

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN



⋮

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH AUDITED

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
3. NERACA
4. LAPORAN OPERASIONAL
5. LAPORAN ARUS KAS
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

⋮

TAHUN 2024



[HTTPS://MERANGINKAB.GO.ID/](https://meranginkab.go.id/)



[instagram.com/bpkad_merangin](https://www.instagram.com/bpkad_merangin)



[facebook.com/bpkad_merangin](https://www.facebook.com/bpkad_merangin)



[youtube.com/@bpkadmerangin](https://www.youtube.com/@bpkadmerangin)

Seloko yang berbunyi "**TALI UNDANG TAMBANG TELITI**" mengandung arti

- Mencerminkan bahwa Kabupaten Merangin merupakan daerah pertemuan yang terbentuk dari dua induk suku yang besar yaitu suku **Batin** dan suku **Penghulu**.
- Mencerminkan persatuan dan kesatuan antara kebiasaan dan adat istiadat yang dipakai oleh induk suku Batin dan induk suku Penghulu yaitu **Undang** yang berasal dari suku Penghulu dan **Teliti** yang berasal dari suku Batin, keduanya dipakai dan merupakan intisari adat istiadat rakyat Kabupaten Merangin yang tak lapuk di hujan tak lekang di panas.
- Mencerminkan bahwa Kabupaten Merangin bidang Pemerintah maupun bidang Kemasyarakatan berdasarkan dengan jiwa musyawarah dan mufakat serta didasarkan ketentuan-ketentuan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.



GEOGRAFIS

Kabupaten Merangin terletak diantara $1^{\circ}10'32''39''$ - $1^{\circ}20'38''35''$ BT dan $1^{\circ}39'23''$ - $2^{\circ}46'9''$ LS. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bungo, timur dengan Kabupaten Sarolangun, selatan dengan Kabupaten Lebong dan barat dengan Kabupaten Kerinci.

Luas wilayah Kabupaten Merangin 7.679 km² atau 767.900 Ha, terbagi atas 24 kecamatan, 205 desa dan 10 kelurahan dengan Kota Bangko sebagai ibukota dan sekaligus sebagai pusat pemerintahan.

TOPOGRAFIS

Kondisi topografis wilayah Kabupaten Merangin secara umum dibagi dalam tiga bagian, yaitu dataran rendah, dataran sedang dan dataran tinggi. Ketinggian berkisar antara 10-1.206 mdpl dengan bentang alam rata-rata bergelombang. Pada dataran rendah terletak pada ketinggian 0-100 mdpl seluas 42.77%. Wilayah dataran sedang yang terletak antara 100-500 mdpl seluas 32.53%, dan dataran tinggi yang terletak lebih dari 500 mdpl seluas 14.5% dari seluruh wilayah.

SEJARAH RINGKAS

Kabupaten Merangin dengan Kota Bangko sebagai ibukotanya terbentuk dari pemekaran wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko (Sarko) menjadi Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun berdasarkan UU No. 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang kemudian diganti dengan UU Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi. Perda No. 4 Tahun 2016 tentang Penetapan Hari Lahirnya Kabupaten Merangin menetapkan Hari Jadi Kabupaten Merangin tanggal 22 Desember 1949, hal ini mengacu pada Keputusan Gubernur Militer Sumatera Selatan tanggal 22 Desember 1949 yang menjadi cikal bakal pengangkatan M. Kamil sebagai Kepala Daerah Kabupaten Merangin di Bangko sejak 1 Januari 1950, serta dikuatkan dengan Keputusan Kementerian Dalam Negeri tanggal 14 Juni 1952. Sejarah Kabupaten Merangin diawali dengan Keputusan Sidang Komite Nasional Indonesia Sumatera di Bukit Tinggi tahun 1946 yang membagi Pulau Sumatera menjadi tiga Sub Provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan, yang selanjutnya ditetapkan dengan UU Nomor 10 tahun 1946, dimana Sub Propinsi ditetapkan menjadi Provinsi. Keresidenan Jambi yang terdiri dari Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Merangin tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah. Dengan UU Darurat No. 19 Tahun 1957 yang selanjutnya diubah dengan UU No. 18 Tahun 1958, dibentuklah Provinsi Daerah Tingkat I Jambi yang terdiri dari Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci, dimana wilayah Kabupaten Merangin meliputi Merangin, Sarolangun dan Bungo Tebo. Sidang DPRD memutuskan bahwa ibukota Kabupaten Merangin berada di Muara Bungo. Adanya Gerakan PRRI tahun 1958, dimana terjadi peristiwa terbakarnya Kantor Bupati Merangin yang kemudian dibangun kembali pada tahun 1965 sebagai persiapan Kantor Bupati Sarko. Setelah berdirinya Kabupaten Sarko melalui UU No 7 Tahun 1965, maka pusat pemerintahan ditempatkan di Kota Bangko.



BUPATI MERANGIN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bangko, 13 Juni 2025

BUPATI MERANGIN,



H. M. SYUKUR, S.H., M.H.

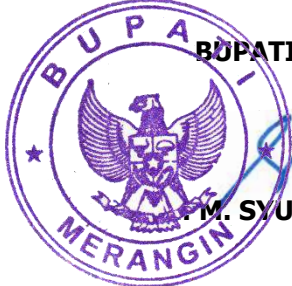
Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, Pemerintah Kabupaten Merangin menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024 (*Audited*) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta perubahannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Bupati Merangin sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.

Pemerintah Kabupaten Merangin selaku entitas pelaporan berkewajiban menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Laporan Finansial yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setelah diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyusunan LKPD Kabupaten Merangin mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah serta perubahannya, Peraturan Bupati Merangin Nomor 100 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Akhir kata, Pemerintah Kabupaten Merangin menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Merangin akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para pengguna, pedoman bagi manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin.

Demikian disampaikan dan diucapkan terima kasih.


BUPATI MERANGIN,

M. SYUKUR, S.H., M.H.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	Hal i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
LAPORAN KEUANGAN	1
1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	1
2. Laporan Perubahan SAL.....	3
3. Neraca Komparatif.....	4
4. Laporan Operasional.....	6
5. Laporan Arus Kas	8
6. Laporan Perubahan Ekuitas.....	10
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	I-1
BAB I PENDAHULUAN	I-1
I.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	I-3
I.2 Kedudukan dan Bentuk Hukum Entitas	I-4
I.3 Kelembagaan Perangkat Daerah	I-6
I.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Kegiatan Operasional .	I-9
I.5 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	I-12
I.6 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).....	I-14
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	II-1
II.1 Ekonomi Makro	II-1
II.2 Kebijakan Keuangan.....	II-13
II.3 Indikator Target Kinerja APBD dan Posisi Keuangan Pemerintah Daerah.....	II-17
II.4 Pemenuhan Belanja <i>Mandatory Spending</i> dan Pemenuhan Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-24
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	III-1
III.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	III-1
III.2 Capaian Kinerja Program dan Keuangan Pemerintah	III-9
III.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja	III-30
III.4 Kewajiban Penganggaran Tahun Berikutnya	III-30
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	IV-1
IV.1 Pengguna dan Kebutuhan Informasi Para Pengguna	IV-1
IV.2 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah dan Entitas Akuntansi.....	IV-2
IV.3 Asumsi Dasar Akuntansi	IV-3
IV.4 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	IV-3
IV.5 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	IV-5
IV.6 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).....	IV-5

BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	V.1-1
V.1	Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	V.1-1
V.2	Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	V.2-1
V.3	Penjelasan Akun-Akun Neraca.....	V.3-1
V.4	Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)	V.4-1
V.5	Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)	V.5-1
V.6	Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	V.6-1
BAB VI	INFORMASI NON KEUANGAN	VI-1
VI.1	Manajemen Pemerintah Daerah	VI-1
VI.2	Kewajiban Kontijensi	VI-4
VI.3	Badan Usaha Milik Daerah PT. Merangin Bima Tama (Perseroda)	VI-4
VI.4	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.....	VI-5
VI.5	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dimanfaatkan Warga Masyarakat sebagai Tempat Usaha	VI-5
BAB VII	PENUTUP.....	VII-1
LAMPIRAN - LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel I.1 Rincian Jumlah Desa/Kelurahan per Kecamatan di Kabupaten Merangin	I-6
Tabel II.1 PDRB, Laju Pertumbuhan dan Indeks Perkembangan Kabupaten Merangin Tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Berlaku (2010=100) dan Atas Dasar Harga Konstan 2010	II-2
Tabel II.2 Distribusi PDRB Kabupaten Merangin Atas Dasar Harga Berlaku (2010=100) Tahun 2020-2024	II-4
Tabel II.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merangin Tahun 2020-2024	II-5
Tabel II.4 PDRB ADHB per Kapita dan PDRB ADHK per Kapita Kabupaten Merangin Tahun 2020-2024 ..	II-6
Tabel II.5 PDRB dan Laju Pertumbuhan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi dan Provinsi Jambi Tahun 2024**	II-8
Tabel II.6 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024	II-9
Tabel II.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-9
Tabel II.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-10
Tabel II.9 Indeks Gini Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024	II-11
Tabel II.10 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Merangin Tahun 2021-2024 Menurut Indikator Penyusunnya	II-11
Tabel II.11 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2021-2024.....	II-12
Tabel II.12 Indikator Kinerja Program Pemerintah Kabupaten Merangin TA 2024	II-19
Tabel III.1 Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin TA 2024	III-3
Tabel III.2 Perkembangan PAD TA 2020-2024	III-4
Tabel III.3 Perkembangan Pendapatan Transfer TA 2020-2024	III-5
Tabel III.4 Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2020-2024.....	III-6
Tabel III.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2024.....	III-8
Tabel III.6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024	III-8
Tabel III.7 Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2024.....	III-9
Tabel III.8 Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Tahun 2024	III-9
Tabel III.9 Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Tahun 2024	III-10
Tabel III.10 Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024	III-11
Tabel III.11 Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024	III-12
Tabel III.12 Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2024	III-12
Tabel III.13 Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Sosial Tahun 2024.....	III-13
Tabel III.14 Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja Tahun 2024	III-14
Tabel III.15 Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024.....	III-14
Tabel III.16 Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pangan Tahun 2024	III-15
Tabel III.17 Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan Tahun 2024.....	III-15
Tabel III.18 Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2024	III-16
Tabel III.19 Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2024.....	III-16
Tabel III.20 Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024.....	III-17



Tabel III.21	Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024	III-17
Tabel III.22	Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan Tahun 2024	III-18
Tabel III.23	Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2024	III-19
Tabel III.24	Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024	III-19
Tabel III.25	Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal Tahun 2024.....	III-20
Tabel III.26	Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024	III-20
Tabel III.27	Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan Tahun 2024	III-21
Tabel III.28	Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan Tahun 2024.....	III-21
Tabel III.29	Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan Tahun 2024.....	III-21
Tabel III.30	Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	III-22
Tabel III.31	Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata Tahun 2024 ..	III-23
Tabel III.32	Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian Tahun 2024 ..	III-23
Tabel III.33	Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perdagangan Tahun 2024	III-24
Tabel III.34	Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perindustrian Tahun 2024	III-24
Tabel III.35	Kinerja Anggaran dan Realisasi Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2024	III-25
Tabel III.36	Kinerja Anggaran dan Realisasi Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Tahun 2024	III-25
Tabel III.37	Kinerja Anggaran dan Realisasi Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Tahun 2024	III-26
Tabel III.38	Kinerja Anggaran dan Realisasi Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Tahun 2024	III-26
Tabel III.39	Kinerja Anggaran dan Realisasi Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Tahun 2024	III-27
Tabel III.40	Kinerja Anggaran dan Realisasi Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024.....	III-28
Tabel III.41	Kinerja Anggaran dan Realisasi Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan Tahun 2024	III-28
Tabel III.42	Kinerja Anggaran dan Realisasi Unsur Kewilayahan Bidang Kecamatan Tahun 2024.....	III-29
Tabel III.43	Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024	III-29
Tabel IV.1	Kualitas, Kriteria dan Besaran Penyisihan Piutang.....	IV-11
Tabel IV.2	Periode dan Persentase Penyisihan Investasi	IV-17
Tabel IV.3	Masa Manfaat Aset Tetap	IV-22
Tabel IV.4	Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap.....	IV-24
Tabel IV.5	Utang Dalam Negeri	IV-32
Tabel V.1-1	Rincian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023 ..	V.1-1
Tabel V.1-2	Realisasi Pendapatan-LRA per Kelompok Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024	V.1-2
Tabel V.1-3	Perbandingan Pendapatan-LRA per Kelompok Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023	V.1-2
Tabel V.1-4	Realisasi PAD-LRA per Jenis Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024.....	V.1-3
Tabel V.1-5	Perbandingan Realisasi PAD-LRA per Jenis Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023	V.1-4
Tabel V.1-6	Realisasi Pajak Daerah-LRA per Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024.....	V.1-5
Tabel V.1-7	Perbandingan Realisasi Pajak Daerah-LRA per Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023	V.1-6
Tabel V.1-8	Realisasi Retribusi Daerah-LRA per Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024.	V.1-8

Tabel V.1-9	Perbandingan Realisasi Retribusi Daerah-LRA per Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023	V.1-11
Tabel V.1-10	Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA per Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024	V.1-12
Tabel V.1-11	Perbandingan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA per Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023	V.1-15
Tabel V.1-12	Realisasi Pendapatan Transfer-LRA per Jenis Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024.....	V.1-16
Tabel V.1-13	Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer-LRA per Jenis Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023	V.1-16
Tabel V.1-14	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA per Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024	V.1-17
Tabel V.1-15	Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA per Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023	V.1-18
Tabel V.1-16	Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan-LRA per Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024	V.1-18
Tabel V.1-17	Perbandingan Realisasi Dana Perimbangan-LRA per Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023	V.1-19
Tabel V.1-18	Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil-LRA per Sub Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024	V.1-19
Tabel V.1-19	Perbandingan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil-LRA per Sub Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023	V.1-20
Tabel V.1-20	Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik-LRA per Sub Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024	V.1-21
Tabel V.1-21	Perbandingan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik-LRA per Sub Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023	V.1-23
Tabel V.1-22	Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LRA per Sub Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024.....	V.1-24
Tabel V.1-23	Perbandingan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LRA per Sub Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023	V.1-25
Tabel V.1-24	Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi-LRA per Sub Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024	V.1-27
Tabel V.1-25	Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi-LRA Alokasi TA 2024.....	V.1-28
Tabel V.1-26	Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi-LRA Alokasi Kurang Bayar TA 2023.....	V.1-28
Tabel V.1-27	Perbandingan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi-LRA per Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023	V.1-29
Tabel V.1-28	Realisasi Belanja per Kelompok Belanja Kabupaten Merangin TA 2024.....	V.1-31
Tabel V.1-29	Perbandingan Realisasi Belanja per Kelompok Belanja Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023.....	V.1-32
Tabel V.1-30	Realisasi Belanja Operasi per Jenis Belanja Kabupaten Merangin TA 2024	V.1-32
Tabel V.1-31	Perbandingan Realisasi Belanja Operasi per Jenis Belanja Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023	V.1-33
Tabel V.1-32	Realisasi Belanja Pegawai per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2024.....	V.1-34
Tabel V.1-33	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023	V.1-34
Tabel V.1-34	Realisasi Belanja Barang dan Jasa per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2024	V.1-35
Tabel V.1-35	Perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023	V.1-37
Tabel V.1-36	Realisasi Belanja Hibah per Objek & Rincian Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2024...	V.1-40
Tabel V.1-37	Perbandingan Realisasi Belanja Hibah per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023.....	V.1-41
Tabel V.1-38	Realisasi Belanja Modal per Jenis Belanja Kabupaten Merangin TA 2024	V.1-42
Tabel V.1-39	Perbandingan Realisasi Belanja Modal per Jenis Belanja Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023.....	V.1-42
Tabel V.1-40	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2024	V.1-44
Tabel V.1-41	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Objek Belanja Kab. Merangin TA 2024 dan TA 2023	V.1-44
Tabel V.1-42	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2024	V.1-45

Tabel V.1-43	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023	V.1-45
Tabel V.1-44	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2024.....	V.1-46
Tabel V.1-45	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023	V.1-46
Tabel V.1-46	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2024	V.1-46
Tabel V.1-47	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023	V.1-47
Tabel V.1-48	Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2024	V.1-47
Tabel V.1-49	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023	V.1-47
Tabel V.1-50	Realisasi Belanja Bagi Hasil Kabupaten Merangin TA 2024.....	V.1-48
Tabel V.1-51	Perbandingan Realisasi Belanja Bagi Hasil Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023	V.1-48
Tabel V.1-52	Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Merangin TA 2024.....	V.1-49
Tabel V.1-53	Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023	V.1-50
Tabel V.1-54	Realisasi Pembiayaan per Jenis Pembiayaan Kabupaten Merangin TA 2024	V.1-50
Tabel V.1-55	Perbandingan Realisasi Pembiayaan per Jenis Pembiayaan Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023	V.1-51
Tabel V.1-56	Realisasi Penerimaan Pembiayaan per Objek Pembiayaan Kabupaten Merangin TA 2024	V.1-51
Tabel V.1-57	Perbandingan Realisasi Penerimaan Pembiayaan per Objek Pembiayaan Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023	V.1-52
Tabel V.1-58	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan per Objek Pembiayaan Kabupaten Merangin TA 2024 ...	V.1-52
Tabel V.1-59	Perbandingan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan per Objek Pembiayaan Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023	V.1-52
Tabel V.1-60	Realisasi Komponen SiLPA Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023	V.1-53
Tabel V.2-1	Rekapitulasi Saldo Awal Kas di BUD per 1 Januari 2024	V.2-1
Tabel V.2-2	Rekapitulasi Saldo Akhir Kas di BUD Per 31 Desember 2024.....	V.2-4
Tabel V.2-3	Rincian Sisa Dana Bantuan Keuangan Kelurahan Bersifat Khusus Per 31 Desember 2024	V.2-5
Tabel V.3-1	Rincian Neraca Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2024 dan 2023.....	V.3-1
Tabel V.3-2	Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2024 dan 2023	V.3-2
Tabel V.3-3	Rincian Kas di Bendahara BOSP Per 31 Desember 2024 dan 2023.....	V.3-5
Tabel V.3-4	Rincian Saldo Kas di Bendahara FKTP Per 31 Desember 2024.....	V.3-6
Tabel V.3-5	Rincian Penyetoran Pendapatan Jasa Giro Rekening Non Kapitasi FKTP Tahun 2024	V.3-6
Tabel V.3-6	Rincian Saldo Kas di Bendahara BOK Per 31 Desember 2024.....	V.3-7
Tabel V.3-7	Rincian Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023	V.3-8
Tabel V.3-8	Rincian Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023	V.3-9
Tabel V.3-9	Rincian Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023.....	V.3-10
Tabel V.3-10	Rincian Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023	V.3-11
Tabel V.3-11	Rincian Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Per 31 Desember 2024 dan 2023	V.3-12
Tabel V.3-12	Rincian Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Per 31 Desember 2024 dan 2023	V.3-13
Tabel V.3-13	Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2024 dan 2023	V.3-14
Tabel V.3-14	Rincian Piutang Transfer Antar Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023	V.3-14
Tabel V.3-15	Rincian Penetapan dan Penyaluran Transfer Antar Daerah Tahun 2024.....	V.3-15
Tabel V.3-16	Rincian Piutang Transfer Antar Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023	V.3-16
Tabel V.3-17	Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023 ..	V.3-17
Tabel V.3-18	Rincian Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2024 dan 2023.....	V.3-18
Tabel V.3-19	Rincian Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2024 dan 2023.....	V.3-19
Tabel V.3-20	Rincian Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2024 dan 2023	V.3-20
Tabel V.3-21	Rincian Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023	V.3-20
Tabel V.3-22	Rincian Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023	V.3-21
Tabel V.3-23	Rincian Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2024 dan 2023	V.3-23
Tabel V.3-24	Rincian Investasi Non Permanen Per 31 Desember 2024 dan 2023.....	V.3-24



Tabel V.3-25	Saldo Penyaluran Dana Bergulir KUPEM per 31 Desember 2023	V.3-24
Tabel V.3-26	Rincian Cadangan atas Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2023	V.3-25
Tabel V.3-27	Rincian Penyertaan Modal Per 31 Desember 2024 dan 2023	V.3-26
Tabel V.3-28	Daftar Penyertaan Modal dan Pembagian Dividen Pemerintah Kabupaten Merangin pada PT. Bank Jambi Periode Tahun 2012 s.d 2024.....	V.3-26
Tabel V.3-29	Struktur Modal PERUMDA Air Minum Tirta Merangin Per 31 Desember 2024 dan 2023.....	V.3-27
Tabel V.3-30	Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023	V.3-29
Tabel V.3-31	Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2024 dan 2023	V.3-29
Tabel V.3-32	Rincian Mutasi Aset Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024 dan 2023	V.3-34
Tabel V.3-33	Rincian Belanja Pegawai yang diakui sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 .	V.3-35
Tabel V.3-34	Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 yang Tidak Dapat Dikapitalisasi Sebagai Aset Tetap	V.3-37
Tabel V.3-35	Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 dan 2023.....	V.3-38
Tabel V.3-36	Rincian Belanja Pegawai yang diakui sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024	V.3-39
Tabel V.3-37	Rincian Mutasi Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2024 dan 2023	V.3-41
Tabel V.3-38	Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023	V.3-43
Tabel V.3-39	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2024 dan 2023.....	V.3-44
Tabel V.3-40	Rincian Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023	V.3-45
Tabel V.3-41	Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2024	V.3-45
Tabel V.3-42	Rincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023	V.3-46
Tabel V.3-43	Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2024 dan 2023	V.3-47
Tabel V.3-44	Rincian Mutasi Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2024 dan 2023	V.3-49
Tabel V.3-45	Rincian Mutasi Program Sapi Bergulir Per 31 Desember 2024.....	V.3-51
Tabel V.3-46	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) Per 31 Desember 2024 dan 2023	V.3-51
Tabel V.3-47	Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023.....	V.3-52
Tabel V.3-48	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2024 dan 2023	V.3-53
Tabel V.3-49	Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023.....	V.3-54
Tabel V.4-1	Rincian Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023	V.4-1
Tabel V.4-2	Penjelasan Perbedaan Nilai Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024.....	V.4-1
Tabel V.4-3	Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2024 dan 2023.....	V.4-2
Tabel V.4-4	Penjelasan Perbedaan Nilai Pendapatan Asli Daerah-LO dan Pendapatan Asli Daerah-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024.....	V.4-2
Tabel V.4-5	Rincian Pajak Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023	V.4-3
Tabel V.4-6	Penjelasan Perbedaan Nilai Pajak Daerah-LO dan Pajak Daerah-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024.....	V.4-3
Tabel V.4-7	Rincian Retribusi Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023	V.4-4
Tabel V.4-8	Penjelasan Perbedaan Nilai Retribusi Daerah-LO dan Retribusi Daerah-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024.....	V.4-5
Tabel V.4-9	Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023 ..	V.4-7
Tabel V.4-10	Penjelasan Perbedaan Nilai Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO dan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024	V.4-7
Tabel V.4-11	Rincian Pendapatan Transfer-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023...	V.4-8
Tabel V.4-12	Penjelasan Perbedaan Nilai Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024	V.4-9
Tabel V.4-13	Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023	V.4-9
Tabel V.4-14	Penjelasan Perbedaan Nilai Pendapatan Transfer Pusat-LO dan Pendapatan Transfer Pusat-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024.....	V.4-9
Tabel V.4-15	Realisasi Dana Perimbangan-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023....	V.4-10
Tabel V.4-16	Penjelasan Perbedaan Nilai Pendapatan Dana Perimbangan-LO dan Pendapatan Dana Perimbangan-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024.....	V.4-10
Tabel V.4-17	Dana Bagi Hasil-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023	V.4-11
Tabel V.4-18	Penjelasan Perbedaan Nilai Pendapatan Dana Bagi Hasil-LO dan Pendapatan Dana Bagi Hasil-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024.....	V.4-11

Tabel V.4-19	Komponen Dana Alokasi Khusus Fisik-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023	V.4-12
Tabel V.4-20	Komponen Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023	V.4-13
Tabel V.4-21	Realisasi Transfer Antar Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023	V.4-14
Tabel V.4-22	Penjelasan Perbedaan Nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO dan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024.....	V.4-14
Tabel V.4-23	Komponen Pendapatan Bagi Hasil-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023	V.4-15
Tabel V.4-24	Penjelasan Perbedaan Nilai Pendapatan Bagi Hasil-LO dan Pendapatan Bagi Hasil-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024	V.4-15
Tabel V.4-25	Penjelasan Perbedaan Nilai Pendapatan Bantuan Keuangan-LO dan Pendapatan Bantuan Keuangan-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2024.....	V.4-15
Tabel V.4-26	Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023	V.4-17
Tabel V.4-27	Penjelasan Perbedaan Nilai Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024	V.4-17
Tabel V.4-28	Komponen Pendapatan Hibah-LO kepada Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2024 dan 2023.....	V.4-18
Tabel V.4-29	Penjelasan Perbedaan Nilai Pendapatan Hibah-LO dan Pendapatan Hibah-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024	V.4-18
Tabel V.4-30	Penjelasan Perbedaan Nilai Beban dan Belanja Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024	V.4-20
Tabel V.4-31	Beban Operasi menurut Klasifikasi Ekonomi Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023	V.4-20
Tabel V.4-32	Penjelasan Perbedaan Nilai Beban Operasi dan Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024	V.4-21
Tabel V.4-33	Beban Pegawai menurut Jenis Pada Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023	V.4-22
Tabel V.4-34	Penjelasan Perbedaan Nilai Beban Pegawai dan Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024	V.4-22
Tabel V.4-35	Beban Barang menurut Jenis pada Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023	V.4-23
Tabel V.4-36	Penjelasan Perbedaan Nilai Beban Barang dan Belanja Barang Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024	V.4-24
Tabel V.4-37	Komponen Beban Jasa menurut Jenis pada Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023	V.4-26
Tabel V.4-38	Penjelasan Perbedaan Nilai Beban Jasa dan Belanja Jasa Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024	V.4-26
Tabel V.4-39	Beban Pemeliharaan menurut Jenis pada Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023	V.4-28
Tabel V.4-40	Penjelasan Perbedaan Nilai Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024	V.4-28
Tabel V.4-41	Penjelasan Perbedaan Nilai Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024	V.4-29
Tabel V.4-42	Penjelasan Perbedaan Nilai Beban Hibah dan Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024	V.4-30
Tabel V.4-43	Komponen Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023	V.4-31
Tabel V.4-44	Komponen Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023	V.4-32
Tabel V.4-45	Komponen Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023	V.4-32
Tabel V.4-46	Surplus/Defisit dari Operasi Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023	V.4-33
Tabel V.4-47	Surplus/Defisit Non Operasional Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023....	V.4-33
Tabel V.5-1	Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023.....	V.5-1
Tabel V.5-2	Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023.....	V.5-2

Tabel V.5-3	Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023.....	V.5-3
Tabel V.5-4	Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023.....	V.5-4
Tabel V.5-5	Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023.....	V.5-5
Tabel V.5-6	Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023.....	V.5-7
Tabel V.5-7	Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023.....	V.5-7
Tabel V.5-8	Mutasi Kas Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023	V.5-9
Tabel V.5-9	Komponen Saldo Akhir Kas Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023	V.5-9
Tabel V.6-1	Rincian Mutasi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024.....	V.6-1
Tabel VI.1	Rincian Jumlah Kursi Partai Politik pada DPRD Kabupaten Merangin Periode 2024-2029	VI-2
Tabel VI.2	Rincian Pimpinan/Wakil Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Merangin Periode 2024 – 2029	VI-2

	Hal
Grafik II.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Merangin Tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Berlaku (2010=100) dan Atas Dasar Harga Konstan 2010	II-3
Grafik II.2. Struktur Ekonomi Kabupaten Merangin Tahun 2024**	II-4
Grafik II.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024.	II-6
Grafik II.4. Struktur Perekonomian Kabupaten Merangin menurut Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Tahun 2020-2024.....	II-7
Grafik II.5. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi dan Provinsi Jambi Tahun 2024**	II-8
Grafik III.1. Perkembangan PAD TA 2020-2024	III-3
Grafik III.2. Perkembangan Pendapatan Transfer TA 2020-2024	III-4
Grafik III.3. Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2020-2024.....	III-5
Grafik III.4. Distribusi Belanja Daerah pada APBD Kabupaten Merangin TA 2024	III-7
Grafik V.1 Kontribusi masing-masing sektor Pendapatan-LRA Kabupaten Merangin TA 2024	V-3
Grafik V.2 Kontribusi masing-masing sektor PAD-LRA Kabupaten Merangin TA 2024	V-4
Grafik V.3 Kontribusi masing-masing sektor Pendapatan Transfer-LRA Kabupaten Merangin TA 2024	V-17
Grafik V.4 Distribusi Belanja Kabupaten Merangin TA 2024	V-29
Grafik V.5 Distribusi Belanja Operasi Kabupaten Merangin TA 2024.....	V-30
Grafik V.6 Distribusi Belanja Modal Kabupaten Merangin TA 2024	V-40

- Lampiran 1a : Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kabupaten Merangin Tahun 2024
- Lampiran 1b : Alur Perubahan APBD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 1c : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan (*Mandatory Spending*) Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 1d : Rekapitulasi Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 2 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 3 : Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai SKPD Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 4 : Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa SKPD Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 5 : Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah SKPD Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 6 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal SKPD Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 7 : Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 8 : Rincian Deposito dan Bunga Deposito pada Bank Persepsi Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 9a : Rekapitulasi Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri se-Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 9b : Rekapitulasi Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri se-Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 9c : Rekapitulasi Mutasi Pajak Dana BOS SD/SMP Negeri se-Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 9d : Rekapitulasi Realisasi Dana BOP PAUD dan Kesenjangan Negeri se-Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 9e : Rekapitulasi Mutasi Pajak Dana BOP PAUD dan Kesenjangan Negeri se-Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 10a : Rekapitulasi Pendapatan dan Belanja yang Bersumber dari Dana Kapitasi JKN pada FKTP Lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 10b : Rekapitulasi Pendapatan dan Belanja yang Bersumber dari Dana BOK pada FKTP Lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 11 : Rekapitulasi Saldo Kas Lainnya di Bendahara Dana BOS pada SD Negeri Penerima Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 12 : Rekapitulasi Bantuan Keuangan Partai Politik oleh Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 13a : Rekapitulasi Penyaluran Transfer ke Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 13b : Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD Desa Tahun Anggaran 2024
- Lampiran 14a : Rincian Piutang Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2024
- Lampiran 14b : Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2024
- Lampiran 14c : Rincian Piutang Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2024 Menurut Kualitas Piutang
- Lampiran 15 : Rincian Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2024
- Lampiran 16a : Rincian Persediaan SKPD Per 31 Desember 2024
- Lampiran 16b : Rincian Obat Kadalua Per 31 Desember 2024
- Lampiran 17 : Investasi Permanen Pemerintah Daerah pada BUMD PT. Bank Jambi dan Perumda Air Minum Tirta Merangin per 31 Desember 2024
- Lampiran 18 : Rekapitulasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2024
- Lampiran 19 : Rekapitulasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2024 menurut Jenis Barang
- Lampiran 20 : Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2024
- Lampiran 21 : Rekapitulasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2024 yang Telah Habis Masa Manfaatnya dan Telah Disusutkan

- Lampiran 22 : Rekapitulasi Mutasi dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2024
- Lampiran 23 : Rincian Mutasi Aset Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2024
- Lampiran 24 : Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dalam Kondisi Rusak Berat Per 31 Desember 2024
- Lampiran 25 : Rekapitulasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Milik Pemerintah Kabupaten Merangin yang belum Tercatat Per 31 Desember 2024
- Lampiran 26a : Rekapitulasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Merangin yang dipergunakan Instansi Vertikal Per 31 Desember 2024
- Lampiran 26b : Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Bukan Merupakan Aset yang Dimiliki dan dikuasai Pemerintah Kabupaten Merangin
- Lampiran 27 : Rekapitulasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dalam proses serah terima dengan Pemerintah Kabupaten Merangin
- Lampiran 28 : Rekapitulasi Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2024
- Lampiran 29 : Rekapitulasi Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2024
- Lampiran 30 : Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2024

ADD	: Alokasi Dana Desa
ADHB	: Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK	: Atas Dasar Harga Konstan
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	: Aparat Pengawas Internal Pemerintah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
ATK	: Alat Tulis Kantor
B	: Baik
B3	: Bahan Berbahaya dan Beracun
Bansos	: Bantuan Sosial
BAPERTARUM	: Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
BAST	: Berita Acara Serah Terima
BBN-KB	: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BHP	: Bahan Habis Pakai
BKS	: Bangun, Kelola, Serah
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BMD	: Barang Milik Daerah
BOK	: Bantuan Operasional Kesehatan
BOP	: Bantuan Operasional Pendidikan
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BOT	: <i>Build, Operate and Transfer</i>
BPHTB	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
BSK	: Bangun, Serah, Kelola
BTO	: <i>Build, Transfer and Operate</i>
BUD	: Bendahara Umum Daerah
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CaLK	: Catatan atas Laporan Keuangan
COVID-19	: <i>Corona Virus Disease</i> 2019
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DBH	: Dana Bagi Hasil
DED	: <i>Detail Engineering Design</i>
DPA-SKPD	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTU	: Dana Transfer Umum
FIFO	: <i>First In First Out</i>
FKTP	: Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
FR	: <i>Fix Rate</i>
Ha	: Hektare
HLS	: Harapan Lama Sekolah
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
IPKI	: Izin Perluasan Kawasan Industri
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
IPUI	: Izin Perluasan Usaha Industri
IUI	: Izin Usaha Industri
IUKI	: Izin Usaha Kawasan Industri
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
KAT	: Komunitas Adat Terpencil
KB	: Keluarga Berencana
KDH	: Kepala Daerah
KDP	: Konstruksi Dalam Pengerjaan
KIE	: Komunikasi, Informasi dan Edukasi
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
KPKNL	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

KSP	: Kerja Sama Pemanfaatan
KUPA	: Kebijakan Umum Perubahan APBD
KUPEM	: Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
LAK	: Laporan Arus Kas
LAKIP	: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LO	: Laporan Operasional
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas
LPE	: Laju Pertumbuhan Ekonomi
LPSAL	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
LS	: Langsung
MHA	: Masyarakat Hukum Adat
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PA	: Pengguna Anggaran
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PBB-KB	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PBB-P2	: Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
PBJT	: Pajak Barang dan Jasa Tertentu
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
Perda	: Peraturan Daerah
Pergub	: Peraturan Gubernur
Permen PUPR	: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Permendikbud	: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Permenkes	: Peraturan Menteri Kesehatan
Permensos	: Peraturan Menteri Sosial
PFK	: Perhitungan Pihak Ketiga
PHA	: Pengarusutamaan Hak Anak
P-IRT	: Pangan Industri Rumah Tangga
PJU	: Penerangan Jalan Umum
PKB	: Penyuluh Keluarga Berencana
PKBM	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PLKB	: Petugas Lapangan Keluarga Berencana
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PP	: Peraturan Pemerintah
PP	: Peraturan Pemerintah
PPh	: Pajak Penghasilan
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PPKD	: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PPK-SKPD	: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
PPLH	: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PPTK	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PSBDT	: Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih
PSDH	: Provisi Sumber Daya Hutan
PUG	: Pengarusutamaan Gender
Q-to-Q	: <i>Quarter to Quarter</i>
RB	: Rusak Berat
RDI	: Rekening Dana Investasi
Renja	: Rencana Kerja
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKUD	: Rekening Kas Umum Daerah
RKUD	: Rekening Kas Umum Daerah
RKUN	: Rekening Kas Umum Negara
RLS	: Rata-rata Lama Sekolah
RPD	: Rencana Pembangunan Daerah

RPD	: Rekening Pinjaman Daerah
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RR	: Rusak Ringan
RRTR	: Rencana Rinci Tata Ruang
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SAL	: Saldo Anggaran Lebih
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SBI	: Sertifikat Bank Indonesia
SD	: Sekolah Dasar
SDA	: Sumber Daya Alam
SDA	: Sumber Daya Malaysia
SDG	: Sumber Daya Genetik
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIDUGA	: Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga
SIKPA	: Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SILPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIMBADA	: Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah
SIPD	: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
SK	: Surat Keputusan
SKB	: Sanggar Kegiatan Belajar
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPD	: Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKPKD	: Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
SKRD	: Surat Ketetapan Retribusi Daerah
SKTJM	: Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SPAM	: Sistem Penyediaan Air Minum
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SPN	: Sertifikat Perbendaharaan Negara
SUN	: Surat Utang Negara
TA	: Tahun Anggaran
TASPEN	: Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
TP/TGR	: Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
UHH	: Umur Harapan Hidup
UKBM	: Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
UKM	: Upaya Kesehatan Masyarakat
UKP	: Upaya Kesehatan Perseorangan
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UMOT	: Usaha Mikro Obat Tradisional
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah
UU	: Undang-Undang
UYHD	: Uang Yang Harus Disetor
VR	: <i>Variable Rate</i>
WP	: Wajib Pajak
WR	: Wajib Retribusi
WS	: Wilayah Sungai
Y-on-Y	: <i>Year On Year</i>



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN-LRA	V.1.1	1.493.816.042.655,00	1.459.275.923.665,51	97,69	1.401.344.105.918,79
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA	V.1.1.1	100.605.992.393,00	94.830.759.645,51	94,26	107.976.482.974,79
Pajak Daerah-LRA	V.1.1.1.a	31.183.000.000,00	32.240.409.337,40	103,39	30.753.014.946,82
Retribusi Daerah-LRA	V.1.1.1.b	34.261.951.015,00	23.555.443.977,67	68,75	5.256.138.946,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	V.1.1.1.c	7.488.236.682,00	7.488.236.682,97	100,00	7.268.658.153,62
Lain-Lain PAD yang Sah-LRA	V.1.1.1.d	27.672.804.696,00	31.546.669.647,47	114,00	64.698.670.928,35
PENDAPATAN TRANSFER-LRA	V.1.1.2	1.377.004.677.610,00	1.352.003.997.917,00	98,18	1.290.285.622.944,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA	V.1.1.2.a	1.275.666.531.939,00	1.280.081.569.300,00	100,35	1.185.973.856.788,00
Dana Bagi Hasil (DBH)-LRA	V.1.1.2.a.1	1.087.904.906.939,00	1.092.319.944.300,00	100,41	999.933.969.788,00
Dana Bagi Hasil (DBH)-LRA	V.1.1.2.a.1.1	108.840.028.000,00	108.840.848.250,00	100,00	77.121.837.796,00
Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA	V.1.1.2.a.1.2	729.206.208.000,00	732.006.415.432,00	100,38	686.823.402.178,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA	V.1.1.2.a.1.3	88.275.705.000,00	86.635.359.106,00	98,14	71.494.372.292,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA	V.1.1.2.a.1.4	161.582.965.939,00	164.837.321.512,00	102,01	164.494.357.522,00
Dana Desa-LRA	V.1.1.2.a.2	174.932.338.000,00	174.932.338.000,00	100,00	175.219.610.000,00
Dana Desa-LRA	V.1.1.2.a.2	174.932.338.000,00	174.932.338.000,00	100,00	175.219.610.000,00
Insentif Fiskal-LRA	V.1.1.2.a.3	12.829.287.000,00	12.829.287.000,00	100,00	10.820.277.000,00
Insentif Fiskal-LRA	V.1.1.2.a.3	12.829.287.000,00	12.829.287.000,00	100,00	10.820.277.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA	V.1.1.2.b	101.338.145.671,00	71.922.428.617,00	70,97	104.311.766.156,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi-Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya-LRA	V.1.1.2.b.1	78.638.145.671,00	64.272.428.617,00	81,73	81.611.766.156,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi-Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya-LRA	V.1.1.2.b.2	22.700.000.000,00	7.650.000.000,00	33,70	22.700.000.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA	V.1.1.3	16.205.372.652,00	12.441.166.103,00	76,77	3.082.000.000,00
Pendapatan Hibah-LRA		0,00	0,00	-	3.082.000.000,00
Hibah dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00	-	3.000.000.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis		0,00	0,00	-	82.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LRA		16.205.372.652,00	12.441.166.103,00	76,77	0,00
BELANJA	V.1.2	1.571.006.958.075,00	1.454.773.168.270,96	92,60	1.338.008.661.903,93
BELANJA OPERASI	V.1.2.1	1.092.148.331.608,00	996.592.669.538,96	91,25	888.240.891.846,63
Belanja Pegawai	V.1.2.1.a	645.496.758.754,00	591.839.454.626,00	91,69	502.287.898.830,00
Belanja Barang dan Jasa	V.1.2.1.b	376.339.904.616,00	336.876.303.542,96	89,51	320.864.442.422,63
Belanja Bunga	V.1.2.1.c	0,00	0,00	-	1.714.899.127,00
Belanja Hibah	V.1.2.1.d	70.311.668.238,00	67.876.911.370,00	96,54	63.373.651.467,00
BELANJA MODAL	V.1.2.2	197.657.072.664,00	193.627.335.532,00	97,96	176.724.837.147,30
Belanja Modal Tanah	V.1.2.2.a	8.500.000,00	0,00	0,00	34.410.489,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	V.1.2.2.b	45.616.430.243,00	43.409.708.584,00	95,16	30.982.388.967,30
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	V.1.2.2.c	63.886.290.570,00	62.655.071.883,00	98,07	79.711.057.271,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	V.1.2.2.d	83.845.423.776,00	83.315.634.140,00	99,37	61.398.124.429,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	V.1.2.2.e	3.865.428.075,00	3.837.445.925,00	99,28	4.459.950.991,00
Belanja Modal Aset Lainnya	V.1.2.2.f	435.000.000,00	409.475.000,00	94,13	138.905.000,00
BELANJA TAK TERDUGA	V.1.2.3	2.351.193.453,00	52.802.850,00	2,25	5.511.000,00
Belanja Tak Terduga		2.351.193.453,00	52.802.850,00	2,25	5.511.000,00
BELANJA TRANSFER	V.1.2.4	278.850.360.350,00	264.500.360.350,00	94,85	273.037.421.910,00
Belanja Bagi Hasil	V.1.2.4.a	3.911.348.550,00	3.911.348.550,00	100,00	3.443.388.110,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah		3.118.300.000,00	3.118.300.000,00	100,00	2.911.090.000,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah		793.048.550,00	793.048.550,00	100,00	532.298.110,00
Belanja Bantuan Keuangan	V.1.2.4.b	274.939.011.800,00	260.589.011.800,00	94,78	269.594.033.800,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa		274.939.011.800,00	260.589.011.800,00	94,78	269.594.033.800,00
JUMLAH BELANJA		1.571.006.958.075,00	1.454.773.168.270,96	92,60	1.338.008.661.903,93
SURPLUS / (DEFISIT)		(77.190.915.420,00)	4.502.755.394,55	105,83	63.335.444.014,86

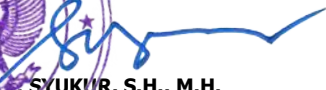
7

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	2	3	4	5	6
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	V.1.3.1	79.190.915.420,00	79.190.915.420,30	100,00	82.250.272.316,44
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		79.190.915.420,00	79.190.915.420,30	100,00	82.648.453.046,61
Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya		0,00	0,00	-	(398.180.730,17)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	V.1.3.2	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	66.394.800.911,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	5.500.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0,00	0,00	-	60.894.800.911,00
PEMBIAYAAN NETTO	V.1.3	77.190.915.420,00	77.190.915.420,30	100,00	15.855.471.405,44
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	V.1.4	0,00	81.693.670.814,85	-	79.190.915.420,30

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok



BUPATI MERANGIN



H. SYUKUR, S.H., M.H.

7



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

No	URAIAN	CATATAN	TA 2024	TA 2023
1	2	3	4	5
1	SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	V.2.1	79.190.915.420,30	82.648.453.046,61
2	PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	V.2.2	79.190.915.420,30	82.250.272.316,44
3	SUB TOTAL (1-2)		0,00	398.180.730,17
4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	V.2.3	81.693.670.814,85	79.190.915.420,30
5	SUB TOTAL (3+4)		81.693.670.814,85	79.589.096.150,47
6	KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	V.2.4	0,00	(398.180.730,17)
7.	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR TAHUN (5+6)	V.2.5	81.693.670.814,85	79.190.915.420,30

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok



BUPATI MERANGIN

H. M. SYUKUR, S.H., M.H.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024	TA 2023
1		3	4
ASET	V.3.1		
ASET LANCAR	V.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	V.3.1.1.a	76.377.716.309,34	73.428.018.745,81
Kas di Bendahara Penerimaan	V.3.1.1.b	0,00	14.913.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	V.3.1.1.c	0,00	0,00
Kas di Bendahara BLUD	V.3.1.1.d	64.373.633,58	320.458.638,98
Kas di Bendahara BOSP	V.3.1.1.e	309.264.500,00	175.748.289,00
Kas di Bendahara FKTP	V.3.1.1.f	100.772.939,93	314.876.243,51
Kas di Bendahara BOK	V.3.1.1.g	4.841.543.432,00	4.936.900.503,00
Kas Lainnya	V.3.1.1.h	139.881.736,75	341.640,00
Piutang Pajak Daerah	V.3.1.1.i	29.464.838.433,78	26.503.803.313,18
Piutang Retribusi Daerah	V.3.1.1.j	12.518.491.490,00	4.660.466.535,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.3.1.1.k	8.057.977.542,88	0,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	V.3.1.1.l	17.081.584,00	3.855.419.753,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	V.3.1.1.m	57.524.339.000,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	V.3.1.1.n	36.024.269.071,00	26.890.382.032,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	V.3.1.1.o	26.946.345,00	34.569.000,00
Penyisihan Piutang	V.3.1.1.p	(23.019.277.718,03)	(20.197.651.380,85)
Beban Dibayar Dimuka	V.3.1.1.q	176.667.199,13	209.540.746,75
Persediaan	V.3.1.1.r	9.311.160.053,02	9.517.986.488,00
JUMLAH ASET LANCAR		211.936.045.552,38	130.665.773.547,38
INVESTASI JANGKA PANJANG	V.3.1.2		
Investasi Non Permanen	V.3.1.2.a	0,00	139.588.041,75
Investasi Permanen	V.3.1.2.b	66.174.727.599,93	65.842.883.784,10
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		66.174.727.599,93	65.982.471.825,85
ASET TETAP	V.3.1.3		
Tanah	V.3.1.3.a	79.782.393.666,80	166.917.774.692,00
Peralatan dan Mesin	V.3.1.3.b	657.856.868.750,23	623.775.520.818,93
Gedung dan Bangunan	V.3.1.3.c	1.135.345.606.228,58	1.073.668.954.507,08
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	V.3.1.3.d	2.550.731.027.153,88	2.456.940.782.222,88
Aset Tetap Lainnya	V.3.1.3.e	84.813.629.548,00	80.969.380.348,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	V.3.1.3.f	16.527.791.282,00	130.620.000,00
Akumulasi Penyusutan	V.3.1.3.g	(2.359.766.955.185,12)	(2.179.220.923.852,25)
<i>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin</i>		<i>(560.337.654.584,11)</i>	<i>(522.789.936.073,22)</i>
<i>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan</i>		<i>(275.962.031.884,00)</i>	<i>(252.774.415.660,29)</i>
<i>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan</i>		<i>(1.521.100.471.828,35)</i>	<i>(1.401.451.015.627,32)</i>
<i>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya</i>		<i>(2.366.796.888,66)</i>	<i>(2.205.556.491,42)</i>
JUMLAH ASET TETAP		2.165.290.361.444,37	2.223.182.108.736,64
PROPERTI INVESTASI	V.3.1.4		
Properti Investasi		818.735.791,00	16.706.877.174,15
<i>Properti Investasi Tanah</i>		<i>580.386.091,00</i>	<i>1.481.273.941,00</i>
<i>Properti Investasi Gedung dan Bangunan</i>		<i>384.435.000,00</i>	<i>17.880.413.737,00</i>
<i>Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan</i>		<i>(146.085.300,00)</i>	<i>(2.654.810.503,85)</i>
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		818.735.791,00	16.706.877.174,15
ASET LAINNYA	V.3.1.5		
Aset Tidak Berwujud	V.3.1.5.a	583.737.960,00	4.400.345.172,40
<i>Aset Tidak Berwujud</i>		<i>4.227.447.915,00</i>	<i>8.548.973.427,00</i>
<i>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</i>		<i>(3.643.709.955,00)</i>	<i>(4.148.628.254,60)</i>
Aset Lain-Lain	V.3.1.5.b	100.892.474.676,90	47.892.497.401,54
<i>Aset Lain-Lain</i>		<i>102.400.048.588,26</i>	<i>50.656.082.645,16</i>
<i>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain</i>		<i>(1.507.573.911,36)</i>	<i>(2.763.585.243,62)</i>
Dana Tranfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	V.3.1.5.c	5.564.440.000,00	31.152.575.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA		107.040.652.636,90	83.445.417.573,94
JUMLAH ASET		2.551.260.523.024,58	2.519.982.648.857,96

7

URAIAN	CATATAN	TA 2024	TA 2023
1		3	4
KEWAJIBAN	V.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	V.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	V.3.2.1.a	293.695,00	341.640,00
Pendapatan Diterima Dimuka	V.3.2.1.b	213.480.860,42	197.226.198,22
Utang Belanja	V.3.2.1.c	35.759.870.315,00	17.110.872.929,60
Utang Jangka Pendek Lainnya	V.3.2.1.d	1.565.155.984,00	1.557.055.984,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		37.538.800.854,42	18.865.496.751,82
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	V.3.2.2		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		37.538.800.854,42	18.865.496.751,82
EKUITAS	V.3.3		
Ekuitas		2.513.721.722.170,16	2.501.117.152.106,14
JUMLAH EKUITAS		2.513.721.722.170,16	2.501.117.152.106,14
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.551.260.523.024,58	2.519.982.648.857,96

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok



BUPATI MERANGIN



M. SYUKUR, S.H., M.H.

7



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024	TA 2023
1	2	3	4
PENDAPATAN-LO	V.4.1	1.406.480.718.847,41	1.253.862.942.820,18
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	V.4.1.1	109.493.758.353,45	109.198.542.179,18
Pajak Daerah-LO	V.4.1.1.a	35.231.508.288,04	33.494.141.802,38
Retribusi Daerah-LO	V.4.1.1.b	52.005.294.850,22	5.517.219.994,13
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	V.4.1.1.c	15.546.214.225,85	7.268.658.153,62
Lain-Lain PAD yang SAH-LO	V.4.1.1.d	6.710.740.989,34	62.918.522.229,05
PENDAPATAN TRANSFER-LO	V.4.1.2	1.218.682.565.679,00	1.139.314.215.448,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	V.4.1.2.a	1.137.077.335.300,00	1.035.002.449.292,00
<i>Dana Perimbangan-LO</i>	<i>V.4.1.2.a.1</i>	<i>1.124.248.048.300,00</i>	<i>1.024.182.172.292,00</i>
<i>Insentif Fiskal-LO</i>	<i>V.4.1.2.a.2</i>	<i>12.829.287.000,00</i>	<i>10.820.277.000,00</i>
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	V.4.1.2.b	81.605.230.379,00	104.311.766.156,00
<i>Pendapatan Bagi Hasil-LO</i>	<i>V.4.1.2.b.1</i>	<i>79.405.230.379,00</i>	<i>81.611.766.156,00</i>
<i>Bantuan Keuangan-LO</i>	<i>V.4.1.2.b.2</i>	<i>2.200.000.000,00</i>	<i>22.700.000.000,00</i>
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	V.4.1.3	78.304.394.814,96	5.350.185.193,00
Pendapatan Hibah-LO	V.4.1.3.a	65.863.228.711,96	5.268.185.193,00
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	V.4.1.3.b	12.441.166.103,00	0,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	V.4.1.3.c	0,00	82.000.000,00
BEBAN	V.4.2	1.290.693.984.204,94	1.195.609.794.247,30
BEBAN OPERASI	V.4.2.1	1.207.275.961.854,94	1.097.791.982.337,30
Beban Pegawai	V.4.2.1.a	596.200.078.309,00	504.822.682.229,00
Beban Barang	V.4.2.1.b	98.146.113.978,14	79.016.750.590,40
Beban Jasa	V.4.2.1.c	171.595.914.088,98	164.424.070.288,08
Beban Pemeliharaan	V.4.2.1.d	12.819.542.746,00	9.409.464.152,01
Beban Perjalanan Dinas	V.4.2.1.e	71.402.409.322,00	62.566.418.856,00
Beban Hibah	V.4.2.1.f	67.910.443.090,50	83.841.645.218,97
Beban Penyisihan Piutang	V.4.2.1.g	3.032.774.621,07	2.599.111.782,29
Beban Lain-Lain	V.4.2.1.h	0,00	2.570.870.456,47
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	V.4.2.1.i	44.322.106.781,89	45.561.176.826,20
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	V.4.2.1.i	21.600.216.411,40	20.635.028.058,14
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	V.4.2.1.i	119.692.135.061,03	120.751.698.740,63
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	V.4.2.1.i	161.240.397,24	134.750.263,72
Beban Penyusutan Aset Properti Investasi	V.4.2.1.i	7.688.728,00	333.552.721,24
Beban Penyusutan Aset Lainnya	V.4.2.1.i	200.222.999,69	190.030.161,76
Beban Amortisasi Aset Tidak berwujud	V.4.2.1.i	185.075.320,00	934.731.992,40
BEBAN TRANSFER	V.4.2.2	83.418.022.350,00	97.817.811.910,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa		3.118.300.000,00	2.911.090.000,00
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa		793.048.550,00	532.298.110,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa		79.506.673.800,00	94.374.423.800,00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL	V.4.3	115.786.734.642,47	58.253.148.572,88
SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL	V.4.4		
SURPLUS NON OPERASIONAL		307.802.250,00	445.526.000,00
Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO		307.802.250,00	445.526.000,00
DEFISIT NON OPERASIONAL		(1.777.404.251,07)	(1.033.614.420,00)
Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO		(109.245.566,90)	(265.917.520,00)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		(1.668.158.684,17)	(767.696.900,00)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL		(1.469.602.001,07)	(588.088.420,00)

7

URAIAN	CATATAN	TA 2024	TA 2023
1	2	3	4
POS LUAR BIASA	V.4.5		
Pendapatan Luar Biasa-LO	V.4.5.1	0,00	0,00
Beban Tak Terduga	V.4.5.2	52.802.850,00	5.511.000,00
POS LUAR BIASA		(52.802.850,00)	(5.511.000,00)
SURPLUS / (DEFISIT)-LO	V.4.6	114.264.329.791,40	57.659.549.152,88

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok



BUPATI MERANGIN

H. M. SYUKUR, S.H., M.H.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	V.5.1		
ARUS MASUK KAS	V.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		32.240.409.337,40	30.753.014.946,82
Penerimaan Retribusi Daerah		23.517.013.977,67	5.256.138.946,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		7.488.236.682,97	7.268.658.153,62
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		31.233.277.147,47	64.016.441.728,35
Penerimaan Dana Bagi Hasil		108.840.848.250,00	77.121.837.796,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		732.006.415.432,00	686.823.402.178,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		251.464.580.618,00	235.988.729.814,00
Penerimaan Dana Desa		174.932.338.000,00	175.219.610.000,00
Penerimaan Insentif Fiskal		12.829.287.000,00	10.820.277.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		64.272.428.617,00	81.611.766.156,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		7.650.000.000,00	22.700.000.000,00
Penerimaan Hibah		0,00	3.082.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		12.441.166.103,00	0,00
JUMLAH ARUS MASUK KAS		1.458.916.001.165,51	1.400.661.876.718,79
ARUS KELUAR KAS	V.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		591.839.454.626,00	502.287.898.830,00
Pembayaran Barang dan Jasa		336.876.303.542,96	320.864.442.422,63
Pembayaran Bunga		0,00	1.714.899.127,00
Pembayaran Hibah		67.876.911.370,00	63.373.651.467,00
Pembayaran Tak Terduga		52.802.850,00	5.511.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		3.118.300.000,00	2.911.090.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		793.048.550,00	532.298.110,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		260.589.011.800,00	269.594.033.800,00
JUMLAH ARUS KELUAR KAS		1.261.145.832.738,96	1.161.283.824.756,63
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		197.770.168.426,55	239.378.051.962,16
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	V.5.2		
ARUS MASUK KAS	V.5.2.1		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		313.392.500,00	592.370.000,00
Penjualan atas Aset Lainnya		38.430.000,00	89.859.200,00
JUMLAH ARUS MASUK KAS		351.822.500,00	682.229.200,00
ARUS KELUAR KAS	V.5.2.2		
Perolehan Tanah		0,00	34.410.489,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		43.409.708.584,00	30.982.388.967,30
Perolehan Gedung dan Bangunan		62.655.071.883,00	79.711.057.271,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		83.315.634.140,00	61.398.124.429,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.837.445.925,00	4.459.950.991,00
Perolehan Aset Lainnya		409.475.000,00	138.905.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		2.000.000.000,00	5.500.000.000,00
JUMLAH ARUS KELUAR KAS		195.627.335.532,00	182.224.837.147,30
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI		(195.275.513.032,00)	(181.542.607.947,30)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	V.5.3		
ARUS MASUK KAS	V.5.3.1		
Pinjaman		0,00	0,00
JUMLAH ARUS MASUK KAS		0,00	0,00
ARUS KELUAR KAS	V.5.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman		0,00	60.894.800.911,00
JUMLAH ARUS KELUAR KAS		0,00	60.894.800.911,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN		0,00	(60.894.800.911,00)

7

URAIAN	CATATAN	2024	2023
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	V.5.4		
ARUS MASUK KAS	V.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		110.317.171.616,59	82.456.739.895,70
Transfer dari SKPD		8.100.000,00	0,00
JUMLAH ARUS MASUK KAS		110.325.271.616,59	82.456.739.895,70
ARUS KELUAR KAS	V.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		110.317.219.561,59	82.456.398.255,70
Transfer ke SKPD		0,00	0,00
JUMLAH ARUS KELUAR KAS		110.317.219.561,59	82.456.398.255,70
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		8.052.055,00	341.640,00
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS SELAMA PERIODE	V.5.5	2.502.707.449,55	(3.059.015.256,14)
SALDO AWAL KAS	V.5.6	79.191.257.060,30	82.648.453.046,61
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	V.5.7	0,00	(398.180.730,17)
SALDO AKHIR KAS	V.5.8	81.693.964.509,85	79.191.257.060,30
1. SALDO AKHIR KAS DI BUD		76.377.716.309,34	73.428.018.745,81
2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		0,00	14.913.000,00
3. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		0,00	0,00
4. KAS DI BLUD		64.373.633,58	320.458.638,98
5. KAS DI BENDAHARA BOSP		309.264.500,00	175.748.289,00
6. KAS DI BENDAHARA FKTP		100.772.939,93	314.876.243,51
7. KAS DI BENDAHARA BOK		4.841.543.432,00	4.936.900.503,00
8. KAS LAINNYA		293.695,00	341.640,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok



BUPATI MERANGIN

H. M. SYUKUR, S.H., M.H.

7



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024	TA 2023
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	V.6.1	2.501.117.152.106,14	2.410.767.789.915,71
SURPLUS / (DEFISIT)-LO	V.6.2	114.264.329.791,40	57.659.549.152,88
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	V.6.3	(101.659.759.727,38)	32.689.813.037,55
Koreksi Nilai Persediaan		654.047.943,50	1.603.620.552,00
Koreksi Ekuitas Lainnya		(102.313.807.670,88)	31.086.192.485,55
EKUITAS AKHIR	V.6.4	2.513.721.722.170,16	2.501.117.152.106,14

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok



BUPATI MERANGIN

H. M. SYUKUR, S.H., M.H.

7



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024

B A B

I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memiliki makna dan urgensi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. LKPD secara substansial merupakan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi sosial ekonomi wilayah sebagai salah satu indikator untuk kemajuan dan perkembangan suatu daerah. Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan yang digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Peningkatan kuantitas dan kompleksitas transaksi pemerintah seiring dengan dinamika perubahan regulasi pengelolaan keuangan berdampak pada peningkatan atensi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang sejalan pula dengan tuntutan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Merangin berkomitmen untuk terus dan selalu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui pemenuhan prinsip-prinsip penyajian pelaporan dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi akuntansi berbasis akrual diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan dan seluruh pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin melalui kinerja entitas yang lebih terukur yang bermuara pada efisiensi dan efektivitas serta mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government*, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yaitu kemakmuran bagi masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan keuangan diperlukan dalam rangka membangun *trust* publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka penerapan basis akrual di tahun 2024, serangkaian upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Merangin sebagai bagian dari proses untuk peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Pengungkapan secara paripurna atas capaian kinerja keuangan, posisi keuangan maupun berbagai hal yang sedang menjadi perhatian, disajikan secara objektif sehingga para pengguna Laporan dapat memperoleh gambaran yang utuh dan informatif terkait pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Merangin.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Pemerintah Kabupaten Merangin dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan sebagai target capaian APBD Tahun Anggaran 2024.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Merangin sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, Dokumen RPD 2024-2026 disusun dengan tanpa Visi Misi Kepala Daerah, namun memuat tujuan dan sasaran pembangunan sampai dengan tahun 2026 dengan mengacu pada visi misi jangka panjang daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan tahap keempat rencana jangka panjang daerah, dan mempertimbangkan isu-isu strategis aktual. Untuk itu, sejalan dengan Tema Nasional dan Tema Provinsi Jambi terkait maka tema RKPD Kabupaten Merangin Tahun 2024 "*Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang Inklusif di Dukung Infrastruktur dan SDM Berdaya Saing*".

Pemerintah Kabupaten Merangin bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Merangin telah menetapkan APBD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024. Sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan sebagai upaya perbaikan manajemen pemerintahan, APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan menganut prinsip anggaran berbasis kinerja. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah yang dilaksanakan dengan prinsip pencapaian kinerja maka kebutuhan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Merangin diharapkan dapat terpenuhi.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Merangin menyusun dan melaksanakan anggaran serta program/kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mensyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output* dan *outcomes*.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Pelaksanaan Anggaran (*budgetary report*) berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Finansial (*financial report*) berupa Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan. Hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan yang dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengamanatkan bahwa mulai tahun 2015, Pemerintah Daerah harus sudah menggunakan basis akrua dalam penyajian laporan keuangan. Implementasi akuntansi berbasis akrua dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas penyajian LKPD dan menyajikan data yang lebih akurat dalam mengukur kinerja Pemerintah Daerah. Dalam akuntansi berbasis akrua dapat menunjukkan bagaimana Pemerintah Daerah membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan dananya, lebih memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Daerah saat ini untuk membiayai aktivitas dan memenuhi kewajibannya serta

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

lebih riil menunjukkan posisi keuangan Pemerintah Daerah dan perubahan posisi keuangannya. Selain itu, dapat lebih memberikan kesempatan pada Pemerintah Daerah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya dan berguna untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Bupati Merangin atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Merangin. Hal ini dimaksudkan untuk:

1. Memberi gambaran capaian program/kegiatan yang dianggarkan dalam APBD sehingga dapat menjadi pedoman atau kerangka acuan yang bersifat umum dalam mencermati dan mengevaluasi APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, khususnya dari aspek keuangan;
3. Memberikan informasi secara singkat tentang realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024;
4. Sebagai acuan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024;
5. Memberikan kemudahan pada publik untuk mengetahui seberapa besar Pelaksanaan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024;
6. Sebagai salah satu bahan evaluasi dalam perencanaan APBD berikutnya;
7. Memenuhi tanggung jawab konstitusional sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada pemerintah Kabupaten Merangin;
9. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektivitas pengendalian atas seluruh aset, utang dan ekuitas; dan
10. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Di samping itu, secara yuridis maksud penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Keuangan ini secara umum adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelolanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan termasuk laporan non keuangan juga disajikan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas entitas pelaporan selama satu periode.

Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai *output* dan *outcomes* dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

LKPD disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan dan dirancang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi secara transparan dari semua kelompok pengguna yang meliputi:

1. Masyarakat;
2. Para Wakil Rakyat, Lembaga Pengawas, dan Lembaga Pemeriksa;
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman; dan
4. Pemerintah.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan-LRA;
5. Belanja;
6. Pembiayaan;
7. Pendapatan-LO; dan
8. Beban.

I.2. Kedudukan dan Bentuk Hukum Entitas

I.2.1 Kondisi Geografis dan Demografis

Kabupaten Merangin terletak di bagian barat Provinsi Jambi yang secara geografis berada di antara 101032'39"-102038'35" Bujur Timur dan antara 1039'23"-2046'9" Lintang Selatan. Luas Kabupaten Merangin 7.679 km² atau sekitar 15,31% dari wilayah Provinsi Jambi. Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Bungo di sebelah utara, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Tebo di sebelah timur, Kabupaten Kerinci dan Provinsi Bengkulu di sebelah barat, serta



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu di sebelah selatan. Sedangkan jarak dari Ibukota Kabupaten ke ibukota Provinsi Jambi (Kota Jambi) 260 Km dengan waktu tempuh 3,5 - 4 jam, jarak ini sudah termasuk ke bandara, sedangkan ke Pelabuhan Samudera Muara Sabak 315 Km, dengan waktu tempuh 5–6 jam.

Kondisi topografis wilayah Kabupaten Merangin secara umum dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu dataran rendah, dataran sedang dan dataran tinggi. Ketinggian berkisar antara 10-1.206 mdpl dengan bentang alam rata-rata bergelombang. Pada dataran rendah terletak pada ketinggian 0-100 mdpl seluas 42.77%. Wilayah dataran sedang yang terletak antara 100-500 mdpl seluas 32.53%, dan dataran tinggi yang terletak lebih dari 500 mdpl seluas 14.5% dari seluruh wilayah. Musim hujan di Kabupaten Merangin berkisar pada bulan Oktober s.d Desember. Musim kemarau bulan Februari s.d Mei. Bagian Timur dan Utara Kabupaten Merangin merupakan dataran rendah dengan temperatur 300°C. Sedangkan bagian barat iklim Kabupaten Merangin bertipe A (Schmidt-Ferguson) dengan curah hujan pada dataran rendah berkisar antara 2.200 mm - 3.200 mm, sedangkan pada daerah perbukitan curah hujan antara 1.600 mm sampai 3.600 mm per tahun.

Kabupaten Merangin merupakan salah satu dari 11 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi dengan Ibukota Bangko dan populasi berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk tahun 2024 oleh BPS Kabupaten Merangin sebanyak 373.409 jiwa, meningkat 1,36% dibandingkan tahun sebelumnya. Kabupaten Merangin Dalam Angka 2024 menunjukkan bahwa 68,76% penduduk berumur 15 tahun keatas bekerja pada sektor Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan.

I.2.2 Bentuk Hukum Entitas

Sidang Komite Nasional Indonesia (KNI) Sumatera di Bukittinggi pada tahun 1946 menetapkan bahwa pulau Sumatera dibagi menjadi tiga Sub Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1946, Sub Provinsi tersebut ditetapkan menjadi provinsi, di mana daerah Keresidenan Jambi yang terdiri dari Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Merangin yang tergabung dalam provinsi Sumatera Tengah. Melalui Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 1958, dibentuklah Provinsi Daerah Tingkat I Jambi yang terdiri dari Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci. Dalam perjalanan sejarah, dengan dibentuknya Provinsi Daerah Tingkat I Jambi, yang sekaligus juga dibentuknya Kabupaten Merangin (Wilayahnya saat ini adalah Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Bungo Tebo) yang beribukota di Bangko.

Kemudian Ibukota Kabupaten Merangin dipindahkan ke Muara Bungo yang diputuskan melalui sidang DPRD. Setelah berdirinya Kabupaten Sarolangun Bangko melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 maka Pusat Pemerintahan ditetapkan di Bangko. Dengan adanya pemekaran wilayah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko dimekarkan menjadi dua, yaitu Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin. Kabupaten Sarolangun dengan ibukota di Sarolangun dan Kabupaten Merangin di Bangko. Keberadaan Kabupaten Merangin diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi, dengan Ibu Kota Kabupaten Merangin berkedudukan di Kecamatan Bangko.

Kabupaten Merangin terdiri dari 24 Kecamatan, 205 desa dan 10 kelurahan, dengan rincian:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel I.1 Rincian Jumlah Desa/Kelurahan per Kecamatan di Kabupaten Merangin

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	Kecamatan Jangkat	11 Desa
2.	Kecamatan Sungai Tenang	14 Desa
3.	Kecamatan Muara Siau	17 Desa
4.	Kecamatan Lembah Masurai	15 Desa
5.	Kecamatan Tiang Pumpung	6 Desa
6.	Kecamatan Pamenang	13 Desa dan 1 Kelurahan
7.	Kecamatan Pamenang Barat	8 Desa
8.	Kecamatan Renah Pamenang	4 Desa
9.	Kecamatan Pamenang Selatan	4 Desa
10.	Kecamatan Bangko	4 Desa dan 4 Kelurahan
11.	Kecamatan Bangko Barat	6 Desa
12.	Kecamatan Nalo Tantan	7 Desa
13.	Kecamatan Batang Masumai	10 Desa
14.	Kecamatan Sungai Manau	10 Desa
15.	Kecamatan Renah Pembarap	12 Desa
16.	Kecamatan Pangkalan Jambu	8 Desa
17.	Kecamatan Tabir	6 Desa dan 5 Kelurahan
18.	Kecamatan Tabir Ulu	6 Desa
19.	Kecamatan Tabir Selatan	8 Desa
20.	Kecamatan Tabir Ilir	7 Desa
21.	Kecamatan Tabir Timur	4 Desa
22.	Kecamatan Tabir Lintas	5 Desa
23.	Kecamatan Margo Tabir	6 Desa
24.	Kecamatan Tabir Barat	14 Desa
Jumlah		205 Desa dan 10 Kelurahan

Sumber: Kabupaten Merangin Dalam Angka 2024

I.3. Kelembagaan Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah beserta Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Daerah, Dinas Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Kantor dan Satuan Polisi Pamong Praja serta Rumah Sakit Umum Daerah selaku Badan Layanan Umum Daerah. Struktur dan Organisasi Pemerintah Daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Tugas pokok dan fungsi setiap perangkat daerah diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah sesuai kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Merangin menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin mencakup 4 urusan yaitu:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

1. Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terbagi atas 6 bidang urusan yaitu (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; (5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan (6) Sosial.
2. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terbagi atas 18 bidang urusan yaitu (1) Tenaga Kerja; (2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (3) Pangan; (4) Pertanian; (5) Lingkungan Hidup; (6) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; (7) Pemberdayaan Masyarakat Desa; (8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; (9) Perhubungan; (10) Komunikasi dan Informatika; (11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; (12) Penanaman Modal; (13) Kepemudaan dan Olah Raga; (14) Statistik; (15) Persandian; (16) Kebudayaan; (17) Perpustakaan dan (18) Kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan, terbagi atas 6 bidang urusan yaitu (1) Kelautan dan Perikanan; (2) Pariwisata; (3) Pertanian; (4) Perdagangan; (5) Perindustrian dan (6) Transmigrasi.
4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, terbagi atas 2 bidang urusan yaitu (1) Sekretariat Daerah; dan (2) Sekretariat DPRD.
5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, terbagi atas 5 bidang urusan yaitu (1) Perencanaan; (2) Keuangan; (3) Kepegawaian; (4) Pendidikan dan Pelatihan; dan (5) Penelitian dan Pengembangan.
6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dalam bidang urusan Inspektorat Daerah.
7. Unsur Kewilayahan dalam bidang urusan Kecamatan dan Kelurahan.
8. Unsur Pemerintahan Umum dalam bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tugas pokok masing-masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Merangin yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Merangin. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan sesuai dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 100 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Merangin hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Kabupaten;
4. Badan Daerah sebanyak 7 unit yaitu :
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- g. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- 5. Dinas Daerah sebanyak 21 Unit yaitu:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Dinas Ketahanan Pangan;
 - h. Dinas Lingkungan Hidup;
 - i. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - k. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - l. Dinas Perhubungan;
 - m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 - o. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 - p. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - r. Dinas Perikanan;
 - s. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - t. Dinas Peternakan dan Perkebunan;
 - u. Satuan Polisi Pamong Praja;
- 6. Kantor Kecamatan sebanyak 24 Unit yaitu:
 - a. Kantor Camat Bangko;
 - b. Kantor Camat Tabir;
 - c. Kantor Camat Sungai Manau;
 - d. Kantor Camat Pamenang;
 - e. Kantor Camat Muara Siau;
 - f. Kantor Camat Jangkat;
 - g. Kantor Camat Tabir Ulu;
 - h. Kantor Camat Tabir Selatan;
 - i. Kantor Camat Lembah Masurai;
 - j. Kantor Camat Bangko Barat;
 - k. Kantor Camat Batang Masumai;
 - l. Kantor Camat Nalo Tantan;
 - m. Kantor Camat Tabir Ilir;
 - n. Kantor Camat Tabir Timur;
 - o. Kantor Camat Renah Pembarap;
 - p. Kantor Camat Pangkalan Jambu;
 - q. Kantor Camat Sungai Tenang;
 - r. Kantor Camat Pamenang Barat;
 - s. Kantor Camat Renah Pamenang;
 - t. Kantor Camat Tabir Lintas;

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- u. Kantor Camat Tabir Barat;
 - v. Kantor Camat Pamenang Selatan;
 - w. Kantor Camat Margo Tabir; dan
 - x. Kantor Camat Tiang Pumpung;
7. BLUD RSUD Kol. Abundjani Bangko.

I.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Kegiatan Operasional

Secara rinci landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Merangin Nomor 100 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2022 Nomor 100);



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Sedangkan landasan hukum Kegiatan Operasional diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6960);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 1);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 3);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 Nomor 8);
 25. Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 15);
 26. Peraturan Bupati Merangin Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 11 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 Nomor 11);

27. Peraturan Bupati Merangin Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 36 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 Nomor 36).

I.5. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

I.5.1. Unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan LPSAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LAK dan LPE. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kabupaten Merangin, yang terdiri dari SKPKD, SKPD, dan BLUD yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan Daerah. Data dan informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD sedangkan data dan informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA SKPKD (BUD).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

3. Neraca

Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Properti Investasi, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca BLUD menyajikan Aset Lancar, Aset Tidak Lancar, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca PPKD (BUD) menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Properti Investasi, Kewajiban dan Ekuitas.

4. Laporan Operasional (LO)

LO menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasional, Beban dari Kegiatan Operasional, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

LAK disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun Anggaran 2024.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

LPE menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi dan Ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai.

LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2024 disusun berdasarkan penggabungan antara Laporan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan BLUD dan Laporan Keuangan SKPKD (BUD). Laporan Keuangan SKPD terdiri dari LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK, Laporan Keuangan BLUD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Operasional sedangkan Laporan keuangan SKPKD (BUD) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

I.5.2. Kebijakan Akuntansi

LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan Bupati Merangin Nomor 100 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin. Terhadap akun-akun yang belum diatur melalui peraturan bupati tersebut maka kebijakan akuntansi yang diperlakukan mengacu kepada ketentuan yang lebih tinggi serta kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku secara umum.

I.5.3. Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2024, dilakukan dengan beberapa pendekatan yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2024 oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi sebagaimana dimaksud Pasal 189 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Laporan Keuangan Tahun 2024 disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai amanat Pasal 190 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. LRA, Neraca, LO dan LPE disusun berdasarkan kompilasi laporan seluruh entitas akuntansi termasuk SKPKD. Sementara LAK disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh SKPKD selaku BUD dan mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening Kas Daerah, serta penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak melalui rekening Kas Daerah namun disahkan oleh BUD seperti transaksi penerimaan dan belanja BLUD, Dana Kapitasi JKN, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Desa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). LPSAL disusun PPKD berdasarkan SAL Awal, SiLPA/SiKPA, koreksi kesalahan dan SAL Akhir.
4. Sebagai entitas akuntansi, Kepala SKPD menyusun Laporan Keuangan yang selanjutnya disampaikan kepada BPKAD selaku SKPKD untuk digabungkan menjadi LKPD. LRA, Neraca, LO dan LPE setiap SKPD dihasilkan dari proses akuntansi yang secara operasional diselenggarakan oleh PPK-SKPD melalui aplikasi SIPD. Khusus akun Aset Tetap, dalam rangka penyusunan laporan keuangan terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi Aset Tetap Tahun 2024 antara Pengurus Barang dan Bendahara Pengeluaran SKPD bersama Bidang Aset dan Bidang

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Akuntansi dan Pelaporan BPKAD. Berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut selanjutnya dilakukan koreksi (penyesuaian) terhadap saldo Aset Tetap dalam aplikasi SIPD sebagai dasar penyajian pada Neraca SKPD.

5. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kol. Abundjani Bangko selain kedudukannya sebagai Unit SKPD pada Dinas Kesehatan, juga telah ditetapkan sebagai UPTD bersifat khusus yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana diatur melalui Peraturan Bupati Merangin Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja UPTD RSUD Kolonel Abundjani Bangko. Sebagai bagian dari Dinas Kesehatan, RSUD mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan yang meliputi LRA, Neraca, LO dan LPE (bagian dari laporan keuangan Dinas Kesehatan), sementara selaku entitas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, RSUD Kol. Abundjani Bangko menyusun laporan keuangan BLUD sesuai standar akuntansi yang berlaku.
6. BPKAD selaku SKPD dan SKPKD diberi kewenangan atas pengelolaan DPA-SKPD. Kepala BPKAD, selaku PPKD yang menjalankan fungsi BUD dan selaku Pengguna Anggaran berkewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan SKPD serta LPSAL dan LAK.
7. Laporan keuangan seluruh SKPD dan BUD untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 disusun berdasarkan transaksi atas pelaksanaan APBD TA 2024 melalui proses penatausahaan dan penyelenggaraan akuntansi melalui aplikasi SIPD. LKPD disajikan berdasarkan penggabungan laporan keuangan tersebut dengan menggunakan aplikasi yang sama, dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya terhadap beberapa komponen dalam laporan keuangan.
8. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Merangin dalam kapasitasnya selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berdasarkan LKPD *unreviewed* yang disampaikan oleh Kepala BPKAD selaku PPKD sebagaimana termuat dalam surat Inspektur Kabupaten Merangin Nomor 700/380/Inspektorat/2025 Tanggal 27 Maret 2025 tentang Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin TA 2024 dan Pernyataan telah direviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 tanggal 8 April 2025.
9. Laporan keuangan tahun 2024 ini tidak mencakup entitas BUMD, namun penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada BUMD disajikan sebagai investasi Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

I.6. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan:

- I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- I.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan; dan
- I.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD:

- II.1. Ekonomi Makro;
- II.2. Kebijakan Keuangan; dan
- II.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan:

- III.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan; dan
- III.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja.

Bab IV. Kebijakan Akuntansi:

- IV.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah;
- IV.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
- IV.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan; dan
- IV.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Bab V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan:

- V.1. Penjelasan Akun-Akun LRA;
- V.2. Penjelasan Akun-Akun LPSAL;
- V.3. Penjelasan Akun-Akun Neraca;
- V.4. Penjelasan Akun-Akun LO;
- V.5. Penjelasan Akun-Akun LAK; dan
- V.6. Penjelasan Akun-Akun LPE.

Bab VI. Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan:

Bab VII. Penutup

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

B A B

II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

II.1 Ekonomi Makro

Kebijakan otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah merupakan jawaban atas permasalahan lokal yang dialami bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan serta rendahnya kualitas hidup masyarakat dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, desentralisasi merupakan langkah strategis untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Dengan otonomi daerah diharapkan perekonomian daerah akan tumbuh semakin kuat dan mandiri. Sementara itu, keberhasilan perekonomian daerah akan sangat ditentukan oleh harmonisasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter di Daerah. Kebijakan fiskal daerah yang termanifestasikan melalui APBD dan perpajakan daerah harus didukung dengan kebijakan moneter melalui neraca pembayaran daerah dan perbankan daerah yang sehat dan kuat. Dalam konteks otonomi daerah dan kebijakan fiskal di daerah, serta proses penyusunan APBD Kabupaten Merangin Tahun 2024, setidaknya terdapat tiga faktor yang paling berpengaruh yaitu (1) indikator-indikator ekonomi yang ditetapkan sebagai asumsi dasar ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan parameter ekonomi penting lainnya seperti target penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran; (2) langkah-langkah kebijakan (*policy measure*) dan administratif (*administrative measure*) yang ditempuh baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan anggaran daerah; (3) berbagai peraturan dan regulasi serta keputusan hukum yang berlaku dan berbagai langkah yang menjadi arahan Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Jambi baik di bidang ekonomi maupun nonekonomi.

Walaupun dihadapkan berbagai kendala dan ketidakpastian, Pemerintah tetap berupaya keras mewujudkan peningkatan pertumbuhan yang lebih berkualitas dan inklusif agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih adil dan merata. Untuk itu, pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 telah ditetapkan sasaran pembangunan yang harus dicapai, antara lain:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,11%;
2. Nilai PDRB berdasarkan ADHB sebesar Rp22.678,56 miliar;
3. Nilai PDRB berdasarkan ADHK sebesar Rp11.294,54 miliar;
4. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,15%;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,50%;
6. Rasio Gini sebesar 0,31;
7. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,57%; dan
8. Pengeluaran per kapita sebesar Rp11.117.667,00.

Data Statistik Kabupaten Merangin yang disajikan dalam laporan keuangan tahun 2024 adalah data yang bersumber dari rilis yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, sebagaimana tercantum dalam Kabupaten Merangin Dalam Angka 2025 (No. Katalog: 1102001.1502, No. Publikasi: 15020.25001), Provinsi Jambi dalam Angka 2025 (No. Katalog: 1102001.15, No. Publikasi: 15000.25003), serta data dan informasi yang diperoleh dari tabel dinamis yang dapat diakses oleh publik melalui website resmi BPS Kabupaten Merangin, BPS Provinsi Jambi dan BPS RI.

Berikut ini penjelasan mengenai beberapa asumsi dasar ekonomi makro yang secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

II.1.1 PDRB dan Perkembangannya

Pembangunan di segala bidang yang telah menjangkau wilayah Kabupaten Merangin memerlukan adanya data statistik untuk perencanaan pembangunan khususnya di bidang ekonomi sekaligus evaluasi hasilnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu data yang digunakan untuk keperluan tersebut baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan disertai dengan inflasi yang cukup rendah dan terkendali merupakan indikator yang menggambarkan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Kabupaten Merangin tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi, keduanya bersinergi dan saling terkait. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin dicerminkan dari angka-angka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), masih memperlihatkan keadaan yang relatif baik. Dari hasil penghitungan sementara yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Merangin, terjadi perubahan agregat PDRB Harga Konstan sebesar Rp11.553,48 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp12.078,18 miliar pada tahun 2024 sehingga laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin menjadi 4,54%. Sedangkan apabila dilihat menurut Harga Berlaku, maka terjadi peningkatan agregat PDRB sebesar 13,09% dari semula Rp22.524,53 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp25.472,37 miliar pada tahun 2024.

Jika membandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi 5 tahun terakhir sebagaimana tergambar pada tabel berikut, dapat kita lihat bahwa setelah laju pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19 di tahun 2020, kembali menuju pulih.

Tabel II.1. PDRB, Laju Pertumbuhan dan Indeks Perkembangan Kabupaten Merangin Tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Berlaku (2010=100) dan Atas Dasar Harga Konstan 2010

(dalam miliar rupiah)

Tahun	ADHB			ADHK		
	PDRB	Laju Pertumbuhan	Indeks Perkembangan	PDRB	Laju Pertumbuhan	Indeks Perkembangan
2020	15.670,88	2,50%	2,69	9.863,65	0,78%	1,69
2021	17.837,62	13,83%	3,06	10.380,46	5,24%	1,78
2022	20.284,06	13,72%	3,48	10.973,80	5,72%	1,88
2023*	22.524,53	11,05%	3,86	11.553,48	5,28%	1,98
2024**	25.472,37	13,09%	4,37	12.078,18	4,54%	2,07

Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BAPPEDA Kabupaten Merangin

*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin sampai dengan tahun 2024 sebesar 4,54%. Faktor terbesar penyumbang pertumbuhan ekonomi tahun 2024 dari sisi sektoral didorong oleh perkembangan pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (14,14%), Jasa Pendidikan (13,50%) serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (13,10%). Apabila dibandingkan dengan angka Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2023 sebesar 5,28%, terjadi kontraksi sebesar 0,74%. Kondisi ini berdampak pada penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,18% dan kemiskinan menjadi 8,40%.

Pada tahun 2024, nilai PDRB di Kabupaten Merangin Atas Dasar Harga Berlaku mencapai Rp25.472,37 miliar. Dengan menggunakan PDRB tahun 2010 sebagai tahun dasar sebesar Rp5.829,19 miliar, berarti Atas Dasar Harga Berlaku PDRB berkembang 4,37 kali selama kurun waktu 2010-2024, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2024 mencapai Rp12.078,18 miliar yang berarti berkembang 2,07 kali dari tahun 2010 sebesar Rp5.829,19 miliar, sebagaimana Grafik berikut:

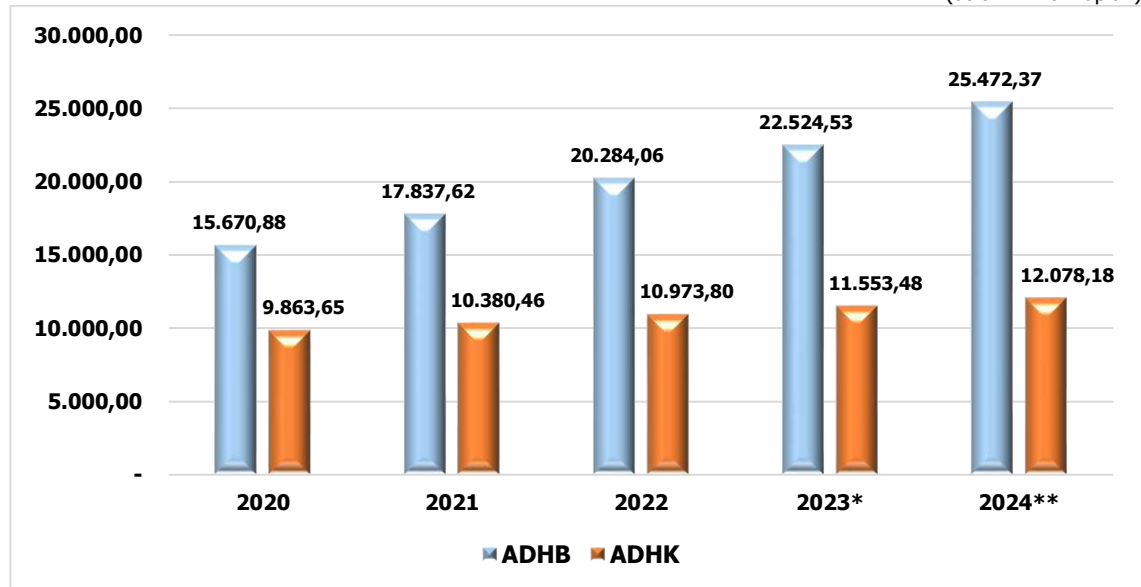


PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Grafik II.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Merangin Tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Berlaku (2010=100) dan Atas Dasar Harga Konstan 2010

(dalam miliar rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BAPPEDA Kabupaten Merangin

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

II.1.2 Struktur Ekonomi

Distribusi PDRB menurut sektor ekonomi atau lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan peranan dan perubahan struktur ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun. Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kabupaten Merangin didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran; Industri Pengolahan; dan Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Merangin pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 52,65% (naik 5,58% dari 47,07% di tahun 2020). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 12,88% (turun 0,14% dari 13,02% di tahun 2020). Berikutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 7,52% (naik 0,13% dari 7,39% di tahun 2020) dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 5,51% (turun 1,30% dari 6,81% di tahun 2020).

Keempat lapangan usaha tersebut mengalami peranan yang berfluktuasi. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan sektor Industri Pengolahan cenderung meningkat. Sedangkan sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan sektor Konstruksi mengalami fluktuasi tapi dengan kecenderungan menurun. Salah satu penyebab faktor yang mendorong peningkatan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah momentum pertumbuhan produksi kelapa sawit yang dibarengi dengan pertumbuhan pada Sektor Pertanian ditandai oleh meningkatnya produksi padi. Namun, tertahan oleh penurunan produksi karet mentah. Sedangkan untuk sektor Konstruksi sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan program-program pembangunan fisik yang terus membaik pasca pandemi COVID-19.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel II.2. Distribusi PDRB Kabupaten Merangin Atas Dasar Harga Berlaku (2010=100) Tahun 2020-2024

(dalam persen)

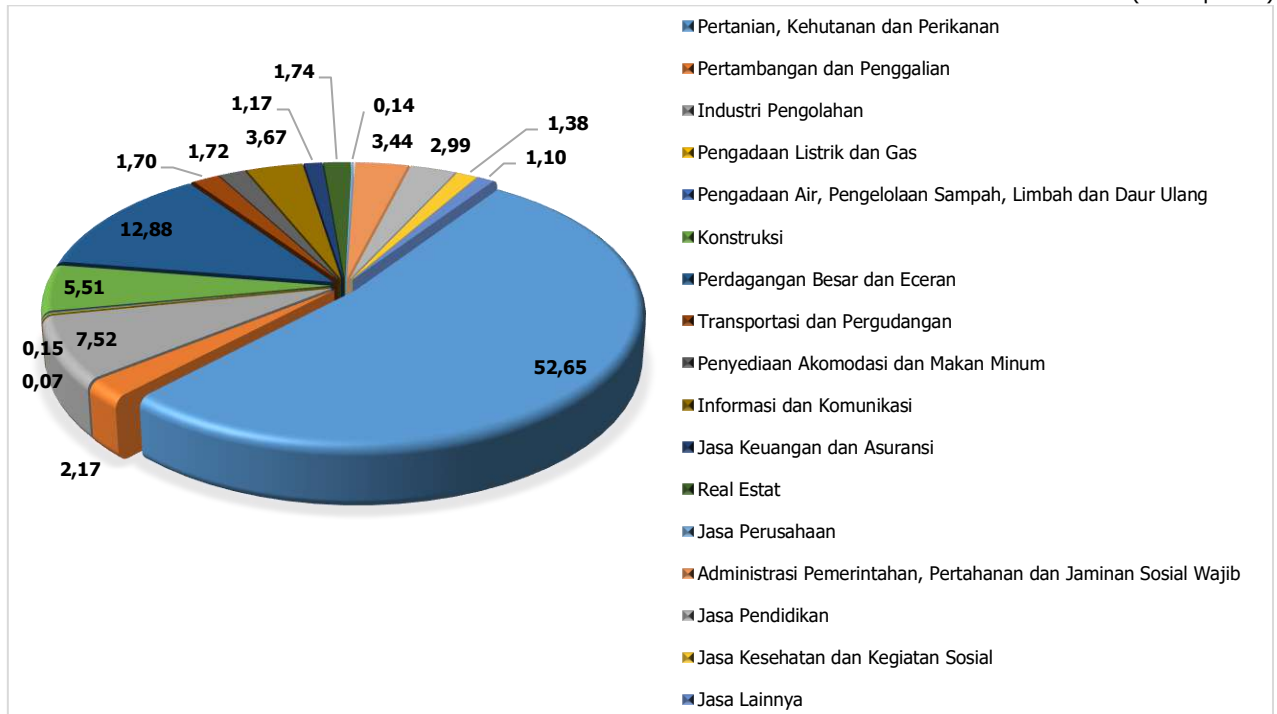
No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	47,07	49,35	50,53	51,01	52,65
B.	Pertambangan dan Penggalian	2,60	2,54	2,62	2,27	2,17
C.	Industri Pengolahan	7,39	7,58	7,76	7,85	7,52
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,19	0,18	0,16	0,16	0,15
F.	Konstruksi	6,81	6,63	6,04	5,87	5,51
G.	Perdagangan Besar dan Eceran	13,02	12,34	12,69	13,32	12,88
H.	Transportasi dan Pergudangan	1,61	1,59	1,71	1,79	1,70
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,99	1,87	1,78	1,76	1,72
J.	Informasi dan Komunikasi	4,76	4,35	4,04	3,88	3,67
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,51	1,47	1,38	1,27	1,17
L.	Real Estat	2,17	2,03	2,01	1,89	1,74
M,N.	Jasa Perusahaan	0,13	0,12	0,13	0,15	0,14
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,54	4,03	3,54	3,34	3,44
P.	Jasa Pendidikan	3,43	3,19	3,04	2,89	2,99
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,48	1,55	1,38	1,36	1,38
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	1,21	1,11	1,10	1,12	1,10
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BAPPEDA Kabupaten Merangin

*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Grafik II.2. Struktur Ekonomi Kabupaten Merangin Tahun 2024**

(dalam persen)



Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BAPPEDA Kabupaten Merangin

**) Angka Sangat Sementara

7



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

II.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu variabel penting dari PDRB adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). LPE didapat dengan membandingkan PDRB atas dasar harga konstan tiap tahun dengan tahun sebelumnya yang menunjukkan perkembangan atau pertumbuhan riil perekonomian atau dapat menggambarkan kinerja pembangunan dari suatu periode ke periode sebelumnya. Selain itu PDRB juga menginformasikan struktur perekonomian daerah. Struktur perekonomian tersebut menggambarkan kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap perekonomian secara makro. Namun demikian, dengan mengamati pertumbuhan PDRB per Kapita dapat dipakai untuk menunjukkan perkembangan kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah. Meningkatnya PDRB per Kapita yang diterima penduduk, maka daya beli (*purchasing power*) masyarakat akan bertambah, sehingga kebutuhan rumah tangganya (*demand*) terhadap barang dan jasa akan terpenuhi. *Demand* yang diikuti *purchasing power*, akan mengakibatkan kesejahteraan masyarakat meningkat. Perekonomian akan mengalami pertumbuhan apabila total *output* produksi barang dan jasa tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Oleh karena demikian, pertumbuhan ekonomi ini menggambarkan perkembangan aktivitas ekonomi dalam kurun waktu tertentu. Adapun peningkatan output produksi barang dan jasa tersebut terjadi apabila terdapat peningkatan permintaan baik oleh masyarakat daerah tersebut atau luar daerah.

Nilai PDRB Kabupaten Merangin tahun 2024 mencapai Rp12.078,18 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari Rp11.553,48 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,55%, terkontraksi 0,73% jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,28%.

Pertumbuhan ekonomi selama 2024 dipercepat oleh adanya pergerakan ekonomi yang terus meningkat dengan porsi yang cukup besar khususnya pada lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (14,14%), Jasa Pendidikan (13,50%) dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib (13,10%).

Tabel II.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merangin Tahun 2020-2024

(dalam persen)						
No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,74	4,85	6,63	5,12	2,77
B.	Pertambangan dan Penggalan	2,43	11,24	10,14	(12,11)	3,75
C.	Industri Pengolahan	(0,88)	5,88	4,39	7,94	1,91
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	5,16	5,20	6,34	12,91	5,45
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,67	5,95	3,60	0,36	0,05
F.	Konstruksi	0,65	7,11	(0,79)	4,49	4,40
G.	Perdagangan Besar dan Eceran	(3,16)	5,63	7,53	9,22	7,05
H.	Transportasi dan Pergudangan	(2,45)	8,45	11,89	6,06	5,80
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(5,47)	5,60	5,92	8,57	7,78
J.	Informasi dan Komunikasi	7,73	2,68	7,07	7,10	6,22
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,84	5,77	(0,50)	(0,72)	0,52
L.	Real Estat	(0,57)	4,84	6,56	2,50	2,50
M,N.	Jasa Perusahaan	(4,72)	2,88	10,81	19,77	2,13
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	(3,77)	0,76	(0,22)	3,77	13,10
P.	Jasa Pendidikan	2,92	2,98	4,93	3,31	13,50
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,37	14,78	(0,28)	5,67	14,14
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	(3,28)	3,68	7,72	4,57	7,61
Produk Domestik Regional Bruto		0,78	5,24	5,72	5,28	4,55

Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BAPPEDA Kabupaten Merangin

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

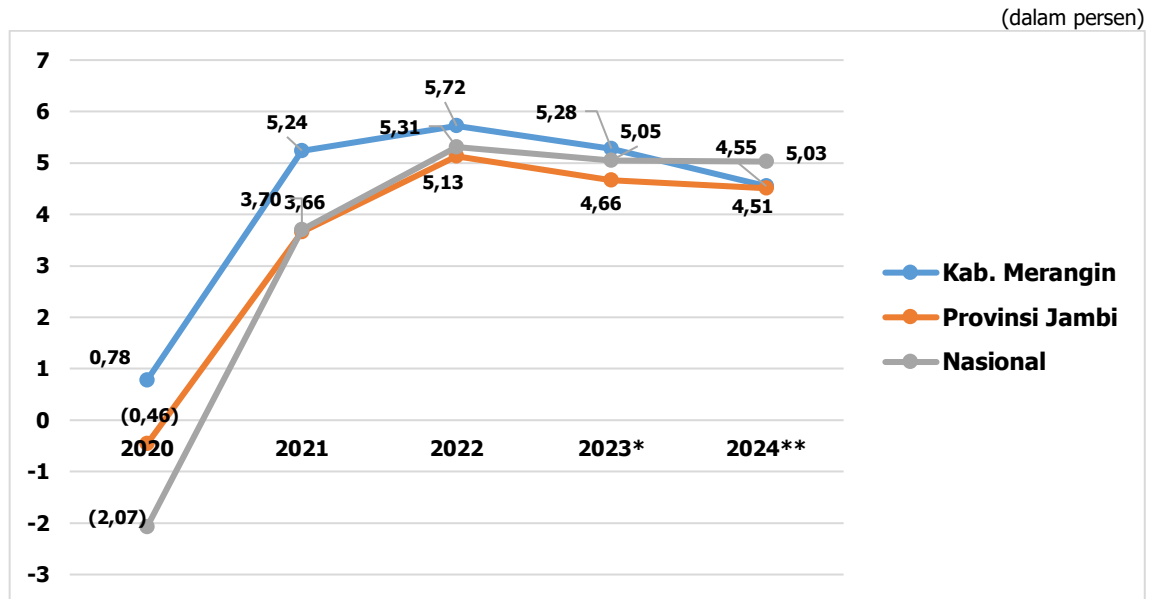
4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Grafik II.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BAPPEDA Kabupaten Merangin

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

II.1.4 PDRB per Kapita

PDRB per Kapita selalu digunakan sebagai indikator kemakmuran masyarakat, semakin tinggi nilai PDRB per Kapita di suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat kemakmuran di daerah tersebut. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per Kapita atau nilai PDRB untuk satu orang penduduk. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) berguna untuk mengetahui pertumbuhan riil ekonomi per Kapita penduduk di suatu daerah.

Nilai PDRB per Kapita Kabupaten Merangin atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga 2024 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 PDRB per kapita tercatat sebesar 44,26 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2024 mencapai 68,22 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. PDRB per Kapita ADHB dan PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Merangin dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) cenderung selalu mengalami kenaikan sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel II.4. PDRB ADHB per Kapita dan PDRB ADHK per Kapita Kabupaten Merangin Tahun 2020-2024

(dalam juta rupiah/jiwa)

Tahun	PDRB ADHB per Kapita			PDRB ADHK per Kapita		
	PDRB ADHB	Jumlah Penduduk	PDRB Per Kapita	PDRB ADHK	Jumlah Penduduk	PDRB Per Kapita
2020	15.670,88	354,05	44,26	9.863,65	354,05	27,86
2021	17.837,62	355,72	50,15	10.380,46	355,72	29,18
2022	20.284,06	357,58	56,73	10.973,80	357,58	30,69
2023*	22.524,53	368,39	61,14	11.553,48	368,39	31,36
2024**	25.472,37	373,41	68,22	12.078,18	373,41	32,35

Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BAPPEDA Kabupaten Merangin

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

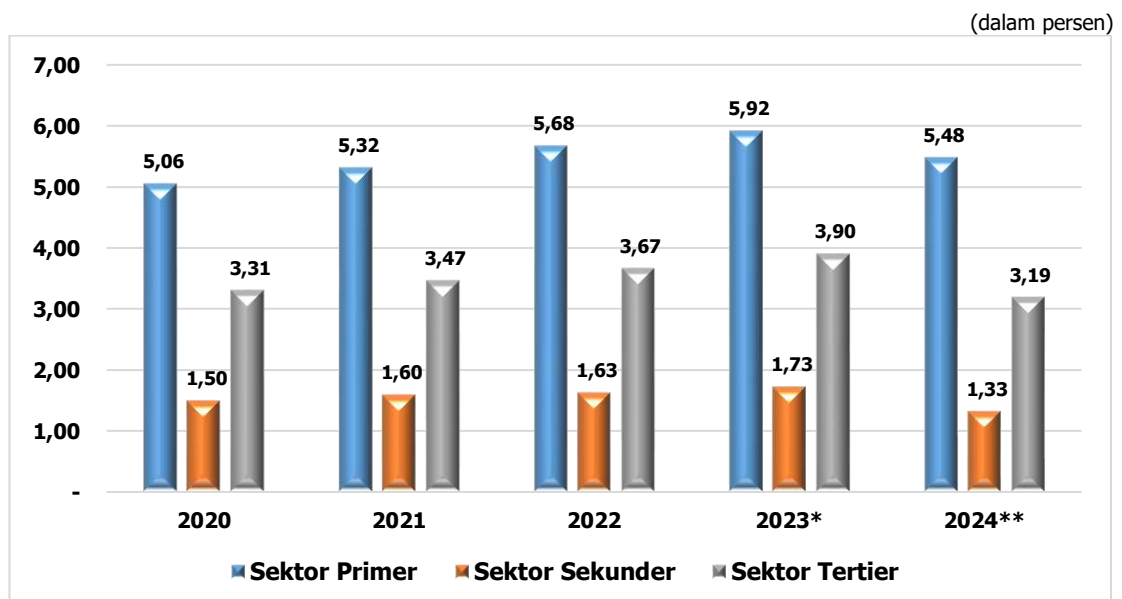
II.1.5 Sektor Primer, Sekunder dan Tersier

Jika seluruh sektor ekonomi tersebut diklasifikasikan ke dalam sektor primer, sekunder dan tersier yang terdiri atas:

- a. Sektor Primer terdiri atas dua lapangan usaha yaitu:
 - 1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; dan
 - 2) Pertambangan dan Penggalian.
- b. Sektor Sekunder terdiri atas empat lapangan usaha yaitu:
 - 1) Industri Pengolahan;
 - 2) Pengadaan Listrik dan Gas;
 - 3) Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan
 - 4) Konstruksi.
- c. Sektor tersier terdiri atas sebelas lapangan usaha yaitu:
 - 1) Perdagangan Besar dan Eceran;
 - 2) Transportasi dan Pergudangan;
 - 3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
 - 4) Informasi dan Komunikasi;
 - 5) Jasa Keuangan dan Asuransi;
 - 6) Real Estat;
 - 7) Jasa Perusahaan;
 - 8) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
 - 9) Jasa Pendidikan;
 - 10) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan
 - 11) Jasa Lainnya.

Dari data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 s.d. 2024, Sektor Primer menjadi sektor yang memiliki kontribusi tertinggi dengan rata-rata terbesar 3,19%. Persentase distribusi masing-masing sektor adalah sebagaimana grafik berikut:

Grafik II.4. Struktur Perekonomian Kabupaten Merangin menurut Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BAPPEDA Kabupaten Merangin

*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

II.1.6 Perbandingan PDRB Kabupaten Merangin dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Kabupaten Merangin, pada tahun 2024 menempati posisi keempat (4,55%) dalam urutan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi. Dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, Kabupaten Merangin berada di urutan ketujuh dengan nilai PDRB sebesar Rp25.472,37 miliar sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.5. PDRB dan Laju Pertumbuhan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi dan Provinsi Jambi Tahun 2024**

(dalam juta rupiah dan persen)

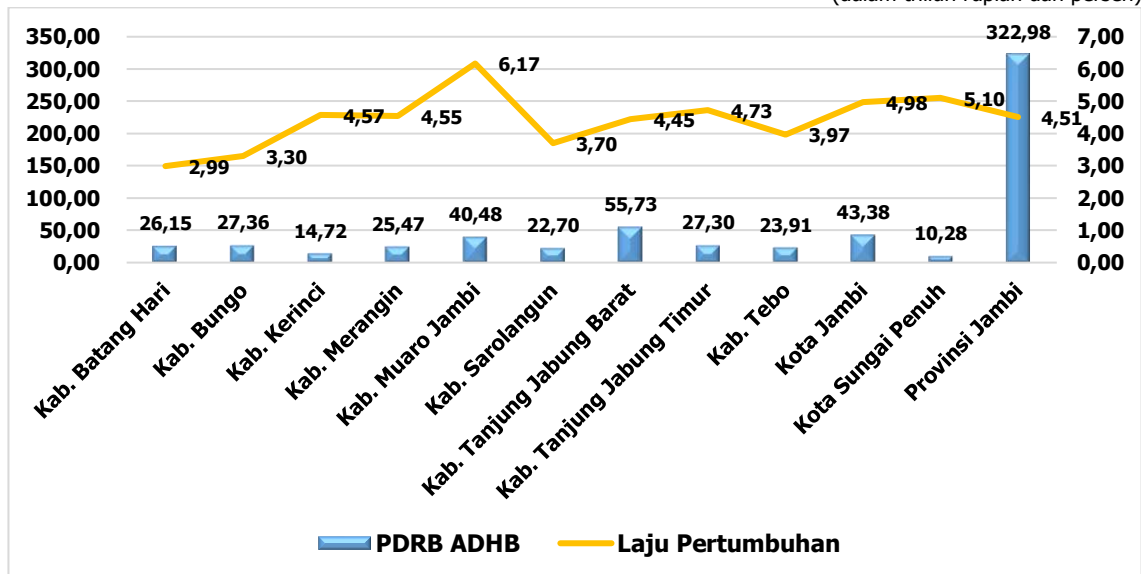
No.	Lapangan Usaha	PDRB ADHB (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
1.	Kab. Batang Hari	26.149,80	2,99
2.	Kab. Bungo	27.356,37	3,30
3.	Kab. Kerinci	14.719,25	4,57
4.	Kab. Merangin	25.472,37	4,55
5.	Kab. Muaro Jambi	40.475,99	6,17
6.	Kab. Sarolangun	22.701,23	3,70
7.	Kab. Tanjung Jabung Barat	55.732,85	4,45
8.	Kab. Tanjung Jabung Timur	27.296,26	4,73
9.	Kab. Tebo	23.908,92	3,97
10.	Kota Jambi	43.375,48	4,98
11.	Kota Sungai Penuh	10.280,79	5,10
12.	Provinsi Jambi	322.975,53	4,51

Sumber: BPS Provinsi Jambi

**) Angka Sangat Sementara

Grafik II.5. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi dan Provinsi Jambi Tahun 2024**

(dalam triliun rupiah dan persen)



Sumber: BPS Provinsi Jambi

**) Angka Sangat Sementara



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

II.1.7 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel II.6. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
Kabupaten Merangin (%)	8,63	9,11	8,70	8,90	8,40
Kabupaten Merangin (Ribu Jiwa)	33,92	35,44	34,14	35,19	33,49
Provinsi Jambi (%)	7,58	8,09	7,62	7,58	7,26
Nasional (%)	9,78	10,14	9,57	9,36	9,03

Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BPS Provinsi Jambi/BPS RI

Persentase penduduk miskin Kabupaten Merangin pada tahun 2024 sebesar 8,40% dan mengalami penurunan sebesar 0,50% jika dibandingkan tahun 2023 di mana persentase penduduk miskin sebesar 8,90%. Persentase penduduk miskin diharapkan dapat ditekan pada posisi 7,0-8,0%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Merangin tahun 2024 berada di atas Provinsi Jambi, sehingga harus menjadi prioritas untuk ditekan di tahun mendatang.

II.1.8 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Merangin tahun 2024 adalah sebesar 4,18%, sebagaimana dijelaskan tabel berikut:

Tabel II.7. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
Kabupaten Merangin	4,86	4,83	4,69	4,35	4,18
Provinsi Jambi	4,26	4,76	4,70	4,50	4,48
Nasional	4,94	6,26	5,83	5,45	4,91

Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BPS Provinsi Jambi/BPS RI

Menurut data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Merangin tahun 2024 menunjukkan angka sebesar 4,18% di mana lebih rendah jika dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 4,35%. TPT Kabupaten Merangin juga lebih rendah dibandingkan Provinsi Jambi dan Nasional yang sebesar 4,48% dan 4,91%.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

II.1.9 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Merangin juga dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.

Berdasarkan sifatnya, inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*). Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*). Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun. (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100 % setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan, dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, tingkat inflasi Kabupaten Merangin tahun 2024 adalah sebesar 2,04% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel II.8. Tingkat Inflasi Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024

(dalam persen)

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
Kabupaten Merangin*	2,61	2,32	1,65	6,04	2,04
Provinsi Jambi**	1,94	2,71	1,66	6,22	1,43
Nasional	2,72	1,68	1,87	5,51	1,57

Sumber: BPS Kabupaten Bungo/BPS Provinsi Jambi/BPS RI

*) Mengacu pada Inflasi Kabupaten Bungo

**) Inflasi Gabungan Kabupaten Bungo dan Kota Jambi (metode rata-rata sederhana)

Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi di Kabupaten Merangin tahun 2024 menunjukkan penurunan sebesar 4,00% dibandingkan tahun 2023 yang berada pada angka 6,04%. Jika dibandingkan dengan tingkat inflasi untuk Provinsi Jambi tahun 2024 sebesar 1,43%, inflasi Kabupaten Merangin lebih tinggi sebesar 0,61%. Namun jika dibandingkan dengan Nasional tahun yang sama, Kabupaten Merangin lebih tinggi sebesar 0,47%.

II.1.10 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Analisis ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 di mana :

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, di mana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, di mana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Merangin, realisasi pencapaian Indeks Gini tahun 2024 sebagaimana dijelaskan tabel berikut:

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel II.9. Indeks Gini Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2024

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
Kabupaten Merangin	0,32	0,29	0,35	0,36	0,32
Provinsi Jambi	0,32	0,32	0,33	0,34	0,32
Nasional	0,38	0,38	0,38	0,39	0,38

Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BPS Provinsi Jambi/BPS RI

Pada tahun 2024, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Merangin berdasarkan Indeks Gini adalah sebesar 0,32 yang lebih rendah poin 0,04 poin jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 0,36. Jika dibandingkan dengan Indeks Gini untuk Provinsi Jambi tahun 2024 sebesar 0,32, Indeks Gini Kabupaten Merangin sama dengan Provinsi Jambi. Namun jika dibandingkan dengan Nasional tahun yang sama, Kabupaten Merangin lebih rendah sebesar 0,06 poin.

II.1.11 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP, Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (<60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Merangin, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Merangin tahun 2024 adalah sebesar 71,66 poin dengan kategori Tinggi sebagaimana disampaikan dalam tabel berikut:

Tabel II.10. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Merangin Tahun 2021-2024 Menurut Indikator Penyusunnya

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023*	2024**
Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (tahun)	73,58	73,78	73,97	74,13
Pengetahuan				
Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)	12,04	12,05	12,25	12,26
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	7,90	7,91	8,13	8,40
Standar Hidup Layak				
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan) (juta rupiah)	10,38	10,71	10,97	11,43
Indek Pembangunan Manusia (IPM)	70,55	70,98	71,81	71,66

Sumber: BPS Kabupaten Merangin

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) Kabupaten Merangin pada tahun 2024 mencapai 74,13 tahun di mana lebih lama 0,16 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2024 adalah 8,40 tahun dengan Harapan Lama Sekolah 12,26 tahun. Sementara, Pengeluaran Riil per Kapita per tahun sebesar Rp11,43 juta atau meningkat Rp0,46 juta dibandingkan tahun sebelumnya.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jambi tahun 2024 sebesar 73,43, IPM Kabupaten Merangin lebih rendah sebesar 1,77 poin. Begitu pula jika dibandingkan dengan Nasional tahun yang sama, Kabupaten Merangin juga lebih rendah sebesar 2,54 poin sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel II.11. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2021-2024

Wilayah	Tahun			
	2021	2022	2023*	2024**
Kabupaten Merangin*	70,55	70,98	71,81	71,66
Provinsi Jambi**	72,62	73,11	73,73	73,43
Nasional	72,29	72,91	74,39	74,20

Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BPS Provinsi Jambi/BPS RI

II.1.12 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian makro Kabupaten Merangin diarahkan pada:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan, yang bertumpu pada peran ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro. Dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja;
2. Peningkatan kegiatan promosi investasi terhadap sektor ekonomi yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, misalnya pengembangan industri pariwisata serta industri kreatif;
3. Mendorong akselerasi realisasi belanja pemerintah daerah untuk memberi *multiplier effect* terhadap pemulihan ekonomi;
4. Mendorong intensifikasi sektor pertanian dalam rangka meningkatkan hasil produksi, dengan menerapkan teknologi pertanian yang mendukung baik dalam tahapan menanam, panen maupun pasca panen;
5. Mendorong produk unggulan daerah melalui peningkatan produktivitas dan pemanfaatan teknologi digital dalam rangka ekspor dan perluasan pemasaran, serta didukung dengan antara lain pembentuk klaster, pelatihan, dan bimbingan teknis;
6. Mendorong sustainabilitas perkebunan kelapa sawit melalui penyusunan skema peremajaan kelapa sawit yang berbasis kemandirian petani;
7. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*publik-private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas;
8. Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (*seed capital*) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (*a group lending approach*) dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kabupaten Merangin;
9. Memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha di Kabupaten Merangin sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya bersama; dan



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

10. Membangun promosi bersama (*joint marketing*) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.

II.2 Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Merangin Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 28 Tahun 2024 dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Daerah periode 2024-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026. RKPD dimaksud merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah bersama DPRD menetapkan KUA/PPAS TA 2024 dalam kerangka penyusunan APBD.

II.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Ada 2 (dua) sumber pendapatan daerah di Kabupaten Merangin yang memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah; Pertama, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah Pusat yang di dalamnya terakomodasi Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Kedua, sumber pendapatan yang berasal dari APBD Kabupaten Merangin, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah dalam setiap tahunnya.

Pendapatan Daerah yang tercermin dalam APBD Kabupaten Merangin diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah, dari Pendapatan Transfer berupa Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (SDA), dari Dana Alokasi Umum (DAU), dari Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik maupun Non Fisik, Dana Penyesuaian, Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi serta dari Lain-lain Pendapatan yang Sah berupa Pendapatan Hibah. Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari transfer pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil dibandingkan sumber pendapatan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Merangin selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan ASN. Dari kondisi tersebut maka kinerja pengelolaan pendapatan daerah harus terus dioptimalkan dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Merangin. Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2024 secara umum difokuskan pada upaya-upaya sebagai berikut:

1. Penyesuaian target pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer. Dimana untuk Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat maupun transfer antar daerah (provinsi) yang



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- berupa DAK, DBHCHT, BK/BKK Provinsi, DBH Provinsi Tahun 2024 disesuaikan kembali sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis pelaksanaan, ataupun surat edaran/penetapan terkait pendanaan dimaksud;
2. Memperluas sumber-sumber pendapatan daerah antara lain dengan mendayagunakan kekayaan atau aset-aset daerah yang ada dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
 3. Menyediakan database subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Merangin yang *up to date*, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk optimalisasi potensi pendapatan, serta menentukan sasaran dalam peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 4. Mengembangkan manajemen pendapatan daerah melalui prinsip profesionalisme, efisiensi, transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab;
 5. Meningkatkan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dan komponen pendapatan daerah lainnya dengan menggunakan/ memanfaatkan ketersediaan teknologi informasi (IT) serta memangkas alur pelayanan menjadi lebih sederhana;
 6. Menyempurnakan regulasi terkait dengan penguatan sistem pemungutan dan pengendalian, serta penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta usaha mendorong peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
 7. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang bertugas mengelola dan memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Merangin;
 8. Meningkatkan kinerja pengelolaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang terdapat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin yang didukung oleh sistem evaluasi kinerja BUMD yang memungkinkan BUMD dioptimalkan maupun dilakukan restrukturisasi;
 9. Melakukan pemanfaatan aset/ Barang Milik Daerah untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperhatikan peraturan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/ Daerah;
 10. Meningkatkan koordinasi antar OPD yang melakukan pengelolaan/pemungutan/ sebagai penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Merangin;
 11. Melakukan koordinasi dan meningkatkan hubungan kerja / kerjasama dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BAPPENAS dan kementerian/ instansi terkait lainnya, dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Bantuan Keuangan secara proporsional sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kabupaten Merangin;
 12. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota lainnya, serta pihak-pihak terkait lainnya dengan peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin, khususnya yang berasal dari sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
 13. Kerja sama dengan pihak ketiga yaitu sektor swasta yang ada di Kabupaten Merangin.

Khusus untuk sektor Pendapatan Asli Daerah, arah kebijakan di atas selanjutnya diimplementasikan melalui berbagai upaya untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Usaha Intensifikasi, meliputi:

1. Melakukan penyuluhan terhadap para wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait maupun dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam menunjang peningkatan bagi hasil pajak dan bukan pajak.

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

3. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengkajian ulang terhadap tarif pajak dan retribusi yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.
4. Melakukan pendekatan dengan WP/WR serta berupaya meningkatkan pelayanan terhadap WP/WR tersebut dalam upaya penagihan dan peningkatan tarif pajak/retribusi.
5. Menginventarisir dan mengklasifikasi WP/WR dengan meningkatkan efektivitas kontrol di segala bidang termasuk didalamnya kegiatan menelaah data tunggakan Pajak/Retribusi serta melakukan tindak lanjut penagihan.
6. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan Pegawai dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan dengan mengirim Pegawai dalam berbagai Kursus yang berkaitan dengan bidang tugasnya masing-masing.
7. Secara rutin dan berkala mengadakan sinkronisasi data dengan Dinas/Instansi terkait, serta mendata langsung setiap WP/WR yang ada.
8. Melakukan sosialisasi Perda tentang pajak dan retribusi, khususnya yang baru diterbitkan.
9. Menerbitkan SK/peraturan Bupati mendahului Perda dengan persetujuan DPRD yang berkaitan dengan peningkatan pajak dan retribusi.
10. Melakukan Revisi terhadap Perda-perda yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang.
11. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengamanan Perda serta penegakan sanksi hukum.
12. Memberikan penghargaan kepada para Camat, Kepala Desa/Lurah yang dapat merealisasikan penerimaan PBB yang mencapai target serta memberikan teguran/peringatan bagi yang tidak mencapai target.
13. Mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi PAD dan PBB secara berkala dengan Dinas/Instansi terkait guna peningkatan penerimaan masukan, rekapitulasi permasalahan dan tanggapan serta menemukan alternatif pemecahan secara bersama.
14. Melakukan kerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri Bangko guna menindaklanjuti tunggakan-tunggakan berbagai jenis pungutan daerah.
15. Melakukan kerjasama dengan PLN dan PDAM dalam rangka penagihan pajak penerangan jalan dan retribusi kebersihan rumah tangga melalui pembayaran rekening pada setiap bulannya.
16. Meningkatkan Intensitas, efektifitas dan efisiensi pemungutan dengan cara menekan biaya pungutnya.
17. Mengurangi jumlah tunggakan Pajak/Retribusi melalui penerapan sanksi yang tegas bagi WP/WR yang belum membayar.
18. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penagihan untuk mengurangi tingkat kebocoran.
19. Berupaya menentukan target penerimaan sesuai dengan potensi penerimaan.
20. Upaya peningkatan pajak dan retribusi daerah dengan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah.
21. Melakukan Studi Banding ke daerah lain yang pengelolaan penerimaannya lebih baik dan potensi daerahnya relatif sama, tujuannya untuk mendapatkan masukan atas pelaksanaan pungutan daerah di daerah tersebut.
22. Melakukan pertukaran informasi dengan daerah-daerah lain mengenai sumber-sumber pendapatan daerah berikut dengan aturan main dan pengelolaannya.
23. Mengoptimalkan pengelolaan PBB yang diserahkan ke daerah.

Usaha Ekstensifikasi, meliputi:

1. Menggali sumber-sumber pungutan baru sesuai dengan kondisi dan potensi penerimaan daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat peraturan daerah yang baru yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
2. Menjaring wajib pajak/retribusi baru yang belum terdata.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

II.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut diatas dan untuk efisiensi keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Merangin sejak tahun 2019 telah menggunakan Analisis Standar Biaya untuk belanja kegiatan dan standar harga satuan, sehingga yang tersedia tersebut betul-betul digunakan untuk menunjang Program Visi Misi Kepala Daerah. Sebagai suatu kewajiban, Pemerintah Kabupaten Merangin juga mengalokasikan Dana Transfer Umum (DTU) sekurang-kurangnya sebesar 25% untuk Belanja Infrastruktur Daerah yang merupakan belanja terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan pelayanan publik antar daerah.

Belanja daerah Pemerintah Kabupaten Merangin difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Standar harga satuan tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Struktur dan penggunaan belanja daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

II.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan pembiayaan Kabupaten Merangin tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan penerimaan pembiayaan
 - 1) Meningkatkan manajemen pembiayaan daerah mengarah kepada akurasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.
 - 2) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2024.
 - 3) Apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk giro/deposito, penyertaan modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
 - 4) Apabila APBD dalam keadaan defisit, maka kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu atau merasionalisasikan belanja.
- b. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah
 - 1) Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan SiLPA.
 - 2) Menjaga posisi pembiayaan neto sehingga dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

II.3 Indikator Target Kinerja APBD dan Posisi Keuangan Pemerintah Daerah

II.3.1 Indikator Kinerja Fiskal Daerah

Kebijakan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dilaksanakan lebih lanjut dalam serangkaian program/kegiatan dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam TA 2024. Kinerja fiskal untuk TA 2024 di sisi anggaran yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah APBD dan Perubahan APBD dan direalisasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan dapat disajikan sebagai berikut:

Pendapatan Daerah TA 2024 terealisasi sebesar Rp1.459.275.923.665,51. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 sebesar Rp1.401.344.105.918,79, terdapat peningkatan sebesar Rp57.931.817.746,72 atau 4,13%. Di sisi Belanja Daerah, realisasi TA 2024 adalah sebesar Rp1.454.773.168.270,96. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah TA 2023 sebesar Rp1.338.008.661.903,93, terdapat peningkatan sebesar Rp116.764.506.367,03 atau 8,73%. Pembiayaan Netto TA 2024 terealisasi sebesar Rp77.190.915.420,30. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp15.855.471.405,44, terdapat peningkatan sebesar Rp61.335.444.014,86 atau 386,84%.

Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Netto TA 2024 sebagaimana diuraikan di atas berdampak pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2024 dengan realisasi sebesar Rp81.693.670.814,85. Jika dibandingkan dengan SiLPA TA 2023 sebesar Rp79.190.915.420,30, terdapat peningkatan sebesar Rp2.502.755.394,55 atau 3,16%.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

II.3.2 Posisi Keuangan Pemerintah Daerah

Posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 digambarkan melalui Neraca per 31 Desember 2024 yang mencakup Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Merangin sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin per 31 Desember 2024 serta perbandingannya dengan tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aset

Aset Pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2024 berjumlah Rp2.551.260.523.024,58, bertambah sebesar Rp31.277.874.166,62 atau 1,24% dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah Rp2.519.982.648.857,96.

2. Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2024 berupa Kewajiban Jangka Pendek berjumlah Rp37.538.800.854,42, bertambah sebesar Rp18.673.304.102,60 atau 98,98% dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah Rp18.865.496.751,82.

3. Ekuitas

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2024 berjumlah Rp2.513.721.722.170,16, bertambah sebesar Rp12.604.570.064,02 atau 0,50% dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah Rp2.501.117.152.106,14.

II.3.3 Indikator Kinerja Program Pemerintah

Sasaran dan prioritas Pemerintah Kabupaten Merangin bidang pembangunan tertuang dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merangin tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Merangin tahun 2024 dan selanjutnya dijabarkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD yang tersebar pada seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin, sebagai tindak lanjut dari visi dan misi yang telah ditetapkan melalui Rencana Kerja pada setiap satuan kerja pada TA 2024.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Merangin tahun 2024 yang merupakan acuan dalam penetapan alokasi belanja daerah TA 2024 beserta perubahannya dilaksanakan dalam bentuk program kegiatan maupun hibah dan bantuan sosial oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok fungsi SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merangin. Prioritas pembangunan TA 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 dan memperhatikan berbagai isu strategis dan permasalahan yang mendesak di Kabupaten Merangin pada tahun 2024, serta mengacu pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan prioritas pembangunan pada RKPD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024 sebagaimana rumusan berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel II.12. Indikator Kinerja Program Pemerintah Kabupaten Merangin TA 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Adil dan Berkelanjutan (Ekonomi Hijau)	Laju Pertumbuhan Ekonomi		6,11%
	1.1 Meningkatnya daya saing sektor unggulan yang berkelanjutan.	a. Pertumbuhan sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	5,36%
		b. Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	3,18%
		c. Pertumbuhan sektor Pariwisata terhadap PDRB	6,21%
		d. Indeks kualitas Lingkungan Hidup	67,87%
		e. Indeks daya saing Infrastruktur Daerah	62,49%
	1.2 Meningkatnya ketahanan perlindungan sosial, kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pemberdayaan keluarga.	a. Angka Kemiskinan	8,15%
		b. Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT)	4,50%
		c. Rasio Gini	0,31
		d. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,61%
2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indek Pembangunan Manusia		70,57%
	2.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan.	a. Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,09 Tahun
		b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,03 Tahun
	2.2 Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan.	Usia Harapan Hidup (UHH)	71,78 Tahun
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	2.3 Maningkatnya kemampuan daya beli masyarakat.	Pengeluaran per kapita	Rp11.117.667,00
	Indeks Reformasi Birokrasi		B
	3.1 Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Prima.	a. Indeks Pelayanan Publik yang baik	B
		b. Persentase OPD dengan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	70,00%
	3.2 Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel dan Kapabel	a. Indeks Prilaku Anti Korupsi	70,65%
		b. Opini BPK	WTP
		c. Tingkat kapabilitas APIP	Level 3
		d. Tingkat kematangan implementasi SPIP	Level 3
		e. Predikat SAKIB	BB
		f. Indeks Kelembagaan	25 (Sedang)
		g. Indeks SPBE	2,25 (cukup)
		h. Indeks Profesionalitas ASN	91,00%

Sumber: BAPPEDA Kab. Merangin

Dalam pencapaian prioritas pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD terdapat beberapa indikator yang pencapaiannya tidak hanya dilaksanakan oleh satu SKPD tetapi bisa lintas SKPD, sehingga sangat diperlukan adanya sinkronisasi, komunikasi dan koordinasi oleh masing-masing SKPD. Kinerja APBD dicerminkan dengan persentase realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun output dari belanja daerah menurut urusan pemerintahan, bidang dan program kerja yang telah direncanakan melalui APBD sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Belanja Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban daerah dalam mewujudkan peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Total anggaran Belanja yang digunakan untuk membiayai Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah sebesar Rp885.718.052.952,00, dengan program prioritas sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

1) Bidang Pendidikan

Belanja Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp483.362.114.940,00. Belanja tersebut difokuskan pada penyediaan pelayanan dan fasilitas Pendidikan Dasar mulai dari jenjang PAUD, SD dan SMP serta Satuan Pendidikan lain yaitu Pendidikan Kesetaraan Paket A dan B, SKB dan PKBM.

2) Bidang Kesehatan

Belanja Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp248.558.499.272,00 yang diprioritaskan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan pelayanan pada FKTP, peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pencegahan stunting.

3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Belanja pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dianggarkan sebesar Rp114.324.198.220,00 dengan prioritas dan sasaran pada pemeliharaan dan peningkatan jalan/jembatan Kabupaten, pemeliharaan/peningkatan infrastruktur permukiman, pemeliharaan/ peningkatan infrastruktur sumber daya air, pembangunan gedung pemerintah, penyusunan rencana tata ruang dan peningkatan alat berat.

4) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Belanja pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dianggarkan sebesar Rp12.692.993.529,00 dengan prioritas dan sasaran pada pemeliharaan dan peningkatan jaringan penerangan jalan umum (PJU) serta pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan perumahan dan pemukiman.

5) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Belanja pada Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dianggarkan sebesar Rp20.977.072.542,00 dengan prioritas dan sasaran pada pemeliharaan dan peningkatan keamanan, kenyamanan dan ketertiban serta perlindungan bagi masyarakat, pencegahan penyakit masyarakat dan bencana kebakaran.

6) Bidang Sosial

Belanja Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp5.803.174.449,00 dengan prioritas dan sasaran pada pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana, peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat, peningkatan kemampuan (*capacity building*) petugas, pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya serta pencegahan dan penanggulangan bencana alam.

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Belanja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban daerah di bidang ketenagakerjaan, kependudukan serta penunjang fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta pengembangan sektor ekonomi rakyat dalam bentuk perizinan, koperasi dan UMKM serta pelayanan investasi. Total anggaran Belanja yang digunakan untuk membiayai Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah sebesar Rp87.030.963.520,00 dengan sasaran dan prioritas sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

1) Bidang Tenaga Kerja

Belanja Bidang Tenaga Kerja dianggarkan sebesar Rp123.069.200,00 dengan prioritas dan sasaran pada perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Belanja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dianggarkan sebesar Rp756.430.000,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.

3) Bidang Pangan

Belanja Bidang Pangan dianggarkan sebesar Rp3.063.738.797,00 dengan prioritas dan sasaran pada penguatan ketersediaan pangan, diversifikasi pangan, peningkatan produksi serta upaya-upaya peningkatan pasca produksi sektor pertanian dan perkebunan.

4) Bidang Pertanahan

Belanja Pertanahan dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00, dengan prioritas dan sasaran pada penyelesaian sengketa agraria dan optimalisasi aset tanah pada pemerintah daerah.

5) Bidang Lingkungan Hidup

Belanja Bidang Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp16.210.018.182,00 dengan prioritas dan sasaran pada perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam, pengendalian polusi dan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

6) Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Belanja Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dianggarkan sebesar Rp5.924.862.250,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.

7) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dianggarkan sebesar Rp9.235.515.353,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kinerja dan peran masyarakat dalam membangun desa, Pembinaan Aparatur, Administrasi, Keuangan dan Aset Desa, dan peningkatan peran perempuan di pedesaan.

8) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Belanja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dianggarkan sebesar Rp14.092.252.823,00 dengan prioritas dan sasaran pada penyediaan sarana dan prasarana Keluarga Berencana dan pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA) berbasis TIK.

9) Bidang Perhubungan

Belanja pada Bidang Perhubungan dianggarkan sebesar Rp4.236.051.894,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor dan pengendalian dan pengamanan lalu lintas.

10) Bidang Komunikasi dan Informatika

Belanja Bidang Komunikasi dan Informatika dianggarkan sebesar Rp5.749.384.217,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, serta kerjasama informasi dengan media massa.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

11) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Belanja Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dianggarkan sebesar Rp5.542.496.190,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengembangan kewirausahaan dan peningkatan kualitas UKM serta kelembagaan koperasi.

12) Bidang Penanaman Modal

Belanja Bidang Penanaman Modal dianggarkan sebesar Rp6.705.589.337,00 dengan prioritas dan sasaran pada penyelenggaraan dan pengendalian perizinan, peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

13) Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Belanja Bidang Kepemudaan dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp9.051.077.700,00 prioritas dan sasaran pada peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga melalui peningkatan fasilitas dan pembinaan olahraga serta peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan.

14) Bidang Statistik

Belanja Bidang Statistik dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00 dengan prioritas dan sasaran pada penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota.

15) Bidang Persandian

Belanja Bidang Persandian dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00 dengan prioritas dan sasaran pada penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota.

16) Bidang Kebudayaan

Belanja Bidang Kebudayaan dianggarkan sebesar Rp2.199.612.700,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengembangan nilai-nilai budaya.

17) Bidang Perpustakaan

Belanja Bidang Perpustakaan dianggarkan sebesar Rp645.749.150,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengelolaan perpustakaan dan peningkatan minat baca.

18) Bidang Kearsipan

Belanja Bidang Kearsipan dianggarkan sebesar Rp3.330.115.727,00 dengan prioritas dan sasaran pada penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah dan pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin adalah urusan pilihan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kekhasan dan keunggulan daerah. Bidang urusan pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Merangin ialah kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian dan Transmigrasi. Anggaran Belanja yang dialokasikan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan adalah sebesar Rp59.620.329.467,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Bidang Kelautan dan Perikanan

Belanja Bidang Kelautan dan Perikanan dianggarkan sebesar Rp4.749.547.250,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengembangan budidaya perikanan dan pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

2) Bidang Pariwisata

Belanja Bidang Pariwisata dianggarkan sebesar Rp10.932.333.374,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan sarana dan prasarana destinasi wisata dan pengembangan pemasaran pariwisata melalui pola kemitraan.

3) Bidang Pertanian

Belanja Bidang Pertanian dianggarkan sebesar Rp37.685.239.593,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengadaan sarana dan prasarana pendukung pertanian/perkebunan dan peternakan, usaha peningkatan produksi hasil pertanian/perkebunan dan peternakan serta pemberdayaan penyuluh lapangan.

4) Bidang Perdagangan

Belanja Bidang Perdagangan dianggarkan sebesar Rp468.520.000,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan sarana dan prasarana pasar, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

5) Bidang Perindustrian

Belanja Bidang Perindustrian dianggarkan sebesar Rp5.779.689.000,00 dengan prioritas dan sasaran pada penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten Merangin.

6) Bidang Transmigrasi

Belanja Bidang Transmigrasi dianggarkan sebesar Rp5.000.250,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan adalah urusan Pemerintah Kabupaten Merangin dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan berupa Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Anggaran Belanja yang dialokasikan untuk Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan adalah sebesar Rp91.987.568.767,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Sekretariat Daerah

Belanja Sekretariat Daerah dianggarkan sebesar Rp42.011.495.015,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan dan pengembangan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, kapasitas kelembagaan DPRD dan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan bagi masyarakat.

2) Bidang Sekretariat DPRD

Belanja Sekretariat DPRD dianggarkan sebesar Rp49.976.073.752,00 dengan prioritas dan sasaran pada pelayanan administrasi dan fasilitas tugas DPRD dan Sekretariat DPRD.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin adalah urusan Pemerintah Kabupaten Merangin dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Bidang urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Merangin adalah perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. Anggaran Belanja yang dialokasikan untuk Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan fungsi penunjang adalah sebesar Rp327.375.050.155,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Bidang Perencanaan

Belanja Bidang Perencanaan dianggarkan sebesar Rp9.904.607.478,00 dengan prioritas dan sasaran pada kualitas dokumen perencanaan pembangunan ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

2) Bidang Keuangan

Belanja Bidang Keuangan dianggarkan sebesar Rp305.487.573.208,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah, transfer kepada Pemerintah Desa serta optimalisasi penerimaan daerah.

3) Bidang Kepegawaian

Belanja Bidang Kepegawaian dianggarkan sebesar Rp8.173.986.728,00 dengan prioritas dan sasaran pada pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur serta peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan kedinasan.

4) Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Belanja Bidang Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan sebesar Rp353.877.000,00 dengan prioritas dan sasaran pada Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

5) Bidang Penelitian dan Pengembangan

Belanja Bidang Penelitian dan Pengembangan dianggarkan sebesar Rp3.455.005.741,00 dengan prioritas dan sasaran pada penguatan kelembagaan serta pengembangan inovasi dan teknologi daerah.

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin mendapat alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp16.111.854.811,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah, penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan dan peningkatan kapasitas tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

g. Unsur Kewilayahan

Unsur Kewilayahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin mendapat alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp63.236.066.891,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan dan pengembangan pemberdayaan kelurahan dan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan bagi masyarakat lingkup kecamatan dan kelurahan.

h. Unsur Pemerintahan Umum

Unsur Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin mendapat alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp39.927.071.512,00 dengan prioritas dan sasaran pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan.

II.4 Pemenuhan Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 yang pada lampirannya menyatakan bahwa dalam penyusunan APBD, Pemerintah Daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik berupa pemenuhan Belanja *Mandatory Spending* dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian sasaran pembangunan.

Alokasi anggaran dan realisasi Belanja *Mandatory Spending* yang dilaksanakan melalui APBD Kabupaten Merangin TA 2024 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

1. Bidang Pendidikan.

Mengacu pada Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 18 Tahun 2022 dan butir E.1.a Lampiran Permendagri Nomor 15 Tahun 2023, anggaran Bidang Pendidikan yang dialokasikan pada APBD sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total anggaran Belanja Daerah. Hingga akhir tahun 2024, dari anggaran sebesar Rp495.258.554.490,00, telah terealisasi sebesar Rp452.051.898.750,00 atau sebesar 91,28%. Jika dibandingkan dengan total Belanja Daerah, rasio di sisi anggaran adalah sebesar 31,52% dan di sisi realisasi adalah sebesar 31,07%, sehingga telah memenuhi amanat peraturan perundang-undangan.

2. Bidang Kesehatan.

Mengacu pada butir E.1.b Lampiran Permendagri Nomor 15 Tahun 2023, hingga akhir tahun 2024, dari anggaran sebesar Rp256.842.378.272,00, telah terealisasi sebesar Rp222.322.804.107,96 atau sebesar 86,56%. Jika dibandingkan dengan total Belanja Daerah diluar gaji, rasio di sisi anggaran adalah sebesar 22,99% dan di sisi realisasi adalah sebesar 21,27%.

3. Bidang Infrastruktur.

Mengacu pada butir E.1.c Lampiran Permendagri Nomor 15 Tahun 2023, anggaran Bidang Infrastruktur yang dialokasikan pada APBD sekurang-kurangnya sebesar 40% dari total anggaran Belanja Daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa untuk percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Hingga akhir tahun 2024, dari anggaran sebesar Rp280.495.760.820,00, telah terealisasi sebesar Rp273.467.597.300,00 atau sebesar 97,49%. Jika dibandingkan dengan total Belanja Daerah diluar komponen pengurangnya, rasio di sisi anggaran adalah sebesar 21,71% dan di sisi realisasi adalah sebesar 22,98%, sehingga belum memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di sisi anggaran sebesar 18,29% dan di sisi realisasi sebesar 17,02%.

4. Penguatan Pembinaan dan Pengawasan.

Mengacu pada butir E.2.d Lampiran Permendagri Nomor 15 Tahun 2023, anggaran Penguatan Pembinaan dan Pengawasan yang dialokasikan pada APBD sekurang-kurangnya sebesar 1,00% dari total anggaran Belanja Daerah. Hingga akhir tahun 2024, dari anggaran sebesar Rp16.111.854.811,00, telah terealisasi sebesar Rp15.056.534.550,00 atau sebesar 93,45%. Jika dibandingkan dengan total Belanja Daerah, rasio di sisi anggaran adalah sebesar 1,03% dan di sisi realisasi adalah sebesar 1,03%, sehingga telah memenuhi amanat peraturan perundang-undangan.

5. Alokasi Dana Desa (ADD).

Mengacu pada Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU Nomor 3 Tahun 2024, anggaran ADD yang dialokasikan pada APBD sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total anggaran pendapatan Dana Perimbangan yang diterima dikurangi DAK. Hingga akhir tahun 2024, dari anggaran sebesar Rp79.506.673.800,00, telah terealisasi sebesar 100,00%. Jika dibandingkan dengan total Belanja Daerah, rasio di sisi anggaran adalah sebesar 9,62% dan di sisi realisasi adalah sebesar 11,59%, sehingga belum memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di sisi anggaran sebesar 0,38% namun di sisi realisasi telah memenuhi amanat peraturan perundang-undangan.

6. Belanja Pegawai.

Mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan butir C.3.a.1).f) Lampiran Permendagri Nomor 15 Tahun

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

2023, anggaran Belanja Pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan pada APBD maksimal sebesar 30% dari total Belanja Daerah. Hingga akhir tahun 2024, dari anggaran sebesar Rp572.805.287.754,00, telah terealisasi sebesar Rp521.181.354.426,00 atau sebesar 90,99%. Jika dibandingkan dengan total Belanja Daerah, rasio di sisi anggaran adalah sebesar 36,46% dan di sisi realisasi adalah sebesar 35,83%, sehingga belum memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di sisi anggaran lebih sebesar 6,46% dan di sisi realisasi lebih sebesar 5,83%.

Rincian alokasi anggaran dan realisasi Belanja *Mandatory Spending* diuraikan lebih lanjut pada **Lampiran 1c**.

Alokasi anggaran dan realisasi Belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan melalui APBD Kabupaten Merangin TA 2023 adalah sebagai berikut:

1. SPM Bidang Pendidikan.
Berpedoman pada PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, dari anggaran sebesar Rp44.994.306.062,00, hingga akhir tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp38.968.229.297,00 atau sebesar 86,61%.
2. SPM Bidang Kesehatan.
Berpedoman pada PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dari anggaran sebesar Rp7.424.174.950,00, hingga akhir tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp6.656.473.391,00 atau sebesar 89,66%.
3. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Berpedoman pada PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dari anggaran sebesar Rp4.700.180.000,00, hingga akhir tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp4.684.653.855,00 atau sebesar 99,67%.
4. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
Berpedoman pada PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00, hingga akhir tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp13.543.190,00 atau sebesar 90,29%.
5. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dari anggaran sebesar Rp7.391.232.650,00, hingga akhir tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp7.241.143.018,00 atau sebesar 97,97%.
6. SPM Bidang Sosial.
Berpedoman pada PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, dari anggaran sebesar Rp110.000.000,00, hingga akhir tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp109.326.684,00 atau sebesar 99,39%.

Rincian alokasi anggaran dan realisasi Belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum diuraikan lebih lanjut pada **Lampiran 1d**.

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023



IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

III.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 pada tanggal 30 Desember 2023. Peraturan daerah tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023. Pergeseran APBD sebelum perubahan APBD dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali guna mengakomodir kebutuhan SKPD, yang dilakukan dengan melakukan perubahan penjabaran yaitu melalui Peraturan Bupati Merangin Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024 tanggal 18 Maret 2024, Peraturan Bupati Merangin Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024 tanggal 26 April 2024 dan Peraturan Bupati Merangin Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024 tanggal 28 Mei 2024. Perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 pada tanggal 10 Oktober 2024 mengubah masing-masing struktur anggaran. Di samping itu, guna mengakomodir permohonan SKPD, dilakukan perubahan penjabaran setelah perubahan berupa pergeseran anggaran antar jenis belanja melalui Peraturan Bupati Merangin Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 tanggal 25 November 2023.

Perubahan APBD yang dilakukan melalui perubahan maupun pergeseran anggaran tersebut meliputi:

a) Pendapatan

Pendapatan pada perubahan APBD TA 2024 mengalami kenaikan yang semula Rp1.460.785.194.724,00 bertambah sebesar Rp33.030.847.931,00, sehingga pendapatan menjadi Rp1.493.816.042.655,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp93.047.380.568,00 bertambah sebesar Rp7.558.611.825,00 sehingga menjadi Rp100.605.992.393,00, dengan rincian:

a) Pajak Daerah semula sebesar Rp29.980.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.203.000.000,00, sehingga menjadi Rp31.183.000.000,00. Kenaikan target pajak daerah tersebut dilatarbelakangi oleh adanya potensi-potensi pajak daerah yang dimungkinkan untuk didapatkan oleh pemerintah daerah.

b) Retribusi daerah semula sebesar Rp5.959.485.500,00 bertambah sebesar Rp28.302.465.515,00, sehingga menjadi sebesar Rp34.261.951.015,00. Kenaikan ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu adanya kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa pendapatan BLUD dicatat sebagai



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Retribusi Daerah. Dalam Perubahan APBD TA 2024 Pemerintah Kabupaten Merangin mencatat Pendapatan BLUD pada kode rekening Retribusi Daerah, sehingga Pendapatan Retribusi meningkat. Disamping itu, terjadinya peningkatan pendapatan retribusi juga disebabkan oleh adanya potensi-potensi retribusi daerah yang dimungkinkan untuk didapatkan oleh pemerintah daerah.

- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami penurunan, semula sebesar Rp7.777.840.000,00, berkurang sebesar Rp289.603.318,00 sehingga menjadi Rp7.488.236.682,00. Penurunan ini disebabkan adanya perhitungan kembali Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- d) Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan, semula sebesar Rp49.330.055.068,00, berkurang sebesar Rp21.657.250.372,00, sehingga menjadi Rp27.672.804.696,00. Penurunan ini disebabkan oleh adanya realisasi dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan serta perpindahan pencatatan Pendapatan BLUD dari rekening Lain-lain PAD yang Sah ke rekening Retribusi Daerah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer mengalami kenaikan, semula sebesar Rp1.352.318.870.156,00, bertambah sebesar Rp24.685.807.454,00, sehingga menjadi sebesar Rp1.377.004.677.610,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan, semula sebesar Rp1.248.007.104.000,00, bertambah sebesar Rp27.659.427.939,00, sehingga menjadi Rp1.275.666.531.939,00. Kenaikan pendapatan tersebut disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Pusat terhadap transfer alokasi kurang bayar DBH yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024. Selanjutnya, adanya penyaluran Dana TDF ke RKUD yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 362 Tahun 2023 tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir Tahun Anggaran 2023 dan adanya penambahan Insentif Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024.
- b) Pendapatan Transfer antar daerah mengalami penurunan, semula sebesar Rp104.311.766.156,00, berkurang sebesar Rp2.973.620.485,00, sehingga menjadi sebesar Rp101.338.145.671,00. Berkurangnya pendapatan ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Jambi Nomor 156/KEP-GUB/BPKPD-2.1/2024 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi untuk Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan, semula sebesar Rp15.418.944.000,00, bertambah sebesar Rp786.428.652,00, sehingga menjadi sebesar Rp16.205.372.652,00. Kenaikan tersebut pada sektor Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

b) Belanja

Belanja pada Perubahan APBD TA 2024 mengalami kenaikan, semula sebesar Rp1.488.785.194.724,00, bertambah sebesar Rp82.221.763.351,00, sehingga menjadi Rp1.571.006.958.075,00. Bertambahnya belanja disebabkan adanya penyesuaian kebutuhan belanja guna mendanai program dan kegiatan prioritas.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

c) Pembiayaan

Pembiayaan pada Perubahan APBD TA 2024, semula sebesar Rp30.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp49.190.915.420,00 menjadi Rp79.190.915.420,00. Kenaikan tersebut adalah pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Merangin juga melakukan pergeseran anggaran setelah Perubahan APBD TA 2024. Pergeseran anggaran ini tidak menyebabkan perubahan APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pergeseran anggaran dilakukan pada Belanja Daerah yaitu:

- a) Belanja Operasi, semula sebesar Rp1.093.586.238.631,00, berkurang sebesar Rp1.437.907.023,00, sehingga menjadi Rp1.092.148.331.608,00;
- b) Belanja Hibah semula sebesar Rp70.251.668.238,00, bertambah sebesar Rp60.000.000,00, sehingga menjadi Rp70.311.668.238,00;
- c) Belanja Modal semula sebesar Rp196.219.165.641,00, bertambah sebesar Rp1.437.907.023,00, sehingga menjadi Rp197.657.072.664,00.

Kebijakan pergeseran belanja diatas dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan pemerintah pusat terkait Dana BOS serta bentuk dukungan Pemerintah Daerah terkait kebijakan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan seleksi CASN (PNS dan PPPK) serta kebijakan prioritas daerah lainnya.

Alur perubahan APBD Kabupaten Merangin sepanjang tahun 2024 secara rinci disajikan pada **Lampiran 1b**.

Realisasi sasaran kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Merangin selama TA 2024 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut ini:

Tabel III.1. Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin TA 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah		Lebih/(Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	Jumlah	%
I.	Pendapatan Daerah	1.493.816.042.655,00	1.459.275.923.665,51	(34.540.118.989,49)	97,69
I.1	Pendapatan Asli Daerah	100.605.992.393,00	94.830.759.645,51	(5.775.232.747,49)	94,26
I.2	Pendapatan Transfer	1.377.004.677.610,00	1.352.003.997.917,00	(25.000.679.693,00)	98,18
I.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	16.205.372.652,00	12.441.166.103,00	(3.764.206.549,00)	76,77
II.	Belanja Daerah	1.571.006.958.075,00	1.454.773.168.270,96	116.233.789.804,04	92,60
II.1	Belanja Operasi	1.092.148.331.608,00	996.592.669.538,96	95.555.662.069,04	91,25
II.2	Belanja Modal	197.657.072.664,00	193.627.335.532,00	4.029.737.132,00	97,96
II.3	Belanja Tidak Terduga	2.351.193.453,00	52.802.850,00	2.298.390.603,00	2,25
II.4	Belanja Transfer	278.850.360.350,00	264.500.360.350,00	14.350.000.000,00	94,85
	Surplus / (Defisit)	(77.190.915.420,00)	4.502.755.394,55	81.693.670.814,55	105,83
III.	Pembiayaan Daerah				
III.1	Penerimaan Pembiayaan	79.190.915.420,00	79.190.915.420,30	0,30	100,00
III.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00
	Pembiayaan Netto	77.190.915.420,00	77.190.915.420,30	0,30	100,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	81.693.670.814,85	81.693.670.814,85	0,00

Sumber: BPKAD Kab. Merangin

Adapun ikhtisar realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Merangin menurut Urusan dan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 1a**. Penjelasan lebih lanjut dari masing-masing unsur APBD sebagai gambaran capaian kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Merangin selama TA 2024 diuraikan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

III.1.1 Realisasi Pendapatan Daerah

Tabel III.1. memperlihatkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1.459.275.923.665,51, lebih rendah Rp34.540.118.989,49 atau 97,69% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp1.493.816.042.655,00. Kondisi ini merupakan kontribusi dari tidak tercapainya target di sektor Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp5.775.232.747,49 atau 94,26%, sektor Pendapatan Transfer sebesar Rp25.000.679.693,00 atau 98,18% dan sektor Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang terealisasi kurang sebesar Rp3.764.206.549,00 atau sebesar 76,77% dari target yang ditetapkan.

1. Pendapatan Asli Daerah

Perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2020 sampai dengan 2024 secara jelas dapat dilihat pada Tabel III.2. dan Grafik III.1 berikut ini:

Tabel III.2. Perkembangan PAD TA 2020-2024

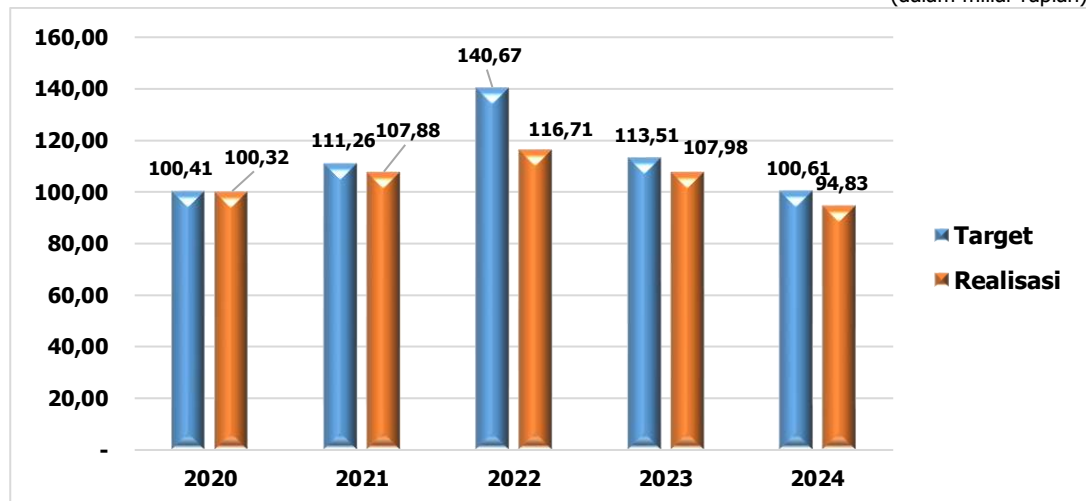
(dalam rupiah)

TA	Target	Realisasi	Perkembangan	
			Target	Realisasi
2020	100.411.729.724,43	100.322.387.750,97	(2.173.191.780,54)	(5.838.582.498,70)
2021	111.262.174.504,00	107.879.827.143,34	10.850.444.779,57	7.557.439.392,37
2022	140.670.249.862,00	116.712.554.237,02	29.408.075.358,00	8.832.727.093,68
2023	113.514.136.051,00	107.976.482.974,79	(27.156.113.811,00)	(8.736.071.262,23)
2024	100.605.992.393,00	94.830.759.645,51	(12.908.143.658,00)	(13.145.723.329,28)

Sumber: BPKAD Kab. Merangin

Grafik III.1. Perkembangan PAD TA 2020-2024

(dalam miliar rupiah)



Sumber: BPKAD Kab. Merangin

Secara keseluruhan dari TA 2020 sampai dengan TA 2022 baik target maupun realisasi PAD Kabupaten Merangin terus menerus mengalami peningkatan, namun pada TA 2023 dan 2024 mengalami penurunan. Penurunan Pendapatan Daerah TA. 2024 lebih disebabkan menurun pendapatan dari Retribusi Daerah yaitu objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, yang disebabkan oleh turunnya penerimaan jasa pelayanan yang bersumber Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/BPJS Kesehatan karena turunnya kelas klaim tagihan BPJS.

Dilihat dari sisi target anggaran, PAD TA 2020 sampai dengan TA 2021 meningkat sebesar Rp10.850.444.779,57 atau 10,81%. Untuk TA 2021 sampai dengan TA 2022 kembali meningkat signifikan sebesar Rp29.408.075.358,00 atau 26,43%. Namun untuk TA 2022 sampai dengan TA 2023, target sektor ini menurun signifikan sebesar Rp27.156.113.811,00



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

atau (19,30%). Sedangkan target TA 2023 sampai dengan TA 2024 kembali menurun cukup signifikan sebesar Rp13.142.973.329,28 atau 11,37%.

Kemudian jika dilihat dari sisi realisasi penerimaan PAD, pada periode TA 2020 sampai dengan TA 2021 meningkat sebesar Rp7.557.439.392,37 atau 7,53%. Begitu pula untuk TA 2021 sampai dengan TA 2022 kembali meningkat sebesar Rp8.832.727.093,68 atau 8,19%. Namun untuk TA 2022 sampai dengan TA 2023 kembali mengalami penurunan sebesar Rp8.736.071.262,23 atau (7,49%). Sedangkan untuk TA 2023 sampai dengan TA 2024 kembali mengalami penurunan sebesar Rp13.145.723.329,28 atau (12,17%).

Penurunan realisasi penerimaan PAD tersebut terjadi pada sektor Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp33.152.001.280,88. Sedangkan sektor lain mengalami peningkatan. Peningkatan pada sektor Pajak Daerah sebesar Rp 1.487.394.390,58, sektor Retribusi Daerah naik sebesar Rp18.299.305.031,67 dan sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan naik sebesar Rp219.578.529,35.

2. Pendapatan Transfer

Perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari pendapatan Transfer dari tahun 2020 sampai dengan 2024 secara rinci dapat dilihat pada Tabel III.3 dan Grafik III.2 berikut ini:

Tabel III.3. Perkembangan Pendapatan Transfer TA 2020-2024

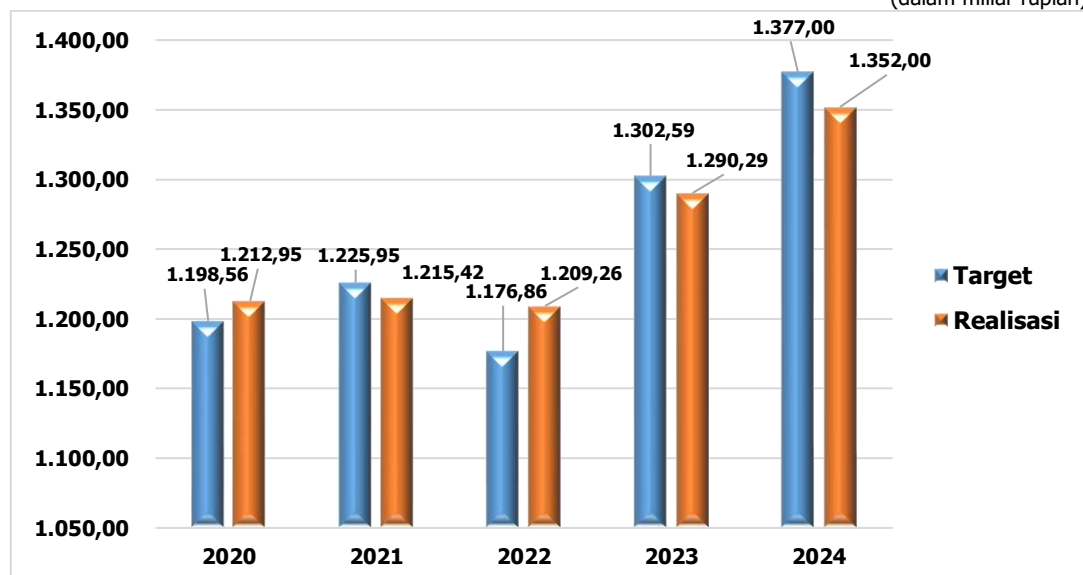
(dalam rupiah)

TA	Target	Realisasi	Perkembangan	
			Target	Realisasi
2020	1.198.556.672.603,00	1.212.946.036.307,04	(161.849.117.222,56)	(122.339.231.179,71)
2021	1.225.952.919.108,00	1.215.423.156.196,00	27.396.246.505,00	2.477.119.888,96
2022	1.176.863.594.307,00	1.209.257.465.659,00	(49.089.324.801,00)	(6.165.690.537,00)
2023	1.302.589.130.079,00	1.290.285.622.944,00	125.725.535.772,00	81.028.157.285,00
2024	1.377.004.677.610,00	1.352.003.997.917,00	74.415.547.531,00	61.718.374.973,00

Sumber: BPKAD Kab. Merangin

Grafik III.2. Perkembangan Pendapatan Transfer TA 2020-2024

(dalam miliar rupiah)



Sumber: BPKAD Kab. Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Dari Tabel III.3 diatas dapat dilihat bahwa dari sisi target, anggaran Pendapatan Transfer TA 2020 hingga TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp27.396.246.505,00 atau 2,29%. Untuk periode TA 2021 hingga TA 2022, pendapatan sektor ini kembali berkurang sebesar Rp49.089.324.801,00 atau (4,00%). Untuk periode TA 2022 sampai dengan TA 2023 kembali meningkat cukup signifikan sebesar Rp125.725.535.772,00 atau 10,68%. Sedangkan periode TA 2023 sampai dengan TA 2024 kembali mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar Rp74.415.547.531,00 atau 5,71%.

Kemudian jika dilihat dari sisi realisasi, anggaran Pendapatan Transfer untuk periode terakhir TA 2020 sampai dengan TA 2021 meningkat sebesar Rp2.477.119.888,96 atau 0,20%. Untuk periode TA 2021 sampai dengan TA 2022, menurun sebesar Rp6.165.690.537,00 atau (0,51%). Namun untuk periode TA 2022 sampai dengan TA 2023 kembali meningkat sebesar Rp81.028.157.285,00 atau 6,70%. Sedangkan periode TA 2023 sampai dengan TA 2024 kembali mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar Rp61.718.374.973,00 atau 4,78%. Peningkatan realisasi penerimaan Pendapatan Transfer TA 2024 dibandingkan TA 2023 bersumber dari selisih penerimaan sektor Transfer Pusat yang meningkat sebesar Rp94.107.712.512,00 atau 7,38% dan Transfer Antar Daerah yang mengalami penurunan sebesar Rp32.389.337.539,00 atau (31,96)%.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada Tabel III.4 dan grafik III.3 berikut ini:

Tabel III.4. Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2020-2024

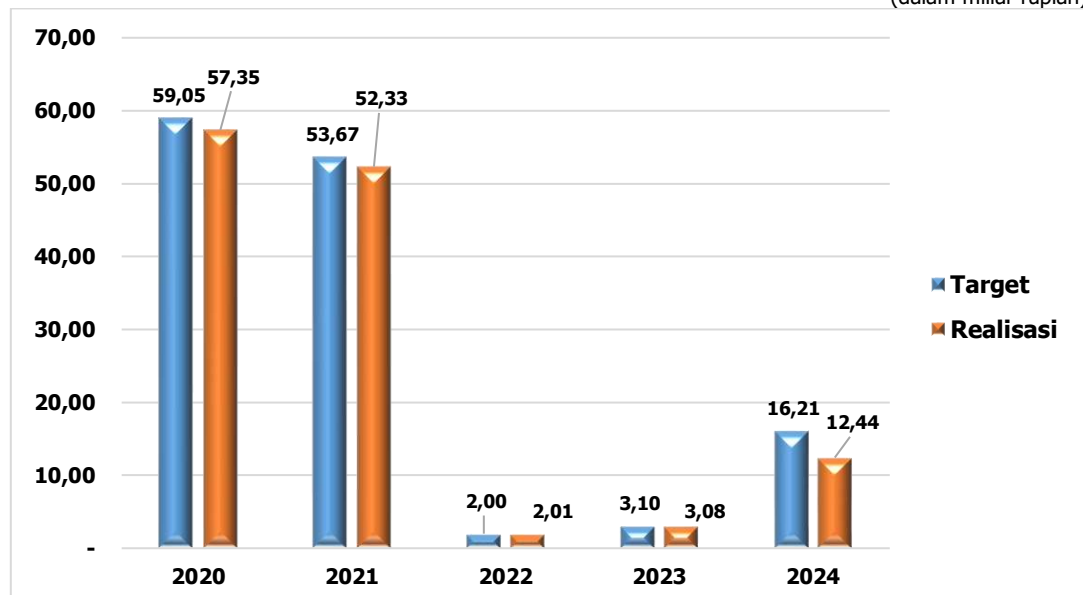
(dalam rupiah)

TA	Target	Realisasi	Perkembangan	
			Target	Realisasi
2020	59.045.999.999,80	57.351.730.000,00	(9.220.711.000,20)	(9.799.861.000,00)
2021	53.669.055.828,00	52.326.232.732,00	(5.376.944.171,80)	(5.025.497.268,00)
2022	2.000.000.000,00	2.005.511.000,00	(51.669.055.828,00)	(50.320.721.732,00)
2023	3.100.000.000,00	3.082.000.000,00	1.100.000.000,00	1.076.489.000,00
2024	16.205.372.652,00	12.441.166.103,00	13.105.372.652,00	9.359.166.103,00

Sumber: BPKAD Kab. Merangin

Grafik III.3. Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2020-2024

(dalam miliar rupiah)



Sumber: BPKAD Kab. Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Dari Tabel III.4 diatas dapat dilihat bahwa dari sisi target, anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2020 sampai dengan TA 2021 menurun sebesar Rp5.376.944.171,80 atau (9,11%) dan periode TA 2021 hingga TA 2022 kembali berkurang sangat signifikan sebesar Rp51.669.055.828,00 atau (96,27%) sebagai dampak perubahan struktur nomenklatur anggaran pendapatan Dana BOS yang semula merupakan komponen dari Pendapatan Hibah menjadi bagian dari pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Pada periode TA 2022 hingga TA 2023, sektor ini meningkat sebesar Rp1.100.000.000,00 atau 55,00%. Sedangkan pada periode TA 2023 hingga TA 2024, sektor ini mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp13.105.372.652,00 atau 422,75%.

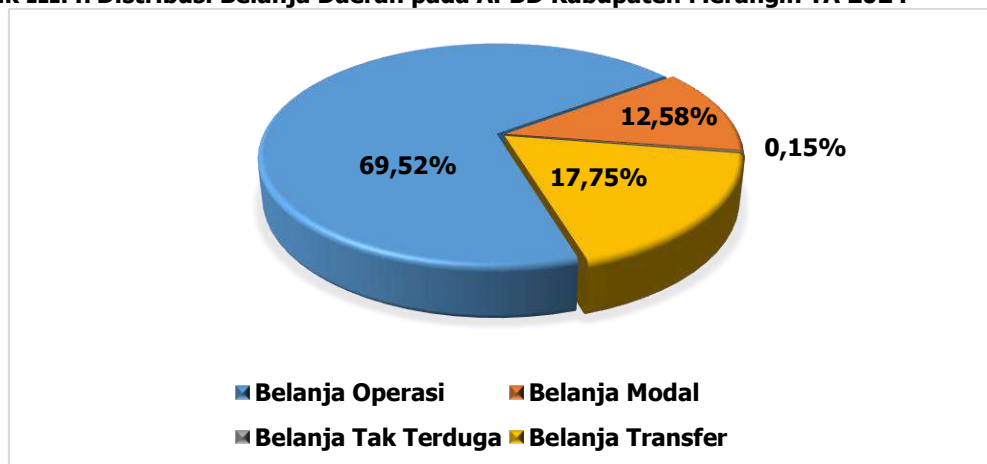
Kemudian jika dilihat dari sisi realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pada periode TA 2020 sampai dengan TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp5.025.497.268,00 atau (8,76%). Selanjutnya pada periode TA 2021 sampai dengan TA 2022 kembali menurun sangat signifikan sebesar Rp50.320.721.732,00 atau (96,17%). Untuk periode TA 2022 hingga TA 2023 meningkat sebesar Rp1.076.489.000,00 atau 53,68%. Sedangkan untuk periode TA 2023 hingga TA 2024 meningkat signifikan sebesar Rp9.359.166.103,00 atau 303,67%.

Peningkatan realisasi di sektor Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2024 disebabkan karena adanya peningkatan dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang pada TA 2023 dianggarkan pada Lain-lain PAD yang Sah. Reklasifikasi akun Pendapatan Dana Kapitasi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pendatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

III.1.2 Realisasi Belanja Daerah

Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi belanja daerah pada TA 2024, Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp1.571.006.958.075,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.454.773.168.270,96 atau 92,60%, sehingga masih terdapat sisa anggaran Belanja Daerah sebesar Rp116.233.789.804,04. Berdasarkan Grafik III.4, terlihat bahwa Belanja Operasi mendapatkan alokasi dana yang lebih besar dibandingkan dengan Belanja Daerah lainnya, yaitu sebesar 69,52% dari total APBD TA 2024.

Grafik III.4. Distribusi Belanja Daerah pada APBD Kabupaten Merangin TA 2024



Sumber: BPKAD Kab. Merangin

Berdasarkan kebijakan belanja daerah serta proporsi masing-masing belanja dapat dilihat bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Merangin terhadap pelayanan publik belum optimal. Hal ini terlihat dari persentase Belanja Operasi yang lebih besar jika dibandingkan dengan



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

komponen Belanja Daerah yang lain. Namun, Jika dilihat dari capaian kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan pada Bab. II, telah dapat membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Merangin terus berupaya maksimal dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja guna pencapaian standar pelayanan minimum kepada masyarakat.

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp1.092.148.331.608,00, dengan realisasi sebesar Rp996.592.669.538,96 atau sebesar 91,25%. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi ini terdiri atas:

Tabel III.5. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Alokasi 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1.	Belanja Pegawai	645.496.758.754,00	591.839.454.626,00	91,69	502.287.898.830,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	376.339.904.616,00	336.876.303.542,96	89,51	320.864.442.422,63
3.	Belanja Bunga	-	-	-	1.714.899.127,00
4.	Belanja Hibah	70.311.668.238,00	67.876.911.370,00	96,54	63.373.651.467,00
Jumlah		1.092.148.331.608,00	996.592.669.538,96	91,25	888.240.891.846,63

Sumber: BPKAD Kab. Merangin

Belanja Modal dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik dan program pembangunan daerah. Pada TA 2024, Belanja Modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp197.657.072.664,00 dan terealisasi sebesar Rp193.627.335.532,00 atau 97,96%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.6. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Alokasi 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1.	Belanja Modal Tanah	8.500.000,00	-	0,00	34.410.489,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.616.430.243,00	43.409.708.584,00	95,16	30.982.388.967,30
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.886.290.570,00	62.655.071.883,00	98,07	79.711.057.271,00
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	83.845.423.776,00	83.315.634.140,00	99,37	61.398.124.429,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.865.428.075,00	3.837.445.925,00	99,28	4.459.950.991,00
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	435.000.000,00	409.475.000,00	94,13	138.905.000,00
Jumlah		197.657.072.664,00	193.627.335.532,00	97,96	176.724.837.147,30

Sumber: BPKAD Kab. Merangin

Belanja Tidak Terduga TA 2024 dialokasikan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp2.351.193.453,00. Dari alokasi tersebut, hingga akhir tahun anggaran dapat direalisasikan sebesar Rp52.802.850,00 atau 2,25% untuk penanggulangan bencana banjir dan longsor Desa Pulau Bayur Kecamatan Pamenang Selatan berdasarkan SK Bupati Nomor 183/BPKAD/2024 tanggal 4 April 2024 tentang penggunaan Belanja Tidak Terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan bencana alam di wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2024.

Di samping itu, pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga dialokasikan anggaran Belanja Transfer kepada Pemerintah Desa dengan total anggaran sebesar Rp278.850.360.350,00 dan terealisasi sebesar Rp264.500.360.350,00 atau 94,85%. Belanja ini terdiri dari:

1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan dengan alokasi sebesar Rp3.911.348.550,00 dan terealisasi 100,00% berupa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
2. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya/ Bantuan Keuangan sebesar Rp274.939.011.800,00 dan terealisasi 94,78% atau Rp260.589.011.800,00 berupa transfer Dana Desa dari Pemerintah Pusat, Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jambi.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Urusan pemerintahan daerah dan bidang kerja pada Pemerintah Kabupaten Merangin dilaksanakan oleh 55 (lima puluh lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 55 (lima puluh lima) SKPD tersebut menjalankan fungsi Entitas Akuntansi yang menyajikan Laporan Keuangan SKPD. Sedangkan BPKAD selain menjalankan fungsi Akuntansi juga bertindak selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) yang menjalankan fungsi Entitas Pelaporan dengan mengkonsolidasikan seluruh Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan BUMD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Merangin.

III.1.3 Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah sebagai pos digunakan untuk menutup defisit anggaran melalui pemanfaatan surplus anggaran. Dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp79.190.915.420,00 yang berasal dari SiLPA TA 2023, dapat terealisasi sebesar Rp79.190.915.420,30 atau sebesar 100,00%. Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00, terealisasi sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 100,00%.

Dari realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan tersebut diperoleh Pembiayaan Netto sebesar Rp77.190.915.420,30, meningkat sebesar Rp61.335.444.014,86 atau sebesar 386,84% dari realisasi 2023 sebesar Rp15.855.471.405,44.

Tabel III.7. Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Target 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1.	Penerimaan Pembiayaan	79.190.915.420,00	79.190.915.420,30	100,00	82.250.272.316,44
2.	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	66.394.800.911,00
Jumlah		77.190.915.420,00	77.190.915.420,30	100,00	15.855.471.405,44

Sumber: BPKAD Kab. Merangin

III.2 Capaian Kinerja Program dan Keuangan Pemerintah

Gambaran kinerja anggaran dan realisasi masing-masing program yang diukur berdasarkan nilai anggaran yang direncanakan dan realisasinya diuraikan sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Total anggaran Belanja yang digunakan untuk membiayai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah sebesar Rp885.718.052.952,00, terealisasi sebesar Rp814.205.175.613,96 atau sebesar 91,93% dengan program prioritas sebagai berikut:

1) Bidang Pendidikan

Belanja Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp483.362.114.940,00, terealisasi sebesar Rp440.799.792.453,00 atau sebesar 91,19% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.8. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.496.000,00	76.045.800,00	92,18
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	334.880.035.056,00	301.000.498.947,00	89,88
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.996.650,00	29.238.650,00	97,47
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	426.790.500,00	364.661.675,00	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.500.000,00	47.187.000,00	85,44
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	611.934.000,00	572.474.518,00	99,34



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.000.000,00	76.000.000,00	100,00
8.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	96.557.753.787,00	87.825.838.010,00	90,96
9.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	31.864.645.249,00	29.443.664.235,00	92,40
10.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	14.555.592.348,00	17.589.860.515,00	120,85
11.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.024.371.350,00	3.762.918.103,00	93,50
12.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	125.000.000,00	0,00	-
13.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	80.000.000,00	11.405.000,00	81,35
Jumlah		483.362.114.940,00	440.799.792.453,00	91,19

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

2) Bidang Kesehatan

Belanja Bidang Kesehatan dari anggaran sebesar Rp248.558.499.272,00, terealisasi sebesar Rp222.322.804.107,96 atau sebesar 89,44% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.9. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	141.999.200,00	141.100.950,00	99,37
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	103.769.329.609,00	99.324.120.159,00	95,72
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	54.999.750,00	54.635.910,00	99,34
4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5.370.000,00	5.362.300,00	99,86
5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	49.425.500,00	98,85
6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	312.699.100,00	304.030.464,00	97,23
7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	480.000.000,00	478.200.000,00	99,63
8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	920.750.335,00	906.802.994,00	98,49
9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.125.000,00	100.653.284,00	99,53
10.	Peningkatan Pelayanan BLUD	51.218.769.672,00	42.445.839.871,00	82,87
11.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	23.515.559.741,00	20.962.930.441,00	89,14
12.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	64.536.383.786,00	54.238.821.285,96	84,04
13.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	127.000.000,00	124.288.200,00	97,86
14.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	159.899.779,00	156.411.000,00	97,82
15.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	31.000.000,00	30.844.000,00	99,50
16.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.459.443.450,00	1.372.096.549,00	94,02
17.	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	83.729.700,00	83.552.100,00	99,79
18.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	269.386.900,00	269.386.900,00	100,00
19.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	191.713.750,00	191.635.250,00	99,96



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
20.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	12.034.500,00	80,23
21.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.114.339.500,00	1.070.632.450,00	96,08
Jumlah		248.558.499.272,00	222.322.804.107,96	89,44

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Belanja pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari anggaran sebesar Rp114.324.198.220,00, terealisasi sebesar Rp113.218.835.120,00 atau sebesar 99,03% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.10. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.500.000,00	57.247.500,00	99,56
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.471.411.724,00	9.027.936.156,00	95,32
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	75.620.000,00	75.090.000,00	99,30
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	912.134.500,00	908.818.240,00	99,64
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.340.000,00	52.090.000,00	99,52
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.500.000,00	231.432.060,00	89,88
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	511.000.000,00	507.304.235,00	99,28
8.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.425.784.000,00	1.410.770.084,00	98,95
9.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.067.954.000,00	5.002.152.370,00	98,70
10.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.389.100.000,00	2.379.641.455,00	99,60
11.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.311.080.000,00	2.305.012.400,00	99,74
12.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	837.740.000,00	835.988.390,00	99,79
13.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	6.600.284.000,00	6.562.511.572,00	99,43
14.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	14.654.658.996,00	14.633.480.512,00	99,86
15.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	68.688.891.000,00	68.219.886.543,00	99,32
16.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	298.604.500,00	298.587.377,00	99,99
17.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	62.970.000,00	62.966.952,00	100,00
18.	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	77.025.500,00	76.941.489,00	99,89
19.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	455.788.000,00	454.804.260,00	99,78



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
20.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	86.826.000,00	86.450.525,00	99,57
21.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	29.986.000,00	29.723.000,00	99,12
Jumlah		114.324.198.220,00	113.218.835.120,00	99,03

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

4) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Belanja pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dari anggaran sebesar Rp12.692.993.529,00, terealisasi sebesar Rp12.361.282.792,00 atau sebesar 97,39% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.11. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.813.000,00	43.634.150,00	65,31
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.565.241.629,00	3.375.293.426,00	94,67
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.550.000,00	20.426.500,00	99,40
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	108.510.000,00	81.856.000,00	75,44
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	407.893.250,00	387.252.772,00	94,94
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.830.000,00	45.615.000,00	99,53
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.758.473.650,00	5.730.167.294,00	99,51
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	343.860.000,00	337.590.800,00	98,18
9.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.000.000,00	4.614.000,00	92,28
10.	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	10.000.000,00	8.929.190,00	89,29
11.	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	352.760.000,00	345.164.860,00	97,85
12.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	40.000.000,00	38.379.600,00	95,95
13.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	647.000.000,00	633.435.250,00	97,90
14.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	60.000.000,00	58.204.000,00	97,01
15.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.261.062.000,00	1.250.719.950,00	99,18
Jumlah		12.692.993.529,00	12.361.282.792,00	97,39

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

5) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Belanja pada Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dari anggaran sebesar Rp20.977.072.542,00, terealisasi sebesar Rp20.076.639.605,00 atau sebesar 95,71% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.12. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.939.450,00	62.784.450,00	87,27
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.292.547.474,00	8.683.160.984,00	93,44
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	77.200.000,00	76.978.200,00	99,71



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	825.440.826,00	821.687.750,00	99,55
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.980.000,00	219.085.000,00	97,38
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	449.490.000,00	390.657.366,00	86,91
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	749.920.000,00	724.195.650,00	96,57
8.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.651.115.750,00	4.559.771.021,00	98,04
9.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	26.835.000,00	26.104.000,00	97,28
10.	Investigasi Kejadian Kebakaran	2.925.000,00	2.925.000,00	100,00
11.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	40.647.500,00	40.193.000,00	98,88
12.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	611.928.192,00	594.463.214,00	97,15
13.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	294.637.000,00	285.711.500,00	96,97
14.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	40.000.000,00	39.165.100,00	97,91
15.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.357.905.350,00	3.300.416.170,00	98,29
16.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	227.561.000,00	217.359.000,00	95,52
17.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	32.000.000,00	31.982.200,00	99,94
Jumlah		20.977.072.542,00	20.076.639.605,00	95,71

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

6) Bidang Sosial

Belanja Bidang Sosial dengan anggaran sebesar Rp5.803.174.449,00, terealisasi sebesar Rp5.425.821.536,00 atau 93,50% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.13. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Sosial Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.955.000,00	64.955.000,00	100,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.845.992.349,00	3.501.513.999,00	91,04
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.964.500,00	20.814.500,00	99,28
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	317.400.000,00	317.354.700,00	99,99
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	453.721.600,00	452.602.612,00	99,75
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.900.000,00	248.993.800,00	99,64
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.271.000,00	77.830.980,00	89,18
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	418.300.000,00	410.188.600,00	98,06
9.	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	80.000.000,00	71.011.700,00	88,76
10.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	39.119.400,00	97,80
11.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	70.000.000,00	69.453.084,00	99,22
12.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000,00	87.690.061,00	97,43
13.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	40.000.000,00	39.873.600,00	99,68
14.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	24.670.000,00	24.419.500,00	98,98
Jumlah		5.803.174.449,00	5.425.821.536,00	93,50



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Total anggaran Belanja yang digunakan untuk membiayai Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah sebesar Rp87.030.963.520,00 terealisasi sebesar Rp81.016.718.676,00 atau sebesar 93,09% dengan sasaran dan prioritas sebagai berikut:

1) Bidang Tenaga Kerja

Belanja Bidang Tenaga Kerja dari anggaran sebesar Rp123.069.200,00, terealisasi sebesar Rp114.984.400,00 atau 93,43% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.14. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	53.507.000,00	51.657.000,00	96,54
2.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	18.685.500,00	17.701.000,00	94,73
3.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	15.870.000,00	14.692.000,00	92,58
4.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	35.006.700,00	30.934.400,00	88,37
Jumlah		123.069.200,00	114.984.400,00	93,43

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Belanja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari anggaran sebesar Rp756.430.000,00, terealisasi sebesar Rp565.473.600,00 atau 74,76% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.15. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	0,00	-
2.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000,00	74.640.200,00	99,52
3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000,00	44.875.200,00	99,72
4.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	305.910.000,00	156.833.600,00	51,27
5.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	119.070.000,00	111.425.600,00	93,58
6.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	18.193.000,00	90,97
7.	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000,00	68.785.500,00	98,27
8.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	91.450.000,00	90.720.500,00	99,20
Jumlah		756.430.000,00	565.473.600,00	74,56

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

3) Bidang Pangan

Belanja Bidang Pangan dari anggaran sebesar Rp3.063.738.797,00, terealisasi sebesar Rp2.852.222.549,00 atau 93,10% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.16. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pangan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.810.000,00	33.272.000,00	98,41
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.910.688.797,00	1.806.708.828,00	94,56
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.000.000,00	44.856.000,00	99,68
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	204.050.000,00	203.740.930,00	99,85
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.500.000,00	7.490.000,00	99,87
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313.450.000,00	306.881.845,00	97,90
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.200.000,00	65.114.800,00	96,90
9.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	145.300.000,00	109.470.650,00	75,34
10.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	120.000.000,00	93.864.000,00	78,22
11.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	25.000.000,00	19.670.000,00	78,68
12.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	113.740.000,00	97.182.400,00	85,44
13.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	60.971.096,00	81,29
Jumlah		3.063.738.797,00	2.852.222.549,00	93,10

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

4) Bidang Pertanahan

Belanja Bidang Lingkungan Hidup dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00, terealisasi sebesar Rp79.599.750,00 atau 79,60% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.17. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.004.000,00	19.155.200,00	63,84
2.	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	34.996.000,00	32.895.800,00	94,00
3.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00	27.548.750,00	78,71
Jumlah		100.000.000,00	79.599.750,00	79,60

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

5) Bidang Lingkungan Hidup

Belanja Bidang Lingkungan Hidup dari anggaran sebesar Rp16.210.018.182,00, terealisasi sebesar Rp14.697.723.757,00 atau 90,67% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel III.18. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.776.180,00	38.761.970,00	99,96
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.169.586.133,00	3.885.104.320,00	93,18
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	427.886.300,00	425.356.050,00	99,41
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.180.000,00	59.488.000,00	97,23
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	639.891.260,00	634.827.160,00	99,21
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500.850.000,00	478.608.200,00	95,56
7.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	1.004.320.000,00	993.302.250,00	98,90
8.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.368.364.510,00	538.555.804,00	39,36
9.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	518.176.000,00	175.173.260,00	33,81
10.	Penyimpanan sementara Limbah B3	9.000.000,00	8.712.000,00	96,80
11.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00	59.655.000,00	99,43
12.	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	21.998.900,00	21.586.300,00	98,12
13.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.487.679,00	40.642.629,00	97,96
14.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.527.000,00	38.330.749,00	99,49
15.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	29.995.280,00	29.241.280,00	97,49
16.	Pengelolaan Sampah	7.279.978.940,00	7.270.378.785,00	99,87
Jumlah		16.210.018.182,00	14.697.723.757,00	90,67

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

6) Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Belanja Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dari anggaran sebesar Rp5.924.862.250,00, terealisasi sebesar Rp5.592.198.226,00 atau sebesar 94,39% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.19. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.361.000,00	27.531.200,00	97,07
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.878.237.250,00	2.629.857.509,00	91,37
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130.000.000,00	127.088.500,00	97,76
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	271.482.000,00	269.072.081,00	99,11
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	307.500.000,00	304.050.000,00	98,88
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	557.956.918,00	529.303.470,00	94,86
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	211.567.432,00	207.251.000,00	97,96
8.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	932.500.000,00	902.658.608,00	96,80
9.	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	3.900.000,00	3.850.000,00	98,72
10.	Pelayanan Pencatatan Sipil	314.550.000,00	304.648.974,00	96,85
11.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	23.000.000,00	22.949.200,00	99,78



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
12.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	245.807.650,00	244.322.684,00	99,40
13.	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20.000.000,00	19.615.000,00	98,08
Jumlah		5.924.862.250,00	5.592.198.226,00	94,39

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

7) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dari anggaran sebesar Rp9.235.515.353,00, terealisasi sebesar Rp8.848.407.480,00 atau sebesar 95,81% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.20. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.330.000,00	57.330.000,00	100,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.473.818.403,00	3.220.703.008,00	92,71
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	402.796.300,00	401.259.612,00	99,62
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.709.000,00	120.034.000,00	98,62
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	388.607.000,00	377.704.713,00	97,19
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.300.000,00	136.450.000,00	95,89
8.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	30.000.000,00	19.224.662,00	64,08
9.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.762.854.650,00	2.707.595.092,00	98,00
10.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.846.500.000,00	1.798.506.393,00	97,40
Jumlah		9.235.515.353,00	8.848.407.480,00	95,81

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

8) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Belanja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari anggaran sebesar Rp14.092.252.823,00, terealisasi sebesar Rp12.362.828.987,00 atau sebesar 87,73% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.21. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.100.000,00	21.100.000,00	100,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.710.284.823,00	5.251.504.965,00	91,97
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	192.080.000,00	181.959.980,00	94,73
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.100.000,00	125.113.574,00	83,35
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	351.000.000,00	332.111.000,00	94,62
8.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	44.459.677,00	88,92



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
9.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.688.400.000,00	1.224.203.372,00	72,51
10.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.236.400.000,00	1.236.351.100,00	100,00
11.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.258.438.000,00	943.012.200,00	74,94
12.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.943.800.000,00	2.662.613.119,00	90,45
13.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	445.650.000,00	295.400.000,00	66,29
Jumlah		14.092.252.823,00	12.362.828.987,00	87,73

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

9) Bidang Perhubungan

Belanja pada bidang perhubungan dari anggaran sebesar Rp4.236.051.894,00, terealisasi sebesar Rp4.080.445.009,00 atau sebesar 96,33% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.22. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.675.000,00	16.542.000,00	99,20
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.963.059.610,00	2.833.449.642,00	95,63
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95.440.000,00	94.346.560,00	98,85
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	241.703.700,00	241.149.995,00	99,77
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.105.000,00	60.290.000,00	98,67
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.746.000,00	132.048.169,00	88,77
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.670.000,00	203.311.600,00	97,90
8.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	50.010.000,00	49.882.290,00	99,74
9.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	134.346.000,00	133.782.900,00	99,58
10.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	78.096.584,00	77.026.780,00	98,63
11.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	149.200.000,00	148.615.073,00	99,61
12.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	78.000.000,00	78.000.000,00	100,00
13.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
Jumlah		4.236.051.894,00	4.080.445.009,00	96,33

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

10) Bidang Komunikasi dan Informatika

Belanja Bidang Komunikasi dan Informatika dari anggaran sebesar Rp5.749.384.217,00, terealisasi sebesar Rp5.580.197.950,00 atau 97,06% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel III.23. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.500.000,00	35.498.950,00	100,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.307.398.217,00	3.173.569.092,00	95,95
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.684.000,00	13.684.000,00	100,00
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.340.000,00	34.998.300,00	99,03
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	233.165.000,00	233.145.200,00	99,99
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.610.000,00	164.797.500,00	99,51
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.116.000,00	103.999.108,00	81,81
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.470.000,00	127.675.100,00	96,38
9.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.417.501.000,00	1.415.887.000,00	99,89
10.	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	281.600.000,00	276.943.700,00	98,35
Jumlah		5.749.384.217,00	5.580.197.950,00	97,06

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

11) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Belanja Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dari anggaran sebesar Rp5.542.496.190,00, terealisasi sebesar Rp5.211.202.289,00 atau sebesar 94,02% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.24. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.500.000,00	36.961.000,00	98,56
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.735.299.240,00	3.468.325.672,00	92,85
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	3.600.000,00	72,00
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.810.000,00	61.965.000,00	97,11
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	288.649.800,00	285.691.234,00	98,98
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.196.000,00	256.750.000,00	98,68
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233.800.000,00	203.860.199,00	87,19
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	303.730.000,00	297.221.834,00	97,86
9.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	20.000.000,00	19.876.500,00	99,38
10.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
11.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	235.494.000,00	229.794.000,00	97,58
12.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	339.017.150,00	327.156.850,00	96,50
Jumlah		5.542.496.190,00	5.211.202.289,00	94,02

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

12) Bidang Penanaman Modal

Belanja Bidang Penanaman Modal dari anggaran sebesar Rp6.705.589.337,00, terealisasi sebesar Rp6.469.721.608,00 atau sebesar 96,48% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel III.25. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.442.950,00	21.442.950,00	100,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.528.009.757,00	4.437.985.279,00	98,01
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	426.593.800,00	421.517.593,00	98,81
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.020.000,00	80.060.335,00	98,82
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	648.755.080,00	616.140.640,00	94,97
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.600.000,00	56.095.600,00	91,06
8.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	29.999.900,00	18.176.650,00	60,59
9.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	45.510.000,00	19.837.700,00	43,59
10.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	77.511.950,00	71.879.961,00	92,73
11.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	660.645.900,00	604.045.900,00	91,43
12.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	116.500.000,00	114.539.000,00	98,32
Jumlah		6.705.589.337,00	6.469.721.608,00	96,48

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

13) Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Belanja Bidang Kepemudaan dan Olahraga dari anggaran sebesar Rp9.051.077.700,00, terealisasi sebesar Rp8.927.159.906,00 atau 98,63% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.26. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	119.923.000,00	65.422.400,00	54,55
2.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
3.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.650.000.000,00	5.624.839.257,00	99,55
4.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	842.100.000,00	816.025.049,00	96,90
5.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2.046.554.900,00	2.039.338.400,00	99,65
6.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	42.499.800,00	31.534.800,00	74,20
7.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
Jumlah		9.051.077.700,00	8.927.159.906,00	98,63

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

14) Bidang Statistik

Belanja Bidang Statistik dari anggaran sebesar Rp40.000.000,00, terealisasi sebesar Rp39.838.900,00 atau sebesar 99,60% pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

15) Bidang Persandian

Belanja Bidang Persandian dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00 terealisasi sebesar Rp24.996.063,00 atau sebesar 99,98% pada Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

16) Bidang Kebudayaan

Belanja Bidang Kebudayaan dari anggaran sebesar Rp2.199.612.700,00 terealisasi sebesar Rp2.117.781.391,00 atau sebesar 96,28%.

Tabel III.27. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	659.927.700,00	659.867.700,00	99,99
2.	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	320.800.000,00	320.540.000,00	99,92
3.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1.218.885.000,00	1.137.373.691,00	93,31
Jumlah		2.199.612.700,00	2.117.781.391,00	96,28

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

17) Bidang Perpustakaan

Belanja Bidang Perpustakaan dari anggaran sebesar Rp645.749.150,00, terealisasi sebesar Rp505.909.272,00 atau sebesar 78,34% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.28. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	249.999.750,00	237.269.210,00	94,91
2.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	349.999.650,00	235.816.062,00	67,38
3.	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	45.749.750,00	32.824.000,00	71,75
Jumlah		645.749.150,00	505.909.272,00	78,34

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

18) Bidang Kearsipan

Belanja Bidang Kearsipan dari anggaran sebesar Rp3.330.115.727,00, terealisasi sebesar Rp2.946.027.539,00 atau 88,47% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.29. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.999.250,00	42.999.250,00	100,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.560.714.962,00	2.285.928.797,00	89,27
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.158.600,00	5.895.000,00	58,03
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.680.000,00	28.560.000,00	99,58
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	196.004.000,00	191.987.669,00	97,95
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000,00	19.780.000,00	98,90
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	241.199.715,00	213.341.985,00	88,45



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.360.400,00	44.649.500,00	88,66
9.	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	119.999.500,00	78.603.588,00	65,50
10.	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	19.999.550,00	11.415.550,00	57,08
11.	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	19.999.950,00	10.299.700,00	51,50
12.	Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	19.999.800,00	12.566.500,00	62,83
Jumlah		3.330.115.727,00	2.946.027.539,00	88,47

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

Anggaran Belanja yang dialokasikan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan adalah sebesar Rp59.620.329.467,00 dan terealisasi sebesar Rp53.169.077.887,00 atau sebesar 89,18% dengan rincian sebagai berikut:

1) Bidang Kelautan dan Perikanan

Belanja Bidang Kelautan dan Perikanan dari anggaran sebesar Rp4.749.547.250,00 terealisasi sebesar Rp4.017.953.199,00 atau sebesar 84,60% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.30. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.634.000,00	27.634.000,00	100,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.598.672.250,00	2.270.081.434,00	87,36
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	220.467.500,00	220.467.500,00	100,00
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	210.000.000,00	209.774.000,00	99,89
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	420.374.000,00	414.760.765,00	98,66
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.400.000,00	51.543.000,00	93,04
7.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	171.134.000,00	170.296.800,00	99,51
8.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	764.204.000,00	386.524.200,00	50,58
9.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	9.030.000,00	4.800.000,00	53,16
10.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	18.513.000,00	8.443.000,00	45,61
11.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	254.118.500,00	253.628.500,00	99,81
Jumlah		4.749.547.250,00	4.017.953.199,00	84,60

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

2) Bidang Pariwisata

Belanja Bidang Pariwisata dari anggaran sebesar Rp10.932.333.374,00, terealisasi sebesar Rp9.950.629.436,00 atau 91,02% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel III.31. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.466.000,00	37.141.000,00	87,46
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.672.764.574,00	3.911.975.256,00	83,72
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	495.747.550,00	472.097.704,00	95,23
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	539.455.000,00	537.729.000,00	99,68
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	357.148.250,00	352.411.784,00	98,67
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.870.000,00	130.096.000,00	85,10
7.	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.803.382.000,00	2.766.936.728,00	98,70
8.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.441.913.000,00	1.325.232.774,00	91,91
9.	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	31.087.000,00	29.553.190,00	95,07
10.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	330.000.000,00	327.734.000,00	99,31
11.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	65.500.000,00	59.722.000,00	91,18
Jumlah		10.932.333.374,00	9.950.629.436,00	91,02

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

3) Bidang Pertanian

Belanja Bidang Pertanian dari anggaran sebesar Rp37.685.239.593,00, terealisasi sebesar Rp33.398.571.609,00 atau sebesar 88,63% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.32. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.357.000,00	95.884.500,00	99,51
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.197.511.594,00	18.752.323.630,00	88,46
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	0,00	-
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	641.924.000,00	640.998.413,00	99,86
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	106.880.000,00	103.715.000,00	97,04
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.306.749.500,00	1.245.736.496,00	95,33
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.650.000,00	171.448.500,00	94,38
9.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.553.827.000,00	769.311.800,00	49,51
10.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	392.539.999,00	371.005.800,00	94,51
11.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	426.095.000,00	424.265.000,00	99,57
12.	Pengembangan Prasarana Pertanian	24.708.000,00	23.958.000,00	96,96
13.	Pembangunan Prasarana Pertanian	9.230.826.500,00	8.322.310.542,00	90,16
14.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	762.300.000,00	745.401.928,00	97,78
15.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
16.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.093.000,00	12.043.000,00	99,59
17.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.714.278.000,00	1.702.669.000,00	99,32
Jumlah		37.685.239.593,00	33.398.571.609,00	88,63

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

4) Bidang Perdagangan

Belanja Bidang Perdagangan dari anggaran sebesar Rp468.520.000,00 terealisasi sebesar Rp414.629.266,00 atau sebesar 88,50% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.33. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perdagangan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	85.000.000,00	84.790.000,00	99,75
2.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	33.520.000,00	31.385.000,00	93,63
3.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	60.000.000,00	59.610.366,00	99,35
4.	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	290.000.000,00	238.843.900,00	82,36
Jumlah		468.520.000,00	414.629.266,00	88,50

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

5) Bidang Perindustrian

Belanja Bidang Perindustrian dari anggaran sebesar Rp5.779.689.000,00, terealisasi sebesar Rp5.382.669.627,00 atau sebesar 93,13%.

Tabel III.34. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perindustrian Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	5.739.689.000,00	5.348.300.627,00	93,18
2.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	15.464.000,00	77,32
3.	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	18.905.000,00	94,53
Jumlah		5.779.689.000,00	5.382.669.627,00	93,13

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

6) Bidang Transmigrasi

Belanja Bidang Transmigrasi dari anggaran sebesar Rp5.000.250,00, terealisasi sebesar Rp4.624.750,00 atau 92,49% pada Program Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Anggaran Belanja yang dialokasikan untuk Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan adalah sebesar Rp91.987.568.767,00 dan terealisasi sebesar Rp86.531.244.372,00 atau sebesar 94,07% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

1) Sekretariat Daerah

Belanja Sekretariat Daerah dari anggaran sebesar Rp42.011.495.015,00, terealisasi sebesar Rp40.151.482.154,00 atau 95,57% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.35. Kinerja Anggaran dan Realisasi Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2024

(dalam rupiah)				
No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.900.000,00	84.868.900,00	99,96
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.965.702.581,00	13.870.992.623,00	92,69
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	261.410.000,00	261.371.304,00	99,99
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	316.649.000,00	305.665.250,00	96,53
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.784.161.750,00	1.764.312.375,00	98,89
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.689.009.000,00	1.670.880.100,00	98,93
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.157.425.814,00	5.906.171.296,00	95,92
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.301.854.500,00	2.267.288.456,00	98,50
9.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	779.480.070,00	525.712.087,00	67,44
10.	Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah	1.822.502.300,00	1.792.988.500,00	98,38
11.	Penataan Organisasi	420.000.000,00	419.175.610,00	99,80
12.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.750.000.000,00	2.729.914.064,00	99,27
13.	Administrasi Tata Pemerintahan	613.000.000,00	603.909.825,00	98,52
14.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	6.095.400.000,00	6.011.015.377,00	98,62
15.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	570.000.000,00	567.825.500,00	99,62
16.	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	190.000.000,00	188.813.400,00	99,38
17.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	380.000.000,00	375.108.092,00	98,71
18.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	200.000.000,00	196.165.495,00	98,08
19.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	440.000.000,00	424.336.900,00	96,44
20.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	190.000.000,00	184.967.000,00	97,35
Jumlah		42.011.495.015,00	40.151.482.154,00	95,57

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

2) Sekretariat DPRD

Belanja Sekretariat DPRD dari anggaran sebesar Rp49.976.073.752,00, terealisasi sebesar Rp46.379.762.218,00 atau sebesar 92,80% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.36. Kinerja Anggaran dan Realisasi Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Tahun 2024

(dalam rupiah)				
No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.708.000,00	64.538.000,00	82,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.288.011.313,00	3.545.485.659,00	82,68
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	326.308.000,00	167.938.500,00	51,47
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.200.000,00	34.980.000,00	63,37
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.859.289.248,00	1.714.737.795,00	92,23
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.721.669.125,00	1.702.530.000,00	98,89
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.549.611.075,00	5.057.550.958,00	91,13
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.432.650.000,00	1.212.755.991,00	84,65
9.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	17.898.926.541,00	17.516.010.027,00	97,86
10.	Layanan Administrasi DPRD	714.489.600,00	429.654.100,00	60,13
11.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	253.823.000,00	248.221.200,00	97,79
12.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	143.111.500,00	36.515.500,00	25,52
13.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	329.495.000,00	153.375.000,00	46,55



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
14.	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.771.594.000,00	2.159.648.439,00	77,92
15.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	547.835.000,00	465.474.083,00	84,97
16.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	72.504.000,00	71.299.280,00	98,34
17.	Pembahasan Kerja Sama Daerah	56.264.000,00	0,00	-
18.	Fasilitasi Tugas DPRD	11.876.584.350,00	11.799.047.686,00	99,35
Jumlah		49.976.073.752,00	46.379.762.218,00	92,80

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Anggaran Belanja yang dialokasikan untuk Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan adalah sebesar Rp327.375.050.155,00 dan terealisasi sebesar Rp307.304.828.656,00 atau sebesar 93,87% dengan rincian sebagai berikut:

1) Bidang Perencanaan

Belanja Bidang Perencanaan dari anggaran sebesar Rp9.904.607.478,00, terealisasi sebesar Rp9.452.340.401,00 atau 95,43% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.37. Kinerja Anggaran dan Realisasi Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.533.000,00	61.253.210,00	99,55
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.387.324.318,00	4.189.363.833,00	95,49
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60.328.500,00	57.152.500,00	94,74
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	233.603.500,00	191.004.445,00	81,76
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	480.488.000,00	467.816.205,00	97,36
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.270.000,00	174.868.000,00	99,20
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	873.522.160,00	748.940.463,00	85,74
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	504.348.000,00	482.494.950,00	95,67
9.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.064.737.500,00	1.051.324.929,00	98,74
10.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	230.822.500,00	222.265.596,00	96,29
11.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	881.630.000,00	879.969.650,00	99,81
12.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	665.000.000,00	642.533.678,00	96,62
13.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	285.000.000,00	283.352.942,00	99,42
Jumlah		9.904.607.478,00	9.452.340.401,00	95,43

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

2) Bidang Keuangan

Belanja Bidang Keuangan dari anggaran sebesar Rp305.487.573.208,00, terealisasi sebesar Rp287.382.838.546,00 atau sebesar 94,07% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.38. Kinerja Anggaran dan Realisasi Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	57.725.000,00	46.160.000,00	79,97
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	299.800.000,00	284.651.012,00	94,95
3.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.220.153.229,00	9.556.799.456,00	93,51



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	897.550.502,00	890.472.745,00	99,21
5.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.379.362.700,00	1.280.228.267,00	92,81
6.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	695.500.000,00	678.240.190,00	97,52
7.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.172.325.000,00	1.131.082.156,00	96,48
8.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.071.295.000,00	1.684.154.308,00	81,31
9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.218.400.000,00	1.212.357.334,00	99,50
10.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.895.690.000,00	1.805.641.000,00	95,25
11.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.631.801.326,00	1.617.181.546,00	99,10
12.	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	529.619.000,00	525.649.299,00	99,25
13.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	281.201.553.803,00	264.553.163.200,00	94,08
14.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.093.452.148,00	2.016.518.533,00	96,33
15.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123.345.500,00	100.539.500,00	81,51
Jumlah		305.487.573.208,00	287.382.838.546,00	94,07

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

3) Bidang Kepegawaian

Belanja Bidang Kepegawaian dari anggaran sebesar Rp8.173.986.728,00, realisasi sebesar Rp6.974.175.243,00 atau sebesar 85,32% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.39. Kinerja Anggaran dan Realisasi Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.893.000,00	33.893.000,00	100,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.459.396.728,00	4.148.159.581,00	93,02
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.800.000,00	37.800.000,00	100,00
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	394.998.000,00	391.552.155,00	99,13
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	231.420.000,00	230.452.000,00	99,58
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	351.594.000,00	266.387.460,00	75,77
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.750.000,00	253.192.200,00	97,10
9.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.032.635.000,00	701.914.966,00	67,97
10.	Mutasi dan Promosi ASN	899.000.000,00	438.597.760,00	48,79
11.	Pengembangan Kompetensi ASN	342.500.000,00	342.445.693,00	99,98
12.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	120.000.000,00	119.780.428,00	99,82
Jumlah		8.173.986.728,00	6.974.175.243,00	85,32

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

4) Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Belanja Bidang Pendidikan dan Pelatihan dari anggaran sebesar Rp353.877.000,00, terealisasi sebesar Rp349.201.909,00 atau sebesar 98,68% pada Program Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

5) Bidang Penelitian dan Pengembangan

Belanja Bidang Penelitian dan Pengembangan dari anggaran sebesar Rp3.455.005.741,00, terealisasi sebesar Rp3.146.272.557,00 atau sebesar 91,06% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.40. Kinerja Anggaran dan Realisasi Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.567.000,00	22.431.700,00	99,40
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.407.825.741,00	2.126.382.493,00	88,31
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.172.000,00	120.191.061,00	98,38
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.900.000,00	70.410.000,00	99,31
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.641.000,00	116.145.897,00	86,26
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.400.000,00	157.010.677,00	97,28
7.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	45.400.000,00	45.201.350,00	99,56
8.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	150.800.000,00	150.690.277,00	99,93
9.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	45.400.000,00	45.057.200,00	99,24
10.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	293.900.000,00	292.751.902,00	99,61
Jumlah		3.455.005.741,00	3.146.272.557,00	91,06

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Anggaran Belanja yang dialokasikan untuk Pengawasan Urusan Pemerintahan adalah sebesar Rp16.111.854.811,00 dan terealisasi sebesar Rp15.056.534.550,00 atau sebesar 93,45% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.41. Kinerja Anggaran dan Realisasi Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000,00	69.372.000,00	99,10
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.981.102.910,00	6.748.407.421,00	96,67
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.808.000,00	98,08
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	866.720.000,00	864.489.817,00	99,74
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.179.896.200,00	1.153.889.772,00	97,80
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.584.828.000,00	1.479.335.000,00	93,34
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	634.000.000,00	551.224.377,00	86,94
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.136.092.500,00	1.111.053.924,00	97,80
9.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.047.289.201,00	1.683.395.079,00	82,23
10.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	438.515.000,00	384.922.869,00	87,78
11.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	382.750.000,00	333.895.707,00	87,24
12.	Pendampingan dan Asistensi	780.661.000,00	666.740.584,00	85,41
Jumlah		16.111.854.811,00	15.056.534.550,00	93,45

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

g. Unsur Kewilayahan

Anggaran Belanja yang dialokasikan untuk Unsur Kewilayahan Bidang Kecamatan adalah sebesar Rp63.236.066.891,00 dan terealisasi sebesar Rp58.037.826.043,00 atau sebesar 91,78% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel III.42. Kinerja Anggaran dan Realisasi Unsur Kewilayahan Bidang Kecamatan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	161.561.400,00	142.876.550,00	88,43
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.035.897.990,00	39.673.093.240,00	92,19
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.221.850,00	16.721.850,00	91,77
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130.516.000,00	105.316.000,00	80,69
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.541.430.400,00	2.331.349.230,00	91,73
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	255.730.000,00	223.818.000,00	87,52
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.959.302.230,00	2.893.308.431,00	97,77
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	900.110.389,00	791.903.642,00	87,98
9.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	851.439.000,00	826.365.000,00	97,06
10.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	47.697.750,00	37.295.350,00	78,19
11.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
12.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	612.930.200,00	590.589.700,00	96,36
13.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9.451.762.682,00	8.773.244.260,00	92,82
14.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	366.792.150,00	294.503.600,00	80,29
15.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	5.000.000,00	4.450.000,00	89,00
16.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	77.329.250,00	65.996.250,00	85,34
17.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.817.845.600,00	1.264.494.940,00	69,56
Jumlah		63.236.066.891,00	58.037.826.043,00	91,78

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

h. Unsur Pemerintahan Umum

Anggaran Belanja yang dialokasikan untuk Unsur Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebesar Rp39.927.071.512,00 dan terealisasi sebesar Rp39.451.762.473,00 atau sebesar 98,81% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.43. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.615.600,00	33.715.600,00	97,40
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.756.712.712,00	2.484.737.271,00	90,13
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	435.269.750,00	431.521.410,00	99,14
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	597.892.250,00	572.680.000,00	95,78
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295.350.000,00	293.905.142,00	99,51
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.000.000,00	58.000.000,00	79,45
8.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	649.063.250,00	635.130.950,00	97,85
9.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	34.476.667.950,00	34.438.727.850,00	99,89



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
10.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	25.000.000,00	20.882.000,00	83,53
11.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	90.000.000,00	84.341.000,00	93,71
12.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	468.500.000,00	373.121.250,00	79,64
Jumlah		39.927.071.512,00	39.451.762.473,00	98,81

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

III.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan TA 2024, yaitu:

1. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dalam menyusun Analisis Beban Kerja dan target SKPD;
2. Kualitas dan profesionalisme SDM aparatur masih perlu ditingkatkan;
3. Kelembagaan perangkat daerah yang belum ramping struktur dan kaya fungsi;
4. Kapasitas keuangan daerah yang belum optimal;
5. Belum optimalnya pengelolaan aset;
6. Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah;
7. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Sehubungan dengan hambatan-hambatan tersebut, langkah-langkah antisipatif yang dilakukan untuk menunjang pencapaian kinerja diantaranya adalah:

1. Memperkuat pengawasan internal melalui pemanfaatan teknologi serta mengembangkan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan kebijakan KDH serta tugas pokok dan fungsi SKPD;
2. Melaksanakan program peningkatan kualitas dan kapasitas SDM aparatur secara berkelanjutan sesuai perkembangan zaman dan mengimplementasikan sistem penilaian kinerja yang transparan untuk meningkatkan kompetensi dan motivasi SDM aparatur;
3. Melakukan penataan struktur organisasi untuk mengeliminasi redundansi dan meningkatkan efisiensi operasional dengan peran dan tanggung jawab yang jelas;
4. Mengidentifikasi sumber pendapatan baru dan meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran untuk memaksimalkan pendapatan dan penggunaan anggaran daerah;
5. Mengimplementasikan sistem manajemen aset terpadu dan melakukan penatausahaan aset secara berkala untuk memaksimalkan nilai dan produktivitas aset daerah;
6. Membentuk tim hukum yang berkualitas dalam menyusun dan mengkaji ulang peraturan daerah dengan mengintegrasikan masukan dari konsultasi publik; dan
7. Mengimplementasikan sistem yang terintegrasi dengan target capaian tindak lanjut yang jelas untuk memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti.

III.4 Kewajiban Penganggaran Tahun Berikutnya

Beberapa kewajiban Pemerintah Kabupaten Merangin yang memerlukan ketersediaan dana di tahun anggaran 2025, diantaranya adalah:

1. Pembayaran JKK 4% atas Tunjangan Profesi Guru PNSD tahun 2023 sebesar Rp2.563.453.399,00 dan tahun 2024 sebesar Rp2.628.251.002,00, sebagaimana surat BPJS Kesehatan Nomor 356/II-08/2025, tanggal 21 Februari 2025, Hal Tagihan Kekurangan 4% Iuran Wajib Tambahan Penghasilan Guru Kab. Merangin Tahun 2023 dan 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

2. Pembayaran JKK 4% atas Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNSD Semester II tahun 2024 sebesar Rp34.740.000,00.
3. Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD dan PPPK atas Gaji ke-13 dan THR tahun 2024 sebesar Rp10.350.170.000,00.
4. Pembayaran Tunjangan Khusus Guru PNSD dan PPPK bulan November dan Desember 2024 sebesar Rp605.106.600,00.
5. Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNSD Semester II 2024 sebesar Rp903.240.000,00.
6. Pembayaran gaji pegawai dan TPP bagi PPK BLUD Non PNS sebesar Rp761.850.000,00 pada RSUD Kol. Abundjani Bangko.
7. Pembayaran jasa pelayanan yang bersumber dari Dana Non Kapitasi BPJS pada Puskesmas se-Kabupaten Merangin tahun 2022 s.d. 2024 sebesar Rp1.147.396.480,00.
8. Pembayaran jasa Tenaga Kesehatan (Bidan Pendidik) tahun 2024 sebesar Rp16.500.000,00.
9. Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bulan November dan Desember 2024 sebesar Rp17.493.840,00.
10. Pembayaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Kelurahan periode tahun 2017-2021 dan Bantuan Keuangan Alat Berat/Alat Pendukung Lainnya periode tahun 2017-2019 sebesar Rp1.557.055.984,00.
11. Pengembalian dana BOP PAUD Swasta yang tutup di tahun 2024 ke RKUN sebesar Rp8.100.000,00.
12. Penganggaran kembali saldo Dana BOS 2023 yang disetorkan ke RKUD di tahun 2024 atas temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Merangin terkait realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp171.604.800,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

B A B
IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pedoman dan standar bagi daerah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Kebijakan akuntansi juga merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan akuntansi. Kebijakan akuntansi ini merupakan dokumen yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah dan wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi pada PPKD maupun SKPD dan juga pihak Perencana termasuk Tim Anggaran pada Pemerintah Daerah.

Pengungkapan pada kebijakan akuntansi dengan cara mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya. Hal ini secara material memengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin terdiri dari 7 (tujuh) laporan yang dibagi menjadi Laporan Pelaksanaan Anggaran, Laporan Finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Pelaksanaan Anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), sedangkan Laporan Finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin merupakan gabungan dari Laporan Keuangan seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin.

IV.1 Pengguna dan Kebutuhan Informasi Para Pengguna

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

- masyarakat;
- wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
- pemerintah.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, terhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*). Selain itu, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

IV.2 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah dan Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi di lingkungan pemerintah Pemerintah Kabupaten Merangin berjumlah 56 entitas yang terdiri dari 54 (lima puluh empat) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 1 (satu) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan 1 (satu) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD lingkup SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berupa Laporan Keuangan SKPD sehubungan dengan pengelolaan anggaran/barang di tahun berkenaan.

Fungsi entitas pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Merangin dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku SKPKD yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan Keuangan dari seluruh SKPD selanjutnya disampaikan kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dikompilasi menjadi LKPD.

Untuk Tahun Anggaran 2024, entitas Pemerintah Kabupaten Merangin yang dicakup dalam laporan keuangan ini meliputi:

- a. Entitas Akuntansi yang terdiri 55 (lima puluh lima) OPD yang terdiri atas 54 (lima puluh empat) SKPD dan 1 (satu) SKPKD yaitu:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2. Dinas Kesehatan	21. Dinas Peternakan dan Perkebunan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	23. Sekretariat Daerah
5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	24. Inspektorat Daerah
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Satuan Polisi Pamong Praja	26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
9. Dinas Ketahanan Pangan	28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
10. Dinas Lingkungan Hidup	29. Badan Penelitian dan Pengembangan
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30. Sekretariat DPRD
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	31. Kantor Camat Bangko
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	32. Kantor Camat Tabir
14. Dinas Perhubungan	33. Kantor Camat Pamenang
15. Dinas Komunikasi dan Informatika	34. Kantor Camat Pamenang Barat
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	35. Kantor Camat Tabir Ulu
17. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	36. Kantor Camat Tabir Selatan
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	37. Kantor Camat Tabir Timur
19. Dinas Perikanan	38. Kantor Camat Tabir Ilir
	39. Kantor Camat Tabir Barat
	40. Kantor Camat Margo Tabir
	41. Kantor Camat Tabir Lintas
	42. Kantor Camat Renah Pamenang



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

43. Kantor Camat Pamenang Selatan	50. Kantor Camat Pangkalan Jambu
44. Kantor Camat Muara Siau	51. Kantor Camat Batang Masumai
45. Kantor Camat Tiang Pumpung	52. Kantor Camat Bangko Barat
46. Kantor Camat Jangkat	53. Kantor Camat Lembah Masurai
47. Kantor Camat Jangkat Timur	54. Kantor Camat Nalo Tantan
48. Kantor Camat Sungai Manau	55. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
49. Kantor Camat Renah Pembarap	

- b. Entitas BLUD: RSUD Kol. Abundjani Bangko yang merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan.

Laporan keuangan ini tidak mencakup entitas Pemerintah Pusat dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat non APBD dan BUMD disajikan dalam lampiran sebagai pelengkap laporan keuangan.

IV.3 Asumsi Dasar Akuntansi

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Merangin adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

1. Kemandirian Entitas;

Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidak terlaksananya program yang telah ditetapkan.

2. Kesenambungan Entitas;

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek..

3. Keterukuran dalam Satuan Uang (*monetary measurement*);

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

IV.4 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam penyusunan laporan keuangan dengan basis akrual, Pemerintah Kabupaten Merangin mengacu pada delapan prinsip yaitu:

1. Basis akuntansi;

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk LO, Neraca dan LPE. Ciri dari laporan basis akrual adalah adanya Laporan Operasional yang mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Sedangkan untuk anggaran yang disusun dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin menggunakan basis kas, LRA disusun berdasarkan basis kas berarti



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Neraca yang berbasis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Prinsip nilai perolehan (*historical cost principle*);
Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih objektif dan dapat diverifikasi. Akan tetapi, bila tidak terdapat nilai perolehan, maka aset atau kewajiban terkait dapat menggunakan nilai wajar. Aset Pemerintah Kabupaten Merangin dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Kemudian, utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.
3. Prinsip realisasi (*realization principle*);
Realisasi adalah pendapatan basis kas yang tersedia dan telah diotorisasikan melalui APBD selama satu tahun anggaran yang akan digunakan untuk belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud, sedangkan pendapatan dan belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.
4. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over-form principle*);
Informasi akuntansi dimaksud untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya saja. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.
5. Prinsip periodisasi (*periodicity principle*);
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan.
6. Prinsip konsistensi (*consistency principle*);
Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dapat dipakai diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure principle*);
Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.
8. Prinsip penyajian wajar (*fair presentation principle*);
Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan yang mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

IV.5 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia selaku bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

IV.6 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta seluruh Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, utamanya terkait ketentuan yang mengatur tentang perubahan nomenklatur Pajak Daerah dengan dibentuknya Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagai salah satu sektor pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Serta dalam upaya memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan Dapat Dibandingkan sebagai salah satu prasyarat normatif yang diperlukan agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, maka pada penyajian saldo awal 2024 dilakukan penyesuaian kode rekening Pajak Daerah yang semula berturut-turut Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Sejenisnya, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan menjadi PBJT-Jasa Perhotelan, PBJT-Makanan dan/atau Minuman, PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan dan PBJT-Tenaga Listrik.

IV.6.1 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Laporan Keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Khusus untuk Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya dihasilkan dan disusun oleh SKPKD yang menjalankan fungsi perbendaharaan. Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih tidak dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi hanya merupakan laporan yang disusun oleh BUD. Laporan keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

konsolidasi disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Contoh akun timbal balik (*reciprocal account*) antara lain sisa uang muka kerja yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran sampai akhir periode akuntansi.

Entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada dibawahnya. Setiap unit Pemerintah yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi setiap bulan menyiapkan laporan Neraca saldo dan LRA serta secara periodik wajib menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Prosedur Konsolidasi

Entitas pelaporan dalam hal ini Pemerintah kabupaten Merangin menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada dibawahnya yaitu setiap SKPD atau SKPKD.

Konsolidasi yang dimaksud dalam kebijakan akuntansi ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik. Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengeliminasi akun-akun yang timbal balik, maka nama-nama akun yang timbal balik, dan estimasi besaran jumlah dalam akun yang timbal balik dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) digabungkan pada SKPD/lembaga teknis Pemerintah Kabupaten Merangin yang secara organisatoris membawahnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- Laporan realisasi anggaran BLUD digabungkan secara bruto kepada laporan realisasi anggaran SKPD/lembaga teknis Pemerintah kabupaten Merangin yang secara organisatoris membawahnya.
- Pemerintah kabupaten Merangin memiliki badan usaha milik daerah (BUMD) di mana laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Pemerintah kabupaten Merangin. Laporan keuangan BUMD hanya dilampirkan dalam laporan keuangan konsolidasian Pemerintah kabupaten Merangin.

IV.6.2 Kebijakan Akuntansi Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan disajikan sebagai aset lancar. Uang dalam pengelolaan pemerintah disajikan sebagai aset non lancar apabila uang tersebut tidak memenuhi definisi aset lancar seperti uang pemerintah yang penggunaannya dibatasi, atau sengaja dialokasikan untuk kebutuhan khusus.

Kas Pemerintah Daerah

Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah meliputi rupiah dan valuta asing. Uang daerah terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Pengelola Uang Daerah meliputi (i) Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), (ii) Bendahara Penerimaan, dan (iii) Bendahara Pengeluaran.

Kas Pemerintah di Luar Pengelolaan Bendahara Umum Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Kas pemerintah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh selain Bendahara Umum Daerah meliputi:

- a. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan bukan bagian dari BUD;
- b. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, apabila Bendahara Pengeluaran bukan bagian dari BUD;
- c. Saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan; dan
- d. Saldo kas di BLUD

Transaksi penerimaan kas dapat berupa:

1. Transaksi Pendapatan dan Belanja daerah
2. Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
3. Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Transfer
4. Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Lainnya/Non Anggaran

Pengakuan

1. Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:
Kas tersebut diterima di RKUD; atau Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau Pengesahan atas penerimaan pendapatan.
2. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja diakui pada saat:
Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari RKUD.
3. Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:
Kas telah diterima di RKUD sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali;
4. Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:
Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan;

Pengukuran

Penerimaan kas dari pendapatan maupun pengeluaran kas akibat transaksi belanja dan pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal kas yaitu sebesar nilai rupiah yang diterima/disahkan, atau yang dikeluarkan dari rekening Kas Daerah. Penerimaan/ pengeluaran kas dalam mata uang asing dan diterima/dikeluarkan dalam akun bank dalam mata uang asing, maka jumlah penerimaan/pengeluaran dicatat dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Apabila penerimaan/ pengeluaran kas dalam mata uang asing dan diterima/dikeluarkan dalam akun bank bermata uang rupiah, maka jumlah diterima/dikeluarkan dalam mata uang asing tersebut dikonversi menjadi rupiah sesuai kurs transaksi.

IV.6.3 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang dikelompokkan menjadi piutang yang ditimbulkan oleh pungutan pendapatan daerah, piutang yang ditimbulkan oleh transfer antar pemerintahan, piutang yang timbul karena kerugian daerah, dan piutang yang ditimbulkan oleh perikatan daerah.

1. Piutang Yang Ditimbulkan Oleh Pungutan Pendapatan Daerah
 1. Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku untuk pajak daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
 2. Pengakuan piutang pajak terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar surat ketetapan tentang piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya surat ketetapan pajak Daerah (SKPD) tentang piutang.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

3. Piutang Retribusi adalah imbalan yang dipungut pemerintah daerah dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan, misalnya retribusi pelayanan kesehatan, retribusi parkir di tepi jalan umum, dan izin trayek, Piutang retribusi timbul jika hingga tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD, misalnya surat penagihan.
2. Piutang Yang Ditimbulkan Oleh Transfer Antar Pemerintahan
 1. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum ditransfer pemerintah Pusat/Provinsi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan/Gubernur (DBH-Provinsi) dan apabila Alokasi Definitif belum ditransfer hingga akhir tahun anggaran maka pemerintah daerah mencatatnya sebagai piutang daerah setelah dokumen sumber resmi pemerintah pusat/pemerintah provinsi atas Dana Bagi Hasil yang terutang diterbitkan.
 2. Disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.
 3. Dana Alokasi umum (DAU) adalah merupakan dana dengan kepastian penerimaan oleh daerah paling tinggi. Besaran alokasi DAU untuk Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Pada akhir tahun masih ada jumlah yang belum ditransfer disebabkan adanya perbedaan antara Peraturan Presiden tentang DAU dengan realisasi dalam satu tahun anggaran, maka Pemkab dapat mencatatnya sebagai Piutang DAU Pemerintah Pusat setelah ada dokumen sumber resmi Pemerintah Pusat atas Dana Alokasi Umum yang terutang diterbitkan.
 4. Penyajian Piutang DAU sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.
 5. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui apabila timbul piutang kepada pemerintah pusat sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak bisa diakui sebagai piutang bila kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK). Piutang muncul apabila daerah sudah menyelesaikan surat pertanggungjawaban tetapi pemerintah pusat sampai dengan akhir tahun terlambat melakukan transfer.
 6. Piutang DAK disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.
 7. Piutang transfer lainnya diakui apabila: 1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima setelah dokumen sumber resmi Pemerintah Pusat atas Dana transfer yang terutang diterbitkan; 2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat
3. Piutang Yang Timbul Karena Kerugian Daerah
 1. Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah Merupakan piutang dari transaksi seperti bendahara atau pegawai Negeri yang karena perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, sehingga yang bersangkutan wajib mengganti kerugian tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

2. Bendahara dan PNS yang bersangkutan harus ditetapkan berdasar ketetapan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dari Pejabat yang berwenang.
3. TPTGR yang jatuh tempo atau yang akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan akan disajikan tersendiri sebagai aset lainnya. Sedangkan TPTGR yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan mendatang disajikan dalam aset lancar atas Tuntutan Ganti Rugi atas kekayaan Daerah.
4. Piutang TPTGR diakui pada saat ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau adanya penetapan dari pejabat yang berwenang.
5. Piutang TPTGR dicatat sebesar surat ketetapan yang dikeluarkan instansi yang berwenang.
4. Piutang yang ditimbulkan oleh perikatan daerah
 1. Piutang karena pemberian pinjaman timbul sehubungan dengan adanya pinjaman yang diberikan pemerintah kabupaten Merangin kepada pemerintah daerah lainnya, perorangan, BUMD, perusahaan swasta, atau organisasi lainnya. Jenis-jenis pinjaman yang diberikan oleh pemerintah daerah bermacam-macam seperti piutang antar pemerintah daerah, piutang Rekening Dana Investasi (RDI), piutang rekening Pinjaman Daerah (RPD), dan piutang karena dana bergulir.
 2. Piutang yang timbul dari tagihan atas pemberian pinjaman harus diklasifikasikan berdasarkan periode jatuh temponya sehingga dapat dibedakan yang harus diklasifikasikan pada aset lancar maupun aset non lancar. Tagihan pemberian pinjaman yang belum dilunasi sampai dengan akhir tahun anggaran dan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya dikelompokkan sebagai aset lancar.
 3. Piutang karena Jual Beli timbul akibat terjadinya pemindahtanganan barang milik daerah melalui penjualan secara kredit/angsuran. Timbulnya piutang atau hak untuk menagih pada akhir periode pelaporan, harus didukung dengan bukti yang sah mengenai pemindahtanganan barang milik daerah. Penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran (misalnya penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas), pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi. Timbulnya tagihan tersebut harus didukung dengan bukti – bukti pelelangan atau bukti lain yang sah yang menyatakan bahwa barang milik daerah tersebut dipindahtangankan secara cicilan/angsuran.
 4. Piutang karena Kemitraan timbul apabila terdapat hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran per 31 Desember belum dilunasi oleh mitra kerjasamanya, piutang ini dicatat sebagai aset di neraca pemerintah.
 5. Piutang pemerintah Kabupaten Merangin juga dapat timbul sehubungan dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Merangin kepada pihak lain, misalnya pemberian konsesi kepada perusahaan untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam. Pemberian jasa juga dapat berupa penyewaan gedung kantor, rumah dinas, dan alat-alat berat milik pemerintah daerah.
 6. Hak pemerintah kabupaten Merangin atas imbalan yang dapat dinilai dengan uang dan per 31 Desember belum diterima dari pihak terkait tersebut diakui sebagai piutang dan disajikan di neraca. Piutang tersebut dikelompokkan ke dalam Piutang lain - lain.

Pengakuan

Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi atau surat penagihan setelah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Pengukuran

1. Piutang pajak dan piutang retribusi diakui sebesar nilai yang tercantum dalam SKPD/SKRD, surat keputusan penagihan yang bersangkutan.
2. Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah.
3. Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
4. Piutang yang timbul dari kemitraan diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian.
5. Piutang yang timbul dari pemberian fasilitas/jasa diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah kabupaten Merangin pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
6. Piutang Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.
7. Piutang Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat.
8. Piutang Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
9. Piutang TP/TGR disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Penyisihan Piutang

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksikan berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.

Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang tersaji di neraca. Penyisihan piutang tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan. Pemilihan dasar penyisihan ini hendaknya didasarkan pada hasil analisis atas data, pengalaman historis, maupun kebijakan dan upaya yang ditempuh pemerintah dalam menetapkan dan menagih piutang.

Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyisihan piutang adalah jumlah yang disisihkan sebagai piutang tak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai yang dapat ditagih. Untuk kelengkapan informasi, jumlah piutang asal (nominal), jumlah penyisihan dan dasar penyisihannya harus dijelaskan dalam CaLK.

Perhitungan Penyisihan Piutang

Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net realizable value*) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo piutang dan upaya penagihan. Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada akhir periode pelaporan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

sebagai beban kerugian piutang. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Tabel IV.1. Kualitas, Kriteria dan Besaran Penyisihan Piutang

No.	Kelompok Piutang	Kualitas	Besaran	Kriteria
1.	Piutang yang ditimbulkan oleh pungutan pendapatan daerah			
	a. Pajak Daerah	Lancar	0,5%	- Umur piutang 0 s.d 1 tahun; dan/atau - Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
		Kurang Lancar	10%	- Umur piutang lebih dari 1 s.d. 2 tahun; dan/atau - Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
		Diragukan	50%	- Umur piutang lebih dari 2 s.d 5 tahun; dan/atau - Wajib pajak mengalami kesulitan Likuiditas.
		Macet	100%	- Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau - Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau - Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau - Wajib pajak mengalami musibah (<i>force majeure</i>).
	b. Retribusi Daerah	Lancar	0,5%	Belum dilakukan pelunasan pada 0-1 bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
		Kurang Lancar	10%	Belum dilakukan pelunasan pada lebih dari 1-3 bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
		Diragukan	50%	Belum dilakukan pelunasan pada lebih dari 3-12 bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
		Macet	100%	Belum dilakukan pelunasan hingga lebih dari 12 bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
2.	Piutang yang timbul karena kerugian daerah			
		Lancar	0,5%	Belum dilakukan pelunasan hingga tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
		Kurang Lancar	10%	Belum dilakukan pelunasan pada lebih dari 1-12 bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
		Diragukan	50%	Belum dilakukan pelunasan pada lebih dari 12-24 bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
		Macet	100%	Belum dilakukan pelunasan hingga lebih dari 24 bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan atau telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
3.	Piutang yang ditimbulkan oleh perikatan daerah			
		Lancar	0,5%	Belum dilakukan pelunasan hingga tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
		Kurang Lancar	10%	Belum dilakukan pelunasan pada lebih dari 1-3 tahun sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
		Diragukan	50%	Belum dilakukan pelunasan pada lebih dari 3-5 tahun sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
		Macet	100%	Belum dilakukan pelunasan hingga lebih dari 5 tahun sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan atau telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Sumber: Peraturan Bupati Merangin Nomor 100/2022

Penghapusan Piutang

Piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah kadaluarsa dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang. Penghapusan secara bersyarat



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih daerah. Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah. Penghapusan piutang hanya dapat dilakukan setelah piutang daerah diurus secara optimal. PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang namun :

1. Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya
2. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit di selesaikan.

Penghapusan secara bersyarat dan mutlak, sepanjang menyangkut piutang daerah ditetapkan oleh :

1. Bupati Merangin untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-
2. Bupati Merangin dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,-

Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat dan mutlak diusulkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara.

Penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :

1. Dalam hal piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau;
2. Dalam hal piutang adalah selain piutang ganti rugi, setelah ditetapkan dengan PSBDT.

Penghapusan secara mutlak atas piutang daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :

1. Diajukan setelah lewat 2 tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang.
2. Penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat, pejabat berwenang.

Penghapusan Piutang Secara Mutlak

Penghapusan mutlak piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapusan mutlak mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusbukuan). Piutang adalah hak, maka hapusnya hak tagih berarti menghapus hak/piutang dari neraca. Penghapusan mutlak piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka satuan kerja yang bersangkutan tidak diperkenankan menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Secara umum kriteria penghapusan mutlak piutang sebagai berikut:

1. Penghapusan mutlak sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
2. Penghapusan mutlak untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, rescheduling dan penurunan tarif bunga kredit.
3. Penghapusan mutlak setelah semua cara gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual jaminan dilelang.
4. Penghapusan mutlak secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Penyajian dan Pengungkapan

Informasi yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan terkait dengan piutang meliputi:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, pengukuran, dan perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih;
2. Rincian jenis dan saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di pemda atau sudah diserahkan penagihannya kepada KPKNL;
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada;
5. Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan;
6. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan;
7. Dalam catatan atas laporan keuangan dijelaskan dasar pertimbangan penghapus bersyarat dan jumlahnya.

IV.6.4 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah piutang yang timbul akibat pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang hingga akhir periode pelaporan belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah Daerah.

Pengakuan

Pencatatan Beban Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, di mana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya dan selisihnya direklasifikasi menjadi Beban Dibayar Dimuka.

Pengukuran

Beban Dibayar Dimuka dicatat sebesar jumlah kas dikeluarkan dan belum diterima/dinikmati oleh pemerintah daerah.

Pengungkapan

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena segera akan menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

IV.6.5 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan adalah merupakan aset berwujud yang meliputi: 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah; 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi; 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya berpindah.

Beban Persediaan diakui dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Pengakuan beban persediaan dengan pendekatan beban, adalah setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban persediaan digunakan untuk persediaan yang sistem pencatatan persediaannya menggunakan metode periodik.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

2. Pengakuan beban persediaan dengan pendekatan aset adalah pengakuan beban persediaan diakui setelah dipakai atau dikonsumsi. Digunakan untuk persediaan-persediaan yang nilainya material dan maksud penggunaannya untuk selama satu periode dan/atau untuk maksud berjaga-jaga.
3. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki pada kegiatan swakelola tidak dimasukkan sebagai persediaan dalam kelompok aset lancar, tetapi dibebankan kepada rekening aset tetap yaitu Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, dan rusak akan tetapi tidak dapat ditelusuri. Jika selisih persediaan maksimal 5% (lima persen) dari jumlah pembelian, maka selisih persediaan tersebut diperlakukan sebagai beban, sedangkan jika selisih persediaan lebih dari 5% (lima persen), maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Penyajian

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian yang meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh (sepanjang dapat diidentifikasi biaya lain-lain dapat menambah biaya perolehan);
2. Biaya standar harga pokok produksi apabila diperoleh dapat dengan memproduksi sendiri, meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya *overhead* tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan; dan
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Pencatatan

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode periodik/metode fisik yaitu metode di mana fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode periodik dapat digunakan untuk jenis persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan seperti persediaan ATK, peralatan listrik, peralatan kebersihan dan lain lain.
2. Metode perpetual adalah metode di mana fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD.
3. Catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai perunit sesuai dengan metode yang digunakan.

Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar :

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan, Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh (sepanjang dapat diidentifikasi biaya lain-lain dapat menambah biaya perolehan);



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

2. Biaya standar harga pokok produksi apabila diperoleh dapat dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan; dan

3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Dalam sistem pencatatan persediaan yang dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Dalam sistem pencatatan dengan Metode perpetual Persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar yaitu nilai pasar yang berlaku pada saat penilaian.

Pengungkapan

Informasi yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut seperti barang dan perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

IV.6.6 Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi pemerintah terdiri dari:

1. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan serta dimiliki selama 3 (tiga) bulan sampai 12 bulan terhitung mulai tanggal pelaporan. Investasi jangka pendek dapat berupa deposito, Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan investasi jangka pendek lainnya.
2. Investasi jangka panjang yaitu investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan terdiri:
 - a. Investasi non permanen yaitu investasi jangka panjang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan yang diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, terdiri dari pemberian pinjaman kepada perusahaan negara/daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah, investasi dalam bentuk Dana bergulir, penyertaan modal dalam proyek pembangunan (yang menghasilkan) dan investasi permanen lainnya.
 - b. Investasi permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan yang terdiri dari penyertaan modal pemerintah kepada perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara beserta badan hukum lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan pada masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Pengakuan

Pengakuan kas menjadi investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria:

1. Kemungkinan manfaat ekonomi, manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi dapat diperoleh; dan
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran kas atas investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar nilai perolehan. Nilai Perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi ditambah dengan komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi dalam bentuk surat berharga yang tidak diketahui nilai perolehannya, maka dinilai sebesar harga pasar surat berharga pada tanggal perolehan. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Investasi yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Investasi Non permanen berupa pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan dinilai sebesar nilai perolehannya. Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Penilaian

Pencatatan Investasi Jangka panjang berupa penyertaan modal dengan mempertimbangkan tingkat kepemilikan sebagai berikut:

1. Tingkat kepemilikan dibawah 20% dicatat berdasarkan metode biaya (*cost method*) yaitu investasi dicatat sebesar harga perolehan. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak memengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
2. Tingkat kepemilikan antara 20% sampai 50% dicatat menggunakan metode ekuitas (*equity method*) yaitu mencatat investasi awal sebesar harga perolehan ditambah (dikurangi) dengan bagian laba/rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba (kecuali dividen) dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.
3. Metode ekuitas juga digunakan untuk investasi dengan kepemilikan di atas 50%. Apabila dalam perhitungan investasi dengan metode ekuitas menghasilkan nilai investasi yang defisit karena kerugian atas investasi tersebut lebih besar dari pada nilai yang diinvestasikan maka nilai investasi disajikan sebesar Rp1,00 (Satu Rupiah).
4. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.
5. Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

6. Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

Tabel IV.2. Periode dan Persentase Penyisihan Investasi

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1.	Jatuh tempo pada periode 1 s.d. 2 Tahun	10%
2.	Jatuh tempo pada periode 2 s.d. 3 Tahun	50%
3.	Jatuh tempo pada periode 3 s.d. 4 Tahun	75 %
4.	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

Sumber: Peraturan Bupati Merangin Nomor 100/2022

Pengakuan

Hasil investasi jangka pendek berupa bunga diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan. Sedangkan hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, maka bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

Pelepasan dan Pemindahan

Pelepasan Investasi jangka pendek dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi dan disajikan dalam laporan operasional. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.

Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

IV.6.7 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran dan Penilaian

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya termasuk bea impor dan biaya yang dilekatkan secara langsung sampai aset tersebut siap untuk digunakan.

Nilai Aset Tetap menurut jenisnya meliputi biaya-biaya sebagai berikut:

1. Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, honor tim pengadaan tanah, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurukan/penimbunan.
2. Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, pajak, asuransi perjalanan, biaya pemasangan dan biaya selama masa uji coba.
3. Pembuatan peralatan dan mesin meliputi pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
4. Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
5. Pembangunan gedung dan bangunan meliputi:
 - a. Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
 - b. Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan bongkar bangunan lama.
6. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi:
 - a. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan
 - b. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
7. Pembelian Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi perjalanan/pengangkutan.
8. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya:
 - a. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
 - b. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, perencanaan dan pengawasan, dan perizinan.
9. Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hadiah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan dan pengiriman.
10. Nilai penerimaan aset tetap dari rampasan/sitaan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan, kecuali untuk Tanah, Gedung dan Bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.
11. Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

12. Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengukuran dan pematangan dan peningkatan bukti kepemilikan.
13. Nilai renovasi dan restorasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas.
14. Biaya-biaya selain konstruksi yang dikapitalisasi menambah nilai aset tetap seperti perencanaan dan pengawasan dan biaya lainnya yang penganggarnya secara gabungan untuk beberapa aset tetap dialokasikan untuk aset tetap yang nilainya paling besar atau lebih 80%. Apabila aset tetap tidak ada yang besar/lebih dari 80% maka dialokasi secara proporsional ke masing-masing aset tetap.

Kebijakan kapitalisasi adalah kebijakan untuk menentukan biaya-biaya yang dapat dimasukkan sebagai komponen harga perolehan aset tetap dan dibuat untuk mewujudkan keseragaman dalam penentuan nilai aset tetap yang dikapitalisasi meliputi:

1. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap
 - a. Aset Tetap Tanah, berapapun nilainya dikapitalisasi.
 - b. Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran pengadaan baru untuk per satuan atau per unit sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00.
 - c. Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang nilai pengeluarannya minimal sebesar Rp10.000.000,00, kecuali pengeluaran secara bertahap yang secara substansi merupakan perolehan atau bagian gedung dan bangunan seperti: teralis, sekat partisi, plafon, tambah daya listrik/instalasi listrik, keramik, pagar, instalasi telepon, instalasi air berapapun nilainya dikapitalisasi.
 - d. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi untuk jalan/irigasi/jaringan yang nilainya pengeluarannya minimal sebesar Rp10.000.000,00 kecuali pengeluaran secara bertahap/lanjutan yang secara substansi merupakan perolehan atau bagian jalan/irigasi/jaringan seperti: trotoar, plangson dll.
 - e. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi untuk aset tetap lainnya berapapun nilainya dikapitalisasi, kecuali pengeluaran aset tetap renovasi yaitu sebesar Rp10.000.000,00
2. Kriteria Kondisi Aset Tetap
 - a. Barang Bergerak
 - 1) Baik (B) : Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
 - 2) Rusak Ringan (RR) : Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian bagian utama/komponen pokok.
 - 3) Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/ penggantian bagian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis untuk diadakan perbaikan/rehabilitasi.
 - b. Barang Tidak Bergerak
 - 1) Tanah
 - i. Baik (B) : Apabila kondisi tanah tersebut siap untuk digunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
 - ii. Rusak Ringan (RR) : Apabila kondisi tanah tersebut karena sesuatu sebab tidak dapat dipergunakan dan/atau dimanfaatkan dan masih memerlukan pengolahan/ perlakuan (misalnya pengeringan, pengurugan, peralatan dan pemadatan) untuk dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- iii. Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi tanah tersebut tidak dapat dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai peruntukannya karena adanya bencana alam, erosi dan sebagainya.
- 2) Jalan dan Jembatan
 - i. Baik (B) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
 - ii. Rusak Ringan (RR) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh namun memerlukan perbaikan ringan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
 - iii. Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan tidak utuh/tidak berfungsi dengan baik dan memerlukan perbaikan dengan biaya besar.
- 3) Bangunan
 - i. Baik (B) : Apabila bangunan tersebut utuh dan tidak memerlukan perbaikan yang berarti kecuali pemeliharaan rutin.
 - ii. Rusak Ringan (RR) : Apabila kondisi bangunan tersebut masih utuh, memerlukan pemeliharaan rutin/perbaikan ringan pada komponen-komponen bukan konstruksi.
 - iii. Rusak Berat (RB) : Apabila bangunan tersebut tidak utuh dan tidak dapat dipergunakan lagi.
- 3. Perlakuan Aset Tetap Setelah Perolehan dan Renovasi Aset Tetap

Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

 - a. Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Pengeluaran pemeliharaan tidak berpengaruh pada nilai aset tetap sehingga tidak dikapitalisasi.
 - b. Belanja untuk peningkatan/pengembangan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

Pengeluaran untuk peningkatan berpengaruh pada nilai aset tetap sehingga perlu dikapitalisasi. Kriteria material/batasan minimal kapitalisasi pemeliharaan aset tetap terdapat lebih detail dibahas pada Kebijakan Akuntansi tentang Penyusutan.
- 4. Penghapusan Aset Tetap

Penghapusan Aset Tetap adalah tindakan menghapus aset tetap daerah dari daftar aset tetap dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas aset tetap yang berada dalam penguasaannya.

Ketentuan mengenai penghapusan Aset Tetap meliputi hal-hal berikut:

 - a. Apabila suatu Aset Tetap telah dilepaskan atau secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang, berarti Aset Tetap tersebut tidak lagi memenuhi definisi Aset Tetap sehingga harus dihapuskan dan melalui proses penghapusan berdasarkan peraturan yang berlaku.
 - b. Apabila Aset Tetap tersebut belum ada surat keputusan penghapusan, maka Aset Tetap tersebut direklasifikasi ke Aset Lainnya.
 - c. Penghapusan Aset Tetap milik daerah meliputi penghapusan dari daftar pengguna dan/atau kuasa pengguna dan penghapusan dari daftar aset tetap milik daerah
 - d. Aset Tetap yang dihapuskan dikeluarkan dari Neraca sebesar nilai aset yang bersangkutan, yang tercatat di neraca.
 - e. Jika Aset Tetap tersebut telah dihapuskan melalui surat keputusan penghapusan, maka Aset Tetap tersebut harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

5. Pengeluaran-pengeluaran yang diklasifikasikan sebagai Bahan Habis Pakai
 - a. Pengeluaran-pengeluaran di bawah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk pengadaan barang dalam bentuk satuan diklasifikasikan sebagai Barang Ekstra seperti Peralatan Kerja/Kantor, Meubelair, Alat Kedokteran, Alat Laboratorium, Alat Peraga atau Alat Pendidikan dan sejenisnya dicatat pada KIB ekstrakomptabel dan penganggarnya pada Belanja Barang dan Jasa pada akun Belanja Operasional Lainnya.
 - b. Pengeluaran-pengeluaran di atas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang bisa dikategorikan sebagai barang pecah belah diklasifikasikan sebagai BHP dan dicatat tersendiri.

Penyajian dan Pengungkapan

1. Informasi yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan Aset Tetap adalah:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat.
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap.
 - d. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap.
 - e. Jumlah komitmen untuk akuisisi hak milik atas Aset Tetap.
 - f. Penjelasan mengenai jenis dan jumlah aset bersejarah.
2. Aset bersejarah (*heritage asset*) tidak harus disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Kegiatan *Feasibility Study* dan *Detail Engineering Design* (DED) yang tidak disertai pelaksanaan pembangunan fisik pada tahun berjalan, maka biaya perolehan FS dan DED tersebut masuk ke dalam akun Aset Lainnya (Sub akun Aset tidak berwujud).

IV.6.8 Kebijakan Akuntansi Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciation*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.

Pengakuan

Penyusutan Aset Tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Pengukuran

Pengukuran penyusutan Aset Tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian nilai Aset Tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

2. Masa manfaat Aset Tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Masa manfaat Aset Tetap dihitung sejak perolehan Aset Tetap dimaksud.
3. Untuk perhitungan penyusutan, dihitung secara semesteran yaitu pada semester perolehan Aset Tetap.
4. Penyusutan Aset Tetap setiap semester disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penentuan masa manfaat Aset Tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan:

1. daya pakai; dan
2. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan, dari Aset Tetap yang bersangkutan.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dan dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Metode ini dipilih karena dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

Penghitungan dan Pencatatan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk setiap Aset Tetap dan dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.

Penyajian dan Pengungkapan

Penyusutan Aset Tetap setiap semester disajikan sebagai akumulasi penyusutan di neraca periode berjalan dan merupakan pengurang pos Aset Tetap. Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya serta dicatat dalam kelompok Aset Tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan. Penghapusan Aset Tetap tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.

Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi Penyusutan Aset Tetap dengan ketentuan:

1. diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai ekuitas pada neraca;
2. diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada penyusunan neraca berbasis akrual; dan
3. dikecualikan untuk Aset Tetap yang sudah dihapuskan pada tahun diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap.

Masa manfaat aset tetap sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV.3. Masa Manfaat Aset Tetap

Kode Rekening	Uraian	Masa Manfaat
1 3 2	Peralatan Dan Mesin	
1 3 2 01	Alat Besar Darat	10
1 3 2 02	Alat Besar Apung	8
1 3 2 03	Alat Bantu	7
1 3 2 04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1 3 2 05	Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	2
1 3 2 06	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1 3 2 07	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1 3 2 08	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1 3 2 09	Alat Bengkel Bermesin	10



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Rekening				Uraian	Masa Manfaat
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Alat Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application & Non Destructive Testing Lab.	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan Dan Perlindungan	5
1	3	2	34	Senjata Sinar	5
1	3	3		Gedung Dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	50
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	7
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	4		Jalan, Irigasi Dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertanahan	30



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Rekening				Uraian	Masa Manfaat
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30
1	3	5	Aset Tetap Lainnya		
1	3	5	04	Barang Bercorak Kebudayaan	
				- Pahatan	10
				- Lukisan	10
				- Alat Kesenian	3
				- Alat Olah Raga	3
				- Tanda Penghargaan	10
				- Maket Dan Foto Dokumen	3
				- Barang Kerajinan	10
1	3	5	05	Alat Olah Raga	3

Sumber: Peraturan Bupati Merangin Nomor 44/2015

Penambahan masa manfaat:

Tabel IV.4. Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap

Kode Barang						Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul Dari Nilai Buku Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	Peralatan Dan Mesin						
1	3	2	01	Alat Besar Darat		Overhaul	> 0% s.d 30%	1	
							> 30% s.d 45%	3	
							>45% s.d 65%	5	
1	3	2	02	Alat Besar Apung		Overhaul	> 0% s.d 30%	1	
							> 30% s.d 45%	2	
							>45% s.d 65%	4	
1	3	2	03	Alat Bantu		Overhaul	> 0% s.d 30%	1	
							> 30% s.d 45%	2	
							>45% s.d 65%	4	
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor		Overhaul	> 0% s.d 25%	1	
							> 25% s.d 50%	2	
							>50% s.d 75%	3	
							>75% s.d 100%	4	
1	3	2	05	Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor		Renovasi	> 0% s.d 25%	0	
							> 25% s.d 50%	1	
							>50% s.d 75%	1	
							>75% s.d 100%	1	
1	3	2	06	Alat Angkutan Apung Bermotor		Overhaul	> 0% s.d 25%	2	
							> 25% s.d 50%	3	
							>50% s.d 75%	4	
							>75% s.d 100%	6	
1	3	2	07	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor		Renovasi	> 0% s.d 25%	1	
							> 25% s.d 50%	1	
							>50% s.d 75%	1	
							>75% s.d 100%	2	
1	3	2	08	Alat Angkutan Bermotor Udara		Overhaul	> 0% s.d 25%	3	
							> 25% s.d 50%	6	
							>50% s.d 75%	9	
							>75% s.d 100%	12	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Barang	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul Dari Nilai Buku Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1 3 2 09	Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75% s.d 100%	4
1 3 2 10	Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	1
1 3 2 11	Alat Ukur	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
1 3 2 12	Alat Pengolahan	Overhaul	> 0% s.d 20%	1
			> 21% s.d 40%	2
			>51% s.d 75%	5
1 3 2 13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	Overhaul	> 0% s.d 20%	1
			> 21% s.d 40%	2
			>51% s.d 75%	5
1 3 2 14	Alat Kantor	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
1 3 2 15	Alat Rumah Tangga	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
1 3 2 16	Peralatan Komputer	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	2
1 3 2 18	Alat Studio	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
1 3 2 19	Alat Komunikasi	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
1 3 2 20	Alat Pemancar	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75% s.d 100%	5
1 3 2 21	Alat Kedokteran	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
1 3 2 22	Alat Kesehatan Umum	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
1 3 2 23	Unit Alat Laboratorium	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75% s.d 100%	4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Barang				Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul Dari Nilai Buku Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1 3 2 24				Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
						> 25% s.d 50%	4
						>50% s.d 75%	5
						>75% s.d 100%	5
1 3 2 25				Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
						> 25% s.d 50%	5
						>50% s.d 75%	7
						>75% s.d 100%	8
1 3 2 26				Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
						> 25% s.d 50%	5
						>50% s.d 75%	7
						>75% s.d 100%	8
1 3 2 27				Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
						> 25% s.d 50%	4
						>50% s.d 75%	5
						>75% s.d 100%	5
1 3 2 28				Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
						> 25% s.d 50%	4
						>50% s.d 75%	5
						>75% s.d 100%	5
1 3 2 29				Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
						> 25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	3
						>75% s.d 100%	4
1 3 2 30				Peralatan Laboratorium Hydrodinamika	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
						> 25% s.d 50%	5
						>50% s.d 75%	7
						>75% s.d 100%	8
1 3 2 31				Senjata Api	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
						> 25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	3
						>75% s.d 100%	4
1 3 2 32				Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
						> 25% s.d 50%	0
						>50% s.d 75%	1
						>75% s.d 100%	1
1 3 2 33				Alat Keamanan Dan Perlindungan	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
						> 25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	2
1 3 2 34				Senjata Sinar	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
						> 25% s.d 50%	0
						>50% s.d 75%	0
						>75% s.d 100%	2
1 3 3				Gedung Dan Bangunan			
1 3 3 01				Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
						> 30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
						>65% s.d 100%	50
1 3 3 02				Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
						> 30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
						>65% s.d 100%	50
1 3 3 03				Bangunan Menara	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
						> 30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Barang			Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul Dari Nilai Buku Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)	
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
						> 30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	3	05	Tugu Peringatan	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
						> 30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	3	06	Candi	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
						> 30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
						> 30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
						> 30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Renovasi	> 0% s.d 30%	
						> 0% s.d 30%	5
						> 30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	3	10	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
						> 25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	3
						>75% s.d 100%	4
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
						> 25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	4
1	3	4		Jalan, Jaringan Dan Irigasi			
1	3	4	01	Jalan	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
						> 30% s.d 45%	5
						>45% s.d 65%	10
1	3	4	02	Jembatan	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
						> 30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
						> 30% s.d 45%	5
						>45% s.d 65%	10
1	3	4	04	Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
						> 30% s.d 45%	5
						>45% s.d 65%	10
1	3	4	05	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
						> 30% s.d 45%	3
						>45% s.d 65%	5
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
						> 30% s.d 45%	2
						>45% s.d 65%	3
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
						> 30% s.d 45%	2
						>45% s.d 65%	3
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
						> 30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
						> 30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Barang					Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul Dari Nilai Buku Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	10	Bangunan Air	Renovasi	> 0% s.d 30%	5	
						> 30% s.d 45%	10	
						>45% s.d 65%	15	
1	3	4	11	Instalasi Air Bersih/Air Baku	Renovasi	> 0% s.d 30%	2	
						> 30% s.d 45%	7	
						>45% s.d 65%	10	
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	Renovasi	> 0% s.d 30%	2	
						> 30% s.d 45%	7	
						>45% s.d 65%	10	
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	> 0% s.d 30%	1	
						> 30% s.d 45%	3	
						>45% s.d 65%	5	
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	> 0% s.d 30%	1	
						> 30% s.d 45%	3	
						>45% s.d 65%	5	
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	> 0% s.d 30%	5	
						> 30% s.d 45%	10	
						>45% s.d 65%	15	
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	> 0% s.d 30%	5	
						> 30% s.d 45%	10	
						>45% s.d 65%	15	
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	Renovasi	> 0% s.d 30%	1	
						> 30% s.d 45%	3	
						>45% s.d 65%	5	
1	3	4	18	Instalasi Gas	Renovasi	> 0% s.d 30%	5	
						> 30% s.d 45%	10	
						>45% s.d 65%	15	
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	Renovasi	> 0% s.d 30%	1	
						> 30% s.d 45%	1	
						>45% s.d 65%	3	
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	Overhaul	> 0% s.d 30%	2	
						> 30% s.d 45%	7	
						>45% s.d 65%	10	
1	3	4	21	Jaringan Listrik	Overhaul	> 0% s.d 30%	5	
						> 30% s.d 45%	10	
						>45% s.d 65%	15	
1	3	4	22	Jaringan Telepon	Overhaul	> 0% s.d 30%	2	
						> 30% s.d 45%	5	
						>45% s.d 65%	10	
1	3	4	23	Jaringan Gas	Overhaul	> 0% s.d 30%	2	
						> 30% s.d 45%	7	
						>45% s.d 65%	10	
1	3	5	Aset Tetap Lainnya					
1	3	5	04	Benda Bercorak Kebudayaan Alat Musik	Overhaul	> 0% s.d 25%	1	
						> 25% s.d 50%	1	
						>50% s.d 75%	2	
1	3	5	05	Peralatan Olah Raga	Renovasi	> 0% s.d 25%	1	
						> 25% s.d 50%	1	
						>50% s.d 75%	2	
						>75% s.d 100%	2	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Kode Barang	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul Dari Nilai Buku Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1 3 5 08	Aset Tetap Dalam Renovasi			
	– Peralatan & Mesin Dalam Renovasi		> 0% s.d 100%	2
	– Gedung & Bangunan Dalam Renovasi		> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
	– Jalan, Irigasi & Jaringan Dalam Renovasi		> 0% s.d 100%	5

Sumber: Peraturan Bupati Merangin Nomor 100/2022

IV.6.9 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset Lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang terdiri dari Tagihan Piutang Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Kemitraan dengan pihak ketiga dan Aset Lain-lain.

Pengakuan

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pengukuran dan Penilaian

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut:

1. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
2. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

Aset Lain-Lain disajikan dalam Neraca sebesar nilai bukunya.

Pengungkapan

Pengungkapan Aset Lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Rincian aset lainnya;
- b. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO); dan
- c. Informasi lainnya yang penting.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

IV.6.10 Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud meliputi: 1) Piranti lunak (*software*) komputer; 2) Lisensi dan *franchise*; 3) Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya; 4) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; 5) Aset Tak Berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan 6) Aset tak berwujud dalam pengerjaan (*intangible asset-work in progress*).

Pengakuan

Aset Tak Berwujud diakui jika dan hanya jika:

1. Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; dan
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Pengakuan Aset Tak Berwujud akan sangat andal bila Aset Tak Berwujud telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah, dapat diidentifikasi serta dikendalikan, dikuasai atau dimiliki entitas. Bila Aset Tak Berwujud diperoleh dengan cara kegiatan swakelola maka pengakuannya dilakukan pada saat kegiatan tersebut dinyatakan telah selesai dilaksanakan.

Aset Tak Berwujud dapat diperoleh entitas melalui pelaksanaan hasil kegiatan yang dilakukan secara internal (swakelola). Kadang-kadang sulit untuk menentukan apakah aset tak berwujud yang dihasilkan dalam kegiatan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria untuk diakui. Kesulitan tersebut antara lain untuk:

1. Menentukan apakah telah timbul, dan saat timbulnya, aset yang dapat diidentifikasi yang akan menghasilkan manfaat ekonomis masa depan; dan
2. Menentukan biaya perolehan aset tersebut secara andal.

Dalam menentukan apakah Aset Tak Berwujud yang dihasilkan secara internal memenuhi syarat untuk diakui, entitas menggolongkan proses dihasilkannya aset tak berwujud menjadi dua tahap, yaitu:

1. Tahap penelitian atau riset; dan
2. Tahap pengembangan.

Jika suatu entitas tidak dapat membedakan antara tahap riset dan tahap pengembangan suatu kegiatan internal untuk menghasilkan aset tak berwujud, maka entitas memperlakukan kegiatan tersebut seolah-olah sebagai pengeluaran yang dilakukan hanya pada tahap riset saja. Suatu entitas tidak boleh mengakui Aset Tak Berwujud yang timbul dari riset (atau dari tahap riset pada suatu kegiatan internal). Pengeluaran untuk riset (atau dari tahap riset pada suatu kegiatan internal) diakui sebagai biaya pada saat terjadinya.

Suatu Aset Tak Berwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahap pengembangan pada suatu kegiatan internal) diakui jika, dan hanya jika perusahaan dapat menunjukkan semua hal berikut ini:

1. Kelayakan teknis penyelesaian Aset Tak Berwujud tersebut sehingga aset tersebut dapat digunakan;
2. Niat untuk menyelesaikan Aset Tak Berwujud tersebut dan menggunakannya;
3. Kemampuan untuk menggunakan Aset Tak Berwujud tersebut; Cara Aset Tak Berwujud menghasilkan kemungkinan manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan, yaitu antara lain entitas harus mampu menunjukkan kegunaan aset tak berwujud tersebut; Tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan pengembangan Aset Tak Berwujud dan menggunakan aset tersebut; dan
4. Kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan aset tak berwujud selama pengembangannya. Beban Masa Lalu Tidak Diakui sebagai Aset;



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

5. Pengeluaran atas unsur Aset Tak Berwujud yang awalnya diakui oleh entitas sebagai biaya dalam laporan keuangan periode sebelumnya tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian hari.

Penilaian dan Pengukuran

Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tak Berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tak Berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan dan disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus. Amortisasi Aset Tak Berwujud, yang selanjutnya disebut Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya, yang hanya dapat diterapkan atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal:

Setelah pengakuan awal, Aset Tak Berwujud dinilai sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi.

Periode Amortisasi:

Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Pada umumnya masa manfaat suatu Aset Tak Berwujud tidak akan melebihi 20 tahun sejak tanggal aset siap digunakan. Amortisasi harus mulai dihitung saat aset siap untuk digunakan.

Masa manfaat Aset Tak Berwujud dihitung sejak perolehan aset tak berwujud dimaksud.

Masa manfaat atau umur ekonomis piranti lunak (*software*) adalah 5 (lima) Tahun.

Peninjauan secara periodik terhadap masa manfaat dan/atau tarif amortisasi maka penetapannya dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Metode Amortisasi:

Metode amortisasi harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi dan/atau sosial oleh entitas. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka harus digunakan metode garis lurus.

Metode amortisasi yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).

Penghentian dan Pelepasan (*Retirement and Disposal*):

Suatu Aset Tak Berwujud tidak boleh lagi diakui, dan harus dihilangkan dari neraca, saat aset tersebut dilepas atau ketika tidak ada lagi manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaannya dan pelepasan yang dilakukan sesudahnya.

Aset Tak Berwujud yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengungkapan

Pengungkapan setiap golongan Aset Tak Berwujud dilakukan dengan membedakan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan Aset Tak Berwujud lainnya. Pengungkapan aset tak berwujud meliputi:

1. Masa manfaat Aset Tak Berwujud;
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, penghentian dan pelepasan, akumulasi amortisasi dan mutasi lainnya.
3. Informasi amortisasi meliputi nilai amortisasi, metode yang digunakan, masa manfaat atau tarif yang digunakan serta nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode.

Pengungkapan Aset Tak Berwujud meliputi:

1. Penjelasan, nilai tercatat, dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap Aset Tak Berwujud yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan;



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- Keberadaan dan nilai Aset Tak Berwujud yang hak penggunaannya dibatasi; dan
- Jumlah komitmen untuk memperoleh Aset Tak Berwujud.

Entitas dianjurkan untuk mengungkapkan informasi mengenai gambaran setiap Aset Tak Berwujud yang sudah sepenuhnya diamortisasikan yang masih digunakan.

IV.6.11 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban dapat diklasifikasikan berdasarkan jatuh tempo dan sumber pinjaman. Berdasarkan jatuh temponya utang diklasifikasi menjadi utang jangka pendek dan utang jangka panjang sedangkan berdasarkan sumber pinjaman maka utang diklasifikasi sebagai utang dalam negeri dan utang luar negeri.

Hubungan antara utang dalam negeri dan utang luar negeri dengan klasifikasi jangka pendek dan jangka panjang disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel IV.5. Utang Dalam Negeri

NO.	Nama Utang	Klasifikasi		Keterangan
		Jangka Pendek	Jangka Panjang	
1.	Utang Pihak Ketiga	V	-	
2.	Utang Bunga	V	-	Berasal dari Pinjaman jangka panjang/ jangka pendek dalam negeri.
3.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	V	-	
4.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	V	-	Berasal dari pokok utang jangka panjang dalam negeri yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan.
5.	Uang Muka KUD	V	-	
6.	Pendapatan Diterima Dimuka	V	-	
7.	Utang Dalam Negeri Perbankan	-	V	Apabila jangka waktu pinjaman lebih dari 1 tahun dan jatuh tempo lebih dari 12 bulan mendatang.
8.	Utang Dalam Negeri Non Perbankan	-	V	Apabila jangka waktu pinjaman lebih dari 1 tahun dan jatuh tempo lebih dari 12 bulan mendatang.

Sumber: Bultek 22 - Akuntansi Utang berbasis Akrua

Utang Dalam Negeri - Jangka Pendek

a. Utang kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan.

b. Utang Bunga

Utang Bunga timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Sertifikat Perbendaharaan Negara (SPN), utang obligasi negara, utang jangka panjang-perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.

c. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapertarum.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

d. Bagian lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

e. Pendapatan diterima dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun Pendapatan Diterima Dimuka sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.

Utang Dalam Negeri Jangka Panjang

a. Obligasi

Surat Berharga Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran pokok utang dan bunganya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. Obligasi adalah salah satu jenis Surat Berharga Negara/Daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan imbalan bunga tetap (*fixed rate*/FR) atau dengan imbalan bunga secara variabel (*variable rate*/VR). Sesuai kebutuhan pemerintahan dalam hal pembiayaan/pendanaan, obligasi dapat diterbitkan dalam mata uang rupiah ataupun dalam valuta asing. Obligasi negara dan obligasi daerah dapat ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum atau diperdagangkan di pasar modal.

b. Utang Pembelian Cicilan

Utang cicilan adalah kewajiban yang timbul karena perolehan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan membayar secara angsuran.

c. Utang Jangka Panjang lainnya

Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri-Perbankan, Utang Dalam Negeri Obligasi dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan. Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK). BSK merupakan pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola oleh mitra sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

d. Utang Dalam Negeri-Perbankan

Utang dalam negeri-perbankan merupakan utang jangka panjang yang berasal dari pinjaman dari lembaga perbankan dan diharapkan akan dibayar lebih dari dua belas bulan setelah tanggal neraca. Pemerintah dapat melakukan pinjaman jangka panjang dari berbagai sumber. Salah satu sumber pinjaman adalah dari lembaga perbankan yang berstatus BUMN atau BUMD.

Kewajiban Kontingensi

Kewajiban kontingensi adalah:

- kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah; atau
- kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
 - tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) pemerintah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
 - jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Utang kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (*invoice*) kepada pemerintah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah. Utang kepada pihak ketiga juga diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan kepada Pihak yang berhak.

Utang Bunga

Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya terakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Utang PFK

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atau bendahara pengeluaran SKPD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi.

Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka dapat diakui dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kewajiban atau pendekatan pendapatan. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Utang Obligasi

Utang Obligasi Negara/Daerah diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan.

Utang Pembelian Cicilan

Sehubungan dengan utang pembelian cicilan, baik yang mengandung bunga secara eksplisit maupun bunga secara tersamar, utang diakui ketika barang yang dibeli telah diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang selanjutnya secara legal telah mengikat para pihak, yaitu ketika perjanjian utang ditandatangani oleh pihak penjual yang sekaligus bertindak selaku kreditur dan pembeli yang juga menjadi debitur.

Utang Jangka Panjang lainnya

Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

Kewajiban Kontingensi

Banyak peristiwa masa lalu yang dapat menimbulkan kewajiban kini. Walaupun demikian, dalam beberapa peristiwa yang jarang terjadi, misalnya dalam tuntutan hukum, dapat timbul perbedaan pendapat mengenai apakah peristiwa tertentu sudah terjadi atau apakah peristiwa tersebut menimbulkan kewajiban kini. Jika demikian halnya, pemerintah menentukan apakah kewajiban kini telah ada pada tanggal neraca dengan mempertimbangkan semua bukti yang tersedia, termasuk misalnya pendapat ahli. Bukti yang dipertimbangkan mencakup, antara



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

lain, bukti tambahan yang diperoleh dari peristiwa setelah tanggal neraca. Atas dasar bukti tersebut, apabila besar kemungkinan bahwa kewajiban kini belum ada pada tanggal neraca, pemerintah mengungkapkan adanya kewajiban kontingensi. Pengungkapan tidak diperlukan jika kemungkinan arus keluar sumber daya kecil.

Kewajiban kontingensi dapat berkembang ke arah yang tidak diperkirakan semula. Oleh karena itu, kewajiban kontingensi harus terus-menerus dikaji ulang untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya bertambah besar (*probable*). Apabila kemungkinan itu terjadi, maka pemerintah akan mengakui kewajiban diestimasi dalam laporan keuangan periode saat perubahan tingkat kemungkinan tersebut terjadi, kecuali nilainya tidak dapat diestimasi secara andal.

Pengukuran

Utang kepada Pihak Ketiga (Account Payable)

Utang kepada Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban entitas pemerintah atas barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan/perjanjian atau sebesar dana yang belum diserahkan kepada yang berhak.

Utang Bunga

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

Utang PFK

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUN/BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

Utang Obligasi

Nilai nominal Utang Obligasi Daerah tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

Utang Pembelian Cicilan

Utang pembelian cicilan, baik yang bunganya dinyatakan secara eksplisit maupun yang bunganya disamarkan dalam bentuk cicilan anuitas, dicatat sebesar nilai nominal. Khusus mengenai utang cicilan anuitas, setiap pelunasan harus dipecah menjadi unsur pelunasan pokok utang dan pelunasan bunga.

Utang Jangka Panjang lainnya

Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar.

Kewajiban Kontingensi

Besaran kewajiban kontingensi tidak dapat diukur secara eksak. Untuk itu diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Penyajian dan Pengungkapan

Kewajiban disajikan pada neraca dan diungkapkan dalam CaLK. Pengungkapan masing-masing kewajiban dirinci sesuai dengan keterangan yang diperlukan. Sedangkan kewajiban kontingensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun demikian pemerintah harus mengungkapkan kewajiban kontingensi pada Catatan atas Laporan Keuangan untuk setiap jenis kewajiban kontingensi pada tanggal neraca. Pengungkapan tersebut dapat meliputi:

- a. karakteristik kewajiban kontingensi;
- b. estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- c. indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- d. kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

IV.6.12 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat:

1. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
2. Kas diterima oleh Bendahara Penerimaan yang hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Kas diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat SKPD wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah;
4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah;
5. Kas diterima oleh entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD; dan
6. Untuk Badan Layanan umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diaku sebagai pendapatan daerah.

Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diaku sebagai pendapatan daerah.

Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, entitas lain tersebut dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Penyajian

Pendapatan-LRA disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Pendapatan bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Operasional, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, dan biaya-biaya yang muncul dalam rangka transaksi pendapatan berbentuk barang/jasa tersebut dikapitalisasikan ke dalam nilai perolehan barang/jasa yang diperoleh.

IV.6.13 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Koreksi atas belanja, termasuk penerimaan kembali belanja, yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Pengukuran

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto sesuai dengan realisasi pengeluaran kas atau sesuai dengan dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan keuangan. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja adalah pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhir tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah, dan konversi yang dilakukan akibat penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.

Perlakuan Akuntansi atas Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Modal

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 bulan;
2. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga;
3. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut batas minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) persatuan barang untuk jenis belanja modal; dan
4. Khusus tanah dan konstruksi dalam pengerjaan berapapun nilainya harus dikapitalisasi sebagai nilai perolehan.

Perlakuan Akuntansi atas Belanja Pemeliharaan

Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- a. bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - b. bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - c. bertambah volume, dan/atau
 - d. bertambah kapasitas produksi, dan/atau
2. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Bila ada pengeluaran bersifat rutin untuk memperbaiki/memelihara aset tetap meskipun jumlahnya material, tetapi digolongkan sebagai *revenue expenditure*. Sedangkan *revenue expenditure* mempunyai makna pengeluaran untuk mempertahankan kapasitas yang ada saat ini (*current year*).

IV.6.14 Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS. Transfer diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi
2. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah
3. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengakuan

Beban Transfer diakui oleh entitas penyalur pada saat:

- 1) terjadi pengeluaran kas dari rekening kas negara/daerah, dan
- 2) terdapat nilai kurang yang dapat diperhitungkan.

Dapat terjadi bahwa belum semua hak entitas penerima transfer direalisasikan pada tahun yang berjalan. Dalam hal terjadi demikian, maka timbul kewajiban bagi entitas penyalur untuk merealisasikan pada periode berikutnya dan jumlah rupiah kewajiban dimaksud diakui sebagai Beban Transfer. Sebaliknya dapat terjadi bahwa entitas penyalur merealisasikan pengeluaran kas melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal ini, jumlah rupiah kelebihan salur dimaksud diakui sebagai piutang transfer.

Pengukuran

Beban transfer diakui dan dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dan jumlah kewajiban yang belum disalurkan. Nilai pengeluaran kas didasarkan pada penyaluran transfer yang dikeluarkan dari rekening entitas kepada rekening penerima. Selain itu kurang bayar/salur merupakan bagian dari beban transfer yang diukur sebesar nilai yang seharusnya disalurkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

1. Dana Bagi Hasil

Beban transfer DBH dinilai sebesar jumlah yang telah dikeluarkan dari kas daerah dan sebesar kewajiban yang terutang untuk disalurkan sebagai pemenuhan hak entitas penerima tahun berjalan, yang diperhitungkan berdasarkan realisasi pendapatan yang diterima dalam satu tahun anggaran. Pengakuan pada beban dan pendapatan pada LO pada transfer dapat berbeda dengan pengakuan secara basis kas yang lebih menekankan



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

pada masuk dan keluarnya kas secara bruto. Misalnya pada LRA kurang atau lebih salur yang direalisasikan akan dicatat sebagai belanja atau pendapatan.

2. Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan pada pemerintah daerah dinilai sebesar jumlah yang telah dikeluarkan dari rekening kas daerah. Dalam hal entitas penerima telah memenuhi seluruh persyaratan, maka entitas penyalur berkewajiban untuk melakukan transfer sebesar jumlah yang dialokasikan. Dalam keadaan demikian, Bantuan Keuangan akan sama dengan nilai alokasi. Akan tetapi, jika terdapat daerah penerima yang tidak memenuhi syarat untuk suatu tahap pencairan, maka nilai yang sudah dialokasikan tidak akan disalurkan seluruhnya. Bantuan Keuangan tetap sebesar kas yang telah disalurkan.

Pencatatan dan Penyajian

Dalam pengelolaan pendapatan pada umumnya, daerah dapat menggunakan rekening antara sebelum ditampung dalam RKUD dan rekening dimaksud dapat ditempatkan pada bank yang berbeda dari bank tempat RKUD. Bank penampung tersebut biasa disebut sebagai bank persepsi. Pada penyaluran dana transfer, penyaluran dana oleh Pemerintah Pusat dilakukan langsung dari RKUN ke RKUD, sesuai dengan ketentuan tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, pembahasan mengenai pencatatan dan penyajian terkait transaksi transfer tidak melibatkan SKPD, tetapi langsung oleh PPKD atau unit perbendaharaan.

Pengungkapan

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

IV.6.15 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran tertentu.

Pengungkapan



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SILPA. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Transaksi pembiayaan penerimaan dicatat dengan menggunakan azas bruto, yaitu pembiayaan penerimaan dicatat sebesar nilai brutonya (tidak dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.

Penyajian

Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

IV.6.16 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, pendapatan non operasional dan pos luar biasa.

Pendapatan Daerah terdiri dari pendapatan perpajakan dan non perpajakan:

Pendapatan Perpajakan

Pendapatan perpajakan daerah adalah pendapatan yang bersumber dari perpajakan yang menjadi kewenangan daerah.

Pendapatan Non Perpajakan

Pendapatan non perpajakan di lingkup pemerintah daerah antara lain terdiri dari:

- a. Pendapatan retribusi daerah;
- b. Lain-lain PAD yang sah; dan
- c. Pendapatan Non-Operasional

Pendapatan Non-Operasional mencakup antara lain surplus penjualan aset non lancar, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus dari kegiatan non operasional lainnya.

Pendapatan non perpajakan berdasarkan proses memperoleh pendapatan tersebut yang digolongkan menjadi:

- a. Pendapatan Perizinan;
- b. Pendapatan Layanan;
- c. Pendapatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- d. Pendapatan Hasil Investasi;
- e. Pendapatan Hasil Investasi Aset Non Keuangan;
- f. Pendapatan Non Perpajakan lainnya

Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) dan/atau pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu sebelum penerimaan kas, bersamaan dengan penerimaan kas dan setelah penerimaan kas.

Pengakuan Pendapatan perpajakan

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *self assessment system* diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di Rekening Kas Daerah tanpa terlebih dahulu pemerintah daerah menerbitkan ketetapan.

Pengakuan Pendapatan Non perpajakan

Pendapatan Perizinan



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan Pemberian Layanan

Pengakuan pendapatan pemberian layanan pada prinsipnya mengikuti pengakuan pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)

Pendapatan dari perizinan diakui pada saat pembayaran diterima atau izin diberikan. Dalam hal terjadi pembayaran dilakukan sebelum ada kepastian bahwa permohonan izin memenuhi syarat dan diterbitkan, maka atas pembayaran dimaksud belum dapat diakui sebagai pendapatan.

Pendapatan Pemanfaatan Aset Non-Kuangan/Pemanfaatan Aset Tetap

Pendapatan non perpajakan yang berasal dari pemanfaatan aset non-keuangan diakui sesuai dengan hak yang dapat diakui oleh entitas sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dibuat oleh entitas pemerintah dengan pihak ketiga yang melakukan kerja sama tersebut atau pada saat diterima oleh entitas. Pengakuan pendapatan dari kerja sama pemanfaatan dilakukan pada saat entitas memiliki hak atas pendapatan tersebut sesuai dengan perjanjian antara entitas dengan pihak ketiga. Apabila pendapatan dari kerja sama pemanfaatan tersebut diterima untuk masa yang lebih dari satu periode akuntansi, maka dilakukan penyesuaian pendapatan secara proporsional (secara bulanan atau semesteran) tergantung dengan sistem yang dibuat oleh pemerintah.

Pendapatan Non Perpajakan Lainnya

Pendapatan non perpajakan lainnya antara lain dapat berasal dari keuntungan penjualan, denda akibat perjanjian/peraturan, bunga/jasa perbankan, penerimaan kembali belanja tahun sebelumnya, putusan pengadilan/pelanggaran hukum dan penghapusan utang. Pendapatan yang berasal dari keuntungan penjualan aset diakui pada saat kas diterima oleh entitas, pendapatan yang berasal dari denda akibat perjanjian atau peraturan diakui pada saat menjadi hak entitas, pendapatan yang berasal dari bunga/jasa perbankan diakui pada saat kas diterima oleh entitas, pendapatan yang berasal dari pengembalian kembali belanja tahun sebelumnya diakui pada saat kas diterima oleh entitas.

Pengakuan Pendapatan Hibah Basis Akrua

Pengakuan pendapatan pada akuntansi berbasis akrual terjadi pada saat hak pemerintah timbul yang akan menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan serta tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat hak pemerintah timbul. Pendapatan hibah pada akuntansi berbasis akrual disajikan di Laporan Operasional. Pendapatan berbasis akrual diakui pada saat timbulnya hak untuk memperoleh

pendapatan tersebut walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan Hibah berbasis akrual diakui pada saat:

1. Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik;
2. Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih; dan
3. Jumlahnya dapat diestimasi secara andal.

Realisasi pendapatan hibah sangat bergantung dari keinginan/niat pemberi hibah untuk mengeksekusinya. Komitmen dari pemberi hibah masih akan terlalu dini untuk diakui sebagai pendapatan hibah-LO mengingat untuk dapat direalisasikan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai hal yang ada di luar kontrol penerima hibah, kemungkinan besar tidak dapat diestimasi terlebih dahulu, serta tidak terlalu besar kekuatan pemerintah untuk menagihnya. Berdasarkan hal tersebut, pendapatan hibah-LO diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut adalah:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- a. Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang jika entitas penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat entitas penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
- b. Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka terhadap pemberian hibah yang didasari oleh perjanjian antara pemberi dan penerima hibah, maka pendapatan hibah diakui setelah timbulnya hak yang ditandai dengan perjanjian hibah ditandatangani.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan yang berasal dari perizinan disajikan sebesar tarif yang dipungut oleh pemerintah atas izin yang diberikannya.

Jumlah pendapatan operasional yang berasal dari pemberian layanan yang dilakukan oleh pemerintah diukur sebesar nilai yang dibebankan atau ditagihkan kepada pengguna. Dalam hal pemberian layanan diikuti dengan pemberian barang, misalnya obat-obatan, jumlah pendapatan dinilai sebesar tarif yang ditetapkan. Artinya jumlah pendapatan tidak mengkompensasi pembayaran dengan harga obat yang diberikan.

Terhadap pendapatan operasional yang berasal dari pemanfaatan/pengambilan SDA berdasar unitnya, jumlah pendapatannya dinilai sebesar jumlah SDA yang diambil/dimanfaatkan dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan. Dalam hal tarif dan penetapan dengan mata uang asing, jumlah pendapatan dicatat dengan mengkonversi menjadi rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal penetapan. Dalam hal penyetoran baru dilakukan kemudian masih dalam batas waktu yang diperkenankan dan terdapat perubahan kurs, jumlah pendapatan operasional adalah sebesar jumlah setoran sekaligus untuk koreksi atas pencatatan sebelumnya.

Pendapatan operasional yang berasal dari pendapatan sewa dinilai sebesar yang menjadi hak entitas pada tahun berjalan. Penghitungan proporsi nilai pendapatan dapat menggunakan bulanan maupun tahunan, tergantung sistem yang dibangun oleh pemerintah.

Pendapatan operasional yang berasal dari kerja sama pemanfaatan, dinilai sebesar jumlah yang menjadi hak entitas pemerintah yang bersangkutan pada tahun berjalan. Penghitungan proporsi nilai pendapatan dapat menggunakan bulanan maupun tahunan, tergantung sistem yang dibangun oleh pemerintah.

Pendapatan operasional yang berasal dari keuntungan penjualan atau pertukaran aset diukur sebesar selisih positif antara kas dan/atau nilai aset yang diterima dikurangi dengan nilai buku aset yang dijual atau diserahkan. Pendapatan yang berasal dari denda akibat perjanjian atau peraturan pemerintah dinilai sebesar nilai penetapan. Untuk pendapatan bunga/jasa perbankan dan pendapatan dari pengembalian belanja tahun sebelumnya diakui sebesar yang telah diterima oleh entitas.

Pendapatan yang berasal dari putusan pengadilan/pelanggaran hukum dinilai sebesar penetapan putusan. Selanjutnya untuk pendapatan yang berasal dari penghapusan utang, dinilai sebesar nilai utang yang dihapuskan oleh pemberi pinjaman.

Penyajian

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

IV.6.17 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi Aset atau timbulnya kewajiban. Beban terdiri dari Beban Operasi, Beban Transfer, Beban Non Operasional dan Beban Luar Biasa.

Pengakuan

Beban dapat diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu sebelum pengeluaran kas, bersamaan dengan pengeluaran kas dan setelah pengeluaran kas.

Beban hibah diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut antara lain:

- dana hibah akan dikeluarkan jika penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
- dana hibah dikeluarkan tanpa persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat dikeluarkan dana hibah tersebut.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa serta menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

IV.6.18 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pengakuan

Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindahbukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

Pengukuran

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

Penyajian dan Pengungkapan

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar dengan nilai Rupiah. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Dana Cadangan pada laporan keuangan disajikan dengan ketentuan:

- Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- b. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan.
- c. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan.
- d. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
- e. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.

Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
- b. Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
- c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
- d. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
- e. Sumber Dana Cadangan; dan
- f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.

IV.6.19 Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat, dan ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya. Dana bergulir memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah.
2. Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan.
3. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
4. Pemerintah Kabupaten Merangin dapat menarik kembali dana bergulir.

Pengembalian dana bergulir oleh penerima dana kepada satker pengelola dapat dilakukan dengan dua cara:

1. Pembayaran secara cicilan.
2. Pembayaran sekaligus lunas.

Pengakuan

Pengeluaran pembiayaan untuk merealisasikan dana bergulir diakui saat penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS) Pengeluaran Pembiayaan. Dana yang dipersepsikan sebagai dana bergulir dan disalurkan oleh pemerintah Kabupaten Merangin ke masyarakat dalam rangka perkuatan modal atau meningkatkan kemampuan ekonomi dapat dikelompokkan sebagai Piutang yang dapat dikelompokkan sebagai aset lancar atau investasi jangka panjang tergantung dari jatuh temponya. Jika piutang tersebut mempunyai jatuh tempo paling lama 12 bulan maka piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo piutang lebih dari 12 bulan maka piutang tersebut dikelompokkan sebagai investasi jangka panjang.

Pengukuran

Pada saat penyaluran pertama kali dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan, yaitu sebesar kas yang dibayarkan. Secara periodik pemerintah Kabupaten Merangin harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika satker pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*) sehingga akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang dapat ditagih.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Penyisihan dan Penghapusan

Tata cara penyisihan dana bergulir dilakukan dengan tahapan: 1) Penentuan kualitas dana bergulir; 2) Penentuan besaran penyisihan dana bergulir; 3) Pencatatan penyisihan dana bergulir; 4) Pelaporan dana bergulir; dan 5) Penghapusan dana bergulir.

Kualitas dana bergulir dibagi sebagai berikut:

1. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun dan/atau masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
2. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
3. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun.
4. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya dan/atau penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia dan/atau penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).

Penentuan besaran penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan, dicatat sebesar nilai kotor (bruto) dan diklasifikasikan atas:

1. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
2. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
3. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
4. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penghapusan dana bergulir oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

1. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir yaitu pengurangan dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih yang tercatat dalam neraca; dan
2. Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir yaitu hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana bergulir.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas yang dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir.

Dana bergulir disajikan di neraca pada kelompok aset lancar (piutang) atau aset non lancar (investasi jangka panjang), pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan, namun secara periodik harus dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga di neraca menggambarkan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang diperoleh dari data dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Informasi yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan dana bergulir adalah:

1. Dasar Penilaian Dana Bergulir.
2. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya.
3. Besarnya suku bunga yang dikenakan.
4. Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir.
5. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

IV.6.20 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang memengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.

Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Koreksi Kesalahan

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan, tidak sesuai dengan yang seharusnya memengaruhi Laporan Keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi dilakukan terhadap kesalahan tidak berulang dan kesalahan berulang/sistemik. Koreksi yang dilakukan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

Jenis Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang; dan
- b. Kesalahan berulang dan sistemik.

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan maka diadakan koreksi kesalahan yang memengaruhi posisi kas maupun tidak dilakukan dengan pembentukan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya maka diadakan koreksi kesalahan dan memengaruhi posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan, yang disebabkan oleh sifat alamiah (Normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya Penerimaan Pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi, sehingga dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan ini tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan Kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau standar



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

akuntansi pemerintah yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan, seperti perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian dalam transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak materil.

Kebijakan akuntansi untuk merevaluasi Aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi, namun demikian perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Perubahan Estimasi Akuntansi

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

Penghentian Operasi

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada, harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

- Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
- Fungsi tersebut tetap ada.
- Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset kewajiban. Kesalahan dalam penyusunan laporan Keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan, kesalahan timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian, dalam situasi tertentu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga peran-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan.

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau pergeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
- Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

IV.6.21 Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi

Pengakuan Aset Konsesi Jasa

Pemerintah daerah mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:

- a. pemerintah daerah mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
- b. pemerintah daerah mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

Pengukuran Aset Konsesi Jasa

Pemerintah daerah melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa sebesar nilai wajar, kecuali atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi. Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

Pengakuan Kewajiban atas Aset Konsesi Jasa

Pengakuan kewajiban pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa yaitu sebesar nilai wajar, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemerintah daerah kepada mitra, atau sebaliknya. Pengakuan kewajiban ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemerintah daerah dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.

Pemerintah daerah mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada kebijakan akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi. Pemerintah daerah mencatat pendapatan lainnya atas konsesi jasa berpedoman pada kebijakan akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran.

Pengukuran Kewajiban atas Aset Konsesi Jasa

Pemerintah daerah mengakui kewajiban sebagai kewajiban keuangan dalam hal pemerintah daerah memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa. Pemerintah daerah memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:

- a. jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau;
- b. kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan, walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.

Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui berpedoman pada kebijakan akuntansi mengenai instrumen keuangan, kecuali untuk hal yang telah diatur dalam kebijakan ini.

Penyajian

Pemerintah daerah menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada kebijakan akuntansi yang mengatur penyajian laporan keuangan.

Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan pemerintah daerah dalam CaLK terkait dengan perjanjian konsesi jasa pada setiap periode pelaporan antara lain:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- a. kebijakan akuntansi yang penting terkait dengan konsesi jasa;
- b. deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa untuk masing-masing perjanjian konsesi jasa baik secara individual, kelompok, maupun gabungan;
- c. ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).
- d. sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
 - 1) hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
 - 2) hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
 - 3) nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
 - 4) hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
 - 5) opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
 - 6) ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul);
 - 7) ketentuan pemberian izin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan
- e. perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

IV.6.22 Properti Investasi

Properti investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:

- a. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku.

Penyajian Properti Investasi

Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan properti investasi dalam CaLK antara lain:

- a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
- b. metode penyusutan yang digunakan;
- c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- e. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- 1) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
- 2) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
- 3) pelepasan;
- 4) penyusutan;
- 5) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
- 6) perubahan lain.

Alih Guna

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

- a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh pemerintah daerah, dialih gunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
- b. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
- c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialih gunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
- d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

Pelepasan

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen atau tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023



PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada masing-masing laporan keuangan, baik akun-akun yang menjadi komponen laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) maupun akun-akun yang menjadi komponen laporan finansial (*financial report*). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Sedangkan laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Penjelasan atas akun-akun laporan keuangan tersebut didasarkan pada urutan penyajian laporan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

V.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Merangin, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD. Akun yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit dan Pembiayaan.

LRA Pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2024 terdiri atas Pendapatan-LRA sebesar Rp1.459.275.923.665,51 dan Belanja sebesar Rp1.454.773.168.270,96. Selisih lebih antara Pendapatan-LRA terhadap Belanja berakibat pada adanya Surplus Anggaran sebesar Rp4.502.755.394,55. Di samping itu juga terdapat selisih lebih antara Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan berupa Pembiayaan Netto sebesar Rp77.190.915.420,30. Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2024 menjadi Rp81.693.670.814,85. Ringkasan LRA tahun 2024 dan 31 Desember 2023 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel V.1-1 Rincian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)					
No.	U r a i a n	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
I.	PENDAPATAN-LRA				
	1. Pendapatan Asli Daerah-LRA	94.830.759.645,51	107.976.482.974,79	(13.145.723.329,28)	(12,17)
	2. Pendapatan Transfer-LRA	1.352.003.997.917,00	1.290.285.622.944,00	61.718.374.973,00	4,78
	3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA	12.441.166.103,00	3.082.000.000,00	9.359.166.103,00	303,67
	Jumlah Pendapatan LRA	1.459.275.923.665,51	1.401.344.105.918,79	57.931.817.746,72	4,13
II.	BELANJA				
	1. Belanja Operasi	996.592.669.538,96	888.240.891.846,63	108.351.777.692,33	12,20
	2. Belanja Modal	193.627.335.532,00	176.724.837.147,30	16.902.498.384,70	9,56
	3. Belanja Tidak Terduga	52.802.850,00	5.511.000,00	47.291.850,00	858,14
	4. Belanja Transfer	264.500.360.350,00	273.037.421.910,00	(8.537.061.560,00)	(3,13)
	Jumlah Belanja	1.454.773.168.270,96	1.338.008.661.903,93	116.764.506.367,03	8,73
IV.	SURPLUS/(DEFISIT)	4.502.755.394,55	63.335.444.014,86	(58.832.688.620,31)	(92,89)
V.	PEMBIAYAAN				
	1. Penerimaan Pembiayaan	79.190.915.420,30	82.250.272.316,44	(3.059.356.896,14)	(3,72)
	2. Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	66.394.800.911,00	(64.394.800.911,00)	(96,99)
	Pembiayaan Netto	77.190.915.420,30	15.855.471.405,44	61.335.444.014,86	386,84
VI.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	81.693.670.814,85	79.190.915.420,30	2.502.755.394,55	3,16

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai SILPA tahun 2024 meningkat sebesar Rp2.502.755.394,55 atau 3,16% dibandingkan SILPA tahun 2023.

Masing-masing akun LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

V.1.1 Pendapatan-LRA

Tahun 2024
Rp1.459.275.923.665,51

Tahun 2023
Rp1.401.344.105.918,79

Jumlah anggaran Pendapatan-LRA TA 2024 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LRA, Pendapatan Transfer-LRA, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LRA adalah sebesar Rp1.493.816.042.655,00, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024 tanggal 25 November 2023. Pendapatan ini dapat direalisasikan sebesar Rp1.459.275.923.665,51 atau 97,69% dari target yang ditetapkan.

Realisasi Pendapatan-LRA per kelompok pendapatan yang diterima Pemerintah Kabupaten Merangin sepanjang TA 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel V.1-2 Realisasi Pendapatan-LRA per Kelompok Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)	Persentase	
					Realisasi	Distribusi
1.	Pendapatan Asli Daerah-LRA	100.605.992.393,00	94.830.759.645,51	(5.775.232.747,49)	94,26	6,50
2.	Pendapatan Transfer-LRA	1.377.004.677.610,00	1.352.003.997.917,00	(25.000.679.693,00)	98,18	92,65
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA	16.205.372.652,00	12.441.166.103,00	(3.764.206.549,00)	76,77	0,85
Jumlah		1.493.816.042.655,00	1.459.275.923.665,51	(34.540.118.989,49)	97,69	100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan-LRA TA 2023 sebesar Rp1.401.344.105.918,79, realisasi pencapaian target Pendapatan-LRA TA 2024 meningkat sebesar Rp57.931.817.746,72 atau 4,13%, sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel V.1-3 Perbandingan Pendapatan-LRA per Kelompok Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Pendapatan Asli Daerah-LRA	94.830.759.645,51	107.976.482.974,79	(13.145.723.329,28)	(12,17)
2.	Pendapatan Transfer-LRA	1.352.003.997.917,00	1.290.285.622.944,00	61.718.374.973,00	4,78
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA	12.441.166.103,00	3.082.000.000,00	9.359.166.103,00	303,67
Jumlah		1.459.275.923.665,51	1.401.344.105.918,79	57.931.817.746,72	4,13

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Kontribusi masing-masing sektor Pendapatan-LRA dapat dilihat pada grafik berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Grafik V.1-1 Kontribusi masing-masing sektor Pendapatan-LRA Kabupaten Merangin TA 2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Berdasarkan Grafik V.1-1, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Merangin masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pendanaan dari Pemerintah Pusat untuk menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya, di mana Pendapatan Transfer-LRA mencapai 92,65% dari total Pendapatan Daerah-LRA.

V.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LRA

	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp94.830.759.645,51	Rp107.976.482.974,79

Melalui mekanisme Perubahan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Merangin menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA sebesar Rp100.605.992.393,00. Dari target tersebut, realisasi PAD-LRA yang dapat dicapai sebesar Rp94.830.759.645,51 atau 94,26% dan memberikan kontribusi sebesar 6,50% bagi Pendapatan Kabupaten Merangin.

Rincian realisasi PAD-LRA yang diterima oleh Kas Daerah TA 2024 dimuat pada tabel berikut:

Tabel V.1-4 Realisasi PAD-LRA per Jenis Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024

(dalam rupiah)						
No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)	Persentase	
					Realisasi	Distribusi
1.	Pajak Daerah-LRA	31.183.000.000,00	32.240.409.337,40	1.057.409.337,40	103,39	34,00
2.	Retribusi Daerah-LRA	34.261.951.015,00	23.555.443.977,67	(10.706.507.037,33)	68,75	24,84
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	7.488.236.682,00	7.488.236.682,97	0,97	100,00	7,90
4.	Lain-lain PAD yang Sah-LRA	27.672.804.696,00	31.546.669.647,47	3.873.864.951,47	114,00	33,27
Jumlah		100.605.992.393,00	94.830.759.645,51	(5.775.232.747,49)	94,26	100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Rincian lebih lanjut per SKPD pengelola PAD tersaji pada **Lampiran 2**.

Pencapaian realisasi tersebut lebih rendah sebesar Rp13.145.723.329,28 atau (12,17%), dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp107.976.482.974,79 sebagaimana rincian berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel V.1-5 Perbandingan Realisasi PAD-LRA per Jenis Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023

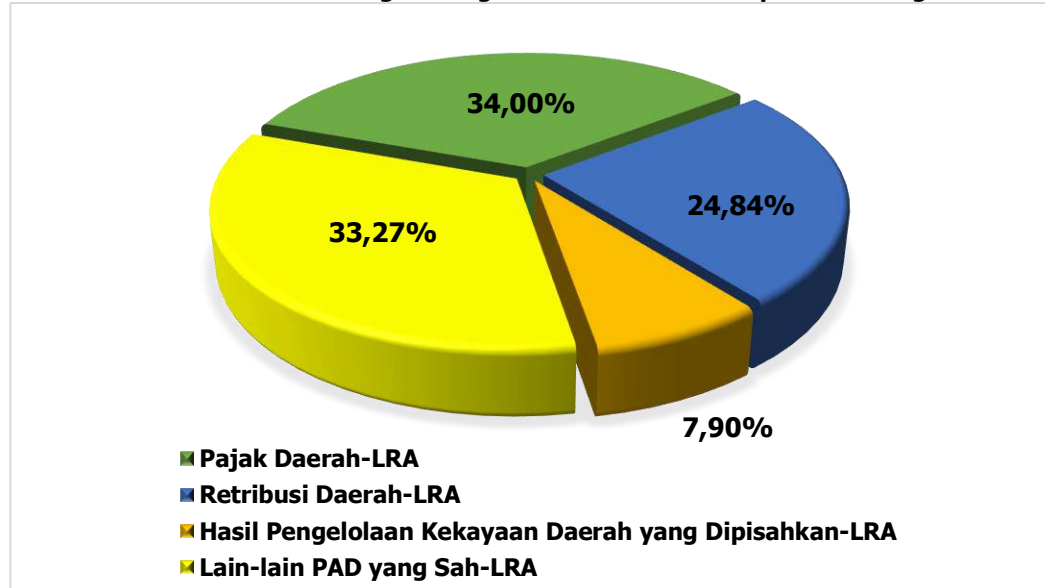
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Pajak Daerah-LRA	32.240.409.337,40	30.753.014.946,82	1.487.394.390,58	4,84
2.	Retribusi Daerah-LRA	23.555.443.977,67	5.256.138.946,00	18.299.305.031,67	348,15
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	7.488.236.682,97	7.268.658.153,62	219.578.529,35	3,02
4.	Lain-lain PAD yang Sah-LRA	31.546.669.647,47	64.698.670.928,35	(33.152.001.280,88)	(51,24)
Jumlah		94.830.759.645,51	107.976.482.974,79	(13.145.723.329,28)	(12,17)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Adapun penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD-LRA adalah Pajak Daerah-LRA dengan kontribusi sebesar 34,00%. Kontribusi masing-masing sektor PAD-LRA dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik V.1-2 Kontribusi masing-masing sektor PAD-LRA Kabupaten Merangin TA 2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Berdasarkan rincian PAD-LRA sebagaimana tabel di atas terlihat bahwa secara total, PAD TA 2024 belum mampu melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian target hanya dapat diraih pada sektor Pajak Daerah-LRA (103,39%), sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA (100,00%) dan sektor Lain-lain PAD yang Sah-LRA (114,01%). Sedangkan untuk sektor Retribusi Daerah-LRA tidak mencapai target sebesar (31,25%). Kondisi ini berpengaruh pada pencapaian secara keseluruhan di mana PAD-LRA mampu terealisasi sebesar 94,26%.

V.1.1.1.a Pajak Daerah-LRA

Tahun 2024
Rp32.240.409.337,40

Tahun 2023
Rp30.753.014.946,82

Pajak Daerah-LRA adalah akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Dari target Pajak Daerah-LRA sebagaimana ditetapkan melalui APBD sebesar Rp31.183.000.000,00, jumlah Pajak Daerah-LRA yang dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2024 adalah sebesar Rp32.240.409.337,40 atau 103,39%, sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp1.057.409.337,40 dari target yang ditetapkan.

Rincian realisasi Pajak Daerah-LRA TA 2024 sebagai berikut:

Tabel V.1-6 Realisasi Pajak Daerah-LRA per Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)	Persentase	
					Realisasi	Distribusi
1.	Pajak Reklame-LRA	1.079.500.000,00	972.685.537,50	(106.814.462,50)	90,11	3,02
2.	Pajak Air Tanah-LRA	200.000.000,00	158.340.710,00	(41.659.290,00)	79,17	0,49
3.	Pajak Sarang Burung Walet-LRA	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00
4.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA	1.600.000.000,00	1.104.057.101,50	(495.942.898,50)	69,00	3,42
5.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LRA	3.060.000.000,00	2.538.503.346,00	(521.496.654,00)	82,96	7,87
6.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LRA	2.300.000.000,00	2.550.837.146,00	250.837.146,00	110,91	7,91
7.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LRA	22.933.500.000,00	24.915.985.496,40	1.982.485.496,40	108,64	77,28
	- PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LRA	2.500.000.000,00	2.483.473.192,00	(16.526.808,00)	99,34	
	- PBJT-Tenaga Listrik-LRA	19.999.100.000,00	21.997.333.448,00	1.998.233.448,00	109,99	
	- PBJT-Jasa Perhotelan-LRA	200.000.000,00	200.307.488,40	307.488,40	100,15	
	- PBJT-Jasa Parkir-LRA	200.000.000,00	202.269.550,00	2.269.550,00	101,13	
	- PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LRA	34.400.000,00	32.601.818,00	(1.798.182,00)	94,77	
Jumlah		31.183.000.000,00	32.240.409.337,40	1.057.409.337,40	103,39	100,00

Sumber: BPPRD Kabupaten Merangin

Realisasi Pajak Daerah-LRA TA 2024 sebagaimana dijelaskan di atas memberikan kontribusi sebesar 34,00% bagi PAD-LRA Kabupaten Merangin.

Berdasarkan rincian penerimaan Pajak Daerah-LRA pada tabel di atas terlihat pula bahwa dari seluruh akun Pajak Daerah-LRA yang ditetapkan, pelampauan target tertinggi terjadi pada realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LRA sebesar 110,91% yang melebihi target sebesar Rp250.837.146,00 atau 10,91%. Namun bila dilihat dari sisi nilai, maka kontribusi realisasi penerimaan tertinggi untuk komponen Pajak Daerah-LRA TA 2024 adalah pada sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LRA yaitu sebesar Rp24.915.985.496,40 atau sebesar 77,28% dari total realisasi Pajak Daerah-LRA.

Dari tabel di atas, secara kumulatif, Pajak Daerah-LRA TA 2024 mampu mencapai target yang ditetapkan. Namun secara sektoral masih terdapat sektor Pajak Daerah-LRA yang belum mencapai target. Sektor tersebut adalah Pajak Reklame-LRA (90,11%), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LRA (82,96%), Pajak Air Tanah-LRA (79,17%), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA (69,00%), Pajak Sarang Burung Walet-LRA (0,00%), PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LRA (99,34%) dan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LRA (94,77%). Secara umum, penyebab tidak tercapainya target Pajak Daerah tersebut antara lain adalah:

1. Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat (wajib Pajak) dalam pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah; dan
2. Adanya masa transisi akibat perubahan regulasi terkait perubahan tarif yang membutuhkan sosialisasi intensif agar dapat diterima oleh Wajib Pajak.

Kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target Pajak Daerah menurut masing-masing sektor yang belum tercapai secara khusus sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

1. Sektor Pajak Reklame-LRA yang tidak terealisasi sebesar Rp106.814.462,50 atau (9,89%) dari target sebesar Rp1.079.500.000,00 karena rendahnya tingkat pemasangan reklame di ruang publik;
2. Sektor Pajak Air Tanah-LRA yang tidak terealisasi sebesar Rp41.659.290,00 atau (20,83%) dari target sebesar Rp200.000.000,00 karena rendahnya tingkat pemanfaatan air tanah;
3. Sektor Pajak Sarang Burung Walet-LRA yang tidak terealisasi atau (0,00%) dari target sebesar Rp10.000.000,00 karena belum adanya kesadaran wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan omset;
4. Sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA yang tidak terealisasi sebesar Rp495.942.898,50 atau (31,00%) dari target sebesar Rp1.600.000.000,00 karena sangat tergantung pada tingkat pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan dalam pembangunan infrastruktur, mengingat sektor ini sebagian besar bersumber dari pihak ketiga pelaksana kerja;
5. Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LRA yang tidak terealisasi sebesar Rp521.496.654,00 atau (17,04%) dari target sebesar Rp3.060.000.000,00 karena belum optimalnya penyampaian SPT oleh perangkat desa;
6. Sektor PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LRA yang tidak terealisasi sebesar Rp16.526.808,00 atau (0,66%) dari target sebesar Rp2.500.000.000,00 karena penurunan omset;
7. Sektor PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LRA yang tidak terealisasi sebesar Rp1.798.182,00 atau (5,23%) dari target sebesar Rp34.400.000,00 karena kurangnya jumlah event yang dapat terlaksana serta penurunan jumlah pengunjung pada usaha sektor hiburan.

Jika dibandingkan dengan TA 2023 di mana Pajak Daerah-LRA terealisasi sebesar Rp30.753.014.946,82, realisasi TA 2024 tersebut lebih tinggi sebesar Rp1.487.394.390,58 atau 4,84% sebagaimana rincian:

Tabel V.1-7 Perbandingan Realisasi Pajak Daerah-LRA per Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)					
No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Pajak Reklame-LRA	972.685.537,50	1.058.977.704,44	(86.292.166,94)	(8,15)
2.	Pajak Air Tanah-LRA	158.340.710,00	186.441.231,06	(28.100.521,06)	(15,07)
3.	Pajak Sarang Burung Walet-LRA	0,00	2.100.000,00	(2.100.000,00)	(100,00)
4.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA	1.104.057.101,50	1.566.147.786,35	(462.090.684,85)	(29,50)
5.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LRA	2.538.503.346,00	2.329.936.492,00	208.566.854,00	8,95
6.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LRA	2.550.837.146,00	2.159.807.682,50	391.029.463,50	18,10
7.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LRA	24.915.985.496,40	23.449.604.050,47	1.466.381.445,93	6,25
	- PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LRA	2.483.473.192,00	2.354.528.103,17	128.945.088,83	5,48
	- PBJT-Tenaga Listrik-LRA	21.997.333.448,00	20.730.202.846,00	1.267.130.602,00	6,11
	- PBJT-Jasa Perhotelan-LRA	200.307.488,40	193.235.951,30	7.071.537,10	3,66
	- PBJT-Jasa Parkir-LRA	202.269.550,00	159.927.900,00	42.341.650,00	26,48
	- PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LRA	32.601.818,00	11.709.250,00	20.892.568,00	178,43
Jumlah		32.240.409.337,40	30.753.014.946,82	1.487.394.390,58	4,84

Sumber: BPPRD Kabupaten Merangin

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, hampir sebagian besar komponen Pajak Daerah-LRA pada TA 2024 memiliki realisasi penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023, kecuali pada sektor:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

1. Pajak Reklame-LRA yang terealisasi lebih rendah sebesar Rp86.292.166,94 atau (8,15%) dari realisasi TA 2023 sebesar Rp1.058.977.704,44;
2. Pajak Air Tanah-LRA yang terealisasi lebih rendah sebesar Rp28.100.521,06 atau (15,07%) dari realisasi TA 2023 sebesar Rp186.441.231,06;
3. Pajak Sarang Burung Walet-LRA yang terealisasi lebih rendah sebesar Rp2.100.000,00 atau (100,00%) dari realisasi TA 2023 sebesar Rp2.100.000,00; dan
4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA yang terealisasi lebih rendah sebesar Rp462.090.684,85 atau (29,50%) dari realisasi TA 2023 sebesar Rp1.566.147.786,35.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terjadi perubahan terhadap nomenklatur jenis Pajak Daerah berupa pemberlakuan jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagai pengganti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir. sehingga perbandingan realisasi Pajak Daerah TA 2024 dan TA 2023 terhadap jenis pajak tersebut menjadi:

1. PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LRA TA 2024 yang terealisasi sebesar Rp2.483.473.192,00, meningkat sebesar Rp128.945.088,83 atau 5,48% dibandingkan realisasi Pajak Restoran TA 2023 sebesar Rp2.354.528.103,17;
2. PBJT Tenaga Listrik-LRA TA 2024 yang terealisasi sebesar Rp21.997.333.448,00, meningkat sebesar Rp1.267.130.602,00 atau 6,11% dibandingkan realisasi Pajak Penerangan Jalan TA 2023 sebesar Rp20.730.202.846,00;
3. PBJT Jasa Perhotelan-LRA TA 2024 yang terealisasi sebesar Rp200.307.488,40, meningkat sebesar Rp7.071.537,10 atau 3,66% dibandingkan realisasi Pajak Hotel TA 2023 sebesar Rp193.235.951,30;
4. PBJT Jasa Parkir-LRA TA 2024 yang terealisasi sebesar Rp202.269.550,00, meningkat sebesar Rp42.341.650,00 atau 26,48% dibandingkan realisasi Pajak Parkir TA 2023 sebesar Rp159.927.900,00; dan
5. PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan-LRA TA 2024 yang terealisasi sebesar Rp32.601.818,00, meningkat sebesar Rp20.892.568,00 atau 178,43% dibandingkan realisasi Pajak Hiburan TA 2023 sebesar Rp11.709.250,00.

V.1.1.1.b Retribusi Daerah-LRA

Tahun 2024
Rp23.555.443.977,67

Tahun 2023
Rp5.256.138.946,00

Retribusi Daerah-LRA adalah akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dari target Retribusi Daerah-LRA sebagaimana ditetapkan melalui APBD sebesar Rp34.261.951.015,00, jumlah Retribusi Daerah-LRA yang dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2024 adalah sebesar Rp23.555.443.977,67, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp10.706.507.037,33 atau 31,25%. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 24,84% dari total realisasi PAD-LRA Kabupaten Merangin. Rincian Retribusi Daerah-LRA yang dapat dipungut dan disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2024 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel V.1-8 Realisasi Retribusi Daerah-LRA per Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)	Persentase	
					Realisasi	Distri busi
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LRA	4.176.600.000,00	3.481.398.000,00	(695.202.000,00)	83,35	14,78
2.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LRA	26.331.465.515,00	17.612.909.346,87	(8.718.556.168,13)	66,89	74,77
3.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LRA	50.000.000,00	43.425.000,00	(6.575.000,00)	86,85	0,18
4.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LRA	910.000.000,00	346.257.200,00	(563.742.800,00)	38,05	1,47
5.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LRA	97.000.000,00	61.301.000,00	(35.699.000,00)	63,20	0,26
6.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LRA	28.600.000,00	0,00	(28.600.000,00)	0,00	0,00
7.	Retribusi Penyewaan Tanah-LRA	40.565.300,00	43.020.000,00	2.454.700,00	106,05	0,18
8.	Retribusi Penyewaan Bangunan-LRA	1.576.482.200,00	905.374.200,00	(671.108.000,00)	57,43	3,84
9.	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LRA	95.000.000,00	84.506.000,00	(10.494.000,00)	88,95	0,36
10.	Retribusi Pemakaian Alat-LRA	190.000.000,00	193.862.500,00	3.862.500,00	102,03	0,82
11.	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LRA	129.438.000,00	129.640.000,00	202.000,00	100,16	0,55
12.	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LRA	238.800.000,00	132.582.000,00	(106.218.000,00)	55,52	0,56
13.	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LRA	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00
14.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LRA	120.000.000,00	74.715.000,00	(45.285.000,00)	62,26	0,32
15.	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LRA	53.000.000,00	0,00	(53.000.000,00)	0,00	0,00
16.	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak-LRA	50.000.000,00	38.430.000,00	(11.570.000,00)	76,86	0,16
17.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LRA	50.000.000,00	53.900.000,00	3.900.000,00	107,80	0,23
18.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LRA	75.000.000,00	354.123.730,80	279.123.730,80	472,16	1,50
Jumlah		34.261.951.015,00	23.555.443.977,67	(10.706.507.037,33)	68,75	100,00

Sumber: BPPRD Kabupaten Merangin

Berdasarkan rincian penerimaan Retribusi Daerah-LRA pada tabel di atas diketahui bahwa dari seluruh akun yang ditetapkan, hanya 5 (lima) sektor retribusi yang mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LRA (472,16%), Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LRA (107,80%), Retribusi Penyewaan Tanah-LRA (106,05%), Retribusi Pemakaian Alat-LRA (102,03%), dan Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LRA (100,16%). Sedangkan sektor yang lain belum mampu melampaui target.

Bila dilihat dari sisi nilai, maka kontribusi realisasi penerimaan tertinggi untuk komponen Retribusi Daerah-LRA TA 2024 adalah pada sektor Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LRA yaitu sebesar Rp17.612.909.346,87 atau 74,77% dari total realisasi Retribusi Daerah-LRA yang merupakan realisasi pendapatan BLUD periode Agustus s.d. Desember 2024 hasil reklasifikasi dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah berdasarkan



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan realisasi periode Januari s.d Juli 2024 masih tercatat sebagai komponen Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp24.576.845.518,73.

Secara umum Retribusi Daerah-LRA TA 2024 belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Dari 18 (delapan belas) sektor yang ada, selain 5 (lima) sektor sebagaimana diuraikan di atas, 13 (tiga belas) sektor lainnya belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini disebabkan berbagai kendala yang dihadapi SKPD dalam mencapai target yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LRA pada Dinas Kesehatan tidak mencapai target sebesar Rp695.202.000,00 atau (16,65%) dari target sebesar Rp4.176.600.000,00 karena menurunnya tingkat kunjungan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan pada Puskesmas selaku Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
2. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LRA pada RSUD Kolonel Abundjani Bangko tidak mencapai target sebesar Rp8.718.556.168,13 atau (33,11%) dari target sebesar Rp26.331.465.515,00 karena menurunnya tingkat kunjungan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan pada RSUD Kolonel Abundjani Bangko. Disamping itu, pada periode Agustus s.d Desember 2024, RSUD Kolonel Abundjani Bangko mengalami penurunan kelas pelayanan pasien BPJS Kesehatan dari tipe C ke tipe D sebagaimana surat Kementerian Kesehatan Nomor YR.02.02/D/43972/2024 Perihal Hasil Reviu Kelas Rumah Sakit Tahun 2024 yang berpengaruh pada tarif layanan bagi masyarakat yang dapat diklaim ke BPJS Kesehatan.
3. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LRA pada Dinas Kesehatan berupa layanan Laboratorium Kesehatan Daerah yang tidak mencapai target sebesar Rp6.575.000,00 atau (13,15%) dari target sebesar Rp50.000.000,00.
4. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LRA pada Dinas Lingkungan Hidup tidak mencapai target sebesar Rp563.742.800,00 atau (61,95%) dari target sebesar Rp910.000.000,00. Hal ini disebabkan oleh:
 - a. Kurangnya kesadaran Wajib retribusi dalam pembayaran; dan
 - b. Kurangnya sumber daya penunjang proses penagihan.
5. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LRA yang secara umum tidak mencapai target sebesar Rp35.699.000,00 atau (36,80%) dari target sebesar Rp97.000.000,00. Sektor ini dikelola oleh SKPD:
 - a. Dinas Perhubungan yang belum mencapai target sebesar Rp29.559.000,00 atau (36,95%) dari target sebesar Rp80.000.000,00, karena berkurangnya intensitas masyarakat yang parkir di tepi jalan terutama setelah realokasi pedagang makanan dan minuman pada eks Pujasera yang semula berlokasi pada Taman PKK.
 - b. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang belum mencapai target sebesar Rp6.140.000,00 atau (36,12%) dari target sebesar Rp17.000.000,00, karena sangat tergantung oleh kunjungan ke objek wisata milik Pemerintah Daerah yang berada ditepi jalan umum oleh masyarakat;
6. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LRA dari target sebesar Rp28.600.000,00, yaitu Dinas Perikanan sebesar Rp25.000.000,00 dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp3.600.000,00 tidak terealisasi karena tidak terdapat perikatan sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah oleh masyarakat di tahun 2024.
7. Retribusi Penyewaan Bangunan-LRA yang secara umum tidak mencapai target sebesar Rp671.108.000,00 atau (42,57%) dari target sebesar Rp1.576.482.200,00. Sektor ini dikelola oleh SKPD:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mampu melebihi target sebesar Rp17.420.000,00 atau 7,37% dari target sebesar Rp236.360.000,00. Pendapatan ini bersumber dari penyewaan Rusunawa milik Pemerintah Daerah.
- b. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan berupa sewa ruko, kios dan los yang belum mencapai target sebesar Rp630.934.800,00 atau (50,60%) dari target sebesar Rp1.246.929.000,00, karena target yang harus dicapai belum menggambarkan kondisi nyata objek retribusi seperti Los buah-buahan dan los daging Pasar Bawah yang masih kosong, Los PKL Pasar Bawah sejumlah 40 unit yang terbakar, Los Blok A2 dan Blok B1 Terminal Angdes Pasar Bawah serta Kios Daging Pasar Baru Bangko yang tidak ada bangunan. Di samping itu, kapasitas UPTD Pengelolaan Pasar juga belum sepenuhnya memadai, baik dari aspek SDM maupun ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional.
- c. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berupa sewa gedung serbaguna dan hall bulu tangkis yang belum mencapai target sebesar Rp12.400.000,00 atau (25,83%) dari target sebesar Rp48.000.000,00, karena sangat tergantung oleh tingkat pemanfaatan gedung dan tingkat pemanfaatannya oleh masyarakat;
- d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tidak terealisasi atau (100,00%) dari target sebesar Rp45.193.200,00. karena tidak terdapat perikatan sewa bangunan milik Pemerintah oleh masyarakat di tahun 2024.
8. Retribusi Pemakaian Laboratorium-LRA yang secara umum tidak mencapai target sebesar Rp10.494.000,00 atau (11,05%) dari target sebesar Rp95.000.000,00. Sektor ini dikelola oleh SKPD:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mampu melebihi target sebesar Rp6.685.000,00 atau 26,74% dari target sebesar Rp25.000.000,00; dan
 - b. Dinas Lingkungan Hidup berupa sewa laboratorium belum mencapai target sebesar Rp17.179.000,00 atau 24,54% dari target sebesar Rp70.000.000,00.
9. Retribusi Tempat Khusus Parkir-LRA pada Dinas Perhubungan tidak mencapai target sebesar Rp106.218.000,00 atau (44,48%) dari target sebesar Rp238.800.000,00. Objek yang menjadi sumber sektor ini adalah pelayanan parkir di Pasar Baru Bangko. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan di lapangan adalah banyaknya akses masuk ke lokasi yang belum terjaga oleh petugas pemungutan.
10. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LRA pada Dinas Peternakan dan Perkebunan tidak terealisasi atau (100,00%) dari target sebesar Rp50.000.000,00 karena adanya ajuan keberatan atas kenaikan tarif layanan RPH pada tahun 2024 oleh para Tukang Potong.
11. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LRA tidak mencapai target sebesar Rp45.285.000,00 atau (37,74%) dari target sebesar Rp120.000.000,00 karena kurangnya kunjungan masyarakat ke objek-objek wisata, meski kondisi sarana dan prasarana kepariwisataan pada objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Merangin sudah mulai memadai melalui upaya-upaya pembangunan dan revitalisasi infrastruktur penunjang kepariwisataan. Di samping itu, adanya alih fungsi kawasan objek wisata menjadi fungsi lain misalnya objek wisata kawasan Dam Betuk di Kecamatan Tabir Lintas yang kini telah menjadi kawasan pengembangan/budidaya perikanan dan belum adanya payung hukum yang menaungi pemungutan untuk beberapa Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang potensial sebagai sumber pendapatan daerah juga memengaruhi tingkat capaian sektor ini.
12. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LRA pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tidak terealisasi atau (0,00%) dari target sebesar Rp53.000.000,00 yang sangat tergantung pada ketersediaan bibit atau benih



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

tanaman yang dapat diperjualbelikan kepada masyarakat dan di tahun 2024 realisasi sektor ini dicatat pada sektor Lain-Lain PAD yang Sah, Hasil Penjualan Tanaman.

13. Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak-LRA berupa ternak tidak layak bibit hasil pengelolaan UPTD Pinang Merah Kecamatan Pamenang Barat pada Dinas Peternakan dan Perkebunan tidak mencapai target sebesar Rp11.570.000,00 atau (23,14%) dari target sebesar Rp50.000.000,00 yang sangat tergantung pada ketersediaan bibit ternak yang dapat diperjualbelikan kepada masyarakat.

Realisasi Retribusi Daerah-LRA pada TA 2024 sebesar Rp23.555.443.977,67 meningkat sebesar Rp18.299.305.031,67 atau 348,15% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp5.256.138.946,00 yang selain karena peningkatan kinerja pendapatan, juga karena restrukturisasi nomenklatur retribusi daerah berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana rincian:

Tabel V.1-9 Perbandingan Realisasi Retribusi Daerah-LRA per Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LRA	3.481.398.000,00	2.972.478.300,00	508.919.700,00	17,12
2.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LRA	17.612.909.346,87	0,00	17.612.909.346,87	-
3.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LRA	43.425.000,00	0,00	43.425.000,00	-
4.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LRA	346.257.200,00	249.450.000,00	96.807.200,00	38,81
5.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LRA	61.301.000,00	46.605.000,00	14.696.000,00	31,53
6.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LRA	0,00	17.754.000,00	(17.754.000,00)	(100,00)
7.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LRA	0,00	5.772.000,00	(5.772.000,00)	(100,00)
8.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LRA	0,00	12.500.000,00	(12.500.000,00)	(100,00)
9.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LRA	0,00	25.909.000,00	(25.909.000,00)	(100,00)
10.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LRA	0,00	353.664.000,00	(353.664.000,00)	(100,00)
11.	Retribusi Penyewaan Tanah-LRA	43.020.000,00	72.400.000,00	(29.380.000,00)	(40,58)
12.	Retribusi Penyewaan Bangunan-LRA	905.374.200,00	826.596.208,00	78.777.992,00	9,53
13.	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LRA	84.506.000,00	76.893.000,00	7.613.000,00	9,90
14.	Retribusi Pemakaian Alat-LRA	193.862.500,00	141.860.000,00	52.002.500,00	36,66
15.	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LRA	129.640.000,00	129.400.000,00	240.000,00	0,19
16.	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LRA	132.582.000,00	112.865.000,00	19.717.000,00	17,47
17.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LRA	74.715.000,00	74.710.000,00	5.000,00	0,01
18.	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak-LRA	38.430.000,00	0,00	38.430.000,00	-
19.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LRA	53.900.000,00	0,00	53.900.000,00	-
20.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LRA	354.123.730,80	137.282.438,00	216.841.292,80	157,95
Jumlah		23.555.443.977,67	5.256.138.946,00	18.299.305.031,67	348,15

Sumber: BPPRD Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, sebagian besar komponen Retribusi Daerah-LRA pada TA 2024 memiliki realisasi penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023, sehingga berpengaruh pada peningkatan realisasi retribusi secara keseluruhan. Peningkatan tertinggi terdapat pada sektor Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LRA sebesar Rp17.612.909.346,87 yang pada tahun 2023 disajikan sebagai salah satu komponen Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

V.1.1.1.c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA

Tahun 2024
Rp7.488.236.682,97

Tahun 2023
Rp7.268.658.153,62

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LRA yang Dipisahkan merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari dividen/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga. Untuk TA 2024 penerimaan pendapatan ini berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin pada PT Bank Jambi.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LRA dalam TA 2024 sebesar Rp7.488.236.682,97 atau 100,00% dari target sebesar Rp7.488.236.682,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp7.268.658.153,62, maka terdapat peningkatan realisasi sebesar Rp219.578.529,35 atau 3,02%. Realisasi sektor ini sangat tergantung pada pembagian laba bersih tahun buku 2023 sesuai dengan proporsi saham Pemerintah kabupaten Merangin terhadap total dividen yang dibagikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jambi tahun 2024.

Posisi saham Pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2024 adalah sebesar Rp45.500.000.000,00. Realisasi TA 2024 tersebut memberikan kontribusi sebesar 7,90% bagi PAD-LRA Kabupaten Merangin.

V.1.1.1.d Lain-lain PAD yang Sah-LRA

Tahun 2024
Rp31.546.669.647,47

Tahun 2023
Rp64.698.670.928,35

Akun Lain-lain PAD yang Sah-LRA merupakan kelompok pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah-LRA, Retribusi Daerah-LRA, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA dalam TA 2024 sebesar Rp31.546.669.647,47 atau 114,00% dari target sebesar Rp27.672.804.696,00. Realisasi sektor ini memberi kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah sebesar 33,27%, dengan rincian yang terdiri dari:

Tabel V.1-10 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA per Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)	Persentase	
					Realisasi	Distribusi
1.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LRA	390.000.000,00	313.392.500,00	(76.607.500,00)	80,36	0,99
2.	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LRA	175.500.000,00	86.394.250,00	(89.105.750,00)	49,23	0,27
3.	Jasa Giro pada Kas Daerah-LRA	1.100.000.000,00	1.482.020.221,10	382.020.221,10	134,73	4,70
4.	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LRA	0,00	16.455,66	16.455,66	-	0,00
5.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LRA	1.408.219.178,00	3.599.560.290,23	2.191.341.112,23	255,61	11,41
6.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LRA	12.240.000,00	7.622.655,00	(4.617.345,00)	62,28	0,02
7.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LRA	0,00	2.228.406,00	2.228.406,00	-	0,01



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)	Persentase	
					Realisasi	Distribusi
8.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LRA	0,00	64.124.386,00	64.124.386,00	-	0,20
9.	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LRA	20.000.000,00	23.574.314,94	3.574.314,94	117,87	0,07
10.	Pendapatan dari Pengembalian-LRA	0,00	1.390.890.649,81	1.390.890.649,81	-	4,41
11.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LRA	24.566.845.518,00	24.576.845.518,73	10.000.000,73	100,04	77,90
Jumlah		27.672.804.696,00	31.546.669.647,47	3.873.864.951,47	114,00	100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Rincian penerimaan pada tabel di atas memperlihatkan bahwa pada TA 2024, realisasi penerimaan terbesar yang masuk melalui Rekening Kas Umum Daerah dari sisi nilai untuk sektor Lain-lain PAD yang Sah-LRA adalah Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LRA sebesar Rp24.576.845.518,73 atau 100,04% dari target yang ditetapkan sebesar Rp24.566.845.518,00. Sektor ini memberikan kontribusi terbesar yaitu 77,90% dari total realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA. Sedangkan apabila dilihat dari capaian, sektor yang memiliki realisasi tertinggi dibanding targetnya adalah sektor Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LRA yang terealisasi sebesar Rp3.599.560.290,23 atau 255,61% dari target sebesar Rp1.408.219.178,00.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA terdiri dari:

1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan-LRA sebesar Rp399.786.750,00 yang terdiri atas:

- Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp313.392.500,00, yaitu hasil pelelangan berdasarkan Risalah Lelang Nomor 640/04.01/2024-01 tanggal 11 Juli 2024 dan Keputusan Bupati Merangin Nomor 262/BPKAD/2024 tentang Penetapan Penjualan Barang Milik Daerah dengan Cara Lelang pada Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang Kabupaten Merangin TA 2024 tanggal 5 Juni 2024, dengan rincian:
 - 9 unit kendaraan roda empat pada 7 SKPD yang terjual dengan total nilai Rp232.558.500,00;
 - 27 unit kendaraan roda dua pada 9 SKPD yang terjual dengan total nilai Rp56.532.000,00; dan
 - 5 paket *scrap* Barang Inventaris Kantor pada 5 SKPD yang terjual dengan nilai Rp24.302.000,00.

Penerimaan ini diterima di Kas Daerah pada tanggal 23 Juli 2024. Jika dibandingkan dengan nilai barang sebagaimana tercantum dalam Risalah Lelang senilai Rp313.395.000,00, terdapat selisih kurang sebesar Rp2.500,00 yang merupakan biaya administrasi bank. Terhadap selisih tersebut maka harga lelang yang disajikan adalah nilai netto setelah dikurangi biaya administrasi bank yang dibebankan pada hasil penjualan barang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- Hasil Penjualan Aset Tetap lainnya-LRA sebesar Rp86.394.250,00 yang terdiri atas:
 - Penjualan hasil perikanan berupa benih ikan nila sebanyak 8.000 ekor hasil produksi Balai Benih Ikan (BBI) Talang Kawo, Kecamatan Bangko senilai Rp1.275.000,00 pada Dinas Perikanan;
 - Penjualan hasil perikanan berupa ikan nila sebanyak 128 kg hasil pembesaran Balai Benih Ikan (BBI) Talang Kawo, Kecamatan Bangko senilai Rp3.200.000,00 pada Dinas Perikanan;
 - Penjualan hasil perkebunan berupa sawit dari kebun Pemerintah Daerah di Desa Simpang Limbur Merangin Kecamatan Pamenang Barat senilai Rp30.023.000,00 pada Dinas Peternakan dan Perkebunan;



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- 4) Penjualan hasil perkebunan berupa karet senilai Rp19.266.250,00 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- 5) Penjualan hasil perkebunan berupa kentang senilai Rp22.830.000,00 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- 6) Penjualan hasil pertanian berupa padi senilai Rp9.800.000,00 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp761.902.460,00, realisasi TA 2024 berkurang sebesar Rp362.115.710,00 atau 47,53%.

2. Penerimaan Jasa Giro-LRA sebesar Rp1.482.020.221,10 berupa Jasa Giro pada PT. Bank Jambi Cabang Bangko dengan nomor rekening 401560009. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.382.775.667,49, realisasi TA 2024 lebih tinggi sebesar Rp99.244.553,61 atau 7,18%.
3. Penerimaan Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LRA sebesar Rp16.455,66. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar nihil, realisasi TA 2024 lebih tinggi sebesar 100,00%.
4. Penerimaan Bunga-LRA sebesar Rp3.599.560.290,23 berupa bunga deposito pada PT. Bank Jambi Cabang Bangko. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp659.275.974,93, realisasi TA 2024 meningkat sebesar Rp2.940.284.315,30 atau 445,99%. Rincian deposito serta bunga yang dihasilkan disajikan pada **Lampiran 8**.
5. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LRA sebesar Rp7.622.655,00 dengan rincian yang terdiri dari:
 - a. Setoran TPTGR an. SJ, mantan Bendahara Pengeluaran Satpol PP tahun 2012 senilai Rp3.250.000,00; dan
 - b. Setoran TPTGR an. VR, mantan Bendahara Pengeluaran Satpol PP tahun 2013 senilai Rp4.372.655,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp8.458.750,00, realisasi TA 2024 ini berkurang sebesar Rp836.095,00 atau (9,88%).

6. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lainnya-LRA sebesar Rp2.228.406,00 berupa kelebihan penyetoran atas pengembalian kelebihan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran/ASN. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.931.612.470,80, terdapat penurunan realisasi sebesar Rp1.929.384.064,80 atau (99,88%) karena realisasi ini pada tahun 2023 dicatat pada akun Lain-lain PAD yang Sah Lainnya. Sedangkan pada tahun 2024, akun tersebut sudah dihapuskan.
7. Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LRA sebesar Rp64.124.386,00, meningkat sebesar Rp30.500.165,31 atau 90,71%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp33.624.220,69.
8. Pendapatan Denda Pajak-LRA sebesar Rp23.574.314,94 dengan rincian:
 - a. Pendapatan Denda Pajak Hotel-LRA sebesar Rp740.132,27;
 - b. Pendapatan Denda Pajak Restoran-LRA sebesar Rp10.043.767,00;
 - c. Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LRA sebesar Rp10.000,00;
 - d. Pendapatan Denda Pajak Reklame-LRA sebesar Rp1.599.724,00;
 - e. Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan-LRA sebesar Rp100.549,80;
 - f. Pendapatan Denda Pajak Parkir-LRA sebesar Rp2.550.000,00;
 - g. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LRA sebesar Rp350.000,00;
 - h. Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA sebesar Rp1.766.807,87; dan
 - i. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LRA sebesar Rp6.413.334,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Pajak-LRA TA 2023 sebesar Rp121.563.505,46, realisasi TA 2024 ini berkurang sebesar Rp97.989.190,52 atau (80,61%).

9. Pendapatan dari Pengembalian-LRA sebesar Rp1.390.890.649,81 dengan rincian:
- Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas-LRA sebesar Rp10.654.691,00;
 - Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan-LRA sebesar Rp100.755.366,00;
 - Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LRA sebesar Rp31.734.536,00;
 - Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LRA sebesar Rp192.040.000,00;
 - Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah-LRA sebesar Rp5.146.204,00;
 - Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal-LRA sebesar Rp1.049.692.252,81; dan
 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas-LRA sebesar Rp867.600,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp124.626.465,00, realisasi TA 2024 ini bertambah sebesar Rp1.266.264.184,81 atau 1.016,05%.

Pada TA 2024 terdapat realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah berupa Pendapatan BLUD (RSUD Kol. Abundjani Bangko) sebesar Rp24.576.845.518,73. Penerimaan ini diatur tersendiri oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. Hingga TA 2024 berakhir, pendapatan sektor ini mampu melebihi target sebesar Rp10.000.000,73 atau 100,04% dari target sebesar Rp24.566.845.518,00 yang merupakan realisasi pendapatan BLUD periode Januari s.d. Juli 2024. Sedangkan untuk periode Agustus s.d. Desember 2024, realisasinya direklasifikasi ke Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LRA berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp64.698.670.928,35, realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA secara kumulatif berkurang sebesar Rp33.149.251.280,88 atau (51,24%) sebagaimana rincian:

Tabel V.1-11 Perbandingan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA per Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LRA	313.392.500,00	592.370.000,00	(278.977.500,00)	(47,10)
2.	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LRA	86.394.250,00	169.532.460,00	(83.138.210,00)	(49,04)
3.	Hasil Sewa BMD-LRA	0,00	139.324.000,00	(139.324.000,00)	(100,00)
4.	Jasa Giro pada Kas Daerah-LRA	1.482.020.221,10	1.382.775.667,49	99.244.553,61	7,18
5.	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LRA	16.455,66	0,00	16.455,66	-
6.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LRA	3.599.560.290,23	659.275.974,93	2.940.284.315,30	445,99
7.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LRA	7.622.655,00	7.690.000,00	(67.345,00)	(0,88)
8.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LRA	0,00	768.750,00	(768.750,00)	(100,00)
9.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LRA	2.228.406,00	1.931.612.470,80	(1.929.384.064,80)	(99,88)
10.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LRA	64.124.386,00	33.624.220,69	30.500.165,31	90,71
11.	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LRA	23.574.314,94	121.563.505,46	(97.989.190,52)	(80,61)



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
12.	Pendapatan dari Pengembalian-LRA	1.390.890.649,81	124.626.465,00	1.266.264.184,81	1.016,05
13.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LRA	24.576.845.518,73	46.781.476.669,98	(22.204.631.151,25)	(47,46)
14.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LRA	0,00	12.754.030.744,00	(12.754.030.744,00)	(100,00)
Jumlah		31.549.419.647,47	64.698.670.928,35	(33.149.251.280,88)	(51,24)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, secara kumulatif Lain-lain PAD yang Sah-LRA pada TA 2024 dibandingkan dengan TA 2023 belum cukup optimal. Peningkatan realisasi tertinggi di sisi nilai terdapat pada sektor Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LRA yang naik sebesar Rp2.940.284.315,30 atau 445,99%. Sedangkan peningkatan realisasi tertinggi di sisi persentase terdapat pada sektor Pendapatan dari Pengembalian-LRA yang naik sebesar Rp1.266.264.184,81 atau 1.016,05%

V.1.1.2 Pendapatan Transfer-LRA

Tahun 2024
Rp1.352.003.997.917,00

Tahun 2023
Rp1.290.285.622.944,00

Pendapatan Transfer-LRA merupakan akun untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi. Pada TA 2024, penerimaan sektor Pendapatan Transfer-LRA merupakan sumber dana terbesar dalam membiayai pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Merangin.

Pada Perubahan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Merangin menetapkan target Pendapatan Transfer-LRA sebesar Rp1.377.004.677.610,00. Dari target tersebut, realisasi yang dapat dicapai dan telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Merangin melalui Kas Daerah sebesar Rp1.352.003.997.917,00 atau 98,18% dan memberikan kontribusi sebesar 92,65% bagi Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin. Pendapatan Transfer-LRA TA 2024 terdiri dari:

Tabel V.1-12 Realisasi Pendapatan Transfer-LRA per Jenis Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)	Persentase	
					Realisasi	Distribusi
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA	1.275.666.531.939,00	1.280.081.569.300,00	4.415.037.361,00	100,35	94,68
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA	101.338.145.671,00	71.922.428.617,00	(29.415.717.054,00)	70,97	5,32
Jumlah		1.377.004.677.610,00	1.352.003.997.917,00	(25.000.679.693,00)	98,18	100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Berdasarkan rincian yang tercantum pada V.12, realisasi tertinggi berdasarkan nilai dan persentase bersumber dari sektor Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA yang mampu terealisasi sebesar Rp1.280.081.569.300,00 atau sebesar 100,35% dari target sebesar Rp1.275.666.531.939,00 yang juga memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Transfer-LRA yaitu sebesar 94,68% dari total realisasi Pendapatan Transfer-LRA.

Pencapaian realisasi Pendapatan Transfer-LRA TA 2024 lebih tinggi sebesar Rp61.718.374.973,00 atau 4,78%, dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.290.285.622.944,00 sebagaimana uraian berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel V.1-13 Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer-LRA per Jenis Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA	1.280.081.569.300,00	1.185.973.856.788,00	94.107.712.512,00	7,94
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA	71.922.428.617,00	104.311.766.156,00	(32.389.337.539,00)	(31,05)
Jumlah		1.352.003.997.917,00	1.290.285.622.944,00	61.718.374.973,00	4,78

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Kontribusi masing-masing sektor Pendapatan Transfer-LRA dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik V.1-3 Kontribusi masing-masing sektor Pendapatan Transfer-LRA Kabupaten Merangin TA 2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.1.1.2.a Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA

Tahun 2024
Rp1.280.081.569.300,00

Tahun 2023
Rp1.185.973.856.788,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan-LRA, Dana Insentif Daerah (DID)-LRA dan Dana Desa-LRA. Penetapan target pendapatan yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat berpedoman pada Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024, PMK Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian DBH CHT menurut Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota TA 2024, KMK Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa setiap Desa TA 2024, KMK Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal TA 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, KMK Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian DAU TA 2024 dalam rangka Dukungan Pendanaan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN di Daerah dan KMK Nomor 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian DAK Nonfisik Dana Tunjangan Guru ASN Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisata TA 2024.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA pada TA 2024 yang ditetapkan melalui APBD Kabupaten Merangin TA 2024 sebesar Rp1.275.666.531.939,00. Terealisasi sebesar 100,35% dari target tersebut sebesar yaitu Rp1.280.081.569.300,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA TA 2024 memberikan kontribusi sebesar 94,68% bagi Pendapatan Transfer-LRA Kabupaten Merangin.

Untuk TA 2024 realisasi penerimaan akun ini terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel V.1-14 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA per Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)	Persentase	
					Realisasi	Distribusi
1.	Dana Perimbangan-LRA	1.087.904.906.939,00	1.092.319.944.300,00	4.415.037.361,00	100,41	85,33
2.	Dana Desa-LRA	174.932.338.000,00	174.932.338.000,00	0,00	100,00	13,67
3.	Insentif Fiskal-LRA	12.829.287.000,00	12.829.287.000,00	0,00	100,00	1,00
Jumlah		1.275.666.531.939,00	1.280.081.569.300,00	4.415.037.361,00	100,35	100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Jika dibandingkan dengan TA 2023 yang secara total terealisasi sebesar Rp1.185.973.856.788,00, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA TA 2024 meningkat sebesar Rp94.107.712.512,00 atau 7,94% yang terdiri atas:

Tabel V.1-15 Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA per Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Dana Perimbangan-LRA	1.092.319.944.300,00	999.933.969.788,00	92.385.974.512,00	9,24
2.	Dana Desa-LRA	174.932.338.000,00	175.219.610.000,00	(287.272.000,00)	(0,16)
3.	Insentif Fiskal-LRA	12.829.287.000,00	10.820.277.000,00	2.009.010.000,00	18,57
Jumlah		1.280.081.569.300,00	1.185.973.856.788,00	94.107.712.512,00	7,94

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA yang diterima melalui Kas Daerah TA 2024 adalah sebagai berikut:

V.1.1.2.a.1 Dana Perimbangan-LRA

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp1.092.319.944.300,00	Rp999.933.969.788,00

Pendapatan Dana Perimbangan-LRA merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil Pemerintah Pusat dalam bentuk Bagi Hasil Pajak-LRA, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LRA, Dana Alokasi Umum-LRA dan Dana Alokasi Khusus-LRA. Pendapatan Dana Perimbangan-LRA yang ditetapkan melalui APBD Kabupaten Merangin TA 2024 sebesar Rp1.087.904.906.939,00. Terealisasi sebesar 100,41% dari target yang ditetapkan tersebut atau sebesar Rp1.092.319.944.300,00.

Untuk TA 2024 realisasi penerimaan akun ini terdiri dari:

Tabel V.1-16 Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan-LRA per Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)	Persentase	
					Realisasi	Distribusi
1.	Dana Bagi Hasil-LRA	108.840.028.000,00	108.840.848.250,00	820.250,00	100,00	9,96
2.	Dana Alokasi Umum-LRA	729.206.208.000,00	732.006.415.432,00	2.800.207.432,00	100,38	67,01
3.	Dana Alokasi Khusus Fisik-LRA	88.275.705.000,00	86.635.359.106,00	(1.640.345.894,00)	98,14	7,93
4.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LRA	161.582.965.939,00	164.837.321.512,00	3.254.355.573,00	102,01	15,09
Jumlah		1.087.904.906.939,00	1.092.319.944.300,00	4.415.037.361,00	100,41	100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sektor yang memiliki kontribusi terbesar bagi Pendapatan Dana Perimbangan-LRA adalah sektor Dana Alokasi Umum-LRA dengan kontribusi sebesar 67,01%. Dari seluruh komponen Pendapatan Dana Perimbangan-LRA pada TA 2024, masih terdapat sektor pendapatan yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Sektor tersebut adalah DAK Fisik-LRA yang terealisasi sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Rp86.635.359.106,00 atau 98,14% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp88.275.705.000,00. Sedangkan untuk sektor lain mampu melebihi target yaitu sektor DBH-LRA mampu melebihi target, dengan realisasi Rp108.840.848.250,00 atau 100,00% dari target sebesar Rp108.840.028.000,00, sektor DAU-LRA mampu melebihi target, dengan realisasi Rp732.006.415.432,00 atau 100,38% dari target sebesar Rp729.206.208.000,00 dan DAK Non Fisik-LRA yang terealisasi sebesar Rp164.837.321.512,00 atau 102,01% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp161.582.965.939,00.

Tidak tercapainya target DAK Fisik-LRA disebabkan oleh karena realisasi sektor ini sangat tergantung pada progres pelaksanaan, serapan dana dan kedisiplinan Pemerintah Daerah dalam pelaporan kegiatan yang didanai oleh DAK Fisik.

Jika dibandingkan dengan TA 2023 yang secara total terealisasi sebesar Rp999.933.969.788,00, realisasi Pendapatan Dana Perimbangan-LRA TA 2024 meningkat sebesar Rp92.385.974.512,00 atau 9,24% yang terdiri atas:

Tabel V.1-17 Perbandingan Realisasi Dana Perimbangan-LRA per Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Dana Bagi Hasil-LRA	108.840.848.250,00	77.121.837.796,00	31.719.010.454,00	41,13
2.	Dana Alokasi Umum-LRA	732.006.415.432,00	686.823.402.178,00	45.183.013.254,00	6,58
3.	Dana Alokasi Khusus Fisik-LRA	86.635.359.106,00	71.494.372.292,00	15.140.986.814,00	21,18
4.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LRA	164.837.321.512,00	164.494.357.522,00	342.963.990,00	0,21
Jumlah		1.092.319.944.300,00	999.933.969.788,00	92.385.974.512,00	9,24

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Rincian Pendapatan Dana Perimbangan-LRA yang diterima melalui Kas Daerah TA 2024 adalah sebagai berikut:

V.1.1.2.a.1.1 Dana Bagi Hasil-LRA

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp108.840.848.250,00	Rp77.121.837.796,00

Dana Bagi Hasil-LRA yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Penetapan alokasi anggaran DBH berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang rincian APBN Tahun 2024 berdasarkan tingkat capaian realisasi Penerimaan Negara di sektor Pajak dan Sumber Daya Alam.

Pendapatan DBH-LRA pada TA 2024 terealisasi sebesar Rp108.840.848.250,00 atau sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp108.840.028.000,00. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 9,96% bagi Pendapatan Dana Perimbangan-LRA yang diterima Kabupaten Merangin. Untuk TA 2024 realisasi penerimaan akun ini terdiri dari:

Tabel V.1-18 Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil-LRA per Sub Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan-LRA	7.758.033.000,00	7.758.033.000,00	0,00	100,00
2.	DBH PPh Pasal 21-LRA	5.483.307.000,00	5.456.847.000,00	(26.460.000,00)	99,52
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LRA	239.220.000,00	265.680.000,00	26.460.000,00	111,06



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
4.	DBH CHT-LRA	38.225.000,00	39.045.250,00	820.250,00	102,15
5.	DBH SDA Minyak Bumi-LRA	10.663.670.000,00	10.663.670.000,00	0,00	100,00
6.	DBH SDA Gas Bumi-LRA	29.435.161.000,00	29.435.161.000,00	0,00	100,00
7.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LRA	336.257.000,00	336.257.000,00	0,00	100,00
8.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LRA	40.935.226.000,00	40.935.226.000,00	0,00	100,00
9.	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LRA	1.018.389.000,00	1.018.389.000,00	0,00	100,00
10.	DBH SDA Perikanan-LRA	1.143.842.000,00	1.143.842.000,00	0,00	100,00
11.	DBH Sawit-LRA	11.788.698.000,00	11.788.698.000,00	0,00	-
Jumlah		108.840.028.000,00	108.840.848.250,00	820.250,00	100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2023 sebesar Rp77.121.837.796,00, realisasi TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp31.719.010.454,00 atau 41,13% sebagaimana uraian berikut:

Tabel V.1-19 Perbandingan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil-LRA per Sub Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan-LRA	7.758.033.000,00	7.512.494.746,00	245.538.254,00	3,27
2.	DBH PPh Pasal 21-LRA	5.456.847.000,00	5.987.558.570,00	(530.711.570,00)	(8,86)
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LRA	265.680.000,00	258.105.858,00	7.574.142,00	2,93
4.	DBH CHT-LRA	39.045.250,00	92.580.092,00	(53.534.842,00)	(57,83)
5.	DBH SDA Minyak Bumi-LRA	10.663.670.000,00	13.547.130.368,00	(2.883.460.368,00)	(21,28)
6.	DBH SDA Gas Bumi-LRA	29.435.161.000,00	8.073.353.852,00	21.361.807.148,00	264,60
7.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LRA	336.257.000,00	259.374.563,00	76.882.437,00	29,64
8.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LRA	40.935.226.000,00	24.752.457.323,00	16.182.768.677,00	65,38
9.	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LRA	1.018.389.000,00	1.848.319.213,00	(829.930.213,00)	(44,90)
10.	DBH SDA Perikanan-LRA	1.143.842.000,00	1.444.887.211,00	(301.045.211,00)	(20,84)
11.	DBH Sawit-LRA	11.788.698.000,00	13.345.576.000,00	(1.556.878.000,00)	(11,67)
Jumlah		108.840.848.250,00	77.121.837.796,00	31.719.010.454,00	41,13

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Dari tabel di atas, realisasi Dana Bagi Hasil TA 2024 yang meningkat cukup signifikan dibandingkan TA 2023 adalah DBH SDA Gas Bumi (264,60%), DBH SDA Minerba-Royalti (65,38%) dan DBH SDA Minerba-Landrent (29,64%). Secara umum, hal ini disebabkan peningkatan penetapan alokasi DBH tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 dibandingkan tahun 2023. Disamping itu, secara khusus, peningkatan tersebut juga disebabkan karena adanya penarikan kas atas DBH yang di-TDF-kan tahun 2023 pada tahun 2024 sebagaimana KMK Nomor 164 tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. TDF DBH SDA Gas Bumi sebesar Rp18.669.543.000,00;
2. TDF DBH SDA Minerba-Royalti sebesar Rp8.834.124.000,00; dan
3. TDF DBH SDA Minerba-Landrent sebesar Rp 59.182.000,00.

Selain peningkatan sebagaimana diuraikan diatas, terdapat pula sektor Dana Bagi Hasil TA 2024 yang mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan TA 2023. Sektor tersebut adalah DBH Cukai Hasil Tembakau (57,83%), DBH SDA Kehutanan (44,90%),



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

DBH SDA Minyak Bumi (21,28%) dan DBH SDA Perikanan (20,84%) yang secara umum disebabkan penurunan penetapan alokasi DBH tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 dibandingkan tahun 2023. Disamping itu, secara khusus, penurunan tersebut juga disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Penghentian penyaluran DBH Cukai Hasil Tembakau tahun 2024 sebesar Rp1.146.750,00 sebagaimana KMK Nomor 43/KM.7/2024;
2. Realisasi tahun 2023 tidak hanya atas penetapan tahun berkenaan, namun terdapat pula penarikan kas atas DBH yang di-TDF-kan tahun 2022 pada tahun 2023 sebagaimana KMK Nomor 10/KM.5/2022 dengan rincian:
 - a. TDF DBH SDA Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp10.842.792,00;
 - b. TDF DBH SDA Kehutanan-PSDH sebesar Rp321.890.213,00;
 - c. TDF DBH SDA Minyak Bumi sebesar Rp1.374.622.368,00; dan
 - d. TDF DBH SDA Perikanan sebesar Rp211.753.211,00.

V.1.1.2.a.1.2 Dana Alokasi Umum-LRA

Tahun 2024
Rp732.006.415.432,00

Tahun 2023
Rp686.823.402.178,00

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Penetapan alokasi anggaran DAU berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang rinciing APBN Tahun 2024. Realisasi DAU sebesar Rp732.006.415.432,00, lebih tinggi sebesar Rp2.800.207.432,00 atau 100,38% dari target yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp729.206.208.000,00. Kontribusi DAU terhadap dana Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) sebesar 67,01%.

Selisih lebih realisasi DAU terhadap anggaran di tahun 2024 merupakan akumulasi dari:

1. Realisasi DAU Tambahan sebesar Rp10.350.170.000,00 yang diperuntukan sebagai Dukungan THR bagi Guru ASN Daerah sebesar Rp5.240.777.000,00 dan Dukungan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah sebesar Rp5.109.393.000,00 sebagaimana diatur pada KMK Nomor 416 Tahun 2024 tanggal 16 November 2024. Penetapan atas alokasi ini terbit setelah Perubahan APBD 2024 sehingga tidak terakomodir pada Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD TA 2024 yang diterbitkan tanggal 10 Oktober 2024.
2. Realisasi kurang DAU yang ditentukan penggunaannya untuk Penggajian Formasi PPPK sebesar Rp7.549.962.568,00. Penyaluran DAU ini pada tahun 2024 berdasarkan kebutuhan Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK sesuai jumlah Pegawai PPPK yang diterbitkan SK pengangkatannya.

Realisasi DAU-LRA TA 2024 terdiri dari:

1. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp538.778.464.000,00;
2. DAU Tambahan THR bagi ASN Guru Daerah sebesar Rp5.240.777.000,00;
3. DAU Tambahan Dukungan Gaji Ketiga Belas bagi ASN Guru Daerah sebesar Rp5.109.393.000,00;
4. DAU yang ditentukan Penggunaannya dengan total nilai sebesar Rp182.877.781.432,00, berupa:
 - a. Penggajian Formasi PPPK sebesar Rp37.558.649.432,00;
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebesar Rp2.000.000.000,00;
 - c. Bidang Pendidikan sebesar Rp90.855.979.000,00;
 - d. Bidang Kesehatan sebesar Rp24.521.157.000,00; dan
 - e. Bidang Pekerjaan Umum Rp27.941.996.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Jika dibandingkan TA 2023 yang terealisasi sebesar Rp686.823.402.178,00, terdapat peningkatan realisasi sebesar Rp45.183.013.254,00 atau 6,58% yang secara umum disebabkan karena peningkatan penetapan alokasi DBH tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 dibandingkan tahun 2023. Disamping itu, secara khusus, peningkatan tersebut juga disebabkan karena:

1. Penetapan DAU Tambahan sebesar Rp10.350.170.000,00 tahun 2024 yang diperuntukan sebagai Dukungan THR bagi Guru ASN Daerah sebesar Rp5.240.777.000,00 dan Dukungan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah sebesar Rp5.109.393.000,00 sebagaimana diatur pada KMK Nomor 416 Tahun 2024 tanggal 16 November 2024.
2. Adanya pemotongan langsung atas penyaluran DAU bulan Oktober 2023 sebesar Rp800.822,00 atas sisa DAK Non Fisik Dana Pelayanan Adminduk tahun sebelumnya yang hingga 31 Desember 2022 belum dikembalikan ke RKUN.

V.1.1.2.a.1.3 Dana Alokasi Khusus Fisik-LRA

Tahun 2024
Rp86.635.359.106,00

Tahun 2023
Rp71.494.372.292,00

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Untuk TA 2023, pengalokasian DAK terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Realisasi DAK Fisik pada TA 2024 adalah sebesar Rp86.635.359.106,00 atau 98,14% dari target yang ditetapkan sebesar Rp88.275.705.000,00. Realisasi TA 2024 tersebut memberikan kontribusi sebesar 7,93% bagi Pendapatan Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Merangin. Untuk TA 2024 realisasi penerimaan akun ini terdiri dari:

Tabel V.1-20 Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik-LRA per Sub Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
1.	DAK Bidang Pendidikan-LRA	26.317.424.000,00	26.098.994.348,00	(218.429.652,00)	99,17
	a. DAK-PAUD	932.036.000,00	928.437.341,00	(3.598.659,00)	99,61
	b. DAK-SD	20.099.353.000,00	19.921.387.779,00	(177.965.221,00)	99,11
	c. DAK-SMP	4.629.748.000,00	4.595.190.670,00	(34.557.330,00)	99,25
	d. DAK-Perpustakaan Daerah	656.287.000,00	653.978.558,00	(2.308.442,00)	99,65
2.	DAK Bidang Kesehatan dan KB-LRA	11.970.852.000,00	11.808.831.071,00	(162.020.929,00)	98,65
	a. Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	2.308.861.000,00	2.272.898.781,00	(35.962.219,00)	98,44
	b. Penguatan Sistem Kesehatan	9.661.991.000,00	9.535.932.290,00	(126.058.710,00)	98,70
3.	DAK Bidang Infrastruktur Jalan-LRA	31.137.217.000,00	30.843.767.000,00	(293.450.000,00)	99,06
	a. Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	11.329.306.000,00	11.267.908.000,00	(61.398.000,00)	99,46
	b. Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	9.020.798.000,00	8.871.817.000,00	(148.981.000,00)	98,35
	c. Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	10.787.113.000,00	10.704.042.000,00	(83.071.000,00)	99,23
4.	DAK Irigasi-LRA	3.402.491.000,00	3.345.676.700,00	(56.814.300,00)	98,33
	- Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	3.402.491.000,00	3.345.676.700,00	(56.814.300,00)	98,33
5.	DAK Pertanian-LRA	8.360.000.000,00	7.503.121.400,00	(856.878.600,00)	89,75
	- Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	8.360.000.000,00	7.503.121.400,00	(856.878.600,00)	89,75



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
6.	DAK Bidang Industri Kecil & Menengah-LRA	3.640.687.000,00	3.610.973.070,00	(29.713.930,00)	99,18
	- Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	3.640.687.000,00	3.610.973.070,00	(29.713.930,00)	99,18
7.	DAK Bidang Pariwisata-LRA	2.503.382.000,00	2.484.139.322,00	(19.242.678,00)	99,23
	- Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	2.503.382.000,00	2.484.139.322,00	(19.242.678,00)	99,23
8.	DAK Bidang Lingkungan Hidup-LRA	943.652.000,00	939.856.195,00	(3.795.805,00)	99,60
	- Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	943.652.000,00	939.856.195,00	(3.795.805,00)	99,60
Jumlah		88.275.705.000,00	86.635.359.106,00	(1.640.345.894,00)	98,14

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

DAK Fisik TA 2024 sebagaimana diuraikan pada tabel di atas terdistribusi kepada masing-masing SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi berkenaan dan dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Perpres Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2024.

Dari tabel di atas, realisasi DAK Fisik TA 2024 yang tidak tercapai cukup signifikan adalah DAK Pertanian sebesar Rp856.878.600,00, DAK Bidang Infrastruktur-Jalan sebesar Rp293.450.000,00; DAK Bidang Pendidikan-SD sebesar Rp177.965.221,00, dan DAK Bidang Kesehatan sebesar Rp162.020.929,00. Selisih kurang realisasi DAK Fisik terhadap anggaran di tahun 2024 secara umum merupakan selisih pagu anggaran terhadap nilai pekerjaan yang dikontrakkan. Dimana nilai kontrak yang dilaksanakan merupakan nilai pekerjaan hasil negosiasi pada saat proses pemilihan penyedia yang menjadi dasar usulan nilai Kontrak dan Nilai Rencana Penyelesaian Kegiatan (NRPK) dari SKPD teknis pada Aplikasi OMSPAN.

Namun demikian terdapat kejadian khusus yang juga mempengaruhi rendahnya tingkat capaian realisasi DAK Fisik tahun 2024 pada beberapa sektor seperti:

1. DAK Bidang Pertanian, disebabkan karena kegiatan Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan yang gagal kontrak senilai Rp855.000.000,00 pada 3 lokasi yaitu Desa Kandang Kec. Tabir, Desa Sungai Pinang Kec. Sungai Manau, dan Kel. Dusun Baru Kec. Tabir karena Kelompok Tani calon penerima tidak dapat memenuhi Surat Keterangan Pembebasan Lahan/Hibah Lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan; dan
2. DAK Bidang Kesehatan dan KB, disebabkan karena kegiatan Pengadaan Kendaraan Distribusi Obat UPTD Instalasi Farmasi yang gagal kontrak senilai Rp49.151.350,00 karena nilai pagu yang dianggarkan lebih kecil dari harga e-katalog.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2023 sebesar Rp71.494.372.292,00, DAK Fisik TA 2024 meningkat sebesar Rp15.140.986.814,00 atau 21,18% sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel V.1-21 Perbandingan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik-LRA per Sub Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	DAK Bidang Pendidikan-LRA	26.098.994.348,00	25.439.404.860,00	659.589.488,00	2,59
	a. DAK-PAUD	928.437.341,00	713.830.650,00	214.606.691,00	30,06
	b. DAK-SD	19.921.387.779,00	14.446.736.100,00	5.474.651.679,00	37,90
	c. DAK-SMP	4.595.190.670,00	5.809.579.642,00	(1.214.388.972,00)	(20,90)
	d. DAK-SKB	653.978.558,00	0,00	653.978.558,00	-
	e. DAK-Perpustakaan Daerah	0,00	4.469.258.468,00	(4.469.258.468,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
2.	DAK Bidang Kesehatan dan KB-LRA	11.808.831.071,00	5.335.486.425,00	6.473.344.646,00	121,33
	a. Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	2.272.898.781,00	0,00	2.272.898.781,00	-
	b. Penguatan Sistem Kesehatan	9.535.932.290,00	5.335.486.425,00	4.200.445.865,00	78,73
3.	DAK Bidang Infrastruktur Jalan-LRA	30.843.767.000,00	29.539.039.800,00	1.304.727.200,00	4,42
	a. Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	11.267.908.000,00	16.044.809.800,00	(4.776.901.800,00)	(29,77)
	b. Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	8.871.817.000,00	13.494.230.000,00	(4.622.413.000,00)	(34,25)
	c. Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	10.704.042.000,00	0,00	10.704.042.000,00	-
4.	DAK Irigasi-LRA	3.345.676.700,00	0,00	3.345.676.700,00	-
	- Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	3.345.676.700,00	0,00	3.345.676.700,00	-
5.	DAK Pertanian-LRA	7.503.121.400,00	0,00	7.503.121.400,00	-
	- Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	7.503.121.400,00	0,00	7.503.121.400,00	-
6.	DAK Bidang Industri Kecil & Menengah-LRA	3.610.973.070,00	1.828.988.255,00	1.781.984.815,00	97,43
	- Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	3.610.973.070,00	1.828.988.255,00	1.781.984.815,00	97,43
7.	DAK Bidang Pariwisata-LRA	2.484.139.322,00	1.617.128.200,00	867.011.122,00	53,61
	- Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	2.484.139.322,00	1.617.128.200,00	867.011.122,00	53,61
8.	DAK Bidang Lingkungan Hidup-LRA	939.856.195,00	1.553.074.500,00	(613.218.305,00)	(39,48)
	- Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	939.856.195,00	1.553.074.500,00	(613.218.305,00)	(39,48)
9.	DAK Bidang Usaha Mikro, Kecil & Menengah-LRA	0,00	6.181.250.252,00	(6.181.250.252,00)	(100,00)
	- Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	0,00	6.181.250.252,00	(6.181.250.252,00)	(100,00)
Jumlah		86.635.359.106,00	71.494.372.292,00	15.140.986.814,00	21,18

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Dari tabel di atas, realisasi DAK Fisik TA 2024 yang meningkat cukup signifikan dibandingkan TA 2023 adalah DAK Bidang Kesehatan (121,33%), DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah (97,43%), DAK Bidang Pariwisata (53,61%), DAK Bidang Pendidikan-SD (37,90%) dan DAK Bidang Pendidikan-PAUD (30,06%). Secara umum, hal ini disebabkan peningkatan penetapan alokasi DBH tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 dibandingkan tahun 2023.

Disamping itu, secara khusus, peningkatan tersebut juga disebabkan karena pada tahun 2023 terdapat pekerjaan yang gagal kontrak yaitu pada sektor DAK Bidang Kesehatan berupa:

1. Pengadaan *Fasfec Cold Storage* Labkesda Kabupaten Merangin sebesar Rp82.500.000,00 karena karena nilai pagu yang dianggarkan lebih kecil dari harga e-katalog; dan
2. Kegiatan pengendalian penyakit sebesar Rp121.539.000,00 yang tidak disetujui Pembahas (K/L).

Selain peningkatan sebagaimana diuraikan diatas, terdapat pula sektor DAK Fisik yang mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan TA 2023. Sektor tersebut adalah



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

DAK Bidang Lingkungan Hidup (39,48%) dan DAK Bidang Pendidikan-SMP (20,90%) yang disebabkan penurunan penetapan alokasi DAK Fisik tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 dibandingkan tahun 2023.

Disamping itu, tahun 2024 terdapat pula sektor DAK Fisik yang tidak mendapatkan alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat yaitu DAK Bidang Pendidikan-Perpustakaan Daerah dan DAK Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

V.1.1.2.a.1.4 Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LRA

Tahun 2024
Rp164.837.321.512,00

Tahun 2023
Rp164.494.357.522,00

Selain DAK Fisik sebagaimana diuraikan pada poin V.1.1.2.a.1.3 di atas, pada TA 2024, Kabupaten Merangin juga mendapatkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa alokasi DAK Non Fisik-LRA, yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri terkait yang mengatur tentang petunjuk teknis DAK Non Fisik TA 2024.

Sektor ini terealisasi sebesar Rp164.837.321.512,00 atau 102,01% dari target sebesar Rp161.582.965.939,00 dan memberikan kontribusi sebesar 15,09% bagi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang diterima Kabupaten Merangin TA 2024. Realisasi penerimaan akun ini terdiri dari:

Tabel V.1-22 Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LRA per Sub Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
1.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	51.052.811.711,00	51.210.012.604,00	157.200.893,00	100,31
2.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.127.500.000,00	2.127.500.000,00	0,00	100,00
3.	DAK Non Fisik-BOP PAUD Reguler	6.457.800.000,00	6.414.771.000,00	(43.029.000,00)	99,33
4.	DAK Non Fisik-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
5.	DAK Non Fisik-BOP Kesetaraan Reguler	2.797.500.000,00	2.633.955.500,00	(163.544.500,00)	94,15
6.	DAK Non Fisik-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	100,00
7.	DAK Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru	60.373.686.920,00	60.041.113.000,00	(332.573.920,00)	99,45
8.	DAK Non Fisik-Tambahan Penghasilan Guru	983.928.000,00	3.999.350.000,00	3.015.422.000,00	406,47
9.	DAK Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru	2.748.802.300,00	3.370.550.000,00	621.747.700,00	122,62
10.	DAK Non Fisik-BOK Kabupaten Kota	6.967.375.515,00	6.967.375.515,00	0,00	100,00
11.	DAK Non Fisik-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	486.831.000,00	486.831.000,00	0,00	100,00
12.	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas	16.664.975.497,00	16.664.107.897,00	(867.600,00)	99,99
13.	DAK Non Fisik-BO Keluarga Berencana	5.652.913.980,00	5.652.913.980,00	0,00	100,00
14.	DAK Non Fisik-Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK	554.511.000,00	554.511.000,00	0,00	100,00
15.	DAK Non Fisik-Pelayanan Kepariwisataaan	1.131.219.300,00	1.131.219.300,00	0,00	100,00
16.	DAK Non Fisik-Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	406.000.000,00	0,00	100,00
17.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	630.200.000,00	630.200.000,00	0,00	100,00
18.	DAK Non Fisik-Ketahanan Pangan & Pertanian	972.326.000,00	972.326.000,00	0,00	100,00
19.	DAK Non Fisik-Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.409.584.716,00	1.409.584.716,00	0,00	100,00
Jumlah		161.582.965.939,00	164.837.321.512,00	3.254.355.573,00	102,01

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Realisasi DAK Non Fisik tahun 2024 yang lebih tinggi dibandingkan pagu anggarannya disebabkan adanya regulasi penetapan pagu yang terbit setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2024 ditetapkan yaitu Keputusan Menteri Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Nomor 423 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024, yang mengubah pagu anggaran Tambahan Penghasilan Guru menjadi sebesar Rp3.999.350.000,00 dan Tunjangan Khusus Guru menjadi sebesar Rp3.370.550.000,00, dari penetapan semula pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023. Disamping itu terdapat pula ketentuan yang sama juga menetapkan pagu yang lebih kecil dari penetapan semula yaitu Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp60.041.113.000,00.

Sementara untuk realisasi DAK Non Fisik BOP PAUD Reguler dan BOP Kesetaraan Reguler yang lebih rendah dibandingkan pagu anggarannya disebabkan oleh adanya keterlambatan penyampaian syarat salur dari Lembaga seperti pengisian BKU, dan adanya Lembaga yang tidak mengambil dana atau sudah tutup di tahap I sehingga di tahap II tidak disalurkan lagi.

Jika dibandingkan dengan TA 2023 yang terealisasi sebesar Rp164.494.357.522,00, terdapat peningkatan penerimaan sebesar Rp342.963.990,00 atau 0,21%.

Tabel V.1-23 Perbandingan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LRA per Sub Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	51.210.012.604,00	51.525.250.261,00	(315.237.657,00)	(0,61)
2.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.127.500.000,00	2.167.500.000,00	(40.000.000,00)	(1,85)
3.	DAK Non Fisik-BOP PAUD Reguler	6.414.771.000,00	6.790.101.000,00	(375.330.000,00)	(5,53)
4.	DAK Non Fisik-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00	60.000.000,00	(30.000.000,00)	(50,00)
5.	DAK Non Fisik-BOP Kesetaraan Reguler	2.633.955.500,00	2.876.900.000,00	(242.944.500,00)	(8,44)
6.	DAK Non Fisik-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00
7.	DAK Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru	60.041.113.000,00	62.711.979.220,00	(2.670.866.220,00)	(4,26)
8.	DAK Non Fisik-Tambahan Penghasilan Guru	3.999.350.000,00	0,00	3.999.350.000,00	-
9.	DAK Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru	3.370.550.000,00	2.201.084.400,00	1.169.465.600,00	53,13
10.	DAK Non Fisik-BOK Kabupaten Kota	6.967.375.515,00	4.326.887.803,00	2.640.487.712,00	61,03
11.	DAK Non Fisik-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	486.831.000,00	402.648.000,00	84.183.000,00	20,91
12.	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas	16.664.107.897,00	21.462.456.400,00	(4.798.348.503,00)	(22,36)
13.	DAK Non Fisik-BO Keluarga Berencana	5.652.913.980,00	5.482.266.344,00	170.647.636,00	3,11
14.	DAK Non Fisik-Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK	554.511.000,00	0,00	554.511.000,00	-
15.	DAK Non Fisik-Pelayanan Kepariwisata	1.131.219.300,00	1.102.230.000,00	28.989.300,00	2,63
16.	DAK Non Fisik-Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	0,00	406.000.000,00	-
17.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	630.200.000,00	451.770.000,00	178.430.000,00	39,50
18.	DAK Non Fisik-Ketahanan Pangan & Pertanian	972.326.000,00	798.284.094,00	174.041.906,00	21,80
19.	DAK Non Fisik-Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.409.584.716,00	2.000.000.000,00	(590.415.284,00)	(29,52)
Jumlah		164.837.321.512,00	164.494.357.522,00	342.963.990,00	0,21

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.1.1.2.a.2 Dana Desa-LRA

Tahun 2024
Rp174.932.338.000,00

Tahun 2023
Rp175.219.610.000,00

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan kepada desa sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Pengalokasian Dana Desa dalam APBD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Pendapatan Dana Desa-LRA pada TA 2024 terealisasi sebesar Rp174.932.338.000,00 atau sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 13,67% bagi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA yang diterima Kabupaten Merangin. Jika dibandingkan dengan TA 2023 yang terealisasi sebesar Rp175.219.610.000,00, terdapat pengurangan penerimaan sebesar Rp287.272.000,00 atau 0,16%.

V.1.1.2.a.3 Insentif Fiskal-LRA

Tahun 2024
Rp12.829.287.000,00

Tahun 2023
Rp10.820.277.000,00

Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Insentif Fiskal TA 2024 diterima Kabupaten Merangin dalam bentuk alokasi insentif fiskal untuk kelompok kategori kinerja Percepatan Belanja Daerah sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024.

Pendapatan Insentif Fiskal-LRA pada TA 2024 terealisasi sebesar Rp12.829.287.000,00 atau sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 1,00% bagi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA yang diterima Kabupaten Merangin. Jika dibandingkan dengan TA 2023 yang terealisasi sebesar Rp10.820.277.000,00, terdapat peningkatan penerimaan sebesar Rp2.009.010.000,00 atau 18,57%.

Berdasarkan Pernyataan Bupati Merangin melalui Rencana Penggunaan Insentif Fiskal (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Merangin tanggal 28 Mei 2024, penerimaan Insentif Fiskal sebesar Rp7.119.948.000,00 diperuntukkan bagi kegiatan:

1. Bidang Pengendalian Inflasi
 - a. Pembangunan bangunan perkuatan tebing (Pembangunan perkuatan tebing dipinggir sungai)
 - b. Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani (pembukaan dan pengerasan Jalan Produksi Perkebunan)
 - c. Pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (pemberian bantuan/hibah Sapi Bali Jantan Remaja bagi kelompok tani terdaftar)
 - d. Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam satu daerah kabupaten/kota (pemberian bantuan/hibah benih ikan, pakan ikan, dan kolam terpal bagi kelompok tani terdaftar)
 - e. Rekonstruksi jalan (preservasi jalan lintasan distribusi logistic dan hasil Perkebunan antar kecamatan dalam kabupaten)
2. Bidang Penurunan Stunting
 - a. Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat skala permukiman (Pembangunan MCK dan septiktank individual pada kawasan rentan stunting)
 - b. Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan (pengadaan Posyandu Kit untuk pemeriksaan Kesehatan/ perkembangan balita di Posyandu)
 - c. Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat (pemberian susu pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi balita stunting)



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

d. Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam satu daerah kabupaten/kota (pemberian makan tambahan/olahan ikan untuk anak sekolah terdampak stunting).

3. Bidang Penurunan Kemiskinan, untuk Pembangunan System Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (Pembangunan Sumur Bor dan SPAM pada kawasan penduduk miskin).

Sementara untuk tahun berjalan, Insentif Fiskal sebesar Rp5.709.339.000,00 diperuntukkan bagi kegiatan:

1. Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya;
2. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan;
3. Pemeliharaan Berkala Jalan;
4. Pengurangan Sampah melalui Pembatasan Timbulan Sampah; dan
5. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian.

V.1.1.2.b Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA

Tahun 2024
Rp71.922.428.617,00

Tahun 2023
Rp104.311.766.156,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA pada TA 2024 berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jambi. Dianggarkan dalam APBD Kabupaten Merangin TA 2024 dengan alokasi sebesar Rp101.338.145.671,00. Dari alokasi tersebut, hingga akhir TA 2024, dapat direalisasikan sebesar Rp71.922.428.617,00 atau 70,97% dan memberikan kontribusi sebesar 5,32% bagi Pendapatan Transfer Kabupaten Merangin. Jika dibandingkan dengan TA 2023 yang terealisasi sebesar Rp104.311.766.156,00, realisasi TA 2024 tersebut berkurang sebesar Rp32.389.337.539,00 atau 31,05%.

Realisasi penerimaan akun ini menurut sektor penerimaannya diuraikan secara rinci sebagai berikut:

V.1.1.2.b.1 Pendapatan Bagi Hasil-LRA

Tahun 2024
Rp64.272.428.617,00

Tahun 2023
Rp81.611.766.156,00

Pendapatan Bagi Hasil-LRA pada TA 2024 dari Pemerintah Provinsi Jambi dianggarkan dalam APBD Kabupaten Merangin TA 2024 sebesar Rp78.638.145.671,00 sebagaimana Keputusan Gubernur Jambi Nomor 156/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024. Dari alokasi tersebut, hingga TA 2024 berakhir, dapat terealisasi sebesar Rp64.272.428.617,00 atau sebesar 81,73%.

Realisasi penerimaan akun ini terdiri dari beberapa sektor sebagaimana rincian berikut:

Tabel V.1-24 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi-LRA per Sub Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LRA	17.223.186.845,00	12.609.919.664,00	(4.613.267.181,00)	73,21
2.	Pendapatan Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LRA	11.395.600.397,00	8.084.199.495,00	(3.311.400.902,00)	70,94
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LRA	29.369.239.449,00	23.898.318.283,00	(5.470.921.166,00)	81,37



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan-LRA	35.113.554,00	32.060.822,00	(3.052.732,00)	91,31
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LRA	20.615.005.426,00	19.647.930.353,00	(967.075.073,00)	95,31
Jumlah		78.638.145.671,00	64.272.428.617,00	(14.365.717.054,00)	81,73

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Uraian realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi-LRA terdiri atas alokasi TA 2024 dan alokasi kurang bayar s.d TA 2023 sebagaimana penjelasan berikut:

1. Alokasi TA 2024 yang ditetapkan pada APBD TA 2024 adalah sebesar Rp58.193.996.211,00. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi TA 2024 ini dapat direalisasikan sebesar Rp41.386.886.046,00 atau 71,12% dari target dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1-25 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi-LRA Alokasi TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2024		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Penyaluran	Jumlah	%
1.	Bagi Hasil PKB-LRA	12.808.628.928,00	8.195.361.746,00	(4.613.267.182,00)	(36,02)
	- Triwulan I TA 2024		4.465.504.766,00		
	- Triwulan II TA 2024		3.729.856.980,00		
2.	Bagi Hasil BBN-KB-LRA	8.742.770.010,00	5.431.369.109,00	(3.311.400.901,00)	(37,88)
	- Triwulan I TA 2024		2.824.949.967,00		
	- Triwulan II TA 2024		2.606.419.142,00		
3.	Bagi Hasil PBB-KB-LRA	22.154.272.465,00	14.250.196.856,00	(7.904.075.609,00)	(35,68)
	- Triwulan I TA 2024		7.048.519.324,00		
	- Triwulan II TA 2024		7.201.677.532,00		
4.	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LRA	26.626.757,00	15.335.357,00	(11.291.400,00)	(42,41)
	- Triwulan I TA 2024		7.418.100,00		
	- Triwulan II TA 2024		7.917.257,00		
5.	Bagi Hasil Pajak Rokok-LRA	14.461.698.051,00	13.494.622.978,00	(967.075.073,00)	(6,69)
	- Triwulan I TA 2024		4.698.757.677,00		
	- Triwulan II TA 2024		4.084.698.609,00		
	- Triwulan III TA 2024		4.711.166.692,00		
Jumlah		58.193.996.211,00	41.386.886.046,00	(16.807.110.165,00)	(28,88)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

2. Alokasi kurang bayar s.d TA 2023 yang terealisasi pada TA 2024 sebesar Rp22.885.542.571,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1-26 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi-LRA Alokasi Kurang Bayar TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Dasar Penetapan	Realisasi 2024		Lebih / (Kurang)	
			Alokasi	Penyaluran	Jumlah	%
1.	Bagi Hasil PKB-LRA		4.414.557.918,00	4.414.557.918,00	0,00	0,00
	- KS Triwulan IV TA 2023	SK 279/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024, 17 April 2024	4.414.557.918,00	4.414.557.918,00	0,00	0,00
2.	Bagi Hasil BBN-KB-LRA		2.652.830.386,00	2.652.830.386,00	0,00	0,00
	- KS Triwulan IV TA 2023	SK 279/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024, 17 April 2024	2.652.830.386,00	2.652.830.386,00	0,00	0,00
3.	Bagi Hasil PBB-KB-LRA		9.648.121.427,00	9.648.121.427,00	0,00	0,00
	- KS Triwulan III TA 2023	SK 943/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2023, 8 Nov 2023	2.433.154.443,00	2.433.154.443,00	0,00	0,00
	- KS Triwulan IV TA 2023	SK 279/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024, 17 April 2024	7.214.966.984,00	7.214.966.984,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Dasar Penetapan	Realisasi 2024		Lebih / (Kurang)	
			Alokasi	Penyaluran	Jumlah	%
4.	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LRA		16.725.465,00	16.725.465,00	0,00	0,00
	- KS Triwulan III TA 2023	SK 943/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2023, 8 Nov 2023	8.238.668,00	8.238.668,00	0,00	0,00
	- KS Triwulan IV TA 2023	SK 279/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024, 17 April 2024	8.486.797,00	8.486.797,00	0,00	0,00
5.	Bagi Hasil Pajak Rokok-LRA		6.153.307.375,00	6.153.307.375,00	0,00	0,00
	- KS Triwulan IV TA 2023 (Tahap I)	SK 180/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024, 4 Maret 2024	3.168.459.199,00	3.168.459.199,00	0,00	0,00
	- KS Triwulan IV TA 2023 (Tahap II)	SK 389/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024, 28 Mei 2024	2.984.848.176,00	2.984.848.176,00	0,00	0,00
Jumlah			22.885.542.571,00	22.885.542.571,00	0,00	0,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Jika dibandingkan dengan TA 2023 yang terealisasi sebesar Rp81.611.766.156,00, realisasi TA 2024 tersebut berkurang sebesar Rp17.339.337.539,00 atau (21,25%), sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Tabel V.1-27 Perbandingan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi-LRA per Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Bagi Hasil PKB-LRA	12.609.919.664,00	17.589.099.818,00	(4.979.180.154,00)	(28,31)
2.	Bagi Hasil BBN-KB-LRA	8.084.199.495,00	13.348.131.919,00	(5.263.932.424,00)	(39,44)
3.	Bagi Hasil PBB-KB-LRA	23.898.318.283,00	31.734.520.684,00	(7.836.202.401,00)	(24,69)
4.	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan-LRA	32.060.822,00	33.456.627,00	(1.395.805,00)	(4,17)
5.	Bagi Hasil Pajak Rokok-LRA	19.647.930.353,00	18.906.557.108,00	741.373.245,00	3,92
Jumlah		64.272.428.617,00	81.611.766.156,00	(17.339.337.539,00)	(21,25)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Turunnya realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi-LRA pada Tahun 2024 disebabkan karena adanya Belanja Bagi hasil yang belum disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp35.324.269.071,00,00 yang terdiri dari:

1. Bagi Hasil Pajak PKB Triwulan III dan IV Tahun 2024 sebesar 10.139.666.481,00,
2. Bagi Hasil Pajak BBN-KB Triwulan III dan IV Tahun 2024 sebesar 7.125.836.621,00,
3. Bagi Hasil Pajak PBB-KB Triwulan III dan IV Tahun 2024 sebesar 14.878.770.560,00,
4. Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Triwulan III dan IV Tahun 2024 sebesar 15.805.700,00,
5. Bagi Hasil Dari Pajak Rokok Triwulan IV Tahap I sebesar Rp3.164.189.709,00.

V.1.1.2.b.2 Bantuan Keuangan-LRA

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp7.650.000.000,00	Rp22.700.000.000,00

Pada TA 2024, Pemerintah Kabupaten Merangin mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jambi sebesar Rp22.700.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2024 tentang APBD Provinsi Jambi TA 2024, Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi ke Kabupaten/Kota untuk Kelurahan dan Kecamatan dalam Provinsi Jambi Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023. Dari alokasi tersebut, hingga akhir TA 2024 dapat direalisasikan sebesar 33,70% atau sebesar Rp7.650.000.000,00 yang terdiri atas Rp1.200.000.000,00 untuk Kecamatan, Rp300.000.000,00 untuk 10 Kelurahan dengan nilai per Kelurahan sebesar Rp30.000.000,00 dan Rp6.150.000.000,00 untuk 205 Desa dengan nilai per Desa sebesar Rp30.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Terhadap sisa penyaluran senilai Rp15.050.000.000,00 yang terdiri atas penundaan penyaluran sebesar Rp700.000.000.00 untuk Kelurahan dan Rp14.350.000.000,00 untuk Desa, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1031/KEP.GUB/BPKPD-4.2/2024 tentang Penetapan Alokasi Tunda Salur Tahap II Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa dan Kelurahan TA 2024 menyatakan bahwa penyalurannya akan dilaksanakan tahun 2025 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah Provinsi Jambi.

Jika dibandingkan dengan TA 2023 yang terealisasi sebesar Rp22.700.000.000,00, realisasi TA 2024 tersebut berkurang sebesar Rp15.050.000.000,00 atau (66,30%).

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus bagi Kelurahan dan Kecamatan tahun 2024 diperuntukan bagi:

1. BKBK Kelurahan

- Bantuan infrastruktur sarana dan prasarana kelurahan;
- Penguatan Lembaga Adat digunakan untuk bantuan operasional pengembangan dan pelestarian nilai-nilai adat di kelurahan;
- Penguatan petugas syara', marbot masjid, pemandi jenazah, guru ngaji dan guru madrasah;
- Insentif bagi petugas administrasi dan keuangan Bantuan Bersifat Khusus;
- Biaya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan (makan minum rapat pemerintahan kelurahan dan LPM, serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke kabupaten/kota dan provinsi);
- Pengadaan peralatan dan mesin penunjang administrasi pemerintahan kelurahan (Komputer PC dan printer) bagi kelurahan yang belum melaksanakan pengadaan;
- Pembiayaan untuk penegakan batas kelurahan/kecamatan;
- Bantuan honorarium Tenaga Pengajar PAUD yang belum dibiayai oleh APBN dan APBD kabupaten/kota;
- Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
- Pembiayaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin ekstrim minimal 10% & pekerja rentan minimal 5%;
- Bantuan operasional untuk kegiatan PKK Kelurahan; dan
- Pananggulungan inflasi.

2. BKBK Kecamatan

- Koordinasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan dan Pembangunan yang ada di kecamatan yang berasal dari provinsi dan/atau kab/kota;
- Pemantauan, sosialisasi, palapotan dan evaluasi program DUMISAKE;
- Rapat koordinasi, sosialisasi, penanggulungan inflasi dan kemiskinan ekstrim;
- Pengadaan alat komunikasi *Handy Talkie* (HT).

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus bagi Desa tahun 2024 diperuntukan bagi:

- Bantuan infrastruktur sarana dan prasarana Desa;
- Penguatan Lembaga Adat dalam pelestarian nilai-nilai adat di desa, kegiatan berupa honorarium pengurus Lembaga Adat Desa;
- Pemberian insentif pengurus kelembagaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa;
- Honorarium bagi petugas syara', marbot masjid, pemandi jenazah, guru ngaji dan guru madrasah;
- Insentif bagi petugas administrasi dan keuangan Bantuan Bersifat Khusus kepada Desa;



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- Pengadaan peralatan mesin penunjang administrasi pemerintah desa berupa Komputer dan PC (bukan laptop) dan printer;
- Pembiayaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin ekstrim minimal 10% dan pekerja rentan minimal 5%; dan
- Bantuan honorarium Tenaga Pengajar PAUD.

V.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Tahun 2024
Rp12.441.166.103,00

Tahun 2023
Rp3.082.000.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada TA 2024 dengan alokasi anggaran pendapatan sebesar Rp16.205.372.652,00 dan terealisasi 76,77% atau sebesar Rp12.441.166.103,00 dan memberikan kontribusi sebesar 0,85% bagi Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin. Pendapatan ini merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN tahun 2024 yang pada tahun 2023 dicatat sebagai salah satu komponen Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Reklasifikasi penerimaan ini ke Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Realisasi dana kapitasi JKN sangat tergantung jumlah peserta yang terdaftar pada masing-masing FKTP (Puskesmas) yang menjadi dasar penentuan besaran pembayaran per bulan yang dibayarkan tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Dana Kapitasi JKN yang diatur oleh Perpres Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2021 sebesar Rp12.441.166.103,00 dengan rincian pada **Lampiran 10a**.

V.1.2 Belanja

Tahun 2024
Rp1.454.773.168.270,96

Tahun 2023
Rp1.338.008.661.903,93

Sebagai penerapan dari kebijakan Belanja Daerah TA 2024, Pemerintah Kabupaten Merangin mengalokasikan Belanja Daerah sebesar Rp1.571.006.958.075,00 melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin TA 2024. Dari alokasi tersebut, Belanja Daerah yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp1.454.773.168.270,96 atau 92,60% sehingga terdapat sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp116.233.789.804,04 atau 7,40% dari total alokasi belanja yang dianggarkan.

Rincian mengenai alokasi Belanja Daerah dan realisasi pengeluaran yang telah dilakukan baik melalui Kas Daerah maupun Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel V.1-28 Realisasi Belanja per Kelompok Belanja Kabupaten Merangin TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)	Persentase	
					Realisasi	Distribusi
1.	Belanja Operasi	1.092.148.331.608,00	996.592.669.538,96	(95.555.662.069,04)	91,25	68,51
2.	Belanja Modal	197.657.072.664,00	193.627.335.532,00	(4.029.737.132,00)	97,96	13,31
3.	Belanja Tidak Terduga	2.351.193.453,00	52.802.850,00	(2.298.390.603,00)	2,25	0,0036
4.	Belanja Transfer	278.850.360.350,00	264.500.360.350,00	(14.350.000.000,00)	94,85	18,18
Jumlah		1.571.006.958.075,00	1.454.773.168.270,96	(116.233.789.804,04)	92,60	100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Berdasarkan tabel realisasi di atas, terlihat bahwa realisasi belanja seluruhnya berada di bawah alokasi anggaran yang disediakan dengan realisasi terendah pada akun Belanja Tidak Terduga yaitu sebesar Rp52.802.850,00 atau 2,25% dari anggaran sebesar Rp2.351.193.453,00. Sementara untuk Belanja Operasi, dari alokasi anggaran sebesar Rp1.092.148.331.608,00, direalisasikan sebesar Rp996.592.669.538,96 atau 91,25% dan untuk Belanja Transfer dengan alokasi anggaran sebesar Rp278.850.360.350,00, direalisasikan sebesar Rp264.500.360.350,00 atau 94,85%. Tingkat serapan anggaran tertinggi diperoleh pada akun Belanja Modal yang mampu direalisasikan sebesar Rp193.627.335.532,00 atau 97,96% dari alokasi yang dianggarkan sebesar Rp197.657.072.664,00.

Pencapaian realisasi belanja tersebut lebih tinggi sebesar Rp116.764.506.367,03 atau 8,73%, dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.338.008.661.903,93 sebagaimana uraian berikut:

Tabel V.1-29 Perbandingan Realisasi Belanja per Kelompok Belanja Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023

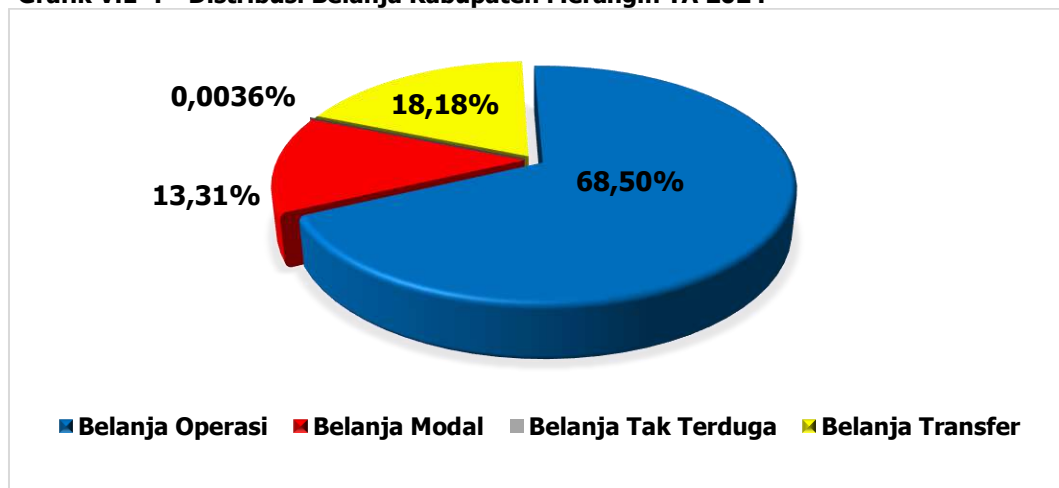
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Belanja Operasi	996.592.669.538,96	888.240.891.846,63	108.351.777.692,33	12,198
2.	Belanja Modal	193.627.335.532,00	176.724.837.147,30	16.902.498.384,70	9,56
3.	Belanja Tidak Terduga	52.802.850,00	5.511.000,00	47.291.850,00	858,14
4.	Belanja Transfer	264.500.360.350,00	273.037.421.910,00	(8.537.061.560,00)	(3,13)
Jumlah		1.454.773.168.270,96	1.338.008.661.903,93	116.764.506.367,03	8,73

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Dari total Belanja Daerah sebagaimana tabel di atas, terdistribusi sebagaimana grafik berikut:

Grafik V.1-4 Distribusi Belanja Kabupaten Merangin TA 2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Dari Grafik V.1-4, tergambar bahwa dari total Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Merangin, sebagian besar masih terdistribusi untuk membiayai Belanja Operasi, di mana belanja ini menyerap 68,50% dari total anggaran Belanja Daerah. Sedangkan Belanja Modal menyerap 13,31%, Belanja Tidak Terduga menyerap 0,0036% dan Belanja Transfer menyerap 18,18%, dengan rincian sebagai berikut:

V.1.2.1 Belanja Operasi

Tahun 2024
Rp996.592.669.538,96

Tahun 2023
Rp888.240.891.846,63

Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kabupaten Merangin yang memberi manfaat jangka pendek. Pos Belanja Operasi terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel V.1-30 Realisasi Belanja Operasi per Jenis Belanja Kabupaten Merangin TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)	Persentase	
					Realisasi	Distribusi
1.	Belanja Pegawai	645.496.758.754,00	591.839.454.626,00	(53.657.304.128,00)	91,69	59,39
2.	Belanja Barang dan Jasa	376.339.904.616,00	336.876.303.542,96	(39.463.601.073,04)	89,51	33,80
3.	Belanja Hibah	70.311.668.238,00	67.876.911.370,00	(2.434.756.868,00)	96,54	6,81
Jumlah		1.092.148.331.608,00	996.592.669.538,96	(95.555.662.069,04)	91,25	100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pengeluaran TA 2024 untuk Belanja Operasi adalah sebesar Rp996.592.669.538,96 atau 91,25% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.092.148.331.608,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp95.555.662.069,04 atau 8,75%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pada pos Belanja Operasi TA 2023 sebesar Rp888.240.891.846,63 maka terjadi peningkatan realisasi pengeluaran sebesar Rp108.351.777.692,33 atau 12,20% sebagai berikut:

Tabel V.1-31 Perbandingan Realisasi Belanja Operasi per Jenis Belanja Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Belanja Pegawai	591.839.454.626,00	502.287.898.830,00	89.551.555.796,00	17,83
2.	Belanja Barang dan Jasa	336.876.303.542,96	320.864.442.422,63	16.011.861.120,33	4,99
3.	Belanja Bunga	0,00	1.714.899.127,00	(1.714.899.127,00)	(100,00)
4.	Belanja Hibah	67.876.911.370,00	63.373.651.467,00	4.503.259.903,00	7,11
Jumlah		996.592.669.538,96	888.240.891.846,63	108.351.777.692,33	12,20

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Dari total Belanja Operasi sebagaimana tabel di atas terdistribusi sebagaimana grafik berikut:

Grafik V.1-5 Distribusi Belanja Operasi Kabupaten Merangin TA 2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Dari Grafik V.1-5, tergambar bahwa dari total Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Merangin, sebagian besar masih terdistribusi untuk membiayai Belanja Pegawai, di mana belanja ini menyerap 59,39% dari total anggaran Belanja Operasi. Sedangkan untuk belanja lainnya terdistribusi lebih kecil yaitu Belanja Barang dan Jasa sebesar 33,80% dan Belanja Hibah sebesar 6,81%.

Berikut penjelasan ringkas mengenai realisasi Belanja Operasi TA 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

V.1.2.1.a Belanja Pegawai

Tahun 2024
Rp591.839.454.626,00

Tahun 2023
Rp502.287.898.830,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp591.839.454.626,00 atau 91,69% dari alokasi sebesar Rp645.496.758.754,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp53.657.304.128,00 atau 8,31%. Realisasi ini terutama digunakan untuk membiayai belanja pegawai pada seluruh SKPD sebagaimana tersaji pada **Lampiran 3**. Adapun realisasi belanja pegawai per objek diuraikan sebagai berikut:

Tabel V.1-32 Realisasi Belanja Pegawai per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	453.813.192.044,00	409.389.404.113,00	(44.423.787.931,00)	90,21
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	84.055.018.534,00	78.000.665.633,00	(6.054.352.901,00)	92,80
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	81.494.623.500,00	79.212.956.850,00	(2.281.666.650,00)	97,20
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.909.426.541,00	17.629.675.030,00	(279.751.511,00)	98,44
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	178.576.070,00	0,00	(178.576.070,00)	0,00
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	605.922.065,00	593.200.000,00	(12.722.065,00)	97,90
7.	Belanja Pegawai BLUD	7.440.000.000,00	7.013.553.000,00	(426.447.000,00)	94,27
Jumlah		645.496.758.754,00	591.839.454.626,00	(53.657.304.128,00)	91,69

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Total realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp591.839.454.626,00 sudah termasuk realisasi Belanja Pegawai yang bersumber dari BLUD dan JKN sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai yang bersumber dari Pendapatan BLUD pada RSUD Kol. Abundjani Bangko dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.440.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.013.553.000,00 atau 94,27%; dan
2. Belanja Pegawai yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN pada FKTP dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.006.590.000,00 dan terealisasi sebesar Rp977.951.000,00 atau 97,15%.

Rincian lebih lanjut Belanja Pegawai yang bersumber dari JKN menurut masing-masing FKTP tersaji pada **Lampiran 10a**.

Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp502.287.898.830,00, realisasi Belanja Pegawai TA 2024 bertambah sebesar Rp89.551.555.796,00 atau 17,83%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1-33 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	409.389.404.113,00	344.004.103.523,00	65.385.300.590,00	19,01
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	78.000.665.633,00	61.291.612.855,00	16.709.052.778,00	27,26
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	79.212.956.850,00	72.194.268.139,00	7.018.688.711,00	9,72
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.629.675.030,00	17.447.712.608,00	181.962.422,00	1,04
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	135.046.161,00	(135.046.161,00)	(100,00)
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	593.200.000,00	655.656.544,00	(62.456.544,00)	(9,53)
7.	Belanja Pegawai BLUD	7.013.553.000,00	6.559.499.000,00	454.054.000,00	6,92
Jumlah		591.839.454.626,00	502.287.898.830,00	89.551.555.796,00	17,83

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Peningkatan realisasi tersebut disebabkan Belanja Gaji PPPK pengangkatan tahun 2023, per Juli 2023. Pada tahun 2023 dianggarkan untuk 6 (enam) bulan. Sedangkan tahun 2024 dianggarkan penuh untuk 12 (dua belas) bulan.

V.1.2.1.b Belanja Barang dan Jasa

Tahun 2024
Rp336.876.303.542,96

Tahun 2023
Rp320.864.442.422,63

Belanja Barang dan Jasa untuk TA 2024 direalisasikan sebesar Rp336.876.303.542,96 atau 89,51% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp376.339.904.616,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp39.463.601.073,04 atau 10,49%. Realisasi pos belanja ini terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada setiap SKPD sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 4**.

Sedangkan realisasi Belanja Barang dan Jasa per objek dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel V.1-34 Realisasi Belanja Barang dan Jasa per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
1.	Belanja Barang Pakai Habis	59.430.409.853,00	47.521.521.984,00	(11.908.887.869,00)	79,96
2.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
3.	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.275.250.000,00	1.227.915.000,00	(47.335.000,00)	96,29
4.	Belanja Jasa Kantor	110.486.033.835,00	98.992.269.690,96	(11.493.764.144,04)	89,60
5.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.696.533.642,00	10.490.189.936,00	(206.343.706,00)	98,07
6.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.864.199.000,00	1.718.917.302,00	(145.281.698,00)	92,21
7.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.976.640.000,00	1.539.807.070,00	(436.832.930,00)	77,90
8.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	100,00
9.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.133.186.000,00	6.910.882.634,00	(222.303.366,00)	96,88
10.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.955.000.000,00	4.923.395.250,00	(31.604.750,00)	99,36
11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	151.550.000,00	151.550.000,00	0,00	100,00
12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.238.190.000,00	1.104.755.571,00	(133.434.429,00)	89,22
13.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	30.000.000,00	3.468.000,00	(26.532.000,00)	11,56
14.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	212.148.600,00	165.768.511,00	(46.380.089,00)	78,14
15.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.806.618.186,00	7.468.009.515,00	(338.608.671,00)	95,66
16.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.476.947.000,00	3.455.524.018,00	(21.422.982,00)	99,38
17.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	903.004.732,00	866.002.500,00	(37.002.232,00)	95,90
18.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	261.400.000,00	94.836.365,00	(166.563.635,00)	36,28
19.	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	79.050.000,00	78.978.000,00	(72.000,00)	99,91
20.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	73.230.740.704,00	67.652.839.823,00	(5.577.900.881,00)	92,38
21.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	87.500.000,00	87.351.910,00	(148.090,00)	99,83
22.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.377.457.500,00	6.494.345.500,00	(883.112.000,00)	88,03
23.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	447.300.000,00	371.262.160,00	(76.037.840,00)	83,00
24.	Belanja Barang dan Jasa BOS	40.314.573.892,00	40.037.265.780,00	(277.308.112,00)	99,31



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
25.	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	277.352.000,00	277.124.000,00	(228.000,00)	99,92
26.	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	177.750.000,00	176.000.000,00	(1.750.000,00)	99,02
27.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	42.413.569.672,00	35.028.823.023,00	(7.384.746.649,00)	82,59
Jumlah		376.339.904.616,00	336.876.303.542,96	(39.463.601.073,04)	89,51

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Total realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp336.876.303.542,96 tersebut sudah termasuk realisasi belanja barang dan jasa yang tidak melalui RKUD dan didanai oleh pendapatan yang bersumber dari BLUD, Dana Kapitasi JKN, Dana BOK, Dana BOS dan Dana BOP sebagai berikut:

1. Belanja Barang dan Jasa BLUD pada RSUD Kol. Abundjani Bangko dengan anggaran sebesar Rp42.413.569.672,00 dan realisasi sebesar Rp35.028.823.023,00 atau 82,59%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana diuraikan diatas lebih rendah dari alokasi anggaran sebesar Rp7.384.746.649,00 atau (17,41%). Hal ini disebabkan RSUD Kol. Abundjani Bangko dalam merealisasikan Belanja Barang dan Jasa sangat tergantung pada capaian Pendapatan BLUD.
2. Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp14.509.129.796,00 dan terealisasi sebesar Rp11.125.285.241,96 atau 76,68%, dengan rincian:
 - a. Belanja Barang Habis Pakai dengan alokasi sebesar Rp1.379.379.400,00 dan realisasi sebesar Rp966.564.582,00 atau 70,07%;
 - b. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi dengan alokasi sebesar Rp19.050.000,00 dan sebesar Rp16.125.000,00 atau 84,65%;
 - c. Belanja Jasa Kantor dengan alokasi sebesar Rp12.410.350.396,00 dan realisasi sebesar Rp9.765.698.159,96 atau 78,69%;
 - d. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dengan alokasi sebesar Rp94.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp55.268.000,00 atau 58,67%;
 - e. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dengan alokasi sebesar Rp15.000.000,00 dan realisasi sebesar 100,00%;
 - f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan alokasi sebesar Rp591.150.000,00 dan realisasi sebesar Rp306.629.500,00 atau 51,87%.
3. Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana BOK pada Puskesmas dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.601.876.000,00 dan terealisasi sebesar Rp16.760.332.568,00 atau 77,59%, dengan rincian:
 - a. Belanja Barang Habis Pakai dengan alokasi sebesar Rp7.328.479.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.099.762.500,00 atau 69,59%;
 - b. Belanja Jasa Kantor dengan alokasi sebesar Rp4.064.647.600,00 dan realisasi sebesar Rp2.614.804.324,00 atau 64,33%;
 - c. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud dengan alokasi sebesar Rp156.450.000,00 dan realisasi sebesar Rp120.435.000,00 atau 76,98%.
 - d. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan alokasi sebesar Rp10.052.299.400,00 dan realisasi sebesar Rp8.925.330.744,00 atau 88,79%.
4. Belanja Barang dan Jasa dalam rangka pengelolaan Dana BOS pada Satuan Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp40.314.573.892,00 dan realisasi sebesar Rp40.037.265.780,00 atau 99,31%, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. SD Negeri, dengan alokasi sebesar Rp31.094.146.762,00 dan realisasi sebesar Rp31.050.163.123,00 atau 99,86%; dan



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- b. SMP Negeri, dengan alokasi sebesar Rp9.220.427.130,00 dan realisasi sebesar Rp8.987.102.657,00 atau 97,47%.
5. Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan pada Satuan Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp455.102.000,00 dan realisasi sebesar Rp453.124.000,00 atau 99,57%, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Belanja Barang Habis Pakai BOP PAUD, dengan alokasi sebesar Rp277.352.000,00 dan realisasi sebesar Rp277.124.000,00 atau 99,92%; dan
- b. Belanja Barang Habis Pakai BOP Kesetaraan, dengan alokasi sebesar Rp177.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp176.000.000,00 atau 99,02%.

Rincian lebih lanjut Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana BOS menurut masing-masing SPN Penerima dan Dana JKN serta BOK sebagaimana tercantum pada **Lampiran 9, Lampiran 10a dan Lampiran 10b.**

Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp320.864.442.422,63, realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 meningkat sebesar Rp16.011.861.120,33 atau 4,99%.

Tabel V.1-35 Perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Belanja Barang Pakai Habis	47.521.521.984,00	42.964.267.756,00	4.557.254.228,00	10,61
2.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	500.000,00	0,00	500.000,00	-
3.	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.227.915.000,00	0,00	1.227.915.000,00	-
4.	Belanja Jasa Kantor	98.992.269.690,96	98.347.582.337,02	644.687.353,94	0,66
5.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.490.189.936,00	10.495.450.017,00	(5.260.081,00)	(0,05)
6.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.718.917.302,00	1.728.916.247,00	(9.998.945,00)	(0,58)
7.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.539.807.070,00	1.481.600.000,00	58.207.070,00	3,93
8.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	37.000.000,00	80.000.000,00	(43.000.000,00)	(53,75)
9.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.910.882.634,00	5.878.184.485,00	1.032.698.149,00	17,57
10.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.923.395.250,00	1.589.747.700,00	3.333.647.550,00	209,70
11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	151.550.000,00	205.745.000,00	(54.195.000,00)	(26,34)
12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.104.755.571,00	2.514.105.097,00	(1.409.349.526,00)	(56,06)
13.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.468.000,00	0,00	3.468.000,00	-
14.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	165.768.511,00	31.360.200,00	134.408.311,00	428,60
15.	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	67.440.500,00	(67.440.500,00)	(100,00)
16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.468.009.515,00	5.828.959.552,00	1.639.049.963,00	28,12
17.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.455.524.018,00	2.865.575.345,00	589.948.673,00	20,59
18.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	866.002.500,00	995.061.368,00	(129.058.868,00)	(12,97)
19.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	94.836.365,00	0,00	94.836.365,00	-
20.	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	78.978.000,00	149.855.600,00	(70.877.600,00)	(47,30)
21.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	67.652.839.823,00	59.124.199.448,00	8.528.640.375,00	14,42
22.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	87.351.910,00	0,00	87.351.910,00	-
23.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.494.345.500,00	278.150.000,00	6.216.195.500,00	2.234,84
24.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	371.262.160,00	1.014.745.000,00	(643.482.840,00)	(63,41)
25.	Belanja Barang dan Jasa BOS	40.037.265.780,00	41.962.877.311,00	(1.925.611.531,00)	(4,59)
26.	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	277.124.000,00	0,00	277.124.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
27.	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	176.000.000,00	0,00	176.000.000,00	-
28.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	35.028.823.023,00	43.260.619.459,61	(8.231.796.436,61)	(19,03)
Jumlah		336.876.303.542,96	320.864.442.422,63	16.011.861.120,33	4,99

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.1.2.1.c Belanja Bunga

Tahun 2024
Rp0,00

Tahun 2023
Rp1.714.899.127,00

Pada TA 2024 tidak terdapat alokasi dan realisasi anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.714.899.127,00, realisasi TA 2023 lebih rendah sebesar (100,00%). Belanja Bunga TA 2023 merupakan realisasi atas pembayaran Kewajiban Bunga dan Biaya Fasilitas Pembiayaan atas Utang pada Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI).

V.1.2.1.d Belanja Hibah

Tahun 2024
Rp67.876.911.370,00

Tahun 2023
Rp63.373.651.467,00

Pos Belanja Hibah pada TA 2024 dialokasikan melalui APBD sebesar Rp70.311.668.238,00 dan direalisasikan sebesar Rp67.876.911.370,00 atau 96,54% yang terdiri dari:

1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dialokasikan sebesar Rp33.273.746.000,00 dan terealisasi sebesar 100,00% berupa:
 - a. Hibah kepada KPU Kabupaten Merangin sebesar Rp21.600.000.000,00;
 - b. Hibah kepada Bawaslu Kabupaten Merangin sebesar Rp6.673.746.000,00;
 - c. Hibah kepada POLRES Merangin sebesar Rp4.000.000.000,00; dan
 - d. Hibah kepada KODIM 0420/Sarko sebesar Rp1.000.000.000,00.
2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang dialokasikan sebesar Rp4.948.959.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.226.483.436,00 atau 65,20% berupa:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi sebesar Rp348.954.000,00 dan realisasi sebesar Rp299.154.000,00 atau 85,73%, yang terdiri atas:
 - 1) Hibah kepada PMI pada Dinas Kesehatan dengan alokasi sebesar Rp299.154.000,00 dan realisasi sebesar 100,00%; dan
 - 2) Hibah pada Kantor Camat Pamenang dengan alokasi sebesar Rp49.800.000,00 dan realisasi sebesar nihil.
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi sebesar Rp4.600.005.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.927.329.436,00 atau 63,64% berupa Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dengan alokasi sebesar Rp18.928.721.288,00 dan terealisasi sebesar Rp18.395.640.247,00 atau 97,18% berupa:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan alokasi sebesar Rp450.000.000,00 dan realisasi sebesar 100,00%, yang terdiri atas:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- 1) Hibah kepada Lembaga Adat Kab. Merangin dengan alokasi sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi 100,00%;
- 2) Hibah kepada Sanggar Seni Budaya Tabir dengan alokasi sebesar Rp25.000.000,00 dan realisasi 100,00%; dan
- 3) Hibah kepada Sanggar Adat dan Seni Serumpun Melayu dengan alokasi sebesar Rp25.000.000,00 dan realisasi 100,00%.
- b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dengan alokasi sebesar Rp15.778.721.288,00 dan direalisasikan sebesar Rp15.246.176.476,00 atau 96,62%, yang terdiri atas:
 - 1) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa bantuan perlengkapan sekolah bagi Peserta Didik PAUD dengan alokasi sebesar Rp60.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp59.550.000,00 atau 99,25%;
 - 2) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum dengan alokasi sebesar Rp6.799.205.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.790.559.099,00 atau 99,87%;
 - 3) Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga berupa Peralatan Olahraga bagi Cabor Drumband (PDBI) dengan alokasi sebesar Rp180.000.000,00 dan realisasi sebesar 100,00%;
 - 4) Pada Dinas Perikanan dengan alokasi sebesar Rp220.340.000,00 dan realisasi sebesar nihil;
 - 5) Pada Dinas Peternakan dan Perkebunan berupa kambing dan domba remaja, kecambah kelapa sawit dan bibit sawit siap tanam, sapi bali remaja dan jalan produksi perkebunan dengan alokasi sebesar Rp1.178.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.174.719.317,00 atau 99,67%;
 - 6) Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berupa benih kacang sachet inchi, pembangunan screen house modern dan sumur bor dengan alokasi sebesar Rp1.121.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.117.721.600,00 atau 99,66%;
 - 7) Pada Kantor Camat Bangko berupa fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum dengan alokasi sebesar Rp2.605.598.928,00 dan realisasi sebesar Rp2.605.598.928,00 atau 100,00%;
 - 8) Pada Kantor Camat Tabir berupa fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum dengan alokasi sebesar Rp2.915.138.928,00 dan realisasi sebesar Rp2.780.827.732,00 atau 95,39%; dan
 - 9) Pada Kantor Camat Pamenang berupa fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum dengan alokasi sebesar Rp698.288.432,00 dan realisasi sebesar Rp537.199.800,00 atau 76,93%.
- c. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang dialokasikan sebesar Rp2.700.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.699.463.771,00 atau 99,98% berupa:
 - 1) Hibah kepada *Geopark* Merangin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan alokasi sebesar Rp400.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp399.463.771,00 atau 99,87%;
 - 2) Hibah kepada KONI Kabupaten Merangin pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan alokasi sebesar Rp2.000.000.000,00 dan realisasi sebesar 100,00%; dan
 - 3) Hibah kepada Pramuka Kabupaten Merangin pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan alokasi sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar 100,00%.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

4. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dialokasikan sebesar Rp3.258.220.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.258.065.237,00 atau 99,99% berupa:
 - a. Hibah Dana BOS SD Swasta dengan alokasi sebesar Rp2.034.980.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.034.979.000,00 atau 99,99%; dan
 - b. Hibah Dana BOS SMP Swasta dengan alokasi sebesar Rp1.223.240.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.223.086.237,00 atau 99,99%.
5. Belanja Hibah Uang Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dialokasikan sebesar Rp8.874.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.695.054.500,00 atau 97,98% berupa:
 - a. Hibah Dana BOP PAUD dengan alokasi sebesar Rp6.177.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.135.699.000,00 atau 99,33%; dan
 - b. Hibah Dana BOP Kesetaraan dengan alokasi sebesar Rp2.697.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.559.355.500,00 atau 94,89%.
6. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dialokasikan sebesar Rp1.027.921.950,00 dan terealisasi sebesar 100,00% sebagaimana Keputusan Bupati Merangin Nomor 81/BANKESBANGPOL/2024 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Merangin pada Pemilihan Umum Periode Tahun 2019-2024 TA 2024 dan Keputusan Bupati Merangin Nomor 402/BANKESBANGPOL/2024 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Merangin pada Pemilihan Umum Periode Tahun 2024-2029 TA 2024.

Rincian realisasi pos belanja ini adalah sebagai berikut:

Tabel V.1-36 Realisasi Belanja Hibah per Objek & Rincian Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
I.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	33.273.746.000,00	33.273.746.000,00	-	100,00
II.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.948.959.000,00	3.226.483.436,00	(1.722.475.564,00)	65,20
1.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	348.954.000,00	299.154.000,00	(49.800.000,00)	85,73
2.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.600.005.000,00	2.927.329.436,00	(1.672.675.564,00)	63,64
III.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	18.928.721.288,00	18.395.640.247,00	(533.081.041,00)	97,18
1.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	100,00
2.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	15.778.721.288,00	15.246.176.476,00	(532.544.812,00)	96,62
3.	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.700.000.000,00	2.699.463.771,00	(536.229,00)	99,98
IV.	Belanja Hibah Dana BOS	3.258.220.000,00	3.258.065.237,00	(154.763,00)	100,00
1.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta	3.258.220.000,00	3.258.065.237,00	(154.763,00)	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
V.	Belanja Hibah Dana BOSP	8.874.100.000,00	8.695.054.500,00	(179.045.500,00)	97,98
1.	Belanja Hibah Dana BOP PAUD	6.177.000.000,00	6.135.699.000,00	(41.301.000,00)	99,33
2.	Belanja Hibah Dana BOP Kesenjangan	2.697.100.000,00	2.559.355.500,00	(137.744.500,00)	94,89
VI.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.027.921.950,00	1.027.921.950,00	-	100,00
1.	Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik	1.027.921.950,00	1.027.921.950,00	0,00	100,00
Jumlah		70.311.668.238,00	67.876.911.370,00	(2.434.756.868,00)	96,54

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Realisasi Belanja Hibah TA 2024 masing-masing SKPD disajikan pada **Lampiran 5**.

Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp63.373.651.467,00, realisasi Belanja Hibah TA 2024 lebih tinggi sebesar Rp4.503.259.903,00 atau 7,11%, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel V.1-37 Perbandingan Realisasi Belanja Hibah per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
I.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	33.273.746.000,00	17.649.164.000,00	15.624.582.000,00	88,53
II.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.226.483.436,00	7.389.992.777,00	(4.163.509.341,00)	(56,34)
1.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	299.154.000,00	2.397.730.700,00	(2.098.576.700,00)	(87,52)
2.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.927.329.436,00	4.992.262.077,00	(2.064.932.641,00)	(41,36)
III.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	18.395.640.247,00	33.909.267.561,00	(15.513.627.314,00)	(45,75)
1.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	450.000.000,00	8.930.201.000,00	(8.480.201.000,00)	(94,96)
2.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	15.246.176.476,00	24.849.066.561,00	(9.602.890.085,00)	(38,64)
3.	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.699.463.771,00	130.000.000,00	2.569.463.771,00	1.976,51
IV.	Belanja Hibah Dana BOS	3.258.065.237,00	3.447.031.100,00	(188.965.863,00)	(5,48)
1.	Belanja Hibah Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta	3.258.065.237,00	3.447.031.100,00	(188.965.863,00)	(5,48)
V.	Belanja Hibah Dana BOSP	8.695.054.500,00	0,00	8.695.054.500,00	-
1.	Belanja Hibah Dana BOP PAUD	6.135.699.000,00	0,00	6.135.699.000,00	-
2.	Belanja Hibah Dana BOP Kesenjangan	2.559.355.500,00	0,00	2.559.355.500,00	-
VI.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.027.921.950,00	978.196.029,00	49.725.921,00	5,08
1.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.027.921.950,00	978.196.029,00	49.725.921,00	5,08
Jumlah		67.876.911.370,00	63.373.651.467,00	4.503.259.903,00	7,11

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2024 disajikan pada **Lampiran 12**.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

V.1.2.2 Belanja Modal

Tahun 2024
Rp193.627.335.532,00

Tahun 2023
Rp176.724.837.147,30

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran dan realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Merangin pada TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel V.1-38 Realisasi Belanja Modal per Jenis Belanja Kabupaten Merangin TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)	Persentase	
					Realisasi	Distribusi
1.	Tanah	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	0,00	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	45.616.430.243,00	43.409.708.584,00	(2.206.721.659,00)	95,16	22,42
3.	Gedung dan Bangunan	63.886.290.570,00	62.655.071.883,00	(1.231.218.687,00)	98,07	32,36
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	83.845.423.776,00	83.315.634.140,00	(529.789.636,00)	99,37	43,03
5.	Aset Tetap Lainnya	3.865.428.075,00	3.837.445.925,00	(27.982.150,00)	99,28	1,98
6.	Aset Lainnya	435.000.000,00	409.475.000,00	(25.525.000,00)	94,13	0,21
Jumlah		197.657.072.664,00	193.627.335.532,00	(4.029.737.132,00)	97,96	100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Berdasarkan tabel di atas, Belanja Modal TA 2024 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp197.657.072.664,00 dan direalisasikan sebesar Rp193.627.335.532,00 atau 97,96%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp176.724.837.147,30, realisasi Belanja Modal TA 2024 lebih tinggi sebesar Rp16.902.498.384,70 atau 9,56%, sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.1-39 Perbandingan Realisasi Belanja Modal per Jenis Belanja Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023

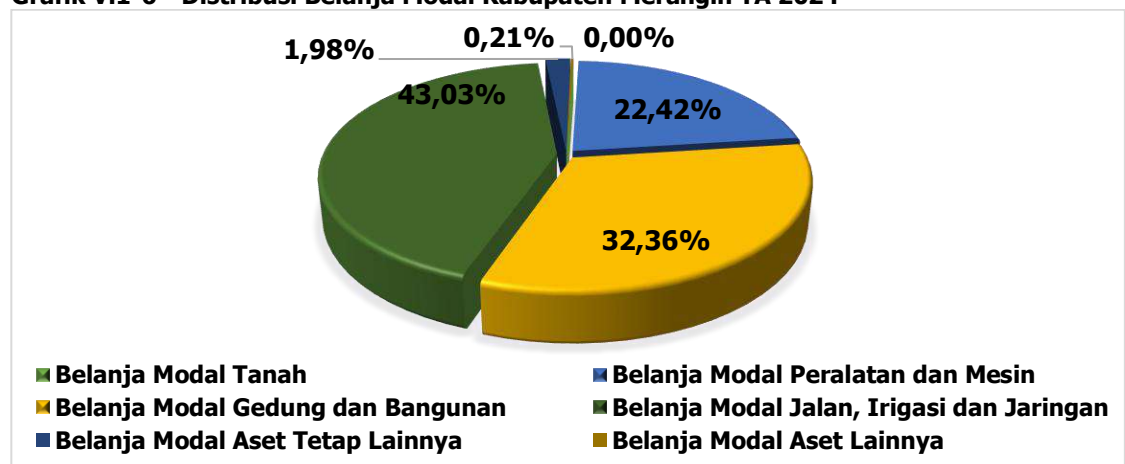
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Tanah	0,00	34.410.489,00	(34.410.489,00)	(100,00)
2.	Peralatan dan Mesin	43.409.708.584,00	30.982.388.967,30	12.427.319.616,70	40,11
3.	Gedung dan Bangunan	62.655.071.883,00	79.711.057.271,00	(17.055.985.388,00)	(21,40)
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	83.315.634.140,00	61.398.124.429,00	21.917.509.711,00	35,70
5.	Aset Tetap Lainnya	3.837.445.925,00	4.459.950.991,00	(622.505.066,00)	(13,96)
6.	Aset Lainnya	409.475.000,00	138.905.000,00	270.570.000,00	194,79
Jumlah		193.627.335.532,00	176.724.837.147,30	16.902.498.384,70	9,56

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Dari total Belanja Modal sebagaimana tabel di atas, terdistribusi sebagaimana grafik berikut:

Grafik V.1-6 Distribusi Belanja Modal Kabupaten Merangin TA 2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Dari Grafik V.1-6, tergambar bahwa dari total Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Merangin, sebagian besar terdistribusi untuk membiayai Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, di mana belanja ini menyerap 43,03% dari total anggaran Belanja Modal.

Sedangkan Belanja Modal lainnya secara berturut-turut berupa belanja Modal Tanah sebesar nihil, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 22,42%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan menyerap 32,36%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 1,98% dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 0,21%. Realisasi Belanja Modal TA 2024 masing-masing SKPD disajikan pada **Lampiran 6**.

Realisasi Belanja Modal ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD selama TA 2024, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

V.1.2.2.a Belanja Modal Tanah

Tahun 2024
Rp0,00

Tahun 2023
Rp34.410.489,00

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 sebesar nihil dari alokasi anggaran sebesar Rp8.500.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 sebesar Rp34.410.489,00, realisasi TA 2024 lebih rendah sebesar (100,00%).

V.1.2.2.b Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tahun 2024
Rp43.409.708.584,00

Tahun 2023
Rp30.982.388.967,30

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp43.409.708.584,00 yang lebih rendah sebesar Rp2.206.721.659,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp45.616.430.243,00 atau sebesar 95,16%. Selisih kurang penyerapan anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 merupakan selisih lebih antara alokasi anggaran terhadap nilai kontrak.

Total realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 tersebut sudah termasuk realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang bersumber dari BLUD, Dana Kapitasi JKN, Dana BOS dan Dana BOP sebagai berikut:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD pada RSUD Kol. Abundjani Bangko dengan anggaran sebesar Rp1.341.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp379.511.048,00 atau 28,30%;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.004.529.000,00 dan terealisasi sebesar Rp552.048.500,00 atau 54,96% dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan; dan
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Dana BOS pada Satuan Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.110.018.889,00 dan realisasi sebesar Rp6.106.119.451,00 atau 99,94%, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. SD Negeri, dengan realisasi sebesar Rp4.717.790.150,00 dari alokasi sebesar Rp4.721.688.150,00 atau 99,92%; dan
 - b. SMP Negeri, dengan realisasi sebesar Rp1.388.329.301,00 dari alokasi sebesar Rp1.388.330.739,00 atau 100,00%.
4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan pada Satuan Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp81.498.000,00 dan realisasi sebesar Rp57.448.000,00 atau 70,49%, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. BOP PAUD, dengan alokasi sebesar Rp23.848.000,00 dan realisasi sebesar Rp23.848.000,00 atau 100,00%; dan
 - b. BOP Kesetaraan, dengan alokasi sebesar Rp57.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp33.600.000,00 atau 58,28%.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel V.1-40 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
1.	Belanja Modal Alat Besar	78.000.000,00	77.900.000,00	(100.000,00)	99,87
2.	Belanja Modal Alat Angkutan	7.740.390.416,00	7.596.364.500,00	(144.025.916,00)	98,14
3.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	13.410.000,00	12.279.000,00	(1.131.000,00)	91,57
4.	Belanja Modal Alat Pertanian	1.054.150.000,00	1.052.560.000,00	(1.590.000,00)	99,85
5.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.017.658.210,00	15.462.004.964,00	(555.653.246,00)	96,53
6.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	309.321.000,00	300.775.000,00	(8.546.000,00)	97,24
7.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.038.255.409,00	5.873.698.181,00	(164.557.228,00)	97,27
8.	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.003.175.000,00	1.989.962.000,00	(13.213.000,00)	99,34
9.	Belanja Modal Komputer	4.405.053.675,00	4.077.209.500,00	(327.844.175,00)	92,56
10.	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	75.000.000,00	74.766.000,00	(234.000,00)	99,69
11.	Belanja Modal Alat Peraga	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
12.	Belanja Modal Rambu-Rambu	49.099.644,00	49.010.940,00	(88.704,00)	99,82
13.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	300.000.000,00	299.900.000,00	(100.000,00)	99,97
14.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.110.018.889,00	6.106.119.451,00	(3.899.438,00)	99,94
15.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	81.498.000,00	57.448.000,00	(24.050.000,00)	70,49
16.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.341.200.000,00	379.511.048,00	(961.688.952,00)	28,30
Jumlah		45.616.430.243,00	43.409.708.584,00	(2.206.721.659,00)	95,16

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp30.982.388.967,30, terjadi peningkatan sebesar Rp12.427.319.616,70 atau 40,11%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1-41 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Objek Belanja Kab. Merangin TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Belanja Modal Alat Besar	77.900.000,00	1.581.441.620,00	(1.503.541.620,00)	(95,07)
2.	Belanja Modal Alat Angkutan	7.596.364.500,00	3.027.236.200,00	4.569.128.300,00	150,93
3.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	12.279.000,00	281.169.992,00	(268.890.992,00)	(95,63)
4.	Belanja Modal Alat Pertanian	1.052.560.000,00	545.083.500,00	507.476.500,00	93,10
5.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	15.462.004.964,00	7.128.147.092,00	8.333.857.872,00	116,91
6.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	300.775.000,00	1.338.514.080,00	(1.037.739.080,00)	(77,53)
7.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.873.698.181,00	1.655.764.085,00	4.217.934.096,00	254,74
8.	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.989.962.000,00	5.257.832.600,00	(3.267.870.600,00)	(62,15)
9.	Belanja Modal Komputer	4.077.209.500,00	3.369.075.439,30	708.134.060,70	21,02
10.	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	74.766.000,00	49.900.000,00	24.866.000,00	49,83
11.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	84.710.000,00	(84.710.000,00)	(100,00)
12.	Belanja Modal Alat Peraga	200.000,00	0,00	200.000,00	-
13.	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	557.800.000,00	(557.800.000,00)	(100,00)
14.	Belanja Modal Rambu-Rambu	49.010.940,00	62.790.000,00	(13.779.060,00)	(21,94)
15.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	299.900.000,00	457.212.000,00	(157.312.000,00)	(34,41)
16.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.106.119.451,00	4.118.041.404,00	1.988.078.047,00	48,28



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
17.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	57.448.000,00	0,00	57.448.000,00	-
18.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	379.511.048,00	1.467.670.955,00	(1.088.159.907,00)	(74,14)
Jumlah		43.409.708.584,00	30.982.388.967,30	12.427.319.616,70	40,11

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.1.2.2.c Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tahun 2024
Rp62.655.071.883,00

Tahun 2023
Rp79.711.057.271,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp62.655.071.883,00, lebih rendah sebesar Rp1.231.218.687,00 dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp63.886.290.570,00 atau sebesar 98,07%.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan ini dialokasikan dalam rangka membiayai belanja modal sebagai berikut:

Tabel V.1-42 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung	56.186.090.570,00	54.970.507.282,00	(1.215.583.288,00)	97,84
2.	Belanja Modal Monumen	260.000.000,00	257.780.000,00	(2.220.000,00)	99,15
3.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	7.416.200.000,00	7.402.831.801,00	(13.368.199,00)	99,82
4.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	24.000.000,00	23.952.800,00	(47.200,00)	99,80
Jumlah		63.886.290.570,00	62.655.071.883,00	(1.231.218.687,00)	98,07

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 berkurang sebesar Rp17.055.985.388,00 atau (21,40%), jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp79.711.057.271,00, dengan rincian:

Tabel V.1-43 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung	54.970.507.282,00	71.671.156.055,00	(16.700.648.773,00)	(23,30)
2.	Belanja Modal Monumen	257.780.000,00	349.762.000,00	(91.982.000,00)	-
3.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	7.402.831.801,00	6.725.233.443,00	677.598.358,00	10,08
4.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	23.952.800,00	964.905.773,00	(940.952.973,00)	(97,52)
Jumlah		62.655.071.883,00	79.711.057.271,00	(17.055.985.388,00)	(21,40)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.1.2.2.d Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tahun 2024
Rp83.315.634.140,00

Tahun 2023
Rp61.398.124.429,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 sebesar Rp83.315.634.140,00, lebih rendah sebesar Rp529.789.636,00 dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp83.845.423.776,00 atau sebesar 99,37%.

Belanja modal ini digunakan untuk membiayai pembangunan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel V.1-44 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
1.	Pembangunan Jalan dan Jembatan	73.761.276.776,00	73.304.713.534,00	(456.563.242,00)	99,38
2.	Pembangunan Bangunan Air	8.373.991.000,00	8.304.008.757,00	(69.982.243,00)	99,16
3.	Pembangunan Instalasi	1.130.156.000,00	1.127.394.482,00	(2.761.518,00)	99,76
4.	Pembangunan Jaringan	580.000.000,00	579.517.367,00	(482.633,00)	99,92
Jumlah		83.845.423.776,00	83.315.634.140,00	(529.789.636,00)	99,37

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp61.398.124.429,00, realisasi TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp21.917.509.711,00 atau 35,70% sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel V.1-45 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Pembangunan Jalan dan Jembatan	73.304.713.534,00	50.122.698.460,00	23.182.015.074,00	46,25
2.	Pembangunan Bangunan Air	8.304.008.757,00	9.672.935.514,00	(1.368.926.757,00)	(14,15)
3.	Pembangunan Instalasi	1.127.394.482,00	130.944.495,00	996.449.987,00	760,97
4.	Pembangunan Jaringan	579.517.367,00	1.471.545.960,00	(892.028.593,00)	(60,62)
Jumlah		83.315.634.140,00	61.398.124.429,00	21.917.509.711,00	35,70

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.1.2.2.e Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tahun 2024
Rp3.837.445.925,00

Tahun 2023
Rp4.459.950.991,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp3.837.445.925,00, lebih rendah sebesar Rp27.982.150,00 dari anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp3.865.428.075,00 atau sebesar 99,28%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1-46 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	35.000.000,00	34.900.000,00	(100.000,00)	99,71
2.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.830.428.075,00	3.802.545.925,00	(27.882.150,00)	99,27
Jumlah		3.865.428.075,00	3.837.445.925,00	(27.982.150,00)	99,28

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS TA 2024 berupa buku-buku pelajaran bagi peserta didik pada Satuan Pendidikan Negeri penerima Dana BOS.

Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp4.459.950.991,00, realisasi TA 2024 berkurang sebesar Rp622.505.066,00 atau sebesar (13,96%).

Tabel V.1-47 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	34.900.000,00	49.986.000,00	(15.086.000,00)	(30,18)
2.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	58.265.708,00	(58.265.708,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
3.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	39.915.600,00	(39.915.600,00)	(100,00)
4.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.802.545.925,00	4.311.783.683,00	(509.237.758,00)	(11,81)
Jumlah		3.837.445.925,00	4.459.950.991,00	(622.505.066,00)	(13,96)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.1.2.2.f Belanja Modal Aset Lainnya

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp409.475.000,00	Rp138.905.000,00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 sebesar Rp409.475.000,00, lebih rendah sebesar Rp25.525.000,00 dari anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp435.000.000,00 atau sebesar 94,13%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1-48 Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
1.	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	435.000.000,00	409.475.000,00	(25.525.000,00)	94,13
Jumlah		435.000.000,00	409.475.000,00	(25.525.000,00)	94,13

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp138.905.000,00, realisasi TA 2024 meningkat sebesar Rp270.570.000,00 atau sebesar 194,79%.

Tabel V.1-49 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	409.475.000,00	138.905.000,00	270.570.000,00	194,79
Jumlah		409.475.000,00	138.905.000,00	270.570.000,00	194,79

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp52.802.850,00	Rp5.511.000,00

Akun belanja ini diperuntukkan bagi keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten Merangin serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Pada TA 2024 dianggarkan sebesar Rp2.351.193.453,00 dan terealisasi sebesar Rp52.802.850,00 atau sebesar 2,25%. Jika dibandingkan dengan TA 2023 yang terealisasi sebesar Rp5.511.000,00, realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024 ini lebih tinggi sebesar Rp47.291.850,00 atau 858,14%.

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024 merupakan kebutuhan dana dalam rangka penanggulangan bencana banjir dan longsor di Desa Pulau Bayur Kec. Pamenang Selatan sebagaimana Keputusan Bupati Merangin Nomor 183/BPKAD/2024 tentang Penggunaan Belanja Tidak terduga pada BPBD dalam Penanganan Bencana Alam di Wilayah Kabupaten Merangin TA 2024.

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024 disajikan pada **Lampiran 7**.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

V.1.2.4 Belanja Transfer

Tahun 2024
Rp264.500.360.350,00

Tahun 2023
Rp273.037.421.910,00

Akun Transfer digunakan untuk menampung pengeluaran uang dari Pemerintah Kabupaten Merangin ke entitas pelaporan lain. Pada TA 2024 Pemerintah Kabupaten Merangin mengalokasikan pengeluaran transfer berupa bagi hasil pendapatan kepada Pemerintahan Desa berupa Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Merangin juga mengalokasikan Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa berupa Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan selain DAK yang diterima Pemerintah Kabupaten Merangin serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.

Transfer TA 2024 terealisasi sebesar Rp264.500.360.350,00 atau 94,85% dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp278.850.360.350,00, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp14.350.000.000,00 atau 5,15%. Jika dibandingkan dengan realisasi Transfer TA 2023 sebesar Rp273.037.421.910,00, realisasi ini berkurang sebesar Rp8.537.061.560,00 atau sebesar (3,13%). Rincian Transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

V.1.2.4.a Belanja Bagi Hasil

Tahun 2024
Rp3.911.348.550,00

Tahun 2023
Rp3.443.388.110,00

Akun Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menampung pengeluaran transfer berupa Bagi Hasil Pendapatan Daerah dari Pemerintah Kabupaten Merangin kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah.

Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2024 sebesar Rp3.911.348.550,00 atau sebesar 100% dari alokasi yang disediakan. Rincian Belanja Bagi Hasil Kabupaten Merangin TA 2024 sebagai berikut:

Tabel V.1-50 Realisasi Belanja Bagi Hasil Kabupaten Merangin TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)	Persentase	
					Realisasi	Distribusi
1.	Bagi Hasil Pajak Daerah	3.118.300.000,00	3.118.300.000,00	0,00	100,00	79,72
2.	Bagi Hasil Retribusi Daerah	793.048.550,00	793.048.550,00	0,00	100,00	20,28
Jumlah		3.911.348.550,00	3.911.348.550,00	0,00	100,00	100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa berpedoman kepada Peraturan Bupati Merangin Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah TA 2024. Dimana besaran alokasi sangat dipengaruhi oleh tingkat capaian realisasi Pajak dan Retribusi Daerah TA 2024.

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2023 sebesar Rp3.443.388.110,00, realisasi ini lebih tinggi sebesar Rp467.960.440,00 atau 13,59% sebagaimana terurai pada tabel berikut:

Tabel V.1-51 Perbandingan Realisasi Belanja Bagi Hasil Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Bagi Hasil Pajak Daerah	3.118.300.000,00	2.911.090.000,00	207.210.000,00	7,12
2.	Bagi Hasil Retribusi Daerah	793.048.550,00	532.298.110,00	260.750.440,00	48,99
Jumlah		3.911.348.550,00	3.443.388.110,00	467.960.440,00	13,59

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Pada Tahun Anggaran 2024, Pemkab. Merangin belum melakukan perhitungan ulang dan penyaluran Belanja Bagi Hasil kepada Desa atas dasar perhitungan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024. Belum terdapat Ketetapan Bupati atas Kurang (lebih) salur Belanja Bagi Hasil dan masih terdapat kurang salur belanja bagi hasil pajak daerah sebesar Rp105.740.933,74 serta lebih salur belanja bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp198.795.086,92 atas realisasi PDRD TA 2024.

V.1.2.4.b Belanja Bantuan Keuangan	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp260.589.011.800,00	Rp269.594.033.800,00

Akun Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menampung pengeluaran transfer berupa bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Merangin kepada Desa berupa Dana Desa yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi Jambi.

Pada TA 2024 dianggarkan sebesar Rp274.939.011.800,00 dan terealisasi sebesar Rp260.589.011.800,00 atau sebesar 94,78%. Belanja Bantuan Keuangan TA 2024 terdiri dari:

Tabel V.1-52 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Merangin TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)	Persentase	
					Realisasi	Distribusi
1.	Dana Desa	174.932.338.000,00	174.932.338.000,00	0,00	100,00	67,13
2.	Alokasi Dana Desa	79.506.673.800,00	79.506.673.800,00	0,00	100,00	30,51
3.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Prov. Jambi	20.500.000.000,00	6.150.000.000,00	(14.350.000.000,00)	30,00	2,36
Jumlah		274.939.011.800,00	260.589.011.800,00	(14.350.000.000,00)	94,78	100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Dari tabel di atas, terlihat bahwa realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2024 terdiri dari Dana Desa yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan selain DAK dari Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Desa dialokasikan berdasarkan Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024 sebesar Rp174.932.338.000,00 dan pada akhir tahun anggaran dapat direalisasikan 100,00%. Proses penyaluran dana desa diawali dengan pengajuan dari Desa kepada Bupati Merangin melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk di-entry ke aplikasi OMSPAN dan selanjutnya diverifikasi oleh KPPN Bangko. Terhadapajuan Desa yang telah memenuhi syarat dan terverifikasi, DPMD mengajukan permintaan pencairan tersebut untuk diterbitkan surat pengantar ke KPPN yang dilengkapi dengan data pendukung yang telah diunduh dari OMSPAN. Berdasarkan kelengkapan tersebut, KPPN menerbitkan SP2D sebagai dasar penyaluran dari RKUN kepada RKD.
2. Alokasi Dana Desa dialokasikan berdasarkan Peraturan Bupati Merangin Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah TA 2024 sebesar Rp79.506.673.800,00 dan direalisasikan 100,00%; dan
3. Bantuan Keuangan ke Desa dalam Kabupaten Merangin yang dialokasikan sebesar Rp20.500.000.000,00 bagi 205 Desa dengan besaran masing-masing Rp100.000.000,00 yang dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2023. Dari alokasi tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp6.150.000.000,00 atau 30,00%.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Terhadap sisa kurang salur sebesar Rp14.350.000.000,00, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1031/KEP.GUB/BPKPD-4.2/2024 tentang Penetapan Alokasi Tunda Salur Tahap II Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa dan Kelurahan TA 2024 menyatakan bahwa penyalurannya akan dilaksanakan tahun 2025 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah Provinsi Jambi.

Jika dibandingkan dengan TA 2023 yang terealisasi sebesar Rp269.594.033.800,00, realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya/Bantuan Keuangan TA 2023 ini lebih rendah sebesar Rp9.005.022.000,00 atau (3,34%) sebagaimana terurai pada tabel berikut:

Tabel V.1-53 Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Dana Desa	174.932.338.000,00	175.219.610.000,00	(287.272.000,00)	(0,16)
2.	Alokasi Dana Desa	79.506.673.800,00	73.874.423.800,00	5.632.250.000,00	7,62
3.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jambi	6.150.000.000,00	20.500.000.000,00	(14.350.000.000,00)	(70,00)
Jumlah		260.589.011.800,00	269.594.033.800,00	(9.005.022.000,00)	(3,34)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Atas Belanja Transfer Bantuan Keuangan TA 2024, masih terdapat kurang salur bantuan keuangan ke desa berupa Alokasi Dana Desa sebesar Rp3.395.278.243,20 dikarenakan belum adanya perhitungan kembali di akhir tahun dan penetapan melalui SK Bupati atas Belanja Transfer Bantuan Keuangan - Alokasi Dana Desa berdasarkan kepada realisasi Dana Perimbangan yang diterima di Tahun 2024.

Rekapitulasi Penyaluran Transfer ke Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 disajikan pada **Lampiran 13a** dan Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024 disajikan pada **Lampiran 13b**.

V.1.3 Pembiayaan Netto

Tahun 2024
Rp77.190.915.420,30

Tahun 2023
Rp15.855.471.405,44

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan, yang berupa penerimaan yang perlu dibayar kembali maupun pengeluaran yang akan diterima kembali. Dalam penganggaran pembiayaan TA 2024, Pemerintah Kabupaten Merangin mengutamakan alokasi pembiayaan untuk menutup defisit dengan memanfaatkan surplus anggaran dan melakukan penyertaan modal pada BUMD. Besaran surplus anggaran yang dimanfaatkan untuk menutupi defisit anggaran tahun berjalan tergambar melalui Pembiayaan Netto yang merupakan selisih lebih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Dari target Pembiayaan Netto sebesar Rp77.190.915.420,00, hingga akhir tahun 2024 diperoleh Pembiayaan Netto sebesar Rp77.190.915.420,30 atau 100,00%, terdapat selisih lebih sebesar Rp0,30. Rincian Pembiayaan Netto TA 2024 sebagaimana dimuat pada tabel berikut:

Tabel V.1-54 Realisasi Pembiayaan per Jenis Pembiayaan Kabupaten Merangin TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
1.	Penerimaan Pembiayaan	79.190.915.420,00	79.190.915.420,30	0,30	100,00
	- Penggunaan SILPA	79.190.915.420,00	79.190.915.420,30	0,30	100,00
2.	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00
	- Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00
Pembiayaan Netto		77.190.915.420,00	77.190.915.420,30	0,30	100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Jika dibandingkan dengan realisasi Pembiayaan Netto TA 2023 sebesar Rp15.855.471.405,44, realisasi ini lebih tinggi sebesar Rp61.335.444.014,86 atau 386,84%, dengan rincian:

Tabel V.1-55 Perbandingan Realisasi Pembiayaan per Jenis Pembiayaan Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Penerimaan Pembiayaan	79.190.915.420,30	82.250.272.316,44	(3.059.356.896,14)	(3,72)
	- Penggunaan SiLPA	79.190.915.420,30	82.648.453.046,61	(3.457.537.626,31)	(4,18)
	- Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	0,00	(398.180.730,17)	398.180.730,17	(100,00)
2.	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	66.394.800.911,00	(64.394.800.911,00)	(96,99)
	- Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	5.500.000.000,00	(3.500.000.000,00)	(63,64)
	- Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	60.894.800.911,00	(60.894.800.911,00)	(100,00)
	Pembiayaan Netto	77.190.915.420,30	15.855.471.405,44	61.335.444.014,86	386,84

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pembiayaan Daerah Kabupaten Merangin TA 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

V.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Tahun 2024
Rp79.190.915.420,30

Tahun 2023
Rp82.250.272.316,44

Akun Penerimaan Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin yang perlu dibayar kembali. Penerimaan ini bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2023 dan dimanfaatkan untuk menutup defisit TA 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp79.190.915.420,00 dan terealisasi sebesar Rp79.190.915.420,30 atau 100,00%.

Rincian realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Merangin TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel V.1-56 Realisasi Penerimaan Pembiayaan per Objek Pembiayaan Kabupaten Merangin TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
1.	Penggunaan SiLPA	79.190.915.420,00	79.190.915.420,30	0,30	100,00
	- Pelampauan PAD	0,00	(5.537.653.076,21)	(5.537.653.076,21)	-
	- Pelampauan Pendapatan Transfer	1.642.114.946,00	(12.303.507.135,00)	(13.945.622.081,00)	(749,25)
	- Pelampauan Lain-Lain	0,00	(18.000.000,00)	(18.000.000,00)	-
	- Pendapatan Daerah yang Sah				
	- Penghematan Belanja	77.548.800.095,00	97.448.255.982,07	19.899.455.887,07	125,66
	- Sisa Lebih Pembiayaan Netto	379,00	(398.180.350,56)	(398.180.729,56)	-
	Jumlah	79.190.915.420,00	79.190.915.420,30	0,30	100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Jika dibandingkan dengan TA 2023 di mana realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp82.250.272.316,44, maka terdapat penurunan sebesar Rp3.059.356.896,14 atau (3,72%) yang terinci sesuai tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel V.1-57 Perbandingan Realisasi Penerimaan Pembiayaan per Objek Pembiayaan Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Penggunaan SiLPA	79.190.915.420,30	82.648.453.046,61	(3.457.537.626,31)	(4,18)
	- Pelampauan PAD	(5.537.653.076,21)	(23.957.695.624,98)	18.420.042.548,77	(76,89)
	- Pelampauan Pendapatan Transfer	(12.303.507.135,00)	32.393.871.352,00	(44.697.378.487,00)	(137,98)
	- Pelampauan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	(18.000.000,00)	5.511.000,00	(23.511.000,00)	(426,62)
	- Penghematan Belanja	97.448.255.982,07	74.233.841.741,60	23.214.414.240,47	31,27
	- Sisa Lebih Pembiayaan Netto	(398.180.350,56)	(27.075.422,01)	(371.104.928,55)	1.370,63
2.	Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	0,00	(398.180.730,17)	398.180.730,17	(100,00)
	Jumlah	79.190.915.420,30	82.250.272.316,44	(3.059.356.896,14)	(3,72)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Tahun 2024
Rp2.000.000.000,00

Tahun 2023
Rp66.394.800.911,00

Pengeluaran Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 sebagaimana ditetapkan pada APBD adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar 100,00%.

Rincian realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Merangin TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel V.1-58 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan per Objek Pembiayaan Kabupaten Merangin TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00
	- Penyertaan Modal pada PT. Bank Jambi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00
	Jumlah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Jika dibandingkan dengan TA 2023 dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp66.394.800.911,00, maka terdapat penurunan nilai sebesar Rp64.394.800.911,00 atau (96,99%) yang terinci sesuai tabel berikut:

Tabel V.1-59 Perbandingan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan per Objek Pembiayaan Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	5.500.000.000,00	(3.500.000.000,00)	(63,64)
	- Penyertaan Modal Perumda Air Minum	0,00	3.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)
	- Penyertaan Modal PT. Bank Jambi	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(500.000.000,00)	(20,00)
2.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	60.894.800.911,00	(60.894.800.911,00)	(100,00)
	- Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	60.894.800.911,00	(60.894.800.911,00)	(100,00)
	Jumlah	2.000.000.000,00	66.394.800.911,00	(64.394.800.911,00)	(96,99)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

V.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Tahun 2024
Rp81.693.670.814,85

Tahun 2023
Rp79.190.915.420,30

Akun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama TA 2024. Realisasi SiLPA dalam TA 2024 sebesar Rp81.693.670.814,85 merupakan selisih antara Pendapatan terhadap Belanja ditambah dengan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan (Pembiayaan Netto). Jika dibandingkan dengan SiLPA TA 2023 sebesar Rp79.190.915.420,30, terdapat peningkatan SiLPA sebesar Rp2.502.755.394,55 atau 3,16%.

Realisasi komponen Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dalam TA 2024, sebagaimana dimuat pada tabel berikut:

Tabel V.1-60 Realisasi Komponen SiLPA Kabupaten Merangin TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
I.	Pelampauan Pendapatan	(34.540.118.989,49)	(17.859.160.211,21)	(16.680.958.778,28)	93,40
1.	Pelampauan PAD	(5.775.232.747,49)	(5.537.653.076,21)	(237.579.671,28)	4,29
2.	Pelampauan Pendapatan Transfer	(25.000.679.693,00)	(12.303.507.135,00)	(12.697.172.558,00)	103,20
3.	Pelampauan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	(3.764.206.549,00)	(18.000.000,00)	(3.746.206.549,00)	20.812,26
II.	Penghematan Belanja	116.233.789.804,04	97.448.255.982,07	18.785.533.821,97	19,28
1.	Penghematan Belanja Operasi	95.555.662.069,04	91.230.364.495,37	4.325.297.573,67	4,74
2.	Penghematan Belanja Modal	4.029.737.132,00	3.264.561.292,70	765.175.839,30	23,44
3.	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	2.298.390.603,00	2.756.730.194,00	(458.339.591,00)	(16,63)
4.	Sisa Belanja Transfer	14.350.000.000,00	196.600.000,00	14.153.400.000,00	7.199,08
III.	Sisa Pembiayaan Netto	0,30	(398.180.350,56)	398.180.350,86	(100,00)
1.	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0,30	(398.180.729,56)	398.180.729,86	(100,00)
2.	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	379,00	(379,00)	(100,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (I + II + III)		81.693.670.814,85	79.190.915.420,30	2.502.755.394,55	3,16

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

V.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan yang merupakan akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya.

Rincian Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

V.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal	Per 31 Desember 2024 Rp79.190.915.420,30	Per 31 Desember 2023 Rp82.648.453.046,61

Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2024 merupakan akumulasi SiLPA tahun sebelumnya yang menjadi sumber penerimaan pembiayaan tahun berjalan dan digunakan untuk menutup defisit anggaran tahun 2024 yaitu sebesar Rp79.190.915.420,30 dengan rincian:

1. Kas di BUD Per 31 Desember 2023 sebesar Rp73.428.018.745,81 terdiri atas:

Tabel V.2-1 Rekapitulasi Saldo Awal Kas di BUD per 1 Januari 2024

(dalam rupiah)		
No.	Uraian	Jumlah
I.	Dana Mengikat (<i>Earmarked</i>)	
1.	Sisa DBH Perkebunan Sawit TA 2023	13.345.576.000,00
2.	Sisa DBH CHT TA 2023	5.928.000,00
3.	Sisa DAK Fisik	
a.	DAK Bidang Pendidikan-SD TA 2021 dan 2023 (Reguler)	235.743.000,00
b.	DAK Bidang Pendidikan - SMP TA 2022 dan 2023 (Reguler)	43.119.700,00
c.	DAK Bidang Pendidikan - SKB TA 2021 (Reguler)	12.000,00
d.	DAK Bidang Pendidikan - PAUD TA 2022 dan 2023 (Reguler)	1.712.500,00
e.	PDAK Bidang Pendidikan- Perpustakaan TA 2023 (Reguler)	57.500,00
f.	DAK Bidang Kesehatan-Pelayanan Farmasi TA 2021 (Reguler)	110.695.200,0
g.	DAK Bidang Kesehatan-KB TA 2021 s.d 2022 (Reguler)	7.441.000,00
h.	DAK Bidang Infrastruktur - Jalan TA 2022 dan 2023 (Reguler)	201.594.081,00
i.	DAK Bidang Pasar TA 2019 (Penugasan)	155.739.085,00
j.	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan TA 2020 dan 2021 (Penugasan)	5.374.989,00
k.	DAK Bidang IKM TA 2023 (Penugasan)	5.271.000,00
l.	DAK Bidang Pariwisata TA 2023 (Penugasan)	418.000,00
m.	DAK Bidang UMKM TA 2023 (Penugasan)	3.000.000,00
	Jumlah Sisa DAK Fisik	770.178.055,00
4.	Sisa DAK Non Fisik	
a.	Bantuan Operasional Kesehatan TA 2023	4.161.278.485,00
b.	Bantuan Operasional KB TA 2023	1.083.970.020,00
c.	Tunjangan Profesi Guru PNSD TA 2023	3.361.650.080,00
d.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD TA 2023	256.650.000,00
e.	Tunjangan Khusus Guru TA 2023	96.636.700
f.	Dana Fasilitasi Penanaman Modal TA 2023	444.000,00
g.	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian TA 2023	9.974.000,00
h.	Dana Pelayanan Kepariwisataaan TA 2023	191.780.700,00
i.	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM TA 2023	309.417.284,00
j.	Sisa Dana BOS SMP Negeri Satu Atap Merangin yang tutup	140.746.171,80
	- SMP Negeri Satu Atap 4 Merangin	43.650.000,00
	- SMP Negeri Satu Atap 10 Merangin	12.046.324,80
	- SMP Negeri Satu Atap 16 Merangin	24.124.066,80
	- SMP Negeri Satu Atap 18 Merangin	60.925.780,20
	Jumlah Sisa DAK Non Fisik	9.612.547.440,80
5.	Sisa DAU Tambahan (Bantuan Kelurahan) TA 2020	56.610.425,00
6.	Sisa DAU yang Ditentukan Penggunaannya (<i>Spesific Grant</i>)	
a.	Dukungan Penggajian PPPK Daerah Tahun 2023	41.536.166.469,00
b.	Dukungan Pendanaan Kelurahan Tahun 2023	24.648.362,00



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Jumlah
	<i>c. Dukungan Bidang Pendidikan Tahun 2023</i>	3.165.208.998,00
	<i>d. Dukungan Bidang Kesehatan Tahun 2023</i>	1.585.092.330,00
	<i>e. Dukungan Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023</i>	619.174.996,00
	Sisa DAU yang Ditentukan Penggunaannya (<i>Spesific Grant</i>)	46.930.291.155,00
7.	DAU Tambahan THR bagi ASN Guru Daerah	4.870.117.000,00
8.	Sisa Dana Insentif Daerah TA 2019, 2021 dan 2022	935.299.810,92
9.	Sisa Dana Insentif Fiskal TA 2023	402.886.590,00
10.	Dana Hibah Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana TA 2019	0,37
11.	Sisa Dana Bantuan Kelurahan TA 2017 s.d 2021	702.155.100,00
12.	Sisa Dana Bantuan Kelurahan Bersifat Khusus TA 2022 dan 2023	454.992.000,00
13.	Sisa Dana Bantuan Kecamatan Bersifat Khusus TA 2023	573.084.940,00
14.	Sisa Dana Bantuan Alat Berat s.d. TA 2017 dan 2019	854.900.884,00
	Jumlah Dana Mengikat (<i>Earmarked</i>)	79.514.431.401,09
II.	Dana Tidak Mengikat	(6.086.412.655,28)
	Jumlah Saldo Awal Kas di BUD Tahun 2023 (I+II)	73.428.018.745,81

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Terhadap sisa Dana Tidak Mengikat sebesar (Rp6.086.412.655,28) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 8 September 2023, Kementerian Keuangan RI menerbitkan PMK Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2023, di mana bagi Kabupaten Merangin ditetapkan adanya pendapatan transfer dengan nilai kumulatif Rp16.379.203.427,00 yang terdiri dari alokasi Kurang Bayar sebesar Rp22.786.933.408,00 dan alokasi Lebih Bayar sebesar Rp6.407.729.981,00;
 - Menindaklanjuti penetapan PMK tersebut, pada proses penyusunan perubahan APBD yang ditetapkan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023, dialokasikan anggaran Pendapatan Transfer dan Belanja yang direncanakan didanai dengan penerimaan berkenaan;
 - Pada tanggal 19 Desember 2023, Kementerian Keuangan RI menerbitkan KMK Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2023 , yang menyatakan bahwa dari alokasi Kurang Bayar sebesar Rp22.786.933.408,00 diantaranya sebesar Rp20.223.838.000,00 disalurkan ke rekening TDF. Sehingga, untuk pendanaan Belanja Daerah atas program/kegiatan yang telah terlaksana berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2023 menggunakan saldo kas yang tersedia di RKUD, termasuk Dana Mengikat (*earmarked*) sebesar Rp6.086.412.655,28.
- Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.913.000,00 berupa penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang hingga 31 Desember 2023 belum disetorkan ke Kas Daerah. Penyetoran dilakukan tanggal 2 Januari 2024 dan 7 Februari 2024.
 - Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Nihil.
 - Saldo Kas di BLUD pada 31 Desember 2023 RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp320.458.638,98.
 - Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp175.748.289,00.
 - Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.251.776.746,51 yang terdiri dari:
 - Saldo Dana Kapitasi JKN sebesar Rp314.876.243,51; dan
 - Saldo Dana BOK sebesar Rp4.936.900.503,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

V.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Per 31 Desember 2024
Rp79.190.915.420,30

Per 31 Desember 2023
Rp82.250.272.316,44

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih tahun 2023 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 yaitu sebesar Rp79.190.915.420,30 yang bersumber dari:

1. Pelampauan Pendapatan sebesar (Rp17.859.160.211,21) dengan rincian:
 - a. Pelampauan PAD sebesar (Rp5.537.653.076,21);
 - b. Pelampauan Pendapatan Transfer sebesar (Rp12.303.507.135,00); dan
 - c. Pelampauan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar (Rp18.000.000,00)
2. Penghematan Belanja sebesar Rp97.448.255.982,07 dengan rincian:
 - a. Penghematan Belanja Operasi sebesar Rp91.230.364.495,37;
 - b. Penghematan Belanja Modal sebesar Rp3.264.561.292,70;
 - c. Penghematan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.756.730.194,00; dan
 - d. Penghematan Belanja Transfer sebesar Rp196.600.000,00.
3. Sisa lebih Pembiayaan Netto sebesar (Rp398.180.350,56) dengan rincian:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebesar (Rp398.180.729,56)
 - b. Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp379,00.

V.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Per 31 Desember 2024
Rp81.693.670.814,85

Per 31 Desember 2023
Rp79.190.915.420,30

SiLPA/(SiKPA) adalah selisih lebih/(kurang) antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih/(kurang) antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang merupakan gambaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Merangin pada tahun 2024 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp81.693.670.814,85, terdiri dari:

1. Surplus Anggaran sebesar Rp4.502.755.394,55; dan
2. Pembiayaan Netto sebesar Rp77.190.915.420,30.

V.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Per 31 Desember 2024
0,00

Per 31 Desember 2023
(Rp398.180.730,17)

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Sampai dengan tanggal pelaporan Per 31 Desember 2024 tidak terdapat Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.

V.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun

Per 31 Desember 2024
Rp81.693.670.814,85

Per 31 Desember 2023
Rp79.190.915.420,30

Saldo anggaran lebih akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain. Nilai akumulatif SAL hingga tahun 2024 berakhir sebesar Rp81.693.670.814,85 dengan rincian:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

1. Saldo Akhir Kas di BUD Per 31 Desember 2024 sebesar Rp76.377.716.309,34 terdiri atas:

Tabel V.2-2 Rekapitulasi Saldo Akhir Kas di BUD Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
I.	Dana Mengikat (<i>Earmarked</i>)	
1.	Sisa DBH Perkebunan Sawit TA 2023	2.034.123.075,00
2.	Sisa DBH CHT TA 2023	19.886.750,00
3.	Sisa DAK Fisik	
a.	DAK Bidang Pendidikan - SD TA 2021 (<i>Reguler</i>)	150.000
b.	DAK Bidang Pendidikan - SMP TA 2022 (<i>Reguler</i>)	750.000,00
c.	DAK Bidang Pendidikan - SKB TA 2021 (<i>Reguler</i>)	12.000,00
d.	DAK Bidang Pendidikan - PAUD TA 2022 (<i>Reguler</i>)	1.662.500,00
e.	DAK Bidang Kesehatan - Pelayanan Farmasi TA 2021 (<i>Reguler</i>)	110.695.200,00
f.	DAK Bidang Kesehatan - KB TA 2021 s.d 2022 (<i>Reguler</i>)	7.441.000,00
g.	DAK Bidang Infrastruktur - Jalan TA 2022 (<i>Reguler</i>)	166.469.482,00
h.	DAK Bidang Pasar TA 2019 (<i>Penugasan</i>)	155.739.085,00
i.	DAK Bidang Pertanian TA 2024 (<i>Penugasan</i>)	44.010.000,00
j.	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan TA 2020 dan 2021 (<i>Penugasan</i>)	5.374.989,00
k.	DAK Bidang IKM TA 2023 dan 2024 (<i>Penugasan</i>)	11.709.000,00
l.	DAK Bidang Pariwisata TA 2023 dan 2024 (<i>Penugasan</i>)	5.668.000,00
m.	DAK Bidang UMKM TA 2023 (<i>Penugasan</i>)	3.000.000,00
n.	DAK Bidang Pendidikan - SD TA 2023 dan 2024 (<i>Penugasan</i>)	406.663.000,00
o.	DAK Bidang Pendidikan - SMP TA 2023 dan 2024 (<i>Penugasan</i>)	43.079.700,00
p.	DAK Bidang Pendidikan - SKB TA 2023 dan 2024 (<i>Penugasan</i>)	200.000,00
q.	DAK Bidang Pendidikan - PAUD TA 2023 dan 2024 (<i>Penugasan</i>)	9.550.000,00
r.	DAK Bidang Pendidikan- Perpustakaan TA 2023 dan 2024 (<i>Penugasan</i>)	57.500,00
s.	DAK Bidang Infrastruktur - Jalan TA 2023 dan 2024 (<i>Reguler</i>)	36.480.599,00
	Jumlah Sisa DAK Fisik	1.008.712.055,00
4.	Sisa DAK Non Fisik	
a.	Bantuan Operasional Kesehatan TA 2024	945.010.748,00
b.	Bantuan Operasional KB TA 2024	1.179.066.828,00
c.	Tunjangan Profesi Guru PNSD TA 2024	1.608.594.780,00
d.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD TA 2024	3.016.250.000,00
e.	Tunjangan Khusus Guru TA 2024	713.121.800,00
f.	Dana Fasilitas Penanaman Modal TA 2024	55.100.100,00
g.	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian TA 2024	20.448.072,00
h.	Dana Pelayanan Kepariwisata TA 2024	95.943.950,00
i.	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM TA 2024	315.593.447,00
j.	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak TA 2024	155.444.400,00
k.	Dana Peningkatan Kapasitas koperasi dan UKM TA 2024	17.560.000,00
l.	Sisa Dana BOS SMP Negeri Satu Atap Merangin yang tutup	140.746.171,80
	- SMP Negeri Satu Atap 4 Merangin	43.650.000,00
	- SMP Negeri Satu Atap 10 Merangin	12.046.324,80
	- SMP Negeri Satu Atap 16 Merangin	24.124.066,80
	- SMP Negeri Satu Atap 18 Merangin	60.925.780,20
m.	Sisa Dana BOP PAUD Swasta TA. 2024 yang harus dikembalikan ke RKUN	8.100.000,00
n.	Pengembalian Dana BOS 2023 ke RKUD di tahun 2024 (<i>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</i>)	171.604.800,00
	Jumlah Sisa DAK Non Fisik	8.442.585.096,80
5.	Sisa DAU Tambahan (Bantuan Kelurahan) TA 2020	56.510.425,00
6.	Sisa DAU yang Ditentukan Penggunaannya (<i>Spesific Grant</i>)	
a.	Dukungan Penggajian PPPK Daerah tahun 2023	17.152.562.949,00
b.	Dukungan Pendanaan Kelurahan tahun 2023	267.248.562,00
c.	Dukungan Bidang Pendidikan tahun 2023	9.349.391.282,00
d.	Dukungan Bidang Kesehatan tahun 2023	1.952.406.561,00
e.	Dukungan Bidang Pekerjaan Umum tahun 2023	228.076.583,00
	Jumlah Sisa DAU yang Ditentukan Penggunaannya (<i>Spesific Grant</i>)	28.949.685.937,00
7.	DAU Tambahan THR bagi ASN Guru Daerah	10.350.170.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Jumlah
8.	Sisa Dana Insentif Fiskal TA 2023 s.d TA 2024	338.634.434,00
9.	Dana Hibah Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana TA 2019	0,37
10.	Sisa Dana Bantuan Kelurahan Bersifat Khusus TA 2022 s.d 2024	(283.719.800,00)
11.	Sisa Dana Bantuan Kecamatan Bersifat Khusus TA 2023 s.d 2024	546.572.850,00
12.	Saldo kas yang diperuntukan bagi pengembalian sisa Dana Bantuan Kelurahan TA 2017 s.d 2021	702.155.100,00
13.	Saldo kas yang diperuntukan bagi pengembalian sisa Dana Bantuan Alat Berat s.d. TA 2017 dan 2019	854.900.884,00
14.	Saldo kas yang diperuntukan bagi pembayaran utang BPJS kekurangan 4% Iuran Wajib Tambahan Penghasilan Guru TA 2023 s.d 2024	5.191.704.401,00
15.	Saldo kas yang diperuntukan bagi pembayaran utang Jasa Pelayanan Dana Non Kapitasi TA 2022 s.d 2024	1.147.396.480,00
16.	Saldo kas yang diperuntukan bagi pembayaran jasa Tenaga Kesehatan (Bidan Pendidik) tahun 2024	16.500.000,00
17.	Saldo kas yang diperuntukan bagi pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bulan November dan Desember 2024	17.493.840,00
Jumlah Dana Mengikat (Earmarked) (1 s.d 17)		59.393.311.528,17
II.	Dana Tidak Mengikat	16.984.404.781,17
Jumlah Saldo Akhir Kas di BUD Tahun 2024 (I+II)		76.377.716.309,34

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Sisa Dana Bantuan Keuangan Kelurahan Bersifat Khusus senilai (Rp283.719.800,00) sebagaimana tercantum nomor urut I.10 pada tabel di atas merupakan selisih antara sisa Bantuan Keuangan Kelurahan Bersifat Khusus periode tahun 2022 s.d. 2024 dengan total nilai sebesar Rp183.795.000,00 terhadap Dana Alokasi Umum yang digunakan sebagai talangan atas pembayaran kegiatan yang sudah terealisasi di tahun 2024 sebesar Rp467.514.800,00 sebagaimana Surat Keterangan Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD Nomor 900.1.3.5/97/BPKAD.2025 Tanggal 24 Maret 2025. Rincian lebih lanjut Sisa Dana Bantuan Keuangan Kelurahan Bersifat Khusus diuraikan sebagai berikut:

Tabel V.2-3 Rincian Sisa Dana Bantuan Keuangan Kelurahan Bersifat Khusus Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)		
No.	Uraian	Jumlah
I.	Sisa BKBK Kelurahan per 31 Desember 2024	
1.	Sisa BKBK Kelurahan TA 2022	78.934.800,00
2.	Sisa BKBK Kelurahan TA 2023	101.480.200,00
3.	Sisa BKBK Kelurahan TA 2024 (Kel. Dusun Baru Kec. Tabir)	3.380.000,00
Jumlah I		183.795.000,00
II.	Dana Alokasi Umum yang Digunakan sebagai Talangan di tahun 2024	
1.	Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko	69.146.000,00
2.	Kel. Pasar Bangko Kec. Bangko	55.120.000,00
3.	Kel. Pasar Atas Bangko Kec. Bangko	46.920.000,00
4.	Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko	70.000.000,00
5.	Kel. Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir	68.465.000,00
6.	Kel. Mampun Kec. Tabir	16.515.000,00
7.	Kel. Pasar Baru Rantau Panjang Kec. Tabir	69.120.000,00
8.	Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir	70.000.000,00
9.	Kel. Pamenang Kec. Pamenang	2.228.800,00
Jumlah II		467.514.800,00
III.	Jumlah Akhir (I-II)	(283.719.800,00)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

- Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Nihil.
- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Nihil.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

4. Saldo Kas di BLUD pada RSUD per 31 Desember 2023 Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp64.373.633,58 yang terdiri dari:
 - a. Saldo rekening BLUD RSUD Kol. Abundjani Bangko pada PT. Bank Jambi Cabang Bangko dengan Nomor Rekening 3005025426 sebesar Rp56.064.366,58; dan
 - b. Kas Tunai di Bendahara BLUD Rp8.309.267,00.
5. Saldo Kas di Bendahara BOSP per 31 Desember 2023 sebesar Rp309.264.500,00 yang terdiri dari:
 - a. Kas di Bendahara BOS SD Rp66.053.739,00; dan
 - b. Kas di Bendahara BOS SMP Rp243.210.761,00.
6. Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.942.316.371,93 yang terdiri dari:
 - a. Saldo Dana Kapitasi JKN sebesar Rp100.757.604,55;
 - b. Saldo Dana BOK Puskesmas sebesar Rp4.841.543.432,00; dan
 - c. Saldo Kas Non Kapitasi sebesar Rp15.335,38 berupa Jasa Giro yang hingga 31 Desember 2024 belum disetorkan ke Kas Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

V.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca

Penjelasan akun Neraca ini menguraikan secara singkat posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin yang disajikan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 yang dikomparasi dengan posisi keuangan Per 31 Desember 2023. Unsur yang disajikan pada neraca terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas.

Saldo Neraca Per 31 Desember 2024 mencakup saldo Neraca Per 31 Desember 2023 ditambah mutasi (tambah/kurang) tahun 2024. Sementara itu, mutasi (tambah/kurang) tahun 2024 meliputi transaksi keuangan yang terjadi atas pelaksanaan APBD TA 2024, koreksi atas saldo Per 31 Desember 2024 dan kejadian lain yang berdampak terhadap posisi keuangan dalam kurun waktu penyusunan laporan keuangan.

Neraca Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2024 terdiri atas Aset sebesar Rp2.551.260.523.024,58, Kewajiban sebesar Rp37.538.800.854,42 dan Ekuitas sebesar Rp2.513.721.722.170,16. Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.3-1. Rincian Neraca Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
I.	ASET				
1.	Aset Lancar	211.936.045.552,38	130.665.773.547,38	81.270.272.005,00	62,20
2.	Investasi Jangka Panjang	66.174.727.599,93	65.982.471.825,85	192.255.774,08	0,29
3.	Aset Tetap	2.165.290.361.444,37	2.223.182.108.736,64	(57.891.747.292,27)	(2,60)
4.	Properti Investasi	818.735.791,00	16.706.877.174,15	(15.888.141.383,15)	(95,10)
5.	Aset Lainnya	107.040.652.636,90	83.445.417.573,94	23.595.235.062,96	28,28
	Jumlah Aset	2.551.260.523.024,58	2.519.982.648.857,96	31.277.874.166,62	1,24
II.	KEWAJIBAN				
1.	Kewajiban Jangka Pendek	37.538.800.854,42	18.865.496.751,82	18.673.304.102,60	98,98
2.	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah Kewajiban	37.538.800.854,42	18.865.496.751,82	18.673.304.102,60	98,98
III.	EKUITAS				
	Ekuitas	2.513.721.722.170,16	2.501.117.152.106,14	12.604.570.064,02	0,50
	Jumlah Ekuitas	2.513.721.722.170,16	2.501.117.152.106,14	12.604.570.064,02	0,50
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	2.551.260.523.024,58	2.519.982.648.857,96	31.277.874.166,62	1,24

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Aset Per 31 Desember 2024 bertambah dibandingkan saldo Per 31 Desember 2023 sebesar Rp31.277.874.166,62 atau 1,24%. Peningkatan tersebut setara dengan bertambahnya nilai kumulatif Kewajiban dan Ekuitas pada periode yang sama, di mana Kewajiban bertambah sebesar Rp18.673.304.102,60 atau 98,98% dan Ekuitas bertambah sebesar Rp12.604.570.064,02 atau 0,50%.

Masing-masing unsur Neraca dapat dijelaskan sebagai berikut:

V.3.1. A s e t

Per 31 Desember 2024
Rp2.551.260.523.024,58

Per 31 Desember 2023
Rp2.519.982.648.857,96

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Nilai Aset Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.551.260.523.024,58. Jika dibandingkan dengan jumlah aset Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.519.982.648.857,96, maka nilai aset bertambah sebesar Rp31.277.874.166,62 atau 1,24%.

Komponen aset Pemerintah Kabupaten Merangin terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Lainnya dan Properti Investasi dengan rincian sebagai berikut:

V.3.1.1 Aset Lancar

	Per 31 Desember 2024 Rp211.936.045.552,38	Per 31 Desember 2023 Rp130.665.773.547,38

Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan yang diharapkan untuk segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Nilai Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Merangin per 31 Desember 2024 sebesar Rp211.936.045.552,38, sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp130.665.773.547,38, bertambah sebesar Rp81.270.272.005,00 atau 62,20%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.3-2 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Kas di Kas Daerah	76.377.716.309,34	73.428.018.745,81	2.949.697.563,53	4,02
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	14.913.000,00	(14.913.000,00)	(100,00)
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	-	0,00	-
4.	Kas di Bendahara BLUD	64.373.633,58	320.458.638,98	(256.085.005,40)	(79,91)
5.	Kas di Bendahara BOSP	309.264.500,00	175.748.289,00	133.516.211,00	75,97
6.	Kas di Bendahara FKTP	100.772.939,93	314.876.243,51	(214.103.303,58)	(68,00)
7.	Kas di Bendahara BOK	4.841.543.432,00	4.936.900.503,00	(95.357.071,00)	(1,93)
8.	Kas Lainnya	139.881.736,75	341.640,00	139.540.096,75	40.844,19
9.	Piutang Pajak Daerah	29.464.838.433,78	26.503.803.313,18	2.961.035.120,60	11,17
10.	Piutang Retribusi Daerah	12.518.491.490,00	4.660.466.535,00	7.858.024.955,00	168,61
11.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.057.977.542,88	-	8.057.977.542,88	-
12.	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	17.081.584,00	3.855.419.753,00	(3.838.338.169,00)	(99,56)
13.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	57.524.339.000,00	-	57.524.339.000,00	-
14.	Piutang Transfer Antar Daerah	36.024.269.071,00	26.890.382.032,00	9.133.887.039,00	33,97
15.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	26.946.345,00	34.569.000,00	(7.622.655,00)	(22,05)
16.	Penyisihan Piutang	(23.019.277.718,03)	(20.197.651.380,85)	(2.821.626.337,18)	13,97
17.	Beban Dibayar Dimuka	176.667.199,13	209.540.746,75	(32.873.547,62)	(15,69)
18.	Persediaan	9.311.160.053,02	9.517.986.488,00	(206.826.434,98)	(2,17)
Jumlah		211.936.045.552,38	130.665.773.547,38	81.270.272.005,00	62,20

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.3.1.1.a Kas di Kas Daerah

	Per 31 Desember 2024 Rp76.377.716.309,34	Per 31 Desember 2023 Rp73.428.018.745,81

Akun Kas di Kas Daerah meliputi uang kas yang ada di Bendahara Umum Daerah selaku Pemegang Kas Daerah dalam bentuk rekening giro. Saldo Kas Daerah Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp76.377.716.309,34, sedangkan saldo akhir RKUD periode yang sama pada PT. Bank Jambi Cabang Bangko dengan nomor rekening 401560009 sebesar Rp76.394.374.023,34, maka akan terdapat perbedaan nilai berupa selisih kurang sebesar Rp16.657.714,00 berupa:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

1. SP2D *outstanding* dan koreksi mutasi kurang/lebih catat oleh bank di tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. SP2D *outstanding* atas SP2D Nomor 15.02/04.0/000110/LS/2.14.0.00.0.00.14.0000/PPR1/12/2024 dengan nilai bersih sebesar Rp34.954.080,00 yang diterbitkan BUD tanggal 18 Desember 2024, di-*debet* oleh Bank tanggal 15 Januari 2025.
 - b. Selisih kurang catat oleh bank dengan total nilai sebesar Rp1.060.000,00 dengan rincian:
 - 1) Kurang catat oleh bank atas SP2D Nomor 15.02/04.0/000110/LS/8.01.0.00.0.00.07.0000/PPR/11/2024 dengan nilai bersih sebesar Rp39.144.600,00 yang diterbitkan BUD tanggal 15 November 2024, di-*debet* oleh Bank senilai Rp39.114.600,00. Selisih kurang senilai Rp30.000,00 di-*debet* oleh Bank tanggal 15 Januari 2025;
 - 2) Kurang catat oleh bank atas SP2D Nomor 15.02/04.0/000610/LS/1.03.0.00.0.00.09.0000/PPR1/12/2024 dengan nilai bersih sebesar Rp39.378.999,00 yang diterbitkan BUD tanggal 9 Desember 2024, di-*debet* oleh Bank tanggal 10 Desember 2024 senilai Rp38.378.999,00. Selisih kurang senilai Rp1.000.000,00 di-*debet* oleh Bank tanggal 13 Februari 2025;
 - 3) Kurang catat oleh bank atas SP2D Nomor 15.02/04.0/000621/LS/1.03.0.00.0.00.09.0000/PPR1/12/2024 dengan nilai bersih sebesar Rp7.565.428,00 yang diterbitkan BUD tanggal 10 Desember 2024, di-*debet* oleh Bank senilai Rp7.555.428,00. Selisih kurang senilai Rp10.000,00 di-*debet* oleh Bank tanggal 13 Februari 2025; dan
 - 4) Kurang catat oleh bank atas SP2D Nomor 15.02/04.0/000952/LS/1.03.0.00.0.00.09.0000/PPR1/12/2024 dengan nilai bersih sebesar Rp1.987.306,00 yang diterbitkan BUD tanggal 30 Desember 2024, di-*debet* oleh Bank senilai Rp1.967.306,00. Selisih kurang senilai Rp20.000,00 di-*debet* oleh Bank tanggal 13 Februari 2025.
 - c. Lebih catat oleh bank dengan total nilai sebesar Rp22.086.336,00 dengan rincian:
 - 1) Lebih catat oleh bank atas SP2D Nomor 15.02/04.0/000837/LS/1.03.0.00.0.00.09.0000/PPR1/12/2024 dengan nilai bersih sebesar Rp19.877.702,00 yang diterbitkan BUD tanggal 27 Desember 2024, ter-*debet* ganda oleh Bank. Selisih lebih tersebut di-*credit* oleh Bank tanggal 9 Januari 2025; dan
 - 2) Lebih catat oleh bank atas SP2D Nomor 15.02/04.0/000838/LS/1.03.0.00.0.00.09.0000/PPR1/12/2024 dengan nilai bersih sebesar Rp2.208.634,00 yang diterbitkan BUD tanggal 27 Desember 2024, ter-*debet* ganda oleh Bank. Selisih lebih tersebut di-*credit* oleh Bank tanggal 9 Januari 2025.
 - d. Selisih lebih catat oleh bank dengan total nilai sebesar Rp20.030,00 dengan rincian:
 - 1) Lebih catat oleh bank atas SP2D Nomor 15.02/04.0/000134/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 dengan nilai bersih sebesar Rp35.362.388,00 yang diterbitkan BUD tanggal 20 Desember 2024, di-*debet* oleh Bank senilai Rp35.382.388,00. Selisih lebih senilai Rp20.000,00 di-*credit* oleh Bank tanggal 13 Februari 2025;
 - 2) Lebih catat oleh bank atas SP2D Nomor 15.02/04.0/000788/LS/1.03.0.00.0.00.09.0000/PPR1/12/2024 dengan nilai bersih sebesar Rp8.843.961,00 yang diterbitkan BUD tanggal 24 Desember 2024, di-*debet* oleh Bank senilai Rp8.843.981,00. Selisih lebih senilai Rp20,00 di-*credit* oleh Bank tanggal 13 Februari 2025; dan



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

3) Lebih catat oleh bank atas SP2D Nomor 15.02/04.0/000146/LS/2.17.3.30.3.31.10.0000/PPR1/12/2024 dengan nilai bersih sebesar Rp5.235.587,00 yang diterbitkan BUD tanggal 27 Desember 2024, di-*debet* oleh Bank senilai Rp5.235.597,00. Selisih lebih senilai Rp10,00 di-*credit* oleh Bank tanggal 13 Februari 2025.

2. Kesalahan pemindahbukuan oleh Bank atas premi asuransi jiwa nasabah sebesar Rp2.750.000,00 yang telah dikoreksi pada tanggal 27 Mei 2025.

Jika dibandingkan dengan Saldo Kas Daerah Per 31 Desember 2023 sebesar Rp73.428.018.745,81, maka saldo kas per 31 Desember 2024 meningkat sebesar Rp2.949.697.563,53 atau 4,02%.

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian saldo Kas di Kas Daerah disajikan pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).

V.3.1.1.b Kas di Bendahara Penerimaan

Per 31 Desember 2024
Rp0,00

Per 31 Desember 2023
Rp14.913.000,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung sisa kas pendapatan yang dikelola Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2024 sebesar nihil. Jika dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.913.000,00, maka saldo Kas di Bendahara Penerimaan berkurang sebesar 100,00%.

V.3.1.1.c Kas di Bendahara Pengeluaran

Per 31 Desember 2024
Rp0,00

Per 31 Desember 2023
Rp0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung sisa kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 sebesar nihil.

V.3.1.1.d Kas di BLUD

Per 31 Desember 2024
Rp64.373.633,58

Per 31 Desember 2023
Rp320.458.638,98

Kas di BLUD merupakan akun untuk menampung saldo kas RSUD Kol. Abundjani Bangko dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan pola BLUD. Saldo Kas di BLUD Per 31 Desember 2024 sebesar Rp64.373.633,58 adalah saldo kas di PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor rekening 3005025426 sebesar Rp56.064.366,58 dan saldo Kas Tunai di Bendahara Penerimaan sebesar Rp8.309.267,00.

Saldo Kas di BLUD berkurang sebesar Rp256.085.005,40 atau (79,91%), jika dibandingkan dengan saldo Kas di BLUD Per 31 Desember 2023 sebesar Rp320.458.638,98.

Penurunan nilai tersebut disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penurunan penerimaan sebesar Rp10.062.940.322,01 atau (19,14%), di mana penerimaan tahun 2024 sebesar Rp42.510.213.504,58 dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp52.573.153.826,59. Penerimaan ini terdiri dari:

a. Pendapatan BLUD tahun 2024 sebesar Rp42.189.754.865,60, berkurang sebesar Rp4.591.721.804,38 atau (9,82%) dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp46.781.476.669,98 dan

7



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- b. SilPA tahun sebelumnya tahun 2024 sebesar Rp320.458.638,98, berkurang sebesar Rp5.471.218.518,02 atau (94,47%) dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp5.791.677.156,61.
2. Penurunan pengeluaran berupa Belanja BLUD sebesar Rp9.806.855.316,61 atau (18,77%), di mana pengeluaran tahun 2024 sebesar Rp42.445.839.871,00 dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp52.252.695.187,61.

V.3.1.1.e Kas di Bendahara BOSP

Per 31 Desember 2024
Rp309.264.500,00

Per 31 Desember 2023
Rp175.748.289,00

Kas di Bendahara BOSP merupakan akun untuk menampung saldo kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang dikelola oleh Satuan Pendidikan Negeri penerima Dana BOSP baik SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan. Saldo Kas di Bendahara BOSP Per 31 Desember 2024 sebesar Rp309.264.500,00. Saldo Kas di Bendahara BOSP meningkat sebesar Rp133.516.213,00 atau 75,97%, jika dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara BOSP Per 31 Desember 2023 sebesar Rp175.748.289,00.

Peningkatan saldo tersebut adalah merupakan akumulasi saldo awal Dana BOSP tahun 2024 sebesar Rp175.748.289,00 ditambah selisih lebih dari Pendapatan dan Belanja Dana BOSP tahun berjalan sebesar Rp133.516.211,00.

Rincian saldo Kas di Bendahara BOSP Per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel V.3-3 Rincian Kas di Bendahara BOSP Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
					Jumlah	%
1.	Sekolah Penerima Dana BOS	SD Negeri	66.053.739,00	23.084.687,00	42.969.052,00	186,14
		- Tunai	0,00	2,00	(2,00)	(100,00)
		- Bank	66.053.739,00	23.084.685,00	42.969.054,00	186,14
		SMP Negeri	243.210.761,00	152.663.602,00	90.547.159,00	59,31
		- Tunai	0,00	0,00	0,00	-
		- Bank	243.210.761,00	152.663.602,00	90.547.159,00	59,31
Jumlah		Total	309.264.500,00	175.748.289,00	133.516.211,00	75,97
		- Tunai	0,00	2,00	(2,00)	(100,00)
		- Bank	309.264.500,00	175.748.287,00	133.516.213,00	75,97

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Rincian Kas di Bendahara BOSP Per 31 Desember 2024 di bank maupun tunai untuk masing-masing sekolah penerima dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

V.3.1.1.f Kas di Bendahara FKTP

Per 31 Desember 2024
Rp100.772.939,93

Per 31 Desember 2023
Rp314.876.243,51

Kas di Bendahara FKTP merupakan akun untuk menampung saldo kas Puskesmas-Puskesmas di lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN. Saldo Kas di Bendahara FKTP Per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.942.316.371,93 merupakan kas yang berada pada Bendahara masing-masing Puskesmas berupa akumulasi dari saldo Dana JKN sebesar Rp100.757.604,55 dan saldo Jasa Giro rekening Non Kapitasi FKTP per 31 Desember 2024 yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp15.335,38.

Saldo Kas di Bendahara FKTP berkurang sebesar Rp214.103.303,58 atau (68,00%), jika dibandingkan dengan saldo Per 31 Desember 2023 sebesar Rp314.876.243,51.

Rincian saldo Kas di Bendahara FKTP berupa JKN dan Jasa Giro Non Kapitasi per Puskesmas dirinci sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel V.3-4 Rincian Saldo Kas di Bendahara FKTP Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	FKTP	Tahun 2024		
		JKN	Jasa Giro Non Kapitasi	Jumlah
1.	Puskesmas Bangko	9.244,94	0,00	9.244,94
2.	Puskesmas Pematang Kandis	4.531,85	0,00	4.531,85
3.	Puskesmas Pamenang	34.597.896,67	5.069,68	34.602.966,35
4.	Puskesmas Rantau Panjang	596,56	6.605,52	7.202,08
5.	Puskesmas Sumber Agung	153.479,55	0,00	153.479,55
6.	Puskesmas Meranti	24.732.452,80	0,00	24.732.452,80
7.	Puskesmas Muara Jernih	3.807,10	0,00	3.807,10
8.	Puskesmas Sungai Bulian	1,00	0,00	1,00
9.	Puskesmas Rantau Limau Manis	4.507.480,70	0,00	4.507.480,70
10.	Puskesmas Muara Kibul	0,85	0,37	1,22
11.	Puskesmas Sungai Manau	2.528.236,80	3.590,21	2.531.827,01
12.	Puskesmas Sekancing	3.796,00	0,00	3.796,00
13.	Puskesmas Simpang Parit	5.412.437,00	0,00	5.412.437,00
14.	Puskesmas Simpang Limbur	5.716.490,00	0,00	5.716.490,00
15.	Puskesmas Pasar Masurai	283.295,00	0,00	283.295,00
16.	Puskesmas Aur Duri	604,67	0,00	604,67
17.	Puskesmas Pasar Baru	4.061.381,00	0,00	4.061.381,00
18.	Puskesmas Tambang Emas	16.453.827,25	0,00	16.453.827,25
19.	Puskesmas Bangko Barat	0,00	0,00	0,00
20.	Puskesmas Tabir Lintas	18.191,00	0,00	18.191,00
21.	Puskesmas Kederasan Panjang	1.981.852,31	69,60	1.981.921,91
22.	Puskesmas Muara Siau	98.144,35	0,00	98.144,35
23.	Puskesmas Kota Raja	809,50	0,00	809,50
24.	Puskesmas Muara Delang	116,15	0,00	116,15
25.	Puskesmas Sungai Jering	29.696,50	0,00	29.696,50
26.	Puskesmas Rantau Suli	130.531,00	0,00	130.531,00
27.	Puskesmas Muara Madras	28.704,00	0,00	28.704,00
J u m l a h		100.757.604,55	15.335,38	100.772.939,93

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin

Terhadap saldo Jasa Giro pada rekening Non Kapitasi FKTP pada PT. Bank Jambi sebesar Rp15.335,38 telah disetorkan secara bertahap pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3-5 Rincian Penyetoran Pendapatan Jasa Giro Rekening Non Kapitasi FKTP Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Tanggal Penyetoran	Bukti Penyetoran	FKTP	No. Rek.	Jumlah
1.	24 Januari 2025	001/STS NON KAPITASI/ PKM.PAMENANG/ 2025	Puskesmas Pamenang	3001850635	6.605,52
2.	24 Januari 2025	001/STS NON KAPITASI/PKM.MS/2025	Puskesmas Muara Siau	3001855653	0,37
3.	30 Januari 2025	001/STS NON KAPITASI/ PKM.RTP/2025	Puskesmas Rantau Panjang	3001847499	5.069,68
4.	30 Januari 2025	001/STS NON KAPITASI/ PKM.PM/2025	Puskesmas Pasar Masurai	3001892688	3.590,21
5.	30 Januari 2025	001/STS NON KAPITASI/ PKM.KP/2025	Puskesmas Kederasan Panjang	3001957146	69,60
J u m l a h					15.335,38

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

V.3.1.1.g Kas di Bendahara BOK

Per 31 Desember 2024
Rp4.841.543.432,00

Per 31 Desember 2023
Rp4.936.900.503,00

Kas di Bendahara BOK merupakan akun untuk menampung saldo kas Puskesmas-Puskesmas di lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yang bersumber dari DAK Non Fisik BOK Puskesmas. Saldo Kas di Bendahara BOK Per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.841.543.432,00.

Saldo Kas di Bendahara BOK berkurang sebesar Rp95.357.071,00 atau (1,93%), jika dibandingkan dengan saldo Per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.936.900.503,00. Dengan rincian saldo per Puskesmas sebagai berikut:

Tabel V.3-6 Rincian Saldo Kas di Bendahara BOK Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	FKTP	Jumlah
1.	Puskesmas Bangko	157.003.436,00
2.	Puskesmas Pematang Kandis	78.044.570,00
3.	Puskesmas Pamenang	292.375.314,00
4.	Puskesmas Rantau Panjang	266.983.703,00
5.	Puskesmas Sumber Agung	195.816.014,00
6.	Puskesmas Meranti	170.033.089,00
7.	Puskesmas Muara Jernih	123.755.556,00
8.	Puskesmas Sungai Bulian	125.084.815,00
9.	Puskesmas Rantau Limau Manis	373.765.457,00
10.	Puskesmas Muara Kibul	121.113.184,00
11.	Puskesmas Sungai Manau	61.673.815,00
12.	Puskesmas Sekancing	122.641.486,00
13.	Puskesmas Simpang Parit	79.991.623,00
14.	Puskesmas Simpang Limbur	255.064.800,00
15.	Puskesmas Pasar Masurai	243.384.118,00
16.	Puskesmas Aur Duri	224.015.534,00
17.	Puskesmas Pasar Baru	232.689.197,00
18.	Puskesmas Tambang Emas	243.496.942,00
19.	Puskesmas Bangko Barat	185.570.146,00
20.	Puskesmas Tabir Lintas	235.115.729,00
21.	Puskesmas Kederasan Panjang	192.805.388,00
22.	Puskesmas Muara Siau	95.510.757,00
23.	Puskesmas Kota Raja	246.672.038,00
24.	Puskesmas Muara Delang	96.361.198,00
25.	Puskesmas Sungai Jering	207.053.045,00
26.	Puskesmas Rantau Suli	32.326.904,00
27.	Puskesmas Muara Madras	183.195.574,00
Jumlah		4.841.543.432,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin

V.3.1.1.h Kas Lainnya

Per 31 Desember 2024
Rp139.881.736,75

Per 31 Desember 2023
Rp341.640,00

Kas Lainnya merupakan akun untuk menampung saldo kas yang tidak termasuk dalam Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP dan Kas di Bendahara BOS.

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024 sebesar Rp139.881.736,75 terdiri dari saldo pajak Dana BOS pada SD selaku Sekolah Penerima berupa Utang Pajak Dana BOS SD Negeri sebesar RpRp293.695,00 dan saldo rekening KUPEM sebesar Rp139.588.041,75 yang tahun sebelumnya disajikan sebagai Invenstasi Non Permanen.

Terhadap Utang Pajak Dana BOS SD Negeri telah disetorkan seluruhnya yaitu pada tanggal 10 Maret 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Reklasifikasi Investasi Non Permanen ke Kas Lainnya atas saldo KUPEM pada rekening penampungan an. Kabag Ekonomi SETDA Merangin pada PT Bank Jambi Cabang Bangko Nomor Rekening 1000017686 merupakan pengembalian Dana Bergulir. Program tersebut telah dihentikan dan saldo KUPEM telah dikembalikan ke RKUD pada tanggal 17 April 2025. Jika dibandingkan dengan saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran SKPD Per 31 Desember 2023 sebesar Rp341.640,00, maka jumlah saldo Kas Lainnya meningkat sebesar 139.540.096,75 atau (40.844,19%).

Rincian saldo pajak Dana BOS untuk masing-masing sekolah penerima dirincikan lebih lanjut pada **Lampiran 11**.

V.3.1.1.i Piutang Pajak Daerah

Per 31 Desember 2024
Rp29.464.838.433,78

Per 31 Desember 2023
Rp26.503.803.313,18

Piutang Pajak Daerah merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Pendapatan Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Pajak Daerah) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan kedepan.

Nilai Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2024 sebesar Rp29.464.838.433,78. Jika dibandingkan dengan jumlah Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.503.803.313,18, maka saldo Piutang Pajak Daerah meningkat sebesar Rp2.961.035.120,60 atau sebesar 11,17%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel V.3-7 Rincian Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Piutang Pajak Reklame	311.535.050,51	328.345.499,01	(16.810.448,50)	(5,12)
	- <i>Piutang Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/Megatron 2014 s.d 2024</i>	<i>303.198.470,51</i>	<i>320.008.919,01</i>	<i>(16.810.448,50)</i>	<i>(5,25)</i>
	- <i>Piutang Reklame Kain 2015 s.d 2016 dan 2022</i>	<i>8.074.080,00</i>	<i>8.074.080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>Piutang Reklame Melekat/Stiker 2016</i>	<i>262.500,00</i>	<i>262.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2014 s.d 2024	163.261.248,43	142.619.782,43	20.641.466,00	14,47
3.	Piutang PBB-P2	26.877.118.194,00	24.096.319.082,00	2.780.799.112,00	11,54
	- <i>Piutang PBB-P2 1994 s.d. 2012 yang dilimpahkan ke Pemkab. Merangin</i>	<i>5.575.439.127,00</i>	<i>5.576.207.739,00</i>	<i>(768.612,00)</i>	<i>(0,01)</i>
	- <i>Piutang PBB-P2 2013 s.d 2024</i>	<i>21.301.679.067,00</i>	<i>18.520.111.343,00</i>	<i>2.781.567.724,00</i>	<i>15,02</i>
4.	Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	2.112.923.940,84	1.936.518.949,74	176.404.991,10	9,11
	a. Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman 2014 s.d 2024	86.482.935,84	103.908.055,34	(17.425.119,50)	(16,77)
	b. Piutang PBJT-Tenaga Listrik	1.999.210.335,00	1.823.753.611,00	175.456.724,00	9,62
	- <i>Piutang PPJ PLN 2024</i>	<i>1.968.333.747,00</i>	<i>1.821.726.121,00</i>	<i>146.607.626,00</i>	<i>8,05</i>
	- <i>Piutang PPJ Non PLN 2024</i>	<i>30.876.588,00</i>	<i>2.027.490,00</i>	<i>28.849.098,00</i>	<i>1.422,90</i>
	c. Piutang PBJT-Jasa Perhotelan 2023 dan 2024	2.690.000,00	5.536.613,40	(2.846.613,40)	(51,41)
	d. Piutang PBJT-Jasa Parkir 2024	20.720.000,00	0,00	20.720.000,00	-
	e. Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 2022 s.d 2024	3.820.670,00	3.320.670,00	500.000,00	15,06
Jumlah		29.464.838.433,78	26.503.803.313,18	2.961.035.120,60	11,17

Sumber: BPPRD Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Nilai Piutang Pajak Daerah diperoleh dari nilai Per 31 Desember 2023 dan mutasi tambah/kurang pada tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel V.3-8 Rincian Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
			Jumlah	%
Saldo Awal	26.503.803.313,18	23.731.709.512,76	2.772.093.800,42	11,68
Mutasi Tambah:	4.919.646.215,00	4.799.212.577,33	120.433.637,67	2,51
Penambahan Piutang 2024	4.919.646.215,00	4.799.212.577,33	120.433.637,67	2,51
Mutasi Kurang:	1.958.611.094,40	2.027.118.776,91	(68.507.682,51)	(3,38)
Penerimaan kas atas Piutang tahun sebelumnya	1.958.611.094,40	2.027.118.776,91	(68.507.682,51)	(3,38)
Jumlah Mutasi:	2.961.035.120,60	2.772.093.800,42	188.941.320,18	6,82
Saldo Akhir	29.464.838.433,78	26.503.803.313,18	2.961.035.120,60	11,17

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Rincian mutasi Piutang Pajak Daerah tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah sebesar Rp4.919.646.215,00 yang merupakan penambahan Piutang Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2024 yang terdiri dari:
 - a. Piutang Pajak Reklame sebesar Rp4.498.474,00;
 - b. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp22.508.846,00;
 - c. Piutang PBB-P2 sebesar Rp2.862.854.490,00;
 - d. Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp6.744.070,00;
 - e. Piutang PBJT-Tenaga Listrik sebesar Rp1.999.210.335,00;
 - f. Piutang PBJT-Jasa Perhotelan sebesar Rp2.610.000,00;
 - g. Piutang PBJT-Jasa Parkir sebesar Rp20.720.000,00; dan
 - h. Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp500.000,00.
2. Mutasi kurang sebesar Rp1.958.611.094,40 yang merupakan penerimaan kas berupa pembayaran Piutang Pajak Daerah tahun sebelumnya pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2024 yang terdiri dari:
 - a. Pembayaran Piutang Pajak Reklame sebesar Rp21.308.922,50;
 - b. Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp1.867.380,00;
 - c. Pembayaran PBB-P2 sebesar Rp82.055.378,00;
 - d. Pembayaran PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp24.169.189,50;
 - e. Pembayaran PBJT-Tenaga Listrik sebesar Rp1.823.753.611,00; dan
 - f. Pembayaran PBJT-Jasa Perhotelan sebesar Rp5.456.613,40.

V.3.1.1.j Piutang Retribusi Daerah

Per 31 Desember 2024
Rp12.518.491.490,00

Per 31 Desember 2023
Rp4.660.466.535,00

Piutang Retribusi Daerah merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Pendapatan Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Retribusi Daerah) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan kedepan.

Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.518.491.490,00. Jika dibandingkan dengan Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.660.466.535,00, maka Piutang Retribusi Daerah bertambah sebesar Rp7.858.024.955,00 atau sebesar 168,61%, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel V.3-9 Rincian Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
					Jumlah	%
1.	Dinas Kesehatan	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	419.085.100,00	224.357.000,00	194.728.100,00	86,79
		a. Non Kapitasi BPJS 2023	0,00	224.357.000,00	(224.357.000,00)	(100,00)
		b. Non Kapitasi BPJS 2024	419.085.100,00	0,00	419.085.100,00	-
2.	RSUD Kol. Abundjani Bangko	Piutang BLUD	6.790.088.855,00	0,00	6.790.088.855,00	-
		a. Piutang Klaim Program JKN-KIS	6.102.500.265,00	0,00	6.102.500.265,00	-
		- Pending Juli 2024	355.575.800,00	0,00	355.575.800,00	-
		- Nov-Des 2024	5.746.924.465,00	0,00	5.746.924.465,00	-
		b. Piutang Klaim Ambulan Rujukan BPJS	229.644.000,00	0,00	229.644.000,00	-
		- Okt-Des 2024	229.644.000,00	0,00	229.644.000,00	-
		c. Klaim Obat Pelayanan Pasien Kronis (IFRS)	442.544.590,00	0,00	442.544.590,00	-
		- Okt-Des 2024	442.544.590,00	0,00	442.544.590,00	-
		d. Klaim Alat Bantu Dengar	15.400.000,00	0,00	15.400.000,00	-
		- Okt-Des 2024	15.400.000,00	0,00	15.400.000,00	-
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 2018 s.d 2020	46.501.708,00	46.501.708,00	0,00	0,00
4.	Dinas Lingkungan Hidup	Piutang Retribusi Kebersihan	554.344.976,00	555.354.976,00	(1.010.000,00)	(0,18)
		a. Retribusi Persampahan/Kebersihan 2014 s.d 2020	254.399.976,00	254.399.976,00	0,00	0,00
		b. Retribusi Persampahan/Kebersihan PDAM 2012 s.d 2019	299.945.000,00	300.955.000,00	(1.010.000,00)	(0,34)
5.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Piutang Retribusi Pengendalian Menara 2014	57.660.552,00	57.660.552,00	0,00	0,00
6.	Dinas Koperasi, UKM, Perindag.	Piutang Retribusi Kekayaan Daerah-Sewa Ruko, Kios, Los 2008 s.d 2023	4.001.161.569,00	3.356.287.569,00	644.874.000,00	19,21
7.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Peternakan	53.700.000,00	0,00	53.700.000,00	-
		a. Hasil penjualan Sapi Penggemukan	21.200.000,00	0,00	21.200.000,00	-
		b. Penjualan atas Sapi Bergulir	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	-
8.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Retribusi Kekayaan Daerah	175.644.000,00	0,00	175.644.000,00	-
		- Sewa Tanah Ruko Pamenang 2023 s.d 2024	139.244.000,00	0,00	139.244.000,00	-
		- Sewa Tanah STAI Bangko 2024	36.400.000,00	0,00	36.400.000,00	-
9.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Piutang Retribusi Kekayaan Daerah	400.901.050,00	400.901.050,00	0,00	0,00
		a. Sewa Tanah 2015 s.d 2017	311.578.450,00	311.578.450,00	0,00	0,00
		b. Sewa Rumah Dinas 2010 s.d 2017	89.322.600,00	89.322.600,00	0,00	0,00
		Piutang Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 2016 & 2017	19.403.680,00	19.403.680,00	0,00	0,00
Jumlah			12.518.491.490,00	4.660.466.535,00	7.858.024.955,00	168,61

Sumber: SKPD Teknis Pemungut

Peningkatan Piutang Retribusi Daerah di tahun 2024 diantaranya disebabkan reklasifikasi Pendapatan BLUD pada RSUD Kol. Abundjani Bangko yang pada tahun 2023 disajikan sebagai Lain-Lain PAD yang Sah.

Nilai Piutang Retribusi Daerah diperoleh dari nilai Per 31 Desember 2023 dan mutasi tambah/kurang pada tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel V.3-10 Rincian Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
			Jumlah	%
Saldo Awal	4.660.466.535,00	4.390.142.435,00	270.324.100,00	6,16
Mutasi Tambah:	12.080.266.988,00	728.152.000,00	11.352.114.988,00	1.559,03
Penambahan Piutang 2024	8.234.105.955,00	710.122.000,00	7.523.983.955,00	1.059,53
Reklasifikasi Saldo Tahun Sebelumnya	3.846.161.033,00	0,00	3.846.161.033,00	-
Koreksi Tambah	0,00	18.030.000,00	(18.030.000,00)	(100,00)
Mutasi Kurang:	4.222.242.033,00	457.827.900,00	3.764.414.133,00	822,23
Penerimaan kas atas Piutang tahun sebelumnya	4.222.242.033,00	456.775.900,00	3.765.466.133,00	824,36
Koreksi Kurang/Penghapusan	0,00	1.052.000,00	(1.052.000,00)	(100,00)
Jumlah Mutasi:	7.858.024.955,00	270.324.100,00	7.587.700.855,00	2.806,89
Saldo Akhir	12.518.491.490,00	4.660.466.535,00	7.858.024.955,00	168,61

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Rincian mutasi Piutang Retribusi Daerah tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah sebesar Rp12.080.266.988,00 yang terdiri dari:
 - a. Penambahan Piutang Retribusi Daerah tahun 2024 sebesar Rp8.234.105.955,00 yang terdiri dari:
 - 1) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp419.085.100,00;
 - 2) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp6.790.088.855,00;
 - 3) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Sewa Tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp175.644.000,00;
 - 4) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Sewa Ruko, Kios dan Los pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp849.003.000,00; dan
 - 5) Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup yang dipungut melalui tagihan kepada pelanggan Perumda Air Minum Tirta Merangin sebesar Rp285.000,00.
 - b. Reklasifikasi nilai Piutang Retribusi tahun sebelumnya dari Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp3.846.161.033,00 yang terdiri dari:
 - 1) Reklasifikasi nilai Piutang Pendapatan BLUD tahun sebelumnya pada RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp3.792.461.033,00; dan
 - 2) Reklasifikasi nilai Piutang Penjualan Ternak tahun sebelumnya pada Dinas Peternakan dan Perkebunan sebesar Rp53.700.000,00.
2. Mutasi kurang sebesar Rp4.222.242.033,00 yang merupakan penerimaan Kas berupa pembayaran Piutang Retribusi Daerah tahun sebelumnya pada tahun 2024 yang terdiri dari:
 - a. Pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp224.357.000,00;
 - b. Pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp3.792.461.033,00;
 - c. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup yang dipungut melalui tagihan kepada pelanggan Perumda Air Minum Tirta Merangin sebesar Rp1.295.000,00; dan
 - d. Pembayaran Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Sewa Ruko, Kios dan Los pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp204.129.000,00.

7



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

V.3.1.1.k Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Per 31 Desember 2024
Rp8.057.977.542,88

Per 31 Desember 2023
Rp0,00

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan akun untuk menampung saldo bagian Laba atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.057.977.542,88. Jika dibandingkan dengan piutang Per 31 Desember 2023 sebesar nihil, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meningkat sebesar Rp8.057.977.542,88 atau 100%.

Piutang tersebut merupakan piutang dividen tunai atas bagian laba PT Bank Jambi tahun 2024 yang baru diterima RKUD pada tanggal 24 Maret 2025 berdasarkan RUPS tanggal 15 Maret 2025.

V.3.1.1.l Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Per 31 Desember 2024
Rp17.081.584,00

Per 31 Desember 2023
Rp3.855.419.753,00

Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Lain-Lain PAD yang Sah kepada pihak ketiga yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan kedepan.

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.081.584,00. Jika dibandingkan dengan piutang Per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.855.419.753,00, piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berkurang sebesar Rp3.838.338.169,00 atau (99,56%), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3-11 Rincian Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	S K P D	U r a i a n	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
					Jumlah	%
1.	BPKAD (PPKD)	Piutang PPKD	11.231.584,00	3.408.720,00	7.822.864,00	229,50
		a. Piutang Gaji PNS 2023	0,00	3.408.720,00	(3.408.720,00)	(100,00)
		b. Piutang Gaji PNS 2024	11.231.584,00	0,00	11.231.584,00	-
2.	RSUD Kol. Abundjani Bangko	Piutang BLUD	5.850.000,00	3.798.311.033,00	(3.792.461.033,00)	(99,85)
		a. Piutang Parkir 2016	5.850.000,00	7.850.000,00	(2.000.000,00)	(25,48)
		b. Piutang Klaim Prog. JKN	0,00	3.195.001.900,00	(3.195.001.900,00)	(100,00)
		- Okt-Des 2023	0,00	3.195.001.900,00	(3.195.001.900,00)	(100,00)
		c. Piutang Klaim Ambulan Rujukan BPJS	0,00	65.264.000,00	(65.264.000,00)	(100,00)
		- Des 2023	0,00	65.264.000,00	(65.264.000,00)	(100,00)
		d. Klaim Obat Pelayanan Pasien Kronis (IFRS)	0,00	530.195.133,00	(530.195.133,00)	(100,00)
		- Des 2022	0,00	530.195.133,00	(530.195.133,00)	(100,00)
3.	Dinas Peternakan dan Perkebunan	Piutang Hasil Penjualan Hewan	0,00	53.700.000,00	(53.700.000,00)	(100,00)
		a. Penjualan Sapi Penggemukan 2012	0,00	21.200.000,00	(21.200.000,00)	(100,00)
		b. Penjualan Sapi Gaduhan 2015	0,00	32.500.000,00	(32.500.000,00)	(100,00)
J u m l a h			17.081.584,00	3.855.419.753,00	(3.838.338.169,00)	(99,56)

Sumber: SKPD Teknis Pemungut

Nilai Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diperoleh dari nilai Per 31 Desember 2023 dan mutasi tambah/kurang pada tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel V.3-12 Rincian Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
			Jumlah	%
Saldo Awal	3.855.419.753,00	5.005.377.877,30	(1.149.958.124,30)	(22,97)
Mutasi Tambah:	11.231.584,00	3.793.869.753,00	(3.782.638.169,00)	(99,70)
Penambahan Piutang 2024	11.231.584,00	3.793.869.753,00	(3.782.638.169,00)	(99,70)
Mutasi Kurang:	3.849.569.753,00	4.943.827.877,30	(1.094.258.124,30)	(22,13)
Penerimaan kas atas Piutang tahun sebelumnya	3.408.720,00	4.883.689.877,30	(4.880.281.157,30)	(99,93)
Reklasifikasi Saldo Tahun Sebelumnya	3.846.161.033,00	0,00	3.846.161.033,00	-
Koreksi Kurang/ Penghapusan	0,00	60.138.000,00	(60.138.000,00)	(100,00)
Jumlah Mutasi:	(3.838.338.169,00)	(1.149.958.124,30)	(2.688.380.044,70)	233,78
Saldo Akhir	17.081.584,00	3.855.419.753,00	(3.838.338.169,00)	(99,56)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Rincian mutasi Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah sebesar Rp11.231.584,00 berupa penambahan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan tahun 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Mutasi kurang sebesar Rp3.849.569.753,00 yang terdiri dari:
 - a. Penerimaan Kas berupa pembayaran Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan tahun 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.408.720,00; dan
 - b. Reklasifikasi nilai Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun sebelumnya ke Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp3.846.161.033,00 yang terdiri dari:
 - 1) Reklasifikasi nilai Piutang Pendapatan BLUD tahun sebelumnya pada RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp3.792.461.033,00; dan
 - 2) Reklasifikasi nilai Piutang Penjualan Ternak tahun sebelumnya pada Dinas Peternakan dan Perkebunan sebesar Rp53.700.000,00.

V.3.1.1.m Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Per 31 Desember 2024
Rp57.524.339.000,00

Per 31 Desember 2023
Rp0,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2024 sebesar Rp57.524.339.000,00. Piutang tersebut merupakan saldo Kurang Bayar DBH s.d tahun 2023 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024 tanggal 25 Oktober 2024, setelah dikurangi dengan penyaluran di tahun 2024 sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana bagi Hasil pada Tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan piutang Per 31 Desember 2023 sebesar nihil, Piutang Transfer Pemerintah Pusat tahun 2024 meningkat 100,00%, dengan rincian sebagai berikut:

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel V.3-13 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Penetapan	Penyaluran	Piutang
		(PMK No. 89 Tahun 2024)	(KMK No. 44/KM.7/2024)	
A.	KB Bagi Hasil Pajak	5.085.427.000,00	1.194.578.000,00	3.890.849.000,00
	1. KB Bagi Hasil Pajak Penghasilan	62.863.000,00	14.767.000,00	48.096.000,00
	- PPH Pasal 25/29 WPOPDN	62.863.000,00	14.767.000,00	48.096.000,00
	2. KB Bagian Daerah-Sektor Pertambangan	4.301.140.000,00	1.010.347.000,00	3.290.793.000,00
	a. Minyak Bumi & Gas Bumi	4.290.242.000,00	1.007.787.000,00	3.282.455.000,00
	b. Non Minyak Bumi & Gas Bumi Lainnya	6.307.000,00	1.482.000,00	4.825.000,00
	c. Pengusahaan Panas Bumi	4.591.000,00	1.078.000,00	3.513.000,00
	3. KB Bagian Daerah-Sektor Perhutanan	190.384.000,00	44.722.000,00	145.662.000,00
	4. Bagian Daerah-Sektor Perkebunan	456.552.000,00	107.245.000,00	349.307.000,00
	5. Bagian Daerah-Sektor Lainnya	74.488.000,00	17.497.000,00	56.991.000,00
B.	KB Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	70.100.166.000,00	16.466.676.000,00	53.633.490.000,00
	1. KB Bagi Hasil SDA Minyak Bumi & Gas Bumi	14.816.262.000,00	3.480.372.000,00	11.335.890.000,00
	a. SDA-Minyak Bumi	1.000,00	1.000,00	0,00
	b. SDA-Gas Bumi	14.816.261.000,00	3.480.371.000,00	11.335.890.000,00
	2. KB Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara	55.275.528.000,00	12.984.336.000,00	42.291.192.000,00
	a. Iuran Tetap (Landrent)	155.509.000,00	36.529.000,00	118.980.000,00
	b. Iuran Eksplorasi & Iuran Eksploitasi (Royalty)	55.120.019.000,00	12.947.807.000,00	42.172.212.000,00
	3. KB Bagi Hasil SDA Kehutanan	1.000,00	1.000,00	0,00
	- PSDH	1.000,00	1.000,00	0,00
	4. KB Bagi Hasil SDA Cukai Hasil Tembakau	8.375.000,00	1.967.000,00	6.408.000,00
Jumlah		75.185.593.000,00	17.661.254.000,00	57.524.339.000,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.3.1.1.n Piutang Transfer Antar Daerah

Per 31 Desember 2024
36.024.269.071,00

Per 31 Desember 2023
Rp26.890.382.032,00

Piutang Transfer Antar Daerah Per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.507.110.165,00. Piutang tersebut terdiri atas alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi tahun 2024 sebesar Rp16.807.110.165,00 dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemerintah Provinsi Jambi Kepada Kelurahan tahun 2024 sebesar Rp700.000.000,00, yang belum disalurkan.

Jika dibandingkan dengan piutang Per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.890.382.032,00, Piutang Transfer Antar Daerah berkurang sebesar Rp9.383.271.867,00 atau (34,89%), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3-14 Rincian Piutang Transfer Antar Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Bagi Hasil Pajak PKB	10.139.666.481,00	4.373.313.042,00	5.766.353.439,00	131,85
	- Triwulan IV Tahun 2023	0,00	4.373.313.042,00	(4.373.313.042,00)	(100,00)
	- Triwulan III TA 2024	5.117.941.042,00	0,00	5.117.941.042,00	-
	- Triwulan IV TA 2024	5.021.725.439,00	0,00	5.021.725.439,00	-
2.	Bagi Hasil Pajak BBN-KB 2024	7.125.836.621,00	0,00	7.125.836.621,00	-
	- Triwulan III TA 2024	3.257.561.683,00	0,00	3.257.561.683,00	-
	- Triwulan IV TA 2024	3.868.274.938,00	0,00	3.868.274.938,00	-
3.	Bagi Hasil Pajak PBB-KB	14.878.770.560,00	14.141.211.932,00	737.558.628,00	5,22
	- Triwulan III Tahun 2023	0,00	2.433.154.443,00	(2.433.154.443,00)	(100,00)
	- Triwulan IV Tahun 2023	0,00	11.708.057.489,00	(11.708.057.489,00)	(100,00)
	- Triwulan III TA 2024	7.563.282.888,00	0,00	7.563.282.888,00	-
	- Triwulan IV TA 2024	7.315.487.672,00	0,00	7.315.487.672,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
4.	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	15.805.700,00	21.499.011,00	(5.693.311,00)	(26,48)
	- Triwulan III Tahun 2023	0,00	8.238.668,00	(8.238.668,00)	(100,00)
	- Triwulan IV Tahun 2023	0,00	13.260.343,00	(13.260.343,00)	(100,00)
	- Triwulan III TA 2024	7.940.959,00	0,00	7.940.959,00	-
	- Triwulan IV TA 2024	7.864.741,00	0,00	7.864.741,00	-
5.	Bagi Hasil Pajak Rokok	3.164.189.709,00	8.354.358.047,00	(5.190.168.338,00)	(62,13)
	- Triwulan IV Tahun 2023	0,00	8.354.358.047,00	(8.354.358.047,00)	(100,00)
	- Triwulan IV Tahap 1 TA 2024	3.164.189.709,00	0,00	3.164.189.709,00	-
6.	Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kelurahan	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00	-
Jumlah		36.024.269.071,00	26.890.382.032,00	9.133.887.039,00	33,97

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Komponen Piutang Transfer Antar Daerah tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel V.3-15 Rincian Penetapan dan Penyaluran Transfer Antar Daerah Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Alokasi	Penyaluran	Lebih/(Kurang) Salur
1.	Bagi Hasil Pajak PKB	18.335.028.227,00	8.195.361.746,00	10.139.666.481,00
	- Triwulan I SK Gub. 657/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024, 22 Agust 2024	4.465.504.766,00	4.465.504.766,00	0,00
	- Triwulan II SK Gub. 887/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024, 12 Nov 2024	3.729.856.980,00	3.729.856.980,00	0,00
	- Triwulan III SK Gub. 898/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024, 22 Nov 2024	5.117.941.042,00	0,00	5.117.941.042,00
	- Triwulan IV SK Gub. 355/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024, 22 April 2025	5.021.725.439,00	0,00	5.021.725.439,00
2.	Bagi Hasil Pajak BBN-KB	12.557.205.730,00	5.431.369.109,00	7.125.836.621,00
	- Triwulan I SK Gub. 657/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024, 22 Agust 2024	2.824.949.967,00	2.824.949.967,00	0,00
	- Triwulan II SK Gub. 887/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024, 12 Nov 2024	2.606.419.142,00	2.606.419.142,00	0,00
	- Triwulan III SK Gub. 898/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024, 22 Nov 2024	3.257.561.683,00	0,00	3.257.561.683,00
	- Triwulan IV SK Gub. 355/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024, 22 April 2025	3.868.274.938,00	0,00	3.868.274.938,00
3.	Bagi Hasil Pajak PBB-KB	29.128.967.416,00	14.250.196.856,00	14.878.770.560,00
	- Triwulan I SK Gub. 657/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024, 22 Agust 2024	7.048.519.324,00	7.048.519.324,00	0,00
	- Triwulan II SK Gub. 887/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024, 12 Nov 2024	7.201.677.532,00	7.201.677.532,00	0,00
	- Triwulan III SK Gub. 898/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024, 22 Nov 2024	7.563.282.888,00	0,00	7.563.282.888,00
	- Triwulan IV SK Gub. 355/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024, 22 April 2025	7.315.487.672,00	0,00	7.315.487.672,00
4.	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	31.141.057,00	15.335.357,00	15.805.700,00
	- Triwulan I SK Gub. 657/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024, 22 Agust 2024	7.418.100,00	7.418.100,00	0,00
	- Triwulan II SK Gub. 887/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024, 12 Nov 2024	7.917.257,00	7.917.257,00	0,00
	- Triwulan III SK Gub. 898/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024, 22 Nov 2024	7.940.959,00	0,00	7.940.959,00
	- Triwulan IV SK Gub. 355/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024, 22 April 2025	7.864.741,00	0,00	7.864.741,00
5.	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	16.658.812.687,00	13.494.622.978,00	3.164.189.709,00
	- Triwulan I SK Gub. 390/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024, 28 Mei 2024	4.698.757.677,00	4.698.757.677,00	0,00
	- Triwulan II SK Gub. 627/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024, 14 Agust 2024	4.084.698.609,00	4.084.698.609,00	0,00
	- Triwulan III SK Gub. 871/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024, 28 Okt 2024	4.711.166.692,00	4.711.166.692,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Alokasi	Penyaluran	Lebih/(Kurang) Salur
- Triwulan IV Tahap I	SK Gub. 1038/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024, 31 Des 2024	3.164.189.709,00	0,00	3.164.189.709,00
6.	Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kelurahan	1.000.000.000,00	300.000.000,00	700.000.000,00
- Tahap I	SK Gub. 665/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-1.1/2024, 20 Des 2024	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
- Tahap II	SK Gub. 665/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-1.1/2024, 20 Des 2024	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00
Jumlah		77.711.155.117,00	41.686.886.046,00	36.024.269.071,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Nilai Piutang Transfer Antar Daerah diperoleh dari nilai Per 31 Desember 2023 dan mutasi tambah/kurang pada tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel V.3-16 Rincian Piutang Transfer Antar Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
			Jumlah	%
Saldo Awal	4.660.466.535,00	4.390.142.435,00	270.324.100,00	6,16
Mutasi Tambah:	12.080.266.988,00	728.152.000,00	11.352.114.988,00	1.559,03
Penambahan Piutang 2024	8.234.105.955,00	710.122.000,00	7.523.983.955,00	1.059,53
Koreksi Tambah	0,00	18.030.000,00	(18.030.000,00)	(100,00)
Mutasi Kurang:	4.222.242.033,00	457.827.900,00	3.764.414.133,00	822,23
Penerimaan kas atas Piutang tahun sebelumnya	4.222.242.033,00	456.775.900,00	3.765.466.133,00	824,36
Koreksi Kurang/ Penghapusan	0,00	1.052.000,00	(1.052.000,00)	(100,00)
Jumlah Mutasi:	7.858.024.955,00	270.324.100,00	7.587.700.855,00	2.806,89
Saldo Akhir	12.518.491.490,00	4.660.466.535,00	7.858.024.955,00	168,61

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Rincian mutasi Piutang Transfer Antar Daerah tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah sebesar Rp38.718.344.338,00 yang terdiri dari:
 - a. Penambahan Piutang Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Jambi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 sebesar Rp35.324.269.071,00 yang terdiri dari:
 - 1) Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp10.139.666.481,00;
 - 2) Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar Rp7.125.836.621,00;
 - 3) Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp14.878.770.560,00;
 - 4) Piutang Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan sebesar Rp15.805.700,00; dan
 - 5) Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp3.164.189.709,00.
 - b. Penambahan Piutang Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jambi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 sebesar Rp700.000.000,00.
 - c. Koreksi kurang catat Piutang Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Jambi tahun sebelumnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp2.694.075.267,00 yang terdiri dari:
 - 1) Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp41.244.876,00;
 - 2) Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar Rp2.652.830.386,00; dan
 - 3) Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp5,00.
2. Mutasi kurang sebesar Rp29.584.457.299,00 yang terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- a. Penerimaan Kas atas pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Jambi tahun sebelumnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp22.885.542.576,00 yang terdiri dari:
 - 1) Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp4.414.557.918,00;
 - 2) Pembayaran Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar Rp2.652.830.386,00;
 - 3) Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp9.648.121.432,00;
 - 4) Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan sebesar Rp16.725.465,00; dan
 - 5) Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp6.153.307.375,00.
- b. Koreksi pencatatan Piutang Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Jambi Triwulan III dan IV TA 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp6.698.914.723,00 dengan rincian:
 - 1) Koreksi saldo Piutang Bagi Hasil dari PBB-KB sebesar Rp4.493.090.505,00;
 - 2) Koreksi saldo Piutang Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan sebesar Rp4.773.546,00; dan
 - 3) Koreksi saldo Piutang Bagi Hasil dari Pajak Rokok sebesar Rp2.201.050.672,00.

V.3.1.1.o Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Per 31 Desember 2024
Rp26.946.345,00

Per 31 Desember 2023
Rp34.569.000,00

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan akun untuk menampung saldo kewajiban pembayaran tuntutan ganti rugi para pegawai Pemerintah Kabupaten Merangin selaku Bendahara dan bukan Bendahara pada SKPD yang akan jatuh tempo pada tahun 2024.

Nilai Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Per 31 Desember 2024 sebesar Rp26.946.345,00. Jika dibandingkan dengan saldo Per 31 Desember 2023 sebesar Rp34.569.000,00, maka nilai Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berkurang sebesar Rp7.622.655,00 atau sebesar (22,05%) yang merupakan penerimaan kas atas Piutang tahun sebelumnya.

Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel V.3-17 Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	(Naik / (Turun))	
				Jumlah	%
1.	SJ, mantan Bendahara Pengeluaran Satpol PP tahun 2012	0,00	3.250.000,00	(3.250.000,00)	(100,00)
2.	VR, mantan Bendahara Pengeluaran Satpol PP tahun 2013	26.946.345,00	31.319.000,00	(4.372.655,00)	(13,96)
Jumlah		26.946.345,00	34.569.000,00	(7.622.655,00)	(22,05)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan tagihan tuntutan ganti rugi daerah kepada PNS yang telah ditetapkan keputusan Pembebanannya melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Terhadap tagihan tersebut, PNS yang bersangkutan telah melakukan pelunasan melalui angsuran pembayaran sepanjang tahun 2024.

Selanjutnya rincian rekapitulasi saldo piutang daerah berdasarkan tahun pengakuan piutang dapat dilihat pada **lampiran 14a**.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

V.3.1.1.p Penyisihan Piutang

Per 31 Desember 2024
(Rp23.019.277.718,03)

Per 31 Desember 2023
(Rp20.197.651.380,85)

Penyisihan Piutang dilakukan agar aset berupa piutang terjaga sehingga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Penyisihan piutang tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang yang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

Penyisihan piutang per tanggal 31 Desember 2024 sebesar (Rp23.019.277.718,03). Jika dibandingkan dengan nilai penyisihan Per 31 Desember 2023 sebesar (Rp20.197.651.380,85), Penyisihan Piutang bertambah sebesar (Rp2.821.626.337,18) atau sebesar 13,97%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3-18 Rincian Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Penyisihan Piutang Pajak	(18.072.730.374,40)	(16.024.296.831,50)	(2.048.433.542,90)	12,78
	a. Pajak Reklame	(214.768.864,23)	(192.240.242,86)	(22.528.621,37)	11,72
	b. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	(131.720.457,05)	(129.028.159,96)	(2.692.297,09)	2,09
	c. PBB-P2	(17.669.644.646,25)	(15.656.639.530,68)	(2.013.005.115,57)	12,86
	d. PBJT-Makanan dan/atau Minuman	(44.941.138,19)	(36.940.843,52)	(8.000.294,67)	21,66
	e. PBJT-Tenaga Listrik	(9.996.051,68)	(9.118.768,06)	(877.283,62)	9,62
	f. PBJT-Jasa Perhotelan	(21.050,00)	(27.683,07)	6.633,07	(23,96)
	g. PBJT-Jasa Parkir	(103.600,00)	0,00	(103.600,00)	-
	h. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	(1.534.567,00)	(301.603,35)	(1.232.963,65)	408,80
2.	Penyisihan Piutang Retribusi	(4.913.694.840,71)	(4.130.918.505,75)	(782.776.334,96)	18,95
	a. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	(2.095.425,50)	(1.121.785,00)	(973.640,50)	86,79
	b. Piutang BLUD pada RSUD	(518.068.865,21)	(123.323.360,75)	(394.745.504,46)	320,09
	- Piutang Klaim Program JKN-KIS	(475.069.909,33)	(35.839.766,00)	(439.230.143,33)	1.225,54
	- Piutang Klaim Ambulan Rujukan BPJS	(13.781.700,00)	(326.320,00)	(13.455.380,00)	4.123,37
	- Klaim Obat Pelayanan Pasien Kronis (IFRS)	(28.199.755,88)	(87.157.274,75)	58.957.518,87	(67,64)
	- Klaim Alat Bantu Dengar	(1.017.500,00)	0,00	(1.017.500,00)	-
	c. Piutang Retribusi Kebersihan/Kebersihan	(554.344.976,00)	(555.354.976,00)	1.010.000,00	(0,18)
	- Dinas Lingkungan Hidup	(254.399.976,00)	(254.399.976,00)	0,00	0,00
	- Perumda Air Minum Tirta Merangin	(299.945.000,00)	(300.955.000,00)	1.010.000,00	(0,34)
	d. Piutang Retribusi Pengendalian Menara	(57.660.552,00)	(57.660.552,00)	0,00	0,00
	e. Piutang Retribusi Kekayaan Daerah	(3.661.737.634,00)	(3.273.852.444,00)	(387.885.190,00)	11,85
	- Sewa Tanah (BPPRD)	(311.578.450,00)	(311.578.450,00)	0,00	0,00
	- Sewa Tanah (BPKAD)	(104.615.000,00)	0,00	(104.615.000,00)	-
	- Sewa Rumah Dinas	(89.322.600,00)	(89.322.600,00)	0,00	0,00
	- Sewa Ruko, Kios dan Los	(3.156.403.584,00)	(2.872.951.394,00)	(283.452.190,00)	9,87
	f. Piutang Hasil Penjualan Ternak	(53.700.000,00)	(53.700.000,00)	0,00	0,00
	- Penjualan Sapi Penggemukan 2012	(21.200.000,00)	(21.200.000,00)	0,00	0,00
	- Penjualan Sapi Bergulir 2015	(32.500.000,00)	(32.500.000,00)	0,00	0,00
	g. Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	(46.501.708,00)	(46.501.708,00)	0,00	0,00
	h. Piutang Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	(19.403.680,00)	(19.403.680,00)	0,00	0,00
3.	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(5.906.157,92)	(7.867.043,60)	1.960.885,68	(24,93)
	- Piutang Gaji PNS pada PPKD	(56.157,92)	(17.043,60)	(39.114,32)	229,50
	- Piutang Parkir pada RSUD Kol. Abundjani Bangko	(5.850.000,00)	(7.850.000,00)	2.000.000,00	(25,48)
4.	Penyisihan Lancar Tuntutan Perbendaharaan	(26.946.345,00)	(34.569.000,00)	7.622.655,00	(22,05)
Jumlah		(23.019.277.718,03)	(20.197.651.380,85)	(2.821.626.337,18)	13,97

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Nilai Penyisihan Piutang diperoleh dari nilai Per 31 Desember 2023 dan mutasi tambah/kurang pada tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel V.3-19 Rincian Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
			Jumlah	%
Saldo Awal	(20.197.651.380,85)	(17.918.052.394,78)	(2.279.598.986,07)	12,72
Mutasi Tambah:	(3.032.774.621,07)	(2.601.301.157,29)	(431.473.463,79)	16,59
Beban Penyisihan tahun sebelumnya	(2.378.784.558,77)	(2.095.308.552,96)	(283.476.005,81)	13,53
Beban Penyisihan tahun 2024	(653.990.062,30)	(503.803.229,33)	(150.186.832,98)	29,81
Koreksi Tambah	0,00	(2.189.375,00)	2.189.375,00	(100,00)
Mutasi Kurang:	(211.148.283,89)	(321.702.171,22)	110.553.887,33	34,37
Penurunan karena Pembayaran	(211.148.283,86)	(307.940.373,22)	96.792.089,36	(31,43)
Koreksi Kurang/ Penghapusan	(0,03)	(13.761.798,00)	13.761.797,97	(100,00)
Jumlah Mutasi:	(2.821.626.337,18)	(2.279.598.986,07)	(542.027.351,11)	23,78
Saldo Akhir	(23.019.277.718,03)	(20.197.651.380,85)	(2.821.626.337,18)	13,97

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Rincian mutasi Penyisihan Piutang tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah sebesar (Rp3.032.774.621,07) yang terdiri dari:
 - a. Penambahan Beban Penyisihan Piutang tahun sebelumnya di tahun 2024 sebesar (Rp2.378.784.558,77) dengan rincian:
 - 1) Beban Penyisihan Piutang Pajak sebesar (Rp2.054.704.103,77); dan
 - 2) Beban Penyisihan Piutang Retribusi sebesar (Rp324.080.455,00).
 - b. Penambahan Beban Penyisihan Piutang tahun 2024 sebesar (Rp653.990.062,30) dengan rincian:
 - 1) Beban Penyisihan Piutang Pajak sebesar (Rp24.624.598,67);
 - 2) Beban Penyisihan Piutang Retribusi sebesar (Rp629.309.305,71); dan
 - 3) Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar (Rp56.157,92).
2. Mutasi kurang sebesar (Rp211.148.283,89) yang terdiri dari:
 - a. Penurunan nilai Penyisihan Piutang karena penerimaan Kas atas pembayaran Piutang tahun sebesar (Rp211.148.283,86) yang terdiri dari:
 - 1) Penyisihan Piutang Pajak sebesar (Rp30.895.159,51);
 - 2) Penyisihan Piutang Retribusi sebesar (Rp172.613.425,75);
 - 3) Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar (Rp17.043,60); dan
 - 4) Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebesar (Rp7.622.655,00).
 - b. Koreksi lebih catat nilai Penyisihan Piutang Pajak sebesar (Rp0,03).

Adapun rincian terkait Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2024 dan Rincian Piutang Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2024 Menurut Kualitas Piutang disajikan pada **Lampiran 14b** dan **Lampiran 14c**.

V.3.1.1.q Beban Dibayar Di muka	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
	Rp176.667.199,13	Rp209.540.746,75

Beban Dibayar Dimuka yang belum jatuh tempo per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp176.667.199,13. Jika dibandingkan dengan saldo Per 31 Desember 2023 sebesar Rp209.540.746,75, Beban Dibayar Dimuka berkurang sebesar Rp32.873.547,62 atau 15,69%. Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2024 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel V.3-20 Rincian Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	15.485.000,00	18.216.000,00	(2.731.000,00)	(14,99)
2.	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	152.848.865,80	185.074.746,75	(32.225.880,95)	(17,41)
3.	Sewa Rumah Kelahiran (RTK)	8.333.333,33	6.250.000,00	2.083.333,33	33,33
Jumlah		176.667.199,13	209.540.746,75	(32.873.547,62)	(15,69)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Rincian Beban Dibayar Dimuka per SKPD tahun 2024 sebagaimana disajikan pada **Lampiran 15**.

V.3.1.1.r Persediaan

Per 31 Desember 2024
Rp9.311.160.053,02

Per 31 Desember 2023
Rp9.517.986.488,00

Nilai Persediaan Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.311.160.053,02. Jika dibandingkan dengan nilai Persediaan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.517.986.488,00, maka nilai Persediaan menurun sebesar Rp206.826.434,98 atau (2,17%).

Pos Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Merangin dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu satu tahun.

Persediaan tahun 2024 merupakan nilai Persediaan yang dikuasakan kepada Pengurus/Penyimpan Barang pada SKPD dan merupakan persediaan yang secara fisik masih terdapat di gudang atau tempat penyimpanan. Untuk persediaan yang bersifat pendukung kegiatan seperti ATK, peralatan listrik, peralatan kebersihan dan lain-lain dicatat dengan metode periodik di mana nilai persediaan disesuaikan melalui jurnal atas dasar jumlah persediaan akhir yang diperoleh melalui *stock opname*. Sedangkan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat seperti persediaan obat-obatan di rumah sakit dicatat dengan menggunakan metode perpetual yaitu dengan menyesuaikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar (*first in first out*).

Rincian Persediaan berdasarkan jenis barang dimuat pada tabel berikut:

Tabel V.3-21 Rincian Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Bahan	33.644.040,00	66.713.290,00	(33.069.250,00)	(49,57)
	- Bahan Baku	15.022.040,00	15.022.040,00	0,00	0,00
	- Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	18.622.000,00	51.691.250,00	(33.069.250,00)	(63,97)
2.	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	662.448.560,00	460.582.800,00	201.865.760,00	43,83
	- Alat Tulis Kantor	14.073.000,00	16.319.000,00	(2.246.000,00)	(13,76)
	- Bahan Cetak	144.527.800,00	209.530.000,00	(65.002.200,00)	(31,02)
	- Benda Pos	100.000,00	0,00	100.000,00	-
	- Bahan Komputer	388.654.550,00	233.006.800,00	155.647.750,00	66,80
	- Alat Listrik	114.393.210,00	1.105.000,00	113.288.210,00	10.252,33
	- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	700.000,00	622.000,00	78.000,00	12,54
3.	Obat-obatan	8.541.688.868,02	8.310.437.420,00	231.251.448,02	2,78%
	- Obat	7.316.501.944,02	6.191.268.422,00	1.125.233.522,02	18,17
	- Obat-obatan Lainnya	1.225.186.924,00	2.119.168.998,00	(893.982.074,00)	(42,19)

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
4.	Natura dan Pakan	73.378.585,00	680.252.978,00	(606.874.393,00)	(89,21)
	- <i>Natura</i>	33.431.585,00	615.990.978,00	(582.559.393,00)	(94,57)
	- <i>Pakan</i>	39.947.000,00	64.262.000,00	(24.315.000,00)	(37,84)
Jumlah		9.311.160.053,02	9.517.986.488,00	(206.826.434,98)	(2,17)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Persediaan obat-obatan sebesar Rp8.541.688.868,02 sebagaimana tercantum pada tabel di atas merupakan akumulasi dari nilai persediaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan termasuk Puskesmas dan Obat Program sebesar Rp6.037.221.085,02 dan RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp2.120.307.739,00. Persediaan obat-obatan tersebut tidak termasuk obat-obatan yang kadaluarsa senilai Rp164.020.494,00 yang terdistribusi sebanyak Rp147.184.557,00 pada Dinas Kesehatan dan Rp16.835.937,00 pada RSUD Kol. Abundjani Bangko. Rincian Persediaan menurut jenisnya serta rincian obat kadaluarsa disajikan dalam **Lampiran 16**.

Nilai Persediaan diperoleh dari nilai Per 31 Desember 2023 dan mutasi tambah/kurang pada tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel V.3-22 Rincian Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
			Jumlah	%
Saldo Awal	9.517.986.488,00	7.761.941.871,40	1.756.044.616,60	22,62
Mutasi Tambah:	105.035.272.228,16	81.074.170.349,00	23.961.101.879,16	29,55
Realisasi Belanja Barang TA 2024	48.749.936.984,00	42.964.267.756,00	5.785.669.228,00	13,47
Pendapatan Hibah Persediaan	3.618.836.769,96	893.683.460,00	2.725.153.309,96	304,93
Persediaan dari Utang Belanja	9.960.049.086,00	5.802.607.185,00	4.157.441.901,00	71,65
Reklasifikasi dari Realisasi Belanja:	31.628.307.093,00	31.413.611.948,00	214.695.145,00	0,68
- <i>Belanja Barang dan Jasa BLUD</i>	12.108.670.971,00	12.987.951.611,00	(879.280.640,00)	(6,77)
- <i>Belanja Barang dan Jasa BOS</i>	19.070.753.822,00	18.425.660.337,00	645.093.485,00	3,50
- <i>Belanja Barang dan Jasa BOP PAUD</i>	154.779.300,00	0,00	154.779.300,00	-
- <i>Belanja Barang dan Jasa BOP Kesetaraan</i>	78.270.000,00	0,00	78.270.000,00	-
- <i>Belanja Hibah BOP PAUD</i>	116.873.000,00	0,00	116.873.000,00	-
- <i>Belanja Hibah BOP Kesetaraan</i>	98.960.000,00	0,00	98.960.000,00	-
Reklasifikasi dari Aset Tetap:	10.423.531.351,70	0,00	10.423.531.351,70	-
- <i>Aset Tetap Peralatan dan Mesin</i>	10.311.320.351,70	0,00	10.311.320.351,70	-
- <i>Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan</i>	112.211.000,00	0,00	112.211.000,00	-
Koreksi Tambah	654.610.943,50	0,00	654.610.943,50	-
Mutasi Kurang:	105.242.098.663,14	79.318.125.732,40	25.923.972.930,74	32,68
Beban Barang Tahun 2024	98.146.113.978,14	79.016.750.590,40	19.129.363.387,74	24,21
Pembayaran Utang tahun sebelumnya	5.802.607.185,00	301.375.142,00	5.501.232.043,00	1.825,38
Kesalahan Penganggaran Aset Tetap	1.292.814.500,00	0,00	1.292.814.500,00	-
Koreksi Kurang/Penghapusan	563.000,00	0,00	563.000,00	-
Jumlah Mutasi:	(206.826.434,98)	1.756.044.616,60	(1.962.871.051,58)	(111,78)
Saldo Akhir	9.311.160.053,02	9.517.986.488,00	(206.826.434,98)	(2,17)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Rincian mutasi Persediaan 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah sebesar Rp105.035.272.228,16 yang terdiri dari:
 - a. Realisasi Belanja Barang TA 2024 sebesar Rp48.749.936.984,00.
 - b. Pendapatan Hibah Persediaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi senilai Rp3.618.836.769,96 dengan rincian:
 - 1) Blanko e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp213.822.000,00 dari Kementerian Dalam Negeri;

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- 2) Obat pada Dinas Kesehatan senilai Rp2.350.484.191,96 dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;
- 3) Alat Kontrasepsi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp932.152.078,00 dari Kantor BKKBN Perwakilan Provinsi Jambi; dan
- 4) Blanko e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp122.378.500,00 dari Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.
- c. Persediaan dari Utang Belanja Barang BLUD pada RSUD Kol. Abundjani Bangko senilai Rp9.960.049.086,00.
- d. Reklasifikasi realisasi Belanja sebesar Rp31.628.307.093,00 yang terdiri dari:
 - 1) Belanja Barang dan Jasa BLUD pada RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp12.108.670.971,00;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp19.070.753.822,00;
 - 3) Belanja Barang dan Jasa BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp154.779.300,00;
 - 4) Belanja Barang dan Jasa BOP Kesetaraan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp78.270.000,00;
 - 5) Belanja Hibah BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp116.873.000,00; dan
 - 6) Belanja Hibah BOP Kesetaraan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp98.960.000,00.
- e. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp10.311.320.351,70 yang terdiri dari:
 - 1) Belanja Modal di bawah nilai kapitalisasi (extracomptable) perolehan tahun 2024 pada 12 (dua belas) SKPD senilai Rp10.306.820.351,70; dan
 - 2) Belanja Modal yang tidak dapat dikategorikan sebagai Aset Tetap sebesar Rp4.500.000,00 pada RSUD Kol. Abundjani Bangko berupa Hardisk (SSD) eksternal.
- f. Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp112.211.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup berupa Bangunan Penampung Sampah.
- g. Koreksi kurang catat saldo awal Persediaan senilai Rp654.610.943,50 dengan rincian:
 - 1) Persediaan Blanko e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp2.334.000,00 karena kesalahan pencatatan harga satuan atas pendapatan hibah persediaan blanko e-KTP dari Pemerintah Provinsi Jambi tahun anggaran sebelumnya;
 - 2) Persediaan Obat pada Dinas Kesehatan senilai Rp478.962.469,50 karena belum mencatat hibah persediaan alat KB dari Pemprov Jambi yang diterima pada tahun-tahun anggaran sebelumnya;
 - 3) Persediaan Alat Kontrasepsi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp173.314.474,00 karena belum mencatat hibah persediaan alat KB dari Pemprov Jambi yang diterima pada tahun-tahun anggaran sebelumnya.
2. Mutasi kurang sebesar Rp105.242.098.663,14 yang terdiri dari:
 - a. Beban Barang tahun 2024 sebesar Rp98.146.113.978,14
 - b. Pengeluaran Kas berupa pembayaran Utang Belanja Barang BLUD pada RSUD Kol. Abundjani Bangko senilai Rp5.802.607.185,00.
 - c. Kesalahan Penganggaran Belanja Modal pada 10 (sepuluh) SKPD sebesar Rp1.274.183.300,00 yang dianggarkan pada akun Belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp21.868.300,00 berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Dana BOS;
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp52.125.000,00 berupa Komputer PC senilai Rp13.200.000,00, Alat Rumah Tangga senilai Rp2.925.000,00 dan Rak Obat senilai Rp36.000.000,00;
 - 3) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp11.900.000,00 berupa Neon Box;
 - 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp146.050.000,00 berupa Mesin Cetak e-KTP senilai Rp119.000.000,00, Sound System senilai Rp5.000.000,00 dan Komputer PC senilai Rp22.050.000,00;
 - 5) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp2.500.000,00 berupa Printer;
 - 6) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp421.000.000,00 berupa Kendaraan Roda 4 senilai Rp416.000.000,00 dan Printer senilai Rp2.500.000,00;
 - 7) Kantor Camat Bangko Barat sebesar Rp2.500.000,00 berupa Printer;
 - 8) Inspektorat Daerah sebesar Rp530.350.000,00 berupa Kendaraan Roda 4 senilai Rp388.300.000,00 dan Komputer PC senilai Rp142.050.000,00;
 - 9) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp9.990.000,00 berupa Alat Listrik (Stavol); dan
 - 10) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp75.900.000,00 berupa 2 unit Tablet *Ipad Pro*.
- d. Kesalahan Penganggaran Belanja Modal Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp18.631.200,00 yang dianggarkan pada akun Belanja Barang dan Jasa BOS dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.149.900,00 berupa Alat Rumah Tangga dan Peralatan Jaringan; dan
 - 2) Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebesar Rp10.481.300,00 berupa Buku Olahraga.
- e. Koreksi lebih catat saldo awal Persediaan Obat senilai Rp563.000,00 pada RSUD Kol. Abundjani Bangko.

V.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Per 31 Desember 2024
Rp66.174.727.599,93

Per 31 Desember 2023
Rp65.982.471.825,85

Nilai Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2024 sebesar Rp66.174.727.599,93. Jika dibandingkan dengan nilai Per 31 Desember 2023 sebesar Rp65.982.471.825,85, maka Investasi Jangka Panjang bertambah sebesar Rp192.255.774,08 atau 0,29%. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir dan Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel V.3-23 Rincian Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)					
No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Investasi Non Permanen	0,00	139.588.041,75	(139.588.041,75)	(100,00)
2.	Investasi Permanen	66.174.727.599,93	65.842.883.784,10	331.843.815,83	0,50
Jumlah		66.174.727.599,93	65.982.471.825,85	192.255.774,08	0,29

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Penjelasan lebih lanjut mengenai Investasi Jangka Panjang tahun 2024 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

V.3.1.2.a Investasi Non Permanen

Per 31 Desember 2024
Rp0,00

Per 31 Desember 2023
Rp139.588.041,75

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu. Investasi Non Permanen pada Pemerintah Kabupaten Merangin merupakan Investasi Non Permanen Lainnya yaitu dana bergulir yang diberikan kepada perorangan atau kelompok ekonomi rakyat Per 31 Desember 2024 dalam bentuk program Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM).

Nilai Investasi Non Permanen Per 31 Desember 2024 sebesar nihil, karena direklasifikasi ke Kas Lainnya atas saldo KUPEM pada rekening penampungan an. Kabag Ekonomi SETDA Merangin pada PT Bank Jambi Cabang Bangko Nomor Rekening 1000017686 yang merupakan pengembalian Dana Bergulir.

Jika dibandingkan dengan saldo Per 31 Desember 2023 sebesar Rp139.588.041,75, maka nilai Investasi Non Permanen berkurang sebesar (Rp139.588.041,75) atau (100,00%). Rincian Saldo Investasi Non Permanen dimuat pada tabel berikut:

Tabel V.3-24 Rincian Investasi Non Permanen Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Investasi Dana Bergulir (Program KUPEM)	441.429.819,00	581.017.860,75	(139.588.041,75)	(24,02)
2.	Cadangan atas Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(441.429.819,00)	(441.429.819,00)	-	-
Jumlah		0,00	139.588.041,75	(139.588.041,75)	(100,00)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Program KUPEM dikelola oleh Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin yang kegiatannya berupa penyaluran kredit kepada UMKM dengan bunga 6% per tahun yang mulai digulirkan dari tahun 2002 sampai tahun 2007 berdasarkan Keputusan Bupati Merangin Nomor 263 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan KUPEM sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 12 Tahun 2008 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3-25 Saldo Penyaluran Dana Bergulir KUPEM per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	nilai perolehan	Bunga	Jumlah
I. Penyaluran Dana Murni TA 2002-2005				
1.	Tahun 2002			
	a. Penyaluran	200.000.000,00	12.000.000,00	212.000.000,00
	b. Pengembalian	55.571.387,00	3.410.463,00	58.981.850,00
	c. Sisa (a-b)	144.428.613,00	8.589.537,00	153.018.150,00
2.	Tahun 2003			
	a. Penyaluran	150.000.000,00	9.000.000,00	159.000.000,00
	b. Pengembalian	45.244.187,04	2.849.628,96	48.093.816,00
	c. Sisa (a-b)	104.755.812,96	6.150.371,04	110.906.184,00
3.	Tahun 2004			
	a. Penyaluran	100.000.000,00	6.000.000,00	106.000.000,00
	b. Pengembalian	54.737.465,10	3.329.199,90	58.066.665,00
	c. Sisa (a-b)	45.262.534,90	2.670.800,10	47.933.335,00
4.	Tahun 2005			
	a. Penyaluran	100.000.000,00	6.000.000,00	106.000.000,00
	b. Pengembalian	55.654.309,00	3.403.041,00	59.057.350,00
	c. Sisa (a-b)	44.345.691,00	2.596.959,00	46.942.650,00

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	nilai perolehan	Bunga	Jumlah
5.	Jumlah I (1+2+3+4)			
	a. Penyaluran	550.000.000,00	33.000.000,00	583.000.000,00
	b. Pengembalian	211.207.348,14	12.992.332,86	224.199.681,00
	c. Saldo I (a-b)	338.792.651,86	20.007.667,14	358.800.319,00
II.	Penyaluran Dana Revolving TA 2006-2007			
1.	Tahun 2006			
	a. Penyaluran	74.000.000,00	4.440.000,00	78.440.000,00
	b. Pengembalian	9.400.920,00	577.080,00	9.978.000,00
	c. Sisa (a-b)	64.599.080,00	3.862.920,00	68.462.000,00
2.	Tahun 2007			
	a. Penyaluran	106.000.000,00	6.360.000,00	112.360.000,00
	b. Pengembalian	92.626.750,00	5.565.750,00	98.192.500,00
	c. Sisa (a-b)	13.373.250,00	794.250,00	14.167.500,00
3.	Jumlah II (1+2)			
	a. Penyaluran dana revolving	180.000.000,00	10.800.000,00	190.800.000,00
	b. Pengembalian revolving	102.027.670,00	6.142.830,00	108.170.500,00
	c. Saldo II (a-b)	77.972.330,00	4.657.170,00	82.629.500,00
	Jumlah (Saldo I+II)	416.764.981,86	24.664.837,14	441.429.819,00

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin

Sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 7 tentang Akuntansi Dana Bergulir, maka Dana Bergulir disajikan dengan metode nilai bersih yang direalisasikan (*Net Realizable Value*) yaitu sejumlah nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa tertagih.

Saldo KUPEM yang bisa tertagih diperoleh dari penatausahaan investasi dana bergulir dengan *aging schedule*. Saldo dana bergulir KUPEM yang beredar di masyarakat per 31 Desember 2023 sebesar Rp441.429.819,00. Seluruh saldo kredit KUPEM yang beredar tersebut merupakan kredit macet. Berdasarkan Peraturan Bupati Merangin Nomor 100 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin, dilakukan *aging schedule* terhadap Nasabah KUPEM Kabupaten Merangin. Hasilnya seluruh dana bergulir tersebut diklasifikasikan dalam kategori macet. Cadangan atas dana bergulir yang diragukan tertagih untuk klasifikasi macet ditetapkan 100% dari kredit macet atau sebesar Rp441.429.819,00. Rincian jumlah cadangan atas dana bergulir yang diragukan tertagih dimuat pada tabel berikut:

Tabel V.3-26 Rincian Cadangan atas Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)			
No.	Uraian	Jumlah Kredit Macet	Cadangan diragukan Tertagih (100%)
1.	Periode 2002-2005	358.800.319,00	358.800.319,00
	- Perguliran APBD tahun 2002	153.018.150,00	153.018.150,00
	- Perguliran APBD tahun 2003	110.906.184,00	110.906.184,00
	- Perguliran APBD tahun 2004	47.933.335,00	47.933.335,00
	- Perguliran APBD tahun 2005	46.942.650,00	46.942.650,00
2.	Periode 2006-2007	82.629.500,00	82.629.500,00
	- Perguliran dana pengembalian tahun 2006	68.462.000,00	68.462.000,00
	- Perguliran dana pengembalian tahun 2007	14.167.500,00	14.167.500,00
	Jumlah	441.429.819,00	441.429.819,00

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin

Saldo dana bergulir KUPEM yang disajikan per 31 Desember 2023 diperoleh dari akumulasi saldo KUPEM yang beredar dan saldo kas di rekening pengelola pada PT Bank Jambi Cabang Bangko Nomor Rekening 1000017686 yang selanjutnya dikurangi dengan cadangan atas dana bergulir diragukan tertagih sebagai rincian berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Saldo dana beredar	Rp441.429.819,00	
Saldo Kas di rekening Pengelola	<u>Rp139.588.041,75</u>	(+)
Jumlah		Rp581.017.860,75
Cadangan dana bergulir diragukan tertagih	<u>Rp441.429.819,00</u>	(-)
Saldo dana bergulir KUPEM		Rp139.588.041,75

V.3.1.2.b Investasi Permanen

Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
Rp66.174.727.599,93	Rp65.842.883.784,10

Saldo Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp66.174.727.599,93, jika dibandingkan dengan jumlah Penyertaan Modal Per 31 Desember 2023 sebesar Rp65.842.883.784,10, maka saldo Investasi Permanen bertambah sebesar Rp331.843.815,83 atau sebesar 0,50%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel V.3-27 Rincian Penyertaan Modal Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	PT Bank Jambi	45.500.000.000,00	43.500.000.000,00	2.000.000.000,00	4,60
2.	PDAM Tirta Merangin	20.674.727.599,93	22.342.883.784,10	(1.668.156.184,17)	(7,47)
Jumlah		66.174.727.599,93	65.842.883.784,10	331.843.815,83	0,50

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

1. PT. Bank Jambi

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Merangin pada PT. Bank Jambi tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal kepada PT. Bank Jambi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2019. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Merangin pada PT Bank Jambi Per 31 Desember 2024 sebesar Rp45.500.000.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo Per 31 Desember 2023 senilai Rp43.500.000.000,00, terdapat peningkatan saldo sebesar Rp2.000.000.000,00 atau sebesar 4,60%.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin berupa saham pada PT Bank Jambi terdiri atas Sertifikat Kolektif Saham No. AE 01 tanggal 26 Juli 2024 yang terdiri atas saham seri A No.AE 00001 MB s.d. No.AE 45500 MB sebanyak 45.500 lembar saham nominal @Rp1.000.000,00 sehingga seluruhnya berjumlah Rp45.500.000.000,00. Kepemilikan saham tersebut menentukan besaran nilai bagi hasil keuntungan atas penyertaan modal tersebut berupa dividen dari PT Bank Jambi pada Tahun 2024 sebesar Rp7.488.236.682,97 yang telah diterima kas daerah pada tanggal 22 Februari 2024 melalui STBP Nomor 15.02/41.0/000011/STBP/ 5.02.0.00.0.00.01.0000/3/2024 dan dicatat sebagai Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD seperti pada tabel berikut:

Tabel V.3-28 Daftar Penyertaan Modal dan Pembagian Dividen Pemerintah Kabupaten Merangin pada PT. Bank Jambi Periode Tahun 2012 s.d 2024

(dalam rupiah)

Tahun	Penyertaan Modal Tahun Berkenaan	Total Kepemilikan Saham	Dividen Tahun Berkenaan	Tambah/(Kurang) Dividen
2012	12.391.000.000,00	12.391.000.000,00	3.556.476.847,00	0,00
2013	2.000.000.000,00	14.391.000.000,00	3.327.479.571,00	(228.997.276,00)
2014	5.609.000.000,00	20.000.000.000,00	3.060.897.581,27	(266.581.989,73)
2015	4.000.000.000,00	24.000.000.000,00	3.137.639.451,57	76.741.870,30



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tahun	Penyertaan Modal Tahun Berkenaan	Total Kepemilikan Saham	Dividen Tahun Berkenaan	Tambah/(Kurang) Dividen
2016	8.500.000.000,00	32.500.000.000,00	4.900.112.473,58	1.762.473.022,01
2017	0,00	32.500.000.000,00	5.392.257.789,50	492.145.315,92
2018	2.500.000.000,00	35.000.000.000,00	5.755.885.001,09	363.627.211,59
2019	4.000.000.000,00	39.000.000.000,00	5.896.472.394,43	140.587.393,34
2020	0,00	39.000.000.000,00	6.265.202.339,18	368.729.944,75
2021	2.000.000.000,00	41.000.000.000,00	7.100.359.765,78	835.157.426,60
2022	0,00	41.000.000.000,00	7.268.658.153,62	168.298.387,84
2023	2.500.000.000,00	43.500.000.000,00	7.488.236.682,97	219.578.529,35
2024	2.000.000.000,00	45.500.000.000,00	0,00	0,00

Sumber: PT. Bank Jambi Cabang Bangko

2. PERUMDA Air Minum Tirta Merangin

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Merangin pada Perusahaan Umum Daerah PERUMDA Air Minum Tirta Merangin tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Merangin Kabupaten Merangin sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2020.

Berdasarkan Laporan Keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Merangin Tahun 2024 tanggal 18 Januari 2025, diketahui bahwa jumlah modal yang dimiliki PERUMDA Air Minum Tirta Merangin Per 31 Desember 2024 secara keseluruhan sebesar Rp65.158.761.862,00. Tidak terdapat peningkatan modal jika dibandingkan Per 31 Desember 2023.

Dari laporan tersebut struktur kepemilikan modal PDAM Tirta Merangin dirinci pada tabel berikut:

Tabel V.3-29 Struktur Modal PERUMDA Air Minum Tirta Merangin Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Hibah dari Pemkab. Merangin berupa tanah se luas 200m ²	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2.	Penyertaan Modal Pemkab. Merangin (Perda No. 7/2020)	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00	0,00	0,00
3.	Penyertaan Modal Non Kas dari Pemerintah Pusat (Perda No. 12/2016)	19.749.211.048,00	19.749.211.048,00	0,00	0,00
4.	Penyertaan Modal Pemkab. Merangin yang telah ditetapkan statusnya (Perda No. 12/2012)	18.301.482.627,00	18.301.482.627,00	0,00	0,00
5.	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya	10.373.689.400,00	10.373.689.400,00	0,00	0,00
6.	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi yang belum ditetapkan statusnya	234.178.787,00	234.178.787,00	0,00	0,00
7.	Jumlah (1+2+3+4+5+6)	65.158.761.862,00	65.158.761.862,00	0,00	0,00
8.	Akumulasi kerugian dan koreksi laba (rugi) tahun sebelumnya	(38.471.131.924,00)	(38.548.565.515,00)	77.433.591,00	(0,20)
9.	Laba (Rugi)	(1.992.542.026,00)	77.433.591,00	(2.069.975.617,00)	(2.673,23)
10.	Jumlah Kekayaan Bersih (7+8+9)	24.695.087.912,00	26.687.629.938,00	(1.992.542.026,00)	(7,47)
11.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (1+2+3+4)	54.550.893.675,00	54.550.893.675,00	0,00	0,00
12.	Persentase Saham Pemerintah Daerah (11/7)	83,72%	83,72%		
Saham Pemerintah Daerah berdasarkan Metode Ekuitas (12 x 10)		20.674.727.599,93	22.342.883.784,10	(1.668.156.184,17)	(7,47)

Sumber: PDAM Tirta Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah modal PERUMDA Air Minum Tirta Merangin Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp65.158.761.862,00 yang terdiri atas:

- a. Hibah dari Pemerintah Kabupaten berupa Bangunan se seluas 200m² yang terletak di Dusun Mudo sebesar Rp200.000,00.
- b. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Merangin yang telah ditetapkan statusnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 sejumlah Rp16.500.000.000,00.
- c. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Merangin yang telah ditetapkan statusnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 sejumlah Rp19.749.211.048,00.
- d. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Merangin yang telah ditetapkan statusnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 sebesar Rp18.301.482.627,00 dengan rincian:
 - 1) Pemerintah Pusat (APBN) sebesar Rp2.091.230.240,00;
 - 2) Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp1.700.000.000,00;
 - 3) Pemerintah Kabupaten Merangin sebesar Rp1.974.262.100,00;
 - 4) Modal Tanah dari Pemerintah Kabupaten sebesar Rp3.337.861.182,00 berupa:
 - a) Tanah Instalasi Pengolahan sebesar Rp2.294.419.182,00; dan
 - b) Tanah Instalasi Umum sebesar Rp1.043.442.000,00;
 - 5) Modal yang telah ditetapkan statusnya sebesar Rp6.927.324.947,00;
 - 6) PPSAB Perkotaan Kabupaten Merangin sebesar Rp178.700.000,00;
 - 7) Modal Pemerintah Kabupaten sebesar Rp2.092.104.158,00.
- e. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dan Provinsi Jambi yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp10.607.868.187,00 dengan rincian:
 - 1) Penyertaan Pemerintah Pusat (APBN) sebesar Rp10.373.689.400,00 berupa:
 - a) Instalasi Sumber sebesar Rp5.755.506.360,00;
 - b) Instalasi Pompa Pembangkit sebesar Rp295.348.000,00;
 - c) Instalasi Pengolahan sebesar Rp3.522.672.960,00; dan
 - d) Instalasi Distribusi sebesar Rp800.162.080,00.
 - 2) Penyertaan Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp234.178.787,00 berupa:
 - a) Instalasi Pengolahan sebesar Rp98.776.700,00; dan
 - b) Instalasi Bahan Instalasi sebesar Rp135.402.087,00.

Dengan akumulasi kerugian tahun sebelumnya sebesar Rp38.471.131.924,00 dan rugi tahun berjalan sebesar Rp1.992.542.026,00, maka jumlah kekayaan bersih PERUMDA Air Minum Tirta Merangin Per 31 Desember 2024 sebesar Rp24.695.087.912,00. Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Merangin pada PERUMDA Air Minum Tirta Merangin adalah sebesar 83,72%. Penilaian saham pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan metode ekuitas, sehingga nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Merangin pada PDAM Tirta Merangin dicatat sebesar persentase kepemilikan terhadap kekayaan bersih PDAM atau sebesar Rp20.674.727.599,93.

Jika dibandingkan dengan posisi Per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.342.883.784,10, terdapat penurunan nilai penyertaan modal pemerintah sebesar Rp1.668.156.184,17 atau (7,47%).

Ikhtisar Investasi Permanen tahun 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

7



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

V.3.1.3 Aset Tetap

Per 31 Desember 2024
Rp2.165.290.361.444,37

Per 31 Desember 2023
Rp2.223.182.108.736,64

Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar 2.165.290.361.444,37. Jika dibandingkan dengan jumlah Aset Tetap 31 Desember 2023 sebesar Rp2.223.182.108.736,64, maka nilai Aset Tetap mengalami penurunan sebesar Rp57.891.747.292,27 atau (2,60%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3-30 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Tanah	79.782.393.666,80	166.917.774.692,00	(87.135.381.025,20)	(52,20)
2.	Peralatan dan Mesin	657.856.868.750,23	623.775.520.818,93	34.081.347.931,30	5,46
3.	Gedung dan Bangunan	1.135.345.606.228,58	1.073.668.954.507,08	61.676.651.721,50	5,74
4.	Jalan, Irigasi, & Jaringan	2.550.731.027.153,88	2.456.940.782.222,88	93.790.244.931,00	3,82
5.	Aset Tetap Lainnya	84.813.629.548,00	80.969.380.348,00	3.844.249.200,00	4,75
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	16.527.791.282,00	130.620.000,00	16.397.171.282,00	125,5
7.	Akumulasi penyusutan	(2.359.766.955.185,12)	(2.179.220.923.852,25)	(180.546.031.332,87)	8,28
Jumlah		2.165.290.361.444,37	2.223.182.108.736,64	(57.891.747.292,27)	(2,60)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2024 merupakan akumulasi dari nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2023 ditambah dengan mutasi di tahun 2024.

Rekapitulasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2024 yang Telah Habis Masa Manfaatnya dan Telah Disusutkan disajikan pada **Lampiran 21**.

V.3.1.3.a Tanah

Per 31 Desember 2024
Rp79.782.393.666,80

Per 31 Desember 2023
Rp166.917.774.692,00

Nilai Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2024 sebesar Rp79.782.393.666,80. Jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2023 sebesar Rp166.917.774.692,00, maka nilai Aset Tanah mengalami penurunan sebesar Rp87.135.381.025,20 atau sebesar (52,20%). Nilai tersebut diperoleh dari nilai Per 31 Desember 2023 dan mutasi tambah/kurang pada Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel V.3-31 Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
			Jumlah	%
Saldo Awal	166.917.774.692,00	166.360.741.012,00	557.033.680,00	0,335
Mutasi Tambah:				
Belanja Modal TA 2024	0,00	34.410.489,00	(34.410.489,00)	(100)
Aset Tetap Tanah di bawah jalan	0,00	3.505.308.464,00	(3.505.308.464,00)	(100)
Hibah Aset Tetap dari Masyarakat/Entitas Lainnya	9.240.000,00	0,00	9.240.000,00	-
Koreksi Karena Kesalahan Pencatatan	1.887.709.235,00	0,00	1.887.709.235,00	-
Reklasifikasi Aset Tetap dari Poroperti Investasi	900.887.850,00	0,00	900.887.850,00	-
Jumlah Mutasi Tambah	2.797.837.085,00	3.539.718.953,00	(741.881.868,00)	(20,96)
Mutasi Kurang:				
Koreksi karena Kesalahan Pencatatan	89.547.596.110,20	0,00	89.547.596.110,20	-



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Reklasifikasi Aset Tetap ke Properti Investasi	0,00	1.481.273.941,00	(1.481.273.941,00)	(100)
Reklasifikasi antara Aset Tetap dan Aset lainnya	0,00	1.501.411.332,00	(1.501.411.332,00)	(100)
Peningkatan Status Aset	385.622.000,00	0,00	385.622.000,00	-
Jumlah Mutasi Kurang	89.933.218.110,20	2.982.685.273,00	86.950.532.837,20	2915
Jumlah Mutasi	(87.135.381.025,20)	557.033.680,00	(87.692.414.705,20)	(15.743)
Saldo Akhir	79.782.393.666,80	166.917.774.692,00	(87.135.381.025,20)	(52,20)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah berupa:

- Hibah Aset Tetap dari Masyarakat/Entitas Lainnya sebesar Rp9.240.000,00 berupa Aset Tetap Tanah seluas 1.500 m² dari orang pribadi an. Fatmawati berupa Lapangan Futsal di Kelurahan Pasar Rantau Panjang, Kecamatan Tabir tanggal 4 Juli 2024.
- Koreksi Karena Kesalahan Pencatatan sebesar Rp1.887.709.235,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Aset Tanah DAM Betuk sebesar Rp10.920.000,00 karena sebelumnya masih bernilai nol;
 - Aset Tetap Tanah yang belum tercatat pada KIB berupa Aset Tanah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebesar Rp923.524.330,00 karena sebelumnya masih bernilai nol
 - Aset Tetap Tanah yang belum tercatat pada KIB berupa Aset Tanah yang masih bernilai nol sebesar Rp542.856.200,00;
 - Aset Tetap Tanah tercatat pada KIB yang masih bernilai nol sebesar Rp95.147.050,00; dan
- Aset Tetap Tanah masih bernilai nol terdiri dari 6 (enam) bidang sebesar Rp124.342.800,00. dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanah Polindes Koto Rami I luas 138 m² sebesar Rp165.600,00;
 - Tanah SDN No.142/VI Tanjung Benuang luas 966 m² sebesar Rp1.159.200,00;
 - Tanah SDN No.253/VI Bangko XII luas 4.206 m² sebesar Rp113.562.000,00;
 - Tanah SDN No.289/VI Koto Rawang luas 1.520 m² sebesar Rp1.824.000,00;
 - Tanah SDN No.32/VI Air Liki I luas 5.000 m² sebesar Rp6.000.000,00; dan
 - Tanah TK Negeri Renah Pemenang luas 1.360 m² sebesar Rp1.632.000,00.
- Aset Tetap Tanah seluas 5.000 m² dari Pemerintah Desa Pelakar Jaya Kecamatan Pamenang sebesar Rp105.218.855,00 berupa Tanah Pasar berdasarkan NPHD Nomor 510/353/PEMDES-PELAKAR-JAYA tanggal 2 oktober 2023 Karena sebelumnya masih bernilai nol.
- Tetap Tanah seluas 15.000 m² dari a.n Muhammad Mardomo sebesar Rp75.000.000,00 berupa Tanah Perkebunan Jahe tanggal 6 Juli 2023, Karena sebelumnya masih bernilai nol.
- Aset Tetap Tanah seluas 10.032 m² dari Pemerintah Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu sebesar Rp9.240.000,00 berupa tanah Ex. Lokasi Rencana Pembangunan Pasar Tradisional Muara Jernih untuk pembangunan Puskesmas Muara Jernih, berdasarkan NPHD Nomor 03/NPHD/MJ/2020 Tahun 2020, Karena sebelumnya masih bernilai nol.
- Koreksi karena kesalahan pencatatan sebesar Rp480.000,00 berupa tanah menara telekomunikasi dengan alamat desa tanjung kasri berdasarkan Surat Hibah nomor 14.1/27/KDS/TJK-2018 pada tanggal 8 oktober 2018;
- Koreksi karena kesalahan pencatatan sebesar Rp980.000,00 berupa tanah menara telekomunikasi dengan alamat desa ngaol berdasarkan Surat Hibah nomor 21 /NG/ 2018 tanggal 8 oktober 2018;

7



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Penilaian tanah diatas berdasarkan nilai NJOP Tahun 2020 sesuai dengan Keputusan Bupati Merangin Nomor 160/BPPRD/2020 tanggal 6 Maret 2020 tentang klasifikasi nilai jual objek pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan kabupaten merangin.

i. Reklasifikasi Aset Tetap dari Properti Investasi karena kesalahan pencatatan pada tahun sebelumnya atas aset yang tidak termasuk dalam kategori Properti Investasi sebesar Rp900.887.850,00, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Fasilitas Umum 1 Pasar Desa sebesar Rp35.660.900,00 dengan luas 20.977 m²;
- 2) Lokasi Pasar (Pertokoan) sebesar Rp21.343.200,00 dengan luas 17.786 m²;
- 3) Los pasar Muaro Madras sebesar Rp1.582.700,00 dengan luas 931 m²;
- 4) Los Pasar Rantau Panjang sebesar Rp102.564.000,00 dengan luas 849 m²;
- 5) Pasar Desa Bukit subur sebesar Rp8.420.100,00 dengan luas 4.953 m²;
- 6) Pasar Desa Bungo Tanjung sebesar Rp85.906.100,00 dengan luas 50.533 m²;
- 7) Pasar Desa Gading Jaya sebesar Rp24.988.300,00 dengan luas 14.699 m²;
- 8) Pasar Desa Mekar Jaya sebesar Rp31.087.900,00 dengan luas 18.287 m²;
- 9) Pasar Desa Muara Delang sebesar Rp26.972.400,00 dengan luas 22.477 m²;
- 10) Pasar Desa Rawa Jaya sebesar Rp41.947.200,00 dengan luas 34.956 m²;
- 11) Pasar Desa Seri Sembilan sebesar Rp23.319.100,00 dengan luas 9.518 m²;
- 12) Pasar Desa Sinar Gading sebesar Rp12.089.900,00 dengan luas 6.135 m²;
- 13) Pasar Desa Sinar Gading sebesar Rp9.955.200,00 dengan luas 5.856 m²;
- 14) Pasar Desa Sungai Sahut sebesar Rp53.147.850,00 dengan luas 21.693 m²;
- 15) Pasar Toko Los Ikan sebesar Rp1.662.600,00 dengan luas 978 m²;
- 16) Tanah Bangunan Los Pasar Ayam sebesar Rp13.081.000,00 dengan luas 127 m²;
- 17) Tanah Los Mesumai Raya sebesar Rp59.019.000,00 dengan luas 573 m²;
- 18) Tanah Los Pasar Ikan sebesar Rp45.835.000,00 dengan luas 445 m²;
- 19) Tanah Los Pasar Koto Renah sebesar Rp410.400,00 dengan luas 342 m²;
- 20) Tanah Pasar Los Ds Pulau Tengah sebesar Rp685.100,00 dengan luas 403 m²;
- 21) Tanah Pasar Los Kaki 5 sebesar Rp241.226.000,00 dengan luas 2.342 m²;
- 22) Tanah Pasar Parak Kelapa sebesar Rp3.850.000,00 dengan luas 385 m²;
- 23) Tanah Pasar Sungai Manau I sebesar Rp1.089.000,00;
- 24) Tanah Pasar Toko Baju 11 sebesar Rp3.774.000,00 dengan luas 2.220 m²;
- 25) Tanah Pasar Toko Baju I sebesar Rp1.377.000,00 dengan luas 810 m²;
- 26) Tanah Pertokoan 1/ Pasar sebesar Rp1.598.400,00 dengan luas 1.332 m²;
- 27) Tanah Pertokoan 2/ Pasar sebesar Rp1.520.400,00 dengan luas 1.260 m²;
- 28) Tanah Pertokoan 3/ Pasar sebesar Rp1.340.400,00 dengan luas 1.117 m²;
- 29) Tanah Pertokoan 5/ Pasar sebesar Rp1.504.800,00 dengan luas 1.254 m²;
- 30) Tanah Pertokoan 6/ Pasar sebesar Rp1.344.000,00 dengan luas 1.120 m²;
- 31) Tanah Pertokoan 7/ Pasar sebesar Rp1.654.800,00 dengan luas 1.378 m²;
- 32) Tanah Pertokoan 8/ Pasar sebesar Rp1.736.400,00 dengan luas 1.448 m²;
- 33) Tanah Toko Pasar Baru 1 sebesar Rp11.869.000,00 dengan luas 1.660 m²;
- 34) Tanah Toko Pasar Baru 4 sebesar Rp6.828.250,00 dengan luas 955 m²;
- 35) Tanah Toko Pasar Baru 3 sebesar Rp7.979.400,00 dengan luas 1.116 m²;
- 36) Tanah Toko Pasar Baru sebesar Rp11.204.050,00 dengan luas 1.567 m²;
- 37) Tanah Bangunan Ruko Ps Lereng sebesar Rp944.500,00 dengan luas 1.889 m²;
dan
- 38) Tanah Bangunan Ruko Pasar Lereng sebesar Rp369.500,00 dengan luas 739 m².



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

2. Mutasi kurang berupa:

- a. Koreksi karena kesalahan pencatatan yaitu lebih catat saldo awal tahun berupa nilai perolehan Aset Tetap Tanah di bawah Jalan Kabupaten sebesar Rp89.547.596.110,20.
- b. Peningkatan status Aset Tetap Tanah di bawah Jalan Kabupaten menjadi Jalan Provinsi sebesar Rp385.622.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 909/KEP.GUB/DPUPR.5/2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Jalan Sumber Agung-Batas Sarolangun sebesar Rp233.750.000,00;
 - 2) Jalan Simpang Kuamang Kuning-Batas Bungo sebesar Rp60.000.000,00;
 - 3) Jalan Simpang Pasar Masurai-Tanjung Agung sebesar Rp46.728.000,00; dan
 - 4) Jalan Tanjung Agung-Koto Tapus sebesar Rp45.144.000,00.

Hingga akhir periode Per 31 Desember 2024, saldo Aset Tetap Tanah milik Pemerintah Kabupaten Merangin adalah sebesar Rp79.782.393.666,80 untuk 2.918 (dua ribu sembilan ratus delapan belas) bidang tanah. Dari jumlah tersebut, telah disertifikasi sebanyak 717 (tujuh ratus tujuh belas) bidang tanah dan sebanyak 2.201 (dua ribu dua ratus satu) bidang tanah belum disertifikasi. Dari jumlah tanah yang belum disertifikasi tersebut, sebanyak 208 (dua ratus delapan) bidang tanah telah diusulkan untuk diproses sertifikasinya dengan rincian:

1. 47 (empat puluh tujuh) bidang sedang proses Panitia Pemeriksaan Tanah;
2. 30 (tiga puluh) berkas sedang proses Surat Keputusan Kepala Kantor BPN Kabupaten Merangin;
3. 10 (sepuluh) berkas sedang proses usulan tanda tangan Kepala Desa/Kelurahan;
4. 103 (seratus tiga) dalam proses peta bidang; dan
5. 18 (delapan belas) tidak bisa dilanjutkan karena sudah terbit sertifikat.

Dari 208 bidang tanah tersebut, masih terdapat 2 (dua) bidang tanah yang tidak dapat diproses sertifikasinya yaitu tanah SDN Nomor 31/VI Rantau Panjang dan Tanah Kantor Lurah Pasar Rantau Panjang karena tanah tersebut sudah disertifikat atas nama sertifikat induknya, namun PNBPN sertifikasi atas tanah tersebut telah disetorkan ke Kas Negara dengan total biaya sebesar Rp609.800,00 yang hingga tahun masih berada di Kas Negara. Bidang Aset BPKAD Kabupaten Merangin akan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin agar dapat diproses dengan usulan persil tanah yang baru.

Disamping itu, terdapat pula Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Merangin yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau masyarakat tanpa adanya dokumen perjanjian baik itu Sewa Pemanfaatan atau Pinjam Pakai sejumlah 4 (empat) bidang tanah dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah STKIP Merangin yang dimanfaatkan oleh Yayasan Pendidikan Merangin dengan Sertifikat Nomor 84 Tahun 2014 seluas 13.425 m². Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin telah bersurat kepada KPKNL Provinsi Jambi untuk menilai besaran atas sewa pemanfaatan tanah tersebut. Pada tanggal 20 Maret 2024, tim penilai dari KPKNL Provinsi Jambi telah melakukan penilaian atas pemanfaatan tanah tersebut sebesar Rp1.213.741.000,00. Berdasarkan hasil dari penilaian tersebut pihak yayasan berkeberatan dan tidak bersedia membayar. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Merangin telah membuat Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri Bangko. Sebagai tindak lanjut dari SKK tersebut Kejaksaan Negeri Bangko telah melakukan mediasi antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan Pihak yayasan sebanyak 3 (tiga) kali, namun pihak yayasan tetap tidak bersedia membayar atas sewa pemanfaatan tanah tersebut. Pada tahun 2025 Yayasan Pendidikan Merangin telah mengugat Pemerintah Kabupaten Merangin ke Pengadilan Negeri Bangko atas kepemilikan tanah STKIP.

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

2. Tanah Biduk Amo yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga (Mlangun Coffee) dengan Sertifikat Nomor 39 Tahun 2012 seluas 2.682 m². Terkait hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Merangin telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor 82/BPKAD/2025 tentang Penetapan Tarif Sewa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Merangin kepada Mlangun Coffee Ujung Tanjung Masumai Bangko.
3. Tanah eks rencana Bandara Tanjung Lamin yang sebagian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian seluas 30,2 ha dengan Sporadik Nomor 030/855/Aset-BPKAD. Pada tahun 2024, tanah tersebut sudah diukur oleh BPN Kabupaten Merangin serta dalam proses penerbitan sertifikat. Dari hasil pengukuran bahwa terdapat 2 (dua) lokasi tanah, yang berlokasi di Desa Simpang Limbur Merangin dan Desa Tanjung Lamin, pada tahun 2024 telah terbit sertifikat yang berlokasi di Desa Limbur Merangin dengan nomor 5 tahun 2024 dengan luasan 123.900 m² serta pada lokasi Desa Tanjung Lamin belum diterbitkan sertifikat dikarenakan permasalahan kesepakatan batas tanah dengan warga.
4. Tanah Sekolah Dasar 206/VI Merangin, Desa Renah Medan, Kecamatan Renah Pembarap merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Merangin sudah memiliki sertifikat tetapi diakui oleh warga bahwa tanah tersebut milik mereka berdasarkan Surat Hak Milik, atas permasalahan tersebut Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan BPN Kabupaten Merangin telah melakukan *plotting* kembali atas tanah tersebut, dengan hasil bahwa tanah Sekolah Dasar 206/VI Merangin tersebut berbatasan dengan Surat Hak Milik warga.
5. Tanah Kebun Jarak seluas 28.820 m² dengan alamat Talang Kawo Kelurahan Dusun Bangko dengan nomor sertifikat 232 Tahun 2016 merupakan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Merangin tetapi diakui oleh Warga bahwa tanah tersebut sebagian milik mereka berdasarkan surat beli jual beli pada tanggal 3 Januari 1975. Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Merangin telah melaksanakan rapat yang dipimpin oleh Asisten I Setda Kabupaten Merangin menyepakati akan dilakukan pengukuran ulang dengan BPN serta disaksikan oleh pihak batas.
6. Tanah Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah desa yang belum diserahkan terimakan kepada Pemerintah desa sebesar Rp1.062.292.200,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Desa Tambang Emas Kecamatan Pamenang Selatan senilai Rp980.235.000,00;
 - b. Desa Meranti Kecamatan Renah Pamenang senilai Rp30.652.800,00;
 - c. Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang senilai Rp28.688.400,00; dan
 - d. Desa Tanah Abang Kecamatan Pamenang senilai Rp22.716.000,00.

Dari nilai Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2024 sebesar Rp79.782.393.666,80 tidak termasuk didalamnya aset Tanah RDC seluas 232 ha di Margoyoso, Kecamatan Margo Tabir. Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Merangin menerima Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1982 Tanah RDC seluas 232 ha milik Direktorat Peternakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dari Pemerintah Provinsi Jambi yang berlokasi di Margoyoso, Kecamatan Margo Tabir dan sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Merangin belum mencatat aset tersebut ke Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) dikarenakan dokumen hibahnya belum lengkap. Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Merangin telah menyerahkan sertifikat tanah RDC ke Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

7



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

V.3.1.3.b Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2024
Rp657.856.868.750,23

Per 31 Desember 2023
Rp623.775.520.818,93

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024 sebesar Rp657.856.868.750,23. Jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023 sebesar Rp623.775.520.818,93, maka nilai aset mengalami peningkatan sebesar Rp34.081.347.931,30 atau sebesar 5,46%. Nilai tersebut diperoleh dari nilai Per 31 Desember 2023 dan mutasi tambah/kurang pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel V.3-32 Rincian Mutasi Aset Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
			Jumlah	%
Saldo Awal	623.775.520.818,93	598.638.876.742,63	25.136.644.076,30	4,20
Mutasi Tambah:				
Belanja Modal TA 2024	43.409.708.584,00	30.982.388.967,30	12.427.319.616,70	40,11
Hibah dari Entitas Lainnya	5.911.718.630,00	0,00	5.911.718.630,00	-
Aset Tetap yang berasal dari Utang Jangka Pendek	324.006.680,00	0,00	324.006.680,00	-
Belanja Pegawai yang diakui sebagai Aset Tetap	44.770.000,00	8.670.000,00	36.100.000,00	416,38
Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai Aset Tetap	396.794.400,00	5.300.000,00	391.494.400,00	7.386,69
Kesalahan Penganggaran Belanja Hibah BOSP	44.462.500,00	46.170.000,00	(1.707.500,00)	(3,7)
Kesalahan Penganggaran Belanja Modal	1.274.183.300,00	0,00	1.274.183.300,00	-
Reklasifikasi antar Aset Tetap	187.856.660,00	138.178.600,00	49.678.060,00	35,95
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOS	8.149.900,00	0,00	8.149.900,00	-
Reklasifikasi antara Aset Tetap dan Aset lainnya	0,00	2.311.281.214,00	(2.311.281.214,00)	(100)
Koreksi karena Kesalahan Pencatatan	0,00	3.308.951.400,00	(3.308.951.400,00)	(100)
Jumlah Mutasi Tambah	51.601.650.654,00	36.800.940.181,30	14.800.710.472,70	40,22
Mutasi Kurang:				
Hibah ke Masyarakat/Entitas Lainnya	411.350.000,00	596.849.200,00	(185.499.200,00)	(31,08)
Penjualan	6.329.638.271,00	6.696.460.984,00	(366.822.713,00)	(5,48)
Reklasifikasi antar Aset Tetap	0,00	45.000.000,00	(45.000.000,00)	(100)
Reklasifikasi antara Aset Tetap dan Aset lainnya	343.236.300,00	87.989.500,00	255.246.800,00	290,09
Belanja Modal di bawah nilai kapitalisasi (<i>extracomptable</i>)	10.306.820.351,70	2.188.587.430,00	8.118.232.921,70	370,93
Belanja Modal yang tidak dapat dikategorikan sebagai Aset Tetap	4.500.000,00	145.215.980,00	(140.715.980,00)	(96,9)
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	124.757.800,00	0,00	124.757.800,00	-
Reklasifikasi antara Aset Tetap ke Aset lainnya	0,00	108.826.100,00	(108.826.100,00)	(100)
Belanja Modal yang tidak dapat dikategorikan sebagai Aset Tetap karena kurang volume	0,00	108.826.100,00	(108.826.100,00)	(100)
Koreksi karena Kesalahan Pencatatan	0,00	13.500.000,00	(13.500.000,00)	(100)
Belanja Modal berupa pelunasan Utang	0,00	1.781.866.911,00	(1.781.866.911,00)	(100)
Pengadaan Aset Tetap tahun sebelumnya	0,00	1.781.866.911,00	(1.781.866.911,00)	(100)
Jumlah Mutasi Kurang	17.520.302.722,70	11.664.296.105,00	5.856.006.617,70	50,2
Jumlah Mutasi	34.081.347.931,30	25.136.644.076,30	8.944.703.855,00	35,58
Saldo Akhir	657.856.868.750,23	623.775.520.818,93	34.081.347.931,30	5,46

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah terdiri dari:

- Belanja Modal TA 2024 pada 45 (empat puluh lima) SKPD sebesar Rp43.409.708.584,00 dengan rincian pada **Lampiran 6**.
- Hibah Aset Tetap dari Kementerian PUPR dengan Nomor 486/BA/Dc/2024 pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp5.911.718.630,00 berupa 1 unit Mobil Tangki Tinja senilai Rp437.929.430,00, 1 unit Bulldozer senilai Rp3.686.106.600,00 dan 1 unit *Excavator* senilai Rp1.787.682.600,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- c. Aset Tetap yang berasal dari Utang Jangka Pendek sebesar Rp324.006.680,00 pada RSUD Kol. Abundjani Bangko berupa Alat Kesehatan.
- d. Belanja Pegawai yang diakui sebagai Aset Tetap pada 17 (tujuh belas) SKPD sebesar Rp44.770.000,00 berupa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3-33 Rincian Belanja Pegawai yang diakui sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Tahun 2024
1.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	510.000,00
2.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.380.000,00
3.	Dinas Lingkungan Hidup	680.000,00
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.760.000,00
5.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.040.000,00
6.	Dinas Perhubungan	1.020.000,00
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.700.000,00
8.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	3.630.000,00
9.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	1.530.000,00
10.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.060.000,00
11.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.020.000,00
12.	Sekretariat Daerah	3.400.000,00
13.	Sekretariat DPRD	8.160.000,00
14.	Inspektorat Daerah	5.440.000,00
15.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.080.000,00
16.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	340.000,00
17.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.020.000,00
JUMLAH		44.770.000,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

- e. Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai Aset Tetap pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp396.794.400,00 berupa pemeliharaan kendaraan pemadam kebakaran;
- f. Kesalahan Penganggaran Belanja Hibah BOSP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp44.462.500,00 berupa Alat Permainan Edukasi (APE), seharusnya Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- g. Kesalahan Penganggaran Belanja Modal pada 10 (sepuluh) SKPD sebesar Rp1.274.183.300,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp21.868.300,00 berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Dana BOS yang dianggarkan di Belanja Barang dan Jasa;
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp52.125.000,00 berupa Komputer PC senilai Rp13.200.000,00, Alat Rumah Tangga senilai Rp2.925.000,00 dan Rak Obat senilai Rp36.000.000,00 yang dianggarkan di Belanja Barang dan Jasa;
 - 3) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp11.900.000,00 berupa *Neon Box* yang dianggarkan di Belanja Barang dan Jasa;
 - 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp146.050.000,00 berupa Mesin Cetak e-KTP senilai Rp119.000.000,00, *Sound System* senilai Rp5.000.000,00 dan Komputer PC senilai Rp22.050.000,00 yang dianggarkan di Belanja Barang dan Jasa;
 - 5) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp2.500.000,00 berupa Printer yang dianggarkan di Belanja Barang dan Jasa;

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- 6) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp421.000.000,00 berupa Kendaraan Roda 4 senilai Rp416.000.000,00 dan Printer senilai Rp2.500.000,00 yang dianggarkan di Belanja Barang dan Jasa;
 - 7) Kantor Camat Bangko Barat sebesar Rp2.500.000,00 berupa Printer yang dianggarkan di Belanja Barang dan Jasa;
 - 8) Inspektorat Daerah sebesar Rp530.350.000,00 berupa Kendaraan Roda 4 senilai Rp388.300.000,00 dan Komputer PC senilai Rp142.050.000,00 yang dianggarkan di Belanja Barang dan Jasa;
 - 9) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp9.990.000,00 berupa Alat Listrik (*Stavol*) yang dianggarkan di Belanja Barang dan Jasa; dan
 - 10) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp75.900.000,00 berupa 2 unit Tablet *Ipad Pro* yang dianggarkan di Belanja Barang dan Jasa.
 - h. Reklasifikasi antar Aset Tetap pada 3 (tiga) SKPD sebesar Rp187.856.660,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp78.566.325,00 yang berasal dari Aset Tetap Lainnya berupa Alat Rumah Tangga;
 - 2) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebesar Rp29.390.335,00 yang berasal dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa papan merek kantor; dan
 - 3) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp79.900.000,00 yang berasal dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa tempat sampah dan papan informasi.
 - i. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp8.149.900,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Alat Rumah Tangga dan Peralatan Jaringan, seharusnya Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
2. Mutasi kurang terdiri dari:
- a. Hibah ke Masyarakat/Entitas Lainnya pada 2 (dua) SKPD sebesar Rp411.350.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Sekretariat Daerah sebesar Rp312.800.000,00 berupa Kendaraan Roda 4 berdasarkan SK hibah Barang dengan nomor 2444/NPHD/BPKPD-7.2/2024; dan
 - 2) Kantor Camat Tabir sebesar Rp98.550.000,00 berupa Komputer PC berdasarkan SK nomor 900/06/KLM/2024;
 - b. Penjualan aset tetap pada 12 (dua belas) SKPD berdasarkan risalah lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi Nomor 440/04.01/2024 sebesar Rp6.329.638.271,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp82.859.000,00 berupa kendaraan roda dua;
 - 2) RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp4.513.389.227,00 berupa alat kedokteran dan barang inventaris kantor;
 - 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp365.380.203,00 berupa kendaraan roda dua dan barang inventaris kantor;
 - 4) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp53.466.875,00 berupa barang inventaris kantor;
 - 5) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp15.000.000,00 berupa kendaraan roda dua;
 - 6) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp81.491.000,00 berupa kendaraan roda dua;
 - 7) Sekretariat Daerah sebesar Rp360.750.000,00 berupa kendaraan roda empat;

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- 8) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp221.880.000,00 berupa kendaraan roda empat dan barang inventaris kantor;
 - 9) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp134.251.666,00 berupa kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua;
 - 10) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp150.500.000,00 berupa kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua;
 - 11) Kantor Camat Bangko sebesar Rp205.670.300,00 berupa kendaraan roda dua dan barang inventaris kantor; dan
 - 12) Kantor Camat Margo Tabir sebesar Rp145.000.000,00 berupa Kendaraan Roda 2.
- c. Reklasifikasi antara Aset Tetap dan Aset lainnya pada 4 (empat) SKPD sebesar Rp343.236.300,00,00 untuk pengadaan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut
- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya dengan total nilai sebesar Rp163.358.300,00 berupa alat musik sebesar Rp74.888.300,00,00 dan koreksi atas temuan belanja mebel sebesar Rp88.470.000,00;
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang reklasifikasi ke aset lainnya sebesar Rp71.922.000,00 berupa Interior Ruang Danyon;
 - 3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian reklasifikasi ke Aset lainnya sebesar Rp39.990.000,00 berupa mesin oven jahe;
 - 4) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dari Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp67.966.000,00.
- d. Belanja Modal di bawah nilai kapitalisasi (*extracomptable*) perolehan tahun 2024 pada 12 (dua belas) SKPD senilai Rp10.306.820.351,70 sesuai dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 100 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3-34 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 yang Tidak Dapat Dikapitalisasi Sebagai Aset Tetap

(dalam rupiah)		
No.	SKPD	Tahun 2024
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.618.357.326,00
2.	Dinas Kesehatan	205.039.329,00
3.	RSUD Kol. Abundjani Bangko	17.138.152,00
4.	Dinas Lingkungan Hidup	21.150.000,00
5.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	3.920.000,00
6.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	300.574.000,00
7.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12.720.000,00
8.	Sekretariat Daerah	34.976.100,00
9.	Sekretariat DPRD	37.458.444,70
10.	Inspektorat Daerah	12.400.000,00
11.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	24.940.000,00
12.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	18.147.000,00
JUMLAH		10.306.820.351,70

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

- e. Belanja Modal yang tidak dapat dikategorikan sebagai Aset Tetap sebesar Rp4.500.000,00 pada RSUD Kol. Abundjani Bangko berupa *Hardisk* (SSD) eksternal.
- f. Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya atas Aset Tak Berwujud pada 3 (tiga) SKPD sebesar Rp124.757.800,00 yang tercatat pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Kesehatan sebesar Rp25.000.000,00 berupa Software SIMBADA;

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- 2) Sekretariat Daerah Rp34.807.500,00 berupa Software SIMBADA;
- 3) Sekretariat Dewan Rp64.950.300,00 berupa Software SIMBADA;

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor 700/1604/ADTT/INSPEKTORAT/2024 tentang Keuangan, Aset, dan Sistem Pengendalian Internal Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin untuk periode Januari hingga 23 September 2024, diketahui terdapat Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang digunakan oleh pihak lain dan belum dikembalikan kepada pengurus barang Sekretariat DPRD dengan sebagai berikut:

1. TV LED 32 inchi dengan nilai perolehan sebesar Rp4.996.875,00 pada sdr. Drm; dan
2. 38 unit barang Peralatan Mesin dengan nilai perolehan sebesar Rp388.515.000,00 pada sdr. ZI.

V.3.1.3.c Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2024
Rp1.135.345.606.228,58

Per 31 Desember 2023
Rp1.073.668.954.507,08

Nilai Aset Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.135.345.606.228,58. Jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.073.668.954.507,08, naik sebesar Rp61.676.651.721,50 atau sebesar 5,74%. Nilai tersebut diperoleh dari nilai Per 31 Desember 2023 dan mutasi tambah/kurang pada tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel V.3-35 Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
			Jumlah	%
Saldo Awal	1.073.668.954.507,08	1.018.568.236.506,38	55.100.718.000,70	5,41
Mutasi Tambah:				
Belanja Modal TA 2024	62.655.071.883,00	79.711.057.271,00	(17.055.985.388,00)	(21,40)
Belanja Pegawai yang diakui sebagai Aset Tetap	27.992.500,00	0,00	27.992.500,00	-
Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai Aset Tetap	320.035.200,00	1.930.464.547,96	(1.610.429.347,96)	(83,42)
Belanja Pemeliharaan yang diakui sebagai Aset Tetap	1.612.236.000,00	0,00	1.612.236.000,00	-
Reklasifikasi antar Aset Tetap	237.815.016,00	13.199.256.836,78	(12.961.441.820,78)	(98,20)
Reklasifikasi antara Aset Tetap dan Aset Lainnya	17.964.701.637,00	5.735.625.214,37	12.229.076.422,63	213,21
Belanja Barang Hibah yang diakui sebagai Aset Tetap	0,00	370.011.818,20	(370.011.818,20)	(100)
Koreksi kesalahan pencatatan tahun sebelumnya	0,00	153.642.494,00	(153.642.494,00)	(100)
Jumlah Mutasi Tambah	82.817.852.236,00	101.100.058.182,31	(18.282.205.946,31)	(18,08)
Mutasi Kurang:				
Hibah ke Entitas Lainnya	83.781.720,50	8.800.528.921,97	(8.716.747.201,47)	(99,05)
Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	1.099.591.879,00	2.724.106.382,03	(1.624.514.503,03)	(59,63)
Reklasifikasi ke Aset lainnya ditahun berjalan	6.664.064.433,00	7.235.787.247,70	(571.722.814,70)	(7,90)
Reklasifikasi antar Aset Tetap koreksi pencatatan tahun sebelumnya	13.293.762.482,00	0,00	13.293.762.482,00	-
Penghapusan Aset	0,00	202.065.814,00	(202.065.814,00)	(100)
Reklasifikasi Aset Tetap ke Properti Investasi	0,00	17.880.413.737,00	(17.880.413.737,00)	(100)
Belanja Modal berupa pelunasan Utang Pengadaan Aset Tetap tahun sebelumnya	0,00	9.156.438.078,91	(9.156.438.078,91)	(100)
Jumlah Mutasi Kurang	21.141.200.514,50	45.999.340.181,61	(24.858.139.667,11)	(54,04)
Jumlah Mutasi	61.676.651.721,50	55.100.718.000,70	6.575.933.720,80	11,93
Saldo Akhir	1.135.345.606.228,58	1.073.668.954.507,08	61.676.651.721,50	5,74

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah terdiri dari:

- Belanja Modal TA 2024 pada 19 (sembilan belas) SKPD sebesar Rp62.655.071.883,00 dengan rincian pada **Lampiran 6**.
- Belanja Pegawai yang diakui sebagai Aset Tetap pada 9 (sembilan) SKPD sebesar Rp27.992.500,00 berupa Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3-36 Rincian Belanja Pegawai yang diakui sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Tahun 2024
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.530.000,00
2.	Dinas Kesehatan	3.400.000,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.595.000,00
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	340.000,00
5.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	680.000,00
6.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	5.857.500,00
7.	Inspektorat Daerah	3.400.000,00
8.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	510.000,00
9.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	680.000,00
JUMLAH		27.992.500,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

- Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai Aset Tetap pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp320.035.200,00 berupa Jasa Konsultansi Perencanaan.
- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang diakui sebagai Aset Tetap pada 3 (tiga) SKPD sebesar Rp1.612.236.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp914.036.000,00;
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp299.260.000,00; dan
 - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp398.940.000,00.
- Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp237.815.016,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp130.620.000,00 dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berupa Gedung dan Bangunan Selasar; dan
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp107.195.016,00 dari Jalan Irigasi dan Jaringan berupa Taman Wisata dan Fasilitas Umum.
- Reklasifikasi antara Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp17.964.701.637,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Reklasifikasi Aset Lainnya ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp361.397.000,00 pada RSUD Kol. Abundjani Bangko berupa jasa konsultansi perencanaan gedung radiologi; dan
 - Reklasifikasi dari Aset Properti Investasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.599.186.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman karena tidak termasuk dalam kategori properti investasi.
 - Reklasifikasi dari Aset lainnya pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp16.004.118.637,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Aset lainnya sebesar Rp107.325.900,00 berupa jasa konsultansi; dan

7



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- b. Aset Gedung dan Bangunan Rp15.896.792.737,00, berupa aset properti investasi yang tidak termasuk dalam kategori properti investasi.
2. Mutasi kurang berupa:
- a. Hibah Aset Tetap kepada masyarakat/entitas lainnya sebesar Rp83.781.720,50 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa bangunan sekolah swasta terdiri dari;
- 1) TK Swasta Nurul Islam nomor 196/NPHD/DAU-SG/PAUD/DISDIKBUD/2024 sebesar Rp7.419.932,90;
 - 2) KB Permata Bangsa nomor 212/NPHD/DAU-SG/PAUD/DISDIKBUD/2024 sebesar Rp7.093.225,34;
 - 3) TK Swasta Kemala Bhyangkari nomor 223/NPHD/DAU-SG/PAUD/DISDIKBUD/2024 sebesar Rp9.364.098,69;
 - 4) TK Swasta Kasih Ibu nomor 226/NPHD/DAU-SG/PAUD/DISDIKBUD/2024 sebesar Rp7.854.343,57;
 - 5) TK An-Nur nomor 225/NPHD/DAU-SG/PAUD/DISDIKBUD/2024 sebesar Rp26.040.098,37; dan
 - 6) TK Safinatunnajwa nomor 224/NPHD/DAU-SG/PAUD/DISDIKBUD/2024 sebesar Rp26.010.021,63.
- b. Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun berjalan sebesar Rp1.099.591.879,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp109.290.335,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebesar Rp29.390.335,00 berupa papan merk;
 - b) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp79.900.000,00 berupa tempat sampah dan papan informasi;
 - 2) Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp990.301.544,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp450.841.320,00; berupa conblok;
 - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp427.249.224,00 berupa turap; dan
 - c) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp112.211.000,00 berupa lampu taman.
- c. Reklasifikasi ke Aset Lainnya ditahun berjalan sebesar Rp6.664.064.433,00 pada 4 (empat) SKPD dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp593.184.000,00 berupa Jasa Konsultansi Perencanaan pekerjaan fisiknya Tahun 2025;
 - 2) RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp23.952.800,00 berupa jasa konsultansi perencanaan pekerjaan fisiknya tahun 2025;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp4.563.872.802,00 berupa Pembangunan Gedung milik Instansi Vertikal yang tidak digunakan untuk operasional Pemda dan belum dihibahkan; dan
 - 4) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp1.483.054.831,00 berupa Pembangunan Gedung milik Pihak Lainnya yang tidak digunakan untuk operasional Pemda dan belum dihibahkan.
- d. Reklasifikasi Antar Aset Tetap koreksi pencatatan ditahun sebelumnya ke Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp13.293.762.482,00 berupa Gedung Tempat Pendidikan Tahun 2023 yang belum tuntas pembangunannya sehingga belum digunakan untuk kegiatan operasional sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

V.3.1.3.d Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Per 31 Desember 2024
Rp2.550.731.027.153,88

Per 31 Desember 2023
Rp2.456.940.782.222,88

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.550.731.027.153,88. Jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.456.940.782.222,88, terdapat peningkatan sebesar Rp93.790.244.931,00 atau sebesar 3,82%.

Nilai tersebut diperoleh dari nilai per 31 Desember 2023 dan mutasi tambah/kurang tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel V.3-37 Rincian Mutasi Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
			Jumlah	%
Saldo Awal	2.456.940.782.222,88	2.366.792.487.690,77	90.148.294.532,11	3,81
Mutasi Tambah:				
Belanja Modal TA 2024	83.315.634.140,00	61.398.124.429,00	21.917.509.711,00	35,70
Belanja Pegawai yang diakui sebagai Aset Tetap	52.802.000,00	0,00	52.802.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai Aset Tetap	1.283.006.850,00	346.558.795,86	936.448.054,14	270,21
Hibah Aset Tetap dari Masyarakat/ Entitas lainnya	12.863.492.250,00	1.374.501.733,00	11.488.990.517,00	835,87
Reklasifikasi antar Aset Tetap	1.058.267.544,00	5.451.655.710,28	(4.393.388.166,28)	(80,59)
Belanja Hibah yang diakui sebagai Aset Tetap	0,00	94.780.380,00	(94.780.380,00)	(100)
Aset Tetap yang berasal dari Bunga Pinjaman SMI	0,00	15.348.157.439,12	(15.348.157.439,12)	(100)
Reklasifikasi antara Aset Tetap dan Aset lainnya	0,00	1.204.580.550,00	(1.204.580.550,00)	(100)
Koreksi karena Kesalahan Pencatatan	0,00	16.433.433.973,00	(16.433.433.973,00)	(100)
Jumlah Mutasi Tambah	98.573.202.784,00	101.651.793.010,26	(3.078.590.226,26)	(3,03)
Mutasi Kurang:				
Belanja Modal di bawah Nilai Kapitalisasi (<i>extracomptable</i>)	112.211.000,00	0,00	112.211.000,00	-
Reklasifikasi antar Aset Tetap	3.341.223.816,00	0,00	3.341.223.816,00	-
Koreksi karena Kesalahan Pencatatan	1.329.523.037,00	0,00	1.329.523.037,00	-
Hibah Aset Tetap kepada masyarakat/entitas lainnya	0,00	475.717.585,00	(475.717.585,00)	(100)
Reklasifikasi antara Aset Tetap dan Aset Lainnya	0,00	262.831.000,00	(262.831.000,00)	(100)
Belanja Modal berupa pelunasan Utang Pengadaan Aset Tetap tahun sebelumnya	0,00	10.764.949.893,15	(10.764.949.893,15)	(100)
Jumlah Mutasi Kurang	4.782.957.853,00	11.503.498.478,15	(6.720.540.625,15)	(58,42)
Jumlah Mutasi	93.790.244.931,00	90.148.294.532,11	3.641.950.398,89	4,04
Saldo Akhir	2.550.731.027.153,88	2.456.940.782.222,88	93.790.244.931,00	3,82

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah terdiri dari:

- Belanja Modal TA 2024 pada 7 (tujuh) SKPD sebesar Rp83.315.634.140,00 dengan rincian pada **Lampiran 6**.
- Belanja Pegawai yang diakui sebagai Aset Tetap sebesar Rp52.802.000,00 pada 3 (tiga) SKPD berupa honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut:
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp48.382.000,00;
 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.400.000,00; dan



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- 3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp1.020.000,00.
 - c. Belanja Barang dan Jasa yang dikategorikan sebagai Aset Tetap sebesar Rp1.283.006.850,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.250.000,00 berupa Belanja Perjalanan Dinas;
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.243.022.400,00 berupa jasa konsultan perencanaan; dan
 - 3) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp37.734.450,00 berupa jasa konsultan perencanaan.
 - d. Hibah Aset Tetap dari Kementerian PUPR Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi Nomor 105/KPTS/Cb6/2024 Tanggal 19 Juni 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Sebagai Tindak Lanjut Hibah Barang Milik Negara Kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp12.863.492.250,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa:
 - 1) Infrastruktur Kawasan Minapolitan sebesar Rp10.067.000.750,00; dan
 - 2) Infrastruktur Kawasan Strategis sebesar Rp2.796.491.500,00.
 - e. Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp1.058.267.544,00 pada 3 (tiga) SKPD berupa dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp112.211.000,00 berupa Fasilitas Aksesibilitas DAK Lampu Taman.
 - 2) Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp67.966.000,00 berupa Sumur Bor.
 - 3) Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp878.090.544,00 yang terdiri dari:
 - a) Dinas Pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp450.841.320,00; dan
 - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp427.249.224,00.
2. Mutasi kurang berupa:
- a. Belanja Modal di bawah nilai kapitalisasi (*extracomptable*) sebesar Rp112.211.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup berupa Bangunan Penampung Sampah.
 - b. Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp3.341.223.816,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp107.195.016,00 berupa Gedung dan Bangunan Taman layak anak; dan
 - 2) Reklasifikasi ke Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp3.234.028.800,00 berupa Jamban/Toilet beserta sanitasinya Pekerjaan Tahun 2023 yang belum tuntas pembangunannya sehingga belum digunakan untuk kegiatan operasional sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - c. Koreksi karena Kesalahan Pencatatan sebesar Rp1.329.523.037,00 pada 3 (tiga) SKPD terdiri dari:
 - 1) Koreksi kesalahan pencatatan karena tidak sesuai dengan kategori aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.315.063.037,00 berupa kegiatan swakelola pekerjaan pemeliharaan titik tertentu.
 - 2) Koreksi kesalahan lebih catat saldo awal tahun pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp5.000.000,00 berupa Jaringan Listrik Distribusi;
 - 3) Koreksi kesalahan lebih catat saldo awal tahun pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp9.460.000,00 berupa Jaringan Internet.

7



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor 646/DPU/2016 tentang Penetapan Ruas Jalan Kabupaten Merangin, total ruas jalan sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat) ruas. Dari total jumlah ruas jalan tersebut terdapat 66 (enam puluh enam) ruas jalan yang tidak tercatat pada KIB Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Terkait kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Merangin telah menetapkan Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor 143/BPKAD/2025 tanggal 21 Mei 2025 tentang Penetapan Nilai Ruas Jalan Kabupaten yang belum tercatat dalam Kartu Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Merangin dengan nilai wajar sebesar Rp68.312.828.973,79 dengan rincian pada **Lampiran 25**.

V.3.1.3.e Aset Tetap Lainnya	Per 31 Desember 2024 Rp84.813.629.548,00	Per 31 Desember 2023 Rp80.969.380.348,00

Nilai Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024 sebesar Rp84.813.629.548,00. Jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2023 sebesar Rp80.969.380.348,00, nilai Aset Tetap Lainnya meningkat sebesar Rp3.844.249.200,00 atau sebesar 4,75%. Nilai tersebut diperoleh dari nilai Per 31 Desember 2023 dan mutasi tambah/kurang pada tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel V.3-38 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
			Jumlah	%
Saldo Awal	80.969.380.348,00	82.378.977.869,00	(1.409.597.521,00)	(1,71)
Mutasi Tambah:				
Belanja Modal TA 2024	3.837.445.925,00	4.459.950.991,00	(622.505.066,00)	(13,96)
Kesalahan penganggaran Belanja Barang dan Jasa BOS	10.481.300,00	0,00	10.481.300,00	-
Reklasifikasi antar Aset Tetap	74.888.300,00	36.989.500,00	37.898.800,00	102,46
Jumlah Mutasi Tambah	3.922.815.525,00	4.496.940.491,00	(574.124.966,00)	(12,77)
Mutasi Kurang:				
Reklasifikasi antar Aset Tetap	78.566.325,00	65.428.600,00	13.137.725,00	20,08
Penghapusan	0,00	104.640.000,00	(104.640.000,00)	(100)
Penjualan	0,00	125.568.000,00	(125.568.000,00)	(100)
Koreksi karena Kesalahan Pos Belanja Modal	0,00	39.915.600,00	(39.915.600,00)	(100)
Belanja Modal yang tidak dapat dikategorikan sebagai Aset Tetap karena kurang volume	0,00	175.439.800,00	(175.439.800,00)	(100)
Reklasifikasi antara Aset Tetap dan Aset lainnya	0,00	749.846.964,00	(749.846.964,00)	(100)
Koreksi karena Kesalahan Pencatatan	0,00	4.617.328.340,00	(4.617.328.340,00)	(100)
Belanja Modal berupa pelunasan Utang Pengadaan Aset Tetap tahun sebelumnya	0,00	28.370.708,00	(28.370.708,00)	(100)
Jumlah Mutasi Kurang	78.566.325,00	5.906.538.012,00	(5.827.971.687,00)	(98,67)
Jumlah Mutasi	3.844.249.200,00	(1.409.597.521,00)	5.253.846.721,00	(372,72)
Saldo Akhir	84.813.629.548,00	80.969.380.348,00	3.844.249.200,00	(4,75)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah terdiri dari:
 - a. Belanja Modal TA 2024 pada 2 (dua) SKPD sebesar Rp3.837.445.925,00 dengan rincian pada **Lampiran 6**.
 - b. Kesalahan penganggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp10.481.300,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Buku Olahraga.
 - c. Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp74.888.300,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

2. Mutasi kurang berupa Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp78.566.325,00 ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa alat rumah tangga lainnya (*home use*).

Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Merangin juga mendapat hibah dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia berupa sapi *Brahman Cross Import* sebanyak 70 (tujuh puluh) ekor. Dari jumlah tersebut, baru diserahkan sebagian sebanyak 50 (lima puluh) ekor sapi dan dikelola pada UPTD Pinang Merah Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin. Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Merangin baru menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) ternak sapi tersebut sebanyak 20 (dua puluh) ekor dan pada tahun 2021 menerima Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebanyak 50 (lima puluh) ekor. Jumlah sapi *Brahman Cross Import* yang dikelola pada UPTD Pinang Merah Dinas Peternakan dan Perkebunan per 31 Desember 2024 berjumlah 12 (dua belas) ekor dengan rincian sapi jantan 2 (dua) ekor, sapi betina 3 (tiga) ekor dan anakan 7 (tujuh) ekor.

V.3.1.3.f Konstruksi Dalam Pengerjaan

Per 31 Desember 2024
Rp16.527.791.282,00

Per 31 Desember 2023
Rp130.620.000,00

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp16.527.791.282,00. Jika dibandingkan dengan nilai Per 31 Desember 2023 sebesar Rp130.620.000,00, nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan meningkat sebesar Rp16.397.171.282,00 atau sebesar 12.553,34%. Nilai tersebut diperoleh dari nilai Per 31 Desember 2023 dan mutasi tambah/kurang pada tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel V.3-39 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
			Jumlah	%
Saldo Awal	130.620.000,00	20.117.935.652,42	(19.987.315.652,42)	(99,35)
Mutasi Tambah:				
Reklasifikasi antar Aset Tetap	16.527.791.282,00	130.620.000,00	16.397.171.282,00	12.553,34
Jumlah Mutasi Tambah	16.527.791.282,00	130.620.000,00	16.397.171.282,00	12.553,34
Mutasi Kurang:				
Hibah Aset Tetap kepada masyarakat/entitas lainnya	0,00	4.169.379.487,39	(4.169.379.487,39)	(100)
Reklasifikasi antar Aset Tetap	130.620.000,00	15.948.556.165,03	(15.817.936.165,03)	(99,18)
Jumlah Mutasi Kurang	130.620.000,00	20.117.935.652,42	(19.987.315.652,42)	(99,35)
Jumlah Mutasi	16.397.171.282,00	(19.987.315.652,42)	36.384.486.934,42	(182,04)
Saldo Akhir	16.527.791.282,00	130.620.000,00	16.397.171.282,00	12.553,34

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah berupa Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp16.527.791.282,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp13.293.762.482,00 berupa Gedung Tempat Pendidikan Tahun 2023 yang belum tuntas pembangunannya sehingga belum digunakan untuk kegiatan operasional sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Reklasifikasi dari Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.234.028.800,00 berupa Jamban/Toilet beserta sanitasinya Pekerjaan Tahun 2023 yang belum tuntas pembangunannya sehingga belum digunakan untuk kegiatan operasional sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

2. Mutasi kurang berupa Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp130.620.000,00 pada RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp130.620.000,00 berupa Pemeliharaan Ruang VIP.

V.3.1.3.g Akumulasi Penyusutan

	Per 31 Desember 2024 (2.359.766.955.185,12)	Per 31 Desember 2023 (Rp2.179.220.923.852,25)

Nilai Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp2.359.766.955.185,12). Jika dibandingkan dengan nilai Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023 sebesar (RpRp2.179.220.923.852,25), nilai penyusutan meningkat sebesar (Rp180.546.031.332,88) atau sebesar 8,28%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel V.3-40 Rincian Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)					
No	S K P D	Tahun 2024	Tahun 2023	Mutasi	
				Jumlah	%
1.	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(560.337.654.584,11)	(522.789.936.073,22)	(37.547.718.510,89)	7,18
2.	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(275.962.031.884,00)	(252.774.415.660,29)	(23.187.616.223,72)	9,17
3.	Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(1.521.100.471.828,35)	(1.401.451.015.627,32)	(119.649.456.201,03)	8,54
4.	Aset Tetap Lainnya	(2.366.796.888,66)	(2.205.556.491,42)	(161.240.397,24)	7,31
Jumlah		(2.359.766.955.185,12)	(2.179.220.923.852,25)	(180.546.031.332,88)	8,28

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Nilai Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024 per jenis Aset Tetap diuraikan sebagai berikut:

Tabel V.3-41 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)					
Uraian	Aset Tetap				Jumlah Penyusutan Tahun 2024
	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	
Saldo Awal	(522.789.936.073,21)	(252.774.415.660,29)	(1.401.451.015.627,32)	(2.205.556.491,42)	(2.179.220.923.852,24)
Mutasi Tambah:					
Nilai Penyusutan Aset Tetap perolehan tahun berjalan	(4.727.723.057,41)	(609.409.066,02)	(4.035.587.565,50)	(49.879.516,74)	(9.422.599.205,67)
Nilai Penyusutan Aset Tetap perolehan tahun sebelumnya	(39.602.811.074,49)	(21.152.814.451,72)	(114.364.619.422,79)	(111.360.880,50)	(175.231.605.829,50)
Koreksi Nilai Penyusutan Aset	(4.000.000,00)	(2.843.584.153,08)	(86.429.567,74)	0.00	(2.934.013.720,82)
Nilai Penyusutan Aset Hibah Aset Tetap dari Entitas Lainnya	0.00	0.00	(1.286.349.225,00)	0.00	(1.286.349.225,00)
Jumlah Mutasi Tambah	(44.334.534.131,90)	(24.605.807.670,82)	(119.772.985.781,03)	(161.240.397,24)	(188.874.567.980,99)
Mutasi Kurang:					
Nilai penyusutan atas Hibah Aset Tetap ke entitas lainnya/ masyarakat	(312.800.000,00)	0.00	0.00	0.00	(312.800.000,00)
Penghapusan	(6.329.638.271,00)	0.00	0.00	0.00	(6.329.638.271,00)
Koreksi nilai penyusutan aset	(145.795.750,00)	(1.418.191.447,11)	(123.529.580,00)	0.00	(1.687.516.777,11)
Jumlah Mutasi Kurang	(6.788.234.021,00)	(1.418.191.447,11)	(123.529.580,00)	0.00	(8.329.955.048,11)
Jumlah Mutasi	(37.546.300.110,90)	(23.187.616.223,71)	(119.649.456.201,03)	(161.240.397,24)	(180.544.612.932,88)
Saldo Akhir	(560.336.236.184,11)	(275.962.031.884,00)	(1.521.100.471.828,35)	(2.366.796.888,66)	(2.359.765.536.785,12)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Nilai Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 18, Lampiran 19 dan Lampiran 20.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

V.3.1.4 Properti Investasi

Per 31 Desember 2024
Rp818.735.791,00

Per 31 Desember 2023
Rp16.706.877.174,15

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk: digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah dapat memiliki Properti Investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai dengan keadaan Pemerintah Daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial; atau Pemerintah Daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Kebijakan Akuntansi Properti Akuntansi ditetapkan melalui Peraturan Bupati Merangin Nomor 100 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.

Nilai bersih Properti Inventasi Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp818.735.791,00 yang merupakan hasil dari pengurangan nilai perolehan sebesar Rp964.821.091,00 terhadap nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar (Rp146.085.300,00), dengan rincian sebagai berikut:

1. Properti Investasi Tanah sebesar Rp580.386.091,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) dengan rincian sebagaimana diungkapkan pada CaLK Nomor V.3.1.3.a angka 2.b.
2. Properti Investasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp384.435.000,00 pada Dinas Perumahan dan Permukiman dengan rincian sebagaimana diungkapkan pada CaLK Nomor V.3.1.3.c angka 2.c.
3. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan sebesar (Rp146.085.300,00),

Jika dibandingkan dengan posisi Per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.706.877.174,15, maka nilai Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Merangin berkurang sebesar Rp15.888.141.383,15 atau (95,10%) dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dicatat sebagai Properti Investasi.

V.3.1.5 Aset Lainnya

Per 31 Desember 2024
Rp107.040.652.636,90

Per 31 Desember 2023
Rp83.445.417.573,94

Nilai Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 sebesar Rp107.040.652.636,90. Jika dibandingkan dengan nilai Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 sebesar Rp83.445.417.573,94, nilai Aset Lainnya meningkat sebesar Rp23.595.235.062,96 atau 28,28%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel V.3-42 Rincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Aset Tidak Berwujud	583.737.960,00	4.400.345.172,40	(3.816.607.212,40)	(86,73)
	- Aset Tidak Berwujud	4.227.447.915,00	8.548.973.427,00	(4.321.525.512,00)	(50,55)
	- Akumulasi Amortisasi	(3.643.709.955,00)	(4.148.628.254,60)	(504.918.299,60)	12,17
2.	Aset Lain-lain	100.892.474.676,90	47.892.497.401,54	52.999.977.275,36	110,66
	- Aset Lain-Lain	102.400.048.588,26	50.656.082.645,16	51.743.965.943,10	102,15
	- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(1.507.573.911,36)	(2.763.585.243,62)	(1.256.011.332,26)	45,45
3.	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.564.440.000,00	31.152.575.000,00	(25.588.135.000,00)	(82,14)
Jumlah		107.040.652.636,90	83.445.417.573,94	23.595.235.062,96	28,28

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

V.3.1.5.a. Aset Tidak Berwujud

Per 31 Desember 2024
Rp583.737.960,00

Per 31 Desember 2023
Rp4.400.345.172,40

Nilai bersih Aset Tidak Berwujud pada Neraca Per 31 Desember 2024 sebesar Rp583.737.960,00 atau berkurang sebesar Rp3.816.607.212,40 atau (86,73%) dari nilai bersih saldo Aset Tidak Berwujud tahun 2023 sebesar Rp4.400.345.172,40.

Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2024 dimuat pada tabel berikut:

Tabel V.3-43 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
			Jumlah	%
Saldo Awal	4.400.345.172,40	354.614.666,00	4.045.730.506,40	1.140,88
Mutasi Tambah:				
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud TA 2024	409.475.000,00	138.905.000,00	270.570.000,00	194,79
Koreksi Tambah Aset Tidak Berwujud	814.751.419,60	0,00	814.751.419,60	-
Belanja Barang dan Jasa yang di akui Aset Tetap	0,00	4.571.673.900,00	(4.571.673.900,00)	(100,00)
Reklasifikasi Belanja Modal TA 2024 dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	289.881.600,00	(289.881.600,00)	(100,00)
Jumlah Mutasi Tambah	1.224.226.419,60	5.000.460.500,00	(3.776.234.080,40)	(75,52)
Mutasi Kurang:				
Koreksi kurang Aset Tidak Berwujud	4.840.958.312,00	0,00	4.840.958.312,00	-
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	185.075.320,00	934.731.992,40	(749.656.672,40)	(80,20)
Salah pos Aset Tidak Berwujud	14.800.000,00	0,00	14.800.000,00	-
Koreksi Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun sebelumnya	0,00	19.998.001,20	(19.998.001,20)	(100,00)
Jumlah Mutasi Kurang	5.040.833.632,00	954.729.993,60	4.086.103.638,40	427,99
Jumlah Mutasi	(3.816.607.212,40)	4.045.730.506,40	(7.862.337.718,80)	(194,34)
Saldo Akhir	583.737.960,00	4.400.345.172,40	(3.816.607.212,40)	(86,73)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.227.447.915,00 atau berkurang sebesar Rp4.321.525.512,00 atau (50,55%) dari saldo Aset Tidak Berwujud tahun 2023 sebesar Rp8.548.973.427,00. Sedangkan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2024 sebesar (Rp3.643.709.955,00) atau berkurang sebesar Rp504.918.299.60 atau (12,17%) dari Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2023 sebesar (Rp4.148.628.254,60).

Rincian mutasi terdiri dari selisih kurang mutasi tambah dan mutasi kurang terhadap Aset Tidak Berwujud dengan rincian sebagai berikut:

1. Mutasi tambah terdiri dari:

- Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp409.475.000,00 pada tiga SKPD dengan rincian sebagai berikut:
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp119.950.000,00 berupa Sistem Informasi Kepegawaian ASN - Paket 5;
 - Inspektorat Daerah sebesar Rp274.725.000,00 berupa Aplikasi *e-Audit* dan *Website Whistle Blowing System* (WBS); dan
 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp14.800.000,00 berupa Buku Digital.
- Koreksi kurang Amortisasi Aset Tidak berwujud pada 8 (delapan) SKPD sebesar Rp814.751.419,60 karena kesalahan pencatatan dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp287.401.200,00 berupa Kajian Teknis;
 - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp187.123.800,00 berupa Kajian Teknis;
 - 3) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp59.540.400,00 berupa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - 4) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp84.991.200,00 berupa Kajian Teknis;
 - 5) Dinas Perikanan sebesar Rp15.000.000,00 berupa Kajian Teknis;
 - 6) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp105.305.700,00 berupa *Masterplan*;
 - 7) Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura sebesar Rp19.945.590,00 berupa Kajian Teknis; dan
 - 8) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp55.443.529,60 berupa Program *ArcGis Desktop Basic License*.
2. Mutasi kurang terdiri dari:
- a. Koreksi kurang Aset Tidak Berwujud sebesar Rp4.840.958.312,00 karena kesalahan pencatatan dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.486.734.000,00 berupa Kajian Teknis;
 - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.134.753.000,00 berupa Kajian Teknis;
 - 3) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp297.702.000,00 berupa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - 4) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp449.952.000,00 berupa Kajian Teknis;
 - 5) Dinas Perikanan sebesar Rp150.000.000,00 berupa Kajian Teknis;
 - 6) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.053.057.000,00 berupa Kajian Teknis
 - 7) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp199.455.900,00 berupa Kajian Teknis; dan
 - 8) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp69.304.412,00 berupa Kajian Teknis.
 - b. Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2024 sebesar Rp185.075.320,00 pada 9 (sembilan) SKPD.
 - c. Salah pos Aset Tidak Berwujud pada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp14.800.000,00 berupa Buku Digital.

Nilai Aset Tidak Berwujud tahun 2024 diuraikan pada **Lampiran 22**.

Kabupaten Merangin juga memiliki Aset Tidak Berwujud warisan budaya/sejarah (*intangible heritage assets*) berupa Geopark Merangin Jambi (GMJ). Kawasan Geopark Merangin Jambi (GMJ) yang terdapat di Kabupaten Merangin berada pada koordinat 101°54'42"-102°16'39"BT dan 1°49'18.93"-2°38'49"LS dengan luas kawasan ± 4.832,31 Km², yang terletak pada 12 (Dua Belas) Kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor 126/BAPPEDA/2021 tentang Deleniasi Geopark Merangin Jambi. GMJ ditetapkan menjadi Geopark Nasional Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 130.K/04/BG/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Penetapan Kawasan Merangin Jambi sebagai Geopark Nasional Indonesia dan dikelola oleh Badan Pengelola Geopark Merangin Jambi. Kemudian pada tanggal 23 Mei 2023 masuk menjadi anggota *UNESCO Global Geopark*.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

V.3.1.5.b. Aset Lain-Lain

Per 31 Desember 2024
Rp100.892.474.676,90

Per 31 Desember 2023
Rp47.892.497.401,54

Nilai bersih Aset Lain-lain Per 31 Desember 2024 sebesar Rp100.892.474.676,90. Jika dibandingkan dengan nilai Aset Lain-lain Per 31 Desember 2023 sebesar Rp47.892.497.401,54, bertambah sebesar Rp52.999.977.275,36 atau 110,66%.

Rincian mutasi Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2024 dimuat pada tabel berikut:

Tabel V.3-44 Rincian Mutasi Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
			Jumlah	%
Saldo Awal	47.892.497.401,54	60.056.496.988,90	(12.163.999.587,36)	(20,25)
Mutasi Tambah:				
Hibah dari Entitas Lainnya	43.459.941.062,00	0,00	43.459.941.062,00	-
Reklasifikasi dari realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024	3.191.860.665,00	372.593.000,00	2.819.267.665,00	756,66
Reklasifikasi dari Aset Tetap	6.864.446.433,00	9.544.910.543,70	(2.680.464.110,70)	(28,08)
Reklasifikasi keluar Penyusutan tahun sebelumnya	0,00	52.122.024,46	(52.122.024,46)	(100)
Koreksi atas nilai perolehan aset rusak berat	1.509.065.259,97	955.988.333,04	553.076.926,93	57,85
Jumlah Mutasi Tambah	55.025.313.419,97	10.925.613.901,20	44.099.699.518,77	403,64
Mutasi Kurang:				
Hibah ke masyarakat	0,00	5.851.921.744,37	(5.851.921.744,37)	(100)
Hibah ke entitas lainnya	0,00	13.690.974.535,00	(13.690.974.535,00)	(100)
Penghapusan	15.710.316,90	0,00	15.710.316,90	-
Penghapusan ternak program sapi bergulir	1.287.849.000,00	37.970.000,00	1.249.879.000,00	3.291,75
Beban Penyusutan Aset Gedung yang digunakan Instansi Vertikal	253.053.927,71	58.952.014,74	194.101.912,97	329,25
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya ke Aset Tetap	468.722.900,00	2.203.069.234,00	(1.734.346.334,00)	(78,72)
Penyertaan modal	0,00	674.120.342,00	(674.120.342,00)	(100)
Koreksi kesalahan pencatatan	0,00	74.800.000,00	(74.800.000,00)	(100)
Reklasifikasi masuk penyusutan tahun sebelumnya	0,00	497.805.618,45	(497.805.618,45)	(100)
Jumlah Mutasi Kurang	2.025.336.144,61	23.089.613.488,56	(21.064.277.343,95)	(91,23)
Jumlah Mutasi	52.999.977.275,36	12.163.999.587,36	65.163.976.862,72	(535,71)
Saldo Akhir	100.892.474.676,90	47.892.497.401,54	52.999.977.275,36	110,66

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Rincian mutasi Aset Lain-lain Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mutasi tambah terdiri dari:

- Hibah dari Kementerian PUPR nomor 486/BA/Dc/2024 sebesar Rp43.459.941.062,00 berupa Jaringan instalasi air yang digunakan oleh Perumda Air Minum Tirta Merangin namun belum ada penyertaan modal.
- Reklasifikasi dari realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.191.860.665,00 berupa Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan.
- Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp6.864.446.433,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Dinas Pendidikan dan kebudayaan berupa jasa konsultan perencanaan Fisik tahun 2025 yang sebelumnya tercatat di Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp593.184.000,00 dan koreksi atas temuan belanja mebel yang sebelumnya tercatat di Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp88.470.000,00;
 - RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar berupa Rp23.952.800,00 berupa jasa konsultan perencanaan yang sebelumnya tercatat di Aset Tetap Gedung dan Bangunan;



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa gedung kantor instansi vertikal yang sebelumnya tercatat pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.563.872.802,00 dan interior kantor instansi vertikal yang sebelumnya tercatat di Aset Tetap Peralatan dan Mesin Rp71.922.000,00;
 - 4) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.483.054.831,00 berupa bangunan tempat olah raga yang sebelumnya tercatat di Aset Tetap Gedung dan Bangunan;
 - 5) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp39.990.000,00 berupa koreksi atas temuan belanja mesin oven yang sebelumnya tercatat di Aset Tetap Peralatan dan Mesin.
 - d. Koreksi nilai perolehan Aset Rusak Berat sebesar Rp1.509.065.259,97 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena salah penghapusan penyusutan Aset P3D yang belum diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jambi.
2. Mutasi kurang terdiri dari:
- a. Penghapusan sebesar Rp15.710.316,91 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 55/BPKAD/2024 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp595.750,00;
 - 2) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp5.414.566,91; dan
 - 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp9.700.000,00.
 - b. Penghapusan ternak program sapi bergulir di Dinas Peternakan dan Perkebunan sebesar Rp1.287.849.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Penghapusan karena pelunasan 163 (seratus enam puluh tiga) ekor ternak Program Sapi Bergulir senilai Rp1.092.383.000,00;
 - 2) Penghapusan karena mati untuk 5 (lima) ekor ternak Program Sapi Bergulir senilai Rp57.908.000,00; dan
 - 3) Penghapusan karena penjualan ternak tidak layak indukan hasil pelunasan Program Sapi Bergulir sebanyak 7 (tujuh) ekor senilai Rp137.558.000,00.
 - c. Beban Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang digunakan instansi vertikal tahun berjalan sebesar Rp253.053.927,71 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - d. Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp468.722.900,00 berupa Jasa Konsultansi Perencanaan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp361.397.000,00;
 - 2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp107.325.900,00;
- Program sapi bergulir Per 31 Desember 2023 sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) ekor dengan nilai total sebesar Rp1.721.755.000,00. Pada tahun 2024 terdapat mutasi berupa pelunasan dan sapi yang mati dengan total nilai Rp1.150.291.000,00 dan redistribusi sebanyak 2 (dua) ekor sapi. Dengan demikian, jumlah sapi pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Per 31 Desember 2024 sebanyak 56 (lima puluh enam) ekor dengan nilai sebesar Rp571.464.000,00, sebagaimana tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel V.3-45 Rincian Mutasi Program Sapi Bergulir Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Kuantitas (ekor)			Harga Satuan	Nilai Total
		Jantan	Betina	Jumlah		
I.	Saldo Awal (s.d akhir tahun 2023)	11	211	222		1.721.755.000,00
II.	Mutasi Tahun 2024					
	1. Mati	-	5	5		57.908.000,00
		-	2	2	6.500.000,00	13.000.000,00
		-	2	2	11.990.000,00	23.980.000,00
		-	1	1	20.928.000,00	20.928.000,00
	2. Pelunasan	9	154	163		1.092.383.000,00
		8	151	159	6.500.000,00	1.033.500.000,00
		-	2	2	11.990.000,00	23.980.000,00
		1	-	1	13.975.000,00	13.975.000,00
		-	1	1	20.928.000,00	20.928.000,00
	Jumlah Mutasi Tahun 2024 (1+2)	9	159	168		1.150.291.000,00
III.	Redistribusi (tidak memengaruhi nilai total)	-	2	2	11.990.000,00	23.980.000,00
VI.	Saldo Akhir Tahun 2024 (I-II+IV)	2	52	54		571.464.000,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Rincian Mutasi Aset Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2024 disajikan pada **Lampiran 23**, Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dalam Kondisi Rusak Berat Per 31 Desember 2024 disajikan pada **Lampiran 24**, Rekapitulasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Merangin yang dipergunakan Instansi Vertikal Per 31 Desember 2024 dan Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Bukan Merupakan Aset yang Dimiliki dan dikuasai Pemerintah Kabupaten Merangin disajikan pada **Lampiran 26a** dan **26b**.

V.3.1.5.c. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Per 31 Desember 2024
Rp5.564.440.000,00

Per 31 Desember 2023
Rp31.152.575.000,00

Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai melalui Fasilitas TDF sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 16 Tahun 2024.

Dana Transfer TDF Per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.564.440.000,00 merupakan saldo rekening milik Pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2024 pada kantor pusat Bank Indonesia dengan nomor rekening 519000251980 dan nama rekening Rek Lain BI TDF Kab. Merangin sebagaimana disampaikan melalui surat Kepala Kantor Wilayah Dirjen. Perbendaharaan Provinsi Jambi Nomor S-125/WPB.06/2025 tanggal 24 Februari 2025 dengan rincian:

Tabel V.3-46 Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	DBH PPh Pasal 21	0,00	1.042.907.000,00	(1.042.907.000,00)	(100,00)
2.	PPh Pasal 25/29 OP	0,00	6.544.000,00	(6.544.000,00)	(100,00)
3.	DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	0,00	1.094.248.000,00	(1.094.248.000,00)	(100,00)
4.	DBH SDA Minyak Bumi 15%	0,00	1.350.321.000,00	(1.350.321.000,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
5.	DBH SDA Minyak Bumi 0,5%	0,00	95.706.000,00	(95.706.000,00)	(100,00)
6.	DBH SDA Gas Bumi 30%	0,00	18.363.574.000,00	(18.363.574.000,00)	(100,00)
7.	DBH SDA Gas Bumi 0,5%	0,00	305.969.000,00	(305.969.000,00)	(100,00)
8.	DBH SDA Minerba Iuran Tetap	0,00	59.182.000,00	(59.182.000,00)	(100,00)
9.	DBH SDA Minerba Royalti	5.564.439.000,00	8.834.124.000,00	(3.269.685.000,00)	(37,01)
10.	DBH SDA Kehutanan PSDH	1.000,00	0,00	1.000,00	-
Jumlah		5.564.440.000,00	31.152.575.000,00	(25.588.135.000,00)	(82,14)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.3.2. Kewajiban

Per 31 Desember 2024

Rp37.538.800.854,42

Per 31 Desember 2023

Rp18.865.496.751,82

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Merangin. Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Nilai Kewajiban Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2024 sebesar Rp37.538.800.854,42. Jika dibandingkan dengan posisi Per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.865.496.751,82, maka nilai Kewajiban Pemerintah Kabupaten Merangin meningkat sebesar Rp18.673.304.102,60 atau 98,98% sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.3-47 Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Kewajiban Jangka Pendek	37.538.800.854,42	18.865.496.751,82	18.673.304.102,60	98,98
	- Utang PFK	293.695,00	341.640,00	(47.945,00)	(14,03)
	- Pendapatan Diterima di Muka	213.480.860,42	197.226.198,22	16.254.662,20	8,24
	- Utang Beban	35.759.870.315,00	17.110.872.929,60	18.648.997.385,40	108,99
	- Utang Jangka Pendek Lainnya	1.565.155.984,00	1.557.055.984,00	8.100.000,00	0,52
2.	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah		37.538.800.854,42	18.865.496.751,82	18.673.304.102,60	98,98

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Hingga tahun 2024, Kewajiban Pemerintah Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut:

V.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Per 31 Desember 2024

Rp37.538.800.854,42

Per 31 Desember 2023

Rp18.865.496.751,82

Nilai Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2024 sebesar Rp37.538.800.854,42. Kewajiban Jangka Pendek bertambah sebesar Rp18.673.304.102,60 atau sebesar 98,98%, jika dibandingkan dengan jumlah Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.865.496.751,82.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Merangin yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan berupa Utang PFK, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya dengan uraian sebagai berikut:

V.3.2.1.a Utang PFK

Per 31 Desember 2024

Rp293.695,00

Per 31 Desember 2023

Rp341.640,00

Nilai Utang PFK Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp293.695,00. Sedangkan Per 31 Desember 2023 terdapat saldo Utang PFK sebesar Rp341.640,00, sehingga terdapat penurunan nilai Utang PFK sebesar Rp47.945,00 atau (14,03%).



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Nilai Utang PFK tahun 2024 merupakan pajak dari pengelolaan Dana BOS pada SD selaku Satuan Pendidikan Negeri Penerima yang belum disetorkan ke Kas Negara berupa Utang PFK Dana BOS SD Negeri. Terhadap utang tersebut, telah disetorkan seluruhnya tanggal 10 Maret 2025, sehingga sisa pajak terutang adalah nihil.

V.3.2.1.b Pendapatan Diterima Dimuka

Per 31 Desember 2024
Rp213.480.860,42

Per 31 Desember 2023
Rp197.226.198,22

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp213.480.860,42 yang merupakan pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang belum jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3-48 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	S K P D	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Pajak Reklame-Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	140.703.316,30	170.767.146,35	(30.063.830,05)	(17,61)
	a. TA 2022	0,00	170.767.146,35	(170.767.146,35)	(100,00)
	b. TA 2023	140.703.316,30	0,00	140.703.316,30	-
2.	Retribusi Kebersihan/ Persampahan	49.578.749,60	12.196.756,79	37.381.992,81	306,49
	a. TA 2022	0,00	12.196.756,79	(12.196.756,79)	(100,00)
	b. TA 2023	49.578.749,60	0,00	49.578.749,60	-
3.	Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	23.198.794,52	14.262.295,08	8.936.499,44	62,66
	a. Sewa Tanah ATM Bank Jambi di Waskita/STAI SMQ	4.750.684,93	4.754.098,36	(3.413,43)	(0,07)
	b. Sewa Tanah ATM Bank Jambi di Kantor BPKAD	4.750.684,93	4.754.098,36	(3.413,43)	(0,07)
	c. Sewa Tanah ATM Bank Jambi di Kantor Bupati Merangin	4.750.684,93	4.754.098,36	(3.413,43)	(0,07)
	d. Sewa Tanah an. Wahidin	1.677.513,70	0,00	1.677.513,70	-
	e. Sewa Tanah an. Henriko Can	1.677.513,70	0,00	1.677.513,70	-
	f. Sewa Tanah an. Henri S	1.677.513,70	0,00	1.677.513,70	-
	g. Sewa Tanah an. Hermen	2.236.684,93	0,00	2.236.684,93	-
	h. Sewa Tanah an. Dody Eko Prasetyo	1.677.513,70	0,00	1.677.513,70	-
Jumlah		213.480.860,42	197.226.198,22	16.254.662,20	8,24

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka diukur sebesar bagian pendapatan yang ditangguhkan dengan menggunakan tanggal akhir periode pelaporan Per 31 Desember 2024 sebagai tanggal *cut off*. Nilai pendapatan yang ditangguhkan diperoleh dari nilai pendapatan yang diterima kas daerah dikurangi dengan perkalian antara nilai pendapatan per hari dengan jumlah hari sejak tanggal penetapan/perjanjian hingga tanggal *cut off*.

Jika dibandingkan dengan nilai Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2023 sebesar Rp197.226.198,22 terdapat peningkatan saldo sebesar Rp16.254.662,20 atau 824%.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per SKPD tahun 2024 dijelaskan pada **Lampiran 28**.

V.3.2.1.c Utang Belanja

Per 31 Desember 2024
Rp35.759.870.315,00

Per 31 Desember 2023
Rp17.110.872.929,60

Nilai Utang Belanja Per 31 Desember 2024 sebesar Rp35.759.870.315,00. Sedangkan nilai Utang Belanja tahun 2023 sebesar Rp17.110.872.929,60, sehingga terdapat peningkatan nilai sebesar Rp18.648.997.385,40 atau 108,99%.

Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel V.3-49 Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	S K P D	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Utang Belanja Pegawai	17.812.071.001,00	8.314.837.918,00	9.497.233.083,00	114,22
2.	Utang Belanja Barang dan Jasa	17.623.792.634,00	8.796.035.011,60	8.827.757.622,40	100,36
3.	Utang Belanja Modal	324.006.680,00	0,00	324.006.680,00	-
J u m l a h		35.759.870.315,00	17.110.872.929,60	18.648.997.385,40	108,99

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Dari utang belanja tersebut, terdapat utang belanja pada RSUD Kol. Abundjani sebesar Rp17.491.346.734. Jika dibandingkan dengan utang tahun 2023 sebesar Rp7.850.951.419,00, nilai utang tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp9.640.395.315 atau 122,79%.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Utang BLUD RSUD Kol. Abundjani Bangko Tahun Anggaran 2024 Nomor 900.1.11.1/261/BA/BPKAD/2025 Nomor 445/5150/RSUD/2025 tanggal 28 Mei 2025, langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka penyelesaian utang RSUD Kol. Abundjani adalah sebagai berikut.

- Meminta Aparat Pengawasan Intern (APIP) untuk melakukan audit dalam rangka mencari penyebab timbulnya utang dan mencari upaya penyelesaian pembayaran utang tersebut, paling lambat tanggal 15 Juli 2025;
- BLUD RSUD Kol. Abundjani Bangko akan melakukan efisiensi belanja dalam penyelesaian utang tersebut paling lambat tanggal 2 Juli 2025;
- BLUD RSUD Kol. Abundjani Bangko akan melakukan perbaikan sistem pelayanan dan sistem rekam medis elektronik paling lambat tanggal 15 Juli 2025;
- Mengupayakan adanya bantuan pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Merangin dalam melakukan penyelesaian utang tersebut dengan persetujuan Bupati Merangin pada Perubahan APBD TA 2025.

Sedangkan, atas utang belanja pegawai tahun 2024, telah terdapat pembayaran sebesar Rp11.858.516.600,00 yang terdiri dari:

- Tamsil Guru TW III dan TW IV TA 2024 sebesar Rp903.240.000,00 tanggal 21 Mei 2025;
- TPG THR dan Gaji ke 13 TA 2024 sebesar Rp10.350.170.000,00 tanggal 18 Maret 2025
- TKG Guru bulan November dan Desember 2024 (susulan) sebesar Rp605.106.600,00 tanggal 18 maret 2025

Rincian Utang Belanja per SKPD tahun 2024 dijelaskan pada **Lampiran 29**.

V.3.2.1.d Utang Jangka Pendek Lainnya

Per 31 Desember 2024
Rp1.565.155.984,00

Per 31 Desember 2023
Rp1.557.055.984,00

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban pemerintah daerah yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.565.155.984,00. Jika dibandingkan dengan nilai Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.557.055.984,00, maka jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya bertambah sebesar Rp8.100.000,00 atau 0,52%.

Utang Jangka Pendek Per 31 Desember 2024 merupakan sisa Bantuan Keuangan Bersifat Khusus tahun-tahun sebelumnya yang masih harus dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi berupa Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Kelurahan periode tahun 2017-2021 dan Bantuan Keuangan Alat Berat/Alat Pendukung Lainnya periode tahun 2017-2019 sebesar Rp1.557.055.984,00 dan sisa BOP PAUD Swasta yang tutup di tahun 2024 dan

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

masih harus dikembalikan ke RKUN sebesar Rp8.100.000,00. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya tahun 2024 sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 30**.

Selain utang sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan Surat Gubernur Jambi Nomor S.2484/BPKPD-6.2/IX/2023 Perihal Pengembalian Sisa Bantuan Keuangan Bersifat Khusus tanggal 18 September 2023 terdapat sisa Bantuan Keuangan kepada Desa periode tahun 2017-2021 yang berada pada Rekening Kas Desa (RKD) sebesar Rp236.521.272,00 sebagaimana Berita Acara Rekonsiliasi Bersama Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Desa Pemerintah Provinsi Jambi TA 2017 s.d. 2021. Atas sisa tersebut, sampai dengan 31 Desember 2024, Pemerintah Desa Sialang Kecamatan Pamenang sebesar telah mengembalikan dengan total sebesar Rp12.208.800,00. Dengan demikian, sisa Bantuan Keuangan kepada Desa yang masih belum dikembalikan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi sebesar Rp224.312.472,00.

Selain Utang Jangka Pendek Lainnya sebagaimana telah diuraikan diatas, pada TA 2019 terdapat peristiwa yang tidak disajikan dalam neraca karena tidak dapat diukur secara andal namun mengacu pada Buletin Teknis Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrua, perlu diungkap sebagai catatan atas laporan keuangan karena dapat berkembang ke arah yang tidak diperkirakan semula.

Peristiwa tersebut adalah dampak dari peristiwa yang jarang terjadi berupa tuntutan hukum. Hingga akhir periode pelaporan telah menjadi perkara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) berdasarkan dokumen putusan Pengadilan Negeri Bangko sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2018/PN Bko tanggal 29 Maret 2018 dengan Tergugat DPRD Kabupaten Merangin terkait perbuatan wanprestasi berupa sisa tagihan koran dari tahun 2015 hingga 2016 yang tidak dibayarkan kepada pemilik Toko Revi selaku Penggugat sebagai pemasok koran untuk Tergugat sejumlah Rp27.200.000,00 serta biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp341.000,00.
2. Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2018/PN Bko tanggal 26 April 2018 dengan Tergugat DPRD Kabupaten Merangin terkait perbuatan wanprestasi berupa tagihan makanan dan minuman bulan Oktober sampai dengan Desember 2016 yang tidak dibayarkan kepada pemilik kantin Fatimah selaku Penggugat sebagai penyedia minuman dan makanan untuk setiap kegiatan baik rapat maupun pertemuan sejumlah Rp165.254.000,00 serta biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp341.000,00.
3. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2018/PN Bko tanggal 7 Mei 2018 dengan Tergugat DPRD Kabupaten Merangin terkait perbuatan wanprestasi berupa tagihan *spare part* dan reparasi bulan Januari sampai dengan Desember 2016 yang tidak dibayarkan kepada pemilik Toko Aneka Motor selaku Penggugat sebagai salah satu penyedia kebutuhan alat dan onderdil kendaraan dinas sejumlah Rp194.550.000,00 serta biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp416.000,00.
4. Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2018/PN Bko tanggal 9 Juli 2018 dengan Tergugat I DPRD Kabupaten Merangin dan Tergugat II Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin terkait perbuatan wanprestasi berupa tagihan makan minum untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yang tidak dibayarkan kepada pemilik Rumah Makan Pusako selaku Penggugat sebagai salah satu penyedia makanan dan minuman untuk setiap kegiatan sejumlah Rp473.703.000,00 serta biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp641.000,00.

Terhadap keputusan tersebut, DPRD Kabupaten Merangin dan Sekretariat DPRD Kabupaten merangin tidak melakukan upaya banding sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Merangin mengajukan surat kepada Bupati Merangin Nomor 170/39/Set.DPRD/2019 tanggal



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

12 Februari 2019 Perihal Mohon Petunjuk Tindak Lanjut yang mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap tagihan tersebut oleh Inspektorat Kabupaten Merangin. Dari hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tentang Pemeriksaan terhadap Utang-Utang Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 1, 2, 3 dan 4/Pdt.GS/2018/PN.Bko kepada Sekretariat DPRD dan DPRD Kabupaten Merangin Nomor 700/464/Inspektorat/2019 tanggal 23 Juli 2019, Tim Inspektorat Kabupaten Merangin yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Merangin Nomor 090/125/SPT/Inspektorat/2019 tanggal 2 maret s/d 21 Maret 2019 membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Tim Inspektorat tidak dapat menilai dan menyimpulkan besaran utang yang dapat diakui secara akurat dan akuntabel karena tidak diperolehnya dan didukung bukti-bukti dokumen/SPJ yang cukup, sah dan lengkap.
2. PPK, PPTK, Bendahara, PPK-SKPD dan Pengguna Anggaran tidak mematuhi ketentuan tupoksi dan ketentuan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara baik, transparan dan akuntabel.
3. PPK, Bendahara, PPK-SKPD dan Pengguna Anggaran tidak memasukkan daftar tagihan pihak ketiga/rekanan yang belum dibayar atau terutang pada laporan penatausahaan/pembukuan pada laporan akhir tahun anggaran yang menjadi utang SKPD Sekretariat DPRD dan tidak melaporkan/mendaftarkan ke BPKAD Kabupaten Merangin agar diakui menjadi utang daerah.
4. Terdapat perbedaan/selisih materi gugatan (tagihan utang/pihak ketiga/rekanan) dalam putusan Pengadilan Negeri Bangko yang berkisar tahun 2014 s/d 2016, sedangkan keterangan langsung/materil yang diperoleh dari pihak terkait/pejabat pelaksana kegiatan dan pengelolaan keuangan menerangkan bahwa timbulnya utang tersebut sudah ada atau terjadi dari 2011 s/d 2016 (masuknya gugatan) di PN Bangko.
5. Berdasarkan penjelasan angka 1 s/d 4 di atas diperoleh data dan fakta bahwa materi gugatan pihak ketiga terhadap pihak Sekretariat DPRD dan DPRD Kabupaten Merangin tidak sesuai dengan fakta dan data yang sebenarnya terjadi (tidak sinkron dan konsisten secara materiil) sehingga tagihan pihak ketiga berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 1, 2, 3 dan 4/Pdt.GS/2018/PN.Bko tidak dapat dijadikan dasar pengakuan utang daerah Kabupaten Merangin.

Terhadap kesimpulan tersebut, Tim Inspektorat Kabupaten Merangin menyarankan kepada Bupati Merangin untuk melakukan langkah-langkah konsolidasi sebagai berikut:

1. Melakukan penyelesaian dengan jalan musyawarah kepada mantan pejabat/sekretaris DPRD periode 2011 s/d 2016 terhadap utang-utang yang menjadi tagihan pihak ketiga berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 1, 2, 3 dan 4/Pdt.GS/2018/PN.Bko sehingga ditentukan besaran utang masing-masing pejabat yang terkait.
2. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1 tersebut tidak terpenuhi, maka atas izin Bapak Bupati Merangin sebaiknya persoalan ini diserahkan kepada Tim TPTGR Kabupaten Merangin untuk membantu memfasilitasi penyelesaiannya karena dalam gugatan perdata tersebut pokok persoalannya ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Merangin cq. Sekretariat DPRD dan DPRD Kabupaten Merangin.

V.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Per 31 Desember 2024
Rp0,00

Per 31 Desember 2023
Rp0,00

Nilai Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 sebesar nihil.

7



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

V.3.3. Ekuitas

Per 31 Desember 2024
Rp2.513.721.722.170,16

Per 31 Desember 2023
Rp2.501.117.152.106,14

Ekuitas menggambarkan selisih antara Aset dengan Kewajiban. Nilai Ekuitas Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.513.721.722.170,16. Jika dibandingkan dengan jumlah Ekuitas Per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.501.117.152.106,14, maka Ekuitas bertambah sebesar Rp12.604.570.064,02 atau sebesar 0,50%. Penjelasan lebih lanjut mengenai Ekuitas Pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2024 diuraikan pada Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

V.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Merangin untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Pos-pos Luar Biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

V.4.1 Pendapatan-LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp1.406.480.718.847,41	Rp1.253.862.942.820,18

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

Penyajian Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut asal serta jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO. Jumlah Pendapatan-LO tahun 2024 adalah sebesar Rp1.406.480.718.847,41. Jika dibandingkan dengan Pendapatan-LO tahun 2023 sebesar Rp1.253.862.942.820,18, terdapat peningkatan Pendapatan-LO sebesar Rp152.617.776.027,23 atau 12,17%.

Rincian Pendapatan-LO tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel V.4-1 Rincian Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Pendapatan Asli Daerah-LO	109.493.758.353,45	109.198.542.179,18	295.216.174,27	0,27
2.	Pendapatan Transfer-LO	1.218.682.565.679,00	1.139.314.215.448,00	79.368.350.231,00	6,97
3.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO	78.304.394.814,96	5.350.185.193,00	72.954.209.621,96	1.363,58
Jumlah		1.406.480.718.847,41	1.253.862.942.820,20	152.617.776.027,23	12,17

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Nilai Pendapatan-LO sebesar Rp1.406.480.718.847,41 berbeda dengan Pendapatan-LRA sebesar Rp1.459.275.923.665,51. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.4-2 Penjelasan Perbedaan Nilai Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024

(dalam rupiah)

Pendapatan-LRA	1.459.275.923.665,51
Mutasi Tambah:	189.090.538.620,72
Penambahan piutang 2024	114.771.569.367,88
Koreksi tambah Piutang tahun sebelumnya di tahun 2024	2.694.075.267,00
Pendapatan Diterima Dimuka tahun sebelumnya yang jatuh tempo tahun 2024	197.225.273,88
Saldo Rekening TDF milik Pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2024 pada Kantor Pusat Bank Indonesia	5.564.440.000,00
Pendapatan Hibah yang tidak melalui mekanisme APBD dari Pemerintah Masyarakat	9.240.000,00
Pendapatan Hibah yang tidak melalui mekanisme APBD dari Pemerintah Pusat	62.448.973.942,00
Pendapatan Hibah yang tidak melalui mekanisme APBD dari Pemerintah Provinsi Jambi	3.405.014.769,96
Mutasi Kurang:	241.885.743.438,82
Penerimaan kas atas Piutang tahun sebelumnya	29.077.427.078,40
Penerimaan kas atas penyetoran saldo BOP PAUD Swasta yang Tutup di tahun 2024	8.100.000,00
Penerimaan kas atas pencairan TDF 2023 di 2024	31.152.575.000,00
Penerimaan Transfer ke Pemerintah Desa TA 2024	181.082.338.000,00
Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2024	213.480.860,42



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Reklasifikasi keluar berupa Surplus dari Kegiatan Non Operasional	308.398.000,00
Reklasifikasi keluar berupa Defisit dari Kegiatan Non Operasional	43.424.500,00
Jumlah Mutasi:	(52.795.204.818,10)
Pendapatan-LO	1.406.480.718.847,41

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Jumlah masing-masing akun Pendapatan-LO dapat diuraikan sebagai berikut:

V.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp109.493.758.353,45	Rp109.198.542.179,18

Akun Pendapatan Asli Daerah-LO merupakan jumlah PAD pada Laporan Operasional untuk periode tahun 2024 dan tahun 2023. Jumlah PAD pada tahun 2024 sebesar Rp109.493.758.353,45, bertambah sebesar Rp295.216.174,27 atau 0,27% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp109.198.542.179,18 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4-3 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Pajak Daerah-LO	35.231.508.288,04	33.494.141.802,38	1.737.366.485,66	5,19
2.	Retribusi Daerah-LO	52.005.294.850,22	5.517.219.994,13	46.488.074.856,09	842,60
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	15.546.214.225,85	7.268.658.153,62	8.277.556.072,23	113,88
4.	Lain-lain PAD yang Sah-LO	6.710.740.989,34	62.918.522.229,05	(56.207.781.239,71)	(89,33)
Jumlah		109.493.758.353,45	109.198.542.179,18	295.216.174,27	0,27

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Nilai Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp109.493.758.353,45 berbeda dengan Pendapatan Asli Daerah-LRA sebesar Rp94.830.759.645,51. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.4-4 Penjelasan Perbedaan Nilai Pendapatan Asli Daerah-LO dan Pendapatan Asli Daerah-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024

(dalam rupiah)

Pendapatan Asli Daerah-LRA	94.830.759.645,51
Mutasi Tambah:	21.420.186.570,76
Penambahan piutang 2024	21.222.961.296,88
Pendapatan Diterima Dimuka tahun sebelumnya yang jatuh tempo tahun 2024	197.225.273,88
Mutasi Kurang:	6.757.187.862,82
Penerimaan kas atas Piutang tahun sebelumnya	6.191.884.502,40
Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2024	213.480.860,42
Reklasifikasi keluar berupa Surplus dari Kegiatan Non Operasional	308.398.000,00
Reklasifikasi keluar berupa Defisit dari Kegiatan Non Operasional	43.424.500,00
Jumlah Mutasi:	14.662.998.707,94
Pendapatan Asli Daerah-LO	109.493.758.353,45

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Jumlah komponen jenis Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

V.4.1.1.a Pajak Daerah-LO	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp35.231.508.288,04	Rp33.494.141.802,38

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2024, sehingga nilai Pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2024 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan tahun 2024. Pembayaran atas Piutang tahun sebelumnya tidak dicatat pada pendapatan Laporan Operasional melainkan dicatat pada Pendapatan-LRA.

Jumlah Pajak Daerah-LO pada tahun 2024 sebesar Rp35.231.508.288,04, meningkat sebesar Rp1.737.366.485,66 atau 5,19% dibandingkan dengan jumlah tahun 2023 sebesar Rp33.494.141.802,38 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4-5 Rincian Pajak Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Pajak Reklame-LO	985.938.919,04	1.039.225.101,86	(53.286.182,82)	(5,13)
2.	Pajak Air Tanah-LO	158.340.710,00	186.420.967,15	(28.080.257,15)	(15,06)
3.	Pajak Sarang Burung Walet-LO	0,00	2.100.000,00	(2.100.000,00)	(100,00)
4.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	1.124.698.567,50	1.489.754.916,50	(365.056.349,00)	(24,50)
5.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO	5.319.302.458,00	5.009.376.199,00	309.926.259,00	6,19
6.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	2.550.837.146,00	2.159.807.682,50	391.029.463,50	18,10
7.	PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO	2.466.048.072,50	2.393.024.072,67	73.023.999,83	3,05
8.	PBJT-Tenaga Listrik-LO	22.172.790.172,00	20.847.428.478,00	1.325.361.694,00	6,36
9.	PBJT-Jasa Perhotelan-LO	197.460.875,00	195.046.564,70	2.414.310,30	1,24
10.	PBJT-Jasa Parkir-LO	222.989.550,00	159.927.900,00	63.061.650,00	39,43
11.	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	33.101.818,00	12.029.920,00	21.071.898,00	175,16
Jumlah		35.231.508.288,04	33.494.141.802,38	1.737.366.485,66	5,19

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Nilai Pajak Daerah-LO sebesar Rp35.231.508.288,04 berbeda dengan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp32.240.409.337,40. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.4-6 Penjelasan Perbedaan Nilai Pajak Daerah-LO dan Pajak Daerah-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024

(dalam rupiah)

Pajak Daerah-LRA	32.240.409.337,40
Mutasi Tambah:	5.090.413.361,34
Penambahan piutang 2024	4.919.646.215,00
Pendapatan Diterima Dimuka tahun sebelumnya yang jatuh tempo tahun 2024	170.767.146,34
Mutasi Kurang:	2.099.314.410,70
Penerimaan kas atas Piutang tahun sebelumnya	1.958.611.094,40
Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2024	140.703.316,30
Jumlah Mutasi:	2.991.098.950,64
Pajak Daerah-LO	35.231.508.288,04

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Mutasi tambah dan mutasi kurang sebagaimana tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

- Mutasi tambah sebesar Rp5.090.413.361,34 yang terdiri dari:
 - Penambahan Piutang Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2024 sebesar Rp4.919.646.215,00 yang terdiri dari:
 - Piutang Pajak Reklame sebesar Rp4.498.474,00;
 - Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp22.508.846,00;
 - Piutang PBB-P2 sebesar Rp2.862.854.490,00;



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- 4) Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp6.744.070,00;
- 5) Piutang PBJT-Tenaga Listrik sebesar Rp1.999.210.335,00;
- 6) Piutang PBJT-Jasa Perhotelan sebesar Rp2.610.000,00;
- 7) Piutang PBJT-Jasa Parkir sebesar Rp20.720.000,00; dan
- 8) Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp500.000,00.
- b. Pajak Reklame Diterima Dimuka yang jatuh tempo tahun 2024 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp170.767.146,34.
2. Mutasi kurang sebesar Rp2.099.314.410,70 yang terdiri dari:
 - a. Penerimaan Kas berupa pembayaran Piutang Pajak Daerah tahun sebelumnya pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2024 sebesar Rp1.958.611.094,40 yang terdiri dari:
 - 1) Pembayaran Piutang Pajak Reklame sebesar Rp21.308.922,50;
 - 2) Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp1.867.380,00;
 - 3) Pembayaran PBB-P2 sebesar Rp82.055.378,00;
 - 4) Pembayaran PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp24.169.189,50;
 - 5) Pembayaran PBJT-Tenaga Listrik sebesar Rp1.823.753.611,00; dan
 - 6) Pembayaran PBJT-Jasa Perhotelan sebesar Rp5.456.613,40.
 - b. Pajak Reklame Diterima Dimuka tahun 2024 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp140.703.316,30.

V.4.1.1.b Retribusi Daerah-LO

Tahun 2024
Rp52.005.294.850,22

Tahun 2023
Rp5.517.219.994,13

Retribusi Daerah adalah pungutan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan, retribusi berhubungan dengan jasa timbal (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah.

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh SKPD Penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Perda, Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jumlah Retribusi Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp52.005.294.850,22, bertambah sebesar Rp46.488.074.856,09 atau 842,60%, dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp5.517.219.994,13 karena perubahan nomenklatur Retribusi Daerah di tahun 2024 sebagaimana diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4-7 Rincian Retribusi Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	48.852.824.636,00	2.963.435.000,00	45.889.389.636,00	1.548,52
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	307.864.282,86	251.907.243,21	55.957.039,65	22,21
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	61.301.000,00	46.605.000,00	14.696.000,00	31,53
4.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	0,00	17.754.000,00	(17.754.000,00)	(100,00)
5.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	0,00	5.772.000,00	(5.772.000,00)	(100,00)

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
6.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	0,00	12.500.000,00	(12.500.000,00)	(100,00)
7.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	0,00	25.909.000,00	(25.909.000,00)	(100,00)
8.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	0,00	353.664.000,00	(353.664.000,00)	(100,00)
9.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	2.038.344.200,56	1.103.486.912,92	934.857.287,64	84,72
10.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	129.640.000,00	411.329.400,00	(281.689.400,00)	(68,48)
11.	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	132.582.000,00	112.865.000,00	19.717.000,00	17,47
12.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	74.715.000,00	74.710.000,00	5.000,00	0,01
13.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	53.900.000,00	0,00	53.900.000,00	-
14.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	354.123.730,80	137.282.438,00	216.841.292,80	157,95
Jumlah		52.005.294.850,22	5.517.219.994,13	46.488.074.856,09	842,60

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Nilai Retribusi Daerah-LO sebesar Rp52.005.294.850,22 berbeda dengan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp23.555.443.977,67. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.4-8 Penjelasan Perbedaan Nilai Retribusi Daerah-LO dan Retribusi Daerah-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024

	(dalam rupiah)
Retribusi Daerah-LRA	23.555.443.977,67
Mutasi Tambah:	32.783.300.449,67
Penambahan piutang 2024	8.234.105.955,00
Pendapatan Diterima Dimuka tahun sebelumnya yang jatuh tempo tahun 2024	26.458.127,54
Reklasifikasi dari Lain-Lain PAD yang Sah berupa Pendapatan BLUD	24.522.736.367,13
Mutasi Kurang:	4.333.449.577,12
Penerimaan kas atas Piutang tahun sebelumnya	4.222.242.033,00
Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2024	72.777.544,12
Reklasifikasi keluar berupa Defisit dari Kegiatan Non Operasional	38.430.000,00
Jumlah Mutasi:	28.449.850.872,55
Retribusi Daerah-LO	52.005.294.850,22

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Mutasi tambah dan mutasi kurang sebagaimana tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah sebesar Rp32.783.300.449,67 yang terdiri dari:
 - a. Penambahan Piutang Retribusi Daerah tahun 2024 sebesar Rp8.234.105.955,00 yang terdiri dari:
 - 1) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp419.085.100,00;
 - 2) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp6.790.088.855,00;
 - 3) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Sewa Tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp175.644.000,00;
 - 4) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Sewa Ruko, Kios dan Los pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp849.003.000,00; dan



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- 5) Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup yang dipungut melalui tagihan kepada pelanggan Perumda Air Minum Tirta Merangin sebesar Rp285.000,00.
 - b. Retribusi Diterima Dimuka yang jatuh tempo tahun 2024 sebesar Rp26.458.127,54 yang terdiri dari:
 - 1) Retribusi Kebersihan/Persampahan Diterima Dimuka yang jatuh tempo tahun 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp12.195.832,46; dan
 - 2) Pendapatan Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah Diterima Dimuka yang jatuh tempo tahun 2024 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp14.262.295,08.
 - c. Reklasifikasi Pendapatan BLUD-LO periode Januari s.d Juli tahun 2024 yang semula dicatat sebagai Lain-Lain PAD yang Sah-LO karena realisasinya dicatat pada akun Lain-Lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp24.522.736.367,13.
2. Mutasi kurang sebesar Rp4.333.449.577,12 yang terdiri dari:
- a. Penerimaan Kas berupa pembayaran Piutang Retribusi Daerah tahun sebelumnya pada tahun 2024 sebesar Rp4.222.242.033,00 yang terdiri dari:
 - 1) Pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp224.357.000,00;
 - 2) Pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp3.792.461.033,00;
 - 3) Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup yang dipungut melalui tagihan kepada pelanggan Perumda Air Minum Tirta Merangin sebesar Rp1.295.000,00; dan
 - 4) Pembayaran Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Sewa Ruko, Kios dan Los pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp204.129.000,00.
 - b. Retribusi Diterima Dimuka tahun 2024 sebesar Rp72.777.544,12 yang terdiri dari:
 - 1) Retribusi Kebersihan/Persampahan Diterima Dimuka pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp49.578.749,60; dan
 - 2) Pendapatan Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah Diterima Dimuka pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp23.198.794,52.
 - c. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit Ternak-LO tahun 2024 sebesar Rp38.430.000,00 yang dicatat sebagai Defisit penjualan Aset Lainnya pada Dinas Peternakan dan Perkebunan.

V.4.1.1.c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Tahun 2024
Rp15.546.214.225,85

Tahun 2023
Rp7.268.658.153,62

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO adalah PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin pada Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan tersebut diterima dan dikelola oleh PPKD, dengan nilai sebesar Rp15.546.214.225,85, meningkat sebesar Rp8.277.556.072,23 atau 113,88%, dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp7.268.658.153,62. Nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp15.546.214.225,85 berbeda dengan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp7.488.236.682,97 sebesar Rp8.057.977.542,88 yaitu penambahan Piutang berupa bagian laba (deviden) atas penyertaan modal pada PT Bank Jambi tahun 2024 yang baru diterima RKUD pada TA 2025 berdasarkan RUPS tanggal 15 Maret 2025.

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

V.4.1.1.d Lain-lain PAD yang Sah-LO

Tahun 2024
Rp6.710.740.989,34

Tahun 2023
Rp62.918.522.229,05

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang Sah-LO yang diterima selama tahun 2024 dan terealisasi sebesar Rp6.710.740.989,34, berkurang sebesar Rp56.207.781.239,71 atau (89,33%), dibandingkan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp62.918.522.229,05. Rincian penerimaan Lain-lain PAD yang Sah-LO adalah sebagai berikut:

Tabel V.4-9 Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	86.394.250,00	79.673.260,00	6.720.990,00	8,44
2.	Hasil Sewa BMD-LO	0,00	139.324.000,00	(139.324.000,00)	(100,00)
3.	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.482.020.221,10	1.382.775.667,49	99.244.553,61	7,18
4.	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO	16.455,66	0,00	16.455,66	-
5.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	3.599.560.290,23	657.601.454,63	2.941.958.835,60	447,38
6.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	0,00	359.375,00	(359.375,00)	(100,00)
7.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	2.228.406,00	1.931.612.470,80	(1.929.384.064,80)	(99,88)
8.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	64.124.386,00	33.624.220,69	30.500.165,31	90,71
9.	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	23.574.314,94	121.563.505,46	(97.989.190,52)	(80,61)
10.	Pendapatan dari Pengembalian-LO	1.398.713.513,81	95.375.695,00	1.303.337.818,81	1.366,53
11.	Pendapatan dari BLUD-LO	54.109.151,60	45.722.581.835,98	(45.668.472.684,38)	(99,88)
12.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0,00	12.754.030.744,00	(12.754.030.744,00)	(100,00)
Jumlah		6.710.740.989,34	62.918.522.229,05	56.207.781.239,71	(89,33)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Nilai Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp6.710.740.989,34 berbeda dengan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp31.546.669.647,47. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.4-10 Penjelasan Perbedaan Nilai Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO dan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024

(dalam rupiah)

Lain-lain PAD yang Sah-LRA	31.546.669.647,47
Mutasi Tambah:	11.231.584,00
Penambahan piutang 2024	11.231.584,00
Mutasi Kurang:	24.847.160.242,13
Penerimaan kas atas Piutang tahun sebelumnya	11.031.375,00
Reklasifikasi ke Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO berupa Pendapatan BLUD	24.522.736.367,13
Reklasifikasi keluar berupa Surplus dari Kegiatan Non Operasional	308.398.000,00
Reklasifikasi keluar berupa Defisit dari Kegiatan Non Operasional	4.994.500,00
Jumlah Mutasi:	(24.835.928.658,13)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	6.710.740.989,34

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Mutasi tambah dan mutasi kurang sebagaimana tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

1. Mutasi tambah sebesar Rp11.231.584,00 berupa penambahan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan tahun 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Mutasi kurang sebesar Rp24.847.160.242,13 yang terdiri dari:
 - a. Penerimaan Kas berupa pembayaran Piutang Lain-Lain PAD yang Sah tahun sebelumnya pada tahun 2024 sebesar Rp11.031.375,00 yang terdiri dari:
 - 1) Pembayaran Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan tahun 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.408.720,00; dan
 - 2) Pembayaran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp7.622.655,00.
 - b. Reklasifikasi Pendapatan BLUD-LO periode Januari s.d Juli tahun 2024 ke Retribusi Pelayanan Kesehatan namun realisasinya tercatat pada akun Lain-Lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp24.522.736.367,13.
 - c. Pendapatan hasil pelelangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2024 berupa Kendaraan Roda Dua, Kendaraan Roda Empat dan Barang Inventaris Kantor tahun 2024 sebesar Rp308.398.000,00 yang dicatat sebagai Surplus Penjualan Aset Non Lancar pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - d. Pendapatan hasil pelelangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2024 berupa paket *scrap* Barang Inventaris Kantor tahun 2024 sebesar Rp4.994.500,00 yang dicatat sebagai Defisit Penjualan Aset Non Lancar pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

V.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp1.218.682.565.679,00	Rp1.139.314.215.448,00

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain, yang pada umumnya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada rekening Kas Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, dalam hal dengan kurang salur.

Pendapatan Transfer-LO tahun 2024 sebesar Rp1.218.682.565.679,00 dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1.139.314.215.448,00, bertambah sebesar Rp79.368.350.231,00 atau 6,97%.

Rincian Pendapatan Transfer-LO tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel V.4-11 Rincian Pendapatan Transfer-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)					
No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.137.077.335.300,00	1.035.002.449.292,00	102.074.886.008,00	9,86
2.	Transfer Antar Daerah-LO	81.605.230.379,00	104.311.766.156,00	(22.706.535.777,00)	(21,77)
Jumlah		1.218.682.565.679,00	1.139.314.215.448,00	79.368.350.231,00	6,97

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Nilai Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp1.218.682.565.679,00 berbeda dengan Pendapatan Transfer-LRA sebesar Rp1.352.003.997.917,00. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel V.4-12 Penjelasan Perbedaan Nilai Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024

(dalam rupiah)	
Transfer-LRA	1.352.003.997.917,00
Mutasi Tambah:	101.807.123.338,00
Penambahan piutang 2024	93.548.608.071,00
Koreksi tambah Piutang tahun sebelumnya di tahun 2024	2.694.075.267,00
Saldo Rekening TDF milik Pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2023	5.564.440.000,00
Mutasi Kurang:	235.128.555.576,00
Penerimaan kas atas Piutang tahun sebelumnya	22.885.542.576,00
Penerimaan kas atas penyetoran saldo BOP PAUD Swasta yang Tutup di tahun 2024	8.100.000,00
Penerimaan kas atas pencairan TDF 2023 di 2024	31.152.575.000,00
Penerimaan Transfer ke Pemerintah Desa TA 2024	181.082.338.000,00
Jumlah Mutasi:	(133.321.432.238,00)
Transfer-LO	1.218.682.565.679,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.4.1.2.a Transfer Pemerintah Pusat-LO

Tahun 2024
Rp1.137.077.335.300,00

Tahun 2023
Rp1.035.002.449.292,00

Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO berupa pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO dalam tahun 2024 merupakan realisasi pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat tahun 2024 yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah-LO dan Dana Desa-LO dengan jumlah sebesar Rp1.137.077.335.300,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1.035.002.449.292,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO meningkat sebesar Rp102.074.886.008,00 atau 9,86%.

Rincian Transfer Pemerintah Pusat-LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.4-13 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)					
No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Dana Perimbangan-LO	1.124.248.048.300,00	1.024.182.172.292,00	100.065.876.008,00	9,77
2.	Dana Insentif Daerah-LO	12.829.287.000,00	10.820.277.000,00	2.009.010.000,00	18,57
Jumlah		1.137.077.335.300,00	1.035.002.449.292,00	102.074.886.008,00	9,86

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp1.137.077.335.300,00 berbeda dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA sebesar Rp1.280.081.569.300,00. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.4-14 Penjelasan Perbedaan Nilai Pendapatan Transfer Pusat-LO dan Pendapatan Transfer Pusat-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024

(dalam rupiah)	
Transfer Pemerintah Pusat-LRA	1.280.081.569.300,00
Mutasi Tambah:	63.088.779.000,00
Penambahan piutang 2024	57.524.339.000,00
Saldo Rekening TDF milik Pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2024	5.564.440.000,00
Mutasi Kurang:	206.093.013.000,00
Penerimaan kas atas penyetoran saldo BOP PAUD Swasta yang Tutup di tahun 2024	8.100.000,00
Penerimaan kas atas pencairan TDF 2023 di 2024	31.152.575.000,00
Penerimaan Transfer Dana Desa ke Pemerintah Desa TA 2024	174.932.338.000,00
Jumlah Mutasi:	(143.004.234.000,00)
Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.137.077.335.300,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

V.4.1.2.a.1 Dana Perimbangan-LO

Tahun 2024
Rp1.124.248.048.300,00

Tahun 2023
Rp1.024.182.172.292,00

Realisasi pendapatan Transfer Dana Perimbangan-LO berupa pendapatan transfer yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Nilai Pendapatan Dana Perimbangan-LO merupakan realisasi Dana Perimbangan tahun 2023 yang terdiri dari Dana Bagi Hasil-LO, Dana Alokasi Umum (DAU)-LO, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO dengan jumlah sebesar Rp1.124.248.048.300,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1.024.182.172.292,00. Pendapatan Dana Perimbangan-LO bertambah sebesar Rp100.065.876.008,00 atau 9,77%.

Rincian Transfer Pemerintah Pusat-LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.4-15 Realisasi Dana Perimbangan-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Bagi Hasil Pajak-LO	140.777.052.250,00	101.370.040.300,00	39.407.011.950,00	38,87
2.	Dana Alokasi Umum-LO	732.006.415.432,00	686.823.402.178,00	45.183.013.254,00	6,58
3.	Dana Alokasi Khusus Fisik-LO	86.635.359.106,00	71.494.372.292,00	15.140.986.814,00	21,18
4.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO	164.829.221.512,00	164.494.357.522,00	334.863.990,00	0,20
Jumlah		1.124.248.048.300,00	1.024.182.172.292,00	100.065.876.008,00	9,77

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Nilai Pendapatan Dana Perimbangan-LO sebesar Rp1.124.248.048.300,00 berbeda dengan Pendapatan Dana Perimbangan-LRA sebesar Rp1.092.319.944.300,00. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.4-16 Penjelasan Perbedaan Nilai Pendapatan Dana Perimbangan-LO dan Pendapatan Dana Perimbangan-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024

(dalam rupiah)

Dana Perimbangan-LRA	1.092.319.944.300,00
Mutasi Tambah:	63.088.779.000,00
Penambahan piutang 2024	57.524.339.000,00
Saldo Rekening TDF milik Pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2024 pada Kantor Pusat Bank Indonesia	5.564.440.000,00
Mutasi Kurang:	31.160.675.000,00
Penerimaan kas atas penyetoran saldo BOP PAUD Swasta yang Tutup di tahun 2024	8.100.000,00
Penerimaan kas atas pencairan TDF 2023 di 2024	31.152.575.000,00
Jumlah Mutasi:	31.928.104.000,00
Dana Perimbangan-LO	1.124.248.048.300,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.4.1.2.a.1.a Dana Bagi Hasil-LO

Tahun 2024
Rp140.777.052.250,00

Tahun 2023
Rp101.370.040.300,00

Dana Bagi Hasil yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase dari Pajak dan sumber daya alam untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil-LO dalam tahun 2024 sebesar Rp140.777.052.250,00, terdiri dari Bagi Hasil Pajak berupa Pajak Bumi Dan Bangunan-LO, Bagi Hasil dari PPh 21-LO, dan Bagi Hasil dari PPh 25 dan PPh 29, WP Orang Pribadi dalam Negeri serta Bagi Hasil Sumber Daya Alam berupa Bagi Hasil dari Cukai Tembakau-LO, Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi-LO, Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi-LO, Bagi Hasil dari Iuran



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tetap (Landrent)-LO, Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti)-LO, Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LO, Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan-LO, dan DBH Sawit-LO. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp101.370.040.300,00, maka terdapat peningkatan Dana Bagi Hasil-LO sebesar Rp39.407.011.950,00 atau 38,87%.

Rincian Dana Bagi Hasil-LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.4-17 Dana Bagi Hasil-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)					
No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan-LO	10.506.538.000,00	1.702.370.250,00	8.804.167.750,00	517,17
2.	DBH PPh Pasal 21-LO	4.413.940.000,00	7.030.465.570,00	(2.616.525.570,00)	(37,22)
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	307.232.000,00	264.649.858,00	42.582.142,00	16,09
4.	DBH Cukai Hasil Tembakau-LO	45.453.250,00	92.580.092,00	(47.126.842,00)	(50,90)
5.	DBH SDA Minyak Bumi-LO	9.217.643.000,00	14.993.157.368,00	(5.775.514.368,00)	(38,52)
6.	DBH SDA Gas Bumi-LO	22.101.508.000,00	26.742.896.852,00	(4.641.388.852,00)	(17,36)
7.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	396.055.000,00	318.556.563,00	77.498.437,00	24,33
8.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	79.837.753.000,00	33.586.581.323,00	46.251.171.677,00	137,71
9.	DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LO	1.018.390.000,00	1.848.319.213,00	(829.929.213,00)	(44,90)
10.	DBH SDA Perikanan-LO	1.143.842.000,00	1.444.887.211,00	(301.045.211,00)	(20,84)
11.	DBH Sawit-LO	11.788.698.000,00	13.345.576.000,00	(1.556.878.000,00)	(11,67)
Jumlah		140.777.052.250,00	101.370.040.300,00	39.407.011.950,00	38,87

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Nilai Pendapatan Dana Bagi Hasil-LO sebesar Rp140.777.052.250,00 berbeda dengan Pendapatan Dana Bagi Hasil-LRA sebesar Rp108.840.848.250,00. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.4-18 Penjelasan Perbedaan Nilai Pendapatan Dana Bagi Hasil-LO dan Pendapatan Dana Bagi Hasil-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024

(dalam rupiah)	
Dana Bagi Hasil-LRA	108.840.848.250,00
Mutasi Tambah:	63.088.779.000,00
Penambahan piutang 2024	57.524.339.000,00
Saldo Rekening TDF milik Pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2024 pada Kantor Pusat Bank Indonesia	5.564.440.000,00
Mutasi Kurang:	31.152.575.000,00
Penerimaan kas atas pencairan TDF 2023 di 2024	31.152.575.000,00
Jumlah Mutasi:	31.936.204.000,00
Dana Bagi Hasil-LO	140.777.052.250,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Mutasi tambah dan mutasi kurang sebagaimana tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah sebesar Rp63.088.779.000,00 yang terdiri dari:
 - a. Penambahan Piutang Dana Perimbangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 sebesar Rp57.524.339.000,00 yang terdiri dari:
 - 1) Piutang Bagi Hasil Pajak sebesar Rp3.890.849.000,00;
 - 2) Piutang Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp53.627.082.000,00; dan
 - 3) Piutang Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp6.408.000,00.

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- b. Saldo Rekening TDF milik Pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2024 pada Kantor Pusat Bank Indonesia dengan nomor rekening 519000251980 dan nama rekening Rek Lain BI TDF Kab. Merangin sebesar Rp5.564.440.000,00.
2. Mutasi kurang sebesar Rp31.152.575.000,00 berupa penerimaan kas atas pencairan TDF 2023 di tahun 2024 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

V.4.1.2.a.1.b Dana Alokasi Umum-LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp732.006.415.432,00	Rp686.823.402.178,00

Pendapatan Dana Alokasi Umum merupakan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan atas Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum (DAU)-LO tahun 2024 sebesar Rp732.006.415.432,00, mengalami peningkatan sebesar Rp45.183.013.254,00 atau 6,58% jika dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp686.823.402.178,00. Penerimaan DAU dari Pemerintah Pusat ditransfer dan ditampung dalam rekening giro Bank Jambi Cabang Bangko a.n. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Merangin.

Tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO tahun 2024 dengan Pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA tahun 2023.

V.4.1.2.a.1.c Dana Alokasi Khusus Fisik-LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp86.635.359.106,00	Rp71.494.372.292,00

Dana Alokasi Khusus Fisik-LO tahun 2024 sebesar Rp86.635.359.106,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp71.494.372.292,00 terdapat peningkatan sebesar Rp15.140.986.814,00 atau 21,18%.

Rincian realisasi komponen Dana Alokasi Khusus Fisik-LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.4-19 Komponen Dana Alokasi Khusus Fisik-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	DAK Bidang Pendidikan-LO	26.098.994.348,00	25.439.404.860,00	659.589.488,00	2,59
	- DAK Reguler-PAUD-LO	928.437.341,00	713.830.650,00	214.606.691,00	30,06
	- DAK Reguler-SD-LO	19.921.387.779,00	14.446.736.100,00	5.474.651.679,00	37,90
	- DAK Reguler-SMP-LO	4.595.190.670,00	5.809.579.642,00	(1.214.388.972,00)	(20,90)
	- DAK Reguler-SKB-LO	653.978.558,00	0,00	653.978.558,00	-
	- DAK Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	0,00	4.469.258.468,00	(4.469.258.468,00)	(100,00)
2.	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-LO	3.610.973.070,00	3.351.761.755,00	259.211.315,00	7,73
3.	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-LO	2.484.139.322,00	1.617.128.200,00	867.011.122,00	53,61
4.	DAK Fisik-Bidang Jalan-LO	30.843.767.000,00	29.539.039.800,00	1.304.727.200,00	4,42
5.	DAK Fisik-Bidang Irigasi-LO	3.345.676.700,00	0,00	3.345.676.700,00	-
6.	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-LO	939.856.195,00	1.553.074.500,00	(613.218.305,00)	(39,48)
7.	DAK Fisik-Bidang Sosial-LO	0,00	2.730.297.511,00	(2.730.297.511,00)	(100,00)
8.	DAK Bidang Kesehatan dan KB-LO	11.808.831.071,00	2.605.188.914,00	9.203.642.157,00	353,28
	- DAK Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting-LO	2.272.898.781,00	0,00	2.272.898.781,00	-
	- DAK Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	9.535.932.290,00	2.605.188.914,00	6.930.743.376,00	266,04
9.	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-LO	0,00	4.658.476.752,00	(4.658.476.752,00)	(100,00)
10.	DAK Fisik-Bidang Pertanian-LO	7.503.121.400,00	0,00	7.503.121.400,00	-
Jumlah		86.635.359.106,00	71.494.372.292,00	15.140.986.814,00	21,18

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik-LO tahun 2024 dengan Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik-LRA tahun 2024.

V.4.1.2.a.1.d Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO

Tahun 2024
Rp164.829.221.512,00

Tahun 2023
Rp164.494.357.522,00

Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO tahun 2024 sebesar Rp164.829.221.512,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp164.494.357.522,00 terdapat peningkatan sebesar Rp334.863.990,00 atau 0,20%.

Rincian realisasi komponen Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.4-20 Komponen Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	51.210.012.604,00	51.525.250.261,00	(315.237.657,00)	(0,61)
2.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	2.127.500.000,00	2.167.500.000,00	(40.000.000,00)	(1,85)
3.	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	60.041.113.000,00	62.711.979.220,00	(2.670.866.220,00)	(4,26)
4.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	3.999.350.000,00	0,00	3.999.350.000,00	-
5.	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	3.370.550.000,00	2.201.084.400,00	1.169.465.600,00	53,13
6.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	7.454.206.515,00	4.729.535.803,00	2.724.670.712,00	57,61
7.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	5.652.913.980,00	5.482.266.344,00	170.647.636,00	3,11
8.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata-LO	1.131.219.300,00	1.102.230.000,00	28.989.300,00	2,63
9.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	630.200.000,00	451.770.000,00	178.430.000,00	39,50
10.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	0,00	406.000.000,00	-
11.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	972.326.000,00	798.284.094,00	174.041.906,00	21,80
12.	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM-LO	1.409.584.716,00	2.000.000.000,00	(590.415.284,00)	(29,52)
13.	DAK Non Fisik-PK2UMK-LO	554.511.000,00	0,00	554.511.000,00	-
14.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO	6.406.671.000,00	6.790.101.000,00	(383.430.000,00)	(5,65)
15.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	30.000.000,00	60.000.000,00	(30.000.000,00)	(50,00)
16.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler-LO	2.633.955.500,00	2.876.900.000,00	(242.944.500,00)	(8,44)
17.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja-LO	135.000.000,00	135.000.000,00	-	-
18.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	16.664.107.897,00	21.462.456.400,00	(4.798.348.503,00)	(22,36)
Jumlah		164.829.221.512,00	164.494.357.522,00	334.863.990,00	0,20

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Nilai Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO sebesar Rp164.829.221.512,00 berbeda dengan Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LRA sebesar Rp164.837.321.512,00. Perbedaan tersebut adalah Penerimaan Kas berupa penyetoran saldo BOP PAUD Swasta yang Tutup di tahun 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp8.100.000,00 yang terdiri dari:

1. TPA Bintang Ceria sebesar Rp3.000.000,00;
2. SPS Asparagus sebesar Rp3.900.000,00;
3. SPS Sopir sebesar Rp900.000,00; dan
4. KB Mawar sebesar Rp300.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

V.4.1.2.a.2 Insentif Fiskal-LO

Tahun 2024
Rp12.829.287.000,00

Tahun 2023
Rp10.820.277.000,00

Pendapatan Insentif Fiskal-LO tahun 2024 sebesar Rp12.829.287.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp10.820.277.000,00, Pendapatan Insentif Fiskal-LO bertambah sebesar Rp2.009.010.000,00 atau 18,57%.

Tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan Insentif Fiskal-LO tahun 2024 dengan Pendapatan Insentif Fiskal-LRA tahun 2024.

V.4.1.2.b Transfer Antar Daerah-LO

Tahun 2024
Rp81.605.230.379,00

Tahun 2023
Rp104.311.766.156,00

Realisasi pendapatan Transfer Antar Daerah-LO berupa pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBD Provinsi Jambi yang dialokasikan kepada daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

Nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO dalam tahun 2024 merupakan realisasi pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2024 yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dengan jumlah sebesar Rp81.605.230.379,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp104.311.766.156,00. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO berkurang sebesar Rp22.706.535.777,00 atau (21,77%).

Rincian Transfer Antar Daerah-LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.4-21 Realisasi Transfer Antar Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Pendapatan Bagi Hasil-LO	79.405.230.379,00	81.611.766.156,00	(2.206.535.777,00)	(2,70)
2.	Bantuan Keuangan-LO	8.350.000.000,00	22.700.000.000,00	(14.350.000.000,00)	(63,22)
Jumlah		81.605.230.379,00	104.311.766.156,00	(22.706.535.777,00)	(21,77)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO sebesar Rp81.605.230.379,00 berbeda dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA sebesar Rp71.922.428.617,00. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.4-22 Penjelasan Perbedaan Nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO dan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024

(dalam rupiah)

Transfer Antar Daerah-LRA	71.922.428.617,00
Mutasi Tambah:	38.718.344.338,00
Penambahan piutang 2024	36.024.269.071,00
Koreksi tambah Piutang tahun sebelumnya di tahun 2024	2.694.075.267,00
Mutasi Kurang:	29.035.542.576,00
Penerimaan kas atas Piutang tahun sebelumnya	22.885.542.576,00
Penerimaan Transfer Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemerintah Provinsi Jambi ke Pemerintah Desa TA 2024	6.150.000.000,00
Jumlah Mutasi:	9.682.801.762,00
Transfer Antar Daerah-LO	81.605.230.379,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.4.1.2.b.1 Pendapatan Bagi Hasil-LO

Tahun 2024
Rp79.405.230.379,00

Tahun 2023
Rp81.611.766.156,00

Pendapatan Bagi Hasil-LO berupa Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi tahun 2024 sebesar Rp79.405.230.379,00. Rincian komponen Pendapatan Bagi Hasil-LO tahun 2024 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel V.4-23 Komponen Pendapatan Bagi Hasil-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor-LO	18.376.273.102,00	16.822.182.460,00	1.554.090.642,00	9,24
2.	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	15.210.036.117,00	9.938.133.703,00	5.271.902.414,00	53,05
3.	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	29.128.967.416,00	33.610.621.457,00	(4.481.654.041,00)	(13,33)
4.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan-LO	31.141.057,00	38.032.107,00	(6.891.050,00)	(18,12)
5.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok-LO	16.658.812.687,00	21.202.796.429,00	(4.543.983.742,00)	(21,43)
Jumlah		79.405.230.379,00	81.611.766.156,00	(2.206.535.777,00)	(2,70)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Pada tahun 2023, pendapatan operasional sektor ini sebesar Rp81.611.766.156,00, sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2024, terdapat penurunan sebesar Rp2.206.535.777,00 atau (2,70%).

Nilai Pendapatan Bagi Hasil-LO sebesar Rp79.405.230.379,00 berbeda dengan Pendapatan Bagi Hasil-LRA sebesar Rp64.272.428.617,00. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.4-24 Penjelasan Perbedaan Nilai Pendapatan Bagi Hasil-LO dan Pendapatan Bagi Hasil-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024

(dalam rupiah)

Pendapatan Bagi Hasil-LRA	64.272.428.617,00
Mutasi Tambah:	38.018.344.338,00
Penambahan piutang 2024	35.324.269.071,00
Koreksi tambah Piutang tahun sebelumnya di tahun 2024	2.694.075.267,00
Mutasi Kurang:	22.885.542.576,00
Penerimaan kas atas Piutang tahun sebelumnya	22.885.542.576,00
Jumlah Mutasi:	15.132.801.762,00
Pendapatan Bagi Hasil-LO	79.405.230.379,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Mutasi tambah dan mutasi kurang sebagaimana tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah sebesar Rp38.018.344.338,00 yang terdiri dari:
 - a. Penambahan Piutang Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Jambi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 sebesar Rp35.324.269.071,00 yang terdiri dari:
 - 1) Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp10.139.666.481,00;
 - 2) Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar Rp7.125.836.621,00;
 - 3) Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp14.878.770.560,00;
 - 4) Piutang Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan sebesar Rp15.805.700,00; dan
 - 5) Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp3.164.189.709,00.
 - b. Koreksi kurang catat Piutang Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Jambi tahun sebelumnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp2.694.075.267,00 yang terdiri dari:
 - 1) Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp41.244.876,00;



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- 2) Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar Rp2.652.830.386,00; dan
- 3) Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp5,00.
2. Mutasi kurang sebesar Rp22.885.542.576,00 berupa Penerimaan Kas atas pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Jambi tahun sebelumnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp22.885.542.576,00 yang terdiri dari:
 - a. Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp4.414.557.918,00;
 - b. Pembayaran Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar Rp2.652.830.386,00;
 - c. Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp9.648.121.432,00;
 - d. Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan sebesar Rp16.725.465,00; dan
 - e. Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp6.153.307.375,00.

V.4.1.2.b.2 Bantuan Keuangan-LO

Tahun 2024
Rp2.200.000.000,00

Tahun 2023
Rp22.700.000.000,00

Pendapatan Bantuan Keuangan-LO dari Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2024 adalah sebesar Rp2.200.000.000,00. Jika dibandingkan dengan jumlah pendapatan Bantuan Keuangan-LO pada tahun 2023 sebesar Rp22.700.000.000,00, maka terdapat penurunan sebesar Rp20.500.000.000,00 atau sebesar (90,31%).

Nilai Pendapatan Bantuan Keuangan-LO sebesar Rp2.200.000.000,00 berbeda dengan Pendapatan Bantuan Keuangan-LRA sebesar Rp7.650.000.000,00. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.4-25 Penjelasan Perbedaan Nilai Pendapatan Bantuan Keuangan-LO dan Pendapatan Bantuan Keuangan-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)	
Bantuan Keuangan-LRA	7.650.000.000,00
Mutasi Tambah:	700.000.000,00
Penambahan piutang 2024	700.000.000,00
Mutasi Kurang:	6.150.000.000,00
Penerimaan Transfer ke Pemerintah Desa TA 2024	6.150.000.000,00
Jumlah Mutasi:	(5.450.000.000,00)
Bantuan Keuangan-LO	2.200.000.000,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Mutasi tambah dan mutasi kurang sebagaimana tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah sebesar Rp700.000.000,00 merupakan penambahan Piutang Bantuan Keuangan Khusus kepada Kelurahan dari Pemerintah Provinsi Jambi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024.
2. Mutasi kurang sebesar Rp6.150.000.000,00 merupakan Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Provinsi Jambi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

V.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Tahun 2024
Rp78.304.394.814,96

Tahun 2023
Rp5.350.185.193,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO pada tahun 2024 sebesar Rp78.304.394.814,96. Sedangkan pada tahun 2023, jumlah sektor pendapatan operasional ini sebesar Rp5.350.185.193,00, sehingga terdapat peningkatan sebesar Rp72.954.209.621,96 atau 1.363,58 %. Rincian komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel V.4-26 Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Pendapatan Hibah-LO	65.863.228.711,96	5.268.185.193,00	60.595.043.518,96	1.150,21
2.	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	12.441.166.103,00	0,00	12.441.166.103,00	-
3.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	0,00	82.000.000,00	(82.000.000,00)	(100,00)
Jumlah		78.304.394.814,96	5.350.185.193,00	72.954.209.621,96	1.363,58

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Nilai Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp78.304.394.814,96 berbeda dengan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA sebesar Rp12.441.166.103,00. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.4-27 Penjelasan Perbedaan Nilai Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024

(dalam rupiah)

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA	12.441.166.103,00
Mutasi Tambah:	65.863.228.711,96
Pendapatan Hibah yang tidak melalui mekanisme APBD dari Masyarakat	9.240.000,00
Pendapatan Hibah yang tidak melalui mekanisme APBD dari Pemerintah Pusat	62.448.973.942,00
Pendapatan Hibah yang tidak melalui mekanisme APBD dari Pemerintah Provinsi Jambi	3.405.014.769,96
Mutasi Kurang:	0,00
Jumlah Mutasi:	65.863.228.711,96
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	78.304.394.814,96

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.4.1.3.a Pendapatan Hibah-LO

Tahun 2024
Rp65.863.228.711,96

Tahun 2023
Rp5.268.185.193,00

Pendapatan Hibah-LO pada tahun 2024 sebesar Rp65.863.228.711,96. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Hibah-LO tahun 2023 sebesar Rp5.268.185.193,00, maka Pendapatan Hibah-LO bertambah sebesar Rp60.595.043.518,96 atau 1.150,21%. Pendapatan Hibah-LO terdiri dari Hibah Barang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Desa/Masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Merangin. Rincian Komponen Pendapatan Hibah-LO tahun 2024 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel V.4-28 Komponen Pendapatan Hibah-LO kepada Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)				
No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Entitas Pemberi
1.	Hibah dari Pemerintah Pusat	62.448.973.942,00	4.578.141.733,00	
	- Hibah Infrastruktur Kawasan Minapolitan pada Dinas PUPR	10.067.000.750,00	0,00	Kementerian PUPR
	- Hibah Infrastruktur Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) pada Dinas PUPR	2.796.491.500,00	0,00	Kementerian PUPR
	- Hibah Mobil Tangki Tinja pada Dinas LH	437.929.430,00	0,00	Kementerian PUPR
	- Hibah Bulldozer pada Dinas LH	3.686.106.600,00	0,00	Kementerian PUPR
	- Hibah Excavator pada Dinas LH	1.787.682.600,00	0,00	Kementerian PUPR
	- Hibah Air Minum Perkotaan pada BPKAD (PPKD)	0,00	3.000.000.000,00	Kementerian Keuangan
	- Hibah 3 Unit Sumur Bor pada Dinas PUPR	0,00	1.374.501.733,00	Kementerian ESDM
	- Hibah Sarana dan Prasarana Air Minum kepada Perumda Air Minum Tirta Merangin namun belum ditetapkan sebagai Penyertaan Modal.	43.459.941.062,00	0,00	Kementerian PUPR
	- Hibah Blanko e-KTP pada Dinas Dukcapil	213.822.000,00	203.640.000,00	Kementerian Dalam Negeri
2.	Hibah dari Pemerintah Provinsi Jambi	3.405.014.769,96	690.043.460,00	
	- Hibah Obat dari Prov. Jambi	2.350.484.191,96	476.221.460,00	Pemprov. Jambi
	- Hibah Alat Kontrasepsi dari Prov. Jambi	932.152.078,00	0,00	Pemprov. Jambi
	- Hibah Blanko e-KTP dari Prov. Jambi	122.378.500,00	213.822.000,00	Pemprov. Jambi
3.	Hibah tanah dari Pemerintah Desa/Masyarakat	9.240.000,00	0,00	
	- Tanah Lapangan Futsal Kel. Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir	9.240.000,00	0,00	Masyarakat an. Fatmawati
Jumlah		65.863.228.711,96	5.268.185.193,00	

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Nilai Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp65.863.228.711,96 berbeda dengan Pendapatan Hibah-LRA sebesar nihil. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.4-29 Penjelasan Perbedaan Nilai Pendapatan Hibah-LO dan Pendapatan Hibah-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024

(dalam rupiah)	
Pendapatan Hibah-LRA	0,00
Mutasi Tambah:	65.863.228.711,96
Pendapatan Hibah yang tidak melalui mekanisme APBD dari Masyarakat	9.240.000,00
Pendapatan Hibah yang tidak melalui mekanisme APBD dari Pemerintah Pusat	62.448.973.942,00
Pendapatan Hibah yang tidak melalui mekanisme APBD dari Pemerintah Provinsi Jambi	3.405.014.769,96
Mutasi Kurang:	0,00
Jumlah Mutasi:	65.863.228.711,96
Pendapatan Hibah-LO	65.863.228.711,96

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Mutasi tambah sebesar Rp65.863.228.711,96 yang terdiri dari:

1. Pendapatan Hibah Aset Tetap Tanah seluas 1.500 m² senilai Rp9.240.000,00 dari Masyarakat an. Fatmawati pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Pendapatan Hibah Aset Tetap dari Pemerintah Pusat sebesar Rp62.235.151.942,00 yang terdiri dari:
 - a. Hibah Mobil Tangki Tinja pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp437.929.430,00 dari Kementerian PUPR;
 - b. Hibah Bulldozer pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp3.686.106.600,00 dari Kementerian PUPR;
 - c. Hibah Excavator pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp1.787.682.600,00 dari Kementerian PUPR;



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- d. Hibah Infrastruktur Kawasan Minapolitan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp10.067.000.750,00 dari Kementerian PUPR;
 - e. Hibah Infrastruktur Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp2.796.491.500,00 dari Kementerian PUPR;
 - f. Hibah Sarana dan Prasarana Air Minum kepada Perumda Air Minum Tirta Merangin namun belum ditetapkan sebagai Penyertaan Modal senilai Rp43.459.941.062,00 dari Kementerian PUPR; dan
3. Pendapatan Hibah Persediaan dari Pemerintah Pusat berupa Blanko e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp213.822.000,00 dari Kementerian Dalam Negeri.
 4. Pendapatan Hibah Persediaan dari Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp3.405.014.769,96 yang terdiri dari:
 - a. Hibah Obat pada Dinas Kesehatan senilai Rp2.350.484.191,96 dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;
 - b. Hibah Alat Kontrasepsi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp932.152.078,00 dari Kantor BKKBN Perwakilan Provinsi Jambi; dan
 - c. Hibah Blanko e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp122.378.500,00 dari Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

V.4.1.3.b Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

Tahun 2024
Rp12.441.166.103,00

Tahun 2023
Rp0,00

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO pada tahun 2024 sebesar Rp12.441.166.103,00 berupa Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar nihil, terdapat peningkatan sebesar (100,00%).

Tidak terdapat perbedaan antara Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO tahun 2024 dengan Pendapatan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LRA tahun 2024.

V.4.1.3.c Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO

Tahun 2024
Rp0,00

Tahun 2023
Rp82.000.000,00

Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO pada tahun 2024 sebesar nihil. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp82.000.000,00, terdapat penurunan sebesar (100,00%).

V.4.2 B e b a n

Tahun 2024
Rp1.290.693.984.204,94

Tahun 2023
Rp1.195.609.794.247,30

Beban merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun, baik yang berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar.

Beban merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.290.693.984.204,94. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1.195.609.794.247,30, terdapat peningkatan beban sebesar Rp95.084.189.957,64 atau 7,95%.

Nilai Beban sebesar Rp1.290.693.984.204,94 berbeda dengan jumlah Belanja Operasi dan Belanja Transfer sebesar Rp1.261.093.029.888,96. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel V.4-30 Penjelasan Perbedaan Nilai Beban dan Belanja Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024

(dalam rupiah)	
Belanja	1.261.093.029.888,96
Mutasi Tambah:	247.523.624.893,73
Persediaan awal tahun 2024	9.517.986.488,00
Pendapatan Hibah dari Entitas Lainnya	3.618.836.769,96
Penambahan Utang Belanja yang diakui tahun 2024	32.072.663.516,00
Beban Dibayar Dimuka tahun 2023 yang jatuh tempo tahun 2024	209.540.746,75
Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	10.722.670.351,70
Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	83.781.720,50
Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.427.274.037,00
Reklasifikasi dari Aset Tidak Berwujud	14.800.000,00
Koreksi kesalahan pencatatan tahun sebelumnya	654.610.943,50
Beban Penyisihan Piutang	3.032.774.621,07
Beban Penyusutan dan Amortisasi	186.168.685.699,25
Mutasi Kurang:	217.922.670.577,75
Persediaan Akhir Tahun 2024	9.311.160.053,02
Pengeluaran kas atas Utang Belanja tahun sebelumnya	19.085.167.710,60
Kesalahan Penganggaran Aset Tetap Peralatan dan Mesin	1.274.183.300,00
Kesalahan Penganggaran Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Barang dan Jasa BOS	8.149.900,00
Kesalahan Penganggaran Aset Tetap Lainnya dari Barang dan Jasa BOS	10.481.300,00
Kesalahan Penganggaran Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Hibah BOSP	44.462.500,00
Pengeluaran Transfer ke Pemerintah Desa TA 2024	181.082.338.000,00
Beban Dibayar Dimuka tahun 2024	176.667.199,13
Koreksi kesalahan pencatatan tahun sebelumnya	563.000,00
Realisasi Belanja yang diatribusi sebagai Aset Tetap	3.737.636.950,00
- Aset Tetap Peralatan dan Mesin	441.564.400,00
- Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.960.263.700,00
- Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.335.808.850,00
Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain	3.191.860.665,00
Jumlah Mutasi:	29.600.954.315,98
Beban	1.290.693.984.204,94

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban operasi dan beban transfer dengan rincian sebagai berikut:

V.4.2.1 Beban Operasi

Tahun 2024
Rp1.207.275.961.854,94

Tahun 2023
Rp1.097.791.982.337,30

Menurut klasifikasi ekonomi, Beban Operasi terdiri atas Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-Lain. Jumlah Beban Operasi tahun 2024 sebesar Rp1.207.275.961.854,94. Pada tahun 2023, Beban Operasi sebesar Rp1.097.791.982.337,30, sehingga terdapat peningkatan sebesar Rp109.483.979.517,64 atau 9,97%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4-31 Beban Operasi menurut Klasifikasi Ekonomi Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)					
No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Beban Pegawai	596.200.078.309,00	504.822.682.229,00	91.377.396.080,00	18,10
2.	Beban Barang	98.146.113.978,14	79.016.750.590,40	19.129.363.387,74	24,21
3.	Beban Jasa	171.595.914.088,98	164.424.070.288,08	7.171.843.800,90	4,36

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
4.	Beban Pemeliharaan	12.819.542.746,00	9.409.464.152,01	3.410.078.593,99	36,24
5.	Beban Perjalanan Dinas	71.402.409.322,00	62.566.418.856,00	8.835.990.466,00	14,12
6.	Beban Hibah	0,00	83.841.645.218,97	0,00	-
7.	Beban Penyisihan Piutang	67.910.443.090,50	2.599.111.782,29	(15.931.202.128,47)	(19,00)
8.	Beban Lain-Lain	0,00	2.570.870.456,47	0,00	-
9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.032.774.621,07	188.540.968.764,09	433.662.838,79	16,69
Jumlah		1.207.275.961.854,94	1.097.791.982.337,30	109.483.979.517,64	9,97

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Nilai Beban Operasi sebesar Rp1.207.275.961.854,94 berbeda dengan Belanja Operasi sebesar Rp996.592.669.538,96. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.4-32 Penjelasan Perbedaan Nilai Beban Operasi dan Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024

(dalam rupiah)	
Belanja	996.592.669.538,96
Mutasi Tambah:	247.523.624.893,73
Persediaan awal tahun 2024	9.517.986.488,00
Pendapatan Hibah dari Entitas Lainnya	3.618.836.769,96
Penambahan Utang Belanja yang diakui tahun 2024	32.072.663.516,00
Beban Dibayar Dimuka tahun 2023 yang jatuh tempo tahun 2024	209.540.746,75
Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	10.722.670.351,70
Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	83.781.720,50
Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.427.274.037,00
Reklasifikasi dari Aset Tidak Berwujud	14.800.000,00
Koreksi kesalahan pencatatan tahun sebelumnya	654.610.943,50
Beban Penyisihan Piutang	3.032.774.621,07
Beban Penyusutan dan Amortisasi	186.168.685.699,25
Mutasi Kurang:	36.840.332.577,75
Persediaan Akhir Tahun 2024	9.311.160.053,02
Pengeluaran kas atas Utang Belanja tahun sebelumnya	19.085.167.710,60
Kesalahan Penganggaran Aset Tetap Peralatan dan Mesin	1.274.183.300,00
Kesalahan Penganggaran Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Barang dan Jasa BOS	8.149.900,00
Kesalahan Penganggaran Aset Tetap Lainnya dari Barang dan Jasa BOS	10.481.300,00
Kesalahan Penganggaran Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Hibah BOSP	44.462.500,00
Beban Dibayar Dimuka tahun 2024	176.667.199,13
Koreksi kesalahan pencatatan tahun sebelumnya	563.000,00
Realisasi Belanja yang diatribusi sebagai Aset Tetap	3.737.636.950,00
- <i>Aset Tetap Peralatan dan Mesin</i>	<i>441.564.400,00</i>
- <i>Aset Tetap Gedung dan Bangunan</i>	<i>1.960.263.700,00</i>
- <i>Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan</i>	<i>1.335.808.850,00</i>
Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain	3.191.860.665,00
Jumlah Mutasi:	210.683.292.315,98
Beban	1.207.275.961.854,94

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Rincian Beban Operasi tersebut adalah sebagai berikut:

V.4.2.1.a Beban Pegawai	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp596.200.078.309,00	Rp504.822.682.229,00

Beban Pegawai disajikan dengan basis akrual, pengakuan Beban Pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai Beban Pegawai sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2024 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2024.

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Realisasi Beban Pegawai tahun 2024 sebesar Rp596.200.078.309,00. Pada tahun 2023 Beban Pegawai sebesar Rp504.822.682.229,00, sehingga terdapat peningkatan sebesar Rp91.377.396.080,00 atau 18,10%.

Rincian Beban Pegawai menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel V.4-33 Beban Pegawai menurut Jenis Pada Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Beban Gaji dan Tunjangan	407.134.770.596,00	346.567.556.922,00	60.567.213.674,00	17,48
2.	Beban Tambahan Penghasilan PNS	78.000.665.633,00	61.291.612.855,00	16.709.052.778,00	27,26
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	85.066.364.050,00	72.185.598.139,00	12.880.765.911,00	17,84
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD dan KDH/WKDH	17.629.675.030,00	17.582.758.769,00	181.962.422,00	1,04
5.	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD dan KDH/WKDH	0,00	655.656.544,00	(135.046.161,00)	(100,00)
6.	Beban Pegawai BLUD	593.200.000,00	6.539.499.000,00	(62.456.544,00)	(9,53)
Jumlah		596.200.078.309,00	504.822.682.229,00	91.377.396.080,00	18,10

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Nilai Beban Pegawai sebesar Rp596.200.078.309,00 berbeda dengan Belanja Pegawai sebesar Rp591.839.454.626,00. Hal ini disebabkan karena adanya transaksi akrual yang berpengaruh terhadap Beban Pegawai. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.4-34 Penjelasan Perbedaan Nilai Beban Pegawai dan Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024

(dalam rupiah)

Belanja Pegawai	591.839.454.626,00
Mutasi Tambah:	15.575.067.602,00
Penambahan Utang Belanja yang diakui tahun 2024	15.248.617.602,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BLUD	326.450.000,00
Mutasi Kurang:	11.214.443.919,00
Pengeluaran kas atas Utang Belanja tahun sebelumnya	11.088.879.419,00
Realisasi Belanja yang diatribusi sebagai Aset Tetap	125.564.500,00
- Aset Tetap Peralatan dan Mesin	44.770.000,00
- Aset Tetap Gedung dan Bangunan	27.992.500,00
- Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	52.802.000,00
Jumlah Mutasi:	4.360.623.683,00
Beban Pegawai	596.200.078.309,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Mutasi tambah dan mutasi kurang sebagaimana tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah sebesar Rp15.575.067.602,00 yang terdiri dari:
 - a. Penambahan Utang Belanja tahun 2024 sebesar Rp15.248.617.602,00 yang terdiri dari:
 - 1) Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.662.991.002,00;
 - 2) Utang Tunjangan Profesi Guru PNSD dan PPPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp10.350.170.000,00;

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- 3) Utang Tunjangan Khusus Guru PNSD dan PPPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp605.106.600,00;
- 4) Utang Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNSD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp868.500.000,00; dan
- 5) Utang Gaji Pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai PPK BLUS Non PNS pada RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp761.850.000,00.
- b. Reklasifikasi Beban Pegawai BLUD-LO dari Belanja Barang dan Jasa BLUD pada RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp326.450.000,00.
2. Mutasi kurang sebesar Rp4.333.449.577,12 yang terdiri dari:
 - a. Pengeluaran Kas berupa pembayaran Utang Belanja tahun sebelumnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp11.088.879.419,00.
 - 1) Pembayaran Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp5.751.384.519,00;
 - 2) Pembayaran Utang Tunjangan Profesi Guru PNSD dan PPPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp94.035.600,00;
 - 3) Pembayaran Utang Gaji ke-13 Tunjangan Profesi Guru PNSD dan PPPK 50% pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.419.861.397,00;
 - 4) Pembayaran Utang Gaji THR Tunjangan Profesi Guru PNSD dan PPPK 50% pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.450.255.603,00;
 - 5) Pembayaran Utang Tunjangan Khusus Guru PNSD dan PPPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp71.842.300,00; dan
 - 6) Pembayaran Utang Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNSD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp301.500.000,00.
 - b. Realisasi Belanja tahun 2024 yang diatribusi sebagai Aset Tetap sebesar Rp125.564.500,00 yang terdiri dari:
 - 1) Belanja Pegawai yang diatribusi sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada 17 (tujuh belas) SKPD senilai Rp44.770.000,00;
 - 2) Belanja Pegawai yang diatribusi sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada 9 (sembilan) SKPD senilai Rp27.992.500,00; dan
 - 3) Belanja Pegawai yang diatribusi sebagai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada 3 (tiga) SKPD senilai Rp52.802.000,00.

V.4.2.1.b Beban Barang

Tahun 2024
Rp98.146.113.978,14

Tahun 2023
Rp79.016.750.590,40

Beban Barang merupakan saldo Beban Barang periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp98.146.113.978,14. Pada tahun 2023, Beban Barang sebesar Rp79.016.750.590,40, sehingga terdapat peningkatan sebesar Rp19.129.363.387,74 atau 24,21%. Rincian Beban Barang menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel V.4-35 Beban Barang menurut Jenis pada Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)					
No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Beban Barang Habis Pakai	87.680.251.126,44	79.016.750.590,40	8.663.500.536,04	10,96
2.	Beban Barang Tak Habis Pakai	30.731.500,00	0,00	30.731.500,00	-
3.	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	10.435.131.351,70	0,00	10.435.131.351,70	-
Jumlah		98.146.113.978,14	79.016.750.590,40	19.129.363.387,74	24,21

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Beban Barang disajikan dengan basis akrual dan diakui dari pemakaian atau konsumsi barang persediaan, penyerahan barang persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah barang persediaan. Beban Barang ini diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan yang terdiri dari Belanja Barang tahun 2024, persediaan yang bersumber dari belanja selain Belanja Barang dan Hibah Persediaan dari entitas lain tahun 2024, selanjutnya dikurangi dengan saldo akhir Persediaan. Dengan penggunaan metode periodik maka pengukuran pemakaian barang dihitung berdasarkan inventarisasi fisik persediaan akhir tahun.

Nilai Beban Barang sebesar Rp98.146.113.978,14 berbeda dengan Belanja Barang sebesar Rp48.749.936.984,00. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.4-36 Penjelasan Perbedaan Nilai Beban Barang dan Belanja Barang Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024

(dalam rupiah)	
Belanja Barang	48.749.936.984,00
Mutasi Tambah:	65.803.321.732,16
Persediaan awal tahun 2024	9.517.986.488,00
Pendapatan Hibah dari Entitas Lainnya	3.618.836.769,96
Penambahan Utang Belanja yang diakui tahun 2024	9.960.049.086,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BLUD	12.108.670.971,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOS	19.070.753.822,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOP PAUD	154.779.300,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOP Kesetaraan	78.270.000,00
Reklasifikasi dari Belanja Hibah BOP PAUD	116.873.000,00
Reklasifikasi dari Belanja Hibah BOP Kesetaraan	98.960.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	10.311.320.351,70
Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	112.211.000,00
Koreksi kesalahan pencatatan tahun sebelumnya	654.610.943,50
Mutasi Kurang:	16.407.144.738,02
Persediaan Akhir Tahun 2024	9.311.160.053,02
Pengeluaran kas atas Utang Belanja tahun sebelumnya	5.802.607.185,00
Kesalahan Penganggaran Aset Tetap Peralatan dan Mesin	1.274.183.300,00
Kesalahan Penganggaran Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Dana BOS)	8.149.900,00
Kesalahan Penganggaran Aset Tetap Lainnya (Dana BOS)	10.481.300,00
Koreksi kesalahan pencatatan tahun sebelumnya	563.000,00
Jumlah Mutasi:	49.396.176.994,14
Beban Barang	98.146.113.978,14

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Mutasi tambah dan mutasi kurang sebagaimana tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah sebesar Rp65.803.321.732,16 yang terdiri dari:
 - a. Persediaan awal tahun 2024 pada 12 (dua belas) SKPD senilai Rp9.517.986.488,00.
 - b. Pendapatan hibah barang Persediaan dari entitas lainnya senilai Rp3.618.836.769,96 dengan rincian:
 - 1) Hibah Blanko e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp213.822.000,00 dari Kementerian Dalam Negeri;
 - 2) Hibah Blanko e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp122.378.500,00 dari Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi;
 - 3) Hibah Obat pada Dinas Kesehatan senilai Rp2.350.484.191,96 dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi; dan



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- 4) Hibah Alat Kontrasepsi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp932.152.078,00 dari Kantor BKKBN Perwakilan Provinsi Jambi.
- c. Penambahan Utang Belanja Barang tahun 2024 pada RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp9.960.049.086,00.
- d. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BLUD pada RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp12.108.670.971,00.
- e. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp19.070.753.822,00.
- f. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp154.779.300,00.
- g. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOP Kesetaraan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp78.270.000,00.
- h. Reklasifikasi dari Belanja Hibah BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp116.873.000,00.
- i. Reklasifikasi dari Belanja Hibah BOP Kesetaraan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp98.960.000,00.
- j. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa realisasi Belanja Modal di bawah nilai kapitalisasi (*extracomptable*) pada 28 (dua puluh delapan) SKPD senilai Rp10.311.320.351,70.
- k. Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa realisasi Belanja Modal di bawah nilai kapitalisasi (*extracomptable*) pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp112.211.000,00.
- l. Koreksi pencatatan saldo Persediaan tahun sebelumnya senilai Rp654.610.943,50 dengan rincian:
 - 1) Persediaan Blanko e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp2.334.000,00;
 - 2) Persediaan Obat pada Dinas Kesehatan senilai Rp478.962.469,50; dan
 - 3) Persediaan Alat Kontrasepsi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp173.314.474,00.
2. Mutasi kurang sebesar Rp16.407.144.738,02 yang terdiri dari:
 - a. Persediaan akhir tahun 2024 pada 14 (empat belas) SKPD senilai Rp9.311.160.053,02.
 - b. Pengeluaran Kas berupa pembayaran Utang Belanja tahun sebelumnya pada RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp5.802.607.185,00.
 - c. Kesalahan Penganggaran pengadaan Aset Tetap tahun 2024 sebesar Rp1.292.814.500,00 yang terdiri dari:
 - 1) Pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada 10 (sepuluh) SKPD senilai Rp1.274.183.300,00;
 - 2) Pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang dan Jasa BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp8.149.900,00; dan
 - 3) Pengadaan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Barang dan Jasa BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp10.481.300,00.
 - d. Koreksi pencatatan saldo Persediaan Obat tahun sebelumnya pada RSUD Kol. Abundjani Bangko senilai Rp563.000,00.

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

V.4.2.1.c Beban Jasa

Tahun 2024
Rp171.595.914.088,98

Tahun 2023
Rp164.424.070.288,08

Beban Jasa merupakan saldo Beban Jasa periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp171.595.914.088,98. Pada tahun 2023, realisasi Beban Jasa sebesar Rp164.424.070.288,08, sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat peningkatan nilai sebesar Rp7.171.843.800,90 atau 4,36%.

Beban Jasa menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel V.4-37 Komponen Beban Jasa menurut Jenis pada Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Beban Jasa Kantor	141.861.735.012,36	142.180.080.904,38	(318.345.892,02)	(0,22)
2.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	10.542.640.656,95	10.429.285.330,70	113.355.326,25	1,09
3.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.824.267.302,00	1.785.716.247,00	38.551.055,00	2,16
4.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.555.723.736,67	1.475.350.000,00	80.373.736,67	5,45
5.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	37.000.000,00	80.000.000,00	(43.000.000,00)	(53,75)
6.	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	180.568.511,00	31.360.200,00	149.208.311,00	475,79
7.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3.137.470.319,00	316.291.340,00	2.821.178.979,00	891,96
8.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.959.160.450,00	2.762.201.691,00	1.196.958.759,00	43,33
9.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	151.550.000,00	205.745.000,00	(54.195.000,00)	(26,34)
10.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.320.743.691,00	3.399.832.975,00	(2.079.089.284,00)	(61,15)
11.	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.468.000,00	0,00	3.468.000,00	-
12.	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.494.345.500,00	298.150.000,00	6.196.195.500,00	2.078,21
13.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	527.240.910,00	1.460.056.600,00	(932.815.690,00)	(63,89)
Jumlah		171.595.914.088,98	164.424.070.288,08	7.171.843.800,90	4,36

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Nilai Beban Jasa sebesar Rp171.595.914.088,98 berbeda dengan Belanja Jasa sebesar Rp132.903.611.624,96. Hal ini disebabkan karena adanya transaksi akrual yang berpengaruh terhadap Beban Jasa berupa mutasi transaksi tahun berjalan atas Beban Dibayar Dimuka, Utang Belanja Jasa, Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dan Belanja Jasa yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.4-38 Penjelasan Perbedaan Nilai Beban Jasa dan Belanja Jasa Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024

(dalam rupiah)

Belanja Jasa	132.903.611.624,96
Mutasi Tambah:	45.855.303.484,75
Penambahan Utang Belanja yang diakui tahun 2024	6.800.171.106,00
Beban Dibayar Dimuka tahun 2023 yang jatuh tempo tahun 2024	209.540.746,75
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BLUD	20.950.106.074,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOS	17.533.646.358,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOP PAUD	88.834.700,00



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOP Kesetaraan	94.330.000,00
Reklasifikasi dari Belanja Hibah BOP PAUD	78.734.500,00
Reklasifikasi dari Belanja Hibah BOP Kesetaraan	85.140.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tidak Berwujud	14.800.000,00
Mutasi Kurang:	7.163.001.020,73
Pengeluaran kas atas Utang Belanja tahun sebelumnya	2.193.681.106,60
Beban Dibayar Dimuka tahun 2024	176.667.199,13
Realisasi Belanja yang diatribusi sebagai Aset Tetap	1.600.792.050,00
- Aset Tetap Gedung dan Bangunan	320.035.200,00
- Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.280.756.850,00
Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain	3.191.860.665,00
Jumlah Mutasi:	38.692.302.464,02
Beban Jasa	171.595.914.088,98

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Mutasi tambah dan mutasi kurang sebagaimana tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah sebesar Rp45.855.303.484,75 yang terdiri dari:
 - a. Penambahan Utang Belanja Jasa tahun 2024 sebesar Rp6.800.171.106,00 dengan rincian:
 - 1) Utang Belanja Jasa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp401.062.020,00;
 - 2) Utang Belanja Jasa pada RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp6.381.615.246,00; dan
 - 3) Utang Belanja Jasa pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp17.493.840,00.
 - b. Beban Dibayar Dimuka yang jatuh tempo tahun 2024 sebesar Rp209.540.746,75 dengan rincian:
 - 1) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp18.216.000,00;
 - 2) Asuransi Barang Milik Daerah pada 7 (tujuh) SKPD sebesar Rp185.074.746,75; dan
 - 3) Sewa Rumah Kelahiran (RTK) pada Dinas Kesehatan sebesar Rp6.250.000,00.
 - c. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BLUD pada RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp20.950.106.074,00.
 - d. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp7.533.646.358,00.
 - e. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp88.834.700,00.
 - f. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOP Kesetaraan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp94.330.000,00.
 - g. Reklasifikasi dari Belanja Hibah BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp78.734.500,00.
 - h. Reklasifikasi dari Belanja Hibah BOP Kesetaraan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp85.140.000,00.
 - i. Reklasifikasi dari Aset Tidak Berwujud pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp14.800.000,00 berupa lisensi Buku Digital.
2. Mutasi kurang sebesar Rp7.163.001.020,73 yang terdiri dari:
 - a. Pengeluaran Kas berupa pembayaran Utang Belanja tahun sebelumnya sebesar Rp2.193.681.106,60 dengan rincian:
 - 1) Pembayaran Utang Belanja Jasa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp145.338.895,60; dan
 - 2) Utang Belanja Jasa pada RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp2.048.342.211,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- b. Penambahan Beban Dibayar Dimuka tahun 2024 sebesar Rp176.667.199,13 dengan rincian:
- 1) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN pada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp15.485.000,00;
 - 2) Asuransi Barang Milik Daerah pada 5 (lima) SKPD sebesar Rp152.848.865,80; dan
 - 3) Sewa Rumah Kelahiran (RTK) pada Dinas Kesehatan sebesar Rp8.333.333,33.
- c. Realisasi Belanja tahun 2024 yang diatribusi sebagai Aset Tetap sebesar Rp1.600.792.050,00 yang terdiri dari:
- 1) Belanja Jasa yang diatribusi sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga senilai Rp320.035.200,00 berupa Jasa Konsultansi Perencanaan; dan
 - 2) Belanja Jasa yang diatribusi sebagai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga senilai Rp1.280.756.850,00 berupa Jasa Konsultan Perencanaan.
- d. Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.191.860.665,00 berupa Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan.

V.4.2.1.d Beban Pemeliharaan

Tahun 2024
Rp12.819.542.746,00

Tahun 2023
Rp9.409.464.152,01

Beban Pemeliharaan merupakan saldo Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp12.819.542.746,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, di mana Beban Pemeliharaan sebesar Rp9.409.464.152,01, sehingga terdapat peningkatan nilai sebesar Rp3.410.078.593,99 atau 36,24%.

Tabel V.4-39 Beban Pemeliharaan menurut Jenis pada Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.771.920.337,00	6.956.116.621,00	815.803.716,00	11,73
2.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.416.683.218,00	1.064.310.995,00	1.352.372.223,00	127,07
3.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.337.852.636,00	1.013.664.285,01	1.324.188.350,99	130,63
4.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	145.383.065,00	375.372.251,00	(229.989.186,00)	(61,27)
5.	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	147.703.490,00	-	147.703.490,00	-
Jumlah		12.819.542.746,00	9.409.464.152,01	3.410.078.593,99	36,24

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Nilai Beban Pemeliharaan sebesar Rp12.819.542.746,00 berbeda dengan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp11.963.350.398,00. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.4-40 Penjelasan Perbedaan Nilai Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024

(dalam rupiah)

Belanja Pemeliharaan	11.963.350.398,00
Mutasi Tambah:	2.865.222.748,00
Penambahan Utang Belanja yang diakui tahun 2024	63.825.722,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BLUD	953.980.589,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOS	520.723.400,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOP PAUD	3.500.000,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOP Kesetaraan	1.600.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Reklasifikasi dari Belanja Hibah BOP PAUD	6.530.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.315.063.037,00
Mutasi Kurang:	2.009.030.400,00
Realisasi Belanja yang diatribusi sebagai Aset Tetap	2.009.030.400,00
- Aset Tetap Peralatan dan Mesin	396.794.400,00
- Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.612.236.000,00
Jumlah Mutasi:	856.192.348,00
Beban Pemeliharaan	12.819.542.746,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Mutasi tambah dan mutasi kurang sebagaimana tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah sebesar Rp2.865.222.748,00 yang terdiri dari:
 - a. Penambahan Utang Belanja Pemeliharaan tahun 2024 pada RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp63.825.722,00.
 - b. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BLUD pada RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp953.980.589,00.
 - c. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp520.723.400,00.
 - d. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.500.000,00.
 - e. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOP Kesetaraan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.600.000,00.
 - f. Reklasifikasi dari Belanja Hibah BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp6.530.000,00.
 - g. Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.315.063.037,00 berupa kegiatan swakelola pekerjaan pemeliharaan titik tertentu karena tidak sesuai dengan kategori aset tetap.
2. Mutasi kurang sebesar Rp2.009.030.400,00 berupa realisasi Belanja tahun 2024 yang diatribusi sebagai Aset Tetap yang terdiri dari:
 - a. Belanja Pemeliharaan yang diatribusi sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan senilai Rp396.794.400,00 berupa pemeliharaan kendaraan pemadam kebakaran; dan
 - b. Belanja Pemeliharaan yang diatribusi sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada 3 (tiga) SKPD senilai Rp1.612.236.000,00.

V.4.2.1.e Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp71.402.409.322,00	Rp62.566.418.856,00

Beban Perjalanan Dinas merupakan saldo Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp71.402.409.322,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, di mana Beban Perjalanan Dinas berjumlah sebesar Rp62.566.418.856,00, maka terdapat peningkatan sebesar Rp8.835.990.466,00 atau 14,12%.

Nilai Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp71.402.409.322,00 berbeda dengan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp67.740.191.733,00. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.4-41 Penjelasan Perbedaan Nilai Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024

(dalam rupiah)	
Belanja Perjalanan Dinas	67.740.191.733,00
Mutasi Tambah:	3.664.467.589,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BLUD	689.615.389,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOS	2.912.142.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOP PAUD	30.010.000,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOP Kesetaraan	1.800.000,00
Reklasifikasi dari Belanja Hibah BOP PAUD	29.100.000,00
Reklasifikasi dari Belanja Hibah BOP Kesetaraan	1.800.000,00
Mutasi Kurang:	2.250.000,00
Realisasi Belanja yang diatribusi sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.250.000,00
Jumlah Mutasi:	3.662.217.589,00
Beban Perjalanan Dinas	71.402.409.322,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Mutasi tambah dan mutasi kurang sebagaimana tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

- Mutasi tambah sebesar Rp3.664.467.589,00 yang terdiri dari:
 - Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BLUD pada RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp689.615.389,00.
 - Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.912.142.200,00.
 - Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp30.010.000,00.
 - Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOP Kesetaraan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.800.000,00.
 - Reklasifikasi dari Belanja Hibah BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp29.100.000,00.
 - Reklasifikasi dari Belanja Hibah BOP Kesetaraan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.800.000,00.
- Mutasi kurang sebesar Rp2.250.000,00 berupa realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2024 yang diatribusi sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Lingkungan Hidup.

V.4.2.1.f Beban Hibah

Tahun 2024
Rp67.910.443.090,50

Tahun 2023
Rp83.841.645.218,97

Beban Hibah merupakan Beban Hibah periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp67.910.443.090,50. Dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp83.841.645.218,97, nilai Beban Hibah berkurang sebesar Rp15.931.202.128,47 atau (19,00%). Realisasi Beban Hibah dikelola oleh BPKAD selaku SKPKD dan SKPD yang memiliki anggaran belanja yang diserahkan kepada Masyarakat.

Nilai Beban Hibah sebesar Rp67.910.443.090,50 berbeda dengan Belanja Hibah sebesar Rp67.876.911.370,00. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.4-42 Penjelasan Perbedaan Nilai Beban Hibah dan Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024

(dalam rupiah)	
Belanja Hibah	67.876.911.370,00
Mutasi Tambah:	495.131.720,50
Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	411.350.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	83.781.720,50
Mutasi Kurang:	461.600.000,00
Reklasifikasi Belanja Hibah BOSP ke Beban Operasional BOP PAUD Berkenaan	231.237.500,00
Reklasifikasi Belanja Hibah BOSP ke Beban Operasional BOP Kesetaraan Berkenaan	185.900.000,00
Kesalahan Penganggaran Belanja Hibah BOSP	44.462.500,00
Jumlah Mutasi:	33.531.720,50
Beban Hibah	67.910.443.090,50

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Mutasi tambah dan mutasi kurang sebagaimana tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

1. Mutasi tambah sebesar Rp495.131.720,50 yang terdiri dari:
 - a. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Hibah kepada Masyarakat/Entitas Lainnya pada Sekretariat Daerah dan Kantor Camat Tabir senilai Rp411.350.000,00.
 - b. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa Hibah kepada Masyarakat/Entitas Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp83.781.720,50.
2. Mutasi kurang sebesar Rp461.600.000,00 yang terdiri dari:
 - a. Reklasifikasi ke Beban Operasional BOP PAUD berkenaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp231.237.500,00.
 - b. Reklasifikasi ke Beban Operasional BOP Kesenian berkenaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp185.900.000,00.
 - c. Kesalahan penganggaran Belanja Hibah BOSP yang seharusnya Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp44.462.500,00 berupa Alat Permainan Edukasi (APE).

V.4.2.1.g Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2024
Rp3.032.774.621,07

Tahun 2023
Rp2.599.111.782,29

Beban Penyisihan Piutang merupakan Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp3.032.774.621,07. Jika dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 sebesar Rp2.599.111.782,29 terdapat peningkatan Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp433.662.838,78 atau 16,69%.

Rincian Beban Penyisihan Piutang tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel V.4-43 Komponen Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	2.079.328.702,44	2.119.304.615,94	(39.975.913,49)	(1,89)
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	953.389.760,71	356.466.762,00	596.922.998,71	167,46
3.	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	56.157,92	123.340.404,35	(123.284.246,43)	(99,95)
Jumlah		3.032.774.621,07	2.599.111.782,29	433.662.838,79	16,69

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.4.2.1.h Beban Lain-Lain

Tahun 2024
Rp0,00

Tahun 2023
Rp2.570.870.456,47

Beban Lain-Lain tahun 2024 sebesar nihil karena pada tahun 2024 dilakukan reklasifikasi ke Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi dan Defisit Non Operasional. Dibandingkan dengan nilai Beban Lain-Lain tahun 2023 sebesar Rp2.570.870.456,47, terdapat penurunan sebesar 100,00%.

V.4.2.1.i Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2024
Rp186.168.685.699,25

Tahun 2023
Rp188.540.968.764,09

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 sebesar Rp186.168.685.699,25 adalah Beban Penyusutan dan Amortisasi yang berasal dari Belanja Modal perolehan sebelum tahun 2024 dan Belanja Modal tahun 2024. Penyusutan dilakukan pada Aset Tetap, sedangkan Amortisasi dilakukan untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 sebagai berikut:

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel V.4-44 Komponen Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	44.322.106.781,89	45.561.176.826,20	(1.239.070.044,31)	(2,72)
2.	Beban Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	21.600.216.411,40	20.635.028.058,14	965.188.353,26	4,68
3.	Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	119.692.135.061,03	120.751.698.740,63	(1.059.563.679,60)	(0,88)
4.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	161.240.397,24	134.750.263,72	26.490.133,52	19,66
5.	Beban Penyusutan Properti Investasi	7.688.728,00	333.552.721,24	(325.863.993,24)	(97,69)
6.	Beban Penyusutan Aset Lainnya	200.222.999,69	190.030.161,76	10.192.837,93	5,36
7.	Beban Amortisasi	185.075.320,00	934.731.992,40	(749.656.672,40)	(80,20)
Jumlah		186.168.685.699,25	188.540.968.764,09	(2.372.283.064,84)	(1,26)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp188.540.968.764,09 terdapat penurunan nilai sebesar Rp2.372.283.064,84 atau (1,26%).

V.4.2.2 Beban Transfer

Tahun 2024
Rp83.418.022.350,00

Tahun 2023
Rp97.817.811.910,00

Beban Transfer merupakan Beban Transfer periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp83.418.022.350,00. Jika dibandingkan dengan nilai Beban Transfer tahun 2023 sebesar Rp97.817.811.910,00, terdapat penurunan Beban Transfer sebesar Rp14.399.789.560,00 atau (14,72%). Rincian Beban Transfer sebagai berikut:

Tabel V.4-45 Komponen Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	3.118.300.000,00	2.911.090.000,00	207.210.000,00	7,12
2.	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi	793.048.550,00	532.298.110,00	260.750.440,00	48,99
3.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	79.506.673.800,00	73.874.423.800,00	5.632.250.000,00	7,62
4.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	20.500.000.000,00	(14.350.000.000,00)	(70,00)
Jumlah		83.418.022.350,00	97.817.811.910,00	(8.249.789.560,00)	(8,43)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Nilai Beban Transfer sebesar Rp83.418.022.350,00 berbeda dengan Belanja Transfer sebesar Rp264.500.360.350,00. Perbedaan tersebut merupakan Pengeluaran Kas berupa Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi kepada Pemerintah Desa Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Transfer Dana Desa TA 2024 dari Pemerintah Pusat sebesar Rp174.932.338.000,00; dan
2. Transfer Bantuan Keuangan Bersifat Khusus TA 2024 dari Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp6.150.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

V.4.3 Surplus/Defisit Operasional

Tahun 2024
Rp115.786.734.642,47

Tahun 2023
Rp58.253.148.572,88

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi sebelum memperhitungkan Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Surplus/Defisit Operasional selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah surplus sebesar Rp115.786.734.642,47. Jika dibandingkan dengan Surplus/Defisit Operasional tahun 2023 sebesar Rp58.253.148.572,88, terdapat peningkatan sebesar Rp57.533.586.069,59 atau 98,76%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4-46 Surplus/Defisit dari Operasi Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Pendapatan-LO	1.406.480.718.847,41	1.253.862.942.820,18	152.617.776.027,23	12,17
2.	Beban	1.290.693.984.204,94	1.195.609.794.247,30	95.084.189.957,64	7,95
Jumlah		115.786.734.642,47	58.253.148.572,88	57.533.586.069,59	98,76

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.4.4 Surplus/Defisit Non Operasional

Tahun 2024
(Rp1.469.602.001,07)

Tahun 2023
(Rp588.088.420,00)

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Sedangkan Surplus/Defisit Non Operasional adalah selisih antara Surplus dan Defisit kegiatan Non Operasional. Untuk tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Merangin terdapat Defisit Non Operasional sebesar (Rp1.469.602.001,07). Jika dibandingkan dengan Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional tahun 2023 sebesar (Rp588.088.420,00), terdapat peningkatan defisit sebesar Rp881.513.581,07 atau 149,89%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4-47 Surplus/Defisit Non Operasional Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO	307.802.250,00	445.526.000,00	(137.723.750,00)	(30,91)
2.	Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO	(109.245.566,90)	(265.917.520,00)	156.671.953,10	(58,92)
3.	Defisit Non Operasional-LO	(1.668.158.684,17)	(767.696.900,00)	(900.461.784,17)	117,29
Jumlah		(1.469.602.001,07)	(588.088.420,00)	(881.513.581,07)	149,89

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Uraian tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Surplus penjualan Aset Non Lancar sebesar Rp307.802.250,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surplus Penjualan Alat Angkutan Roda 4 sebesar Rp232.561.000,00. Penerimaan Kas atas penjualan tersebut setelah pemotongan biaya administrasi bank sebesar Rp2.500,00 adalah sebesar Rp232.558.500,00, sedangkan nilai setelah akumulasi penyusutan yang tercatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar nihil;
 - b. Surplus Penjualan Alat Angkutan Roda 2 sebesar Rp56.532.000,00. Penerimaan Kas atas penjualan tersebut adalah sebesar Rp56.532.000,00, sedangkan nilai setelah akumulasi penyusutan yang tercatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar nihil; dan



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- c. Surplus Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp18.709.250,00. Penerimaan Kas atas penjualan tersebut adalah sebesar Rp19.305.000,00, sedangkan nilai setelah akumulasi penyusutan yang tercatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp595.750,00.
2. Defisit penjualan Aset Non Lancar sebesar (Rp109.245.566,90) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Defisit Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar (Rp10.117.566,90). Penerimaan Kas atas penjualan tersebut adalah sebesar Rp4.997.000,00, sedangkan nilai setelah akumulasi penyusutan yang tercatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp15.114.566,90; dan
 - b. Defisit penjualan 6 ekor sapi Brahman Cross dan 1 ekor sapi Bali pada Dinas Peternakan dan Perkebunan sebesar (Rp99.128.000,00). Penerimaan Kas atas penjualan tersebut sebesar Rp38.430.000,00 sedangkan nilai yang tercatat sebagai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp137.558.000,00.
3. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar (Rp1.664.096.654,23) dengan rincian:
 - a. Penurunan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Merangin karena penilaian investasi atau penyertaan modal berdasarkan metode ekuitas sebesar (Rp1.668.156.184,17); dan
 - b. Pemotongan langsung atas pendapatan berupa biaya transfer atas penerimaan hasil pelelangan BMD yang dipotong langsung oleh Bank sebesar (Rp2.500,00).

V.4.5 Pos Luar Biasa

Tahun 2024
(Rp52.802.850,00)

Tahun 2023
(Rp5.511.000,00)

Pos Luar Biasa merupakan selisih antara Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa. Pada tahun 2024 saldo Pos Luar Biasa sebesar (Rp52.802.850,00). Sedangkan tahun 2023, nilai Pos Luar Biasa adalah (Rp5.511.000,00). Sehingga terdapat peningkatan nilai Pos Luar Biasa sebesar Rp47.291.850,00) atau 858,14%.

V.4.5.1 Pendapatan Luar Biasa

Tahun 2024
Rp0,00

Tahun 2023
Rp0,00

Realisasi Pendapatan Luar Biasa tahun 2024 adalah nihil.

V.4.5.2 Beban Luar Biasa

Tahun 2024
Rp52.802.850,00

Tahun 2023
Rp5.511.000,00

Jumlah Beban Luar Biasa tahun 2024 adalah Rp52.802.850,00 yang merupakan kebutuhan dana dalam rangka penanggulangan bencana banjir dan longsor di Desa Pulau Bayur Kec. Pamenang Selatan sebagaimana Keputusan Bupati Merangin Nomor 183/BPKAD/2024 tentang Penggunaan Belanja Tidak terduga pada BPBD dalam Penanganan Bencana Alam di Wilayah Kabupaten Merangin TA 2024.

Jika dibandingkan dengan Beban Luar Biasa tahun 2023 sebesar Rp5.511.000,00, terdapat peningkatan beban sebesar Rp47.291.850,00 atau 858,14%.

V.4.6 Surplus/Defisit-LO

Tahun 2024
Rp114.264.329.791,40

Tahun 2023
Rp57.659.549.152,88

Surplus/Defisit-LO merupakan jumlah antara Surplus/Defisit Operasional, Surplus/Defisit Non Operasional dan Pos Luar Biasa selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Untuk tahun 2024, Surplus-LO sebesar Rp114.264.329.791,40, terdapat peningkatan sebesar Rp56.604.780.638,52 atau 98,17% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp57.659.549.152,88.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

V.5 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas (LAK) adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. LAK disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening Kas Daerah yang dikelola oleh BUD dalam hal ini adalah Kuasa BUD selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan dan Transitoris.

Saldo awal kas daerah ditambah dengan arus kas bersih selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD/Satuan Pendidikan Negeri/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/Badan Layanan Umum Daerah. Sisa kas di Bendahara baik Bendahara Penerimaan maupun Pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari arus keluar kas di BUD sesuai dengan SP2D, penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD namun disahkan oleh BUD dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD.

Arus Kas Pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

V.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp197.770.168.426,55	Rp239.378.051.962,16

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Merangin dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus kas bersih aktivitas operasi tahun 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel V.5-1 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)					
No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Arus Masuk Kas	1.458.916.001.165,51	1.400.661.876.718,79	58.254.124.446,72	4,16
2.	Arus Keluar Kas	1.261.145.832.738,96	1.161.283.824.756,63	99.862.007.982,33	8,60
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		197.770.168.426,55	239.378.051.962,16	(41.607.883.535,61)	(17,38)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Berdasarkan Tabel V.5-152, Arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2024 adalah sebesar Rp197.770.168.426,55, berkurang sebesar Rp41.607.883.535,61 atau (17,38%) dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp239.378.051.962,16. Komponen penyusun Arus Kas dari Aktivitas Operasi tahun 2024 telah termasuk penerimaan yang tidak melalui RKUD namun disahkan oleh BUD. Realisasi arus kas aktivitas operasi tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

V.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Tahun 2024
Rp1.458.916.001.165,51

Tahun 2023
Rp1.400.661.876.718,79

Arus masuk kas yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Merangin dari aktivitas operasi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.458.916.001.165,51, jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1.400.661.876.718,79, terdapat peningkatan sebesar Rp58.254.124.446,72 atau sebesar 4,16%.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi berasal dari realisasi PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah, yang digunakan untuk membiayai operasional Pemerintah daerah yang terdiri dari:

Tabel V.5-2 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)					
No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Penerimaan Pajak Daerah	32.240.409.337,40	30.753.014.946,82	1.487.394.390,58	4,84
2.	Penerimaan Retribusi Daerah	23.517.013.977,67	5.256.138.946,00	18.260.875.031,67	347,42
3.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.488.236.682,97	7.268.658.153,62	219.578.529,35	3,02
4.	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	31.233.277.147,47	64.016.441.728,35	(32.783.164.580,88)	(51,21)
5.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	13.519.605.250,00	13.850.739.266,00	(331.134.016,00)	(2,39)
6.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	95.321.243.000,00	63.271.098.530,00	32.050.144.470,00	50,66
7.	Penerimaan Dana Alokasi Umum	732.006.415.432,00	686.823.402.178,00	45.183.013.254,00	6,58
8.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik	86.635.359.106,00	71.494.372.292,00	15.140.986.814,00	21,18
9.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik	164.829.221.512,00	164.494.357.522,00	334.863.990,00	0,20
10.	Penerimaan Dana Desa	174.932.338.000,00	175.219.610.000,00	(287.272.000,00)	(0,16%)
11.	Penerimaan Insentif Fiskal	12.829.287.000,00	10.820.277.000,00	2.009.010.000,00	(18,57%)
12.	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	64.272.428.617,00	81.611.766.156,00	(17.339.337.539,00)	(21,25)
13.	Penerimaan Bantuan Keuangan	7.650.000.000,00	22.700.000.000,00	(15.050.000.000,00)	(66,30)
14.	Penerimaan Hibah	0,00	3.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)
15.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya	0,00	82.000.000,00	(82.000.000,00)	(100,00)
16.	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.441.166.103,00	0,00	12.441.166.103,00	-
Jumlah Arus Masuk Kas		1.458.916.001.165,51	1.400.661.876.718,79	58.254.124.446,72	4,16

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Penerimaan daerah yang tidak melalui RKUD namun disahkan oleh BUD dan termasuk dalam Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi tahun 2024 adalah:

1. Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp17.612.909.346,87 yang merupakan Pendapatan BLUD periode periode Agustus s.d. Desember 2024 hasil reklasifikasi dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

2. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah senilai Rp24.576.845.518,73 yang merupakan Pendapatan BLUD periode Januari s.d. Juli 2024.
3. Penerimaan yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp254.139.585.001,00, berupa:
 - a. Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Dana BOSP dan BOK sebesar Rp79.207.247.001,00 yang terdiri dari:
 - i. Dana BOS sebesar Rp53.337.512.604,00;
 - ii. Dana BOP PAUD sebesar Rp6.436.671.000,00;
 - iii. Dana BOP Kesetaraan sebesar Rp2.768.955.500,00; dan
 - iv. Dana BOK Puskesmas sebesar Rp16.664.107.897,00.
 - b. Penerimaan Dana Desa tahun 2024 sebesar Rp174.932.338.000,00.
4. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp12.441.166.103,00 berupa Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Disamping itu, di tahun 2024 terdapat penerimaan daerah yang tidak melalui RKUD namun disahkan oleh BUD dan tidak termasuk dalam Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi tahun 2024 berupa pengembalian BOP PAUD Swasta yang tutup di tahun 2024 dan harus disetorkan ke RKUN sebesar Rp8.100.000,00 dengan rincian:

1. TPA Bintang Ceria sebesar Rp3.000.000,00;
2. SPS Asparagus sebesar Rp3.900.000,00;
3. SPS Soplir sebesar Rp900.000,00; dan
4. KB Mawar sebesar Rp300.000,00.

Penyetoran ke RKUD dilakukan pada tanggal 30 Desember 2024, hingga periode 31 Desember 2024, belum disetorkan ke RKUN dan dicatat sebagai Utang Jangka Pendek Lainnya pada pos Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOP PAUD.

V.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Tahun 2024
Rp1.261.145.832.738,96

Tahun 2023
Rp1.161.283.824.756,63

Arus keluar kas yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Merangin untuk aktivitas operasi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.261.145.832.738,96. Dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1.161.283.824.756,63, arus keluar kas bertambah sebesar Rp99.862.007.982,33 atau sebesar 8,60%.

Arus Kas keluar dari Aktivitas Operasi merupakan pengeluaran kas guna membiayai operasional Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

Tabel V.5-3 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)					
No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Pembayaran Belanja Pegawai	591.839.454.626,00	502.287.898.830,00	89.551.555.796,00	17,83
2.	Pembayaran Belanja Barang	336.876.303.542,96	320.864.442.422,63	16.011.861.120,33	4,99
3.	Pembayaran Belanja Bunga	0,00	1.714.899.127,00	(1.714.899.127,00)	(100,00)
4.	Pembayaran Belanja Hibah	67.876.911.370,00	63.373.651.467,00	4.503.259.903,00	7,11
5.	Pembayaran Belanja Tidak Terduga	52.802.850,00	5.511.000,00	47.291.850,00	858,14
6.	Pembayaran Transfer Bagi Hasil Pajak	3.118.300.000,00	2.911.090.000,00	207.210.000,00	7,12
7.	Pembayaran Transfer Bagi Hasil Retribusi	793.048.550,00	532.298.110,00	260.750.440,00	48,99
8.	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan	260.589.011.800,00	269.594.033.800,00	(9.005.022.000,00)	(3,34)
Jumlah Arus Keluar Kas		1.261.145.832.738,96	1.161.283.824.756,63	99.862.007.982,33	8,60

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD namun disahkan oleh BUD dan termasuk dalam Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi adalah:

1. Belanja BLUD pada RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp42.042.376.023,00, yang terdiri dari Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp7.013.553.000,00 dan Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp35.028.823.023,00;
2. Belanja Dana JKN pada FKTP sebesar Rp12.103.236.241,96, yang terdiri dari Belanja Pegawai JKN sebesar Rp977.951.000,00 dan Belanja Barang dan Jasa JKN sebesar Rp11.125.285.241,96;
3. Belanja Dana BOK pada FKTP sebesar Rp16.760.332.568,00 berupa Belanja Barang dan Jasa Dana BOK;
4. Belanja Dana BOS SD sebesar Rp33.085.142.123,00 yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp31.050.163.123,00 dan Belanja Hibah sebesar Rp2.034.979.000,00;
5. Belanja Dana BOS SMP sebesar Rp10.210.188.894,00 yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp8.987.102.657,00 dan Belanja Hibah sebesar Rp1.223.086.237,00;
6. Belanja Dana BOP PAUD sebesar Rp6.412.823.000,00 yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp277.124.000,00 dan Belanja Hibah sebesar Rp6.135.699.000,00; dan
7. Belanja Dana BOP Kesetaraan sebesar Rp2.735.355.500,00 yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp176.000.000,00 dan Belanja Hibah sebesar Rp2.559.355.500,00.
8. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa berupa Dana Desa sebesar Rp174.932.338.000,00.

V.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Tahun 2024
(Rp195.275.513.032,00)

Tahun 2023
(Rp181.542.607.947,30)

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta Investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Merangin kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas ini sepanjang tahun 2024 adalah sebesar (Rp195.275.513.032,00). Dibandingkan dengan arus kas bersih dari Aktivitas Investasi tahun 2023 sebesar (Rp181.542.607.947,30), terdapat penurunan arus kas sebesar Rp13.732.905.084,70 atau (7,56%). Komponen penyusun Arus Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2024 berbeda dengan tahun 2022, dimana di tahun 2024 telah termasuk pengeluaran yang tidak melalui RKUD namun disahkan oleh BUD. Arus kas bersih aktivitas Investasi tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel V.5-4 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)					
No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Arus Masuk Kas	351.822.500,00	682.229.200,00	(330.406.700,00)	(48,43)
2.	Arus Keluar Kas	195.627.335.532,00	182.224.837.147,30	13.402.498.384,70	7,35
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(195.275.513.032,00)	(181.542.607.947,30)	(13.732.905.084,70)	(7,56)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Realisasi arus kas aktivitas Investasi tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

V.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Tahun 2024
Rp351.822.500,00

Tahun 2023
Rp682.229.200,00

Arus masuk kas dari Aktivitas Investasi adalah arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan penjualan aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Merangin. Selama tahun 2024 terdapat transaksi masuk dari Aktivitas Investasi berupa Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan senilai Rp351.822.500,00 yang tercatat sebagai komponen Penerimaan Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dibandingkan dengan arus kas masuk dari Aktivitas Investasi tahun 2023 sebesar Rp682.229.200,00, terdapat penurunan arus kas sebesar Rp330.406.700,00 atau (48,43%).

Arus masuk kas tersebut bersumber dari Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin dan Aset Lainnya berupa penerimaan yang bersumber dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan senilai Rp351.822.500,00, yang terdiri dari:

- Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan berupa kendaraan dan peralatan kantor yang dilelang di tahun 2024 sebesar Rp313.392.500,00 yang terdiri dari:
 - Hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp24.302.000,00;
 - Hasil penjualan alat angkutan darat bermotor kendaraan dinas bermotor perorangan roda 4 senilai Rp232.558.500,00; dan
 - Hasil penjualan alat angkutan darat bermotor kendaraan dinas bermotor perorangan roda 2 senilai Rp56.532.000,00.
- Penjualan bibit ternak sapi pada Dinas Peternakan dan Perkebunan senilai Rp38.430.000,00.

V.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Tahun 2024
Rp195.627.335.532,00

Tahun 2023
Rp182.224.837.147,30

Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi merupakan pengeluaran kas Belanja Modal dalam rangka perolehan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam bentuk pembayaran belanja modal yang meliputi Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya serta Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi tahun 2024 sebesar Rp195.627.335.532,00, bertambah sebesar Rp13.402.498.384,70 atau 7,35% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp182.224.837.147,30.

Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Tabel V.5-5 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)					
No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Belanja Modal Tanah	0,00	34.410.489,00	(34.410.489,00)	(100,00)
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.409.708.584,00	30.982.388.967,30	12.427.319.616,70	40,11
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62.655.071.883,00	79.711.057.271,00	(17.055.985.388,00)	(21,40)
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	83.315.634.140,00	61.398.124.429,00	21.917.509.711,00	35,70
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.837.445.925,00	4.459.950.991,00	(622.505.066,00)	(13,96)
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	409.475.000,00	138.905.000,00	270.570.000,00	194,79
7.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	5.500.000.000,00	(3.500.000.000,00)	(63,64)
Jumlah Arus Keluar Kas		195.627.335.532,00	182.224.837.147,30	13.402.498.384,70	7,35

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi tahun 2024 bersumber dari realisasi Belanja Modal tahun berjalan dan termasuk belanja modal yang tidak melalui RKUD namun disahkan oleh BUD sebagai berikut :

1. Belanja Modal BLUD pada RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp403.463.848,00 yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp379.511.048,00; dan
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp23.952.800,00.
2. Belanja Modal JKN pada FKTP sebesar Rp552.048.500,00 berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
3. Belanja Modal Dana BOS SD sebesar Rp7.877.486.225,00 berupa:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.717.790.150,00; dan
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.159.696.075,00.
4. Belanja Modal Dana BOS SMP sebesar Rp2.031.179.151,00 berupa:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.388.329.301,00; dan
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp642.849.850,00.
5. Belanja Modal BOP PAUD sebesar Rp23.848.000,00 berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
6. Belanja Modal Kesenjangan sebesar Rp33.600.000,00 berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

V.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tahun 2024
Rp0,00

Tahun 2023
(Rp60.894.800.911,00)

Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun 2024 adalah nihil. Jika dibandingkan tahun 2023 sebesar (Rp60.894.800.911,00), terdapat penurunan arus kas sebesar Rp60.894.800.911,00 atau (100,00%).

V.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tahun 2024
Rp0,00

Tahun 2023
Rp0,00

Arus masuk kas dari Aktivitas Pendanaan tahun 2024 dan 2023 adalah Nihil.

V.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tahun 2024
Rp0,00

Tahun 2023
Rp60.894.800.911,00

Arus keluar kas dari Aktivitas Pendanaan tahun 2024 adalah nihil, berkurang sebesar Rp60.894.800.911,00 atau (100,00%) dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp60.894.800.911,00.

V.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Tahun 2024
Rp8.052.055,00

Tahun 2023
Rp341.640,00

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Merangin. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2024 adalah Rp8.052.055,00, bertambah sebesar Rp7.710.415,00 atau 2.256,88% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp341.640,00. Rincian arus kas ini terdiri dari:

Tabel V.5-6 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Arus Masuk Kas	110.325.271.616,59	82.456.739.895,70	27.868.531.720,89	33,80
2.	Arus Keluar Kas	110.317.219.561,59	82.456.398.255,70	27.860.821.305,89	33,79
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		8.052.055,00	341.640,00	7.710.415,00	2.256,88

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Realisasi arus kas aktivitas Transitoris tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

V.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Tahun 2024
Rp110.325.271.616,59

Tahun 2023
Rp82.456.739.895,70

Arus masuk kas dari Aktivitas Transitoris bersumber dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Transfer dari SKPD. PFK adalah penerimaan yang diperoleh melalui pemotongan SP2D-LS yang menurut peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk memungut jumlah tertentu atas pembayaran yang dilakukan oleh BUD atau Kuasa BUD guna disetorkan lebih lanjut kepada pihak yang berhak tanpa memengaruhi anggaran. Sedangkan Transfer dari SKPD merupakan penerimaan atas penyetoran saldo kas tahun sebelumnya dari Bendahara Penerimaan SKPD.

Arus masuk kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2024 sebesar Rp110.325.271.616,59 dan tahun 2023 sebesar Rp82.456.739.895,70 sehingga terdapat peningkatan sebesar Rp27.868.531.720,89 atau 33,80%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.5-7 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	110.317.171.616,59	82.456.739.895,70	27.860.431.720,89	33,79
2.	Transfer dari SKPD	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	-
Jumlah Arus Masuk Kas		110.325.271.616,59	82.456.739.895,70	27.868.531.720,89	33,80

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Penjelasan atas arus masuk kas tersebut adalah:

- Arus masuk kas berupa Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga merupakan penerimaan pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, nilai penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga adalah sebesar Rp110.317.171.616,59 dengan rincian:

- Iuran Wajib Pegawai 8% sebesar Rp21.160.316.791,00;
- Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp17.714.072.587,35;
- Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp1.308.546.865,49;
- Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp372.521.116,37;
- Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp3.016.809.249,00;
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp29.075.280.914,38;



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- g. Zakat, Infaq & Lainnya sebesar Rp7.816.845.146,50;
 - h. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp646.476.708,00;
 - i. Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp1.943.385.176,00;
 - j. Iuran Wajib Pegawai 1% sebesar Rp4.577.147.327,00;
 - k. ASKES 4% sebesar Rp21.175.101.265,00; dan
 - l. Pajak Daerah Makan dan Minum 10% sebesar Rp1.510.668.470,50.
2. Arus masuk kas berupa Transfer dari SKPD sebesar Rp8.100.000,00 yang merupakan Saldo PAUD swasta yang tutup di tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :
- a. TPA Bintang Ceria sebesar Rp3.000.000,00;
 - b. SPS Asparagus sebesar Rp3.900.000,00;
 - c. SPS Sopliir sebesar Rp900.000,00; dan
 - d. KB Mawar sebesar Rp300.000,00.

V.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Tahun 2024
Rp110.317.219.561,59

Tahun 2023
Rp82.456.398.255,70

Arus keluar kas dari Aktivitas Transitoris bersumber dari Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa penyetoran atas pemungutan pajak selama tahun 2024. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2024 sebesar Rp110.317.219.561,59, sedangkan tahun 2023 sebesar Rp82.456.398.255,70, sehingga terdapat peningkatan sebesar Rp27.860.821.305,89 atau 33,79%.

Arus keluar kas tersebut adalah Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga yang merupakan pengeluaran atas potongan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak dengan nilai kumulatif sebesar Rp110.317.219.561,59, dengan rincian:

- a. Iuran Wajib Pegawai 8% sebesar Rp21.160.316.791,00;
- b. Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp17.714.048.587,35;
- c. Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp1.308.546.865,49;
- d. Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp372.715.756,37;
- e. Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp3.016.809.249,00;
- f. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp29.075.158.219,38;
- g. Zakat, Infaq & Lainnya sebesar Rp7.816.845.146,50;
- h. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp646.476.708,00;
- i. Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp1.943.385.176,00;
- j. Iuran Wajib Pegawai 1% sebesar Rp4.577.147.327,00;
- k. ASKES 4% sebesar Rp21.175.101.265,00; dan
- l. Pajak Daerah Makan dan Minum 10% sebesar Rp1.510.668.470,50.

V.5.5. Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode

Tahun 2024
Rp2.505.457.449,55

Tahun 2023
(Rp3.059.015.256,14)

Perubahan/mutasi kas menginformasikan tentang kenaikan/(penurunan) kas dari berbagai aktivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin sepanjang tahun 2024 sebesar Rp2.505.457.449,55, bertambah sebesar Rp5.564.472.705,69 atau 181,90% dibandingkan tahun 2023 sebesar (Rp3.059.015.256,14), dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel V.5-8 Mutasi Kas Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Kenaikan/(Penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi	197.772.918.426,55	239.378.051.962,16	(41.605.133.535,61)	(17,38)
2.	Kenaikan/(Penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi	(195.275.513.032,00)	(181.542.607.947,30)	(13.732.905.084,70)	7,56
3.	Kenaikan/(Penurunan) Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	(60.894.800.911,00)	60.894.800.911,00	(100,00)
4.	Kenaikan/(Penurunan) Kas dari Aktivitas Transitoris	8.052.055,00	341.640,00	7.710.415,00	2.256,88
Kenaikan/(Penurunan) Kas		2.505.457.449,55	(3.059.015.256,14)	5.564.472.705,69	181,90

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.5.6. Saldo Awal Kas

Tahun 2024
Rp79.191.257.060,30

Tahun 2023
Rp82.648.453.046,61

Saldo awal kas tahun 2024 sebesar Rp79.190.915.420,30 yang merupakan saldo akhir kas tahun 2023 termasuk Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran tahun 2023 sebesar Rp341.640,00 berupa pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara/Daerah yang merupakan Utang PFK Dana BOS SD.

Sampai dengan laporan ini disusun, seluruh Utang PFK Dana BOS SD telah disetorkan ke Kas Negara/Daerah sehingga saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Dana BOS bernilai Nihil. Jika dibandingkan dengan saldo awal kas tahun 2023 sebesar Rp82.648.453.046,61, terdapat penurunan saldo awal kas sebesar Rp3.457.195.986,31 atau (4,18%).

V.5.7. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Tahun 2024
Rp0,00

Tahun 2023
(Rp398.180.730,17)

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya tahun 2024 sebesar nihil. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar (Rp398.180.730,17), terdapat penurunan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp398.180.730,17 atau (100,00%).

V.5.8. Saldo Akhir Kas

Tahun 2024
Rp81.693.964.509,85

Tahun 2023
Rp79.191.257.060,30

Saldo akhir kas tahun 2024 di BUD sebesar Rp81.693.964.509,85 merupakan saldo kas yang bersumber dari akumulasi saldo awal kas dan kenaikan/penurunan bersih kas selama periode tahun 2024. Jika dibandingkan dengan saldo akhir kas tahun 2023 sebesar Rp79.191.257.060,30, terdapat peningkatan saldo akhir kas sebesar Rp2.502.707.449,55 atau 3,16%. Rincian Saldo Akhir Kas tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel V.5-9 Komponen Saldo Akhir Kas Kabupaten Merangin Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
	Saldo Akhir Kas	81.693.964.509,85	79.191.257.060,30	2.502.707.449,55	3,16
1.	Saldo Akhir Kas di BUD	76.377.716.309,34	73.428.018.745,81	2.949.697.563,53	4,02
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	14.913.000,00	(14.913.000,00)	(100,00)
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	-
4.	Kas di BLUD	64.373.633,58	320.458.638,98	(256.085.005,40)	(79,91)
5.	Kas di Bendahara BOSP	309.264.500,00	175.748.289,00	133.516.211,00	75,97
6.	Kas di Bendahara FKTP	100.772.939,93	314.876.243,51	(214.103.303,58)	(68,00)
7.	Kas di Bendahara BOK	4.841.543.432,00	4.936.900.503,00	(95.357.071,00)	(1,93)
8.	Kas Lainnya	293.695,00	341.640,00	(47.945,00)	(14,03)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN **LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Atas rincian saldo Akhir Kas sebesar Rp81.693.964.509,85 sebagaimana tercantum pada tabel di atas, jika dibandingkan dengan rincian saldo Kas di Neraca sebesar Rp81.833.552.551,60, terdapat selisih sebesar Rp139.588.041,75 yaitu pada Kas Lainnya. Selisih tersebut merupakan reklasifikasi Investasi Non Permanen ke Kas Lainnya atas saldo KUPEM pada rekening penampungan an. Kabag Ekonomi SETDA Merangin pada PT Bank Jambi Cabang Bangko Nomor Rekening 1000017686 yang merupakan pengembalian Dana Bergulir. Program tersebut telah dihentikan dan saldo KUPEM telah dikembalikan ke RKUD pada tanggal 17 April 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

V.6 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan dari operasional tahun berjalan (Surplus/Defisit-LO) serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Surplus/Defisit-LO pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

V.6.1 Ekuitas Awal

	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp2.501.117.152.106,14	Rp2.410.767.789.915,71
Ekuitas Awal Pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2024 adalah sebesar Rp2.501.117.152.106,14. Nilai ini merupakan saldo akhir Ekuitas tahun 2023 sesuai Neraca <i>Audited</i> . Jika dibandingkan dengan Ekuitas Awal tahun 2023 sebesar Rp2.410.767.789.915,71, Ekuitas Awal tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp90.349.362.190,43 atau sebesar 3,75%. Peningkatan tersebut bersumber dari:		
1. Surplus aktifitas operasional tahun 2023 sebesar Rp57.659.549.152,88; dan		
2. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar selama tahun 2023 sebesar Rp32.689.813.037,55 yang terdiri dari:		
a. Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp1.603.620.552,00; dan		
b. Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp31.086.192.485,55.		

V.6.2 Surplus/(Defisit)-LO

	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp114.264.329.791,40	Rp57.659.549.152,88
Surplus/(Defisit)-LO tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Merangin sebesar Rp114.264.329.791,40 merupakan surplus atas kegiatan operasional dan non operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca dan dihasilkan dari transaksi penutup akun Surplus/Defisit-LO. Jika dibandingkan dengan Surplus/(Defisit)-LO tahun 2023 sebesar Rp57.659.549.152,88, terdapat peningkatan nilai sebesar Rp56.604.780.638,52 atau 98,17%.		

V.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp101.659.759.727,38)	Rp32.689.813.037,55
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Merangin sepanjang tahun 2024 sebesar (Rp101.659.759.727,38), merupakan koreksi-koreksi yang secara langsung menambah/mengurangi ekuitas pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp32.689.813.037,55, terdapat penurunan nilai sebesar Rp134.349.572.764,93 atau (410,98%).		

Tabel V.6-1 Rincian Mutasi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024

		(dalam rupiah)
Mutasi Tambah:		6.317.446.517,82
Koreksi pencatatan persediaan		654.610.943,50
Penurunan nilai Penyisihan Piutang karena pembayaran		211.148.283,86
Penurunan nilai Penyisihan Piutang karena kesalahan pencatatan tahun sebelumnya		0,03
Penurunan nilai Pendapatan Diterima Dimuka karena kesalahan pencatatan tahun sebelumnya		924,34
Koreksi pencatatan Aset Tetap Tanah		1.887.709.235,00



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Koreksi pencatatan Aset Lain-Lain	1.509.065.259,97
Koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	312.800.000,00
Koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	884.681.591,52
Koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	42.678.860,00
Koreksi pencatatan Amortisasi Aset Tidak Berwujud	814.751.419,60
Mutasi Kurang:	107.977.206.245,20
Koreksi pencatatan Persediaan	563.000,00
Koreksi pencatatan Piutang	6.698.914.723,00
Koreksi pencatatan Aset Tetap Tanah	89.933.218.110,20
Koreksi pencatatan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	14.460.000,00
Koreksi pencatatan Aset Lain-Lain	1.150.291.000,00
Koreksi pencatatan Aset Tidak Berwujud	4.840.958.312,00
Koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.306.200,00
Koreksi pencatatan Utang Belanja Pegawai tahun selumnya	5.337.494.900,00
Jumlah Mutasi:	(101.659.759.727,38)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Koreksi-koreksi tersebut merupakan akumulasi dari mutasi tambah dan mutasi kurang terhadap nilai ekuitas dengan rincian sebagai berikut:

1. Mutasi tambah dengan nilai kumulatif sebesar Rp6.317.446.517,82 yang terdiri dari :
 - a. Koreksi pencatatan persediaan yang bersumber dari hibah tahun sebelumnya sebesar Rp654.610.943,50 dengan rincian:
 - 1) Persediaan alat KB dari BKKBN Perwakilan Provinsi Jambi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp173.314.474,00;
 - 2) Persediaan blanko e-KTP dari Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp2.334.000,00; dan
 - 3) Persediaan obat Program dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp478.962.469,50.
 - b. Penurunan nilai Penyisihan Piutang sebesar Rp211.148.283,86 karena penerimaan atas pembayaran Piutang tahun sebelumnya di tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Penurunan nilai Penyisihan Piutang Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp30.895.159,51 dengan rincian:
 - a) Penyisihan Piutang Pajak Reklame sebesar Rp106.544,62;
 - b) Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp1.449.690,00;
 - c) Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp20.072.027,80;
 - d) Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp120.845,96;
 - e) Penyisihan Piutang PBJT- Tenaga Listrik sebesar Rp9.118.768,06; dan
 - f) Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan sebesar Rp27.283,07.
 - 2) Penurunan nilai Penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp172.613.425,75 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.121.785,00;
 - b) Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp125.323.360,75;
 - c) Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.295.000,00;
 - d) Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp44.873.280,00.
 - 3) Penurunan nilai Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp7.639.698,60 dengan rincian:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- a) Penyisihan Piutang Pengembalian Terlanjur Bayar Gaji PNS pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp17.043,60; dan
- b) Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp7.622.655,00.
- c. Koreksi pencatatan Penyisihan Piutang Pajak Daerah tahun sebelumnya karena perhitungan desimal pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp0,03 dengan rincian:
 - 1) Penyisihan Piutang Pajak Reklame sebesar Rp0,01; dan
 - 2) Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp0,02.
- d. Koreksi pencatatan Pendapatan Diterima Dimuka tahun sebelumnya sebesar Rp924,34 dengan rincian:
 - 1) Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp0,01; dan
 - 2) Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp924,33.
- e. Koreksi pencatatan Aset Tetap Tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.887.709.235,00 dengan rincian:
 - 1) 44 Bidang Tanah yang belum dicatat pada KIB Aset Tetap Tanah sebesar Rp923.524.330,00;
 - 2) 12 Bidang Tanah yang belum bernilai namun sudah dicatat pada KIB Aset Tetap Tanah sebesar Rp219.489.850,00;
 - 3) 35 Bidang Tanah hasil Inventarisasi tahun 2024 yang belum dicatat pada KIB Aset Tetap Tanah senilai Rp553.776.200,00; dan
 - 4) 5 bidang aset tanah yang berasal dari hibah Pemerintah Desa tahun sebelumnya senilai Rp190.918.855,00.
- f. Koreksi pencatatan Aset Lain-Lain berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Aset Tetap Gedung dan Bangunan P3D yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp1.509.065.259,97.
- g. Koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa hibah 1 unit kendaraan roda 4 kepada Pemerintah Provinsi Jambi pada Sekretariat Daerah sebesar Rp312.800.000,00.
- h. Koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp884.681.591,52 terdiri dari:
 - 1) Koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Rp731.242.382,88 karena Kapitalisasi ke Aset Induk dengan rincian:
 - a) Koreksi saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp33.040.542,05 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - b) Koreksi saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp22.464.986,40 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c) Koreksi saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.781.151,52 pada Dinas Perikanan;
 - d) Koreksi saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp27.862.501,76 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - e) Koreksi saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp60.437.100,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- f) Koreksi saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp170.607.043,46 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - g) Koreksi saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp80.981.141,22 pada Dinas Kesehatan;
 - h) Koreksi saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp220.017.195,94 pada RSUD Kol Abundjani Bangko;
 - i) Koreksi saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp89.084.619,66 pada Sekretariat Daerah; dan
 - j) Koreksi saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp20.966.100,87 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 2) Koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan karena kesalahan pencatatan Gedung Tempat Pendidikan tahun 2023 sebagai Aset Gedung Bangunan yang seharusnya Konstruksi Dalam Pengerjaan karena belum selesai dibangun sebesar Rp153.439.208,64 pada Dinas Pendidikan.
- i. Koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp42.678.860,00 terdiri dari:
 - 1) Koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp2.253.500,00 berupa Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dibawah nilai kapitalisasi dengan rincian:
 - a) Koreksi saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.128.500,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - b) Koreksi saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp125.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 2) Koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) karena kesalahan pencatatan MCK Sekolah tahun 2023 sebagai Aset JIJ yang seharusnya Konstruksi Dalam Pengerjaan karena belum selesai dibangun sebesar Rp40.425.360,00 pada Dinas Pendidikan.
- j. Koreksi pencatatan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp814.751.419,60 dengan rincian:
 - 1) Koreksi saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp105.305.700,00 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - 2) Koreksi saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp15.000.000,00 pada Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - 3) Koreksi saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp187.123.800,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 4) Koreksi saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp55.443.529,60 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 5) Koreksi saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp287.401.200,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 6) Koreksi saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp59.540.400,00 pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - 7) Koreksi saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp19.945.590,00 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - 8) Koreksi saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp84.991.200,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 2. Mutasi kurang dengan nilai kumulatif sebesar Rp107.977.206.245,20 yang terdiri dari:
 - a. Koreksi pencatatan Persediaan sebesar Rp563.000,00 pada RSUD Kol. Abundjani Bangko berupa lebih catat saldo awal persediaan obat.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- b. Koreksi pencatatan Piutang Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Jambi Triwulan III dan IV TA 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp6.698.914.723,00 dengan rincian:
 - 1) Koreksi saldo Piutang Bagi Hasil dari PBB-KB sebesar Rp4.493.090.505,00;
 - 2) Koreksi saldo Piutang Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan sebesar Rp4.773.546,00; dan
 - 3) Koreksi saldo Piutang Bagi Hasil dari Pajak Rokok sebesar Rp2.201.050.672,00.
- c. Koreksi pencatatan Aset Tetap Tanah sebesar Rp89.933.218.110,20 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah karena perubahan perhitungan nilai Aset Tetap Tanah di bawah Jalan Kabupaten yang semula menggunakan NJOP 2016 menjadi NJOP 2003.
- d. Koreksi pencatatan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp14.460.000,00 berupa Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan di bawah nilai kapitalisasi dengan rincian:
 - 1) Koreksi saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp5.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - 2) Koreksi saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp9.460.000,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- e. Koreksi pencatatan Aset Lain-Lain berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah pada Dinas Peternakan dan Perkebunan sebesar Rp1.150.291.000,00 berupa pelunasan 1 ekor ternak gaduhan senilai Rp20.928.000,00, 1 ekor ternak gaduhan yang mati senilai Rp20.928.000,00 dan pelunasan ternak redistribusi sebanyak 163 ekor (9 ekor jantan dan 154 ekor betina) senilai 1.108.435.000,00.
- f. Koreksi pencatatan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp4.840.958.312,00 berupa kajian teknis perencanaan konstruksi/non konstruksi dengan rincian:
 - 1) Koreksi saldo Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.053.057.000,00 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - 2) Koreksi saldo Aset Tidak Berwujud sebesar Rp150.000.000,00 pada Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - 3) Koreksi saldo Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.134.753.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 4) Koreksi saldo Aset Tidak Berwujud sebesar Rp69.304.412,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 5) Koreksi saldo Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.486.734.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 6) Koreksi saldo Aset Tidak Berwujud sebesar Rp297.702.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - 7) Koreksi saldo Aset Tidak Berwujud sebesar Rp199.455.900,00 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - 8) Koreksi saldo Aset Tidak Berwujud sebesar Rp449.952.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- g. Koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.306.200,00 pada RSUD Kol. Abundjani Bangko karena kapitalisasi ke Aset Induk.
- h. Koreksi pencatatan Utang Belanja Pegawai tahun sebelumnya sebesar Rp5.337.494.900,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian:
 - 1) Susulan Tambahan Penghasilan Guru PNSD bulan Oktober dan November 2023 sebesar Rp301.500.000,00;
 - 2) Susulan Tunjangan Profesi Guru PNSD Semester II 2023 sebesar Rp94.035.600,00;



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- 3) Susulan Tunjangan Khusus Guru PNSD dan PPPK Triwulan III 2023 sebesar Rp71.842.300,00;
- 4) Gaji THR TPG 50% Tahun 2023 sebesar Rp2.450.255.603,00; dan
- 5) Gaji ke-13 TPG 50% Tahun 2023 sebesar Rp2.419.861.397,00.

V.6.4 Ekuitas Akhir	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp2.513.721.722.170,16	Rp2.501.117.152.106,14
Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2024 adalah sebesar Rp2.513.721.722.170,16. Apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir tahun 2023 sebesar Rp2.501.117.152.106,14, maka nilai Ekuitas Pemerintah Kabupaten Merangin bertambah sebesar Rp12.604.570.064,02 atau 0,50%.		



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

B A B VI

INFORMASI NON KEUANGAN

VI.1 Manajemen Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah dengan penyebutan Bupati yang dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya dibantu oleh seorang Wakil Bupati. Lebih lanjut dinyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah.

Sebagai hasil dari proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin periode masa bakti 2018-2023 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018, manajemen puncak pada Pemerintah Kabupaten Merangin dipimpin oleh Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. dan Mashuri, S.Pd., M.M. selaku Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 43/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin tahun 2018 yang kemudian disahkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.15-6047 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Merangin Provinsi Jambi dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.15-6048 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Merangin Provinsi Jambi tanggal 14 September 2018.

Pasca proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yang dilaksanakan tahun 2020, di mana Dr. H. Al Haris, S.Sos, M.H. dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I. ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Terpilih berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 22/PL.02.7-Kpt/15/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020. Kondisi ini berdampak pada perubahan kepemimpinan daerah Kabupaten Merangin melalui pengangkatan Wakil Bupati Merangin, Mashuri, S.Pd., M.M. sebagai Bupati Merangin untuk sisa masa jabatan 2018-2023 melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.15-3960 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Merangin dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Merangin tanggal 23 Agustus 2021.

Guna mengisi kekosongan jabatan Wakil Bupati Merangin, berdasarkan ketentuan pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, DPRD Kabupaten Merangin menggelar Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Bupati Merangin Sisa Masa Jabatan tahun 2018-2023 pada tanggal 8 Agustus 2022. Sebagai hasil dari Sidang Paripurna tersebut terpilih dan ditetapkan Nilwan Yahya, S.E. sebagai Wakil Bupati Merangin terpilih sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan DPRD Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 8 Agustus 2022. Penetapan tersebut kemudian disahkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.15-5156 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Merangin Provinsi Jambi tanggal 22 Agustus 2022.

Dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Merangin hasil dari proses Pemilihan periode masa bakti 2018-2023 sebagaimana disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.3791 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.3792 Tahun 2023 Tanggal 11 September 2023, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Merangin diangkat H. Mukti, S.E., M.E. selaku Penjabat Bupati Merangin melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.3727 Tahun 2023 Tanggal 7 September 2023.

Selanjutnya pada tanggal 22 September 2024 Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, M.H. melantik Jangcik Mohza, S.Pd., M.Si. sebagai Penjabat Bupati Merangin menggantikan H. Mukti, S.E., M.E. berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3751 Tahun 2024 Tanggal 21 September 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Merangin Provinsi Jambi.

Sebagai hasil proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin Nomor 11/PL.02.7-BA/1502/2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Merangin pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 6 Februari 2025, KPU Kabupaten Merangin menetapkan H. M. Syukur, S.H., M.H. dan Drs. H. Abdul Khafidh, M.M. selaku Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Merangin. Penetapan tersebut kemudian disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 14 Februari 2025 yang selanjutnya dilantik secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2025.

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2024, Pemerintah Daerah bersinergi bersama DPRD Kabupaten Merangin yang merupakan hasil Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 untuk masa bakti tahun 2019-2024, yang kemudian digantikan dengan anggota DPRD Kabupaten Merangin hasil Pemilihan Umum Legislatif tahun 2024 untuk masa bakti tahun 2024-2029. Komposisi keanggotaan DPRD Kabupaten Merangin periode 2024-2029 berjumlah 35 orang yang berasal dari partai politik sebagai berikut:

Tabel VI.1 Rincian Jumlah Kursi Partai Politik pada DPRD Kabupaten Merangin Periode 2024-2029

No.	Partai Politik	Kursi
1.	Partai Amanat Nasional (PAN)	5
2.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	4
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	4
4.	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	4
5.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3
6.	Partai Demokrat	3
7.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3
8.	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	3
9.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	2
10.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2
11.	Partai Kebangkitan Nusantara	1
12.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	1
Jumlah		35

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Merangin, 2025

DPRD Kabupaten Merangin dipimpin oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua beserta alat kelengkapan DPRD lainnya, sebagai berikut:

Tabel VI.2 Rincian Pimpinan/Wakil Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Merangin Periode 2024 – 2029

Uraian Jabatan	Nama
Ketua DPRD	: Muhammad Rifaldi, S. Tr.AP.
Wakil Ketua DPRD I	: Herman Efendi, S.T., M.M.
Wakil Ketua DPRD II	: Bripka. (Purn.) Ahmad Fahmi, S.H.
Komisi I (Bidang Hukum dan Pemerintahan)	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian Jabatan	Nama
- Ketua	: Taufiq, S.E.
- Wakil Ketua	: Sukadi, S.H.
- Sekretaris	: H. M. Hazil Aima Putra, S.H., Sp.Not, M.H.
- Anggota	: 1. H. Sukar
	2. Muhammad Helmi, S.Kom.
	3. As'ari El Wakas, S.H.
	4. Nasihin
	5. Teguh Wahyudi, S.H.
	6. M. Yuzan, S.Pd.I.
	7. A. Thalib
Komisi II (Bidang Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat, Keuangan dan Dunia Usaha)	
- Ketua	: Muhammad Yani, A.Md.
- Wakil Ketua	: H. Syaiful Hadi, S.E.
- Sekretaris	: Samdianto, S.Sos.
- Anggota	: 1. Rahmad Hidayat
	2. Mira Sartika
	3. Patria Nusa Nanta Samosir, S.Kom.
	4. Indra Geni, S.Pd.
	5. Abdul Khalim, S.H.
	6. Parhan
	7. Haryanto, S.H.
	8. H. Darmadi
Komisi III (Bidang Pembangunan)	
- Ketua	: Al Hanim Assodiki, S.H.
- Wakil Ketua	: Syafriyon, S.H., M.H.
- Sekretaris	: Satria Abadi, S.H.
- Anggota	: 1. Mulyadi, S.H, M.M.
	2. M. Haris, S.Pd.
	3. Pahala Junior Pasaribu, S.AB.
	4. Hasren Purja Sakti
	5. Amri Saham, S.I.P.
	6. Aditya Nugraha Illahi, S.E., M.E.
	7. H. Zainal Amri
	8. Toni Irwan Jaya, S.H.
Badan Anggaran	
- Ketua	: <i>ex officio</i> Ketua DPRD
- Wakil Ketua	: <i>ex officio</i> Wakil Ketua DPRD
- Anggota	: 1. Taufiq, S.E.
	2. Rahmad Hidayat
	3. Muhammad Yani, A.Md.
	4. Muhammad Helmi, S.Kom.
	5. Sukadi, S.H.
	6. Nasihin, S.H.
	7. Aditya Nugraha Illahi, S.E, M.E.
	8. H. Zainal Amri
	9. As'ari El Wakas, S.H.
	10. H. Darmadi
	11. Samdianto, S.Sos.
	12. Abdul Khalim, S.H.
	13. M. Yuzan, S.Pd.I.
	14. A. Thalib
	15. Syafriyon, S.H., M.H.
	16. H. Syaiful Hadi, S.E.
Badan Musyawarah	
- Ketua	: <i>ex officio</i> Ketua DPRD
- Wakil Ketua	: <i>ex officio</i> Wakil Ketua DPRD
- Anggota	: 1. Mira Sartika
	2. Al Hanim Assodiki, S.H.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian Jabatan	Nama
	3. Pahala Junior Pasaribu, S.AB.
	4. M. Haris, S.Pd.
	5. Indra Geni, S.Pd.
	6. Amri Saham, S.I.P.
	7. Teguh Wahyudi, S.H.
	8. Haryanto, S.H.
	9. Satria Abadi, S.H.
	10. Patria Nusa Nanta Samosir, S.Kom.
	11. Toni Irwan Jaya, S.H.
	12. H. Sukar
	13. Mulyadi, S.H, M.M.
	14. Hasren Purja Sakti
	15. Parhan
	16. H. M. Hazil Aima Putra, SH.Sp.Not, M.H.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah	
- Ketua	: As'ari El Wakas, S.H.
- Wakil Ketua	: Nasihin
- Anggota	: 1. Taufiq, S.E.
	2. Mulyadi, S.H, M.M.
	3. H. Syaiful Hadi, S.E.
	4. Muhammad Helmi, S.Kom.
	5. Indra Geni, S.Pd.
	6. Teguh Wahyudi, S.H.
	7. Haryanto, S.H.
	8. Al Hanim Assodiki, S.H.
	9. Toni Irwan Jaya, S.H.
Badan Kehormatan	
- Ketua	: Toni Irwan Jaya, S.H.
- Wakil Ketua	: Syafriyon, S.H., M.H.
- Anggota	: 1. Abdul Khalim, S.H.
	2. Rahmad Hidayat
	3. M. Yuzan, S.Pd.I.

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Merangin, 2025

VI.2 Kewajiban Kontijensi

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jambi Nomor 22.B/LHP/XVIII.JMB/5/2022 tanggal 20 Mei 2022 terdapat 66 ruas Jalan Kabupaten Merangin yang tidak tercatat nilai perolehan pada Daftar Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan nilai Aset Ruas Jalan Kabupaten yang belum tercatat dalam Kartu Inventaris Barang Milik Pemerintah Kabupaten Merangin. Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Merangin telah menetapkan Surat Keputusan Bupati Merangin nomor 143/BPKAD/2025 tanggal 21 Mei 2025 tentang Penetapan Nilai Aset Ruas Jalan Kabupaten yang belum tercatat Dalam Kartu Inventaris Barang Milik Kabupaten Merangin dengan nilai wajar sebesar Rp68.312.828.973,79.

VI.3 Badan Usaha Milik Daerah PT. Merangin Bima Tama (Perseroda)

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Aset Daerah secara efektif, efisien dan akuntabel, dengan persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Merangin dan Bupati Merangin, Pemerintah Kabupaten Merangin memutuskan untuk membentuk PT. Merangin Bima Tama (Perseroda) dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Merangin Bima Tama (Perseroda). Pembentukan BUMD ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna Aset Daerah, mengembangkan Investasi Daerah, memberikan



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

kontribusi terhadap PAD dan membantu menggerakkan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Berpedoman kepada PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Bupati Merangin menyampaikan usulan rencana pendirian BUMD kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana surat Bupati Merangin Nomor 500/353/Pereko/2021 Perihal Usulan Pendirian BUMD tanggal 6 Oktober 2021. Menanggapi usulan tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melalui surat Nomor 539/9781/Keuda Hal Permintaan Kelengkapan Dokumen Penilaian atas Usulan Rencana Pendirian BUMD PT. Merangin Bima Tama tanggal 31 Desember 2021 menyatakan pada intinya bahwa Pemerintah Kabupaten Merangin diminta untuk mempertimbangkan kembali rencana pendirian BUMD PT Merangin Bima Tama dan mengklarifikasi dasar hukum serta status pendirian BUMD dimaksud. Selanjutnya dalam hal menyampaikan usulan rencana pendirian BUMD, agar memedomani tata cara pendirian, kesesuaian bentuk badan hukum dan ketentuan penamaan BUMD sesuai ketentuan PP Nomor 54 Tahun 2017 serta menyampaikan dokumen Analisa Kelayakan Usaha.

Guna menindaklanjuti permintaan tersebut, pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Merangin melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin melakukan penyusunan dokumen Analisa Kelayakan Usaha atas rencana pendirian BUMD dengan *core business* pengelolaan kopi. Hingga akhir periode pelaporan tahun 2024, BUMD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 secara administrasi masih berproses sesuai ketentuan yang berlaku.

VI.4 Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman

Guna menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman yang menjadi kewajiban para pengembang selaku penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, Pemerintah Kabupaten Merangin telah menerima dokumen administratif terkait prasarana, sarana dan utilitas yang akan dihibahkan untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi administrasi dan lapangan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Dinas Perumahan dan Kawawan Permukiman telah mengajukan surat kepada Inspektorat Kabupaten Merangin dan BPKAD Kabupaten Merangin Nomor 277/PERKIM/2024 Perihal Permohonan Verifikasi Penyerahan PSU tanggal 6 November 2024. Hingga akhir periode pelaporan tahun 2024, karena keterbatasan waktu, verifikasi masih terus berproses. Kondisi ini mengakibatkan masih adanya potensi Pendapatan Hibah berupa Barang Milik Daerah yang belum dapat disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum pada **Lampiran 27**.

VI.5 Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dimanfaatkan Warga Masyarakat sebagai Tempat Usaha

Pada tanggal 12 Maret 2024, seorang warga masyarakat Kabupaten Merangin mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Negeri Bangko terkait kepemilikan sebidang tanah dengan ukuran luas $\pm 300 \text{ M}^2$ yang (dahulu) Sungai Dalam, Bangko, Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi/(sekarang) terletak di Jalan Jend. Sudirman/ Lintas Sumatera, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi kepada:

1. Bupati Merangin (Tergugat I)
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin (Tergugat II)
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin (Tergugat III)



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin (Tergugat IV)
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin (Turut Tergugat).

Dengan pokok permasalahan yaitu adanya larangan dari para Tergugat kepada Penggugat atas pembangunan 6 unit kios menggunakan rangka baja dan belum/tanpa dinding karena menurut Tergugat, tanah tersebut merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Atas sengketa tersebut, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Bangko memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan (menunda) pembongkaran atas bangunan kios tersebut dengan cara tidak memerintahkan Turut Tergugat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrahct*).

Hingga akhir periode pelaporan tahun 2024, Penggugat telah melakukan pencabutan gugatan perkara berkenaan sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bko Tanggal 24 Juli 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023



PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2024, disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta seluruh perubahannya. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2024, terdapat penggantian manajemen pemerintahan di Kabupaten Merangin melalui pengangkatan Penjabat Bupati, H. Mukti, S.E. M.E. yang melanjutkan jabatan Bupati Merangin hasil dari proses Pemilihan periode masa bakti 2018-2023. Hingga tanggal 7 September 2023 dilakukan pergantian kembali dengan diangkatnya Jangcik Mohza, S.Pd., M.Si. pada tanggal 22 September 2024. Selanjutnya sebagai hasil proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Merangin menetapkan H. M. Syukur, S.H., M.H. dan Drs. H. Abdul Khafidh, M.M. selaku Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Merangin melalui pelantikan serentak oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip keterbukaan, profesional dan bertanggung jawab. Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diperkuat untuk menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Pemerintah Kabupaten Merangin telah berupaya untuk mewujudkan hal tersebut dengan melaksanakan berbagai tahapan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta memperhatikan situasi, kondisi dan sumber daya yang dimiliki. Dengan berbekal semangat dan komitmen dari seluruh tingkatan manajemen pemerintahan, laporan keuangan ini dapat diselesaikan secara paripurna dengan tetap memperhatikan kualitas penyajiannya.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2024 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Merangin dalam penyampaian maksud dan penjelasan isi laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jambi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2024 disajikan sesuai dengan kondisi objektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangannya, kami meyakini bahwa secara umum pengelolaan keuangan tahun 2024 telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan, serta pengungkapan yang disajikan dapat memberikan gambaran utuh pengelolaan guna pengambilan keputusan.





PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Kami berharap dengan LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2024 berbasis akrual, pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan ini, dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran kami harapkan demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Merangin di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas upaya-upaya yang kita lakukan, dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan khususnya untuk Pemerintah Kabupaten Merangin yang lebih baik.

 **BUPATI MERANGIN,**

M. SYUKUR, S.H., M.H.

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN IKHTISAR REALISASI KINERJA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6=4/3
I.	PELAYANAN UMUM	1.156.076.874.721,00	1.068.090.866.141,00	(87.986.008.580,00)	92,39
1	Pendidikan	336.311.932.772,00	302.185.028.590,00	(34.126.904.182,00)	89,85
2	Kesehatan	157.055.042.666,00	143.810.171.432,00	(13.244.871.234,00)	91,57
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.337.506.224,00	10.859.918.191,00	(477.588.033,00)	95,79
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10.317.171.529,00	10.021.835.942,00	(295.335.587,00)	97,14
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	11.691.517.750,00	10.978.549.400,00	(712.968.350,00)	93,90
6	Sosial	5.458.504.449,00	5.094.254.191,00	(364.250.258,00)	93,33
7	Pangan	2.584.698.797,00	2.471.064.403,00	(113.634.394,00)	95,60
8	Lingkungan Hidup	5.838.169.873,00	5.522.145.700,00	(316.024.173,00)	94,59
9	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.924.862.250,00	5.592.198.226,00	(332.664.024,00)	94,39
10	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.235.515.353,00	8.848.407.480,00	(387.107.873,00)	95,81
11	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.469.564.823,00	5.956.789.519,00	(512.775.304,00)	92,07
12	Perhubungan	3.734.399.310,00	3.581.137.966,00	(153.261.344,00)	95,90
13	Komunikasi dan Informatika	4.050.283.217,00	3.887.367.250,00	(162.915.967,00)	95,98
14	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.927.985.040,00	4.614.374.939,00	(313.610.101,00)	93,64
15	Penanaman Modal	5.775.421.587,00	5.641.242.397,00	(134.179.190,00)	97,68
16	Statistik	40.000.000,00	39.838.900,00	(161.100,00)	99,60
17	Kearsipan	3.330.115.727,00	2.946.027.539,00	(384.088.188,00)	88,47
18	Kelautan dan Perikanan	3.532.547.750,00	3.194.260.699,00	(338.287.051,00)	90,42
19	Pariwisata	6.260.451.374,00	5.441.450.744,00	(819.000.630,00)	86,92
20	Pertanian	23.563.572.094,00	21.022.606.539,00	(2.540.965.555,00)	89,22
21	Sekretariat Daerah	42.011.495.015,00	40.151.482.154,00	(1.860.012.861,00)	95,57
22	Sekretariat DPRD	49.976.073.752,00	46.379.762.218,00	(3.596.311.534,00)	92,80
23	Perencanaan	9.904.607.478,00	9.452.340.401,00	(452.267.077,00)	95,43
24	Keuangan	305.487.573.208,00	287.382.838.546,00	(18.104.734.662,00)	94,07
25	Kepegawaian	8.173.986.728,00	6.974.175.243,00	(1.199.811.485,00)	85,32
26	Pendidikan dan Pelatihan	353.877.000,00	349.201.909,00	(4.675.091,00)	98,68
27	Penelitian dan Pengembangan	3.455.005.741,00	3.146.272.557,00	(308.733.184,00)	91,06
28	Inspektorat	16.111.854.811,00	15.056.534.550,00	(1.055.320.261,00)	93,45
29	Kecamatan	63.236.066.891,00	58.037.826.043,00	(5.198.240.848,00)	91,78
30	Kesatuan Bangsa dan Politik	39.927.071.512,00	39.451.762.473,00	(475.309.039,00)	98,81
II.	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	9.325.554.792,00	9.137.963.805,00	(187.590.987,00)	97,99
1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	9.285.554.792,00	9.098.090.205,00	(187.464.587,00)	97,98
2	Sosial	40.000.000,00	39.873.600,00	(126.400,00)	99,68
III.	EKONOMI	123.673.329.679,00	120.238.824.665,00	(3.434.505.014,00)	97,22
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	97.713.911.996,00	97.103.285.289,00	(610.626.707,00)	99,38
2	Tenaga Kerja	123.069.200,00	114.984.400,00	(8.084.800,00)	93,43
3	Pangan	479.040.000,00	381.158.146,00	(97.881.854,00)	79,57
4	Perhubungan	501.652.584,00	499.307.043,00	(2.345.541,00)	99,53
5	Komunikasi dan Informatika	1.699.101.000,00	1.692.830.700,00	(6.270.300,00)	99,63
6	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	614.511.150,00	596.827.350,00	(17.683.800,00)	97,12
7	Penanaman Modal	930.167.750,00	828.479.211,00	(101.688.539,00)	89,07
8	Persandian	25.000.000,00	24.996.063,00	(3.937,00)	99,98
9	Kelautan dan Perikanan	1.216.999.500,00	823.692.500,00	(393.307.000,00)	67,68
10	Pertanian	14.121.667.499,00	12.375.965.070,00	(1.745.702.429,00)	87,64
11	Perdagangan	468.520.000,00	414.629.266,00	(53.890.734,00)	88,50
12	Perindustrian	5.779.689.000,00	5.382.669.627,00	(397.019.373,00)	93,13
IV.	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	13.355.528.309,00	12.131.167.992,00	(1.224.360.317,00)	90,83
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.883.680.000,00	2.875.990.185,00	(7.689.815,00)	99,73
2	Pertanahan	100.000.000,00	79.599.750,00	(20.400.250,00)	79,60
3	Lingkungan Hidup	10.371.848.309,00	9.175.578.057,00	(1.196.270.252,00)	88,47
V.	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	4.764.922.000,00	4.719.088.305,00	(45.833.695,00)	99,04
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.389.100.000,00	2.379.641.455,00	(9.458.545,00)	99,60
2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.375.822.000,00	2.339.446.850,00	(36.375.150,00)	98,47
VI.	KESEHATAN	99.126.144.606,00	84.918.672.143,96	(14.207.472.462,04)	85,67
1.	Kesehatan	91.503.456.606,00	78.512.632.675,96	(12.990.823.930,04)	85,80
2.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.622.688.000,00	6.406.039.468,00	(1.216.648.532,00)	84,04
VII.	PARIWISATA	4.671.882.000,00	4.509.178.692,00	(162.703.308,00)	96,52
1	Pariwisata	4.671.882.000,00	4.509.178.692,00	(162.703.308,00)	96,52
VIII.	PENDIDIKAN	158.946.621.718,00	150.165.614.432,00	(8.781.007.286,00)	94,48
1	Pendidikan	147.050.182.168,00	138.614.763.863,00	(8.435.418.305,00)	94,26
2	Kepemudaan dan Olahraga	9.051.077.700,00	8.927.159.906,00	(123.917.794,00)	98,63
3	Kebudayaan	2.199.612.700,00	2.117.781.391,00	(81.831.309,00)	96,28
4	Perpustakaan	645.749.150,00	505.909.272,00	(139.839.878,00)	78,34

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6=4/3
IX. PERLINDUNGAN SOSIAL		1.066.100.250,00	861.792.095,00	(204.308.155,00)	80,84
1	Sosial	304.670.000,00	291.693.745,00	(12.976.255,00)	95,74
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	756.430.000,00	565.473.600,00	(190.956.400,00)	74,76
3	Transmigrasi	5.000.250,00	4.624.750,00	(375.500,00)	92,49
Jumlah		1.571.006.958.075,00	1.454.773.168.270,96	(116.233.789.804,04)	92,60



BUPATI MERANGIN

H. M. SYUKUR, S.H., M.H.

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
ALUR PERUBAHAN APBD KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam rupiah)															
No.	Uraian	APBD Awal	Pergeseran I		Pergeseran II		Pergeseran III		Perubahan		Pergeseran setelah Perubahan		Lebih/(Kurang) APBD TA 2024 terhadap pergeseran setelah Perubahan APBD TA 2024		
		Perda 3 Thn 2023 30 Desember 2023	-	-	-	Perda 8 Thn 2024 10 Oktober 2024	-	-	-						
		Perbup 33 Thn 2023 30 Desember 2023	Perbup 7 Thn 2024 18 Maret 2024	Perbup 9 Thn 2024 26 April 2024	Perbup 11 Thn 2024 28 Mei 2024	Perbup 32 Thn 2024 10 Oktober 2024	Perbup 36 Thn 2024 25 November 2024								
		Jumlah	Jumlah	Lebih/(Kurang 5=4-3	Jumlah	Lebih/(Kurang 7=6-4	Jumlah	Lebih/(Kurang 9=6-8	Jumlah	Lebih/(Kurang 13=10-12	Jumlah	Lebih/(Kurang 15=12-14			
1	2	3	4	5=4-3	6	7=6-4	8	9=6-8	10	11=10-12	12	13=10-12	14	15=12-14	16=14-3
4	PENDAPATAN	1.460.785.194.724,00	1.460.785.194.724,00	0,00	1.460.785.194.724,00	0,00	1.460.785.194.724,00	0,00	1.493.816.042.655,00	33.030.847.931,00	1.493.816.042.655,00	0,00	33.030.847.931,00		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	93.047.380.568,00	93.047.380.568,00	0,00	93.047.380.568,00	0,00	93.047.380.568,00	0,00	100.605.992.393,00	7.558.611.825,00	100.605.992.393,00	0,00	7.558.611.825,00		
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	29.980.000.000,00	29.980.000.000,00	0,00	29.980.000.000,00	0,00	29.980.000.000,00	0,00	31.183.000.000,00	1.203.000.000,00	31.183.000.000,00	0,00	1.203.000.000,00		
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.959.485.500,00	5.959.485.500,00	0,00	5.959.485.500,00	0,00	5.959.485.500,00	0,00	34.261.951.015,00	28.302.465.515,00	34.261.951.015,00	0,00	28.302.465.515,00		
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.777.840.000,00	7.777.840.000,00	0,00	7.777.840.000,00	0,00	7.777.840.000,00	0,00	7.488.236.682,00	(289.603.318,00)	7.488.236.682,00	0,00	(289.603.318,00)		
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	49.330.055.068,00	49.330.055.068,00	0,00	49.330.055.068,00	0,00	49.330.055.068,00	0,00	27.672.804.696,00	(21.657.250.372,00)	27.672.804.696,00	0,00	(21.657.250.372,00)		
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.352.318.870.156,00	1.352.318.870.156,00	0,00	1.352.318.870.156,00	0,00	1.352.318.870.156,00	0,00	1.377.004.677.610,00	24.685.807.454,00	1.377.004.677.610,00	0,00	24.685.807.454,00		
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.248.007.104.000,00	1.248.007.104.000,00	0,00	1.248.007.104.000,00	0,00	1.248.007.104.000,00	0,00	1.275.666.531.939,00	27.659.427.939,00	1.275.666.531.939,00	0,00	27.659.427.939,00		
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	104.311.766.156,00	104.311.766.156,00	0,00	104.311.766.156,00	0,00	104.311.766.156,00	0,00	101.338.145.671,00	(2.973.620.485,00)	101.338.145.671,00	0,00	(2.973.620.485,00)		
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.418.944.000,00	15.418.944.000,00	0,00	15.418.944.000,00	0,00	15.418.944.000,00	0,00	16.205.372.652,00	786.428.652,00	16.205.372.652,00	0,00	786.428.652,00		
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15.418.944.000,00	15.418.944.000,00	0,00	15.418.944.000,00	0,00	15.418.944.000,00	0,00	16.205.372.652,00	786.428.652,00	16.205.372.652,00	0,00	786.428.652,00		
5	BELANJA	1.488.785.194.724,00	1.488.785.194.724,00	0,00	1.488.785.194.724,00	0,00	1.488.785.194.724,00	0,00	1.571.006.958.075,00	82.221.763.351,00	1.571.006.958.075,00	0,00	82.221.763.351,00		
5.1	BELANJA OPERASI	1.035.868.787.706,00	1.035.868.787.706,00	0,00	1.035.950.581.706,00	81.794.000,00	1.038.771.572.206,00	2.820.990.500,00	1.093.586.238.631,00	57.635.656.925,00	1.092.148.331.608,00	(1.437.907.023,00)	56.279.543.902,00		
5.1.1	Belanja Pegawai	634.443.381.165,00	634.443.381.165,00	0,00	634.471.563.665,00	28.182.500,00	633.686.087.515,00	(785.476.150,00)	645.653.939.320,00	11.182.375.655,00	645.496.758.754,00	(157.180.566,00)	11.053.377.589,00		
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	336.082.498.853,00	336.082.498.853,00	0,00	336.136.110.353,00	53.611.500,00	336.344.302.003,00	208.191.650,00	377.680.631.073,00	41.544.520.720,00	376.339.904.616,00	(1.340.726.457,00)	40.257.405.763,00		
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.4	Belanja Hibah	65.342.907.688,00	65.342.907.688,00	0,00	65.342.907.688,00	0,00	68.741.182.688,00	3.398.275.000,00	70.251.668.238,00	4.908.760.550,00	70.311.668.238,00	60.000.000,00	4.968.760.550,00		
5.2	BELANJA MODAL	172.184.163.926,00	172.184.163.926,00	0,00	172.102.369.926,00	(81.794.000,00)	176.401.327.426,00	4.298.957.500,00	196.219.165.641,00	24.116.795.715,00	197.657.072.664,00	1.437.907.023,00	25.472.908.738,00		
5.2.1	Belanja Modal Tanah	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00		
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.423.565.676,00	37.423.565.676,00	0,00	36.747.761.676,00	(675.804.000,00)	36.169.044.176,00	(578.717.500,00)	43.830.850.895,00	7.083.089.219,00	45.616.430.243,00	1.785.579.348,00	8.192.864.567,00		
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.297.088.070,00	59.327.088.070,00	30.000.000,00	59.921.098.070,00	594.010.000,00	61.603.773.070,00	1.682.675.000,00	63.886.290.570,00	3.965.192.500,00	63.886.290.570,00	0,00	4.589.202.500,00		
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jalinan dan Irtigasi	71.161.909.780,00	71.131.909.780,00	(30.000.000,00)	71.131.909.780,00	0,00	74.326.909.780,00	3.195.000.000,00	83.845.423.776,00	12.713.513.996,00	83.845.423.776,00	0,00	12.683.513.996,00		
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.178.100.400,00	4.178.100.400,00	0,00	4.178.100.400,00	0,00	4.178.100.400,00	0,00	4.213.100.400,00	35.000.000,00	3.865.428.075,00	(347.672.325,00)	(312.672.325,00)		
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00	0,00	435.000.000,00	320.000.000,00	435.000.000,00	0,00	320.000.000,00		
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.630.675.742,00	7.630.675.742,00	0,00	7.630.675.742,00	0,00	510.727.742,00	(7.119.948.000,00)	2.351.193.453,00	(5.279.482.289,00)	2.351.193.453,00	0,00	(5.279.482.289,00)		
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	7.630.675.742,00	7.630.675.742,00	0,00	7.630.675.742,00	0,00	510.727.742,00	(7.119.948.000,00)	2.351.193.453,00	(5.279.482.289,00)	2.351.193.453,00	0,00	(5.279.482.289,00)		
5.4	BELANJA TRANSFER	273.101.567.350,00	273.101.567.350,00	0,00	273.101.567.350,00	0,00	273.101.567.350,00	0,00	278.850.360.350,00	5.748.793.000,00	278.850.360.350,00	0,00	5.748.793.000,00		
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	3.593.948.550,00	3.593.948.550,00	0,00	3.593.948.550,00	0,00	3.593.948.550,00	0,00	3.911.348.550,00	317.400.000,00	3.911.348.550,00	0,00	317.400.000,00		
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	269.507.618.800,00	269.507.618.800,00	0,00	269.507.618.800,00	0,00	269.507.618.800,00	0,00	274.939.011.800,00	5.431.393.000,00	274.939.011.800,00	0,00	5.431.393.000,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(28.000.000.000,00)	(28.000.000.000,00)	0,00	(28.000.000.000,00)	0,00	(28.000.000.000,00)	0,00	(77.190.915.420,00)	(49.190.915.420,00)	(77.190.915.420,00)	0,00	(49.190.915.420,00)		
6	PEMBIAYAAN DAERAH														
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	30.000.000.000,00	0,00	30.000.000.000,00	0,00	79.190.915.420,00	49.190.915.420,00	79.190.915.420,00	0,00	49.190.915.420,00		
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	30.000.000.000,00	0,00	30.000.000.000,00	0,00	79.190.915.420,00	49.190.915.420,00	79.190.915.420,00	0,00	49.190.915.420,00		
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00		
6.2.1	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00		
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PEMBIAYAAN NETTO	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	0,00	28.000.000.000,00	0,00	28.000.000.000,00	0,00	77.190.915.420,00	49.190.915.420,00	77.190.915.420,00	0,00	49.190.915.420,00		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4

**REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PEMENUHAN BELANJA WAJIB
YANG DIAMANKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (MANDATORY SPENDING)
TAHUN ANGGARAN 2024**

A. BIDANG PENDIDIKAN

(Anggaran Bidang Pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari Total Belanja Daerah sebagaimana Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 18 Tahun 2022 dan butir E.1.a Lampiran Permendagri Nomor 15 Tahun 2023)

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG (Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
1.	a. Belanja pada Dinas Pendidikan:	485.561.727.640,00	442.917.573.844,00	(42.644.153.796,00)	91,22
1)	Urusan Pendidikan	483.362.114.940,00	440.799.792.453,00	(42.562.322.487,00)	91,19
a)	Belanja Operasi:	415.437.148.946,00	374.260.659.549,00	(41.176.489.397,00)	90,09
i.	Belanja Pegawai	334.930.542.056,00	300.984.958.947,00	(33.945.583.109,00)	89,86
ii.	Belanja Barang dan Jasa	63.714.281.890,00	58.335.701.429,00	(5.378.580.461,00)	91,56
iii.	Belanja Hibah	16.792.325.000,00	14.939.999.173,00	(1.852.325.827,00)	88,97
b)	Belanja Modal	67.924.965.994,00	66.539.132.904,00	(1.385.833.090,00)	97,96
2)	Urusan Kebudayaan	2.199.612.700,00	2.117.781.391,00	(81.831.309,00)	96,28
a)	Belanja Operasi:	2.177.112.700,00	2.095.381.391,00	(81.731.309,00)	96,25
i.	Belanja Barang dan Jasa	1.327.112.700,00	1.245.917.620,00	(81.195.080,00)	93,88
ii.	Belanja Hibah	850.000.000,00	849.463.771,00	(536.229,00)	99,94
b)	Belanja Modal	22.500.000,00	22.400.000,00	(100.000,00)	99,56
b.	Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara lain:	9.696.826.850,00	9.134.324.906,00	(127.492.794,00)	94,20
1)	Urusan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	645.749.150,00	207.165.000,00	(3.575.000,00)	32,08
a)	Belanja Operasi:	437.049.150,00	2.040.000,00	0,00	0,47
i.	Belanja Pegawai	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00
ii.	Belanja Barang dan Jasa	435.009.150,00	298.744.272,00		
b)	Belanja Modal	208.700.000,00	205.125.000,00	(3.575.000,00)	98,29
2)	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	9.051.077.700,00	8.927.159.906,00	(123.917.794,00)	98,63
a)	Belanja Operasi:	6.402.077.700,00	6.286.650.299,00	(115.427.401,00)	98,20
i.	Belanja Barang dan Jasa	3.922.077.700,00	3.806.650.299,00	(115.427.401,00)	97,06
ii.	Belanja Hibah	2.480.000.000,00	2.480.000.000,00	0,00	100,00
b)	Belanja Modal	2.649.000.000,00	2.640.509.607,00	(8.490.393,00)	99,68
2.	Anggaran Bidang Pendidikan (1a+1b)	495.258.554.490,00	452.051.898.750,00	(42.771.646.590,00)	91,28
3.	Total Belanja Daerah	1.571.006.958.075,00	1.454.773.168.270,96	(116.233.789.804,04)	92,60
4.	Rasio Anggaran Bidang Pendidikan (2:3) x 100%	31,52%	31,07%		

B. BIDANG KESEHATAN

(Anggaran Bidang Kesehatan sebagaimana butir E.1.b Lampiran Permendagri Nomor 15 Tahun 2023)

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG (Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan:	248.558.499.272,00	222.322.804.107,96	(26.235.695.164,04)	89,44
-	Urusan Kesehatan	248.558.499.272,00	222.322.804.107,96	(26.235.695.164,04)	89,44
a)	Belanja Operasi:	229.349.219.447,00	204.749.163.938,96	(24.600.055.508,04)	89,27
i.	Belanja Pegawai	112.231.649.609,00	107.327.481.559,00	(4.904.168.050,00)	95,63
ii.	Belanja Barang dan Jasa	116.818.415.838,00	97.122.528.379,96	(19.695.887.458,04)	83,14
iii.	Belanja Hibah	299.154.000,00	299.154.000,00	0,00	100,00
b)	Belanja Modal	19.209.279.825,00	17.573.640.169,00	(1.635.639.656,00)	91,49
b.	Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	8.283.879.000,00	0,00	(1.269.683.978,00)	0,00
-	Urusan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.283.879.000,00	0,00	(1.269.683.978,00)	0,00
-	Belanja Operasi:	8.283.879.000,00	0,00	(1.269.683.978,00)	0,00
-	Belanja Barang dan Jasa	8.283.879.000,00	7.014.195.022,00	(1.269.683.978,00)	84,67
2.	Anggaran Bidang Kesehatan (1a+1b)	256.842.378.272,00	222.322.804.107,96	(27.505.379.142,04)	86,56
3.	Total Belanja Daerah	1.571.006.958.075,00	1.454.773.168.270,96	(116.233.789.804,04)	92,60
4.	Gaji ASN	453.813.192.044,00	409.389.404.113,00	(44.423.787.931,00)	90,21
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	1.117.193.766.031,00	1.045.383.764.157,96	(71.810.001.873,04)	93,57
6.	Rasio anggaran Bidang Kesehatan (2:5) x 100%	22,99%	21,27%		

C. BIDANG INFRASTRUKTUR

(Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik diarahkan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa untuk percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, sebagaimana butir E.1.c Lampiran Permendagri Nomor 15 Tahun 2023)

1. BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG (Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
1.	Total Belanja Daerah	1.571.006.958.075,00	1.454.773.168.270,96	(116.233.789.804,04)	92,60
2.	Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah	278.850.360.350,00	264.500.360.350,00	(14.350.000.000,00)	94,85
a)	Belanja Bagi Hasil	3.911.348.550,00	3.911.348.550,00	0,00	100,00
b)	Bantuan keuangan	274.939.011.800,00	260.589.011.800,00	(14.350.000.000,00)	94,78
3.	Selisih (1-2)	1.292.156.597.725,00	1.190.272.807.920,96	(101.883.789.804,04)	92,12
4.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40%xSelisih)	516.862.639.090,00	476.109.123.168,38		

2. PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG (Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
1.	a. Belanja Modal	197.657.072.664,00	193.627.335.532,00	(4.029.737.132,00)	97,96
1)	Tanah	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	0,00
2)	Peralatan dan Mesin	45.616.430.243,00	43.409.708.584,00	(2.206.721.659,00)	95,16
3)	Bangunan dan Gedung	63.886.290.570,00	62.655.071.883,00	(1.231.218.687,00)	98,07
4)	Jalan, Irigasi dan Jaringan	83.845.423.776,00	83.315.634.140,00	(529.789.636,00)	99,37
5)	Aset Tetap Lainnya	3.865.428.075,00	3.837.445.925,00	(27.982.150,00)	99,28
6)	Aset Lainnya	435.000.000,00	409.475.000,00	(25.525.000,00)	94,13
b.	Belanja Pemeliharaan	12.527.019.918,00	11.963.350.398,00	(563.669.520,00)	95,50
Jumlah		210.184.092.582,00	205.590.685.930,00	(4.593.406.652,00)	97,81
2.	Belanja Hibah	70.311.668.238,00	67.876.911.370,00	(2.434.756.868,00)	96,54
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	280.495.760.820,00	273.467.597.300,00	(7.028.163.520,00)	97,49
4.	Total Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa untuk percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah	1.292.156.597.725,00	1.190.272.807.920,96	(101.883.789.804,04)	92,12
5.	Persentase Belanja Infrastruktur (3:4) x 100%	21,71%	22,98%		

D. PENGUATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

(Anggaran Penguatan Pembinaan dan Pengawasan sekurang-kurangnya 0,90% dari total belanja daerah sebagaimana butir E.2.c Lampiran Permendagri Nomor 15 Tahun 2023)

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG (Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
1.	Total Belanja Daerah	1.571.006.958.075,00	1.454.773.168.270,96	(116.233.789.804,04)	92,60
2.	Urusan Pengawasan pada Inspektorat	16.111.854.811,00	15.056.534.550,00	(1.055.320.261,00)	93,45
a)	Belanja Pegawai	6.972.662.910,00	6.740.021.421,00	(232.641.489,00)	96,66
b)	Belanja Barang dan Jasa	7.619.586.401,00	6.888.150.415,00	(731.435.986,00)	90,40
c)	Belanja Modal	1.519.605.500,00	1.428.362.714,00	(91.242.786,00)	94,00
3.	Persentase Belanja Penguatan Pembinaan dan Pengawasan (2:1) x 100%	1,03%	1,03%		

E. ALOKASI DANA DESA

(Anggaran Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebagaimana Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG (Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
1.	Penerimaan yang diperhitungkan	838.046.236.000,00	697.528.131.682,00	(140.518.104.318,00)	83,23
a)	Dana Alokasi Umum	729.206.208.000,00	588.687.283.432,00	(140.518.924.568,00)	80,73
1)	DAU	538.778.464.000,00	549.128.634.000,00	10.350.170.000,00	101,92
2)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00
3)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	45.108.612.000,00	37.558.649.432,00	(7.549.962.568,00)	83,26
4)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	90.855.979.000,00	90.855.979.000,00	0,00	100,00
5)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	24.521.157.000,00	24.521.157.000,00	0,00	100,00
6)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	27.941.996.000,00	27.941.996.000,00	0,00	100,00
b)	Dana Bagi Hasil	108.840.028.000,00	108.840.848.250,00	820.250,00	100,00

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG (Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
2.	Pengurang	11.826.923.000,00	11.827.743.250,00	820.250,00	100,01
a)	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	38.225.000,00	39.045.250,00	820.250,00	102,15
b)	DBH Sawit	11.788.698.000,00	11.788.698.000,00	0,00	100,00
3.	Jumlah Dana Transfer yang diperhitungkan	826.219.313.000,00	685.700.388.432,00	(140.518.924.568,00)	82,99
4.	Alokasi Dana Desa	79.506.673.800,00	79.506.673.800,00	0,00	100,00
5.	Persentase Alokasi Dana Desa (4:3) x 100%	9,62%	11,59%		

F. BELANJA PEGAWAI

(Anggaran Belanja Pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan butir C.3.a.1).f) Lampiran Permendagri Nomor 15 Tahun 2023)

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG (Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
1.	Total Belanja Daerah	1.571.006.958.075,00	1.454.773.168.270,96	(116.233.789.804,04)	92,60
2.	Belanja Pegawai di luar tunjangan guru	572.805.287.754,00	521.181.354.426,00	(51.623.933.328,00)	90,99
3.	Persentase Belanja Pegawai (2:1) x 100%	36,46%	35,83%		

REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2024
(Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ KURANG	%
1	2	3	4	5	6=5-4	7
A. SPM Bidang Pendidikan						
(PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan)						
1. Pendidikan Dasar						
	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50.000.000,00	11.405.000,00	(38.595.000,00)	22,81
	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00
	3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	72.000.000,00	0,00	(72.000.000,00)	0,00
	4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	100,00
	5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.895.604.000,00	7.446.354.000,00	(449.250.000,00)	94,31
	6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	662.393.000,00	525.182.898,00	(137.210.102,00)	79,29
	7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	439.398.000,00	234.438.000,00	(204.960.000,00)	53,35
	8	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	250.000.000,00	100.000.000,00	(150.000.000,00)	40,00
	9	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	20.000.000,00	19.320.000,00	(680.000,00)	96,60
	10	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	300.000.000,00	109.060.000,00	(190.940.000,00)	36,35
	11	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	311.000.000,00	0,00	(311.000.000,00)	0,00
	12	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00
	13	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00
	14	Pembangunan Ruang Kelas Baru	7.747.869.600,00	7.196.586.937,00	(551.282.663,00)	92,88
	15	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	0,00
	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	9.691.480.000,00	8.768.682.177,00	(922.797.823,00)	90,48
	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.646.498.978,00	2.632.898.720,00	(13.600.258,00)	99,49
	18	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00
	19	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	384.625.000,00	372.425.000,00	(12.200.000,00)	96,83
	20	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.737.989.000,00	2.826.739.000,00	(911.250.000,00)	75,62
	21	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	151.386.000,00	58.788.000,00	(92.598.000,00)	38,83
	22	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	275.000.000,00	169.263.700,00	(105.736.300,00)	61,55
	23	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00
	24	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	17.500.000,00	13.000.000,00	(4.500.000,00)	74,29
	25	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	250.000.000,00	86.791.290,00	(163.208.710,00)	34,72
	26	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00
	27	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	95.000.000,00	45.158.000,00	(49.842.000,00)	47,53
	28	Pembangunan Ruang Kelas Baru	737.500.000,00	731.251.451,00	(6.248.549,00)	99,15
	29	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00
	30	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00
Total :			38.290.243.578,00	32.847.344.173,00	(5.442.899.405,00)	85,79

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ KURANG	%
1	2	3	4	5	6=5-4	7
2. Pendidikan Anak Usia Dini	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	525.000.000,00	483.849.650,00	(41.150.350,00)	92,16
	2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	860.000.000,00	854.684.000,00	(5.316.000,00)	99,38
	3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	3.502.566.000,00	3.348.816.000,00	(153.750.000,00)	95,61
	4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	200.000.000,00	172.933.000,00	(27.067.000,00)	86,47
	5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	195.961.900,00	185.709.129,00	(10.252.771,00)	94,77
	6	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	4.999.850,00	4.999.850,00	0,00	100,00
	7	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	199.999.900,00	148.847.900,00	(51.152.000,00)	74,42
	8	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00
	9	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	69.999.700,00	40.217.700,00	(29.782.000,00)	57,45
	10	Pembangunan Ruang Kelas Baru	840.535.134,00	821.277.895,00	(19.257.239,00)	97,71
	11	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00
	12	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	70.000.000,00	59.550.000,00	(10.450.000,00)	85,07
		Total :	6.699.062.484,00	6.120.885.124,00	(578.177.360,00)	91,37
3. Pendidikan Kesetaraan	1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00
			Total :	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Pendidikan:			44.994.306.062,00	38.968.229.297,00	(6.026.076.765,00)	86,61

B. SPM Bidang Kesehatan

(PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan)

1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4.173.040.350,00	3.813.313.289,00	(359.727.061,00)	91,38
	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	164.556.000,00	139.068.000,00	(25.488.000,00)	84,51
	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	347.050.000,00	160.599.100,00	(186.450.900,00)	46,28
	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	33.135.000,00	32.970.000,00	(165.000,00)	99,50
	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	885.161.800,00	826.659.052,00	(58.502.748,00)	93,39
	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	11.050.000,00	11.039.000,00	(11.000,00)	99,90
	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.000.000,00	9.100.000,00	(900.000,00)	91,00
	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	45.275.000,00	35.383.200,00	(9.891.800,00)	78,15
	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	602.235.000,00	573.929.500,00	(28.305.500,00)	95,30
	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.000.000,00	9.852.000,00	(148.000,00)	98,52
	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	896.938.800,00	858.888.250,00	(38.050.550,00)	95,76
	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	245.733.000,00	185.672.000,00	(60.061.000,00)	75,56
Total:			7.424.174.950,00	6.656.473.391,00	(767.701.559,00)	89,66
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Kesehatan:			7.424.174.950,00	6.656.473.391,00	(767.701.559,00)	89,66

C. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.349.680.000,00	1.344.177.536,00	(5.502.464,00)	99,59
	2	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.039.420.000,00	1.035.463.919,00	(3.956.081,00)	99,62
Total:			2.389.100.000,00	2.379.641.455,00	(9.458.545,00)	99,60

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ KURANG	%
1	2	3	4	5	6=5-4	7
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.953.020.000,00	1.950.822.210,00	(2.197.790,00)	99,89
		2 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	358.060.000,00	354.190.190,00	(3.869.810,00)	98,92
		Total:	2.311.080.000,00	2.305.012.400,00	(6.067.600,00)	99,74
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:			4.700.180.000,00	4.684.653.855,00	(15.526.145,00)	99,67
D. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)						
1.	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi	1 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.000.000,00	4.614.000,00	(386.000,00)	92,28
		2 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	10.000.000,00	8.929.190,00	(1.070.810,00)	89,29
		Total:	15.000.000,00	13.543.190,00	(1.456.810,00)	90,29
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman:			15.000.000,00	13.543.190,00	(1.456.810,00)	90,29
E. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota)						
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.158.400.000,00	2.118.513.156,00	(39.886.844,00)	98,15
		2 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	148.799.900,00	144.473.111,00	(4.326.789,00)	97,09
		Total:	2.307.199.900,00	2.262.986.267,00	(44.213.633,00)	98,08
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	97.632.500,00	92.481.230,00	0	0,00
		Total:	97.632.500,00	92.481.230,00	0,00	94,72
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban	1 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	279.637.000,00	270.716.300,00	(8.920.700,00)	96,81
		2 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	15.000.000,00	14.995.200,00	(4.800,00)	99,97
		Total:	294.637.000,00	285.711.500,00	(8.925.500,00)	96,97
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	40.647.500,00	40.193.000,00	(454.500,00)	98,88
		2 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	891.785.000,00	826.594.750,00	(65.190.250,00)	92,69
		3 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	3.759.330.750,00	3.733.176.271,00	(26.154.479,00)	99,30
		Total:	4.691.763.250,00	4.599.964.021,00	(91.799.229,00)	98,04
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum:			7.391.232.650,00	7.241.143.018,00	(144.938.362,00)	97,97

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ KURANG	%
1	2	3	4	5	6=5-4	7
F. SPM Bidang Sosial (PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota)						
1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	1	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	10.000.000,00	9.690.500,00	(309.500,00)	96,91
	2	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	10.000.000,00	9.997.014,00	(2.986,00)	99,97
	3	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20.000.000,00	19.776.670,00	(223.330,00)	98,88
	4	Penyediaan Permakanan	30.000.000,00	29.988.900,00	(11.100,00)	99,96
	Total:		70.000.000,00	69.453.084,00	(546.916,00)	99,22
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	1	Penyediaan Permakanan	30.000.000,00	29.988.900,00	(11.100,00)	99,96
	2	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	10.000.000,00	9.690.500,00	(309.500,00)	96,91
	3	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	10.000.000,00	9.997.014,00	(2.986,00)	99,97
	4	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20.000.000,00	19.776.670,00	(223.330,00)	98,88
	Total:		70.000.000,00	69.453.084,00	(546.916,00)	99,22
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	1	Penyediaan Permakanan	30.000.000,00	29.988.900,00	(11.100,00)	99,96
	2	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	10.000.000,00	9.690.500,00	(309.500,00)	96,91
	3	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	10.000.000,00	9.997.014,00	(2.986,00)	99,97
	4	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20.000.000,00	19.776.670,00	(223.330,00)	98,88
	Total:		70.000.000,00	69.453.084,00	(546.916,00)	99,22
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	1	Penyediaan Permakanan	30.000.000,00	29.988.900,00	(11.100,00)	99,96
	2	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	10.000.000,00	9.690.500,00	(309.500,00)	96,91
	3	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	10.000.000,00	9.997.014,00	(2.986,00)	99,97
	4	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20.000.000,00	19.776.670,00	(223.330,00)	98,88
	Total:		70.000.000,00	69.453.084,00	(546.916,00)	99,22
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	1	Penyediaan Makanan	40.000.000,00	39.873.600,00	(126.400,00)	99,68
	Total:		40.000.000,00	39.873.600,00	(126.400,00)	99,68
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Sosial:			110.000.000,00	109.326.684,00	(673.316,00)	99,39
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM:			64.634.893.662,00	57.673.369.435,00	(6.961.524.227,00)	89,23

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 2

(dalam rupiah)

No.	S K P D	Jenis Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah			
			Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
1. Dinas Kesehatan		Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	-
		Retribusi Daerah	30.558.065.515,00	21.137.732.346,87	- 9.420.333.168,13	69,17
		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	0,00	0,00	-	-
		Lain-Lain PAD yang Sah	24.566.845.518,00	24.577.728.454,11	10.882.936,11	100,04
		Jumlah	55.124.911.033,00	45.715.460.800,98	- 9.409.450.232,02	82,93
- Dinas Kesehatan		Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	-
		Retribusi Daerah	4.226.600.000,00	3.524.823.000,00	- (701.777.000,00)	83,40
		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	0,00	0,00	-	-
		Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	882.935,38	882.935,38	-
		Jumlah	4.226.600.000,00	3.525.705.935,38	- (700.894.064,62)	83,42
- RSUD Kol. Abundjani Bangko (BLUD)		Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	-
		Retribusi Daerah	26.331.465.515,00	17.612.909.346,87	- (8.718.556.168,13)	66,89
		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	0,00	0,00	-	-
		Lain-Lain PAD yang Sah	24.566.845.518,00	24.576.845.518,73	10.000.000,73	100,04
		Jumlah	50.898.311.033,00	42.189.754.865,60	- (8.708.556.167,40)	82,89
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	-
		Retribusi Daerah	240.000.000,00	529.638.730,80	289.638.730,80	220,68
		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	0,00	0,00	0,00	-
		Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	240.000.000,00	529.638.730,80	289.638.730,80	220,68
3. Dinas Perumahan dan pemukiman		Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	-
		Retribusi Daerah	236.360.000,00	253.780.000,00	17.420.000,00	107,37
		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	0,00	0,00	0,00	-
		Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	236.360.000,00	253.780.000,00	17.420.000,00	107,37
4. Dinas Lingkungan Hidup		Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	-
		Retribusi Daerah	980.000.000,00	399.078.200,00	- (580.921.800,00)	40,72
		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	0,00	0,00	0,00	-
		Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	980.000.000,00	399.078.200,00	- (580.921.800,00)	40,72
5. Dinas Perhubungan		Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	-
		Retribusi Daerah	368.800.000,00	236.923.000,00	- (131.877.000,00)	64,24
		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	0,00	0,00	0,00	-
		Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	368.800.000,00	236.923.000,00	- (131.877.000,00)	64,24
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian		Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	-
		Retribusi Daerah	1.376.367.000,00	745.634.200,00	- (630.732.800,00)	54,17
		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	0,00	0,00	0,00	-
		Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	1.376.367.000,00	745.634.200,00	- (630.732.800,00)	54,17
7. Dinas Perikanan		Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	-
		Retribusi Daerah	35.000.000,00	0,00	- (35.000.000,00)	-
		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	0,00	0,00	0,00	-
		Lain-Lain PAD yang Sah	127.500.000,00	4.475.000,00	- (123.025.000,00)	3,51
		Jumlah	162.500.000,00	4.475.000,00	- (158.025.000,00)	2,75
8. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga		Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	-
		Retribusi Daerah	188.600.000,00	121.175.000,00	- (67.425.000,00)	64,25
		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	0,00	0,00	0,00	-
		Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	188.600.000,00	121.175.000,00	- (67.425.000,00)	64,25
9. Dinas Peternakan dan Perkebunan		Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	-
		Retribusi Daerah	100.000.000,00	38.430.000,00	- (61.570.000,00)	38,43
		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	0,00	0,00	0,00	-
		Lain-Lain PAD yang Sah	30.000.000,00	30.023.000,00	23.000,00	100,08
		Jumlah	130.000.000,00	68.453.000,00	- (61.547.000,00)	52,66
10. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	-
		Retribusi Daerah	113.000.000,00	58.132.500,00	- (54.867.500,00)	51,44
		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	0,00	0,00	0,00	-
		Lain-Lain PAD yang Sah	18.000.000,00	51.896.250,00	33.896.250,00	288,31
		Jumlah	131.000.000,00	110.028.750,00	- (20.971.250,00)	83,99
11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)		Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	-
		Retribusi Daerah	65.758.500,00	34.920.000,00	- (30.838.500,00)	53,10
		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	7.488.236.682,00	7.488.236.682,97	0,97	100,00
		Lain-Lain PAD yang Sah	2.910.459.178,00	6.858.972.628,42	3.948.513.450,42	235,67
		Jumlah	10.464.454.360,00	14.382.129.311,39	3.917.674.951,39	137,44
12. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah		Pajak Daerah	31.183.000.000,00	32.240.409.337,40	1.057.409.337,40	103,39
		Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	-
		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	0,00	0,00	0,00	-
		Lain-Lain PAD yang Sah	20.000.000,00	23.574.314,94	3.574.314,94	117,87
		Jumlah	31.203.000.000,00	32.263.983.652,34	1.060.983.652,34	103,40
Jumlah		Pajak Daerah	31.183.000.000,00	32.240.409.337,40	1.057.409.337,40	103,39
		Retribusi Daerah	34.261.951.015,00	23.555.443.977,67	- (10.706.507.037,33)	68,75
		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	7.488.236.682,00	7.488.236.682,97	0,97	100,00
		Dipisahkan				
		Lain-Lain PAD yang Sah	27.672.804.696,00	31.546.669.647,47	3.873.864.951,47	114,00
		Jumlah	100.605.992.393,00	94.830.759.645,51	- (5.775.232.747,49)	94,26

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PEGAWAI SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam rupiah)

No.	S K P D	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6=4/3
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	334.930.542.056,00	300.984.958.947,00	(33.945.583.109,00)	89,86
2.	Dinas Kesehatan	112.231.649.609,00	107.327.481.559,00	(4.904.168.050,00)	95,63
	- Dinas Kesehatan	104.791.649.609,00	100.313.928.559,00	(4.477.721.050,00)	95,73
	- RSUD Kol. Abundjani Bangko	7.440.000.000,00	7.013.553.000,00	(426.447.000,00)	94,27
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.677.920.724,00	8.223.157.156,00	(454.763.568,00)	94,76
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.497.291.629,00	3.312.655.426,00	(184.636.203,00)	94,72
5.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.319.881.619,00	2.239.414.224,00	(80.467.395,00)	96,53
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.303.110.591,00	2.011.075.870,00	(292.034.721,00)	87,32
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	4.449.686.064,00	4.221.811.690,00	(227.874.374,00)	94,88
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.795.924.449,00	3.453.194.099,00	(342.730.350,00)	90,97
9.	Dinas Ketahanan Pangan	1.863.168.797,00	1.759.202.828,00	(103.965.969,00)	94,42
10.	Dinas Lingkungan Hidup	4.160.484.133,00	3.876.002.320,00	(284.481.813,00)	93,16
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.844.582.250,00	2.596.202.509,00	(248.379.741,00)	91,27
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.441.132.403,00	3.187.510.008,00	(253.622.395,00)	92,63
13.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.583.663.823,00	5.124.883.965,00	(458.779.858,00)	91,78
14.	Dinas Perhubungan	2.898.159.610,00	2.767.869.642,00	(130.289.968,00)	95,50
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.227.859.717,00	3.093.482.592,00	(134.377.125,00)	95,84
16.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	3.727.023.240,00	3.460.243.172,00	(266.780.068,00)	92,84
17.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	4.515.807.677,00	4.425.783.199,00	(90.024.478,00)	98,01
18.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.536.485.162,00	2.261.698.997,00	(274.786.165,00)	89,17
19.	Dinas Perikanan	2.583.339.250,00	2.254.748.434,00	(328.590.816,00)	87,28
20.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	4.610.772.074,00	3.850.175.256,00	(760.596.818,00)	83,50
21.	Dinas Peternakan dan Perkebunan	5.626.278.207,00	5.084.717.953,00	(541.560.254,00)	90,37
22.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	15.548.326.387,00	13.644.788.677,00	(1.903.537.710,00)	87,76
23.	Sekretariat Daerah	15.261.563.651,00	13.985.543.369,00	(1.276.020.282,00)	91,64
24.	Inspektorat Daerah	6.972.662.910,00	6.740.021.421,00	(232.641.489,00)	96,66
25.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.346.655.818,00	4.147.335.333,00	(199.320.485,00)	95,41
26.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.872.360.744,00	5.612.033.615,00	(260.327.129,00)	95,57
27.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	4.290.920.435,00	3.895.964.891,00	(394.955.544,00)	90,80
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	4.460.048.728,00	4.148.811.581,00	(311.237.147,00)	93,02
29.	Badan Penelitian dan Pengembangan	2.329.625.741,00	2.048.640.493,00	(280.985.248,00)	87,94
30.	Sekretariat DPRD	21.611.458.854,00	20.742.855.689,00	(868.603.165,00)	95,98
31.	Kantor Camat Bangko	6.148.763.647,00	5.941.072.533,00	(207.691.114,00)	96,62
32.	Kantor Camat Tabir	4.136.874.200,00	3.947.499.954,00	(189.374.246,00)	95,42
33.	Kantor Camat Pamenang	2.590.000.167,00	2.455.511.404,00	(134.488.763,00)	94,81
34.	Kantor Camat Pamenang Barat	1.665.087.839,00	1.538.142.688,00	(126.945.151,00)	92,38
35.	Kantor Camat Tabir Ulu	1.427.104.427,00	1.276.060.660,00	(151.043.767,00)	89,42
36.	Kantor Camat Tabir Selatan	1.289.999.108,00	1.233.324.266,00	(56.674.842,00)	95,61
37.	Kantor Camat Tabir Timur	1.073.303.871,00	1.017.080.511,00	(56.223.360,00)	94,76
38.	Kantor Camat Tabir Ilir	1.210.831.832,00	1.032.547.886,00	(178.283.946,00)	85,28
39.	Kantor Camat Tabir Barat	1.381.886.907,00	1.319.459.576,00	(62.427.331,00)	95,48
40.	Kantor Camat Margo Tabir	1.308.600.500,00	1.253.911.561,00	(54.688.939,00)	95,82
41.	Kantor Camat Tabir Lintas	1.339.057.577,00	1.197.856.845,00	(141.200.732,00)	89,46
42.	Kantor Camat Renah Pamenang	1.076.752.342,00	836.007.229,00	(240.745.113,00)	77,64
43.	Kantor Camat Pamenang Selatan	1.064.967.547,00	928.096.185,00	(136.871.362,00)	87,15
44.	Kantor Camat Muara Siau	1.859.893.850,00	1.697.668.166,00	(162.225.684,00)	91,28
45.	Kantor Camat Tiang Pumpung	1.454.146.028,00	1.328.161.796,00	(125.984.232,00)	91,34
46.	Kantor Camat Jangkat	1.988.896.905,00	1.557.471.527,00	(431.425.378,00)	78,31
47.	Kantor Camat Jangkat Timur	1.276.724.924,00	1.095.798.743,00	(180.926.181,00)	85,83
48.	Kantor Camat Sungai Manau	1.552.474.690,00	1.423.424.952,00	(129.049.738,00)	91,69
49.	Kantor Camat Renah Pembarap	1.260.126.409,00	1.170.080.075,00	(90.046.334,00)	92,85
50.	Kantor Camat Pangkalan Jambu	1.461.507.626,00	1.305.210.906,00	(156.296.720,00)	89,31
51.	Kantor Camat Batang Masumai	1.392.902.424,00	1.313.190.833,00	(79.711.591,00)	94,28
52.	Kantor Camat Bangko Barat	1.327.499.278,00	1.287.475.893,00	(40.023.385,00)	96,99
53.	Kantor Camat Lembah Masurai	1.610.990.493,00	1.449.591.075,00	(161.399.418,00)	89,98
54.	Kantor Camat Nalo Tantan	1.386.098.649,00	1.330.638.726,00	(55.459.923,00)	96,00
55.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.693.881.162,00	2.421.905.721,00	(271.975.441,00)	89,90
J u m l a h		645.496.758.754,00	591.839.454.626,00	(53.657.304.128,00)	91,69

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam rupiah)

No.	S K P D	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6=4/3
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	65.041.394.590,00	59.581.619.049,00	(5.459.775.541,00)	91,61
2.	Dinas Kesehatan	116.818.415.838,00	97.122.528.379,96	(19.695.887.458,04)	83,14
	- Dinas Kesehatan	74.404.846.166,00	62.093.705.356,96	(12.311.140.809,04)	83,45
	- RSUD Kol. Abundjani Bangko	42.413.569.672,00	35.028.823.023,00	(7.384.746.649,00)	82,59
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.157.119.220,00	12.065.753.015,00	(91.366.205,00)	99,25
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.729.871.900,00	8.563.222.516,00	(166.649.384,00)	98,09
5.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.377.847.726,00	5.270.268.366,00	(107.579.360,00)	98,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.530.487.492,00	1.470.478.208,00	(60.009.284,00)	96,08
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	4.431.459.050,00	4.322.866.247,00	(108.592.803,00)	97,55
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.221.675.000,00	1.997.715.237,00	(223.959.763,00)	89,92
9.	Dinas Ketahanan Pangan	1.193.070.000,00	1.085.529.721,00	(107.540.279,00)	90,99
10.	Dinas Lingkungan Hidup	10.668.682.049,00	9.448.432.592,00	(1.220.249.457,00)	88,56
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.820.680.000,00	2.738.407.717,00	(82.272.283,00)	97,08
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.675.507.950,00	5.543.697.472,00	(131.810.478,00)	97,68
13.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.283.879.000,00	7.014.195.022,00	(1.269.683.978,00)	84,67
14.	Dinas Perhubungan	1.228.367.640,00	1.203.614.427,00	(24.753.213,00)	97,98
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.399.568.200,00	2.366.212.821,00	(33.355.379,00)	98,61
16.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	3.934.445.950,00	3.457.115.106,00	(477.330.844,00)	87,87
17.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	2.196.851.110,00	2.045.357.224,00	(151.493.886,00)	93,10
18.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.193.799.715,00	948.982.814,00	(244.816.901,00)	79,49
19.	Dinas Perikanan	1.735.868.000,00	1.553.430.765,00	(182.437.235,00)	89,49
20.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	7.672.474.000,00	7.354.573.407,00	(317.900.593,00)	95,86
21.	Dinas Peternakan dan Perkebunan	7.095.214.000,00	5.350.603.629,00	(1.744.610.371,00)	75,41
22.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	6.771.565.999,00	6.686.766.433,00	(84.799.566,00)	98,75
23.	Sekretariat Daerah	25.037.131.364,00	24.470.036.685,00	(567.094.679,00)	97,73
24.	Inspektorat Daerah	7.619.586.401,00	6.888.150.415,00	(731.435.986,00)	90,40
25.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.182.701.660,00	4.930.709.068,00	(251.992.592,00)	95,14
26.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.962.224.726,00	7.433.407.895,00	(528.816.831,00)	93,36
27.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	3.693.123.500,00	3.520.963.945,00	(172.159.555,00)	95,34
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3.717.415.000,00	2.825.183.571,00	(892.231.429,00)	76,00
29.	Badan Penelitian dan Pengembangan	1.054.480.000,00	1.027.222.064,00	(27.257.936,00)	97,42
30.	Sekretariat DPRD	26.295.645.773,00	23.588.343.337,00	(2.707.302.436,00)	89,70
31.	Kantor Camat Bangko	1.824.429.710,00	1.732.724.139,00	(91.705.571,00)	94,97
32.	Kantor Camat Tabir	2.638.943.294,00	2.435.563.823,00	(203.379.471,00)	92,29
33.	Kantor Camat Pamenang	839.612.920,00	696.899.550,00	(142.713.370,00)	83,00
34.	Kantor Camat Pamenang Barat	460.682.989,00	450.767.764,00	(9.915.225,00)	97,85
35.	Kantor Camat Tabir Ulu	457.265.500,00	370.355.458,00	(86.910.042,00)	80,99
36.	Kantor Camat Tabir Selatan	340.670.000,00	340.327.958,00	(342.042,00)	99,90
37.	Kantor Camat Tabir Timur	353.480.000,00	351.099.800,00	(2.380.200,00)	99,33
38.	Kantor Camat Tabir Ilir	381.221.750,00	295.651.000,00	(85.570.750,00)	77,55
39.	Kantor Camat Tabir Barat	542.985.500,00	445.332.790,00	(97.652.710,00)	82,02
40.	Kantor Camat Margo Tabir	485.974.350,00	398.271.844,00	(87.702.506,00)	81,95
41.	Kantor Camat Tabir Lintas	447.395.000,00	420.987.310,00	(26.407.690,00)	94,10
42.	Kantor Camat Renah Pamenang	363.524.700,00	360.731.164,00	(2.793.536,00)	99,23
43.	Kantor Camat Pamenang Selatan	393.277.000,00	300.985.400,00	(92.291.600,00)	76,53
44.	Kantor Camat Muara Siau	334.884.600,00	286.220.100,00	(48.664.500,00)	85,47
45.	Kantor Camat Tiang Pumpung	373.589.000,00	238.974.642,00	(134.614.358,00)	63,97
46.	Kantor Camat Jangkat	456.000.000,00	403.559.459,00	(52.440.541,00)	88,50
47.	Kantor Camat Jangkat Timur	839.494.000,00	703.297.942,00	(136.196.058,00)	83,78
48.	Kantor Camat Sungai Manau	384.707.600,00	378.392.467,00	(6.315.133,00)	98,36
49.	Kantor Camat Renah Pembarap	351.328.300,00	349.992.322,00	(1.335.978,00)	99,62
50.	Kantor Camat Pangkalan Jambu	448.123.000,00	434.492.914,00	(13.630.086,00)	96,96
51.	Kantor Camat Batang Masumai	388.530.200,00	385.970.435,00	(2.559.765,00)	99,34
52.	Kantor Camat Bangko Barat	325.861.950,00	305.886.512,00	(19.975.438,00)	93,87
53.	Kantor Camat Lembah Masurai	433.670.000,00	372.285.100,00	(61.384.900,00)	85,85
54.	Kantor Camat Nalo Tantan	397.178.000,00	385.957.700,00	(11.220.300,00)	97,17
55.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.336.522.400,00	2.156.188.802,00	(180.333.598,00)	92,28
J u m l a h		376.339.904.616,00	336.876.303.542,96	(39.463.601.073,04)	89,51

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA HIBAH SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam rupiah)

No.	S K P D	Jenis Belanja Hibah	Belanja Hibah			
			Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
			4	5	6=5-4	7=5/4
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Hibah Uang kepada Instansi Vertikal	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Uang (dibentuk berdasarkan Per-UU-an)	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Barang (dibentuk berdasarkan Per-UU-an)	4.600.005.000,00	2.927.329.436,00	(1.672.675.564,00)	63,64
		Hibah Uang (bersifat Sosial Kemasyarakatan)	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	100,00
		Hibah Barang (bersifat Sosial Kemasyarakatan)	60.000.000,00	59.550.000,00	(450.000,00)	99,25
		Hibah Barang (berbadan hukum Indonesia)	400.000.000,00	399.463.771,00	(536.229,00)	99,87
		Belanja Hibah Uang Dana BOS Satdikdas Negeri	271.200.000,00	271.200.000,00	0,00	100,00
		Belanja Hibah Uang Dana BOS Satdikdas Swasta	6.151.420.000,00	6.148.165.237,00	(3.254.763,00)	99,95
		Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Dana BOSP (BOP PAUD)	3.012.600.000,00	2.974.399.000,00	(38.201.000,00)	98,73
		Belanja Hibah Dana BOSP (BOP Kesetaraan)	2.697.100.000,00	2.559.355.500,00	(137.744.500,00)	94,89
		Jumlah	17.642.325.000,00	15.789.462.944,00	(1.852.862.056,00)	89,50
2. Dinas Kesehatan		Hibah Uang kepada Instansi Vertikal	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Uang (dibentuk berdasarkan Per-UU-an)	299.154.000,00	299.154.000,00	0,00	100,00
		Hibah Barang (dibentuk berdasarkan Per-UU-an)	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Uang (bersifat Sosial Kemasyarakatan)	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Barang (bersifat Sosial Kemasyarakatan)	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Barang (berbadan hukum Indonesia)	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Uang Dana BOS Satdikdas Negeri	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Uang Dana BOS Satdikdas Swasta	0,00	0,00	0,00	-
		Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Dana BOSP (BOP PAUD)	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Dana BOSP (BOP Kesetaraan)	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	299.154.000,00	299.154.000,00	0,00	100,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Hibah Uang kepada Instansi Vertikal	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Uang (dibentuk berdasarkan Per-UU-an)	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Barang (dibentuk berdasarkan Per-UU-an)	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Uang (bersifat Sosial Kemasyarakatan)	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Barang (bersifat Sosial Kemasyarakatan)	6.799.205.000,00	6.790.559.099,00	(8.645.901,00)	99,87
		Hibah Barang (berbadan hukum Indonesia)	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Uang Dana BOS Satdikdas Negeri	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Uang Dana BOS Satdikdas Swasta	0,00	0,00	0,00	-
		Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Dana BOSP (BOP PAUD)	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Dana BOSP (BOP Kesetaraan)	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	6.799.205.000,00	6.790.559.099,00	(8.645.901,00)	99,87
5. Dinas Perikanan		Hibah Uang kepada Instansi Vertikal	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Uang (dibentuk berdasarkan Per-UU-an)	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Barang (dibentuk berdasarkan Per-UU-an)	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Uang (bersifat Sosial Kemasyarakatan)	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Barang (bersifat Sosial Kemasyarakatan)	220.340.000,00	0,00	(220.340.000,00)	0,00
		Hibah Barang (berbadan hukum Indonesia)	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Uang Dana BOS Satdikdas Negeri	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Uang Dana BOS Satdikdas Swasta	0,00	0,00	0,00	-
		Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Dana BOSP (BOP PAUD)	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Dana BOSP (BOP Kesetaraan)	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	220.340.000,00	0,00	(220.340.000,00)	0,00
6. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga		Hibah Uang kepada Instansi Vertikal	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Uang (dibentuk berdasarkan Per-UU-an)	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Barang (dibentuk berdasarkan Per-UU-an)	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Uang (bersifat Sosial Kemasyarakatan)	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Barang (bersifat Sosial Kemasyarakatan)	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	100,00
		Hibah Barang (berbadan hukum Indonesia)	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0,00	100,00
		Belanja Hibah Uang Dana BOS Satdikdas Negeri	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Uang Dana BOS Satdikdas Swasta	0,00	0,00	0,00	-
		Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Dana BOSP (BOP PAUD)	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Dana BOSP (BOP Kesetaraan)	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	2.480.000.000,00	2.480.000.000,00	0,00	100,00
7. Dinas Peternakan dan Perkebunan		Hibah Uang kepada Instansi Vertikal	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Uang (dibentuk berdasarkan Per-UU-an)	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Barang (dibentuk berdasarkan Per-UU-an)	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Uang (bersifat Sosial Kemasyarakatan)	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Barang (bersifat Sosial Kemasyarakatan)	1.178.650.000,00	1.174.719.317,00	(3.930.683,00)	99,67
		Hibah Barang (berbadan hukum Indonesia)	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Uang Dana BOS Satdikdas Negeri	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Uang Dana BOS Satdikdas Swasta	0,00	0,00	0,00	-
		Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Dana BOSP (BOP PAUD)	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Dana BOSP (BOP Kesetaraan)	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	1.178.650.000,00	1.174.719.317,00	(3.930.683,00)	99,67
8. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		Hibah Uang kepada Instansi Vertikal	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Uang (dibentuk berdasarkan Per-UU-an)	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Barang (dibentuk berdasarkan Per-UU-an)	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Uang (bersifat Sosial Kemasyarakatan)	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Barang (bersifat Sosial Kemasyarakatan)	1.121.500.000,00	1.117.721.600,00	(3.778.400,00)	99,66
		Hibah Barang (berbadan hukum Indonesia)	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Uang Dana BOS Satdikdas Negeri	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Uang Dana BOS Satdikdas Swasta	0,00	0,00	0,00	-
		Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Dana BOSP (BOP PAUD)	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Dana BOSP (BOP Kesetaraan)	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	1.121.500.000,00	1.117.721.600,00	(3.778.400,00)	99,66

No.	S K P D	Jenis Belanja Hibah	Belanja Hibah			
			Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
10. Kecamatan Bangko		Hibah Uang kepada Instansi Vertikal	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Uang (dibentuk berdasarkan Per-UU-an)	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Barang (dibentuk berdasarkan Per-UU-an)	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Uang (bersifat Sosial Kemasyarakatan)	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Barang (bersifat Sosial Kemasyarakatan)	2.605.598.928,00	2.605.598.928,00	0,00	100,00
		Hibah Barang (berbadan hukum Indonesia)	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Uang Dana BOS Satdikdas Negeri	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Uang Dana BOS Satdikdas Swasta	0,00	0,00	0,00	-
		Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Dana BOSP (BOP PAUD)	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Dana BOSP (BOP Kesetaraan)	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah	2.605.598.928,00	2.605.598.928,00	0,00	100,00	
11. Kecamatan Tabir		Hibah Uang kepada Instansi Vertikal	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Uang (dibentuk berdasarkan Per-UU-an)	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Barang (dibentuk berdasarkan Per-UU-an)	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Uang (bersifat Sosial Kemasyarakatan)	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Barang (bersifat Sosial Kemasyarakatan)	2.915.138.928,00	2.780.827.732,00	(134.311.196,00)	95,39
		Hibah Barang (berbadan hukum Indonesia)	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Uang Dana BOS Satdikdas Negeri	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Uang Dana BOS Satdikdas Swasta	0,00	0,00	0,00	-
		Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Dana BOSP (BOP PAUD)	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Dana BOSP (BOP Kesetaraan)	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah	2.915.138.928,00	2.780.827.732,00	(134.311.196,00)	95,39	
12. Kecamatan Pamenang		Hibah Uang kepada Instansi Vertikal	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Uang (dibentuk berdasarkan Per-UU-an)	49.800.000,00	0,00	(49.800.000,00)	-
		Hibah Barang (dibentuk berdasarkan Per-UU-an)	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Uang (bersifat Sosial Kemasyarakatan)	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Barang (bersifat Sosial Kemasyarakatan)	698.288.432,00	537.199.800,00	(161.088.632,00)	76,93
		Hibah Barang (berbadan hukum Indonesia)	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Uang Dana BOS Satdikdas Negeri	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Uang Dana BOS Satdikdas Swasta	0,00	0,00	0,00	-
		Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Dana BOSP (BOP PAUD)	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Dana BOSP (BOP Kesetaraan)	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah	748.088.432,00	537.199.800,00	(210.888.632,00)	71,81	
13. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Hibah Uang kepada Instansi Vertikal	33.273.746.000,00	33.273.746.000,00	0,00	100,00
		Hibah Uang (dibentuk berdasarkan Per-UU-an)	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Barang (dibentuk berdasarkan Per-UU-an)	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Uang (bersifat Sosial Kemasyarakatan)	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Barang (bersifat Sosial Kemasyarakatan)	0,00	0,00	0,00	-
		Hibah Barang (berbadan hukum Indonesia)	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Uang Dana BOS Satdikdas Negeri	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Uang Dana BOS Satdikdas Swasta	0,00	0,00	0,00	-
		Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.027.921.950,00	1.027.921.950,00	0,00	100,00
		Belanja Hibah Dana BOSP (BOP PAUD)	0,00	0,00	0,00	-
		Belanja Hibah Dana BOSP (BOP Kesetaraan)	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah	34.301.667.950,00	34.301.667.950,00	0,00	100,00	
Jumlah		Hibah Uang kepada Instansi Vertikal	33.273.746.000,00	33.273.746.000,00	0,00	100,00
		Hibah Uang (dibentuk berdasarkan Per-UU-an)	348.954.000,00	299.154.000,00	(49.800.000,00)	85,73
		Hibah Barang (dibentuk berdasarkan Per-UU-an)	4.600.005.000,00	2.927.329.436,00	(1.672.675.564,00)	63,64
		Hibah Uang (bersifat Sosial Kemasyarakatan)	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	100,00
		Hibah Barang (bersifat Sosial Kemasyarakatan)	15.778.721.288,00	15.246.176.476,00	(532.544.812,00)	96,62
		Hibah Barang (berbadan hukum Indonesia)	2.700.000.000,00	2.699.463.771,00	(536.229,00)	99,98
		Belanja Hibah Uang Dana BOS Satdikdas Negeri	271.200.000,00	271.200.000,00	0,00	100,00
		Belanja Hibah Uang Dana BOS Satdikdas	6.151.420.000,00	6.148.165.237,00	(3.254.763,00)	99,95
		Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.027.921.950,00	1.027.921.950,00	1.027.921.950,00	100,00
		Belanja Hibah Dana BOSP (BOP PAUD)	3.012.600.000,00	2.974.399.000,00	(38.201.000,00)	98,73
		Belanja Hibah Dana BOSP (BOP Kesetaraan)	2.697.100.000,00	2.559.355.500,00	(137.744.500,00)	94,89
	Jumlah	70.311.668.238,00	67.876.911.370,00	(1.406.834.918,00)	96,54	

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 6

(dalam rupiah)						
No.	S K P D	Jenis Belanja Modal	Belanja Modal			
			Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	20.542.454.849,00	20.271.695.451,00	(270.759.398,00)	98,68
		Gedung dan Bangunan	41.557.583.070,00	40.478.949.151,00	(1.078.633.919,00)	97,40
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.017.000.000,00	2.008.342.377,00	(8.657.623,00)	99,57
		Aset Tetap Lainnya	3.830.428.075,00	3.802.545.925,00	(27.882.150,00)	99,27
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	67.947.465.994,00	66.561.532.904,00	(1.385.933.090,00)	97,96
2.	Dinas Kesehatan	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	12.317.183.825,00	10.726.717.729,00	(1.590.466.096,00)	87,09
		Gedung dan Bangunan	6.892.096.000,00	6.846.922.440,00	(45.173.560,00)	99,34
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	19.209.279.825,00	17.573.640.169,00	(1.635.639.656,00)	91,49
	- Dinas Kesehatan	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	6.802.122.825,00	6.274.678.500,00	(527.444.325,00)	92,25
		Gedung dan Bangunan	5.918.096.000,00	5.874.595.850,00	(43.500.150,00)	99,26
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	12.720.218.825,00	12.149.274.350,00	(570.944.475,00)	95,51
	- RSUD Kol. Abundjani Bangko	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	5.515.061.000,00	4.452.039.229,00	(1.063.021.771,00)	80,73
		Gedung dan Bangunan	974.000.000,00	972.326.590,00	(1.673.410,00)	99,83
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	6.489.061.000,00	5.424.365.819,00	(1.064.695.181,00)	83,59
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	143.541.500,00	143.169.000,00	(372.500,00)	99,74
		Gedung dan Bangunan	7.406.644.000,00	7.366.868.270,00	(39.775.730,00)	99,46
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	79.139.767.776,00	78.629.328.580,00	(510.439.196,00)	99,36
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	86.689.953.276,00	86.139.365.850,00	(550.587.426,00)	99,36
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	45.830.000,00	45.615.000,00	(215.000,00)	99,53
		Gedung dan Bangunan	140.000.000,00	139.756.600,00	(243.400,00)	99,83
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	380.000.000,00	379.633.000,00	(367.000,00)	99,90
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	565.830.000,00	565.004.600,00	(825.400,00)	99,85
5.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	557.100.000,00	533.275.000,00	(23.825.000,00)	95,72
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	557.100.000,00	533.275.000,00	(23.825.000,00)	95,72
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.450.000,00	(50.000,00)	99,33
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	7.500.000,00	7.450.000,00	(50.000,00)	99,33
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	90.505.000,00	90.180.000,00	(325.000,00)	99,64
		Gedung dan Bangunan	338.000.000,00	337.283.800,00	(716.200,00)	99,79
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	113.500.000,00	112.922.000,00	(578.000,00)	99,49
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	542.005.000,00	540.385.800,00	(1.619.200,00)	99,70
9.	Dinas Ketahanan Pangan	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.490.000,00	(10.000,00)	99,87
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	7.500.000,00	7.490.000,00	(10.000,00)	99,87
10.	Dinas Lingkungan Hidup	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	550.696.000,00	545.571.650,00	(5.124.350,00)	99,07
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	830.156.000,00	827.717.195,00	(2.438.805,00)	99,71
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	1.380.852.000,00	1.373.288.845,00	(7.563.155,00)	99,45
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	159.600.000,00	158.000.000,00	(1.600.000,00)	99,00
		Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.588.000,00	(412.000,00)	99,59
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	259.600.000,00	257.588.000,00	(2.012.000,00)	99,22
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	118.875.000,00	117.200.000,00	(1.675.000,00)	98,59
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	118.875.000,00	117.200.000,00	(1.675.000,00)	98,59

No.	S K P D	Jenis Belanja Modal	Belanja Modal			
			Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang	%
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
13.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
		Gedung dan Bangunan	199.710.000,00	198.750.000,00	(960.000,00)	99,52
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	224.710.000,00	223.750.000,00	(960.000,00)	99,57
13.	Dinas Perhubungan	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	109.524.644,00	108.960.940,00	(563.704,00)	99,49
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	109.524.644,00	108.960.940,00	(563.704,00)	99,49
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	186.956.300,00	185.337.500,00	(1.618.800,00)	99,13
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	186.956.300,00	185.337.500,00	(1.618.800,00)	99,13
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	1.332.236.000,00	1.322.490.000,00	(9.746.000,00)	99,27
		Gedung dan Bangunan	2.417.000.000,00	2.388.918.250,00	(28.081.750,00)	98,84
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	380.000.000,00	379.734.654,00	(265.346,00)	99,93
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	4.129.236.000,00	4.091.142.904,00	(38.093.096,00)	99,08
16.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	91.000.000,00	88.800.000,00	(2.200.000,00)	97,58
		Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	29.390.335,00	(609.665,00)	97,97
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	121.000.000,00	118.190.335,00	(2.809.665,00)	97,68
17.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	195.580.000,00	191.555.000,00	(4.025.000,00)	97,94
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	35.000.000,00	34.900.000,00	(100.000,00)	99,71
		Aset Lainnya	15.000.000,00	14.800.000,00	(200.000,00)	98,67
		Jumlah	245.580.000,00	241.255.000,00	(4.325.000,00)	98,24
18.	Dinas Perikanan	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
		Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.774.000,00	(226.000,00)	99,89
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	210.000.000,00	209.774.000,00	(226.000,00)	99,89
19.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	521.915.000,00	520.928.500,00	(986.500,00)	99,81
		Gedung dan Bangunan	3.713.250.000,00	3.694.155.845,00	(19.094.155,00)	99,49
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	985.000.000,00	977.956.334,00	(7.043.666,00)	99,28
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	5.220.165.000,00	5.193.040.679,00	(27.124.321,00)	99,48
20.	Dinas Peternakan dan Perkebunan	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	42.205.000,00	39.685.000,00	(2.520.000,00)	94,03
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	42.205.000,00	39.685.000,00	(2.520.000,00)	94,03
21.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	301.500.000,00	299.569.000,00	(1.931.000,00)	99,36
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	301.500.000,00	299.569.000,00	(1.931.000,00)	99,36
22.	Sekretariat Daerah	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	1.712.800.000,00	1.695.902.100,00	(16.897.900,00)	99,01
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	1.712.800.000,00	1.695.902.100,00	(16.897.900,00)	99,01
23.	Inspektorat Daerah	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	980.598.000,00	930.282.714,00	(50.315.286,00)	94,87
		Gedung dan Bangunan	239.007.500,00	223.355.000,00	(15.652.500,00)	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	300.000.000,00	274.725.000,00	(25.275.000,00)	-
		Jumlah	1.519.605.500,00	1.428.362.714,00	(91.242.786,00)	94,00
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	175.250.000,00	174.837.000,00	(413.000,00)	99,76
		Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.459.000,00	(541.000,00)	99,73
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	375.250.000,00	374.296.000,00	(954.000,00)	99,75
25.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tanah	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	0,00
		Peralatan dan Mesin	1.431.700.000,00	1.351.708.000,00	(79.992.000,00)	94,41
		Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	59.800.000,00	(200.000,00)	99,67
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	1.500.200.000,00	1.411.508.000,00	(88.692.000,00)	94,09

No.	S K P D	Jenis Belanja Modal	Belanja Modal			
			Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang	%
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
26.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	767.190.000,00	756.301.000,00	(10.889.000,00)	98,58
		Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.496.000,00	(504.000,00)	99,75
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	967.190.000,00	955.797.000,00	(11.393.000,00)	98,82
27.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	230.400.000,00	229.432.000,00	(968.000,00)	99,58
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	120.000.000,00	119.950.000,00	(50.000,00)	99,96
		Jumlah	350.400.000,00	349.382.000,00	(1.018.000,00)	99,71
28.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	70.900.000,00	70.410.000,00	(490.000,00)	99,31
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	70.900.000,00	70.410.000,00	(490.000,00)	99,31
29.	Sekretariat DPRD	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	1.875.969.125,00	1.855.958.000,00	(20.011.125,00)	98,93
		Gedung dan Bangunan	193.000.000,00	192.605.192,00	(394.808,00)	99,80
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	2.068.969.125,00	2.048.563.192,00	(20.405.933,00)	99,01
30.	Kantor Camat Bangko	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	21.900.000,00	18.500.000,00	(3.400.000,00)	84,47
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	21.900.000,00	18.500.000,00	(3.400.000,00)	84,47
31.	Kantor Camat Tabir	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	164.070.000,00	113.550.000,00	(50.520.000,00)	69,21
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	164.070.000,00	113.550.000,00	(50.520.000,00)	69,21
32.	Kantor Camat Pamenang	Tanah	0,00	0,00	0,00	100,00
		Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
34.	Kantor Camat Tabir Ulu	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
35.	Kantor Camat Tabir Selatan	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	100,00
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	100,00
36.	Kantor Camat Tabir Timur	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00
38.	Kantor Camat Tabir Barat	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	15.400.000,00	0,00	(15.400.000,00)	0,00
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	15.400.000,00	0,00	(15.400.000,00)	0,00
40.	Kantor Camat Margo Tabir	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	20.500.000,00	17.500.000,00	(3.000.000,00)	85,37
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	20.500.000,00	17.500.000,00	(3.000.000,00)	85,37
40.	Kantor Camat Tabir Lintas	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	18.000.000,00	(2.000.000,00)	90,00
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	20.000.000,00	18.000.000,00	(2.000.000,00)	90,00
43.	Kantor Camat Muara Siau	Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	22.500.000,00	22.250.000,00	(250.000,00)	98,89
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	22.500.000,00	22.250.000,00	(250.000,00)	98,89

No.	S K P D	Jenis Belanja Modal	Belanja Modal			
			Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang	%
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
44. Kantor Camat Tiang Pumpung		Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	29.898.000,00	(102.000,00)	99,66
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	30.000.000,00	29.898.000,00	(102.000,00)	99,66
44. Kantor Camat Sungai Manau		Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	27.000.000,00	26.490.000,00	(510.000,00)	98,11
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	27.000.000,00	26.490.000,00	(510.000,00)	98,11
49. Kantor Camat Pangkalan Jambu		Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00
51. Kantor Camat Bangko Barat		Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
52. Kantor Camat Lembah Masurai		Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	16.950.000,00	6.400.000,00	(10.550.000,00)	37,76
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	16.950.000,00	6.400.000,00	(10.550.000,00)	37,76
53. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Tanah	0,00	0,00	0,00	-
		Peralatan dan Mesin	595.000.000,00	572.000.000,00	(23.000.000,00)	96,13
		Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
		Jumlah	595.000.000,00	572.000.000,00	(23.000.000,00)	96,13
Jumlah		Tanah	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	0,00
		Peralatan dan Mesin	45.616.430.243,00	43.409.708.584,00	(2.206.721.659,00)	95,16
		Gedung dan Bangunan	63.886.290.570,00	62.655.071.883,00	(1.231.218.687,00)	98,07
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	83.845.423.776,00	83.315.634.140,00	(529.789.636,00)	99,37
		Aset Tetap Lainnya	3.865.428.075,00	3.837.445.925,00	(27.982.150,00)	99,28
		Aset Lainnya	435.000.000,00	409.475.000,00	(25.525.000,00)	94,13
		Jumlah	197.657.072.664,00	193.627.335.532,00	(4.029.737.132,00)	97,96

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TIDAK TERDUGA
TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam rupiah)

No.	S K P D	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6=4/3
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	2.351.193.453,00	52.802.850,00	2.298.390.603,00	2,25
	- Penanggulangan Bencana Banjir dan Longsor (BANSOR) Desa Pulau Bayur Kec. Pamenang Selatan	2.351.193.453,00	52.802.850,00	2.298.390.603,00	2,25
J u m l a h		2.351.193.453,00	52.802.850,00	2.298.390.603,00	2,25

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
RINCIAN DEPOSITO DAN BUNGA DEPOSITO PADA BANK PERSEPSI
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam rupiah)

No.	Bank Persepsi & Tanggal Penempatan	Nomor Sertifikat Deposito	Jumlah	Penutupan		Bunga Deposito	Keterangan
				Tanggal	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Bank Jambi Cabang Bangko							
1.	12-02-2024	AZ-3005808323 A028806	10.000.000.000,00	23 Des 2024	10.000.000.000,00	431.506.849,29	
						39.726.027,40	13-03-2024
						42.465.753,42	16-04-2024
						41.095.890,41	13-05-2024
						42.465.753,42	12-06-2024
						41.095.890,41	12-07-2024
						42.465.753,42	12-08-2024
						42.465.753,42	12-09-2024
						41.095.890,41	12-10-2024
						42.465.753,42	12-11-2024
						41.095.890,41	12-12-2024
						15.068.493,15	23-12-2024
2.	12-02-2024	AZ-3005808439 A028808	10.000.000.000,00	23 Des 2024	10.000.000.000,00	431.506.849,29	
						39.726.027,40	13-03-2024
						42.465.753,42	16-04-2024
						41.095.890,41	13-05-2024
						42.465.753,42	12-06-2024
						41.095.890,41	12-07-2024
						42.465.753,42	12-08-2024
						42.465.753,42	12-09-2024
						41.095.890,41	12-10-2024
						42.465.753,42	12-11-2024
						41.095.890,41	12-12-2024
						15.068.493,15	23-12-2024
3.	12-02-2024	AZ-3005808412 A028807	10.000.000.000,00	23 Des 2024	10.000.000.000,00	431.506.849,29	
						39.726.027,40	13-03-2024
						42.465.753,42	16-04-2024
						41.095.890,41	13-05-2024
						42.465.753,42	12-06-2024
						41.095.890,41	12-07-2024
						42.465.753,42	12-08-2024
						42.465.753,42	12-09-2024
						41.095.890,41	12-10-2024
						42.465.753,42	12-11-2024
						41.095.890,41	12-12-2024
						15.068.493,15	23-12-2024
4.	12-02-2024	AZ-3005808498 A028810	10.000.000.000,00	23 Des 2024	10.000.000.000,00	431.506.849,29	
						39.726.027,40	13-03-2024
						42.465.753,42	16-04-2024
						41.095.890,41	13-05-2024
						42.465.753,42	12-06-2024
						41.095.890,41	12-07-2024
						42.465.753,42	12-08-2024
						42.465.753,42	12-09-2024
						41.095.890,41	12-10-2024
						42.465.753,42	12-11-2024
						41.095.890,41	12-12-2024
						15.068.493,15	23-12-2024
5.	12-02-2024	AZ-3005808455 A028809	10.000.000.000,00	23 Des 2024	10.000.000.000,00	431.506.849,29	
						39.726.027,40	13-03-2024
						42.465.753,42	16-04-2024
						41.095.890,41	13-05-2024
						42.465.753,42	12-06-2024
						41.095.890,41	12-07-2024
						42.465.753,42	12-08-2024
						42.465.753,42	12-09-2024
						41.095.890,41	12-10-2024
						42.465.753,42	12-11-2024
						41.095.890,41	12-12-2024
						15.068.493,15	23-12-2024
6.	05-04-2024	AZ-3005942167 A028844	10.000.000.000,00	20 Des 2024	10.000.000.000,00	360.273.972,58	
						41.095.890,41	05-05-2024
						42.465.753,42	05-06-2024
						41.095.890,41	05-07-2024
						42.465.753,42	05-08-2024
						42.465.753,42	05-09-2024
						41.095.890,41	05-10-2024
						42.465.753,42	05-11-2024
						41.095.890,41	05-12-2024
						26.027.397,26	24-12-2024

No.	Bank Persepsi & Tanggal Penempatan	Nomor Sertifikat Deposito	Jumlah	Penutupan		Bunga Deposito	Keterangan
				Tanggal	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	05-04-2024	AZ-3005942151 A019390	10.000.000.000,00	27 Des 2024	10.000.000.000,00	364.383.561,62 41.095.890,41 42.465.753,42 41.095.890,41 42.465.753,42 42.465.753,42 41.095.890,41 42.465.753,42 41.095.890,41 30.136.986,30	 05-05-2024 05-06-2024 05-07-2024 05-08-2024 05-09-2024 05-10-2024 05-11-2024 05-12-2024 27-12-2024
8.	05-04-2024	AZ-3005942208 A019450	10.000.000.000,00	20 Des 2024	10.000.000.000,00	360.273.972,58 41.095.890,41 42.465.753,42 41.095.890,41 42.465.753,42 42.465.753,42 41.095.890,41 42.465.753,42 41.095.890,41 26.027.397,26	 05-05-2024 05-06-2024 05-07-2024 05-08-2024 05-09-2024 05-10-2024 05-11-2024 05-12-2024 24-12-2024
Jumlah I			80.000.000.000,00		80.000.000.000,00	3.242.465.753,23	
II. Remunerasi Treasury Deposit Facility (TDF)							
1.	Kantor Pusat Bank Indonesia	519000251980				357.094.537,00	
Jumlah II						357.094.537,00	
Jumlah I + II + III			80.000.000.000,00			3.599.560.290,23	

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
REKAPITULASI REALISASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SD NEGERI SE-KABUPATEN MERANGIN
TAHUN ANGGARAN 2024

I. DANA BOS REGULER SD 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah	Saldo Awal			Pendapatan			Belanja							
		Bank	Tunai	Total Saldo Awal 2024	Koreksi Saldo Awal Bank/(Tunai) 2024	Saldo Awal Setelah Koreksi 2024	Pendapatan 2024	Pendapatan Lain-Lain	Total Pendapatan 2024	Belanja Operasi					
1	2	3	4	5=3+4	6	7=5+6	8	9	10=8+9	11	12	13	14	15	16=11+12+13+14+15
A. SD NEGERI															
1	SD NEGERI 01/VI BANGKO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.560.000,00	0,00	210.560.000,00	65.331.000,00	92.022.600,00	3.500.000,00	0,00	0,00	160.853.600,00
2	SD NEGERI 02/VI BANGKO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.820.000,00	0,00	425.820.000,00	162.780.600,00	214.094.400,00	0,00	0,00	0,00	376.875.000,00
3	SD NEGERI 03/VI BANGKO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.860.000,00	0,00	205.860.000,00	64.275.200,00	71.127.800,00	2.625.000,00	0,00	0,00	138.028.000,00
4	SD NEGERI 04/VI PULAU RENGAS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.040.000,00	0,00	62.040.000,00	21.573.500,00	30.519.000,00	500.000,00	6.000.000,00	0,00	58.592.500,00
5	SD NEGERI 05/VI KUNGKAI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.360.000,00	0,00	88.360.000,00	30.740.200,00	49.600.400,00	0,00	6.000.000,00	0,00	86.340.600,00
6	SD NEGERI 06/VI PAMENANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.940.000,00	0,00	235.940.000,00	107.796.300,00	58.730.700,00	20.336.000,00	19.875.000,00	0,00	206.738.000,00
7	SD NEGERI 07/VI LIMBUR MERANGIN I	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	133.480.000,00	0,00	133.480.000,00	46.488.400,00	56.923.200,00	0,00	5.250.000,00	0,00	108.661.600,00
8	SD NEGERI 08/VI LUBUK GAUNG I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.200.000,00	0,00	75.200.000,00	50.415.900,00	18.219.800,00	0,00	4.140.000,00	0,00	72.775.700,00
9	SD NEGERI 09/VI NALO GEDANG	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	87.384.000,00	0,00	87.384.000,00	49.792.600,00	13.375.400,00	0,00	11.700.000,00	0,00	74.868.000,00
10	SD NEGERI 10/VI SUNGAI MANAU I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.360.000,00	0,00	135.360.000,00	83.803.100,00	24.255.100,00	0,00	8.400.000,00	0,00	116.458.200,00
11	SD NEGERI 11/VI MUARA PANCO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.540.000,00	0,00	85.540.000,00	27.010.600,00	25.855.100,00	0,00	1.800.000,00	0,00	54.665.700,00
12	SD NEGERI 12/VI BUKIT BATU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.240.000,00	0,00	184.240.000,00	70.261.900,00	64.911.400,00	0,00	16.200.000,00	0,00	151.373.300,00
13	SD NEGERI 13/VI KAMPUNG TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.520.000,00	0,00	101.520.000,00	22.894.000,00	42.005.900,00	850.000,00	10.050.000,00	0,00	75.799.900,00
14	SD NEGERI 14/VI AIR BATU I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.260.000,00	0,00	121.260.000,00	31.685.200,00	52.276.600,00	0,00	11.730.000,00	0,00	95.691.800,00
15	SD NEGERI 15/VI SEKANCING I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.640.000,00	0,00	52.640.000,00	26.147.500,00	13.579.500,00	0,00	0,00	0,00	39.727.000,00
16	SD NEGERI 16/VI MUARA SIAU I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.200.000,00	0,00	75.200.000,00	23.974.800,00	32.364.500,00	0,00	3.360.000,00	0,00	59.699.300,00
17	SD NEGERI 17/VI PASAR MASURAI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.240.000,00	0,00	137.240.000,00	48.064.600,00	62.452.200,00	0,00	7.800.000,00	0,00	118.316.800,00
18	SD NEGERI 18/VI DUSUN TUO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.020.000,00	0,00	125.020.000,00	69.301.500,00	39.634.800,00	0,00	7.200.000,00	0,00	116.136.300,00
19	SD NEGERI 19/VI KOTO TAPUS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.860.000,00	0,00	111.860.000,00	60.957.500,00	21.996.900,00	2.100.000,00	6.300.000,00	0,00	91.354.400,00
20	SD NEGERI 20/VI MUARA MADRAS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.440.000,00	0,00	71.440.000,00	33.773.100,00	27.115.100,00	485.000,00	3.600.000,00	0,00	64.973.200,00
21	SD NEGERI 21/VI RANTAU SULI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.960.000,00	0,00	78.960.000,00	50.044.800,00	14.752.200,00	0,00	8.400.000,00	0,00	73.197.000,00
22	SD NEGERI 22/VI PULAU TENGAH I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.320.000,00	0,00	73.320.000,00	16.531.600,00	37.834.800,00	0,00	0,00	0,00	54.366.400,00
23	SD NEGERI 23/VI RANTAU PANJANG I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.700.000,00	0,00	427.700.000,00	111.000.900,00	208.754.200,00	2.400.000,00	41.550.000,00	0,00	363.705.100,00
24	SD NEGERI 24/VI MUARA JERNIH I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.800.000,00	0,00	65.800.000,00	8.768.100,00	37.566.600,00	0,00	11.320.000,00	0,00	57.654.700,00
25	SD NEGERI 25/VI TANJUNG ILIR I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.320.000,00	0,00	214.320.000,00	75.884.500,00	80.466.700,00	0,00	13.800.000,00	0,00	170.151.200,00
26	SD NEGERI 26/VI KAPUK I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.700.000,00	0,00	98.700.000,00	24.988.000,00	36.984.600,00	0,00	12.000.000,00	0,00	73.972.600,00
27	SD NEGERI 27/VI SIDOLEGO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.160.000,00	0,00	107.160.000,00	22.839.200,00	43.206.400,00	8.030.000,00	16.320.000,00	0,00	90.395.600,00
28	SD NEGERI 28/VI SUMBER AGUNG I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.380.000,00	0,00	166.380.000,00	28.936.800,00	62.958.000,00	0,00	19.500.000,00	0,00	111.394.800,00
29	SD NEGERI 29/VI RANTAU LIMAU MANIS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.320.000,00	0,00	73.320.000,00	17.116.500,00	46.289.200,00	0,00	4.680.000,00	0,00	68.085.700,00
30	SD NEGERI 30/VI RANTAU NGARAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.200.000,00	0,00	75.200.000,00	11.918.400,00	34.258.900,00	500.000,00	10.200.000,00	0,00	56.877.300,00
31	SD NEGERI 31/VI RANTAU PANJANG II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.780.000,00	0,00	128.780.000,00	23.757.000,00	57.434.800,00	0,00	10.800.000,00	0,00	91.991.800,00
32	SD NEGERI 32/VI AIR LIKI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400.000,00	0,00	56.400.000,00	8.942.400,00	22.029.000,00	0,00	9.600.000,00	0,00	40.571.400,00
33	SD NEGERI 33/VI SUNGAI ULAK I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.460.000,00	0,00	149.460.000,00	57.985.600,00	52.752.200,00	600.000,00	6.600.000,00	0,00	117.937.800,00
34	SD NEGERI 34/VI RANTAU JERING II	526,00	0,00	526,00	0,00	526,00	56.400.000,00	0,00	56.400.000,00	22.447.100,00	20.410.600,00	0,00	8.000.000,00	0,00	50.857.700,00
35	SD NEGERI 35/VI SELING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.940.000,00	0,00	235.940.000,00	91.293.100,00	76.920.100,00	1.100.000,00	23.400.000,00	0,00	192.713.200,00
36	SD NEGERI 36/VI RANTAU PANJANG III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.740.000,00	0,00	583.740.000,00	211.867.100,00	176.178.300,00	0,00	31.650.000,00	0,00	419.695.400,00
37	SD NEGERI 37/VI PULAU ARO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.360.000,00	0,00	88.360.000,00	14.609.000,00	46.099.500,00	0,00	8.700.000,00	0,00	69.408.500,00
38	SD NEGERI 38/VI DANAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.760.000,00	0,00	144.760.000,00	73.088.100,00	38.708.500,00	0,00	12.000.000,00	0,00	123.796.600,00
39	SD NEGERI 39/VI TANJUNG KASRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.760.000,00	0,00	50.760.000,00	18.608.500,00	12.166.700,00	0,00	6.600.000,00	0,00	37.375.200,00
40	SD NEGERI 40/VI RANTAU PANJANG IV	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	140.060.000,00	0,00	140.060.000,00	38.897.800,00	75.205.400,00	9.537.800,00	8.650.000,00	0,00	132.291.000,00
41	SD NEGERI 41/VI RANTAU PANJANG V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.640.000,00	0,00	240.640.000,00	73.914.000,00	101.062.200,00	0,00	21.000.000,00	0,00	195.976.200,00
42	SD NEGERI 42/VI RANTAU DERAS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.100.000,00	0,00	108.100.000,00	52.349.800,00	37.224.800,00	0,00	9.820.000,00	0,00	99.394.600,00
43	SD NEGERI 43/VI GUGUK I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.720.000,00	0,00	82.720.000,00	7.427.900,00	45.362.100,00	0,00	12.000.000,00	0,00	64.790.000,00
44	SD NEGERI 44/VI PEMATANG PAUH I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.560.000,00	0,00	69.560.000,00	40.350.600,00	15.046.400,00	0,00	8.400.000,00	0,00	63.797.000,00
45	SD NEGERI 45/VI LUBUK PUNGKUK I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.020.000,00	0,00	125.020.000,00	31.037.500,00	10.112.500,00	0,00	5.400.000,00	0,00	46.550.000,00
46	SD NEGERI 46/VI DESA BARU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.860.000,00	0,00	64.860.000,00	18.404.800,00	28.537.700,00	0,00	3.600.000,00	0,00	50.542.500,00
47	SD NEGERI 47/VI KOTO RAMI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.440.000,00	0,00	24.440.000,00	7.832.100,00	10.601.900,00	0,00	4.150.000,00	0,00	22.584.000,00
48	SD NEGERI 48/VI BIUKU TANJUNG I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.940.000,00	0,00	94.940.000,00	30.852.500,00	44.199.300,00	0			

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
REKAPITULASI REALISASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SD NEGERI SE-KABUPATEN MERANGIN
TAHUN ANGGARAN 2024

I. DANA BOS REGULER SD 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah	Belanja			Jumlah Total Belanja	Total	Saldo BKU 2024		
		Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Total Belanja Modal			Bank	Tunai	Ket
1	2	17	18	19=17+18	20=16+19	21=7+10-20	22	23	24
A.	SD NEGERI								
1	SD NEGERI 01/VI BANGKO I	35.700.000,00	14.006.400,00	49.706.400,00	210.560.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	SD NEGERI 02/VI BANGKO II	7.200.000,00	41.745.000,00	48.945.000,00	425.820.000,00	0,00	0,00	0,00	
3	SD NEGERI 03/VI BANGKO III	50.905.000,00	16.927.000,00	67.832.000,00	205.860.000,00	0,00	0,00	0,00	
4	SD NEGERI 04/VI PULAU RENGAS I	0,00	3.447.500,00	3.447.500,00	62.040.000,00	0,00	0,00	0,00	
5	SD NEGERI 05/VI KUNGKAI I	550.000,00	1.469.400,00	2.019.400,00	88.360.000,00	0,00	0,00	0,00	
6	SD NEGERI 06/VI PAMENANG	4.350.000,00	24.852.000,00	29.202.000,00	235.940.000,00	0,00	0,00	0,00	
7	SD NEGERI 07/VI LIMBUR MERANGIN I	16.295.000,00	8.523.400,00	24.818.400,00	133.480.000,00	649,00	649,00	0,00	
8	SD NEGERI 08/VI LUBUK GAUNG I	0,00	2.424.300,00	2.424.300,00	75.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
9	SD NEGERI 09/VI NALO GEDANG	9.450.000,00	3.102.000,00	12.552.000,00	87.420.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	SD NEGERI 10/VI SUNGAI MANAU I	0,00	18.901.800,00	18.901.800,00	135.360.000,00	0,00	0,00	0,00	
11	SD NEGERI 11/VI MUARA PANCO I	16.900.000,00	13.974.300,00	30.874.300,00	85.540.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	SD NEGERI 12/VI BUKIT BATU	23.700.000,00	9.166.700,00	32.866.700,00	184.240.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	SD NEGERI 13/VI KAMPUNG TENGAH	18.200.000,00	7.520.100,00	25.720.100,00	101.520.000,00	0,00	0,00	0,00	
14	SD NEGERI 14/VI AIR BATU I	9.550.000,00	16.018.200,00	25.568.200,00	121.260.000,00	0,00	0,00	0,00	
15	SD NEGERI 15/VI SEKANCING I	7.692.900,00	5.220.100,00	12.913.000,00	52.640.000,00	0,00	0,00	0,00	
16	SD NEGERI 16/VI MUARA SIAU I	8.050.000,00	7.450.700,00	15.500.700,00	75.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
17	SD NEGERI 17/VI PASAR MASURAI I	0,00	18.923.200,00	18.923.200,00	137.240.000,00	0,00	0,00	0,00	
18	SD NEGERI 18/VI DUSUN TUA I	0,00	8.883.700,00	8.883.700,00	125.020.000,00	0,00	0,00	0,00	
19	SD NEGERI 19/VI KOTO TAPUS I	9.500.000,00	11.005.600,00	20.505.600,00	111.860.000,00	0,00	0,00	0,00	
20	SD NEGERI 20/VI MUARA MADRAS I	3.600.000,00	2.866.800,00	6.466.800,00	71.440.000,00	0,00	0,00	0,00	
21	SD NEGERI 21/VI RANTAU SULI	0,00	5.763.000,00	5.763.000,00	78.960.000,00	0,00	0,00	0,00	
22	SD NEGERI 22/VI PULAU TENGAH I	10.500.000,00	8.453.600,00	18.953.600,00	73.320.000,00	0,00	0,00	0,00	
23	SD NEGERI 23/VI RANTAU PANJANG I	25.850.000,00	38.144.900,00	63.994.900,00	427.700.000,00	0,00	0,00	0,00	
24	SD NEGERI 24/VI MUARA JERNIH I	2.105.300,00	6.040.000,00	8.145.300,00	65.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
25	SD NEGERI 25/VI TANJUNG ILIR I	28.199.000,00	15.969.800,00	44.168.800,00	214.320.000,00	0,00	0,00	0,00	
26	SD NEGERI 26/VI KAPUK I	16.300.000,00	8.427.400,00	24.727.400,00	98.700.000,00	0,00	0,00	0,00	
27	SD NEGERI 27/VI SIDOLEGO I	9.500.000,00	7.264.400,00	16.764.400,00	107.160.000,00	0,00	0,00	0,00	
28	SD NEGERI 28/VI SUMBER AGUNG I	45.800.000,00	9.185.200,00	54.985.200,00	166.380.000,00	0,00	0,00	0,00	
29	SD NEGERI 29/VI RANTAU LIMAU MANIS I	0,00	5.234.300,00	5.234.300,00	73.320.000,00	0,00	0,00	0,00	
30	SD NEGERI 30/VI RANTAU NGARAU	11.052.900,00	7.269.800,00	18.322.700,00	75.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
31	SD NEGERI 31/VI RANTAU PANJANG II	0,00	36.788.200,00	36.788.200,00	128.780.000,00	0,00	0,00	0,00	
32	SD NEGERI 32/VI AIR LIKI I	9.500.000,00	6.328.600,00	15.828.600,00	56.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
33	SD NEGERI 33/VI SUNGAI ULAK I	20.900.000,00	10.622.200,00	31.522.200,00	149.460.000,00	0,00	0,00	0,00	
34	SD NEGERI 34/VI RANTAU JERING II	2.500.000,00	3.036.500,00	5.536.500,00	56.394.200,00	6.326,00	6.326,00	0,00	
35	SD NEGERI 35/VI SELING	24.600.000,00	18.626.800,00	43.226.800,00	235.940.000,00	0,00	0,00	0,00	
36	SD NEGERI 36/VI RANTAU PANJANG III	107.648.000,00	56.396.600,00	164.044.600,00	583.740.000,00	0,00	0,00	0,00	
37	SD NEGERI 37/VI PULAU ARO I	9.600.000,00	9.351.500,00	18.951.500,00	88.360.000,00	0,00	0,00	0,00	
38	SD NEGERI 38/VI DANAU	14.000.000,00	6.963.400,00	20.963.400,00	144.760.000,00	0,00	0,00	0,00	
39	SD NEGERI 39/VI TANJUNG KASRI	6.800.000,00	6.584.800,00	13.384.800,00	50.760.000,00	0,00	0,00	0,00	
40	SD NEGERI 40/VI RANTAU PANJANG IV	7.774.000,00	0,00	7.774.000,00	140.065.000,00	0,00	0,00	0,00	
41	SD NEGERI 41/VI RANTAU PANJANG V	25.150.000,00	19.513.800,00	44.663.800,00	240.640.000,00	0,00	0,00	0,00	
42	SD NEGERI 42/VI RANTAU DERAS I	0,00	8.705.400,00	8.705.400,00	108.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
43	SD NEGERI 43/VI GUGUK I	9.500.000,00	8.430.000,00	17.930.000,00	82.720.000,00	0,00	0,00	0,00	
44	SD NEGERI 44/VI PEMATANG PAUH I	0,00	5.763.000,00	5.763.000,00	69.560.000,00	0,00	0,00	0,00	
45	SD NEGERI 45/VI LUBUK PUNGGUK I	15.960.000,00	0,00	15.960.000,00	62.510.000,00	62.510.000,00	62.510.000,00	0,00	
46	SD NEGERI 46/VI DESA BARU	9.000.000,00	5.317.500,00	14.317.500,00	64.860.000,00	0,00	0,00	0,00	
47	SD NEGERI 47/VI KOTO RAMI I	0,00	1.626.000,00	1.626.000,00	24.210.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	
48	SD NEGERI 48/VI BIUKU TANJUNG I	0,00	6.388.200,00	6.388.200,00	94.940.000,00	0,00	0,00	0,00	
49	SD NEGERI 49/VI SUNGAI HITAM I	18.041.400,00	7.665.800,00	25.707.200,00	80.840.000,00	0,00	0,00	0,00	
50	SD NEGERI 50/VI LUBUK MENTILIN	9.600.000,00	4.135.700,00	13.735.700,00	56.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
51	SD NEGERI 51/VI PULAU BARU I	13.900.000,00	7.542.500,00	21.442.500,00	137.240.000,00	0,00	0,00	0,00	
52	SD NEGERI 52/VI SIDO LEGO II	21.600.000,00	14.949.100,00	36.549.100,00	217.140.000,00	0,00	0,00	0,00	
53	SD NEGERI 53/VI PASAR MASURAI II	0,00	9.147.000,00	9.147.000,00	81.780.000,00	0,00	0,00	0,00	
54	SD NEGERI 54/VI LUBUK BIRAH	0,00	2.460.500,00	2.460.500,00	44.709.500,00	30,20	30,20	0,00	
55	SD NEGERI 55/VI NILO DINGIN	35.600.000,00	12.702.400,00	48.302.400,00	150.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
56	SD NEGERI 56/VI PERADUN TEMERAS	3.100.000,00	7.618.100,00	10.718.100,00	44.180.000,00	0,00	0,00	0,00	
57	SD NEGERI 57/VI SUNGAI PINANG	7.200.000,00	6.270.200,00	13.470.200,00	97.760.000,00	0,00	0,00	0,00	
58	SD NEGERI 58/VI TANJUNG BERUGO	14.000.000,00	5.150.600,00	19.150.600,00	76.140.000,00	0,00	0,00	0,00	
59	SD NEGERI 59/VI SUNGAI NILAU	0,00	14.138.700,00	14.138.700,00	86.480.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	Nama Sekolah	Saldo Awal					Pendapatan			Belanja					
		Bank	Tunai	Total Saldo Awal 2024	Koreksi Saldo Awal Bank/(Tunai) 2024	Saldo Awal Setelah Koreksi 2024	Pendapatan 2024	Pendapatan Lain-Lain	Total Pendapatan 2024	Belanja Operasi					
										Belanja Barang	Belanja Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Perjalanan Dinas	Belanja Hibah	Total Belanja Operasi
1	2	3	4	5=3+4	6	7=5+6	8	9	10=8+9	11	12	13	14	15	16=11+12+13+14+15
60	SD NEGERI 60/VI BANGKO IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.940.000,00	0,00	282.940.000,00	38.394.400,00	149.792.800,00	0,00	0,00	0,00	188.187.200,00
61	SD NEGERI 61/VI TIARO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.520.000,00	0,00	54.520.000,00	8.638.600,00	26.879.600,00	1.500.000,00	12.900.000,00	0,00	49.918.200,00
62	SD NEGERI 62/VI BEDENG REJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.740.000,00	0,00	160.740.000,00	63.092.100,00	55.295.700,00	2.000.000,00	12.950.000,00	0,00	133.337.800,00
63	SD NEGERI 63/VI REJO SARI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.080.000,00	0,00	77.080.000,00	18.072.800,00	33.152.200,00	0,00	9.425.000,00	0,00	60.650.000,00
64	SD NEGERI 64/VI TANJUNG LAMIN I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.080.000,00	0,00	77.080.000,00	18.612.700,00	21.158.000,00	5.792.800,00	8.675.000,00	0,00	54.238.500,00
65	SD NEGERI 65/VI KARANG BERAHI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.760.000,00	0,00	97.760.000,00	52.788.200,00	12.602.800,00	1.500.000,00	10.350.000,00	0,00	77.241.000,00
66	SD NEGERI 66/VI JELATANG I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.040.000,00	0,00	203.040.000,00	71.246.500,00	75.519.900,00	0,00	6.400.000,00	0,00	153.166.400,00
67	SD NEGERI 67/VI TANJUNG GEDANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.300.000,00	0,00	136.300.000,00	55.454.700,00	35.078.300,00	0,00	8.800.000,00	0,00	99.333.000,00
68	SD NEGERI 68/VI EMPANG BENA0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.220.000,00	0,00	200.220.000,00	79.162.200,00	37.410.200,00	0,00	7.800.000,00	0,00	124.372.400,00
69	SD NEGERI 69/VI TALANG TEMBAGO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.220.000,00	0,00	59.220.000,00	14.138.000,00	26.447.700,00	0,00	4.200.000,00	0,00	44.785.700,00
70	SD NEGERI 70/VI DESA GEDANG I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.020.000,00	0,00	172.020.000,00	83.697.600,00	56.319.600,00	0,00	1.800.000,00	0,00	141.817.200,00
71	SD NEGERI 71/VI BERINGIN TINGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.780.000,00	0,00	81.780.000,00	42.409.000,00	26.443.500,00	0,00	0,00	0,00	68.852.500,00
72	SD NEGERI 72/VI DESA GEDANG II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.920.000,00	0,00	63.920.000,00	25.217.900,00	19.829.000,00	0,00	0,00	0,00	45.046.900,00
73	SD NEGERI 73/VI TANJUNG DALAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.540.000,00	0,00	85.540.000,00	17.374.600,00	60.983.400,00	0,00	4.228.000,00	0,00	82.586.000,00
74	SD NEGERI 74/VI RANCAN	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	49.820.000,00	0,00	49.820.000,00	29.460.300,00	13.849.300,00	0,00	0,00	0,00	43.309.600,00
75	SD NEGERI 75/VI PULAU RENGAS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400.000,00	0,00	56.400.000,00	24.204.100,00	19.843.500,00	450.000,00	7.650.000,00	0,00	52.147.600,00
76	SD NEGERI 76/VI DESA MUDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.760.000,00	0,00	50.760.000,00	27.512.100,00	8.344.600,00	7.103.300,00	7.800.000,00	0,00	50.760.000,00
77	SD NEGERI 77/VI KAMPUNG LIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.200.000,00	0,00	169.200.000,00	64.010.800,00	60.030.900,00	0,00	10.100.000,00	0,00	134.141.700,00
78	SD NEGERI 78/VI TIANGKO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.080.000,00	0,00	77.080.000,00	42.768.900,00	17.938.200,00	0,00	11.600.000,00	0,00	72.307.100,00
79	SD NEGERI 79/VI SERINGAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.020.000,00	0,00	78.020.000,00	32.119.500,00	21.685.300,00	0,00	12.450.000,00	0,00	66.254.800,00
80	SD NEGERI 80/VI MUARA BANTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.320.000,00	0,00	73.320.000,00	44.059.900,00	13.491.100,00	0,00	11.700.000,00	0,00	69.251.000,00
81	SD NEGERI 81/VI BERINGIN SANGGUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.320.000,00	0,00	73.320.000,00	21.559.200,00	40.258.000,00	0,00	0,00	0,00	61.817.200,00
82	SD NEGERI 82/VI RANTAU LIMAU KAPAS	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	79.900.000,00	0,00	79.900.000,00	17.299.599,00	33.329.300,00	2.000.000,00	2.400.000,00	0,00	55.028.899,00
83	SD NEGERI 83/VI BIRUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.360.000,00	0,00	88.360.000,00	45.996.600,00	22.738.200,00	0,00	8.150.000,00	0,00	76.884.800,00
84	SD NEGERI 84/VI TELUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500.000,00	0,00	70.500.000,00	39.199.500,00	14.341.100,00	0,00	9.600.000,00	0,00	63.140.600,00
85	SD NEGERI 85/VI BARU NALO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.760.000,00	0,00	50.760.000,00	28.906.400,00	12.343.500,00	0,00	7.200.000,00	0,00	48.449.900,00
86	SD NEGERI 86/VI MUARA SIAU II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.720.000,00	0,00	35.720.000,00	15.699.000,00	15.273.200,00	0,00	2.150.000,00	0,00	33.122.200,00
87	SD NEGERI 87/VI KANDANG I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.120.000,00	0,00	139.120.000,00	49.553.500,00	49.387.500,00	0,00	11.850.000,00	0,00	110.791.000,00
88	SD NEGERI 88/VI BANGKO V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.720.000,00	0,00	129.720.000,00	58.770.600,00	50.700.700,00	0,00	0,00	0,00	109.471.300,00
89	SD NEGERI 89/VI SUNGAI MANAU II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.340.000,00	0,00	104.340.000,00	44.237.800,00	25.402.200,00	0,00	11.700.000,00	0,00	81.340.000,00
90	SD NEGERI 90/VI DURJAN LECAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.960.000,00	0,00	125.960.000,00	63.822.600,00	34.560.900,00	0,00	12.150.000,00	0,00	110.533.500,00
91	SD NEGERI 91/VI RANTAU PANJANG VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.160.000,00	0,00	107.160.000,00	29.346.000,00	40.813.300,00	8.600.000,00	8.550.000,00	0,00	87.309.300,00
92	SD NEGERI 92/VI MUARA KIBUL I	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	50.760.000,00	0,00	50.760.000,00	19.002.600,00	20.429.000,00	0,00	6.050.000,00	0,00	45.481.600,00
93	SD NEGERI 93/VI KOTO RAYO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.340.000,00	0,00	104.340.000,00	48.786.100,00	36.178.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	90.964.100,00
94	SD NEGERI 94/VI TANJUNG MUDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.460.000,00	0,00	102.460.000,00	33.767.900,00	28.631.100,00	0,00	0,00	0,00	62.399.000,00
95	SD NEGERI 95/VI PARIT UJUNG TANJUNG I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.840.000,00	0,00	127.840.000,00	41.425.600,00	37.184.200,00	1.000.000,00	16.200.000,00	0,00	95.809.800,00
96	SD NEGERI 96/VI SUMBER AGUNG II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.960.000,00	0,00	125.960.000,00	51.293.100,00	36.561.200,00	300.000,00	6.750.000,00	0,00	94.904.300,00
97	SD NEGERI 97/VI RANTAU PANJANG VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.480.000,00	0,00	39.480.000,00	11.134.200,00	21.186.100,00	0,00	3.960.000,00	0,00	36.280.300,00
98	SD NEGERI 98/VI BANGKO VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.740.000,00	0,00	113.740.000,00	28.985.000,00	71.976.400,00	0,00	4.850.000,00	0,00	105.811.400,00
99	SD NEGERI 99/VI TAMBANG NIBUNG I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.640.000,00	0,00	99.640.000,00	42.460.800,00	25.929.600,00	2.100.000,00	12.850.000,00	0,00	83.340.400,00
100	SD NEGERI 100/VI PAMENANG II	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	485.040.000,00	0,00	485.040.000,00	234.880.300,00	134.796.800,00	5.300.000,00	17.100.000,00	0,00	392.077.100,00
101	SD NEGERI 101/VI SUNGAI ULAK II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.280.000,00	0,00	105.280.000,00	56.640.100,00	23.966.700,00	0,00	10.950.000,00	0,00	91.556.800,00
102	SD NEGERI 102/VI MARKEH I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.740.000,00	0,00	113.740.000,00	25.192.300,00	42.449.300,00	0,00	9.600.000,00	0,00	77.241.600,00
103	SD NEGERI 103/VI BUKIT PERENTAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.980.000,00	0,00	109.980.000,00	34.046.900,00	44.758.000,00	0,00	0,00	0,00	78.804.900,00
104	SD NEGERI 104/VI RANTAU PANJANG VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.200.000,00	0,00	310.200.000,00	53.079.300,00	187.488.100,00	0,00	33.000.000,00		

No	Nama Sekolah	Belanja			Saldo BKU 2024				
		Belanja Modal			Jumlah Total Belanja	Total	Bank	Tunai	Ket
		Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Total Belanja Modal					
1	2	17	18	19=17+18	20=16+19	21=7+10-20	22	23	24
60	SD NEGERI 60/VI BANGKO IV	64.850.000,00	29.902.800,00	94.752.800,00	282.940.000,00	0,00	0,00	0,00	
61	SD NEGERI 61/VI TIARO I	0,00	4.601.800,00	4.601.800,00	54.520.000,00	0,00	0,00	0,00	
62	SD NEGERI 62/VI BEDENG REJO	13.600.000,00	13.802.200,00	27.402.200,00	160.740.000,00	0,00	0,00	0,00	
63	SD NEGERI 63/VI REJO SARI I	10.800.000,00	5.630.000,00	16.430.000,00	77.080.000,00	0,00	0,00	0,00	
64	SD NEGERI 64/VI TANJUNG LAMIN I	13.373.500,00	9.468.000,00	22.841.500,00	77.080.000,00	0,00	0,00	0,00	
65	SD NEGERI 65/VI KARANG BERAHI I	7.154.000,00	13.365.000,00	20.519.000,00	97.760.000,00	0,00	0,00	0,00	
66	SD NEGERI 66/VI JELATANG I	16.799.100,00	33.074.500,00	49.873.600,00	203.040.000,00	0,00	0,00	0,00	
67	SD NEGERI 67/VI TANJUNG GEDANG	16.960.000,00	20.007.000,00	36.967.000,00	136.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
68	SD NEGERI 68/VI EMPANG BENAO	50.830.000,00	25.017.600,00	75.847.600,00	200.220.000,00	0,00	0,00	0,00	
69	SD NEGERI 69/VI TALANG TEMBAGO I	9.500.000,00	4.934.300,00	14.434.300,00	59.220.000,00	0,00	0,00	0,00	
70	SD NEGERI 70/VI DESA GEDANG I	20.050.000,00	10.152.800,00	30.202.800,00	172.020.000,00	0,00	0,00	0,00	
71	SD NEGERI 71/VI BERINGIN TINGGI	0,00	12.927.500,00	12.927.500,00	81.780.000,00	0,00	0,00	0,00	
72	SD NEGERI 72/VI DESA GEDANG II	18.873.100,00	0,00	18.873.100,00	63.920.000,00	0,00	0,00	0,00	
73	SD NEGERI 73/VI TANJUNG DALAM	0,00	2.954.000,00	2.954.000,00	85.540.000,00	0,00	0,00	0,00	
74	SD NEGERI 74/VI RANCAN	0,00	6.547.400,00	6.547.400,00	49.857.000,00	0,00	0,00	0,00	
75	SD NEGERI 75/VI PULAU RENGAS II	700.000,00	3.552.400,00	4.252.400,00	56.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
76	SD NEGERI 76/VI DESA MUDO	0,00	0,00	0,00	50.760.000,00	0,00	0,00	0,00	
77	SD NEGERI 77/VI KAMPUNG LIMO	12.200.000,00	22.858.300,00	35.058.300,00	169.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
78	SD NEGERI 78/VI TIANGKO I	0,00	4.772.900,00	4.772.900,00	77.080.000,00	0,00	0,00	0,00	
79	SD NEGERI 79/VI SERINGAT	5.460.000,00	6.305.200,00	11.765.200,00	78.020.000,00	0,00	0,00	0,00	
80	SD NEGERI 80/VI MUARA BANTAN	0,00	4.069.000,00	4.069.000,00	73.320.000,00	0,00	0,00	0,00	
81	SD NEGERI 81/VI BERINGIN SANGGUL	6.150.000,00	5.352.800,00	11.502.800,00	73.320.000,00	0,00	0,00	0,00	
82	SD NEGERI 82/VI RANTAU LIMAU KAPAS	21.091.400,00	3.780.500,00	24.871.900,00	79.900.799,00	0,00	0,00	0,00	
83	SD NEGERI 83/VI BIRUN	5.700.000,00	5.775.200,00	11.475.200,00	88.360.000,00	0,00	0,00	0,00	
84	SD NEGERI 84/VI TELUN	0,00	7.359.400,00	7.359.400,00	70.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
85	SD NEGERI 85/VI BARU NALO I	0,00	2.310.100,00	2.310.100,00	50.760.000,00	0,00	0,00	0,00	
86	SD NEGERI 86/VI MUARA SIAU II	0,00	2.597.800,00	2.597.800,00	35.720.000,00	0,00	0,00	0,00	
87	SD NEGERI 87/VI KANDANG I	19.750.000,00	8.579.000,00	28.329.000,00	139.120.000,00	0,00	0,00	0,00	
88	SD NEGERI 88/VI BANGKO V	13.400.000,00	6.848.700,00	20.248.700,00	129.720.000,00	0,00	0,00	0,00	
89	SD NEGERI 89/VI SUNGAI MANAU II	3.000.000,00	20.000.000,00	23.000.000,00	104.340.000,00	0,00	0,00	0,00	
90	SD NEGERI 90/VI DURIAN LECAR	6.000.000,00	9.426.500,00	15.426.500,00	125.960.000,00	0,00	0,00	0,00	
91	SD NEGERI 91/VI RANTAU PANJANG VI	16.000.000,00	3.850.700,00	19.850.700,00	107.160.000,00	0,00	0,00	0,00	
92	SD NEGERI 92/VI MUARA KIBUL I	2.000.000,00	3.278.400,00	5.278.400,00	50.760.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
93	SD NEGERI 93/VI KOTO RAYO I	9.500.000,00	3.875.900,00	13.375.900,00	104.340.000,00	0,00	0,00	0,00	
94	SD NEGERI 94/VI TANJUNG MUDO	8.600.000,00	31.455.200,00	40.055.200,00	102.454.200,00	5.800,00	5.800,00	0,00	
95	SD NEGERI 95/VI PARIT UJUNG TANJUNG I	25.775.000,00	6.255.200,00	32.030.200,00	127.840.000,00	0,00	0,00	0,00	
96	SD NEGERI 96/VI SUMBER AGUNG II	26.000.000,00	5.055.700,00	31.055.700,00	125.960.000,00	0,00	0,00	0,00	
97	SD NEGERI 97/VI RANTAU PANJANG VII	0,00	3.199.700,00	3.199.700,00	39.480.000,00	0,00	0,00	0,00	
98	SD NEGERI 98/VI BANGKO VI	370.000,00	7.558.600,00	7.928.600,00	113.740.000,00	0,00	0,00	0,00	
99	SD NEGERI 99/VI TAMBANG NIBUNG I	5.600.000,00	10.699.600,00	16.299.600,00	99.640.000,00	0,00	0,00	0,00	
100	SD NEGERI 100/VI PAMENANG II	56.250.000,00	36.712.900,00	92.962.900,00	485.040.000,00	4,00	4,00	0,00	
101	SD NEGERI 101/VI SUNGAI ULAK II	8.200.000,00	5.523.200,00	13.723.200,00	105.280.000,00	0,00	0,00	0,00	
102	SD NEGERI 102/VI MARKEH I	23.500.000,00	12.998.400,00	36.498.400,00	113.740.000,00	0,00	0,00	0,00	
103	SD NEGERI 103/VI BUKIT PERENTAK	13.000.000,00	18.175.100,00	31.175.100,00	109.980.000,00	0,00	0,00	0,00	
104	SD NEGERI 104/VI RANTAU PANJANG VIII	18.000.000,00	18.632.600,00	36.632.600,00	310.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
105	SD NEGERI 105/VI KAPUK II	0,00	708.200,00	708.200,00	34.780.000,00	0,00	0,00	0,00	
106	SD NEGERI 106/VI PULAU TERBAKAR	4.000.000,00	2.890.700,00	6.890.700,00	64.887.500,00	0,00	0,00	0,00	
107	SD NEGERI 107/VI NGAOL I	38.200.000,00	5.610.200,00	43.810.200,00	99.640.000,00	0,00	0,00	0,00	
108	SD NEGERI 108/VI LUBUK BERINGIN	34.500.000,00	10.925.300,00	45.425.300,00	126.900.000,00	0,00	0,00	0,00	
109	SD NEGERI 109/VI DUSUN TUO II	0,00	7.413.100,00	7.413.100,00	56.400.000,00	0,60	0,60	0,00	
110	SD NEGERI 110/VI SEKANCING II	9.021.100,00	2.497.800,00	11.518.900,00	30.080.000,00	0,00	0,00	0,00	
111	SD NEGERI 111/VI RANTAU JERING I	10.900.000,00	5.780.300,00	16.680.300,00	115.620.000,00	55,40	55,40	0,00	
112	SD NEGERI 112/VI RANTAU KERMA	0,00	4.518.100,00	4.518.100,00	35.720.000,00	0,00	0,00	0,00	
113	SD NEGERI 113/VI MUARA MADRAS	25.600.100,00	8.897.800,00	34.497.900,00	79.900.000,00	0,00	0,00	0,00	
114	SD NEGERI 114/VI BANGKO VII	6.700.000,00	17.956.800,00	24.656.800,00	187.060.000,00	0,00	0,00	0,00	
115	SD NEGERI 115/VI BANGKO VIII	27.875.000,00	43.449.900,00	71.324.900,00	511.360.000,00	0,00	0,00	0,00	
116	SD NEGERI 116/VI PULAU RENGAS III	10.700.000,00	6.410.300,00	17.110.300,00	130.660.000,00	0,00	0,00	0,00	
117	SD NEGERI 117/VI LIMBUR MERANGIN II	6.000.000,00	5.678.600,00	11.678.600,00	73.320.000,00	0,00	0,00	0,00	
118	SD NEGERI 118/VI KARANG BERAHI II	13.000.000,00	15.057.500,00	28.057.500,00	174.840.000,00	0,00	0,00	0,00	
119	SD NEGERI 119/VI KEROYA	13.000.000,00	13.571.200,00	26.571.200,00	129.720.000,00	0,00	0,00	0,00	
120	SD NEGERI 120/VI RANTAU DERAS II	0,00	1.896.500,00	1.896.500,00	47.070.526,00	0,00	0,00	0,00	
121	SD NEGERI 121/VI AUR BEDURI	21.626.800,00	6.272.300,00	27.899.100,00	148.520.000,00	0,00	0,00	0,00	
122	SD NEGERI 122/VI SIDO MAKMUR I	12.547.100,00	10.830.200,00	23.377.300,00	125.960.000,00	0,00	0,00	0,00	
123	SD NEGERI 123/VI SIDORUKUN	1.400.000,00	7.236.900,00	8.636.900,00	129.720.000,00	0,00	0,00	0,00	
124	SD NEGERI 124/VI KOTO BARU	22.500.000,00	7.826.000,00	30.326.000,00	121.260.000,00	0,00	0,00	0,00	
125	SD NEGERI 125/VI PULAU ARO II	5.350.000,00	4.633.600,00	9.983.600,00	62.980.000,00	0,00	0,00	0,00	
126	SD NEGERI 126/VI MUARA JERNIH	8.730.500,00	10.870.700,00	19.601.200,00	139.120.000,00	0,00	0,00	0,00	
127	SD NEGERI 127/VI MUARA KIBUL II	5.400.000,00	8.127.400,00	13.527.400,00	123.140.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	Nama Sekolah	Saldo Awal					Pendapatan			Belanja					
		Bank	Tunai	Total Saldo Awal 2024	Koreksi Saldo Awal Banjir/(Tunai) 2024	Saldo Awal Setelah Koreksi 2024	Pendapatan 2024	Pendapatan Lain-Lain	Total Pendapatan 2024	Belanja Operasi					
										Belanja Barang	Belanja Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Perjalanan Dinas	Belanja Hibah	Total Belanja Operasi
1	2	3	4	5=3+4	6	7=5+6	8	9	10=8+9	11	12	13	14	15	16=11+12+13+14+15
128	SD NEGERI 128/VI TANJUNG PUTUS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.460.000,00	0,00	102.460.000,00	20.764.200,00	52.867.900,00	0,00	16.800.000,00	0,00	90.432.100,00
129	SD NEGERI 129/VI TELENTAM I	1.202.900,00	0,00	1.202.900,00	0,00	1.202.900,00	84.337.100,00	0,00	84.337.100,00	29.830.700,00	30.897.700,00	0,00	11.850.000,00	0,00	72.578.400,00
130	SD NEGERI 130/VI SUNGAI MANAU III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.920.000,00	0,00	110.920.000,00	33.035.600,00	23.144.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	57.879.600,00
131	SD NEGERI 131/VI MUARA PANCO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.240.000,00	0,00	137.240.000,00	49.430.200,00	43.427.700,00	0,00	9.800.000,00	0,00	102.657.900,00
132	SD NEGERI 132/VI SUNGAI JERING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.160.000,00	0,00	107.160.000,00	35.838.000,00	27.652.200,00	4.815.000,00	1.500.000,00	0,00	69.805.200,00
133	SD NEGERI 133/VI REJOSARI II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500.000,00	0,00	70.500.000,00	17.747.100,00	25.156.700,00	0,00	9.375.000,00	0,00	52.278.800,00
134	SD NEGERI 134/VI DESA BARU TP I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.240.000,00	0,00	43.240.000,00	20.766.200,00	15.814.800,00	0,00	3.100.000,00	0,00	39.681.000,00
135	SD NEGERI 135/VI PULAU RAMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.360.000,00	0,00	88.360.000,00	26.147.200,00	28.806.400,00	0,00	0,00	0,00	54.953.600,00
136	SD NEGERI 136/VI PULAU TENGAH II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.120.000,00	0,00	45.120.000,00	22.841.900,00	16.237.700,00	0,00	3.000.000,00	0,00	42.079.600,00
137	SD NEGERI 137/VI KOTO TEGUH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.860.000,00	0,00	64.860.000,00	36.991.600,00	15.082.400,00	0,00	8.400.000,00	0,00	60.474.000,00
138	SD NEGERI 138/VI TL SIKUMBANG I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.860.000,00	0,00	64.860.000,00	26.986.600,00	12.010.800,00	0,00	400.000,00	0,00	39.397.400,00
139	SD NEGERI 139/VI PULAU TENGAH IV	75.539,00	0,00	75.539,00	0,00	75.539,00	100.505.400,00	0,00	100.505.400,00	42.591.600,00	22.466.400,00	0,00	0,00	0,00	65.058.000,00
140	SD NEGERI 140/VI RANTAU PANJANG	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	121.260.000,00	0,00	121.260.000,00	47.356.100,00	43.286.400,00	0,00	3.600.000,00	0,00	94.242.500,00
141	SD NEGERI 141/VI PULAU BAYUR I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200.000,00	0,00	28.200.000,00	7.852.200,00	14.437.700,00	0,00	3.960.000,00	0,00	26.249.900,00
142	SD NEGERI 142/VI KOTO TAPUS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.420.000,00	0,00	134.420.000,00	61.807.900,00	35.974.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	106.781.900,00
143	SD NEGERI 143/VI KUNGKAI II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.800.000,00	0,00	159.800.000,00	66.290.500,00	75.006.700,00	450.000,00	5.900.000,00	0,00	147.647.200,00
144	SD NEGERI 144/VI BANGKO IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.040.000,00	0,00	109.040.000,00	24.316.100,00	61.217.000,00	0,00	9.600.000,00	0,00	95.133.100,00
145	SD NEGERI 145/VI SALAM BUKU I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900.000,00	0,00	32.900.000,00	16.609.100,00	10.336.100,00	0,00	3.400.000,00	0,00	30.345.200,00
146	SD NEGERI 146/VI MENTAWAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.180.000,00	0,00	326.180.000,00	163.524.700,00	96.978.800,00	0,00	16.050.000,00	0,00	276.553.500,00
147	SD NEGERI 147/VI LANGLING I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.040.000,00	0,00	109.040.000,00	46.740.000,00	36.521.400,00	7.490.000,00	0,00	0,00	90.751.400,00
148	SD NEGERI 148/VI KARANG ANYAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300.000,00	0,00	89.300.000,00	36.733.600,00	36.146.400,00	0,00	6.000.000,00	0,00	78.880.000,00
149	SD NEGERI 149/VI PINANG MERAH I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.980.000,00	0,00	156.980.000,00	66.565.800,00	69.602.200,00	660.000,00	8.400.000,00	0,00	145.228.000,00
150	SD NEGERI 150/VI LUBUK BUMBUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.960.000,00	0,00	266.960.000,00	61.043.100,00	140.860.900,00	7.200.000,00	25.090.000,00	0,00	234.194.000,00
151	SD NEGERI 151/VI BATANG KIBUL	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	56.397.100,00	0,00	56.397.100,00	27.299.600,00	11.349.300,00	0,00	14.850.000,00	0,00	53.498.900,00
152	SD NEGERI 152/VI RANTAU PANJANG IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.800.000,00	0,00	112.800.000,00	40.116.500,00	56.622.000,00	2.000.000,00	8.880.000,00	0,00	107.618.500,00
153	SD NEGERI 153/VI RANTAU PANJANG X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.180.000,00	0,00	279.180.000,00	107.365.500,00	111.162.700,00	2.700.000,00	14.600.000,00	0,00	235.828.200,00
154	SD NEGERI 154/VI AIR LIKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400.000,00	0,00	56.400.000,00	14.576.200,00	10.090.600,00	0,00	3.000.000,00	0,00	27.666.800,00
155	SD NEGERI 155/VI PARIT UJUNG TANJUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.660.000,00	0,00	177.660.000,00	75.729.700,00	51.258.500,00	0,00	15.150.000,00	0,00	142.138.200,00
156	SD NEGERI 156/VI DURIAN BETAKUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.780.000,00	0,00	128.780.000,00	55.657.500,00	22.105.600,00	0,00	9.300.000,00	0,00	87.063.100,00
157	SD NEGERI 157/VI BUNGO TANJUNG	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	95.880.000,00	0,00	95.880.000,00	53.741.400,00	22.009.600,00	0,00	1.800.000,00	0,00	77.551.000,00
158	SD NEGERI 158/VI PALIPAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.900.000,00	0,00	126.900.000,00	47.297.800,00	52.102.200,00	0,00	7.800.000,00	0,00	107.200.000,00
159	SD NEGERI 159/VI RANTAU BIDARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.420.000,00	0,00	87.420.000,00	32.954.100,00	30.811.400,00	0,00	1.360.000,00	0,00	65.125.500,00
160	SD NEGERI 160/VI PASAR MASURAI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.860.000,00	0,00	64.860.000,00	34.994.200,00	15.699.800,00	0,00	6.300.000,00	0,00	56.994.000,00
161	SD NEGERI 161/VI MUARA SIAU III	394,00	0,00	394,00	0,00	394,00	26.320.000,00	0,00	26.320.000,00	10.158.400,00	5.380.300,00	0,00	7.440.000,00	0,00	22.978.700,00
162	SD NEGERI 162/VI PEMATANG PAUH II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.480.000,00	0,00	39.480.000,00	21.043.100,00	6.046.400,00	0,00	8.400.000,00	0,00	35.489.500,00
163	SD NEGERI 163/VI MUARA PANGI	472,00	0,00	472,00	0,00	472,00	99.640.000,00	0,00	99.640.000,00	37.323.300,00	29.206.700,00	0,00	11.000.000,00	0,00	77.530.000,00
164	SD NEGERI 164/VI PULAU BARU II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.920.000,00	0,00	110.920.000,00	46.205.400,00	31.566.700,00	0,00	12.950.000,00	0,00	90.722.100,00
165	SD NEGERI 165/VI TITIAN TERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.080.000,00	0,00	77.080.000,00	31.199.700,00	40.537.700,00	0,00	2.800.000,00	0,00	74.537.400,00
166	SD NEGERI 166/VI DESA PAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.740.000,00	0,00	66.740.000,00	18.035.400,00	46.287.700,00	0,00	1.200.000,00	0,00	65.523.100,00
167	SD NEGERI 167/VI MAMPUN BARU I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.120.000,00	0,00	92.120.000,00	60.112.830,00	4.838.300,00	12.789.420,00	6.975.000,00	0,00	84.715.550,00
168	SD NEGERI 168/VI MAMPUN BARU II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.100.000,00	0,00	155.100.000,00	32.632.300,00	108.408.000,00	0,00	7.700.000,00	0,00	148.740.300,00
169	SD NEGERI 169/VI MERANTIH I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.820.000,00	0,00	96.820.000,00	34.600.100,00	45.366.700,00	0,00	11.250.000,00	0,00	91.216.800,00
170	SD NEGERI 170/VI RASAU I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.180.000,00	0,00	91.180.000,00	31.117.600,00	32.863.100,00	0,00	9.000.000,00	0,00	72.980.700,00
171	SD NEGERI 171/VI PAUH MENANG I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.340.000,00	0,00	292.340.000,00	105.568.500,00	80.837.000,00	0,00	10.600.000,00	0,00	197.005.500,00
172	SD NEGERI 172/VI PAUH MENANG II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16								

No	Nama Sekolah	Belanja			Saldo BKU 2024				
		Belanja Modal			Jumlah Total Belanja	Total	Bank	Tunai	Ket
		Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Total Belanja Modal					
1	2	17	18	19=17+18	20=16+19	21=7+10-20	22	23	24
128	SD NEGERI 128/VI TANJUNG PUTUS I	2.870.000,00	9.157.900,00	12.027.900,00	102.460.000,00	0,00	0,00	0,00	
129	SD NEGERI 129/VI TELENTAM I	11.500.000,00	1.461.600,00	12.961.600,00	85.540.000,00	0,00	0,00	0,00	
130	SD NEGERI 130/VI SUNGAI MANAU III	38.482.000,00	14.558.400,00	53.040.400,00	110.920.000,00	0,00	0,00	0,00	
131	SD NEGERI 131/VI MUARA PANCO II	17.700.000,00	16.882.100,00	34.582.100,00	137.240.000,00	0,00	0,00	0,00	
132	SD NEGERI 132/VI SUNGAI JERING	3.935.000,00	33.419.800,00	37.354.800,00	107.160.000,00	0,00	0,00	0,00	
133	SD NEGERI 133/VI REJO SARI II	13.150.000,00	5.071.200,00	18.221.200,00	70.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
134	SD NEGERI 134/VI DESA BARU TP I	1.150.000,00	2.409.000,00	3.559.000,00	43.240.000,00	0,00	0,00	0,00	
135	SD NEGERI 135/VI PULAU RAMAN	18.194.200,00	15.212.200,00	33.406.400,00	88.360.000,00	0,00	0,00	0,00	
136	SD NEGERI 136/VI PULAU TENGAH II	0,00	3.040.400,00	3.040.400,00	45.120.000,00	0,00	0,00	0,00	
137	SD NEGERI 137/VI KOTO TEGUH	0,00	4.386.000,00	4.386.000,00	64.860.000,00	0,00	0,00	0,00	
138	SD NEGERI 138/VI TL SIKUMBANG I	19.250.000,00	6.212.600,00	25.462.600,00	64.860.000,00	0,00	0,00	0,00	
139	SD NEGERI 139/VI PULAU TENGAH IV	27.900.000,00	7.622.000,00	35.522.000,00	100.580.000,00	939,00	939,00	0,00	
140	SD NEGERI 140/VI RANTAU PANJANG	18.000.000,00	9.079.500,00	27.079.500,00	121.322.000,00	0,00	0,00	0,00	
141	SD NEGERI 141/VI PULAU BAYUR I	0,00	1.950.100,00	1.950.100,00	28.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
142	SD NEGERI 142/VI KOTO TAPUS II	13.000.000,00	14.638.100,00	27.638.100,00	134.420.000,00	0,00	0,00	0,00	
143	SD NEGERI 143/VI KUNGKAT II	2.450.000,00	9.702.800,00	12.152.800,00	159.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
144	SD NEGERI 144/VI BANGKO IX	4.800.000,00	9.106.900,00	13.906.900,00	109.040.000,00	0,00	0,00	0,00	
145	SD NEGERI 145/VI SALAM BUKU I	0,00	2.554.800,00	2.554.800,00	32.900.000,00	0,00	0,00	0,00	
146	SD NEGERI 146/VI MENTAWAK	28.550.000,00	21.076.500,00	49.626.500,00	326.180.000,00	0,00	0,00	0,00	
147	SD NEGERI 147/VI LANTING I	7.600.000,00	10.688.600,00	18.288.600,00	109.040.000,00	0,00	0,00	0,00	
148	SD NEGERI 148/VI KARANG ANYAR	4.650.000,00	5.770.000,00	10.420.000,00	89.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
149	SD NEGERI 149/VI PINANG MERAH I	3.000.000,00	8.752.000,00	11.752.000,00	156.980.000,00	0,00	0,00	0,00	
150	SD NEGERI 150/VI LUBUK BUMBUN	16.500.000,00	16.266.000,00	32.766.000,00	266.960.000,00	0,00	0,00	0,00	
151	SD NEGERI 151/VI BATANG KIBUL	0,00	2.901.100,00	2.901.100,00	56.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
152	SD NEGERI 152/VI RANTAU PANJANG IX	0,00	5.181.500,00	5.181.500,00	112.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
153	SD NEGERI 153/VI RANTAU PANJANG X	26.500.000,00	16.851.800,00	43.351.800,00	279.180.000,00	0,00	0,00	0,00	
154	SD NEGERI 154/VI AIR LIKI	18.300.000,00	10.433.200,00	28.733.200,00	56.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
155	SD NEGERI 155/VI PARIT UJUNG TANJUNG	22.230.000,00	13.291.800,00	35.521.800,00	177.660.000,00	0,00	0,00	0,00	
156	SD NEGERI 156/VI DURIAN BETAKUK	37.750.000,00	3.966.900,00	41.716.900,00	128.780.000,00	0,00	0,00	0,00	
157	SD NEGERI 157/VI BUNGO TANJUNG	2.500.000,00	16.389.000,00	18.889.000,00	96.440.000,00	0,00	0,00	0,00	
158	SD NEGERI 158/VI PALIPAN	19.400.000,00	300.000,00	19.700.000,00	126.900.000,00	0,00	0,00	0,00	
159	SD NEGERI 159/VI RANTAU BIDARO	14.177.100,00	8.117.400,00	22.294.500,00	87.420.000,00	0,00	0,00	0,00	
160	SD NEGERI 160/VI PASAR MASURAI III	4.900.000,00	2.966.000,00	7.866.000,00	64.860.000,00	0,00	0,00	0,00	
161	SD NEGERI 161/VI MUARA SIAU III	0,00	3.341.300,00	3.341.300,00	26.320.000,00	394,00	394,00	0,00	
162	SD NEGERI 162/VI PEMATANG PAUH II	0,00	3.990.500,00	3.990.500,00	39.480.000,00	0,00	0,00	0,00	
163	SD NEGERI 163/VI MUARA PANGI	17.500.000,00	4.610.000,00	22.110.000,00	99.640.000,00	472,00	472,00	0,00	
164	SD NEGERI 164/VI PULAU BARU II	10.000.000,00	10.197.900,00	20.197.900,00	110.920.000,00	0,00	0,00	0,00	
165	SD NEGERI 165/VI TITIAN TERAS	0,00	2.542.600,00	2.542.600,00	77.080.000,00	0,00	0,00	0,00	
166	SD NEGERI 166/VI DESA PAPIT	0,00	1.216.900,00	1.216.900,00	66.740.000,00	0,00	0,00	0,00	
167	SD NEGERI 167/VI MAMPUN BARU I	3.185.250,00	4.195.500,00	7.380.750,00	92.096.300,00	23.700,00	23.700,00	0,00	
168	SD NEGERI 168/VI MAMPUN BARU II	0,00	6.359.700,00	6.359.700,00	155.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
169	SD NEGERI 169/VI MERANTIH I	0,00	5.603.200,00	5.603.200,00	96.820.000,00	0,00	0,00	0,00	
170	SD NEGERI 170/VI RASAU I	9.500.000,00	8.699.300,00	18.199.300,00	91.180.000,00	0,00	0,00	0,00	
171	SD NEGERI 171/VI PAUH MENANG I	66.050.000,00	29.284.500,00	95.334.500,00	292.340.000,00	0,00	0,00	0,00	
172	SD NEGERI 172/VI PAUH MENANG II	23.000.000,00	18.904.100,00	41.904.100,00	164.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
173	SD NEGERI 173/VI BATANG KIBUL II	2.700.000,00	3.239.600,00	5.939.600,00	61.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
174	SD NEGERI 174/VI RANTAU PANJANG XI	5.550.000,00	3.245.300,00	8.795.300,00	94.940.000,00	0,00	0,00	0,00	
175	SD NEGERI 175/VI NGAOL II	2.000.000,00	1.901.500,00	3.901.500,00	56.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
176	SD NEGERI 176/VI SUNGAI TABIR	6.700.000,00	2.559.500,00	9.259.500,00	36.660.000,00	0,00	0,00	0,00	
177	SD NEGERI 177/VI GUGUK II	17.200.000,00	8.666.600,00	25.866.600,00	105.280.000,00	0,40	0,40	0,00	
178	SD NEGERI 178/VI TALANG SEGEHAH	0,00	166.800,00	166.800,00	21.620.000,00	0,00	0,00	0,00	
179	SD NEGERI 179/VI DURIAN RAMBUN	10.628.700,00	6.621.000,00	17.249.700,00	36.660.000,00	0,00	0,00	0,00	
180	SD NEGERI 180/VI PASAR MASURAI IV	0,00	8.887.300,00	8.887.300,00	145.700.000,00	0,00	0,00	0,00	
181	SD NEGERI 181/VI KOTORAMI II	0,00	0,00	0,00	24.440.000,00	0,00	0,00	0,00	
182	SD NEGERI 182/VI SEPANTAI RENAH	0,00	2.462.000,00	2.462.000,00	33.840.000,00	6,00	6,00	0,00	
183	SD NEGERI 183/VI RENAH KEMUMU	6.540.000,00	5.723.500,00	12.263.500,00	56.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
184	SD NEGERI 184/VI TALANG TEMBAGO II	2.587.700,00	4.693.500,00	7.281.200,00	69.560.000,00	0,00	0,00	0,00	
185	SD NEGERI 185/VI TANJUNG LAMIN II	46.715.700,00	3.686.300,00	50.402.000,00	157.920.000,00	0,00	0,00	0,00	
186	SD NEGERI 186/VI LUBUK GAUNG II	0,00	3.404.400,00	3.404.400,00	44.180.000,00	0,00	0,00	0,00	
187	SD NEGERI 187/VI RANTAU DERAS	0,00	5.142.400,00	5.142.400,00	63.920.000,00	0,00	0,00	0,00	
188	SD NEGERI 188/VI MUARA BELENGO	8.500.000,00	17.700.900,00	26.200.900,00	118.440.000,00	0,00	0,00	0,00	
189	SD NEGERI 189/VI PINANG MERAH II	19.940.000,00	18.227.800,00	38.167.800,00	266.020.000,00	0,00	0,00	0,00	
190	SD NEGERI 190/VI MAMPUN BARU III	3.253.000,00	9.118.700,00	12.371.700,00	113.740.000,00	0,00	0,00	0,00	
191	SD NEGERI 191/VI MERANTIH II	33.160.000,00	11.884.700,00	45.044.700,00	206.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
192	SD NEGERI 192/VI RASAU II	2.450.000,00	4.037.100,00	6.487.100,00	69.560.000,00	0,00	0,00	0,00	
193	SD NEGERI 193/VI BUKIT BUNGKUL	11.900.000,00	23.807.600,00	35.707.600,00	238.760.000,00	0,00	0,00	0,00	
194	SD NEGERI 194/VI TAMBANG EMAS I	23.640.900,00	44.990.500,00	68.631.400,00	292.340.000,00	0,00	0,00	0,00	
195	SD NEGERI 195/VI PEMATANG KANCIL	1.500.000,00	7.935.000,00	9.435.000,00	78.960.000,00	0,00	0,00	0,00	

7

No	Nama Sekolah	Saldo Awal						Pendapatan			Belanja				
		Bank	Tunai	Total Saldo Awal 2024	Koreksi Saldo Awal Bank/(Tunai) 2024	Saldo Awal Setelah Koreksi 2024	Pendapatan 2024	Pendapatan Lain-Lain	Total Pendapatan 2024	Belanja Operasi					
										Belanja Barang	Belanja Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Perjalanan Dinas	Belanja Hibah	Total Belanja Operasi
1	2	3	4	5=3+4	6	7=5+6	8	9	10=8+9	11	12	13	14	15	16=11+12+13+14+15
196	SD NEGERI 196/VI TANAH ABANG I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.660.000,00	0,00	271.660.000,00	96.050.600,00	114.334.100,00	0,00	9.700.000,00	0,00	220.084.700,00
197	SD NEGERI 197/VI AIR LIKI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400.000,00	0,00	56.400.000,00	38.392.600,00	10.163.800,00	0,00	4.800.000,00	0,00	53.356.400,00
198	SD NEGERI 198/VI ULAK MAKAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.120.000,00	0,00	139.120.000,00	53.686.500,00	54.598.600,00	0,00	6.150.000,00	0,00	114.435.100,00
199	SD NEGERI 199/VI BATANG KIBUL III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400.000,00	0,00	56.400.000,00	8.923.300,00	16.017.400,00	0,00	16.950.000,00	0,00	41.890.700,00
200	SD NEGERI 200/VI TAMBANG BARU I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.900.000,00	0,00	126.900.000,00	32.426.300,00	64.892.800,00	0,00	0,00	0,00	97.319.100,00
201	SD NEGERI 201/VI TANJUNG ILIR II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.140.000,00	0,00	76.140.000,00	21.266.400,00	41.767.700,00	0,00	8.250.000,00	0,00	71.284.100,00
202	SD NEGERI 202/VI BELURAN PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.140.000,00	0,00	170.140.000,00	51.347.700,00	84.362.700,00	0,00	10.800.000,00	0,00	146.510.400,00
203	SD NEGERI 203/VI RANTAU PANJANG XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.460.000,00	0,00	102.460.000,00	33.600.000,00	50.516.400,00	1.500.000,00	8.500.000,00	0,00	94.116.400,00
204	SD NEGERI 204/VI BARU PANGKALAN JAMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.040.000,00	0,00	62.040.000,00	19.633.300,00	19.749.000,00	0,00	8.550.000,00	0,00	47.932.300,00
205	SD NEGERI 205/VI AIR BATU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.960.000,00	0,00	125.960.000,00	42.751.300,00	31.570.300,00	0,00	1.940.000,00	0,00	76.261.600,00
206	SD NEGERI 206/VI MARKEH II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.420.000,00	0,00	40.420.000,00	8.175.400,00	21.725.000,00	0,00	500.000,00	0,00	30.400.400,00
207	SD NEGERI 207/VI MUARA INJUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.840.000,00	0,00	127.840.000,00	68.902.300,00	37.334.700,00	2.800.000,00	6.600.000,00	0,00	115.637.000,00
208	SD NEGERI 208/VI PEMATANG PAUH III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.460.000,00	0,00	55.460.000,00	30.281.500,00	12.649.300,00	0,00	7.950.000,00	0,00	50.880.800,00
209	SD NEGERI 209/VI RENAH ALAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.060.000,00	0,00	93.060.000,00	42.292.700,00	25.941.500,00	0,00	6.600.000,00	0,00	74.834.200,00
210	SD NEGERI 210/VI PAMENANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.700.000,00	0,00	51.700.000,00	9.454.500,00	31.717.400,00	0,00	5.400.000,00	0,00	46.571.900,00
211	SD NEGERI 211/VI BANGKO X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.860.000,00	0,00	252.860.000,00	128.497.900,00	56.238.400,00	4.100.000,00	20.430.000,00	0,00	209.266.300,00
212	SD NEGERI 212/VI BANGKO XI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.140.000,00	0,00	29.140.000,00	10.859.700,00	10.908.700,00	0,00	6.000.000,00	0,00	27.768.400,00
213	SD NEGERI 213/VI BIUKU TANJUNG II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.860.000,00	0,00	64.860.000,00	28.971.100,00	19.834.800,00	0,00	10.400.000,00	0,00	59.205.900,00
214	SD NEGERI 214/VI LUBUK GAUNG III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00	2.410.600,00	3.020.300,00	0,00	1.200.000,00	0,00	6.630.900,00
215	SD NEGERI 215/VI TAMBANG NIBUNG II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.160.000,00	0,00	60.160.000,00	19.246.000,00	17.913.800,00	0,00	11.550.000,00	0,00	48.709.800,00
216	SD NEGERI 216/VI JELATANG II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200.000,00	0,00	28.200.000,00	7.821.100,00	13.249.300,00	0,00	5.400.000,00	0,00	26.470.400,00
217	SD NEGERI 217/VI PAMENANG IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.020.000,00	0,00	31.020.000,00	4.511.000,00	19.534.800,00	0,00	5.160.000,00	0,00	29.205.800,00
218	SD NEGERI 218/VI LANTAK SERIBU I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.220.000,00	0,00	153.220.000,00	50.029.500,00	61.479.000,00	3.934.800,00	10.920.000,00	0,00	126.363.300,00
219	SD NEGERI 219/VI SIALANG I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.520.000,00	0,00	101.520.000,00	47.243.000,00	34.509.800,00	0,00	11.000.000,00	0,00	92.752.800,00
220	SD NEGERI 220/VI TANJUNG BENUANG I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.960.000,00	0,00	172.960.000,00	74.932.200,00	53.971.800,00	2.000.000,00	13.500.000,00	0,00	144.404.000,00
221	SD NEGERI 221/VI SUNGAI KAPAS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.280.000,00	0,00	293.280.000,00	128.842.700,00	90.215.700,00	6.000.000,00	13.800.000,00	0,00	238.858.400,00
222	SD NEGERI 222/VI TANJUNG REJO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.740.000,00	0,00	301.740.000,00	68.369.800,00	88.081.200,00	0,00	12.650.000,00	0,00	169.101.000,00
223	SD NEGERI 223/IV RANTAU LIMA MANIS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.780.000,00	0,00	128.780.000,00	32.455.325,00	72.034.800,00	0,00	14.400.000,00	0,00	118.890.125,00
224	SD NEGERI 224/VI KAPUK III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.560.000,00	0,00	22.560.000,00	1.804.000,00	10.702.900,00	0,00	7.000.000,00	0,00	19.506.900,00
225	SD NEGERI 225/VI NGAOL III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400.000,00	0,00	56.400.000,00	18.089.700,00	22.381.900,00	0,00	3.600.000,00	0,00	44.071.600,00
226	SD NEGERI 226/VI TELENTAM II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.880.000,00	0,00	48.880.000,00	25.368.300,00	9.037.700,00	0,00	12.450.000,00	0,00	46.856.000,00
227	SD NEGERI 227/VI TANJUNG REJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.100.000,00	0,00	61.100.000,00	12.679.300,00	30.420.300,00	3.041.000,00	10.300.000,00	0,00	56.440.600,00
228	SD NEGERI 228/VI AIR BATU III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.260.000,00	0,00	27.260.000,00	11.446.800,00	12.710.500,00	0,00	0,00	0,00	24.157.300,00
229	SD NEGERI 229/VI SUNGAI MANAU IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500.000,00	0,00	70.500.000,00	32.038.000,00	18.622.500,00	0,00	7.890.000,00	0,00	58.550.500,00
230	SD NEGERI 230/VI GUGUK III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.480.000,00	0,00	39.480.000,00	16.435.600,00	10.289.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	28.164.600,00
231	SD NEGERI 231/VI MUARA SIAU IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300.000,00	0,00	42.300.000,00	10.047.000,00	22.136.600,00	1.300.000,00	2.550.000,00	0,00	36.033.600,00
232	SD NEGERI 232/VI RANTAU MACANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.800.000,00	0,00	65.800.000,00	26.210.200,00	22.234.800,00	0,00	4.800.000,00	0,00	53.245.000,00
233	SD NEGERI 233/VI SUNGAI HITAM II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.220.000,00	0,00	59.220.000,00	18.717.900,00	12.055.100,00	0,00	5.400.000,00	0,00	36.173.000,00
234	SD NEGERI 234/VI TANJUNG MUDO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.980.000,00	0,00	62.980.000,00	40.931.200,00	6.694.000,00	0,00	8.400.000,00	0,00	56.025.200,00
235	SD NEGERI 235/VI TANJUNG MUDO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300.000,00	0,00	42.300.000,00	15.329.100,00	17.720.800,00	0,00	5.100.000,00	0,00	38.149.900,00
236	SD NEGERI 236/VI TIANGKO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.460.000,00	0,00	55.460.000,00	28.275.700,00	11.931.900,00	0,00	10.700.000,00	0,00	50.907.600,00
237	SD NEGERI 237/VI KANDANG II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.320.000,00	0,00	26.320.000,00	7.532.800,00	8.420.300,00	0,00	7.700.000,00	0,00	23.653.100,00
238	SD NEGERI 238/VI TANJUNG PUTUS II	200.526,00	0,00	200.526,00	0,00	200.526,00	47.940.000,00	0,00	47.940.000,00	33.647.026,00	7.543.500,00	0,00	6.000.000,00	0,00	47.190.526,00
239	SD NEGERI 239/VI BUNGA ANTOI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.380.000,00	0,00	166.380.000,00	65.620.400,00	66.419.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	137.439.400,00
240	SD NEGERI 240/VI SUNGAI SAHUT I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.920.000,00	0,00	204.920.000,00	100.422.500,00	44.358.600,00	1.000.00			

No	Nama Sekolah	Belanja			Saldo BKU 2024				
		Belanja Modal			Jumlah Total Belanja	Total	Bank	Tunai	Ket
		Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Total Belanja Modal					
1	2	17	18	19=17+18	20=16+19	21=7+10-20	22	23	24
196	SD NEGERI 196/VI TANAH ABANG I	27.720.000,00	23.855.300,00	51.575.300,00	271.660.000,00	0,00	0,00	0,00	
197	SD NEGERI 197/VI AIR LIKI III	850.000,00	2.193.600,00	3.043.600,00	56.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
198	SD NEGERI 198/VI ULAK MAKAM	12.200.000,00	12.484.900,00	24.684.900,00	139.120.000,00	0,00	0,00	0,00	
199	SD NEGERI 199/VI BATANG KIBUL III	9.500.000,00	5.009.300,00	14.509.300,00	56.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
200	SD NEGERI 200/VI TAMBANG BARU I	18.400.000,00	11.180.900,00	29.580.900,00	126.900.000,00	0,00	0,00	0,00	
201	SD NEGERI 201/VI TANJUNG ILIR II	0,00	4.855.900,00	4.855.900,00	76.140.000,00	0,00	0,00	0,00	
202	SD NEGERI 202/VI BELURAN PANJANG	15.000.000,00	8.629.600,00	23.629.600,00	170.140.000,00	0,00	0,00	0,00	
203	SD NEGERI 203/VI RANTAU PANJANG XII	0,00	8.343.600,00	8.343.600,00	102.460.000,00	0,00	0,00	0,00	
204	SD NEGERI 204/VI BARU PANGKALAN JAMBU	7.500.000,00	6.607.700,00	14.107.700,00	62.040.000,00	0,00	0,00	0,00	
205	SD NEGERI 205/VI AIR BATU	29.900.000,00	19.798.400,00	49.698.400,00	125.960.000,00	0,00	0,00	0,00	
206	SD NEGERI 206/VI MARKEH II	5.900.000,00	4.119.600,00	10.019.600,00	40.420.000,00	0,00	0,00	0,00	
207	SD NEGERI 207/VI MUARA INJUM	1.600.000,00	10.603.000,00	12.203.000,00	127.840.000,00	0,00	0,00	0,00	
208	SD NEGERI 208/VI PEMATANG PAUH III	1.500.000,00	3.079.200,00	4.579.200,00	55.460.000,00	0,00	0,00	0,00	
209	SD NEGERI 209/VI RENAH ALAI	9.700.000,00	8.525.800,00	18.225.800,00	93.060.000,00	0,00	0,00	0,00	
210	SD NEGERI 210/VI PAMENANG	0,00	5.128.100,00	5.128.100,00	51.700.000,00	0,00	0,00	0,00	
211	SD NEGERI 211/VI BANGKO X	17.500.000,00	26.093.700,00	43.593.700,00	252.860.000,00	0,00	0,00	0,00	
212	SD NEGERI 212/VI BANGKO XI	0,00	1.371.600,00	1.371.600,00	29.140.000,00	0,00	0,00	0,00	
213	SD NEGERI 213/VI BIUKU TANJUNG II	1.647.300,00	4.006.800,00	5.654.100,00	64.860.000,00	0,00	0,00	0,00	
214	SD NEGERI 214/VI LUBUK GAUNG III	0,00	2.769.100,00	2.769.100,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
215	SD NEGERI 215/VI TAMBANG NIBUNG II	6.800.000,00	4.650.200,00	11.450.200,00	60.160.000,00	0,00	0,00	0,00	
216	SD NEGERI 216/VI JELATANG II	0,00	1.729.600,00	1.729.600,00	28.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
217	SD NEGERI 217/VI PAMENANG IV	0,00	1.814.200,00	1.814.200,00	31.020.000,00	0,00	0,00	0,00	
218	SD NEGERI 218/VI LANTAK SERIBU I	13.424.900,00	13.431.800,00	26.856.700,00	153.220.000,00	0,00	0,00	0,00	
219	SD NEGERI 219/VI SIALANG I	0,00	8.767.200,00	8.767.200,00	101.520.000,00	0,00	0,00	0,00	
220	SD NEGERI 220/VI TANJUNG BENUANG I	11.430.000,00	17.126.000,00	28.556.000,00	172.960.000,00	0,00	0,00	0,00	
221	SD NEGERI 221/VI SUNGAI KAPAS I	32.696.000,00	21.725.600,00	54.421.600,00	293.280.000,00	0,00	0,00	0,00	
222	SD NEGERI 222/VI TANJUNG REJO I	102.075.000,00	30.564.000,00	132.639.000,00	301.740.000,00	0,00	0,00	0,00	
223	SD NEGERI 223/IV RANTAU LIMA MANIS II	1.200.000,00	8.689.875,00	9.889.875,00	128.780.000,00	0,00	0,00	0,00	
224	SD NEGERI 224/VI KAPUK III	0,00	0,00	0,00	19.506.900,00	3.053.100,00	3.053.100,00	0,00	
225	SD NEGERI 225/VI NGAOL III	10.250.000,00	2.078.400,00	12.328.400,00	56.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
226	SD NEGERI 226/VI TELENTAM II	0,00	2.024.000,00	2.024.000,00	48.880.000,00	0,00	0,00	0,00	
227	SD NEGERI 227/VI TANJUNG REJO	0,00	4.659.400,00	4.659.400,00	61.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
228	SD NEGERI 228/VI AIR BATU III	0,00	3.102.700,00	3.102.700,00	27.260.000,00	0,00	0,00	0,00	
229	SD NEGERI 229/VI SUNGAI MANAU IV	0,00	11.949.500,00	11.949.500,00	70.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
230	SD NEGERI 230/VI GUGUK III	7.500.000,00	3.815.400,00	11.315.400,00	39.480.000,00	0,00	0,00	0,00	
231	SD NEGERI 231/VI MUARA SIAU IV	3.200.000,00	3.066.400,00	6.266.400,00	42.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
232	SD NEGERI 232/VI RANTAU MACANG	2.500.000,00	10.055.000,00	12.555.000,00	65.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
233	SD NEGERI 233/VI SUNGAI HITAM II	16.985.200,00	6.061.800,00	23.047.000,00	59.220.000,00	0,00	0,00	0,00	
234	SD NEGERI 234/VI TANJUNG MUDO I	0,00	6.954.800,00	6.954.800,00	62.980.000,00	0,00	0,00	0,00	
235	SD NEGERI 235/VI TANJUNG MUDO II	0,00	4.150.100,00	4.150.100,00	42.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
236	SD NEGERI 236/VI TIANGKO II	0,00	4.552.400,00	4.552.400,00	55.460.000,00	0,00	0,00	0,00	
237	SD NEGERI 237/VI KANDANG II	0,00	2.666.900,00	2.666.900,00	26.320.000,00	0,00	0,00	0,00	
238	SD NEGERI 238/VI TANJUNG PUTUS II	950.000,00	0,00	950.000,00	48.140.526,00	0,00	0,00	0,00	
239	SD NEGERI 239/VI BUNGA ANTOI I	23.500.000,00	5.410.600,00	28.910.600,00	166.350.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
240	SD NEGERI 240/VI SUNGAI SAHUT I	17.026.000,00	40.752.900,00	57.778.900,00	204.920.000,00	0,00	0,00	0,00	
241	SD NEGERI 241/VI MUARA DELANG I	16.164.000,00	6.702.000,00	22.866.000,00	182.360.000,00	0,00	0,00	0,00	
242	SD NEGERI 242/VI SINAR GADING I	4.630.000,00	8.538.900,00	13.168.900,00	167.320.000,00	0,00	0,00	0,00	
243	SD NEGERI 243/VI BUNGO TANJUNG I	9.597.000,00	13.889.500,00	23.486.500,00	143.817.100,00	2.900,00	2.900,00	0,00	
244	SD NEGERI 244/VI SIDOMAKMUR	1.200.000,00	9.974.700,00	11.174.700,00	87.420.000,00	0,00	0,00	0,00	
245	SD NEGERI 245/VI TIARO II	1.900.000,00	6.167.000,00	8.067.000,00	44.180.000,00	0,00	0,00	0,00	
246	SD NEGERI 246/VI TELUK SIKUMBANG II	5.000.000,00	1.575.700,00	6.575.700,00	35.720.000,00	0,00	0,00	0,00	
247	SD NEGERI 247/VI SIALANG II	24.265.000,00	23.295.200,00	47.560.200,00	183.850.000,00	22,40	22,40	0,00	
248	SD NEGERI 248/VI SUNGAI PUTIH I	22.009.800,00	7.499.300,00	29.509.100,00	125.020.000,00	0,00	0,00	0,00	
249	SD NEGERI 249/VI RAWA JAYA I	27.399.500,00	13.558.600,00	40.958.100,00	150.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
250	SD NEGERI 250/VI SINAR GADING II	6.500.000,00	11.887.000,00	18.387.000,00	170.460.100,00	3,00	3,00	0,00	
251	SD NEGERI 251/VI BUNGO TANJUNG II	8.100.000,00	9.936.700,00	18.036.700,00	112.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
252	SD NEGERI 252/VI LANTAK SERIBU II	6.200.000,00	24.416.500,00	30.616.500,00	163.560.000,00	0,00	0,00	0,00	
253	SD NEGERI 253/VI BANGKO XII	50.500.000,00	60.256.700,00	110.756.700,00	599.720.000,00	0,00	0,00	0,00	
254	SD NEGERI 254/VI TAMBANG EMAS II	31.300.000,00	17.440.200,00	48.740.200,00	235.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
255	SD NEGERI 255/VI SUNGAI KAPAS II	19.900.000,00	32.440.800,00	52.340.800,00	319.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
256	SD NEGERI 256/VI PEMATANG KANCIL II	13.550.000,00	6.997.000,00	20.547.000,00	101.520.000,00	0,00	0,00	0,00	
257	SD NEGERI 257/VI AIR BATU I	45.030.000,00	6.108.000,00	51.138.000,00	124.080.000,00	0,00	0,00	0,00	
258	SD NEGERI 258/VI REJO SARI	16.000.000,00	6.664.400,00	22.664.400,00	120.320.000,00	0,00	0,00	0,00	
259	SD NEGERI 259/VI BUKIT SUBUR	18.500.000,00	12.543.700,00	31.043.700,00	199.280.000,00	0,00	0,00	0,00	
260	SD NEGERI 260/VI RAWA JAYA II	13.986.000,00	17.019.000,00	31.005.000,00	240.640.000,00	0,00	0,00	0,00	
261	SD NEGERI 261/VI KOTA RAJA	21.600.000,00	9.484.500,00	31.084.500,00	112.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
262	SD NEGERI 262/VI SUKO REJO	17.200.000,00	6.512.500,00	23.712.500,00	83.660.000,00	0,00	0,00	0,00	
263	SD NEGERI 263/VI PULAU ARO III	0,00	3.912.600,00	3.912.600,00	82.720.000,00	0,00	0,00	0,00	

7

No	Nama Sekolah	Saldo Awal					Pendapatan			Belanja					
		Bank	Tunai	Total Saldo Awal 2024	Koreksi Saldo Awal Bank/(Tunai) 2024	Saldo Awal Setelah Koreksi 2024	Pendapatan 2024	Pendapatan Lain-Lain	Total Pendapatan 2024	Belanja Operasi					
										Belanja Barang	Belanja Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Perjalanan Dinas	Belanja Hibah	Total Belanja Operasi
1	2	3	4	5=3+4	6	7=5+6	8	9	10=8+9	11	12	13	14	15	16=11+12+13+14+15
264	SD NEGERI 264/VI BUKIT BUNGKUL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.580.000,00	0,00	100.580.000,00	50.389.100,00	24.463.500,00	0,00	0,00	0,00	74.852.600,00
265	SD NEGERI 265/VI BUKIT BERINGIN I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.440.000,00	0,00	118.440.000,00	32.458.400,00	45.099.800,00	0,00	21.000.000,00	0,00	98.558.200,00
266	SD NEGERI 266/VI BUKIT BERINGIN II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.880.000,00	0,00	142.880.000,00	79.134.600,00	40.591.500,00	400.000,00	8.400.000,00	0,00	128.526.100,00
267	SD NEGERI 267/VI SUNGAI SAHUT II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.120.000,00	0,00	186.120.000,00	54.818.500,00	74.450.900,00	633.000,00	1.400.000,00	0,00	131.302.400,00
268	SD NEGERI 268/VI BUNGA ANTOI II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.640.000,00	0,00	381.640.000,00	193.989.300,00	66.685.000,00	0,00	5.540.000,00	0,00	266.214.300,00
269	SD NEGERI 269/VI SUNGAI BULIAN I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.620.000,00	0,00	115.620.000,00	47.762.900,00	29.341.300,00	0,00	20.300.000,00	0,00	97.404.200,00
270	SD NEGERI 270/VI MUARA PANCO III	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	52.640.000,00	0,00	52.640.000,00	34.762.497,00	7.540.600,00	0,00	7.800.000,00	0,00	50.103.097,00
271	SD NEGERI 271/VI SEKANCING III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.040.000,00	0,00	109.040.000,00	43.910.100,00	23.949.900,00	0,00	6.000.000,00	0,00	73.860.000,00
272	SD NEGERI 272/VI PULAU TENGAH III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000.000,00	0,00	141.000.000,00	43.890.500,00	33.510.200,00	0,00	7.200.000,00	0,00	84.600.700,00
273	SD NEGERI 273/VI SUNGAI PUTIH II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.440.000,00	0,00	118.440.000,00	47.477.500,00	28.903.400,00	1.050.000,00	13.050.000,00	0,00	90.480.900,00
274	SD NEGERI 274/VI MUARA DELANG II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.480.000,00	0,00	509.480.000,00	222.378.500,00	177.777.000,00	0,00	11.950.000,00	0,00	412.105.500,00
275	SD NEGERI 275/VI BUNGO TANJUNG III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000.000,00	0,00	141.000.000,00	78.652.100,00	34.764.800,00	0,00	2.200.000,00	0,00	115.616.900,00
276	SD NEGERI 276/VI AIR BATU II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.800.000,00	0,00	65.800.000,00	34.988.200,00	19.065.100,00	4.469.900,00	3.750.000,00	0,00	62.273.200,00
277	SD NEGERI 277/VI TANJUNG BENJANG II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.560.000,00	0,00	210.560.000,00	81.051.500,00	80.333.400,00	1.340.000,00	14.340.000,00	0,00	177.064.900,00
278	SD NEGERI 278/VI BANGKO XIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.240.000,00	0,00	43.240.000,00	16.037.500,00	21.024.500,00	0,00	5.400.000,00	0,00	42.462.000,00
279	SD NEGERI 279/VI KAPUK IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.560.000,00	0,00	69.560.000,00	9.464.800,00	41.774.800,00	0,00	6.600.000,00	0,00	57.839.600,00
280	SD NEGERI 280/VI BANGKO XIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.900.000,00	0,00	220.900.000,00	67.396.500,00	117.370.900,00	0,00	0,00	0,00	184.767.400,00
281	SD NEGERI 281/VI DESA BARU TP II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.580.000,00	0,00	53.580.000,00	15.322.200,00	30.979.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	48.301.200,00
282	SD NEGERI 282/VI BANGKO XV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.040.000,00	0,00	532.040.000,00	244.898.900,00	151.927.700,00	4.100.000,00	34.500.000,00	0,00	435.426.600,00
283	SD NEGERI 283/VI TANAH ABANG II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.180.000,00	0,00	138.180.000,00	80.943.500,00	29.622.500,00	0,00	14.700.000,00	0,00	125.266.000,00
284	SD NEGERI 284/VI NALO GEDANG II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.740.000,00	0,00	66.740.000,00	18.393.600,00	16.046.400,00	0,00	7.650.000,00	0,00	42.090.000,00
285	SD NEGERI 285/VI BARU NALO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.980.000,00	0,00	109.980.000,00	67.295.100,00	14.822.500,00	0,00	12.300.000,00	0,00	94.417.600,00
286	SD NEGERI 286/VI PULAU BAYUR II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.440.000,00	0,00	71.440.000,00	8.632.100,00	34.604.800,00	0,00	12.251.300,00	0,00	55.488.200,00
287	SD NEGERI 287/VI TAMBANG BARU II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.340.000,00	0,00	57.340.000,00	7.516.200,00	35.057.400,00	0,00	9.120.000,00	0,00	51.693.600,00
288	SD NEGERI 288/VI SERI SEMBILAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.740.000,00	0,00	207.740.000,00	97.259.700,00	35.280.100,00	0,00	26.700.000,00	0,00	159.239.800,00
289	SD NEGERI 289/VI LUBUK PUNGKUK 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400.000,00	0,00	56.400.000,00	19.083.000,00	14.063.800,00	1.250.000,00	6.600.000,00	0,00	40.996.800,00
290	SD NEGERI 290/VI SEMPANG LIMBUR	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	141.000.000,00	0,00	141.000.000,00	49.062.900,00	60.755.100,00	0,00	7.200.000,00	0,00	117.018.000,00
291	SD NEGERI 291/VI SALAM BUKU II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.720.000,00	0,00	176.720.000,00	52.481.700,00	58.894.500,00	3.496.200,00	9.450.000,00	0,00	124.322.400,00
292	SD NEGERI 292/VI NILO DINGIN II	1.686.800,00	0,00	1.686.800,00	0,00	1.686.800,00	203.243.200,00	0,00	203.243.200,00	112.965.900,00	56.254.800,00	0,00	10.450.000,00	0,00	179.670.700,00
293	SD NEGERI 293/VI SUNGAI BULIAN II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.800.000,00	0,00	112.800.000,00	47.823.800,00	31.527.400,00	0,00	18.300.000,00	0,00	97.651.200,00
294	SD NEGERI 294/VI BANGKO XV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.560.000,00	0,00	116.560.000,00	30.857.300,00	62.643.500,00	0,00	0,00	0,00	93.500.800,00
295	SD NEGERI 295/VI SUNGAI LIMAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.440.000,00	0,00	71.440.000,00	35.292.800,00	13.166.700,00	0,00	9.850.000,00	0,00	58.309.500,00
296	SD NEGERI 296/VI RANTAU PANJANG XIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.720.000,00	0,00	176.720.000,00	56.863.400,00	66.535.400,00	4.775.000,00	9.720.000,00	0,00	137.893.800,00
297	SD NEGERI 297/VI KOTO RAYO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.780.000,00	0,00	34.780.000,00	16.774.700,00	13.231.900,00	0,00	3.600.000,00	0,00	33.606.600,00
298	SD NEGERI 298/VI BUKIT BERINGIN III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300.000,00	0,00	42.300.000,00	11.299.600,00	21.700.600,00	0,00	5.400.000,00	0,00	38.400.200,00
299	SD NEGERI 299/VI LANGLING II	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	67.680.000,00	0,00	67.680.000,00	17.665.100,00	25.477.700,00	1.922.200,00	5.750.000,00	0,00	50.815.000,00
300	SD NEGERI 300/VI SUNGAI TEBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.360.000,00	0,00	511.360.000,00	205.127.100,00	183.772.300,00	7.500.000,00	41.175.000,00	0,00	437.574.400,00
301	SD NEGERI 301/VI PATEKUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.940.000,00	0,00	47.940.000,00	21.021.900,00	17.143.500,00	0,00	7.650.000,00	0,00	45.815.400,00
302	SD NEGERI 302/VI BUNGA ANTOI III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.180.000,00	0,00	232.180.000,00	83.526.700,00	92.843.800,00	0,00	17.400.000,00	0,00	193.770.500,00
303	SD NEGERI 303/VI PULAU TEBAKAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.520.000,00	0,00	54.520.000,00	17.232.400,00	32.831.900,00	0,00	0,00	0,00	50.064.300,00
304	SD NEGERI 304/VI BATANG KIBUL IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400.000,00	0,00	56.400.000,00	13.021.300,00	29.396.900,00	0,00	0,00	0,00	42.418.200,00
305	SD NEGERI 305/VI BUNGO TANJUNG IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.580.000,00	0,00	100.580.000,00	45.711.500,00	23.946.900,00	0,00	1.480.000,00	0,00	71.138.400,00
306	SD NEGERI 306/VI SUNGAI LIMAU II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.700.000,00	0,00	51.700.000,00	17.994.600,00	25.902.700,00	0,00	6.050.000,00	0,00	49.947.300,00
307	SD NEGERI 307/VI DURIAN MUKUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.380.000,00	0,00	25.380.000,00	10.725.200,00	8.137.700,00	0,00	4.150.000,00	0,00	23.012.900,00
308	SD NEGERI 308/VI RANTAU SULI.II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.480.000,00	0,00	86.480.000,00	32.449.300,00	23.446.400,00	0,00	5.600.000,00	0,00	61.495.700,00
309	SD NEGERI 309/VI MEKAR LIMAU MANIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.800.000,00	0,00	65.800.000,00	6.379.700,00	49.173.200,00	1.200.000,00	7.480.000,00	0,00	64.232.900,00
310	SD NEGERI 310/VI TUNGGUL BULIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.200.000,00	0,00	122.200.000,00	42.144.600,00	59.487.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	106.631.600,00
311	SD NEGERI 311/VI KEMBANG BUNGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.140.000,00	0,00	76.140.000,00	44.959.100,00	15.285.300,00	0,00	6.250.000,00	0,00	66.494.400,00
312	SD NEGERI 312/VI RIMBA KARTIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.740.000,00	0,00	19.740.000,00	4.723.900,00	10.608.700,00	0,00	1.800.000,00	0,00	17.132.600,00
313	SD NEGERI 313/VI RANTAU PALIMBANG	866,00	0,00	866,00	0,td										

7

No	Nama Sekolah	Belanja			Saldo BKU 2024				
		Belanja Modal			Jumlah Total Belanja	Total	Bank	Tunai	Ket
		Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Total Belanja Modal					
1	2	17	18	19=17+18	20=16+19	21=7+10-20	22	23	24
264	SD NEGERI 264/VI BUKIT BUNGKUL II	17.000.000,00	8.727.400,00	25.727.400,00	100.580.000,00	0,00	0,00	0,00	
265	SD NEGERI 265/VI BUKIT BERINGIN I	17.100.000,00	2.781.800,00	19.881.800,00	118.440.000,00	0,00	0,00	0,00	
266	SD NEGERI 266/VI BUKIT BERINGIN II	7.400.000,00	6.953.900,00	14.353.900,00	142.880.000,00	0,00	0,00	0,00	
267	SD NEGERI 267/VI SUNGAI SAHUT II	41.606.000,00	13.211.600,00	54.817.600,00	186.120.000,00	0,00	0,00	0,00	
268	SD NEGERI 268/VI BUNGA ANTOI II	73.800.000,00	41.625.700,00	115.425.700,00	381.640.000,00	0,00	0,00	0,00	
269	SD NEGERI 269/VI SUNGAI BULIAN I	16.038.000,00	2.177.800,00	18.215.800,00	115.620.000,00	0,00	0,00	0,00	
270	SD NEGERI 270/VI MUARA PANCO III	0,00	2.537.000,00	2.537.000,00	52.640.097,00	0,00	0,00	0,00	
271	SD NEGERI 271/VI SEKANCING III	28.300.000,00	6.880.000,00	35.180.000,00	109.040.000,00	0,00	0,00	0,00	
272	SD NEGERI 272/VI PULAU TENGAH III	43.683.000,00	12.716.300,00	56.399.300,00	141.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
273	SD NEGERI 273/VI SUNGAI PUTIH II	18.850.000,00	9.109.100,00	27.959.100,00	118.440.000,00	0,00	0,00	0,00	
274	SD NEGERI 274/VI MUARA DELANG II	51.881.000,00	45.493.500,00	97.374.500,00	509.480.000,00	0,00	0,00	0,00	
275	SD NEGERI 275/VI BUNGO TANJUNG III	16.923.000,00	8.460.100,00	25.383.100,00	141.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
276	SD NEGERI 276/VI AIR BATU II	0,00	3.526.800,00	3.526.800,00	65.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
277	SD NEGERI 277/VI TANJUNG BENUANG II	18.000.000,00	15.495.100,00	33.495.100,00	210.560.000,00	0,00	0,00	0,00	
278	SD NEGERI 278/VI BANGKO XIII	0,00	778.000,00	778.000,00	43.240.000,00	0,00	0,00	0,00	
279	SD NEGERI 279/VI KAPUK IV	6.000.000,00	5.720.400,00	11.720.400,00	69.560.000,00	0,00	0,00	0,00	
280	SD NEGERI 280/VI BANGKO XIV	17.500.000,00	18.632.600,00	36.132.600,00	220.900.000,00	0,00	0,00	0,00	
281	SD NEGERI 281/VI DESA BARU TP II	0,00	5.278.800,00	5.278.800,00	53.580.000,00	0,00	0,00	0,00	
282	SD NEGERI 282/VI BANGKO XV	48.200.000,00	48.413.400,00	96.613.400,00	532.040.000,00	0,00	0,00	0,00	
283	SD NEGERI 283/VI TANAH ABANG II	3.500.000,00	9.414.000,00	12.914.000,00	138.180.000,00	0,00	0,00	0,00	
284	SD NEGERI 284/VI NALO GEDANG II	24.650.000,00	0,00	24.650.000,00	66.740.000,00	0,00	0,00	0,00	
285	SD NEGERI 285/VI BARU NALO II	10.240.000,00	5.322.400,00	15.562.400,00	109.980.000,00	0,00	0,00	0,00	
286	SD NEGERI 286/VI PULAU BAYUR II	10.989.300,00	4.962.500,00	15.951.800,00	71.440.000,00	0,00	0,00	0,00	
287	SD NEGERI 287/VI TAMBANG BARU II	1.200.000,00	4.446.400,00	5.646.400,00	57.340.000,00	0,00	0,00	0,00	
288	SD NEGERI 288/VI SERI SEMBILAN	36.030.000,00	12.470.200,00	48.500.200,00	207.740.000,00	0,00	0,00	0,00	
289	SD NEGERI 289/VI LUBUK PUNGUK 2	11.194.700,00	4.208.500,00	15.403.200,00	56.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
290	SD NEGERI 290/VI SIMPANG LIMBUR	15.210.000,00	8.772.000,00	23.982.000,00	141.000.000,00	64,00	64,00	0,00	
291	SD NEGERI 291/VI SALAM BUKU II	32.685.000,00	19.712.600,00	52.397.600,00	176.720.000,00	0,00	0,00	0,00	
292	SD NEGERI 292/VI NILO DINGIN II	8.200.000,00	17.049.300,00	25.249.300,00	204.920.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
293	SD NEGERI 293/VI SUNGAI BULIAN II	8.978.000,00	6.170.800,00	15.148.800,00	112.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
294	SD NEGERI 294/VI BANGKO XV	16.500.000,00	6.559.200,00	23.059.200,00	116.560.000,00	0,00	0,00	0,00	
295	SD NEGERI 295/VI SUNGAI LIMAU	10.358.500,00	2.772.000,00	13.130.500,00	71.440.000,00	0,00	0,00	0,00	
296	SD NEGERI 296/VI RANTAU PANJANG XIII	27.800.000,00	11.026.200,00	38.826.200,00	176.720.000,00	0,00	0,00	0,00	
297	SD NEGERI 297/VI KOTO RAYO II	0,00	1.173.400,00	1.173.400,00	34.780.000,00	0,00	0,00	0,00	
298	SD NEGERI 298/VI BUKIT BERINGIN III	0,00	3.899.800,00	3.899.800,00	42.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
299	SD NEGERI 299/VI LANGLING II	11.506.100,00	5.358.900,00	16.865.000,00	67.680.000,00	4,00	4,00	0,00	
300	SD NEGERI 300/VI SUNGAI TEBAL	6.200.000,00	67.585.600,00	73.785.600,00	511.360.000,00	0,00	0,00	0,00	
301	SD NEGERI 301/VI PATEKUN	0,00	2.124.600,00	2.124.600,00	47.940.000,00	0,00	0,00	0,00	
302	SD NEGERI 302/VI BUNGA ANTOI III	26.280.000,00	12.129.500,00	38.409.500,00	232.180.000,00	0,00	0,00	0,00	
303	SD NEGERI 303/VI PULAU TEBAKAR	1.500.000,00	2.955.700,00	4.455.700,00	54.520.000,00	0,00	0,00	0,00	
304	SD NEGERI 304/VI BATANG KIBUL IV	11.500.000,00	2.481.800,00	13.981.800,00	56.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
305	SD NEGERI 305/VI BUNGO TANJUNG IV	24.085.000,00	5.356.600,00	29.441.600,00	100.580.000,00	0,00	0,00	0,00	
306	SD NEGERI 306/VI SUNGAI LIMAU II	0,00	1.610.300,00	1.610.300,00	51.557.600,00	142.400,00	142.400,00	0,00	
307	SD NEGERI 307/VI DURIAN MUKUT	0,00	2.367.100,00	2.367.100,00	25.380.000,00	0,00	0,00	0,00	
308	SD NEGERI 308/VI RANTAU SULI II	16.500.000,00	8.484.300,00	24.984.300,00	86.480.000,00	0,00	0,00	0,00	
309	SD NEGERI 309/VI MEKAR LIMAU MANIS	0,00	1.567.100,00	1.567.100,00	65.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
310	SD NEGERI 310/VI TUNGGUL BULIN	9.200.000,00	6.368.400,00	15.568.400,00	122.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
311	SD NEGERI 311/VI KEMBANG BUNGO	3.677.000,00	5.968.600,00	9.645.600,00	76.140.000,00	0,00	0,00	0,00	
312	SD NEGERI 312/VI RIMBA KARTIKA	0,00	2.607.400,00	2.607.400,00	19.740.000,00	0,00	0,00	0,00	
313	SD NEGERI 313/VI RANTAU PALIMBANG	0,00	2.204.500,00	2.204.500,00	30.080.000,00	866,00	866,00	0,00	
JUMLAH DANA BOS REGULER SD		3.854.900.050,00	3.150.096.075,00	7.004.996.125,00	37.669.839.348,00	66.037.736,00	66.037.736,00	0,00	

II. DANA BOS AFIRMASI SD 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah	Saldo Awal					Pendapatan			Belanja					
		Bank	Tunai	Total Saldo Awal 2024	Koreksi Saldo Awal Bank/(Tunai) 2024	Saldo Awal Setelah Koreksi 2024	Pendapatan 2024	Pendapatan Lain- Lain	Total Pendapatan 2024	Belanja Operasi					
										Belanja Barang	Belanja Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Perjalanan Dinas	Belanja Hibah	Total Belanja Operasi
1	2	3	4	5=3+4	6	7=5+6	8	9	10=8+9	11	12	13	14	15	16=11+12+13+14+15
1	SD NEGERI 54/VI LUBUK BIRAH	262.001,00	0,00	262.001,00	0,00	262.001,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
2	SD NEGERI 64/VI TANJUNG LAMIN I	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SD NEGERI 74/VI RANCAN	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
4	SD NEGERI 82/VI RANTAU LIMAU KAPAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
5	SD NEGERI 313/VI RANTAU PALIMBARANG	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
JUMLAH DANA BOS AFIRMASI SD		15.310.001,00	0,00	15.310.001,00	0,00	15.310.001,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00

7

II. DANA BOS AFIRMASI SD 2024

(dalam rupiah)

		Belanja				Saldo BKU 2024			
No	Nama Sekolah	Belanja Modal			Jumlah Total Belanja	Total	Bank	Tunai	Ket
		Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Total Belanja Modal					
1	2	17	18	19=17+18	20=16+19	21=7+10-20	22	23	24
1	SD NEGERI 54/VI LUBUK BIRAH	0,00	0,00	0,00	262.000,00	1,00	1,00	0,00	
2	SD NEGERI 64/VI TANJUNG LAMIN I	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
3	SD NEGERI 74/VI RANCAN	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	
4	SD NEGERI 82/VI RANTAU LIMAU KAPAS	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
5	SD NEGERI 313/VI RANTAU PALIMBARANG	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH DANA BOS AFIRMASI SD		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.310.000,00	1,00	1,00	0,00	

4

III. DANA BOS KINERJA SD 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah	Saldo Awal				Pendapatan				Belanja					
		Bank	Tunai	Total Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal Setelah	Pendapatan 2024	Pendapatan Lain-Lain	Total Pendapatan 2024	Belanja Operasi					Total Belanja Operasi
				2024	Bank/(Tunai) 2024	Koreksi 2024				Belanja Barang	Belanja Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Perjalanan Dinas	Belanja Hibah	
1	2	3	4	5=3+4	6	7=5+6	8	9	10=8+9	11	12	13	14	15	16=11+12+13+14+15
1	SD NEGERI 02/VI BANGKO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	10.844.200,00	3.255.800,00	0,00	0,00	0,00	14.100.000,00
2	SD NEGERI N0. 18VI DUSUN TUO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	9.491.300,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
3	SD NEGERI 25/VI TANJUNG ILIR I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	9.491.300,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
4	SD NEGERI 028/VI SUMBER AGUNG I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	4.691.300,00	4.808.700,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
5	SD NEGERI 50/VI LUBUK MENTILIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	3.688.400,00	1.811.600,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
6	SD NEGERI 56/VI PERADUN TEMERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	4.091.300,00	2.408.700,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
7	SD NEGERI 63/VI REJO SARI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	2.285.500,00	1.214.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
8	SD NEGERI 076/VI DESA MUDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	3.390.000,00	1.802.900,00	0,00	0,00	0,00	5.192.900,00
9	SD NEGERI 86/VI MUARA SIAU II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	6.988.400,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
10	SD NEGERI 92/VI MUARA KIBUL I	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SD NEGERI NO.098/VI BANGKO VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	5.200.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00
12	SD NEGERI 103/VI BUKIT PERENTAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	3.094.200,00	2.405.800,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
13	SD NEGERI 115/VI BANGKO VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	14.541.300,00	2.358.700,00	0,00	0,00	0,00	16.900.000,00
14	SD NEGERI 117/VI LIMBUR MERANGIN II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	3.191.300,00	4.808.700,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
15	SD NEGERI 124/VI KOTO BARU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	5.491.300,00	4.008.700,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
16	SD NEGERI 135/VI PULAU RAMAN	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SD NEGERI 138/VI TL SIKUMBANG I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	6.941.300,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	6.950.000,00
18	SD NEGERI 140/VI RANTAU PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	6.988.400,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
19	SD NEGERI 144/VI BANGKO IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	11.482.600,00	3.017.400,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
20	SD NEGERI 159/VI RANTAU BIDARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	7.738.400,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	7.750.000,00
21	SD NEGERI 163/VI MUARA PANGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	4.638.400,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00
22	SD NEGERI 168/VI MAMPUN BARU II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	1.634.200,00	1.605.800,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00
23	SD NEGERI 171/VI PAUH MENANG I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	2.288.400,00	1.211.600,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
24	SD NEGERI 180/VI PASAR MASURAI IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	2.291.300,00	3.208.700,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
25	SD NEGERI 181/VI KOTORAMI II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	1.947.100,00	3.152.900,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
26	SD NEGERI 182/VI SEPANTAI RENAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	1.797.100,00	2.702.900,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
27	SD NEGERI 183/VI RENAH KEMUMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	7.741.300,00	1.758.700,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
28	SD NEGERI 184/VI TALANG TEBAGO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	1.991.300,00	4.008.700,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
29	SD NEGERI 189/VI PINANG MERAH II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	2.891.300,00	1.608.700,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
30	SD NEGERI 192/VI RASAU II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	3.791.300,00	1.208.700,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
31	SD Negeri 193/VI Bukit Bungkul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	2.047.100,00	502.900,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
32	SD NEGERI 195/VI PEMATANG KANCIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	1.985.500,00	1.514.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
33	SD NEGERI 202/VI BELURAN PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	5.491.300,00	4.008.700,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
34	SD NEGERI 204/VI BARU PANGKALAN JAMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	3.588.400,00	4.061.600,00	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00
35	SD NEGERI 214/VI LUBUK GAUNG III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	2.394.200,00	3.605.800,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
36	SD NEGERI 216/VI JELATANG II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	1.985.500,00	1.514.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
37	SD NEGERI 218/VI LANTAK SERIBU I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	3.088.400,00	2.411.600,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
38	SD NEGERI 233/VI SUNGAI HITAM II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	3.688.400,00	1.811.600,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
39	SD NEGERI 239/VI BUNGA ANTOK I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	6.846.300,00	3.008.700,00	0,00	0,00	0,00	9.855.000,00
40	SD NEGERI 245/VI TIARO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	4.091.300,00	2.408.700,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
41	SD NEGERI 253/VI BANGKO XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	17.338.400,00	3.161.600,00	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00
42	SD NEGERI 254/VI TAMBANG EMAS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	3.694.200,00	7.505.800,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00
43	SD NEGERI 257 / VI AIR BATU I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	4.691.300,00	4.808.700,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
44	SD NEGERI 260/VI RAWA JAYA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	4.044.300,00	1.958.700,00	0,00	0,00	0,00	6.003.000,00
45	SD NEGERI 264/VI BUKIT BUNGKUL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	3.791.300,00	1.208.700,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
46	SD NEGERI 265/VI BUKIT BERINGIN I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	1.100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
47	SD NEGERI 276/VI AIR BATU II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	4.691.300,00	4.808.700,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
48	SD NEGERI 282/VI BANGKO XV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	9.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00
49	SD NEGERI 285/VI BARU NALO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	7.735.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	7.750.000,00
50	SD NEGERI 288/VI SERI SEMBILAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	2.711.300,00	2.708.700,00	0,00	0,00	0,00	5.420.000,00
51	SD NEGERI 289/VI LUBUK PUNGKUK 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	3.688.400,00	1.811.600,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
52	SD NEGERI 293/VI SUNGAI BULIAN II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	4.691.300,00	4.808.700,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
53	SD NEGERI 302/VI BUNGA ANTOK III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	6.846.300,00	3.008.700,00	0,00	0,00	0,00	9.855.000,00
54	SD NEGERI 311/ VI KEMBANG BOINGU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	844.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.644.000,00
JUMLAH DANA BOS KINERJA SD		16.000,00	2,00	16.002,00	0,00	16.002,00	1.242.500.000,00	0,00	1.242.500.000,00	260.716.200,00	124.293.700,00	0,00	0,00	0,00	385.009.900,00
JUMLAH DANA BOS SD (I+II+III)		23.084.685,00	2,00	23.084.687,00	0,00	23.084.687,00	38.970.618.400,00	0,00	38.970.618.400,00	14.729.183.203,00	13.362.564.600,00	237.906.020,00	2.720.509.300,00	0,00	31.050.163.123,00

7

III. DANA BOS KINERJA SD 2024

(dalam rupiah)

		Belanja			Saldo BKU 2024				
No	Nama Sekolah	Belanja Modal			Jumlah Total Belanja	Total	Bank	Tunai	Ket
		Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Total Belanja Modal					
1	2	17	18	19=17+18	20=16+19	21=7+10+20	22	23	24
1	SD NEGERI 02/VI BANGKO II	20.900.000,00	0,00	20.900.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	SD NEGERI NO. 18VI DUSUN TUO I	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
3	SD NEGERI 25/VI TANJUNG ILIR I	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
4	SD NEGERI 028/VI SUMBER AGUNG I	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
5	SD NEGERI 50/VI LUBUK MENTILIN	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
6	SD NEGERI 56/VI PERADUN TEMERAS	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
7	SD NEGERI 63/VI REJO SARI I	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
8	SD NEGERI 076/VI DESA MUDO	17.307.100,00	0,00	17.307.100,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
9	SD NEGERI 86/VI MUARA SIAU II	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	SD NEGERI 92/VI MUARA KIBUL I	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	
11	SD NEGERI NO.098VI BANGKO VI	15.800.000,00	0,00	15.800.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	SD NEGERI 103/VI BUKIT PERENTAK	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	SD NEGERI 115/VI BANGKO VIII	13.000.000,00	5.100.000,00	18.100.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
14	SD NEGERI 117VI LIMBUR MERANGIN II	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
15	SD NEGERI 124/VI KOTO BARU	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
16	SD NEGERI 135/VI PULAU RAMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
17	SD NEGERI 138/VI TL SIKUMBANG I	15.550.000,00	0,00	15.550.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
18	SD NEGERI 140/VI RANTAU PANJANG	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
19	SD NEGERI 144/VI BANGKO IX	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
20	SD NEGERI 159VI RANTAU BIDARO	14.750.000,00	0,00	14.750.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
21	SD NEGERI 163/VI MUARA PANGI	17.850.000,00	0,00	17.850.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
22	SD NEGERI 168/VI MAMPUN BARU II	19.260.000,00	0,00	19.260.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
23	SD NEGERI 171/VI PAUH MENANG I	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
24	SD NEGERI 180/VI PASAR MASURAI IV	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
25	SD NEGERI 181/VI KOTORAMI II	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
26	SD NEGERI 182/VI SEPANTAI RENAH	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
27	SD NEGERI 183/VI RENAH KEMUMU	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
28	SD NEGERI 184/VI TALANG TEBAGO II	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
29	SD NEGERI 189/VI PINANG MERAH II	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
30	SD NEGERI 192/VI RASAU II	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
31	SD Negeri 193/VI Bukit Bungkul	19.950.000,00	0,00	19.950.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
32	SD NEGERI 195VI PEMATANG KANCIL	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
33	SD NEGERI 202/VI BELURAN PANJANG	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
34	SD NEGERI 204/VI BARU PANGKALAN JAMBU	14.850.000,00	0,00	14.850.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
35	SD NEGERI 214/VI LUBUK GAUNG III	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
36	SD NEGERI 216/VI JELATANG II	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
37	SD NEGERI 218/VI LANTAK SERIBU I	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
38	SD NEGERI 233/VI SUNGAI HITAM II	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
39	SD NEGERI 239/VI BUNGA ANTROI I	12.645.000,00	0,00	12.645.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
40	SD NEGERI 245/VI TIARO II	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
41	SD NEGERI 253/VI BANGKO XII	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
42	SD NEGERI 254/VI TAMBANG EMAS II	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
43	SD NEGERI 257 / VI AIR BATU I	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
44	SD NEGERI 260/VI RAWA JAYA II	16.497.000,00	0,00	16.497.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
45	SD NEGERI 264/VI BUKIT BUNGKUL II	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
46	SD NEGERI 265/VI BUKIT BERINGIN I	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
47	SD NEGERI 276/VI AIR BATU II	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
48	SD NEGERI 282/VI BANGKO XV	14.000.000,00	4.500.000,00	18.500.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
49	SD NEGERI 285/VI BARU NALO II	14.750.000,00	0,00	14.750.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
50	SD NEGERI 288/VI SERTI SEMBILAN	17.080.000,00	0,00	17.080.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
51	SD NEGERI 289/VI LUBUK PUNGKUK 2	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
52	SD NEGERI 293/VI SUNGAI BULIAN II	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
53	SD NEGERI 302/VI BUNGA ANTROI III	12.645.000,00	0,00	12.645.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
54	SD NEGERI 311/ VI KEMBANG BUNGU	19.856.000,00	0,00	19.856.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH DANA BOS KINERJA SD		847.890.100,00	9.600.000,00	857.490.100,00	1.242.500.000,00	16.002,00	16.002,00	0,00	
JUMLAH DANA BOS SD (I+II+III)		4.717.790.150,00	3.159.696.075,00	7.877.486.225,00	38.927.649.348,00	66.053.739,00	66.053.739,00	0,00	

7

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
REKAPITULASI REALISASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI SE-KABUPATEN MERANGIN
TAHUN ANGGARAN 2024

I. DANA BOS REGULER SMP 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah	Saldo Awal					Pendapatan					Belanja				
		Bank	Tunai	Total Saldo Awal 2024	Koreksi Saldo Awal Bank/(Tunai) 2024	Saldo Awal Setelah Koreksi 2024	Pendapatan 2024	Pendapatan Lain-Lain	Total Pendapatan 2024	Belanja Barang	Belanja Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Perjalanan Dinas	Belanja Hibah	Total Belanja Operasi	
1	2	3	4	5=3+4	6	7=5+6	8	9	10=8+9	11	12	13	14	15	16=11+12+13+14+15	
A. SMP NEGERI																
1	SMP NEGERI 01 MERANGIN	136.800,00	0,00	136.800,00	0,00	136.800,00	745.743.200,00	0,00	745.743.200,00	329.230.227,00	162.090.014,00	113.700.000,00	0,00	0,00	605.020.241,00	
2	SMP NEGERI 02 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.520.000,00	0,00	489.520.000,00	264.496.311,00	169.834.489,00	4.060.000,00	7.200.000,00	0,00	445.590.800,00	
3	SMP NEGERI 03 MERANGIN	2.778,00	0,00	2.778,00	0,00	2.778,00	153.117.222,00	0,00	153.117.222,00	67.809.230,00	63.196.064,00	2.000.000,00	0,00	0,00	133.005.294,00	
4	SMP NEGERI 04 MERANGIN	4.042.374,00	0,00	4.042.374,00	0,00	4.042.374,00	1.197.747.626,00	0,00	1.197.747.626,00	634.228.750,00	250.378.248,00	26.900.000,00	0,00	0,00	911.506.998,00	
5	SMP NEGERI 05 MERANGIN	217.437,00	0,00	217.437,00	0,00	217.437,00	175.051.563,00	0,00	175.051.563,00	60.292.845,00	69.636.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	131.528.845,00	
6	SMP NEGERI 06 MERANGIN	97.900,00	0,00	97.900,00	0,00	97.900,00	195.942.480,00	0,00	195.942.480,00	61.887.300,00	60.152.500,00	147.180,00	0,00	0,00	122.186.980,00	
7	SMP NEGERI 07 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.040.000,00	0,00	283.040.000,00	72.267.400,00	146.717.800,00	4.600.000,00	0,00	0,00	223.585.200,00	
8	SMP NEGERI 08 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.160.000,00	0,00	88.160.000,00	40.703.300,00	30.766.700,00	0,00	6.000.000,00	0,00	77.470.000,00	
9	SMP NEGERI 09 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600.000,00	0,00	40.600.000,00	15.896.800,00	19.384.800,00	1.918.500,00	2.250.000,00	0,00	39.450.100,00	
10	SMP NEGERI 10 MERANGIN	4.077.874,00	0,00	4.077.874,00	0,00	4.077.874,00	590.023.126,00	0,00	590.023.126,00	150.841.760,00	215.938.430,00	27.700.000,00	0,00	0,00	394.480.190,00	
11	SMP NEGERI 11 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.120.000,00	0,00	153.120.000,00	54.335.600,00	81.898.000,00	0,00	0,00	0,00	136.233.600,00	
12	SMP NEGERI 12 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.080.000,00	0,00	334.080.000,00	86.491.150,00	163.392.100,00	0,00	6.660.000,00	0,00	256.543.250,00	
13	SMP NEGERI 13 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.320.000,00	0,00	408.320.000,00	150.391.900,00	106.460.000,00	19.400.000,00	16.050.000,00	0,00	292.301.900,00	
14	SMP NEGERI 14 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.160.000,00	0,00	233.160.000,00	51.458.400,00	139.060.600,00	0,00	3.500.000,00	0,00	194.019.000,00	
15	SMP NEGERI 15 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.240.000,00	0,00	74.240.000,00	41.088.500,00	9.862.100,00	0,00	2.400.000,00	0,00	53.350.600,00	
16	SMP NEGERI 16 MERANGIN	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	132.231.700,00	0,00	132.231.700,00	34.029.000,00	87.900.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	124.929.000,00	
17	SMP NEGERI 17 MERANGIN	3.690.000,00	0,00	3.690.000,00	0,00	3.690.000,00	177.480.000,00	0,00	177.480.000,00	57.500.000,00	81.873.300,00	6.550.000,00	6.000.000,00	0,00	151.923.300,00	
18	SMP NEGERI 18 MERANGIN	1.812.365,00	0,00	1.812.365,00	0,00	1.812.365,00	142.754.685,00	0,00	142.754.685,00	49.464.210,00	52.557.690,00	0,00	5.500.000,00	0,00	107.521.900,00	
19	SMP NEGERI 19 MERANGIN	25.011,00	0,00	25.011,00	0,00	25.011,00	213.414.989,00	0,00	213.414.989,00	114.692.103,00	60.937.954,00	0,00	1.800.000,00	0,00	177.430.057,00	
20	SMP NEGERI 20 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.800.000,00	0,00	92.800.000,00	38.728.600,00	39.731.900,00	1.748.000,00	0,00	0,00	80.208.500,00	
21	SMP NEGERI 21 MERANGIN	73.521,00	0,00	73.521,00	0,00	73.521,00	85.840.000,00	0,00	85.840.000,00	39.589.500,00	34.746.400,00	0,00	3.600.000,00	0,00	77.935.900,00	
22	SMP NEGERI 22 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.840.000,00	0,00	114.840.000,00	19.810.000,00	84.120.000,00	0,00	0,00	0,00	103.930.000,00	
23	SMP NEGERI 23 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.760.000,00	0,00	302.760.000,00	46.526.400,00	208.856.400,00	15.000.000,00	0,00	0,00	270.382.800,00	
24	SMP NEGERI 24 MERANGIN	189.600,00	0,00	189.600,00	0,00	189.600,00	168.010.400,00	0,00	168.010.400,00	65.319.500,00	63.504.400,00	2.600.000,00	3.600.000,00	0,00	135.023.900,00	
25	SMP NEGERI 25 MERANGIN	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	75.399.806,00	0,00	75.399.806,00	11.115.500,00	43.408.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	0,00	57.823.500,00	
26	SMP NEGERI 26 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.080.000,00	0,00	44.080.000,00	29.736.800,00	6.000.100,00	0,00	2.250.000,00	0,00	37.986.900,00	
27	SMP NEGERI 27 MERANGIN	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	44.080.000,00	0,00	44.080.000,00	17.500.400,00	22.350.000,00	4.229.600,00	0,00	0,00	44.080.000,00	
28	SMP NEGERI 28 MERANGIN	26.733,00	0,00	26.733,00	0,00	26.733,00	41.733.267,00	0,00	41.733.267,00	17.012.412,00	19.867.900,00	2.500.000,00	0,00	0,00	39.380.312,00	
29	SMP NEGERI 29 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.040.000,00	0,00	51.040.000,00	30.658.200,00	15.858.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	49.216.200,00	
30	SMP NEGERI 30 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.880.000,00	0,00	78.880.000,00	17.002.800,00	47.603.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	70.905.800,00	
31	SMP NEGERI 31 MERANGIN	323.000,00	0,00	323.000,00	0,00	323.000,00	37.120.000,00	0,00	37.120.000,00	15.177.131,00	14.092.069,00	0,00	4.500.000,00	0,00	33.769.200,00	
32	SMP NEGERI 32 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.840.000,00	0,00	114.840.000,00	23.070.366,00	47.576.200,00	5.500.000,00	4.950.000,00	0,00	81.096.566,00	
33	SMP NEGERI 33 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.920.000,00	0,00	158.920.000,00	51.651.574,00	77.704.500,00	0,00	0,00	0,00	129.356.074,00	
34	SMP NEGERI 34 MERANGIN	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	141.520.000,00	0,00	141.520.000,00	70.456.100,00	48.425.400,00	0,00	2.400.000,00	0,00	121.281.500,00	
35	SMP NEGERI 35 MERANGIN	26.640,00	0,00	26.640,00	0,00	26.640,00	46.373.360,00	0,00	46.373.360,00	9.585.900,00	25.983.800,00	0,00	0,00	0,00	35.569.700,00	
36	SMP NEGERI 36 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00	17.412.200,00	29.820.800,00	700.000,00	3.600.000,00	0,00	51.533.000,00	
37	SMP NEGERI 37 MERANGIN	634,00	0,00	634,00	0,00	634,00	35.959.366,00	0,00	35.959.366,00	17.683.900,00	9.512.200,00	0,00	4.800.000,00	0,00	31.996.100,00	
38	SMP NEGERI 38 MERANGIN	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00	27.840.000,00	0,00	27.840.000,00	21.108.300,00	6.052.200,00	0,00	0,00	0,00	27.160.500,00	
39	SMP NEGERI 39 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.040.000,00	0,00	109.040.000,00	78.396.300,00	22.306.900,00	0,00	1.500.000,00	0,00	102.203.200,00	
40	SMP NEGERI 40 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.960.000,00	0,00	64.960.000,00	21.934.700,00	33.199.800,00	1.000.000,00	4.050.000,00	0,00	60.184.500,00	
41	SMP NEGERI 41 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.840.000,00	0,00	85.840.000,00	36.715.400,00	42.955.900,00	0,00	1.200.000,00	0,00	80.871.300,00	
42	SMP NEGERI 42 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.880.000,00	0,00	49.880.000,00	11.197.000,00	26.399.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	41.196.000,00	
43	SMP NEGERI 43 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.520.000,00	0,00	402.520.000,00	189.971.700,00	138.910.800,00	0,00	3.600.000,00	0,00	332.482.500,00	
44	SMP NEGERI 44 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.960.000,00	0,00	64.960.000,00	18.831.600,00	38.785.300,00	0,00	5.250.000,00	0,00	62.866.900,00	
45	SMP NEGERI 45 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600.000,00	0,00	69.600.000,00	22.141.400,00	35.846.400,00	1.100.000,00	3.600.000,00	0,00	62.687.800,00	
46	SMP NEGERI 46 MERANGIN	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	49.880.000,00	0,00	49.880.000,00	12.196.600,00	36.501.700,00	0,00	0,00	0,00	48.698.300,00	
47	SMP NEGERI 47 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.1									

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
REKAPITULASI REALISASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI SE-KABUPATEN MERANGIN
TAHUN ANGGARAN 2024

I. DANA BOS REGULER SMP 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah	Belanja			Saldo BKU 2024				
		Belanja Modal			Jumlah Total Belanja	Total	Bank	Tunai	Ket
		Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Total Belanja Modal					
1	2	17	18	19=17+18	20=16+19	21=7+10-20	22	23	24
A. SMP NEGERI									
1	SMP NEGERI 01 MERANGIN	76.045.047,00	64.720.800,00	140.765.847,00	745.786.088,00	93.912,00	93.912,00	0,00	
2	SMP NEGERI 02 MERANGIN	23.550.000,00	20.379.200,00	43.929.200,00	489.520.000,00	0,00	0,00	0,00	
3	SMP NEGERI 03 MERANGIN	12.053.994,00	8.058.700,00	20.112.694,00	153.117.988,00	2.012,00	2.012,00	0,00	
4	SMP NEGERI 04 MERANGIN	245.876.000,00	44.294.600,00	290.170.600,00	1.201.677.598,00	112.402,00	112.402,00	0,00	
5	SMP NEGERI 05 MERANGIN	21.935.500,00	21.555.600,00	43.491.100,00	175.019.945,00	249.055,00	249.055,00	0,00	
6	SMP NEGERI 06 MERANGIN	58.700.000,00	15.153.400,00	73.853.400,00	196.040.380,00	0,00	0,00	0,00	
7	SMP NEGERI 07 MERANGIN	35.964.000,00	23.490.800,00	59.454.800,00	283.040.000,00	0,00	0,00	0,00	
8	SMP NEGERI 08 MERANGIN	6.400.000,00	4.290.000,00	10.690.000,00	88.160.000,00	0,00	0,00	0,00	
9	SMP NEGERI 09 MERANGIN	1.149.900,00	0,00	1.149.900,00	40.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	SMP NEGERI 10 MERANGIN	71.848.314,00	45.156.600,00	117.004.914,00	511.485.104,00	82.615.896,00	82.615.896,00	0,00	
11	SMP NEGERI 11 MERANGIN	9.990.000,00	6.896.400,00	16.886.400,00	153.120.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	SMP NEGERI 12 MERANGIN	36.092.650,00	41.444.100,00	77.536.750,00	334.080.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	SMP NEGERI 13 MERANGIN	91.989.900,00	24.028.200,00	116.018.100,00	408.320.000,00	0,00	0,00	0,00	
14	SMP NEGERI 14 MERANGIN	22.700.000,00	16.441.000,00	39.141.000,00	233.160.000,00	0,00	0,00	0,00	
15	SMP NEGERI 15 MERANGIN	17.149.000,00	3.740.400,00	20.889.400,00	74.240.000,00	0,00	0,00	0,00	
16	SMP NEGERI 16 MERANGIN	5.709.000,00	1.602.000,00	7.311.000,00	132.240.000,00	0,00	0,00	0,00	
17	SMP NEGERI 17 MERANGIN	5.550.000,00	20.006.700,00	25.556.700,00	177.480.000,00	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	
18	SMP NEGERI 18 MERANGIN	23.550.000,00	12.368.100,00	35.918.100,00	143.440.000,00	1.127.050,00	1.127.050,00	0,00	
19	SMP NEGERI 19 MERANGIN	19.758.482,00	15.938.800,00	35.697.282,00	213.127.339,00	312.661,00	312.661,00	0,00	
20	SMP NEGERI 20 MERANGIN	7.454.000,00	5.137.500,00	12.591.500,00	92.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
21	SMP NEGERI 21 MERANGIN	2.935.000,00	4.969.100,00	7.904.100,00	85.840.000,00	73.521,00	73.521,00	0,00	
22	SMP NEGERI 22 MERANGIN	7.292.000,00	3.618.000,00	10.910.000,00	114.840.000,00	0,00	0,00	0,00	
23	SMP NEGERI 23 MERANGIN	15.450.000,00	16.927.200,00	32.377.200,00	302.760.000,00	0,00	0,00	0,00	
24	SMP NEGERI 24 MERANGIN	18.000.000,00	14.921.600,00	32.921.600,00	167.945.500,00	254.500,00	254.500,00	0,00	
25	SMP NEGERI 25 MERANGIN	12.700.000,00	4.876.500,00	17.576.500,00	75.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
26	SMP NEGERI 26 MERANGIN	4.000.000,00	2.093.100,00	6.093.100,00	44.080.000,00	0,00	0,00	0,00	
27	SMP NEGERI 27 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	44.080.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	
28	SMP NEGERI 28 MERANGIN	0,00	1.779.100,00	1.779.100,00	41.159.412,00	600.588,00	600.588,00	0,00	
29	SMP NEGERI 29 MERANGIN	0,00	1.823.800,00	1.823.800,00	51.040.000,00	0,00	0,00	0,00	
30	SMP NEGERI 30 MERANGIN	3.200.000,00	4.774.200,00	7.974.200,00	78.880.000,00	0,00	0,00	0,00	
31	SMP NEGERI 31 MERANGIN	2.387.900,00	962.900,00	3.350.800,00	37.120.000,00	323.000,00	323.000,00	0,00	
32	SMP NEGERI 32 MERANGIN	19.474.034,00	11.138.900,00	30.612.934,00	111.709.500,00	3.130.500,00	3.130.500,00	0,00	
33	SMP NEGERI 33 MERANGIN	23.314.226,00	6.249.700,00	29.563.926,00	158.920.000,00	0,00	0,00	0,00	
34	SMP NEGERI 34 MERANGIN	11.500.000,00	8.443.500,00	19.943.500,00	141.225.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00	
35	SMP NEGERI 35 MERANGIN	8.658.000,00	2.139.000,00	10.797.000,00	46.366.700,00	33.300,00	33.300,00	0,00	
36	SMP NEGERI 36 MERANGIN	0,00	6.467.000,00	6.467.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
37	SMP NEGERI 37 MERANGIN	0,00	3.784.900,00	3.784.900,00	35.781.000,00	179.000,00	179.000,00	0,00	
38	SMP NEGERI 38 MERANGIN	0,00	748.000,00	748.000,00	27.908.500,00	0,00	0,00	0,00	
39	SMP NEGERI 39 MERANGIN	0,00	6.836.800,00	6.836.800,00	109.040.000,00	0,00	0,00	0,00	
40	SMP NEGERI 40 MERANGIN	1.500.000,00	3.275.500,00	4.775.500,00	64.960.000,00	0,00	0,00	0,00	
41	SMP NEGERI 41 MERANGIN	3.000.000,00	1.968.700,00	4.968.700,00	85.840.000,00	0,00	0,00	0,00	
42	SMP NEGERI 42 MERANGIN	5.300.000,00	3.384.000,00	8.684.000,00	49.880.000,00	0,00	0,00	0,00	
43	SMP NEGERI 43 MERANGIN	50.451.300,00	19.583.300,00	70.034.600,00	402.517.100,00	2.900,00	2.900,00	0,00	
44	SMP NEGERI 44 MERANGIN	0,00	2.093.100,00	2.093.100,00	64.960.000,00	0,00	0,00	0,00	
45	SMP NEGERI 45 MERANGIN	2.610.000,00	4.302.200,00	6.912.200,00	69.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
46	SMP NEGERI 46 MERANGIN	0,00	1.181.700,00	1.181.700,00	49.880.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
47	SMP NEGERI 47 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	66.120.000,00	0,00	0,00	0,00	
48	SMP NEGERI 48 MERANGIN	1.500.000,00	2.518.500,00	4.018.500,00	56.834.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
49	SMP NEGERI 49 MERANGIN	0,00	1.000.800,00	1.000.800,00	34.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
50	SMP NEGERI 50 MERANGIN	0,00	561.700,00	561.700,00	33.640.000,00	0,00	0,00	0,00	
51	SMP NEGERI 51 MERANGIN	4.500.000,00	2.024.600,00	6.524.600,00	69.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
52	SMP NEGERI 52 MERANGIN	2.442.000,00	0,00	2.442.000,00	37.120.000,00	844.200,00	844.200,00	0,00	
53	SMP NEGERI 53 MERANGIN	15.128.854,00	2.046.200,00	17.175.054,00	69.600.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
54	SMP NEGERI 54 MERANGIN	4.200.000,00	9.179.500,00	13.379.500,00	100.920.000,00	0,00	0,00	0,00	
55	SMP NEGERI 55 MERANGIN	0,00	4.660.000,00	4.660.000,00	129.920.000,00	0,00	0,00	0,00	
56	SMP NEGERI 56 MERANGIN	4.759.000,00	5.741.900,00	10.500.900,00	97.440.000,00	0,00	0,00	0,00	
57	SMP NEGERI 57 MERANGIN	0,00	4.099.000,00	4.099.000,00	32.480.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
58	SMP NEGERI 58 MERANGIN	0,00	6.234.600,00	6.234.600,00	170.520.000,00	0,00	0,00	0,00	
59	SMP NEGERI 59 MERANGIN	0,00	1.622.700,00	1.622.700,00	48.720.000,00	0,00	0,00	0,00	
60	SMP NEGERI 60 MERANGIN	15.748.000,00	9.691.600,00	25.439.600,00	87.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
61	SMP NEGERI SATU ATAP 01 MERANGIN	21.874.500,00	4.096.000,00	25.970.500,00	71.920.000,00	0,00	0,00	0,00	
62	SMP NEGERI SATU ATAP 02 MERANGIN	1.000.000,00	6.118.400,00	7.118.400,00	55.775.900,00	3.392.100,00	3.392.100,00	0,00	

No	Nama Sekolah	Saldo Awal					Pendapatan			Belanja					
		Bank	Tunai	Total Saldo Awal 2024	Koreksi Saldo Awal Bank/(Tunai) 2024	Saldo Awal Setelah Koreksi 2024	Pendapatan 2024	Pendapatan Lain-Lain	Total Pendapatan 2024	Belanja Operasi					
										Belanja Barang	Belanja Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Perjalanan Dinas	Belanja Hibah	Total Belanja Operasi
1	2	3	4	5=3+4	6	7=5+6	8	9	10=8+9	11	12	13	14	15	16=11+12+13+14+15
63	SMP NEGERI SATU ATAP 03 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920.000,00	0,00	13.920.000,00	10.373.000,00	849.000,00	0,00	0,00	0,00	11.222.000,00
64	SMP NEGERI SATU ATAP 04 MERANGIN	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	44.080.000,00	0,00	44.080.000,00	15.148.500,00	20.443.500,00	0,00	4.800.000,00	0,00	40.392.000,00
65	SMP NEGERI SATU ATAP 05 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00	4.695.600,00	3.034.800,00	0,00	1.800.000,00	0,00	9.530.400,00
66	SMP NEGERI SATU ATAP 06 MERANGIN	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	46.364.000,00	0,00	46.364.000,00	10.734.600,00	27.047.100,00	1.720.000,00	0,00	0,00	39.501.700,00
67	SMP NEGERI SATU ATAP 07 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.160.000,00	0,00	30.160.000,00	9.512.000,00	18.315.000,00	1.883.000,00	0,00	0,00	29.710.000,00
68	SMP NEGERI SATU ATAP 08 MERANGIN	71.787.214,00	0,00	71.787.214,00	0,00	71.787.214,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SMP NEGERI SATU ATAP 09 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.840.000,00	0,00	27.840.000,00	9.976.800,00	16.063.200,00	0,00	1.800.000,00	0,00	27.840.000,00
70	SMP NEGERI SATU ATAP 10 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SMP NEGERI SATU ATAP 11 MERANGIN	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SMP NEGERI SATU ATAP 12 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.520.000,00	0,00	25.520.000,00	3.055.500,00	20.536.600,00	0,00	0,00	0,00	23.592.100,00
73	SMP NEGERI SATU ATAP 13 MERANGIN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.640.000,00	0,00	4.640.000,00	1.160.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	0,00	4.640.000,00
74	SMP NEGERI SATU ATAP 14 MERANGIN	692.304,00	0,00	692.304,00	0,00	692.304,00	20.880.000,00	0,00	20.880.000,00	5.951.000,00	11.329.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	20.880.000,00
75	SMP NEGERI SATU ATAP 15 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	SMP NEGERI SATU ATAP 16 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	SMP NEGERI SATU ATAP 17 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.440.000,00	0,00	39.440.000,00	19.260.500,00	12.679.500,00	0,00	7.500.000,00	0,00	39.440.000,00
78	SMP NEGERI SATU ATAP 18 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	SMP NEGERI SATU ATAP 19 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600.000,00	0,00	69.600.000,00	38.057.900,00	21.469.600,00	0,00	7.200.000,00	0,00	66.727.500,00
80	SMP NEGERI SATU ATAP 20 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.160.000,00	0,00	175.160.000,00	80.989.500,00	65.455.100,00	0,00	4.400.000,00	0,00	150.844.600,00
81	SMP NEGERI SATU ATAP 21 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.240.000,00	0,00	132.240.000,00	35.656.004,00	60.240.200,00	0,00	0,00	0,00	95.896.204,00
82	SMP NEGERI SATU ATAP 22 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.080.000,00	0,00	44.080.000,00	27.316.200,00	9.963.800,00	0,00	4.800.000,00	0,00	42.080.000,00
83	SMP NEGERI SATU ATAP 23 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120.000,00	0,00	8.120.000,00	0,00	8.120.000,00	0,00	0,00	0,00	8.120.000,00
84	SMP NEGERI SATU ATAP 24 MERANGIN	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	69.400.000,00	0,00	69.400.000,00	35.381.700,00	16.963.800,00	0,00	7.772.900,00	0,00	60.118.400,00
JUMLAH DANA BOS REGULER SMP		92.603.602,00	0,00	92.603.602,00	0,00	92.603.602,00	10.373.828.967,00	0,00	10.373.828.967,00	4.021.185.219,00	4.079.850.658,00	259.382.380,00	189.682.900,00	0,00	8.550.101.157,00

No	Nama Sekolah	Belanja			Saldo BKU 2024				
		Belanja Modal			Jumlah Total Belanja	Total	Bank	Tunai	Ket
		Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Total Belanja Modal					
1	2	17	18	19=17+18	20=16+19	21=7+10+20	22	23	24
63	SMP NEGERI SATU ATAP 03 MERANGIN	1.600.000,00	1.083.500,00	2.683.500,00	13.905.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	
64	SMP NEGERI SATU ATAP 04 MERANGIN	0,00	3.688.000,00	3.688.000,00	44.080.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
65	SMP NEGERI SATU ATAP 05 MERANGIN	950.000,00	1.119.600,00	2.069.600,00	11.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
66	SMP NEGERI SATU ATAP 06 MERANGIN	0,00	5.233.400,00	5.233.400,00	44.735.100,00	1.664.900,00	1.664.900,00	0,00	
67	SMP NEGERI SATU ATAP 07 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	29.710.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
68	SMP NEGERI SATU ATAP 08 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	74.107.214,00	74.107.214,00	0,00	
69	SMP NEGERI SATU ATAP 09 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	27.840.000,00	0,00	0,00	0,00	
70	SMP NEGERI SATU ATAP 10 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tutup
71	SMP NEGERI SATU ATAP 11 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.400,00	1.770.400,00	0,00	
72	SMP NEGERI SATU ATAP 12 MERANGIN	0,00	1.927.900,00	1.927.900,00	25.520.000,00	0,00	0,00	0,00	
73	SMP NEGERI SATU ATAP 13 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	4.640.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
74	SMP NEGERI SATU ATAP 14 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	20.880.000,00	692.304,00	692.304,00	0,00	
75	SMP NEGERI SATU ATAP 15 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tutup
76	SMP NEGERI SATU ATAP 16 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tutup
77	SMP NEGERI SATU ATAP 17 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	39.440.000,00	0,00	0,00	0,00	
78	SMP NEGERI SATU ATAP 18 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tutup
79	SMP NEGERI SATU ATAP 19 MERANGIN	1.200.000,00	1.672.500,00	2.872.500,00	69.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
80	SMP NEGERI SATU ATAP 20 MERANGIN	18.600.000,00	5.715.400,00	24.315.400,00	175.160.000,00	0,00	0,00	0,00	
81	SMP NEGERI SATU ATAP 21 MERANGIN	29.908.000,00	5.820.800,00	35.728.800,00	131.625.004,00	614.996,00	614.996,00	0,00	
82	SMP NEGERI SATU ATAP 22 MERANGIN	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	44.080.000,00	0,00	0,00	0,00	
83	SMP NEGERI SATU ATAP 23 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	8.120.000,00	0,00	0,00	0,00	
84	SMP NEGERI SATU ATAP 24 MERANGIN	7.025.000,00	2.429.500,00	9.454.500,00	69.572.900,00	27.100,00	27.100,00	0,00	
JUMLAH DANA BOS REGULER SMP		1.115.673.601,00	623.330.800,00	1.739.004.401,00	10.289.105.558,00	177.327.011,00	177.327.011,00	0,00	

4

II. DANA BOS AFIRMASI SMP 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah			Saldo Awal			Pendapatan			Belanja					
		Bank	Tunai	Total Saldo Awal 2024	Koreksi Saldo Awal Bank/(Tunai) 2024	Saldo Awal Setelah Koreksi 2024	Pendapatan 2024	Pendapatan Lain-Lain	Total Pendapatan 2024	Belanja Barang	Belanja Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Perjalanan Dinas	Belanja Hibah	Total Belanja Operasi
1	2	3	4	5=3+4	6	7=5+6	8	9	10=8+9	11	12	13	14	15	16=11+12+13+14+15
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH DANA BOS AFIRMASI SMP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7

II. DANA BOS AFIRMASI SMP 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah	Belanja				Saldo BKU 2024			
		Belanja Modal			Jumlah Total Belanja	Total	Bank	Tunai	Ket
		Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Total Belanja Modal					
1	2	17	18	19=17+18	20=16+19	21=7+10-20	22	23	24
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH DANA BOS AFIRMASI SMP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

III. DANA BOS KINERJA SMP 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah	Saldo Awal					Pendapatan			Belanja					
		Bank	Tunai	Total Saldo Awal 2024	Koreksi Saldo Awal Bank/(Tunai) 2024	Saldo Awal Setelah Koreksi 2024	Pendapatan 2024	Pendapatan Lain-Lain	Total Pendapatan 2024	Belanja Operasi					
										Belanja Barang	Belanja Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Perjalanan Dinas	Belanja Hibah	Total Belanja Operasi
1	2	3	4	5=3+4	6	7=5+6	8	9	10=8+9	11	12	13	14	15	16=11+12+13+14+15
1	SMP NEGERI 01 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	33.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
2	SMP NEGERI 02 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	31.609.700,00	920.300,00	1.410.000,00	0,00	0,00	33.940.000,00
3	SMP NEGERI 04 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	2.694.000,00	53.660.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	58.054.000,00
4	SMP NEGERI 07 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	15.305.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	18.905.000,00
5	SMP NEGERI 08 MERANGIN	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
6	SMP NEGERI 09 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	11.039.700,00	5.111.600,00	0,00	0,00	0,00	16.151.300,00
7	SMP NEGERI 11 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	37.653.600,00	46.400,00	2.160.000,00	450.000,00	0,00	40.310.000,00
8	SMP NEGERI 14 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	24.980.100,00	631.900,00	0,00	0,00	0,00	25.612.000,00
9	SMP NEGERI 18 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	34.982.600,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
10	SMP NEGERI 20 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	51.491.300,00	2.008.700,00	2.500.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00
11	SMP NEGERI 52 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
12	SMP NEGERI 53 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	4.018.000,00	2.708.700,00	1.665.000,00	0,00	0,00	8.391.700,00
13	SMP NEGERI 54 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	17.479.700,00	3.520.300,00	14.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
14	SMP NEGERI 58 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	8.277.500,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.777.500,00
15	SMP NEGERI SATU ATAP 08 MERANGIN	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SMP NEGERI SATU ATAP 12 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	3.800.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00
17	SMP NEGERI SATU ATAP 20 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	33.494.200,00	5.800,00	0,00	1.500.000,00	0,00	35.000.000,00
JUMLAH DANA BOS KINERJA SMP		60.060.000,00	0,00	60.060.000,00	0,00	60.060.000,00	735.000.000,00	0,00	735.000.000,00	320.385.400,00	91.231.100,00	23.435.000,00	1.950.000,00	0,00	437.001.500,00
JUMLAH DANA BOS SMP (I+II+III)		152.663.602,00	0,00	152.663.602,00	0,00	152.663.602,00	11.108.828.967,00	0,00	11.108.828.967,00	4.341.584.619,00	4.171.081.758,00	282.817.380,00	191.632.900,00	0,00	8.987.102.657,00

7

III. DANA BOS KINERJA SMP 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah	Belanja			Saldo BKU 2024				
		Belanja Modal			Jumlah Total Belanja	Total	Bank	Tunai	Ket
		Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Total Belanja Modal					
1	2	17	18	19=17+18	20=16+19	21=7+10-20	22	23	24
1	SMP NEGERI 01 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	SMP NEGERI 02 MERANGIN	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
3	SMP NEGERI 04 MERANGIN	70.291.000,00	6.670.350,00	76.961.350,00	135.015.350,00	4.984.650,00	4.984.650,00	0,00	
4	SMP NEGERI 07 MERANGIN	16.095.000,00	0,00	16.095.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
5	SMP NEGERI 08 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
6	SMP NEGERI 09 MERANGIN	6.000.000,00	12.848.700,00	18.848.700,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
7	SMP NEGERI 11 MERANGIN	29.690.000,00	0,00	29.690.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
8	SMP NEGERI 14 MERANGIN	9.388.000,00	0,00	9.388.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
9	SMP NEGERI 18 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	SMP NEGERI 20 MERANGIN	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
11	SMP NEGERI 52 MERANGIN	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	SMP NEGERI 53 MERANGIN	25.709.200,00	0,00	25.709.200,00	34.100.900,00	899.100,00	899.100,00	0,00	
13	SMP NEGERI 54 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
14	SMP NEGERI 58 MERANGIN	60.222.500,00	0,00	60.222.500,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
15	SMP NEGERI SATU ATAP 08 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
16	SMP NEGERI SATU ATAP 12 MERANGIN	23.200.000,00	0,00	23.200.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
17	SMP NEGERI SATU ATAP 20 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH DANA BOS KINERJA SMP		272.655.700,00	19.519.050,00	292.174.750,00	729.176.250,00	65.883.750,00	65.883.750,00	0,00	
JUMLAH DANA BOS SMP (I+II+III)		1.388.329.301,00	642.849.850,00	2.031.179.151,00	11.018.281.808,00	243.210.761,00	243.210.761,00	0,00	

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
REKAPITULASI MUTASI PAJAK DANA BOS SD/SMP NEGERI SE-KABUPATEN MERANGIN
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah	Mutasi Pajak			Saldo Akhir 2024
		Saldo Awal 2024	Pemotongan	Penyeteroran	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
I. SD NEGERI					
1	SD NEGERI 01/VI BANGKO I	0,00	12.850.234,00	12.850.234,00	0,00
2	SD NEGERI 02/VI BANGKO II	0,00	30.440.225,00	30.440.225,00	0,00
3	SD NEGERI 03/VI BANGKO III	0,00	12.342.741,00	12.342.741,00	0,00
4	SD NEGERI 04/VI PULAU RENGAS I	0,00	2.285.076,00	2.285.076,00	0,00
5	SD NEGERI 05/VI KUNGKAI I	0,00	1.689.313,00	1.689.313,00	0,00
6	SD NEGERI 06/VI PAMENANG	0,00	14.266.906,00	14.266.906,00	0,00
7	SD NEGERI 07/VI LIMBUR MERANGIN I	0,00	6.458.574,00	6.458.574,00	0,00
8	SD NEGERI 08/VI LUBUK GAUNG. I	0,00	4.735.332,00	4.735.332,00	0,00
9	SD NEGERI 09/VI NALO GEDANG	0,00	6.172.075,00	6.172.075,00	0,00
10	SD NEGERI 10/VI SUNGAI MANAU I	0,00	8.515.212,00	8.515.212,00	0,00
11	SD NEGERI 11/VI MUARA PANCO I	0,00	4.218.610,00	4.218.610,00	0,00
12	SD NEGERI 12/VI BUKIT BATU	0,00	10.178.539,00	10.178.539,00	0,00
13	SD NEGERI 13/VI KAMPUNG TENGAH	0,00	4.779.837,00	4.779.837,00	0,00
14	SD NEGERI 14/VI AIR BATU I	0,00	3.513.612,00	3.513.612,00	0,00
15	SD NEGERI 15/VI SEKANCING I	0,00	3.144.910,00	3.144.910,00	0,00
16	SD NEGERI 16/VI MUARA SIAU I	0,00	2.646.233,00	2.646.233,00	0,00
17	SD NEGERI 17/VI PASAR MASURAI I	0,00	3.765.198,00	3.765.198,00	0,00
18	SD NEGERI 18/VI DUSUN TUO I	0,00	7.780.205,00	7.780.205,00	0,00
19	SD NEGERI 19/VI KOTO TAPUS I	0,00	6.829.983,00	6.829.983,00	0,00
20	SD NEGERI 20/VI MUARA MADRAS I	0,00	3.288.924,00	3.288.924,00	0,00
21	SD NEGERI 21/VI RANTAU SULI	0,00	4.601.500,00	4.601.500,00	0,00
22	SD NEGERI 22/VI PULAU TENGAH I	0,00	2.755.596,00	2.755.596,00	0,00
23	SD NEGERI 23/VI RANTAU PANJANG I	0,00	20.381.132,00	20.381.132,00	0,00
24	SD NEGERI 24/VI MUARA JERNIH I	0,00	1.287.424,00	1.287.424,00	0,00
25	SD NEGERI 25/VI TANJUNG ILIR I	0,00	13.688.020,00	13.688.020,00	0,00
26	SD NEGERI 26/VI KAPUK I	0,00	4.349.561,00	4.349.561,00	0,00
27	SD NEGERI 27/VI SIDOLEGO I	0,00	4.629.728,00	4.629.728,00	0,00
28	SD NEGERI 28/VI SUMBER AGUNG I	0,00	10.220.045,00	10.220.045,00	0,00
29	SD NEGERI 29/VI RANTAU LIMA MANIS I	0,00	1.932.305,00	1.932.305,00	0,00
30	SD NEGERI 30/VI RANTAU NGARAU	0,00	1.693.003,00	1.693.003,00	0,00
31	SD NEGERI 31/VI RANTAU PANJANG II	0,00	6.552.880,00	6.552.880,00	0,00
32	SD NEGERI 32/VI AIR LIKI I	0,00	1.855.636,00	1.855.636,00	0,00
33	SD NEGERI 33/VI SUNGAI ULAK I	0,00	7.800.792,00	7.800.792,00	0,00
34	SD NEGERI 34/VI RANTAU JERING II	0,00	762.000,00	762.000,00	0,00
35	SD NEGERI 35/VI SELING	0,00	14.316.276,00	14.316.276,00	0,00
36	SD NEGERI 36/VI RANTAU PANJANG III	0,00	34.752.813,00	34.752.813,00	0,00
37	SD NEGERI 37/VI PULAU ARO I	0,00	2.329.460,00	2.329.460,00	0,00
38	SD NEGERI 38/VI DANAU	0,00	8.882.406,00	8.882.406,00	0,00
39	SD NEGERI 39/VI TANJUNG KASRI	0,00	1.877.758,00	1.877.758,00	0,00
40	SD NEGERI 40/VI RANTAU PANJANG IV	0,00	7.851.803,00	7.851.803,00	0,00
41	SD NEGERI 41/VI RANTAU PANJANG V	0,00	11.530.885,00	11.530.885,00	0,00
42	SD NEGERI 42/VI RANTAU DERAS I	0,00	5.389.383,00	5.389.383,00	0,00
43	SD NEGERI 43/VI GUGUK I	0,00	3.138.446,00	3.138.446,00	0,00
44	SD NEGERI 44/VI PEMATANG PAUH I	0,00	3.729.387,00	3.729.387,00	0,00
45	SD NEGERI 45/VI LUBUK PUNGKUK I	0,00	4.424.383,00	4.379.383,00	45.000,00
46	SD NEGERI 46/VI DESA BARU	0,00	2.499.505,00	2.499.505,00	0,00
47	SD NEGERI 47/VI KOTO RAMI I	0,00	551.305,00	551.305,00	0,00
48	SD NEGERI 48/VI BIUKU TANJUNG I	0,00	3.836.170,00	3.836.170,00	0,00
49	SD NEGERI 49/VI SUNGAI HITAM I	0,00	3.839.134,00	3.839.134,00	0,00
50	SD NEGERI 50/VI LUBUK MENTILIN	0,00	4.258.483,00	4.258.483,00	0,00
51	SD NEGERI 51/VI PULAU BARU I	0,00	8.823.507,00	8.823.507,00	0,00
52	SD NEGERI 52/VI SIDO LEGO II	0,00	8.183.301,00	8.183.301,00	0,00
53	SD NEGERI 53/VI PASAR MASURAI II	0,00	2.506.228,00	2.506.228,00	0,00
54	SD NEGERI 54/VI LUBUK BIRAH	0,00	2.550.803,00	2.550.803,00	0,00
55	SD NEGERI 55/VI NILO DINGIN	0,00	8.363.408,00	8.150.713,00	212.695,00
56	SD NEGERI 56/VI PERADUN TEMERAS	0,00	4.060.377,00	4.060.377,00	0,00
57	SD NEGERI 57/VI SUNGAI PINANG	0,00	5.768.451,00	5.768.451,00	0,00
58	SD NEGERI 58/VI TANJUNG BERUGO	0,00	3.836.609,00	3.836.609,00	0,00
59	SD NEGERI 59/VI SUNGAI NILAU	0,00	3.358.677,00	3.358.677,00	0,00
60	SD NEGERI 60/VI BANGKO IV	0,00	11.281.679,00	11.281.679,00	0,00
61	SD NEGERI 61/VI TIARO I	0,00	599.654,00	599.654,00	0,00
62	SD NEGERI 62/VI BEDENG REJO	239.640,00	7.975.103,00	8.214.743,00	0,00
63	SD NEGERI 63/VI REJO SARI I	0,00	5.173.232,00	5.173.232,00	0,00
64	SD NEGERI 64/VI TANJUNG LAMIN I	0,00	5.447.788,00	5.447.788,00	0,00
65	SD NEGERI 65/VI KARANG BERAHI I	0,00	6.713.145,00	6.713.145,00	0,00
66	SD NEGERI 66/VI JELATANG I	0,00	11.367.680,00	11.367.680,00	0,00
67	SD NEGERI 67/VI TANJUNG GEDANG	0,00	7.925.780,00	7.925.780,00	0,00
68	SD NEGERI 68/VI EMPANG BENA O	0,00	14.121.117,00	14.121.117,00	0,00
69	SD NEGERI 69/VI TALANG TEMBAGO I	0,00	2.306.650,00	2.306.650,00	0,00
70	SD NEGERI 70/VI DESA GEDANG I	0,00	10.526.856,00	10.526.856,00	0,00
71	SD NEGERI 71/VI BERINGIN TINGGI	0,00	4.240.160,00	4.240.160,00	0,00
72	SD NEGERI 72/VI DESA GEDANG II	0,00	4.271.614,00	4.271.614,00	0,00
73	SD NEGERI 73/VI TANJUNG DALAM	0,00	1.655.518,00	1.655.518,00	0,00
74	SD NEGERI 74/VI RANCAN	0,00	2.863.357,00	2.863.357,00	0,00
75	SD NEGERI 75/VI PULAU RENGAS II	0,00	2.697.688,00	2.697.688,00	0,00

No	Nama Sekolah	Mutasi Pajak			
		Saldo Awal 2024	Pemotongan	Penyvetoran	Saldo Akhir 2024
1	2	3	4	5	6=3+4-5
76	SD NEGERI 76/VI DESA MUDO	0,00	4.215.971,00	4.215.971,00	0,00
77	SD NEGERI 77/VI KAMPUNG LIMO	0,00	4.745.689,00	4.745.689,00	0,00
78	SD NEGERI 78/VI TIANGKO I	0,00	4.157.776,00	4.157.776,00	0,00
79	SD NEGERI 79/VI SERINGAT	0,00	3.431.052,00	3.431.052,00	0,00
80	SD NEGERI 80/VI MUARA BANTAN	0,00	4.671.707,00	4.671.707,00	0,00
81	SD NEGERI 81/VI BERINGIN SANGGUL	0,00	2.532.040,00	2.532.040,00	0,00
82	SD NEGERI 82/VI RANTAU LIMAU KAPAS	0,00	4.192.968,00	4.192.968,00	0,00
83	SD NEGERI 83/VI BIRUN	0,00	5.321.507,00	5.321.507,00	0,00
84	SD NEGERI 84/VI TELUN	0,00	3.979.686,00	3.979.686,00	0,00
85	SD NEGERI 85/VI BARU NALO I	0,00	2.862.570,00	2.862.570,00	0,00
86	SD NEGERI 86/VI MUARA SIAU II	0,00	3.309.457,00	3.309.457,00	0,00
87	SD NEGERI 87/VI KANDANG I	0,00	7.799.230,00	7.799.230,00	0,00
88	SD NEGERI 88/VI BANGKO V	0,00	8.606.760,00	8.606.760,00	0,00
89	SD NEGERI 89/VI SUNGAI MANAU II	0,00	4.926.745,00	4.926.745,00	0,00
90	SD NEGERI 90/VI DURIAN LECAN	0,00	7.311.327,00	7.311.327,00	0,00
91	SD NEGERI 91/VI RANTAU PANJANG VI	0,00	5.065.972,00	5.065.972,00	0,00
92	SD NEGERI 92/VI MUARA KIBUL I	0,00	1.569.464,00	1.569.464,00	0,00
93	SD NEGERI 93/VI KOTO RAYO I	0,00	5.606.376,00	5.606.376,00	0,00
94	SD NEGERI 94/VI TANJUNG MUDO	36.000,00	6.042.251,00	6.078.251,00	0,00
95	SD NEGERI 95/VI PARIT UJUNG TANJUNG I	0,00	6.580.472,00	6.580.472,00	0,00
96	SD NEGERI 96/VI SUMBER AGUNG II	0,00	7.847.263,00	7.847.263,00	0,00
97	SD NEGERI 97/VI RANTAU PANJANG VII	0,00	1.120.793,00	1.120.793,00	0,00
98	SD NEGERI 98/VI BANGKO VI	0,00	4.765.785,00	4.765.785,00	0,00
99	SD NEGERI 99/VI TAMBANG NIBUNG I	0,00	4.305.885,00	4.305.885,00	0,00
100	SD NEGERI 100/VI PAMENANG II	0,00	32.454.546,00	32.454.546,00	0,00
101	SD NEGERI 101/VI SUNGAI ULAK II	0,00	6.630.503,00	6.630.503,00	0,00
102	SD NEGERI 102/VI MARKEH I	0,00	4.835.919,00	4.835.919,00	0,00
103	SD NEGERI 103/VI BUKIT PERENTAK	8.000,00	5.600.692,00	5.608.692,00	0,00
104	SD NEGERI 104/VI RANTAU PANJANG VIII	0,00	15.379.667,00	15.379.667,00	0,00
105	SD NEGERI 105/VI KAPUK II	0,00	0,00	0,00	0,00
106	SD NEGERI 106/VI PULAU TERBAKAR	0,00	2.461.247,00	2.461.247,00	0,00
107	SD NEGERI 107/VI NGAOL I	0,00	6.693.627,00	6.693.627,00	0,00
108	SD NEGERI 108/VI LUBUK BERINGIN	0,00	7.338.795,00	7.338.795,00	0,00
109	SD NEGERI 109/VI DUSUN TUO II	0,00	1.800.670,00	1.800.670,00	0,00
110	SD NEGERI 110/VI SEKANCING II	0,00	2.075.934,00	2.075.934,00	0,00
111	SD NEGERI 111/VI RANTAU JERING I	0,00	3.987.064,00	3.987.064,00	0,00
112	SD NEGERI 112/VI RANTAU KERMAS	0,00	1.453.940,00	1.453.940,00	0,00
113	SD NEGERI 113/VI MUARA MADRAS	0,00	3.971.625,00	3.971.625,00	0,00
114	SD NEGERI 114/VI BANGKO VII	0,00	9.089.449,00	9.089.449,00	0,00
115	SD NEGERI 115/VI BANGKO VIII	0,00	32.813.463,00	32.813.463,00	0,00
116	SD NEGERI 116/VI PULAU RENGAS III	0,00	4.424.927,00	4.424.927,00	0,00
117	SD NEGERI 117/VI LUMBUR MERANGIN II	0,00	5.663.003,00	5.663.003,00	0,00
118	SD NEGERI 118/VI KARANG BERAHI II	0,00	6.093.666,00	6.093.666,00	0,00
119	SD NEGERI 119/VI KEROYA	0,00	8.199.323,00	8.199.323,00	0,00
120	SD NEGERI 120/VI RANTAU DERAS II	0,00	1.532.290,00	1.532.290,00	0,00
121	SD NEGERI 121/VI AUR BEDURI	0,00	9.609.077,00	9.609.077,00	0,00
122	SD NEGERI 122/VI SIDO MAKMUR I	0,00	3.382.193,00	3.382.193,00	0,00
123	SD NEGERI 123/VI SIDORUKUN	0,00	6.323.698,00	6.323.698,00	0,00
124	SD NEGERI 124/VI KOTO BARU	0,00	8.019.034,00	8.019.034,00	0,00
125	SD NEGERI 125/VI PULAU ARO II	0,00	1.486.515,00	1.486.515,00	0,00
126	SD NEGERI 126/VI MUARA JERNIH	0,00	8.482.019,00	8.482.019,00	0,00
127	SD NEGERI 127/VI MUARA KIBUL II	0,00	4.290.983,00	4.290.983,00	0,00
128	SD NEGERI 128/VI TANJUNG PUTUS I	0,00	1.590.044,00	1.590.044,00	0,00
129	SD NEGERI 129/VI TELENTAM I	0,00	4.241.308,00	4.241.308,00	0,00
130	SD NEGERI 130/VI SUNGAI MANAU III	0,00	7.373.047,00	7.373.047,00	0,00
131	SD NEGERI 131/VI MUARA PANCO II	0,00	6.532.441,00	6.532.441,00	0,00
132	SD NEGERI 132/VI SUNGAI JERING	0,00	6.302.475,00	6.302.475,00	0,00
133	SD NEGERI 133/VI REJOSARI II	0,00	3.652.284,00	3.652.284,00	0,00
134	SD NEGERI 134/VI DESA BARU TP I	0,00	1.962.307,00	1.962.307,00	0,00
135	SD NEGERI 135/VI PULAU RAMAN	0,00	4.400.219,00	4.400.219,00	0,00
136	SD NEGERI 136/VI PULAU TENGAH II	0,00	2.196.968,00	2.196.968,00	0,00
137	SD NEGERI 137/VI KOTO TEGUH	0,00	3.339.092,00	3.339.092,00	0,00
138	SD NEGERI 138/VI TL SIKUMBANG I	0,00	6.325.506,00	6.325.506,00	0,00
139	SD NEGERI 139/VI PULAU TENGAH IV	0,00	7.170.993,00	7.170.993,00	0,00
140	SD NEGERI 140/VI RANTAU PANJANG	0,00	8.584.998,00	8.584.998,00	0,00
141	SD NEGERI 141/VI PULAU BAYUR I	0,00	851.003,00	851.003,00	0,00
142	SD NEGERI 142/VI KOTO TAPUS II	0,00	7.012.740,00	7.012.740,00	0,00
143	SD NEGERI 143/VI KUNGKAI II	0,00	7.783.291,00	7.783.291,00	0,00
144	SD NEGERI 144/VI BANGKO IX	0,00	7.970.395,00	7.970.395,00	0,00
145	SD NEGERI 145/VI SALAM BUKU I	0,00	1.296.111,00	1.296.111,00	0,00
146	SD NEGERI 146/VI MENTAWAK	0,00	19.853.251,00	19.853.251,00	0,00
147	SD NEGERI 147/VI LANGLING I	0,00	6.311.700,00	6.311.700,00	0,00
148	SD NEGERI 148/VI KARANG ANYAR	0,00	4.721.608,00	4.721.608,00	0,00
149	SD NEGERI 149/VI PINANG MERAH I	0,00	7.907.783,00	7.907.783,00	0,00
150	SD NEGERI 150/VI LUBUK BUMBUN	0,00	8.595.342,00	8.595.342,00	0,00
151	SD NEGERI 151/VI BATANG KIBUL	0,00	2.554.736,00	2.554.736,00	0,00
152	SD NEGERI 152/VI RANTAU PANJANG IX	0,00	5.449.848,00	5.449.848,00	0,00
153	SD NEGERI 153/VI RANTAU PANJANG X	0,00	16.059.482,00	16.059.482,00	0,00
154	SD NEGERI 154/VI AIR LIKI	0,00	3.885.911,00	3.885.911,00	0,00
155	SD NEGERI 155/VI PARIT UJUNG TANJUNG II	0,00	9.493.784,00	9.493.784,00	0,00
156	SD NEGERI 156/VI DURIAN BETAKUK	0,00	9.340.963,00	9.340.963,00	0,00
157	SD NEGERI 157/VI BUNGO TANJUNG	0,00	5.661.874,00	5.661.874,00	0,00
158	SD NEGERI 158/VI PALIPAN	0,00	7.003.786,00	7.003.786,00	0,00

7

No	Nama Sekolah	Mutasi Pajak			
		Saldo Awal 2024	Pemotongan	Penysetoran	Saldo Akhir 2024
1	2	3	4	5	6=3+4-5
159	SD NEGERI 159/VI RANTAU BIDARO	0,00	6.584.702,00	6.584.702,00	0,00
160	SD NEGERI 160/VI PASAR MASURAI III	0,00	3.915.712,00	3.915.712,00	0,00
161	SD NEGERI 161/VI MUARA SIAU III	0,00	781.983,00	781.983,00	0,00
162	SD NEGERI 162/VI PEMATANG PAUH II	0,00	2.145.329,00	2.145.329,00	0,00
163	SD NEGERI 163/VI MUARA PANGI	0,00	5.436.653,00	5.436.653,00	0,00
164	SD NEGERI 164/VI PULAU BARU II	0,00	5.798.631,00	5.798.631,00	0,00
165	SD NEGERI 165/VI TITIAN TERAS	0,00	3.317.670,00	3.317.670,00	0,00
166	SD NEGERI 166/VI DESA PAPIT	0,00	3.089.364,00	3.089.364,00	0,00
167	SD NEGERI 167/VI MAMPUN BARU I	0,00	7.778.206,00	7.778.206,00	0,00
168	SD NEGERI 168/VI MAMPUN BARU II	0,00	7.709.629,00	7.709.629,00	0,00
169	SD NEGERI 169/VI MERANTIH I	0,00	3.260.210,00	3.260.210,00	0,00
170	SD NEGERI 170/VI RASAU I	0,00	4.328.836,00	4.328.836,00	0,00
171	SD NEGERI 171/VI PAUH MENANG I	0,00	20.596.199,00	20.596.199,00	0,00
172	SD NEGERI 172/VI PAUH MENANG II	0,00	7.196.332,00	7.196.332,00	0,00
173	SD NEGERI 173/VI BATANG KIBUL II	0,00	2.620.358,00	2.620.358,00	0,00
174	SD NEGERI 174/VI RANTAU PANJANG XI	0,00	4.960.481,00	4.960.481,00	0,00
175	SD NEGERI 175/VI NGAOL II	0,00	2.513.412,00	2.513.412,00	0,00
176	SD NEGERI 176/VI SUNGAI TABIR	0,00	1.547.348,00	1.547.348,00	0,00
177	SD NEGERI 177/VI GUGUK II	0,00	5.890.719,00	5.890.719,00	0,00
178	SD NEGERI 178/VI TALANG SEGECAH	0,00	1.021.535,00	1.021.535,00	0,00
179	SD NEGERI 179/VI DURIAN RAMBUN	0,00	2.105.268,00	2.105.268,00	0,00
180	SD NEGERI 180/VI PASAR MASURAI IV	0,00	9.511.125,00	9.511.125,00	0,00
181	SD NEGERI 181/VI KOTORAMI II	0,00	2.997.429,00	2.997.429,00	0,00
182	SD NEGERI 182/VI SEPANTAI RENAH	0,00	1.242.929,00	1.206.929,00	36.000,00
183	SD NEGERI 183/VI RENAH KEMUMU	0,00	5.384.002,00	5.384.002,00	0,00
184	SD NEGERI 184/VI TALANG TEMBAGO II	0,00	3.759.287,00	3.759.287,00	0,00
185	SD NEGERI 185/VI TANJUNG LAMIN II	0,00	8.015.911,00	8.015.911,00	0,00
186	SD NEGERI 186/VI LUBUK GAUNG II	0,00	2.637.256,00	2.637.256,00	0,00
187	SD NEGERI 187/VI RANTAU DERAS	0,00	2.522.744,00	2.522.744,00	0,00
188	SD NEGERI 188/VI MUARA BELENGO	0,00	5.251.983,00	5.251.983,00	0,00
189	SD NEGERI 189/VI PINANG MERAH II	0,00	18.523.598,00	18.523.598,00	0,00
190	SD NEGERI 190/VI MAMPUN BARU III	0,00	4.282.922,00	4.282.922,00	0,00
191	SD NEGERI 191/VI MERANTIH II	0,00	12.356.114,00	12.356.114,00	0,00
192	SD NEGERI 192/VI RASAU II	0,00	5.894.476,00	5.894.476,00	0,00
193	SD NEGERI 193/VI BUKIT BUNGKUL	0,00	14.653.631,00	14.653.631,00	0,00
194	SD NEGERI 194/VI TAMBANG EMAS I	0,00	17.787.262,00	17.787.262,00	0,00
195	SD NEGERI 195/VI PEMATANG KANCIL	0,00	6.020.235,00	6.020.235,00	0,00
196	SD NEGERI 196/VI TANAH ABANG I	0,00	12.351.517,00	12.351.517,00	0,00
197	SD NEGERI 197/VI AIR LIKI III	0,00	3.997.910,00	3.997.910,00	0,00
198	SD NEGERI 198/VI ULAK MAKAM	0,00	8.304.221,00	8.304.221,00	0,00
199	SD NEGERI 199/VI BATANG KIBUL III	0,00	1.939.878,00	1.939.878,00	0,00
200	SD NEGERI 200/VI TAMBANG BARU I	0,00	4.350.950,00	4.350.950,00	0,00
201	SD NEGERI 201/VI TANJUNG ILIR II	0,00	2.244.457,00	2.244.457,00	0,00
202	SD NEGERI 202/VI BELURAN PANJANG	0,00	7.967.119,00	7.967.119,00	0,00
203	SD NEGERI 203/VI RANTAU PANJANG XII	0,00	4.263.198,00	4.263.198,00	0,00
204	SD NEGERI 204/VI BARU PANGKALAN JAMBU	0,00	4.733.629,00	4.733.629,00	0,00
205	SD NEGERI 205/VI AIR BATU	0,00	7.205.982,00	7.205.982,00	0,00
206	SD NEGERI 206/VI MARKEH II	0,00	938.472,00	938.472,00	0,00
207	SD NEGERI 207/VI MUARA INUM	0,00	7.881.045,00	7.881.045,00	0,00
208	SD NEGERI 208/VI PEMATANG PAUH III	0,00	3.011.967,00	3.011.967,00	0,00
209	SD NEGERI 209/VI RENAH ALAI	0,00	4.872.164,00	4.872.164,00	0,00
210	SD NEGERI 210/VI PAMENANG	0,00	604.202,00	604.202,00	0,00
211	SD NEGERI 211/VI BANGKO X	0,00	15.939.112,00	15.939.112,00	0,00
212	SD NEGERI 212/VI BANGKO XI	0,00	427.088,00	427.088,00	0,00
213	SD NEGERI 213/VI BIUKU TANJUNG II	0,00	3.415.790,00	3.415.790,00	0,00
214	SD NEGERI 214/VI LUBUK GAUNG III	0,00	2.215.854,00	2.215.854,00	0,00
215	SD NEGERI 215/VI TAMBANG NIBUNG II	0,00	2.091.048,00	2.091.048,00	0,00
216	SD NEGERI 216/VI JELATANG II	0,00	790.611,00	790.611,00	0,00
217	SD NEGERI 217/VI PAMENANG IV	0,00	462.284,00	462.284,00	0,00
218	SD NEGERI 218/VI LANTAK SERIBU I	0,00	3.148.887,00	3.148.887,00	0,00
219	SD NEGERI 219/VI SIALANG I	0,00	2.491.028,00	2.491.028,00	0,00
220	SD NEGERI 220/VI TANJUNG BENUANG I	0,00	11.179.430,00	11.179.430,00	0,00
221	SD NEGERI 221/VI SUNGAI KAPAS I	0,00	14.635.983,00	14.635.983,00	0,00
222	SD NEGERI 222/VI TANJUNG REJO I	0,00	40.905.841,00	40.905.841,00	0,00
223	SD NEGERI 223/IV RANTAU LIMA MANIS II	0,00	4.286.291,00	4.286.291,00	0,00
224	SD NEGERI 224/VI KAPUK III	0,00	0,00	0,00	0,00
225	SD NEGERI 225/VI NGAOL III	0,00	2.650.196,00	2.650.196,00	0,00
226	SD NEGERI 226/VI TELENTAM II	0,00	2.449.051,00	2.449.051,00	0,00
227	SD NEGERI 227/VI TANJUNG REJO	0,00	914.250,00	914.250,00	0,00
228	SD NEGERI 228/VI AIR BATU III	0,00	627.927,00	627.927,00	0,00
229	SD NEGERI 229/VI SUNGAI MANAU IV	0,00	3.233.610,00	3.233.610,00	0,00
230	SD NEGERI 230/VI GUGUK III	0,00	2.051.623,00	2.051.623,00	0,00
231	SD NEGERI 231/VI MUARA SIAU IV	0,00	577.973,00	577.973,00	0,00
232	SD NEGERI 232/VI RANTAU MACANG	0,00	3.326.615,00	3.326.615,00	0,00
233	SD NEGERI 233/VI SUNGAI HITAM II	0,00	5.704.361,00	5.704.361,00	0,00
234	SD NEGERI 234/VI TANJUNG MUDO I	0,00	4.172.164,00	4.172.164,00	0,00
235	SD NEGERI 235/VI TANJUNG MUDO II	0,00	1.423.691,00	1.423.691,00	0,00
236	SD NEGERI 236/VI TIANGKO II	0,00	2.826.250,00	2.826.250,00	0,00
237	SD NEGERI 237/VI KANDANG II	0,00	566.227,00	566.227,00	0,00
238	SD NEGERI 238/VI TANJUNG PUTUS II	0,00	3.215.372,00	3.215.372,00	0,00
239	SD NEGERI 239/VI BUNGA ANTOT I	0,00	11.163.127,00	11.163.127,00	0,00
240	SD NEGERI 240/VI SUNGAI SAHUT I	0,00	13.519.435,00	13.519.435,00	0,00
241	SD NEGERI 241/VI MUARA DELANG I	0,00	11.859.696,00	11.859.696,00	0,00

No	Nama Sekolah	Mutasi Pajak			
		Saldo Awal 2024	Pemotongan	Penysetoran	Saldo Akhir 2024
1	2	3	4	5	6=3+4-5
242	SD NEGERI 242/VI SINAR GADING I	0,00	10.290.173,00	10.290.173,00	0,00
243	SD NEGERI 243/VI BUNGO TANJUNG I	0,00	7.607.658,00	7.607.658,00	0,00
244	SD NEGERI 244/VI SIDOMAKMUR	0,00	2.210.057,00	2.210.057,00	0,00
245	SD NEGERI 245/VI TIARO II	0,00	3.044.441,00	3.044.441,00	0,00
246	SD NEGERI 246/VI TELUK SIKUMBANG II	0,00	2.344.541,00	2.344.541,00	0,00
247	SD NEGERI 247/VI SIALANG II	58.000,00	9.607.127,00	9.665.127,00	0,00
248	SD NEGERI 248/VI SUNGAI PUTIH I	0,00	5.434.612,00	5.434.612,00	0,00
249	SD NEGERI 249/VI RAWA JAYA I	0,00	10.023.438,00	10.023.438,00	0,00
250	SD NEGERI 250/VI SINAR GADING II	0,00	9.830.567,00	9.830.567,00	0,00
251	SD NEGERI 251/VI BUNGO TANJUNG II	0,00	6.063.597,00	6.063.597,00	0,00
252	SD NEGERI 252/VI LANTAK SERIBU II	0,00	9.244.449,00	9.244.449,00	0,00
253	SD NEGERI 253/VI BANGKO XII	0,00	41.457.008,00	41.457.008,00	0,00
254	SD NEGERI 254/VI TAMBANG EMAS II	0,00	16.780.169,00	16.780.169,00	0,00
255	SD NEGERI 255/VI SUNGAI KAPAS II	0,00	15.868.575,00	15.868.575,00	0,00
256	SD NEGERI 256/VI PEMATANG KANCIL II	0,00	3.623.322,00	3.623.322,00	0,00
257	SD NEGERI 257/VI AIR BATU I	0,00	10.196.423,00	10.196.423,00	0,00
258	SD NEGERI 258/VI REJO SARI	0,00	5.488.806,00	5.488.806,00	0,00
259	SD NEGERI 259/VI BUKIT SUBUR	0,00	13.538.194,00	13.538.194,00	0,00
260	SD NEGERI 260/VI RAWA JAYA II	0,00	15.581.874,00	15.581.874,00	0,00
261	SD NEGERI 261/VI KOTA RAJA	0,00	6.161.064,00	6.161.064,00	0,00
262	SD NEGERI 262/VI SUKO REJO	0,00	5.349.839,00	5.349.839,00	0,00
263	SD NEGERI 263/VI PULAU ARO III	0,00	1.816.806,00	1.816.806,00	0,00
264	SD NEGERI 264/VI BUKIT BUNGKUL II	0,00	8.000.028,00	8.000.028,00	0,00
265	SD NEGERI 265/VI BUKIT BERINGIN I	0,00	6.931.690,00	6.931.690,00	0,00
266	SD NEGERI 266/VI BUKIT BERINGIN II	0,00	8.259.130,00	8.259.130,00	0,00
267	SD NEGERI 267/VI SUNGAI SAHUT II	0,00	9.839.009,00	9.839.009,00	0,00
268	SD NEGERI 268/VI BUNGA ANTOI II	0,00	26.882.498,00	26.882.498,00	0,00
269	SD NEGERI 269/VI SUNGAI BULIAN I	0,00	5.766.780,00	5.766.780,00	0,00
270	SD NEGERI 270/VI MUARA PANCO III	0,00	3.282.008,00	3.282.008,00	0,00
271	SD NEGERI 271/VI SEKANCING III	0,00	7.301.927,00	7.301.927,00	0,00
272	SD NEGERI 272/VI PULAU TENGAH III	0,00	8.736.956,00	8.736.956,00	0,00
273	SD NEGERI 273/VI SUNGAI PUTIH II	0,00	6.090.712,00	6.090.712,00	0,00
274	SD NEGERI 274/VI MUARA DELANG II	0,00	29.469.896,00	29.469.896,00	0,00
275	SD NEGERI 275/VI BUNGO TANJUNG III	0,00	9.666.985,00	9.666.985,00	0,00
276	SD NEGERI 276/VI AIR BATU II	0,00	5.898.152,00	5.898.152,00	0,00
277	SD NEGERI 277/VI TANJUNG BENUANG II	0,00	12.739.970,00	12.739.970,00	0,00
278	SD NEGERI 278/VI BANGKO XIII	0,00	1.697.688,00	1.697.688,00	0,00
279	SD NEGERI 279/VI KAPUK IV	0,00	1.555.419,00	1.555.419,00	0,00
280	SD NEGERI 280/VI BANGKO XIV	0,00	9.631.356,00	9.631.356,00	0,00
281	SD NEGERI 281/VI DESA BARU TP II	0,00	1.102.226,00	1.102.226,00	0,00
282	SD NEGERI 282/VI BANGKO XV	0,00	38.259.860,00	38.259.860,00	0,00
283	SD NEGERI 283/VI TANAH ABANG II	0,00	8.930.408,00	8.930.408,00	0,00
284	SD NEGERI 284/VI NALO GEDANG II	0,00	3.624.674,00	3.624.674,00	0,00
285	SD NEGERI 285/VI BARU NALO II	0,00	10.084.475,00	10.084.475,00	0,00
286	SD NEGERI 286/VI PULAU BAYUR II	0,00	1.824.050,00	1.824.050,00	0,00
287	SD NEGERI 287/VI TAMBANG BARU II	0,00	950.204,00	950.204,00	0,00
288	SD NEGERI 288/VI SERI SEMBILAN	0,00	15.390.267,00	15.390.267,00	0,00
289	SD NEGERI 289/VI LUBUK PUNGUK 2	0,00	4.761.562,00	4.761.562,00	0,00
290	SD NEGERI 290/VI SIMPANG LIMBUR	0,00	6.589.157,00	6.589.157,00	0,00
291	SD NEGERI 291/VI SALAM BUKU II	0,00	9.610.562,00	9.610.562,00	0,00
292	SD NEGERI 292/VI NILO DINGIN II	0,00	11.451.211,00	11.451.211,00	0,00
293	SD NEGERI 293/VI SUNGAI BULIAN II	0,00	7.891.175,00	7.891.175,00	0,00
294	SD NEGERI 294/VI BANGKO XV	0,00	5.104.130,00	5.104.130,00	0,00
295	SD NEGERI 295/VI SUNGAI LIMAUI	0,00	4.537.192,00	4.537.192,00	0,00
296	SD NEGERI 296/VI RANTAU PANJANG XIII	0,00	10.849.637,00	10.849.637,00	0,00
297	SD NEGERI 297/VI KOTO RAYO II	0,00	1.588.354,00	1.588.354,00	0,00
298	SD NEGERI 298/VI BUKIT BERINGIN III	0,00	1.308.432,00	1.308.432,00	0,00
299	SD NEGERI 299/VI LANGLING II	0,00	2.873.485,00	2.873.485,00	0,00
300	SD NEGERI 300/VI SUNGAI TEBAL	0,00	22.036.150,00	22.036.150,00	0,00
301	SD NEGERI 301/VI PATEKUN	0,00	1.719.537,00	1.719.537,00	0,00
302	SD NEGERI 302/VI BUNGA ANTOI III	0,00	13.608.601,00	13.608.601,00	0,00
303	SD NEGERI 303/VI PULAU TEBAKAR	0,00	806.760,00	806.760,00	0,00
304	SD NEGERI 304/VI BATANG KIBUL IV	0,00	2.526.591,00	2.526.591,00	0,00
305	SD NEGERI 305/VI BUNGO TANJUNG IV	0,00	6.978.801,00	6.978.801,00	0,00
306	SD NEGERI 306/VI SUNGAI LIMAUI II	0,00	1.843.472,00	1.843.472,00	0,00
307	SD NEGERI 307/VI DURIAN MUKUT	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
308	SD NEGERI 308/VI RANTAU SULI II	0,00	4.403.182,00	4.403.182,00	0,00
309	SD NEGERI 309/VI MEKAR LIMAUI MANIS	0,00	1.083.883,00	1.083.883,00	0,00
310	SD NEGERI 310/VI TUNGUL BULIN	0,00	6.401.139,00	6.401.139,00	0,00
311	SD NEGERI 311/VI KEMBANG BUNGO	0,00	6.891.600,00	6.891.600,00	0,00
312	SD NEGERI 312/VI RIMBA KARTIKA	0,00	336.590,00	336.590,00	0,00
313	SD NEGERI 313/VI RANTAU PALIMBANG	0,00	1.293.285,00	1.293.285,00	0,00
JUMLAH MUTASI PAJAK SD (I)		341.640,00	2.067.320.848,00	2.067.368.793,00	293.695,00

No	Nama Sekolah	Mutasi Pajak			
		Saldo Awal 2024	Pemotongan	Penyvetoran	Saldo Akhir 2024
1	2	3	4	5	6=3+4-5
II. SMP NEGERI					
1	SMP NEGERI 01 MERANGIN	0,00	58.287.899,00	58.287.899,00	0,00
2	SMP NEGERI 02 MERANGIN	0,00	29.851.383,00	29.851.383,00	0,00
3	SMP NEGERI 03 MERANGIN	0,00	8.308.762,00	8.308.762,00	0,00
4	SMP NEGERI 04 MERANGIN	0,00	101.940.917,00	101.940.917,00	0,00
5	SMP NEGERI 05 MERANGIN	0,00	10.088.919,00	10.088.919,00	0,00
6	SMP NEGERI 06 MERANGIN	0,00	12.023.728,00	12.023.728,00	0,00
7	SMP NEGERI 07 MERANGIN	0,00	12.514.771,00	12.514.771,00	0,00
8	SMP NEGERI 08 MERANGIN	0,00	4.864.354,00	4.864.354,00	0,00
9	SMP NEGERI 09 MERANGIN	0,00	754.525,00	754.525,00	0,00
10	SMP NEGERI 10 MERANGIN	0,00	23.983.229,00	23.983.229,00	0,00
11	SMP NEGERI 11 MERANGIN	0,00	14.792.172,00	14.792.172,00	0,00
12	SMP NEGERI 12 MERANGIN	0,00	9.733.126,00	9.733.126,00	0,00
13	SMP NEGERI 13 MERANGIN	0,00	23.069.592,00	23.069.592,00	0,00
14	SMP NEGERI 14 MERANGIN	0,00	10.351.625,00	10.351.625,00	0,00
15	SMP NEGERI 15 MERANGIN	0,00	5.744.918,00	5.744.918,00	0,00
16	SMP NEGERI 16 MERANGIN	0,00	4.272.167,00	4.272.167,00	0,00
17	SMP NEGERI 17 MERANGIN	0,00	1.186.300,00	1.186.300,00	0,00
18	SMP NEGERI 18 MERANGIN	0,00	10.323.862,00	10.323.862,00	0,00
19	SMP NEGERI 19 MERANGIN	0,00	14.868.939,00	14.868.939,00	0,00
20	SMP NEGERI 20 MERANGIN	0,00	5.739.329,00	5.739.329,00	0,00
21	SMP NEGERI 21 MERANGIN	0,00	4.635.037,00	4.635.037,00	0,00
22	SMP NEGERI 22 MERANGIN	0,00	2.649.291,00	2.649.291,00	0,00
23	SMP NEGERI 23 MERANGIN	0,00	5.676.986,00	5.676.986,00	0,00
24	SMP NEGERI 24 MERANGIN	0,00	8.586.117,00	8.586.117,00	0,00
25	SMP NEGERI 25 MERANGIN	0,00	3.131.955,00	3.131.955,00	0,00
26	SMP NEGERI 26 MERANGIN	0,00	3.729.225,00	3.729.225,00	0,00
27	SMP NEGERI 27 MERANGIN	0,00	1.020.896,00	1.020.896,00	0,00
28	SMP NEGERI 28 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00
29	SMP NEGERI 29 MERANGIN	0,00	3.451.122,00	3.451.122,00	0,00
30	SMP NEGERI 30 MERANGIN	0,00	582.490,00	582.490,00	0,00
31	SMP NEGERI 31 MERANGIN	0,00	1.284.111,00	1.284.111,00	0,00
32	SMP NEGERI 32 MERANGIN	0,00	3.616.254,00	3.616.254,00	0,00
33	SMP NEGERI 33 MERANGIN	0,00	8.535.079,00	8.535.079,00	0,00
34	SMP NEGERI 34 MERANGIN	0,00	2.429.279,00	2.429.279,00	0,00
35	SMP NEGERI 35 MERANGIN	0,00	1.904.924,00	1.904.924,00	0,00
36	SMP NEGERI 36 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00
37	SMP NEGERI 37 MERANGIN	0,00	2.243.967,00	2.243.967,00	0,00
38	SMP NEGERI 38 MERANGIN	0,00	2.094.640,00	2.094.640,00	0,00
39	SMP NEGERI 39 MERANGIN	0,00	7.608.144,00	7.608.144,00	0,00
40	SMP NEGERI 40 MERANGIN	0,00	1.399.707,00	1.399.707,00	0,00
41	SMP NEGERI 41 MERANGIN	0,00	1.334.129,00	1.334.129,00	0,00
42	SMP NEGERI 42 MERANGIN	0,00	1.525.847,00	1.525.847,00	0,00
43	SMP NEGERI 43 MERANGIN	0,00	4.806.728,00	4.806.728,00	0,00
44	SMP NEGERI 44 MERANGIN	0,00	2.153.012,00	2.153.012,00	0,00
45	SMP NEGERI 45 MERANGIN	0,00	3.087.744,00	3.087.744,00	0,00
46	SMP NEGERI 46 MERANGIN	0,00	1.343.088,00	1.343.088,00	0,00
47	SMP NEGERI 47 MERANGIN	0,00	4.284.085,00	4.284.085,00	0,00
48	SMP NEGERI 48 MERANGIN	0,00	1.987.035,00	1.987.035,00	0,00
49	SMP NEGERI 49 MERANGIN	0,00	741.746,00	741.746,00	0,00
50	SMP NEGERI 50 MERANGIN	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
51	SMP NEGERI 51 MERANGIN	0,00	2.346.905,00	2.346.905,00	0,00
52	SMP NEGERI 52 MERANGIN	0,00	5.193.699,00	5.193.699,00	0,00
53	SMP NEGERI 53 MERANGIN	0,00	6.500.626,00	6.500.626,00	0,00
54	SMP NEGERI 54 MERANGIN	0,00	1.060.986,00	1.060.986,00	0,00
55	SMP NEGERI 55 MERANGIN	0,00	6.156.995,00	6.156.995,00	0,00
56	SMP NEGERI 56 MERANGIN	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
57	SMP NEGERI 57 MERANGIN	0,00	1.326.319,00	1.326.319,00	0,00
58	SMP NEGERI 58 MERANGIN	0,00	14.826.274,00	14.826.274,00	0,00
59	SMP NEGERI 59 MERANGIN	0,00	988.865,00	988.865,00	0,00
60	SMP NEGERI 60 MERANGIN	0,00	4.990.090,00	4.990.090,00	0,00
61	SMP NEGERI SATU ATAP 01 MERANGIN	0,00	4.355.282,00	4.355.282,00	0,00
62	SMP NEGERI SATU ATAP 02 MERANGIN	0,00	70.648,00	70.648,00	0,00
63	SMP NEGERI SATU ATAP 03 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SMP NEGERI SATU ATAP 04 MERANGIN	0,00	1.689.071,00	1.689.071,00	0,00
65	SMP NEGERI SATU ATAP 05 MERANGIN	0,00	349.491,00	349.491,00	0,00
66	SMP NEGERI SATU ATAP 06 MERANGIN	0,00	382.054,00	382.054,00	0,00
67	SMP NEGERI SATU ATAP 07 MERANGIN	0,00	229.085,00	229.085,00	0,00
68	SMP NEGERI SATU ATAP 08 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SMP NEGERI SATU ATAP 09 MERANGIN	0,00	399.921,00	399.921,00	0,00
70	SMP NEGERI SATU ATAP 10 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SMP NEGERI SATU ATAP 11 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SMP NEGERI SATU ATAP 12 MERANGIN	0,00	4.088.596,00	4.088.596,00	0,00
73	SMP NEGERI SATU ATAP 13 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SMP NEGERI SATU ATAP 14 MERANGIN	0,00	335.626,00	335.626,00	0,00
75	SMP NEGERI SATU ATAP 15 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00
76	SMP NEGERI SATU ATAP 16 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00
77	SMP NEGERI SATU ATAP 17 MERANGIN	0,00	2.393.380,00	2.393.380,00	0,00
78	SMP NEGERI SATU ATAP 18 MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00
79	SMP NEGERI SATU ATAP 19 MERANGIN	0,00	4.348.578,00	4.348.578,00	0,00
80	SMP NEGERI SATU ATAP 20 MERANGIN	0,00	4.806.811,00	4.806.811,00	0,00
81	SMP NEGERI SATU ATAP 21 MERANGIN	0,00	644.000,00	644.000,00	0,00
82	SMP NEGERI SATU ATAP 22 MERANGIN	0,00	2.949.451,00	2.949.451,00	0,00

No	Nama Sekolah	Mutasi Pajak			
		Saldo Awal 2024	Pemotongan	Penyetoran	Saldo Akhir 2024
1	2	3	4	5	6=3+4-5
83	SMP NEGERI SATU ATAP 23 MERANGIN	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
84	SMP NEGERI SATU ATAP 24 MERANGIN	0,00	4.594.186,00	4.594.186,00	0,00
JUMLAH MUTASI PAJAK SMP (II)		0,00	524.302.094,00	524.302.094,00	0,00
JUMLAH MUTASI PAJAK (I + II)		341.640,00	2.591.622.942,00	2.591.670.887,00	293.695,00

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
REKAPITULASI REALISASI DANA BOP PAUD DAN KESETARAAN NEGERI SE-KABUPATEN MERANGIN
TAHUN ANGGARAN 2024

I. DANA BOP PAUD NEGERI 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah/Entitas Penerima	Saldo Awal						Pendapatan		Belanja					
		Bank	Tunai	Total Saldo Awal 2024	Koreksi Saldo Awal Bank/(Tunai) 2024	Saldo Awal Setelah Koreksi 2024	Pendapatan 2024	Pendapatan Lain-Lain	Total Pendapatan 2024	Belanja Operasi					Total Belanja Operasi
										Belanja Barang	Belanja Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Perjalanan Dinas	Belanja Hibah	
1	2	3	4	5=3+4	6	7=5+6	8	9	10=8+9	11	12	13	14	15	16=11+12+13+14+15
1	TK NEGERI HARAPAN IBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	4.750.000,00	3.000.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	10.200.000,00
2	TK NEGERI TUNAS BANGSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	12.250.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
3	TK NEGERI PEMBINA 1 BANGKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	7.755.300,00	9.763.200,00	0,00	0,00	0,00	17.518.500,00
4	TK NEGERI PEMBINA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400.000,00	0,00	128.400.000,00	49.724.000,00	37.176.000,00	1.800.000,00	31.700.000,00	0,00	120.400.000,00
5	TK NEGERI PERTIWI DHARMA WANITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	6.940.000,00	3.600.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	12.580.000,00
6	TK NEGERI PUSPITASARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200.000,00	0,00	25.200.000,00	11.474.000,00	10.310.000,00	1.110.000,00	950.000,00	0,00	23.844.000,00
7	TK NEGERI TERATAI PUTIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00	0,00	18.600.000,00	10.200.000,00	3.600.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	18.600.000,00
8	TK NEGERI PEMBINA TABIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400.000,00	0,00	86.400.000,00	50.812.000,00	23.388.000,00	0,00	0,00	0,00	74.200.000,00
9	TK NEGERI PERTIWI I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	5.790.000,00	8.610.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00
10	TK NEGERI KARTIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	7.380.000,00	3.600.000,00	300.000,00	720.000,00	0,00	12.000.000,00
11	TK NEGERI FAJAR HARAPAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	3.164.000,00	4.836.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	10.400.000,00
12	TK NEGERI HARAPAN BUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	12.750.000,00	550.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	14.300.000,00
13	TK NEGERI HARAPAN BUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	6.814.000,00	7.086.000,00	0,00	0,00	0,00	13.900.000,00
14	TK NEGERI JAMIATUL ISLAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400.000,00	0,00	29.400.000,00	23.120.000,00	2.100.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	27.220.000,00
15	TK NEGERI KASIH BUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	2.520.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00
16	TK NEGERI PEMBINA MERANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200.000,00	0,00	25.200.000,00	7.424.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00	5.550.000,00	0,00	22.974.000,00
17	TK NEGERI TUNAS MULIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	6.228.000,00	5.200.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	14.428.000,00
18	TK NEGERI CAHAYA ABADI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400.000,00	0,00	23.400.000,00	9.085.000,00	7.020.000,00	1.670.000,00	1.800.000,00	0,00	19.575.000,00
19	TK NEGERI HARAPAN KASIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	4.000.000,00	5.300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	9.600.000,00
20	TK NEGERI LIMA JURAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800.000,00	0,00	25.800.000,00	15.850.000,00	3.400.000,00	2.150.000,00	1.200.000,00	0,00	22.600.000,00
21	SKB KABUPATEN MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.572.000,00	0,00	22.572.000,00	13.622.000,00	7.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	22.022.000,00
JUMLAH DANA BOP PAUD (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.172.000,00	0,00	572.172.000,00	271.652.300,00	167.569.200,00	10.030.000,00	59.110.000,00	0,00	508.361.500,00

II. DANA BOP KESETARAAN NEGERI 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah/Entitas Penerima	Saldo Awal						Pendapatan		Belanja					
		Bank	Tunai	Total Saldo Awal 2024	Koreksi Saldo Awal Bank/(Tunai) 2024	Saldo Awal Setelah Koreksi 2024	Pendapatan 2024	Pendapatan Lain-Lain	Total Pendapatan 2024	Belanja Operasi					Total Belanja Operasi
										Belanja Barang	Belanja Jasa	Belanja Pemeliharaan	Belanja Perjalanan Dinas	Belanja Hibah	
1	2	3	4	5=3+4	6	7=5+6	8	9	10=8+9	11	12	13	14	15	16=11+12+13+14+15
1	SKB KABUPATEN MERANGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	177.230.000,00	179.470.000,00	1.600.000,00	3.600.000,00	0,00	361.900.000,00
JUMLAH DANA BOP KESETARAAN (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	177.230.000,00	179.470.000,00	1.600.000,00	3.600.000,00	0,00	361.900.000,00
JUMLAH DANA BOP (I+II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.172.000,00	0,00	972.172.000,00	448.882.300,00	347.039.200,00	11.630.000,00	62.710.000,00	0,00	870.261.500,00

7

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
REKAPITULASI REALISASI DANA BOP PAUD DAN KESETARAAN NEGERI SE-KABUPATEN MERANGIN
TAHUN ANGGARAN 2024

I. DANA BOP PAUD NEGERI 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah/Entitas Penerima	Belanja			Saldo BKU 2024				
		Belanja Modal			Jumlah Total Belanja	Total	Bank	Tunai	Ket
		Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Total Belanja Modal					
1	2	17	18	19=17+18	20=16+19	21=7+10-20	22	23	24
1	TK NEGERI HARAPAN IBU	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	TK NEGERI TUNAS BANGSA	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
3	TK NEGERI PEMBINA 1 BANGKO	9.324.000,00	9.157.500,00	18.481.500,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
4	TK NEGERI PEMBINA 2	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	128.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
5	TK NEGERI PERTIWI DHARMA WANITA	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
6	TK NEGERI PUSPITASARI	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
7	TK NEGERI TERATAI PUTIH	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
8	TK NEGERI PEMBINA TABIR	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	86.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
9	TK NEGERI PERTIWI I	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	TK NEGERI KARTIKA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
11	TK NEGERI FAJAR HARAPAN	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	TK NEGERI HARAPAN BUNDA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	TK NEGERI HARAPAN BUNDA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
14	TK NEGERI JAMIATUL ISLAM	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
15	TK NEGERI KASIH BUNDA	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
16	TK NEGERI PEMBINA MERANTI	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
17	TK NEGERI TUNAS MULIA	2.372.000,00	0,00	2.372.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
18	TK NEGERI CAHAYA ABADI	3.825.000,00	0,00	3.825.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
19	TK NEGERI HARAPAN KASIH	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
20	TK NEGERI LIMA JURAI	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
21	SKB KABUPATEN MERANGIN	550.000,00	0,00	550.000,00	22.572.000,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH DANA BOP PAUD (I)		54.653.000,00	9.157.500,00	63.810.500,00	572.172.000,00	0,00	0,00	0,00	

II. DANA BOP KESETARAAN NEGERI 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah/Entitas Penerima	Belanja			Saldo BKU 2024				
		Belanja Modal			Jumlah Total Belanja	Total	Bank	Tunai	Ket
		Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Total Belanja Modal					
1	2	17	18	19=17+18	20=16+19	21=7+10-20	22	23	24
1	SKB KABUPATEN MERANGIN	38.100.000,00	0,00	38.100.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH DANA BOP KESETARAAN (II)		38.100.000,00	0,00	38.100.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH DANA BOP (I+II)		92.753.000,00	9.157.500,00	101.910.500,00	972.172.000,00	0,00	0,00	0,00	

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
REKAPITULASI MUTASI PAJAK DANA BOP PAUD DAN KESETARAAN NEGERI SE-KABUPATEN MERANGIN
TAHUN ANGGARAN 2024

I. PAJAK DANA BOP PAUD NEGERI 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah/Entitas Penerima	Mutasi Pajak			
		Saldo Awal 2024	Pemotongan	Penysetoran	Saldo Akhir 2024
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	TK NEGERI HARAPAN IBU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TK NEGERI TUNAS BANGSA	0,00	96.160,00	96.160,00	0,00
3	TK NEGERI PEMBINA 1 BANGKO	0,00	1.831.495,00	1.831.495,00	0,00
4	TK NEGERI PEMBINA 2	0,00	3.941.266,00	3.941.266,00	0,00
5	TK NEGERI PERTIWI DHARMA WANITA	0,00	0,00	0,00	0,00
6	TK NEGERI PUSPITASARI	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
7	TK NEGERI TERATAI PUTIH	0,00	392.046,00	392.046,00	0,00
8	TK NEGERI PEMBINA TABIR	0,00	4.486.455,00	4.486.455,00	0,00
9	TK NEGERI PERTIWI I	0,00	0,00	0,00	0,00
10	TK NEGERI KARTIKA	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TK NEGERI FAJAR HARAPAN	0,00	0,00	0,00	0,00
12	TK NEGERI HARAPAN BUNDA	0,00	547.046,00	547.046,00	0,00
13	TK NEGERI HARAPAN BUNDA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
14	TK NEGERI JAMIATUL ISLAM	0,00	368.747,00	368.747,00	0,00
15	TK NEGERI KASIH BUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00
16	TK NEGERI PEMBINA MERANTI	0,00	568.430,00	568.430,00	0,00
17	TK NEGERI TUNAS MULIA	0,00	245.423,00	245.423,00	0,00
18	TK NEGERI CAHAYA ABADI	0,00	55.320,00	55.320,00	0,00
19	TK NEGERI HARAPAN KASIH	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
20	TK NEGERI LIMA JURAI	0,00	0,00	0,00	0,00
21	SKB KABUPATEN MERANGIN	0,00	283.918,00	283.918,00	0,00
JUMLAH MUTASI PAJAK BOP PAUD (I)		0,00	12.899.506,00	12.899.506,00	0,00

II. PAJAK DANA BOP KESETARAAN NEGERI 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah/Entitas Penerima	Mutasi Pajak			
		Saldo Awal 2024	Pemotongan	Penysetoran	Saldo Akhir 2024
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	SKB KABUPATEN MERANGIN	0,00	25.926.018,00	25.926.018,00	0,00
JUMLAH MUTASI PAJAK BOP KESETARAAN (II)		0,00	25.926.018,00	25.926.018,00	0,00
JUMLAH MUTASI PAJAK (I + II)		0,00	38.825.524,00	38.825.524,00	0,00


BUPATI MERANGIN

H. M. SYUKUR, S.H., M.H.

**REKAPITULASI PENDAPATAN DAN BELANJA YANG BERSUMBER DARI DANA KAPITASI JKN
PADA FKTP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
TAHUN ANGGARAN 2024**

(dalam rupiah)

No.	S K P D	Jenis Belanja Modal	Pendapatan dan Belanja dari Dana Kapitasi JKN pada FKTP			
			Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
1.	Puskesmas Bangko	Saldo Awal		41.556.528,45		
		1. Pendapatan	1.058.443.471,55	914.868.640,00	(143.574.831,55)	86,44
		2. Belanja	1.100.000.000,00	956.415.923,51	143.584.076,49	86,95
		a. Belanja Operasi	1.022.215.000,00	885.017.923,51	137.197.076,49	86,58
		- Belanja Pegawai	52.560.000,00	52.560.000,00	0,00	100,00
		- Belanja Barang dan Jasa	969.655.000,00	832.457.923,51	137.197.076,49	85,85
		b. Belanja Modal	77.785.000,00	71.398.000,00	6.387.000,00	91,79
		- Peralatan dan Mesin	77.785.000,00	71.398.000,00	6.387.000,00	91,79
		3. Suplus/Defisit (1-2)	(41.556.528,45)	(41.547.283,51)	9.244,94	-
		Saldo Akhir		9.244,94		
2.	Puskesmas Pematang Kandis	Saldo Awal		105,85		
		1. Pendapatan	949.999.894,15	843.119.265,00	(106.880.629,15)	88,75
		2. Belanja	950.000.000,00	843.114.839,00	106.885.161,00	88,75
		a. Belanja Operasi	849.400.000,00	765.514.839,00	83.885.161,00	90,12
		- Belanja Pegawai	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	100,00
		- Belanja Barang dan Jasa	805.000.000,00	721.114.839,00	83.885.161,00	89,58
		b. Belanja Modal	100.600.000,00	77.600.000,00	23.000.000,00	77,14
		- Peralatan dan Mesin	100.600.000,00	77.600.000,00	23.000.000,00	77,14
		3. Suplus/Defisit (1-2)	(105,85)	4.426,00	4.531,85	(4.181,39)
		Saldo Akhir		4.531,85		
3.	Puskesmas Pamenang	Saldo Awal		138.314.849,67		
		1. Pendapatan	921.689.860,58	940.335.399,00	18.645.538,42	102,02
		2. Belanja	1.060.004.710,00	1.044.052.352,00	15.952.358,00	98,50
		a. Belanja Operasi	1.021.549.710,00	1.009.597.352,00	11.952.358,00	98,83
		- Belanja Pegawai	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	100,00
		- Belanja Barang dan Jasa	977.149.710,00	965.197.352,00	11.952.358,00	98,78
		b. Belanja Modal	38.455.000,00	34.455.000,00	4.000.000,00	89,60
		- Peralatan dan Mesin	38.455.000,00	34.455.000,00	4.000.000,00	89,60
		3. Suplus/Defisit (1-2)	(138.314.849,42)	(103.716.953,00)	34.597.896,42	74,99
		Saldo Akhir		34.597.896,67		
4.	Puskesmas Rantau Panjang	Saldo Awal		517.445,26		
		1. Pendapatan	1.009.482.554,74	858.095.686,00	(151.386.868,74)	85,00
		2. Belanja	1.010.000.000,00	858.612.534,70	151.387.465,30	85,01
		a. Belanja Operasi	970.000.000,00	838.612.534,70	131.387.465,30	86,45
		- Belanja Pegawai	52.560.000,00	52.560.000,00	0,00	100,00
		- Belanja Barang dan Jasa	917.440.000,00	786.052.534,70	131.387.465,30	85,68
		b. Belanja Modal	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	50,00
		- Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	50,00
		3. Suplus/Defisit (1-2)	(517.445,26)	(516.848,70)	596,56	99,88
		Saldo Akhir		596,56		
5.	Puskesmas Sumber Agung	Saldo Awal		19.575.744,55		
		1. Pendapatan	441.170.320,15	403.008.824,00	(38.161.496,15)	91,35
		2. Belanja	460.746.065,00	422.431.089,00	38.314.976,00	91,68
		a. Belanja Operasi	423.246.065,00	384.931.089,00	38.314.976,00	90,95
		- Belanja Pegawai	37.380.000,00	37.380.000,00	0,00	100,00
		- Belanja Barang dan Jasa	385.866.065,00	347.551.089,00	38.314.976,00	90,07
		b. Belanja Modal	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	100,00
		- Peralatan dan Mesin	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	100,00
		3. Suplus/Defisit (1-2)	(19.575.744,85)	(19.422.265,00)	153.479,85	99,22
		Saldo Akhir		153.479,55		
6.	Puskesmas Meranti	Saldo Awal		1.291.778,15		
		1. Pendapatan	483.708.221,85	470.376.954,00	(13.331.267,85)	97,24
		2. Belanja	485.000.000,00	446.936.279,35	38.063.720,65	92,15
		a. Belanja Operasi	420.402.000,00	410.016.279,35	10.385.720,65	97,53
		- Belanja Pegawai	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00
		- Belanja Barang dan Jasa	398.802.000,00	388.416.279,35	10.385.720,65	97,40
		b. Belanja Modal	64.598.000,00	36.920.000,00	27.678.000,00	57,15
		- Peralatan dan Mesin	64.598.000,00	36.920.000,00	27.678.000,00	57,15
		3. Suplus/Defisit (1-2)	(1.291.778,15)	23.440.674,65	24.732.452,80	-
		Saldo Akhir		24.732.452,80		
7.	Puskesmas Muara Jernih	Saldo Awal		1.160.381,40		
		1. Pendapatan	548.839.618,60	393.146.750,00	(155.692.868,60)	71,63
		2. Belanja	550.000.000,00	394.303.324,30	155.696.675,70	71,69
		a. Belanja Operasi	546.800.000,00	394.303.324,30	152.496.675,70	72,11
		- Belanja Pegawai	45.240.000,00	45.240.000,00	0,00	100,00
		- Belanja Barang dan Jasa	501.560.000,00	349.063.324,30	152.496.675,70	69,60
		b. Belanja Modal	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00
		- Peralatan dan Mesin	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00
		3. Suplus/Defisit (1-2)	(1.160.381,40)	(1.156.574,30)	3.807,10	99,67
		Saldo Akhir		3.807,10		
8.	Puskesmas Sungai Bulian	Saldo Awal		68.248,00		
		1. Pendapatan	406.501.752,00	357.694.416,00	(48.807.336,00)	87,99
		2. Belanja	406.570.000,00	357.762.663,00	48.807.337,00	88,00
		a. Belanja Operasi	406.570.000,00	357.762.663,00	48.807.337,00	88,00
		- Belanja Pegawai	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	100,00
		- Belanja Barang dan Jasa	362.170.000,00	313.362.663,00	48.807.337,00	86,52
		b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	-
		- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	-
		3. Suplus/Defisit (1-2)	(68.248,00)	(68.247,00)	1,00	100,00
		Saldo Akhir		1,00		

No.	S K P D	Jenis Belanja Modal	Pendapatan dan Belanja dari Dana Kapitasi JKN pada FKTP			
			Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
			4	5	6=5-4	7=5/4
9. Puskesmas Rantau Limau Manis		Saldo Awal		2.015,70		
		1. Pendapatan	309.997.984,30	211.590.783,00	(98.407.201,30)	68,26
		2. Belanja	310.000.000,00	207.085.318,00	102.914.682,00	66,80
		a. Belanja Operasi	306.800.000,00	207.085.318,00	99.714.682,00	67,50
		- Belanja Pegawai	38.820.000,00	38.820.000,00	0,00	100,00
		- Belanja Barang dan Jasa	267.980.000,00	168.265.318,00	99.714.682,00	62,79
		b. Belanja Modal	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00
		- Peralatan dan Mesin	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00
		3. Suplus/Defisit (1-2)	(2.015,70)	4.505.465,00	4.507.480,70	(223.518,63)
		Saldo Akhir		4.507.480,70		
10. Puskesmas Muara Kibul		Saldo Awal		3.000,00		
		1. Pendapatan	1.289.997.000,00	479.628.467,00	(810.368.533,00)	37,18
		2. Belanja	1.290.000.000,00	479.631.466,15	810.368.533,85	37,18
		a. Belanja Operasi	1.178.976.000,00	476.431.466,15	702.544.533,85	40,41
		- Belanja Pegawai	45.240.000,00	45.240.000,00	0,00	100,00
		- Belanja Barang dan Jasa	1.133.736.000,00	431.191.466,15	702.544.533,85	38,03
		b. Belanja Modal	111.024.000,00	3.200.000,00	107.824.000,00	2,88
		- Peralatan dan Mesin	111.024.000,00	3.200.000,00	107.824.000,00	2,88
		3. Suplus/Defisit (1-2)	(3.000,00)	(2.999,15)	0,85	-
		Saldo Akhir		0,85		
11. Puskesmas Sungai Manau		Saldo Awal		64.416,80		
		1. Pendapatan	519.935.583,20	466.311.122,00	(53.624.461,20)	89,69
		2. Belanja	520.000.000,00	463.847.302,00	56.152.698,00	89,20
		a. Belanja Operasi	474.500.000,00	436.284.802,00	38.215.198,00	91,95
		- Belanja Pegawai	38.760.000,00	38.760.000,00	0,00	100,00
		- Belanja Barang dan Jasa	435.740.000,00	397.524.802,00	38.215.198,00	91,23
		b. Belanja Modal	45.500.000,00	27.562.500,00	17.937.500,00	-
		- Peralatan dan Mesin	45.500.000,00	27.562.500,00	17.937.500,00	-
		3. Suplus/Defisit (1-2)	(64.416,80)	2.463.820,00	2.528.236,80	(3.824,81)
		Saldo Akhir		2.528.236,80		
12. Puskesmas Sekancing		Saldo Awal		893,00		
		1. Pendapatan	349.999.107,00	276.114.422,00	(73.884.685,00)	78,89
		2. Belanja	350.000.000,00	276.111.519,00	73.888.481,00	78,89
		a. Belanja Operasi	350.000.000,00	276.111.519,00	73.888.481,00	78,89
		- Belanja Pegawai	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00
		- Belanja Barang dan Jasa	328.400.000,00	254.511.519,00	73.888.481,00	77,50
		b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	-
		- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	-
		3. Suplus/Defisit (1-2)	(893,00)	2.903,00	3.796,00	(325,08)
		Saldo Akhir		3.796,00		
13. Puskesmas Simpang Parit		Saldo Awal		44.916,00		
		1. Pendapatan	414.955.084,00	396.559.276,00	(18.395.808,00)	95,57
		2. Belanja	415.000.000,00	391.191.755,00	23.808.245,00	94,26
		a. Belanja Operasi	407.500.000,00	383.691.755,00	23.808.245,00	94,16
		- Belanja Pegawai	29.070.000,00	29.070.000,00	0,00	100,00
		- Belanja Barang dan Jasa	378.430.000,00	354.621.755,00	23.808.245,00	93,71
		b. Belanja Modal	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
		- Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
		3. Suplus/Defisit (1-2)	(44.916,00)	5.367.521,00	5.412.437,00	-
		Saldo Akhir		5.412.437,00		
14. Puskesmas Simpang Limbur		Saldo Awal		69.978.736,00		
		1. Pendapatan	509.151.855,75	488.291.133,00	(20.860.722,75)	95,90
		2. Belanja	579.130.592,00	552.553.379,00	26.577.213,00	95,41
		a. Belanja Operasi	523.315.592,00	496.738.379,00	26.577.213,00	94,92
		- Belanja Pegawai	35.190.000,00	35.165.000,00	25.000,00	99,93
		- Belanja Barang dan Jasa	488.125.592,00	461.573.379,00	26.552.213,00	94,56
		b. Belanja Modal	55.815.000,00	55.815.000,00	0,00	100,00
		- Peralatan dan Mesin	55.815.000,00	55.815.000,00	0,00	100,00
		3. Suplus/Defisit (1-2)	(69.978.736,25)	(64.262.246,00)	5.716.490,25	91,83
		Saldo Akhir		5.716.490,00		
15. Puskesmas Pasar Masurai		Saldo Awal		56.939,00		
		1. Pendapatan	839.943.061,00	634.537.868,00	(205.405.193,00)	75,55
		2. Belanja	839.999.900,00	634.311.512,00	205.688.388,00	75,51
		a. Belanja Operasi	799.499.900,00	619.311.512,00	180.188.388,00	77,46
		- Belanja Pegawai	52.560.000,00	52.560.000,00	0,00	100,00
		- Belanja Barang dan Jasa	746.939.900,00	566.751.512,00	180.188.388,00	75,88
		b. Belanja Modal	40.500.000,00	15.000.000,00	25.500.000,00	37,04
		- Peralatan dan Mesin	40.500.000,00	15.000.000,00	25.500.000,00	37,04
		3. Suplus/Defisit (1-2)	(56.839,00)	226.356,00	283.195,00	(398,24)
		Saldo Akhir		283.295,00		
16. Puskesmas Aur Duri		Saldo Awal		375,67		
		1. Pendapatan	869.999.624,24	383.978.493,00	(486.021.131,24)	44,14
		2. Belanja	870.000.000,00	383.978.264,00	486.021.736,00	44,14
		a. Belanja Operasi	790.675.000,00	383.978.264,00	406.696.736,00	48,56
		- Belanja Pegawai	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	100,00
		- Belanja Barang dan Jasa	746.275.000,00	339.578.264,00	406.696.736,00	45,50
		b. Belanja Modal	79.325.000,00	0,00	79.325.000,00	0,00
		- Peralatan dan Mesin	79.325.000,00	0,00	79.325.000,00	0,00
		3. Suplus/Defisit (1-2)	(375,76)	229,00	604,76	(60,94)
		Saldo Akhir		604,67		

No.	S K P D	Jenis Belanja Modal	Pendapatan dan Belanja dari Dana Kapitasi JKN pada FKTP			
			Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
			3	4	5	6=5-4
17. Puskesmas Pasar Baru		Saldo Awal		8.843.694,95		
	1. Pendapatan		292.433.705,30	287.394.789,00	(5.038.916,30)	98,28
	2. Belanja		301.277.400,00	292.177.102,95	9.100.297,05	96,98
	a. Belanja Operasi		301.277.400,00	292.177.102,95	9.100.297,05	96,98
	- Belanja Pegawai		35.190.000,00	35.190.000,00	0,00	100,00
	- Belanja Barang dan Jasa		266.087.400,00	256.987.102,95	9.100.297,05	96,58
	b. Belanja Modal		0,00	0,00	0,00	-
	- Peralatan dan Mesin		0,00	0,00	0,00	-
	3. Suplus/Defisit (1-2)		(8.843.694,70)	(4.782.313,95)	4.061.380,75	54,08
		Saldo Akhir		4.061.381,00		
18. Puskesmas Tambang Emas		Saldo Awal		4.950.386,25		
	1. Pendapatan		415.049.613,75	399.283.085,00	(15.766.528,75)	96,20
	2. Belanja		420.000.000,00	387.779.644,00	32.220.356,00	92,33
	a. Belanja Operasi		420.000.000,00	387.779.644,00	32.220.356,00	92,33
	- Belanja Pegawai		38.760.000,00	25.890.000,00	12.870.000,00	66,80
	- Belanja Barang dan Jasa		381.240.000,00	361.889.644,00	19.350.356,00	94,92
	b. Belanja Modal		0,00	0,00	0,00	-
	- Peralatan dan Mesin		0,00	0,00	0,00	-
	3. Suplus/Defisit (1-2)		(4.950.386,25)	11.503.441,00	16.453.827,25	-
		Saldo Akhir		16.453.827,25		
19. Puskesmas Bangko Barat		Saldo Awal		0,00		
	1. Pendapatan		0,00	0,00	0,00	-
	2. Belanja		0,00	0,00	0,00	-
	a. Belanja Operasi		0,00	0,00	0,00	-
	- Belanja Pegawai		0,00	0,00	0,00	-
	- Belanja Barang dan Jasa		0,00	0,00	0,00	-
	b. Belanja Modal		0,00	0,00	0,00	-
	- Peralatan dan Mesin		0,00	0,00	0,00	-
	3. Suplus/Defisit (1-2)		0,00	0,00	0,00	-
		Saldo Akhir		0,00		
20. Puskesmas Tabir Lintas		Saldo Awal		19.834,00		
	1. Pendapatan		239.980.166,00	129.705.844,00	(110.274.322,00)	54,05
	2. Belanja		240.000.000,00	129.707.487,00	110.292.513,00	54,04
	a. Belanja Operasi		225.000.000,00	129.707.487,00	95.292.513,00	57,65
	- Belanja Pegawai		24.780.000,00	14.265.000,00	10.515.000,00	57,57
	- Belanja Barang dan Jasa		200.220.000,00	115.442.487,00	84.777.513,00	57,66
	b. Belanja Modal		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	-
	- Peralatan dan Mesin		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	-
	3. Suplus/Defisit (1-2)		(19.834,00)	(1.643,00)	18.191,00	-
		Saldo Akhir		18.191,00		
21. Puskesmas Kederasan Panjang		Saldo Awal		21.715.305,31		
	1. Pendapatan		362.464.823,34	350.299.545,00	(12.165.278,34)	96,64
	2. Belanja		384.180.129,00	370.032.998,00	14.147.131,00	96,32
	a. Belanja Operasi		347.462.129,00	337.539.998,00	9.922.131,00	97,14
	- Belanja Pegawai		38.760.000,00	38.760.000,00	0,00	100,00
	- Belanja Barang dan Jasa		308.702.129,00	298.779.998,00	9.922.131,00	96,79
	b. Belanja Modal		36.718.000,00	32.493.000,00	4.225.000,00	88,49
	- Peralatan dan Mesin		36.718.000,00	32.493.000,00	4.225.000,00	88,49
	3. Suplus/Defisit (1-2)		(21.715.305,66)	(19.733.453,00)	1.981.852,66	90,87
		Saldo Akhir		1.981.852,31		
22. Puskesmas Muara Siau		Saldo Awal		692.330,35		
	1. Pendapatan		1.029.307.669,65	588.834.539,00	(440.473.130,65)	57,21
	2. Belanja		1.030.000.000,00	589.428.725,00	440.571.275,00	57,23
	a. Belanja Operasi		985.850.000,00	589.428.725,00	396.421.275,00	59,79
	- Belanja Pegawai		52.560.000,00	52.560.000,00	0,00	100,00
	- Belanja Barang dan Jasa		933.290.000,00	536.868.725,00	396.421.275,00	57,52
	b. Belanja Modal		44.150.000,00	0,00	44.150.000,00	0,00
	- Peralatan dan Mesin		44.150.000,00	0,00	44.150.000,00	0,00
	3. Suplus/Defisit (1-2)		(692.330,35)	(594.186,00)	98.144,35	85,82
		Saldo Akhir		98.144,35		
23. Puskesmas Kota Raja		Saldo Awal		2.305,50		
	1. Pendapatan		249.997.694,50	151.197.138,00	(98.800.556,50)	60,48
	2. Belanja		250.000.000,00	151.198.634,00	98.801.366,00	60,48
	a. Belanja Operasi		250.000.000,00	151.198.634,00	98.801.366,00	60,48
	- Belanja Pegawai		18.480.000,00	16.020.000,00	2.460.000,00	86,69
	- Belanja Barang dan Jasa		231.520.000,00	135.178.634,00	96.341.366,00	58,39
	b. Belanja Modal		0,00	0,00	0,00	-
	- Peralatan dan Mesin		0,00	0,00	0,00	-
	3. Suplus/Defisit (1-2)		(2.305,50)	(1.496,00)	809,50	64,89
		Saldo Akhir		809,50		
24. Puskesmas Muara Delang		Saldo Awal		136,15		
	1. Pendapatan		1.249.999.863,85	1.206.828.624,00	(43.171.239,85)	96,55
	2. Belanja		1.250.000.000,00	1.206.828.644,00	43.171.356,00	96,55
	a. Belanja Operasi		1.119.000.000,00	1.083.823.644,00	35.176.356,00	96,86
	- Belanja Pegawai		47.250.000,00	47.250.000,00	0,00	100,00
	- Belanja Barang dan Jasa		1.071.750.000,00	1.036.573.644,00	35.176.356,00	96,72
	b. Belanja Modal		131.000.000,00	123.005.000,00	7.995.000,00	93,90
	- Peralatan dan Mesin		131.000.000,00	123.005.000,00	7.995.000,00	93,90
	3. Suplus/Defisit (1-2)		(136,15)	(20,00)	116,15	14,69
		Saldo Akhir		116,15		

No.	S K P D	Jenis Belanja Modal	Pendapatan dan Belanja dari Dana Kapitasi JKN pada FKTP			
			Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
			4	5	6=5-4	7=5/4
25.	Puskesmas Sungai Jering	Saldo Awal		5.625.523,50		
		1. Pendapatan	234.374.476,50	210.029.018,00	(24.345.458,50)	89,61
		2. Belanja	240.000.000,00	215.624.845,00	24.375.155,00	89,84
		a. Belanja Operasi	240.000.000,00	215.624.845,00	24.375.155,00	89,84
		- Belanja Pegawai	22.170.000,00	19.401.000,00	2.769.000,00	-
		- Belanja Barang dan Jasa	217.830.000,00	196.223.845,00	21.606.155,00	90,08
		b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	-
		- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	-
		3. Suplus/Defisit (1-2)	(5.625.523,50)	(5.595.827,00)	29.696,50	99,47
		Saldo Akhir		29.696,50		
26.	Puskesmas Rantau Suli	Saldo Awal		105.045,00		
		1. Pendapatan	608.234.955,00	277.910.752,00	(330.324.203,00)	45,69
		2. Belanja	608.340.000,00	277.885.266,00	330.454.734,00	45,68
		a. Belanja Operasi	592.340.000,00	277.885.266,00	314.454.734,00	46,91
		- Belanja Pegawai	40.980.000,00	40.980.000,00	0,00	100,00
		- Belanja Barang dan Jasa	551.360.000,00	236.905.266,00	314.454.734,00	42,97
		b. Belanja Modal	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00
		- Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00
		3. Suplus/Defisit (1-2)	(105.045,00)	25.486,00	130.531,00	(24,26)
		Saldo Akhir		130.531,00		
27.	Puskesmas Muara Madras	Saldo Awal		285.309,00		
		1. Pendapatan	599.714.691,00	322.025.271,00	(277.689.420,00)	53,70
		2. Belanja	600.000.000,00	322.281.876,00	277.718.124,00	53,71
		a. Belanja Operasi	543.341.000,00	312.681.876,00	230.659.124,00	57,55
		- Belanja Pegawai	39.480.000,00	39.480.000,00	0,00	100,00
		- Belanja Barang dan Jasa	503.861.000,00	273.201.876,00	230.659.124,00	54,22
		b. Belanja Modal	56.659.000,00	9.600.000,00	47.059.000,00	16,94
		- Peralatan dan Mesin	56.659.000,00	9.600.000,00	47.059.000,00	16,94
		3. Suplus/Defisit (1-2)	(285.309,00)	(256.605,00)	28.704,00	89,94
		Saldo Akhir		28.704,00		
		Saldo Awal		314.876.243,51		
		1. Pendapatan	16.205.372.652,00	12.441.166.103,00	(3.764.206.549,00)	76,77
		2. Belanja	16.520.248.796,00	12.655.284.741,96	3.864.964.054,04	76,60
		a. Belanja Operasi	15.515.719.796,00	12.103.236.241,96	3.412.483.554,04	78,01
		- Belanja Pegawai	1.006.590.000,00	977.951.000,00	28.639.000,00	97,15
		- Belanja Barang dan Jasa	14.509.129.796,00	11.125.285.241,96	3.383.844.554,04	76,68
		b. Belanja Modal	1.004.529.000,00	552.048.500,00	452.480.500,00	54,96
		- Peralatan dan Mesin	1.004.529.000,00	552.048.500,00	452.480.500,00	54,96
		3. Suplus/Defisit (1-2)	(314.876.144,00)	(214.118.638,96)	100.757.505,04	68,00
		Saldo Akhir		100.757.604,55		
	Jumlah					

**REKAPITULASI PENDAPATAN DAN BELANJA YANG BERSUMBER DARI DANA BOK
PADA FKTP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
TAHUN ANGGARAN 2024**

(dalam rupiah)

No.	S K P D	Jenis Belanja Modal	Pendapatan dan Belanja dari Dana BOK pada FKTP			
			Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
1.	Puskesmas Bangko	Saldo Awal		367.729.584,00		
		1. Pendapatan	624.983.500,00	257.253.916,00	(367.729.584,00)	41,16
		2. Belanja	624.983.500,00	467.980.064,00	157.003.436,00	74,88
		a. Belanja Operasi	624.983.500,00	467.980.064,00	157.003.436,00	74,88
		- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	-
		- Belanja Barang dan Jasa	624.983.500,00	467.980.064,00	157.003.436,00	74,88
		b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	-
		- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	-
		3. Suplus/Defisit (1-2)	0,00	(210.726.148,00)	(210.726.148,00)	-
		Saldo Akhir		157.003.436,00		
2.	Puskesmas Pematang Kandis	Saldo Awal		34.367.281,00		
		1. Pendapatan	822.800.000,00	788.432.719,00	(34.367.281,00)	95,82
		2. Belanja	822.800.000,00	744.755.430,00	78.044.570,00	90,51
		a. Belanja Operasi	822.800.000,00	744.755.430,00	78.044.570,00	90,51
		- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	-
		- Belanja Barang dan Jasa	822.800.000,00	744.755.430,00	78.044.570,00	90,51
		b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	-
		- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	-
		3. Suplus/Defisit (1-2)	0,00	43.677.289,00	43.677.289,00	-
		Saldo Akhir		78.044.570,00		
3.	Puskesmas Pamenang	Saldo Awal		352.415.066,00		
		1. Pendapatan	952.000.000,00	599.584.934,00	(352.415.066,00)	62,98
		2. Belanja	952.000.000,00	659.624.686,00	292.375.314,00	69,29
		a. Belanja Operasi	952.000.000,00	659.624.686,00	292.375.314,00	69,29
		- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	-
		- Belanja Barang dan Jasa	952.000.000,00	659.624.686,00	292.375.314,00	69,29
		b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	-
		- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	-
		3. Suplus/Defisit (1-2)	0,00	(60.039.752,00)	(60.039.752,00)	-
		Saldo Akhir		292.375.314,00		
4.	Puskesmas Rantau Panjang	Saldo Awal		280.829.135,00		
		1. Pendapatan	842.670.000,00	561.840.865,00	(280.829.135,00)	66,67
		2. Belanja	842.670.000,00	575.686.297,00	266.983.703,00	68,32
		a. Belanja Operasi	842.670.000,00	575.686.297,00	266.983.703,00	68,32
		- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	-
		- Belanja Barang dan Jasa	842.670.000,00	575.686.297,00	266.983.703,00	68,32
		b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	-
		- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	-
		3. Suplus/Defisit (1-2)	0,00	(13.845.432,00)	(13.845.432,00)	-
		Saldo Akhir		266.983.703,00		
5.	Puskesmas Sumber Agung	Saldo Awal		285.540.383,00		
		1. Pendapatan	830.300.000,00	544.759.617,00	(285.540.383,00)	65,61
		2. Belanja	830.300.000,00	634.483.986,00	195.816.014,00	76,42
		a. Belanja Operasi	830.300.000,00	634.483.986,00	195.816.014,00	76,42
		- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	-
		- Belanja Barang dan Jasa	830.300.000,00	634.483.986,00	195.816.014,00	76,42
		b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	-
		- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	-
		3. Suplus/Defisit (1-2)	0,00	(89.724.369,00)	(89.724.369,00)	-
		Saldo Akhir		195.816.014,00		
6.	Puskesmas Meranti	Saldo Awal		179.425.043,00		
		1. Pendapatan	726.100.000,00	546.674.957,00	(179.425.043,00)	75,29
		2. Belanja	726.100.000,00	556.066.911,00	170.033.089,00	76,58
		a. Belanja Operasi	726.100.000,00	556.066.911,00	170.033.089,00	76,58
		- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	-
		- Belanja Barang dan Jasa	726.100.000,00	556.066.911,00	170.033.089,00	76,58
		b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	-
		- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	-
		3. Suplus/Defisit (1-2)	0,00	(9.391.954,00)	(9.391.954,00)	-
		Saldo Akhir		170.033.089,00		
7.	Puskesmas Muara Jernih	Saldo Awal		188.481.270,00		
		1. Pendapatan	739.800.000,00	551.318.730,00	(188.481.270,00)	74,52
		2. Belanja	739.800.000,00	616.044.444,00	123.755.556,00	83,27
		a. Belanja Operasi	739.800.000,00	616.044.444,00	123.755.556,00	83,27
		- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	-
		- Belanja Barang dan Jasa	739.800.000,00	616.044.444,00	123.755.556,00	83,27
		b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	-
		- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	-
		3. Suplus/Defisit (1-2)	0,00	(64.725.714,00)	(64.725.714,00)	-
		Saldo Akhir		123.755.556,00		
8.	Puskesmas Sungai Bulian	Saldo Awal		271.609.314,00		
		1. Pendapatan	680.800.000,00	409.190.686,00	(271.609.314,00)	60,10
		2. Belanja	680.800.000,00	555.715.185,00	125.084.815,00	81,63
		a. Belanja Operasi	680.800.000,00	555.715.185,00	125.084.815,00	81,63
		- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	-
		- Belanja Barang dan Jasa	680.800.000,00	555.715.185,00	125.084.815,00	81,63
		b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	-
		- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	-
		3. Suplus/Defisit (1-2)	0,00	(146.524.499,00)	(146.524.499,00)	-
		Saldo Akhir		125.084.815,00		

No.	S K P D	Jenis Belanja Modal	Pendapatan dan Belanja dari Dana BOK pada FKTP			
			Anqqaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
9.	Puskesmas Rantau Limau Manis	Saldo Awal		385.653.377,00		
		1. Pendapatan	740.540.000,00	354.886.623,00	(385.653.377,00)	47,92
		2. Belanja	740.540.000,00	366.774.543,00	373.765.457,00	49,53
		a. Belanja Operasi	740.540.000,00	366.774.543,00	373.765.457,00	49,53
		- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	-
		- Belanja Barang dan Jasa	740.540.000,00	366.774.543,00	373.765.457,00	49,53
		b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	-
		- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	-
		3. Suplus/Defisit (1-2)	0,00	(11.887.920,00)	(11.887.920,00)	-
		Saldo Akhir		373.765.457,00		
		Saldo Awal		195.498.372,00		
10.	Puskesmas Muara Kibul	1. Pendapatan	925.900.000,00	730.401.628,00	(195.498.372,00)	78,89
		2. Belanja	925.900.000,00	804.786.816,00	121.113.184,00	86,92
		a. Belanja Operasi	925.900.000,00	804.786.816,00	121.113.184,00	86,92
		- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	-
		- Belanja Barang dan Jasa	925.900.000,00	804.786.816,00	121.113.184,00	86,92
		b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	-
		- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	-
		3. Suplus/Defisit (1-2)	0,00	(74.385.188,00)	(74.385.188,00)	-
		Saldo Akhir		121.113.184,00		
		Saldo Awal		80.176.569,00		
		1. Pendapatan	843.100.000,00	762.923.431,00	(80.176.569,00)	90,49
		2. Belanja	843.100.000,00	781.426.185,00	61.673.815,00	92,68
11.	Puskesmas Sungai Manau	a. Belanja Operasi	843.100.000,00	781.426.185,00	61.673.815,00	92,68
		- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	-
		- Belanja Barang dan Jasa	843.100.000,00	781.426.185,00	61.673.815,00	92,68
		b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	-
		- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	-
		3. Suplus/Defisit (1-2)	0,00	(18.502.754,00)	(18.502.754,00)	-
		Saldo Akhir		61.673.815,00		
		Saldo Awal		51.373.933,00		
		1. Pendapatan	729.500.000,00	678.126.067,00	(51.373.933,00)	92,96
		2. Belanja	729.500.000,00	606.858.514,00	122.641.486,00	83,19
		a. Belanja Operasi	729.500.000,00	606.858.514,00	122.641.486,00	83,19
		- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	-
		- Belanja Barang dan Jasa	729.500.000,00	606.858.514,00	122.641.486,00	83,19
12.	Puskesmas Sekancing	b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	-
		- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	-
		3. Suplus/Defisit (1-2)	0,00	71.267.553,00	71.267.553,00	-
		Saldo Akhir		122.641.486,00		
		Saldo Awal		133.423.951,00		
		1. Pendapatan	789.200.000,00	655.776.049,00	(133.423.951,00)	83,09
		2. Belanja	789.200.000,00	709.208.377,00	79.991.623,00	89,86
		a. Belanja Operasi	789.200.000,00	709.208.377,00	79.991.623,00	89,86
		- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	-
		- Belanja Barang dan Jasa	789.200.000,00	709.208.377,00	79.991.623,00	89,86
		b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	-
		- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	-
		3. Suplus/Defisit (1-2)	0,00	(53.432.328,00)	(53.432.328,00)	-
13.	Puskesmas Simpang Parit	Saldo Akhir		79.991.623,00		
		Saldo Awal		90.253.761,00		
		1. Pendapatan	710.900.000,00	620.646.239,00	(90.253.761,00)	87,30
		2. Belanja	710.900.000,00	455.835.200,00	255.064.800,00	64,12
		a. Belanja Operasi	710.900.000,00	455.835.200,00	255.064.800,00	64,12
		- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	-
		- Belanja Barang dan Jasa	710.900.000,00	455.835.200,00	255.064.800,00	64,12
		b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	-
		- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	-
		3. Suplus/Defisit (1-2)	0,00	164.811.039,00	164.811.039,00	-
		Saldo Akhir		255.064.800,00		
		Saldo Awal		196.565.507,00		
14.	Puskesmas Simpang Limbur	1. Pendapatan	905.916.500,00	709.350.993,00	(196.565.507,00)	78,30
		2. Belanja	905.916.500,00	662.532.382,00	243.384.118,00	73,13
		a. Belanja Operasi	905.916.500,00	662.532.382,00	243.384.118,00	73,13
		- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	-
		- Belanja Barang dan Jasa	905.916.500,00	662.532.382,00	243.384.118,00	73,13
		b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	-
		- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	-
		3. Suplus/Defisit (1-2)	0,00	46.818.611,00	46.818.611,00	-
		Saldo Akhir		243.384.118,00		
		Saldo Awal		221.860.487,00		
		1. Pendapatan	784.400.000,00	562.539.513,00	(221.860.487,00)	71,72
		2. Belanja	784.400.000,00	560.384.466,00	224.015.534,00	71,44
15.	Puskesmas Pasar Masurai	a. Belanja Operasi	784.400.000,00	560.384.466,00	224.015.534,00	71,44
		- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	-
		- Belanja Barang dan Jasa	784.400.000,00	560.384.466,00	224.015.534,00	71,44
		b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	-
		- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	-
		3. Suplus/Defisit (1-2)	0,00	2.155.047,00	2.155.047,00	-
		Saldo Akhir		224.015.534,00		
		Saldo Awal		221.860.487,00		
		1. Pendapatan	784.400.000,00	562.539.513,00	(221.860.487,00)	71,72
		2. Belanja	784.400.000,00	560.384.466,00	224.015.534,00	71,44
		a. Belanja Operasi	784.400.000,00	560.384.466,00	224.015.534,00	71,44
		- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	-
		- Belanja Barang dan Jasa	784.400.000,00	560.384.466,00	224.015.534,00	71,44
16.	Puskesmas Aur Duri	b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	-
		- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	-
		3. Suplus/Defisit (1-2)	0,00	2.155.047,00	2.155.047,00	-
		Saldo Akhir		224.015.534,00		
		Saldo Awal		221.860.487,00		
		1. Pendapatan	784.400.000,00	562.539.513,00	(221.860.487,00)	71,72
		2. Belanja	784.400.000,00	560.384.466,00	224.015.534,00	71,44
		a. Belanja Operasi	784.400.000,00	560.384.466,00	224.015.534,00	71,44
		- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	-
		- Belanja Barang dan Jasa	784.400.000,00	560.384.466,00	224.015.534,00	71,44
		b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	-
		- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	-
		3. Suplus/Defisit (1-2)	0,00	2.155.047,00	2.155.047,00	-
		Saldo Akhir		224.015.534,00		

No.	S K P D	Jenis Belanja Modal	Pendapatan dan Belanja dari Dana BOK pada FKTP			
			Anqqaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
			4	5	6=5-4	7=5/4
17. Puskesmas Pasar Baru		Saldo Awal		233.106.180,00		
		1. Pendapatan	686.702.000,00	453.595.820,00	(233.106.180,00)	66,05
		2. Belanja	686.702.000,00	454.012.803,00	232.689.197,00	66,11
		a. Belanja Operasi	686.702.000,00	454.012.803,00	232.689.197,00	66,11
		- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	-
		- Belanja Barang dan Jasa	686.702.000,00	454.012.803,00	232.689.197,00	66,11
		b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	-
		- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	-
		3. Suplus/Defisit (1-2)	0,00	(416.983,00)	(416.983,00)	-
		Saldo Akhir		232.689.197,00		
		Saldo Awal		77.381.262,00		
18. Puskesmas Tambang Emas		1. Pendapatan	860.400.000,00	783.018.738,00	(77.381.262,00)	91,01
		2. Belanja	860.400.000,00	616.903.058,00	243.496.942,00	71,70
		a. Belanja Operasi	860.400.000,00	616.903.058,00	243.496.942,00	71,70
		- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	-
		- Belanja Barang dan Jasa	860.400.000,00	616.903.058,00	243.496.942,00	71,70
		b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	-
		- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	-
		3. Suplus/Defisit (1-2)	0,00	166.115.680,00	166.115.680,00	-
		Saldo Akhir		243.496.942,00		
		Saldo Awal		240.332.625,00		
		1. Pendapatan	797.800.000,00	557.467.375,00	(240.332.625,00)	69,88
19. Puskesmas Bangko Barat		2. Belanja	797.800.000,00	612.229.854,00	185.570.146,00	76,74
		a. Belanja Operasi	797.800.000,00	612.229.854,00	185.570.146,00	76,74
		- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	-
		- Belanja Barang dan Jasa	797.800.000,00	612.229.854,00	185.570.146,00	76,74
		b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	-
		- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	-
		3. Suplus/Defisit (1-2)	0,00	(54.762.479,00)	(54.762.479,00)	-
		Saldo Akhir		185.570.146,00		
		Saldo Awal		198.831.519,00		
		1. Pendapatan	779.000.000,00	580.168.481,00	(198.831.519,00)	74,48
		2. Belanja	779.000.000,00	543.884.271,00	235.115.729,00	69,82
20. Puskesmas Tabir Lintas		a. Belanja Operasi	779.000.000,00	543.884.271,00	235.115.729,00	69,82
		- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	-
		- Belanja Barang dan Jasa	779.000.000,00	543.884.271,00	235.115.729,00	69,82
		b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	-
		- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	-
		3. Suplus/Defisit (1-2)	0,00	36.284.210,00	36.284.210,00	-
		Saldo Akhir		235.115.729,00		
		Saldo Awal		164.287.346,00		
		1. Pendapatan	779.999.000,00	615.711.654,00	(164.287.346,00)	78,94
		2. Belanja	779.999.000,00	587.193.612,00	192.805.388,00	75,28
21. Puskesmas Kederasan Panjang		a. Belanja Operasi	779.999.000,00	587.193.612,00	192.805.388,00	75,28
		- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	-
		- Belanja Barang dan Jasa	779.999.000,00	587.193.612,00	192.805.388,00	75,28
		b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	-
		- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	-
		3. Suplus/Defisit (1-2)	0,00	28.518.042,00	28.518.042,00	-
		Saldo Akhir		192.805.388,00		
		Saldo Awal		87.921.506,00		
		1. Pendapatan	843.800.000,00	755.878.494,00	(87.921.506,00)	89,58
		2. Belanja	843.800.000,00	748.289.243,00	95.510.757,00	88,68
22. Puskesmas Muara Siau		a. Belanja Operasi	843.800.000,00	748.289.243,00	95.510.757,00	88,68
		- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	-
		- Belanja Barang dan Jasa	843.800.000,00	748.289.243,00	95.510.757,00	88,68
		b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	-
		- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	-
		3. Suplus/Defisit (1-2)	0,00	7.589.251,00	7.589.251,00	-
		Saldo Akhir		95.510.757,00		
		Saldo Awal		295.964.429,00		
		1. Pendapatan	719.000.000,00	423.035.571,00	(295.964.429,00)	58,84
		2. Belanja	719.000.000,00	472.327.962,00	246.672.038,00	65,69
23. Puskesmas Kota Raja		a. Belanja Operasi	719.000.000,00	472.327.962,00	246.672.038,00	65,69
		- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	-
		- Belanja Barang dan Jasa	719.000.000,00	472.327.962,00	246.672.038,00	65,69
		b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	-
		- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	-
		3. Suplus/Defisit (1-2)	0,00	(49.292.391,00)	(49.292.391,00)	-
		Saldo Akhir		246.672.038,00		
		Saldo Awal		29.872.529,00		
		1. Pendapatan	909.516.500,00	879.643.971,00	(29.872.529,00)	96,72
		2. Belanja	909.516.500,00	813.155.302,00	96.361.198,00	89,41
24. Puskesmas Muara Delang		a. Belanja Operasi	909.516.500,00	813.155.302,00	96.361.198,00	89,41
		- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	-
		- Belanja Barang dan Jasa	909.516.500,00	813.155.302,00	96.361.198,00	89,41
		b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	-
		- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	-
		3. Suplus/Defisit (1-2)	0,00	66.488.669,00	66.488.669,00	-
		Saldo Akhir		96.361.198,00		

No.	S K P D	Jenis Belanja Modal	Pendapatan dan Belanja dari Dana BOK pada FKTP			
			Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
25.	Puskesmas Sungai Jering	Saldo Awal		123.802.280,00		
		1. Pendapatan	768.516.500,00	644.714.220,00	(123.802.280,00)	83,89
		2. Belanja	768.516.500,00	561.463.455,00	207.053.045,00	73,06
		a. Belanja Operasi	768.516.500,00	561.463.455,00	207.053.045,00	73,06
		- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	-
		- Belanja Barang dan Jasa	768.516.500,00	561.463.455,00	207.053.045,00	73,06
		b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	-
		- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	-
		3. Suplus/Defisit (1-2)	0,00	83.250.765,00	83.250.765,00	-
		Saldo Akhir		207.053.045,00		
26.	Puskesmas Rantau Suli	Saldo Awal		81.059.879,00		
		1. Pendapatan	868.116.500,00	787.056.621,00	(81.059.879,00)	90,66
		2. Belanja	868.116.500,00	835.789.596,00	32.326.904,00	96,28
		a. Belanja Operasi	868.116.500,00	835.789.596,00	32.326.904,00	96,28
		- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	-
		- Belanja Barang dan Jasa	868.116.500,00	835.789.596,00	32.326.904,00	96,28
		b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	-
		- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	-
		3. Suplus/Defisit (1-2)	0,00	(48.732.975,00)	(48.732.975,00)	-
		Saldo Akhir		32.326.904,00		
27.	Puskesmas Muara Madras	Saldo Awal		89.137.915,00		
		1. Pendapatan	940.115.500,00	850.977.585,00	(89.137.915,00)	90,52
		2. Belanja	940.115.500,00	756.919.926,00	183.195.574,00	80,51
		a. Belanja Operasi	940.115.500,00	756.919.926,00	183.195.574,00	80,51
		- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	-
		- Belanja Barang dan Jasa	940.115.500,00	756.919.926,00	183.195.574,00	80,51
		b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	-
		- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	-
		3. Suplus/Defisit (1-2)	0,00	94.057.659,00	94.057.659,00	-
		Saldo Akhir		183.195.574,00		
Jumlah		Saldo Awal		4.936.900.503,00		
		1. Pendapatan	21.601.876.000,00	16.664.975.497,00	(4.936.900.503,00)	77,15
		2. Belanja	21.601.876.000,00	16.760.332.568,00	4.841.543.432,00	77,59
		a. Belanja Operasi	21.601.876.000,00	16.760.332.568,00	4.841.543.432,00	77,59
		- Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	-
		- Belanja Barang dan Jasa	21.601.876.000,00	16.760.332.568,00	4.841.543.432,00	77,59
		b. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	-
		- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	-
		3. Suplus/Defisit (1-2)	0,00	(95.357.071,00)	(95.357.071,00)	-
		Saldo Akhir		4.841.543.432,00		

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
REKAPITULASI SALDO KAS LAINNYA DI BENDAHARA DANA BOS PADA SD NEGERI PENERIMA
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam rupiah)

No.	Nama Sekolah	Sisa Pajak Terhutang Tahun 2023	Tanggal	Penyetoran Tahun 2023/2024					Jumlah	Sisa Pajak Terhutang 2023 di Tahun 2024	Penambahan Pajak Terhutang di Tahun 2024	Pajak Terhutang di Tahun 2024
				Jenis Pajak								
				PPN (211)	PPh Pasal 21 (121)	PPh Pasal 23 (123)	PPh Pasal 24 (124)	Pajak Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9	11=3-10	12	13=11+12
I. SD NEGERI												
1	SD NEGERI 45/VI LUBUK PUNGKUK I	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
2	SD NEGERI 55/VI NILO DINGIN	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.695,00	212.695,00
3	SD NEGERI 62/VI BEDENG REJO	239.640,00	08/01/2024	0,00	0,00	194.640,00	0,00	0,00	239.640,00	0,00	0,00	0,00
			08/01/2024		45.000,00	0,00						
4	SD NEGERI 94/VI TANJUNG MUDO	36.000,00	16/01/2024	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
5	SD NEGERI 103/VI BUKIT PERENTAK	8.000,00	16/01/2024	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6	SD NEGERI 182/VI SEPANTAI RENAH	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
7	SD NEGERI 247/VI SIALANG II	58.000,00	15/02/2024	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH MUTASI SD		341.640,00		0,00	147.000,00	194.640,00	0,00	0,00	341.640,00	0,00	293.695,00	293.695,00

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
REKAPITULASI SALDO KAS LAINNYA DI BENDAHARA DANA BOS PADA SD NEGERI PENERIMA
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam rupiah)

No.	Nama Sekolah	Pajak Terhutang di Tahun 2024	Tanggal	Penyetoran Tahun 2024/2025					Sisa Pajak Terhutang di Tahun 2024
				Jenis Pajak				Jumlah	
				PPN (211)	PPH Pasal 21 (121)	PPH Pasal 23 (123)	Pajak Daerah		
1	2	14=13	15	16	17	18	19	20=16+17+18+19	21=14-20
I. SD NEGERI									
1	SD NEGERI 45/VI LUBUK PUNGGUK I	45.000,00	10/03/2025	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2	SD NEGERI 55/VI NILO DINGIN	212.695,00	10/03/2025	122.695,00	90.000,00	0,00	0,00	212.695,00	0,00
3	SD NEGERI 62/VI BEDENG REJO	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SD NEGERI 94/VI TANJUNG MUDO	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SD NEGERI 103/VI BUKIT PERENTAK	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SD NEGERI 182/VI SEPANTAI RENAH	36.000,00	10/03/2025	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
7	SD NEGERI 247/VI SIALANG II	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH MUTASI (III)		293.695,00		122.695,00	171.000,00	0,00	0,00	293.695,00	0,00

BUPATI MERANGIN



H. M. SYUKUR, S.H., M.H.

**REKAPITULASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
TAHUN ANGGARAN 2024**

(dalam rupiah)

No.	Partai Politik	Realisasi TA 2024			Realisasi TA 2023			Tambah/ (Kurang)
		Jumlah Kursi	Total Suara	Jumlah Bantuan	Jumlah Kursi	Total Suara	Jumlah Bantuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5-8
PEMILU DPRD KABUPATEN MERANGIN 2019								
1.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	6 Kursi	37.844	124.885.200,00	6 Kursi	37.844	184.456.954,00	(59.571.754,00)
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	4 Kursi	16.932	55.875.600,00	4 Kursi	16.932	82.528.938,00	(26.653.338,00)
3.	Partai Amanat Nasional (PAN)	3 Kursi	17.067	56.321.100,00	3 Kursi	17.067	83.186.947,00	(26.865.847,00)
4.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	3 Kursi	16.653	54.954.900,00	3 Kursi	16.653	81.169.053,00	(26.214.153,00)
5.	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	3 Kursi	14.283	47.133.900,00	3 Kursi	14.283	69.617.342,00	(22.483.442,00)
6.	Partai Demokrat	3 Kursi	12.326	40.675.800,00	3 Kursi	12.326	60.078.650,00	(19.402.850,00)
7.	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	3 Kursi	15.895	52.453.500,00	3 Kursi	15.895	77.474.455,00	(25.020.955,00)
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3 Kursi	15.207	50.183.100,00	3 Kursi	15.207	74.121.047,00	(23.937.947,00)
9.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2 Kursi	15.739	51.938.700,00	2 Kursi	15.739	76.714.089,00	(24.775.389,00)
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2 Kursi	12.042	39.738.600,00	2 Kursi	12.042	58.694.394,00	(18.955.794,00)
11.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	2 Kursi	18.274	60.304.200,00	2 Kursi	18.274	89.070.034,00	(28.765.834,00)
12.	Partai Beringin Karya (BERKARYA)	1 Kursi	8.429	27.815.700,00	1 Kursi	8.429	41.084.126,00	(13.268.426,00)
Jumlah I		35 Kursi	200.691	662.280.300,00	35 Kursi	200.691	978.196.029,00	(315.915.729,00)
PEMILU DPRD KABUPATEN MERANGIN 2024								
1.	Partai Amanat Nasional (PAN)	5 Kursi	27.059	44.647.350,00				44.647.350,00
2.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	4 Kursi	27.815	45.894.750,00				45.894.750,00
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	4 Kursi	23.724	39.144.600,00				39.144.600,00
4.	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	4 Kursi	21.159	34.912.350,00				34.912.350,00
5.	Partai Demokrat	3 Kursi	20.504	33.831.600,00				33.831.600,00
6.	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	3 Kursi	13.943	23.005.950,00				23.005.950,00
7.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3 Kursi	17.361	28.645.650,00				28.645.650,00
8.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3 Kursi	23.994	39.590.100,00				39.590.100,00
9.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	2 Kursi	17.268	28.492.200,00				28.492.200,00
10.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2 Kursi	14.891	24.570.150,00				24.570.150,00
11.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	1 Kursi	4.598	7.586.700,00				7.586.700,00
12.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	1 Kursi	9.285	15.320.250,00				15.320.250,00
Jumlah II		35 Kursi	221.601	365.641.650,00				365.641.650,00
T o t a l		35 Kursi	221.601	1.027.921.950,00	35 Kursi	200.691	978.196.029,00	49.725.921,00

**REKAPITULASI PENYALURAN TRANSFER KE PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

(dalam rupiah)

Bagi Hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD)																	
No.	Kecamatan	Desa	Dana Desa (APBN)			Alokasi Dana Desa (APBD)			Bagi Hasil Pajak Daerah			Bagi Hasil Retribusi Daerah					
			Alokasi	Penyaluran	Lebih/(Kurang) Salur	Alokasi	Penyaluran	Lebih/(Kurang) Salur	Alokasi	Penyaluran	Lebih/(Kurang) Salur	Alokasi	Penyaluran	Lebih/(Kurang) Salur			
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10	11	12=10-11	13	14	15=13-14			
1.	Jangkat	1. Renah Kemumu	896.131.000,00	896.131.000,00	0,00	350.068.531,00	350.068.531,00	0,00	15.414.312,00	15.414.312,00	0,00	3.920.401,00	3.920.401,00	0,00			
		2. Tanjung Kasri	681.740.000,00	681.740.000,00	0,00	324.813.296,00	324.813.296,00	0,00	14.962.482,00	14.962.482,00	0,00	3.805.000,00	3.805.000,00	0,00			
		3. Lubuk Mentilin	760.048.000,00	760.048.000,00	0,00	304.748.581,00	304.748.581,00	0,00	14.870.439,00	14.870.439,00	0,00	3.781.492,00	3.781.492,00	0,00			
		4. Rantau Kemas	986.520.000,00	986.520.000,00	0,00	390.520.484,00	390.520.484,00	0,00	15.154.665,00	15.154.665,00	0,00	3.854.085,00	3.854.085,00	0,00			
		5. Renah Alai	780.251.000,00	780.251.000,00	0,00	335.885.820,00	335.885.820,00	0,00	15.028.632,00	15.028.632,00	0,00	3.821.895,00	3.821.895,00	0,00			
		6. Pulau Tengah	1.013.592.000,00	1.013.592.000,00	0,00	575.699.490,00	575.699.490,00	0,00	16.059.100,00	16.059.100,00	0,00	4.085.084,00	4.085.084,00	0,00			
		7. Lubuk Pungguk	772.598.000,00	772.598.000,00	0,00	406.394.630,00	406.394.630,00	0,00	14.880.394,00	14.880.394,00	0,00	3.784.034,00	3.784.034,00	0,00			
		8. Koto Renah	724.168.000,00	724.168.000,00	0,00	345.803.940,00	345.803.940,00	0,00	14.609.798,00	14.609.798,00	0,00	3.714.922,00	3.714.922,00	0,00			
		9. Muara Madras	926.839.000,00	926.839.000,00	0,00	572.625.362,00	572.625.362,00	0,00	15.975.504,00	15.975.504,00	0,00	4.063.733,00	4.063.733,00	0,00			
		10. Renah Peliaan	779.292.000,00	779.292.000,00	0,00	379.969.439,00	379.969.439,00	0,00	15.538.884,00	15.538.884,00	0,00	3.952.217,00	3.952.217,00	0,00			
		11. Koto Rawang	863.640.000,00	863.640.000,00	0,00	317.155.147,00	317.155.147,00	0,00	15.207.820,00	15.207.820,00	0,00	3.867.661,00	3.867.661,00	0,00			
2.	Bangko	1. Kungkai	855.543.000,00	855.543.000,00	0,00	480.164.812,00	480.164.812,00	0,00	15.189.591,00	15.189.591,00	0,00	3.863.005,00	3.863.005,00	0,00			
		2. Mudo	727.873.000,00	727.873.000,00	0,00	347.787.722,00	347.787.722,00	0,00	14.663.744,00	14.663.744,00	0,00	3.728.701,00	3.728.701,00	0,00			
		3. Landiq	788.764.000,00	788.764.000,00	0,00	350.605.631,00	350.605.631,00	0,00	14.740.373,00	14.740.373,00	0,00	3.748.272,00	3.748.272,00	0,00			
		4. Sungai Kapas	1.205.083.000,00	1.205.083.000,00	0,00	544.895.111,00	544.895.111,00	0,00	17.403.437,00	17.403.437,00	0,00	4.428.436,00	4.428.436,00	0,00			
3.	Muara Siau	1. Durian Rambun	723.964.000,00	723.964.000,00	0,00	447.879.379,00	447.879.379,00	0,00	14.683.641,00	14.683.641,00	0,00	3.733.782,00	3.733.782,00	0,00			
		2. Lubuk Birah	807.029.000,00	807.029.000,00	0,00	370.799.563,00	370.799.563,00	0,00	15.306.925,00	15.306.925,00	0,00	3.892.973,00	3.892.973,00	0,00			
		3. Lubuk Beringin	858.336.000,00	858.336.000,00	0,00	460.369.228,00	460.369.228,00	0,00	16.365.566,00	16.365.566,00	0,00	4.163.357,00	4.163.357,00	0,00			
		4. Rantau Macang	841.070.000,00	841.070.000,00	0,00	365.649.539,00	365.649.539,00	0,00	15.838.017,00	15.838.017,00	0,00	4.028.618,00	4.028.618,00	0,00			
		5. Peradun Temeras	851.897.000,00	851.897.000,00	0,00	357.406.486,00	357.406.486,00	0,00	15.613.858,00	15.613.858,00	0,00	3.971.366,00	3.971.366,00	0,00			
		6. Teluk Sikumbang	841.381.000,00	841.381.000,00	0,00	342.833.612,00	342.833.612,00	0,00	15.452.521,00	15.452.521,00	0,00	3.930.160,00	3.930.160,00	0,00			
		7. Muara Siau	898.082.000,00	898.082.000,00	0,00	410.863.227,00	410.863.227,00	0,00	16.379.000,00	16.379.000,00	0,00	4.166.788,00	4.166.788,00	0,00			
		8. Tiaro	758.109.000,00	758.109.000,00	0,00	386.070.125,00	386.070.125,00	0,00	15.722.188,00	15.722.188,00	0,00	3.999.034,00	3.999.034,00	0,00			
		9. Air Lago	767.550.000,00	767.550.000,00	0,00	298.211.119,00	298.211.119,00	0,00	14.692.662,00	14.692.662,00	0,00	3.736.086,00	3.736.086,00	0,00			
		10. Badak Tekurung	799.460.000,00	799.460.000,00	0,00	304.292.959,00	304.292.959,00	0,00	14.858.049,00	14.858.049,00	0,00	3.778.328,00	3.778.328,00	0,00			
		11. Rantau Bidaro	647.936.000,00	647.936.000,00	0,00	295.387.369,00	295.387.369,00	0,00	14.615.874,00	14.615.874,00	0,00	3.716.474,00	3.716.474,00	0,00			
		12. Rantau Panjang	943.906.000,00	943.906.000,00	0,00	369.784.759,00	369.784.759,00	0,00	15.261.925,00	15.261.925,00	0,00	3.881.480,00	3.881.480,00	0,00			
		13. Pulau Raman	869.782.000,00	869.782.000,00	0,00	357.684.064,00	357.684.064,00	0,00	15.621.406,00	15.621.406,00	0,00	3.973.294,00	3.973.294,00	0,00			
		14. Pasar Muara Siau	758.987.000,00	758.987.000,00	0,00	309.558.189,00	309.558.189,00	0,00	14.312.686,00	14.312.686,00	0,00	3.639.038,00	3.639.038,00	0,00			
		15. Sepantai Renah	709.003.000,00	709.003.000,00	0,00	311.220.111,00	311.220.111,00	0,00	15.046.424,00	15.046.424,00	0,00	3.826.440,00	3.826.440,00	0,00			
		16. Sungai Ulas	802.602.000,00	802.602.000,00	0,00	310.648.946,00	310.648.946,00	0,00	15.030.892,00	15.030.892,00	0,00	3.822.473,00	3.822.473,00	0,00			
		17. Rantau Bayur	754.802.000,00	754.802.000,00	0,00	358.585.065,00	358.585.065,00	0,00	15.645.908,00	15.645.908,00	0,00	3.979.552,00	3.979.552,00	0,00			
4.	Sungai Manau	1. Sungai Pinang	743.773.000,00	743.773.000,00	0,00	350.067.594,00	350.067.594,00	0,00	14.725.742,00	14.725.742,00	0,00	3.744.535,00	3.744.535,00	0,00			
		2. Tiangko	773.987.000,00	773.987.000,00	0,00	431.485.077,00	431.485.077,00	0,00	15.562.696,00	15.562.696,00	0,00	3.958.299,00	3.958.299,00	0,00			
		3. Palipan	760.352.000,00	760.352.000,00	0,00	380.732.082,00	380.732.082,00	0,00	15.559.623,00	15.559.623,00	0,00	3.957.514,00	3.957.514,00	0,00			
		4. Seringat	799.994.000,00	799.994.000,00	0,00	342.403.433,00	342.403.433,00	0,00	14.517.325,00	14.517.325,00	0,00	3.691.304,00	3.691.304,00	0,00			
		5. Durian Lecah	810.507.000,00	810.507.000,00	0,00	373.041.125,00	373.041.125,00	0,00	15.350.477,00	15.350.477,00	0,00	3.904.097,00	3.904.097,00	0,00			
		6. Bukit Batu	722.126.000,00	722.126.000,00	0,00	380.146.750,00	380.146.750,00	0,00	15.090.115,00	15.090.115,00	0,00	3.837.599,00	3.837.599,00	0,00			
		7. Sungai Nilau	918.479.000,00	918.479.000,00	0,00	418.678.546,00	418.678.546,00	0,00	15.902.983,00	15.902.983,00	0,00	4.045.210,00	4.045.210,00	0,00			
		8. Sungai Manau	954.144.000,00	954.144.000,00	0,00	409.050.908,00	409.050.908,00	0,00	14.952.628,00	14.952.628,00	0,00	3.802.483,00	3.802.483,00	0,00			
		9. Benteng	701.188.000,00	701.188.000,00	0,00	341.210.892,00	341.210.892,00	0,00	14.484.896,00	14.484.896,00	0,00	3.683.022,00	3.683.022,00	0,00			
		10. Gelanggang	722.120.000,00	722.120.000,00	0,00	354.435.365,00	354.435.365,00	0,00	14.844.518,00	14.844.518,00	0,00	3.774.872,00	3.774.872,00	0,00			
5.	Tabir	1. Kandang	1.094.930.000,00	1.094.930.000,00	0,00	435.290.530,00	435.290.530,00	0,00	17.043.268,00	17.043.268,00	0,00	4.336.447,00	4.336.447,00	0,00			
		2. Koto Rayo	919.150.000,00	919.150.000,00	0,00	390.478.488,00	390.478.488,00	0,00	15.824.664,00	15.824.664,00	0,00	4.025.207,00	4.025.207,00	0,00			
		3. Tanjung Ilir	865.962.000,00	865.962.000,00	0,00	381.409.656,00	381.409.656,00	0,00	15.578.049,00	15.578.049,00	0,00	3.962.220,00	3.962.220,00	0,00			
		4. Buluran Panjang	977.087.000,00	977.087.000,00	0,00	380.917.998,00	380.917.998,00	0,00	15.564.679,00	15.564.679,00	0,00	3.958.805,00	3.958.805,00	0,00			
		5. Seling	926.053.000,00	926.053.000,00	0,00	385.983.125,00	385.983.125,00	0,00	15.702.418,00	15.702.418,00	0,00	3.993.985,00	3.993.985,00	0,00			
6.	Pamenang	6. Lubuk Napal	817.524.000,00	817.524.000,00	0,00	314.698.615,00	314.698.615,00	0,00	14.452.473,00	14.452.473,00	0,00	3.674.741,00	3.674.741,00	0,00			
		1. Jelatang	842.682.000,00	842.682.000,00	0,00	451.536.188,00	451.536.188,00	0,00	14.965.824,00	14.965.824,00	0,00	3.805.854,00	3.805.854,00	0,00			
		2. Tanjung Gedang	782.161.000,00	782.161.000,00	0,00	365.009.256,00	365.009.256,00	0,00	15.820.605,00	15.820.605,00	0,00	4.024.171,00	4.024.171,00	0,00			
		3. Empang Benao	828.847.000,00	828.847.000,00	0,00	380.545.099,00	380.545.099,00	0,00	15.554.538,00	15.554.538,00	0,00	3.956.215,00	3.956.215,00	0,00			
		4. Rejo Sari	797.925.000,00	797.925.000,00	0,00	396.334.369,00	396.334.369,00	0,00	14.751.489,00	14.751.489,00	0,00	3.751.111,00	3.751.111,00	0,00			
		5. Keroya	796.288.000,00	796.288.000,00	0,00	397.718.534,00	397.718.534,00	0,00	15.333.003,00	15.333.003,00	0,00	3.899.634,00	3.899.634,00	0,00			
		6. Muara Belengo	829.442.000,00	829.442.000,00	0,00	404.719.587,00	404.719.587,00	0,00	15.758.341,00	15.758.341,00	0,00	4.008.268,00	4.008.268,00	0,00			
		7. Karang Berahi	896.612.000,00	896.612.000,00	0,00</												

**REKAPITULASI PENYALURAN TRANSFER KE PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

(dalam rupiah)

No.	Kecamatan	D e s a	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi			Total Transfer ke Pemerintah Desa		
			Alokasi	Penyaluran	Lebih/(Kurang) Salur	Alokasi	Penyaluran	Lebih/(Kurang) Salur
1	2	3	16	17	18=16-17	18=4+7+10+13+16	19=5+8+11+14+17	20=18-19
1.	Jangkat	1. Renah Kemumu	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.365.534.244,00	1.295.534.244,00	70.000.000,00
		2. Tanjung Kasri	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.125.320.778,00	1.055.320.778,00	70.000.000,00
		3. Lubuk Mentilin	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.183.448.512,00	1.113.448.512,00	70.000.000,00
		4. Rantau Kermas	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.496.049.234,00	1.426.049.234,00	70.000.000,00
		5. Renah Alai	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.234.987.347,00	1.164.987.347,00	70.000.000,00
		6. Pulau Tengah	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.709.435.674,00	1.639.435.674,00	70.000.000,00
		7. Lubuk Pungguk	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.297.657.058,00	1.227.657.058,00	70.000.000,00
		8. Koto Renah	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.188.296.660,00	1.118.296.660,00	70.000.000,00
		9. Muara Madras	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.619.503.599,00	1.549.503.599,00	70.000.000,00
		10. Renah Pelan	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.278.752.540,00	1.208.752.540,00	70.000.000,00
		11. Koto Rawang	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.299.870.628,00	1.229.870.628,00	70.000.000,00
2.	Bangko	1. Kungkai	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.454.760.408,00	1.384.760.408,00	70.000.000,00
		2. Mudo	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.194.053.167,00	1.124.053.167,00	70.000.000,00
		3. Langling	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.257.858.276,00	1.187.858.276,00	70.000.000,00
		4. Sungai Kapas	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.871.809.984,00	1.801.809.984,00	70.000.000,00
3.	Muara Siau	1. Durian Rambun	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.290.260.802,00	1.220.260.802,00	70.000.000,00
		2. Lubuk Birah	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.297.028.461,00	1.227.028.461,00	70.000.000,00
		3. Lubuk Beringin	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.439.234.151,00	1.369.234.151,00	70.000.000,00
		4. Rantau Macang	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.326.586.174,00	1.256.586.174,00	70.000.000,00
		5. Peradun Temeras	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.328.888.710,00	1.258.888.710,00	70.000.000,00
		6. Teluk Sikumbang	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.303.597.293,00	1.233.597.293,00	70.000.000,00
		7. Muara Siau	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.429.491.015,00	1.359.491.015,00	70.000.000,00
		8. Tiaro	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.263.900.347,00	1.193.900.347,00	70.000.000,00
		9. Air Lago	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.184.189.867,00	1.114.189.867,00	70.000.000,00
		10. Badak Tekurung	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.222.389.336,00	1.152.389.336,00	70.000.000,00
		11. Rantau Bidaro	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.061.655.717,00	991.655.717,00	70.000.000,00
		12. Rantau Panjang	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.432.834.164,00	1.362.834.164,00	70.000.000,00
		13. Pulau Raman	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.347.060.764,00	1.277.060.764,00	70.000.000,00
		14. Pasar Muara Siau	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.186.496.913,00	1.116.496.913,00	70.000.000,00
		15. Sepantai Renah	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.139.095.975,00	1.069.095.975,00	70.000.000,00
		16. Sungai Ulas	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.232.104.311,00	1.162.104.311,00	70.000.000,00
		17. Rantau Bayur	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.233.012.525,00	1.163.012.525,00	70.000.000,00
4.	Sungai Manau	1. Sungai Pinang	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.212.310.871,00	1.142.310.871,00	70.000.000,00
		2. Tiangko	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.324.993.072,00	1.254.993.072,00	70.000.000,00
		3. Palipan	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.260.601.219,00	1.190.601.219,00	70.000.000,00
		4. Seringat	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.260.606.062,00	1.190.606.062,00	70.000.000,00
		5. Durian Lecah	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.302.802.699,00	1.232.802.699,00	70.000.000,00
		6. Bukit Batu	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.221.200.464,00	1.151.200.464,00	70.000.000,00
		7. Sungai Nilau	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.457.105.739,00	1.387.105.739,00	70.000.000,00
		8. Sungai Manau	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.481.950.019,00	1.411.950.019,00	70.000.000,00
		9. Benteng	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.160.566.810,00	1.090.566.810,00	70.000.000,00
		10. Gelanggang	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.195.174.755,00	1.125.174.755,00	70.000.000,00
5.	Tabir	1. Kandang	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.651.600.245,00	1.581.600.245,00	70.000.000,00
		2. Koto Rayo	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.429.478.359,00	1.359.478.359,00	70.000.000,00
		3. Tanjung Ilir	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.366.911.925,00	1.296.911.925,00	70.000.000,00
		4. Buluran Panjang	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.477.528.482,00	1.407.528.482,00	70.000.000,00
		5. Seling	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.431.732.528,00	1.361.732.528,00	70.000.000,00
6.	Pamenang	6. Lubuk Napal	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.250.349.829,00	1.180.349.829,00	70.000.000,00
		1. Jelatang	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.412.989.866,00	1.342.989.866,00	70.000.000,00
		2. Tanjung Gedang	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.267.015.032,00	1.197.015.032,00	70.000.000,00
		3. Empang Benao	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.328.902.852,00	1.258.902.852,00	70.000.000,00
		4. Rejo Sari	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.312.761.969,00	1.242.761.969,00	70.000.000,00
		5. Keroya	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.313.239.171,00	1.243.239.171,00	70.000.000,00
		6. Muara Belengo	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.353.928.196,00	1.283.928.196,00	70.000.000,00
		7. Karang Berahi	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.412.970.240,00	1.342.970.240,00	70.000.000,00
		8. Pauh Menang	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.477.860.518,00	1.407.860.518,00	70.000.000,00
		9. Pematang Kancil	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.128.200.143,00	1.058.200.143,00	70.000.000,00
		10. Tanah Abang	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.470.641.830,00	1.400.641.830,00	70.000.000,00
		11. Sialang	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.381.305.763,00	1.311.305.763,00	70.000.000,00
		12. Sungai Udang	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.490.315.210,00	1.420.315.210,00	70.000.000,00
		13. Pelakar Jaya	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.372.248.738,00	1.302.248.738,00	70.000.000,00

No.	Kecamatan	D e s a	Dana Desa (APBN)			Alokasi Dana Desa (APBD)			Bagi Hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
									Bagi Hasil Pajak Daerah			Bagi Hasil Retribusi Daerah		
			Alokasi	Penyaluran	Lebih/(Kurang) Salur	Alokasi	Penyaluran	Lebih/(Kurang) Salur	Alokasi	Penyaluran	Lebih/(Kurang) Salur	Alokasi	Penyaluran	Lebih/(Kurang) Salur
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10	11	12=10-11	13	14	15=13-14
7.	Tabir Ulu	1. Muara Jernih	1.092.983.000,00	1.092.983.000,00	0,00	563.139.713,00	563.139.713,00	0,00	17.765.782,00	17.765.782,00	0,00	4.520.982,00	4.520.982,00	0,00
		2. Kapuk	1.036.334.000,00	1.036.334.000,00	0,00	447.207.366,00	447.207.366,00	0,00	16.678.787,00	16.678.787,00	0,00	4.243.356,00	4.243.356,00	0,00
		3. Pulau Aro	875.673.000,00	875.673.000,00	0,00	436.741.684,00	436.741.684,00	0,00	15.940.596,00	15.940.596,00	0,00	4.054.817,00	4.054.817,00	0,00
		4. Rantau Ngarau	852.458.000,00	852.458.000,00	0,00	400.471.883,00	400.471.883,00	0,00	16.096.421,00	16.096.421,00	0,00	4.094.616,00	4.094.616,00	0,00
		5. Medan Baru	653.552.000,00	653.552.000,00	0,00	287.000.270,00	287.000.270,00	0,00	14.387.797,00	14.387.797,00	0,00	3.658.222,00	3.658.222,00	0,00
		6. Muara Seketuk	821.505.000,00	821.505.000,00	0,00	323.570.831,00	323.570.831,00	0,00	14.928.695,00	14.928.695,00	0,00	3.796.371,00	3.796.371,00	0,00
8.	Tabir Selatan	1. Sungai Sahut	1.255.787.000,00	1.255.787.000,00	0,00	415.137.986,00	415.137.986,00	0,00	15.118.158,00	15.118.158,00	0,00	3.844.761,00	3.844.761,00	0,00
		2. Bungo Antoi	1.290.719.000,00	1.290.719.000,00	0,00	487.725.906,00	487.725.906,00	0,00	15.848.796,00	15.848.796,00	0,00	4.031.371,00	4.031.371,00	0,00
		3. Muara Delang	1.277.152.000,00	1.277.152.000,00	0,00	499.772.648,00	499.772.648,00	0,00	14.943.973,00	14.943.973,00	0,00	3.800.273,00	3.800.273,00	0,00
		4. Sinar Gading	880.663.000,00	880.663.000,00	0,00	512.717.574,00	512.717.574,00	0,00	14.381.198,00	14.381.198,00	0,00	3.656.536,00	3.656.536,00	0,00
		5. Bungo Tanjung	899.518.000,00	899.518.000,00	0,00	379.153.835,00	379.153.835,00	0,00	15.108.799,00	15.108.799,00	0,00	3.842.371,00	3.842.371,00	0,00
		6. Rawa Jaya	1.228.616.000,00	1.228.616.000,00	0,00	401.127.902,00	401.127.902,00	0,00	14.737.172,00	14.737.172,00	0,00	3.747.455,00	3.747.455,00	0,00
		7. Gading Jaya	860.513.000,00	860.513.000,00	0,00	361.238.917,00	361.238.917,00	0,00	14.340.987,00	14.340.987,00	0,00	3.646.267,00	3.646.267,00	0,00
		8. Mekar Jaya	728.270.000,00	728.270.000,00	0,00	350.930.728,00	350.930.728,00	0,00	14.613.246,00	14.613.246,00	0,00	3.715.803,00	3.715.803,00	0,00
9.	Lembah Masurai	1. Nilo Dingin	750.159.000,00	750.159.000,00	0,00	328.227.469,00	328.227.469,00	0,00	14.820.373,00	14.820.373,00	0,00	3.768.705,00	3.768.705,00	0,00
		2. Tanjung Berugo	715.367.000,00	715.367.000,00	0,00	328.370.000,00	328.370.000,00	0,00	14.824.249,00	14.824.249,00	0,00	3.769.695,00	3.769.695,00	0,00
		3. Tuo	856.701.000,00	856.701.000,00	0,00	354.011.473,00	354.011.473,00	0,00	15.067.944,00	15.067.944,00	0,00	3.831.936,00	3.831.936,00	0,00
		4. Koto Rami	839.946.000,00	839.946.000,00	0,00	340.550.046,00	340.550.046,00	0,00	14.701.878,00	14.701.878,00	0,00	3.738.440,00	3.738.440,00	0,00
		5. Rancan	841.098.000,00	841.098.000,00	0,00	324.119.433,00	324.119.433,00	0,00	14.708.660,00	14.708.660,00	0,00	3.740.173,00	3.740.173,00	0,00
		6. Pasar Masurai	638.078.000,00	638.078.000,00	0,00	299.310.842,00	299.310.842,00	0,00	14.722.567,00	14.722.567,00	0,00	3.743.725,00	3.743.725,00	0,00
		7. Rantau Jering	953.118.000,00	953.118.000,00	0,00	439.704.942,00	439.704.942,00	0,00	17.398.266,00	17.398.266,00	0,00	4.427.116,00	4.427.116,00	0,00
		8. Tanjung Dalam	794.798.000,00	794.798.000,00	0,00	411.826.917,00	411.826.917,00	0,00	15.045.522,00	15.045.522,00	0,00	3.826.209,00	3.826.209,00	0,00
		9. Muara Pangli	747.067.000,00	747.067.000,00	0,00	380.243.151,00	380.243.151,00	0,00	15.546.327,00	15.546.327,00	0,00	3.954.118,00	3.954.118,00	0,00
		10. Sungai Lalang	690.649.000,00	690.649.000,00	0,00	333.634.898,00	333.634.898,00	0,00	14.967.421,00	14.967.421,00	0,00	3.806.262,00	3.806.262,00	0,00
		11. Talang Asal	995.075.000,00	995.075.000,00	0,00	356.052.177,00	356.052.177,00	0,00	14.888.485,00	14.888.485,00	0,00	3.786.101,00	3.786.101,00	0,00
		12. Muara Kelukup	835.929.000,00	835.929.000,00	0,00	344.298.195,00	344.298.195,00	0,00	15.257.395,00	15.257.395,00	0,00	3.880.323,00	3.880.323,00	0,00
		13. Muara Lengayo	719.590.000,00	719.590.000,00	0,00	310.052.662,00	310.052.662,00	0,00	15.014.677,00	15.014.677,00	0,00	3.818.331,00	3.818.331,00	0,00
		14. Talang Paruh	761.511.000,00	761.511.000,00	0,00	389.603.153,00	389.603.153,00	0,00	16.489.404,00	16.489.404,00	0,00	4.194.986,00	4.194.986,00	0,00
		15. Durian Mukut	785.819.000,00	785.819.000,00	0,00	341.098.724,00	341.098.724,00	0,00	15.170.390,00	15.170.390,00	0,00	3.858.101,00	3.858.101,00	0,00
10.	Bangko Barat	1. Pulau Rengas	943.632.000,00	943.632.000,00	0,00	347.191.978,00	347.191.978,00	0,00	14.647.544,00	14.647.544,00	0,00	3.724.563,00	3.724.563,00	0,00
		2. Biuku Tanjung	845.162.000,00	845.162.000,00	0,00	357.890.990,00	357.890.990,00	0,00	15.173.443,00	15.173.443,00	0,00	3.858.881,00	3.858.881,00	0,00
		3. Bedeng Rejo	684.463.000,00	684.463.000,00	0,00	316.470.229,00	316.470.229,00	0,00	14.500.650,00	14.500.650,00	0,00	3.687.045,00	3.687.045,00	0,00
		4. Sungai Putih	1.017.735.000,00	1.017.735.000,00	0,00	367.213.610,00	367.213.610,00	0,00	14.503.461,00	14.503.461,00	0,00	3.687.763,00	3.687.763,00	0,00
		5. Bukit Beringin	872.597.000,00	872.597.000,00	0,00	458.330.168,00	458.330.168,00	0,00	15.068.997,00	15.068.997,00	0,00	3.832.205,00	3.832.205,00	0,00
		6. Pulau Rengas Ulu	791.351.000,00	791.351.000,00	0,00	382.520.044,00	382.520.044,00	0,00	14.919.700,00	14.919.700,00	0,00	3.794.073,00	3.794.073,00	0,00
11.	Nalo Tantan	1. Sungai Uluak	1.219.186.000,00	1.219.186.000,00	0,00	472.225.557,00	472.225.557,00	0,00	16.115.828,00	16.115.828,00	0,00	4.099.573,00	4.099.573,00	0,00
		2. Aur Berduri	785.272.000,00	785.272.000,00	0,00	362.746.789,00	362.746.789,00	0,00	15.070.536,00	15.070.536,00	0,00	3.832.598,00	3.832.598,00	0,00
		3. Telun	690.932.000,00	690.932.000,00	0,00	355.500.946,00	355.500.946,00	0,00	14.873.495,00	14.873.495,00	0,00	3.782.272,00	3.782.272,00	0,00
		4. Nalo Gedang	871.008.000,00	871.008.000,00	0,00	366.915.195,00	366.915.195,00	0,00	14.495.346,00	14.495.346,00	0,00	3.685.691,00	3.685.691,00	0,00
		5. Baru Nalo	834.656.000,00	834.656.000,00	0,00	395.532.059,00	395.532.059,00	0,00	15.273.545,00	15.273.545,00	0,00	3.884.448,00	3.884.448,00	0,00
		6. Mentawak	744.069.000,00	744.069.000,00	0,00	355.908.419,00	355.908.419,00	0,00	14.476.670,00	14.476.670,00	0,00	3.680.921,00	3.680.921,00	0,00
		7. Danau	939.375.000,00	939.375.000,00	0,00	372.835.268,00	372.835.268,00	0,00	15.344.879,00	15.344.879,00	0,00	3.902.667,00	3.902.667,00	0,00
12.	Batang Masumai	1. Lubuk Gaung	851.712.000,00	851.712.000,00	0,00	397.767.489,00	397.767.489,00	0,00	15.334.334,00	15.334.334,00	0,00	3.899.974,00	3.899.974,00	0,00
		2. Salam Buku	1.243.141.000,00	1.243.141.000,00	0,00	409.924.177,00	409.924.177,00	0,00	14.976.375,00	14.976.375,00	0,00	3.808.549,00	3.808.549,00	0,00
		3. Pulau Baru	692.222.000,00	692.222.000,00	0,00	392.141.377,00	392.141.377,00	0,00	15.181.339,00	15.181.339,00	0,00	3.860.898,00	3.860.898,00	0,00
		4. Nibung	673.535.000,00	673.535.000,00	0,00	339.426.207,00	339.426.207,00	0,00	14.717.003,00	14.717.003,00	0,00	3.742.303,00	3.742.303,00	0,00
		5. Titian Teras	805.542.000,00	805.542.000,00	0,00	372.820.220,00	372.820.220,00	0,00	14.655.926,00	14.655.926,00	0,00	3.726.704,00	3.726.704,00	0,00
		6. Kederasan Panjang	680.362.000,00	680.362.000,00	0,00	323.116.954,00	323.116.954,00	0,00	14.681.399,00	14.681.399,00	0,00	3.733.210,00	3.733.210,00	0,00
		7. Rantau Alai	795.746.000,00	795.746.000,00	0,00	433.064.888,00	433.064.888,00	0,00	15.605.656,00	15.605.656,00	0,00	3.969.271,00	3.969.271,00	0,00
		8. Tambang Besi	677.873.000,00	677.873.000,00	0,00	313.214.665,00	313.214.665,00	0,00	14.412.119,00	14.412.119,00	0,00	3.664.434,00	3.664.434,00	0,00
		9. Pelangi	726.644.000,00	726.644.000,00	0,00	367.948.107,00	367.948.107,00	0,00	14.668.106,00	14.668.106,00	0,00	3.729.815,00	3.729.815,00	0,00
		10. Pulau Layang	709.137.000,00	709.137.000,00	0,00	359.642.792,00	359.642.792,00	0,00	14.986.127,00	14.986.127,00	0,00	3.811.039,00	3.811.039,00	0,00
13.	Pamenang Barat	1. Tanjung Lamin	987.090.000,00	987.090.000,00	0,00	373.861.330,00	373.861.330,00	0,00	14.684.237,00	14.684.237,00	0,00	3.733.935,00	3.733.935,00	0,00
		2. Limbur Meranginur Mer												

No.	Kecamatan	D e s a	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi			Total Transfer ke Pemerintah Desa		
			Alokasi	Penyaluran	Lebih/(Kurang) Salur	Alokasi	Penyaluran	Lebih/(Kurang) Salur
			16	17	18=16-17	18=4+7+10+13+16	19=5+8+11+14+17	20=18-19
7.	Tabir Ulu	1. Muara Jernih	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.778.409.477,00	1.708.409.477,00	70.000.000,00
		2. Kapuk	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.604.463.509,00	1.534.463.509,00	70.000.000,00
		3. Pulau Aro	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.432.410.097,00	1.362.410.097,00	70.000.000,00
		4. Rantau Ngarau	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.373.120.920,00	1.303.120.920,00	70.000.000,00
		5. Medan Baru	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.058.598.289,00	988.598.289,00	70.000.000,00
		6. Muara Seketuk	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.263.800.897,00	1.193.800.897,00	70.000.000,00
8.	Tabir Selatan	1. Sungai Sahut	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.789.887.905,00	1.719.887.905,00	70.000.000,00
		2. Bungo Antoi	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.898.325.073,00	1.828.325.073,00	70.000.000,00
		3. Muara Delang	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.895.668.894,00	1.825.668.894,00	70.000.000,00
		4. Sinar Gading	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.511.418.308,00	1.441.418.308,00	70.000.000,00
		5. Bungo Tanjung	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.397.623.005,00	1.327.623.005,00	70.000.000,00
		6. Rawa Jaya	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.748.228.529,00	1.678.228.529,00	70.000.000,00
		7. Gading Jaya	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.339.739.171,00	1.269.739.171,00	70.000.000,00
		8. Mekar Jaya	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.197.529.777,00	1.127.529.777,00	70.000.000,00
9.	Lembah Masurai	1. Nilo Dingin	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.196.975.547,00	1.126.975.547,00	70.000.000,00
		2. Tanjung Berugo	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.162.330.944,00	1.092.330.944,00	70.000.000,00
		3. Tuo	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.329.612.353,00	1.259.612.353,00	70.000.000,00
		4. Koto Rami	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.298.936.364,00	1.228.936.364,00	70.000.000,00
		5. Rancan	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.283.666.266,00	1.213.666.266,00	70.000.000,00
		6. Pasar Masurai	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.055.855.134,00	985.855.134,00	70.000.000,00
		7. Rantau Jering	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.514.648.324,00	1.444.648.324,00	70.000.000,00
		8. Tanjung Dalam	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.325.496.648,00	1.255.496.648,00	70.000.000,00
		9. Muara Pangli	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.246.810.596,00	1.176.810.596,00	70.000.000,00
		10. Sungai Lalang	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.143.057.581,00	1.073.057.581,00	70.000.000,00
		11. Talang Asal	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.469.801.763,00	1.399.801.763,00	70.000.000,00
		12. Muara Kelukup	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.299.364.913,00	1.229.364.913,00	70.000.000,00
		13. Muara Lengayo	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.148.475.670,00	1.078.475.670,00	70.000.000,00
		14. Talang Paruh	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.271.798.543,00	1.201.798.543,00	70.000.000,00
		15. Durian Mukut	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.245.946.215,00	1.175.946.215,00	70.000.000,00
10.	Bangko Barat	1. Pulau Rengas	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.409.196.085,00	1.339.196.085,00	70.000.000,00
		2. Biuku Tanjung	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.322.085.314,00	1.252.085.314,00	70.000.000,00
		3. Bedeng Rejo	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.119.120.924,00	1.049.120.924,00	70.000.000,00
		4. Sungai Putih	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.503.139.834,00	1.433.139.834,00	70.000.000,00
		5. Bukit Beringin	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.449.828.370,00	1.379.828.370,00	70.000.000,00
		6. Pulau Rengas Ulu	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.292.584.817,00	1.222.584.817,00	70.000.000,00
11.	Nalo Tantan	1. Sungai Ulak	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.811.626.958,00	1.741.626.958,00	70.000.000,00
		2. Aur Berduri	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.266.921.923,00	1.196.921.923,00	70.000.000,00
		3. Telun	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.165.088.713,00	1.095.088.713,00	70.000.000,00
		4. Nalo Gedang	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.356.104.232,00	1.286.104.232,00	70.000.000,00
		5. Baru Nalo	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.349.346.052,00	1.279.346.052,00	70.000.000,00
		6. Mentawak	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.218.135.010,00	1.148.135.010,00	70.000.000,00
		7. Danau	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.431.457.814,00	1.361.457.814,00	70.000.000,00
12.	Batang Masumai	1. Lubuk Gaung	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.368.713.797,00	1.298.713.797,00	70.000.000,00
		2. Salam Buku	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.771.850.101,00	1.701.850.101,00	70.000.000,00
		3. Pulau Baru	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.203.405.614,00	1.133.405.614,00	70.000.000,00
		4. Nibung	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.131.420.513,00	1.061.420.513,00	70.000.000,00
		5. Titian Teras	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.296.744.850,00	1.226.744.850,00	70.000.000,00
		6. Kederasan Panjang	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.121.893.563,00	1.051.893.563,00	70.000.000,00
		7. Rantau Alai	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.348.385.815,00	1.278.385.815,00	70.000.000,00
		8. Tambang Besi	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.109.164.218,00	1.039.164.218,00	70.000.000,00
		9. Pelangi	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.212.990.028,00	1.142.990.028,00	70.000.000,00
		10. Pulau Layang	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.187.576.958,00	1.117.576.958,00	70.000.000,00
13.	Pamenang Barat	1. Tanjung Lamin	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.479.369.502,00	1.409.369.502,00	70.000.000,00
		2. Limbur Merangin	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.440.987.820,00	1.370.987.820,00	70.000.000,00
		3. Karang Anyar	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.335.025.537,00	1.265.025.537,00	70.000.000,00
		4. Pinang Merah	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.391.870.195,00	1.321.870.195,00	70.000.000,00
		5. Sp. Limbur Merangin	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.322.414.700,00	1.252.414.700,00	70.000.000,00
		6. Mampun Baru	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.288.697.162,00	1.218.697.162,00	70.000.000,00
		7. Papit	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.195.893.890,00	1.125.893.890,00	70.000.000,00
		8. Pulau Tujuh	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.596.769.944,00	1.526.769.944,00	70.000.000,00

No.	Kecamatan	D e s a	Dana Desa (APBN)			Alokasi Dana Desa (APBD)			Bagi Hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
									Bagi Hasil Pajak Daerah			Bagi Hasil Retribusi Daerah		
			Alokasi	Penyaluran	Lebih/(Kurang) Salur	Alokasi	Penyaluran	Lebih/(Kurang) Salur	Alokasi	Penyaluran	Lebih/(Kurang) Salur	Alokasi	Penyaluran	Lebih/(Kurang) Salur
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10	11	12=10-11	13	14	15=13-14
14.	Tabir Ilir	1. Rantau Limau Manis	1.049.508.000,00	1.049.508.000,00	0,00	421.043.531,00	421.043.531,00	0,00	16.655.840,00	16.655.840,00	0,00	4.237.495,00	4.237.495,00	0,00
		2. Ulak Makam	797.103.000,00	797.103.000,00	0,00	361.471.806,00	361.471.806,00	0,00	15.035.865,00	15.035.865,00	0,00	3.823.743,00	3.823.743,00	0,00
		3. Air Batu	783.749.000,00	783.749.000,00	0,00	368.423.011,00	368.423.011,00	0,00	14.536.350,00	14.536.350,00	0,00	3.696.163,00	3.696.163,00	0,00
		4. Rejo Sari	662.248.000,00	662.248.000,00	0,00	345.329.694,00	345.329.694,00	0,00	14.596.901,00	14.596.901,00	0,00	3.711.629,00	3.711.629,00	0,00
		5. Kota Raja	676.798.000,00	676.798.000,00	0,00	355.275.179,00	355.275.179,00	0,00	14.867.356,00	14.867.356,00	0,00	3.780.704,00	3.780.704,00	0,00
		6. Tunggul Bulin	803.548.000,00	803.548.000,00	0,00	363.860.579,00	363.860.579,00	0,00	15.100.824,00	15.100.824,00	0,00	3.840.334,00	3.840.334,00	0,00
		7. Mekar Limau Manis	849.243.000,00	849.243.000,00	0,00	378.208.349,00	378.208.349,00	0,00	15.490.993,00	15.490.993,00	0,00	3.939.986,00	3.939.986,00	0,00
15.	Tabir Timur	1. Sungai Limau	1.092.985.000,00	1.092.985.000,00	0,00	446.120.043,00	446.120.043,00	0,00	16.884.172,00	16.884.172,00	0,00	4.295.813,00	4.295.813,00	0,00
		2. Sungai Bulian	1.014.875.000,00	1.014.875.000,00	0,00	403.361.224,00	403.361.224,00	0,00	14.797.904,00	14.797.904,00	0,00	3.762.966,00	3.762.966,00	0,00
		3. Seri Sembilan	787.947.000,00	787.947.000,00	0,00	354.115.982,00	354.115.982,00	0,00	14.835.833,00	14.835.833,00	0,00	3.772.653,00	3.772.653,00	0,00
		4. Bukit Subur	862.944.000,00	862.944.000,00	0,00	382.506.585,00	382.506.585,00	0,00	14.919.334,00	14.919.334,00	0,00	3.793.980,00	3.793.980,00	0,00
16.	Renah Pembarap	1. Muaro Panco Barat	875.456.000,00	875.456.000,00	0,00	432.778.810,00	432.778.810,00	0,00	15.832.830,00	15.832.830,00	0,00	4.027.293,00	4.027.293,00	0,00
		2. Talang Segekah	733.771.000,00	733.771.000,00	0,00	408.979.195,00	408.979.195,00	0,00	14.950.678,00	14.950.678,00	0,00	3.801.985,00	3.801.985,00	0,00
		3. Durian Betakuk	766.673.000,00	766.673.000,00	0,00	433.567.720,00	433.567.720,00	0,00	15.619.330,00	15.619.330,00	0,00	3.972.764,00	3.972.764,00	0,00
		4. Muara Bantan	890.023.000,00	890.023.000,00	0,00	397.453.590,00	397.453.590,00	0,00	15.325.798,00	15.325.798,00	0,00	3.897.794,00	3.897.794,00	0,00
		5. Parit Ujung Tanjung	1.000.760.000,00	1.000.760.000,00	0,00	456.328.934,00	456.328.934,00	0,00	16.238.292,00	16.238.292,00	0,00	4.130.851,00	4.130.851,00	0,00
		6. Guguk	938.065.000,00	938.065.000,00	0,00	417.609.629,00	417.609.629,00	0,00	14.749.184,00	14.749.184,00	0,00	3.750.523,00	3.750.523,00	0,00
		7. Markeh	800.040.000,00	800.040.000,00	0,00	399.951.514,00	399.951.514,00	0,00	15.393.726,00	15.393.726,00	0,00	3.915.143,00	3.915.143,00	0,00
		8. Air Batu	1.095.152.000,00	1.095.152.000,00	0,00	485.566.190,00	485.566.190,00	0,00	16.344.816,00	16.344.816,00	0,00	4.158.058,00	4.158.058,00	0,00
		9. Marus Jaya	677.620.000,00	677.620.000,00	0,00	369.314.762,00	369.314.762,00	0,00	14.560.600,00	14.560.600,00	0,00	3.702.357,00	3.702.357,00	0,00
		10. Renah Medan	768.946.000,00	768.946.000,00	0,00	339.673.230,00	339.673.230,00	0,00	14.443.081,00	14.443.081,00	0,00	3.672.342,00	3.672.342,00	0,00
		11. Simpang Parit	650.231.000,00	650.231.000,00	0,00	366.210.961,00	366.210.961,00	0,00	14.476.196,00	14.476.196,00	0,00	3.680.800,00	3.680.800,00	0,00
		12. Muaro Panco Timur	735.825.000,00	735.825.000,00	0,00	370.628.029,00	370.628.029,00	0,00	14.831.266,00	14.831.266,00	0,00	3.771.487,00	3.771.487,00	0,00
17.	Pangkalan Jambu	1. Baru Pkl. Jambu	748.132.000,00	748.132.000,00	0,00	346.477.667,00	346.477.667,00	0,00	14.628.119,00	14.628.119,00	0,00	3.719.602,00	3.719.602,00	0,00
		2. Bukit Perentak	896.031.000,00	896.031.000,00	0,00	323.581.996,00	323.581.996,00	0,00	14.694.045,00	14.694.045,00	0,00	3.736.440,00	3.736.440,00	0,00
		3. Birun	874.791.000,00	874.791.000,00	0,00	401.140.892,00	401.140.892,00	0,00	14.754.929,00	14.754.929,00	0,00	3.751.990,00	3.751.990,00	0,00
		4. Tiga Alur	669.851.000,00	669.851.000,00	0,00	330.834.994,00	330.834.994,00	0,00	14.202.737,00	14.202.737,00	0,00	3.610.956,00	3.610.956,00	0,00
		5. Bungo Tanjung	1.033.631.000,00	1.033.631.000,00	0,00	364.349.933,00	364.349.933,00	0,00	14.425.587,00	14.425.587,00	0,00	3.667.874,00	3.667.874,00	0,00
		6. Sungai Jering	915.047.000,00	915.047.000,00	0,00	347.533.524,00	347.533.524,00	0,00	14.656.832,00	14.656.832,00	0,00	3.726.935,00	3.726.935,00	0,00
		7. Kampung Limo	784.938.000,00	784.938.000,00	0,00	370.947.508,00	370.947.508,00	0,00	14.839.953,00	14.839.953,00	0,00	3.773.706,00	3.773.706,00	0,00
		8. Tanjung Mudo	682.206.000,00	682.206.000,00	0,00	347.530.856,00	347.530.856,00	0,00	14.656.759,00	14.656.759,00	0,00	3.726.917,00	3.726.917,00	0,00
18.	Jangkat Timur	1. Tanjung Mudo	726.660.000,00	726.660.000,00	0,00	402.561.581,00	402.561.581,00	0,00	15.028.516,00	15.028.516,00	0,00	3.821.866,00	3.821.866,00	0,00
		2. Koto Teguh	815.443.000,00	815.443.000,00	0,00	332.066.793,00	332.066.793,00	0,00	14.924.778,00	14.924.778,00	0,00	3.795.371,00	3.795.371,00	0,00
		3. Baru	815.137.000,00	815.137.000,00	0,00	528.644.380,00	528.644.380,00	0,00	15.502.850,00	15.502.850,00	0,00	3.943.014,00	3.943.014,00	0,00
		4. Talang Tembago	877.437.000,00	877.437.000,00	0,00	394.726.220,00	394.726.220,00	0,00	15.269.035,00	15.269.035,00	0,00	3.883.296,00	3.883.296,00	0,00
		5. Beringin Tinggi	1.028.058.000,00	1.028.058.000,00	0,00	446.680.758,00	446.680.758,00	0,00	15.993.326,00	15.993.326,00	0,00	4.068.285,00	4.068.285,00	0,00
		6. Pematang Pauh	857.408.000,00	857.408.000,00	0,00	449.069.274,00	449.069.274,00	0,00	15.604.688,00	15.604.688,00	0,00	3.969.024,00	3.969.024,00	0,00
		7. Rantau Suli	1.090.074.000,00	1.090.074.000,00	0,00	645.685.502,00	645.685.502,00	0,00	15.931.454,00	15.931.454,00	0,00	4.052.482,00	4.052.482,00	0,00
		8. Gedang	1.078.663.000,00	1.078.663.000,00	0,00	494.712.226,00	494.712.226,00	0,00	16.845.888,00	16.845.888,00	0,00	4.286.035,00	4.286.035,00	0,00
		9. Koto Baru	855.996.000,00	855.996.000,00	0,00	429.292.663,00	429.292.663,00	0,00	15.520.480,00	15.520.480,00	0,00	3.947.517,00	3.947.517,00	0,00
		10. Tanjung Benuang	912.797.000,00	912.797.000,00	0,00	448.773.429,00	448.773.429,00	0,00	15.361.689,00	15.361.689,00	0,00	3.906.961,00	3.906.961,00	0,00
		11. Jangkat	841.475.000,00	841.475.000,00	0,00	385.740.061,00	385.740.061,00	0,00	15.024.668,00	15.024.668,00	0,00	3.820.883,00	3.820.883,00	0,00
		12. Tanjung Alam	696.750.000,00	696.750.000,00	0,00	367.397.518,00	367.397.518,00	0,00	14.525.867,00	14.525.867,00	0,00	3.693.486,00	3.693.486,00	0,00
		13. Kabu	769.155.000,00	769.155.000,00	0,00	332.282.220,00	332.282.220,00	0,00	14.794.668,00	14.794.668,00	0,00	3.762.140,00	3.762.140,00	0,00
		14. Sp. Talang Tembago	682.720.000,00	682.720.000,00	0,00	349.160.282,00	349.160.282,00	0,00	14.565.101,00	14.565.101,00	0,00	3.703.506,00	3.703.506,00	0,00
19.	Renah Pamenang	1. Meranti	1.050.302.000,00	1.050.302.000,00	0,00	381.550.337,00	381.550.337,00	0,00	14.893.330,00	14.893.330,00	0,00	3.787.338,00	3.787.338,00	0,00
		2. Bukit Bungkul	1.086.999.000,00	1.086.999.000,00	0,00	412.348.000,00	412.348.000,00	0,00	15.042.288,00	15.042.288,00	0,00	3.825.383,00	3.825.383,00	0,00
		3. Rasau	879.783.000,00	879.783.000,00	0,00	388.619.545,00	388.619.545,00	0,00	15.085.568,00	15.085.568,00	0,00	3.836.437,00	3.836.437,00	0,00
		4. Lantak Seribu	1.144.172.000,00	1.144.172.000,00	0,00	447.154.008,00	447.154.008,00	0,00	15.300.247,00	15.300.247,00	0,00	3.891.268,00	3.891.268,00	0,00
20.	Pamenang Selatan	1. Tambang Emas	1.184.035.000,00	1.184.035.000,00	0,00	532.341.486,00	532.341.486,00	0,00	15.702.373,00	15.702.373,00	0,00	3.993.973,00	3.993.973,00	0,00
		2. Tanjung Benuang	1.086.352.000,00	1.086.352.000,00	0,00	476.648.036,00	476.648.036,00	0,00	15.431.159,00	15.431.159,00	0,00	3.924.703,00	3.924.703,00	0,00
		3. Pulau Bayur	877.175.000,00	877.175.000,00	0,00	429.126.391,00	429.126.391,00	0,00	16.204.502,00	16.204.502,00	0,00	4.122.221,00	4.122.221,2	

No.	Kecamatan	D e s a	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi			Total Transfer ke Pemerintah Desa		
			Alokasi	Penyaluran	Lebih/(Kurang) Salur	Alokasi	Penyaluran	Lebih/(Kurang) Salur
			16	17	18=16-17	18=4+7+10+13+16	19=5+8+11+14+17	20=18-19
14.	Tabir Ilir	1. Rantau Limau Manis	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.591.444.866,00	1.521.444.866,00	70.000.000,00
		2. Ulak Makam	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.277.434.414,00	1.207.434.414,00	70.000.000,00
		3. Air Batu	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.270.404.524,00	1.200.404.524,00	70.000.000,00
		4. Rejo Sari	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.125.886.224,00	1.055.886.224,00	70.000.000,00
		5. Kota Raja	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.150.721.239,00	1.080.721.239,00	70.000.000,00
		6. Tunggul Bulin	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.286.349.737,00	1.216.349.737,00	70.000.000,00
		7. Mekar Limau Manis	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.346.882.328,00	1.276.882.328,00	70.000.000,00
15.	Tabir Timur	1. Sungai Limau	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.660.285.028,00	1.590.285.028,00	70.000.000,00
		2. Sungai Bulian	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.536.797.094,00	1.466.797.094,00	70.000.000,00
		3. Seri Sembilan	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.260.671.468,00	1.190.671.468,00	70.000.000,00
		4. Bukit Subur	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.364.163.899,00	1.294.163.899,00	70.000.000,00
16.	Renah Pembarap	1. Muaro Panco Barat	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.428.094.933,00	1.358.094.933,00	70.000.000,00
		2. Talang Segegap	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.261.502.858,00	1.191.502.858,00	70.000.000,00
		3. Durian Betakuk	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.319.832.814,00	1.249.832.814,00	70.000.000,00
		4. Muara Bantan	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.406.700.182,00	1.336.700.182,00	70.000.000,00
		5. Parit Ujung Tanjung	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.577.458.077,00	1.507.458.077,00	70.000.000,00
		6. Guquk	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.474.174.336,00	1.404.174.336,00	70.000.000,00
		7. Markeh	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.319.300.383,00	1.249.300.383,00	70.000.000,00
		8. Air Batu	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.701.221.064,00	1.631.221.064,00	70.000.000,00
		9. Marus Jaya	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.165.197.719,00	1.095.197.719,00	70.000.000,00
		10. Renah Medan	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.226.734.653,00	1.156.734.653,00	70.000.000,00
		11. Simpang Parit	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.134.598.957,00	1.064.598.957,00	70.000.000,00
		12. Muaro Panco Timur	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.225.055.782,00	1.155.055.782,00	70.000.000,00
17.	Pangkalan Jambu	1. Baru Pkl. Jambu	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.212.957.388,00	1.142.957.388,00	70.000.000,00
		2. Bukit Perentak	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.338.043.481,00	1.268.043.481,00	70.000.000,00
		3. Birun	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.394.438.811,00	1.324.438.811,00	70.000.000,00
		4. Tiga Alur	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.118.499.687,00	1.048.499.687,00	70.000.000,00
		5. Bungo Tanjung	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.516.074.394,00	1.446.074.394,00	70.000.000,00
		6. Sungai Jering	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.380.964.291,00	1.310.964.291,00	70.000.000,00
		7. Kampung Limo	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.274.499.167,00	1.204.499.167,00	70.000.000,00
		8. Tanjung Mudo	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.148.120.532,00	1.078.120.532,00	70.000.000,00
18.	Jangkat Timur	1. Tanjung Mudo	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.248.071.963,00	1.178.071.963,00	70.000.000,00
		2. Koto Teguh	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.266.229.942,00	1.196.229.942,00	70.000.000,00
		3. Baru	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.463.227.244,00	1.393.227.244,00	70.000.000,00
		4. Talang Tembago	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.391.315.551,00	1.321.315.551,00	70.000.000,00
		5. Beringin Tinggi	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.594.800.369,00	1.524.800.369,00	70.000.000,00
		6. Pematang Pauh	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.426.050.986,00	1.356.050.986,00	70.000.000,00
		7. Rantau Suli	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.855.743.438,00	1.785.743.438,00	70.000.000,00
		8. Gedang	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.694.507.149,00	1.624.507.149,00	70.000.000,00
		9. Koto Baru	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.404.756.660,00	1.334.756.660,00	70.000.000,00
		10. Tanjung Benuang	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.480.839.079,00	1.410.839.079,00	70.000.000,00
		11. Jangkat	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.346.060.612,00	1.276.060.612,00	70.000.000,00
		12. Tanjung Alam	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.182.366.871,00	1.112.366.871,00	70.000.000,00
		13. Kabu	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.219.994.028,00	1.149.994.028,00	70.000.000,00
		14. Sp. Talang Tembago	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.150.148.889,00	1.080.148.889,00	70.000.000,00
19.	Renah Pamenang	1. Meranti	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.550.533.005,00	1.480.533.005,00	70.000.000,00
		2. Bukit Bungkul	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.618.214.671,00	1.548.214.671,00	70.000.000,00
		3. Rasau	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.387.324.550,00	1.317.324.550,00	70.000.000,00
		4. Lantak Seribu	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.710.517.523,00	1.640.517.523,00	70.000.000,00
20.	Pamenang Selatan	1. Tambang Emas	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.836.072.832,00	1.766.072.832,00	70.000.000,00
		2. Tanjung Benuang	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.682.355.898,00	1.612.355.898,00	70.000.000,00
		3. Pulau Bayur	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.426.628.114,00	1.356.628.114,00	70.000.000,00
		4. Selango	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.220.569.034,00	1.150.569.034,00	70.000.000,00
21.	Margo Tabir	1. Tanjung Rejo	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.603.906.217,00	1.533.906.217,00	70.000.000,00
		2. Sumber Agung	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.695.266.740,00	1.625.266.740,00	70.000.000,00
		3. Suko Rejo	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.204.634.700,00	1.134.634.700,00	70.000.000,00
		4. Sido Rukun	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.259.566.435,00	1.189.566.435,00	70.000.000,00
		5. Lubuk Bumbun	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.600.543.645,00	1.530.543.645,00	70.000.000,00
		6. Tegal Rejo	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.273.493.774,00	1.203.493.774,00	70.000.000,00
22.	Tabir Lintas	1. Tambang Baru	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.544.336.478,00	1.474.336.478,00	70.000.000,00
		2. Sido Lego	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.625.236.393,00	1.555.236.393,00	70.000.000,00
		3. Mensango	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.265.005.685,00	1.195.005.685,00	70.000.000,00
		4. Koto Baru	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.229.004.127,00	1.159.004.127,00	70.000.000,00
		5. Sido Harjo	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.312.002.343,00	1.242.002.343,00	70.000.000,00

No.	Kecamatan	D e s a	Dana Desa (APBN)			Alokasi Dana Desa (APBD)			Bagi Hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
									Bagi Hasil Pajak Daerah			Bagi Hasil Retribusi Daerah		
			Alokasi	Penyaluran	Lebih/(Kurang) Salur	Alokasi	Penyaluran	Lebih/(Kurang) Salur	Alokasi	Penyaluran	Lebih/(Kurang) Salur	Alokasi	Penyaluran	Lebih/(Kurang) Salur
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10	11	12=10-11	13	14	15=13-14
23.	Tabir Barat	1. Muara Kibul	765.885.000,00	765.885.000,00	0,00	474.636.176,00	474.636.176,00	0,00	15.359.045,00	15.359.045,00	0,00	3.906.285,00	3.906.285,00	0,00
		2. Tanjung Putus	781.408.000,00	781.408.000,00	0,00	361.655.377,00	361.655.377,00	0,00	15.275.810,00	15.275.810,00	0,00	3.885.026,00	3.885.026,00	0,00
		3. Pulau Tebakar	761.853.000,00	761.853.000,00	0,00	450.945.466,00	450.945.466,00	0,00	15.403.351,00	15.403.351,00	0,00	3.917.601,00	3.917.601,00	0,00
		4. Batang Kibul	725.928.000,00	725.928.000,00	0,00	470.226.034,00	470.226.034,00	0,00	16.616.205,00	16.616.205,00	0,00	4.227.372,00	4.227.372,00	0,00
		5. Sungai Tabir	746.937.000,00	746.937.000,00	0,00	366.685.962,00	366.685.962,00	0,00	15.412.610,00	15.412.610,00	0,00	3.919.966,00	3.919.966,00	0,00
		6. Telentang	1.036.182.000,00	1.036.182.000,00	0,00	507.186.544,00	507.186.544,00	0,00	16.932.754,00	16.932.754,00	0,00	4.308.221,00	4.308.221,00	0,00
		7. Ngal	963.598.000,00	963.598.000,00	0,00	530.043.614,00	530.043.614,00	0,00	16.194.637,00	16.194.637,00	0,00	4.119.701,00	4.119.701,00	0,00
		8. Air Liki	949.159.000,00	949.159.000,00	0,00	428.521.509,00	428.521.509,00	0,00	16.170.649,00	16.170.649,00	0,00	4.113.574,00	4.113.574,00	0,00
		9. Pulau Lebar	930.260.000,00	930.260.000,00	0,00	382.021.721,00	382.021.721,00	0,00	15.594.693,00	15.594.693,00	0,00	3.966.471,00	3.966.471,00	0,00
		10. Muaro Langeh	616.939.000,00	616.939.000,00	0,00	324.176.866,00	324.176.866,00	0,00	14.710.222,00	14.710.222,00	0,00	3.740.571,00	3.740.571,00	0,00
		11. Tanjung Beringin	697.106.000,00	697.106.000,00	0,00	403.606.686,00	403.606.686,00	0,00	14.821.983,00	14.821.983,00	0,00	3.769.116,00	3.769.116,00	0,00
		12. Baru Kibul	667.038.000,00	667.038.000,00	0,00	386.628.989,00	386.628.989,00	0,00	14.595.250,00	14.595.250,00	0,00	3.711.207,00	3.711.207,00	0,00
		13. Ngal Ilir	729.676.000,00	729.676.000,00	0,00	380.012.407,00	380.012.407,00	0,00	15.540.052,00	15.540.052,00	0,00	3.952.516,00	3.952.516,00	0,00
		14. Air Liki Baru	764.493.000,00	764.493.000,00	0,00	419.704.852,00	419.704.852,00	0,00	15.930.892,00	15.930.892,00	0,00	4.052.339,00	4.052.339,00	0,00
24.	Tiang Pumpung	1. Sekancing	929.694.000,00	929.694.000,00	0,00	361.788.151,00	361.788.151,00	0,00	15.044.467,00	15.044.467,00	0,00	3.825.940,00	3.825.940,00	0,00
		2. Sekancing Ilir	766.617.000,00	766.617.000,00	0,00	390.008.230,00	390.008.230,00	0,00	15.123.331,00	15.123.331,00	0,00	3.846.082,00	3.846.082,00	0,00
		3. Beringin Sanggul	870.931.000,00	870.931.000,00	0,00	312.550.594,00	312.550.594,00	0,00	14.629.014,00	14.629.014,00	0,00	3.719.830,00	3.719.830,00	0,00
		4. Baru Bukit Punjung	806.403.000,00	806.403.000,00	0,00	308.476.636,00	308.476.636,00	0,00	14.283.275,00	14.283.275,00	0,00	3.631.526,00	3.631.526,00	0,00
		5. Rantau Limau Kapas	754.788.000,00	754.788.000,00	0,00	320.635.477,00	320.635.477,00	0,00	14.613.919,00	14.613.919,00	0,00	3.715.975,00	3.715.975,00	0,00
		6. Baru Sungai Sakai	743.942.000,00	743.942.000,00	0,00	330.655.142,00	330.655.142,00	0,00	14.886.397,00	14.886.397,00	0,00	3.785.562,00	3.785.562,00	0,00
J u m l a h			174.932.338.000,00	174.932.338.000,00	0,00	79.506.673.800,00	79.506.673.800,00	0,00	3.118.300.000,00	3.118.300.000,00	0,00	793.048.550,00	793.048.550,00	0,00

No.	Kecamatan	Desa	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi			Total Transfer ke Pemerintah Desa		
			Alokasi	Penyaluran	Lebih/(Kurang) Salur	Alokasi	Penyaluran	Lebih/(Kurang) Salur
			16	17	18=16-17	18=4+7+10+13+16	19=5+8+11+14+17	20=18-19
23.	Tabir Barat	1. Muara Kibul	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.359.786.506,00	1.289.786.506,00	70.000.000,00
		2. Tanjung Putus	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.262.224.213,00	1.192.224.213,00	70.000.000,00
		3. Pulau Tebakar	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.332.119.418,00	1.262.119.418,00	70.000.000,00
		4. Batang Kibul	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.316.997.611,00	1.246.997.611,00	70.000.000,00
		5. Sungai Tabir	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.232.955.538,00	1.162.955.538,00	70.000.000,00
		6. Telentang	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.664.609.519,00	1.594.609.519,00	70.000.000,00
		7. Ngalol	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.613.955.952,00	1.543.955.952,00	70.000.000,00
		8. Air Liki	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.497.964.732,00	1.427.964.732,00	70.000.000,00
		9. Pulau Lebar	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.431.842.885,00	1.361.842.885,00	70.000.000,00
		10. Muaro Langeh	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.059.566.659,00	989.566.659,00	70.000.000,00
		11. Tanjung Beringin	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.219.303.785,00	1.149.303.785,00	70.000.000,00
		12. Baru Kibul	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.171.973.446,00	1.101.973.446,00	70.000.000,00
		13. Ngalol Ilir	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.229.180.975,00	1.159.180.975,00	70.000.000,00
		14. Air Liki Baru	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.304.181.083,00	1.234.181.083,00	70.000.000,00
24.	Tiang Pumpung	1. Sekancing	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.410.352.558,00	1.340.352.558,00	70.000.000,00
		2. Sekancing Ilir	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.275.594.643,00	1.205.594.643,00	70.000.000,00
		3. Beringin Sanggul	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.301.830.438,00	1.231.830.438,00	70.000.000,00
		4. Baru Bukit Punjung	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.232.794.437,00	1.162.794.437,00	70.000.000,00
		5. Rantau Limau Kapas	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.193.753.371,00	1.123.753.371,00	70.000.000,00
		6. Baru Sungai Sakai	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	1.193.269.101,00	1.123.269.101,00	70.000.000,00
J u m l a h			20.500.000.000,00	6.150.000.000,00	14.350.000.000,00	278.850.360.350,00	264.500.360.350,00	14.350.000.000,00

**IKHTISAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa
TAHUN ANGGARAN 2024**

(dalam rupiah)

No.	Kecamatan	D e s a	Pendapatan Transfer		Pendapatan Asli Desa/ Pendapatan Lainnya		Total pendapatan Desa		Belanja		Surplus/(Defisit)	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8=4+6	9=5+7	10	11	12=8-10	13=9-11
1.	Jangkat	1. Renah Kemumu	1.365.534.244,00	1.295.534.244,00	84.694,00	84.694,00	1.365.618.938,00	1.295.618.938,00	1.381.618.938,00	1.308.537.122,00	(16.000.000,00)	(12.918.184,00)
		2. Tanjung Kasri	1.125.320.778,00	1.055.320.778,00	39.948,00	39.948,00	1.125.360.726,00	1.055.360.726,00	1.135.680.796,00	1.056.854.628,00	(10.320.070,00)	(1.493.902,00)
		3. Lubuk Mentilin	1.183.448.512,00	1.113.448.512,00	286.324,00	286.324,00	1.183.734.836,00	1.113.734.836,00	1.185.734.836,00	1.112.848.512,00	(2.000.000,00)	886.324,00
		4. Rantau Kermas	1.496.049.234,00	1.426.049.234,00	124.365,69	124.365,69	1.496.173.599,69	1.426.173.599,69	1.503.061.163,86	1.386.630.130,00	(6.887.564,17)	39.543.469,69
		5. Renah Alai	1.234.987.347,00	1.164.987.347,00	361.087,97	361.087,97	1.235.348.434,97	1.165.348.434,97	1.235.348.434,97	1.164.987.347,00	0,00	361.087,97
		6. Pulau Tengah	1.709.435.674,00	1.639.435.674,00	200.000,00	200.000,00	1.709.635.674,00	1.639.635.674,00	1.712.260.994,00	1.642.060.994,00	(2.625.320,00)	(2.425.320,00)
		7. Lubuk Pungguk	1.297.657.058,00	1.227.657.058,00	164.825,41	164.825,41	1.297.821.883,41	1.227.821.883,41	1.297.822.178,56	1.227.756.968,00	(295,15)	64.915,41
		8. Koto Renah	1.188.296.660,00	1.118.296.660,00	256.246,00	256.246,00	1.188.552.906,00	1.118.552.906,00	1.189.997.143,00	1.114.375.194,00	(1.444.237,00)	4.177.712,00
		9. Muara Madras	1.619.503.599,00	1.549.503.599,00	245.827,00	245.827,00	1.619.749.426,00	1.549.749.426,00	1.619.977.834,00	1.534.694.472,00	(228.408,00)	15.054.954,00
		10. Renah Pelan	1.278.752.540,00	1.208.752.540,00	109.838,00	109.838,00	1.278.862.378,00	1.208.862.378,00	1.279.442.906,00	1.200.198.834,00	(580.528,00)	8.663.544,00
		11. Koto Rawang	1.299.870.628,00	1.229.870.628,00	157.291,77	157.291,77	1.300.027.919,77	1.230.027.919,77	1.300.058.943,02	1.219.363.457,25	(31.023,25)	10.664.462,52
2.	Bangko	1. Kungkai	1.454.760.408,00	1.384.760.408,00	12.699.985,62	12.699.985,62	1.467.460.393,62	1.397.460.393,62	1.511.198.074,62	1.416.156.226,32	(43.737.681,00)	(18.695.832,70)
		2. Mudo	1.194.053.167,00	1.124.053.167,00	74.964,48	74.964,48	1.194.128.131,48	1.124.128.131,48	1.243.470.721,48	1.172.540.884,09	(49.342.590,00)	(48.412.752,61)
		3. Langling	1.257.858.276,00	1.187.858.276,00	153.196,29	153.196,29	1.258.011.472,29	1.188.011.472,29	1.276.349.428,59	1.186.809.954,03	(18.337.956,30)	1.201.518,26
		4. Sungai Kapas	1.871.809.984,00	1.801.809.984,00	16.911.511,81	16.911.511,81	1.888.721.495,81	1.818.721.495,81	1.882.136.009,81	1.785.825.550,81	6.585.486,00	32.895.945,00
3.	Muara Siau	1. Durian Rambun	1.290.260.802,00	1.220.260.802,00	105.558,00	105.558,00	1.290.366.360,00	1.220.366.360,00	1.303.493.104,74	1.223.753.104,00	(13.126.744,74)	(3.386.744,00)
		2. Lubuk Birah	1.297.028.461,00	1.227.028.461,00	300.335.430,35	300.335.430,35	1.597.363.891,35	1.527.363.891,35	1.642.563.891,35	1.562.563.891,35	(45.200.000,00)	(35.200.000,00)
		3. Lubuk Beringin	1.439.234.151,00	1.369.234.151,00	160.175,00	160.175,00	1.439.394.326,00	1.369.394.326,00	1.439.394.326,00	1.359.232.920,00	0,00	10.161.406,00
		4. Rantau Macang	1.326.586.174,00	1.256.586.174,00	300.882,00	300.882,00	1.326.887.056,00	1.256.887.056,00	1.336.887.056,00	1.264.215.163,00	(10.000.000,00)	(7.328.107,00)
		5. Peradun Temeras	1.328.888.710,00	1.258.888.710,00	254.000,00	254.000,00	1.329.142.710,00	1.259.142.710,00	1.333.342.710,00	1.165.095.710,00	(4.200.000,00)	94.047.000,00
		6. Teluk Sikumbang	1.303.597.293,00	1.233.597.293,00	272.891,00	272.891,00	1.303.870.184,00	1.233.870.184,00	1.341.877.144,00	1.211.548.509,00	(38.006.960,00)	22.321.675,00
		7. Muara Siau	1.429.491.015,00	1.359.491.015,00	1.187.694,40	1.187.694,40	1.430.678.709,40	1.360.678.709,40	1.478.355.500,40	1.390.105.866,50	(47.676.791,00)	(29.427.157,10)
		8. Tiaro	1.263.900.347,00	1.193.900.347,00	302.323,11	302.323,11	1.264.202.670,11	1.194.202.670,11	1.272.202.670,11	1.181.900.347,00	(8.000.000,00)	12.302.323,11
		9. Air Lago	1.184.189.867,00	1.114.189.867,00	179.000,00	179.000,00	1.184.368.867,00	1.114.368.867,00	1.191.368.779,91	1.119.253.667,00	(6.999.912,91)	(4.884.800,00)
		10. Badak Tekurung	1.222.389.336,00	1.152.389.336,00	196.875,00	196.875,00	1.222.586.211,00	1.152.586.211,00	1.222.586.211,00	1.148.889.336,00	0,00	3.696.875,00
		11. Rantau Bidaro	1.061.655.717,00	991.655.717,00	96.112,88	96.112,88	1.061.751.829,88	991.751.829,88	1.067.914.965,88	992.738.248,88	(6.163.136,00)	(986.419,00)
		12. Rantau Panjang	1.432.834.164,00	1.362.834.164,00	300.000,00	300.000,00	1.433.134.164,00	1.363.134.164,00	1.458.134.164,00	1.355.625.164,00	(25.000.000,00)	7.509.000,00
		13. Pulau Raman	1.347.060.764,00	1.277.060.764,00	285.936,04	285.936,04	1.347.346.700,04	1.277.346.700,04	1.347.506.144,04	1.274.055.096,00	(159.444,00)	3.291.604,04
		14. Pasar Muara Siau	1.186.496.913,00	1.116.496.913,00	136.565,76	136.565,76	1.186.633.478,76	1.116.633.478,76	1.186.633.478,76	1.116.633.478,76	0,00	0,00
		15. Sepantai Renah	1.139.095.975,00	1.069.095.975,00	59.223,00	59.223,00	1.139.155.198,00	1.069.155.198,00	1.139.155.198,00	1.067.242.805,00	0,00	1.912.393,00
		16. Sungai Ulas	1.232.104.311,00	1.162.104.311,00	258.525,00	258.525,00	1.232.362.836,00	1.162.362.836,00	1.247.562.836,00	1.111.628.096,00	(15.200.000,00)	50.734.740,00
		17. Rantau Bayur	1.233.012.525,00	1.163.012.525,00	120.687,92	120.687,92	1.233.133.212,92	1.163.133.212,92	1.353.136.539,77	1.283.133.896,00	(120.003.326,85)	(120.000.683,08)
4.	Sungai Manau	1. Sungai Pinang	1.212.310.871,00	1.142.310.871,00	70.742,24	70.742,24	1.212.381.613,24	1.142.381.613,24	1.236.151.613,24	1.164.140.358,24	(23.770.000,00)	(21.758.745,00)
		2. Tiangko	1.324.993.072,00	1.254.993.072,00	169.270,53	169.270,53	1.325.162.342,53	1.255.162.342,53	1.350.162.342,53	1.279.842.342,53	(25.000.000,00)	(24.680.000,00)
		3. Palipan	1.260.601.219,00	1.190.601.219,00	37.465,36	37.465,36	1.260.638.684,36	1.190.638.684,36	1.271.680.474,36	1.188.140.435,36	(11.041.790,00)	2.498.249,00
		4. Seringat	1.260.606.062,00	1.190.606.062,00	300.988,00	300.988,00	1.260.907.050,00	1.190.907.050,00	1.276.157.761,00	982.410.504,00	(15.250.711,00)	208.496.546,00
		5. Durian Lecah	1.302.802.699,00	1.232.802.699,00	69.706,27	69.706,27	1.302.872.405,27	1.232.872.405,27	1.307.872.405,27	1.237.802.699,00	(5.000.000,00)	(4.930.293,73)
		6. Bukit Batu	1.221.200.464,00	1.151.200.464,00	30.193,24	30.193,24	1.221.230.657,24	1.151.230.657,24	1.232.909.747,24	1.161.344.357,24	(11.679.090,00)	(10.113.700,00)
		7. Sungai Nilau	1.457.105.739,00	1.387.105.739,00	309.383,00	309.383,00	1.457.415.122,00	1.387.415.122,00	1.467.314.383,00	1.397.314.383,00	(9.899.261,00)	(9.899.261,00)
		8. Sungai Manau	1.481.950.019,00	1.411.950.019,00	174.657,96	174.657,96	1.482.124.676,96	1.412.124.676,96	1.492.422.672,96	1.421.224.177,96	(10.297.996,00)	(9.099.501,00)
		9. Benteng	1.160.566.810,00	1.090.566.810,00	242.719,95	242.719,95	1.160.809.529,95	1.090.809.529,95	1.157.668.268,95	1.086.650.549,00	3.141.261,00	4.158.980,95
		10. Gelanggang	1.195.174.755,00	1.125.174.755,00	300.000,00	300.000,00	1.195.474.755,00	1.125.474.755,00	1.215.418.816,00	1.142.438.816,00	(19.944.061,00)	(16.964.061,00)
5.	Tabir	1. Kandang	1.651.600.245,00	1.581.600.245,00	300.564,00	300.564,00	1.651.900.809,00	1.581.900.809,00	1.646.900.809,00	1.576.600.245,00	5.000.000,00	5.300.564,00
		2. Koto Rayo	1.429.478.359,00	1.359.478.359,00	307.476,00	307.476,00	1.429.785.835,00	1.359.785.835,00	1.493.775.515,00	1.423.356.515,00	(63.989.680,00)	(63.570.680,00)
		3. Tanjung Ilir	1.366.911.925,00	1.296.911.925,00	67.182,00	67.182,00	1.366.979.107,00	1.296.979.107,00	1.413.504.107,00	1.338.436.925,00	(46.525.000,00)	(41.457.818,00)
		4. Beluran Panjang	1.477.528.482,00	1.407.528.482,00	108.630,00	108.630,00	1.477.637.112,00	1.407.637.112,00	1.472.637.112,00	1.401.868.482,00	5.000.000,00	5.768.630,00
		5. Seling	1.431.732.528,00	1.361.732.528,00	5.815.345,12	5.815.345,12	1.437.547.873,12	1.367.547.873,12	1.442.587.873,12	1.344.534.403,00	(5.040.000,00)	23.013.470,12
		6. Lubuk Napal	1.250.349.829,00	1.180.349.829,00	22.080,00	22.080,00	1.250.371.909,00	1.180.371.909,00	1.245.371.909,00	1.175.349.829,00	5.000.000,00	5.022.080,00

**IKHTISAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa
TAHUN ANGGARAN 2024**

(dalam rupiah)

No.	Kecamatan	Desa	Penerimaan Pembiayaan		Pengeluaran Pembiayaan		Pembiayaan Netto	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	14	15	16	17	18=14-16	19=15-17
1.	Jangkat	1. Renah Kemumu	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
		2. Tanjung Kasri	10.320.070,00	10.320.070,00	0,00	0,00	10.320.070,00	10.320.070,00
		3. Lubuk Mentilin	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		4. Rantau Kermas	6.887.564,17	6.887.564,17	0,00	0,00	6.887.564,17	6.887.564,17
		5. Renah Alai	409,00	409,00	0,00	0,00	409,00	409,00
		6. Pulau Tengah	2.625.320,00	2.625.320,00	0,00	0,00	2.625.320,00	2.625.320,00
		7. Lubuk Pungguk	295,15	295,15	0,00	0,00	295,15	295,15
		8. Koto Renah	1.444.237,00	1.444.237,00	0,00	0,00	1.444.237,00	1.444.237,00
		9. Muara Madras	228.408,00	228.408,00	0,00	0,00	228.408,00	228.408,00
		10. Renah Pelan	580.528,00	580.528,00	0,00	0,00	580.528,00	580.528,00
		11. Koto Rawang	31.023,25	31.023,25	0,00	0,00	31.023,25	31.023,25
2.	Bangko	1. Kungkai	43.737.681,00	43.737.681,00	0,00	0,00	43.737.681,00	43.737.681,00
		2. Mudo	49.342.590,00	49.342.590,00	0,00	0,00	49.342.590,00	49.342.590,00
		3. Langling	43.997.456,30	43.997.456,30	25.659.500,00	25.659.500,00	18.337.956,30	18.337.956,30
		4. Sungai Kapas	19.483.952,00	19.483.952,00	26.069.438,00	26.069.438,00	(6.585.486,00)	(6.585.486,00)
3.	Muara Siau	1. Durian Rambun	13.126.744,74	13.126.744,74	0,00	0,00	13.126.744,74	13.126.744,74
		2. Lubuk Bira	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		3. Lubuk Beringin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Rantau Macang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		5. Peradun Temeras	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
		6. Teluk Sikumbang	38.006.960,00	38.006.960,00	0,00	0,00	38.006.960,00	38.006.960,00
		7. Muara Siau	47.676.791,00	47.676.791,00	0,00	0,00	47.676.791,00	47.676.791,00
		8. Tiaro	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
		9. Air Lago	7.000.008,06	7.000.008,06	0,00	0,00	7.000.008,06	7.000.008,06
		10. Badak Tekurung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11. Rantau Bidaro	6.163.136,00	6.163.136,00	0,00	0,00	6.163.136,00	6.163.136,00
		12. Rantau Panjang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
		13. Pulau Raman	159.444,00	159.444,00	0,00	0,00	159.444,00	159.444,00
		14. Pasar Muara Siau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15. Sepantai Renah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16. Sungai Ulas	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00
		17. Rantau Bayur	120.006.509,85	120.006.509,85	0,00	0,00	120.006.509,85	120.006.509,85
4.	Sungai Manau	1. Sungai Pinang	23.770.000,00	23.770.000,00	0,00	0,00	23.770.000,00	23.770.000,00
		2. Tiango	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
		3. Palipan	11.041.790,00	11.041.790,00	0,00	0,00	11.041.790,00	11.041.790,00
		4. Seringat	15.340.711,00	15.340.711,00	0,00	0,00	15.340.711,00	15.340.711,00
		5. Durian Lecah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		6. Bukit Batu	11.679.090,00	11.679.090,00	0,00	0,00	11.679.090,00	11.679.090,00
		7. Sungai Nilau	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00
		8. Sungai Manau	10.297.996,00	10.297.996,00	0,00	0,00	10.297.996,00	10.297.996,00
		9. Benteng	541.761,00	541.761,00	0,00	0,00	541.761,00	541.761,00
		10. Gelanggang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.	Tabir	1. Kandang	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00
		2. Koto Rayo	63.989.680,00	63.989.680,00	0,00	0,00	63.989.680,00	63.989.680,00
		3. Tanjung Ilir	46.525.000,00	46.525.000,00	0,00	0,00	46.525.000,00	46.525.000,00
		4. Beluran Panjang	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)
		5. Seling	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	5.040.000,00	5.040.000,00
		6. Lubuk Napal	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)

No.	Kecamatan	D e s a	Pendapatan Transfer		Pendapatan Asli Desa/ Pendapatan Lainnya		Total pendapatan Desa		Belanja		Surplus / (Defisit)	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8=4+6	9=5+7	10	11	12=9-10	13=9-11
6.	Pamenang	1. Jelatang	1.412.989.866,00	1.342.989.866,00	21.063.199,69	21.063.199,69	1.434.053.065,69	1.364.053.065,69	1.435.852.499,70	1.363.659.300,00	(1.799.434,01)	393.765,69
		2. Tanjung Gedang	1.267.015.032,00	1.197.015.032,00	478.000,00	478.000,00	1.267.493.032,00	1.197.493.032,00	1.472.245.687,20	1.398.716.001,40	(204.752.655,20)	(201.222.969,40)
		3. Empang Benao	1.328.902.852,00	1.258.902.852,00	5.300.000,00	5.300.000,00	1.334.202.852,00	1.264.202.852,00	1.380.998.833,46	1.280.104.807,00	(46.795.981,46)	(15.901.955,00)
		4. Rejo Sari	1.312.761.969,00	1.242.761.969,00	2.071.000,00	2.071.000,00	1.314.832.969,00	1.244.832.969,00	1.299.060.148,71	1.215.999.895,00	15.772.820,29	28.833.074,00
		5. Keroya	1.313.239.171,00	1.243.239.171,00	286.794,59	286.794,59	1.313.525.965,59	1.243.525.965,59	1.331.356.147,59	1.260.254.043,09	(17.830.182,00)	(16.728.077,50)
		6. Muara Belengo	1.353.928.196,00	1.283.928.196,00	163.207,27	163.207,27	1.354.091.403,27	1.284.091.403,27	1.361.130.940,19	1.285.444.380,00	(7.039.536,92)	(1.352.976,73)
		7. Karang Berahi	1.412.970.240,00	1.342.970.240,00	406.494,02	406.494,02	1.413.376.734,02	1.343.376.734,02	1.414.783.228,04	1.342.865.089,00	(1.406.494,02)	511.645,02
		8. Pauh Menang	1.477.860.518,00	1.407.860.518,00	54.181.901,14	181.901,14	1.532.042.419,14	1.408.042.419,14	1.427.006.701,46	1.278.021.817,03	105.035.717,68	130.020.602,11
		9. Pematang Kancil	1.128.200.143,00	1.058.200.143,00	200.000,00	200.000,00	1.128.400.143,00	1.058.400.143,00	1.120.961.671,27	976.889.604,00	7.438.471,73	81.510.539,00
		10. Tanah Abang	1.470.641.830,00	1.400.641.830,00	16.323.768,00	16.323.768,00	1.486.965.598,00	1.416.965.598,00	1.505.183.079,99	1.418.633.712,00	(18.217.481,99)	(1.668.114,00)
		11. Sialang	1.381.305.763,00	1.311.305.763,00	300.000,00	300.000,00	1.381.605.763,00	1.311.605.763,00	1.379.593.235,91	1.275.809.022,00	2.012.527,09	35.796.741,00
		12. Sungai Udang	1.490.315.210,00	1.420.315.210,00	65.322.000,00	65.322.000,00	1.555.637.210,00	1.485.637.210,00	1.538.805.403,63	1.460.175.664,00	16.831.806,37	25.461.546,00
		13. Pelakar Jaya	1.372.248.738,00	1.302.248.738,00	45.335.621,31	45.335.621,31	1.417.584.359,31	1.347.584.359,31	1.422.088.347,10	1.348.556.228,00	(4.503.987,79)	(971.868,69)
7.	Tabir Ulu	1. Muara Jernih	1.778.409.477,00	1.708.409.477,00	106.540,00	106.540,00	1.778.516.017,00	1.708.516.017,00	1.984.480.473,00	1.577.990.096,00	(205.964.456,00)	130.525.921,00
		2. Kapuk	1.604.463.509,00	1.534.463.509,00	54.974,43	54.974,43	1.604.518.483,43	1.534.518.483,43	1.604.518.483,43	1.529.462.339,00	0,00	5.056.144,43
		3. Pulau Aro	1.432.410.097,00	1.362.410.097,00	225.753,21	225.753,21	1.432.635.850,21	1.362.635.850,21	1.432.835.928,64	1.353.540.175,43	(200.078,43)	9.095.674,78
		4. Rantau Ngarau	1.373.120.920,00	1.303.120.920,00	420.770,00	420.770,00	1.373.541.690,00	1.303.541.690,00	1.393.541.690,00	1.317.942.971,00	(20.000.000,00)	(14.401.281,00)
		5. Medan Baru	1.058.598.289,00	988.598.289,00	109.752,00	109.752,00	1.058.708.041,00	988.708.041,00	1.058.728.944,00	988.601.104,00	(20.903,00)	106.937,00
		6. Muara Seketuk	1.263.800.897,00	1.193.800.897,00	473.108,00	473.108,00	1.264.274.005,00	1.194.274.005,00	1.317.038.601,00	1.217.956.528,00	(52.764.596,00)	(23.682.523,00)
8.	Tabir Selatan	1. Sungai Sahut	1.789.887.905,00	1.719.887.905,00	20.537.197,04	19.437.197,04	1.810.425.102,04	1.739.325.102,04	1.792.846.004,33	1.689.706.704,00	17.579.097,71	49.618.398,04
		2. Bungo Antoi	1.898.325.073,00	1.828.325.073,00	49.263.383,72	49.263.383,72	1.947.588.456,72	1.877.588.456,72	1.825.025.956,72	1.755.025.956,72	122.562.500,00	122.562.500,00
		3. Muara Delang	1.895.668.894,00	1.825.668.894,00	36.056.797,43	36.056.797,43	1.931.725.691,43	1.861.725.691,43	1.974.614.545,45	1.883.481.338,00	(42.888.854,02)	(21.755.646,57)
		4. Sinar Gading	1.511.418.308,00	1.441.418.308,00	10.560.822,82	10.560.822,82	1.521.979.130,82	1.451.979.130,82	1.383.236.109,74	1.305.375.051,74	(138.743.021,08)	146.604.079,08
		5. Bungo Tanjung	1.397.623.005,00	1.327.623.005,00	31.181.236,85	31.181.236,85	1.428.804.241,85	1.358.804.241,85	1.434.033.287,96	1.356.938.119,00	(5.229.046,11)	1.866.122,85
		6. Rawa Jaya	1.748.228.529,00	1.678.228.529,00	20.649.619,84	20.649.619,84	1.768.878.148,84	1.698.878.148,84	1.782.535.938,84	1.707.577.201,00	(13.657.790,00)	(8.699.052,16)
		7. Gading Jaya	1.339.739.171,00	1.269.739.171,00	13.720.125,15	13.720.125,15	1.353.459.296,15	1.283.459.296,15	1.280.020.433,19	1.194.596.704,00	73.438.862,96	88.862.592,15
		8. Mekar Jaya	1.197.529.777,00	1.127.529.777,00	29.135.697,39	29.135.697,39	1.226.665.474,39	1.156.665.474,39	1.211.575.874,39	1.141.402.607,00	15.089.600,00	15.262.867,39
9.	Lembah Masurai	1. Nilo Dingin	1.196.975.547,00	1.126.975.547,00	114.299,62	114.299,62	1.197.089.846,62	1.127.089.846,62	1.097.124.299,62	1.023.974.299,62	99.965.547,00	103.115.547,00
		2. Tanjung Berugo	1.162.330.944,00	1.092.330.944,00	185.252,00	185.252,00	1.162.516.196,00	1.092.516.196,00	1.162.360.252,00	1.091.925.004,00	155.944,00	591.192,00
		3. Tuo	1.329.612.353,00	1.259.612.353,00	67.430,00	67.430,00	1.329.679.783,00	1.259.679.783,00	1.329.679.783,00	1.259.679.783,00	0,00	0,00
		4. Koto Rami	1.298.936.364,00	1.228.936.364,00	365.046,66	365.046,66	1.299.301.410,66	1.229.301.410,66	1.299.820.336,00	1.229.820.000,00	(518.925,34)	(518.589,34)
		5. Rancan	1.283.666.266,00	1.213.666.266,00	406.753,00	406.753,00	1.284.073.019,00	1.214.073.019,00	1.284.072.686,00	1.212.135.933,00	333,00	1.937.086,00
		6. Pasar Masurai	1.055.855.134,00	985.855.134,00	1.229.861,98	1.229.861,98	1.057.084.995,98	987.084.995,98	1.057.974.021,00	985.987.659,12	(889.025,02)	1.097.336,86
		7. Rantau Jering	1.514.648.324,00	1.444.648.324,00	201.874,19	201.874,19	1.514.850.198,19	1.444.850.198,19	1.514.849.460,19	1.430.464.000,00	738,00	14.386.198,19
		8. Tanjung Dalam	1.325.496.648,00	1.255.496.648,00	1.990.203,55	1.990.203,55	1.327.486.851,55	1.257.486.851,55	1.326.293.053,55	1.255.410.850,00	1.193.798,00	2.076.001,55
		9. Muara Pangli	1.246.810.596,00	1.176.810.596,00	227.489,00	227.489,00	1.247.038.085,00	1.177.038.085,00	1.249.054.709,00	1.171.184.689,00	(2.016.624,00)	5.853.396,00
		10. Sungai Lalang	1.143.057.581,00	1.073.057.581,00	109.888,00	109.888,00	1.143.167.469,00	1.073.167.469,00	1.149.077.900,00	1.071.794.000,00	(5.910.431,00)	1.373.469,00
		11. Talang Asal	1.469.801.763,00	1.399.801.763,00	601.212,97	601.212,97	1.470.402.975,97	1.400.402.975,97	1.470.402.592,97	1.390.401.769,97	383,00	10.001.206,00
		12. Muara Kelukup	1.299.364.913,00	1.229.364.913,00	113.667,49	113.667,49	1.299.478.580,49	1.229.478.580,49	1.317.477.667,49	1.229.244.000,00	(17.999.087,00)	234.580,49
		13. Muara Langayo	1.148.475.670,00	1.078.475.670,00	223.157,19	223.157,19	1.148.698.827,19	1.078.698.827,19	1.148.697.157,19	1.078.154.000,00	1.670,00	544.827,19
		14. Talang Paruh	1.271.798.543,00	1.201.798.543,00	309.497,28	309.497,28	1.272.108.040,28	1.202.108.040,28	1.253.157.040,28	1.177.395.283,00	18.951.000,00	24.712.757,28
		15. Durian Mukut	1.245.946.215,00	1.175.946.215,00	311.300,00	311.300,00	1.246.257.515,00	1.176.257.515,00	1.226.257.515,00	1.155.946.215,00	20.000.000,00	20.311.300,00
10.	Bangko Barat	1. Pulau Rengas	1.409.196.085,00	1.339.196.085,00	18.287.188,77	18.287.188,77	1.427.483.273,77	1.357.483.273,77	1.445.997.760,10	1.351.130.006,20	(18.514.486,33)	6.353.267,57
		2. Bliuku Tanjung	1.322.085.314,00	1.252.085.314,00	0,00	0,00	1.322.085.314,00	1.252.085.314,00	1.240.543.765,00	1.154.541.549,00	0,00	11.541.549,00
		3. Bedeng Rejo	1.119.120.924,00	1.049.120.924,00	137.557,00	137.557,00	1.119.258.481,00	1.049.258.481,00	1.119.258.481,00	1.046.724.907,00	0,00	2.533.574,00
		4. Sungai Putih	1.503.139.834,00	1.433.139.834,00	10.438.684,11	10.438.684,11	1.513.578.518,11	1.443.578.518,11	1.513.781.427,11	1.435.838.030,00	(202.909,00)	7.740.488,11
		5. Bukit Beringin	1.449.828.370,00	1.379.828.370,00	1.576.245,12	1.576.245,12	1.451.404.615,12	1.381.404.615,12	1.471.330.839,12	1.370.900.839,12	(19.926.224,00)	10.503.776,00
		6. Pulau Rengas Ulu	1.292.584.817,00	1.222.584.817,00	247.209,98	247.209,98	1.292.832.026,98	1.222.832.026,98	1.311.023.950,98	1.229.567.341,00	(18.191.924,00)	(6.735.314,02)
11.	Nalo Tantan	1. Sungai Ulak	1.811.626.958,00	1.741.626.958,00	478.747,34	478.747,34	1.812.105.705,34	1.742.105.705,34	1.843.105.705,34	1.771.993.240,00	(31.000.000,00)	(29.887.534,66)
		2. Aur Berduri	1.266.921.923,00	1.196.921.923,00	69.366,45	69.366,45	1.266.991.289,45	1.196.991.289,45	1.266.996.190,62	1.192.811.310,31	(4.901,17)	4.179.979,14
		3. Telun	1.165.088.713,00	1.095.088.713,00	213.689,00	213.689,00	1.165.302.402,00	1.095.302.402,00	1.254.306.740,00	1.121.181.456,00	(89.004.338,00)	(25.879.054,00)
		4. Nalo Gedang	1.356.104.232,00	1.286.104.232,00	200.000,00	200.000,00	1.356.304.232,00	1.286.304.232,00	1.359.074.232,00	1.289.074.232,00	(2.770.000,00)	(2.770.000,00)
		5. Baru Nalo	1.349.346.052,00	1.279.346.052,00	200.000,00	200.000,00	1.349.546.052,00	1.279.546.052,00	1.349.546.052,00	1.279.546.052,00	0,00	1.052,00
		6. Mentawak	1.218.135.010,00	1.148.135.010,00	400.000,00	400.000,00	1.218.535.010,00	1.148.535.010,00	1.218.535.010,00	1.148.535.010,00	0,00	0,00
		7. Danau	1.431.457.814,00	1.361.457.814,00	157.314,00	157.314,00	1.431.615.128,00	1.361.615.128,00	1.433.310.128,00	1.363.310.128,00	(1.695.000,00)	(1.695.000,00)

No.	Kecamatan	D e s a	Penerimaan Pembiayaan		Pengeluaran Pembiayaan		Pembiayaan Netto	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	14	15	16	17	18=14-16	19=15-17
6.	Pamenang	1. Jelatang	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
		2. Tanjung Gedang	204.752.655,20	204.752.655,20	0,00	0,00	204.752.655,20	204.752.655,20
		3. Empang Benao	46.795.981,46	46.795.981,46	0,00	0,00	46.795.981,46	46.795.981,46
		4. Rejo Sari	4.227.179,71	4.227.179,71	20.000.000,00	20.000.000,00	(15.772.820,29)	(15.772.820,29)
		5. Keroya	17.830.182,00	17.830.182,00	0,00	0,00	17.830.182,00	17.830.182,00
		6. Muara Belengo	7.039.535,92	7.039.535,92	0,00	0,00	7.039.535,92	7.039.535,92
		7. Karang Berahi	1.406.494,02	1.406.494,02	0,00	0,00	1.406.494,02	1.406.494,02
		8. Pauh Menang	24.964.282,32	24.964.282,32	130.000.000,00	130.000.000,00	(105.035.717,68)	(105.035.717,68)
		9. Pematang Kancil	2.561.528,27	2.561.528,27	10.000.000,00	10.000.000,00	(7.438.471,73)	(7.438.471,73)
		10. Tanah Abang	18.217.481,99	18.217.481,99	0,00	0,00	18.217.481,99	18.217.481,99
		11. Sialang	47.987.472,91	47.987.472,91	50.000.000,00	50.000.000,00	(2.012.527,09)	(2.012.527,09)
		12. Sungai Udang	3.168.193,63	3.168.193,63	20.000.000,00	20.000.000,00	(16.831.806,37)	(16.831.806,37)
		13. Pelakar Jaya	4.503.987,79	4.503.987,79	0,00	0,00	4.503.987,79	4.503.987,79
7.	Tabir Ulu	1. Muara Jernih	205.973.456,00	205.973.456,00	0,00	0,00	205.973.456,00	205.973.456,00
		2. Kapuk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Pulau Aro	5.200.078,43	5.200.078,43	5.000.000,00	0,00	200.078,43	5.200.078,43
		4. Rantau Ngarau	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		5. Medan Baru	20.903,00	20.903,00	0,00	0,00	20.903,00	20.903,00
		6. Muara Seketuk	52.764.596,00	52.764.596,00	0,00	0,00	52.764.596,00	52.764.596,00
8.	Tabir Selatan	1. Sungai Sahut	82.420.902,29	82.420.902,29	100.000.000,00	100.000.000,00	(17.579.097,71)	(17.579.097,71)
		2. Bungo Antoi	7.437.500,00	7.437.500,00	130.000.000,00	130.000.000,00	(122.562.500,00)	(122.562.500,00)
		3. Muara Delang	42.887.854,02	42.887.854,02	0,00	0,00	42.887.854,02	42.887.854,02
		4. Sinar Gading	1.256.978,92	1.256.978,92	140.000.000,00	140.000.000,00	(138.743.021,08)	(138.743.021,08)
		5. Bungo Tanjung	5.229.046,11	5.229.046,11	0,00	0,00	5.229.046,11	5.229.046,11
		6. Rawa Jaya	13.657.790,00	13.657.790,00	0,00	0,00	13.657.790,00	13.657.790,00
		7. Gading Jaya	52.555.449,32	52.555.449,32	125.994.312,28	125.994.000,00	(73.438.862,96)	(73.438.550,68)
		8. Mekar Jaya	74.910.400,00	74.910.400,00	90.000.000,00	90.000.000,00	(15.089.600,00)	(15.089.600,00)
9.	Lembah Masurai	1. Nilo Dingin	37.387,00	37.387,00	100.000.000,00	100.000.000,00	(99.962.613,00)	(99.962.613,00)
		2. Tanjung Berugo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Tuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Koto Rami	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
		5. Rancan	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		6. Pasar Masurai	892.145,00	892.145,00	0,00	0,00	892.145,00	892.145,00
		7. Rantau Jering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8. Tanjung Dalam	2.006,00	2.006,00	0,00	0,00	2.006,00	2.006,00
		9. Muara Pangli	2.888.021,00	2.888.021,00	0,00	0,00	2.888.021,00	2.888.021,00
		10. Sungai Lalang	5.912.129,00	5.912.129,00	0,00	0,00	5.912.129,00	5.912.129,00
		11. Talang Asal	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00
		12. Muara Kelukup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13. Muara Langayo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14. Talang Paruh	0,00	0,00	18.951.000,00	18.951.000,00	(18.951.000,00)	(18.951.000,00)
		15. Durian Mukut	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(20.000.000,00)
10.	Bangko Barat	1. Pulau Rengas	18.514.486,33	18.514.486,33	0,00	0,00	18.514.486,33	18.514.486,33
		2. Biuku Tanjung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Bedeng Rejo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Sungai Putih	202.909,00	202.909,00	0,00	0,00	202.909,00	202.909,00
		5. Bukit Beringin	19.926.224,00	19.926.224,00	0,00	0,00	19.926.224,00	19.926.224,00
		6. Pulau Rengas Ulu	18.191.924,00	18.191.924,00	0,00	0,00	18.191.924,00	18.191.924,00
11.	Nalo Tantan	1. Sungai Ulak	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00
		2. Aur Berduri	4.901,17	4.901,17	0,00	0,00	4.901,17	4.901,17
		3. Telun	89.004.338,00	89.004.338,00	0,00	0,00	89.004.338,00	89.004.338,00
		4. Nalo Gedang	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00	2.770.000,00
		5. Baru Nalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Mentawak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Danau	1.695.000,00	1.695.000,00	0,00	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00

No.	Kecamatan	D e s a	Pendapatan Transfer		Pendapatan Asli Desa/ Pendapatan Lainnya		Total pendapatan Desa		Belanja		Surplus/(Defisit)	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8=4+6	9=5+7	10	11	12=8-10	13=9-11
12.	Batang Masumai	1. Lubuk Gaung	1.368.713.797,00	1.298.713.797,00	2.477.714,49	2.477.714,49	1.371.191.511,49	1.301.191.511,49	1.385.204.970,49	1.309.817.993,00	(14.013.459,00)	(8.626.481,51)
		2. Salam Buku	1.771.850.101,00	1.701.850.101,00	381.532,55	381.532,55	1.772.231.633,55	1.702.231.633,55	1.772.231.633,55	1.702.231.633,55	0,00	0,00
		3. Pulau Baru	1.203.405.614,00	1.133.405.614,00	200.000,00	200.000,00	1.203.605.614,00	1.133.605.614,00	1.202.059.842,00	543.368.544,00	1.545.772,00	590.237.070,00
		4. Nibung	1.131.420.513,00	1.061.420.513,00	71.978,91	71.978,91	1.131.492.491,91	1.061.492.491,91	1.177.024.432,91	1.057.243.095,91	(45.531.941,00)	4.249.396,00
		5. Titian Teras	1.296.744.850,00	1.226.744.850,00	114.255,45	114.255,45	1.296.859.105,45	1.226.859.105,45	1.332.064.405,45	1.261.350.485,00	(35.205.300,00)	(34.491.379,55)
		6. Kederasan Panjang	1.121.893.563,00	1.051.893.563,00	130.902,11	130.902,11	1.122.024.465,11	1.052.024.465,11	1.123.673.346,10	1.053.673.346,10	(1.648.880,99)	(1.648.880,99)
		7. Rantau Alai	1.348.385.815,00	1.278.385.815,00	159.679,90	159.679,90	1.348.545.494,90	1.278.545.494,90	1.348.590.642,90	1.278.430.963,00	(45.148,00)	114.531,90
		8. Tambang Besi	1.109.164.218,00	1.039.164.218,00	25.051.123,00	25.051.123,00	1.134.215.341,00	1.064.215.341,00	1.141.719.297,00	1.062.718.974,00	(7.503.956,00)	1.496.367,00
		9. Pelangki	1.212.990.028,00	1.142.990.028,00	114.858,72	114.858,72	1.213.104.886,72	1.143.104.886,72	1.188.304.886,72	1.118.190.028,00	24.800.000,00	24.914.858,72
		10. Pulau Layang	1.187.576.958,00	1.117.576.958,00	83.206,33	83.206,33	1.187.660.164,33	1.117.660.164,33	1.188.085.131,99	1.116.618.890,00	(424.967,66)	1.041.274,33
13.	Pamenang Barat	1. Tanjung Lamin	1.479.369.502,00	1.409.369.502,00	60.882,20	60.882,20	1.479.430.384,20	1.409.430.384,20	1.181.500.384,20	1.111.395.429,00	297.930.000,00	298.034.955,20
		2. Limbur Merangin	1.440.987.820,00	1.370.987.820,00	88.935,49	88.935,49	1.441.076.755,49	1.371.076.755,49	1.444.876.755,49	1.348.387.820,00	(3.800.000,00)	22.688.935,49
		3. Karang Anyar	1.335.025.537,00	1.265.025.537,00	87.482,01	87.482,01	1.335.113.019,01	1.265.113.019,01	1.255.113.019,01	1.179.768.400,00	80.000.000,00	85.344.619,01
		4. Pinang Merah	1.391.870.195,00	1.321.870.195,00	303.002,32	303.002,32	1.392.173.197,32	1.322.173.197,32	1.392.176.097,80	1.297.469.382,32	(2.900,48)	24.703.815,00
		5. Sp. Limbur Merangin	1.322.414.700,00	1.252.414.700,00	106.176,00	106.176,00	1.322.520.876,00	1.252.520.876,00	1.334.290.876,00	1.181.640.876,00	(11.770.000,00)	70.880.000,00
		6. Mampun Baru	1.288.697.162,00	1.218.697.162,00	24.083.000,00	24.083.000,00	1.312.780.162,00	1.242.780.162,00	1.319.058.456,00	1.241.233.456,00	(6.278.294,00)	1.546.706,00
		7. Papit	1.195.893.890,00	1.125.893.890,00	200.000,00	200.000,00	1.196.093.890,00	1.126.093.890,00	1.196.632.054,00	1.125.061.862,00	(538.164,00)	1.032.028,00
		8. Pulau Tujuh	1.596.769.944,00	1.526.769.944,00	45.126.859,88	45.126.859,88	1.641.896.803,88	1.571.896.803,88	1.658.489.243,88	1.567.341.400,00	(16.592.440,00)	4.555.403,88
14.	Tabir Ilir	1. Rantau Limau Manis	1.591.444.866,00	1.521.444.866,00	194.594,33	194.594,33	1.591.639.460,33	1.521.639.460,33	1.594.889.054,28	1.514.004.860,00	(3.249.593,95)	7.634.600,33
		2. Uлак Makam	1.277.434.414,00	1.207.434.414,00	60.105,29	60.105,29	1.277.494.519,29	1.207.494.519,29	1.277.519.494,29	1.192.459.389,00	(24.975,00)	15.035.130,29
		3. Air Batu	1.270.404.524,00	1.200.404.524,00	9.393.499,05	9.393.499,05	1.279.798.023,05	1.209.798.023,05	1.280.015.646,37	1.190.402.928,40	(217.623,32)	19.395.094,65
		4. Rejo Sari	1.125.886.224,00	1.055.886.224,00	5.327.582,94	5.327.582,94	1.131.213.806,94	1.061.213.806,94	1.131.483.204,94	1.061.420.622,00	(269.398,00)	(206.815,06)
		5. Kota Raja	1.150.721.239,00	1.080.721.239,00	300.000,00	300.000,00	1.151.021.239,00	1.081.021.239,00	1.287.176.239,00	1.083.831.136,00	(136.155.000,00)	(2.809.897,00)
		6. Tunggul Bulin	1.286.349.737,00	1.216.349.737,00	300.000,00	300.000,00	1.286.649.737,00	1.216.649.737,00	1.322.589.737,00	1.228.589.737,00	(35.940.000,00)	(11.940.000,00)
		7. Mekar Limau Manis	1.346.882.328,00	1.276.882.328,00	194.088,34	194.088,34	1.347.076.416,34	1.277.076.416,34	1.347.076.416,34	1.262.547.900,00	0,00	14.528.516,34
15.	Tabir Timur	1. Sungai Limau	1.660.285.028,00	1.590.285.028,00	289.635,92	289.635,92	1.660.574.663,92	1.590.574.663,92	1.661.699.155,92	1.591.427.801,32	(1.124.492,00)	(853.137,40)
		2. Sungai Bulian	1.536.797.094,00	1.466.797.094,00	60.928.918,83	60.928.918,83	1.597.726.012,83	1.527.726.012,83	1.601.223.110,83	1.522.463.556,00	(3.497.098,00)	5.262.456,83
		3. Seri Sembilan	1.260.671.468,00	1.190.671.468,00	18.912.000,00	18.912.000,00	1.279.583.468,00	1.209.583.468,00	1.441.887.369,78	1.018.494.881,78	(162.303.901,78)	191.088.586,22
		4. Bukit Subur	1.364.163.899,00	1.294.163.899,00	7.200.359,60	7.200.359,60	1.371.364.258,60	1.301.364.258,60	1.376.559.734,05	1.306.023.904,80	(5.195.475,45)	(4.659.646,20)
16.	Renah Pembarap	1. Muara Panco Barat	1.428.094.933,00	1.358.094.933,00	817.912,50	817.912,50	1.428.912.845,50	1.358.912.845,50	1.428.912.845,50	1.346.015.071,50	0,00	12.897.774,00
		2. Talang Segeqah	1.261.502.858,00	1.191.502.858,00	244.019,28	244.019,28	1.261.746.877,28	1.191.746.877,28	1.331.989.472,28	1.186.621.213,00	(70.242.595,00)	5.125.664,28
		3. Durian Betakuk	1.319.832.814,00	1.249.832.814,00	92.397,00	92.397,00	1.319.925.211,00	1.249.925.211,00	1.372.467.570,00	1.249.802.814,00	(52.542.359,00)	122.397,00
		4. Muara Bantan	1.406.700.182,00	1.336.700.182,00	145.048,69	145.048,69	1.406.845.230,69	1.336.845.230,69	1.406.845.230,69	1.335.720.182,00	0,00	1.125.048,69
		5. Parit Ujung Tanjung	1.577.458.077,00	1.507.458.077,00	300.000,00	300.000,00	1.577.758.077,00	1.507.758.077,00	1.607.758.077,00	1.454.778.077,00	(30.000.000,00)	52.980.000,00
		6. Guguk	1.474.174.336,00	1.404.174.336,00	259.426,85	259.426,85	1.474.433.762,85	1.404.433.762,85	1.474.433.762,85	1.391.174.471,85	0,00	13.259.291,00
		7. Markeh	1.319.300.383,00	1.249.300.383,00	300.882,00	300.882,00	1.319.601.265,00	1.249.601.265,00	1.319.601.265,00	1.249.287.000,00	0,00	314.265,00
		8. Air Batu	1.701.221.064,00	1.631.221.064,00	300.000,00	300.000,00	1.701.521.064,00	1.631.521.064,00	1.751.521.064,00	1.523.052.616,00	(50.000.000,00)	108.468.448,00
		9. Marus Jaya	1.165.197.719,00	1.095.197.719,00	522.787,04	522.787,04	1.165.720.506,04	1.095.720.506,04	1.165.720.506,04	1.093.739.911,00	0,00	1.980.595,04
		10. Renah Medan	1.226.734.653,00	1.156.734.653,00	247.122,35	247.122,35	1.226.981.775,35	1.156.981.775,35	1.225.498.263,35	1.155.478.263,35	1.483.512,00	1.503.512,00
		11. Simpang Parit	1.134.598.957,00	1.064.598.957,00	140.637,54	140.637,54	1.134.739.594,54	1.064.739.594,54	1.134.739.594,54	1.042.280.250,00	0,00	22.459.344,54
		12. Muara Panco Timur	1.225.055.782,00	1.155.055.782,00	78.318,62	78.318,62	1.225.134.100,62	1.155.134.100,62	1.254.982.726,62	1.164.874.408,00	(29.848.626,00)	(9.740.307,38)
17.	Pangkalan Jambu	1. Baru Pkl. Jambu	1.212.957.388,00	1.142.957.388,00	197.416,74	197.416,74	1.213.154.804,74	1.143.154.804,74	1.213.154.633,74	1.142.956.500,00	171,00	198.304,74
		2. Bukit Perentak	1.338.043.481,00	1.268.043.481,00	300.000,00	300.000,00	1.338.343.481,00	1.268.343.481,00	1.338.368.450,00	1.268.368.450,00	(24.969,00)	(24.969,00)
		3. Birun	1.394.438.811,00	1.324.438.811,00	225.500,00	225.500,00	1.394.664.311,00	1.324.664.311,00	1.394.664.278,00	1.324.664.278,00	33,00	33,00
		4. Tiga Alur	1.118.499.687,00	1.048.499.687,00	300.882,00	300.882,00	1.118.800.569,00	1.048.800.569,00	1.118.800.482,00	1.008.499.600,00	87,00	40.300.969,00
		5. Bungo Tanjung	1.516.074.394,00	1.446.074.394,00	300.000,00	300.000,00	1.516.374.394,00	1.446.374.394,00	1.516.379.394,00	1.446.374.221,45	(5.000,00)	172,55
		6. Sungai Jering	1.380.964.291,00	1.310.964.291,00	87.794,79	87.794,79	1.381.052.085,79	1.311.052.085,79	1.381.052.085,79	1.310.964.291,00	0,00	87.794,79
		7. Kampung Limo	1.274.499.167,00	1.204.499.167,00	799.167,00	799.167,00	1.275.298.334,00	1.205.298.334,00	1.275.798.326,00	1.203.638.326,00	(499.992,00)	1.660.008,00
		8. Tanjung Mudo	1.148.120.532,00	1.078.120.532,00	2.317,00	2.317,00	1.148.122.849,00	1.078.122.849,00	1.148.122.745,40	1.075.465.900,00	103,60	2.656.949,00

No.	Kecamatan	D e s a	Penerimaan Pembiayaan		Pengeluaran Pembiayaan		Pembiayaan Netto	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	14	15	16	17	18=14-16	19=15-17
12.	Batang Masumai	1. Lubuk Gaung	14.013.459,00	14.013.459,00	0,00	0,00	14.013.459,00	14.013.459,00
		2. Salam Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Pulau Baru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Nibung	45.531.941,00	45.531.941,00	0,00	0,00	45.531.941,00	45.531.941,00
		5. Titian Teras	45.205.300,00	45.205.300,00	10.000.000,00	0,00	35.205.300,00	45.205.300,00
		6. Kederasan Panjang	4.449.000,00	4.449.000,00	0,00	0,00	4.449.000,00	4.449.000,00
		7. Rantau Alai	45.148,00	45.148,00	0,00	0,00	45.148,00	45.148,00
		8. Tambang Besi	7.503.956,00	7.503.956,00	0,00	0,00	7.503.956,00	7.503.956,00
		9. Pelangki	5.200.000,00	5.200.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	(24.800.000,00)	(24.800.000,00)
		10. Pulau Layang	424.967,66	424.967,66	0,00	0,00	424.967,66	424.967,66
13.	Pamenang Barat	1. Tanjung Lamin	2.070.000,00	2.070.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	(297.930.000,00)	(297.930.000,00)
		2. Limbur Merangin	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
		3. Karang Anyar	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	(80.000.000,00)	(80.000.000,00)
		4. Pinang Merah	2.900,48	2.900,48	0,00	0,00	2.900,48	2.900,48
		5. Sp. Limbur Merangin	11.770.000,00	11.770.000,00	0,00	0,00	11.770.000,00	11.770.000,00
		6. Mampun Baru	26.278.294,00	26.278.294,00	20.000.000,00	20.000.000,00	6.278.294,00	6.278.294,00
		7. Papit	538.164,00	538.164,00	0,00	0,00	538.164,00	538.164,00
		8. Pulau Tujuh	16.592.440,00	16.592.440,00	0,00	0,00	16.592.440,00	16.592.440,00
		1. Rantau Limau Manis	3.249.593,95	3.249.593,95	0,00	0,00	3.249.593,95	3.249.593,95
		2. Ulak Makam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Tabir Ilir	3. Air Batu	217.623,32	217.623,32	0,00	0,00	217.623,32	217.623,32
		4. Rejo Sari	269.398,00	269.398,00	0,00	0,00	269.398,00	269.398,00
		5. Kota Raja	136.155.000,00	136.155.000,00	0,00	0,00	136.155.000,00	136.155.000,00
		6. Tunggul Bulin	35.940.000,00	35.940.000,00	0,00	0,00	35.940.000,00	35.940.000,00
		7. Mekar Limau Manis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Sungai Limau	1.124.492,00	1.124.492,00	0,00	0,00	1.124.492,00	1.124.492,00
		2. Sungai Bulian	4.544.532,00	4.544.532,00	0,00	0,00	4.544.532,00	4.544.532,00
		3. Seri Sembilan	162.303.901,78	162.303.901,78	0,00	0,00	162.303.901,78	162.303.901,78
		4. Bukit Subur	5.195.475,45	5.195.475,45	0,00	0,00	5.195.475,45	5.195.475,45
		1. Muara Panco Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Renah Pembarap	2. Talang Segegah	70.242.595,00	70.242.595,00	0,00	0,00	70.242.595,00	70.242.595,00
		3. Durian Betakuk	52.542.359,00	52.542.359,00	0,00	0,00	52.542.359,00	52.542.359,00
		4. Muara Bantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Parit Ujung Tanjung	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
		6. Guguk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Markeh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8. Air Batu	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
		9. Marus Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10. Renah Medan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		11. Simpang Parit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pangkalan Jambu	12. Muara Panco Timur	30.030.000,00	30.030.000,00	0,00	0,00	30.030.000,00	30.030.000,00
		1. Baru Pkl. Jambu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Bukit Perentak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Birun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Tiga Alur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Bungo Tanjung	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		6. Sungai Jering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Kampung Limo	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		8. Tanjung Mudo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

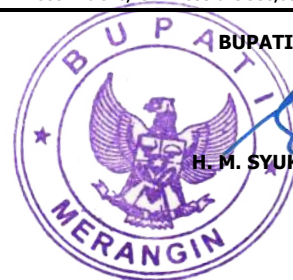
No.	Kecamatan	D e s a	Pendapatan Transfer		Pendapatan Asli Desa/ Pendapatan Lainnya		Total pendapatan Desa		Belanja		Surplus/(Defisit)	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8=4+6	9=5+7	10	11	12=8-10	13=9-11
18.	Jangkat Timur	1. Tanjung Mudo	1.248.071.963,00	1.178.071.963,00	35.522.395,00	35.522.395,00	1.283.594.358,00	1.213.594.358,00	1.284.129.289,55	1.210.929.264,00	(534.931,55)	2.665.094,00
		2. Koto Teguh	1.266.229.942,00	1.196.229.942,00	165.116,00	165.116,00	1.266.395.058,00	1.196.395.058,00	1.269.076.045,00	1.198.597.984,00	(2.680.987,00)	(2.202.926,00)
		3. Baru	1.463.227.244,00	1.393.227.244,00	125.659,53	125.659,53	1.463.352.903,53	1.393.352.903,53	1.464.011.004,53	1.393.906.001,53	(658.101,00)	(553.098,00)
		4. Talang Tembago	1.391.315.551,00	1.321.315.551,00	260.730,00	260.730,00	1.391.576.281,00	1.321.576.281,00	1.392.225.345,00	1.321.666.058,00	(649.064,00)	(89.777,00)
		5. Beringin Tinggi	1.594.800.369,00	1.524.800.369,00	74.989,14	74.989,14	1.594.875.358,14	1.524.875.358,14	1.594.875.358,14	1.524.800.369,00	0,00	74.989,14
		6. Pematang Pauh	1.426.050.986,00	1.356.050.986,00	203.218,03	203.218,03	1.426.254.204,03	1.356.254.204,03	1.426.504.681,86	1.353.407.000,00	(250.477,83)	2.847.204,03
		7. Rantau Suli	1.855.743.438,00	1.785.743.438,00	134.996,37	134.996,37	1.855.878.434,37	1.785.878.434,37	1.870.878.434,37	1.800.743.438,00	(15.000.000,00)	(14.865.003,63)
		8. Gedang	1.694.507.149,00	1.624.507.149,00	125.337,00	125.337,00	1.694.632.486,00	1.624.632.486,00	1.697.313.708,00	1.626.777.996,00	(2.681.222,00)	(2.145.510,00)
		9. Koto Baru	1.404.756.660,00	1.334.756.660,00	135.443,00	135.443,00	1.404.892.103,00	1.334.892.103,00	1.405.754.818,00	1.335.649.263,00	(862.715,00)	(757.160,00)
		10. Tanjung Benuang	1.480.839.079,00	1.410.839.079,00	200.677,00	200.677,00	1.481.039.756,00	1.411.039.756,00	1.481.828.533,00	1.408.001.005,00	(788.777,00)	3.038.751,00
		11. Jangkat	1.346.060.612,00	1.276.060.612,00	166.825,00	166.825,00	1.346.227.437,00	1.276.227.437,00	1.346.779.522,00	1.273.137.661,00	(552.085,00)	3.089.776,00
		12. Tanjung Alam	1.182.366.871,00	1.112.366.871,00	72.054,25	72.054,25	1.182.438.925,25	1.112.438.925,25	1.182.438.925,25	1.112.146.619,00	0,00	292.306,25
		13. Kabu	1.219.994.028,00	1.149.994.028,00	69.404,66	69.404,66	1.220.063.432,66	1.150.063.432,66	1.220.063.432,66	11.499.940.128,00	0,00	(10.349.876.695,34)
		14. Sp. Talang Tembago	1.150.148.889,00	1.080.148.889,00	207.710,00	207.710,00	1.150.356.599,00	1.080.356.599,00	1.131.016.171,00	1.057.309.639,00	19.340.428,00	23.046.960,00
19.	Renah Pamenang	1. Meranti	1.550.533.005,00	1.480.533.005,00	6.865.625,49	6.865.625,49	1.557.398.630,49	1.487.398.630,49	1.562.286.912,49	1.482.314.858,00	(4.888.282,00)	5.083.772,49
		2. Bukit Bungkul	1.618.214.671,00	1.548.214.671,00	5.162.036,00	5.162.036,00	1.623.376.707,00	1.553.376.707,00	1.631.089.959,00	1.543.586.993,00	(7.713.252,00)	9.789.714,00
		3. Rasau	1.387.324.550,00	1.317.324.550,00	454.757,83	454.757,83	1.387.779.307,83	1.317.779.307,83	1.394.771.722,75	1.310.608.000,00	(6.992.414,92)	7.171.307,83
		4. Lantak Seribu	1.710.517.523,00	1.640.517.523,00	5.802.119,29	5.802.119,29	1.716.319.642,29	1.646.319.642,29	1.733.157.348,34	1.657.367.309,05	(16.837.706,05)	(11.047.666,76)
20.	Pamenang Selatan	1. Tambang Emas	1.836.072.832,00	1.766.072.832,00	100.478.570,87	100.478.570,87	1.936.551.402,87	1.866.551.402,87	1.938.088.200,00	1.868.088.200,00	(1.536.797,13)	(1.536.797,13)
		2. Tanjung Benuang	1.682.355.898,00	1.612.355.898,00	13.823.672,37	13.823.672,37	1.696.179.570,37	1.626.179.570,37	1.706.143.812,00	1.624.993.812,00	(9.964.241,63)	1.185.758,37
		3. Pulau Bayur	1.426.628.114,00	1.356.628.114,00	293.417,00	293.417,00	1.426.921.531,00	1.356.921.531,00	1.376.921.531,00	1.259.168.904,00	50.000.000,00	97.752.627,00
		4. Selango	1.220.569.034,00	1.150.569.034,00	77.232,90	77.232,90	1.220.646.266,90	1.150.646.266,90	1.182.503.121,90	1.111.796.104,00	38.143.145,00	38.850.162,90
21.	Margo Tabir	1. Tanjung Rejo	1.603.906.217,00	1.533.906.217,00	14.808.239,28	14.808.239,28	1.618.714.456,28	1.548.714.456,28	1.619.095.166,28	1.503.457.272,00	(380.710,00)	45.257.184,28
		2. Sumber Agung	1.695.266.740,00	1.625.266.740,00	116.156.307,49	116.156.307,49	1.811.423.047,49	1.741.423.047,49	1.811.423.047,49	1.732.522.547,49	0,00	8.900.500,00
		3. Suko Rejo	1.204.634.700,00	1.134.634.700,00	10.328.462,84	10.328.462,84	1.214.963.162,84	1.144.963.162,84	1.214.963.162,84	1.144.195.700,00	0,00	767.462,84
		4. Sido Rukun	1.259.566.435,00	1.189.566.435,00	54.654.094,71	54.654.094,71	1.314.220.529,71	1.244.220.529,71	1.317.820.529,17	1.244.320.529,17	(3.599.999,46)	(99.999,46)
		5. Lubuk Bumbun	1.600.543.645,00	1.530.543.645,00	2.093.345,00	2.093.345,00	1.602.636.990,00	1.532.636.990,00	1.656.225.990,00	1.575.845.990,00	(53.589.000,00)	(43.209.000,00)
		6. Tegal Rejo	1.273.493.774,00	1.203.493.774,00	23.696.202,09	23.696.202,09	1.297.189.976,09	1.227.189.976,09	1.301.844.625,09	1.224.907.856,00	(4.654.649,00)	2.282.120,09
22.	Tabir Lintas	1. Tambang Baru	1.544.336.478,00	1.474.336.478,00	12.933.185,31	12.933.185,31	1.557.269.663,31	1.487.269.663,31	1.558.014.124,64	1.486.199.874,00	(744.461,33)	1.069.789,31
		2. Sido Lego	1.625.236.393,00	1.555.236.393,00	56.000.000,00	56.000.000,00	1.681.236.393,00	1.611.236.393,00	1.730.058.701,29	1.624.026.580,00	(48.822.308,29)	(12.790.187,00)
		3. Mensango	1.265.005.685,00	1.195.005.685,00	230.085,68	230.085,68	1.265.235.770,68	1.195.235.770,68	1.300.460.803,19	1.200.230.717,51	(35.225.032,51)	(4.994.946,83)
		4. Koto Baru	1.229.004.127,00	1.159.004.127,00	317.971,00	317.971,00	1.229.322.098,00	1.159.322.098,00	1.242.039.692,00	1.141.871.446,00	(12.717.594,00)	17.450.652,00
		5. Sido Harjo	1.312.002.343,00	1.242.002.343,00	35.300.000,00	35.300.000,00	1.347.302.343,00	1.277.302.343,00	1.364.844.207,30	1.225.896.289,00	(17.541.864,30)	51.406.054,00
23.	Tabir Barat	1. Muara Kibul	1.359.786.506,00	1.289.786.506,00	340.335,00	340.335,00	1.360.126.841,00	1.290.126.841,00	1.379.220.556,00	1.256.384.207,00	(19.093.715,00)	33.742.634,00
		2. Tanjung Putus	1.262.224.213,00	1.192.224.213,00	3.969.316,00	3.969.316,00	1.266.193.529,00	1.196.193.529,00	1.267.633.601,00	1.182.768.033,00	(1.440.072,00)	13.425.496,00
		3. Pulau Tebakar	1.332.119.418,00	1.262.119.418,00	323.287,00	323.287,00	1.332.442.705,00	1.262.442.705,00	1.353.884.590,00	1.282.572.040,00	(21.441.885,00)	(20.129.335,00)
		4. Batang Kibul	1.316.997.611,00	1.246.997.611,00	153.340,25	153.340,25	1.317.150.951,25	1.247.150.951,25	1.315.849.607,25	1.134.651.019,00	1.301.344,00	112.499.932,25
		5. Sungai Tabir	1.232.955.538,00	1.162.955.538,00	135.509,00	135.509,00	1.233.091.047,00	1.163.091.047,00	1.223.091.047,00	1.152.955.538,00	10.000.000,00	10.135.509,00
		6. Telentam	1.664.609.519,00	1.594.609.519,00	72.221,00	72.221,00	1.664.681.740,00	1.594.681.740,00	1.654.681.740,00	1.584.269.519,00	10.000.000,00	10.412.221,00
		7. Ngaol	1.613.955.952,00	1.543.955.952,00	77.557,56	77.557,56	1.614.033.509,56	1.544.033.509,56	1.614.033.509,56	1.543.005.752,56	0,00	1.027.757,00
		8. Air Liki	1.497.964.732,00	1.427.964.732,00	200.000,00	200.000,00	1.498.164.732,00	1.428.164.732,00	1.507.368.651,00	1.437.168.651,00	(9.203.919,00)	(9.003.919,00)
		9. Pulau Lebar	1.431.842.885,00	1.361.842.885,00	886.000,00	886.000,00	1.432.728.885,00	1.362.728.885,00	1.442.822.885,00	1.372.815.528,00	(10.094.000,00)	(10.086.643,00)
		10. Muaro Langgeh	1.059.566.659,00	989.566.659,00	100.000,00	100.000,00	1.059.666.659,00	989.666.659,00	1.058.257.472,00	979.167.528,00	1.409.187,00	10.499.131,00
		11. Tanjung Beringin	1.219.303.785,00	1.149.303.785,00	184.712,00	184.712,00	1.219.488.497,00	1.149.488.497,00	1.212.686.859,00	1.128.637.528,00	6.801.638,00	20.850.969,00
		12. Baru Kibul	1.171.973.446,00	1.101.973.446,00	330.000,00	330.000,00	1.172.303.446,00	1.102.303.446,00	1.162.303.446,00	1.090.470.010,00	10.000.000,00	11.833.436,00
		13. Ngaol Ilir	1.229.180.975,00	1.159.180.975,00	73.746,00	73.746,00	1.229.254.721,00	1.159.254.721,00	1.249.798.422,00	1.139.724.676,00	(20.543.701,00)	19.530.045,00
		14. Air Liki Baru	1.304.181.083,00	1.234.181.083,00	200.000,00	200.000,00	1.304.381.083,00	1.234.381.083,00	1.304.381.083,00	1.234.181.083,00	0,00	200.000,00

7

No.	Kecamatan	D e s a	Penerimaan Pembiayaan		Pengeluaran Pembiayaan		Pembiayaan Netto	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	14	15	16	17	18=14-16	19=15-17
18.	Jangkat Timur	1. Tanjung Mudo	534.931,55	534.931,55	0,00	0,00	534.931,55	534.931,55
		2. Koto Teguh	2.680.987,00	2.680.987,00	0,00	0,00	2.680.987,00	2.680.987,00
		3. Baru	658.101,00	658.101,00	0,00	0,00	658.101,00	658.101,00
		4. Talang Tembago	649.064,00	649.064,00	0,00	0,00	649.064,00	649.064,00
		5. Beringin Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Pematang Pauh	250.477,83	250.477,83	0,00	0,00	250.477,83	250.477,83
		7. Rantau Suli	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
		8. Gedang	2.681.222,00	2.681.222,00	0,00	0,00	2.681.222,00	2.681.222,00
		9. Koto Baru	862.715,00	862.715,00	0,00	0,00	862.715,00	862.715,00
		10. Tanjung Benuang	788.777,00	788.777,00	0,00	0,00	788.777,00	788.777,00
		11. Jangkat	552.085,00	552.085,00	0,00	0,00	552.085,00	552.085,00
		12. Tanjung Alam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13. Kabu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14. Sp. Talang Tembago	659.572,00	659.572,00	20.000.000,00	20.000.000,00	(19.340.428,00)	(19.340.428,00)
19.	Renah Pamenang	1. Meranti	4.888.282,00	4.888.282,00	0,00	0,00	4.888.282,00	4.888.282,00
		2. Bukit Bungkul	7.713.252,00	7.713.252,00	0,00	0,00	7.713.252,00	7.713.252,00
		3. Rasau	6.992.414,92	6.992.414,92	0,00	0,00	6.992.414,92	6.992.414,92
		4. Lantak Seribu	16.837.706,05	16.837.706,05	0,00	0,00	16.837.706,05	16.837.706,05
20.	Pamenang Selatan	1. Tambang Emas	1.538.606,00	1.538.606,00	0,00	0,00	1.538.606,00	1.538.606,00
		2. Tanjung Benuang	10.000.000,01	10.000.000,01	0,00	0,00	10.000.000,01	10.000.000,01
		3. Pulau Bayur	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50.000.000,00)
		4. Selango	11.858.090,00	11.858.090,00	50.000.000,00	50.000.000,00	(38.141.910,00)	(38.141.910,00)
21.	Margo Tabir	1. Tanjung Rejo	380.710,00	380.710,00	0,00	0,00	380.710,00	380.710,00
		2. Sumber Agung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Suko Rejo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Sido Rukun	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
		5. Lubuk Bumbun	53.589.000,00	53.589.000,00	0,00	0,00	53.589.000,00	53.589.000,00
		6. Tegal Rejo	4.654.649,00	4.654.649,00	0,00	0,00	4.654.649,00	4.654.649,00
22.	Tabir Lintas	1. Tambang Baru	744.461,33	744.461,33	0,00	0,00	744.461,33	744.461,33
		2. Sido Lego	48.822.308,29	48.822.308,29	0,00	0,00	48.822.308,29	48.822.308,29
		3. Mensango	35.225.032,51	35.225.032,51	0,00	0,00	35.225.032,51	35.225.032,51
		4. Koto Baru	12.717.937,00	12.717.937,00	0,00	0,00	12.717.937,00	12.717.937,00
		5. Sido Harjo	27.541.864,30	27.541.864,30	10.000.000,00	10.000.000,00	17.541.864,30	17.541.864,30
23.	Tabir Barat	1. Muara Kibul	43.000.000,00	43.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
		2. Tanjung Putus	11.440.072,00	11.440.072,00	10.000.000,00	10.000.000,00	1.440.072,00	1.440.072,00
		3. Pulau Tebakar	31.441.885,00	31.441.885,00	10.000.000,00	10.000.000,00	21.441.885,00	21.441.885,00
		4. Batang Kibul	8.698.656,00	8.698.656,00	10.000.000,00	0,00	(1.301.344,00)	8.698.656,00
		5. Sungai Tabir	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(10.000.000,00)
		6. Telentang	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(10.000.000,00)
		7. Ngaol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8. Air Liki	9.203.919,00	9.203.919,00	0,00	0,00	9.203.919,00	9.203.919,00
		9. Pulau Lebar	20.094.000,00	20.094.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.094.000,00	10.094.000,00
		10. Muaro Langeh	8.590.813,00	8.590.813,00	10.000.000,00	10.000.000,00	(1.409.187,00)	(1.409.187,00)
		11. Tanjung Beringin	3.198.362,00	3.198.362,00	10.000.000,00	10.000.000,00	(6.801.638,00)	(6.801.638,00)
		12. Baru Kibul	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(10.000.000,00)
		13. Ngaol Ilir	30.543.701,00	30.543.701,00	10.000.000,00	10.000.000,00	20.543.701,00	20.543.701,00
		14. Air Liki Baru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Kecamatan	D e s a	Pendapatan Transfer		Pendapatan Asli Desa/ Pendapatan Lainnya		Total pendapatan Desa		Belanja		Surplus/(Defisit)	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8=4+6	9=5+7	10	11	12=9-10	13=9-11
24.	Tiang Pumpung	1. Sekancing	1.410.352.558,00	1.340.352.558,00	252.036,52	252.036,52	1.410.604.594,52	1.340.604.594,52	1.405.885.893,52	1.335.598.920,00	4.718.701,00	5.005.674,52
		2. Sekancing Ilir	1.275.594.643,00	1.205.594.643,00	53.265,75	53.265,75	1.275.647.908,75	1.205.647.908,75	1.273.691.157,72	1.197.383.524,00	1.956.751,03	8.264.384,75
		3. Beringin Sanggul	1.301.830.438,00	1.231.830.438,00	160.342,39	160.342,39	1.301.990.780,39	1.231.990.780,39	1.261.995.090,33	1.190.993.000,00	39.995.690,06	40.997.780,39
		4. Baru Bukit Punjung	1.232.794.437,00	1.162.794.437,00	75.366,76	75.366,76	1.232.869.803,76	1.162.869.803,76	1.163.022.372,76	1.077.808.898,76	69.847.431,00	85.060.905,00
		5. Rantau Limau Kapas	1.193.753.371,00	1.123.753.371,00	345.485,23	345.485,23	1.194.098.856,23	1.124.098.856,23	1.232.369.166,23	1.156.729.659,00	(38.270.310,00)	(32.630.802,77)
		6. Baru Sungai Sakai	1.193.269.101,00	1.123.269.101,00	4.121.795,85	4.121.795,85	1.197.390.896,85	1.127.390.896,85	1.201.804.160,85	1.126.089.134,85	(4.413.264,00)	1.301.762,00
J u m l a h			278.850.360.350,00	264.500.360.350,00	1.524.137.287,27	1.469.037.287,27	280.374.497.637,27	265.969.397.637,27	281.715.012.076,48	273.391.260.595,32	(1.340.514.439,21)	(7.421.862.958,05)

No.	Kecamatan	D e s a	Penerimaan Pembiayaan		Pengeluaran Pembiayaan		Pembiayaan Netto	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	14	15	16	17	18=14-16	19=15-17
24.	Tiang Pumpung	1. Sekancing	323.897,00	323.897,00	5.042.598,00	5.000.000,00	(4.718.701,00)	(4.676.103,00)
		2. Sekancing Ilir	43.248,97	43.248,97	2.000.000,00	2.000.000,00	(1.956.751,03)	(1.956.751,03)
		3. Beringin Sanggul	4.309,94	4.309,94	40.000.000,00	40.000.000,00	(39.995.690,06)	(39.995.690,06)
		4. Baru Bukit Punjung	152.569,00	152.569,00	70.000.000,00	70.000.000,00	(69.847.431,00)	(69.847.431,00)
		5. Rantau Limau Kapas	43.270.310,00	43.270.310,00	5.000.000,00	0,00	38.270.310,00	43.270.310,00
		6. Baru Sungai Sakai	4.413.264,00	4.413.264,00	0,00	0,00	4.413.264,00	4.413.264,00
J u m l a h			3.203.068.788,67	3.203.068.788,67	1.888.716.848,28	1.853.673.938,00	1.314.351.940,39	1.349.394.850,67



BUPATI MERANGIN

H. M. SYUKUR, S.N., M.H.

**RINCIAN PIUTANG PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PER 31 DESEMBER 2024**

I. PIUTANG PAJAK DAERAH (BPPRD)

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo 2023	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		Saldo Akhir 2024
		(Audited)		Setelah Koreksi	Penambahan 2024	Koreksi	Pembayaran	Koreksi/Penghapusan	(Unaudited)
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10=5+(6+7)-(8+9)
1. Pajak Reklame									
a.	Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	320.008.919,01	0,00	320.008.919,01	4.498.474,00	0,00	21.308.922,50	0,00	303.198.470,51
-	Tahun 2014	2.404.350,00	0,00	2.404.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404.350,00
-	Tahun 2015	32.708.128,13	0,00	32.708.128,13	0,00	0,00	0,00	0,00	32.708.128,13
-	Tahun 2016	78.513.556,00	0,00	78.513.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.513.556,00
-	Tahun 2017	19.940.249,60	0,00	19.940.249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.940.249,60
-	Tahun 2018	22.201.963,31	0,00	22.201.963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22.201.963,31
-	Tahun 2019	19.848.800,00	0,00	19.848.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.848.800,00
-	Tahun 2020	25.807.935,00	0,00	25.807.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.807.935,00
-	Tahun 2021	22.029.789,69	0,00	22.029.789,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22.029.789,69
-	Tahun 2022	1.576.500,00	0,00	1.576.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.500,00
-	Tahun 2023	94.977.647,28	0,00	94.977.647,28	0,00	0,00	21.308.922,50	0,00	73.668.724,78
-	Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	4.498.474,00	0,00	0,00	0,00	4.498.474,00
b.	Reklame Kain	8.074.080,00	0,00	8.074.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.074.080,00
-	Tahun 2015	264.600,00	0,00	264.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.600,00
-	Tahun 2016	5.247.000,00	0,00	5.247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247.000,00
-	Tahun 2022	2.562.480,00	0,00	2.562.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562.480,00
c.	Reklame Melekat/Stiker	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00
-	Tahun 2016	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00
Jumlah Pajak Reklame		328.345.499,01	0,00	328.345.499,01	4.498.474,00	0,00	21.308.922,50	0,00	311.535.050,51
2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan									
a.	Tahun 2014	1.779.022,50	0,00	1.779.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.022,50
b.	Tahun 2015	1.222.020,00	0,00	1.222.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.020,00
c.	Tahun 2016	107.292.622,50	0,00	107.292.622,50	0,00	0,00	1.403.280,00	0,00	105.889.342,50
d.	Tahun 2017	8.651.487,30	0,00	8.651.487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.651.487,30
e.	Tahun 2018	5.443.651,80	0,00	5.443.651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.443.651,80
f.	Tahun 2019	5.151.102,15	0,00	5.151.102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151.102,15
g.	Tahun 2020	3.468.360,38	0,00	3.468.360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468.360,38
h.	Tahun 2021	2.922.796,05	0,00	2.922.796,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.796,05
i.	Tahun 2022	4.219.479,60	0,00	4.219.479,60	0,00	0,00	464.100,00	0,00	3.755.379,60
j.	Tahun 2023	2.469.240,15	0,00	2.469.240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469.240,15
k.	Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	22.508.846,00	0,00	0,00	0,00	22.508.846,00
Jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		142.619.782,43	0,00	142.619.782,43	22.508.846,00	0,00	1.867.380,00	0,00	163.261.248,43

No.	Uraian	Saldo 2023 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal Setelah Koreksi	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		Saldo Akhir 2024 (Unaudited)
					Penambahan 2024	Koreksi	Pembayaran	Koreksi/Penghapusan	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10=5+(6+7)-(8+9)
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)									
a.	PBB-P2 1994 s.d. 2012 yang dilimpahkan ke Pemkab	5.576.207.739,00	0,00	5.576.207.739,00	0,00	0,00	768.612,00	0,00	5.575.439.127,00
-	Tahun 1994	17.378.175,00	0,00	17.378.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.378.175,00
-	Tahun 1995	11.271.020,00	0,00	11.271.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.271.020,00
-	Tahun 1996	18.075.299,00	0,00	18.075.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.075.299,00
-	Tahun 1997	26.526.406,00	0,00	26.526.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.526.406,00
-	Tahun 1998	30.923.623,00	0,00	30.923.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.923.623,00
-	Tahun 1999	91.905.766,00	0,00	91.905.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.905.766,00
-	Tahun 2000	121.396.263,00	0,00	121.396.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.396.263,00
-	Tahun 2001	118.543.699,00	0,00	118.543.699,00	0,00	0,00	14.056,00	0,00	118.529.643,00
-	Tahun 2002	139.274.153,00	0,00	139.274.153,00	0,00	0,00	11.214,00	0,00	139.262.939,00
-	Tahun 2003	172.372.577,00	0,00	172.372.577,00	0,00	0,00	16.426,00	0,00	172.356.151,00
-	Tahun 2004	303.357.254,00	0,00	303.357.254,00	0,00	0,00	16.426,00	0,00	303.340.828,00
-	Tahun 2005	302.587.930,00	0,00	302.587.930,00	0,00	0,00	16.426,00	0,00	302.571.504,00
-	Tahun 2006	402.353.583,00	0,00	402.353.583,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	402.345.583,00
-	Tahun 2007	498.275.074,00	0,00	498.275.074,00	0,00	0,00	102.674,00	0,00	498.172.400,00
-	Tahun 2008	723.550.992,00	0,00	723.550.992,00	0,00	0,00	142.570,00	0,00	723.408.422,00
-	Tahun 2009	776.758.887,00	0,00	776.758.887,00	0,00	0,00	141.380,00	0,00	776.617.507,00
-	Tahun 2010	671.743.051,00	0,00	671.743.051,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	671.738.051,00
-	Tahun 2011	952.410.621,00	0,00	952.410.621,00	0,00	0,00	147.540,00	0,00	952.263.081,00
-	Tahun 2012	197.503.366,00	0,00	197.503.366,00	0,00	0,00	146.900,00	0,00	197.356.466,00
b.	Piutang PBB-P2 2013 s.d 2022	18.520.111.343,00	0,00	18.520.111.343,00	2.862.827.990,00	26.500,00	81.286.766,00	0,00	21.301.679.067,00
-	Tahun 2013	927.734.178,00	0,00	927.734.178,00	0,00	0,00	178.486,00	0,00	927.555.692,00
-	Tahun 2014	832.777.329,00	0,00	832.777.329,00	0,00	0,00	256.751,00	0,00	832.520.578,00
-	Tahun 2015	876.629.809,00	0,00	876.629.809,00	0,00	0,00	1.178.370,00	0,00	875.451.439,00
-	Tahun 2016	1.222.792.006,00	0,00	1.222.792.006,00	0,00	7.000,00	552.216,00	0,00	1.222.246.790,00
-	Tahun 2017	1.199.293.787,00	0,00	1.199.293.787,00	0,00	19.500,00	601.228,00	0,00	1.198.712.059,00
-	Tahun 2018	1.461.489.036,00	0,00	1.461.489.036,00	0,00	0,00	1.344.760,00	0,00	1.460.144.276,00
-	Tahun 2019	1.417.900.603,00	0,00	1.417.900.603,00	0,00	0,00	1.133.749,00	0,00	1.416.766.854,00
-	Tahun 2020	2.447.493.435,00	0,00	2.447.493.435,00	0,00	0,00	1.759.050,00	0,00	2.445.734.385,00
-	Tahun 2021	2.705.100.006,00	0,00	2.705.100.006,00	0,00	0,00	2.791.758,00	0,00	2.702.308.248,00
-	Tahun 2022	2.603.411.778,00	0,00	2.603.411.778,00	0,00	0,00	11.583.530,00	0,00	2.591.828.248,00
-	Tahun 2023	2.825.489.376,00	0,00	2.825.489.376,00	0,00	0,00	59.906.868,00	0,00	2.765.582.508,00
-	Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	2.862.827.990,00	0,00	0,00	0,00	2.862.827.990,00
Jumlah PBB-P2		24.096.319.082,00	0,00	24.096.319.082,00	2.862.827.990,00	26.500,00	82.055.378,00	0,00	26.877.118.194,00
4. PBJT-Makanan dan/atau Minuman									
a.	Tahun 2014	154.500,00	0,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00
b.	Tahun 2015	2.531.530,00	0,00	2.531.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531.530,00
c.	Tahun 2016	9.450.141,50	0,00	9.450.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450.141,50
d.	Tahun 2017	6.031.597,00	0,00	6.031.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031.597,00
e.	Tahun 2018	7.210.742,16	0,00	7.210.742,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210.742,16
f.	Tahun 2019	2.694.443,18	0,00	2.694.443,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694.443,18
q.	Tahun 2020	16.743.104,00	0,00	16.743.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.743.104,00
h.	Tahun 2021	2.554.938,00	0,00	2.554.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554.938,00
i.	Tahun 2022	9.871.640,00	0,00	9.871.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.871.640,00
j.	Tahun 2023	46.665.419,50	0,00	46.665.419,50	0,00	0,00	24.169.189,50	0,00	22.496.230,00
k.	Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	6.744.070,00	0,00	0,00	0,00	6.744.070,00
Jumlah PBJT-Makanan dan/atau Minuman		103.908.055,34	0,00	103.908.055,34	6.744.070,00	0,00	24.169.189,50	0,00	86.482.935,84

No.	Uraian	Saldo 2023 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal Setelah Koreksi	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		Saldo Akhir 2024 (Unaudited)
					Penambahan 2024	Koreksi	Pembayaran	Koreksi/Penghapusan	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10=5+(6+7)-(8+9)
5. PBJT-Tenaga Listrik									
a. PLN		1.821.726.121,00	0,00	1.821.726.121,00	1.968.333.747,00	0,00	1.821.726.121,00	0,00	1.968.333.747,00
- Tahun 2023		1.821.726.121,00	0,00	1.821.726.121,00	0,00	0,00	1.821.726.121,00	0,00	0,00
- Tahun 2024		0,00	0,00	0,00	1.968.333.747,00	0,00	0,00	0,00	1.968.333.747,00
b. Non PLN		2.027.490,00	0,00	2.027.490,00	30.876.588,00	0,00	2.027.490,00	0,00	30.876.588,00
- Tahun 2023		2.027.490,00	0,00	2.027.490,00	0,00	0,00	2.027.490,00	0,00	0,00
- Tahun 2024		0,00	0,00	0,00	30.876.588,00	0,00	0,00	0,00	30.876.588,00
Jumlah PBJT-Tenaga Listrik		1.823.753.611,00	0,00	1.823.753.611,00	1.999.210.335,00	0,00	1.823.753.611,00	0,00	1.999.210.335,00
6. PBJT-Jasa Perhotelan									
a. Tahun 2023		5.536.613,40	0,00	5.536.613,40	0,00	0,00	5.456.613,40	0,00	80.000,00
b. Tahun 2024		0,00	0,00	0,00	2.610.000,00	0,00	0,00	0,00	2.610.000,00
Jumlah PBJT-Jasa Perhotelan		5.536.613,40	0,00	5.536.613,40	2.610.000,00	0,00	5.456.613,40	0,00	2.690.000,00
7. PBJT-Jasa Parkir									
a. Tahun 2024		0,00	0,00	0,00	20.720.000,00	0,00	0,00	0,00	20.720.000,00
Jumlah PBJT-Jasa Parkir		0,00	0,00	0,00	20.720.000,00	0,00	0,00	0,00	20.720.000,00
8. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan									
a. Tahun 2022		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
b. Tahun 2023		320.670,00	0,00	320.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.670,00
c. Tahun 2024		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Jumlah PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan		3.320.670,00	0,00	3.320.670,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.820.670,00
Jumlah Piutang Pajak Daerah		26.503.803.313,18	0,00	26.503.803.313,18	4.919.619.715,00	26.500,00	1.958.611.094,40	0,00	29.464.838.433,78

II. PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

(dalam rupiah)									
No.	Uraian	Saldo 2023 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal Setelah Koreksi	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		Saldo Akhir 2024 (Unaudited)
					Penambahan 2024	Koreksi	Pembayaran	Koreksi/Penghapusan	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10=5+(6+7)-(8+9)
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan									
a.	Dinas Kesehatan	224.357.000,00	0,00	224.357.000,00	419.085.100,00	0,00	224.357.000,00	0,00	419.085.100,00
-	Tahun 2023	224.357.000,00	0,00	224.357.000,00	0,00	0,00	224.357.000,00	0,00	0,00
-	Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	419.085.100,00	0,00	0,00	0,00	419.085.100,00
b.	RSUD Kolonel Abundjani Bangko	3.790.461.033,00	0,00	3.790.461.033,00	6.790.088.855,00	0,00	3.790.461.033,00	0,00	6.790.088.855,00
1)	Piutang Program JKN-KIS	3.195.001.900,00	0,00	3.195.001.900,00	6.102.500.265,00	0,00	3.195.001.900,00	0,00	6.102.500.265,00
-	Pending Okt 2023	123.331.200,00	0,00	123.331.200,00	0,00	0,00	123.331.200,00	0,00	0,00
-	Pending Nov 2023	85.771.500,00	0,00	85.771.500,00	0,00	0,00	85.771.500,00	0,00	0,00
-	Pending Des 2023	2.985.899.200,00	0,00	2.985.899.200,00	0,00	0,00	2.985.899.200,00	0,00	0,00
-	Pending Juli 2024	0,00	0,00	0,00	355.575.800,00	0,00	0,00	0,00	355.575.800,00
-	Nov 2024	0,00	0,00	0,00	2.826.814.600,00	0,00	0,00	0,00	2.826.814.600,00
-	Des 2024	0,00	0,00	0,00	2.920.109.865,00	0,00	0,00	0,00	2.920.109.865,00
2)	Piutang Ambulan Rujukan BPJS	65.264.000,00	0,00	65.264.000,00	229.644.000,00	0,00	65.264.000,00	0,00	229.644.000,00
-	Des 2023	65.264.000,00	0,00	65.264.000,00	0,00	0,00	65.264.000,00	0,00	0,00
-	Okt 2024	0,00	0,00	0,00	56.760.000,00	0,00	0,00	0,00	56.760.000,00
-	Nov 2024	0,00	0,00	0,00	76.224.000,00	0,00	0,00	0,00	76.224.000,00
-	Des 2024	0,00	0,00	0,00	96.660.000,00	0,00	0,00	0,00	96.660.000,00
3)	Klaim Obat Pelayanan Pasien Kronis	530.195.133,00	0,00	530.195.133,00	442.544.590,00	0,00	530.195.133,00	0,00	442.544.590,00
-	Sept 2023	119.053.441,00	0,00	119.053.441,00	0,00	0,00	119.053.441,00	0,00	0,00
-	Okt 2023	137.697.974,00	0,00	137.697.974,00	0,00	0,00	137.697.974,00	0,00	0,00
-	Nov 2023	131.510.929,00	0,00	131.510.929,00	0,00	0,00	131.510.929,00	0,00	0,00
-	Des 2023	141.932.789,00	0,00	141.932.789,00	0,00	0,00	141.932.789,00	0,00	0,00
-	Okt 2024	0,00	0,00	0,00	116.234.992,00	0,00	0,00	0,00	116.234.992,00
-	Nov 2024	0,00	0,00	0,00	157.312.723,00	0,00	0,00	0,00	157.312.723,00
-	Des 2024	0,00	0,00	0,00	168.996.875,00	0,00	0,00	0,00	168.996.875,00
4)	Klaim Alat Bantu Dengar	0,00	0,00	0,00	15.400.000,00	0,00	0,00	0,00	15.400.000,00
-	Okt 2024	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
-	Nov 2024	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
-	Des 2024	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Jumlah Retribusi Pelayanan Kesehatan		4.014.818.033,00	0,00	4.014.818.033,00	7.209.173.955,00	0,00	4.014.818.033,00	0,00	7.209.173.955,00

No.	Uraian	Saldo 2023 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal Setelah Koreksi	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		Saldo Akhir 2024 (Unaudited)
					Penambahan 2024	Koreksi	Pembayaran	Koreksi/Penghapusan	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10=5+(6+7)-(8+9)
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan									
a.	Dinas Lingkungan Hidup	254.399.976,00	0,00	254.399.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.399.976,00
-	Tahun 2014	43.854.000,00	0,00	43.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.854.000,00
-	Tahun 2016	56.399.400,00	0,00	56.399.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.399.400,00
-	Tahun 2017	25.594.176,00	0,00	25.594.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.594.176,00
-	Tahun 2018	31.149.600,00	0,00	31.149.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.149.600,00
-	Tahun 2019	31.993.200,00	0,00	31.993.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.993.200,00
-	Tahun 2020	65.409.600,00	0,00	65.409.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.409.600,00
b.	Perumda Air Minum Tirta Merangin	300.955.000,00	0,00	300.955.000,00	0,00	285.000,00	1.295.000,00	0,00	299.945.000,00
-	Tahun 2012	29.590.000,00	0,00	29.590.000,00	0,00	20.000,00	90.000,00	0,00	29.520.000,00
-	Tahun 2013	22.340.000,00	0,00	22.340.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	22.225.000,00
-	Tahun 2014	36.225.000,00	0,00	36.225.000,00	0,00	25.000,00	60.000,00	0,00	36.190.000,00
-	Tahun 2015	57.665.000,00	0,00	57.665.000,00	0,00	60.000,00	110.000,00	0,00	57.615.000,00
-	Tahun 2016	60.610.000,00	0,00	60.610.000,00	0,00	60.000,00	225.000,00	0,00	60.445.000,00
-	Tahun 2017	47.340.000,00	0,00	47.340.000,00	0,00	55.000,00	275.000,00	0,00	47.120.000,00
-	Tahun 2018	31.405.000,00	0,00	31.405.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	31.235.000,00
-	Tahun 2019	15.780.000,00	0,00	15.780.000,00	0,00	65.000,00	250.000,00	0,00	15.595.000,00
Jumlah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan		555.354.976,00	0,00	555.354.976,00	0,00	285.000,00	1.295.000,00	0,00	554.344.976,00
3. Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi (Dinas Komunikasi dan Informatika)									
a.	Tahun 2014	57.660.552,00	0,00	57.660.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.660.552,00
Jumlah Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi		57.660.552,00	0,00	57.660.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.660.552,00

No.	Uraian	Saldo 2023 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal Setelah Koreksi	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		Saldo Akhir 2024 (Unaudited)
					Penambahan 2024	Koreksi	Pembayaran	Koreksi/Penghapusan	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10=5+(6+7)-(8+9)
4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah									
a.	Sewa Tanah (BPPRD)	311.578.450,00	0,00	311.578.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.578.450,00
-	STKIP YPM Bangko 2015	155.730.000,00	0,00	155.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.730.000,00
-	STKIP YPM Bangko 2016	155.730.000,00	0,00	155.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.730.000,00
-	Penjahit Pesona Busana 2017	118.450,00	0,00	118.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.450,00
b.	Sewa Tanah (BPKAD)	0,00	0,00	0,00	106.022.000,00	69.622.000,00	0,00	0,00	175.644.000,00
-	IZHAR MAJID, Ruko Pamenang 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	69.622.000,00	0,00	0,00	69.622.000,00
-	IZHAR MAJID, Ruko Pamenang 2024	0,00	0,00	0,00	69.622.000,00	0,00	0,00	0,00	69.622.000,00
-	STAI Bangko	0,00	0,00	0,00	36.400.000,00	0,00	0,00	0,00	36.400.000,00
c.	Sewa Rumah Dinas (BPPRD)	89.322.600,00	0,00	89.322.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.322.600,00
-	Tahun 2010	31.803.200,00	0,00	31.803.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.803.200,00
-	Tahun 2011	32.104.400,00	0,00	32.104.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.104.400,00
-	Tahun 2014	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00
-	Tahun 2015	4.620.000,00	0,00	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620.000,00
-	Tahun 2016	2.485.000,00	0,00	2.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485.000,00
-	Tahun 2017	16.480.000,00	0,00	16.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.480.000,00
d.	Sewa Ruko, Kios, Los dan WC (Dinas Koperindag)	3.356.287.569,00	0,00	3.356.287.569,00	849.003.000,00	0,00	204.129.000,00	0,00	4.001.161.569,00
-	Tahun 2008	76.460.000,00	0,00	76.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.460.000,00
-	Tahun 2009	80.739.000,00	0,00	80.739.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.739.000,00
-	Tahun 2010	143.325.000,00	0,00	143.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.325.000,00
-	Tahun 2011	170.563.000,00	0,00	170.563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.563.000,00
-	Tahun 2012	204.143.600,00	0,00	204.143.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.143.600,00
-	Tahun 2013	127.480.240,00	0,00	127.480.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.480.240,00
-	Tahun 2014	186.790.120,00	0,00	186.790.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.790.120,00
-	Tahun 2015	84.192.408,00	0,00	84.192.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.192.408,00
-	Tahun 2016	39.507.000,00	0,00	39.507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.507.000,00
-	Tahun 2017	54.423.601,00	0,00	54.423.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.423.601,00
-	Tahun 2018	178.940.400,00	0,00	178.940.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.940.400,00
-	Tahun 2020	817.081.800,00	0,00	817.081.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.081.800,00
-	Tahun 2021	352.186.800,00	0,00	352.186.800,00	0,00	0,00	5.940.000,00	0,00	346.246.800,00
-	Tahun 2022	354.689.600,00	0,00	354.689.600,00	0,00	0,00	38.133.000,00	0,00	316.556.600,00
-	Tahun 2023	485.765.000,00	0,00	485.765.000,00	0,00	0,00	160.056.000,00	0,00	325.709.000,00
-	Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	849.003.000,00	0,00	0,00	0,00	849.003.000,00
Jumlah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		3.757.188.619,00	0,00	3.757.188.619,00	955.025.000,00	69.622.000,00	204.129.000,00	0,00	4.577.706.619,00
5. Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Dinas Peternakan dan Perkebunan)									
a.	Sapi Penggemukan Tahun 2012	21.200.000,00	0,00	21.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200.000,00
b.	Sapi Gaduhan Tahun 2015	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00
Jumlah Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		53.700.000,00	0,00	53.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.700.000,00
6. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)									
a.	Tahun 2018	4.930.100,00	0,00	4.930.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930.100,00
b.	Tahun 2019	16.907.408,00	0,00	16.907.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.907.408,00
c.	Tahun 2020	24.664.200,00	0,00	24.664.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.664.200,00
Jumlah Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung		46.501.708,00	0,00	46.501.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.501.708,00

No.	Uraian	Saldo 2023 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal Setelah Koreksi	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		Saldo Akhir 2024 (Unaudited)
					Penambahan 2024	Koreksi	Pembayaran	Koreksi/Penghapusan	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10=5+(6+7)-(8+9)
7. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (BPPRD)									
a. Tahun 2016		19.295.680,00	0,00	19.295.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.295.680,00
b. Tahun 2017		108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Jumlah Retribusi Izin Gangguan/Keramaian		19.403.680,00	0,00	19.403.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.403.680,00
Jumlah Piutang Retribusi Daerah									
		8.504.627.568,00	0,00	8.504.627.568,00	8.164.198.955,00	69.907.000,00	4.220.242.033,00	0,00	12.518.491.490,00

III. PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

(dalam rupiah)									
No.	Uraian	Saldo 2023 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal Setelah Koreksi	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		Saldo Akhir 2024 (Unaudited)
					Penambahan 2024	Koreksi	Pembayaran	Koreksi/Penghapusan	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10=5+(6+7)-(8+9)
1. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan									
- Tahun 2024		0,00	0,00	0,00	8.057.977.542,88	0,00	0,00	0,00	8.057.977.542,88
Jumlah Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan									
		0,00	0,00	0,00	8.057.977.542,88	0,00	0,00	0,00	8.057.977.542,88

IV. PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH

(dalam rupiah)									
No.	Uraian	Saldo 2023 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal Setelah Koreksi	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		Saldo Akhir 2024 (Unaudited)
					Penambahan 2024	Koreksi	Pembayaran	Koreksi/Penghapusan	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10=5+(6+7)-(8+9)
1. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan (BPKAD)									
- Tahun 2023		3.408.720,00	0,00	3.408.720,00	0,00	0,00	3.408.720,00	0,00	0,00
- Tahun 2024		0,00	0,00	0,00	11.231.584,00	0,00	0,00	0,00	11.231.584,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan		3.408.720,00	0,00	3.408.720,00	11.231.584,00	0,00	3.408.720,00	0,00	11.231.584,00
2. Piutang BLUD (RSUD Kolonel Abundjani Bangko)									
a. Piutang Parkir 2016		7.850.000,00	0,00	7.850.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	5.850.000,00
Jumlah Piutang BLUD		7.850.000,00	0,00	7.850.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	5.850.000,00
Jumlah Piutang Lain-Lain PAD yang Sah									
		11.258.720,00	0,00	11.258.720,00	11.231.584,00	0,00	5.408.720,00	0,00	17.081.584,00

IV. PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT (BPKAD)

(dalam rupiah)									
No.	Uraian	Saldo 2023 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal Setelah Koreksi	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		Saldo Akhir 2024 (Unaudited)
					Penambahan 2024	Koreksi	Pembayaran	Koreksi/ Penghapusan	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10=5+(6+7)-(8+9)
1. Piutang Bagi Hasil Pajak									
a.	Kurang Bayar PPh Pasal 25/29 s.d. TA 2023	0,00	0,00	0,00	48.096.000,00	0,00	0,00	0,00	48.096.000,00
b.	Kurang Bayar PBB Migas - Bagian Daerah s.d. TA 2023	0,00	0,00	0,00	3.282.455.000,00	0,00	0,00	0,00	3.282.455.000,00
c.	Kurang Bayar PBB Minerba - Bagian Daerah s.d. TA 2023	0,00	0,00	0,00	4.825.000,00	0,00	0,00	0,00	4.825.000,00
d.	Kurang Bayar PBB Panas Bumi - Bagian Daerah s.d. TA 2023	0,00	0,00	0,00	3.513.000,00	0,00	0,00	0,00	3.513.000,00
e.	Kurang Bayar PBB Perhutanan - Bagian Daerah s.d. TA 2023	0,00	0,00	0,00	145.662.000,00	0,00	0,00	0,00	145.662.000,00
f.	Kurang Bayar PBB Perkebunan - Bagian Daerah s.d. TA 2023	0,00	0,00	0,00	349.307.000,00	0,00	0,00	0,00	349.307.000,00
g.	Kurang Bayar PBB Sektor Lainnya - Bagian Daerah s.d. TA 2023	0,00	0,00	0,00	56.991.000,00	0,00	0,00	0,00	56.991.000,00
Jumlah Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00	0,00	3.890.849.000,00	0,00	0,00	0,00	3.890.849.000,00
2. Piutang Bagi Hasil Sumber Daya Alam									
a.	Kurang Bayar Gas Bumi s.d. TA 2023	0,00	0,00	0,00	11.335.890.000,00	0,00	0,00	0,00	11.335.890.000,00
b.	Kurang Bayar Minerba - Landrent s.d. TA 2023	0,00	0,00	0,00	118.980.000,00	0,00	0,00	0,00	118.980.000,00
c.	Kurang Bayar Minerba - Royalti s.d. TA 2023	0,00	0,00	0,00	42.172.212.000,00	0,00	0,00	0,00	42.172.212.000,00
Jumlah Bagi Hasil Sumber Daya Alam		0,00	0,00	0,00	53.627.082.000,00	0,00	0,00	0,00	53.627.082.000,00
3. Piutang Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau									
a.	Kurang Bayar s.d. TA 2023	0,00	0,00	0,00	6.408.000,00	0,00	0,00	0,00	6.408.000,00
Jumlah Bagi Hasil PBB-KB		0,00	0,00	0,00	6.408.000,00	0,00	0,00	0,00	6.408.000,00
Jumlah Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	57.524.339.000,00	0,00	0,00	0,00	57.524.339.000,00

V. PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA (BPKAD)

(dalam rupiah)									
No.	Uraian	Saldo 2023 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal Setelah Koreksi	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		Saldo Akhir 2024 (Unaudited)
					Penambahan 2024	Koreksi	Pembayaran	Koreksi/ Penghapusan	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10=5+(6+7)-(8+9)
1. Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)									
a.	Triwulan IV TA 2023	4.373.313.042,00	0,00	4.373.313.042,00	0,00	41.244.876,00	4.414.557.918,00	0,00	0,00
b.	Triwulan III TA 2024	0,00	0,00	0,00	5.117.941.042,00	0,00	0,00	0,00	5.117.941.042,00
c.	Triwulan IV TA 2024	0,00	0,00	0,00	5.021.725.439,00	0,00	0,00	0,00	5.021.725.439,00
	Jumlah Bagi Hasil PKB	4.373.313.042,00	0,00	4.373.313.042,00	10.139.666.481,00	41.244.876,00	4.414.557.918,00	0,00	10.139.666.481,00
2. Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor (BBN-KB)									
a.	Triwulan IV TA 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652.830.386,00	2.652.830.386,00	0,00	0,00
b.	Triwulan III TA 2024	0,00	0,00	0,00	3.257.561.683,00	0,00	0,00	0,00	3.257.561.683,00
c.	Triwulan IV TA 2024	0,00	0,00	0,00	3.868.274.938,00	0,00	0,00	0,00	3.868.274.938,00
	Jumlah Bagi Hasil BBN-KB	0,00	0,00	0,00	7.125.836.621,00	2.652.830.386,00	2.652.830.386,00	0,00	7.125.836.621,00
3. Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor (PBB-KB)									
a.	Triwulan III TA 2023	2.433.154.443,00	0,00	2.433.154.443,00	0,00	5,00	2.433.154.448,00	0,00	0,00
b.	Triwulan IV TA 2023	11.708.057.489,00	0,00	11.708.057.489,00	0,00	0,00	7.214.966.984,00	4.493.090.505,00	0,00
c.	Triwulan III TA 2024	0,00	0,00	0,00	7.563.282.888,00	0,00	0,00	0,00	7.563.282.888,00
d.	Triwulan IV TA 2024	0,00	0,00	0,00	7.315.487.672,00	0,00	0,00	0,00	7.315.487.672,00
	Jumlah Bagi Hasil PBB-KB	14.141.211.932,00	0,00	14.141.211.932,00	14.878.770.560,00	5,00	9.648.121.432,00	4.493.090.505,00	14.878.770.560,00
4. Piutang Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan									
a.	Triwulan III TA 2023	8.238.668,00	0,00	8.238.668,00	0,00	0,00	8.238.668,00	0,00	0,00
b.	Triwulan IV TA 2023	13.260.343,00	0,00	13.260.343,00	0,00	0,00	8.486.797,00	4.773.546,00	0,00
c.	Triwulan III TA 2024	0,00	0,00	0,00	7.940.959,00	0,00	0,00	0,00	7.940.959,00
d.	Triwulan IV TA 2024	0,00	0,00	0,00	7.864.741,00	0,00	0,00	0,00	7.864.741,00
	Jumlah Piutang Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	21.499.011,00	0,00	21.499.011,00	15.805.700,00	0,00	16.725.465,00	4.773.546,00	15.805.700,00
5. Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok									
a.	Triwulan IV TA 2023	8.354.358.047,00	0,00	8.354.358.047,00	0,00	0,00	6.153.307.375,00	2.201.050.672,00	0,00
b.	Triwulan IV TA 2024	0,00	0,00	0,00	3.164.189.709,00	0,00	0,00	0,00	3.164.189.709,00
	Jumlah Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	8.354.358.047,00	0,00	8.354.358.047,00	3.164.189.709,00	0,00	6.153.307.375,00	2.201.050.672,00	3.164.189.709,00
6. Piutang Bantuan Keuangan Khusus kepada Kelurahan									
a.	Tahap II TA 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00
	Jumlah Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00
Jumlah Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya									
		26.890.382.032,00	0,00	26.890.382.032,00	35.324.269.071,00	3.394.075.262,00	22.885.542.576,00	6.698.914.723,00	36.024.269.071,00

VI. BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

(dalam rupiah)									
No.	Uraian	Saldo 2023 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal Setelah Koreksi	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		Saldo Akhir 2024 (Unaudited)
					Penambahan 2024	Koreksi	Pembayaran	Koreksi/ Penghapusan	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10=5+(6+7)-(8+9)
1. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara (BPKAD)									
a.	SJ, mantan Bendahara Pengeluaran Satpol PP Tahun 2012	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00
b.	VR, mantan Bendahara Pengeluaran Satpol PP Tahun 2013	31.319.000,00	0,00	31.319.000,00	0,00	0,00	4.372.655,00	0,00	26.946.345,00
Jumlah Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara		34.569.000,00	0,00	34.569.000,00	0,00	0,00	7.622.655,00	0,00	26.946.345,00
Jumlah Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		34.569.000,00	0,00	34.569.000,00	0,00	0,00	7.622.655,00	0,00	26.946.345,00

**RINCIAN PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PER 31 DESEMBER 2024**

I. PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH (BPPRD)

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo 2023	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal	Mutasi Tambah			Mutasi Kurang		Saldo Akhir 2024
		(Audited)		Setelah Koreksi	Penambahan <2024	Penambahan 2024	Koreksi	Pembayaran	Koreksi/Penghapusan	(Unaudited)
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11=5+(6+7+8)-(9+10)
1. Penyisihan Pajak Reklame										
a.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	186.209.894,86	0,00	186.209.894,86	21.587.681,63	22.492,37	0,00	106.544,62	0,01	207.713.524,23
	- Tahun 2014	2.404.350,00	0,00	2.404.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404.350,00
	- Tahun 2015	32.708.128,13	0,00	32.708.128,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.708.128,13
	- Tahun 2016	78.513.556,00	0,00	78.513.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.513.556,00
	- Tahun 2017	19.940.249,60	0,00	19.940.249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.940.249,60
	- Tahun 2018	18.838.130,51	0,00	18.838.130,51	3.363.832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.201.963,31
	- Tahun 2019	9.924.400,00	0,00	9.924.400,00	9.924.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.848.800,00
	- Tahun 2020	12.903.967,50	0,00	12.903.967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.903.967,50
	- Tahun 2021	10.358.254,85	0,00	10.358.254,85	656.640,01	0,00	0,00	0,00	0,01	11.014.894,85
	- Tahun 2022	143.970,00	0,00	143.970,00	644.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.250,00
	- Tahun 2023	474.888,27	0,00	474.888,27	6.998.528,82	0,00	0,00	106.544,62	0,00	7.366.872,47
	- Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	22.492,37	0,00	0,00	0,00	22.492,37
b.	Reklame Kain	5.767.848,00	0,00	5.767.848,00	1.024.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.792.840,00
	- Tahun 2015	264.600,00	0,00	264.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.600,00
	- Tahun 2016	5.247.000,00	0,00	5.247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247.000,00
	- Tahun 2022	256.248,00	0,00	256.248,00	1.024.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.240,00
c.	Reklame Melekat/Stiker	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00
	- Tahun 2016	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00
	Jumlah Penyisihan Pajak Reklame	192.240.242,86	0,00	192.240.242,86	22.612.673,63	22.492,37	0,00	106.544,62	0,01	214.768.864,23
2. Penyisihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan										
a.	Tahun 2014	1.779.022,50	0,00	1.779.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.022,50
b.	Tahun 2015	1.222.020,00	0,00	1.222.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.020,00
c.	Tahun 2016	107.292.622,50	0,00	107.292.622,50	0,00	0,00	0,00	1.403.280,00	0,00	105.889.342,50
d.	Tahun 2017	8.651.487,30	0,00	8.651.487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.651.487,30
e.	Tahun 2018	4.539.420,90	0,00	4.539.420,90	904.230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.443.651,80
f.	Tahun 2019	2.575.551,08	0,00	2.575.551,08	2.228.797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804.348,43
g.	Tahun 2020	1.734.180,19	0,00	1.734.180,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.180,19
h.	Tahun 2021	1.156.322,39	0,00	1.156.322,39	305.075,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.398,03
i.	Tahun 2022	65.186,90	0,00	65.186,90	356.761,07	0,00	0,00	46.410,00	0,01	375.537,96
j.	Tahun 2023	12.346,20	0,00	12.346,20	234.577,83	0,00	0,00	0,00	0,01	246.924,02
k.	Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	112.544,32	0,00	0,00	0,00	112.544,32
	Jumlah Penyisihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	129.028.159,96	0,00	129.028.159,96	4.029.442,79	112.544,32	0,00	1.449.690,00	0,02	131.720.457,05

No.	Uraian	Saldo 2023	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal	Mutasi Tambah			Mutasi Kurang		Saldo Akhir 2024
		(Audited)		Setelah Koreksi						(Unaudited)
				5=3+4	Penambahan <2024	Penambahan 2024	Koreksi	Pembayaran	Koreksi/Penghapusan	11=5+(6+7+8)-(9+10)
1	2	3	4		6	7	8	9	10	
3. Penyisihan Pajak Bumi dan Banqunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)										
a.	PBB-P2 1994 s.d. 2012 yang dilimpahkan ke Pemkab	5.576.207.739,00	0,00	5.576.207.739,00	0,00	0,00	0,00	768.612,00	0,00	5.575.439.127,00
	- Tahun 1994	17.378.175,00	0,00	17.378.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.378.175,00
	- Tahun 1995	11.271.020,00	0,00	11.271.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.271.020,00
	- Tahun 1996	18.075.299,00	0,00	18.075.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.075.299,00
	- Tahun 1997	26.526.406,00	0,00	26.526.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.526.406,00
	- Tahun 1998	30.923.623,00	0,00	30.923.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.923.623,00
	- Tahun 1999	91.905.766,00	0,00	91.905.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.905.766,00
	- Tahun 2000	121.396.263,00	0,00	121.396.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.396.263,00
	- Tahun 2001	118.543.699,00	0,00	118.543.699,00	0,00	0,00	0,00	14.056,00	0,00	118.529.643,00
	- Tahun 2002	139.274.153,00	0,00	139.274.153,00	0,00	0,00	0,00	11.214,00	0,00	139.262.939,00
	- Tahun 2003	172.372.577,00	0,00	172.372.577,00	0,00	0,00	0,00	16.426,00	0,00	172.356.151,00
	- Tahun 2004	303.357.254,00	0,00	303.357.254,00	0,00	0,00	0,00	16.426,00	0,00	303.340.828,00
	- Tahun 2005	302.587.930,00	0,00	302.587.930,00	0,00	0,00	0,00	16.426,00	0,00	302.571.504,00
	- Tahun 2006	402.353.583,00	0,00	402.353.583,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	402.345.583,00
	- Tahun 2007	498.275.074,00	0,00	498.275.074,00	0,00	0,00	0,00	102.674,00	0,00	498.172.400,00
	- Tahun 2008	723.550.992,00	0,00	723.550.992,00	0,00	0,00	0,00	142.570,00	0,00	723.408.422,00
	- Tahun 2009	776.758.887,00	0,00	776.758.887,00	0,00	0,00	0,00	141.380,00	0,00	776.617.507,00
	- Tahun 2010	671.743.051,00	0,00	671.743.051,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	671.738.051,00
	- Tahun 2011	952.410.621,00	0,00	952.410.621,00	0,00	0,00	0,00	147.540,00	0,00	952.263.081,00
	- Tahun 2012	197.503.366,00	0,00	197.503.366,00	0,00	0,00	0,00	146.900,00	0,00	197.356.466,00
b.	Piutang PBB-P2 2013 s.d 2022	10.080.431.791,68	0,00	10.080.431.791,68	2.018.736.503,42	14.314.139,95	26.500,00	19.303.415,80	0,00	12.094.205.519,25
	- Tahun 2013	927.734.178,00	0,00	927.734.178,00	0,00	0,00	0,00	178.486,00	0,00	927.555.692,00
	- Tahun 2014	832.777.329,00	0,00	832.777.329,00	0,00	0,00	0,00	256.751,00	0,00	832.520.578,00
	- Tahun 2015	876.629.809,00	0,00	876.629.809,00	0,00	0,00	0,00	1.178.370,00	0,00	875.451.439,00
	- Tahun 2016	1.222.792.006,00	0,00	1.222.792.006,00	0,00	0,00	7.000,00	552.216,00	0,00	1.222.246.790,00
	- Tahun 2017	1.199.293.787,00	0,00	1.199.293.787,00	0,00	0,00	19.500,00	601.228,00	0,00	1.198.712.059,00
	- Tahun 2018	1.461.489.036,00	0,00	1.461.489.036,00	0,00	0,00	0,00	1.344.760,00	0,00	1.460.144.276,00
	- Tahun 2019	708.950.301,50	0,00	708.950.301,50	708.950.301,50	0,00	0,00	1.133.749,00	0,00	1.416.766.854,00
	- Tahun 2020	1.223.746.717,50	0,00	1.223.746.717,50	0,00	0,00	0,00	879.525,00	0,00	1.222.867.192,50
	- Tahun 2021	1.352.550.003,00	0,00	1.352.550.003,00	0,00	0,00	0,00	1.395.879,00	0,00	1.351.154.124,00
	- Tahun 2022	260.341.177,80	0,00	260.341.177,80	1.041.364.711,20	0,00	0,00	5.791.765,00	0,00	1.295.914.124,00
	- Tahun 2023	14.127.446,88	0,00	14.127.446,88	268.421.490,72	0,00	0,00	5.990.686,80	0,00	276.558.250,80
	- Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14.314.139,95	0,00	0,00	0,00	14.314.139,95
Jumlah Penyisihan PBB-P2		15.656.639.530,68	0,00	15.656.639.530,68	2.018.736.503,42	14.314.139,95	26.500,00	20.072.027,80	0,00	17.669.644.646,25
4. Penyisihan PBJT-Makanan dan/atau Minuman										
a.	Tahun 2014	154.500,00	0,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00
b.	Tahun 2015	2.531.530,00	0,00	2.531.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531.530,00
c.	Tahun 2016	9.450.141,50	0,00	9.450.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450.141,50
d.	Tahun 2017	6.031.597,00	0,00	6.031.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031.597,00
e.	Tahun 2018	6.785.504,08	0,00	6.785.504,08	425.238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210.742,16
f.	Tahun 2019	1.347.221,59	0,00	1.347.221,59	1.347.221,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694.443,18
g.	Tahun 2020	8.371.552,00	0,00	8.371.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.371.552,00
h.	Tahun 2021	1.277.469,00	0,00	1.277.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.469,00
i.	Tahun 2022	758.001,20	0,00	758.001,20	4.177.818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.820,00
j.	Tahun 2023	233.327,15	0,00	233.327,15	2.137.141,81	0,00	0,00	120.845,96	0,00	2.249.623,00
k.	Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	33.720,35	0,00	0,00	0,00	33.720,35
Jumlah Penyisihan PBJT-Makanan dan/atau Minuman		36.940.843,52	0,00	36.940.843,52	8.087.420,28	33.720,35	0,00	120.845,96	0,00	44.941.138,19

No.	Uraian	Saldo 2023	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal	Mutasi Tambah			Mutasi Kurang		Saldo Akhir 2024
		(Audited)		Setelah Koreksi	Penambahan <2024	Penambahan 2024	Koreksi	Pembayaran	Koreksi/Penghapusan	(Unaudited)
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11=5+(6+7+8)-(9+10)
5. Penyisihan PBJT-Tenaga Listrik										
a. PLN		9.108.630,61	0,00	9.108.630,61	0,00	9.841.668,74	0,00	9.108.630,61	0,00	9.841.668,74
- Tahun 2023		9.108.630,61	0,00	9.108.630,61	0,00	0,00	0,00	9.108.630,61	0,00	0,00
- Tahun 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	9.841.668,74	0,00	0,00	0,00	9.841.668,74
b. Non PLN		10.137,45	0,00	10.137,45	0,00	154.382,94	0,00	10.137,45	0,00	154.382,94
- Tahun 2023		10.137,45	0,00	10.137,45	0,00	0,00	0,00	10.137,45	0,00	0,00
- Tahun 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	154.382,94	0,00	0,00	0,00	154.382,94
Jumlah Penyisihan PBJT-Tenaga Listrik		9.118.768,06	0,00	9.118.768,06	0,00	9.996.051,68	0,00	9.118.768,06	0,00	9.996.051,68
6. Penyisihan PBJT-Jasa Perhotelan										
a. Tahun 2023		27.683,07	0,00	27.683,07	7.600,00	0,00	0,00	27.283,07	0,00	8.000,00
b. Tahun 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00
Jumlah Penyisihan PBJT-Jasa Perhotelan		27.683,07	0,00	27.683,07	7.600,00	13.050,00	0,00	27.283,07	0,00	21.050,00
7. Penyisihan PBJT-Jasa Parkir										
a. Tahun 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00
Jumlah Penyisihan PBJT-Jasa Parkir		0,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00
8. Penyisihan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan										
a. Tahun 2022		300.000,00	0,00	300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
b. Tahun 2023		1.603,35	0,00	1.603,35	30.463,65	0,00	0,00	0,00	0,00	32.067,00
c. Tahun 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Jumlah Penyisihan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan		301.603,35	0,00	301.603,35	1.230.463,65	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.534.567,00
Jumlah Penyisihan Piutang Pajak Daerah		16.024.296.831,50	0,00	16.024.296.831,50	2.054.704.103,77	24.598.098,67	26.500,00	30.895.159,51	0,03	18.072.730.374,40

II. PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

(dalam rupiah)										
No.	Uraian	Saldo 2023	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal	Mutasi Tambah			Mutasi Kurang		Saldo Akhir 2024
		(Audited)		Setelah Koreksi	Penambahan <2024	Penambahan 2024	Koreksi	Pembayaran	Koreksi/Penghapusan	(Unaudited)
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11=5+(6+7+8)-(9+10)
1. Penyisihan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)										
- Tahun 2023		1.121.785,00	0,00	1.121.785,00	0,00	0,00	0,00	1.121.785,00	0,00	0,00
- Tahun 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	2.095.425,50	0,00	0,00	0,00	2.095.425,50
Jumlah Penyisihan Retribusi Pelayanan Kesehatan		1.121.785,00	0,00	1.121.785,00	0,00	2.095.425,50	0,00	1.121.785,00	0,00	2.095.425,50

No.	Uraian	Saldo 2023	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal	Mutasi Tambah			Mutasi Kurang		Saldo Akhir 2024
		(Audited)		Setelah Koreksi	Penambahan <2024	Penambahan 2024	Koreksi	Pembayaran	Koreksi/Penghapusan	(Unaudited)
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11=5+(6+7+8)-(9+10)
2. Penyisihan Piutang BLUD (RSUD Kolonel Abundjani Bangko)										
b.	Piutang Program JKN-KIS	35.839.766,00	0,00	35.839.766,00	0,00	475.069.909,33	0,00	35.839.766,00	0,00	475.069.909,33
-	Pending Okt 2023	12.333.120,00	0,00	12.333.120,00	0,00	0,00	0,00	12.333.120,00	0,00	0,00
-	Pending Nov 2023	8.577.150,00	0,00	8.577.150,00	0,00	0,00	0,00	8.577.150,00	0,00	0,00
-	Pending Des 2023	14.929.496,00	0,00	14.929.496,00	0,00	0,00	0,00	14.929.496,00	0,00	0,00
-	Nov 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	282.681.460,00	0,00	0,00	0,00	282.681.460,00
-	Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600.549,33	0,00	0,00	0,00	14.600.549,33
-	Pending Juli 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	177.787.900,00	0,00	0,00	0,00	177.787.900,00
c.	Piutang Ambulan Rujukan BPJS	326.320,00	0,00	326.320,00	0,00	13.781.700,00	0,00	326.320,00	0,00	13.781.700,00
-	Des 2023	326.320,00	0,00	326.320,00	0,00	0,00	0,00	326.320,00	0,00	0,00
-	Okt 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676.000,00	0,00	0,00	0,00	5.676.000,00
-	Nov 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7.622.400,00	0,00	0,00	0,00	7.622.400,00
-	Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	483.300,00	0,00	0,00	0,00	483.300,00
d.	Piutang Jampersal/Klaim Bayi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Agust-Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	Klaim COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Tahun 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Tahun 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f.	Klaim BPJS Ketenagakerjaan 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g.	Klaim Pelayanan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h.	Klaim Obat Pelayanan Pasien Kronis (IFRS)	87.157.274,75	0,00	87.157.274,75	0,00	28.199.755,88	0,00	87.157.274,75	0,00	28.199.755,88
-	Sept 2023	59.526.720,50	0,00	59.526.720,50	0,00	0,00	0,00	59.526.720,50	0,00	0,00
-	Okt 2023	13.769.797,40	0,00	13.769.797,40	0,00	0,00	0,00	13.769.797,40	0,00	0,00
-	Nov 2023	13.151.092,90	0,00	13.151.092,90	0,00	0,00	0,00	13.151.092,90	0,00	0,00
-	Des 2023	709.663,95	0,00	709.663,95	0,00	0,00	0,00	709.663,95	0,00	0,00
-	Okt 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11.623.499,20	0,00	0,00	0,00	11.623.499,20
-	Nov 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	15.731.272,30	0,00	0,00	0,00	15.731.272,30
-	Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	844.984,38	0,00	0,00	0,00	844.984,38
i.	Klaim Alat Bantu Dengar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.500,00	0,00	0,00	0,00	1.017.500,00
-	Okt 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
-	Nov 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
-	Des 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Jumlah Penyisihan Piutang BLUD		131.173.360,75	0,00	131.173.360,75	0,00	518.068.865,21	0,00	125.323.360,75	0,00	523.918.865,21

No.	Uraian	Saldo 2023	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal	Mutasi Tambah			Mutasi Kurang		Saldo Akhir 2024
		(Audited)		Setelah Koreksi	Penambahan <2024	Penambahan 2024	Koreksi	Pembayaran	Koreksi/Penghapusan	(Unaudited)
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11=5+(6+7+8)-(9+10)
3. Penyisihan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan										
a.	Dinas Lingkungan Hidup	254.399.976,00	0,00	254.399.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.399.976,00
-	Tahun 2014	43.854.000,00	0,00	43.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.854.000,00
-	Tahun 2016	56.399.400,00	0,00	56.399.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.399.400,00
-	Tahun 2017	25.594.176,00	0,00	25.594.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.594.176,00
-	Tahun 2018	31.149.600,00	0,00	31.149.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.149.600,00
-	Tahun 2019	31.993.200,00	0,00	31.993.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.993.200,00
-	Tahun 2020	65.409.600,00	0,00	65.409.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.409.600,00
-	Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Perumda Air Minum Tirta Merangin	300.955.000,00	0,00	300.955.000,00	0,00	0,00	285.000,00	1.295.000,00	0,00	299.945.000,00
-	Tahun 2012	29.590.000,00	0,00	29.590.000,00	0,00	0,00	20.000,00	90.000,00	0,00	29.520.000,00
-	Tahun 2013	22.340.000,00	0,00	22.340.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	22.225.000,00
-	Tahun 2014	36.225.000,00	0,00	36.225.000,00	0,00	0,00	25.000,00	60.000,00	0,00	36.190.000,00
-	Tahun 2015	57.665.000,00	0,00	57.665.000,00	0,00	0,00	60.000,00	110.000,00	0,00	57.615.000,00
-	Tahun 2016	60.610.000,00	0,00	60.610.000,00	0,00	0,00	60.000,00	225.000,00	0,00	60.445.000,00
-	Tahun 2017	47.340.000,00	0,00	47.340.000,00	0,00	0,00	55.000,00	275.000,00	0,00	47.120.000,00
-	Tahun 2018	31.405.000,00	0,00	31.405.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	31.235.000,00
-	Tahun 2019	15.780.000,00	0,00	15.780.000,00	0,00	0,00	65.000,00	250.000,00	0,00	15.595.000,00
Jumlah Penyisihan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan		555.354.976,00	0,00	555.354.976,00	0,00	0,00	285.000,00	1.295.000,00	0,00	554.344.976,00
4. Penyisihan Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi (Dinas Komunikasi dan Informatika)										
a.	Tahun 2014	57.660.552,00	0,00	57.660.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.660.552,00
Jumlah Penyisihan Retribusi Pengendalian Menara		57.660.552,00	0,00	57.660.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.660.552,00

No.	Uraian	Saldo 2023	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		Saldo Akhir 2024	
		(Audited)		Setelah Koreksi	Penambahan <2024	Penambahan 2024	Koreksi	Pembayaran	Koreksi/Penghapusan	(Unaudited)
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11=5+(6+7+8)-(9+10)
5. Penyisihan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah										
a.	Sewa Tanah (BPPRD)	311.578.450,00	0,00	311.578.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.578.450,00
-	Tahun 2015	155.730.000,00	0,00	155.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.730.000,00
-	Tahun 2016	155.730.000,00	0,00	155.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.730.000,00
-	Tahun 2017	118.450,00	0,00	118.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.450,00
b.	Sewa Tanah (BPKAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.993.000,00	69.622.000,00	0,00	0,00	104.615.000,00
-	IZHAR MAJID, Ruko Pamenang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.622.000,00	0,00	0,00	69.622.000,00
-	IZHAR MAJID, Ruko Pamenang	0,00	0,00	0,00	0,00	34.811.000,00	0,00	0,00	0,00	34.811.000,00
-	IZHAR MAJID, Ruko Pamenang	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
c.	Sewa Rumah Dinas (BPPRD)	89.322.600,00	0,00	89.322.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.322.600,00
-	Tahun 2010	31.803.200,00	0,00	31.803.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.803.200,00
-	Tahun 2011	32.104.400,00	0,00	32.104.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.104.400,00
-	Tahun 2014	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00
-	Tahun 2015	4.620.000,00	0,00	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620.000,00
-	Tahun 2016	2.485.000,00	0,00	2.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485.000,00
-	Tahun 2017	16.480.000,00	0,00	16.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.480.000,00
d.	Sewa Ruko, Kios, Los dan WC (Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan)	2.872.951.394,00	0,00	2.872.951.394,00	324.080.455,00	4.245.015,00	0,00	44.873.280,00	0,00	3.156.403.584,00
-	Tahun 2008	76.460.000,00	0,00	76.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.460.000,00
-	Tahun 2009	80.739.000,00	0,00	80.739.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.739.000,00
-	Tahun 2010	143.325.000,00	0,00	143.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.325.000,00
-	Tahun 2011	170.563.000,00	0,00	170.563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.563.000,00
-	Tahun 2012	204.143.600,00	0,00	204.143.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.143.600,00
-	Tahun 2013	127.480.240,00	0,00	127.480.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.480.240,00
-	Tahun 2014	186.790.120,00	0,00	186.790.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.790.120,00
-	Tahun 2015	84.192.408,00	0,00	84.192.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.192.408,00
-	Tahun 2016	39.507.000,00	0,00	39.507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.507.000,00
-	Tahun 2017	54.423.601,00	0,00	54.423.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.423.601,00
-	Tahun 2018	178.940.400,00	0,00	178.940.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.940.400,00
-	Tahun 2020	817.081.800,00	0,00	817.081.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.081.800,00
-	Tahun 2021	352.186.800,00	0,00	352.186.800,00	0,00	0,00	0,00	5.940.000,00	0,00	346.246.800,00
-	Tahun 2022	354.689.600,00	0,00	354.689.600,00	0,00	0,00	0,00	38.133.000,00	0,00	316.556.600,00
-	Tahun 2023	2.428.825,00	0,00	2.428.825,00	324.080.455,00	0,00	0,00	800.280,00	0,00	325.709.000,00
-	Tahun 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245.015,00	0,00	0,00	0,00	4.245.015,00
Jumlah Penyisihan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		3.273.852.444,00	0,00	3.273.852.444,00	324.080.455,00	39.238.015,00	69.622.000,00	44.873.280,00	0,00	3.661.919.634,00
6. Penyisihan Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Dinas Perkebunan dan Peternakan)										
a.	Sapi Penggemukan Tahun 2012	21.200.000,00	0,00	21.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200.000,00
b.	Sapi Gaduhan Tahun 2015	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00
Jumlah Penyisihan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		53.700.000,00	0,00	53.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.700.000,00
7. Penyisihan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)										
a.	Tahun 2018	4.930.100,00	0,00	4.930.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930.100,00
b.	Tahun 2019	16.907.408,00	0,00	16.907.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.907.408,00
c.	Tahun 2020	24.664.200,00	0,00	24.664.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.664.200,00
Jumlah Penyisihan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung		46.501.708,00	0,00	46.501.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.501.708,00
8. Penyisihan Retribusi Izin Ganqquan/ Keramaian (BPPRD)										
a.	Tahun 2016	19.295.680,00	0,00	19.295.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.295.680,00
b.	Tahun 2017	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Jumlah Penyisihan Retribusi Izin Gangguan/Keramaian		19.403.680,00	0,00	19.403.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.403.680,00
Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi Daerah										
		4.138.768.505,75	0,00	4.138.768.505,75	324.080.455,00	559.402.305,71	69.907.000,00	172.613.425,75	0,00	4.919.544.840,71

III. PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH

(dalam rupiah)										
No.	Uraian	Saldo 2023 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal Setelah Koreksi	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		Saldo Akhir 2024 (Unaudited)	
					Penambahan <2024	Penambahan 2024	Koreksi	Pembayaran		Koreksi/Penghapusan
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11=5+(6+7+8)-(9+10)
1. Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan (BPKAD)										
	- Tahun 2023	17.043,60	0,00	17.043,60	0,00	0,00	0,00	17.043,60	0,00	0,00
	- Tahun 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	56.157,92	0,00	0,00	0,00	56.157,92
2. Penyisihan Parkir (RSUD Kol. Abundiani Bangko)										
	- Piutang Parkir 2016	7.850.000,00	0,00	7.850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	5.850.000,00
Jumlah Penyisihan Piutang Pengembalian Terlanjur Bayar Gaji PNS										
		7.867.043,60	0,00	7.867.043,60	0,00	56.157,92	0,00	2.017.043,60	0,00	5.906.157,92
Jumlah Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah										
		7.867.043,60	0,00	7.867.043,60	0,00	56.157,92	0,00	2.017.043,60	0,00	5.906.157,92

IV. PENYISIHAN BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

(dalam rupiah)										
No.	Uraian	Saldo 2023 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal Setelah Koreksi	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		Saldo Akhir 2024 (Unaudited)	
					Penambahan <2024	Penambahan 2024	Koreksi	Pembayaran		Koreksi/Penghapusan
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11=5+(6+7+8)-(9+10)
1. Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara (BPKAD)										
a.	SJ, mantan Bendahara	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00
	Pengeluaran Satpol PP Tahun 2012									
b.	VR, mantan Bendahara	31.319.000,00	0,00	31.319.000,00	0,00	0,00	0,00	4.372.655,00	0,00	26.946.345,00
	Pengeluaran Satpol PP Tahun 2013									
Jumlah Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara		34.569.000,00	0,00	34.569.000,00	0,00	0,00	0,00	7.622.655,00	0,00	26.946.345,00
Jumlah Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		34.569.000,00	0,00	34.569.000,00	0,00	0,00	0,00	7.622.655,00	0,00	26.946.345,00

**RINCIAN PIUTANG PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN PER 31 DESEMBER 2024
MENURUT KUALITAS PIUTANG**

I. PIUTANG PAJAK DAERAH (BPPRD)

(dalam rupiah)											
No.	Uraian	Saldo Akhir Piutang 2024 (Unaudited)	Kualitas Piutang				Penyisihan Piutang				Saldo Akhir Penyisihan 2024 (Unaudited)
			Lancar (≤1 Thn)	Kurang Lancar (>1-2 Thn)	Diragukan (>2-5 Thn)	Macet (>5 Thn)	Lancar (0-5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11
1. Pajak Reklame											
a.	Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	303.198.470,51	4.498.474,00	73.668.724,78	49.414.224,69	175.617.047,04	22.492,37	7.366.872,47	24.707.112,35	175.617.047,04	207.713.524,23
-	Tahun 2014	2.404.350,00	0,00	0,00	0,00	2.404.350,00	0,00	0,00	0,00	2.404.350,00	2.404.350,00
-	Tahun 2015	32.708.128,13	0,00	0,00	0,00	32.708.128,13	0,00	0,00	0,00	32.708.128,13	32.708.128,13
-	Tahun 2016	78.513.556,00	0,00	0,00	0,00	78.513.556,00	0,00	0,00	0,00	78.513.556,00	78.513.556,00
-	Tahun 2017	19.940.249,60	0,00	0,00	0,00	19.940.249,60	0,00	0,00	0,00	19.940.249,60	19.940.249,60
-	Tahun 2018	22.201.963,31	0,00	0,00	0,00	22.201.963,31	0,00	0,00	0,00	22.201.963,31	22.201.963,31
-	Tahun 2019	19.848.800,00	0,00	0,00	0,00	19.848.800,00	0,00	0,00	0,00	19.848.800,00	19.848.800,00
-	Tahun 2020	25.807.935,00	0,00	0,00	25.807.935,00	0,00	0,00	0,00	12.903.967,50	0,00	12.903.967,50
-	Tahun 2021	22.029.789,69	0,00	0,00	22.029.789,69	0,00	0,00	0,00	11.014.894,85	0,00	11.014.894,85
-	Tahun 2022	1.576.500,00	0,00	0,00	1.576.500,00	0,00	0,00	0,00	788.250,00	0,00	788.250,00
-	Tahun 2023	73.668.724,78	0,00	73.668.724,78	0,00	0,00	0,00	7.366.872,47	0,00	0,00	7.366.872,47
-	Tahun 2024	4.498.474,00	4.498.474,00	0,00	0,00	0,00	22.492,37	0,00	0,00	0,00	22.492,37
b.	Reklame Kain	8.074.080,00	0,00	0,00	2.562.480,00	5.511.600,00	0,00	0,00	1.281.240,00	5.511.600,00	6.792.840,00
-	Tahun 2015	264.600,00	0,00	0,00	0,00	264.600,00	0,00	0,00	0,00	264.600,00	264.600,00
-	Tahun 2016	5.247.000,00	0,00	0,00	0,00	5.247.000,00	0,00	0,00	0,00	5.247.000,00	5.247.000,00
-	Tahun 2022	2.562.480,00	0,00	0,00	2.562.480,00	0,00	0,00	0,00	1.281.240,00	0,00	1.281.240,00
c.	Reklame Melekat/Stiker	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	262.500,00
-	Tahun 2016	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	262.500,00
Jumlah Pajak Reklame		311.535.050,51	4.498.474,00	73.668.724,78	51.976.704,69	181.391.147,04	22.492,37	7.366.872,47	25.988.352,35	181.391.147,04	214.768.864,23
2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan											
a.	Tahun 2014	1.779.022,50	0,00	0,00	0,00	1.779.022,50	0,00	0,00	0,00	1.779.022,50	1.779.022,50
b.	Tahun 2015	1.222.020,00	0,00	0,00	0,00	1.222.020,00	0,00	0,00	0,00	1.222.020,00	1.222.020,00
c.	Tahun 2016	105.889.342,50	0,00	0,00	0,00	105.889.342,50	0,00	0,00	0,00	105.889.342,50	105.889.342,50
d.	Tahun 2017	8.651.487,30	0,00	0,00	0,00	8.651.487,30	0,00	0,00	0,00	8.651.487,30	8.651.487,30
e.	Tahun 2018	5.443.651,80	0,00	0,00	0,00	5.443.651,80	0,00	0,00	0,00	5.443.651,80	5.443.651,80
f.	Tahun 2019	5.151.102,15	0,00	0,00	693.507,45	4.457.594,70	0,00	0,00	346.753,73	4.457.594,70	4.804.348,43
g.	Tahun 2020	3.468.360,38	0,00	0,00	3.468.360,38	0,00	0,00	0,00	1.734.180,19	0,00	1.734.180,19
h.	Tahun 2021	2.922.796,05	0,00	0,00	2.922.796,05	0,00	0,00	0,00	1.461.398,03	0,00	1.461.398,03
i.	Tahun 2022	3.755.379,60	0,00	3.755.379,60	0,00	0,00	0,00	375.537,96	0,00	0,00	375.537,96
j.	Tahun 2023	2.469.240,15	0,00	2.469.240,15	0,00	0,00	0,00	246.924,02	0,00	0,00	246.924,02
k.	Tahun 2024	22.508.846,00	22.508.846,00	0,00	0,00	0,00	112.544,32	0,00	0,00	0,00	112.544,32
Jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		163.261.248,43	22.508.846,00	6.224.619,75	7.084.663,88	127.443.118,80	112.544,32	622.461,98	3.542.331,95	127.443.118,80	131.720.457,05

No.	Uraian	Saldo Akhir	Kualitas Piutang					Penyisihan Piutang			Saldo Akhir
		Piutang 2024 (Unaudited)	Lancar (≤1 Thn)	Kurang Lancar (>1-2 Thn)	Diragukan (>2-5 Thn)	Macet (>5 Thn)	Lancar (0.5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Penyisihan 2024 (Unaudited)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)											
a.	PBB-P2 1994 s.d. 2012 yang dilimpahkan ke Pemkab	5.575.439.127,00	0,00	0,00	0,00	5.575.439.127,00	0,00	0,00	0,00	5.575.439.127,00	5.575.439.127,00
-	Tahun 1994	17.378.175,00	0,00	0,00	0,00	17.378.175,00	0,00	0,00	0,00	17.378.175,00	17.378.175,00
-	Tahun 1995	11.271.020,00	0,00	0,00	0,00	11.271.020,00	0,00	0,00	0,00	11.271.020,00	11.271.020,00
-	Tahun 1996	18.075.299,00	0,00	0,00	0,00	18.075.299,00	0,00	0,00	0,00	18.075.299,00	18.075.299,00
-	Tahun 1997	26.526.406,00	0,00	0,00	0,00	26.526.406,00	0,00	0,00	0,00	26.526.406,00	26.526.406,00
-	Tahun 1998	30.923.623,00	0,00	0,00	0,00	30.923.623,00	0,00	0,00	0,00	30.923.623,00	30.923.623,00
-	Tahun 1999	91.905.766,00	0,00	0,00	0,00	91.905.766,00	0,00	0,00	0,00	91.905.766,00	91.905.766,00
-	Tahun 2000	121.396.263,00	0,00	0,00	0,00	121.396.263,00	0,00	0,00	0,00	121.396.263,00	121.396.263,00
-	Tahun 2001	118.529.643,00	0,00	0,00	0,00	118.529.643,00	0,00	0,00	0,00	118.529.643,00	118.529.643,00
-	Tahun 2002	139.262.939,00	0,00	0,00	0,00	139.262.939,00	0,00	0,00	0,00	139.262.939,00	139.262.939,00
-	Tahun 2003	172.356.151,00	0,00	0,00	0,00	172.356.151,00	0,00	0,00	0,00	172.356.151,00	172.356.151,00
-	Tahun 2004	303.340.828,00	0,00	0,00	0,00	303.340.828,00	0,00	0,00	0,00	303.340.828,00	303.340.828,00
-	Tahun 2005	302.571.504,00	0,00	0,00	0,00	302.571.504,00	0,00	0,00	0,00	302.571.504,00	302.571.504,00
-	Tahun 2006	402.345.583,00	0,00	0,00	0,00	402.345.583,00	0,00	0,00	0,00	402.345.583,00	402.345.583,00
-	Tahun 2007	498.172.400,00	0,00	0,00	0,00	498.172.400,00	0,00	0,00	0,00	498.172.400,00	498.172.400,00
-	Tahun 2008	723.408.422,00	0,00	0,00	0,00	723.408.422,00	0,00	0,00	0,00	723.408.422,00	723.408.422,00
-	Tahun 2009	776.617.507,00	0,00	0,00	0,00	776.617.507,00	0,00	0,00	0,00	776.617.507,00	776.617.507,00
-	Tahun 2010	671.738.051,00	0,00	0,00	0,00	671.738.051,00	0,00	0,00	0,00	671.738.051,00	671.738.051,00
-	Tahun 2011	952.263.081,00	0,00	0,00	0,00	952.263.081,00	0,00	0,00	0,00	952.263.081,00	952.263.081,00
-	Tahun 2012	197.356.466,00	0,00	0,00	0,00	197.356.466,00	0,00	0,00	0,00	197.356.466,00	197.356.466,00
b.	Piutang PBB-P2 2013 s.d 2024	21.301.679.067,00	2.862.827.990,00	2.765.582.508,00	7.739.870.881,00	7.933.397.688,00	14.314.139,95	276.558.250,80	3.869.935.440,50	7.933.397.688,00	12.094.205.519,25
-	Tahun 2013	927.555.692,00	0,00	0,00	0,00	927.555.692,00	0,00	0,00	0,00	927.555.692,00	927.555.692,00
-	Tahun 2014	832.520.578,00	0,00	0,00	0,00	832.520.578,00	0,00	0,00	0,00	832.520.578,00	832.520.578,00
-	Tahun 2015	875.451.439,00	0,00	0,00	0,00	875.451.439,00	0,00	0,00	0,00	875.451.439,00	875.451.439,00
-	Tahun 2016	1.222.246.790,00	0,00	0,00	0,00	1.222.246.790,00	0,00	0,00	0,00	1.222.246.790,00	1.222.246.790,00
-	Tahun 2017	1.198.712.059,00	0,00	0,00	0,00	1.198.712.059,00	0,00	0,00	0,00	1.198.712.059,00	1.198.712.059,00
-	Tahun 2018	1.460.144.276,00	0,00	0,00	0,00	1.460.144.276,00	0,00	0,00	0,00	1.460.144.276,00	1.460.144.276,00
-	Tahun 2019	1.416.766.854,00	0,00	0,00	0,00	1.416.766.854,00	0,00	0,00	0,00	1.416.766.854,00	1.416.766.854,00
-	Tahun 2020	2.445.734.385,00	0,00	0,00	2.445.734.385,00	0,00	0,00	0,00	1.222.867.192,50	0,00	1.222.867.192,50
-	Tahun 2021	2.702.308.248,00	0,00	0,00	2.702.308.248,00	0,00	0,00	0,00	1.351.154.124,00	0,00	1.351.154.124,00
-	Tahun 2022	2.591.828.248,00	0,00	0,00	2.591.828.248,00	0,00	0,00	0,00	1.295.914.124,00	0,00	1.295.914.124,00
-	Tahun 2023	2.765.582.508,00	0,00	2.765.582.508,00	0,00	0,00	0,00	276.558.250,80	0,00	0,00	276.558.250,80
-	Tahun 2024	2.862.827.990,00	2.862.827.990,00	0,00	0,00	0,00	14.314.139,95	0,00	0,00	0,00	14.314.139,95
Jumlah PBB-P2		26.877.118.194,00	2.862.827.990,00	2.765.582.508,00	7.739.870.881,00	13.508.836.815,00	14.314.139,95	276.558.250,80	3.869.935.440,50	13.508.836.815,00	17.669.644.646,25
4. PBJT-Makanan dan/atau Minuman											
a.	Tahun 2014	154.500,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00	154.500,00
b.	Tahun 2015	2.531.530,00	0,00	0,00	0,00	2.531.530,00	0,00	0,00	0,00	2.531.530,00	2.531.530,00
c.	Tahun 2016	9.450.141,50	0,00	0,00	0,00	9.450.141,50	0,00	0,00	0,00	9.450.141,50	9.450.141,50
d.	Tahun 2017	6.031.597,00	0,00	0,00	0,00	6.031.597,00	0,00	0,00	0,00	6.031.597,00	6.031.597,00
e.	Tahun 2018	7.210.742,16	0,00	0,00	0,00	7.210.742,16	0,00	0,00	0,00	7.210.742,16	7.210.742,16
f.	Tahun 2019	2.694.443,18	0,00	0,00	0,00	2.694.443,18	0,00	0,00	0,00	2.694.443,18	2.694.443,18
g.	Tahun 2020	16.743.104,00	0,00	0,00	16.743.104,00	0,00	0,00	0,00	8.371.552,00	0,00	8.371.552,00
h.	Tahun 2021	2.554.938,00	0,00	0,00	2.554.938,00	0,00	0,00	0,00	1.277.469,00	0,00	1.277.469,00
i.	Tahun 2022	9.871.640,00	0,00	0,00	9.871.640,00	0,00	0,00	0,00	4.935.820,00	0,00	4.935.820,00
j.	Tahun 2023	22.496.230,00	0,00	22.496.230,00	0,00	0,00	0,00	2.249.623,00	0,00	0,00	2.249.623,00
k.	Tahun 2024	6.744.070,00	6.744.070,00	0,00	0,00	0,00	33.720,35	0,00	0,00	0,00	33.720,35
Jumlah PBJT-Makanan dan/atau Minuman		86.482.935,84	6.744.070,00	22.496.230,00	29.169.682,00	28.072.953,84	33.720,35	2.249.623,00	14.584.841,00	28.072.953,84	44.941.138,19

No.	Uraian	Saldo Akhir Piutang 2024 (Unaudited)	Kualitas Piutang				Penyisihan Piutang				Saldo Akhir Penyisihan 2024 (Unaudited)
			Lancar (≤1 Thn)	Kurang Lancar (>1-2 Thn)	Diragukan (>2-5 Thn)	Macet (>5 Thn)	Lancar (0.5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11
5. PBJT-Tenaga Listrik											
a. PLN		1.968.333.747,00	1.968.333.747,00	0,00	0,00	0,00	9.841.668,74	0,00	0,00	0,00	9.841.668,74
- Tahun 2024		1.968.333.747,00	1.968.333.747,00	0,00	0,00	0,00	9.841.668,74	0,00	0,00	0,00	9.841.668,74
b. Non PLN		30.876.588,00	30.876.588,00	0,00	0,00	0,00	154.382,94	0,00	0,00	0,00	154.382,94
- Tahun 2024		30.876.588,00	30.876.588,00	0,00	0,00	0,00	154.382,94	0,00	0,00	0,00	154.382,94
Jumlah PBJT-Tenaga Listrik		1.999.210.335,00	1.999.210.335,00	0,00	0,00	0,00	9.996.051,68	0,00	0,00	0,00	9.996.051,68
6. PBJT-Jasa Perhotelan											
a. Tahun 2023		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
b. Tahun 2024		2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00
Jumlah PBJT-Jasa Perhotelan		2.690.000,00	2.610.000,00	80.000,00	0,00	0,00	13.050,00	8.000,00	0,00	0,00	21.050,00
7. PBJT-Jasa Parkir											
a. Tahun 2024		20.720.000,00	20.720.000,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00
Jumlah PBJT-Jasa Parkir		20.720.000,00	20.720.000,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00
8. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan											
a. Tahun 2022		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
b. Tahun 2023		320.670,00	0,00	320.670,00	0,00	0,00	0,00	32.067,00	0,00	0,00	32.067,00
c. Tahun 2024		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Jumlah PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan		3.820.670,00	500.000,00	320.670,00	3.000.000,00	0,00	2.500,00	32.067,00	1.500.000,00	0,00	1.534.567,00
Total Piutang Pajak Daerah		29.464.838.433,78	4.898.899.715,00	2.868.372.752,53	7.831.101.931,57	13.845.744.034,68	24.494.498,67	286.837.275,25	3.915.550.965,80	13.845.744.034,68	18.072.730.374,40

II. PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

No.	Uraian	Saldo Akhir Piutang 2024 (Unaudited)	Kualitas Piutang				Penyisihan Piutang				Saldo Akhir Penyisihan 2024 (Unaudited)
			Lancar (≤1 Bln)	Kurang Lancar (>1-3 Bln)	Diragukan (>3-12 Thn)	Macet (>12 Thn)	Lancar (0.5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)											
a. Tahun 2024		419.085.100,00	419.085.100,00	0,00	0,00	0,00	2.095.425,50	0,00	0,00	0,00	2.095.425,50
Jumlah Retribusi Pelayanan Kesehatan		419.085.100,00	419.085.100,00	0,00	0,00	0,00	2.095.425,50	0,00	0,00	0,00	2.095.425,50
2. Piutang BLUD (RSUD Kolonel Abundjani Bangko)											
b. Piutang Program JKN-KIS		6.102.500.265,00	2.920.109.865,00	2.826.814.600,00	355.575.800,00	0,00	14.600.549,33	282.681.460,00	177.787.900,00	0,00	475.069.909,33
- Pending Juli 2024		355.575.800,00	0,00	0,00	355.575.800,00	0,00	0,00	0,00	177.787.900,00	0,00	177.787.900,00
- Nov 2024		2.826.814.600,00	0,00	2.826.814.600,00	0,00	0,00	0,00	282.681.460,00	0,00	0,00	282.681.460,00
- Des 2024		2.920.109.865,00	2.920.109.865,00	0,00	0,00	0,00	14.600.549,33	0,00	0,00	0,00	14.600.549,33
c. Piutang Ambulan Rujukan BPJS		229.644.000,00	96.660.000,00	132.984.000,00	0,00	0,00	483.300,00	13.298.400,00	0,00	0,00	13.781.700,00
- Okt 2024		56.760.000,00	0,00	56.760.000,00	0,00	0,00	0,00	5.676.000,00	0,00	0,00	5.676.000,00
- Nov 2024		76.224.000,00	0,00	76.224.000,00	0,00	0,00	0,00	7.622.400,00	0,00	0,00	7.622.400,00
- Des 2024		96.660.000,00	96.660.000,00	0,00	0,00	0,00	483.300,00	0,00	0,00	0,00	483.300,00
d. Klaim Obat Pelayanan Pasien Kronis (IFRS)		442.544.590,00	168.996.875,00	273.547.715,00	0,00	0,00	844.984,38	27.354.771,50	0,00	0,00	28.199.755,88
- Okt 2024		116.234.992,00	0,00	116.234.992,00	0,00	0,00	0,00	11.623.499,20	0,00	0,00	11.623.499,20
- Nov 2024		157.312.723,00	0,00	157.312.723,00	0,00	0,00	0,00	15.731.272,30	0,00	0,00	15.731.272,30
- Des 2024		168.996.875,00	168.996.875,00	0,00	0,00	0,00	844.984,38	0,00	0,00	0,00	844.984,38
e. Klaim Alat Bantu Dengar		15.400.000,00	5.500.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	27.500,00	990.000,00	0,00	0,00	1.017.500,00
- Okt 2024		5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
- Nov 2024		4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
- Des 2024		5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Jumlah Piutang BLUD		6.795.938.855,00	3.191.266.740,00	3.243.246.315,00	355.575.800,00	5.850.000,00	15.956.333,71	324.324.631,50	177.787.900,00	5.850.000,00	523.918.865,21

No.	Uraian	Saldo Akhir	Kualitas Piutang				Penyisihan Piutang				Saldo Akhir
		Piutang 2024 (Unaudited)	Lancar (≤1 Bln)	Kurang Lancar (>1-3 Bln)	Diragukan (>3-12 Thn)	Macet (>12 Thn)	Lancar (0-5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Penyisihan 2024 (Unaudited)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11
3. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan											
a.	Dinas Lingkungan Hidup	254.399.976,00	0,00	0,00	0,00	254.399.976,00	0,00	0,00	0,00	254.399.976,00	254.399.976,00
-	Tahun 2014	43.854.000,00	0,00	0,00	0,00	43.854.000,00	0,00	0,00	0,00	43.854.000,00	43.854.000,00
-	Tahun 2016	56.399.400,00	0,00	0,00	0,00	56.399.400,00	0,00	0,00	0,00	56.399.400,00	56.399.400,00
-	Tahun 2017	25.594.176,00	0,00	0,00	0,00	25.594.176,00	0,00	0,00	0,00	25.594.176,00	25.594.176,00
-	Tahun 2018	31.149.600,00	0,00	0,00	0,00	31.149.600,00	0,00	0,00	0,00	31.149.600,00	31.149.600,00
-	Tahun 2019	31.993.200,00	0,00	0,00	0,00	31.993.200,00	0,00	0,00	0,00	31.993.200,00	31.993.200,00
-	Tahun 2020	65.409.600,00	0,00	0,00	0,00	65.409.600,00	0,00	0,00	0,00	65.409.600,00	65.409.600,00
b.	Perumda Air Minum Tirta Merangin	299.945.000,00	0,00	0,00	0,00	299.945.000,00	0,00	0,00	0,00	299.945.000,00	299.945.000,00
-	Tahun 2012	29.520.000,00	0,00	0,00	0,00	29.520.000,00	0,00	0,00	0,00	29.520.000,00	29.520.000,00
-	Tahun 2013	22.225.000,00	0,00	0,00	0,00	22.225.000,00	0,00	0,00	0,00	22.225.000,00	22.225.000,00
-	Tahun 2014	36.190.000,00	0,00	0,00	0,00	36.190.000,00	0,00	0,00	0,00	36.190.000,00	36.190.000,00
-	Tahun 2015	57.615.000,00	0,00	0,00	0,00	57.615.000,00	0,00	0,00	0,00	57.615.000,00	57.615.000,00
-	Tahun 2016	60.445.000,00	0,00	0,00	0,00	60.445.000,00	0,00	0,00	0,00	60.445.000,00	60.445.000,00
-	Tahun 2017	47.120.000,00	0,00	0,00	0,00	47.120.000,00	0,00	0,00	0,00	47.120.000,00	47.120.000,00
-	Tahun 2018	31.235.000,00	0,00	0,00	0,00	31.235.000,00	0,00	0,00	0,00	31.235.000,00	31.235.000,00
-	Tahun 2019	15.595.000,00	0,00	0,00	0,00	15.595.000,00	0,00	0,00	0,00	15.595.000,00	15.595.000,00
Jumlah Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan		554.344.976,00	0,00	0,00	0,00	554.344.976,00	0,00	0,00	0,00	554.344.976,00	554.344.976,00
4. Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi (Dinas Komunikasi dan Informatika)											
a.	Tahun 2014	57.660.552,00	0,00	0,00	0,00	57.660.552,00	0,00	0,00	0,00	57.660.552,00	57.660.552,00
Jumlah Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi		57.660.552,00	0,00	0,00	0,00	57.660.552,00	0,00	0,00	0,00	57.660.552,00	57.660.552,00
5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah											
a.	Sewa Tanah (BPPRD)	311.578.450,00	0,00	0,00	0,00	311.578.450,00	0,00	0,00	0,00	311.578.450,00	311.578.450,00
-	STKIP YPM Bangko 2015	155.730.000,00	0,00	0,00	0,00	155.730.000,00	0,00	0,00	0,00	155.730.000,00	155.730.000,00
-	STKIP YPM Bangko 2016	155.730.000,00	0,00	0,00	0,00	155.730.000,00	0,00	0,00	0,00	155.730.000,00	155.730.000,00
-	Penjahit Pesona Busana 2017	118.450,00	0,00	0,00	0,00	118.450,00	0,00	0,00	0,00	118.450,00	118.450,00
b.	Sewa Tanah (BPKAD)	175.644.000,00	36.400.000,00	0,00	69.622.000,00	69.622.000,00	182.000,00	0,00	34.811.000,00	69.622.000,00	104.615.000,00
-	IZHAR MAJID, Ruko Pamenang	69.622.000,00	0,00	0,00	0,00	69.622.000,00	0,00	0,00	0,00	69.622.000,00	69.622.000,00
-	IZHAR MAJID, Ruko Pamenang	69.622.000,00	0,00	0,00	69.622.000,00	0,00	0,00	0,00	34.811.000,00	0,00	34.811.000,00
-	STAI Bangko	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
c.	Sewa Rumah Dinas (BPPRD)	89.322.600,00	0,00	0,00	0,00	89.322.600,00	0,00	0,00	0,00	89.322.600,00	89.322.600,00
-	Tahun 2010	31.803.200,00	0,00	0,00	0,00	31.803.200,00	0,00	0,00	0,00	31.803.200,00	31.803.200,00
-	Tahun 2011	32.104.400,00	0,00	0,00	0,00	32.104.400,00	0,00	0,00	0,00	32.104.400,00	32.104.400,00
-	Tahun 2014	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
-	Tahun 2015	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00	4.620.000,00	4.620.000,00
-	Tahun 2016	2.485.000,00	0,00	0,00	0,00	2.485.000,00	0,00	0,00	0,00	2.485.000,00	2.485.000,00
-	Tahun 2017	16.480.000,00	0,00	0,00	0,00	16.480.000,00	0,00	0,00	0,00	16.480.000,00	16.480.000,00
d.	Sewa Ruko, Kios, Los dan WC (Dinas Koperasi UKM Perindag)	4.001.161.569,00	849.003.000,00	0,00	0,00	3.152.158.569,00	4.245.015,00	0,00	0,00	3.152.158.569,00	3.156.403.584,00
-	Tahun 2008	76.460.000,00	0,00	0,00	0,00	76.460.000,00	0,00	0,00	0,00	76.460.000,00	76.460.000,00
-	Tahun 2009	80.739.000,00	0,00	0,00	0,00	80.739.000,00	0,00	0,00	0,00	80.739.000,00	80.739.000,00
-	Tahun 2010	143.325.000,00	0,00	0,00	0,00	143.325.000,00	0,00	0,00	0,00	143.325.000,00	143.325.000,00
-	Tahun 2011	170.563.000,00	0,00	0,00	0,00	170.563.000,00	0,00	0,00	0,00	170.563.000,00	170.563.000,00
-	Tahun 2012	204.143.600,00	0,00	0,00	0,00	204.143.600,00	0,00	0,00	0,00	204.143.600,00	204.143.600,00
-	Tahun 2013	127.480.240,00	0,00	0,00	0,00	127.480.240,00	0,00	0,00	0,00	127.480.240,00	127.480.240,00
-	Tahun 2014	186.790.120,00	0,00	0,00	0,00	186.790.120,00	0,00	0,00	0,00	186.790.120,00	186.790.120,00
-	Tahun 2015	84.192.408,00	0,00	0,00	0,00	84.192.408,00	0,00	0,00	0,00	84.192.408,00	84.192.408,00
-	Tahun 2016	39.507.000,00	0,00	0,00	0,00	39.507.000,00	0,00	0,00	0,00	39.507.000,00	39.507.000,00
-	Tahun 2017	54.423.601,00	0,00	0,00	0,00	54.423.601,00	0,00	0,00	0,00	54.423.601,00	54.423.601,00
-	Tahun 2018	178.940.400,00	0,00	0,00	0,00	178.940.400,00	0,00	0,00	0,00	178.940.400,00	178.940.400,00
-	Tahun 2020	817.081.800,00	0,00	0,00	0,00	817.081.800,00	0,00	0,00	0,00	817.081.800,00	817.081.800,00
-	Tahun 2021	346.246.800,00	0,00	0,00	0,00	346.246.800,00	0,00	0,00	0,00	346.246.800,00	346.246.800,00
-	Tahun 2022	316.556.600,00	0,00	0,00	0,00	316.556.600,00	0,00	0,00	0,00	316.556.600,00	316.556.600,00
-	Tahun 2023	325.709.000,00	0,00	0,00	0,00	325.709.000,00	0,00	0,00	0,00	325.709.000,00	325.709.000,00
-	Tahun 2024	849.003.000,00	849.003.000,00	0,00	0,00	0,00	4.245.015,00	0,00	0,00	0,00	4.245.015,00
Jumlah Retribusi Pemakaian		4.577.706.619,00	885.403.000,00	0,00	69.622.000,00	3.622.681.619,00	4.427.015,00	0,00	34.811.000,00	3.622.681.619,00	3.661.919.634,00

No.	Uraian	Saldo Akhir Piutang 2024 (Unaudited)	Kualitas Piutang				Penyisihan Piutang				Saldo Akhir Penyisihan 2024 (Unaudited)
			Lancar (≤1 Bln)	Kurang Lancar (>1-3 Bln)	Diragukan (>3-12 Thn)	Macet (>12 Thn)	Lancar (0.5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11
6. Piutang Hasil Penjualan Hewan (Dinas Perkebunan dan Peternakan)											
a.	Sapi Penggemukan Tahun 2012	21.200.000,00	0,00	0,00	0,00	21.200.000,00	0,00	0,00	0,00	21.200.000,00	21.200.000,00
b.	Sapi Gaduhan Tahun 2015	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00
Jumlah Piutang Hasil Penjualan Hewan		53.700.000,00	0,00	0,00	0,00	53.700.000,00	0,00	0,00	0,00	53.700.000,00	53.700.000,00
7. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)											
a.	Tahun 2018	4.930.100,00	0,00	0,00	0,00	4.930.100,00	0,00	0,00	0,00	4.930.100,00	4.930.100,00
b.	Tahun 2019	16.907.408,00	0,00	0,00	0,00	16.907.408,00	0,00	0,00	0,00	16.907.408,00	16.907.408,00
c.	Tahun 2020	24.664.200,00	0,00	0,00	0,00	24.664.200,00	0,00	0,00	0,00	24.664.200,00	24.664.200,00
Jumlah Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung		46.501.708,00	0,00	0,00	0,00	46.501.708,00	0,00	0,00	0,00	46.501.708,00	46.501.708,00
8. Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian (BPPRD)											
a.	Tahun 2016	19.295.680,00	0,00	0,00	0,00	19.295.680,00	0,00	0,00	0,00	19.295.680,00	19.295.680,00
b.	Tahun 2017	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
Jumlah Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian		19.403.680,00	0,00	0,00	0,00	19.403.680,00	0,00	0,00	0,00	19.403.680,00	19.403.680,00
Total Piutang Retribusi Daerah		12.524.341.490,00	4.495.754.840,00	3.243.246.315,00	425.197.800,00	4.360.142.535,00	22.478.774,21	324.324.631,50	212.598.900,00	4.360.142.535,00	4.919.544.840,71

III. PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH

(dalam rupiah)											
No.	Uraian	Saldo Akhir Piutang 2024 (Unaudited)	Kualitas Piutang			Penyisihan Piutang				Saldo Akhir Penyisihan 2024 (Unaudited)	
			Lancar (≤1 Bln)	Kurang Lancar (>1-12 Bln)	Diragukan (>12-24 Bln)	Macet (>24 Bln)	Lancar (0.5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)		Macet (100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11
1. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan (BPKAD)											
a.	Tahun 2024	11.231.584,00	11.231.584,00	0,00	0,00	0,00	56.157,92	0,00	0,00	0,00	56.157,92
2. Piutang BLUD (RSUD Kolonel Abundjani Bangko)											
a.	Piutang Parkir 2016	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00
Jumlah Piutang Lain-Lain PAD yang Sah											
		17.081.584,00	11.231.584,00	0,00	0,00	5.850.000,00	56.157,92	0,00	0,00	5.850.000,00	5.906.157,92

IV. BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

(dalam rupiah)											
No.	Uraian	Saldo Akhir Piutang 2024 (Unaudited)	Kualitas Piutang				Penyisihan Piutang				Saldo Akhir Penyisihan 2024 (Unaudited)
			Lancar (≤1 Bln)	Kurang Lancar (>1-12 Bln)	Diragukan (>12-24 Bln)	Macet (>24 Bln)	Lancar (0.5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11
1. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara (BPKAD)											
a.	VR, mantan Bendahara	26.946.345,00	0,00	0,00	0,00	26.946.345,00	0,00	0,00	0,00	26.946.345,00	26.946.345,00
	Pengeluaran Satpol PP Tahun 2013										
	Jumlah Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	26.946.345,00	0,00	0,00	0,00	26.946.345,00	0,00	0,00	0,00	26.946.345,00	26.946.345,00
	Jumlah Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	26.946.345,00	0,00	0,00	0,00	26.946.345,00	0,00	0,00	0,00	26.946.345,00	26.946.345,00

**RINCIAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PER 31 DESEMBER 2024**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Aset yang Diasuransikan	Nama dan Alamat Penyedia Jasa	Polis/Perjanjian Kerjasama		Periode Asuransi		Nilai Premi Asuransi/ Realisasi Belanja	Sisa Asuransi per 31 Des 2024		Jumlah Asuransi Dibayar Dimuka		Saldo 2023	Mutasi Tahun 2024		Saldo Akhir 2024		
				No.	Jangka Waktu Tanggungan	Mulai	Berakhir		Waktu	Nilai	Waktu	Nilai		Audited	Tambah		Kurang	Unaudited
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	Dinas Kesehatan - Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP kelas 3	182.312 Jiwa	BPJS Kesehatan Jl. Teuku Umar Kel. Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo Telp. (0242)21139	400.2.24.2/2343.1/Dinkes/2023 13 Desember 2023	12 Bulan	01 Januari 2024	31 Desember 2024	7.706.222.400,00 6.891.393.600,00		7.697.889.066,67 6.891.393.600,00		8.333.333,33 -	6.250.000,00 -	8.333.333,33 -	6.250.000,00 -	8.333.333,33 -		
	- Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP kelas 3	182.312 Jiwa	BPJS Kesehatan Jl. Teuku Umar Kel. Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo Telp. (0242)21139	78/PMK.02/2020 30 Juni 2020	12 Bulan	01 Januari 2024	31 Desember 2024	789.828.800,00	12 Bulan	789.828.800,00	0 Bulan	-	-	-	-	-		
	- Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)	Rumah beserta Peralatan Rumah Tangga	Pemilik Rumah an. Popy Maryudi Shoheri Puskesmas Muara Madras Telp. (0246) 322959	400.7.14.2/687/DINKES/2024 22 Mei 2024	12 Bulan	01 Mei 2024	30 April 2025	25.000.000,00	8 Bulan	16.666.666,67	4 Bulan	8.333.333,33	6.250.000,00	8.333.333,33	6.250.000,00	8.333.333,33		
2.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	58 Pegawai	BPJS Ketenagakerjaan Jl. Jend. Sudirman Lintas Sumatera Km. 1 Merangin Telp. (0246) 322959	211/KTR/II-08/0920 01 September 2020	12 Bulan	01 Januari 2024	31 Desember 2024	7.656.000,00	12 Bulan	7.656.000,00	0 Bulan	-	-	-	-	-		
3.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan - Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	72 Pegawai	Bendahara Umum Negara		12 Bulan	01 Januari 2024	31 Desember 2024	111.411.195,00 83.460.195,00		111.411.195,00 83.460.195,00		-	-	-	-	-		
	- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	213 Pegawai	BPJS Ketenagakerjaan Jl. Jend. Sudirman Lintas Sumatera Km. 1 Merangin Telp. (0246) 322959	PER/110/122022 28 Desember 2022	12 Bulan	01 Januari 2024	31 Desember 2024	27.951.000,00	12 Bulan	27.951.000,00	0 Bulan	-	-	-	-	-		
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	18 Pegawai	BPJS Kesehatan Jl. Teuku Umar Kel. Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo Telp. (0242)21139	PER/06/032022 01 Maret 2022	12 Bulan	01 Januari 2024	31 Desember 2024	44.429.834,00 24.015.084,00		33.272.186,74 24.015.084,00		11.157.647,26 -	11.920.109,29 -	11.157.647,26 -	11.920.109,29 -	11.157.647,26 -		
	- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	34 Pegawai	BPJS Ketenagakerjaan Jl. Jend. Sudirman Lintas Sumatera Km. 1 Merangin Telp. (0246) 322959	PER/110/122022 28 Desember 2022	12 Bulan	01 Januari 2024	31 Desember 2024	4.444.000,00	12 Bulan	4.444.000,00	0 Bulan	-	-	-	-	-		
	- Premi Asuransi Barang Milik Daerah	Kendaraan Roda 4 (BH 8023 F, BH 1309 FZ)	Bumiputera Muda Jl. Gajah Mada No.10, Lb. Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36135 Telp. (0241) 3601087	1025022124090006 12 September 2024	365 Hari	12 September 2024	12 September 2025	15.970.750,00	110 Hari	4.813.102,74	255 Hari	11.157.647,26	11.920.109,29	11.157.647,26	11.920.109,29	11.157.647,26		
5.	Dinas Lingkungan Hidup - Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	278 Pegawai	BPJS Ketenagakerjaan Jl. Jend. Sudirman Lintas Sumatera Km. 1 Merangin Telp. (0246) 322959	PER/110/122022 28 Desember 2022	12 Bulan	01 Juni 2024	01 Mei 2025	36.696.000,00	7 Bulan	21.406.000,00	5 Bulan	15.290.000,00	18.216.000,00	15.290.000,00	18.216.000,00	15.290.000,00		
6.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.559 Jiwa	BPJS Kesehatan Jl. Teuku Umar Kel. Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo Telp. (0242)21139	211/KTR/II-08/0920 01 September 2020	12 Bulan	01 Januari 2024	31 Desember 2024	2.257.172.722,00	12 Bulan	2.257.172.722,00	0 Bulan	-	-	-	-	-		
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika - Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	21 Pegawai	BPJS Ketenagakerjaan Jl. Jend. Sudirman Lintas Sumatera Km. 1 Merangin Telp. (0246) 322959	PER/110/122022 28 Desember 2022	12 Bulan	01 Januari 2024	31 Desember 2024	2.772.000,00	12 Bulan	2.772.000,00	0 Bulan	-	-	-	-	-		

No.	Uraian	Aset yang Diasuransikan	Nama dan Alamat Penyedia Jasa	Polis/Perjanjian Kerjasama		Periode Asuransi		Nilai Premi Asuransi/ Realisasi Belanja	Sisa Asuransi per 31 Des 2024		Jumlah Asuransi Dibayar Dimuka		Saldo 2023	Mutasi Tahun 2024		Saldo Akhir 2024
				No.	Jangka Waktu Tanggungan	Mulai	Berakhir		Waktu	Nilai	Waktu	Nilai		Audited	Tambah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian							1.760.000,00		1.565.000,00		195.000,00	-	195.000,00	-	195.000,00
	- Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2 Pegawai	BPJS Kesehatan Jl. Teuku Umar Kel. Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo Telp. (0247)21139		12 Bulan	01 Januari 2024	31 Desember 2024	1.400.000,00	12 Bulan	1.400.000,00	0 Bulan	-	-	-	-	-
	- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1 Pegawai an. Deka Saputra	BPJS Ketenagakerjaan Jl. Jend. Sudirman Lintas Sumatera Km. 1 Merangin Telp. (0746) 322959		12 Bulan	03 Juli 2024	02 Juli 2025	180.000,00	6 Bulan	90.000,00	6 Bulan	90.000,00	-	90.000,00	-	90.000,00
		1 Pegawai an. Hambali Amin	BPJS Ketenagakerjaan Jl. Jend. Sudirman Lintas Sumatera Km. 1 Merangin Telp. (0746) 322959		12 Bulan	14 Agustus 2024	13 Agustus 2025	180.000,00	5 Bulan	75.000,00	7 Bulan	105.000,00	-	105.000,00	-	105.000,00
9.	Dinas Peternakan dan Perkebunan							42.000.000,00		42.000.000,00		-	-	-	-	-
	- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	500 Pekerja	BPJS Ketenagakerjaan Jl. Jend. Sudirman Lintas Sumatera Km. 1 Merangin Telp. (0746) 322959	PER/02/092024 Juni 2024	12 Bulan	01 Januari 2024	31 Desember 2024	42.000.000,00	12 Bulan	42.000.000,00	0 Bulan	-	-	-	-	-
10.	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura							8.470.000,00		7.425.753,42		-	1.067.452,05	-	1.067.452,05	-
	- Premi Asuransi Barang Milik Daerah	Kendaraan Roda 4 (BH 29 FZ)	Bumiputera Muda Jl. Gajah Mada No.10, Lb. Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36135 Telp. (0741) 3601087	1025022123020005 15 Februari 2023	365 Hari	15 Februari 2023	15 Februari 2024	8.470.000,00	320 Hari	7.425.753,42	0 Hari	-	1.067.452,05	-	1.067.452,05	-
11.	Sekretariat Daerah							218.564.551,00		83.953.097,19		53.971.670,33	80.639.783,47	53.971.670,33	80.639.783,47	53.971.670,33
	- Premi Asuransi Barang Milik Daerah	Kendaraan Roda 4 (BH 1 FZ, BH 6 FZ)	Bumiputera Muda Jl. Gajah Mada No.10, Lb. Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36135 Telp. (0741) 3601087	1025022123040001 4 April 2023	366 Hari	04 April 2023	04 April 2024	25.344.850,00	271 Hari	18.766.268,72	0 Hari	-	6.578.581,28	-	6.578.581,28	-
	- Premi Asuransi Barang Milik Daerah	Kendaraan Roda 4 (BH 10 FZ, BH 11 FZ, BH 1061 FZ, BH 19 FZ, BH 20 FZ, BH 17 FZ, BH 1526 F, BH 1316 FZ, BH 1528 F, BH 1651 F, BH 1652 F, BH 1592 F, BH 1591 F, BH 1653 F, BH 1508 F, BH 8620 F, BH 2052 F, BH 1051 F, BH 1066 F, BH 1088 F, BH 1060 F)	Bumiputera Muda Jl. Gajah Mada No.10, Lb. Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36135 Telp. (0741) 3601087	1025022123080007 04 September 2023	366 Hari	04 September 2023	04 September 2024	109.300.000,00	118 Hari	35.238.797,81	0 Hari	-	74.061.202,19	-	74.061.202,19	-
	- Premi Asuransi Barang Milik Daerah	Kendaraan Roda 4 (BH 1 FZ, BH 2 F, BH 6 FZ)	Bumiputera Muda Jl. Gajah Mada No.10, Lb. Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36135 Telp. (0741) 3601087	1025022124040006 4 April 2024	365 Hari	04 April 2024	04 April 2025	17.935.300,00	271 Hari	13.316.346,03	94 Hari	4.618.953,97	-	4.618.953,97	-	4.618.953,97
	- Premi Asuransi Barang Milik Daerah	Kendaraan Roda 4 (BH 10 FZ, BH 11 FZ, BH 1061 FZ, BH 19 FZ, BH 17 FZ, BH 1526 F, BH 1528 F, BH 1651 F, BH 1653 F, BH 8620 F, BH 1060 F, BH 1066 F)	Bumiputera Muda Jl. Gajah Mada No.10, Lb. Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36135 Telp. (0741) 3601087	1025022124100003 30 September 2024	365 Hari	30 September 2024	30 September 2025	65.984.401,00	92 Hari	16.631.684,64	273 Hari	49.352.716,36	-	49.352.716,36	-	49.352.716,36

No.	Uraian	Aset yang Diasuransikan	Nama dan Alamat Penyedia Jasa	Polis/ Perjanjian Kerjasama		Periode Asuransi		Nilai Premi Asuransi/ Realisasi Belanja	Sisa Asuransi per 31 Des 2024		Jumlah Asuransi Dibayar Dimuka		Saldo 2023	Mutasi Tahun 2024		Saldo Akhir 2024		
				No.	Jangka Waktu Tanggungan	Mulai	Berakhir		Waktu	Nilai	Waktu	Nilai		Audited	Tambah		Kurang	Unaudited
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
12.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							64.688.950,00		34.338.553,80		34.281.158,49	24.278.237,70	34.281.158,49	24.278.237,70	34.281.158,49		
	- Premi Asuransi Barang Milik Daerah	Kendaraan Roda 4 (BH 1579 FZ, BH 22 F, BH 1306 FZ, BH 1578 F, BH 1574 F, BH 8035 F)	Bumiputera Muda Jl. Gajah Mada No.10, Lb. Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36135 Telp. (0741) 3601087	1025022123110021 10 November 2023	366 Hari	10 November 2023	10 November 2024	28.209.000,00	417 Hari	32.139.762,30	0 Hari	-	24.278.237,70	-	24.278.237,70	-		
	- Premi Asuransi Barang Milik Daerah	Kendaraan Roda 4 (BH 1579 FZ, BH 22 F, BH 1306 FZ, BH 1578 F, BH 1574 F)	Bumiputera Muda Jl. Gajah Mada No.10, Lb. Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36135 Telp. (0741) 3601087	1025022124120011 09 Desember 2024	365 Hari	09 Desember 2024	09 Desember 2025	30.485.350,00	22 Hari	1.837.473,15	343 Hari	28.647.876,85	-	28.647.876,85	-	28.647.876,85		
	- Premi Asuransi Barang Milik Daerah	Kendaraan Roda 4 (BH 8035 F)	Bumiputera Muda Jl. Gajah Mada No.10, Lb. Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36135 Telp. (0741) 3601087	1025022124120012 09 Desember 2024	365 Hari	09 Desember 2024	09 Desember 2025	5.994.600,00	22 Hari	361.318,36	343 Hari	5.633.281,64	-	5.633.281,64	-	5.633.281,64		
13.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah							104.296.036,00		66.296.648,60		9.572.557,39	5.160.131,55	9.572.557,39	5.160.131,55	9.572.557,39		
	- Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	26 Pegawai	BPJS Kesehatan Jl. Teuku Umar Kel. Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo Telp. (0742)21139	PER/40/032022 1 Maret 2022	12 Bulan	01 Januari 2024	31 Desember 2024	40.818.960,00	12 Bulan	40.818.960,00	0 Bulan	-	-	-	-	-		
	- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	43 Pegawai	BPJS Ketenagakerjaan Jl. Jend. Sudirman Lintas Sumatera Km. 1 Merangin Telp. (0746) 322959	PER/40/032022 1 Maret 2022	12 Bulan	01 Januari 2024	31 Desember 2024	5.577.000,00	12 Bulan	5.577.000,00	0 Bulan	-	-	-	-	-		
	- Premi Asuransi Barang Milik Daerah	Kendaraan Roda 4 (BH 1576 F, BH 1572 F, BH 1584 F, BH 1614 F, BH 1031 F)	Bumiputera Muda Jl. Gajah Mada No.10, Lb. Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36135 Telp. (0741) 3601087	1025022123030006 16 Maret 2023	366 Hari	16 Maret 2023	16 Maret 2024	22.982.455,00	0 Hari	-	0 Hari	-	4.772.313,06	-	4.772.313,06	-		
	- Premi Asuransi Barang Milik Daerah	Kendaraan Roda 4 (BH 1619 F)	Bumiputera Muda Jl. Gajah Mada No.10, Lb. Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36135 Telp. (0741) 3601087	102502212301003 26 Januari 2023	365 Hari	26 Januari 2023	26 Januari 2024	5.444.375,00	0 Hari	-	0 Hari	-	387.818,49	-	387.818,49	-		
	- Premi Asuransi Barang Milik Daerah	Kendaraan Roda 4 (BH 1576 F, BH 1572 F, BH 1614 F, BH 1619 F, BH 1031 F)	Bumiputera Muda Jl. Gajah Mada No.10, Lb. Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36135 Telp. (0741) 3601087	1025022124030017 16 Maret 2024	365 Hari	16 Maret 2024	16 Maret 2025	23.988.246,00	290 Hari	19.059.154,36	75 Hari	4.929.091,64	-	4.929.091,64	-	4.929.091,64		
	- Premi Asuransi Barang Milik Daerah	Kendaraan Roda 4 (BH 1747 XX)	Bumiputera Muda Jl. Gajah Mada No.10, Lb. Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36135 Telp. (0741) 3601087	1025022124110012 05 Nopember 2024	365 Hari	05 November 2024	05 November 2025	5.485.000,00	56 Hari	841.534,25	309 Hari	4.643.465,75	-	4.643.465,75	-	4.643.465,75		
14.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah							28.814.175,00		12.290.906,92		16.523.268,08	17.425.397,27	16.523.268,08	17.425.397,27	16.523.268,08		
	- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	67 Pegawai	BPJS Ketenagakerjaan Jl. Jend. Sudirman Lintas Sumatera Km. 1 Merangin Telp. (0746) 322959	PER/022/112024 19 November 2024	12 Bulan	01 Januari 2024	31 Desember 2024	8.844.000,00	12 Bulan	8.844.000,00	0 Bulan	-	-	-	-	-		
	- Premi Asuransi Barang Milik Daerah	Kendaraan Roda 4 (BH 1599 FZ)	Bumiputera Muda Jl. Gajah Mada No.10, Lb. Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36135 Telp. (0741) 3601087	1025022124110001 29 Oktober 2024	365 Hari	29 Oktober 2024	29 Oktober 2025	4.984.125,00	63 Hari	860.273,63	302 Hari	4.123.851,37	4.476.588,52	4.123.851,37	4.476.588,52	4.123.851,37		
	- Premi Asuransi Barang Milik Daerah	Kendaraan Roda 4 (BH 1560 F, BH 1557 F, BH 1032 F)	Bumiputera Muda Jl. Gajah Mada No.10, Lb. Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36135 Telp. (0741) 3601087	1025022124110002 29 Oktober 2024	365 Hari	29 Oktober 2024	29 Oktober 2025	14.986.050,00	63 Hari	2.586.633,29	302 Hari	12.399.416,71	12.948.808,74	12.399.416,71	12.948.808,74	12.399.416,71		

No.	Uraian	Aset yang Diasuransikan	Nama dan Alamat Penyedia Jasa	Polis/ Perjanjian Kerjasama		Periode Asuransi		Nilai Premi Asuransi/ Realisasi Belanja	Sisa Asuransi per 31 Des 2024		Jumlah Asuransi Dibayar Dimuka		Saldo 2023	Mutasi Tahun 2024		Saldo Akhir 2024		
				No.	Jangka Waktu Tanggungan	Mulai	Berakhir		Waktu	Nilai	Waktu	Nilai		Audited	Tambah		Kurang	Unaudited
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
15.	Sekretariat DPRD							86.152.785,00		7.756.308,25		27.342.564,25	44.583.635,41	27.342.564,25	44.583.635,41	27.342.564,25		
	- Premi Asuransi Barang Milik Daerah	Kendaraan Roda 4 (BH 1599 FZ)	Bumiputera Muda Jl. Gajah Mada No.10, Lb. Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36135 Telp. (0741) 3601087	1025022123110027 30 November 2023	366 Hari	30 November 2023	30 November 2024	39.562.185,00	31 Hari	3.350.895,45	0 Hari	-	29.833.778,85	-	29.833.778,85	-		
	- Premi Asuransi Barang Milik Daerah	Kendaraan Roda 4 (BH 1560 F, BH 1557 F, BH 1032 F)	Bumiputera Muda Jl. Gajah Mada No.10, Lb. Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36135 Telp. (0741) 3601087	1025022123110026 15 November 2023	366 Hari	15 November 2023	15 November 2024	16.976.250,00	46 Hari	2.133.627,05	0 Hari	-	14.749.856,56	-	14.749.856,56	-		
	- Premi Asuransi Barang Milik Daerah	Kendaraan Roda 4 (BH 21 FZ, BH 1633 F, BH 1540 FZ, BH 1563 F, BH 1057 F)	Bumiputera Muda Jl. Gajah Mada No.10, Lb. Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36135 Telp. (0741) 3601087	1025022124120006 3 Desember 2024	365 Hari	03 Desember 2024	03 Desember 2025	29.614.350,00	28 Hari	2.271.785,75	337 Hari	27.342.564,25	-	27.342.564,25	-	27.342.564,25		
16.	Kantor Camat Bangko							60.480.000,00		60.480.000,00		-	-	-	-	-		
	Kelurahan Dusun Bangko																	
	- Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP kelas 3	50 Jiwa		Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2024 22 Juli 2024	12 Bulan	01 Januari 2024	31 Desember 2024	10.080.000,00	12 Bulan	10.080.000,00	0 Bulan	-	-	-	-	-		
	- Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP kelas 3	25 Jiwa		Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2024 22 Juli 2024	12 Bulan	01 Januari 2024	31 Desember 2024	5.040.000,00	12 Bulan	5.040.000,00	0 Bulan	-	-	-	-	-		
	Kelurahan Pasar Bangko																	
	- Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP kelas 3	50 Jiwa		Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2024 22 Juli 2024	12 Bulan	01 Januari 2024	31 Desember 2024	10.080.000,00	12 Bulan	10.080.000,00	0 Bulan	-	-	-	-	-		
	- Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP kelas 3	25 Jiwa		Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2024 22 Juli 2024	12 Bulan	01 Januari 2024	31 Desember 2024	5.040.000,00	12 Bulan	5.040.000,00	0 Bulan	-	-	-	-	-		
	Kelurahan Pasar Atas																	
	- Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP kelas 3	50 Jiwa		Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2024 22 Juli 2024	12 Bulan	01 Januari 2024	31 Desember 2024	10.080.000,00	12 Bulan	10.080.000,00	0 Bulan	-	-	-	-	-		
	- Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP kelas 3	25 Jiwa		Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2024 22 Juli 2024	12 Bulan	01 Januari 2024	31 Desember 2024	5.040.000,00	12 Bulan	5.040.000,00	0 Bulan	-	-	-	-	-		
	Kelurahan Pematang Kandis																	
	- Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP kelas 3	50 Jiwa		Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2024 22 Juli 2024	12 Bulan	01 Januari 2024	31 Desember 2024	10.080.000,00	12 Bulan	10.080.000,00	0 Bulan	-	-	-	-	-		
	- Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP kelas 3	25 Jiwa		Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2024 22 Juli 2024	12 Bulan	01 Januari 2024	31 Desember 2024	5.040.000,00	12 Bulan	5.040.000,00	0 Bulan	-	-	-	-	-		

No.	Uraian	Aset yang Diasuransikan	Nama dan Alamat Penyedia Jasa	Polis/Perjanjian Kerjasama		Periode Asuransi		Nilai Premi Asuransi/ Realisasi Belanja	Sisa Asuransi per 31 Des 2024		Jumlah Asuransi Dibayar Dimuka		Saldo 2023	Mutasi Tahun 2024		Saldo Akhir 2024
				No.	Jangka Waktu Tanggungan	Mulai	Berakhir		Waktu	Nilai	Waktu	Nilai		Audited	Tambah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17.	Kantor Camat Tabir							75.600.000,00		75.600.000,00			-	-	-	-
	Kelurahan Pasar Rantau Panjang															
	- Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP kelas 3	50 Jiwa		Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2024	12 Bulan	01 Januari 2024	31 Desember 2024	10.080.000,00	12 Bulan	10.080.000,00	0 Bulan	-	-	-	-	-
	- Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP kelas 3	25 Jiwa		Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2024	12 Bulan	01 Januari 2024	31 Desember 2024	5.040.000,00	12 Bulan	5.040.000,00	0 Bulan	-	-	-	-	-
	Kelurahan Mampun															
	- Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP kelas 3	50 Jiwa		Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2024	12 Bulan	01 Januari 2024	31 Desember 2024	10.080.000,00	12 Bulan	10.080.000,00	0 Bulan	-	-	-	-	-
	- Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP kelas 3	25 Jiwa		Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2024	12 Bulan	01 Januari 2024	31 Desember 2024	5.040.000,00	12 Bulan	5.040.000,00	0 Bulan	-	-	-	-	-
	Kelurahan Pasar Baru															
	- Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP kelas 3	50 Jiwa		Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2024	12 Bulan	01 Januari 2024	31 Desember 2024	10.080.000,00	12 Bulan	10.080.000,00	0 Bulan	-	-	-	-	-
	- Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP kelas 3	25 Jiwa		Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2024	12 Bulan	01 Januari 2024	31 Desember 2024	5.040.000,00	12 Bulan	5.040.000,00	0 Bulan	-	-	-	-	-
	Kelurahan Dusun Baru															
	- Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP kelas 3	50 Jiwa		Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2024	12 Bulan	01 Januari 2024	31 Desember 2024	10.080.000,00	12 Bulan	10.080.000,00	0 Bulan	-	-	-	-	-
	- Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP kelas 3	25 Jiwa		Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2024	12 Bulan	01 Januari 2024	31 Desember 2024	5.040.000,00	12 Bulan	5.040.000,00	0 Bulan	-	-	-	-	-
	Kelurahan Kampung Baruh															
	- Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP kelas 3	50 Jiwa		Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2024	12 Bulan	01 Januari 2024	31 Desember 2024	10.080.000,00	12 Bulan	10.080.000,00	0 Bulan	-	-	-	-	-
	- Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP kelas 3	25 Jiwa		Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2024	12 Bulan	01 Januari 2024	31 Desember 2024	5.040.000,00	12 Bulan	5.040.000,00	0 Bulan	-	-	-	-	-
18.	Kantor Camat Pamenang							24.796.800,00		24.796.800,00			-	-	-	-
	Kelurahan Pamenang															
	- Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP kelas 3	98 Jiwa		Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2024	12 Bulan	01 Januari 2024	31 Desember 2024	19.756.800,00	12 Bulan	19.756.800,00	0 Bulan	-	-	-	-	-
	- Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP kelas 3	25 Jiwa		Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2024	12 Bulan	01 Januari 2024	31 Desember 2024	5.040.000,00	12 Bulan	5.040.000,00	0 Bulan	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Aset yang Diasuransikan	Nama dan Alamat Penyedia Jasa	Polis/Perjanjian Kerjasama		Periode Asuransi		Nilai Premi Asuransi/ Realisasi Belanja	Sisa Asuransi per 31 Des 2024		Jumlah Asuransi Dibayar Dimuka		Saldo 2023	Mutasi Tahun 2024		Saldo Akhir 2024
				No.	Jangka Waktu Tanggungan	Mulai	Berakhir		Waktu	Nilai	Waktu	Nilai		Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19.	Kantor Camat Renah Pamenang	7 Pegawai	BPJS Ketenagakerjaan Jl. Jend. Sudirman Lintas Sumatera Km. 1 Merangin Telp. (0246) 322959	PER/110/122022 28 Desember 2022	12 Bulan	01 Januari 2024	31 Desember 2024	924.000,00	12 Bulan	924.000,00	0 Bulan	-	-	-	-	-
	- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN							924.000,00		924.000,00		-	-	-	-	-
	Jumlah Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa							2.257.172.722,00		2.257.172.722,00		-	-	-	-	-
	Jumlah Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBP dan BP kelas 3							7.052.270.400,00		7.052.270.400,00		-	-	-	-	-
	Jumlah Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBP dan BP kelas 3							789.828.800,00		789.828.800,00		-	-	-	-	-
	Jumlah Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN							149.694.239,00		149.694.239,00		-	-	-	-	-
	Jumlah Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN							137.224.000,00		121.739.000,00	15.485.000,00	18.216.000,00	15.485.000,00	18.216.000,00	18.216.000,00	15.485.000,00
	Jumlah Asuransi Barang Milik Daerah							215.428.172,00		62.579.306,18	152.848.865,80	185.074.746,75	152.848.865,80	185.074.746,75	185.074.746,75	152.848.865,80
	Jumlah Sewa Rumah Kelahiran (RTK)							25.000.000,00		16.666.666,67	8.333.333,33	6.250.000,00	8.333.333,33	6.250.000,00	6.250.000,00	8.333.333,33
	TOTAL							10.626.618.333,00		10.449.951.133,85	176.667.199,13	209.540.746,75	176.667.199,13	209.540.746,75	209.540.746,75	176.667.199,13

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
RINCIAN PERSEDIAAN SKPD
PER 31 DESEMBER 2024

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Uraian Persediaan	Per 31 Desember 2024		Per 31 Desember 2023	
			Jumlah/Jenis	Jumlah	Jumlah/Jenis	Jumlah
1	2	3	4	5	4	5
1.	Dinas Kesehatan	Obat	6.037.221.085,02	6.037.221.085,02	3.743.551.548,00	3.743.551.548,00
		- Obat di Instalasi Farmasi	3.855.903.086,81		3.001.295.464,00	
		- Obat di Puskesmas	813.799.453,00		668.524.149,00	
		- Obat Program Kecacingan	2.704.146,48		0,00	
		- Obat Program Jiwa	98.875.589,00		6.623.415,00	
		- Obat Program Malaria	16.323.548,00		0,00	
		- Obat Program DBD	43.026.480,00		0,00	
		- Obat Program Rabies	29.412.900,00		0,00	
		- Obat Program HIV	57.515.088,25		0,00	
		- Obat Program Diare	26.141.020,00		0,00	
		- Obat Program Kusta	506.391,48		0,00	
		- Obat Program Gizi	144.504.000,00		67.108.520,00	
		- Obat Program Hepatitis	47.547.317,00		0,00	
		- Obat Program TBC	900.962.065,00		0,00	
2.	RSUD Kol. Abundjani Bangko	Obat	1.279.280.859,00	2.120.307.739,00	2.447.716.874,00	4.427.330.872,00
		Obat-obatan Lainnya	841.026.880,00		1.979.613.998,00	
3.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Alat Listrik	113.413.210,00	113.413.210,00	0,00	0,00
4.	Dinas Ketahanan Pangan	Obat-Obatan Lainnya (Penyediaan Alat Penguji Mutu dan Keamanan Pangan)	40.170.000,00	73.601.585,00	120.510.000,00	736.500.978,00
		Natura (Cadangan Beras)	33.431.585,00		615.990.978,00	
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bahan Cetak	56.911.800,00	445.037.350,00	115.368.500,00	348.217.300,00
		Bahan Komputer	388.125.550,00		232.848.800,00	
5.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Obat-Obatan Lainnya (Alat Kontrasepsi)	327.635.044,00	327.635.044,00	0,00	0,00
6.	Dinas Perhubungan	Bahan Baku (untuk PKB)	15.022.040,00	116.035.040,00	15.022.040,00	123.123.040,00
		Alat Tulis Kantor	12.202.000,00		14.390.000,00	
		Bahan Cetak	87.336.000,00		92.286.000,00	
		Alat Listrik	925.000,00		1.105.000,00	
		Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih)	550.000,00		320.000,00	
7.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Alat Tulis Kantor	63.000,00	63.000,00	160.000,00	634.000,00
		Bahan Cetak	0,00		435.000,00	
		Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih)	0,00		39.000,00	
8.	Dinas Perikanan	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	18.622.000,00	74.924.000,00	51.691.250,00	97.498.250,00
		Obat-Obatan Lainnya (Obat dan Peralatan Ikan)	16.355.000,00		19.045.000,00	
		Pakan (Peralatan Perikanan)	39.947.000,00		26.762.000,00	
9.	Dinas Peternakan dan Perkebunan	Pakan (Konsentrat Ternak)	0,00	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00
10.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Alat Tulis Kantor	786.000,00	786.000,00	290.000,00	290.000,00
11.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bahan Cetak	0,00	0,00	1.039.000,00	1.039.000,00
12.	Kantor Camat Muara Siau	Alat Tulis Kantor	511.000,00	511.000,00	702.000,00	702.000,00
13.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Alat Tulis Kantor	511.000,00	1.625.000,00	777.000,00	1.599.500,00
		Benda Pos	100.000,00		0,00	
		Bahan Cetak	280.000,00		401.500,00	
		Bahan Komputer	529.000,00		158.000,00	
		Alat Listrik	55.000,00		0,00	
		Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih)	150.000,00		263.000,00	
Jumlah		Bahan Baku	15.022.040,00		15.022.040,00	
		Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	18.622.000,00		51.691.250,00	
		Alat Tulis Kantor	14.073.000,00		16.319.000,00	
		Bahan Cetak	144.527.800,00		209.530.000,00	
		Benda Pos	100.000,00		0,00	
		Bahan Komputer	388.654.550,00		233.006.800,00	
		Alat Listrik	114.393.210,00		1.105.000,00	
		Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	700.000,00		622.000,00	
		Obat	7.316.501.944,02		6.191.268.422,00	
		Obat-obatan Lainnya	1.225.186.924,00		2.119.168.998,00	
		Natura	33.431.585,00		615.990.978,00	
		Pakan	39.947.000,00		64.262.000,00	
				9.311.160.053,02		9.517.986.488,00

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
RINCIAN OBAT KADALUARSA PER 31 DESEMBER 2024

Lampiran 16b

I. DINAS KESEHATAN

(dalam rupiah)

No.	Uraian Persediaan	Kuantitas		Nilai	
		Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Abocath 20	set	1	8.000,00	8.000,00
2	Acetylcystein Kapsul 200 mg	tablet	60.720	310,00	18.823.200,00
3	Acyclovir 400 mg	tablet	20	999,00	19.980,00
4	Alat Suntik Sekali Pakai 3 ml	botol	100	1.000,00	100.000,00
5	Alat Suntik Sekali Pakai 5 ml	vial	24	1.100,00	26.400,00
6	Alopurinol Tab 100 mg	tablet	170	88,00	14.960,00
7	Alopurinol Tab 300 mg	pot	100	202,00	20.200,00
8	Aminofilina Inj 24 mg/ml-10 ml	tablet	249	2.628,00	654.372,00
9	Amlodipin 10 mg	botol	300	72,00	21.600,00
10	Amlodipin 5 mg	tablet	310	53,00	16.430,00
11	Amoksisilin Kap 500 mg	tablet	110	213,00	23.430,00
12	Amoksisilina Kap 250 mg	botol	70	194,00	13.580,00
13	Anti Hemmoroid Suppositoria	tube	110	3.280,00	360.800,00
14	Aqua Pro Injeksi Steril	botol	144	2.674,00	385.056,00
15	Asam Folat Tab 1 mg	tablet	160	59,00	9.440,00
16	Asam Mefenamat Tablet 500 mg	tablet	680	112,00	76.160,00
17	Atropin Sulpat Inj 0,25 mg/ml-1 ml	botol	78	1.718,00	134.004,00
18	Captopril Tablet 25 mg	tablet	694	76,00	52.744,00
19	Cianokobalamin Tab 50 mcg	tablet	1.535	45,00	69.075,00
20	Difenhidramin Inj 10 mg/ml-1ml	tablet	96	833,00	79.968,00
21	Doxycycline 100 mg	tablet	170	289,00	49.130,00
22	Erytromisin Kapsul 500 mg	bungkus	1.620	2.220,00	3.596.400,00
23	Fitomenadion Tab Salut 10 mg	botol	10	788,00	7.880,00
24	Furosemida Tablet 40 mg	tablet	110	104,00	11.440,00
25	Gentamisin Inj	botol	3	3.386,00	10.158,00
26	Geriavita Tablet	vial	310	3.774,00	1.169.940,00
27	Glibenklamida Tab 5 mg	vial	100	87,00	8.700,00
28	Glukosa lar Infus 5 % Steril	botol	10	6.627,00	66.270,00
29	Golongan Darah	pot	121	519.000,00	62.799.000,00
30	Griseofulvin Tab 125 mg Micrinized	tablet	355	210,00	74.550,00
31	Herbacold	botol	243	2.521,00	612.603,00
32	Infus Set Anak	tablet	34	6.600,00	224.400,00
33	Kalsium Laktat Tablet 500 mg	tablet	680	60,00	40.800,00
34	Klorampenicol Syrup	vial	9	201,00	1.809,00
35	Klorfeniramin Maleas Tablet 4 mg	tablet	80	175,00	14.000,00
36	Kotrimoksazol Suspensi	botol	11	2.119,00	23.309,00
37	Magnesium Sulfat Inj (iv) 40 %-25 ml	tablet	36	4.290,00	154.440,00
38	Magnesium Sulpat Inj (iv) 20%-25 ml	tablet	20	3.760,00	75.200,00
39	Metformin 500 mg	tablet	4.002	78,00	312.156,00
40	Metil Ergometrin Inj 0,200mg/1 ml	botol	47	1.023,00	48.081,00
41	Metoklorpamid Drop	tube	21.400	1.778,00	38.049.200,00
42	Multivitamin Anak syrup	tube	1	22.600,00	22.600,00
43	Nipedipin Tablet	Set	27	3.986,00	107.622,00
44	Nistatin 100.000 IU/G Tab Vagina	tablet	21	555,00	11.655,00
45	Norefineprina Bitartrat inj 0,1 %-1 ml	ampul	300	1.604,00	481.200,00
46	Oksitetrasiklin Salep Kulit 3%	tablet	25	2.886,00	72.150,00
47	Oksitoksin Inj 10 IU/ml-ml	tablet	44	1.126,00	49.544,00
48	Omeprazol Inj	tablet	4	5.395,00	21.580,00
49	Pehapral	botol	70	1.387,00	97.090,00
50	Piridoksin HCl Tab 10 mg	pcs	1.298	72,00	93.456,00
51	Salbutamol 4 mg	kapsul	527	65,00	34.255,00
52	Salbutamol Tablet 2mg	tablet	340	50,00	17.000,00
53	Simvastatin 10 mg	tablet	250	69,00	17.250,00
54	Simvastatin 20 mg	tablet	90	151,00	13.590,00
55	Thiamin HCl Inj 100 mg/ml-1ml	botol	41.170	430,00	17.703.100,00
56	Urin Bag	kotak	27	6.800,00	183.600,00
Jumlah I			139.236		147.184.557,00

II. RSUD KOL. ABUNDJANI

(dalam rupiah)

No.	Uraian Persediaan	Kuantitas		Nilai	
		Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Captopril 25 mg	tab	300	75,00	22.500,00
2	Cendo Vasacon MDS	pcs	210	2.900,00	609.000,00
3	Cilostazol	tab	400	6.485,00	2.594.000,00
4	Granon injeksi	amp	3	115.835,00	347.505,00
5	Haloperidol 5 mg	tab	1500	218,00	327.000,00
6	Mask Non Rebretng Anak	pcs	20	34.870,00	697.400,00
7	Mevilox 15 mg	tab	90	8.436,00	759.240,00
8	Pyrantel Pamoat	tab	196	677,00	132.692,00
9	Quetiapine XR 200 mg	tab	20	14.070,00	281.400,00
10	Vaksin Hepatitis Dewasa	vial	130	66.600,00	8.658.000,00
11	Vitamin C 500 mg	tab	5100	472,00	2.407.200,00
Jumlah II			7.969		16.835.937,00
Total (I + II)			147.205		164.020.494,00

KABUPATEN MERANGIN
INVESTASI PERMANEN PEMERINTAH DAERAH
PADA BUMD PT. BANK JAMBI DAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA MERANGIN
Per 31 Desember 2024

I. Posisi Modal Pemerintah Kabupaten Merangin pada PT. Bank Jambi

(dalam rupiah)

No.	Pemegang Saham	Per 31 Desember 2024*		Per 31 Desember 2023**			
A. Saham Seri A							
1.	Pemerintah Prov. Jambi	256.594	24,34%	256.594.000.000	198.364	22,51%	198.364.000.000
2.	PT. BPD Jabar & Banten Tbk	81.700	7,75%	81.700.000.000	-	0,00%	
3.	Pemerintah Kota Jambi	70.000	6,64%	70.000.000.000	65.000	7,38%	65.000.000.000
4.	Pemerintah Kab. Batang Hari	69.892	6,63%	69.892.000.000	69.892	7,93%	69.892.000.000
5.	Pemerintah Kab. Bungo	67.822	6,43%	67.822.000.000	63.774	7,24%	63.774.000.000
6.	Pemerintah Kota Sungai Penuh	67.500	6,40%	67.500.000.000	67.500	7,66%	67.500.000.000
7.	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	64.121	6,08%	64.121.000.000	64.121	7,28%	64.121.000.000
8.	Pemerintah Kab. Sarolangun	63.617	6,04%	63.617.000.000	58.617	6,65%	58.617.000.000
9.	Pemerintah Kab. Tebo	61.389	5,82%	61.389.000.000	61.389	6,97%	61.389.000.000
10.	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur	61.000	5,79%	61.000.000.000	56.000	6,35%	56.000.000.000
11.	Pemerintah Kab. Kerinci	56.000	5,31%	56.000.000.000	56.000	6,35%	56.000.000.000
12.	Pemerintah Kab. Muaro Jambi	48.164	4,57%	48.164.000.000	38.164	4,33%	38.164.000.000
13.	Pemerintah Kab. Merangin	45.500	4,32%	45.500.000.000	43.500	4,94%	43.500.000.000
Jumlah Saham Seri A :		1.013.299	96,13%	1.013.299.000.000	842.321	95,59%	842.321.000.000
B. Saham Seri B							
1.	Koperasi Konsumen Karyawan Bank Jambi	17.500	0,83%	8.750.000.000	13.771	0,78%	6.885.500.000
2.	Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT. Bank Jambi	64.000	3,04%	32.000.000.000	64.000	3,63%	32.000.000.000
Jumlah Saham Seri B :		81.500	3,87%	40.750.000.000	77.771	4,41%	38.885.500.000
C. Jumlah (A+B)		1.094.799	100,00%	1.054.049.000.000	920.092	100,00%	881.206.500.000

Sumber:

*) Laporan Keuangan PT. Bank Jambi Tahun 2024 (Unaudited)

**) Laporan Keuangan PT. Bank Jambi Tahun 2023 (Audited)

II. Posisi Modal Pemerintah Kabupaten Merangin pada Perumda Air Minum Tirta Merangin

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MERANGIN KABUPATEN MERANGIN
 Per 31 Desember 2024

1. **Aset, Kewajiban dan Ekuitas**

No.	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Naik/(Turun)	%
Sumber Data		Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Merangin			
Status		<i>Audited</i>	<i>Audited</i>		
1.	Aset				
1.a	Aset Lancar	8.271.738.500,00	8.497.069.891,00	(225.331.391,00)	(2,65)
1.b	Aset Tidak Lancar	19.074.280.612,00	20.496.806.382,00	(1.422.525.770,00)	(6,94)
1.c	Jumlah Aset (1.a + 1.b)	27.346.019.112,00	28.993.876.273,00	(1.647.857.161,00)	(5,68)
2.	Liabilitas				
2.a	Liabilitas Lancar	1.536.712.889,00	1.354.623.616,00	182.089.273,00	13,44
2.b	Liabilitas Tidak Lancar	1.114.218.311,00	952.040.569,00	162.177.742,00	17,03
2.c	Jumlah Liabilitas (2.a + 2.b)	2.650.931.200,00	2.306.664.185,00	344.267.015,00	14,92
3.	Ekuitas				
3.a	Modal Hibah	200.000,00	200.000,00	-	0,00
3.b	Modal Pemerintah Daerah	36.249.211.048,00	36.249.211.048,00	-	0,00
3.c	Modal Pemerintah Daerah-Non Kas (Perda 12/2012)	18.301.482.627,00	18.301.482.627,00	-	0,00
3.d	Modal Pemerintah Pusat YBDTS	10.373.689.400,00	10.373.689.400,00	-	0,00
3.e	Modal Pemerintah Provinsi YBDTS	234.178.787,00	234.178.787,00	-	0,00
3.f	Jumlah Modal (Σ 3.a s.d. 3.e)	65.158.761.862,00	65.158.761.862,00	-	0,00
3.g	Penyesuaian Laba Ditahan	(38.471.131.924,00)	(38.548.565.515,00)	77.433.591,00	(0,20)
3.h	Laba/(Rugi) Bersih	(1.992.542.026,00)	77.433.591,00	(2.069.975.617,00)	(2.673,23)
3.i	Koreksi Laba/(Rugi)	-	-	-	-
3.j	Jumlah Ekuitas (Σ 3.f s.d. 3.i)	24.695.087.912,00	26.687.629.938,00	(1.992.542.026,00)	(7,47)

2. **Pendapatan, Beban dan Laba/(Rugi) Bersih**

No.	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Naik/(Turun)	%
Sumber Data		Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Merangin			
Status		<i>Audited</i>	<i>Audited</i>		
4.	Pendapatan Usaha	16.591.379.619,00	16.733.730.711,00	(142.351.092,00)	(0,85)
5.	Beban Usaha	18.583.810.181,00	16.693.429.260,00	1.890.380.921,00	11,32
6.	Laba/(Rugi) Usaha (4 - 5)	(1.992.430.562,00)	40.301.451,00	(2.032.732.013,00)	(5.043,82)
7.	Pendapatan Lain-Lain	2.415.467,00	37.132.140,00	(34.716.673,00)	(93,49)
8.	Beban Lain-Lain	2.526.931,00	-	2.526.931,00	-
9.	Laba/(Rugi) Lain-Lain (7 - 8)	(111.464,00)	37.132.140,00	(37.243.604,00)	(100,30)
10.	Laba/(Rugi) Sebelum Pajak (6 + 9)	(1.992.542.026,00)	77.433.591,00	(2.069.975.617,00)	(2.673,23)
11.	Pajak Penghasilan	-	-	-	-
12.	Laba/(Rugi) Setelah Pajak (10 - 12)	(1.992.542.026,00)	77.433.591,00	(2.069.975.617,00)	(2.673,23)

3. **Posisi Saham Pemerintah Daerah**

No.	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Naik/(Turun)	%
Sumber Data		Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Merangin			
Status		<i>Unaudited</i>	<i>Audited</i>		
13.	% Saham Pemerintah Daerah (Σ 3.a s/d 3.c)/(3.f)	83,72%	83,72%	0,00%	
14.	Kepemilikan Daerah (13 * 3.i)	20.674.727.599,93	22.342.883.784,10	(1.668.156.184,17)	(7,47)


BUPATI MERANGIN

H. M. SYUKUR, S.H., M.H.

REKAPITULASI ASET TETAP PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PER 31 DESEMBER 2024

I. ASET TETAP TANAH

(dalam rupiah)

No.	S K P D	ASET TETAP TANAH													Saldo Akhir Aset TA 2024 (Audited)
		Saldo TA 2023 (Audited)	Realisasi Belanja Modal TA 2024	Mutasi Tambah					Mutasi Kurang					Jumlah Mutasi	
				Mutasi Masuk Antar SKPD		Hibah Aset Tetap dari Masyarakat/Entitas Lainnya	Mutasi Dari Properti Investasi	Koreksi Karena Kesalahan Pencatatan	Jumlah Mutasi Tambah	Mutasi Keluar Antar SKPD		Koreksi Karena Kesalahan Pencatatan	Jumlah Mutasi Kurang		
				SKPD Asal	Nilai					SKPD Tujuan	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=1+4+6-8	10	11	12	13=10+12-11	14=9-13	15=1+14	
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	Dinas Peternakan dan Perkebunan	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	
2.	RSD Kol. Abundiani Banoko	423.095.938,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.095.938,00	423.095.938,00	
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.984.359.894,00	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	336.137.950,00	0,00	0,00	0,00	336.137.950,00	0,00	0,00	0,00	336.137.950,00	5.320.497.844,00	
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	173.967.570,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.967.570,00	173.967.570,00	
5.	Dinas Perhubungan	26.097.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.097.000,00	26.097.000,00	
6.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	1.993.548.637,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993.548.637,00	1.993.548.637,00	
7.	Dinas Peternakan dan Perkebunan	25.016.463,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	600.000,00	0,00	600.000,00	(600.000,00)	
8.	Sekretariat Daerah	379.880.900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.880.900,00	379.880.900,00	
9.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	158.861.808.290,00	0,00		0,00	9.240.000,00	900.887.850,00	1.887.709.235,00	2.797.837.085,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	336.137.950,00	89.933.218.110,20	90.269.356.060,20	(87.471.518.975,20)	
10.	Kantor Camat Tabir	50.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
J u m l a h		166.917.774.692,00	0,00		336.737.950,00	9.240.000,00	900.887.850,00	1.887.709.235,00	3.134.575.035,00		336.737.950,00	89.933.218.110,20	90.269.956.060,20	(87.135.381.025,20)	

4

II. ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

(dalam rupiah)

ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN																
No.	S K P D	Saldo TA 2023 (Audited)	Realisasi Belanja Modal TA 2024	Kesalahan Penganggaran Belanja Aset Tetap di bawah Nilai Kapitalisasi	Reklasifikasi Antar Aset tetap		Mutasi Masuk Antar SKPD		Mutasi Tambah							
					Sumber	Nilai	SKPD Asal	Nilai	Hibah dari Entitas Lainnya	Aset Tetap yang Berasal Dari Utang Jangka Pendek	Belanja Pegawai Yang Diakui Sebagai Aset Tetap	Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai Aset Tetap	Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP/Belanja Hibah BOSP	Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOS	Jumlah Mutasi Tambah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16(14+15)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	130.017.088.827,00	20.271.695.451,00	21.868.300,00	Aset Tetap Lainnya	78.566.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.462.500,00	8.149.900,00	20.424.742.476,00	
2	Dinas Kesehatan	98.931.563.956,31	6.274.678.500,00	52.125.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.326.803.500,00	
3	RSD Kol. Abundjani Banko	89.862.453.487,58	4.452.039.229,00	0,00		0,00	0,00	0,00	324.006.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.776.045.909,00	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28.854.939.741,00	143.169.000,00	0,00		0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	59.928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.097.000,00	
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	33.827.268.663,84	45.615.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	46.125.000,00	
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12.873.919.943,00	533.275.000,00	11.900.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00	396.794.400,00	0,00	0,00	944.349.400,00	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.797.490.846,00	7.450.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450.000,00	
8	Satuan Polisi Pamong Praja	2.280.670.218,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.862.412.567,00	90.180.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.180.000,00	
10	Dinas Ketahanan Pangan	2.039.582.751,00	7.490.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490.000,00	
11	Dinas Lingkungan Hidup	21.927.236.491,72	545.571.650,00	0,00		0,00	0,00	5.911.718.630,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	6.457.970.280,00	
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.932.711.856,00	158.000.000,00	146.050.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	308.810.000,00	
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.290.435.447,00	117.200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	119.240.000,00	
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.268.132.719,00	25.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	
15	Dinas Perhubungan	11.020.340.342,00	108.960.940,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	109.980.940,00	
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.526.739.097,00	185.337.500,00	2.500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	189.537.500,00	
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	6.129.669.723,00	1.322.490.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630.000,00	0,00	0,00	0,00	1.326.120.000,00	
18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	4.343.115.851,00	88.800.000,00	0,00	Gedung dan Bangunan	29.390.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	119.720.335,00	
19	Dinas Kearsifan dan Perpustakaan	2.539.017.100,00	191.555.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00	194.615.000,00	
20	Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.665.699.663,00	10.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
21	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	3.601.033.382,84	520.928.500,00	421.000.000,00	Gedung dan Bangunan	79.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.828.500,00	
22	Dinas Peternakan dan Perikanan	4.795.708.076,00	39.685.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.685.000,00	
23	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	14.690.587.310,00	299.569.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	300.589.000,00	
24	Sekretariat Daerah	51.009.125.840,00	1.695.902.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.699.302.100,00	
25	Inspektorat Daerah	3.692.401.666,00	930.282.714,00	530.350.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.466.027.714,00	
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.549.571.020,00	174.837.000,00	9.990.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.827.000,00	
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.938.547.658,00	1.351.708.000,00	75.900.000,00		0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	226.269.400,00	0,00	0,00	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.657.957.400,00	
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	4.795.653.062,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	4.721.958.772,00	756.301.000,00	0,00		0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	98.695.330,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	855.336.330,00	
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.170.708.714,00	229.432.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	230.452.000,00	
31	Badan Penelitian dan Pengembangan	955.357.427,00	70.410.000,00	0,00		0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	27.339.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.749.082,00	
32	Sekretariat DPRD	21.277.697.056,00	1.855.958.000,00	0,00		0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	74.799.000,00	0,00	0,00	8.160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.938.917.000,00	
33	Kantor Camat Banko	1.527.827.871,00	18.500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	
34	Kantor Camat Tabir	2.008.253.426,00	113.550.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.550.000,00	
35	Kantor Camat Pamenana	1.132.587.808,00	15.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	
36	Kantor Camat Pamenana Barat	510.693.494,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Kantor Camat Tabir Ulu	735.866.385,00	15.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	
38	Kantor Camat Tabir Selatan	717.197.119,00	12.200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	
39	Kantor Camat Tabir Timur	656.211.267,00	17.500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	
40	Kantor Camat Tabir Ilir	501.112.110,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Kantor Camat Tabir Barat	1.490.977.410,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Kantor Camat Margo Tabir	543.845.497,00	17.500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	
43	Kantor Camat Tabir Lintas	614.277.276,00	18.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	
44	Kantor Camat Renah Pamenana	316.769.578,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Kantor Camat Pamenana Selatan	685.960.275,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	Kantor Camat Muara Siau	723.426.245,00	22.250.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250.000,00	
47	Kantor Camat Tano Pumpung	667.610.683,00	29.898.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.898.000,00	
48	Kantor Camat Jangkat	944.779.226,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Kantor Camat Jangkat Timur	1.197.266.692,00	0,00	0,00		0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	23.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.175.000,00	
50	Kantor Camat Sungai Manau	644.697.805,00	26.490.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.490.000,00	
51	Kantor Camat Renah Pembiran	729.788.511,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Kantor Camat Panokalan Jambu	616.809.433,00	18.900.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900.000,00	
53	Kantor Camat Batana Masumai	686.948.765,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Kantor Camat Banko Barat	480.920.334,00	3.000.000,00	2.500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	
55	Kantor Camat Lembah Masurai	873.431.176,00	6.400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	
56	Kantor Camat Nalo Tantan	460.878.260,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Badan Kestatuan Bangsa dan Politik	3.068.542.898,00	572.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.000.000,00	
J u m l a h		623.775.520.818,93	43.409.708.584,00	1.274.183.300,00		187.856.660,00		510.205.812,00	5.911.718.630,00	324.006.680,00	44.770.000,00	396.794.400,00	44.462.500,00	8.149.900,00	52.111.856.466,00	

II. ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

(dalam rupiah)

ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN														
No.	SKPD	Mutasi Kurang										Jumlah Mutasi	Saldo Akhir Aset TA 2024 (Audited)	
		Belanja Modal di bawah Nilai Kapitalisasi (Extracomptable)	Belanja Modal yang tidak dapat dikategorikan sebagai Aset Tetap	Reklasifikasi Antar Aset tetap/ Aset Lainnya Tahun Berjalan		Reklasifikasi Antara Aset tetap dan Aset lainnya Tahun Sebelumnya		Mutasi Keluar Antar SKPD		Hibah ke Masyarakat/Entitas Lainnya	Penghapusan			Jumlah Mutasi Kurang
				Tujuan	Nilai	Tujuan	Nilai	SKPD Tujuan	Nilai					
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26=17+18-20-21-22-23-24-25	27=16-26	28=31-27	
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.618.357.326,00	0,00	Aset Tetap Lainnya	163.358.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.859.000,00	9.864.574.636,00	10.560.167.850,00	140.577.256.677,00	
2.	Dinas Kesehatan	205.039.329,00	0,00		0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.039.329,00	6.096.764.171,00	105.028.328.127,31	
3.	RSD Kol. Abundiani Banko	17.138.152,00	4.500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513.389.227,00	4.535.027.379,00	241.018.530,00	90.103.472.017,58	
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00		71.922.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.922.000,00	131.175.000,00	28.986.114.741,00	
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	74.799.000,00	0,00	0,00	74.799.000,00	(28.674.000,00)	33.798.594.663,84	
6.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.349.400,00	13.818.269.343,00	
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.804.940.846,00	0,00	
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.670.218,64	
9.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.180.000,00	1.952.592.567,00	
10.	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490.000,00	2.047.072.751,00	
11.	Dinas Lingkungan Hidup	21.150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.150.000,00	6.436.820.280,00	28.364.056.771,72	
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.810.000,00	4.241.521.856,00	
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	59.928.000,00	0,00	365.380.203,00	425.308.203,00	(306.068.203,00)	2.984.367.244,00
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	7.293.132.719,00
15.	Dinas Perhubungan	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.980.940,00	11.130.321.282,00	
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.466.875,00	53.466.875,00	136.070.625,00	2.662.809.722,00	
17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	3.920.000,00	0,00		39.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	58.910.000,00	1.267.210.000,00	7.396.879.723,00	
18.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.720.335,00	4.462.836.186,00	
19.	Dinas Kearsifan dan Perpustakaan	12.720.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720.000,00	181.895.000,00	2.720.912.100,00	
20.	Dinas Perikanan	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2.675.699.663,00	
21.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	300.574.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.574.000,00	721.254.500,00	4.322.287.882,84	
22.	Dinas Peternakan dan Perikanan	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.685.000,00	4.835.393.076,00	
23.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.491.000,00	81.491.000,00	219.098.000,00	14.909.685.310,00	
24.	Sekretariat Daerah	34.976.100,00	0,00		34.807.500,00	0,00	0,00	312.800.000,00	0,00	360.750.000,00	955.965.500,00	51.965.094.340,00	51.965.094.340,00	
25.	Inspektorat Daerah	12.400.000,00	0,00		64.950.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.350.300,00	1.388.722.414,00	5.081.124.080,00	
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.827.000,00	5.734.398.020,00	
27.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.880.000,00	343.750.330,00	1.314.207.070,00	11.252.754.728,00	
28.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.269.400,00	(226.269.400,00)	4.569.383.662,00
29.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	24.940.000,00	0,00	Jalan, Irigasi dan Jaringan	67.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.251.666,00	227.157.666,00	628.178.664,00	5.350.137.436,00	
30.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	18.147.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.500.000,00	195.986.082,00	34.465.918,00	4.205.174.632,00	
31.	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.749.082,00	1.053.106.509,00	
32.	Sekretariat DPRD	37.458.444,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.458.444,70	1.901.458.555,30	23.179.155.611,30
33.	Kantor Camat Banko	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.670.300,00	205.670.300,00	(187.170.300,00)	1.340.657.571,00	
34.	Kantor Camat Tabir	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	98.550.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	2.023.253.426,00	
35.	Kantor Camat Pamenang	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	1.147.587.808,00	
36.	Kantor Camat Pamenang Barat	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.492.400,00	0,00	
37.	Kantor Camat Tabir Ulu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	750.865.385,00	0,00	
38.	Kantor Camat Tabir Selatan	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	729.397.119,00	
39.	Kantor Camat Tabir Timur	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	673.711.267,00	
40.	Kantor Camat Tabir Ilir	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.112.110,00	
41.	Kantor Camat Tabir Barat	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.977.410,00	0,00	
42.	Kantor Camat Marop Tabir	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000.000,00	145.000.000,00	(127.500.000,00)	416.345.497,00	
43.	Kantor Camat Tabir Lintas	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	632.277.276,00	
44.	Kantor Camat Renah Pamenang	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.769.578,00	
45.	Kantor Camat Pamenang Selatan	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.860.275,00	
46.	Kantor Camat Muara Siau	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.678.245,00	0,00	
47.	Kantor Camat Tano Pungung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250.000,00	697.508.683,00	0,00	
48.	Kantor Camat Jangkat	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.779.226,00	
49.	Kantor Camat Jangkat Timur	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.175.000,00	1.220.441.692,00	
50.	Kantor Camat Sungai Manau	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.490.000,00	671.187.805,00	
51.	Kantor Camat Renah Pembalap	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.788.511,00	
52.	Kantor Camat Panokalan Jambu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900.000,00	635.709.433,00	
53.	Kantor Camat Batang Masumai	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.948.765,00	
54.	Kantor Camat Banoko Barat	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	4.886.420.330,00	
55.	Kantor Camat Lembah Masurai	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	879.831.176,00	
56.	Kantor Camat Nalo Tantan	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.878.260,00	
57.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.000.000,00	3.640.542.898,00	
Jumlah		10.306.820.351,70	4.500.000,00		343.236.300,00	124.757.800,00		510.205.812,00	411.350.000,00	6.329.638.271,00	18.030.508.534,70	34.081.347.931,30	657.856.868.750,23	

7

III. ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN

ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN														
(dalam rupiah)														
No.	SKPD	Saldo TA 2023 (Audited)	Realisasi Belanja Modal TA 2024	Belanja Pemeliharaan yang diakui sebagai Aset Tetap	Reklasifikasi Antar Aset tetap		Reklasifikasi Antara Aset tetap dan Aset lainnya	Reklasifikasi Dari Property Investasi	Mutasi Masuk Antar SKPD		Belanja Pegawai yang diakui sebagai Aset Tetap	Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai Aset Tetap	Jumlah Mutasi Tambah	
					Mutasi Tambah				SKPD Asal	Nilai				
					Sumber	Nilai								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=y(4&d.13)	
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	416.068.938.824,68	40.478.949.151,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	1.530.000,00	0,00	40.480.479.151,00
2.	Dinas Kesehatan	99.465.818.198,00	5.874.595.850,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	3.400.000,00	0,00	5.877.995.850,00
3.	RSD Kol. Abundjani Bangko	45.632.056.225,00	972.326.590,00	0,00	Kontruksi Dalam Pengeriaan	130.620.000,00	361.397.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.464.343.590,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	179.316.086.412,10	7.366.868.270,00	0,00	Jalan, Irigasi dan Jaringan	107.195.016,00		0,00			0,00	11.595.000,00	0,00	7.485.658.286,00
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	42.946.693.730,00	139.756.600,00	0,00		0,00	0,00	1.599.186.000,00			0,00	340.000,00	0,00	1.739.282.600,00
6.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.350.080.287,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	530.659.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	2.221.978.814,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.455.414.804,00	337.283.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	680.000,00	0,00	337.963.800,00
10.	Dinas Ketahanan Pangan	1.420.076.278,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup	4.800.886.545,03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	605.745.000,00		0,00	0,00	1.421.868.000,00
									0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	816.123.000,00			
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.568.631.000,00	99.588.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	99.588.000,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.175.329.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.610.847.540,00	198.750.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	198.750.000,00
15.	Dinas Perhubungan	4.183.461.575,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.430.169.996,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	23.201.149.772,00	2.388.918.250,00	0,00		0,00	107.325.900,00	15.896.792.737,00			0,00	5.857.500,00	0,00	18.398.894.387,00
18.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	6.641.103.172,00	29.390.335,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	29.390.335,00
19.	Dinas Kearsifan dan Perustakaan	5.815.302.409,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Dinas Perikanan	4.939.907.378,00	199.774.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	607.440.000,00	0,00	0,00	807.214.000,00
21.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	50.023.545.966,31	3.694.155.845,00	914.036.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24.066.408.257,00	0,00	320.035.200,00	28.994.635.302,00
22.	Dinas Peternakan dan Perkebunan	11.118.631.913,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	21.818.841.203,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sekretariat Daerah	58.972.890.774,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	641.697.426,00	0,00	0,00	641.697.426,00
25.	Inspektorat Daerah	1.796.501.000,00	223.355.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	3.400.000,00	0,00	226.755.000,00
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.383.298.943,76	199.459.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	510.000,00	0,00	199.969.000,00
27.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.854.960.100,00	59.800.000,00	299.260.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00	680.000,00	0,00	359.740.000,00
28.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	827.035.000,00	199.496.000,00	398.940.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	598.436.000,00
29.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.343.727.028,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.343.727.028,00	0,00	0,00	1.343.727.028,00
31.	Sekretariat DPRD	34.017.055.041,65	192.605.192,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	192.605.192,00
32.	Kantor Camat Bangko	3.976.262.328,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	157.968.616,00	0,00	0,00	157.968.616,00
33.	Kantor Camat Tabir	2.012.663.070,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Kantor Camat Pamenang	942.649.485,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Kantor Camat Pamenang Barat	471.955.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Kantor Camat Tabir Ulu	615.339.070,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Kantor Camat Tabir Selatan	1.010.847.036,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	131.640.338,00	0,00	0,00	131.640.338,00
38.	Kantor Camat Tabir Timur	597.185.287,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Kantor Camat Tabir Ilir	564.131.287,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Kantor Camat Tabir Barat	541.875.434,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Kantor Camat Maroo Tabir	1.048.256.859,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Kantor Camat Tabir Lintas	214.258.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Kantor Camat Renah Pamenang	125.450.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Kantor Camat Pamenang Selatan	1.389.825.363,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Kantor Camat Muara Siau	467.739.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Kantor Camat Tiang Pumpung	536.218.408,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
47.	Kantor Camat Janokat	410.405.408,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
48.	Kantor Camat Janokat Timur	515.917.741,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
49.	Kantor Camat Sunqai Manau	1.253.214.397,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
50.	Kantor Camat Renah Pembarap	1.020.719.678,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

III. ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN

ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN													
No.	S K P D	Mutasi Kurang										Saldo Akhir Aset TA 2024 (Audited)	
		Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan		Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Sebelumnya		Reklasifikasi Antara Aset tetap dan Aset lainnya	Mutasi Keluar Antar SKPD		Hibah ke Masyarakat/Entitas Lainnya	Jumlah Mutasi Kurang	Jumlah Mutasi		
		Tujuan	Nilai	Tujuan	Nilai		SKPD Tujuan	Nilai					
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23=21-22	24=16-23	25=3-24	
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	450.841.320,00	Kontruksi dalam Pengerjaan	13.293.762.482,00	593.184.000,00			0,00	83.781.720,50	14.421.569.522,50	26.058.909.628,50	442.127.848.453,18
2.	Dinas Kesehatan		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	5.877.995.850,00	105.343.814.048,00
3.	RSD Kol. Abundjani Bangko		0,00		0,00	23.952.800,00			0,00	0,00	23.952.800,00	1.440.390.790,00	47.072.447.015,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan, Irigasi dan Jaringan	427.249.224,00		0,00	4.563.872.802,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	24.066.408.257,00	0,00	29.988.836.663,00	(22.503.178.377,00)	156.812.908.035,10	
					0,00		Sekretariat Daerah	641.697.426,00					
					0,00		Kantor Camat Bangko	157.968.616,00					
					0,00		Kantor Camat Tabir Selatan	131.640.338,00					
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		0,00		0,00	0,00	Dinas Lingkungan Hidup	605.745.000,00	0,00	605.745.000,00	1.133.537.600,00	44.080.231.330,00	
6.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.080.287,00	
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	530.659.200,00	
8.	Satuan Polisi Pamona Praja		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.221.978.814,00	
9.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	337.963.800,00	1.793.378.604,00
10.	Dinas Ketahanan Pangan		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.076.278,00	
11.	Dinas Lingkungan Hidup		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.421.868.000,00	6.222.754.545,03	
					0,00								
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	99.588.000,00	1.668.219.000,00	
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.329.000,00	
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	198.750.000,00	7.809.597.540,00	
15.	Dinas Perhubungan		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.183.461.575,00	
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.430.169.996,00	
17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18.398.894.387,00	41.600.044.159,00	
18.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Peralatan dan Mesin	29.390.335,00		0,00	0,00	Dinas Perikanan	607.440.000,00	0,00	636.830.335,00	(607.440.000,00)	6.033.663.172,00	
19.	Dinas Kearsifan dan Perustakaan		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.815.302.409,00	
20.	Dinas Perikanan		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	807.214.000,00	5.747.121.378,00	
21.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Peralatan dan Mesin	79.900.000,00		0,00	1.483.054.831,00		0,00	0,00	1.675.165.831,00	27.319.469.471,00	77.343.015.437,31	
		Jalan Irigasi dan jaringan	112.211.000,00		0,00								
22.	Dinas Peternakan dan Perkebunan		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11.118.631.913,56	
23.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21.818.841.203,00	
24.	Sekretariat Daerah		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	641.697.426,00	59.614.588.200,99	
25.	Inspektorat Daerah		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	226.755.000,00	2.023.256.000,00	
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	199.969.000,00	4.583.267.943,26	
27.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		0,00		0,00	0,00	Dinas Lingkungan Hidup	816.123.000,00	0,00	816.123.000,00	(456.383.000,00)	7.398.577.100,00	
28.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	598.436.000,00	1.425.471.000,00	
29.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		0,00		0,00	0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	1.343.727.028,00	0,00	1.343.727.028,00	(1.343.727.028,00)	0,00	
30.	Badan Penelitian dan Pengembangan		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.343.727.028,00	1.343.727.028,00	
31.	Sekretariat DPRD		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	192.605.192,00	34.209.660.233,65	
32.	Kantor Camat Bangko		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	157.968.616,00	4.134.230.944,00	
33.	Kantor Camat Tabir		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.012.663.070,00	
34.	Kantor Camat Pamenang		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	942.649.485,00	
35.	Kantor Camat Pamenang Barat		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	471.955.000,00	
36.	Kantor Camat Tabir Ulu		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	615.339.070,00	
37.	Kantor Camat Tabir Selatan		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	131.640.338,00	1.142.487.374,00	
38.	Kantor Camat Tabir Timur		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	597.185.287,00	
39.	Kantor Camat Tabir Ilir		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	564.131.287,00	
40.	Kantor Camat Tabir Barat		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	541.875.434,00	
41.	Kantor Camat Maroo Tabir		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.256.859,00	
42.	Kantor Camat Tabir Lintas		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	214.258.000,00	
43.	Kantor Camat Renah Pamenang		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	175.450.000,00	
44.	Kantor Camat Pamenang Selatan		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.825.363,00	
45.	Kantor Camat Muara Siau		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	467.739.500,00	
46.	Kantor Camat Tano Pumbung		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	536.218.408,00	
47.	Kantor Camat Jangkat		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	410.405.408,00	
48.	Kantor Camat Jangkat Timur		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	515.917.741,00	
49.	Kantor Camat Sungai Manau		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.214.397,00	
50.	Kantor Camat Renah Pembarau		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.719.678,00	

ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN													
No.	SKPD	Saldo TA 2023 (Audited)	Mutasi Tambah										
			Realisasi Belanja Modal TA 2024	Belanja Pemeliharaan yang diakui sebagai Aset Tetap	Reklasifikasi Antar Aset tetap		Reklasifikasi Antara Aset tetap dan Aset lainnya	Reklasifikasi Dari Property Investasi	Mutasi Masuk Antar SKPD		Belanja Pegawai yang diakui sebagai Aset Tetap	Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai Aset Tetap	Jumlah Mutasi Tambah
					Sumber	Nilai			SKPD Asal	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=Σ(4 s.d. 13)
51.	Kantor Camat Panokalan Jambu	939.617.079,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
52.	Kantor Camat Batang Masumai	1.256.698.099,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
53.	Kantor Camat Batang Barat	518.775.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
54.	Kantor Camat Lembah Masurai	723.894.247,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
55.	Kantor Camat Nalo Tantan	140.709.100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
56.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.393.269.100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.073.668.954.507,08	62.655.071.883,00	1.612.236.000,00		237.815.016,00	468.722.900,00	17.495.978.737,00		28.370.749.665,00	27.992.500,00	320.035.200,00	111.188.601.901,00

ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN													
No.	S K P D	Mutasi Kurang										Saldo Akhir Aset TA 2024 (Audited)	
		Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berjalan		Reklasifikasi Antar Aset Sebelumnya		Reklasifikasi Antara Aset tetap dan Aset lainnya	Mutasi Keluar Antar SKPD		Hibah ke Masyarakat/Entitas Lainnya	Jumlah Mutasi Kurang	Jumlah Mutasi		
		Tujuan	Nilai	Tujuan	Nilai		SKPD Tujuan	Nilai					
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23=20-21	24=14-23	25=3-24	
51.	Kantor Camat Pangkalan Jambu		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	939.617.079,00	
52.	Kantor Camat Batang Masurai		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.698.099,00	
53.	Kantor Camat Batoko Barat		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	518.775.400,00	
54.	Kantor Camat Lembah Masurai		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	723.894.247,00	
55.	Kantor Camat Nalo Tantan		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	140.709.100,00	
56.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.393.269.100,00	
J u m l a h			1.099.591.879,00		13.293.762.482,00	6.664.064.433,00		28.370.749.665,00	83.781.720,50	49.511.950.179,50	61.676.651.721,50	1.135.345.606.228,58	

7

IV. ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

(dalam rupiah)

ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN											
No.	SKPD	Saldo TA 2023 (Audited)	Mutasi Tambah								
			Realisasi Belanja Modal TA 2024	Belanja Pegawai yang diakui sebagai Aset Tetap	Reklasifikasi Antar Aset Tetap		Mutasi Masuk Antar SKPD		Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai Aset Tetap	Hibah dari Entitas Lainnya	Jumlah Mutasi Tambah
					Sumber	Nilai	SKPD Asal	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7(4 s.d. 11)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.322.425.202,79	2.008.342.377,00	0,00	Gedung dan Bangunan	450.841.320,00		0,00	0,00	0,00	2.459.183.697,00
2.	Dinas Kesehatan	8.241.404.209,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	RSD Kol. Abundjani Bangko	4.468.993.925,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.309.096.443.821,44	78.629.328.580,00	48.382.000,00	Gedung dan Bangunan	427.249.224,00		0,00	1.243.022.400,00	12.863.492.250,00	93.211.474.454,00
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	37.150.094.559,00	379.633.000,00	3.400.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	383.033.000,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28.458.365.094,14	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	143.636.311,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	143.142.000,00	112.922.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	112.922.000,00
9.	Dinas Lingkungan Hidup	6.752.699.535,62	827.717.195,00	0,00		0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15.970.000,00	2.250.000,00	0,00	845.937.195,00
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	229.977.910,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	71.300.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	164.293.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Dinas Perhubungan	1.075.063.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	183.653.695,00	379.734.654,00	1.020.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	380.754.654,00
15.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	125.893.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	94.653.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Dinas Perikanan	7.912.827.767,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	6.670.219.771,61	977.956.334,00	0,00	Gedung dan Bangunan	112.211.000,00		0,00	37.734.450,00	0,00	1.127.901.784,00
19.	Dinas Peternakan dan Perkebunan	14.055.316.661,44	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	15.229.331.101,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Sekretariat Daerah	1.560.191.270,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Inspektorat Daerah	152.397.560,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	179.475.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	335.760.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	327.139.500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	109.872.000,00	0,00	0,00	Peralatan dan Mesin	67.966.000,00		0,00	0,00	0,00	67.966.000,00
27.	Sekretariat DPRD	1.193.081.752,84	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Kantor Camat Bangko	979.614.700,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Kantor Camat Tabir	30.900.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Kantor Camat Pamenang	33.253.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Kantor Camat Tabir Selatan	49.400.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Kantor Camat Tabir Timur	129.800.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Kantor Camat Tabir Ilir	34.075.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Kantor Camat Tabir Barat	285.356.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Kantor Camat Marqo Tabir	377.947.187,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Kantor Camat Tabir Lintas	20.000.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Kantor Camat Muara Siau	19.970.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Kantor Camat Tiang Pumpung	170.758.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Kantor Camat Renah Pembarap	57.823.689,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Kantor Camat Bangko Barat	64.000.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Kantor Camat Lembah Masurai	163.635.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	76.599.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2.456.940.782.222,88	83.315.634.140,00	52.802.000,00		1.058.267.544,00		15.970.000,00	1.283.006.850,00	12.863.492.250,00	98.589.172.784,00

7

IV. ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

(dalam rupiah)

ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN												
No.	S K P D	Mutasi Kurang										Saldo Akhir Aset TA 2024 (Audited)
		Belanja Modal di bawah Nilai Kapitalisasi (Extracomptable)	Belanja Modal Yang Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Aset Tetap	Reklasifikasi Antar Aset Tetap		Mutasi Keluar Antar SKPD		Koreksi Karena Kesalahan Pencatatan	Jumlah Mutasi Kurang	Jumlah Mutasi		
				Tujuan	Nilai	SKPD Tujuan	Nilai					
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20=Σ(19 a.d. j)	21=12-20	22=Σ(1+20)	
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	Kontruksi dalam pengeriaan	3.234.028.800,00		0,00	5.000.000,00	3.239.028.800,00	(779.845.103,00)	9.542.580.099,79	
2.	Dinas Kesehatan	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.241.404.209,00	
3.	RSD Kol. Abundjani Bangko	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.468.993.925,00	
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	Gedung dan Banqunan	107.195.016,00		0,00	1.315.063.037,00	1.422.258.053,00	91.789.216.401,00	2.400.885.660.222,44	
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	383.033.000,00	37.533.127.559,00	
6.	Badan Penangqulangan Bencana Daerah	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28.458.365.094,14	
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00		0,00		0,00	9.460.000,00	9.460.000,00	(9.460.000,00)	134.176.311,00	
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	112.922.000,00	256.064.000,00	
9.	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	845.937.195,00	7.598.636.730,62	
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	229.977.910,00	
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	71.300.000,00	
12.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	164.293.000,00	
13.	Dinas Perhubungan	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.063.000,00	
14.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	380.754.654,00	564.408.349,00	
15.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Keria	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	125.893.000,00	
16.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	94.653.000,00	
17.	Dinas Perikanan	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.912.827.767,00	
18.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	112.211.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	112.211.000,00	1.015.690.784,00	7.685.910.555,61	
19.	Dinas Peternakan dan Perkebunan	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14.055.316.661,44	
20.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.229.331.101,00	
21.	Sekretariat Daerah	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.191.270,00	
22.	Inspektorat Daerah	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	152.397.560,00	
23.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	179.475.000,00	
24.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00		0,00	Dinas Lingkungan Hidup	15.970.000,00	0,00	15.970.000,00	(15.970.000,00)	319.790.000,00	
25.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	327.139.500,00	
26.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	67.966.000,00	177.838.000,00	
27.	Sekretariat DPRD	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.081.752,84	
28.	Kantor Camat Bangko	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	979.614.700,00	
29.	Kantor Camat Tabir	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.900.000,00	
30.	Kantor Camat Pamenang	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	33.253.000,00	
31.	Kantor Camat Tabir Selatan	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	49.400.000,00	
32.	Kantor Camat Tabir Timur	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	129.800.000,00	
33.	Kantor Camat Tabir Ilir	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	34.075.000,00	
34.	Kantor Camat Tabir Barat	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	285.356.000,00	
35.	Kantor Camat Margo Tabir	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	377.947.187,00	
36.	Kantor Camat Tabir Lintas	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	
37.	Kantor Camat Muara Siau	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19.970.000,00	
38.	Kantor Camat Tiang Pumpung	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	170.758.000,00	
39.	Kantor Camat Renah Pembarap	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	57.823.689,00	
40.	Kantor Camat Bangko Barat	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	64.000.000,00	
41.	Kantor Camat Lembah Masurai	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	163.635.000,00	
42.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	76.599.000,00	
J u m l a h		112.211.000,00	0,00		3.341.223.816,00		15.970.000,00	1.329.523.037,00	4.798.927.853,00	93.790.244.931,00	2.550.731.027.153,88	

7

V. ASET TETAP LAINNYA

(dalam rupiah)

ASET TETAP LAINNYA												
No.	S K P D	Saldo TA 2023 (Audited)	Mutasi Tambah				Mutasi Kurang				Jumlah Mutasi	Saldo Akhir Aset TA 2024 (Audited)
			Realisasi Belanja Modal TA 2024	Kesalahan penganggaran Belanja Barang dan Jasa BOS	Reklasifikasi Antar Aset Tetap		Jumlah Mutasi Tambah	Reklasifikasi Antar Aset Tetap		Jumlah Mutasi Kurang		
					Sumber	Nilai		Tujuan	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8=7(4&5-7)	9	10	11=9+10	12=8-11	13=3+12
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	78.326.365.721,00	3.802.545.925,00	10.481.300,00	Peralatan dan Mesin	74.888.300,00	3.887.915.525,00	Peralatan dan Mesin	78.566.325,00	78.566.325,00	3.809.349.200,00	82.135.714.921,00
2.	Dinas Kesehatan	7.260.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7.260.000,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	201.639.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	201.639.000,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	149.875.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	149.875.000,00
6.	Dinas Ketahanan Pangan	537.642.550,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	537.642.550,00
7.	Dinas Lingkungan Hidup	41.950.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	41.950.000,00
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.500.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
9.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga	62.020.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	62.020.000,00
10.	Dinas Perhubungan	115.045.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	115.045.000,00
11.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu	10.399.900,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.399.900,00
12.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	511.922.000,00	34.900.000,00	0,00		0,00	34.900.000,00		0,00	0,00	34.900.000,00	546.822.000,00
13.	Dinas Perikanan	8.751.923,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.751.923,00
14.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	190.058.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	190.058.000,00
15.	Dinas Peternakan dan Perkebunan	226.261.314,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	226.261.314,00
16.	Sekretariat Daerah	379.770.640,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	379.770.640,00
17.	Inspektorat Daerah	29.360.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	29.360.000,00
18.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.723.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.723.000,00
19.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	24.970.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	24.970.000,00
20.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	23.992.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	23.992.000,00
21.	Sekretariat DPRD	86.391.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	86.391.500,00
22.	Kantor Camat Tabir Ilir	2.500.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
23.	Kantor Camat Jangkat Timur	982.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	982.800,00
J u m l a h		80.969.380.348,00	3.837.445.925,00	10.481.300,00		74.888.300,00	3.922.815.525,00		78.566.325,00	78.566.325,00	3.844.249.200,00	84.813.629.548,00

7

VI. KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

(dalam rupiah)

ASET KONTRUKSI DALAM Pengerjaan										
No.	S K P D	Saldo TA 2023 (Audited)	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang			Jumlah Mutasi	Saldo Akhir Aset TA 2024 (Audited)	
			Reklasifikasi Antar Aset tetap		Reklasifikasi Antar Aset tetap					
			Asal	Nilai	Jumlah Mutasi Tambah	Tujuan	Nilai			Jumlah Mutasi Kurang
1	2	3	5	6	4	5	6	7=6	8=4-7	9=3+8
1.	RSD Kol. Abundjani Bangko	130.620.000,00		0,00		0,00 Gedung dan Bangunan	130.620.000,00	130.620.000,00	(130.620.000,00)	0,00
2.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	Gedung dan Bangunan	13.293.762.482,00	16.527.791.282,00	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	16.527.791.282,00	16.527.791.282,00
			Jalan Irigasi dan Jaringan	3.234.028.800,00		Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00			
Jumlah		130.620.000,00		16.527.791.282,00	16.527.791.282,00		130.620.000,00	130.620.000,00	16.397.171.282,00	16.527.791.282,00

7

RINCIAN ASET TETAP PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN PER 31 DESEMBER 2024
MENURUT JENIS BARANG

I. ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

(dalam rupiah)

No.	SKPD	ALAT BESAR	ALAT ANGKUTAN	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	ALAT PERTANIAN	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	ALAT LABORATORIUM	ALAT PERSENJATAAN	KOMPUTER
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	44.410.000,00	5.808.648.495,00	94.854.066,00	310.198.150,00	49.440.280.486,18	850.605.716,00	461.513.000,00	17.838.469.390,30	18.378.222,00	63.157.495.207,52
2.	DINAS KESEHATAN	0,00	26.215.138.774,00	17.914.000,00	3.500.000,00	8.474.752.227,99	584.815.965,00	56.877.667.236,62	6.697.826.655,00	0,00	6.093.286.848,70
3.	RUMAH SAKIT DAERAH KOLONEL ABUNDJANI	48.000.000,00	6.429.337.710,00	0,00	0,00	7.379.482.330,00	251.141.133,00	68.302.598.010,58	5.436.106.483,00	0,00	2.161.206.251,00
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	9.477.160.659,00	10.239.036.575,00	127.578.626,00	0,00	3.837.930.962,00	640.359.769,00	0,00	934.400.507,00	39.831.375,00	3.645.420.268,00
5.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	13.158.332,00	2.234.961.469,00	16.788.000,00	7.662.000,00	3.660.297.744,84	67.807.102,00	0,00	11.055.000,00	0,00	734.867.103,00
6.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	1.395.983.500,00	0,00	0,00	384.659.868,64	157.944.000,00	10.000.000,00	0,00	50.000.000,00	241.682.850,00
7.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	114.680.000,00	11.613.341.708,00	0,00	0,00	1.784.591.467,00	62.487.000,00	0,00	0,00	0,00	228.965.168,00
8.	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	907.676.129,00	0,00	0,00	664.564.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.552.200,00
9.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	727.457.500,00	3.451.465.064,00	2.799.200,00	0,00	543.748.382,00	152.963.500,00	0,00	0,00	0,00	234.582.200,00
10.	DINAS KETAHANAN PANGAN	0,00	1.123.076.939,00	0,00	0,00	551.692.031,00	23.424.500,00	0,00	0,00	0,00	348.879.281,00
11.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12.619.888.797,00	5.556.925.583,63	509.113.772,00	56.965.380,00	1.490.334.978,00	102.607.997,00	4.999.500,00	5.547.593.433,00	0,00	969.149.723,00
12.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	1.100.387.475,00	0,00	0,00	929.905.143,00	172.672.983,00	327.290.250,00	89.925.000,00	0,00	1.621.341.005,00
13.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	1.838.021.128,00	0,00	0,00	592.223.430,00	62.937.000,00	0,00	0,00	0,00	491.185.686,00
14.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	4.115.843.051,00	0,00	22.144.000,00	1.477.296.515,00	149.681.000,00	449.311.290,00	0,00	0,00	1.078.856.863,00
15.	DINAS PERHUBUNGAN	110.227.900,00	3.101.869.266,00	3.721.987.200,00	0,00	1.361.809.770,00	78.007.749,00	0,00	0,00	0,00	400.930.082,00
16.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	643.888.896,00	6.973.500,00	650.000,00	644.445.496,00	721.957.500,00	0,00	0,00	0,00	644.894.330,00
17.	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0,00	978.424.000,00	786.660.592,00	1.761.929.800,00	1.966.575.860,00	106.379.000,00	0,00	260.364.000,00	0,00	990.876.471,00
18.	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	11.180.950,00	1.847.199.537,00	386.180.000,00	0,00	1.335.313.370,00	45.290.779,00	0,00	0,00	0,00	837.671.550,00
19.	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA	19.888.000,00	2.010.139.200,00	0,00	0,00	1.086.003.107,00	219.695.800,00	0,00	900.000,00	0,00	336.019.901,00
20.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00	1.054.814.900,00	0,00	0,00	1.238.057.910,00	75.120.000,00	0,00	0,00	0,00	352.919.290,00
21.	DINAS PERIKANAN	33.470.000,00	748.316.701,00	107.859.178,00	0,00	581.144.678,00	297.101.090,00	0,00	151.836.148,00	0,00	755.971.868,00
22.	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	6.340.867.600,00	3.866.548.750,00	71.719.400,00	1.522.540.000,00	1.469.399.249,00	117.769.170,00	0,00	0,00	0,00	1.520.841.141,00
23.	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	196.521.000,00	1.750.602.297,00	9.990.000,00	685.532.088,00	1.001.647.108,00	25.150.000,00	68.827.114,00	193.231.234,00	0,00	903.892.235,00
24.	SEKRETARIAT DAERAH	299.022.500,00	20.573.367.364,00	24.601.500,00	0,00	22.857.321.178,00	1.942.456.397,00	0,00	98.075.000,00	0,00	6.146.915.401,00
25.	SEKRETARIAT DPRD	0,00	8.770.320.470,00	0,00	0,00	11.130.521.053,30	755.164.539,00	0,00	0,00	0,00	2.458.199.249,00
26.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	2.714.262.983,00	0,00	0,00	627.336.945,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	297.042.970,00
27.	KANTOR CAMAT BANGKO	26.900.000,00	480.110.497,00	0,00	0,00	452.676.574,00	18.850.000,00	0,00	0,00	0,00	356.420.500,00
28.	KANTOR CAMAT BANGKO BARAT	0,00	165.963.534,00	0,00	0,00	241.386.800,00	13.150.000,00	0,00	0,00	0,00	65.920.000,00
29.	KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI	0,00	408.229.265,00	0,00	0,00	181.219.500,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	90.500.000,00
30.	KANTOR CAMAT JANGKAT	0,00	682.804.226,00	0,00	0,00	104.519.000,00	4.088.000,00	0,00	0,00	0,00	153.368.000,00
31.	KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR	0,00	928.787.092,00	3.950.000,00	0,00	153.757.600,00	18.415.000,00	0,00	0,00	0,00	115.532.000,00
32.	KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI	0,00	631.345.362,00	0,00	0,00	148.653.256,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	94.332.558,00
33.	KANTOR CAMAT MARGO TABIR	0,00	177.933.449,00	0,00	0,00	128.667.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.744.999,00
34.	KANTOR CAMAT MUAHA SIAU	0,00	370.566.245,00	0,00	0,00	307.430.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	117.182.000,00
35.	KANTOR CAMAT NALO TANTAN	0,00	262.453.000,00	0,00	0,00	130.617.837,00	0,00	0,00	6.750.000,00	0,00	61.057.423,00
36.	KANTOR CAMAT PAMENANG	0,00	501.947.978,00	0,00	0,00	333.572.142,00	9.139.688,00	0,00	0,00	0,00	302.928.000,00
37.	KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT	0,00	139.921.844,00	0,00	0,00	219.407.250,00	32.125.000,00	0,00	0,00	0,00	119.239.400,00
38.	KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN	0,00	347.224.368,00	0,00	0,00	168.574.193,00	31.822.100,00	0,00	0,00	0,00	138.339.614,00
39.	KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU	0,00	312.695.733,00	0,00	0,00	195.888.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.125.000,00
40.	KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG	0,00	103.672.578,00	0,00	0,00	141.709.000,00	7.997.000,00	0,00	0,00	0,00	63.391.000,00
41.	KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP	0,00	374.548.611,00	0,00	0,00	215.616.900,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	128.623.000,00

RINCIAN ASET TETAP PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN PER 31 DESEMBER 2024
MENURUT JENIS BARANG

I. ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

(dalam rupiah)

No.	SKPD	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	ALAT EKSPLORASI	ALAT KESELAMATAN KERJA	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN, DAN PEMURNIAN	ALAT PERAGA	PERALATAN PROSES, DAN PRODUKSI	RAMBU-RAMBU	ALAT OLAHRAGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=Σ(3 s.d 10)
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	44.000.000,00	0,00	137.469.200,00	0,00	24.700.000,00	0,00	0,00	2.346.234.744,00	140.577.256.677,00
2.	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508.920,00	54.917.500,00	0,00	0,00	105.028.328.127,31
3.	RUMAH SAKIT DAERAH KOLONEL ABUNDJANI	-	0,00	0,00	0,00	0,00	84.704.600,00	6.897.000,00	3.998.500,00	90.103.472.017,58
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.396.000,00	28.986.114.741,00
5.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	0,00	0,00	11.733.336,00	0,00	0,00	0,00	27.040.264.577,00	0,00	33.798.594.663,84
6.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	0,00	35.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.280.670.218,64
7.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	0,00	0,00	14.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.818.269.343,00
8.	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	1.952.592.567,00
9.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	629.135.000,00	0,00	0,00	0,00	62.790.000,00	0,00	5.804.940.846,00
10.	DINAS KETAHANAN PANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047.072.751,00
11.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.477.608,09	0,00	28.364.056.771,72
12.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241.521.856,00
13.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984.367.244,00
14.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERBENCANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.293.132.719,00
15.	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355.489.315,00	0,00	11.130.321.282,00
16.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662.809.722,00
17.	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0,00	0,00	0,00	377.070.000,00	0,00	168.600.000,00	0,00	0,00	7.396.879.723,00
18.	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462.836.186,00
19.	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.919.470,84	589.722.404,00	4.322.287.882,84
20.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720.912.100,00
21.	DINAS PERIKANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675.699.663,00
22.	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.909.685.310,00
23.	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.835.393.076,00
24.	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.335.000,00	51.965.094.340,00
25.	SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.114.205.311,30
26.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640.542.898,00
27.	KANTOR CAMAT BANGKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	1.340.657.571,00
28.	KANTOR CAMAT BANGKO BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.420.334,00
29.	KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	686.948.765,00
30.	KANTOR CAMAT JANGKAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.779.226,00
31.	KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.441.692,00
32.	KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.831.176,00
33.	KANTOR CAMAT MARGO TABIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.345.497,00
34.	KANTOR CAMAT MUARA SIAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.678.245,00
35.	KANTOR CAMAT NALO TANTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.878.260,00
36.	KANTOR CAMAT PAMENANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.587.808,00
37.	KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.693.494,00
38.	KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.960.275,00
39.	KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.709.433,00
40.	KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.769.578,00
41.	KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.788.511,00

4

No.	SKPD	ALAT BESAR	ALAT ANGKUTAN	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	ALAT PERTANIAN	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	ALAT LABORATORIUM	ALAT PERSENJATAAN	KOMPUTER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.	KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU	0,00	372.764.105,00	0,00	0,00	178.746.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.677.400,00
43.	KANTOR CAMAT TABIR	0,00	524.491.102,00	0,00	0,00	794.561.193,00	9.413.200,00	0,00	0,00	0,00	692.287.931,00
44.	KANTOR CAMAT TABIR BARAT	0,00	1.008.186.781,00	0,00	107.474.400,00	238.170.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.146.000,00
45.	KANTOR CAMAT TABIR ILIR	0,00	165.304.910,00	0,00	0,00	215.860.200,00	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	112.047.000,00
46.	KANTOR CAMAT TABIR LINTAS	0,00	364.011.776,00	0,00	0,00	155.767.500,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	101.425.000,00
47.	KANTOR CAMAT TABIR SELATAN	0,00	363.427.996,00	0,00	0,00	191.151.726,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	166.817.397,00
48.	KANTOR CAMAT TABIR TIMUR	0,00	351.476.717,00	0,00	0,00	207.484.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.750.150,00
49.	KANTOR CAMAT TABIR ULU	0,00	445.960.358,00	0,00	0,00	176.428.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.478.000,00
50.	KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG	0,00	336.753.483,00	0,00	0,00	233.735.600,00	10.641.600,00	0,00	0,00	0,00	116.378.000,00
51.	INSPEKTORAT DAERAH	0,00	2.498.069.791,00	51.628.500,00	0,00	1.300.429.595,89	50.465.257,00	0,00	0,00	0,00	1.178.878.236,11
52.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	1.876.948.835,00	0,00	0,00	1.961.742.358,00	537.764.655,00	0,00	0,00	0,00	1.357.942.172,00
53.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	2.705.276.135,33	0,00	0,00	3.958.793.654,43	267.074.811,00	0,00	0,00	0,00	4.321.610.127,24
54.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	0,00	4.278.751.992,00	8.752.000,00	1.800.000,00	59.175.496,00	57.181.450,00	0,00	0,00	0,00	163.722.724,00
55.	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	6.800.000,00	1.901.893.061,00	36.000.000,00	0,00	1.160.053.074,00	99.200.440,00	0,00	0,00	0,00	2.146.190.861,00
56.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH	0,00	2.010.659.850,00	0,00	0,00	1.383.524.013,00	24.303.000,00	0,00	0,00	0,00	782.687.769,00
57.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	523.219.927,00	0,00	0,00	313.641.080,00	9.494.000,00	0,00	0,00	0,00	206.751.502,00
J U M L A H		30.089.633.238,00	155.704.998.565,96	5.985.349.534,00	4.480.395.818,00	142.164.295.775,27	8.910.364.890,00	126.502.206.401,20	37.266.532.850,30	108.209.597,00	110.918.138.905,57

7

No.	SKPD	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	ALAT EKSPLORASI	ALAT KESELAMATAN KERJA	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN, DAN PEMURNIAN	ALAT PERAGA	PERALATAN PROSES, DAN PRODUKSI	RAMBU-RAMBU	ALAT OLAHRAGA	JUMLAH
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21=Σ(3 s.d 20)
42.	KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.187.805,00
43.	KANTOR CAMAT TABIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.023.253.426,00
44.	KANTOR CAMAT TABIR BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.977.410,00
45.	KANTOR CAMAT TABIR ILIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.112.110,00
46.	KANTOR CAMAT TABIR LINTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673.000,00	632.277.276,00
47.	KANTOR CAMAT TABIR SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.397.119,00
48.	KANTOR CAMAT TABIR TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.711.267,00
49.	KANTOR CAMAT TABIR ULU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.866.385,00
50.	KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.508.683,00
51.	INSPEKTORAT DAERAH	0,00	3.013.000,00	63.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146.074.380,00
52.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734.398.020,00
53.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.252.754.728,00
54.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569.383.662,00
55.	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350.137.436,00
56.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.205.174.632,00
57.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.106.509,00
J U M L A H		44.000.000,00	3.013.000,00	891.531.536,00	377.070.000,00	33.208.920,00	308.222.100,00	31.031.837.970,93	3.037.859.648,00	657.856.868.750,23

7

II. ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN

(dalam rupiah)

No.	SKPD	BANGUNAN GEDUNG	MONUMEN	BANGUNAN MENARA	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	427.229.693.920,53	0,00	0,00	14.898.154.532,65	442.127.848.453,18
2.	DINAS KESEHATAN	101.514.025.417,00	0,00	29.894.000,00	3.799.894.631,00	105.343.814.048,00
3.	RUMAH SAKIT DAERAH KOLONEL ABUNDJANI	46.465.995.015,00	0,00	0,00	606.452.000,00	47.072.447.015,00
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	174.975.740.267,03	784.508.100,00	0,00	6.050.374.305,07	181.810.622.672,10
5.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	40.589.254.850,00	654.205.689,00	0,00	2.836.770.791,00	44.080.231.330,00
6.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.221.978.814,00	0,00	0,00	0,00	2.221.978.814,00
7.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	2.350.080.287,00	0,00	0,00	0,00	2.350.080.287,00
8.	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.793.378.604,00	0,00	0,00	0,00	1.793.378.604,00
9.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	530.659.200,00	0,00	0,00	0,00	530.659.200,00
10.	DINAS KETAHANAN PANGAN	1.369.716.687,00	0,00	0,00	50.359.591,00	1.420.076.278,00
11.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.854.365.050,03	0,00	0,00	368.389.495,00	6.222.754.545,03
12.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.645.899.000,00	0,00	0,00	22.320.000,00	1.668.219.000,00
13.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.175.329.000,00	0,00	0,00	0,00	2.175.329.000,00
14.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.874.097.840,00	0,00	0,00	935.499.700,00	7.809.597.540,00
15.	DINAS PERHUBUNGAN	4.024.847.483,00	0,00	0,00	158.614.092,00	4.183.461.575,00
16.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.330.319.996,00	0,00	0,00	99.850.000,00	5.430.169.996,00
17.	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	40.877.044.008,00	0,00	0,00	723.000.151,00	41.600.044.159,00
18.	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	6.033.663.172,00	0,00	0,00	0,00	6.033.663.172,00
19.	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	50.859.567.077,21	55.945.000,00	403.501.226,00	1.957.593.877,10	53.276.607.180,31
20.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	5.773.056.409,00	0,00	0,00	42.246.000,00	5.815.302.409,00
21.	DINAS PERIKANAN	4.399.979.453,00	0,00	0,00	1.347.141.925,00	5.747.121.378,00
22.	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	16.478.473.822,00	0,00	0,00	5.340.367.381,00	21.818.841.203,00
23.	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	10.135.243.900,56	0,00	0,00	983.388.013,00	11.118.631.913,56
24.	SEKRETARIAT DAERAH	56.636.923.727,99	0,00	136.014.120,00	2.199.952.927,00	58.972.890.774,99
25.	SEKRETARIAT DPRD	33.401.992.383,65	0,00	0,00	807.667.850,00	34.209.660.233,65
26.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.132.676.100,00	0,00	0,00	260.593.000,00	2.393.269.100,00
27.	KANTOR CAMAT BANGKO	3.813.911.328,00	0,00	0,00	162.351.000,00	3.976.262.328,00
28.	KANTOR CAMAT BANGKO BARAT	460.835.400,00	0,00	0,00	57.940.000,00	518.775.400,00
29.	KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI	1.078.604.099,00	0,00	0,00	178.094.000,00	1.256.698.099,00
30.	KANTOR CAMAT JANGKAT	378.017.000,00	0,00	0,00	32.388.408,00	410.405.408,00
31.	KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR	274.727.295,00	0,00	0,00	241.190.446,00	515.917.741,00
32.	KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI	653.334.430,00	0,00	0,00	70.559.817,00	723.894.247,00
33.	KANTOR CAMAT MARGO TABIR	948.376.859,00	0,00	0,00	99.880.000,00	1.048.256.859,00
34.	KANTOR CAMAT MUARA SIAU	419.789.500,00	0,00	0,00	47.950.000,00	467.739.500,00
35.	KANTOR CAMAT NALO TANTAN	41.019.100,00	0,00	0,00	99.690.000,00	140.709.100,00
36.	KANTOR CAMAT PAMENANG	810.496.485,00	0,00	0,00	132.153.000,00	942.649.485,00
37.	KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT	330.615.000,00	0,00	0,00	141.340.000,00	471.955.000,00
38.	KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN	384.508.287,00	0,00	0,00	1.005.317.076,00	1.389.825.363,00
39.	KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU	802.462.950,00	0,00	0,00	137.154.129,00	939.617.079,00
40.	KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG	79.250.000,00	0,00	0,00	96.200.000,00	175.450.000,00
41.	KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP	828.928.560,00	0,00	0,00	191.791.118,00	1.020.719.678,00
42.	KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU	1.182.493.497,00	0,00	0,00	70.720.900,00	1.253.214.397,00
43.	KANTOR CAMAT TABIR	1.943.623.070,00	0,00	0,00	69.040.000,00	2.012.663.070,00
44.	KANTOR CAMAT TABIR BARAT	392.598.434,00	0,00	0,00	149.277.000,00	541.875.434,00
45.	KANTOR CAMAT TABIR ILIR	439.881.287,00	0,00	0,00	124.250.000,00	564.131.287,00
46.	KANTOR CAMAT TABIR LINTAS	114.328.000,00	0,00	0,00	99.930.000,00	214.258.000,00
47.	KANTOR CAMAT TABIR SELATAN	1.010.847.036,00	0,00	0,00	0,00	1.010.847.036,00
48.	KANTOR CAMAT TABIR TIMUR	480.336.287,00	0,00	0,00	116.849.000,00	597.185.287,00
49.	KANTOR CAMAT TABIR ULU	472.569.070,00	0,00	0,00	142.770.000,00	615.339.070,00
50.	KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG	491.318.408,00	0,00	0,00	44.900.000,00	536.218.408,00
51.	INSPEKTORAT DAERAH	1.953.594.000,00	0,00	0,00	69.662.000,00	2.023.256.000,00
52.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.262.994.943,76	0,00	0,00	320.273.000,00	4.583.267.943,76
53.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6.875.812.100,00	0,00	0,00	449.019.000,00	7.324.831.100,00
54.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	73.746.000,00	0,00	0,00	0,00	73.746.000,00
55.	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	1.071.178.000,00	38.250.000,00	0,00	316.043.000,00	1.425.471.000,00
56.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.296.116.028,00	0,00	0,00	47.611.000,00	1.343.727.028,00
J U M L A H		1.085.040.313.937,76	1.532.908.789,00	569.409.346,00	48.202.974.155,82	1.135.345.606.228,58

III. ASET TETAP JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN

(dalam rupiah)

No.	SKPD	JALAN DAN JEMBATAN	BANGUNAN AIR	INSTALASI	JARINGAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	967.795.182,20	8.336.927.160,59	51.149.000,00	186.708.757,00	9.542.580.099,79
2.	DINAS KESEHATAN	145.944.521,00	1.740.164.796,00	6.304.994.798,00	50.300.094,00	8.241.404.209,00
3.	RUMAH SAKIT DAERAH KOLONEL ABUNDJANI	438.570.800,00	664.553.430,00	2.254.738.124,00	1.111.131.571,00	4.468.993.925,00
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	1.935.672.296.788,18	384.890.821.816,02	47.673.035.175,01	32.649.506.443,23	2.400.885.660.222,44
5.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	16.332.560.715,20	5.862.742.228,80	1.573.144.466,00	13.764.680.149,00	37.533.127.559,00
6.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	103.739.300,00	30.437.011,00	0,00	134.176.311,00
7.	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	54.892.000,00	129.958.000,00	71.214.000,00	0,00	256.064.000,00
8.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	22.236.378.361,84	6.162.906.332,30	0,00	59.080.400,00	28.458.365.094,14
9.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.295.133.980,10	1.157.554.536,52	5.145.948.214,00	0,00	7.598.636.730,62
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	63.700.000,00	77.690.000,00	88.587.910,00	229.977.910,00
11.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	71.300.000,00	0,00	71.300.000,00
12.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	25.000.000,00	0,00	139.293.000,00	164.293.000,00
13.	DINAS PERHUBUNGAN	1.061.536.000,00	0,00	0,00	13.527.000,00	1.075.063.000,00
15.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0,00	0,00	564.408.349,00	0,00	564.408.349,00
16.	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	0,00	0,00	125.893.000,00	0,00	125.893.000,00
17.	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAHA	5.218.833.508,40	2.383.578.801,21	56.853.246,00	26.645.000,00	7.685.910.555,61
18.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	94.653.000,00	0,00	0,00	0,00	94.653.000,00
19.	DINAS PERIKANAN	787.865.918,00	6.472.767.573,00	641.719.515,00	10.474.761,00	7.912.827.767,00
20.	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	6.490.935.859,00	8.343.208.321,00	84.466.000,00	310.720.921,00	15.229.331.101,00
21.	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	11.951.743.614,44	1.785.283.884,00	303.339.163,00	14.950.000,00	14.055.316.661,44
22.	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	1.241.900.000,00	318.291.270,00	1.560.191.270,00
23.	SEKRETARIAT DPRD	70.175.000,00	486.599.752,84	255.350.500,00	380.956.500,00	1.193.081.752,84
24.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	0,00	76.599.000,00	76.599.000,00
25.	KANTOR CAMAT BANGKO	474.938.000,00	504.676.700,00	0,00	0,00	979.614.700,00
26.	KANTOR CAMAT BANGKO BARAT	0,00	0,00	64.000.000,00	0,00	64.000.000,00
27.	KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI	140.250.000,00	0,00	0,00	23.385.000,00	163.635.000,00
28.	KANTOR CAMAT MARGO TABIR	0,00	377.947.187,00	0,00	0,00	377.947.187,00
29.	KANTOR CAMAT MUARA SIAU	0,00	19.970.000,00	0,00	0,00	19.970.000,00
30.	KANTOR CAMAT PAMENANG	33.253.000,00	0,00	0,00	0,00	33.253.000,00
31.	KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP	0,00	57.823.689,00	0,00	0,00	57.823.689,00
32.	KANTOR CAMAT TABIR	0,00	30.900.000,00	0,00	0,00	30.900.000,00
33.	KANTOR CAMAT TABIR BARAT	74.845.000,00	210.511.000,00	0,00	0,00	285.356.000,00
34.	KANTOR CAMAT TABIR ILIR	0,00	0,00	34.075.000,00	0,00	34.075.000,00
35.	KANTOR CAMAT TABIR LINTAS	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
35.	KANTOR CAMAT TABIR SELATAN	0,00	49.400.000,00	0,00	0,00	49.400.000,00
36.	KANTOR CAMAT TABIR TIMUR	0,00	0,00	0,00	129.800.000,00	129.800.000,00
37.	KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG	138.610.000,00	0,00	0,00	32.148.000,00	170.758.000,00
38.	INSPEKTORAT DAERAH	0,00	76.850.000,00	31.863.560,00	43.684.000,00	152.397.560,00
39.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	0,00	36.841.000,00	142.634.000,00	179.475.000,00
40.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	99.800.000,00	219.990.000,00	0,00	319.790.000,00
41.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	62.910.000,00	250.729.500,00	13.500.000,00	0,00	327.139.500,00
42.	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	0,00	0,00	177.838.000,00	0,00	177.838.000,00
J U M L A H		2.003.744.121.248,36	430.288.114.008,28	67.105.688.121,01	49.593.103.776,23	2.550.731.027.153,88

IV. ASET TETAP LAINNYA

(dalam rupiah)

No.	SKPD	BAHAN PERPUSTAKAAN	BERCORAK KEBUDAYAAN	HEWAN	TANAMAN	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	JUMLAH
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	80.000.749.749,00	2.134.965.172,00	0,00	0,00	0,00	82.135.714.921,00
2.	DINAS KESEHATAN	7.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260.000,00
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
4.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	201.639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.639.000,00
5.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	149.875.000,00	0,00	0,00	0,00	149.875.000,00
6.	DINAS KETAHANAN PANGAN	408.592.550,00	0,00	89.500.000,00	39.550.000,00	0,00	537.642.550,00
7.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	21.950.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	41.950.000,00
8.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
9.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	62.020.000,00	0,00	0,00	0,00	62.020.000,00
10.	DINAS PERHUBUNGAN	111.045.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	115.045.000,00
11.	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	4.400.000,00	5.999.900,00	0,00	0,00	0,00	10.399.900,00
12.	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	177.752.000,00	12.306.000,00	0,00	0,00	190.058.000,00
13.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	545.822.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	546.822.000,00
14.	DINAS PERIKANAN	8.751.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.751.923,00
15.	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	0,00	0,00	226.261.314,00	0,00	0,00	226.261.314,00
16.	SEKRETARIAT DAERAH	146.598.440,00	78.285.000,00	0,00	152.137.200,00	2.750.000,00	379.770.640,00
17.	SEKRETARIAT DPRD	29.771.500,00	0,00	0,00	56.620.000,00	0,00	86.391.500,00
18.	KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR	0,00	982.800,00	0,00	0,00	0,00	982.800,00
19.	KANTOR CAMAT TABIR ILIR	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
20.	INSPEKTORAT DAERAH	29.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.360.000,00
21.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.723.000,00
22.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	24.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.970.000,00
23.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH	4.016.000,00	0,00	0,00	19.976.000,00	0,00	23.992.000,00
J U M L A H		81.553.649.162,00	2.636.879.872,00	328.067.314,00	292.283.200,00	2.750.000,00	84.813.629.548,00

7

REKAPITULASI NILAI PENYUSUTAN ASET TETAP PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PER 31 DESEMBER 2024

I. ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

(dalam rupiah)

ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN																
No.	SKPD	Saldo TA 2023 (Audited)	Mutasi Tambah					Mutasi Kurang					Jumlah Mutasi	Saldo TA 2024 (Audited)		
			Nilai Penyusutan Aset Tetap Perolehan TA 2024	Nilai Penyusutan Aset Tetap Perolehan Tahun Sebelumnya	Koreksi Kesalahan Pencatatan Nilai Penyusutan	Mutasi Masuk Nilai Penyusutan antar SKPD		Koreksi Kesalahan Pencatatan Nilai Penyusutan Perolehan Tahun Sebelumnya	Mutasi Keluar Nilai Penyusutan antar SKPD		Nilai Penyusutan Karena Hibah Aset Tetap ke Masyarakat/Entitas Lainnya	Penghapusan			Jumlah Mutasi Kurang	
						SKPD Asal	Nilai		SKPD Tujuan	Nilai						
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15=10+12-14	16=13	17=16
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	107.576.669.395,46	1.439.917.157,30	9.532.342.379,81	0,00	0,00	10.972.259.537,11	8.847.000,00	0,00	0,00	82.859.000,00	91.706.000,00	10.880.553.537,11	118.457.232.932,57	8.191.287.593,50	86.419.395.155,71
2	Dinas Kesehatan	78.228.107.562,21	529.811.256,37	7.686.478.337,13	0,00	0,00	8.216.287.593,50	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	8.191.287.593,50	86.419.395.155,71	0,00	0,00
3	RSO Kol. Abduhadi Baroko	71.978.873.502,75	530.613.931,30	9.788.773.302,55	0,00	0,00	10.319.387.233,85	0,00	0,00	0,00	4.513.389.227,00	5.805.998.006,85	77.784.871.509,60	86.419.395.155,71	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24.715.018.991,24	20.214.400,00	863.629.232,60	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	59.928.000,00	943.771.632,60	7.192.200,00	0,00	0,00	936.579.432,60	25.651.598.423,84	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	31.474.536.898,05	8.738.998,60	1.096.799.122,65	0,00	0,00	1.105.538.121,25	0,00	0,00	11.224.750,00	0,00	0,00	11.224.750,00	1.094.313.371,25	32.568.850.269,30	0,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10.463.457.525,95	98.852.495,13	961.445.759,68	0,00	0,00	1.060.298.254,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.298.254,81	11.523.755.780,76	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.148.165.989,58	931.250,00	272.580.301,61	0,00	0,00	273.511.551,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.511.551,61	5.421.677.541,19	0,00	0,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	2.185.008.092,75	0,00	43.653.308,96	0,00	0,00	43.653.308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.653.308,96	2.228.661.401,71	0,00	0,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pendidikan Anak	1.712.100.542,24	10.898.875,00	50.404.464,76	0,00	0,00	61.303.339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.303.339,76	1.773.403.882,00	0,00	0,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	1.885.775.251,00	749.000,00	749.000,00	0,00	0,00	50.474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.474.000,00	1.936.249.251,00	0,00	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	15.833.517.894,67	676.206.440,36	1.364.596.789,88	0,00	0,00	2.040.803.230,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.803.230,24	17.874.321.124,91	0,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.465.985.628,52	71.677.580,32	156.545.890,02	0,00	0,00	228.223.470,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.223.470,34	3.694.209.098,86	0,00	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.095.053.114,86	17.073.469,26	90.228.192,86	0,00	0,00	107.301.662,12	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	59.928.000,00	0,00	365.380.203,00	425.308.203,00	(318.006.540,88)	2.777.046.573,98	0,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.264.559.357,54	2.937.500,00	378.216.766,56	0,00	0,00	381.154.266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.154.266,56	6.645.713.624,10	0,00	0,00
15	Dinas Perhubungan	8.810.302.259,36	13.047.281,60	687.047.746,91	0,00	0,00	700.095.028,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.095.028,51	9.510.397.287,87	0,00	0,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.956.389.662,13	28.531.071,42	229.140.014,87	0,00	0,00	257.671.086,29	0,00	0,00	0,00	53.466.875,00	53.466.875,00	204.204.211,29	2.160.593.873,42	0,00	0,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Pendidikan dan Pendidikan	3.546.437.800,04	163.312.749,99	657.077.013,30	0,00	0,00	820.389.763,29	4.998.750,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	19.998.750,00	800.391.013,29	4.346.828.813,33	0,00
18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	3.745.381.874,67	16.177.817,01	204.013.408,54	0,00	0,00	220.191.225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.191.225,55	3.965.573.100,22	0,00	0,00
19	Dinas Kearsifan dan Perustakaan	1.840.885.379,12	27.142.750,00	240.575.685,96	0,00	0,00	267.718.435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.718.435,96	2.108.603.815,08	0,00	0,00
20	Dinas Perikanan	2.590.867.274,43	1.125.000,00	20.923.338,56	0,00	0,00	20.923.338,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.923.338,56	2.610.790.612,99	0,00	0,00
21	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	2.590.111.238,98	98.991.321,42	370.712.872,61	4.000.000,00	0,00	473.704.194,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.704.194,03	3.063.815.433,01	0,00	0,00
22	Dinas Peternakan dan Perkebunan	4.646.539.834,43	6.796.250,00	65.742.048,24	0,00	0,00	72.538.298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.538.298,24	4.719.078.132,67	0,00	0,00
23	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	11.126.143.562,12	36.588.462,99	876.248.037,44	0,00	0,00	876.248.037,44	0,00	0,00	0,00	81.491.000,00	81.491.000,00	794.757.037,44	11.920.900.599,56	0,00	0,00
24	Sekretariat Daerah	4.035.021.323,51	265.738.596,43	1.433.783.853,17	0,00	0,00	1.699.263.363,17	34.807.500,00	0,00	0,00	312.800.000,00	380.750.000,00	47.236.185.631,11	0,00	0,00	0,00
25	Inspektorat Daerah	3.486.788.033,47	231.358.320,02	91.589.298,50	0,00	0,00	122.947.618,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.947.618,52	3.809.735.651,99	0,00	0,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.748.412.620,38	32.341.925,00	299.184.383,42	0,00	0,00	331.526.308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.526.308,42	5.079.938.928,60	0,00	0,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13.527.847.247,24	180.936.643,11	491.508.865,36	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	226.269.400,00	898.714.908,47	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	226.269.400,00	0,00	221.880.000,00	570.019.730,00	328.695.178,47	13.856.542.425,71
										Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	98.695.330,00					
28	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	4.130.013.142,59	88.661.285,72	284.087.497,60	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	98.695.330,00	471.444.113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	134.251.666,00	134.251.666,00	337.192.447,32	4.467.205.589,91
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3.745.319.535,49	24.090.006,00	144.696.333,38	0,00	0,00	168.786.339,38	0,00	0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	27.339.082,00	0,00	150.500.000,00	177.839.082,00	(9.052.742,62)	3.736.266.792,87
30	Badan Penelitian dan Pengembangan	849.088.580,58	7.281.000,00	32.069.335,72	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	27.339.082,00	66.689.417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.689.417,72	915.777.998,30
31	Sekretariat DPRD	19.058.792.092,49	24.282.080,29	947.277.276,14	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.224.750,00	982.784.106,43	64.950.300,00	0,00	0,00	0,00	64.950.300,00	917.833.806,43	19.976.625.898,92	0,00
32	Kantor Camat Baroko	1.396.688.985,23	2.312.500,00	39.709.733,37	0,00	0,00	42.022.233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	205.670.300,00	(163.648.066,63)	1.233.040.918,60	0,00	0,00
33	Kantor Camat Tabir	1.939.748.926,00	1.500.000,00	33.940.050,00	0,00	0,00	35.440.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440.050,00	1.975.188.976,00	0,00	0,00
34	Kantor Camat Pammana	1.095.399.772,29	1.875.000,00	12.281.785,71	0,00	0,00	14.156.785,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.156.785,71	1.109.556.558,00	0,00	0,00
35	Kantor Camat Pammana Barat	500.484.565,43	0,00	7.996.428,57	0,00	0,00	7.996.428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996.428,57	508.480.994,00	0,00	0,00
36	Kantor Camat Tabir Ulu	724.068.170,22	1.875.000,00	6.760.714,28	0,00	0,00	8.635.714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.635.714,28	732.703.885,00	0,00	0,00
37	Kantor Camat Tabir Selatan	686.317.297,57	1.525.000,00	12.303.214,28	0,00	0,00	13.828.214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.828.214,28	700.145.511,85	0,00	0,00
38	Kantor Camat Tabir Timur	641.854.202,71	2.187.500,00	5.877.264,00	0,00	0,00	7.865.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865.264,00	649.719.466,71	0,00	0,00
39	Kantor Camat Tabir Jir	491.604.252,86	0,00	7.213.571,44	0,00	0,00	7.213.571,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.213.571,44	498.817.824,30	0,00	0,00
40	Kantor Camat Tabir Barat	1.472.934.762,14	0,00	7.827.642,86	0,00	0,00	7.827.642,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827.642,86	1.480.762.410,00	0,00	0,00
41	Kantor Camat Marop Tabir	542.845.497,00	2.187.500,00	1.000.000,00	0,00	0,00	3.187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000.000,00	(141.812.500,00)	401.032.997,00	0,00	0,00
42	Kantor Camat Tabir Lintan	613.277.276,00	4.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	618.777.276,00	0,00	0,00
43	Kantor Camat Rengah Pammana	312.729.935,15	0,00	4.023.642,85	0,00	0,00	4.023.642,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023.642,85	316.753.578,00	0,00	0,00
44	Kantor Camat Pammana Selatan	628.610.275,00	0,00	5.550.000,00	0,00	0,00	5.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550.000,00	684.160.275,00	0,00	0,00
45	Kantor Camat Muara Sau	760.325.645,00	1.843.750,00	10.840												

II. ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN

(dalam rupiah)

ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN														
No.	S K P D	Saldo TA 2023 (Audited)	Mutasi Tambah				Mutasi Kurang				Jumlah Mutasi	Saldo TA 2024 (Audited)		
			Nilai Penyusutan Aset Tetap Perolehan TA 2024	Nilai Penyusutan Aset Tetap Perolehan Tahun Sebelumnya	Mutasi Masuk Nilai Penyusutan antar SKPD		Koreksi Nilai Penyusutan Aset	Jumlah Mutasi Tambah	Mutasi Masuk Nilai Penyusutan antar SKPD					
					SKPD Asal	Nilai			Tujuan	Nilai			Koreksi Nilai Penyusutan	Jumlah Mutasi Kurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+4,8)	10	11	12	13=(10+4,12)	14=9-13	15=3+14
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	121.949.273.313,52	393.526.721,06	8.300.041.776,50	0,00	0,00	0,00	8.693.568.497,56		0,00	443.318.886,91	443.318.886,91	8.250.249.610,65	130.200.022.924,12
2.	Dinas Kesehatan	24.584.024.307,50	58.779.958,50	1.949.579.144,48	0,00	0,00	0,00	2.008.359.102,98		0,00	91.887.933,54	91.887.933,54	1.916.471.169,44	26.500.495.476,94
3.	RSD Kol. Abundiani Banko	8.765.500.007,34	0,00	899.194.875,44	0,00	1.306.200,00	0,00	900.501.075,44		0,00	256.867.614,52	256.867.614,52	643.633.460,92	9.409.133.468,26
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25.108.198.297,01	74.871.891,26	3.586.321.728,22	0,00	0,00	0,00	3.661.193.619,48	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	4.255.900.550,42	101.075.172,44	4.437.645.073,74	(776.451.454,26)	24.331.746.842,75
									Sekretariat Daerah	77.773.261,34				
									Kantor Camat Banko	1.579.686,16				
									Kantor Camat Tabir Selatan	1.316.403,38				
										217.334.490,00	22.464.986,40	239.799.476,40	1.328.047.690,47	7.265.789.728,15
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.937.742.037,68	0,00	842.585.886,87	0,00	725.261.280,00	0,00	1.567.847.166,87	Dinas Lingkungan Hidup		0,00	0,00	0,00	258.508.831,52
6.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	211.507.225,83	0,00	47.001.605,74	0,00	0,00	0,00	47.001.605,74		0,00	0,00	0,00	47.001.605,74	258.508.831,52
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	98.874.008,00	0,00	10.613.184,00	0,00	0,00	0,00	10.613.184,00		0,00	0,00	0,00	10.613.184,00	109.487.192,00
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	394.204.785,12	0,00	44.439.576,28	0,00	0,00	0,00	44.439.576,28		0,00	0,00	0,00	44.439.576,28	438.644.361,40
9.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	310.121.979,12	4.228.976,00	29.108.296,08	0,00	0,00	0,00	33.337.272,08		0,00	0,00	0,00	33.337.272,08	343.459.251,20
10.	Dinas Ketahanan Pangan	442.246.192,28	0,00	28.401.525,56	0,00	0,00	0,00	28.401.525,56		0,00	0,00	0,00	28.401.525,56	470.647.717,84
11.	Dinas Lingkungan Hidup	593.913.455,58	0,00	108.047.862,88	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	217.334.490,00	0,00	900.926.082,88		0,00	0,00	0,00	900.926.082,88	1.494.839.538,46
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	575.543.730,00								
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	417.862.371,30	0,00	27.951.322,98	0,00	0,00	0,00	27.951.322,98		0,00	0,00	0,00	27.951.322,98	445.813.694,28
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	674.139.630,54	0,00	35.539.509,46	0,00	0,00	0,00	35.539.509,46		0,00	0,00	0,00	35.539.509,46	709.679.140,00
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.606.922.500,60	0,00	149.327.299,80	0,00	0,00	0,00	149.327.299,80		0,00	60.437.100,00	60.437.100,00	88.890.199,80	1.695.812.700,40
15.	Dinas Perhubungan	962.363.678,23	0,00	83.669.231,50	0,00	0,00	0,00	83.669.231,50		0,00	0,00	0,00	83.669.231,50	1.046.032.909,73
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	852.966.604,06	0,00	108.603.399,92	0,00	0,00	0,00	108.603.399,92		0,00	0,00	0,00	108.603.399,92	961.570.003,98
17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	2.421.349.319,05	23.007.548,16	455.125.137,70	0,00	2.117.016.673,08	0,00	2.595.149.358,94		0,00	33.040.542,05	33.040.542,05	2.562.108.816,89	4.983.458.135,94
18.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	2.276.028.246,63	0,00	120.349.487,26	0,00	0,00	0,00	120.349.487,26	Dinas Perikanan	308.697.660,00	0,00	308.697.660,00	(188.348.172,74)	2.087.680.073,89
19.	Dinas Kearsifan dan Perpustakaan	507.298.574,78	0,00	116.306.048,18	0,00	0,00	0,00	116.306.048,18		0,00	0,00	0,00	116.306.048,18	623.604.622,96
20.	Dinas Perikanan	1.645.242.167,32	0,00	104.583.703,88	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	308.697.660,00	0,00	413.281.363,88		0,00	5.781.151,52	5.781.151,52	407.500.212,36	2.052.742.379,68
21.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	6.145.633.681,31	48.239.761,04	1.001.003.563,98	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.255.900.550,42	0,00	5.305.143.875,44		0,00	267.248.182,78	267.248.182,78	5.037.895.692,66	11.183.529.373,97
22.	Dinas Peternakan dan Perkebunan	3.384.572.345,75	0,00	222.372.638,30	0,00	0,00	0,00	222.372.638,30		0,00	0,00	0,00	222.372.638,30	3.606.944.984,05
23.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	7.075.848.275,08	0,00	407.437.679,82	0,00	0,00	0,00	407.437.679,82		0,00	0,00	0,00	407.437.679,82	7.483.285.954,90
24.	Sekretariat Daerah	16.539.407.048,48	0,00	1.179.457.815,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77.773.261,34	0,00	1.257.231.076,84	Kantor Camat Batang Masumai	0,00	104.064.806,52	104.064.806,52	1.153.166.270,32	17.692.573.318,80
25.	Inspektorat Daerah	803.319.579,70	2.267.550,00	32.440.142,64	0,00	0,00	0,00	34.707.692,64		0,00	0,00	0,00	34.707.692,64	838.027.272,34
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.244.449.663,01	0,00	74.250.152,58	0,00	0,00	0,00	74.250.152,58		0,00	0,00	0,00	74.250.152,58	1.318.699.815,59
27.	Badan Penelolnaan Keuangan dan Aset Daerah	1.945.109.148,00	0,00	144.635.833,69	0,00	0,00	0,00	144.635.833,69	Dinas Lintokunaa Hidup	575.543.730,00	30.326.905,59	605.870.635,59	(461.234.801,90)	1.483.874.346,10
28.	Badan Penelolnaan Politik dan Retribusi Daerah	448.203.251,30	4.486.660,00	19.725.658,07	0,00	0,00	0,00	24.212.318,07		0,00	0,00	0,00	24.212.318,07	472.415.569,37
29.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	513.037.676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	513.037.676,48	0,00	513.037.676,48	(513.037.676,48)	0,00
30.	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	20.352.594,80	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	513.037.676,48	0,00	533.390.271,28		0,00	0,00	0,00	533.390.271,28	533.390.271,28
31.	Sekretariat DPRD	7.662.750.870,47	0,00	554.749.395,17	0,00	0,00	0,00	554.749.395,17		0,00	0,00	0,00	554.749.395,17	8.217.500.265,64
32.	Kantor Camat Bangko	1.156.087.180,44	0,00	77.352.082,64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.579.686,16	0,00	78.931.768,80		0,00	1.137.286,49	1.137.286,49	77.794.482,31	1.233.881.662,75
33.	Kantor Camat Tabir	1.021.555.313,32	0,00	34.726.249,90	0,00	0,00	0,00	34.726.249,90		0,00	0,00	0,00	34.726.249,90	1.056.281.563,22
34.	Kantor Camat Pamenano	358.212.676,11	0,00	17.055.589,58	0,00	0,00	0,00	17.055.589,58		0,00	0,00	0,00	17.055.589,58	375.268.265,69
35.	Kantor Camat Pamenano Barat	92.316.200,00	0,00	9.439.100,00	0,00	0,00	0,00	9.439.100,00		0,00	0,00	0,00	9.439.100,00	101.755.300,00
36.	Kantor Camat Tabir Ulu	269.368.593,20	0,00	12.156.975,40	0,00	0,00	0,00	12.156.975,40		0,00	0,00	0,00	12.156.975,40	281.525.568,60
37.	Kantor Camat Tabir Selatan	281.397.279,24	0,00	17.636.226,96	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.316.403,38	0,00	18.952.630,34		0,00	540.878,35	540.878,35	18.411.751,99	299.809.031,23
38.	Kantor Camat Tabir Timur	105.039.391,66	0,00	11.943.705,74	0,00	0,00	0,00	11.943.705,74		0,00	0,00	0,00	11.943.705,74	116.983.097,40
39.	Kantor Camat Tabir Ilir	110.859.231,66	0,00	11.282.625,74	0,00	0,00	0,00	11.282.625,74		0,00	0,00	0,00	11.282.625,74	122.141.857,40
40.	Kantor Camat Tabir Barat	126.947.772,84	0,00	10.837.508,68	0,00	0,00	0,00	10.837.508,68		0,00	0,00	0,00	10.837.508,68	137.785.281,52
41.	Kantor Camat Maroo Tabir	263.030.763,34	0,00	20.965.137,18	0,00	0,00	0,00	20.965.137,18		0,00	0,00	0,00	20.965.137,18	283.995.900,52
42.	Kantor Camat Tabir Lintas	39.879.290,00	0,00	4.285.160,00	0,00	0,00	0,00	4.285.160,00		0,00	0,00	0,00	4.285.160,00	44.164.450,00
43.	Kantor Camat Renah Pamenano	44.468.500,00	0,00	3.509.000,00	0,00	0,00	0,00	3.509.000,00		0,00	0,00	0,00	3.509.000,00	47.977.500,00
44.	Kantor Camat Pamenano Selatan	312.916.841,42	0,00	27.796.507,26	0,00	0,00	0,00	27.796.507,26		0,00	0,00	0,00	27.796.507,26	340.713.348,68
45.	Kantor Camat Muara Siau	316.040.078,42	0,00	9.874.362,64	0,00	0,00	0,00	9.874.362,64		0,00	0,00	0,00	9.874.362,64	325.914.441,06
46.	Kantor Camat Tiano Pimunn	99.891.936,08	0,00	10.724.368,16	0,00	0,00	0,00	10.724.368,16		0,00	0,00	0,00	10.616.304,24	110.616.304,24
47.	Kantor Camat Janokat	156.379.376,08	0,00	8.208.108,16	0,00	0,00	0,00	8.208.108,16		0,00	0,00	0,00	8.208.108,16	164.587.484,24
48.	Kantor Camat Janokat Timur	150.961.710,91	0,00	10.085.446,28	0,00	0,00	0,00	10.085.446,28		0,00	0,00	0,00	10.085.446,28	161.047.157,19
49.	Kantor Camat Sunnail Manau	599.682.721,08	0,00	19.066.276,72	0,00	0,00	0,00	19.066.276,726						

III. ASET TETAP JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN

(dalam rupiah)

ASET TETAP JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN												
No.	S K P D	Saldo TA 2023 (Audited)	Mutasi Tambah				Mutasi Kurang			Jumlah Mutasi	Saldo TA 2024 (Audited)	
			Nilai Penyusutan Aset Tetap Perolehan TA 2024	Nilai Penyusutan Aset Tetap Perolehan Tahun Sebelumnya	Nilai Penyusutan Aset Hibah Aset Tetap dari Entitas Lainnya	Koreksi Nilai Penyusutan Aset	Jumlah Mutasi Tambah	Koreksi Nilai Penyusutan Aset	Jumlah Mutasi Kurang			
1	2	3	4	5	6	7	8=7(4 s.d. 7)	9	10=8	11=7-10	12=3-11	
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	605.069.159,43	48.891.746,43	288.939.188,12	0,00	0,00	337.830.934,55	121.401.080,00	121.401.080,00	216.429.854,55	821.499.013,98	
2.	Dinas Kesehatan	1.194.335.653,15	244.360.446,36	0,00	0,00	0,00	244.360.446,36	0,00	0,00	244.360.446,36	1.438.696.099,51	
3.	RSD Kol. Abundiani Bangko	1.441.790.201,71	0,00	167.341.047,54	0,00	0,00	167.341.047,54	0,00	0,00	167.341.047,54	1.609.131.249,25	
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.340.203.647.193,72	3.638.283.910,22	107.995.090.438,14	1.286.349.225,00	79.826.567,74	112.999.550.141,10	0,00	0,00	112.999.550.141,10	1.453.203.197.334,82	
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	14.030.889.173,02	4.787.912,50	2.053.612.901,00	0,00	0,00	2.058.400.813,50	0,00	0,00	2.058.400.813,50	16.089.289.986,52	
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.457.427.569,37	0,00	2.274.999.656,04	0,00	0,00	2.274.999.656,04	0,00	0,00	2.274.999.656,04	13.732.427.225,41	
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	15.144.349,17	0,00	3.089.353,04	0,00	0,00	3.089.353,04	2.128.500,00	2.128.500,00	960.853,04	16.105.202,21	
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	26.763.483,33	6.939.950,00	3.870.216,66	0,00	0,00	10.810.166,66	0,00	0,00	10.810.166,66	37.573.649,99	
9.	Dinas Lingkungan Hidup	3.328.536.880,89	34.895.359,75	536.323.863,32	0,00	6.603.000,00	577.822.223,07	0,00	0,00	577.822.223,07	3.906.359.103,96	
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	54.016.070,75	0,00	5.153.364,42	0,00	0,00	5.153.364,42	0,00	0,00	5.153.364,42	59.169.435,17	
11.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	24.286.625,00	0,00	7.589.650,00	0,00	0,00	7.589.650,00	0,00	0,00	7.589.650,00	31.876.275,00	
12.	Dinas Perhubungan	836.458.730,00	0,00	41.381.330,00	0,00	0,00	41.381.330,00	0,00	0,00	41.381.330,00	877.840.060,00	
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	4.364.816,50	5.510.934,37	4.364.816,50	0,00	0,00	9.875.750,87	0,00	0,00	9.875.750,87	14.240.567,37	
14.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	7.491.000,00	0,00	832.333,34	0,00	0,00	832.333,34	0,00	0,00	832.333,34	8.323.333,34	
15.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	94.653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.653.000,00	
16.	Dinas Perikanan	2.994.691.441,66	0,00	167.960.485,56	0,00	0,00	167.960.485,56	0,00	0,00	167.960.485,56	3.162.651.927,22	
17.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	2.318.600.970,81	50.784.539,20	372.629.548,22	0,00	0,00	423.414.087,42	0,00	0,00	423.414.087,42	2.742.015.058,23	
18.	Dinas Peternakan dan Perkebunan	12.286.675.049,23	0,00	80.764.672,04	0,00	0,00	80.764.672,04	0,00	0,00	80.764.672,04	12.367.439.721,27	
19.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	8.980.493.498,53	0,00	191.353.609,76	0,00	0,00	191.353.609,76	0,00	0,00	191.353.609,76	9.171.847.108,29	
20.	Sekretariat Daerah	116.765.789,76	0,00	9.540.531,76	0,00	0,00	9.540.531,76	0,00	0,00	9.540.531,76	126.306.321,52	
21.	Inspektorat Daerah	42.961.983,35	0,00	3.653.766,66	0,00	0,00	3.653.766,66	0,00	0,00	3.653.766,66	46.615.750,01	
22.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	80.034.187,50	0,00	5.335.612,50	0,00	0,00	5.335.612,50	0,00	0,00	5.335.612,50	85.369.800,00	
23.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	203.851.704,16	0,00	9.623.404,17	0,00	0,00	9.623.404,17	0,00	0,00	9.623.404,17	213.475.108,33	
24.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	21.850.225,00	1.132.766,67	3.370.225,00	0,00	0,00	4.502.991,67	0,00	0,00	4.502.991,67	26.353.216,67	
25.	Sekretariat DPRD	211.790.726,32	0,00	25.403.824,76	0,00	0,00	25.403.824,76	0,00	0,00	25.403.824,76	237.194.551,08	
26.	Kantor Camat Bangko	259.143.003,00	0,00	57.587.334,00	0,00	0,00	57.587.334,00	0,00	0,00	57.587.334,00	316.730.337,00	
27.	Kantor Camat Tabir	4.017.000,00	0,00	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00	4.635.000,00	
28.	Kantor Camat Pamenang	21.614.450,00	0,00	3.325.300,00	0,00	0,00	3.325.300,00	0,00	0,00	3.325.300,00	24.939.750,00	
29.	Kantor Camat Tabir Selatan	16.796.000,00	0,00	988.000,00	0,00	0,00	988.000,00	0,00	0,00	988.000,00	17.784.000,00	
30.	Kantor Camat Tabir Timur	38.940.000,00	0,00	6.490.000,00	0,00	0,00	6.490.000,00	0,00	0,00	6.490.000,00	45.430.000,00	
31.	Kantor Camat Tabir Ilir	7.382.916,67	0,00	1.135.833,34	0,00	0,00	1.135.833,34	0,00	0,00	1.135.833,34	8.518.750,01	
32.	Kantor Camat Tabir Barat	105.720.450,00	0,00	11.694.720,00	0,00	0,00	11.694.720,00	0,00	0,00	11.694.720,00	117.415.170,00	
33.	Kantor Camat Marqo Tabir	113.384.156,10	0,00	9.448.679,68	0,00	0,00	9.448.679,68	0,00	0,00	9.448.679,68	122.832.835,78	
34.	Kantor Camat Tabir Lintas	4.500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	5.500.000,00	
35.	Kantor Camat Muara Siau	3.245.125,00	0,00	499.250,00	0,00	0,00	499.250,00	0,00	0,00	499.250,00	3.744.375,00	
36.	Kantor Camat Tiang Pumpung	110.387.100,00	0,00	15.468.400,00	0,00	0,00	15.468.400,00	0,00	0,00	15.468.400,00	125.855.500,00	
37.	Kantor Camat Renah Pembarap	17.347.106,69	0,00	1.445.592,22	0,00	0,00	1.445.592,22	0,00	0,00	1.445.592,22	18.792.698,91	
38.	Kantor Camat Lembah Masurai	153.501.500,00	0,00	779.500,00	0,00	0,00	779.500,00	0,00	0,00	779.500,00	154.281.000,00	
39.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.447.337,50	0,00	1.914.975,00	0,00	0,00	1.914.975,00	0,00	0,00	1.914.975,00	14.362.312,50	
Jumlah		1.401.451.015.627,32	4.035.587.565,50	114.364.619.422,79	1.286.349.225,00	86.429.567,74	119.772.985.781,03	123.529.580,00	123.529.580,00	119.649.456.201,03	1.521.100.471.828,35	

7

IV. ASET TETAP LAINNYA

(dalam rupiah)

ASET TETAP LAINNYA								
No.	S K P D	Saldo TA 2023 (Audited)	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		Jumlah Mutasi	Saldo TA 2024 (Audited)
			Nilai Penyusutan Aset Tetap Perolehan TA 2024	Nilai Penyusutan Aset Tetap Perolehan Tahun Sebelumnya	Jumlah Mutasi Tambah	Jumlah Mutasi Kurang		
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8=6-7	9=3+8
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.748.641.791,38	49.879.516,74	102.000.880,42	151.880.397,16	0,00	151.880.397,16	1.900.522.188,54
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
3.	Satuan Polisi Pamong Praja	149.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.875.000,00
4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
5.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	62.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.020.000,00
6.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	5.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999.900,00
7.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
8.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	132.752.000,04	0,00	9.360.000,08	9.360.000,08	0,00	9.360.000,08	142.112.000,12
9.	Sekretariat Daerah	78.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.285.000,00
10.	Kantor Camat Tabir Ilir	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
11.	Kantor Camat Jangkat Timur	982.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.800,00
J u m l a h		2.205.556.491,42	49.879.516,74	111.360.880,50	161.240.397,24	0,00	161.240.397,24	2.366.796.888,66

7

**REKAPITULASI ASET TETAP PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN PER 31 DESEMBER 2024
YANG TELAH HABIS MASA MANFAATNYA DAN TELAH DISUSUTKAN**

(dalam rupiah)

No.	S K P D	Aset Tetap				Jumlah
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Tanggungan	Aset Tetap Lainnya	
1	2	3	4	5	6	7=1(3 s.d. 6)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	115.054.922.502,70	1.066.850.000,00	20.000.000,00	1.763.588.271,00	117.905.360.773,70
2.	Dinas Kesehatan	59.553.610.849,96	470.146.000,00	145.944.521,00	0,00	60.169.701.370,96
3.	RSD Kol. Abundiani Bangko	36.207.428.620,00	0,00	0,00	0,00	36.207.428.620,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.720.785.991,00	0,00	370.718.449.800,11	17.000.000,00	392.456.235.791,11
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	29.322.170.710,00	0,00	4.718.703.398,00	0,00	34.040.874.108,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	2.185.948.968,64	0,00	0,00	0,00	2.185.948.968,64
7.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.210.971.524,00	0,00	0,00	0,00	6.210.971.524,00
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.668.067.967,00	0,00	0,00	0,00	1.668.067.967,00
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.869.657.846,00	0,00	0,00	0,00	4.869.657.846,00
10.	Dinas Ketahanan Pangan	1.838.887.751,00	0,00	0,00	0,00	1.838.887.751,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup	12.743.061.764,72	0,00	99.335.000,00	0,00	12.842.396.764,72
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.251.759.556,00	0,00	0,00	0,00	3.251.759.556,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.500.149.044,00	0,00	0,00	0,00	2.500.149.044,00
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.773.890.769,00	0,00	0,00	0,00	5.773.890.769,00
15.	Dinas Perhubungan	7.280.728.167,00	0,00	472.815.000,00	0,00	7.753.543.167,00
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.679.407.657,00	0,00	0,00	0,00	1.679.407.657,00
17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	3.111.398.081,00	0,00	0,00	0,00	3.111.398.081,00
18.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	3.318.182.669,00	0,00	0,00	0,00	3.318.182.669,00
19.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	1.923.273.106,00	0,00	749.620.531,00	124.472.000,00	2.797.365.637,00
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.379.506.600,00	0,00	94.653.000,00	0,00	1.474.159.600,00
21.	Dinas Perikanan	2.545.875.363,00	0,00	637.303.089,00	0,00	3.183.178.452,00
22.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	7.670.412.510,00	0,00	6.490.935.859,00	0,00	14.161.348.369,00
23.	Dinas Peternakan dan Perkebunan	4.584.459.922,00	0,00	11.762.559.708,00	0,00	16.347.019.630,00
24.	Sekretariat Daerah	42.696.230.955,00	0,00	0,00	78.285.000,00	42.774.515.955,00
25.	Sekretariat DPRD	17.380.352.489,00	0,00	19.900.000,00	0,00	17.400.252.489,00
26.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.030.912.898,00	0,00	0,00	0,00	3.030.912.898,00
27.	Kantor Camat Bangko	1.318.912.597,00	0,00	0,00	0,00	1.318.912.597,00
28.	Kantor Camat Bangko Barat	477.320.334,00	0,00	0,00	0,00	477.320.334,00
29.	Kantor Camat Batang Masumai	686.948.765,00	0,00	0,00	0,00	686.948.765,00
30.	Kantor Camat Jangkat	941.179.226,00	0,00	0,00	0,00	941.179.226,00
31.	Kantor Camat Jangkat Timur	1.205.441.692,00	0,00	0,00	0,00	1.205.441.692,00
32.	Kantor Camat Lembah Masurai	827.331.176,00	0,00	140.250.000,00	0,00	967.581.176,00
33.	Kantor Camat Marqo Tabir	398.845.497,00	0,00	0,00	0,00	398.845.497,00
34.	Kantor Camat Muara Siau	750.928.245,00	0,00	0,00	0,00	750.928.245,00
35.	Kantor Camat Nalo Tantan	446.628.260,00	0,00	0,00	0,00	446.628.260,00
36.	Kantor Camat Pamenang	1.092.737.808,00	0,00	0,00	0,00	1.092.737.808,00
37.	Kantor Camat Pamenang Barat	483.718.494,00	0,00	0,00	0,00	483.718.494,00
38.	Kantor Camat Pamenang Selatan	681.160.275,00	0,00	0,00	0,00	681.160.275,00
39.	Kantor Camat Pangkalan Jambu	591.009.433,00	0,00	0,00	0,00	591.009.433,00
40.	Kantor Camat Renah Pamenang	316.769.578,00	0,00	0,00	0,00	316.769.578,00
41.	Kantor Camat Renah Pembarap	682.888.511,00	0,00	0,00	0,00	682.888.511,00
42.	Kantor Camat Sungai Manau	628.337.805,00	0,00	0,00	0,00	628.337.805,00
43.	Kantor Camat Tabir	1.922.421.926,00	0,00	0,00	0,00	1.922.421.926,00
44.	Kantor Camat Tabir Barat	1.461.172.410,00	0,00	0,00	0,00	1.461.172.410,00
45.	Kantor Camat Tabir Ilir	468.992.110,00	0,00	0,00	0,00	468.992.110,00
46.	Kantor Camat Tabir Lintas	614.277.276,00	0,00	0,00	0,00	614.277.276,00
47.	Kantor Camat Tabir Selatan	666.887.119,00	0,00	0,00	0,00	666.887.119,00
48.	Kantor Camat Tabir Timur	643.812.267,00	0,00	0,00	0,00	643.812.267,00
49.	Kantor Camat Tabir Ulu	721.366.385,00	0,00	0,00	0,00	721.366.385,00
50.	Kantor Camat Tianq Pumpung	667.610.683,00	0,00	0,00	0,00	667.610.683,00
51.	Inspektorat Daerah	3.376.525.266,00	0,00	0,00	0,00	3.376.525.266,00
52.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.307.103.220,00	0,00	0,00	0,00	4.307.103.220,00
53.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.266.477.777,00	0,00	0,00	0,00	8.266.477.777,00
54.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	3.783.077.460,00	0,00	0,00	0,00	3.783.077.460,00
55.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3.265.844.382,00	0,00	0,00	0,00	3.265.844.382,00
56.	Badan Penelitian dan Pengembangan	840.415.509,00	0,00	0,00	0,00	840.415.509,00
57.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	3.742.633.662,00	0,00	62.910.000,00	0,00	3.805.543.662,00
J u m l a h		441.197.780.258,02	1.536.996.000,00	396.070.469.906,11	1.983.345.271,00	840.788.591.435,13

**REKAPITULASI MUTASI DAN AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PER 31 DESEMBER 2024**

(dalam rupiah)

Rincian Aset Tidak Berwujud											
No.	SKPD/Jenis	Tahun Perolehan	Semester	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat yang sudah dilalui s.d Desember 2024 (Tahun)	Amortisasi per tahun	Nilai Perolehan	Amortisasi s.d Tahun 2023	Amortisasi Tahun 2024	Amortisasi s.d Tahun 2024	Nilai Sisa per 31 Desember 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8-11
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan										
	- <i>Software Simbada</i>	2011	1	5	14	7.013.699	35.068.497,00	35.068.497,00	0,00	35.068.497,00	0,00
	Jumlah						35.068.497,00	35.068.497,00	0,00	35.068.497,00	0,00
2.	Dinas Kesehatan										
	- <i>Software Simbada</i>	2010	1	5	15	5.600.000	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00
	- <i>Software Simbada</i>	2010	1	5	15	5.000.000	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
	Jumlah						53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00	0,00
3.	RSUD Kol. Abundjani										
	- <i>Billing SIMKASDA</i>	2014	1	5	11	16.390.000	81.950.000,00	81.950.000,00	0,00	81.950.000,00	0,00
	- <i>Website</i>	2014	1	5	11	12.782.000	63.910.000,00	63.910.000,00	0,00	63.910.000,00	0,00
	Jumlah						145.860.000,00	145.860.000,00	0,00	145.860.000,00	0,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
	- <i>Software Simbada</i>	2010	1	5	15	6.171.169	30.855.847,00	30.855.847,00	0,00	30.855.847,00	0,00
	- Sistem Informasi Tata Ruang dan Bangunan	2017	1	5	8	19.900.000	99.500.000,00	99.500.000,00	0,00	99.500.000,00	0,00
	- Sistem Informasi Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	2017	1	5	8	29.900.000	149.500.000,00	149.500.000,00	0,00	149.500.000,00	0,00
	Jumlah						279.855.847,00	279.855.847,00	0,00	279.855.847,00	0,00
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman										
	- <i>Software SPIKD KP3K</i>	2011	1	5	14	20.322.462	101.612.308,00	101.612.308,00	0,00	101.612.308,00	0,00
	Jumlah						101.612.308,00	101.612.308,00	0,00	101.612.308,00	0,00
6.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
	- <i>Software Simbada</i>	2011	1	5	14	7.298.710	36.493.550,00	36.493.550,00	0,00	36.493.550,00	0,00
	Jumlah						36.493.550,00	36.493.550,00	0,00	36.493.550,00	0,00
7.	Dinas Ketahanan Pangan										
	- <i>Software Simbada</i>	2013	1	5	12	7.500.000	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	0,00
	Jumlah						37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	0,00
8.	Dinas Lingkungan Hidup										
	- <i>Software Aplikasi Jakstrada</i>	2019	1	5	6	9.999.000	49.995.000,00	49.995.000,00	0,00	49.995.000,00	0,00
	- <i>Software Aplikasi Simpatda</i>	2021	1	5	4	11.999.900	59.999.500,00	35.999.700,00	11.999.900,00	47.999.600,00	11.999.900,00
	Jumlah						109.994.500,00	85.994.700,00	11.999.900,00	97.994.600,00	11.999.900,00
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
	- <i>software Aplikasi Sipedang</i>	2021	1	5	4	9.988.000	49.940.000,00	29.964.000,00	9.988.000,00	39.952.000,00	9.988.000,00
	Jumlah						49.940.000,00	29.964.000,00	9.988.000,00	39.952.000,00	9.988.000,00
10.	Dinas Perhubungan										
	- <i>software SIM PKB</i>	2020	1	5	5	21.000.000	105.000.000,00	84.000.000,00	21.000.000,00	105.000.000,00	0,00
	Jumlah						105.000.000,00	84.000.000,00	21.000.000,00	105.000.000,00	0,00
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika										
	- <i>Software Aplikasi Menjamu</i>	2019	1	5	6	17.193.000	85.965.000,00	85.965.000,00	0,00	85.965.000,00	0,00
	- <i>Software Aplikasi LUSI Studio</i>	2023	1	5	2	6.981.000	34.905.000,00	6.981.000,00	6.981.000,00	13.962.000,00	20.943.000,00
	Jumlah						120.870.000,00	92.946.000,00	6.981.000,00	99.927.000,00	20.943.000,00
12.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja										
	- <i>Software Simbada</i>	2013	1	5	12	9.800.000	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00	0,00
	- <i>Software SIMYANDU</i>	2015	1	5	10	29.920.000	149.600.000,00	149.600.000,00	0,00	149.600.000,00	0,00
	- <i>Software Sistem Informasi Perizinan OSS</i>	2019	1	5	6	24.160.000	120.800.000,00	120.800.000,00	0,00	120.800.000,00	0,00
	Jumlah						319.400.000,00	319.400.000,00	0,00	319.400.000,00	0,00

Rincian Aset Tidak Berwujud											
No.	SKPD/Jenis	Tahun Perolehan	Semester	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat yang sudah dilalui s.d Desember 2024 (Tahun)	Amortisasi per tahun	Nilai Perolehan	Amortisasi s.d Tahun 2023	Amortisasi Tahun 2024	Amortisasi s.d Tahun 2024	Nilai Sisa per 31 Desember 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8-11
13.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan										
	- <i>Software</i> Simbada	2013	1	5	12	10.119.400	50.597.000,00	50.597.000,00	0,00	50.597.000,00	0,00
	- <i>Software</i> Buku Digital	2023	2	5	1,5	9.997.200	49.986.000,00	4.998.600,00	9.997.200,00	14.995.800,00	34.990.200,00
	Jumlah						100.583.000,00	55.595.600,00	9.997.200,00	65.592.800,00	34.990.200,00
14.	Dinas Peternakan dan Perkebunan										
	- <i>Software</i> Simbada	2013	1	5	12	6.999.740	34.998.700,00	34.998.700,00	0,00	34.998.700,00	0,00
	Jumlah						34.998.700,00	34.998.700,00	0,00	34.998.700,00	0,00
15.	Sekretariat Daerah										
	- <i>Software</i> Aset	2014	1	5	11	12.150.000	60.750.000,00	60.750.000,00	0,00	60.750.000,00	0,00
	- <i>Software</i> Komputer	2009	1	5	16	79.450.000	397.250.000,00	397.250.000,00	0,00	397.250.000,00	0,00
	- <i>Program</i> Simbada	2010	1	5	15	6.961.500	34.807.500,00	34.807.500,00	0,00	34.807.500,00	0,00
	Jumlah						492.807.500,00	492.807.500,00	0,00	492.807.500,00	0,00
16.	Inspektorat Daerah										
	- <i>Software</i> Simbada	2013	1	5	12	10.277.600	51.388.000,00	51.388.000,00	0,00	51.388.000,00	0,00
	- <i>Aplikasi e-Audite</i>	2024	2	5	0,5	39.960.000	199.800.000,00	0,00	19.980.000,00	19.980.000,00	179.820.000,00
	- Website Whistle Blowing System (WBS)	2024	2	5	0,5	14.985.000	74.925.000,00	0,00	7.492.500,00	7.492.500,00	67.432.500,00
	Jumlah						326.113.000,00	51.388.000,00	27.472.500,00	78.860.500,00	247.252.500,00
17.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah										
	- Program Aplikasi Dokumen Manajemen Sistem Arsip	2018	1	5	7	12.100.000	60.500.000,00	60.500.000,00	0,00	60.500.000,00	0,00
	- Program Aplikasi Sistem Informasi Barang	2018	1	5	7	7.260.000	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	36.300.000,00	0,00
	Jumlah						96.800.000,00	96.800.000,00	0,00	96.800.000,00	0,00
18.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah										
	- <i>Software</i> Simbada	2009	1	5	16	20.128.400	100.642.000,00	100.642.000,00	0,00	100.642.000,00	0,00
	- <i>Update Software</i> Simbada	2022	1	5	3	9.966.000	49.830.000,00	19.932.000,00	9.966.000,00	29.898.000,00	19.932.000,00
	- <i>Software</i> Pesediaan	2023	1	5	2	7.983.120	39.915.600,00	7.983.120,00	7.983.120,00	15.966.240,00	23.949.360,00
	Jumlah						190.387.600,00	128.557.120,00	17.949.120,00	146.506.240,00	43.881.360,00
19.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah										
	- <i>Software</i> DBMS	2014	1	5	11	16.629.183	83.145.916,00	83.145.916,00	0,00	83.145.916,00	0,00
	- <i>Software</i> BPHTB	2014	1	5	11	19.998.000	99.990.000,00	99.990.000,00	0,00	99.990.000,00	0,00
	- <i>Software</i> Simpada	2014	1	5	11	38.280.000	191.400.000,00	191.400.000,00	0,00	191.400.000,00	0,00
	- <i>Software</i> Visualiasi Pengelolaan dan Pelaporan PAD	2015	1	5	10	3.982.000	19.910.000,00	19.910.000,00	0,00	19.910.000,00	0,00
	- <i>Software</i> Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan PAD	2015	1	5	10	9.988.000	49.940.000,00	49.940.000,00	0,00	49.940.000,00	0,00
	- <i>Software</i> Setoran PAD <i>Online</i>	2015	1	5	10	9.988.000	49.940.000,00	49.940.000,00	0,00	49.940.000,00	0,00
	- <i>Software</i> SIM PBB dan SIM BPHTB	2016	1	5	9	37.712.779	188.563.897,00	188.563.897,00	0,00	188.563.897,00	0,00
	- <i>Software</i> PAD	2017	1	5	8	20.114.000	100.570.000,00	100.570.000,00	0,00	100.570.000,00	0,00
	- Aplikasi Sistem Informasi Piutang	2018	1	5	7	10.098.000	50.490.000,00	50.490.000,00	0,00	50.490.000,00	0,00
	- Aplikasi <i>Web service</i> BPN	2020	1	5	5	5.977.400	29.887.000,00	23.909.600,00	5.977.400,00	29.887.000,00	0,00
	- Aplikasi <i>Online Payment</i>	2020	1	5	5	6.987.200	34.936.000,00	27.948.800,00	6.987.200,00	34.936.000,00	0,00
	Jumlah						898.772.813,00	885.808.213,00	12.964.600,00	898.772.813,00	0,00
20.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah										
	- <i>Software</i> Simpeg	2003	1	5	22	9.820.000	49.100.000,00	49.100.000,00	0,00	49.100.000,00	0,00
	- <i>Software</i> Absensi <i>Online</i> (SAPO)	2021	1	5	4	33.928.000	169.640.000,00	101.784.000,00	33.928.000,00	135.712.000,00	33.928.000,00
	- <i>Software</i> Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG)	2023	2	5	1,5	20.800.000	104.000.000,00	10.400.000,00	20.800.000,00	31.200.000,00	72.800.000,00
	- Sistem Informasi Kepegawaian ASN - Paket 5	2024	2	5	0,5	23.990.000	119.950.000,00	0,00	11.995.000,00	11.995.000,00	107.955.000,00
	Jumlah						442.690.000,00	161.284.000,00	66.723.000,00	228.007.000,00	214.683.000,00

Rincian Aset Tidak Berwujud											
No.	SKPD/Jenis	Tahun Perolehan	Semester	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat yang sudah dilalui s.d Desember 2024 (Tahun)	Amortisasi per tahun	Nilai Perolehan	Amortisasi s.d Tahun 2023	Amortisasi Tahun 2024	Amortisasi s.d Tahun 2024	Nilai Sisa per 31 Desember 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8-11
21.	Sekretariat DPRD										
	- <i>Software</i> Simbada	2013	1	5	12	12.990.060	64.950.300,00	64.950.300,00	0,00	64.950.300,00	0,00
	- Aplikasi Sistem Pengawasan Penvelengqaraan Pemerintah Daerah	2017	1	5	8	23.960.000	119.800.000,00	119.800.000,00	0,00	119.800.000,00	0,00
	- <i>Sofware penataan aset simbada</i>	2010	1	5	15	12.990.060	64.950.300,00	64.950.300,00	0,00	64.950.300,00	0,00
	Jumlah						249.700.600,00	249.700.600,00	0,00	249.700.600,00	0,00
	J u m l a h						4.227.447.915,00	3.458.634.635,00	185.075.320,00	3.643.709.955,00	583.737.960,00

RINCIAN MUTASI ASET LAIN-LAIN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PER 31 DESEMBER 2024

(dalam rupiah)

		Saldo 2023 (Audited)	Reklasifikasi dari realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024		Mutasi Tambah		Reklasifikasi keluar Penyusutan tahun sebelumnya		Jumlah	Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya ke Aset Tetap		Mutasi Kurang				Jumlah	Tambah/(Kurang) Mutasi	Saldo Akhir TA 2024 (Unaudited)	
												Penghapusan ternak program sapi bergulir		Penghapusan ternak program sapi bergulir		Penghapusan			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9	10	11	12	13	14	15 = 12+13+14	16 = 13+14	17 = 15+16	18 = 17+18	19 = 18+19	
1.	Dinas Pendidikan	21.290.390.710,03	0,00	0,00	681.654.000,00	1.509.065.259,97	2.190.719.259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.719.259,97	23.481.109.970,00	
2.	Dinas Kesehatan	250.289.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.289.670,00		
3.	RSD Kol. Abundanti Banko	381.321.500,00	0,00	0,00	23.952.800,00	0,00	23.952.800,00	361.397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.397.000,00	(337.444.200,00)	43.877.300,00	
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.119.624.343,26	3.191.860.665,00	0,00	4.635.794.802,00	0,00	7.827.655.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.053.927,71	0,00	253.053.927,71	7.574.601.539,29	27.694.225.882,55		
5.	Dinas Pemukiman dan Kawasan Permukiman	178.977.518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.977.518,77		
6.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	39.241.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.241.040,00		
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75.492.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.492.500,00		
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00		
9.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	73.023.168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.023.168,30		
10.	Dinas Ketahanan Pangan	450.284.133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.284.133,50		
11.	Dinas Lintokungan Hidup	17.625.718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.625.718,75		
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.671.984,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.671.984,71		
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.172.092,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.172.092,86		
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.260.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260.375,00		
15.	Dinas Perhubungan	5.578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578.000,00		
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.643.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.414.566,90	0,00	5.414.566,90	(5.414.566,90)	3.228.893,30		
17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	126.100.043,57	0,00	0,00	39.990.000,00	0,00	39.990.000,00	107.325.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.325.900,00	(67.335.900,00)	58.764.143,57	
18.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	183.759.169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.759.169,40		
19.	Dinas Kearsifan dan Perustakan	5.778.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778.775,00		
20.	Dinas Perikanan	2.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.000,00		
21.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	105.573.256,81	0,00	0,00	1.483.054.831,00	0,00	1.483.054.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.054.831,00	1.588.628.087,81		
22.	Dinas Peternakan dan Perkebunan	2.216.508.535,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.383.000,00	57.908.000,00	137.558.000,00	0,00	0,00	1.287.849.000,00	(1.287.849.000,00)	928.659.535,43	928.659.535,43		
23.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	752.965.516,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.965.516,89		
24.	Sekretariat Daerah	149.075.209,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.075.209,94		
25.	Inspektorat Daerah	308.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.352,00		
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	81.682.146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00	(9.700.000,00)	71.982.146,60		
27.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	1.073.767.418,00	0,00	43.459.941.062,00	0,00	0,00	43.459.941.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.459.941.062,00	44.533.708.480,00		
28.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	28.976.642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.976.642,20		
29.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00		
30.	Badan Penelitian dan Pengembangan	6.379.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379.250,00		
31.	Sekretariat DPRD	59.588.012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.588.012,40		
32.	Kantor Camat Banko	18.238.466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.238.466,67		
33.	Kantor Camat Tabir	901.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.980,00		
34.	Kantor Camat Pamenang	4.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214.000,00		
35.	Kantor Camat Pamenang Barat	2.404.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404.200,00		
36.	Kantor Camat Tabir Ulu	4.233.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233.750,00		
37.	Kantor Camat Tabir Selatan	10.891.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.891.250,00		
38.	Kantor Camat Tabir Timur	3.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168.000,00		
39.	Kantor Camat Tabir Barat	7.423.990,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.423.990,25		
40.	Kantor Camat Maro Tabir	241.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.440,00		
41.	Kantor Camat Tabir Lintas	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00		
42.	Kantor Camat Renah Pamenang	1.106.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.875,00		
43.	Kantor Camat Muara Sibau	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00		
44.	Kantor Camat Tano Pumungo	2.171.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171.250,00		
45.	Kantor Camat Janokat	4.754.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754.375,00		
46.	Kantor Camat Janokat Timur	22.824.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.824.420,00		
47.	Kantor Camat Sunoi Manau	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00		
48.	Kantor Camat Renah Pembarrap	1.164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.000,00		
49.	Kantor Camat Pankalalan Jambu	19.121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.121.500,00		
50.	Kantor Camat Batana Masumai	13.789.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.789.750,00		
51.	Kantor Camat Banko Barat	5.371.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.371.500,00		
52.	Kantor Camat Lembah Masurai	21.002.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.002.950,00		
53.	Kantor Camat Nalo Tantan	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00		
54.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.509.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.509.661,00		
Jumlah		47.892.497.401,54	3.191.860.665,00	43.459.941.062,00	6.864.446.433,00	1.509.065.259,97	55.025.313.419,97	468.722.900,00	1.092.383.000,00	57.908.000,00	137.558.000,00	253.053.927,71	15.710.316,90	2.025.336.144,61	52.999.977.275,36	100.892.474.676,90			

**REKAPITULASI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN DALAM KONDISI RUSAK BERAT
PER 31 DESEMBER 2024**

(dalam rupiah)

No.	S K P D	Saldo Akhir 2023 (Audited)	Mutasi Tambah	Mutasi keluar	Saldo Akhir 2024 (Unaudited)
			Koreksi nilai Aset Rusak Berat	Reklasifikasi Ke Aset Tetap	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1.	Dinas Kesehatan	56.494.850,00	0,00	0,00	56.494.850,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70.181.350,35	0,00	0,00	70.181.350,35
3.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	178.977.518,77	0,00	0,00	178.977.518,77
4.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	39.241.040,00	0,00	0,00	39.241.040,00
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00
7.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	73.023.168,30	0,00	0,00	73.023.168,30
8.	Dinas Ketahanan Pangan	450.284.133,50	0,00	0,00	450.284.133,50
9.	Dinas Lingkungan Hidup	17.625.718,75	0,00	0,00	17.625.718,75
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.671.984,71	0,00	0,00	16.671.984,71
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.172.092,86	0,00	595.750,00	12.576.342,86
12.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.260.375,00	0,00	0,00	2.260.375,00
13.	Dinas Perhubungan	5.578.000,00	0,00	0,00	5.578.000,00
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.643.460,20	0,00	5.414.566,90	3.228.893,30
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	18.774.143,57	0,00	0,00	18.774.143,57
16.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	75.423.169,40	0,00	0,00	75.423.169,40
17.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.778.775,00	0,00	0,00	5.778.775,00
18.	Dinas Perikanan	2.285.000,00	0,00	0,00	2.285.000,00
19.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	105.573.256,81	0,00	0,00	105.573.256,81
20.	Dinas Peternakan dan Perkebunan	9.148.571,43	0,00	0,00	9.148.571,43
21.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	180.192.516,89	0,00	0,00	180.192.516,89
22.	Sekretariat Daerah	54.629.063,94	0,00	0,00	54.629.063,94
23.	Inspektorat Daerah	308.352,00	0,00	0,00	308.352,00
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	81.682.146,60	0,00	9.700.000,00	71.982.146,60
25.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	28.976.642,20	0,00	0,00	28.976.642,20
26.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
27.	Badan Penelitian dan Pengembangan	6.379.250,00	0,00	0,00	6.379.250,00
28.	Sekretariat DPRD	59.588.012,40	0,00	0,00	59.588.012,40
29.	Kantor Camat Bangko	18.238.466,67	0,00	0,00	18.238.466,67
30.	Kantor Camat Tabir	901.980,00	0,00	0,00	901.980,00
31.	Kantor Camat Pamenang	4.214.000,00	0,00	0,00	4.214.000,00
32.	Kantor Camat Pamenang Barat	2.404.200,00	0,00	0,00	2.404.200,00
33.	Kantor Camat Tabir Ulu	4.233.750,00	0,00	0,00	4.233.750,00
34.	Kantor Camat Tabir Selatan	10.891.250,00	0,00	0,00	10.891.250,00
35.	Kantor Camat Tabir Timur	3.168.000,00	0,00	0,00	3.168.000,00
36.	Kantor Camat Tabir Barat	7.423.990,25	0,00	0,00	7.423.990,25
37.	Kantor Camat Margo Tabir	241.440,00	0,00	0,00	241.440,00
38.	Kantor Camat Tabir Lintas	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00
39.	Kantor Camat Renah Pamenang	1.106.875,00	0,00	0,00	1.106.875,00
40.	Kantor Camat Muara Siau	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
41.	Kantor Camat Tiang Pumpung	2.171.250,00	0,00	0,00	2.171.250,00
42.	Kantor Camat Jangkat	4.754.375,00	0,00	0,00	4.754.375,00
43.	Kantor Camat Jangkat Timur	22.824.420,00	0,00	0,00	22.824.420,00
44.	Kantor Camat Sungai Manau	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
45.	Kantor Camat Renah Pembarap	1.164.000,00	0,00	0,00	1.164.000,00
46.	Kantor Camat Pangkalan Jambu	19.121.500,00	0,00	0,00	19.121.500,00
47.	Kantor Camat Batang Masumai	13.789.750,00	0,00	0,00	13.789.750,00
48.	Kantor Camat Bangko Barat	5.371.500,00	0,00	0,00	5.371.500,00
49.	Kantor Camat Lembah Masurai	21.002.950,00	0,00	0,00	21.002.950,00
50.	Kantor Camat Nalo Tantan	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
51.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.509.661,00	0,00	0,00	24.509.661,00
JUMLAH		1.739.535.950,61	0,00	15.710.316,90	1.723.825.633,71

7

**REKAPITULASI ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN YANG BELUM TERCATAT
PER 31 DESEMBER 2024**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	No. Ruas	Estimasi Nilai Wajar	Panjang Ruas (m)	Lebar Ruas (m)	Luas Persegi (m)	Estimasi Nilai Wajar per Meter	Kecamatan yang dilalui
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jalan Dusun Bangko Rendah	020	412.056.737,59	830	3,50	2.905	141.843,97	Bangko
2.	Jalan Pulau Rayo 2	022	2.269.503.546,10	4.000	4	16.000	141.843,97	Bangko
3.	Jalan Sungai Piul 2	023	493.617.021,28	870	4	3.480	141.843,97	Bangko
4.	Jalan Pematang Permai 1	026	453.900.709,22	800	4	3.200	141.843,97	Bangko
5.	Jalan Pematang Permai 2	027	200.000.000,00	470	3	1.410	141.843,97	Bangko
6.	Jalan Kurnia 2	030	46.808.510,64	110	3	330	141.843,97	Bangko
7.	Jalan Waher	031	248.226.950,35	350	5	1.750	141.843,97	Bangko
8.	Jalan Simpang Limbur Merangin - Limbur Merangin	035	1.003.493.406,00	3.000	4	12.000	83.624,45	Pamenang Barat
9.	Jalan Keramat 2 Pamenang	044	167.248.901,00	500	4	2.000	83.624,45	Pamenang
10.	Jalan Kesehatan Pamenang	046	260.908.285,56	780	4	3.120	83.624,45	Pamenang
11.	Jalan Pematang Kancil	050	1.254.366.757,50	3.000	5	15.000	83.624,45	Pamenang
12.	Jalan Riojajo Muara Delang	057	742.832.866,26	1.100	5	5.500	135.060,52	Tabir Selatan
13.	Jalan Mampun - SMPN 2 Merangin Rantau Panjang	070	166.124.441,00	410	3	1.230	135.060,52	Tabir
14.	Jalan SMPN 2 Merangin - Simpang Pasar Rantau Panjang	071	1.215.544.690,24	2.000	4,50	9.000	135.060,52	Tabir
15.	Jalan Pinang Rantau Panjang	076	972.435.752,20	1.800	4	7.200	135.060,52	Tabir
16.	Jalan Gedung Nasional	078	401.805.050,39	850	3,50	2.975	135.060,52	Tabir
17.	Jalan Belakang Pasar Rantau Panjang	079	162.072.625,37	400	3	1.200	135.060,52	Tabir
18.	Jalan Masjid Agung Rantau Panjang	080	356.559.775,80	660	4	2.640	135.060,52	Tabir
19.	Jalan Datuk Menaho	081	287.881.500,81	609	3,50	2.131,50	135.060,52	Tabir
20.	Jalan Kayu Batu Rantau Panjang	082	226.901.675,51	420	4	1.680	135.060,52	Tabir
21.	Jalan Simpang Kuamang Kuning - Batas Bungo	086	1.620.726.253,66	3.000	4	12.000	135.060,52	Tabir
22.	Jalan Simpang Kantor Camat - Simpang Ulak Makam	089	2.228.498.598,78	3.300	5	16.500	135.060,52	Tabir Ilir
23.	Jalan Simpang Rantau Limau Manis - Mekar Limau Manis	091	4.119.345.894,72	6.100	5	30.500	135.060,52	Tabir Ilir
24.	Jalan Kantor Camat Tabir Timur	092	972.435.752,20	1.800	4	7.200	135.060,52	Tabir Timur
25.	Jalan Belakang Pasar Baru 2	096	59.574.468,09	140	3	420	141.843,97	Bangko
26.	Jalan Belakang Pasar Baru 3	097	51.063.829,79	120	3	360	141.843,97	Bangko
27.	Jalan Belakang Pasar Baru 4	098	72.340.425,53	170	3	510	141.843,97	Bangko
28.	Jalan Pasar Baru (Jalur 2)	100	226.950.354,61	400	4	1.600	141.843,97	Bangko
29.	Jalan Letnan Sardaini	102	209.929.078,01	370	4	1.480	141.843,97	Bangko
30.	Jalan Kapten P. Tendeau	103	119.148.936,17	210	4	840	141.843,97	Bangko
31.	Jalan Pendidikan 3	105	273.049.645,39	550	3,50	1.925	141.843,97	Bangko
32.	Jalan Pemuda 2	108	131.560.283,69	265	3,50	927,50	141.843,97	Bangko
33.	Jalan Puskesmas Pematang Kandis	109	171.276.595,74	345	3,50	1.207,50	141.843,97	Bangko
34.	Jalan Sapta Marga 1	111	382.978.723,40	900	3	2.700	141.843,97	Bangko
35.	Jalan Sapta Marga 2	112	387.234.042,55	910	3	2.730	141.843,97	Bangko
36.	Jalan Pasar Muara Jernih	117	207.280.041,00	410	4	1.640	126.390,27	Tabir Ulu
37.	Jalan Mensango 2	120	91.841.154,37	170	4	680	135.060,52	Tabir Lintas
38.	Jalan Ngao - Sungai Pinang	124	5.199.830.063,82	7.700	5	38.500	135.060,52	Tabir Barat
39.	Jalan Bukit Aur	132	130.496.453,90	230	4	920	141.843,97	Bangko
40.	Jalan Masumai	133	84.893.617,02	171	3,50	598,50	141.843,97	Bangko
41.	Jalan Melati 2	135	21.276.595,74	50	3	150	141.843,97	Bangko
42.	Jalan RA. Muthallib	136	248.226.950,35	500	3,50	1.750	141.843,97	Bangko
43.	Jalan Simpang Lubuk Gaung - Rantau Alai	140	1.514.593.501,90	7.300	4	29.200	51.869,64	Batang Masumai
44.	Jalan Pelangi - Lubuk Gaung	149	217.852.490,00	1.200	3,50	4.200	51.869,64	Batang Masumai
45.	Jalan Pulau Rengas - Rantau Alai	152	2.666.666.666,67	4.700	4	18.800	141.843,97	Bangko Barat
46.	Jalan Pesantren Durian Hijau	159	223.045.202,00	300	3	900	247.828,00	Renah Pembarap
47.	Jalan Simpang A4 - Meranti	182	1.873.187.691,20	5.600	4	22.400	83.624,45	Pamenang Barat
48.	Jalan R. Kadipan 2	191	85.106.382,98	100	6	600	141.843,97	Bangko
49.	Jalan M. Daud	192	85.106.382,98	150	4	600	141.843,97	Bangko
50.	Jalan Pangeran Tumenggung	193	209.929.078,01	370	4	1.480	141.843,97	Bangko
51.	Jalan Sungai Mas 2	197	322.695.035,46	650	3,50	2.275	141.843,97	Bangko
52.	Jalan Hiwang	201	146.453.900,71	295	3,50	1.032,50	141.843,97	Bangko
53.	Jalan Puding 2	206	429.787.234,04	505	6	3.030	141.843,97	Bangko
54.	Jalan Simpang Lintas Bangko Kerinci - Pulau Rengas	210	1.304.964.539,01	2.300	4	9.200	141.843,97	Bangko Barat
55.	Jalan Teluk Wang 2	234	503.546.099,29	710	5	3.550	141.843,97	Bangko Barat
56.	Jalan Air Batu - Guguk	237	6.096.568.854,67	8.200	3	24.600	247.828,00	Renah Pembarap
57.	Jalan Dermaga Air Batu	240	477.068.904,28	550	3,50	1.925	247.828,00	Renah Pembarap
58.	Jalan Koto Rami - Sepantai Renah	246	1.956.536.859,65	10.000	3	30.000	65.217,90	Lembah Masurai
59.	Jalan Nilo Dingin Dusun Bawah	253	111.522.601,00	570	3	1.710	65.217,90	Lembah Masurai
60.	Jalan Nilo Dingin - Sungai Lalang	254	450.003.477,72	2.300	3	6.900	65.217,90	Lembah Masurai
61.	Jalan Rantau Kemas - Tanjung Kasri	259	11.003.563.298,67	14.800	5	74.000	148.696,80	Jangkat
62.	Jalan Rio Gagah Mudo 1 Muara Madras	263	713.744.646,40	1.600	3	4.800	148.696,80	Jangkat
63.	Jalan Rio Gagah Mudo 2 Muara Madras	264	111.522.601,00	250	3	750	148.696,80	Jangkat
64.	Jalan Baru - Rantau Suli	269	5.353.084.848,00	9.000	4	36.000	148.696,80	Jangkat Timur
65.	Jalan Simpang Kabu - Simpang Beringin Tinggi	272	1.784.361.616,00	4.000	3	12.000	148.696,80	Jangkat Timur
66.	Jalan Simpang Beringin Tinggi - Simpang Koto Tapus	274	2.319.670.100,80	5.200	3	15.600	148.696,80	Jangkat Timur
Total Panjang Jalan (M)			68.312.828.973,79			525.442,50	8.902.641,24	

**REKAPITULASI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN YANG DIPERGUNAKAN INSTANSI VERTIKAL
PER 31 DESEMBER 2024**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan s/d 2023	Penyusutan Tahun 2024	Akumulasi Penyusutan s/d 2024	Nilai Buku Tahun 2024 (Audited)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	8=5+6	9=4-8	10
1.	Rehab Ruang Sel POLRES Merangin	2009	401.278.698,00	112.358.035,44	8.025.573,96	120.383.609,40	280.895.088,60	Polres Merangin
2.	Rehab Pagar Kejaksaan dan Gerbang Kantor Kejaksaan Negeri Bangko	2009	165.500.000,00	46.340.000,00	3.310.000,00	49.650.000,00	115.850.000,00	Kejari Merangin
3.	Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Bangko	2009	110.765.000,00	31.014.200,00	2.215.300,00	33.229.500,00	77.535.500,00	Kejari Merangin
4.	Rehab Rumah Dinas Pengadilan Negeri Bangko	2009	103.250.000,00	28.910.000,00	2.065.000,00	30.975.000,00	72.275.000,00	Pengadilan Negeri
5.	Bangunan Ruang Sel POLRES Merangin	2010	336.801.916,00	87.568.498,16	6.736.038,32	94.304.536,48	242.497.379,52	Polres Merangin
6.	Rehab Ruang ADK/MES Kantor Kejaksaan Negeri Bangko	2010	113.941.801,00	29.624.868,26	2.278.836,02	31.903.704,28	82.038.096,72	Kejari Merangin
7.	Ruang Kerja Pengadilan Negeri Bangko	2010	102.339.211,00	26.608.194,86	2.046.784,22	28.654.979,08	73.684.231,92	Pengadilan Negeri
8.	Rehab Gedung DPD KNPI Bangko	2010	85.244.688,00	22.163.618,88	1.704.893,76	23.868.512,64	61.376.175,36	KNPI
9.	Rehab Ruang Kasat Narkoba POLRES Merangin	2010	20.075.102,00	5.219.526,52	401.502,04	5.621.028,56	14.454.073,44	Polres Merangin
10.	Paqar dan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Bangko	2010	169.542.660,00	44.081.091,60	3.390.853,20	47.471.944,80	122.070.715,20	Kejari Merangin
11.	Paqar Rumah Dinas POLRES Merangin	2010	56.810.798,00	14.770.807,48	1.136.215,96	15.907.023,44	40.903.774,56	Polres Merangin
12.	Bangunan Aula KODIM (Laniutan)	2010	100.375.508,00	26.097.632,08	2.007.510,16	28.105.142,24	72.270.365,76	Kodim 042 Sarko
13.	Lapangan Tembak Belakang KODIM 0420 Sarko	2010	27.104.902,00	7.047.274,52	542.098,04	7.589.372,56	19.515.529,44	Kodim 042 Sarko
14.	Rumah Dinas Pemda (Kejaksan Negeri Bangko)	2010	45.471.431,00	11.822.572,06	909.428,62	12.732.000,68	32.739.430,32	Kejari Merangin
15.	Rehab Kantor DPD KNPI Bangko	2011	161.472.081,00	38.753.299,44	3.229.441,62	41.982.741,06	119.489.339,94	KNPI
16.	Gedung Dharma Wanita Kejaksaan Negeri Bangko	2011	150.349.186,00	36.083.804,64	3.006.983,72	39.090.788,36	111.258.397,64	Kejari Merangin
17.	Ruang Sel POLRES Merangin	2011	104.270.696,00	25.024.967,04	2.085.413,92	27.110.380,96	77.160.315,04	Polres Merangin
18.	Ruang Sat Narkoba POLRES Merangin	2011	81.086.550,00	19.460.772,00	1.621.731,00	21.082.503,00	60.004.047,00	Polres Merangin
19.	Rehab Rumah Dinas POLSEK Tabir	2011	81.028.590,00	19.446.861,60	1.620.571,80	21.067.433,40	59.961.156,60	Polres Merangin
20.	Rehab Kantor KPUD Kabupaten Merangin	2011	80.898.021,00	19.415.525,04	1.617.960,42	21.033.485,46	59.864.535,54	KPU
21.	Ruang Kerja Ikatan Adhivaksa Dharma Karini Kejari Bangko	2011	26.871.857,00	6.449.245,68	537.437,14	6.986.682,82	19.885.174,18	Kejari Merangin
22.	Rehab Ruang Intel POLRES Merangin	2011	26.866.475,00	6.447.954,00	537.329,50	6.985.283,50	19.881.191,50	Polres Merangin
23.	Lapangan Tembak KODIM 0420 Sarko	2011	104.270.696,00	25.024.967,04	2.085.413,92	27.110.380,96	77.160.315,04	Kodim 042 Sarko
24.	Pos Lintas POLRES Merangin	2011	99.575.906,00	23.898.217,44	1.991.518,12	25.889.735,56	73.686.170,44	Polres Merangin
25.	Pos Lintas POLRES Merangin	2011	37.622.967,00	9.029.512,08	752.459,34	9.781.971,42	27.840.995,58	Polres Merangin
26.	Rehab Ruang Krimsus POLRES Merangin	2012	79.332.161,00	17.453.075,42	1.586.643,22	19.039.718,64	60.292.442,36	Polres Merangin
27.	Rehab Gedung Utama Kantor DPD KNPI Bangko	2012	75.453.836,00	16.599.843,92	1.509.076,72	18.108.920,64	57.344.915,36	KNPI
28.	Turap Kantor Kejaksaan Negeri Bangko	2011	80.657.545,00	20.970.961,70	1.613.150,90	22.584.112,60	58.073.432,40	Kejari Merangin
29.	Bangunan Pendopo Kejaksaan Negeri Bangko	2012	163.998.530,00	39.359.647,20	3.279.970,60	42.639.617,80	121.358.912,20	Kejari Merangin
30.	Pembangunan Pos Lalu Lintas Jatilur Depan Kantor Bupati	2017	226.475.215,00	29.441.777,95	4.529.504,30	33.971.282,25	192.503.932,75	Polres Merangin
31.	Pembangunan Kapolpos Pasar Bawah Bangko	2018	222.575.494,00	26.709.059,28	4.451.509,88	31.160.569,16	191.414.924,84	Polres Merangin
32.	Pembangunan Rumah Dinas Polres Kec. Bangko	2018	166.937.189,00	20.032.462,68	3.338.743,78	23.371.206,46	143.565.982,54	Polres Merangin
33.	Peningkatan Bangunan Gedung Pemda III (Polres Merangin)	2019	783.485.096,00	70.513.658,64	15.669.701,92	86.183.360,56	697.301.735,44	Polres Merangin
34.	Peningkatan Gedung Pemda II (Kejari Merangin)	2019	206.188.035,00	18.556.923,15	4.123.760,70	22.680.683,85	183.507.351,15	Kejari Merangin
35.	Peningkatan Bangunan Gedung Pemda IV (Kodim 042 Sarko)	2019	103.193.032,00	9.287.372,88	2.063.860,64	11.351.233,52	91.841.798,48	Kodim 042 Sarko
36.	Pembangunan Musholla Kantor Kejaksaan Negeri Bangko	2020	241.625.564,89	16.913.789,54	4.832.511,30	21.746.300,84	219.879.264,05	Kejari Merangin
37.	Rehabilitasi Ruang Kerja Kalapas	2020	60.328.122,29	4.222.968,57	1.206.562,45	5.429.531,01	54.898.591,28	Lapas Merangin
38.	Rehabilitasi Ruang Kerja Dandim	2020	181.172.937,58	12.682.105,62	3.623.458,75	16.305.564,37	164.867.373,21	Kodim 042 Sarko
39.	Rehabilitasi Bangunan Gedung Pemda 2 (Kejari Merangin)	2020	96.580.841,61	6.760.658,90	1.931.616,83	8.692.275,73	87.888.565,88	Kejari Merangin
40.	Peningkatan Bangunan Gedung Pemda III (Polres Merangin)	2021	519.811.057,72	31.188.663,45	10.396.221,15	41.584.884,61	478.226.173,11	Polres Merangin
41.	Peningkatan Bangunan Gedung Pemda II (Kejari Merangin)	2021	210.945.324,94	12.656.719,50	4.218.906,50	16.875.626,00	194.069.698,94	Kejari Merangin
42.	Gedung Pemda IV (Kodim 042 Sarko)	2021	519.713.416,39	25.985.670,83	10.394.268,33	36.379.939,16	483.333.477,23	Kodim 042 Sarko
43.	Gedung Pemda III (Polres Merangin)	2021	1.592.794.254,71	79.639.712,73	31.855.885,09	111.495.597,83	1.481.298.656,88	Polres Merangin
44.	Lapangan Bulu Tangkis dan Gazebo Jl. Kesehatan Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko (Kejari Merangin)	2021	108.373.798,57	6.502.427,90	2.167.475,97	8.669.903,87	99.703.894,70	Kejari Merangin
45.	Gedung Pemda III (Polres Merangin)	2023	559.410.000,00	11.188.200,00	11.188.200,00	22.376.400,00	537.033.600,00	Polres Merangin
46.	Pembangunan Pagar Rumah Dinas Pemda II (Kejari Merangin)	2023	104.834.129,00	1.048.341,29	2.096.682,58	3.145.023,87	101.689.105,13	Kejari Merangin
47.	Pembangunan Garasi Pemda III (Polres Merangin)	2023	508.470.064,00	5.084.700,64	10.169.401,28	15.254.101,92	493.215.962,08	Polres Merangin
48.	Peningkatan Gedung Pemda IV (Kodim 042 Sarko)	2023	210.965.295,00	2.109.652,95	4.219.305,90	6.328.958,85	204.636.336,15	Kodim 042 Sarko
49.	Peningkatan Rumah Dinas Pemda II (Kejari Merangin)	2023	195.014.305,00	1.950.143,05	3.900.286,10	5.850.429,15	189.163.875,85	Kejari Merangin
50.	Pembangunan Gedung Pemda II Kejari	2024	520.288.387,00	0,00	5.202.883,87	5.202.883,87	515.085.503,13	Kejari Merangin
51.	Pembangunan Gedung Pemda II Kejati Jambi/Kota	2024	710.159.782,00	0,00	7.101.597,82	7.101.597,82	703.058.184,18	Kejari Merangin
52.	Pembangunan Gedung Pemda IV	2024	364.306.835,00	0,00	3.643.068,35	3.643.068,35	360.663.766,65	Kodim 042 Sarko
53.	Pembangunan Gedung Pemda III	2024	2.033.299.349,00	0,00	20.332.993,49	20.332.993,49	2.012.966.355,51	Polres Merangin
54.	Pembangunan Gedung Pemda V	2024	468.212.293,00	0,00	4.682.122,93	4.682.122,93	463.530.170,07	Polres Merangin
55.	Rehabilitasi Rumah Dinas Pemda III	2024	76.852.274,00	0,00	768.522,74	768.522,74	76.083.751,26	Polres Merangin
56.	Rehabilitasi Atap Perumahan Brimob	2024	180.082.348,00	0,00	1.800.823,48	1.800.823,48	178.281.524,52	Polres Merangin
57.	Rehabilitasi Bangunan Kantor Kajari	2024	210.671.534,00	0,00	2.106.715,34	2.106.715,34	208.564.818,66	Kejari Merangin
58.	Lanjutan Interior Ruang Danyon Brimob	2024	71.922.000,00	0,00	7.192.200,00	7.192.200,00	64.729.800,00	Polres Merangin
JUMLAH			14.646.944.786,70	1.209.519.983,65	253.053.927,71	1.462.573.911,37	13.184.370.875,33	

**DAFTAR ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN YANG BUKAN MERUPAKAN ASET YANG DIMILIKI
DAN DIKUASAI PEMKAB MERANGIN**

(dalam rupiah)

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	2	3	4	5=3-4
A. Sekretariat Daerah		94.446.646,00	26.445.060,88	68.001.585,12
1.	Bangunan Pesantren Salafiah-Almuhajadah	94.446.646,00	26.445.060,88	68.001.585,12
B. Dinas Pendidikan		444.406.970,00	74.139.459,80	370.267.510,20
1.	Rehab SMK Masurai	128.062.000,00	23.051.160,00	105.010.840,00
2.	Rehab SMK TB Bangko	113.333.400,00	22.666.680,00	90.666.720,00
3.	RKB SMK Sulthon Fattah	203.011.570,00	28.421.619,80	174.589.950,20
C. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		3.627.385.973,31	834.372.662,97	2.793.013.310,34
1.	Ruang Guru Dan Kantor Madrasah Diniyah Amaliya Griya Bangko Asri	40.846.416,00	8.986.211,52	31.860.204,48
2.	Rehab Musholla Darussalam Pamenang	110.008.354,00	11.000.835,40	99.007.518,60
3.	Madrasah Mesjid Darussalam Dusun 1 Ds. Pulau Tuiuh	89.455.661,00	19.680.245,42	69.775.415,58
4.	Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Serik Ponpes Az-Ariyah Desa Muaro Panco Timur Kec. Renah Pembarap	53.431.980,23	534.319,80	52.897.660,43
5.	Mck Panti Jompo Azzakariyah	49.956.000,00	19.982.400,00	29.973.600,00
6.	Pemb. Toilet Umum Ponpes Al-Furqon Dsn. Sepadan Ds. Sekancing Kec. Tiang Pumpung	332.443.000,00	58.177.525,00	274.265.475,00
7.	Pemb. Toilet Umum Ponpes Al-Islah Dsn. Simp. Danau Pauh Ds. Pulau Tengah Kec. Jangkat	350.000.000,00	61.250.000,00	288.750.000,00
8.	Rabat Beton Jalan Ponpes Al Ikhlas Tabir Lintas	100.650.590,67	15.097.588,60	85.553.002,07
9.	Pemb. Sumur Bor Ponpes Syekh Maulana Qori Ds. Titian Teras Kec. Batang Masumai	97.135.413,00	17.808.159,05	79.327.253,95
10.	Pemb. Sumur Bor Ponpes Tahfidz Al Qur'an Wal Hadist Al-Munawwaroh Bangko	77.081.330,00	12.846.888,33	64.234.441,67
11.	Pemb. Sumur Bor Ponpes Baitul Najjah Ds. Tambang Emas Kec. Pamenang Selatan	97.226.206,00	17.824.804,43	79.401.401,57
12.	Pemb. Sumur Bor Ponpes Darussalam Kec. Pamenang	97.018.679,00	17.786.757,82	79.231.921,18
13.	Pemb. Sumur Bor Ponpes Syarif Hidayatullah Rt. 04 Rw. 09 Kel. Dsn. Bangko	97.148.383,00	17.810.536,88	79.337.846,12
14.	Pembangunan Prasarana Air Bersih Ds. Tj Putus Ponpes T. Ulu	99.950.000,00	49.975.000,00	49.975.000,00
15.	Bangunan Turap Ponpes Assyriyah Muara Panco	111.768.287,00	24.589.023,14	87.179.263,86
16.	Sarana Dan Prasarana Air Minum Ponpes Desa Kampung Limo Kec. Pangkalan Jambu	65.912.609,41	4.394.173,96	61.518.435,45
17.	Pemb. Bronjong Ponpes Almunawaroh Kel. Dsn. Bangko Kec. Bangko	77.558.992,00	13.960.618,56	63.598.373,44
18.	Turap Ponpes Assariyah Talang Siluang	34.567.653,00	8.987.589,78	25.580.063,22
19.	Pemb. Pengendali Daya Rusak Air Ponpes Al-Munawaroh Desa Rantau Ngarau	119.029.589,00	47.611.835,60	71.417.753,40
20.	Mck Desa Tanjung Putus Ponpes Tabir Ulu	44.950.000,00	16.856.250,00	28.093.750,00
21.	Pemb. Mck Ponpes Azzakariyah Ds. Muara Panco Timur Kec. Renah Pembarap	109.859.101,00	15.105.626,39	94.753.474,61
22.	Pemb. Mck Ponpes Nurul Athfal Ds. Simpang Limbur Merangin	87.168.821,00	10.896.102,63	76.272.718,37
23.	Pemb. Mck Ponpes Syarif Hidayatullah Kel. Dusun Bangko	49.100.000,00	9.206.250,00	39.893.750,00
24.	Pemb. Toilet Umum Ponpes Sultan Fatah Dsn. Subur Sari Ds. Tambang Emas Kec. Pamenang	300.000.000,00	52.500.000,00	247.500.000,00
25.	Mck Ponpes Modem Assalam	43.573.527,00	14.161.396,28	29.412.130,72
26.	Mck Ponpes Haqqul Yakim Muaro Panco	249.264.122,00	81.010.839,65	168.253.282,35
27.	Mck Ponpes Assyriyah Ds Muaro Panco Timur	49.599.691,00	14.879.907,30	34.719.783,70
28.	Mck Ponpes Haqqul Yakim Muaro Panco	49.643.849,00	14.893.154,70	34.750.694,30
29.	Mck Ponpes Nurul Manan Ds Sido Rukun	54.193.129,00	14.903.110,48	39.290.018,52
30.	Mck Ponpes Nurul Iman Ds Badak Tekurung	42.148.738,00	11.590.902,95	30.557.835,05
31.	Mck Ponpes Azzakariyah (Putri)	49.970.000,00	19.988.000,00	29.982.000,00
32.	Mck Ponpes Al-Munawaroh	49.950.000,00	19.980.000,00	29.970.000,00
33.	Mck Ponpes Kampung Baruh	44.970.000,00	17.988.000,00	26.982.000,00
34.	Mck Sumur Gali Ponpes Sait Mustafa	44.980.000,00	17.992.000,00	26.988.000,00
35.	Mck Ponpes Irsyabiyah Mensango Kec.Tabir Lintas	49.450.000,00	17.307.500,00	32.142.500,00
36.	Mck Ponpes Nurul Falah Ds Nqaoi Kec.Tabir Ulu	49.460.000,00	17.311.000,00	32.149.000,00
37.	Pemb. Sarana Air Bersih Ponpes Al Ishlah Danau Pauh	56.507.926,00	15.539.679,65	40.968.246,35
38.	Pemb. Sarana Air Bersih Ponpes Al Munawaroh Sei. Misang Bangko	56.507.926,00	15.539.679,65	40.968.246,35
39.	Pemb. Tempat Pemandian Umum Ponpes Nurul Yakim Ds. Durian Lecah	44.900.000,00	8.418.750,00	36.481.250,00
D. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga		1.483.054.831,00	0,00	1.483.054.831,00
1.	Tribun Mini Lapangan Bola Voli Desa Muara Delang	109.675.066,00	0,00	109.675.066,00
2.	Lapangan Bola Voli Desa Bungo Tanjung Kec. Tabir Selatan	89.944.000,00	0,00	89.944.000,00
3.	Lapangan Bola Voli Desa Kota Baru Kec. Tabir Lintas	89.931.000,00	0,00	89.931.000,00
3.	Tribun Mini Lapangan Sepakbola Desa Sungai Sahut	199.555.739,00	0,00	199.555.739,00
3.	Tribun Lapangan Sepakbola Semayo Kec. Tabir	993.949.026,00	0,00	993.949.026,00
JUMLAH		5.649.294.420,31	934.957.183,65	4.714.337.236,66

**REKAPITULASI PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
DALAM PROSES SERAH TERIMA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PER 31 DESEMBER 2024**

(dalam rupiah)

No.	Pengembang	Nama Perumahan/Lokasi	Total Luas Lahan (m ²)	NPHD		Jenis Prasarana, Sarana dan Utilitas	Luas (m ²)	Nilai Estimasi Perencanaan Fisik
				Nomor	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PT. Meisya Deka Zahra	AL-AKMA RT. 38 Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko	13.600	09/MDZ/NPHD/XII/2023	28/12/2023	Jalan Utama	1.424	170.880.000,00
						Jalan Lingkungan	2.390	286.800.000,00
						Drainase	773	77.300.000,00
						Ruang Terbuka Hijau	602	12.040.000,00
						Tempat Pembuangan Sampah	6	2.700.000,00
						Masjid	144	144.000.000,00
						Jumlah	5.339	693.720.000,00
2	PT. Wahyu Bersama	GRIYA MADINAH ASRI Jl. Lingk. Talang Kawo Kel. Dusun Bangko	150.000	005/PT-WB/NPHD/XII/2023	28/12/2023	Jalan Utama	1.080	89.640.000,00
						Jalan Lingkungan	38.640	3.297.120.000,00
						Drainase	5.893	489.119.000,00
						Kolam Retensi	168	13.944.000,00
						Masjid	484	40.172.000,00
						Sarana Pendidikan	103	8.549.000,00
						Tempat Pembuangan Sampah Sementara	13	1.079.000,00
						Sarana Olah Raga/Lapangan Bola	180	14.940.000,00
						Ruang Terbuka Hijau	7.726	641.258.000,00
						Jumlah	54.287	4.595.821.000,00
3	PT. Kayu Kencana	PURI KENCANA Desa Sungai Ulak Kec. Nalo Tantan	90.000	01/KK/XII/2023	28/12/2023	Jalan Utama	2.532	443.100.000,00
						Jalan Lingkungan	7.555	1.322.125.000,00
						Drainase	1.740	304.447.500,00
						Masjid	366	64.050.000,00
						Sarana Olahraga	200	35.000.000,00
						Ruang Terbuka Hijau	8.543	1.495.025.000,00
						Jumlah	20.936	3.663.747.500,00
4	PT. Tirta Gading Mas Sakti	ALAM PERMAI REGENCY Jln. Patimura-Bangko Tinggi Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko	2.892	07/PT-TGMS/NPHD/XII/2023	28/12/2023	Jalan Utama	1.134	89.640.000,00
						Jalan Lingkungan	4.350	3.297.120.000,00
						Drainase	580	489.119.000,00
						Ruang Terbuka Hijau	2.000	641.258.000,00
						Jumlah	8.064	4.517.137.000,00

No.	Pengembang	Nama Perumahan/Lokasi	Total Luas Lahan (m ²)	NPHD		Jenis Prasarana, Sarana dan Utilitas	Luas (m ²)	Nilai Estimasi Perencanaan Fisik
				Nomor	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	PT. Fikrindo	MUTIARA DINDA RT. 19 RW. 07 Kel. Pasar Atas Bangko	14.018	09/FK-NPHD/XII/2023	28/12/2023	Jalan Utama	1.330	166.250.000,00
						Jalan Lingkungan	1.165	145.625.000,00
						Drainase	339	42.350.000,00
						Ruang Terbuka Hijau	402	50.271.250,00
						Jumlah	3.236	404.496.250,00
6	PT. Fikrindo	GRIYA MUTIARA LINGKAT Waskita Karya	3.116	03/FK-NPHD/XII/2023	28/12/2023	Jalan Utama	805	50.312.500,00
						Jalan Lingkungan	4.343	271.406.250,00
						Drainase	641	40.068.750,00
						Masjid	156	10.312.500,00
						Ruang Terbuka Hijau	150	9.375.000,00
Jumlah	6.095	381.475.000,00						
7	PT. Montok Bumi Pertiwi	ALAM BERAJO I Dusun Bangko	1.385	16/MBP/NPHD/XII/2023	28/12/2023	Jalan Utama	540	54.000.000,00
						Jalan Lingkungan	4.905	490.500.000,00
						Drainase	1.962	196.200.000,00
						TPS	75	7.500.000,00
						Ruang Terbuka Hijau	313	31.250.000,00
Jumlah	7.795	779.450.000,00						
8	PT. Montok Bumi Pertiwi	ALAM BERAJO III Pamenang	3.17	17/MBPP/NPHD/XII/2023	28/12/2023	Jalan Utama	5.400	810.000.000,00
						Jalan Lingkungan	5.180	777.000.000,00
						Drainase	5.290	793.500.000,00
						Masjid	900	135.000.000,00
						Ruang Terbuka Hijau	600	90.000.000,00
Jumlah	17.370	2.605.500.000,00						
9	PT. Khalifa Falah Nusantara	KHALANA RIVERSIDENCE Jl. Lintas Sumatera (Sungai Piul) Kel. Dusun Bangko	35.000	06/KFN-NPHD/XII/2023	28/12/2023	Jalan Utama	805	50.312.500,00
						Jalan Lingkungan	4.343	271.406.250,00
						Drainase	641	40.068.750,00
						Masjid	156	10.312.500,00
						Ruang Terbuka Hijau	150	9.375.000,00
Jumlah	6.095	381.475.000,00						
10	PT. Khalifa Falah Nusantara	KHALANA RIVERSIDE Tahap 2 Lingk. Mensawang RT.036 RW. 008 Kel.Dusun Bangko	18.000	05/KFN-NPHD/XII/2023	28/12/2023	Jalan Utama	805	50.312.500,00
						Jalan Lingkungan	4.343	271.406.250,00
						Drainase	641	40.068.750,00
						Masjid	156	10.312.500,00
						Ruang Terbuka Hijau	150	9.375.000,00
Jumlah	6.095	381.475.000,00						

No.	Pengembang	Nama Perumahan/Lokasi	Total Luas Lahan (m ²)	NPHD		Jenis Prasarana, Sarana dan Utilitas	Luas (m ²)	Nilai Estimasi Perencanaan Fisik
				Nomor	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	PT. Khalifa Falah Nusantara	VILLA CITRA KHALANA Jl. Lintas Talang Kawo RT.13 RW. 03 Kel. Dusun Bangko	15.760	05/KFN-NPHD/XII/2023	28/12/2023	Jalan Utama	2.160	129.600.000,00
						Jalan Lingkungan	3.850	231.000.000,00
						Drainase	1.030	61.800.000,00
						Ruang Terbuka Hijau	160	64.000.000,00
						Jumlah	7.200	486.400.000,00
12	PT. Pulau Rengas Dwi Putra	ALIYA TOWN Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko	23.397	18/PRPD-NPHD/XII/2023	28/12/2023	Jalan Utama	1.554	93.240.000,00
						Jalan Lingkungan	2.551	153.060.000,00
						Drainase	1.889	113.298.600,00
						Ruang Terbuka Hijau	500	200.000.000,00
						Jumlah	6.494	559.598.600,00
13	PT. Daikha Global Mandiri	GRIYA BUKIT HIJAU Kel. Dusun bangko, Kec. Bangko	12.699	02/PT.DGM/MRG/2022	28/12/2023	Jalan Utama	1.050	63.000.000,00
						Jalan Lingkungan	1.450	87.000.000,00
						Drainase	370	22.200.000,00
						Masjid	240	28.800.000,00
						Ruang Terbuka Hijau	331	19.842.000,00
Jumlah	3.441	220.842.000,00						
14	PT. Araffi Permai Nalo Tantan	ARRAFI PERMAI Jl. Jalur Dua SMA Negeri 6 Merangin RT.026 RW. 04 Kec. Nalo Tantan	10.648	02/PT.ARF/XII/2023	28/12/2023	Jalan Utama	2.023	1.709.435.000,00
						Jalan Lingkungan	724	470.600.000,00
						Drainase	409	116.626.350,00
						Masjid	104	208.000.000,00
						Ruang Terbuka Hijau	669	100.838.650,00
Jumlah	3.929	2.605.500.000,00						
15	PT. Putra Tunggal Prakarsa	MERANGIN CLUSTER RT. 21 RW. 03 Sapta Marga Kel. Pematang Kandis	2.020	14/PT.PTP/XII/2023	28/12/2023	Jalan Utama	300	93.750.000,00
						Drainase	138	41.400.000,00
						Ruang Terbuka Hijau	80	25.000.000,00
						Jumlah	518	160.150.000,00
16	PT. Saffana Hikmah Persada	KANDIS REGENCY RT. 13 Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko	7.130	07/SHP-SK/DIR/XII/2023	28/12/2023	Jalan Utama	348	52.200.000,00
						Jalan Lingkungan	720	108.000.000,00
						Drainase	238	35.700.000,00
						Ruang Terbuka Hijau	100	15.000.000,00
						Jumlah	1.406	210.900.000,00
17	PT. Yasqo Multi	KUNGKAI ASRI Jl. Bangko-Kerinci KM 05 Desa Kungkai	80.000	02/ADK/XII/2023	28/12/2023	Jalan Utama	3.232	810.000.000,00
						Jalan Lingkungan	1.338	777.000.000,00
						Drainase	1.030	61.800.000,00
						Masjid	800	74.000.000,00
						Ruang Terbuka Hijau	1.200	90.000.000,00
						TPA	400	80.000.000,00
						Jumlah	8.000	1.892.800.000,00

No.	Pengembang	Nama Perumahan/Lokasi	Total Luas Lahan (m ²)	NPHD		Jenis Prasarana, Sarana dan Utilitas	Luas (m ²)	Nilai Estimasi Perencanaan Fisik
				Nomor	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	PT. Perkasa Tantan Nusantara	PERTANUSA PERMAI REGENCY Jl. Jalur Dua SMAN 6 Merangin Desa Sungai Ulak Kec. Nalo Tantan	5.981	019/PT.PTPN/XII/2023	28/12/2023	Jalan Utama	4.960	744.000.000,00
						Jalan Lingkungan	5.100	765.000.000,00
						Drainase	4.370	655.500.000,00
						Musholla	200	30.000.000,00
						Ruang Terbuka Hijau	400	60.000.000,00
						Jumlah	26.460	2.254.500.000,00
19	PT. Hitam Ulu Trans Domestic	ROMANISTI MADE RESIDENCE Jalan Gulama Bulat, Muara Delang	2.475	14/PTHD-NPHD/XII/2023	28/12/2023	Jalan Utama	792	131.830.717,00
						Jalan Lingkungan	836	139.006.156,00
						Drainase	547	109.400.000,00
						Ruang Terbuka Hijau	300	50.000.000,00
						Jumlah	2.475	430.236.873,00
						20	PT. Mura Laduni Lamaju	MELANGUN GIGIH BERSAMA Jl. Jalur Dua SMAN 6 Merangin Desa Sungai Ulak Kec. Nalo Tantan
Jalan Lingkungan	2.000	400.000.000,00						
Drainase	567	113.400.000,00						
Ruang Terbuka Hijau	400	80.000.000,00						
Jumlah	4.167	833.400.000,00						
21	PT. Aulia Development Kontruksi	AULIA RESINDENCE Jl. Pasar Atas Bangko	26.093	11/ADK/XII/2023	28/12/2023			
						Drainase	2.385	59.625.000,00
						Ruang Terbuka Hijau	758	18.950.000,00
						Jumlah	10.546	448.725.000,00
22	PT. Pencipta Muda Ceria	MULYA REGENCY Jl. Pendidikan RT. 20 Kel. Pematang Kandis	9.054	05/PMC/XIII/2023	28/12/2023	Jalan Utama	522	104.400.000,00
						Jalan Lingkungan	1.665	333.000.000,00
						Drainase	729	72.900.000,00
						Ruang Terbuka Hijau	263	52.500.000,00
						Fasos	198	39.600.000,00
						Jumlah	3.377	602.400.000,00
23	PT. Bagindo Cahaya Perkasa	AL-HANAN Desa Salam Buku Kec. Batang Masumai	17.510	04/BPC/XII/2023	28/12/2023	Jalan Utama	3.694	306.602.000,00
						Drainase	1.249	103.667.000,00
						Ruang Terbuka Hijau	255	21.165.000,00
						Jumlah	5.198	431.434.000,00
24	PT. Rika Abadi Jaya	TAMBANG BARU RESIDENCE Jl. Lintas Sumatera Desa Tambang Baru RT. 01 RW. 01 Kec. Tabir Lintas	10.990	06/BPC/XII/2023	28/12/2023	Jalan	4.000	332.000.000,00
						Drainase	1.214	100.762.000,00
						Ruang Terbuka Hijau	1.114	92.462.000,00
						Jumlah	6.328	525.224.000,00
Jumlah								30.066.407.223,00

**REKAPITULASI PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PER 31 DESEMBER 2024**

(dalam rupiah)							
No	Uraian	Saldo 2023 (Audited)	Mutasi Tahun 2024		Koreksi Tahun 2024		Saldo Akhir 2024 (Unaudited)
			Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+(4-5)+(6-7)
1.	Pajak Reklame (BPPRD)	170.767.146,35	140.703.316,30	170.767.146,34	0,00	0,01	140.703.316,30
	a. TA 2023	170.767.146,35	0,00	170.767.146,34	0,00	0,01	(0,00)
	b. TA 2024	0,00	140.703.316,30	0,00	0,00	0,00	140.703.316,30
2.	Retribusi Kebersihan/Persampahan (Dinas Lingkungan Hidup)	12.196.756,79	49.578.749,60	12.195.832,46	0,00	924,33	49.578.749,60
	a. TA 2023	12.196.756,79	0,00	12.195.832,46	0,00	924,33	0,00
	b. TA 2024	0,00	49.578.749,60	0,00	0,00	0,00	49.578.749,60
3.	Retribusi Penyewaan Tanah (BPKAD)	0,00	23.198.794,52	0,00	0,00	0,00	23.198.794,52
	a. Sewa Tanah ATM Bank Jambi di Waskita/STAI SMQ Tahun 2024	0,00	4.750.684,93	0,00	0,00	0,00	4.750.684,93
	b. Sewa Tanah ATM Bank Jambi di Kantor BPKAD Tahun 2024	0,00	4.750.684,93	0,00	0,00	0,00	4.750.684,93
	c. Sewa Tanah ATM Bank Jambi di Kantor Bupati Merangin Tahun 2024	0,00	4.750.684,93	0,00	0,00	0,00	4.750.684,93
	d. Sewa Tanah an. Wahidin	0,00	1.677.513,70	0,00	0,00	0,00	1.677.513,70
	e. Sewa Tanah an. Henriko Can	0,00	1.677.513,70	0,00	0,00	0,00	1.677.513,70
	f. Sewa Tanah an. Henri S	0,00	1.677.513,70	0,00	0,00	0,00	1.677.513,70
	g. Sewa Tanah an. Hermen	0,00	2.236.684,93	0,00	0,00	0,00	2.236.684,93
	h. Sewa Tanah an. Dody Eko Prasetyo	0,00	1.677.513,70	0,00	0,00	0,00	1.677.513,70
4.	Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah (BPPRD)	14.262.295,08	0,00	14.262.295,08	0,00	0,00	0,00
	a. Sewa Tanah ATM Bank Jambi di Waskita/STAI SMQ Tahun 2023	4.754.098,36	0,00	4.754.098,36	0,00	0,00	0,00
	b. Sewa Tanah ATM Bank Jambi di Kantor BPKAD Tahun 2023	4.754.098,36	0,00	4.754.098,36	0,00	0,00	0,00
	c. Sewa Tanah ATM Bank Jambi di Kantor Bupati Merangin Tahun 2023	4.754.098,36	0,00	4.754.098,36	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA (1+2+3)		197.226.198,22	213.480.860,42	197.225.273,88	0,00	924,34	213.480.860,42

**REKAPITULASI UTANG BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PER 31 DESEMBER 2024**

Lampiran 29

No	Uraian	Saldo 2023 (Audited)	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		Saldo Akhir 2024 (Unaudited)
			Utang Tahun Berjalan	Koreksi Tambah	Pembayaran	Koreksi Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+(4+5)-(6+7)
A. UTANG BELANJA PEGAWAI							
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
1.	Utang JKK 4% Pemda Kab/Kota BPJS	8.314.837.918,00	2.662.991.002,00	0,00	5.751.384.519,00	0,00	5.226.444.401,00
a.	JKK 4% Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2021	3.043.558.783,00	0,00	0,00	3.043.558.783,00	0,00	0,00
b.	JKK 4% Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2022	2.707.825.736,00	0,00	0,00	2.707.825.736,00	0,00	0,00
c.	JKK 4% Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2023	2.563.453.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563.453.399,00
d.	JKK 4% Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2024	0,00	2.628.251.002,00	0,00	0,00	0,00	2.628.251.002,00
e.	JKK 4% Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNSD Semester II Tahun 2024	0,00	34.740.000,00	0,00	0,00	0,00	34.740.000,00
2.	Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD dan PPPK	0,00	10.350.170.000,00	0,00	0,00	0,00	10.350.170.000,00
a.	Tunjangan Profesi Guru Gaji ke-13 Tahun 2024	0,00	5.109.742.200,00	0,00	0,00	0,00	5.109.742.200,00
b.	Tunjangan Profesi Guru THR Tahun 2024	0,00	5.240.427.800,00	0,00	0,00	0,00	5.240.427.800,00
3.	Belanja Tunjangan Khusus Guru PNSD dan PPPK	0,00	605.106.600,00	0,00	0,00	0,00	605.106.600,00
-	Tunjangan Khusus Guru Bulan November dan Desember Tahun 2024	0,00	605.106.600,00	0,00	0,00	0,00	605.106.600,00
4.	Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0,00	868.500.000,00	0,00	0,00	0,00	868.500.000,00
-	Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNSD Semester II Tahun 2024	0,00	868.500.000,00	0,00	0,00	0,00	868.500.000,00
	Jumlah Utang Belanja Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.314.837.918,00	14.486.767.602,00	0,00	5.751.384.519,00	0,00	17.050.221.001,00
2. RSUD Kol. Abundjani Bangko							
a.	Gaji Pegawai PPK BLUD Non PNS Tidak Tetap Kategori A Bulan Des 2024	0,00	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00
b.	Gaji Pegawai PPK BLUD Non PNS Tidak Tetap Kategori B Bulan Des 2024	0,00	116.050.000,00	0,00	0,00	0,00	116.050.000,00
c.	Gaji Pegawai PPK BLUD Non PNS Tidak Tetap Kategori C Bulan Des 2024	0,00	98.050.000,00	0,00	0,00	0,00	98.050.000,00
d.	Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai PPK BLUD Non PNS Tidak Tetap Kategori A Bulan Nov 2024	0,00	94.650.000,00	0,00	0,00	0,00	94.650.000,00
e.	Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai PPK BLUD Non PNS Tidak Tetap Dokter Spesialis Bulan Nov 2024	0,00	74.000.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000.000,00
f.	Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai PPK BLUD Non PNS Tidak Tetap Kategori A Bulan Des 2024	0,00	95.100.000,00	0,00	0,00	0,00	95.100.000,00
g.	Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai PPK BLUD Non PNS Tidak Tetap Dokter Spesialis Bulan Des 2024	0,00	74.000.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000.000,00
	Jumlah Utang Beban Pegawai RSD Kol. Abundjani	0,00	761.850.000,00	0,00	0,00	0,00	761.850.000,00
	JUMLAH UTANG BELANJA PEGAWAI	8.314.837.918,00	15.248.617.602,00	0,00	5.751.384.519,00	0,00	17.812.071.001,00
B. UTANG BELANJA BARANG DAN JASA							
1. Dinas Kesehatan							
a.	Utang Pelayanan Kapitasi BPJS	145.338.895,60	36.912.260,00	0,00	145.338.895,60	0,00	36.912.260,00
	Tahun 2023	145.338.895,60	0,00	0,00	145.338.895,60	0,00	0,00
-	Puskesmas Pamenang	90.004.710,25	0,00	0,00	90.004.710,25	0,00	0,00
-	Puskesmas Sumber Agung	10.746.064,70	0,00	0,00	10.746.064,70	0,00	0,00
-	Puskesmas Kederasan Panjang	14.180.128,65	0,00	0,00	14.180.128,65	0,00	0,00
-	Puskesmas Simpang Limbur	29.130.591,75	0,00	0,00	29.130.591,75	0,00	0,00
-	Puskesmas Pasar Baru	1.277.400,25	0,00	0,00	1.277.400,25	0,00	0,00
	Tahun 2024	0,00	36.912.260,00	0,00	0,00	0,00	36.912.260,00
-	Puskesmas Pamenang	0,00	12.180.585,00	0,00	0,00	0,00	12.180.585,00
-	Puskesmas Meranti	0,00	24.731.675,00	0,00	0,00	0,00	24.731.675,00
b.	Utang Non Kapitasi	799.746.720,00	347.649.760,00	0,00	0,00	0,00	1.147.396.480,00
	Tahun 2022	188.429.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.429.920,00
-	Puskesmas Bangko	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
-	Puskesmas Pematang Kandis	5.775.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775.360,00
-	Puskesmas Rantau Panjang	18.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.968.000,00
-	Puskesmas Pamenang	15.716.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.716.800,00
-	Puskesmas Muara Delang	48.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.160.000,00
-	Puskesmas Sumber Agung	6.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888.000,00
-	Puskesmas Meranti	6.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.624.000,00
-	Puskesmas Sungai Bulian	8.654.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.654.400,00
-	Puskesmas Muara Siau	11.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.272.000,00
-	Puskesmas Pasar Masurai	7.584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.584.000,00
-	Puskesmas Sungai Manau	7.607.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607.280,00
-	Puskesmas Simpang Parit	4.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480.000,00
-	Puskesmas Muara Madras	6.643.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.643.200,00
-	Puskesmas Rantau Suli	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
-	Puskesmas Tambang Emas	16.625.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.625.680,00
-	Puskesmas Muara Jernih	16.835.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.835.200,00
-	Puskesmas Sekancing	2.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.000,00
-	Puskesmas Kota Raja	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
	Tahun 2023	611.316.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.316.800,00
-	Puskesmas Bangko	21.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.680.000,00
-	Puskesmas Pematang Kandis	38.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.904.000,00
-	Puskesmas Rantau Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Puskesmas Pamenang	36.671.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.671.200,00
-	Puskesmas Muara Delang	113.824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.824.000,00
-	Puskesmas Sumber Agung	16.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.864.000,00
-	Puskesmas Meranti	23.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.536.000,00
-	Puskesmas Sungai Bulian	20.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.960.000,00
-	Puskesmas Muara Siau	43.561.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.561.600,00
-	Puskesmas Pasar Masurai	67.616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.616.000,00
-	Puskesmas Sungai Manau	28.957.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.957.600,00
-	Puskesmas Simpang Parit	11.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.680.000,00
-	Puskesmas Muara Madras	11.107.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.107.200,00
-	Puskesmas Rantau Suli	1.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.000,00
-	Puskesmas Tambang Emas	65.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.712.000,00
-	Puskesmas Muara Jernih	80.571.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.571.200,00
-	Puskesmas Sekancing	5.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360.000,00
-	Puskesmas Kota Raja	3.964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964.000,00
-	Puskesmas Muara Kibul	16.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640.000,00
-	Puskesmas Tabir Lintas	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00

No	Uraian	Saldo 2023 (Audited)	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		Saldo Akhir 2024 (Unaudited)
			Utang Tahun Berjalan	Koreksi Tambah	Pembayaran	Koreksi Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+(4+5)-(6+7)
Tahun 2024		0,00	347.649.760,00	0,00	0,00	0,00	347.649.760,00
- Puskesmas Bangko		0,00	16.880.000,00	0,00	0,00	0,00	16.880.000,00
- Puskesmas Pematang Kandis		0,00	7.948.000,00	0,00	0,00	0,00	7.948.000,00
- Puskesmas Rantau Panjang		0,00	37.368.000,00	0,00	0,00	0,00	37.368.000,00
- Puskesmas Pamenang		0,00	12.723.200,00	0,00	0,00	0,00	12.723.200,00
- Puskesmas Muara Delang		0,00	66.189.680,00	0,00	0,00	0,00	66.189.680,00
- Puskesmas Sumber Agung		0,00	14.376.000,00	0,00	0,00	0,00	14.376.000,00
- Puskesmas Meranti		0,00	18.664.000,00	0,00	0,00	0,00	18.664.000,00
- Puskesmas Sungai Bulan		0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00
- Puskesmas Muara Siau		0,00	24.349.680,00	0,00	0,00	0,00	24.349.680,00
- Puskesmas Pasar Masurai		0,00	24.912.000,00	0,00	0,00	0,00	24.912.000,00
- Puskesmas Sungai Manau		0,00	28.415.200,00	0,00	0,00	0,00	28.415.200,00
- Puskesmas Simpang Parit		0,00	10.144.000,00	0,00	0,00	0,00	10.144.000,00
- Puskesmas Muara Madras		0,00	20.326.400,00	0,00	0,00	0,00	20.326.400,00
- Puskesmas Rantau Suli		0,00	1.428.000,00	0,00	0,00	0,00	1.428.000,00
- Puskesmas Tambang Emas		0,00	17.840.000,00	0,00	0,00	0,00	17.840.000,00
- Puskesmas Muara Jernih		0,00	26.933.600,00	0,00	0,00	0,00	26.933.600,00
- Puskesmas Sekancing		0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
- Puskesmas Kederasan Panjang		0,00	2.672.000,00	0,00	0,00	0,00	2.672.000,00
- Puskesmas Simpang Limbur		0,00	7.840.000,00	0,00	0,00	0,00	7.840.000,00
- Puskesmas Tabir Lintas		0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
c. Utang Jasa Tenaga Kesehatan (Bidan Pendidik)		0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00
Tahun 2024		0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00
- Puskesmas Rantau Panjang, an. Zakiah Amini (Okt s.d Des 2024)		0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
- Puskesmas Simpang Limbur, an. Iva Rini Astuti (Sept s.d Des 2024)		0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
- Puskesmas Pasar Baru, an. Celyy Anggraeni (Sept s.d Des 2024)		0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
- Puskesmas Muara Madras, an. Emiliwida Yanti (Sept s.d Des 2024)		0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
- Puskesmas Kederasan Panjang, an. Rosalina (Sept s.d Des 2024)		0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
- Puskesmas Kederasan Panjang, an. Fithri Zulvia (Sept s.d Des 2024)		0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa Dinas Kesehatan		945.085.615,60	401.062.020,00	0,00	145.338.895,60	0,00	1.200.808.740,00
2. RSUD Kol. Abundjani Bangko							
2.1 Utang Belanja Barang							
a. Obat BPJS		2.375.071.892,00	4.625.549.454,00	0,00	2.375.071.892,00	0,00	4.625.549.454,00
- Tahun 2023		2.375.071.892,00	0,00	0,00	2.375.071.892,00	0,00	0,00
- Tahun 2024		0,00	4.625.549.454,00	0,00	0,00	0,00	4.625.549.454,00
b. Obat Umum		98.782.036,00	0,00	0,00	98.782.036,00	0,00	0,00
- Tahun 2023		98.782.036,00	0,00	0,00	98.782.036,00	0,00	0,00
c. Bahan Habis Pakai (BHP) dan Alat Kesehatan		2.121.834.254,00	2.800.920.786,00	0,00	2.121.834.254,00	0,00	2.800.920.786,00
- BHP Kesehatan Tahun 2023		1.972.684.254,00	0,00	0,00	1.972.684.254,00	0,00	0,00
- BHP Kesehatan Tahun 2024		0,00	2.511.987.786,00	0,00	0,00	0,00	2.511.987.786,00
- Gas Medis/Oksigen Bulanan 2023		149.150.000,00	0,00	0,00	149.150.000,00	0,00	0,00
- Gas Medis/Oksigen Bulanan 2024		0,00	288.933.000,00	0,00	0,00	0,00	288.933.000,00
d. Bahan dan Alat Laboratorium		1.102.024.003,00	1.909.058.024,00	0,00	1.102.024.003,00	0,00	1.909.058.024,00
- Tahun 2023		1.102.024.003,00	0,00	0,00	1.102.024.003,00	0,00	0,00
- Tahun 2024		0,00	1.909.058.024,00	0,00	0,00	0,00	1.909.058.024,00
e. Bahan dan Alat Radiologi		104.895.000,00	173.870.022,00	0,00	104.895.000,00	0,00	173.870.022,00
- Tahun 2023		104.895.000,00	0,00	0,00	104.895.000,00	0,00	0,00
- Tahun 2024		0,00	173.870.022,00	0,00	0,00	0,00	173.870.022,00
f. Makan Minum Pasien		0,00	355.371.800,00	0,00	0,00	0,00	355.371.800,00
- Makan Minum Pasien Bulan Okt 2024		0,00	88.535.720,00	0,00	0,00	0,00	88.535.720,00
- Makan Minum Pasien Bulan Nov 2024		0,00	132.917.400,00	0,00	0,00	0,00	132.917.400,00
- Makan Minum Pasien Bulan Des 2024		0,00	133.918.680,00	0,00	0,00	0,00	133.918.680,00
g. Alat Tulis Kantor Operasional		0,00	44.359.000,00	0,00	0,00	0,00	44.359.000,00
- Alat Tulis Kantor Operasional Bulan Agust 2024		0,00	18.989.000,00	0,00	0,00	0,00	18.989.000,00
- Alat Tulis Kantor Operasional Bulan Nov 2024		0,00	25.370.000,00	0,00	0,00	0,00	25.370.000,00
h. Alat Tulis Kantor Cetak Form Rekam Mudik		0,00	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00	24.400.000,00
- ATK Cetak Form Rekam Medik Bulan Agust 2024		0,00	8.950.000,00	0,00	0,00	0,00	8.950.000,00
- ATK Cetak Form Rekam Medik Bulan Sept 2024		0,00	6.825.000,00	0,00	0,00	0,00	6.825.000,00
- ATK Cetak Form Rekam Medik Bulan Nov 2024		0,00	8.625.000,00	0,00	0,00	0,00	8.625.000,00
i. Cetak dan Penggandaan Operasional		0,00	26.520.000,00	0,00	0,00	0,00	26.520.000,00
- Cetak dan Penggandaan Okt 2024		0,00	20.020.000,00	0,00	0,00	0,00	20.020.000,00
- Cetak dan Penggandaan Nov 2024		0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
Jumlah Utang Belanja Barang		5.802.607.185,00	9.960.049.086,00	0,00	5.802.607.185,00	0,00	9.960.049.086,00
2.2 Utang Belanja Jasa							
a. Jasa Pelayanan BPJS		1.405.787.636,00	5.047.823.445,00	0,00	1.405.787.636,00	0,00	5.047.823.445,00
- Pending Okt 2023		54.265.728,00	0,00	0,00	54.265.728,00	0,00	0,00
- Pending Nov 2023		37.739.460,00	0,00	0,00	37.739.460,00	0,00	0,00
- Pending Des 2023		1.313.782.448,00	0,00	0,00	1.313.782.448,00	0,00	0,00
- Pending Maret 2024		0,00	34.893.144,00	0,00	0,00	0,00	34.893.144,00
- Pending April 2024		0,00	89.509.112,00	0,00	0,00	0,00	89.509.112,00
- Pending Mei 2024		0,00	61.963.440,00	0,00	0,00	0,00	61.963.440,00
- Pending Juni 2024		0,00	50.869.368,00	0,00	0,00	0,00	50.869.368,00
- Pending Juli 2024		0,00	156.452.076,00	0,00	0,00	0,00	156.452.076,00
- Sept 2024		0,00	1.054.829.095,00	0,00	0,00	0,00	1.054.829.095,00
- Okt 2024		0,00	1.070.713.248,00	0,00	0,00	0,00	1.070.713.248,00
- Nov 2024		0,00	1.243.772.022,00	0,00	0,00	0,00	1.243.772.022,00
- Des 2024		0,00	1.284.821.940,00	0,00	0,00	0,00	1.284.821.940,00
b. Jasa Pelayanan Jampersal		13.437.204,00	0,00	0,00	13.437.204,00	0,00	0,00
- Tahun 2022		13.437.204,00	0,00	0,00	13.437.204,00	0,00	0,00
c. Jasa Pelayanan Farmasi		185.800.687,00	130.243.770,00	0,00	185.800.687,00	0,00	130.243.770,00
- Jasa Farmasi Kronis Juli s/d Des 2023		136.013.899,00	0,00	0,00	136.013.899,00	0,00	0,00
- Jasa Farmasi Umum Juli s/d Des 2023		49.786.788,00	0,00	0,00	49.786.788,00	0,00	0,00
- Jasa Farmasi Kronis Juli s/d Des 2024		0,00	130.243.770,00	0,00	0,00	0,00	130.243.770,00
d. Jasa Pelayanan Umum		244.206.644,00	785.878.740,00	0,00	244.206.644,00	0,00	785.878.740,00
- Jasa Pelayanan Umum Des 2023		236.679.124,00	0,00	0,00	236.679.124,00	0,00	0,00
- Praktek Pendidikan 2023		7.527.520,00	0,00	0,00	7.527.520,00	0,00	0,00
- Jasa Pelayanan Umum Okt 2024		0,00	281.300.668,00	0,00	0,00	0,00	281.300.668,00
- Jasa Pelayanan Umum Nov 2024		0,00	246.010.373,00	0,00	0,00	0,00	246.010.373,00
- Jasa Pelayanan Umum Des 2024		0,00	253.802.499,00	0,00	0,00	0,00	253.802.499,00
- Praktek Pendidikan Jan s/d Des 2024		0,00	4.765.200,00	0,00	0,00	0,00	4.765.200,00
e. Jasa Pelayanan PT		0,00	118.930.291,00	0,00	0,00	0,00	118.930.291,00
- Jasa Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Bulan Juni dan Juli Tahun 2024		0,00	12.261.240,00	0,00	0,00	0,00	12.261.240,00
- Jasa Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Bulan Agust dan Nov Tahun 2024		0,00	49.133.812,00	0,00	0,00	0,00	49.133.812,00
- Jasa Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Bulan Des Tahun 2024		0,00	57.535.239,00	0,00	0,00	0,00	57.535.239,00
f. Rujukan Parsial		29.945.000,00	39.550.000,00	0,00	29.945.000,00	0,00	39.550.000,00
- Nov 2023		14.610.000,00	0,00	0,00	14.610.000,00	0,00	0,00
- Des 2023		15.335.000,00	0,00	0,00	15.335.000,00	0,00	0,00
- Sept 2024		0,00	10.280.000,00	0,00	0,00	0,00	10.280.000,00
- Okt 2024		0,00	5.110.000,00	0,00	0,00	0,00	5.110.000,00
- Nov 2024		0,00	13.515.000,00	0,00	0,00	0,00	13.515.000,00
- Des 2024		0,00	10.645.000,00	0,00	0,00	0,00	10.645.000,00

No	Uraian	Saldo 2023 (Audited)	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		Saldo Akhir 2024 (Unaudited)
			Utang Tahun Berjalan	Koreksi Tambah	Pembayaran	Koreksi Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+(4+5)-(6+7)
g.	KIR Umum/Narkoba	121.384.120,00	48.125.000,00	0,00	121.384.120,00	0,00	48.125.000,00
	- KIR Narkoba 2023	4.014.120,00	0,00	0,00	4.014.120,00	0,00	0,00
	- KIR Narkoba Okt 2024	0,00	12.375.000,00	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00
	- KIR Narkoba Nov 2024	0,00	4.452.800,00	0,00	0,00	0,00	4.452.800,00
	- KIR Narkoba Des 2024	0,00	4.056.800,00	0,00	0,00	0,00	4.056.800,00
	- KIR PPPK 2023	117.092.800,00	0,00	0,00	117.092.800,00	0,00	0,00
	- KIR Haji 2024	0,00	21.696.400,00	0,00	0,00	0,00	21.696.400,00
	- KIR Rohani 2023	277.200,00	0,00	0,00	277.200,00	0,00	0,00
	- KIR Rohani Okt 2024	0,00	1.496.000,00	0,00	0,00	0,00	1.496.000,00
	- KIR Rohani Nov 2024	0,00	1.584.000,00	0,00	0,00	0,00	1.584.000,00
	- KIR Rohani Des 2024	0,00	2.464.000,00	0,00	0,00	0,00	2.464.000,00
h.	Jasa COVID-19 Tahun 2022	47.780.920,00	0,00	0,00	47.780.920,00	0,00	0,00
i.	Piket	0,00	181.064.000,00	0,00	0,00	0,00	181.064.000,00
	- Kelebihan Jam kerja Overtime Jaga Malam Bulan Nov 2024	0,00	87.864.000,00	0,00	0,00	0,00	87.864.000,00
	- Kelebihan Jam kerja Overtime Jaga Malam Bulan Des 2024	0,00	93.200.000,00	0,00	0,00	0,00	93.200.000,00
j.	Akomodasi dan Transportasi Petugas Kalibrasi	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
	- Jasa Kalibrasi Biaya Akomodasi dan Transportasi Petugas Kalibrasi	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
	Utang Belanja Jasa	2.048.342.211,00	6.381.615.246,00	0,00	2.048.342.211,00	0,00	6.381.615.246,00
2.3	Utang Belanja Pemeliharaan						
a.	Kalibrasi Alat kesehatan	0,00	57.720.722,00	0,00	0,00	0,00	57.720.722,00
b.	Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	6.105.000,00	0,00	0,00	0,00	6.105.000,00
	- Belanja Spare Part Alat Ventilator Oxygen Cell Max 3	0,00	6.105.000,00	0,00	0,00	0,00	6.105.000,00
	Utang Belanja Pemeliharaan	0,00	63.825.722,00	0,00	0,00	0,00	63.825.722,00
	Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa RSUD Kol Abundjani	7.850.949.396,00	16.405.490.054,00	0,00	7.850.949.396,00	0,00	16.405.490.054,00
3.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan						
	Utang Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN						
	- November 2024	0,00	8.746.920,00	0,00	0,00	0,00	8.746.920,00
	- Desember 2024	0,00	8.746.920,00	0,00	0,00	0,00	8.746.920,00
	Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	17.493.840,00	0,00	0,00	0,00	17.493.840,00
	JUMLAH UTANG BELANJA BARANG DAN JASA	8.796.035.011,60	16.824.045.914,00	0,00	7.996.288.291,60	0,00	17.623.792.634,00
C.	UTANG BELANJA MODAL						
1.	RSUD Kol. Abundjani Bangko						
1.1	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin						
a.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran Lainnya	0,00	265.810.000,00	0,00	0,00	0,00	265.810.000,00
	- Infant Incubator	0,00	128.844.000,00	0,00	0,00	0,00	128.844.000,00
	- Infant Radiant Warmer	0,00	136.966.000,00	0,00	0,00	0,00	136.966.000,00
b.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran Lainnya	0,00	58.196.680,00	0,00	0,00	0,00	58.196.680,00
	- Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran Lainnya	0,00	58.196.680,00	0,00	0,00	0,00	58.196.680,00
	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	324.006.680,00	0,00	0,00	0,00	324.006.680,00
	Jumlah Utang Belanja Modal RSUD Kol Abundjani	0,00	324.006.680,00	0,00	0,00	0,00	324.006.680,00
	JUMLAH UTANG BELANJA MODAL	0,00	324.006.680,00	0,00	0,00	0,00	324.006.680,00
	JUMLAH UTANG BELANJA (A+B+C)	17.110.872.929,60	32.396.670.196,00	0,00	13.747.672.810,60	0,00	35.759.870.315,00

**MUTASI UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PER 31 DESEMBER 2024**

(dalam rupiah)											
No	Uraian	Kuantitas	Satuan	Alokasi	Realisasi	Saldo Utang TA 2023 (Audited)	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		Saldo Utang TA 2024 (Unaudited)
							Penambahan	Jumlah	Pembayaran	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9=8	10	11=10	12=7+9-11
1.	Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Pengadaan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya TA 2017										
	- Pengadaan Excavator	1	Unit	1.500.000.000,00	1.448.299.116,00	51.700.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.700.884,00
	- Pengadaan Backhoe Loader	1	Unit	1.500.000.000,00	994.400.000,00	505.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.600.000,00
	Jumlah 1					557.300.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.300.884,00
2.	Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Pengadaan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya TA 2018 dan 2019										
	- Pengadaan Alat-Alat Berat	1	Unit	3.000.000.000,00	2.726.900.000,00	273.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.100.000,00
	- Pengadaan Mobil Armada Damkar	1	Unit	3.000.000.000,00	2.975.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00
	Jumlah 2					297.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.600.000,00
3.	Bantuan Keuangan Kelurahan TA 2017 s.d 2021										
	- 10 Kelurahan (@Rp60.000.000,00)	5	Unit	3.000.000.000,00	2.297.844.900,00	702.155.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.155.100,00
	Jumlah 3					702.155.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.155.100,00
4.	Pengembalian Kelebihan Pendapatan DAK Nonfisik BOP PAUD TA 2024										
	BOP PAUD Swasta yang tutup di tahun 2024 dan harus disetorkan ke RKUN										
	- TPA Bintang Ceria					0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	- SPS Asparagus					0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
	- SPS Soplir					0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	- KB Mawar					0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Jumlah 4					0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00
Jumlah						1.557.055.984,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	1.565.155.984,00

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PERUMDA)
TIRTA MERANGIN
KABUPATEN MERANGIN

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Neraca	1
Laporan Laba (Rugi)	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5 -13



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
(PERUMDA)
"TIRTA MERANGIN"



Jln. Jend Sudirman KM.3 Kel. Pematang Kandis Bangko Telp. (0746) 21199 Email : pdamtirtamerangin@gmail.com

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) AIR MINUM TIRTA MERANGIN
KABUPATEN MERANGIN

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : ANTONI KURNIA PUTRA, SE
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Km. 3 Bangko
Alamat Sesuai KTP : Jln. M.Yamin Rt 11 RW 5 Kelurahan Pasar Atas Bangko
Jabatan : Direktur Perumda Air Minum Tirta Merangin Kab.Merangin

Dengan ini menyatakan bahwa;

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bangko, 10 Juni 2025



ANTONI KURNIA PUTRA, SE
Direktur



Laporan Auditor Independen

Nomor: 00134/2.1213/AU.2/11/1429-1/1/VI/2025

**Pemegang Saham, Dewan Pengawas dan Direksi
PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) AIR MINUM TIRTA MERANGIN
KABUPATEN MERANGIN**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Merangin, Kabupaten Merangin**, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal lain

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 diaudit oleh Auditor Independen lain dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Tanggung jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola Terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.



Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit Kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.



Registered Public Accountants
Heru, Saleh, Marzuki & Rekan
Audit | Tax | Consulting

NIU KAP : 367/KM.1/2018
Jl. Pondok Kopi Raya A1 No. 6 RT. 001 RW. 009
Kel. Pondok Kopi, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur 13460
Telp. (021) - 86614716 Fax. (021) - 86614716
E-mail : kaphsm2018@gmail.com
Website : www.kap-hsm.com

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
HERU, SALEH, MARZUKI & REKAN**

Drs. Heru Noruza Ak., CA., CPA., CFI
NRAP. AP : 1429

Jakarta, 10 Juni 2025



HSM

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PERUMDA)
TIRTA MERANGIN
KABUPATEN MERANGIN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

	Catatan	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	2c,3	1.009.917.973	961.871.202
Piutang Usaha	2d,4	7.128.224.120	7.313.071.277
Piutang Lain-lain	5	-	-
Persediaan	2e,6	133.596.407	222.127.412
Jumlah Aset Lancar		8.271.738.500	8.497.069.891
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 36.496.264.967,-Periode 2024 dan Rp 34.556.930.532,-Periode 2023)			
	2f,7	19.074.280.612	20.496.806.382
Jumlah Aset Tidak Lancar		19.074.280.612	20.496.806.382
JUMLAH ASET		27.346.019.112	28.993.876.273
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS LANCAR			
Utang Usaha	8	743.214.340	484.090.820
Utang Bank	9	125.181.854	181.366.585
Utang Lain-lain	10	-	16.974.000
Liabilitas Imbalan Kerja	2i,11	668.316.695	671.774.361
Jumlah Liabilitas Lancar		1.536.712.889	1.354.205.766
LIABILITAS TIDAK LANCAR			
Utang Bank	9	195.473.536	33.295.795
Liabilitas Imbalan Kerja	2i,11	918.744.774	918.744.774
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar		1.114.218.310	952.040.569
EKU ITAS			
Modal	12	65.158.761.862	65.158.761.862
Saldo Rugi	Hal 3	(40.463.673.950)	(38.471.131.924)
Jumlah Ekuitas		24.695.087.912	26.687.629.938
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		27.346.019.112	28.993.876.273

Lihat Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari laporan keuangan pokok secara keseluruhan

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PERUMDA)
KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
PENDAPATAN USAHA	2g, 13		
Pendapatan Air		11.766.053.550	12.248.752.875
Pendapatan Non Air		<u>4.825.326.069</u>	<u>4.484.977.836</u>
		16.591.379.619	16.733.730.711
BEBAN USAHA			
Beban Usaha	2g, 14	<u>18.583.810.181</u>	<u>16.693.429.260</u>
JUMLAH BEBAN USAHA		18.583.810.181	16.693.429.260
LABA (RUGI) USAHA		- 1.992.430.562	40.301.451
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	2g		
Pendapatan		2.415.467	37.132.140
Beban		<u>- 2.526.931</u>	<u>-</u>
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		- 111.464	37.132.140
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK	2h	- 1.992.542.026	77.433.591
PAJAK PENGHASILAN		<u>0</u>	<u>0</u>
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK		- 1.992.542.026	77.433.591

Lihat Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang terpisahkan dari laporan keuangan pokok secara keseluruhan

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PERUMDA) KABUPATEN
MERANGIN**
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Modal Pemerintah Pusat	Modal Pemerintah Provinsi	Modal Pemerintah Kabupaten	Modal Pemerintah Pusat YBDTS	Modal Pemerintah Provinsi YBDTS	Modal Hibah	Saldo Laba(Rugi)	Jumlah Ekuitas
Saldo 31 Desember 2022	2.091.230.240	1.700.000.000	47.759.463.435	10.373.689.400	234.178.787	200.000	(38.548.565.515)	23.610.196.347
Tambahan modal disetor	-	-	3.000.000.000	-	-	-	-	3.000.000.000
Rugi tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	77.433.591	77.433.591
Saldo 31 Desember 2023	2.091.230.240	1.700.000.000	50.759.463.435	10.373.689.400	234.178.787	200.000	(38.471.131.924)	26.687.629.938
Tambahan modal disetor	-	-	-	-	-	-	-	-
Rugi tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	(1.992.542.026)	(1.992.542.026)
Saldo 31 Desember 2024	2.091.230.240	1.700.000.000	50.759.463.435	10.373.689.400	234.178.787	200.000	(40.463.673.950)	24.695.087.912

Lihat Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari laporan keuangan pokok secara keseluruhan

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PERUMDA) TIRTA
MERANGIN KABUPATEN MERANGIN**
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba (Rugi) Bersih	(1.992.542.026)	77.433.591
Koreksi Laba (Rugi) tahun lalu		
Penyesuaian terhadap Laba(Rugi) bersih		
Penyusutan Asset Tetap	1.939.334.435	1.902.033.595
Penyisihan Piutang	1.891.499.215	367.279.748
(Laba) Rugi Sebelum Perubahan Modal Kerja	1.838.291.624	2.346.746.934
Perubahan arus kas dari aktivitas operasi :		
Penurunan (Kenaikan) piutang usaha	(1.688.897.820)	(1.667.246.349)
Penurunan (Kenaikan) piutang lain-lain	(1.550.000)	12.928.074
Penurunan (Kenaikan) persediaan	88.531.004	(90.739.126)
Kenaikan (Penurunan) utang usaha	259.123.520	(169.967.529)
Kenaikan (Penurunan) utang lainnya	(5.000.000)	(30.000.000)
Kenaikan (Penurunan) Utang non usaha	(11.974.000)	5.726.000
Kenaikan (Penurunan) liabilitas pasca kerja	(3.457.666)	(84.330.558)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	475.066.662	313.117.446
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penurunan (Penambahan) asset tetap	(516.808.664)	(3.231.235.449)
Arus kas bersih untuk aktivitas investasi	(516.808.664)	(3.231.235.449)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Modal Pemerintah Daerah	-	3.000.000.000
Pinjaman bank	89.788.773	(228.057.958)
Arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan	89.788.773	2.771.942.042
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	48.046.771	(146.175.960)
SALDO KAS DAN BANK AWAL TAHUN	961.871.202	1.108.047.163
SALDO KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	<u>1.009.917.973</u>	<u>961.871.202</u>

Lihat Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari laporan keuangan pokok secara keseluruhan

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MERANGIN
KABUPATEN MERANGIN**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Merangin Kabupaten Merangin didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun-Bangko Nomor 3 tahun 1991 dan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Merangin Nomor 11 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin.

Anggaran dasar Perusahaan telah diubah dengan Peraturan Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Merangin Nomor 1 tahun 2019 tanggal 21 Maret 2019, tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PERUMDA) Tirta Merangin, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

b. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perusahaan

Berdasarkan Bab II pasal 2 Peraturan UMUM Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2019 dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mendorong peningkatan kinerja BUMD agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Perumda Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin memiliki tujuan untuk :

- Meningkatkan Kinerja dan daya saing Perumda berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- Menyelenggarakan pelayanan public yang berintegritas; dan
- Menyelenggarakan pengelolaan air minum yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Struktur Organisasi dan Personalia Dewan Pengawas

Dewan Pengawas PERUMDA Tirta Merangin Kabupaten Merangin ditetapkan berdasarkan Nomor : 662/PEREKO/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pemerintah Kabupaten Merangin, untuk Masa Bhakti 2022 - 2026, adalah sebagai berikut :

Ketua merangkap Anggota : Asisten II Setda Kabupaten Merangin

Direksi

Direktur PDAM Tirta Merangin Kabupaten Merangin ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor 490/PEREKO/tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024, Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2024 s/d 2029 adalah sebagai berikut :

Direktur : Antoni Kurnia Putra, SE

Jumlah Pegawai PDAM Tirta Merangin Kabupaten Merangin sebanyak 95 orang, terdiri dari 77 orang pegawai tetap dan 5 orang Capek, 8 Orang Honor, dan 5 Orang pegawai kontrak.

PDAM Tirta Merangin Kabupaten Merangin berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman KM.3 Bangko 37314 Provinsi Jambi.

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MERANGIN
KABUPATEN MERANGIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan PDAM Tirta Merangin Kabupaten Merangin disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan dan akrual. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasi menjadi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan metode tidak langsung. Untuk tujuan penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas dan investasi jangka pendek sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.

b. Transaksi dan saldo Dalam Mata Uang Asing

Perseroan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Rupiah. Sesuai dengan SAK ETAP Bab 25 tentang "Mata Uang Pelaporan" dan SAK ETAP Bab 26 tentang "Transaksi Mata Uang Asing", maka transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Konversi kurs pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp 16.162,- dan Rp 15.416,-.

Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing, diakui sebagai laba (rugi) selisih kurs pada laporan laba rugi tahun berjalan.

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai "Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya".

d. Piutang Usaha

Piutang usaha dicatat dan disajikan berdasarkan besarnya piutang yang benar-benar dapat ditagih. Perusahaan menetapkan penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan dan kolektibilitas masing-masing piutang pada setiap akhir periode. Untuk piutang usaha dari rekening air, penyisihan ditentukan dengan mengelompokkan tiap pelanggan berdasarkan pengalaman dan data historis selama tiga tahun terakhir.

e. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih (*the lower cost or net realizable value*). Harga perolehan dinyatakan berdasarkan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP).

Penyisihan untuk persediaan usang dan lambat bergerak ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang.

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MERANGIN
KABUPATEN MERANGIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

f. Aset Tetap

Aset tetap disajikan sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Tarif penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Aset	Masa Manfaat	Tarif
Bangunan	20 tahun	5,00%
Mesindan Peralatan Instalasi	16 tahun	6,25%
Kendaraan	4 tahun	25,00%
Peralatan dan Inventaris Kantor	4 tahun	25,00%

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau member manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak di gunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

Aset Tetap dalam Penyelesaian harus dilaporkan secara terpisah dari Aset Tetap yang belum beroperasi dan belum dapat disusutkan sampai aset tetap tersebut dinyatakan beroperasi komersial. Aset tetap dalam penyelesaian dicatat dalam aset lain-lain.

Pada tanggal pelaporan, Perusahaan membuat perhitungan penurunan nilai secara individual untuk setiap aset maupun secara kelompok aset untuk kondisi yang tidak dimungkinkan secara individual.

g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Seluruh pendapatan baik pendapatan usaha maupun pendapatan non usaha diukur berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume.

Beban diakui pada saat terjadinya dan sesuai dengan masa manfaatnya (*accrual basis*).

h. Pajak Penghasilan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut. Perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui adanya pajak tangguhan.

Untuk kepentingan perpajakan perusahaan melakukan perhitungan pajak sendiri.

i. Imbalan pasca kerja

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan yang memenuhi syarat. Sumber pendanaan pensiun berasal dari karyawan yang dihitung sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun (PhDP) dan kekurangannya ditanggung perusahaan termasuk beban jasa masa lalu. Perusahaan membukukan program manfaat karyawan yang diatur Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 tahun 2023. Kewajiban atas masa kerja lalu diestimasi dengan menggunakan metode *Projected Benefit Cost Method (Attained Age Normal)* berdasarkan asumsi aktuarial jangka panjang. Kewajiban transisi yang timbul diakui sesuai jumlah jatuh tempo pada periode berjalan.

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MERANGIN
KABUPATEN MERANGIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024
 (Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

j. Kewajiban kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang belum pasti, perusahaan tidak mengakui kewajiban kontinjensi sebagai kewajiban. Kewajiban kontinjensi diungkapkan pada tanggal perolehan, uraian dan sifat kewajiban kontinjensi jika praktis dilakukan.

3. KAS DAN BANK

Saldo kas dan bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>Kas</u>		
Kas	91.542.597	126.278.600
<u>Bank</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	362.165.506	403.807.381
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	373.174.206	283.913.833
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	129.313.689	107.004.920
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.	46.938.473	26.082.600
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	<u>6.783.503</u>	<u>14.783.868</u>
Jumlah kas dan bank	<u>1.009.917.973</u>	<u>961.871.202</u>

4. PIUTANG USAHA

Akun piutang usaha per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Piutang Pelanggan	10.216.780.640	8.510.128.582
Penyisihan Piutang	<u>(3.088.556.520)</u>	<u>(1.197.057.305)</u>
Jumlah Piutang Usaha	<u>7.128.224.120</u>	<u>7.313.071.277</u>

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan piutang usaha tersebut cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha dikemudian hari.

5. PIUTANG LAIN-LAIN

Saldo piutang lain-lain tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar **NIHIL**

6. PERSEDIAAN

Saldo Persediaan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Bahan kimia	58.208.400	54.725.775
Bahan Instalasi	<u>75.388.007</u>	<u>167.401.637</u>
Jumlah Persediaan	<u>133.596.407</u>	<u>222.127.412</u>

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MERANGIN
KABUPATEN MERANGIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

7. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Uraian	Saldo 01/01/2024	Mutasi		Saldo 31/12/2024
		Penambahan	Pengurangan	
<u>Harga Perolehan</u>				
Tanah	2.313.926.288	-	-	2.313.926.288
Instalasi Sumber Air	7.533.858.162	33.775.000	-	7.567.633.162
Instalasi Pompa dan Pembangkit	5432.420.870	215.012.000	-	5.647.432.870
Instalasi Pengolahan Air	9.723.257.226	-	-	9.723.257.226
Instalasi Distribusi dan Transmisi	27.242.627.705	255.346.664	-	27.497.974.369
Instalasi Umum	3.529.789.672	12.675.000	-	3.542.464.672
Jumlah Aset	55.775.879.921	516.808.664	-	56.292.688.586
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
Instalasi Sumber Air	4.943.946.224	268.494.620	-	5.212.440.843
Instalasi Pompa dan Pembangkit	3.264.728.813	227.389.500	-	3.492.118.313
Instalasi Pengolahan Air	8.139.383.234	226.118.068	-	8.365.501.302
Instalasi Distribusi dan Transmisi	14.873.740.476	1.174.350.794	-	16.048.091.270
Instalasi Umum	3.335.131.786	42.981.453	-	3.378.113.239
Jumlah Ak. Penyusutan	34.556.930.532	1.939.334.435	-	36.496.264.967
<u>Akumulasi Penurunan nilai</u>				
Instalasi Sumber Air	346.389.945	-	-	346.389.945
Instalasi Pompa dan Pembangkit	90.000.000	-	-	90.000.000
Instalasi Pengolahan Air	81.691.066	-	-	81.691.066
Instalasi Distribusi dan Transmisi	202.500.000	-	-	202.500.000
Instalasi Umum	1.561.996	-	-	1.561.996
Jumlah Ak. Penurunan nilai	722.143.007	-	-	722.143.007
Nilai Buku	20.496.806.383			19.074.280.612

Uraian	Saldo 01/01/2023	Mutasi		Saldo 31/12/2023
		Penambahan	Pengurangan	
<u>Harga Perolehan</u>				
Tanah	2.313.926.288	-	-	2.313.926.288
Instalasi Sumber Air	7.527.663.162	6.195.000	-	7.533.858.162
Instalasi Pompa dan Pembangkit	4.946.270.870	486.150.000	-	5432.420.870
Instalasi Pengolahan Air	9.703.535.226	19.722.000	-	9.723.257.226
Instalasi Distribusi dan Transmisi	24.598.359.256	2.644.268.449	-	27.242.627.705
Instalasi Umum	3.454.889.672	74.900.000	-	3.529.789.672
Jumlah Aset	52.544.644.472	3.231.235.449	-	55.775.879.921
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
Instalasi Sumber Air	4.675.761.354	268.184.870	-	4.943.946.224
Instalasi Pompa dan Pembangkit	3.075.842.005	188.886.808	-	3.264.728.813
Instalasi Pengolahan Air	7.826.179.861	313.203.373	-	8.139.383.234
Instalasi Distribusi dan Transmisi	13.769.908.372	1.103.832.103	-	14.873.740.476
Instalasi Umum	3.307.205.345	27.926.441	-	3.335.131.786
Jumlah Ak. Penyusutan	32.654.896.937	1.902.033.595	-	34.556.930.532

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MERANGIN
KABUPATEN MERANGIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

7. ASET TETAP (lanjutan)

Uraian	Saldo 01/01/2023	Mutasi		Saldo 31/12/2023
		Penambahan	Pengurangan	
<u>Akumulasi Penurunan nilai</u>				
Instalasi Sumber Air	346.389.945	-	-	346.389.945
Instalasi Pompa dan Pembangkit	90.000.000	-	-	90.000.000
Instalasi Pengolahan Air	81.691.066	-	-	81.691.066
Instalasi Distribusi dan Transmisi	202.500.000	-	-	202.500.000
Instalasi Umum	1.561.996	-	-	1.561.996
Jumlah Ak. Penurunan nilai	722.143.007	-	-	722.143.007
Nilai Buku	19.167.604.528			20.496.806.383

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi adanya penurunan nilai terhadap aset tetap tersebut, sehingga tidak diperlukan tambahan cadangan penurunan nilai aset tetap.

8. UTANG USAHA

Saldo Utang Usaha pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

	2024	2023
CV Satu Bintang	456.277.730	246.229.080
PT.Surya Makmur A. Perkasa	118.573.500	103.701.750
PT.Anugrah Tirta Sukses	26.437.430	56.437.430
Toko Mutiara	15.960.000	44.590.000
CV Wildan Aditama	-	-
PT Karya Muda Suplindo	-	-
CV Surya Engineering	10.000.000	-
Toko Centra Olympic	-	-
Hutang usaha Lainnya	115.965.680	33.132.560
Jumlah Utang Usaha	743.214.340	484.090.820

9. UTANG BANK

Saldo Utang Bank per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

	2024	2023
a. Utang yang akan jatuh tempo satu tahun		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	-	81.479.185
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	125.181.854	99.887.400
	125.181.854	181.366.585
b. Utang jangka panjang		
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	195.473.536	33.295.795
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	-	-
	195.473.536	33.295.795
Jumlah Utang Bank	320.655.390	214.662.380

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MERANGIN
KABUPATEN MERANGIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024
 (Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

9. UTANG BANK (lanjutan)

Perusahaan memperoleh pinjaman modal kerja dari pihak perbankan, yaitu :

PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Bangko

Surat Perjanjian Kredit Nomor	:	1030.04/Bko, Tanggal 01 April 2024
Jenis Kredit	:	Kredit Investasi Umum
Pagu Kredit	:	Rp. 400.000.000,-
Tujuan Kredit	:	Tambahan pembelian mesin pompa IPA
Jangka Waktu	:	36 bulan
Suku Bunga	:	9,5%/p.aanuitas
Denda Keterlambatan	:	50% dari tunggakan bunga tanggal jatuh tempo
Pinjaman Jaminan	:	- Sertifikat hak milik no.166 an.Dewi Murni luas 986 M2 lokasi Desa Salam Buku
		- Sertifikat hak milik no.836 an.Giberno luas 13.260 M2.

10. UTANG LAIN-LAIN

Saldo Utang Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Biaya yang masih harus dibayar		11.974.000
Pinjaman Pihak Ke III	-	5.000.000
Jumlah Utang Lain-lain	-	16.974.000

11. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan kerja karyawan (program imbalan pasti) sesuai Undang- Undang Ketenaga kerjaan No. 13/2003, dengan usia pensiun normal adalah 56 tahun, melalui Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI).

Saldo Liabilitas Imbalan Kerja pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
a. Jangka Pendek	668.316.695	671.774.361
b. Jangka Panjang	918.744.774	918.744.774
Jumlah liabilitas imbalan kerja	<u>1.587.061.469</u>	<u>1.590.519.135</u>

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MERANGIN
KABUPATEN MERANGIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

12. MODAL

Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Modal Pemerintah Kabupaten	50.759.463.435	50.759.463.435
Penyertaan Pemerintah Pusat YBDTS	10.373.689.400	10.373.689.400
Modal Pemerintah Pusat	2.091.230.240	2.091.230.240
Modal Pemerintah Provinsi	1.700.000.000	1.700.000.000
Penyertaan Pemerintah Daerah TKIYBDTS	234.178.787	234.178.787
Modal Hibah	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
Jumlah Modal	<u>65.158.761.862</u>	<u>65.158.761.862</u>

13. PENDAPATAN USAHA

Jumlah Pendapatan Usaha untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>Pendapatan Air</u>		
Pendapatan Penjualan Air	11.740.943.850	12.201.050.775
Pendapatan Penjualan Air Tangki	19.790.000	36.155.000
Pendapatan Air Lainnya	<u>5.319.700</u>	<u>11.547.100</u>
	<u>11.766.053.550</u>	<u>12.248.752.875</u>
<u>Pendapatan Non Air</u>		
Pendapatan Langganan Tetap	3.870.471.000	3.639.885.000
Pendapatan Denda	578.395.000	531.650.000
Pendapatan Sambungan Baru	318.729.365	287.251.696
Pendapatan Penyambungan Kembali	5.794.000	9.250.000
Pendapatan Balik Nama	2.650.000	2.200.000
Pendapatan Non Air Lainnya	<u>49.286.704</u>	<u>14.741.140</u>
	4.825.326.069	4.484.977.836
Jumlah Pendapatan Usaha	<u>16.591.379.619</u>	<u>16.733.730.711</u>

Pendapatan penjualan air diperoleh dari penjualan air kepada pelanggan melalui penerbitan rekening air atas pemakaian air berdasarkan tarif progresif melalui water meter dan penjualan melalui mobil.

14. BEBAN USAHA

Jumlah beban usaha per 31 Desember 2024 dan 2023 ini terdiri dari :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Beban pegawai		
Beban pegawai bagian adm umum & keuangan	2.701.044.675	3.135.790.347
Beban pegawai sumber air	1.258.665.096	1.255.428.504
Beban pegawai bagian transmisi distribusi	1.417.835.769	946.721.091
Beban pegawai bagian pengolahan	<u>44.485.709</u>	<u>13.020.720</u>
	<u>5.422.031.249</u>	<u>5.350.960.662</u>

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MERANGIN
KABUPATEN MERANGIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

14. BEBAN USAHA (lanjutan)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Beban BBM		
Instalasi transmisi distribusi	54.686.000	150.000
Instalasi sumber air	-	18.300.000
	54.686.000	18.450.000
Beban Listrik		
Instalasi sumber air	4.462.229.329	4.418.590.149
Instalasi umum	30.468.650	13.524.516
	4.492.697.979	4.432.114.665
Beban bahan		
Beban bahan kimia	767.139.337	632.897.200
Beban bahan instalasi	287.062.451	313.931.965
Beban bahan pembantu	65.950.800	36.576.000
	1.120.152.588	983.405.165
Beban Penyusutan dan Amortisasi		
Instalasi transmisi distribusi	1.174.350.794	1.103.832.103
Instalasi sumber air	495.884.119	457.071.677
Instalasi pengolahan air	226.118.068	313.203.373
Instalasi umum	42.981.453	27.926.441
	1.939.334.435	1.902.033.594
Beban Pemeliharaan		
Instalasi transmisi distribusi	414.314.500	602.499.860
Instalasi sumber air	999.190.262	387.656.680
Instalasi umum	200.351.240	384.322.375
Instalasi pengolahan air	69.923.080	92.684.500
	1.683.779.082	1.467.163.415
Beban umum dan administrasi		
Beban hubungan langganan	616.691.355	572.408.096
Beban penyisihan piutang	1.891.499.215	367.279.748
Beban Pemakaian Air (Pajak Pemakaian Air)	70.160.598	-
Beban perjalanan dinas	255.126.600	323.523.550
Beban kantor	140.819.500	164.603.700
Beban penelitian dan pengembangan	117.688.000	135.869.000
Beban Konsumsi	114.655.120	158.510.650
Beban Pendidikan, pelatihan dan peningkatan SDM	75.629.600	158.575.000
Beban keuangan	107.770.632	60.775.379
Beban Badan Pengawas	149.342.000	136.385.800
Beban ATK	75.059.400	72.910.400
Beban Direksi	38.500.000	55.250.000
Beban operasi lainnya	218.186.827	333.210.436
	3.871.128.847	2.539.301.759
Jumlah Beban Usaha	18.583.810.181	16.693.429.260

15. TANGGUNGJAWAB DAN KEWENANGAN PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan diselesaikan pada tanggal 10 Juni 2025.

BLUD RSUD KOLONEL ABUNDJANI BANGKO
LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONEL ABUNDJANI
LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Koresponding 31 Desember 2023
dan
Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan Pengurus	i
Laporan Auditor Independen	ii
Laporan Realisasi Anggaran	1
Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih	2
Neraca	3
Laporan Operasional	4
Laporan Arus Kas	5
Laporan Perubahan Ekuitas	7
Catatan Atas Laporan Keuangan.....	8
Lampiran	33



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
RSUD KOLONEL ABUNDJANI BANGKO
TERAKREDITASI : PARIPURNA



Jln. Kesehatan No.20 Kel. Pematang Kandis Bangko Telp (0746) 21459 - 21118

SURAT PERNYATAAN DIREKTUR
TENTANG
TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : dr. Irwan Kurniawan
Jabatan : Direktur BLUD RSUD Kolonel Abundjani Bangko
NIP/NIK/NIDN : 197809182009041001/1502121809780001
Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD RSUD Kolonel Abundjani Bangko.
2. Laporan Keuangan BLUD RSUD Kolonel Abundjani Bangko untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/PMK.05/2017 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan BLUD RSUD Kolonel Abundjani Bangko dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan BLUD RSUD Kolonel Abundjani Bangko tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas Sistem Pengendalian Internal dalam BLUD RSUD Kolonel Abundjani Bangko.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bangko, 19 Mei 2025





KANTOR AKUNTAN PUBLIK EKO PRASETYO

Izin Usaha KMK RI No. 401/KM.1/2023

Laporan Auditor Independen

Nomor : 00053/2.1426/AU.5/11/1947-1/1/V/2025

Kepada Yth.

Direktur

RSUD KOLONEL ABUNDJANI BANGKO

Di-Tempat

Opini

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan RSUD Kolonel Abundjani Bangko terlampir, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran tanggal 31 Desember 2024, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan, dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap RSUD berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk



KANTOR AKUNTAN PUBLIK EKO PRASETYO

Izin Usaha KMK RI No. 401/KM.1/2023

memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan RSUD dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi RSUD atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan RSUD.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit, kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal RSUD.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.



Alamat: Jalan Raja Yamin No.1 - K Lantai 1 RT.25, Kel Selamat, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi 36129



081174-8218



kap.ekoprasetyo@gmail.com



kapekojambi@gmail.com



KANTOR AKUNTAN PUBLIK EKO PRASETYO

Izin Usaha KMK RI No. 401/KM.1/2023

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan RSUD untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan RSUD tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Hal Lain

Laporan keuangan RSUD Kolonel Abundjani Bangko tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain dengan nomor laporan 00053/2.1353/AU.5/11/1439.1/1/IV/2024 tanggal 01 April 2024, yang menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Kantor Akuntan Publik Eko Prasetyo



Eko Prasetyo, M.Sc, Ak, CA, CPA

Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1947



19 Mei 2025



Alamat: Jalan Raja Yamin No.1 - K Lantai 1 RT.25, Kel Selamat, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi 36129



081174-8218



kap.ekoprasetyo@gmail.com



kapekojambi@gmail.com

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONEL ABUNDJANI
KABUPATEN MERANGIN**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 2024	Realisasi 2024 (Audited)	%	Realisasi 2023 (Audited)
PENDAPATAN					
Lain-Lain PAD yang Sah	3.1.1-a-b	50.898.311.033,00	42.189.754.865,60	82,89	46.781.476.669,59
JUMLAH PENDAPATAN		50.898.311.033,00	42.189.754.865,60	82,89	46.781.476.669,59
BELANJA					
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	3.1.2-a	7.440.000.000,00	7.013.553.000,00	94,27	6.559.499.000,00
Belanja Barang dan Jasa	3.1.2-b	42.413.569.672,00	35.028.823.023,00	82,59	43.260.619.459,61
Jumlah Belanja Operasi		49.853.569.672,00	42.042.376.023,00	84,33	49.820.118.459,61
Belanja Modal					
Belanja Peralatan dan Mesin	3.1.2-c	1.341.200.000,00	379.511.048,00	28,30	1.467.670.955,00
Belanja Gedung dan Bangunan	3.1.2-c	24.000.000,00	23.952.800,00	99,80	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.1.2-c	-	-	-	964.905.773,00
Jumlah Belanja Modal		1.365.200.000,00	403.463.848,00	29,55	2.432.576.728,00
JUMLAH BELANJA		51.218.769.672,00	42.445.839.871,00	113,89	52.252.695.187,61
SURPLUS (DEFISIT)		320.458.638,98	(256.085.005,40)		(5.471.218.518,02)
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI					
Penggunaan SILPA	3.2.1	320.458.638,98	320.458.638,98	100,00	5.791.677.157,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI		320.458.638,98	320.458.638,98		5.791.677.157,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI					
Pembayaran Pokok Pinjaman					-
Pengeluaran Penyertaan Modal					-
Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	3.2.1				-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI					-
PEMBIAYAAN NETO		320.458.638,98	320.458.638,98		5.791.677.157,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)					
			64.373.633,58		320.458.638,98

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONEL ABUNDJANI
KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
		(Audited)	(Audited)
SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	3.2.1	320.458.638,98	5.791.677.157,00
PENGUNAAN SAL		(320.458.638,98)	(5.791.677.157,00)
SUB JUMLAH		-	-
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	3.2.1	64.373.633,58	320.458.638,98
SUB JUMLAH		64.373.633,58	320.458.638,98
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA		-	-
LAIN-LAIN		-	-
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	3.2.1	64.373.633,58	320.458.638,98

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONEL ABUNDJANI
KABUPATEN MERANGIN
NERACA

Per 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

ASET	Catatan	2024	2023
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	3.3.1	64.373.633,58	320.458.638,98
Piutang Pelayanan	3.3.2	6.795.938.855,00	3.798.311.033,00
Penyisihan Kerugian Piutang Pelayanan		(523.918.865,21)	(131.173.360,75)
Persediaan	3.3.3	2.120.870.739,00	4.427.330.872,00
JUMLAH ASET LANCAR		8.457.264.362,37	8.414.927.183,23
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap			
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023)	3.3.4	53.008.005.053,95	58.331.055.863,78
Aset Tidak Berwujud			
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023)	3.3.5	-	-
Aset Lain-Lain			
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023)	3.3.5	43.877.300,00	381.321.500,00
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		53.051.882.353,95	58.712.377.363,78
JUMLAH ASET		61.509.146.716,32	67.127.304.547,01
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Usaha	3.3.6	17.491.346.734,00	7.850.949.396,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		17.491.346.734,00	7.850.949.396,00
JUMLAH KEWAJIBAN		17.491.346.734,00	7.850.949.396,00
EKUITAS			
Ekuitas	3.3.7	44.017.799.982,32	59.276.355.151,01
JUMLAH EKUITAS		44.017.799.982,32	59.276.355.151,01
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		61.509.146.716,32	67.127.304.547,01

*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan*

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONEL ABUNDJANI
KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah	3.4.1a-c	45.187.382.687,60	46.166.904.795,98
Pendapatan Hibah	3.4.1-d	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		45.187.382.687,60	46.166.904.795,98
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	3.4.2-a	8.101.853.000,00	6.539.499.000,00
Beban Persediaan	3.4.2-b	22.335.586.103,00	10.219.097.391,00
Beban Jasa	3.4.2-b	21.542.004.163,00	32.545.791.814,61
Beban Pemeliharaan	3.4.2-b	1.017.806.311,00	1.312.447.191,00
Beban Perjalanan Dinas	3.4.2-b	689.615.389,00	704.607.878,00
Beban Penyisihan Piutang	3.4.2-c	523.918.865,21	123.323.360,75
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.4.2-d	11.384.504.756,83	12.334.673.095,13
Beban Lain - Lain	3.4.2-e	-	22.225.819,00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		65.595.288.588,04	63.801.665.549,49
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(20.407.905.900,44)	(17.634.760.753,51)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Penyetoran Ke Kas Daerah		-	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA			
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL		(20.407.905.900,44)	(17.634.760.753,51)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONEL ABUNDJANI
KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Jasa Lain-Lain PAD yang Sah	42.189.754.865,60	46.781.476.669,59
Jumlah Arus Kas Masuk	<u>42.189.754.865,60</u>	<u>46.781.476.669,59</u>
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	(7.013.553.000,00)	(6.559.499.000,00)
Pembayaran Jasa	(35.028.823.023,00)	(43.260.619.459,61)
Jumlah Arus Kas Keluar	<u>(42.042.376.023,00)</u>	<u>(49.820.118.459,61)</u>
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	<u>147.378.842,60</u>	<u>(3.038.641.790,02)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Kas Masuk		
Penjualan atas Aset Tetap	-	-
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	-	-
Penjualan atas Aset Lainnya	-	-
Penerimaan dari Divestasi	-	-
Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	<u>-</u>	<u>-</u>
Arus Kas Keluar		
Perolehan Peralatan dan Mesin	(379.511.048,00)	(1.467.670.955,00)
Perolehan Gedung dan Bangunan	(23.952.800,00)	-
Perolehan Aset Tetap Lainnya	-	(964.905.773,00)
Jumlah Arus Kas Keluar	<u>(403.463.848,00)</u>	<u>(2.432.576.728,00)</u>
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	<u>(403.463.848,00)</u>	<u>(2.432.576.728,00)</u>

*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan*

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONEL ABUNDJANI
KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN ARUS KAS - *Lanjutan*
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pinjaman	-	-
R/K Penerimaan	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-
Arus Kas Keluar		
Pengembalian Dana Subsidi APBD	-	-
Setor Ke Kasda Provinsi Jambi (dari Kas BLUD)	-	-
Lalu Lintas Kas Bank Antar Tahun	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	-	-
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Fihak Ketiga	-	-
R/K Penerimaan	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Fihak Ketiga	-	-
R/K Pengeluaran	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	-	-
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(256.085.005,40)	(5.471.218.518,02)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	320.458.638,98	5.791.677.157,00
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	64.373.633,58	320.458.638,98
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN TERDIRI DARI :		
Kas	8.309.267,00	204.880.801,00
Kas di Bank Pembangunan Daerah Jambi-3005025426	56.064.366,58	115.577.837,98
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	64.373.633,58	320.458.638,98

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONEL ABUNDJANI
KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Saldo Awal	Saldo Akhir
Ekuitas Awal		75.802.921.843,20	59.276.355.151,01
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan			5.020.901.971,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar:			
Koreksi Nilai Persediaan	3.3.7	-	-
Koreksi Revaluasi Aset Tetap		-	-
Koreksi Beban Penyisihan Piutang		-	5.850.000,00
Koreksi Ekuitas Lainnya		1.108.194.061,32	122.598.760,75
Koreksi Hutang		-	-
Jumlah Ekuitas Awal		76.911.115.904,52	64.425.705.882,76
Ekuitas Tahun Berjalan			
Ekuitas Hibah	3.3.7	-	-
Jumlah Ekuitas Tahun Berjalan		-	-
Surplus (Defisit) LO Tahun Berjalan		(17.634.760.753,51)	(20.407.905.900,44)
Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2024		59.276.355.151,01	44.017.799.982,32

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONEL ABUNDJANI
KABUPATEN MERANGIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

1 GAMBARAN UMUM

1.1 Sejarah Singkat

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangko berdiri pada tahun 1983 type C, selanjutnya pemberian nama "Rumah Sakit Umum Daerah Bangko" menjadi "Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abundjani Bangko", merupakan pemberian nama Bupati Merangin melalui keputusan Bupati Merangin No. 265 Tahun 2002. Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani merupakan institusi kesehatan yang berada dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko berdiri pada tahun 1983 type C dengan luas lahan kurang lebih 35.000 M2 dengan luas bangunan 8.260 M2 dengan kapasitas 195 tempat tidur dan merupakan Rumah Sakit Pemerintah, satu-satunya di Kabupaten Merangin dan merupakan salah satu dari 13 (tiga belas) rumah sakit umum yang berada di Provinsi Jambi. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kol. Abundjani Bangko didirikan pada tanggal 01 bulan Juli Tahun 2014 sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 49 Tahun 2014 yang diundangkan dalam Berita Acara Tahun 2014 Nomor 49 tanggal 01 bulan Juli tahun 2014 Sebelum berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kol. Abundjani merupakan Unit Pelaksana Departemen Kesehatan yang telah melaksanakan kegiatannya sejak tanggal 17 bulan September tahun 1983 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan No. 20 Pada tanggal 17 bulan September tahun 1983.

Bidang Usaha dan kegiatan utama RSUD Kolonel Abundjani Bangko adalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan pelayanan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Medis
- b. Pelayanan penunjang medis dan non medis
- c. Pelayanan Rujukan
- d. Pelayanan Pendidikan dan pelatihan
- e. Pelayanan Hemodialisa

1.2 Susunan Dewan Pengawas dan Direksi

Berdasarka Peraturan Bupati Merangin Nomor 32 Tahun 2021 Tentang pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, tugas fungsi dan tata kerja UPTD Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko Tahun 2024 Sebagai Berikut:

Dewan Pengawas:

• Ketua Dewan Pengawas	: drg. Sony Propesma, MPH
• Anggota Dewan Pengawas	: Masyhuri, S.E, M.Si
• Sekretaris bukan Anggota	: Tety sesnita, AMKL

Dewan Direksi:

• Pimpinan BLUD	: dr. Irwan Kurniawan
• Pejabat Keuangan BLUD	: dr. Asril Parlaungan Naibaho
• Pejabat Teknis BLUD	: Ismail, SKM
	: dr. M. Zaherman
	: Ashari, SKM

1.3 Sumber Daya Manusia

Untuk pelaksanaan kegiatan dan usaha tersebut RSUD Kolonel Abundjani Bangko didukung SDM sebanyak 738 orang, Menurut jenjang pendidikannya sebagai berikut:

• Dokter Spesialis	: 25 orang
• Dokter Umum	: 27 orang
• Dokter Gigi	: 4 orang
• Psikolog	: 1 orang
• Sarjana (S1) Psikolog	: 1 orang
• Apoteker	: 22 orang
• S1 Farmasi	: 12 orang
• DIII Farmasi	: 14 orang
• S2 Keperawatan	: 1 orang

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONEL ABUNDJANI
KABUPATEN MERANGIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

1.3 Sumber Daya Manusia - Lanjutan

• Ners	: 75 orang
• S1 Keperawatan	: 22 orang
• DIII Keperawatan	: 91 orang
• SPK/SPKU	: 10 orang
• Profesi Kebidanan	: 6 orang
• DIV. Kebidanan	: 17 orang
• DIII Kebidanan	: 118 orang
• S1 Kesmas	: 47 orang
• Pasca Sarjana (Kesmas)	: 5 orang
• DIV Kesehatan Gigi	: 3 orang
• DIII Kesehatan Gigi	: 2 orang
• SPRG	: 1 orang
• DIV/S1 Gizi	: 6 orang
• DIII Gizi	: 7 orang
• SI Sanitasi Lingkungan	: 1 orang
• DIII Sanitasi/Kesling	: 7 orang
• S1 Analis	: 5 orang
• DIII Analis/Aak	: 24 orang
• SMAK/SAKMA	: 1 orang
• Teknik elektro	: 3 orang
• DIV Radiologi	: 2 orang
• DIII Radiologi/Radiognosis	: 13 orang
• DIII Perawat Anestesi	: 2 orang
• DIV Perawat Anestesi	: 5 orang
• Profesi Fisioterapis	: 2 orang
• S1 Fisioterapis	: 3 orang
• DIII Fisioterapis	: 7 orang
• Refraksionis Opt	: 1 orang
• Medical Record	: 5 orang
• DIII Administrasi RS	: 3 orang
• DII Emergency	: 1 orang
• DIV Akupuntur	: 1 orang
• LCPK	: 1 orang
• S2 (Pasca Sarjana Non Kesehatan)	: 2 orang
• S1 (Non Kesehatan)	: 43 orang
• DIV (Non Kesehatan)	: 0 orang
• DIII (Non Kesehatan)	: 3 orang
• SLTP/SLTA/SD	: 87 orang

1.4 Kebijakan Akuntansi Yang Penting

RSUD Kol. Abundjani Bangko menyusun Laporan keuangan Tahun Anggaran 2024 mengacu kepada Permendagri no. 79 tahun 2018 dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 13

1. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

- Laporan keuangan, yang disajikan dalam rupiah penuh, disusun atas dasar akrual dengan konsep biaya historis.
- Laporan arus kas disusun atas dasar kas dengan metode langsung.
- Periode akuntansi rumah sakit adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan yang dalam hal ini sesuai dengan tahun anggaran.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONEL ABUNDJANI
KABUPATEN MERANGIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

1.4 Kebijakan Akuntansi Yang Penting - Lanjutan

2. Mata Uang Pelaporan dan Transaksi

Mata uang pelaporan yang digunakan oleh entitas adalah mata uang Rupiah, sekaligus sebagai mata uang fungsional. Semua jumlah-jumlah transaksi dan saldo akun disajikan dalam Rupiah, kecuali dijelaskan lain.

3. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang. Kas dan setara kas disajikan sebesar nilai rupiahnya.

4. Pengakuan pendapatan dan beban

- a. Sumbangan dari pihak lain di luar pemerintah dan subsidi pemerintah diakui berdasarkan penerimaan kas atau aset non kas.
- b. Pendapatan jasa pelayanan diakui pada saat jasa pelayanan selesai dilaksanakan.
- c. Pendapatan dari obat-obatan, bahan dan alat habis pakai yang digunakan untuk kegiatan pelayanan diakui pada saat barang tersebut dikonsumsi oleh pasien.
- d. Pendapatan dari penjualan obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang dilakukan apotik diakui pada saat barang diserahkan kepada pembeli.
- e. Beban diakui sesuai dengan masa manfaatnya (dasar akrual).

Pendapatan merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas.

- a. Pendapatan usaha dari jasa layanan, pendapatan usaha lainnya, dan pendapatan lainnya dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima, diakui ketika hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal. Pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca.
- b. Pendapatan dari hasil kerjasama diakui pada saat hak kepemilikan berpindah, pendapatan hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima.
- c. Pendapatan dari hasil kerjasama diakui pada saat hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya kerjasama yang dilakukan.
- d. Pendapatan dari APBD atau APBN diakui pada saat diterima uang atau aset lainnya dalam bentuk diterbitnya SP2D.
- e. Pendapatan lain-lain yang sah diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diberikan.

Biaya merupakan penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas.

Biaya diakui pada saat timbulnya biaya tersebut sebesar jumlah yang digunakan untuk pelayanan, jumlah yang telah dibayar, jumlah yang harus dibayarkan, jumlah yang diestimasi atau sebesar jumlah yang dialokasikan.

5. Penyisihan Kerugian Piutang dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:

- a. Piutang dengan umur $\leq$ 1 bulan sebesar 0,5%.
- b. Piutang dengan umur > 1-3 Bulan sebesar 10%.
- c. Piutang dengan Umur > 3-12 Bulan Sebesar 50%
- d. Piutang dengan umur >12 Bulan Sebesar 100%

6. Piutang

Piutang Pelayanan

Piutang pelayanan merupakan piutang yang diakui atas pendapatan jasa layanan yang telah diberikan dalam rangka kegiatan BLU, tetapi belum dilakukan penyetoran/pembayarannya. Piutang pelayanan disajikan sebesar nilai tunai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan setelah dikurangi estimasi penyisihan piutang tak tertagih.

7. Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk dipakai dalam mendukung kegiatan operasional rumah sakit dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. RSUD melakukan pemeriksaan fisik (stock opname) persediaan setiap akhir bulan. Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Persediaan dinilai menggunakan metode FIFO (First In First Out).

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONEL ABUNDJANI
KABUPATEN MERANGIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

8. Aset tetap

Aset tetap disajikan berdasarkan hal berikut:

- a. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap apabila beban perolehan aset dapat diukur secara andal dan besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomis di masa datang yang berkaitan dengan aset tersebut akan mengalir ke dalam BLUD.
- b. Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung sejak bulan aset yang bersangkutan digunakan, dengan cara garis lurus, berdasarkan taksiran masa manfaatnya dengan prosentase tahunan dari biaya perolehan sebagai berikut:

1) Gedung dan Bangunan	50 tahun
2) Jalan, irigasi	30 tahun
3) Instalasi/Jaringan	0 tahun
4) Peralatan mesin	5 tahun
5) Alat Kesehatan	5-8 tahun
6) Komputer	4 tahun
7) Kendaraan	7 tahun
8) Alat Kantor dan meubelair	5 tahun
- c. Metode penyusutan dan taksiran masa manfaat atas perolehan aset tetap diatur sesuai dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 42 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Merangin.
- d. Beban pemeliharaan normal dibebankan pada laporan aktivitas tahun berjalan. Sedangkan perbaikan, penambahan, pemugaran, perluasan dan lain-lain yang menambah masa manfaat atau kapasitas aset dikapitalisasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Bagan Standar Badan Layanan Umum

Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abundjani. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan aset akan diberlakukan

sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi ketiga kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara, bertambah: ekonomis/efisien, umur pemanfaatan/umur ekonomis, volume, dan mutu/kapasitas produktivitas.
- b. Ada perubahan fisik semula.
- c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap, sebagai berikut:
 - 1) Tanah dengan nilai Rp.1
 - 2) Peralatan Medis dan alat angkutan sebesar Rp. 1.000.000,-.
 - 3) Peralatan Non Medis dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat medis sebesar Rp. 500.000,-.
 - 4) Jalan, jaringan dan instalasi dengan nilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); kecuali untuk perolehan jalan, jaringan dan instalasi yang diperoleh melalui hibah dan/atau rampasan yang tidak diketahui nilai perolehan atau nilai wajarnya, maka diberikan nilai Rp1,- (satu rupiah)
 - 5) Aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 6) Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - 7) Aset tetap konstruksi (gedung dan bangunan) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONEL ABUNDJANI
KABUPATEN MERANGIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

Aset Tetap - Lanjutan

No	Uraian	Nilai Kapitalis
1.	Tanah	
2.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	1.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.000.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	500.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	Alat-Alat Kantor	500.000
	Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	500.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	500.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	500.000
2.9	Alat Keamanan	500.000
3.	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	10.000.000
3.2	Bangunan Monumen	10.000.000
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	10.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	10.000.000
4.3	Instalasi	10.000.000
4.4	Jaringan	10.000.000
5.	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	500.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	500.000
	b. Ternak	500.000
	c. Tumbuhan Pohon	500.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel

- d. Hak atas tanah dikapitalisasi senilai biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hak tersebut. Selanjutnya hak atas tanah diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya berdasarkan surat perizinan.
- e. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepas (dijual atau dihibahkan) atau apabila aset secara permanen ditarik dari penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis di masa datang yang diharapkan dari pelepasannya.

9. Aset Lainnya

- a. Aset tidak berwujud
- Perangkat lunak komputer (software)
 - Lisensi dan Waralaba (Franchise). Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
 - Hasil kajian/penelitian yang diberikan manfaat jangka panjang.
 - Hak cipta (copyright), paten, dan kekayaan intelektual lainnya. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu (investor) atas hasil temuan (invention) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- b. Aset Lain-lain
- Merupakan aset RSUD yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap aset tak berwujud, aset KSO dan aset sewa guna usaha.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONEL ABUNDJANI
KABUPATEN MERANGIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

10. Kewajiban

Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek (hutang kepada pihak ketiga, hutang perhitungan pihak ketiga, hutang jangka pendek lainnya) dan kewajiban jangka panjang. Hutang dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

11. Ekuitas

Ekuitas merupakan pos pada neraca yang merupakan aset bersih dan menampung selisih antara aset dan kewajiban.

1.5

Visi

Visi BLUD RSUD Kolonel Abundjani Bangko adalah menjadi rumah sakit umum daerah terbaik di Propinsi Jambi.

Misi

- 1) Memberikan pelayanan prima, sepenuh hati dan kasih sayang dengan mengutamakan keselamatan pasien;
- 2) Mengembangkan sumber daya manusia yang kompetitif dan profesionalisme; dan
- 3) Meningkatkan, mengembangkan sarana dan pra sarana yang memenuhi standar dan berwawasan lingkungan dalam mendukung program pemerintah di bidang pariwisata dan pertanian.

Nilai-Nilai

- a. Ramah :
Karyawan RSUD Kolonel Abundjani memiliki sikap ramah dalam melayani pasien.
- b. Cepat Tanggap :
Karyawan RSUD Kolonel Abundjani memiliki sikap tanggap terhadap setiap keadaan pasien, memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan segera mengambil tindakan.
- c. Tulus :
Penuh empati, berpikir positif, ikhlas, rendah hati, dalam melayani pasien.
- d. Tepat :
Senantiasa melayani pasien dengan tepat/akurat, tepat waktu, tepat obat, tepat diagnosa.
- e. Integritas :
Integritas merupakan nilai dasar utama, dapat membedakan dan memilih antara hal yang baik dan hal yang buruk, berani menyampaikan apa adanya dan dapat dipercaya.
- f. Kompeten :
Penguasaan atas ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai profesi, untuk dapat melaksanakan tugas pekerjaannya dengan kualitas tinggi, dapat dinilai dan dapat dipertanggungjawabkan.
- g. Komitmen :
Bersedia berjuang bersama mewujudkan visi dan misi bersama.
- h. Tenggang Rasa :
Saling menghormati, bisa menerima perbedaan, bisa memahami perasaan orang lain.

Tujuan

Tujuan BLUD RSUD Kolonel Abundjani adalah terwujudnya BLUD RSUD Kolonel Abundjani yang unggul dan mampu memberikan pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar mutu dan kebutuhan pasien, guna menunjang peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Merangin.

1.6

Pelayanan RSUD Kolonel Abundjani

RSUD Kolonel Abundjani sebagai institusi penyelenggara pelayanan publik dibidang kesehatan menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Adapun jenis pelayanan yang disediakan RSUD Kolonel Abundjani adalah sebagai berikut:

- a. pelayanan Gawat Darurat;
- b. pelayanan Rawat Jalan;
- c. pelayanan Rawat Inap;
- d. pelayanan Bedah Sentral;
- e. pelayanan Persalinan dan Perinatologi;
- f. pelayanan Intensif;
- g. pelayanan Radiologi;
- h. pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
- i. pelayanan Rehabilitasi Medik;
- j. pelayanan Farmasi;
- k. pelayanan Transfusi Darah;

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONEL ABUNDJANI
KABUPATEN MERANGIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

Pelayanan RSUD Kolonel Abundjani - Lanjutan

- l. pelayanan Rekam Medik;
- m. pelayanan Gizi;
- n. pelayanan Pengelolaan Limbah;
- o. Pelayanan Administrasi dan Manajemen;
- p. pelayanan Ambulance/Kereta Jenazah;
- q. pelayanan Pemulasaran Jenazah;
- r. pelayanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit;
- s. pelayanan Parkir
- t. pelayanan Laundry;
- u. pelayanan Hemodialisa;
- v. pelayanan Fisiotherapy; dan
- w. pelayanan Akupuntur.

1.7 Sumber Daya Manusia

Untuk pelaksanaan kegiatan dan usaha tersebut RSUD Kolonel Abundjani didukung oleh sebanyak 739 Orang.

1.8 Alamat RSUD Kolonel Abundjani

Jln. Kesehatan No. 20 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, telepon 0746-21459, Provinsi Jambi.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

2.1 Entitas Pelaporan

Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan PSAP 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU. Laporan Keuangan RSUD

Kolonel Abundjani terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

2.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual berarti bahwa transaksi diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- b. Basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA dan belanja. Basis kas berarti bahwa transaksi diakui dan dicatat pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2.3 Kebijakan Akuntansi Pos-pos Laporan Keuangan

2.3.1 Pendapatan dan Beban-LRA

- a. Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah atau bendahara penerimaan yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui saat diterimanya kas oleh bendahara penerimaan atau pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatatkan jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Belanja - LRA adalah semua pengeluaran dari Rekening Bendahara Pengeluaran/Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran atau Rekening Kas Umum Daerah.
- c. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran Uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Surplus dan Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode laporan.
- e. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan dan pengeluaran yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
- f. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode laporan.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONEL ABUNDJANI
KABUPATEN MERANGIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

2.3.2 Pendapatan - LO

- a. Pendapatan - LO adalah hak RSUD yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh RSUD .
- b. Pendapatan - LO diakui pada saat timbulnya hak RSUD untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- c. Pendapatan - LO dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2.3.3 Pengakuan Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan/ atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

2.3.4 Kas dan Setara Kas

Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. Kas RSUD Kolonel Abundjani adalah *kas on hand* maupun kas yang disimpan di bank. Kas terdiri dari :

- a. Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas BLUD.
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD
Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD merupakan kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran SKPD yang berasal dari sisa uang UP/TU yang belum di setor ke Kas Daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD
Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang tidak dipergunakan lagi/dipertanggungjawabkan dan belum disetor ke Kas BLUD (Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan).
- d. Kas Lainnya
Kas Lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai.
Yang pengelolaannya di luar mekanisme Kas daerah dan BLUD serta menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.

2.3.5 Piutang Pelayanan

Piutang hak atau klaim kepada pihak ke tiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.

Penyisihan Kerugian Piutang

Penyisihan Kerugian Piutang dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:

NO.	URAIAN	MASA PIUTANG (Jumlah Tempo)	TAHUN PENETAPAN	JUMLAH PIUTANG S.D 31 DESEMBER TA 2024	PENYISIHAN PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN S.D. TA 2024
					LANCAR 0,5%	LURANG LANCA 10%	DIRAGUKAN 50%	MACET 100%	
1	2	3	4	5	11x110,3%	13x8110%	13x8110%	14x10100%	13x11+12x11+13x14
1	Piutang Parkir 2016	2016	2016	5.850.000,00	-	-	-	5.850.000,00	5.850.000,00
2	KLAIM PELAYANAN BPJS			6.102.500.265,00	14.600.549,33	282.681.460,00	177.787.900,00	-	475.069.909,33
	a. Klaim Pelayanan BPJS Bulan Juli 2024	31/07/2024	2024	355.575,000	-	-	177.787.900,00	-	177.787.900,00
	b. Klaim Pelayanan BPJS Bulan November 2024	30/11/2024	2024	2.826.814,600	-	282.681.460,00	-	-	282.681.460,00
	c. Klaim Pelayanan BPJS Bulan Desember 2024	31/12/2024	2024	2.920.109,865	14.600.549,33	-	-	-	14.600.549,33
3	KLAIM (PELAYANAN FARMASI)			487.944.590,00	872.484,38	26.344.771,50	-	-	29.217.255,88
	Klaim pelayanan farmasi kretek bulan Oktober s.d desember 2024		2024	442.544.590,00	844.984,38	27.354.771,50	-	-	28.199.755,88
	a. Klaim Pelayanan bulan Oktober 2024	31/10/2024	2024	116.234.992,00	-	11.623.499,20	-	-	11.623.499,20
	b. Klaim Pelayanan bulan November 2024	30/11/2024	2024	157.312.723,00	-	15.731.272,30	-	-	15.731.272,30
	c. Klaim Pelayanan bulan Desember 2024	31/12/2024	2024	168.996.875,00	844.984,38	-	-	-	844.984,38
	Klaim Pelayanan Farmasi Rawat jalan Alat bantu dengan bulan Oktober s.d Desember 2024		2024	15.400.000,00	27.500,00	990.000,00	-	-	1.017.500,00
	a. Klaim Pelayanan Farmasi Rawat jalan Alat bantu dengan bulan Oktober 2024	31/10/2024	2024	5.500.000,00	-	550.000,00	-	-	550.000,00
	b. Klaim Pelayanan Farmasi Rawat jalan Alat bantu dengan bulan November 2024	30/11/2024	2024	4.400.000,00	-	440.000,00	-	-	440.000,00
	c. Klaim Pelayanan Farmasi Rawat jalan Alat bantu dengan bulan Desember 2024	31/12/2024	2024	5.500.000,00	27.500,00	-	-	-	27.500,00
4	Klaim Pelayanan Ambulans 2024		2024	229.644.000,00	483.300,00	13.298.400,00	-	-	13.781.700,00
	a. Klaim Ambulans Rutinan BPJS Oktober 2024	31/10/2024	2024	56.760.000,00	-	5.676.000,00	-	-	5.676.000,00
	b. Klaim Ambulans Rutinan BPJS November 2024	30/11/2024	2024	76.224.000,00	-	7.622.400,00	-	-	7.622.400,00
	c. Klaim Ambulans Rutinan BPJS Desember 2024	31/12/2024	2024	96.660.000,00	483.300,00	-	-	-	483.300,00
JUMLAH				6.795.938.855,00	15.956.333,70	324.324.631,50	177.787.900,00	5.850.000,00	823.918.865,20

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONEL ABUNDJANI
KABUPATEN MERANGIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

2.3 Kebijakan Akuntansi Pos-pos Laporan Keuangan -Lanjutan

2.3.5 Piutang Pelayanan - Lanjutan

- a. Piutang dengan umur 6-12 bulan sebesar 50 %.
- b. Piutang dengan umur diatas 1 tahun sebesar 100 %.

2.3.6 Belanja Dibayar di Muka

Belanja dibayar di muka adalah pembayaran di muka yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Biaya dibayar di muka berfungsi untuk membiayai operasional jangka panjang, misalnya premi asuransi dan sewa dibayar di muka.

Belanja dibayar dimuka diakui sebagai pos sementara pada saat pembayaran. Belanja dibayar di muka diakui sebagai biaya pada saat jasa diterima. Belanja dibayar di muka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu. Belanja dibayar dimuka disajikan secara netto.

2.3.7 Persediaan

Persediaan adalah barang yang dibeli dengan dimaksudkan untuk dijual atau yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*), yaitu harga pokok dari barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan pertama kali.

Nilai Persediaan pada akhir periode setiap barang persediaan adalah perkalian antara jumlah unit barang dari hasil stok opname dengan harga per unit barang, dimulai dari harga pembelian terakhir. Apabila jumlah unit barang persediaan akhir lebih besar daripada jumlah unit pembelian terakhir maka nilai barang kelebihanannya diperitungkan dengan harga beli sebelumnya.

2.3.8 Investasi Jangka Panjang

Jangka Panjang adalah penyertaan yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi Jangka Panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

2.3.9 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aktiva berwujud yang dimiliki oleh RSUD Kolonel Abundjani yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan/operasional dan pelayanan. Aset Tetap dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, donasi atau cara lain yang sah. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nialinya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun dalam tanggal laporan belum selesai seluruhnya.

g. Akumulasi Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO. selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan tahunan, yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.

Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan tahunan, yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONEL ABUNDJANI
KABUPATEN MERANGIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

2.3 Kebijakan Akuntansi Pos-pos Laporan Keuangan - Lanjutan

2.3.9 Aset Tetap - Lanjutan

Aset Tetap RSUD Kolonel Abundjani dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aktiva tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aktiva tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung sejak bulan aset yang bersangkutan digunakan, dengan cara garis lurus, berdasarkan taksiran masa manfaatnya dengan prosentase tahunan dari biaya perolehan tabel sebagai berikut:

h. Sewa

- a. Transaksi sewa dikelompokkan sebagai *capital lease* apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 1. Penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewa pada akhir masa sewa dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya sewa.
 2. Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa dapat menutup pengembalian biaya perolehan barang modal yang disewa beserta bunganya sebagai keuntungan perusahaan sewa.
 3. Masa sewa minimal dua tahun
- b. Transaksi sewa yang tidak memenuhi kriteria tersebut dikelompokkan sebagai transaksi sewa menyewa biasa.
- c. Menurut metode *Capital Lease*, aset yang disewaguna-usahkan disajikan dalam pos "aset tetap" sedangkan kewajibannya disajikan dalam pos "utang sewa"
- d. Aset sewa dan utang sewa diukur sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa ditambah nilai sisa. Aset sewa disusutkan berdasarkan metode dan takiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

2.3.10 Aset Tidak Berwujud

- a. Aset tidak berwujud rumah sakit terdiri dari aset tidak berwujud formula dan aset tidak berwujud yang dihasilkan secara intern.
- b. Formula diukur sebesar biaya perolehannya dan diamortisasi selama 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus.
- c. Aset tidak berwujud yang dihasilkan secara intern berupa kapitalisasi biaya pengembangan sistem informasi rumah sakit. Biaya pengembangan tersebut diukur sebesar biaya perolehannya yang mencakup:
 - 1) Pengeluaran bahan dan jasa yang dikomunikasi untuk menghasilkan sistem baru;
 - 2) Gaji, upah, dan biaya-biaya kepegawaian terkait lainnya dari pegawai yang langsung terlibat dalam menghasilkan sistem baru;
 - 3) Pengeluaran langsung terkait (seperti biaya pendaftaran hukum) dalam menghasilkan sistem baru;
 - 4) Overhead yang dibutuhkan untuk menghasilkan sistem baru yang telah dialokasikan secara rasional dan konsisten (seperti alokasi penyusutan, premi asuransi dan sewa).
- d. Biaya pengembangan sistem informasi rumah sakit diamortisasi selama 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus. (Maksimal 20 Tahun sesuai PSAK. No.19).

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Metode Amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Masa manfaat aset tak berwujud selain yang memiliki masa manfaat tak terbatas adalah selama 5 (lima) tahun.

2.3.11 Aset Lain-lain

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

2.3.12 Kewajiban

Adalah utang yang timbulkan dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi RSUD. Dalam konteks entitas rumah sakit, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah atau lembaga internasional. Kewajiban entitas rumah sakit juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONEL ABUNDJANI
KABUPATEN MERANGIN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

2.3 Kebijakan Akuntansi Pos-pos Laporan Keuangan - Lanjutan

2.3.12 Kewajiban - Lanjutan

a. Kewajiban Jangka Pendek

Merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi :

1. Utang Usaha
2. Utang Pihak Ketiga
3. Utang Pajak
4. Belanja yang masih harus dibayar
5. Uang Muka Pasien
6. Pendapatan yang Diterima Dimuka
7. Utang Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban jangka pendek dinilai sebesar nilai nominal kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek berkurang pada saat pembayaran/penyelesaian.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang diakui pada saat BLUD menerima hak dari pihak lain tetapi BLUD belum memenuhi kewajiban kepada pihak tersebut. Kewajiban jangka panjang dinilai sebesar nominal utang jangka panjang.

2.3.13 Ekuitas

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah keseluruhan aset dengan jumlah keseluruhan kewajiban

2.3.14 Koreksi Kesalahan

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran, kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :

- a. Kesalahan yang tidak berulang.
- b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :

- a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan.
- b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. (contohnya adalah penerimaan pajak).

Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONEL ABUNDJANI

KABUPATEN MERANGIN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah)

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN		
3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN		
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus (defisit) LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.		
3.1.1 Pendapatan - LRA	2024	2023
	42.189.754.865,60	46.781.476.669,59
a. Pendapatan Jasa Layanan	42.189.754.865,60	41.932.120.802,98
b. Pendapatan Lainnya	-	4.849.355.866,61
Jumlah Pendapatan - LRA	42.189.754.865,60	46.781.476.669,59
3.1.2 Belanja LRA	2024	2023
	42.445.839.871,00	52.252.695.187,61
Belanja Operasi		
a. Belanja Pegawai:		
- Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	5.009.700.000,00	4.602.550.000,00
- Belanja Tambahan Penghasilan Non PNS	1.945.300.000,00	1.877.450.000,00
- Belanja Biaya BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS	58.553.000,00	59.499.000,00
- Belanja untuk Karyawan Berprestasi	-	20.000.000,00
Jumlah Belanja Pegawai	7.013.553.000,00	6.559.499.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa:		
Belanja Persediaan:		
- Belanja Obat	3.714.994.339,00	4.895.718.841,00
- Belanja Bahan Habis Pakai Kesehatan	2.753.556.323,00	2.332.654.048,00
- Belanja Bahan dan Alat Laboratorium	2.219.927.670,00	1.815.066.362,00
- Belanja Bahan Makanan Pasien	1.087.260.652,00	190.622.770,00
- Belanja Bahan dan Alat Radiologi	104.895.000,00	989.622.529,00
- Belanja Bahan Bakar Minyak	456.477.162,00	480.512.261,00
- Belanja Alat Tulis Kantor	290.511.000,00	488.515.988,00
- Belanja Alat Listrik dan Elektronik	51.379.125,00	68.440.000,00
- Belanja Bahan Peralatan Kerja	197.713.000,00	65.889.000,00
- Belanja Benda Pos dan Pengiriman	7.123.000,00	7.689.300,00
- Belanja Pengadaan Fotocopy	206.342.200,00	322.200.550,00
Jumlah Belanja Persediaan	11.090.179.471,00	11.656.931.649,00
Belanja Jasa:		
- Belanja Jasa Pelayanan Medis	15.079.007.787,00	19.849.621.236,00
- Belanja Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.324.612.452,00	1.346.782.202,00
- Belanja Jasa Sampah/Beban Jasa Pemeriksaan air, udara, gas	1.279.633.600,00	1.338.770.980,00
- Belanja Honorarium Piket	890.133.000,00	325.185.000,00
- Belanja Jasa Pengembangan SIM IT	1.135.341.823,00	1.204.001.851,00
- Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	977.800.000,00	948.350.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman	618.050.500,00	708.644.000,00
- Belanja Jasa Pelayanan Paramedis/Non Medis	-	1.288.545.893,00
Belanja Jasa:		
- Belanja Cetak Rekam Medis	-	-
- Belanja Pakaian dan Perlengkapan Karyawan	13.275.000,00	87.504.712,00
- Belanja Jasa Konsultan	115.005.600,00	178.446.140,00
- Belanja Pelayanan Rujukan	121.263.750,00	181.790.000,00
- Belanja Bantuan Gizi dan Penyakit Khusus	84.000.000,00	84.000.000,00
- Belanja Linen	37.300.000,00	56.240.000,00
- Belanja Perlengkapan Ruang Pasien	63.760.000,00	48.778.750,00
- Belanja Jasa Sewa	18.000.000,00	56.800.000,00
- Belanja Jasa Lainnya	11.851.500,00	14.799.900,00
- Belanja Perlengkapan dan Pemulasaran Jenazah	4.715.000,00	1.500.000,00
- Beban Diklat, study banding/study tiru	321.786.814,00	257.520.000,00
Jumlah Belanja Jasa	22.095.536.826,00	27.977.280.664,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONEL ABUNDJANI

KABUPATEN MERANGIN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah)

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN- Lanjutan

3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN- Lanjutan

3.1.2 Belanja-Lanjutan

	2024	2023
Belanja Pemeliharaan:		
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	414.444.000,00	403.589.420,00
Belanja Pemeliharaan Jasa, Irigasi, dan Jaringan	143.946.099,00	138.507.070,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin:	-	-
Belanja Pemeliharaan Alat Transportasi	194.830.000,00	334.973.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	194.760.490,00	168.991.575,00
Belanja Pemeliharaan Teknologi Informasi	-	225.516.651,00
Belanja Pemeliharaan dan Kalibrasi	56.390.942,00	117.381.415,00
Belanja Alat Kedokteran	6.000.000,00	54.108.060,00
Jumlah Belanja Pemeliharaan	1.010.371.531,00	1.443.067.191,00
Belanja Perjalanan Dinas:		
Belanja Perjalanan Dinas BLUD	584.536.695,00	664.171.708,00
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas	584.536.695,00	664.171.708,00
Belanja Lain-lain:		
Belanja Diklat	-	922.664.048,00
Belanja Perizinan dan Legalisasi	21.208.000,00	248.721.700,00
Belanja Seminar dan Lokakarya	-	3.500.000,00
Belanja Pemasaran dan Publikasi	51.550.000,00	-
Belanja Visualisasi Data Rumah Sakit	40.323.000,00	-
Belanja Beban Administrasi Bank	-	929.999,61
Belanja Pembelian Peralatan Kantor/Rumah Tangga	135.117.500,00	343.352.500,00
Jumlah Belanja Lain-lain	248.198.500,00	1.519.168.247,61
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	35.028.823.023,00	43.260.619.459,61
Jumlah Belanja Operasi	42.042.376.023,00	49.820.118.459,61
c. Belanja Modal:	2024	2023
- Belanja Peralatan dan Mesin	379.511.048,00	1.467.670.955,00
- Belanja Gedung dan Bangunan	23.952.800,00	-
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	964.905.773,00
Jumlah Belanja Modal	403.463.848,00	2.432.576.728,00
Jumlah Belanja LRA	42.445.839.871,00	52.252.695.187,61

3.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu : saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. LPSAL dimaksudkan untuk memberikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya.

	2024	2023
	64.373.633,58	320.458.638,98
3.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal		
- Kas di Rekening Bendahara Penerimaan BLUD	320.458.638,98	5.791.677.157,00
- Penggunaan SAL	(320.458.638,98)	(5.791.677.157,00)
- Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan	64.373.633,58	320.458.638,98
Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir	64.373.633,58	320.458.638,98
Kas		
Kas Di Bendahara Penerimaan BLUD	8.309.267,00	204.880.801,00
Bank		
Kas di Bank Pembangunan Daerah Jambi-3005025426	56.064.366,58	115.577.837,98
Jumlah Kas dan Setara Kas	64.373.633,58	320.458.638,98

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONEL ABUNDJANI

KABUPATEN MERANGIN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah)

3.	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN- Lanjutan			
3.2	PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH - Lanjutan			
3..2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal - Lanjutan			
	Nilai Kas dan Setara Kas merupakan Nilai SAL Akhir. Nilai ini didasarkan pada asumsi bahwa Anggaran BLUD yang menggunakan basis kas sehingga Saldo Anggaran Lebih Akhir dapat tercermin pada nilai kas dan setara kas akhir tahun yang belum digunakan.			
3.3	PENJELASAN POS-POS NERACA			
	Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:			
3.3.1	Kas dan Setara Kas	2024	2023	
		64.373.633,58	320.458.638,98	
	a. Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	8.309.267,00	204.880.801,00	
	b. Kas di Bank Pembangunan Daerah Jambi-3005025426	56.064.366,58	115.577.837,98	
	Jumlah Kas dan Setara Kas	64.373.633,58	320.458.638,98	
3.3.2	Piutang	2024	2023	
		6.272.019.989,79	3.667.137.672,25	
	a. Piutang Pelayanan BPJS:			
	- Piutang Pelayanan BPJS Tahun 2024	6.102.500.270,00	-	
	- Piutang Pelayanan BPJS Oktober 2023	-	123.331.200,00	
	- Piutang Pelayanan BPJS November 2023	-	85.771.500,00	
	- Piutang Pelayanan BPJS Desember 2023	-	2.985.899.200,00	
	b. Piutang Pelayanan Farmasi	457.944.585,00	530.195.133,00	
	c. Piutang Ambulance	229.644.000,00	65.264.000,00	
	d. Piutang Parkir 2016 laporan piutang 2017	5.850.000,00	7.850.000,00	
	e. Piutang Pihak Ketiga	-	-	
	Jumlah Piutang Pelayanan:	6.795.938.855,00	3.798.311.033,00	
	f. Penyisihan Kerugian Piutang Pelayanan	(523.918.865,21)	(131.173.360,75)	
	Jumlah Piutang Pelayanan	6.272.019.989,79	3.667.137.672,25	
3.3.3	Persediaan	2024	2023	
		2.120.870.739,00	4.427.330.872,00	
	a. Persediaan Obat BLUD:			
	- Persediaan Obat -obatan di Gudang Farmasi	977.099.429,00	2.063.149.224,00	
	- Persediaan Obat -obatan di Apotik Rawat Jalan	204.463.720,00	198.237.442,00	
	- Persediaan Obat -obatan di Apotik Rawat Inap	98.280.710,00	184.872.248,00	
	b. Persediaan BHP BLUD:			
	- Persediaan BHP di Gudang Farmasi	810.857.748,00	1.493.362.545,00	
	- Persediaan BHP di Apotik Rawat Jalan	5.675.309,00	8.707.384,00	
	- Persediaan BHP di Apotik Rawat Inap	24.493.823,00	34.679.069,00	
	c. Persediaan Hibah			
	Hibah Obat	-	1.457.960,00	
	Hibah BHP	-	442.865.000,00	
	Jumlah Persediaan	2.120.870.739,00	4.427.330.872,00	
3.3.4	Aset Tetap	53.008.005.053,95	58.331.055.863,78	
	TAHUN 2024	Saldo Awal 2023	Mutasi Penambahan Pengurangan	Saldo Akhir 2024
	1. Harga Perolehan :			
	Tanah	423.095.938,00	-	423.095.938,00
	Peralatan dan Mesin	89.862.453.487,58	4.776.045.909,00	89.841.161.949,58
	Gedung dan Bangunan	45.632.056.225,00	1.464.343.590,00	47.072.447.015,00
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.468.993.925,00	-	4.468.993.925,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	130.620.000,00	130.620.000,00	-
	Jumlah Harga Perolehan	140.517.219.575,58	6.240.389.499,00	141.805.698.827,58
	TAHUN 2023	Saldo Awal 2023	Mutasi Penambahan Pengurangan	Saldo Akhir 2024
	2. Akumulasi Penyusutan:			
	Peralatan dan Mesin	71.978.873.502,75	5.543.687.938,85	77.522.561.441,60
	Gedung dan Bangunan	8.765.500.007,34	900.501.075,44	9.666.001.082,78
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.441.790.201,71	167.341.047,54	1.609.131.249,25
	Jumlah Akumulasi Penyusutan	82.186.163.711,80	6.611.530.061,83	88.797.693.773,63
	NILAI BUKU	58.331.055.863,78		53.008.005.053,95

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONEL ABUNDJANI

KABUPATEN MERANGIN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah)

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN- Lanjutan		
3.3 PENJELASAN POS-POS NERACA - Lanjutan		
	2024	2023
3.3.5 Aset Lainnya		
a. Aset Lainnya	43.877.300,00	381.321.500,00
b. Aset Tidak Berwujud	-	-
Jumlah Aset Lainnya	43.877.300,00	381.321.500,00
3.3.6 Utang Usaha	17.491.346.734,00	7.850.949.396,00
a. Utang Obat dan BHP:		
- Utang BHP	4.883.848.832,00	3.328.753.257,00
- Utang Obat Farmasi	4.625.549.454,00	2.473.853.928,00
b. Utang Jasa Layanan:		
- Utang Jasa Pelayanan BPJS	5.047.823.445,00	1.405.787.636,00
- Utang Jamkesmas	-	-
- Utang Jasa KIR	48.125.000,00	121.384.120,00
- Utang Jasa Layanan Covid-19	-	47.780.920,00
- Utang Jampersal	-	13.437.204,00
- Utang Jasa Pelayanan PT	118.930.291,00	-
- Utang Farmasi	130.243.770,00	185.800.687,00
- Utang Rujukan Parsial	39.550.000,00	29.945.000,00
- Utang Jasa Layanan Umum	785.878.740,00	244.206.644,00
- Utang Piket	181.064.000,00	-
- Utang Makan Minum Pasien	355.371.800,00	-
- Utang Alat Tulis Kantor	68.759.000,00	-
- Utang Cetak Pengadaan dan foto Copy	26.520.000,00	-
c. Utang Beban Pemeliharaan		
- Klibrasi Alat Kesehatan	57.720.722,00	-
- Pemeliharaan alat Kedokteran dan Kesehatan	6.105.000,00	-
- Akomodasi dan Transportasi Petugas kalibrasi	30.000.000,00	-
d. Utang Belanja Modal		
- Infant Incubator	128.844.000,00	-
- Infant Radiant Warmer	136.966.000,00	-
- Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran	58.196.680,00	-
e. Utang Beban Pegawai		
Gaji dan Tunjangan Pegawai	761.850.000,00	-
Jumlah Utang Usaha	17.491.346.734,00	7.850.949.396,00
3.3.7 Ekuitas	44.017.799.982,32	59.276.355.151,01
- Ekuitas Awal	59.276.355.151,01	75.802.921.843,20
- Surplus (Defisit) LO Tahun Berjalan	(20.407.905.900,44)	(17.634.760.753,51)
- Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	5.020.901.971,00	-
- Koreksi Beban Penyisihan Piutang	5.850.000,00	-
- Koreksi Ekuitas Lainnya	122.598.760,75	1.108.194.061,32
Jumlah Ekuitas	44.017.799.982,32	59.276.355.151,01

Laporan Operasional RSUD menyajikan informasi mengenai ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh RSUD dalam satu periode pelaporan. Penjelasan lebih lanjut mengenai Pos-pos Laporan Operasional RSUD adalah sebagai berikut :

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONEL ABUNDJANI

KABUPATEN MERANGIN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah)

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

	2024	2023
3.4.1 Pendapatan Operasional	45.187.382.687,60	46.166.904.795,98
a. Pendapatan Jasa Layanan:		
- Pendapatan Jasa Layanan BLUD	-	6.216.269.184,00
b. Pendapatan Jasa Layanan Khusus:		
- Pendapatan Jasa Layanan BPJS	42.189.754.865,60	31.027.006.562,00
- Pendapatan Hasil Kerjasama	-	291.722.505,00
- Pendapatan Klaim Covid	-	-
- Pendapatan Jasa Jamkesa & Jampersal	-	-
c. Pendapatan Lainnya	2.997.627.822,00	8.187.583.584,98
d. Pendapatan Hibah	-	444.322.960,00
Jumlah Pendapatan Operasional	45.187.382.687,60	46.166.904.795,98

Pendapatan Lainnya merupakan pendapatan dari (Pendapatan Farmasi, Pendapatan Bunga, Pendapatan Sewa Ambulance

Pendapatan KIR, Pendapatan Mahasiswa Praktek, Pendapatan Sewa, Pendapatan Parkir).

Pendapatan Hibah merupakan pendapatan dari Persediaan Barang berupa Obat dan BHP Medis.

	2023	2022
3.4.2 Beban Operasional	65.595.288.588,04	63.801.665.549,49
a. Beban Pegawai		
- Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	5.433.800.000,00	4.602.550.000,00
- Beban Tambahan Penghasilan Non PNS	2.283.050.000,00	1.877.450.000,00
- Beban BPJS Kesehatan Non PNS	58.553.000,00	59.499.000,00
- Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	326.450.000,00	-
Jumlah Belanja Pegawai	8.101.853.000,00	6.539.499.000,00
b. Beban Persediaan		
- Beban Obat	9.508.416.808,00	3.811.254.849,00
- Beban Bahan Habis Pakai Kesehatan	8.775.992.273,00	1.634.931.282,00
- Beban Bahan dan Alat Laboratorium	2.219.927.670,00	1.815.066.362,00
- Beban Bahan Makanan Pasien	1.087.260.652,00	989.622.529,00
- Beban Bahan Bakar Minyak	-	480.512.261,00
- Beban Alat Tulis Kantor	290.511.000,00	488.515.988,00
- Beban Bahan dan Alat Radiologi	104.895.000,00	190.622.770,00
- Beban Bahan dan Alat Rumah Tangga	135.117.500,00	344.352.500,00
- Beban Alat Listrik dan Elektronik	-	68.440.000,00
- Beban Bahan Peralatan Kerja	-	65.520.000,00
- Beban Benda Pos dan Pengiriman	7.123.000,00	7.689.300,00
- Beban Penggandaan (Foto Copy)	206.342.200,00	322.200.550,00
- Beban Bahan Peralatan dan Pustaka	-	369.000,00
Jumlah Beban Persediaan	22.335.586.103,00	10.219.097.391,00
c. Beban Jasa		
- Beban Jasa Pelayanan Medis	15.137.772.320,00	23.263.752.809,00
- Beban Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.305.841.490,00	1.346.782.202,00
- Beban Jasa Sampah/Beban Jasa Pemeriksaan air, udara, gas	139.597.000,00	1.337.770.980,00
- Beban Honorarium Picket	890.133.000,00	325.185.000,00
- Beban Jasa Pengembangan SIM IT	1.135.341.823,00	1.204.001.851,00
- Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-LO	704.940.079,00	948.350.000,00
- Beban Makanan dan Minuman	618.050.500,00	708.644.000,00
- Beban Jasa Pelayanan Paramedis/Non Medis	13.275.000,00	1.288.545.893,00
- Beban Cetak Rekam Medis	-	-
- Beban Pakaian dan Perlengkapan Karyawan	-	87.504.712,00
- Beban Jasa Konsultan	115.005.600,00	178.446.140,00
- Beban Pelayanan Rujukan	121.263.750,00	181.790.000,00
- Beban Bantuan Gizi dan Penyakit Khusus	84.000.000,00	84.000.000,00
- Beban Linen	37.300.000,00	56.240.000,00
- Beban Perlengkapan Ruang Pasien	63.760.000,00	48.778.750,00
- Beban Jasa Sewa	18.000.000,00	56.800.000,00
- Beban Jasa Lainnya	12.571.500,00	15.729.899,61
- Beban Perlengkapan dan Pemulasaran Jenazah	4.715.000,00	1.500.000,00
- Beban Diklat, Seminar dan Lokakarya	321.786.814,00	905.727.878,00
- Beban Dokumentasi, Perizinan dan Publikasi	113.081.000,00	506.241.700,00
- Beban Bahan Bakar Minyak dan Gas	456.477.162,00	-
- Beban Alat Listrik dan Elektronik	51.379.125,00	-
- Beban Bahan Pembersih dan Peralatan kerja	197.713.000,00	-
Jumlah Belanja Jasa	21.542.004.163,00	32.545.791.814,61

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONEL ABUNDJANI

KABUPATEN MERANGIN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah)

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

3.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL - Lanjutan

3.4.2 Beban Operasional - Lanjutan

	2024	2023
d. Beban Pemeliharaan		
- Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	414.444.000,00	289.983.795,00
- Beban Pemeliharaan Jasa, Irigasi, dan Jaringan	134.556.099,00	138.507.070,00
- Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin:	-	-
- Beban Pemeliharaan Alat Transportasi	204.220.000,00	334.973.000,00
- Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	126.035.000,00	151.977.200,00
- Beban Pemeliharaan Teknologi Informasi	68.725.490,00	225.516.651,00
- Beban Pemeliharaan dan Kalibrasi	57.720.722,00	117.381.415,00
- Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-
- Beban Alat Kedokteran	12.105.000,00	54.108.060,00
Jumlah Beban Pemeliharaan	<u>1.017.806.311,00</u>	<u>1.312.447.191,00</u>
e. Beban Perjalanan Dinas:		
- Beban Perjalanan Dinas BLUD	689.615.389,00	704.607.878,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	<u>689.615.389,00</u>	<u>704.607.878,00</u>
f. Beban Penyisihan Piutang:		
Beban Penyisihan Piutang	523.918.865,21	123.323.360,75
Jumlah Beban Penyisihan Piutang	<u>523.918.865,21</u>	<u>123.323.360,75</u>
g. Beban Penyusutan dan Amortisasi:		
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	899.194.875,44	889.009.735,77
- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	10.317.968.833,85	11.278.322.311,82
- Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	167.341.047,54	167.341.047,54
- Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	<u>11.384.504.756,83</u>	<u>12.334.673.095,13</u>
h. Beban Lain-Lain:		
Beban Lain-Lain	-	22.225.819,00
Jumlah Beban Lain-Lain	<u>-</u>	<u>22.225.819,00</u>
Jumlah Beban Operasional	<u>65.595.288.588,04</u>	<u>63.801.665.549,49</u>

Beban Lain-Lain merupakan Belanja Modal yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi

3.4.3 TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

Direktur RSUD Kolonel Abundjani Bangko bertanggung jawab atas penyajian dan penyusunan laporan keuangan RSUD sebagaimana diuraikan dimuka yang telah diselesaikan pada tanggal 19 Mei 2025.



BPKAD Kabupaten Merangin Jl. Jend.Sudirman Km. 02, Kelurahan Pematang, Kandis Kecamatan Bangko, Jambi